2023 Laporan Tahunan
Annual Report

PRESISI

MEMBANGUN PERUSAHAAN MELALUI BISNIS BARU YANG BERKELANJUTAN

BUILDING A COMPANY THROUGH SUSTAINABLE NEW BUSINESS

PT PP Presisi Tbk

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN SERTA SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Information Presented in the Annual Report and Disclaimer

Penyusunan Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk, disebut juga "Perusahaan" atau "PP Presisi" atau "PPRE" tahun 2023 menggunakan referensi dan standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana PP Presisi berdomisili dan mengembangkan kegiatan operasi dan bisnisnya. Parameter dan kriteria standar mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyampaian laporan tahunan PP Presisi juga mengelaborasi beberapa dokumen Perusahaan, baik itu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Laporan Keuangan teraudit, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang di dalamnya mencakup Tingkat Kesehatan Perusahaan. Penggunaan dokumen ini diharapkan memberikan landasan argumentasi yang kuat bagi PP Presisi dalam menghadirkan informasi dan data yang valid.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PP Presisi tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan" atau "PP Presisi" atau "PPRE" yang mengacu pada PT PP Presisi Tbk. Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan PT PP Presisi Tbk.

Untuk dapat meraih pembaca yang lebih beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Perusahaan yaitu www.pp-presisi.co.id.

The 2023 Annual Report of PT PP Presisi Tbk, also known as "the Company" or "PP Presisi" or "PPRE", is prepared per references and standards applicable in Indonesia, in which PP Presisi is domiciled and developed its operational and business activities. The standard parameters and criteria refer to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies and OJK Circular No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

PP Presisi's annual report also elaborates on several corporate documents, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Long Term Plan (RJPP), Audited Financial Statements, and Performance Evaluation Reports, which include the Company's Soundness Level. The use of these documents is expected to provide a solid argumentative basis for PP Presisi in presenting valid information and data.

This Annual Report contains various statements related to the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in implementing applicable laws and regulations. These statements have prospects of risk and uncertainty, as well as the possibility of differences from actual developments. Various prospective statements in this Annual Report have been prepared based on assumptions regarding the latest conditions and projections of future situations related to the Company's business environment. PT PP (Persero) Tbk cannot guarantee that these documents, whose validity has been confirmed, will bring definite results.

This Annual Report contains the words "Company", "PP Presisi", or "PPRE", which refer to PT PP Presisi Tbk. In addition, the word "We" is also used several times with the same function to consider the ease of mentioning PT PP Presisi Tbk.

To reach a more diverse audience and refer to applicable regulations, this report is presented in two languages, i.e., Bahasa Indonesia and English. This Annual Report can be viewed and downloaded on the Company's official website, www.pp-presisi.co.id.

TEMA SAMPUL

Cover Theme

MEMBANGUN PERUSAHAAN MELALUI BISNIS BARU YANG BERKELANJUTAN

BUILDING A COMPANY THROUGH SUSTAINABLE NEW BUSINESS

Mengembangkan bisnis tentu tak lepas dari kemampuan untuk mengambil kesempatan yang ada. Memanfaatkan setiap peluang dan potensi menjadi salah satu hal mendasar untuk dapat mewujudkan keberlanjutan, khususnya pada aspek pengembangan bisnis sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas Perusahaan.

Berlandaskan filosofi tersebut, PP Presisi mengambil kesempatan untuk mengembangkan bisnis pada lini Jasa Pertambangan. Inisiatif ini telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, dan akan menjadi bagian penting dari proses PP Presisi untuk dapat tumbuh berkembang. Terutama dengan modal yang telah dimiliki, penguatan bisnis pada lini Jasa Pertambangan yang memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bisnis yang selama ini dijalani. Di sisi lain, divestasi pada beberapa aset dengan pemeliharaan yang tinggi menjadi nilai tambah bagi perampingan bisnis yang akan berfokus pada margin yang baik.

Developing a business is inseparable from the ability to take advantage of existing opportunities. Utilizing every opportunity and potential is one of the fundamental things in realizing sustainability, particularly in the aspect of business development following the Company's business capacity and capabilities.

Based on this philosophy, PP Presisi took the opportunity to develop business in the Mining Services line. The initiative has been carried out in the last few years and will be essential to PP Presisi's growth process. Especially with the owned capital, strengthening the business in the Mining Services line, which has characteristics that are not very different from the business that has been running so far. On the other hand, divesting several high-maintenance assets is an added value for streamlining a business that will focus on good margins.

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity

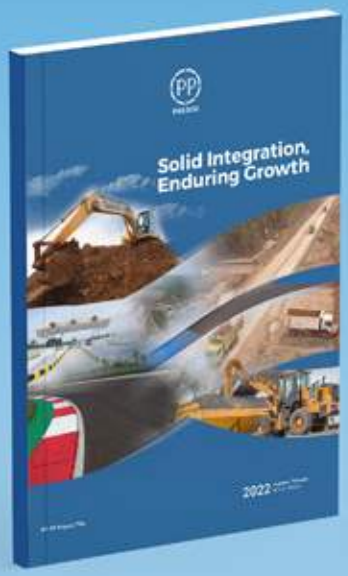

2022

SOLID INTEGRATION, ENDURING GROWTH

Integrasi yang solid, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi kunci dan faktor penting untuk mendorong penjualan dan memperluas pangsa pasar. Berbekal aspek fundamental yang telah dibangun dengan kokoh serta fokus Perseroan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, PPRE optimis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan secara strategis dapat menciptakan nilai tambah bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan secara berkelanjutan.

Solid integration to achieve enduring growth is a key and important factor in driving sales and expanding market share. Equipped with fundamental aspects that have been solidly built and its focus on sustainable growth, PPRE is optimistic that policies that have been strategically formulated can create added value for Shareholders and Stakeholders sustainably.

PPRE terus berupaya untuk memperkuat performa terbaiknya dengan tetap memastikan mutu dan kualitas produk dan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan budaya kerja, serta peningkatan efektivitas proses kerja melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan strategis jangka panjang Perseroan. Seluruh upaya ini tentu tak lepas dari komitmen PPRE untuk senantiasa menciptakan nilai tambah bagi para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa-masa mendatang.

PPRE strives to strengthen its best performance while ensuring the quality of products and services, improving the quality of human capital, developing work culture, and increasing the effectiveness of work processes through optimizing the use of information systems and technology to achieve the Company's long-term strategic goals. These efforts cannot be separated from PPRE's commitment to creating added value for Shareholders and other stakeholders and contributing to Indonesia's economic growth in the future.

2021

CREATING FUTURE PATH THROUGH BUSINESS TURNAROUND

Tantangan tahun 2021 tidak menyurutkan langkah PT PP Presisi Tbk untuk terus bertumbuh dan berkembang. Perseroan terus berupaya memanfaatkan setiap potensi yang ada di tengah berbagai tantangan, kemudian bertindak dengan cepat untuk mengelolanya menjadi sumber pertumbuhan yang baru dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalisasi keunggulan, yakni kepemilikan alat berat dalam jumlah besar serta sumber daya manusia yang kompeten, Perseroan memasuki lini bisnis baru jasa kontraktor pertambangan nikel. Lini bisnis ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan Perseroan di tahun 2021, bahkan melebihi target.

The challenges in 2021 did not weaken PT PP Presisi Tbk's steps to continue growing and developing. The Company continues to strive to take advantage of every existing potential amidst various challenges then act quickly to mold it into a new and sustainable source of growth. By optimizing our advantages, i.e., the ownership of heavy equipment in large quantities and competent Human Capital, the Company has entered a new business line, i.e., nickel mining contractor services. The business line spectacularly contributed significantly to the Company's operational and financial performance growth in 2021, even exceeding the target.

Kinerja yang sangat baik ini diyakini masih terus dicapai pada tahun-tahun ke depannya, sejalan dengan program pemerintah untuk melakukan hilirisasi dan pembangunan smelter tambang mineral. Selain itu, kinerja Perseroan untuk pekerjaan konstruksi sipil pun terus bertumbuh sebagai hasil dari pengendalian mutu yang terus terjaga serta peningkatan sinergi dengan entitas usaha di dalam Grup PP maupun non-grup. Perseroan berhasil meningkatkan posisi dari subkontraktor menjadi kontraktor utama pada beberapa pekerjaan konstruksi milik perusahaan swasta. Seluruh pencapaian ini mendorong Perseroan untuk terus mengoptimalkan lini bisnis *civil work, production plant*, dan *mining services* untuk menyerap potensi pertumbuhan pasar ke depannya.

It is believed that the excellent performance will continue to prosper in the years to come, in line with the government's program to perform downstreaming and building mineral mining smelters. In addition, the Company's performance in civil construction works continues to grow due to maintained quality control and increased synergy with business entities within PP Group and non-groups. The Company has improved its position from sub-contractor to main contractor in several construction works owned by private companies. These achievements have encouraged the Company to continue optimizing the civil work, production plant, and mining services business lines to absorb the market growth potential in the future.

2020

EMERGING WITH RESILIENCE

Sebagai akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dan ketidakpastian bagi seluruh sektor usaha, termasuk sektor konstruksi. Namun, di tengah iklim usaha yang sangat tidak kondusif tersebut, PP Presisi tetap memperkuat layanan usaha dengan melakukan klasterisasi lini bisnis lama menjadi 5 lini bisnis baru, meliputi *civil work, mining services, structure work, production plant*, dan *heavy equipment rental*, sebagai upaya untuk terus tumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berkat klasterisasi lini bisnis tersebut, Perseroan berhasil meraih kepercayaan pelanggan di pasar eksternal dan sukses mendapatkan berbagai proyek penting nasional.

As a result of the COVID-19 pandemic that has hit the world, 2020 was a year full of challenges and uncertainties in all business sectors, including the construction sector. However, during a very unconducive business climate, PP Presisi continues to strengthen its business services by clustering old business lines into five new business lines, consisting of civil work, mining services, structure work, production plant, and heavy equipment rental, to continue growing and reach a broader market. Thanks to the clustering of its business line, the Company has successfully gained customer trust in the external market and acquired several important national projects.

DAFTAR ISI

Table of Content

2	Informasi yang Disajikan dalam Laporan Tahunan serta Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Information Presented in the Annual Report and Disclaimer
3	Tema Sampul Cover Theme
4	Kesinambungan Tema Theme Continuity
6	Daftar Isi Table of Content
8	Mengembangkan Bisnis yang Berfokus pada Kompetensi Inti Developing a Business that Focuses on Core Competencies
10	Keunggulan Armada Alat Berat Advantages of Heavy Equipment Fleet
22	Kinerja 2023 2023 Performance

IKTHISAR KINERJA 2023
Performance Highlights 2023

26	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights
33	Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Organisasi Business and Organizational Performance Highlights
35	Ikhtisar Saham Shares Highlights
37	Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds Highlights
37	Informasi tentang Sumber Pendanaan Lainnya Information on Other Funding Sources
38	Kilas Peristiwa 2023 2023 Event Highlights
42	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

48	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
62	Laporan Direksi Board of Directors Report
74	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 PT PP Presisi Tbk Statement of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Responsibility for the 2023 Annual Report of PT PP Presisi Tbk

PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

78	Identitas Perusahaan Corporate Identity
79	Riwayat Singkat Perusahaan Brief Corporate History
82	Jejak Langkah Milestones
88	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture
90	Makna Logo Perusahaan Meaning of Company Logo
91	Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan Jasa Business Activities, Products and Services
104	Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi Business Network and Operational Area
106	Keanggotaan dalam Asosiasi Membership in Associations
108	Struktur Organisasi Organizational Structure
110	Susunan dan Profil Dewan Komisaris Structure and Profile of the Board of Commissioners
116	Susunan dan Profil Direksi Structure and Profile of the Board of Directors
121	Pejabat Eksekutif Executive Officials
126	Demografi Sumber Daya Manusia Human Capital Demographics
131	Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham Chronology of Share Issuance and Listing
132	Informasi Pemegang Saham Shareholder Information
140	Struktur Grup dan Kelompok Usaha PTPP PTPP Group and Business Group Structure
142	Struktur Grup dan Kelompok Usaha Group Structure and Business Group
143	Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Ventura Bersama List of Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures
144	Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Issuance and Listing
145	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Institutions and Professional Supporting the Capital Market
147	Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on Corporate Website

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion and Analysis

152	Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industrial Review
154	Inisiatif dan Kebijakan Strategis Tahun 2023 Initiatives and Strategic Policies in 2023
156	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operations Review per Business Segment
166	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
167	Informasi tentang Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain Information on National Strategic Projects or Other Assignments
167	Penelitian dan Pengembangan Research and Development
168	Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya Financial Review and Other Material Information
198	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure
200	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment
200	Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment
201	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Information and Material Facts Subsequent to the Date of Accountant Report

201 Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan atau Pendapatan Bersih Perusahaan serta Laba Operasi Perusahaan, dan Informasi Peningkatan atau Penurunan yang Material Dari Penjualan atau Pendapatan Bersih
Impact of Price Changes on Sales or Net Revenue and Profit of the Company, and the Information on Material Increase or Decrease from Sales or Net Revenue

202 Informasi tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing
Information on the Impact of Exchange Rates against Foreign Currency

202 Pencapaian Target Tahun 2023
Target Achievement in 2023

204 Prospek Usaha Tahun Mendatang serta Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2024
Business Outlook for the Upcoming Year and the Company's Strategic Plan and Performance Projection for 2024

207 Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Payout

208 Perpajakan dan PNBP: Kontribusi terhadap Negara
Taxes and PNBP: Contribution to the State

209 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Use of Proceeds from Public Offering

210 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

211 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

217 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Occurrence

218 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan
Changes in Laws and Regulations and Their Impact on Company Performance

219 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policy and Their Impact on the Company

220 Tingkat Kesehatan Perusahaan
Corporate Soundness Level

220 Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity

221 Peta Jalan Usaha dan Rencana Jangka Panjang
Business Roadmap and Long-Term Plans

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

226 Komitmen dan Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Commitment and Development of Good Corporate Governance Implementation

253 Organ Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Organs

501 Pengendalian Internal
Internal Control

508 Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

516 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

522 Perkara Penting
Litigation

523 Kode Etik
Code of Conduct

528 Kebijakan Benturan Kepentingan
Policies on Conflict of Interest

528 Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*
Policies on Insider Trading Prevention

529 Kebijakan Anti Korupsi
Policies on Anti-Corruption

533 Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
Policies on Gratuity Control

536 Kebijakan tentang Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Suap/Donasi dan Lainnya
Policies on Giving and Receiving Gifts/Bribery/Donation and Others

538 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NEGARA (LHKPN)
State Official Wealth Report (LHKPN)

540 Kebijakan Pemberian Dana untuk Aktivitas Politik
Policies on Political Activity Funding

541 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

545 Kebijakan Terhadap Kreditur
Policies on Creditors

546 Kebijakan Terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Policies on Goods and/or Services Procurement

549 Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)
Conformity of the Corporate Governance to the Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

571 Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
Implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance

RUJUKAN KEBERLANJUTAN
Sustainability Reference

630 Rujukan Keberlanjutan
Sustainability Reference

LAPORAN KEUANGAN
Financial Report

748 REFERENSI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company

MENGEMBANGKAN BISNIS YANG BERFOKUS PADA KOMPETENSI INTI

Developing a Business that Focuses on Core Competencies

PP PRESISI

KONSTRUKSI
Construction

- MINING SERVICES
- CIVIL WORK

BISNIS SUPPORTING
Supporting Business

- PRODUCTION PLANT
- HEAVY EQUIPMENT RENTAL

Berdiri sejak tahun 2004, PP Presisi kini telah menjadi bagian penting dari perkembangan bisnis kelompok usaha PTPP dan telah mengembangkan lini bisnisnya baik di sektor konstruksi maupun non konstruksi.

Established in 2004, PP Presisi has become an important part of the business development of PTPP business group and has developed its business lines in the construction and non-construction sectors.

Diversifikasi pada bidang jasa pertambangan secara komprehensif, mulai dari *mining development, (hauling road, hauling road upgrading, hauling road maintance, stockpile)* sampai dengan *mining operation (ore geting, ore barging, ore hauling),* didukung oleh kapasitas alat berat yang dimiliki serta kapabilitas PP Presisi dibidang jasa konstruksi secara komprehensif, PP Presisi secara berkesinambungan mengoptimalkan aset dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan.

Comprehensive diversification in the mining services sector, from mining development (hauling road, hauling road upgrading, hauling road maintenance, and stockpile) to mining operations (ore getting, ore barging, and ore hauling), supported by the capacity of the heavy equipment owned and PP Presisi's comprehensive capabilities in construction services, PP Presisi continuously optimizes its assets and equipment to provide the best service to each customer.

Pekerjaan proyek infrastruktur, di antaranya pekerjaan proyek jalan, bendungan, bandara, sirkuit, dermaga dan bangunan konstruksi/fondasi seperti penggalian tanah dan penguatan struktur tanah untuk menjamin fondasi. Pada masing-masing proyek *civil work*, Perseroan melakukan pekerjaan pembukaan lahan, *cut and fill*, pengerasan lapisan jalan, beton, sampai dengan *rigid/flexible pavement* secara komprehensif. Lini bisnis *civil work* termasuk didalamnya lini bisnis *structure work* yang merupakan lini bisnis *supporting* Perusahaan.

Infrastructure project work, including work on roads, dams, airports, circuits, and docks as well as building construction/foundations such as excavating soil and strengthening soil structures to ensure foundations. In every civil work project, the Company carries out comprehensive land clearing, cut and fill, road paving, concrete, and rigid/flexible pavement work. The civil work business line includes the structure work business line, which is the supporting business line.

Terdiri dari *ready mix batching plant*, *asphalt mix plant*, dan *stone crusher*. *Batching plant* baik pada *ready mix* (*cement*) maupun *asphalt* dan *crusher* berperan dalam mengolah material campuran atau batuan dasar menggunakan formulasi khusus, sehingga menghasilkan beton cor siap pakai maupun material aspal dan batu split yang siap disajikan pada area proyek yang membutuhkan.

Consists of a ready-mix batching plant, asphalt mix plant, and stone crusher. Batching plants in both ready-mix (cement) as well as asphalt and crusher play a role in processing mixed materials or bedrock using special formulations, resulting in ready-to-use cast concrete as well as asphalt and split stone materials that are ready to be used in the desired project area.

Penyewaan alat berat merupakan lini bisnis PP Presisi sebelum melakukan transformasi bisnis. Sampai saat ini, PP Presisi tetap mempertahankan bisnis tersebut. Perseroan memberikan jasa yang lengkap dengan memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan, prima dan perawatan berjangka.

Heavy equipment rental was PP Presisi's business before a business transformation. Until now, PP Presisi has retained this business. The Company provides comprehensive services by ensuring the availability of reliable, prime equipment and conducting periodic maintenance.

KEUNGGULAN ARMADA ALAT BERAT

Advantages of Heavy Equipment Fleet

Kekuatan dan keunggulan armada alat berat menjadi bagian penting dari perkembangan rantai nilai PP Presisi. Melalui keunggulan ini, PP Presisi dengan percaya diri memasuki lapangan bisnis baru seperti Jasa Pertambangan.

The strength and superiority of the heavy equipment fleet is an important part of developing the PP Presisi value chain. Through this advantage, PP Presisi confidently enters new business fields, such as Mining Services.

1.610
Klaster *Truck* | Truk Clusters

847
Klaster *Earthwork* | Earthwork Clusters

236
Klaster *Support Unit** | Support Unit Clusters

113
Klaster *Concrete Set* | Concrete Set Clusters

89
Klaster TC & PH | TC & PH Clusters

76
Klaster *Fix Plant* | Fix Plant Clusters

49
Klaster *Asphalt Set* | Asphalt Set Clusters

27
Klaster *Crane* | Crane Clusters

16
Klaster *Special Unit*** | Special Unit Clusters

11
Klaster *Foundation* | Foundation Clusters

3.074
Total Armada Alat Berat | Total Heavy Equipment Fleet

PROYEK TOL CIJAGO SEKSI 3A DAN 3B

CIJAGO SECTION 3A & 3B TOLL PROJECT

Di akhir tahun 2023, Tol Cijago seksi 3A dan 3B resmi beroperasi yang merupakan salah satu proyek terbesar kami dan menjadi bukti nyata kemampuan PP Presisi dalam mengerjakan proyek infrastruktur secara komprehensif dan turut mendukung kemajuan Indonesia. Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, PP Presisi menjadi kontraktor utama yang berhasil membangun tol ini sesuai dengan jangka waktu dan kualitas yang ditargetkan.

At the end of 2023, Cijago Toll Road sections 3A and 3B officially operated. They are one of our most significant projects and became tangible proof of PP Presisi's ability to work on comprehensive infrastructure projects and contribute to Indonesia's progress. In this National Strategic Project (PSN), PP Presisi became the main contractor who successfully built this toll road following the targeted timeframe and quality.

PROYEK DERMAGA IKN

IKN PIER PROJECT

Dengan Pembangunan proyek Dermaga IKN, PP Presisi berkontribusi dalam peningkatan pengiriman logistik ke area proyek IKN, sehingga dapat mempercepat penyelesaian proyek yang berada di IKN dengan terdapat area *stockyard* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang dan material konstruksi bangunan dengan luas lahan mencapai 10.000m^2.

With the construction of the IKN pier project, PP Presisi contributes to improving logistics delivery to the IKN project area to accelerate the project completion with an up to 10,000m^2 stockyard area that functions as a storage for goods and building construction materials.

PROYEK INKIS

INKIS PROJECT

PP Presisi dipercaya dalam Pembangunan Jalan Tol Indrapura Kisaran dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki, dengan lebih dari 180 unit alat berat yang digunakan pada proyek tersebut mampu menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan kualitas yang baik, yang dapat memberikan keunggulan dengan meningkatkan konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei serta peningkatan ekonomi masyarakat dengan menurunkan biaya logistik dan memangkas waktu tempuh.

PP Presisi is trusted in the construction of the Indrapura Kisaran Toll Road with its capabilities and capacities, with more than 180 units of heavy equipment used to complete the project following the specified time with good quality, which can provide advantages by increasing connectivity and improving the economy of the community by reducing logistics costs and cutting travel time.

PROYEK WEDA BAY NICKEL

WEDA BAY NICKEL PROJECT

Dengan kemampuan dan kapabilitas alat berat yang dimiliki, PP Presisi mampu meningkatkan *positioning* menjadi kontraktor utama pada jasa pertambangan secara komprehensif mulai dari *mining development infrastructure* sampai dengan *mining operation* sebagai sumber *recuring income* dengan jangka waktu kontrak yang lebih panjang.

With the capabilities of its heavy equipment, PP Presisi can increase its positioning to become the main contractor for comprehensive mining services, starting from mining infrastructure development to mining operations as a source of recurring income with a longer contract term.

PROYEK IGP MINES OF BAHODOPI VALE

IGP MINES OF BAHODOPI VALE PROJECT

Dengan pengalaman dan kapabilitas PP Presisi sebagai kontraktor proyek jasa pertambangan, PP Presisi dipercaya dalam Pembangunan jalan akses tambang Proyek Indonesian Growth Project (IGP) Mines of Bahodopi Vale Indonesia secara komprehensif dari mulai pembangunan akses jalan pertambangan, pembangunan *sediment pond*, dan pemenuhan material batu dengan peolahan sendiri melalui pekerjaan *Quarry Development* sehingga meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian pekerjaan.

With its experience and capabilities as a mining service project contractor, PP Presisi is trusted in the construction of mine access roads for the comprehensive work in the Indonesian Growth Project's (IGP) Mines of Bahodopi by Vale Indonesia from the construction of mining access roads, construction of sediment ponds, and fulfillment of stone materials with its own processing through Quarry Development work to increase effectiveness in work completion.

KINERJA 2023

2023 Performance

Perjalanan yang berkelanjutan menjadi aspek penting bagi PP Presisi dalam mewujudkan bisnis yang tumbuh dan berkembang.

Sustainable journey is an important aspect for PP Presisi in realizing a growing and developing business.

Rp **6,75** triliun trillion

Perolehan Nilai Kontrak Baru

Acquisition of New Contract Value

Meningkat 28,72% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,24 triliun. Kenaikan perolehan nilai kontrak baru ini terutama didapatkan dari jasa kontraktor tambang.

A 28.72% increase from the previous year of Rp5.24 trillion. The increase in the value of new contracts was mainly obtained from mining contractor services.

Rp **4,45** triliun trillion

Perolehan Kontrak Baru dari Lini Bisnis Jasa Kontraktor Pertambangan

New Contract Acquisition from the Mining Contractor Services Business Line

Tumbuh 48,80% atau setara Rp1,46 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,99 triliun. Pertumbuhan ini turut mendorong kontribusinya terhadap jumlah perolehan nilai kontrak baru PP Presisi, di mana pada tahun 2022 lini bisnis Jasa Kontraktor Pertambangan berkontribusi sebesar 57,05%, meningkat menjadi 65,95% di tahun 2023.

A 48.80% growth or the equivalent of Rp1.46 trillion from the previous year of Rp2.99 trillion. The growth also boosted its contribution to the total value of PP Presisi's new contracts, in which the Mining Contractor Services business line contributed 57.05% in 2022, increasing to 65.95% in 2023.

Rp **3,40** triliun trillion

Jumlah Pendapatan PP Presisi

Total Revenue of PP Presisi

Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,63 triliun, pendapatan PP Presisi dengan pertumbuhan pada lini bisnis Jasa Kontraktor Pertambangan menjadi faktor fundamental bagi PP Presisi dalam menjaga bisnisnya untuk dapat berkembang di masa-masa mendatang.

Although it experienced a slight decrease compared to the previous year of Rp3.63 trillion, PP Presisi's revenue with growth in the Mining Contractor Services business line is a fundamental factor for PP Presisi in maintaining its business to develop in the future.

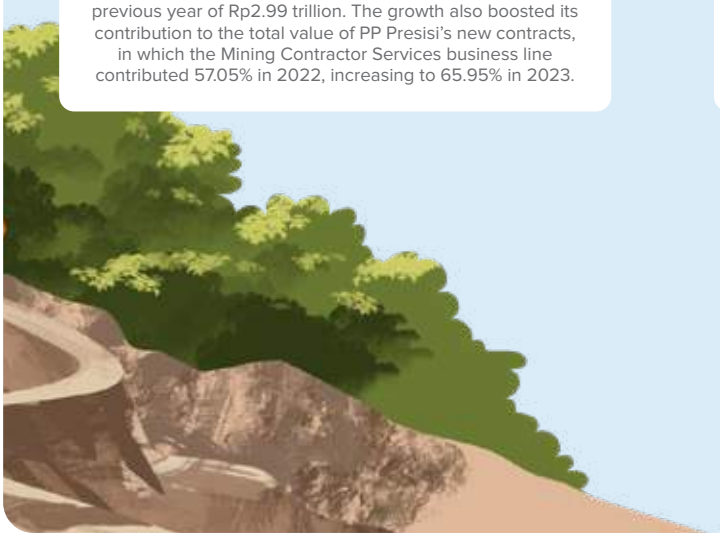

Rp**172,78** miliar billion

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year

Kemampuan PP Presisi dalam menjaga momentum pertumbuhan tercermin dari keberhasilannya untuk mencatat laba bersih tahun berjalan di tahun 2023.

PP Presisi's ability to maintain growth momentum is reflected in its success in recording a net profit for the year in 2023.

Rp**3,31** triliun trillion

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Tumbuh 5,23% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,15 triliun. Pertumbuhan ekuitas menjadi salah satu aspek mendasar bagi potensi PP Presisi untuk berekspansi di masa mendatang.

Grew by 5.23% compared to the previous year of Rp3.15 trillion. Equity growth is one of the fundamental aspects of PP Presisi's potential to expand in the future.

IKTHISAR KINERJA 2023

Performance Highlights 2023

Proyek Weda Bay Nickel, Halmahera, Maluku Utara
Weda Bay Nickel Project, Halmahera, North Maluku

PROYEK WEDA BAY NICKEL,
HALMAHERA, MALUKU UTARA
PP
PRESISI

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Key Financial Highlights

Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billion Rupiah, unless otherwise stated	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Pendapatan Revenue	3.400,86	3.635,19	2.807,23	2.336,96	3.853,25	(6,45)	(3,07)
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(2.807,30)	(3.022,81)	(2.354,94)	(1.894,60)	(3.002,89)	(7,13)	(1,67)
Laba Kotor Gross Profit	593,56	612,38	452,29	442,35	850,36	(3,07)	(8,60)
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	14,71	34,06	79,71	51,44	-	(56,82)	-
Beban Usaha Operating Expenses	(90,22)	(89,26)	(66,79)	(49,11)	(70,27)	1,08	6,45
Pendapatan/(Beban) Keuangan Funding Income/(Expenses)	(229,11)	(228,37)	(199,24)	(191,47)	-	0,32	-
Pendapatan/(Beban) Lainnya Other Income/(Expenses)	7,92	(32,50)	(37,21)	(67,15)	(225,83)	(124,37)	-
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	(18,68)	(1,15)	(2,32)	(4,58)	-	1.524,35	-
Beban Penurunan Nilai Piutang Receivables Impairment Expense	-	-	-	-	(2,85)	-	-
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(96,38)	(102,22)	(71,96)	(58,72)	(97,60)	(5,71)	(0,31)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	181,79	192,94	156,80	127,34	453,81	(5,78)	(20,44)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax (Expense)	(9,01)	(11,28)	(9,99)	(11,46)	(14,56)	(20,15)	(11,31)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit of the Year	172,78	181,66	146,81	115,88	439,25	(4,89)	(20,81)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	8,17	7,56	10,78	5,31	5,19	8,06	12,00
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Year	180,95	189,22	157,59	121,19	444,45	(4,37)	(20,12)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Profit of the Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	80,22	100,75	76,93	58,57	331,27	(20,38)	(29,85)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	92,57	80,91	69,88	57,31	107,98	14,41	(3,78)
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	85,75	106,05	83,93	62,34	333,79	(19,15)	(28,81)
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	95,20	83,16	73,66	58,85	110,66	14,47	(3,69)
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh) Basic Earnings per Share (in full amount of Rupiah)	7,85	9,85	7,52	5,73	32,40	(20,30)	(29,84)
EBITDA	1.020,2	1.067,5	937,0	907,5	1.186,8	(4,43)	(78,51)

Pendapatan
Revenue

Rp-miliar | Rp-billion

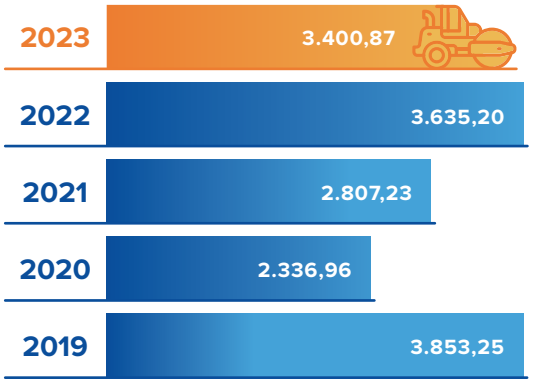

Laba Kotor
Gross Profit

Rp-miliar | Rp-billion

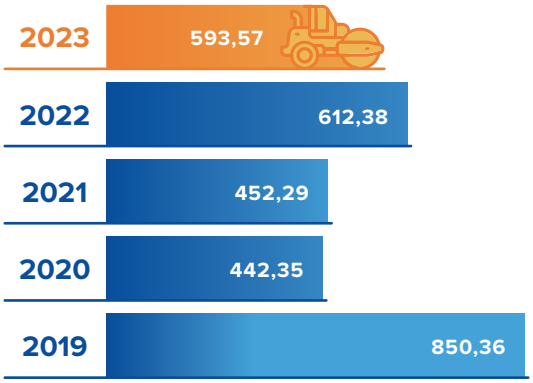

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp-miliar | Rp-billion

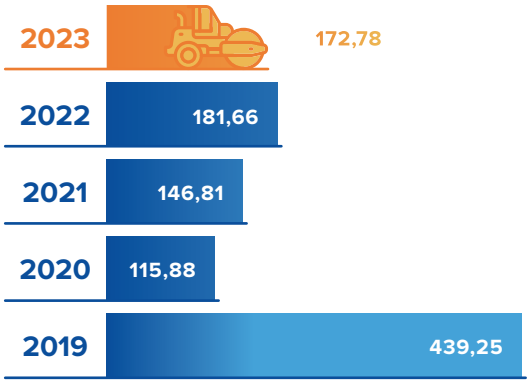

Laba Bersih (Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk)
Net Profit (Profit for the Year Attributable to Owner of Parent Entity)

Rp-miliar | Rp-billion

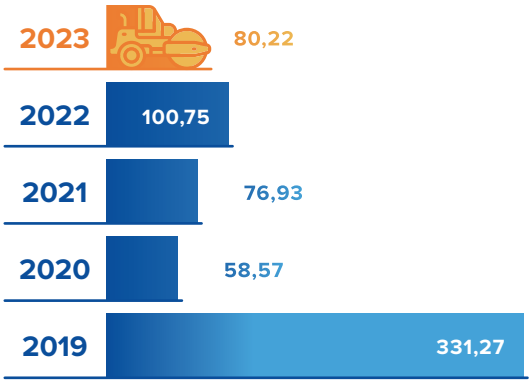

EBITDA
EBITDA

Rp-miliar | Rp-billion

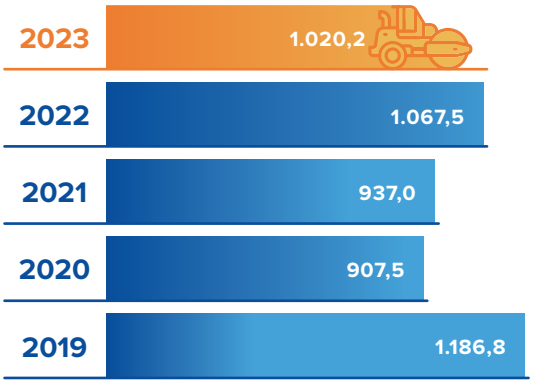

Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billion Rupiah, unless otherwise stated	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**YoY 2022-2023** (%)	**CAGR 2019-2023** (%)
Aset Asset							
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	4.965,57	4.904,80	4.217,36	3.866,12	4.542,74	1,24	2,25
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets							
Investasi pada Ventura Bersama Investments in Joint Ventures	11,67	162,64	131,15	51,44	-	(92,82)	-
Aset Tetap - bersih Fixed Assets - Net	1.500,70	1.712,08	2.076,32	2.341,28	2.967,44	(12,35)	(15,67)
Aset Tidak lancar Lainnya Other Non-Current Assets	687,05	808,92	604,82	508,39	250,69	(15,07)	28,67
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	2.199,41	2.683,64	2.812,29	2.901,11	3.218,13	(18,04)	(9,08)
Jumlah Aset Total Assets	7.164,99	7.588,44	7.029,65	6.767,23	7.760,86	(5,58)	(1,98)
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Liabilities							
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	3.223,01	3.795,39	3.555,62	2.950,67	3.433,91	(15,08)	(1,57)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	626,89	642,72	494,74	974,56	1.164,87	(2,46)	(14,35)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.849,90	4.438,11	4.050,36	3.925,23	4.598,78	(13,25)	(4,35)
Ekuitas Equity							
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	2.429,29	2.343,54	2.245,18	2.172,96	2.518,18	3,66	(0,89)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	885,80	806,78	734,10	669,03	643,89	9,79	8,30
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.315,09	3.150,33	2.979,28	2.842,00	3.162,08	5,23	1,19
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	7.164,99	7.588,44	7.029,65	6.767,23	7.760,86	(5,58)	(1,98)

Total Aset
Total Assets

Rp-miliar | Rp-billion

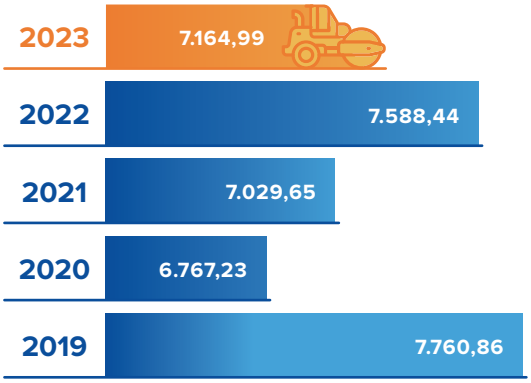

Total Liabilitas
Total Liabilities

Rp-miliar | Rp-billion

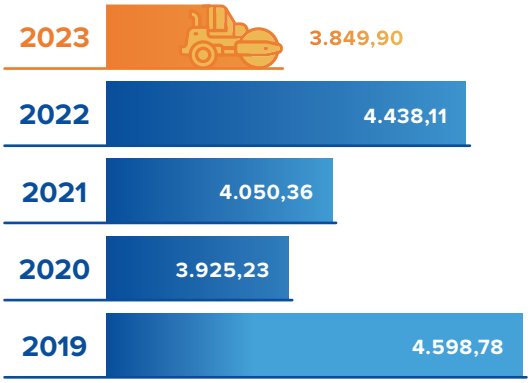

Total Ekuitas
Total Equity

Rp-miliar | Rp-billion

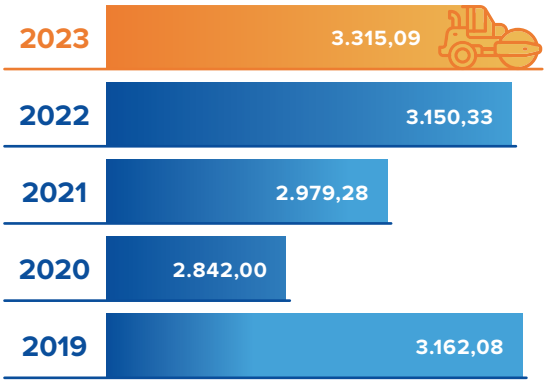

Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billion Rupiah, unless otherwise stated	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (for) Operating Activities	67,37	311,09	235,48	240,50	143,31	(78,34)	(17,20)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (for) Investing Activities	209,32	(76,35)	(41,08)	(193,94)	(410,40)	(374,14)	-
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (for) Financing Activities	(420,55)	(184,51)	(73,73)	(461,96)	185,25	127,93	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(143,87)	50,23	120,67	(414,39)	(81,84)	(386,43)	15,15
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	305,61	255,39	134,71	549,10	630,94	19,67	(16,57)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents the End of the Year	161,75	305,61	255,39	134,71	549,10	(47,07)	(26,33)

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Rp-miliar | Rp-billion

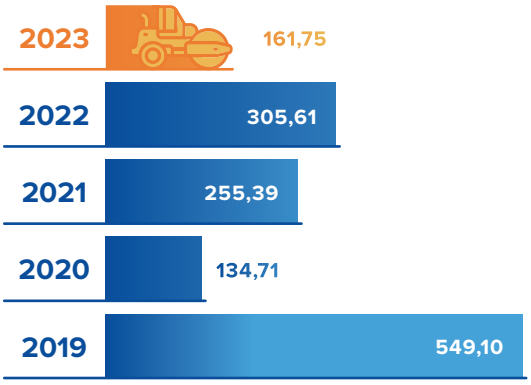

Rasio-rasio Keuangan
Financial Ratios

Perihal Subject	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**Kenaikan (Penurunan) 2022-2023 (%)** 2022-2023 Increase (Decrease) (%)
Profitabilitas Profitability						
Pertumbuhan Pendapatan (%) Revenue Growth (%)	(6,44)	29,49	20,12	(39,35)	26,27	(35,94)
Margin Laba Bruto (%) Gross Profit Margin (%)	17,45	16,85	16,11	18,93	22,07	0,61
Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	15,23	15,33	16,57	19,03	20,24	(0,09)
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	2,36	2,77	2,74	2,51	8,60	(0,41)
Margin EBITDA (%) EBITDA Margin (%)	30,00	29,37	33,38	38,83	30,80	0,63
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) Return on Asset Ratio (%)	1,12	1,33	1,09	0,87	4,27	(0,21)
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (%) Return on Equity Ratio (%)	2,42	3,20	2,58	2,06	10,48	(0,78)
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga (kali) EBITDA to Interest Ratio (times)	4,43	4,63	4,72	4,74	5,53	(0,21)
Rasio Utang terhadap EBITDA (kali) Debt to EBITDA Ratio (times)	1,94	2,23	2,38	2,13	1,56	(0,29)
Likuiditas Liquidity						
Rasio Lancar (kali) Current Ratio (times)	(1,54)	1,29	1,19	1,31	1,32	0,25
Rasio Kas (kali) Cash Ratio (times)	0,05	0,09	0,07	0,05	0,16	(0,04)
Solvabilitas Solvency						
Rasio Kewajiban Berbunga terhadap Jumlah Ekuitas (kali) Interest-Bearing Liability to Equity Ratio (times)	0,06	0,81	0,76	0,75	0,92	(0,16)
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (kali) Debt to Asset Ratio (times)	0,54	0,58	0,58	0,58	0,59	(0,05)
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (kali) Debt to Equity Ratio (times)	1,16	1,41	1,36	1,38	1,45	(0,25)

Margin Laba Bersih (Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk)

Net Profit Margin (Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity)

%

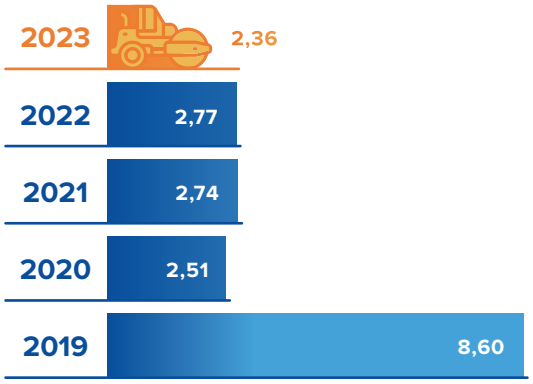

Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk)

Return on Asset (Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity)

%

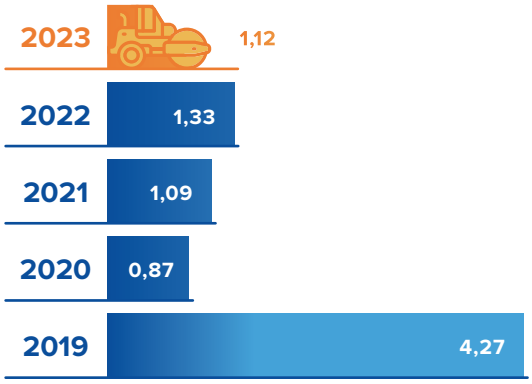

Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk)

Return on Equity (Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity)

%

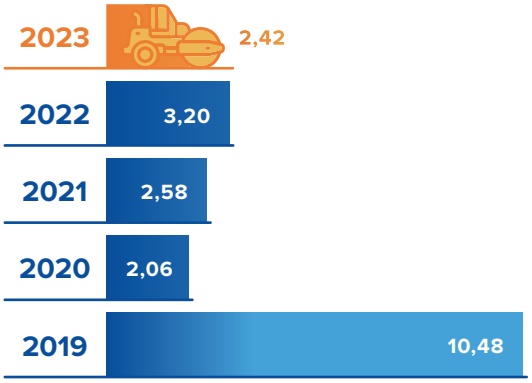

IKHTISAR KINERJA BISNIS DAN ORGANISASI

Business and Organizational Performance Highlights

Kinerja Lini Bisnis: Pendapatan per Segmen
Business Lines' Performance: Revenue per Segment

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billion Rupiah, unless otherwise stated	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Konstruksi Construction	3.212,76	3.407,24	2.397,51	1.957,48	3.253,60	(5,71)	(0,32)
Ready Mix	80,62	110,34	248,78	139,16	224,55	(26,93)	(22,59)
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	107,49	117,61	160,94	240,32	375,10	(8,61)	(26,84)
Total Pendapatan Total Revenue	3.400,87	3.635,19	2.807,23	2.336,96	3.853,25	(6,45)	(3,07)

Komposisi Pendapatan per Segmen
Revenue Composition per Segment

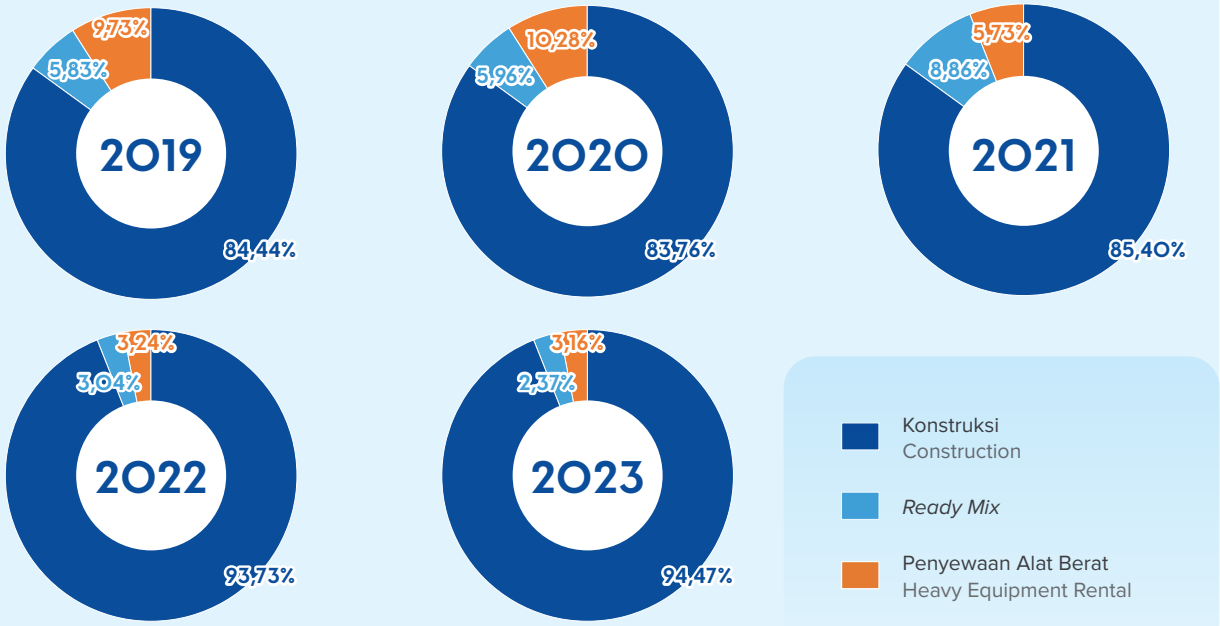

Perolehan Kontrak Baru per Segmen
New Contracts Acquisition per Segment

Perihal Subject	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Konstruksi Construction							
Civil Work	2.005,19	2.179,41	3.574,72	2.351,93	4.358,21	(7,99)	(17,64)
Mining	4.452,59	2.992,41	1.715,28	255,39	1.266,29	48,80	36,94
Subjumlah Konstruksi Subtotal Construction	6.457,78	5.171,82	5.290,01	2.607,32	5.624,50	24,86	3,51

Perihal Subject	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Ready Mix	181,58	6,03	218,63	106,89	117,75	2.911,28	11,44
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	112,27	67,47	95,83	101,7	126,24	66,40	(2,89)
Jumlah Perolehan Kontrak Baru Total Acquisition of New Contracts	6.751,63	5.245,32	5.604,47	2.815,92	5.868,49	28,72	3,57

Komposisi Perolehan Kontrak Baru per Segmen
New Contracts Acquisition Composition per Segment

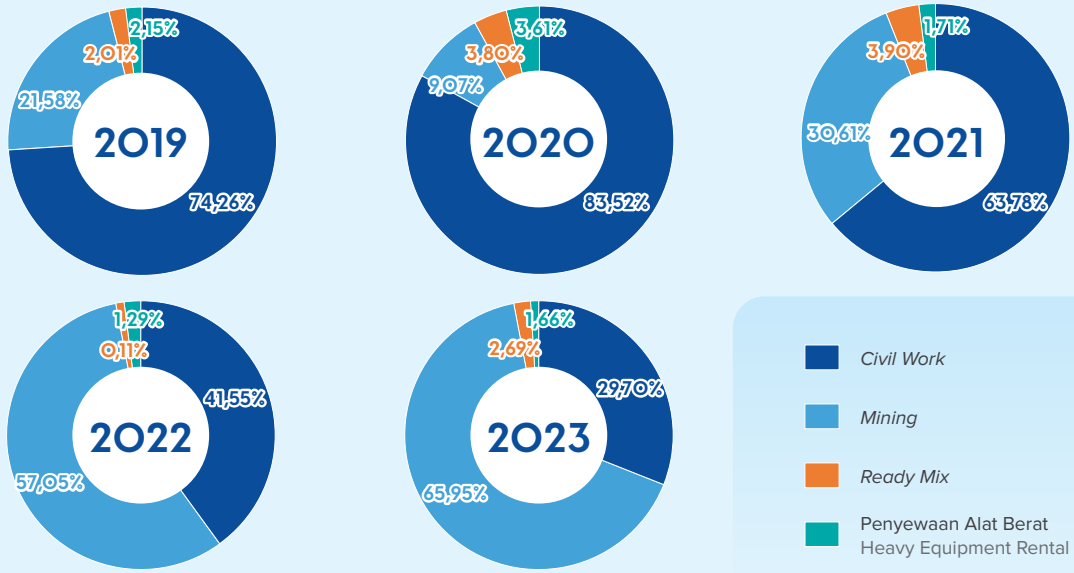

Berdasarkan Kinerja Organisasi
Based on Organizational Performance

Keterangan Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Jumlah Karyawan (Orang) Total Employees (Personnel)	285	295	313	290	222	(3,39)
Penilaian Penerapan GCG (Skor)* GCG Assessment (Score)*	-	86,822	88,395	86,698	82,017	

* Perangkat dan metode evaluasi dan *assessment* atas penerapan GCG menggunakan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
* GCG implementation assessment uses a method based on a copy of the Decree of Secretary to the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, on the Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

Berdasarkan SK Kementerian BUMN RI No. SK-12/S.MBU/08/2023 tentang pencabutan Keputusan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka untuk tahun buku 2023 tidak dilakukan *assessment* GCG namun Perusahaan tetap melakukan penerapan GCG mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Based on the Decree of the Ministry of SOE No. SK-12/S.MBU/08/2023 on the revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises, the Company did not carry out a GCG assessment for the 2023 fiscal year. However, the Company continues to implement GCG, referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises as well as applicable laws and regulations.

IKHTISAR SAHAM

Shares Highlights

Sekilas Informasi Saham PPRE 2019-2023
PPRE Share Information in a Glance for 2019-2023

	2023	2022	2021	2020	2019
Harga Pembukaan (Rp/lembar saham) Opening Price (Rp/share)	125	174	264	240	318
Harga Tertinggi (Rp/lembar saham) Highest Price (Rp/share)	128	204	298	304	422
Harga Terendah (Rp/lembar saham) Lowest Price (Rp/share)	70	121	148	74	206
Harga Penutupan (Rp/lembar saham) Closing Price (Rp/share)	79	124	174	262	240
Jumlah Saham Beredar (juta lembar saham) Total Outstanding Shares (millions of shares)	10.224.271.000	10.224.271.000	10.224.271.000	10.224.271.000	10.224.271.000
Bursa Saham Stock Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange				

Informasi Perdagangan Saham PPRE 2022-2023
PPRE Share Exchange Information in 2022-2023

Periode Period	**Jumlah Saham Beredar (lembar saham)** Total Outstanding Shares (Shares)	**Harga Pembukaan (Rp/lembar saham)** Opening Price (Rp/share)	**Harga Tertinggi (Rp/lembar saham)** Highest Price (Rp/share)	**Harga Terendah (Rp/lembar saham)** Lowest Price (Rp/share)	**Harga Penutupan (Rp/lembar saham)** Closing Price (Rp/share)	**Volume Perdagangan (lembar saham)** Trading Volume (Shares)	**Kapitalisasi Pasar (Rp)** Market Capitalization (Rp)
2023							
Triwulan I First Quarter	10.224.271.000	125	132	102	114	299.591.800	1.166.000.000
Triwulan II Second Quarter	10.224.271.000	114	122	95	101	162.847.200	1.033.000.000
Triwulan III Third Quarter	10.224.271.000	100	110	96	100	366.779.100	1.022.000.000
Triwulan IV Fourth Quarter	10.224.271.000	100	84	70	79	303.559.700	1.268.000.000
2022							
Triwulan I First Quarter	10.224.271.000	174	204	147	171	657.190.300	1.748.000.000
Triwulan II Second Quarter	10.224.271.000	172	181	148	152	363.714.000	1.554.000.000
Triwulan III Third Quarter	10.224.271.000	151	173	140	147	482.676.700	1.503.000.000
Triwulan IV Fourth Quarter	10.224.271.000	147	153	121	124	180.529.800	1.268.000.000

Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham dan Volume Perdagangan Saham PPRE Periode Januari 2022 s.d Desember 2023
Graph of PPRE Closing Price and Trading Volume Movements for January 2022 to December 2023 Period

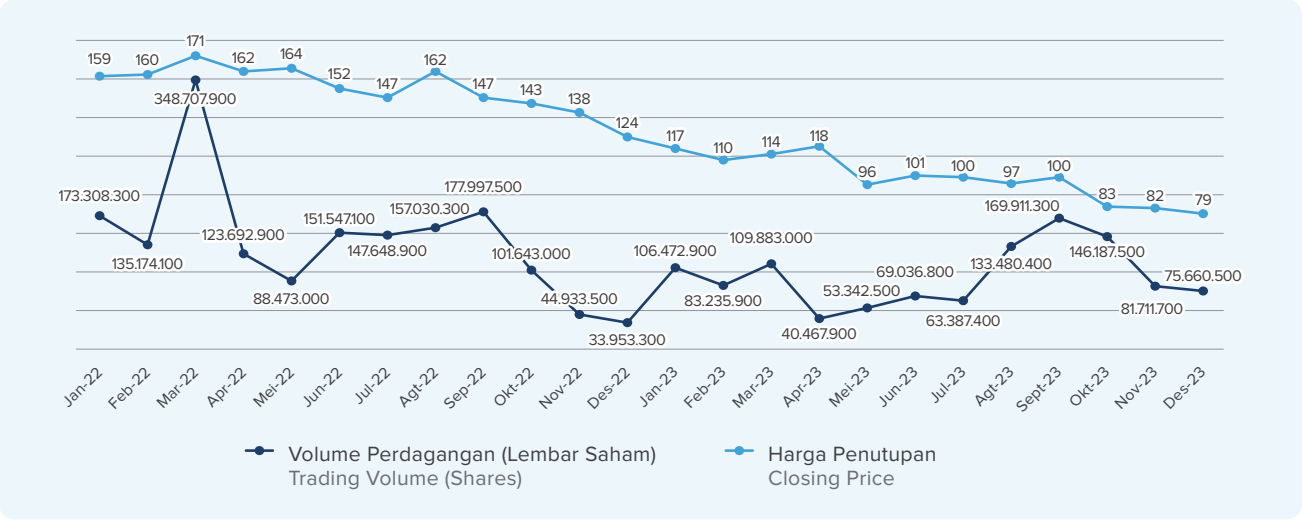

Informasi Tentang Aksi Korporasi

Di sepanjang tahun 2022 dan 2023, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, serta perubahan nilai nominal saham. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, perubahan nilai nominal saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi, jumlah efek konversi yang dilaksanakan, dan harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi, yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Information on Corporate Actions

Throughout 2022 and 2023, the Company did not carry out corporate actions that caused changes in shares, such as stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares. Thus, there is no information regarding the date of implementation of the corporate action, stock split ratio, reverse stock, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, changes in nominal value of shares, number of outstanding shares before and after the corporate action, the number of convertible securities carried out, and share prices before and after the corporate action, which can be presented in this Annual Report.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Di tahun 2022 dan 2023, Perusahaan tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Perusahaan mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*).

Information on Suspension and/or Sanctions and Delisting of Shares

In 2022 and 2023, the Company has never been subject to sanctions that could affect share trading activities on the Stock Exchange where the Company lists shares and trades shares, be it suspension and/or delisting.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI

Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds Highlights

Pada 1 Juli 2022, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Tahap I Tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia dalam rangka memperkuat permodalan.

On July 1, 2022, the Company conducted a Public Offering of Shelf-Registered Bonds I Phase I of 2022 on the Indonesia Stock Exchange to strengthen capital.

Nama Name	**Tanggal Penerbitan** Issuance Date	**Nilai (Rp-miliar)** Value (Rp-billion)	**Tenor** Tenor	**Tingkat Bunga/ Imbalan** Interest/Reward Rate	**Tanggal Jatuh Tempo** Due Date	**Peringkat** Rating	**Status** Status
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 PP Presisi Public Offering of Shelf-Registered Bonds I Phase I of 2022							
Seri A Series A	1 Juli 2022 July 1, 2022	102,27	3 tahun 3 years	9,50% per tahun 9.50% per year	30 Juni 2025 June 30, 2025	• 2023: idBBB+ (Pefindo) • 2022: idBBB+ (Pefindo)	Aktif Active
Seri B Series B		100,70	5 tahun 5 years	10,50% per tahun 10.50% per year	30 Juni 2027 June 30, 2027	• 2023: idBBB+ (Pefindo) • 2022: idBBB+ (Pefindo)	Aktif Active
Jumlah Total		**202,97**					

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Information on Other Funding Sources

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak menerbitkan instrumen keuangan seperti *Medium Term Notes* (MTN) atau surat utang dalam bentuk lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.

Until the end of 2023, the Company did not issue financial instruments such as Medium-Term Notes (MTN) or other forms of debt securities. Hence, there is no information regarding other funding sources.

KILAS PERISTIWA 2023

2023 Event Highlights

JANUARI | JANUARY

Selasa, 03 Januari 2023
Penandatangan Kontrak Proyek Pembangunan Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN) yang dihadiri oleh Direktur Operasi Perusahaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak PPK Jembatan Pulau Balang Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang Kementerian PUPR. Penandatanganan proyek Pembangunan Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN) dengan fokus pada pekerjaan struktur dan sipil.

Tuesday, January 3, 2023
The signing of the Logistics Pier Construction Contract for the National Capital City (IKN), attended by the Director of Operations and the Jembatan Pulau Balang PPK Contract Signing Officer, Jembatan Pulau Balang Implementation Work Unit from the Ministry of PUPR. The signing of the IKN Logistics Pier Construction project focused on structural and civil works.

Kamis, 12 Januari 2023
Peringatan bulan K3 Nasional Proyek Weda Bay Nikel dengan mendapatkan penghargaan juara ke-2 untuk Kategori *Best Performance Contractor* dan mendapatkan penghargaan 2.000.000 *Manhours Work Without Lost Time Accident* yang diberikan oleh Kepala Teknik Tambang dan Geologi *Manager* PT Weda Bay Nickel.

Thursday, January 12, 2023
Commemorated Weda Bay Nikel Project's National OHS month by winning Second Place in the Best Performance Contractor Category and receiving the 2,000,000 Manhours Work Without Lost Time Accident award. The Head of Mining Engineering and Geology Manager of PT Weda Bay Nickel gave the award.

FEBRUARI | FEBRUARY

Kamis, 22 Februari 2023
Pelaksanaan RUPSLB Tahun 2023 PPRE dengan agenda pergantian Direktur Operasi dan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM, yang dihadiri oleh Manajemen Perusahaan.

Thursday, February 22, 2023
Commenced the 2023 EGMS of PPRE with the agenda of succeeding the Director of Operations and Director of Business Planning & HCM, which was attended by Company Management.

MARET | MARCH

Rabu, 29 Maret 2023
Pelaksanaan CEO *Talk* dengan tema Peningkatan Program Kerja QHSE di Lingkungan Proyek, yang dihadiri oleh Direksi, *Vice President*, *Manager* dan *Project Manager* Perusahaan.

Wednesday, March 29, 2023
Implemented a CEO Talk with the theme "Improving the QHSE Work Program in the Project Environment," attended by the BOD, Vice Presidents, Managers, and Project Managers.

APRIL | APRIL

Jumat, 14 April 2023
CSR Pembagian Sembako untuk warga sekitar lingkungan UKP PPRE dipandu oleh Direktur Utama dan Direktur Perencaan Bisnis & HCM. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Perusahaan yang ke 19.

Friday, April 14, 2023
CSR activity by distributing basic necessities to residents around the UKP PPRE environment, guided by the President Director and Director of Business Planning & HCM. The activity is a part of the Company's 19th-anniversary events.

MEI | MAY

Rabu, 16 Mei 2023
Pelaksanaan Pekan Olah Raga dan Seni dalam rangka memperingati HUT PPRE Ke 19, yang diikuti oleh karyawan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Wednesday, May 16, 2023
Implemented Sports and Arts Week to celebrate the 19th anniversary of PPRE, attended by employees of the Company and Subsidiaries.

Jumat, 19 Mei 2023
Penyelenggaraan donor darah karyawan Perusahaan merupakan salah satu rangkaian acara HUT PPRE Ke 19 yang diikuti oleh Karyawan Perusahaan dan jajaran Direksi.

Friday, May 19, 2023
Organized the Company's employee blood drive as one of the events to celebrate the 19th anniversary of PPRE. Company employees and the BOD attended the event.

Rabu, 24 Mei 2023
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PPRE dengan beberapa agenda yang ditetapkan. Salah satu hasil keputusan rapat terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Wednesday, May 24, 2023
Implemented the Annual General Meeting of Shareholders of PPRE for the 2022 Fiscal Year with several set agendas. One of the meeting resolutions was a change in the BOC and BOD composition.

JUNI | JUNE

Senin-Rabu, 05-07 Juni 2023
Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dihadiri oleh Internal Auditor Perusahaan dan Mutu Agung Lestari selaku eksternal auditor.

Monday-Wednesday, June 5-7, 2023
Implemented the Anti-Bribery Management System (SMAP) Audit, attended by the Company's Internal Auditor and Mutu Agung Lestari as the external auditor.

Selasa-Rabu, 20-21 Juni 2023
Pre-Construction Meeting (PCM) Proyek Dermaga IKN yang dihadiri oleh Direktur Operasi PPRE.

Tuesday-Wednesday, June 20-21, 2023
Pre-Construction Meeting (PCM) for the IKN Pier Project, attended by the Director of Operations of PPRE.

Sabtu, 24 Juni 2023
Program CSR Khitanan Massal dihadiri oleh Direktur Utama PPRE dan diikuti kurang lebih oleh 100 orang peserta anak-anak.

Saturday, June 24, 2023
The Mass Circumcision CSR Program, which was attended by the President Director of PPRE. Around 100 children participated in the event.

JULI | JULY

Jumat, 07 Juli 2023
First Cut Mining Operation Weda Bay Nickel Project dihadiri oleh SVP QHSE PT PP Persero Tbk, Direktur Utama dan Direktur Operasi PPRE serta Tim Weda Bay.

Friday, July 7, 2023
The First Cut Mining Operation of the Weda Bay Nickel Project was attended by the SVP of QHSE, President Director, and Director of Operations of PPRE, as well as the Weda Bay Team.

AGUSTUS | AUGUST

Kamis, 3 Agustus 2023
Peresmian proyek Hengjaya yang dihadiri oleh Direktur Operasi Perusahaan, Direksi Hengjaya, dan pihak IMIP. Acara diadakan sebagai bentuk peresmian jalan akses yg dibuka dari Hengjaya Site Tangofa menuju IMIP melalui jalur darat yang mana akan meningkatkan produksi *supply* material tambang tersebut.

Thursday, August 3, 2023
The inauguration of the Hengjaya Project, attended by the Director of Operations, BOD of Hengjaya, and IMIP. The event was held as a form of inauguration of the access road, which was opened from the Hengjaya Site Tangofa to IMIP via land, which will increase the production of the mining material supply.

Kamis, 10 Agustus 2023
Penerimaan penghargaan TJSL & CSR Awards 2023 dengan kategori Pilar Lingkungan dan Pilar Sosial yang dihadiri oleh Direktur Utama Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Thursday, August 10, 2023
The President Director accepted the 2023 TJSL & CSR Awards in the Environmental and Social Pillar categories.
The Company is committed to participating in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment in a way that benefits society.

Jumat, 18 Agustus 2023
Uji Laik Fungsi (ULF) Ruas Tol Cinere
- Uji Laik Fungsi (ULF) Ruas Tol Cinere
- Jagorawi Seksi 3B. Dihadiri oleh Tim BPJT dan Bina Marga Kementerian PUPR, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, serta Korlantas POLRI.

Friday, August 18, 2023
Functional Worthiness Test (ULF) of the Cinere Toll Road and the ULF of the Cinere–Jagorawi Toll Road Section 3B. The event was attended by the BPJT and Bina Marga Team of the Ministry of PUPR, the Directorate General of Land Transportation of the Ministry of Transportation, and the Indonesian Police Traffic Corps.

SEPTEMBER | SEPTEMBER

Rabu, 6 September 2023
PPRE meraih 2 penghargaan sebagai TOP GRC Bintang 4 dan kategori The Most Committed GRC Leader 2023 untuk Direktur Utama PPRE dalam ajang GRC Award 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business.

Wednesday, September 6, 2023
PPRE won two awards in the TOP GRC 4 Star and The Most Committed GRC Leader 2023 category for the President Director of PPRE in Top Business Magazine's 2023 GRC Award event.

OKTOBER | OCTOBER

Minggu, 1 Oktober 2023
Opening Ceremony Hauling Road & Bridge Tofu Weda Bay Nickel Project dengan telah diselesaikannya pekerjaan Pembangunan Jembatan Tofu yang akan digunakan untuk jalan *hauling.* Acara diresmikan oleh Manager Operation Construction WBN dan dihadiri oleh GM *Mining Operation*, PJO HR Tofu PPRE.

Sunday, October 1, 2023
The Opening Ceremony for the Tofu Weda Bay Nickel Project Hauling Road & Bridge by completing the construction of the Tofu Bridge, which will be used as a hauling road. The WBN Construction Operation Manager officiated the event, which was attended by the GM of Mining Operation, PJO HR Tofu of PPRE.

NOVEMBER | NOVEMBER

Sabtu, 18 November 2023
Program TJSL *grand launching* Urban Farming Food Estate bersama komunitas Kampung Kita Depok dihadiri oleh Tim Corsec PPRE, Sekda Depok, Mantan Walikota Depok Periode 2006-2016, Mantan Wakil Walikota Depok Periode 2016-2021 dan Tokoh Masyarakat Sekitar.

Saturday, November 18, 2023
The TJSL Grand Launching Urban Farming Food Estate program with the Kampung Kita Depok community. The event was attended by the Corsec Team of PPRE, the Depok Regional Secretary, the Former Depok Mayor for the 2006-2016 Period, the Former Depok Deputy Mayor for the 2016-2021 Period, and Local Community Figures.

DESEMBER | DECEMBER

Jumat, 8 Desember 2023
Kunjungan Kerja Menteri PUPR ke Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi didampingi oleh TLKJ, Dirjen Binamarga, PPK Lahan, BUJT, Jasamarga, CSJ dan Tim Proyek Cijago, sebagai bagian dari *monitoring* penyelesaian pekerjaan proyek.

Friday, December 8, 2023
Working Visit of the Minister of PUPR to the Cinere-Jagorawi Toll Road Project accompanied by TLKJ, Director General of Binamarga, PPK Land, BUJT, Jasamarga, CSJ, and the Cijago Project Team, as part of work completion monitoring.

Workshop PT PP Presisi Tbk - Bekasi

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

Penghargaan Tahun 2023 Berskala Nasional
National Awards in 2023

INDONESIA TOP DIGITAL PR AWARD 2023

Deskripsi Penghargaan:
Prestasi dalam membangun *Digital Public Relation*

Pemberi Penghargaan:
TRANS N CO INDONESIA

Acara/Kegiatan:
TRANS N CO INFO BRAND

Tanggal Diberikan:
28 Februari 2023

Award Description:
Achievement for building Digital Public Relation

Awardee:
TRANS N CO INDONESIA

Event/Activity:
TRANS N CO INFO BRAND

Date Given:
February 28, 2023

BUMN Track 2023

Deskripsi Penghargaan:
Peringkat Terbaik I dalam kategori Inovasi Bisnis Perusahaan Tbk

Pemberi Penghargaan:
BUMN Track

Acara/Kegiatan:
12th Anugerah BUMN 2023

Tanggal Diberikan:
15 Maret 2023

Award Description:
Best Rank I in the Tbk Company Business Innovation category

Awardee:
BUMN Track

Event/Activity:
12th Anugerah BUMN 2023

Date Given:
March 15, 2023

BUMN Track 2023

Deskripsi Penghargaan:
Peringkat Terbaik II dalam kategori Strategi Pemulihan Perusahaan Tbk

Pemberi Penghargaan:
BUMN Track

Acara/Kegiatan:
12th Anugerah BUMN 2023

Tanggal Diberikan:
15 Maret 2023

Award Description:
Best Rank II in the Tbk Company Recovery Strategy category

Awardee:
BUMN Track

Event/Activity:
12th Anugerah BUMN 2023

Date Given:
March 15, 2023

TJSL & CSR AWARD 2023

Deskripsi Penghargaan:
Program TJSL & CSR BUMN melalui 4 pilar pembangunan yang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan UMK yang berkelanjutan. PPRE meraih peringkat Silver untuk kategori Pilar Sosial dan peringkat Gold untuk kategori Pilar Lingkungan.

Pemberi Penghargaan:
BUMN Track

Acara/Kegiatan:
TJSL & CSR AWARD 2023

Tanggal Diberikan:
10 Agustus 2023

Award Description:
The BUMN TJSL & CSR program consists of four development pillars that create added value for sustainable companies and MSEs. PPRE achieved a Silver rating in the Social Pillar category and a Gold rating in the Environmental Pillar category.

Awardee:
BUMN Track

Event/Activity:
TJSL & CSR Award 2023

Date Given:
August 10, 2023

Top GRC Awards 2023

Deskripsi Penghargaan:
I Gede Upeksa Negara, Direktur Utama PPRE, sebagai The Most Committed GRC Leader 2023

Pemberi Penghargaan:
Top Business

Acara/Kegiatan:
Top GRC Awards 2023

Tanggal Diberikan:
6 September 2023

Award Description:
I Gede Upeksa Negara, President Director of PPRE, as The Most Committed GRC Leader in 2023

Awardee:
Top Business

Event/Activity:
Top GRC Awards 2023

Date Given:
September 6, 2023

Top GRC Awards 2023

Deskripsi Penghargaan:
Top GRC Awards 2023 #STAR 4

Pemberi Penghargaan:
Top Business

Acara/Kegiatan:
Top GRC Awards 2023

Tanggal Diberikan:
6 September 2023

Award Description:
Top GRC Awards 2023 #STAR 4

Awardee:
Top Business

Event/Activity:
Top GRC Awards 2023

Date Given:
September 6, 2023

Sertifikasi Tahun 2023 Berskala Nasional
National Certifications in 2023

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Management System

Deskripsi Sertifikasi:
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Hasil Pencapaian: 92,16% untuk Kategori Tingkat Lanjutan (166 Kriteria)

Certification Description:
Occupational Safety and Health Management System with 92.16% Achievement in the Advanced Level Category (166 Criteria)

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Certification Agency:
Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
22 April 2021

Issuance Date:
April 22, 2021

Masa Berlaku Hingga:
22 April 2024

Valid Until:
April 22, 2024

SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
Mutu Certification International

Certification Agency:
Mutu Certification International

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
9 Juni 2021

Issuance Date:
Juni 9, 2021

Masa Berlaku Hingga:
9 Juni 2024

Valid Until:
June 9, 2024

BS EN ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
BS EN ISO 9001:2015 Quality Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
NQA

Certification Agency:
NQA

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
16 Agustus 2023

Issuance Date:
August 16, 2023

Masa Berlaku Hingga:
24 Agustus 2026

Valid Until:
August 24, 2026

BS EN ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
BS EN ISO 45001:2018 Occupational Safety and Health Management System

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
NQA

Certification Agency:
NQA

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
16 Agustus 2023

Issuance Date:
August 16, 2023

Masa Berlaku Hingga:
24 Agustus 2026

Valid Until:
August 24, 2026

BS EN ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan
BS EN ISO 14001:2015 Environmental Management Systems

Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi:
NQA

Certification Agency:
NQA

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi:
16 Agustus 2023

Issuance Date:
August 16, 2023

Masa Berlaku Hingga:
24 Agustus 2026

Valid Until:
August 24, 2026

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Proyek IGP Mines of Bahodopi Vale, Morowali, Sulawesi Tengah
IGP Mines Project of Bahodopi Vale, Morowali, Central Sulawesi

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Sebagai pelaku usaha pada sektor yang berperan dalam pembangunan, PT PP Presisi Tbk menyadari bahwa infrastruktur dan konstruksi berkontribusi besar terhadap percepatan pembangunan nasional yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia. Izinkan saya mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku 2023, terutama dari sudut pandang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG TANGGUH

Perekonomian Indonesia di tahun 2023 memperlihatkan kemampuannya untuk tetap tumbuh dengan baik di tengah tantangan perekonomian dunia. International Monetary Fund (IMF) dalam dokumen *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2023 memproyeksikan perekonomian global tahun 2023 tumbuh sebesar 3%, melambat dari tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,5%. Negara-negara maju diperkirakan akan melambat dari 2,6% pada tahun 2022 menjadi 1,5% pada tahun 2023 yang disebabkan dampak dari pengetatan kebijakan moneter. Sementara negara-

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

As a business entity in the development sector, PT PP Presisi Tbk realizes that infrastructure and construction contribute significantly to the acceleration of national development carried out by the Government of Indonesia. Allow me, on behalf of the Board of Commissioners, to present the Company's Annual Report for the 2023 fiscal year,especially from the Board of Commissioners' perspective when carrying out its supervisory and advisory functions.

REALIZING A RESILIENT INDONESIAN ECONOMY TOGETHER

Indonesia's economy in 2023 demonstrated its ability to continue growing well amidst the world economy's challenges. The October 2023 edition of the World Economic Outlook (WEO) document by the International Monetary Fund (IMF) projected the global economy in 2023 to grow by 3%, slowing down from 2022 with growth of 3.5%. Developed countries are expected to slow down from 2.6% in 2022 to 1.5% in 2023 due to the impact of tightening monetary policy. Meanwhile, developing countries are expected to experience a slight decline in

Inovasi dan terobosan menjadi kunci penting bagi Perusahaan untuk dapat memperkuat posisinya di tengah perkembangan konstruksi nasional.

Innovation and breakthroughs are important keys for the Company to strengthen its position amidst national construction developments.

Nur Rochmad

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner

negara berkembang diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan pertumbuhan, dari 4,1% pada tahun 2022 menjadi 4% pada tahun 2023. Masih mengutip dari data WEO oleh IMF, meskipun inflasi dunia akan mengalami penurunan, inflasi masih menjadi tantangan serius yang berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 8,7% pada tahun 2022 menjadi 6,9% pada tahun 2023. Di samping masalah ketimpangan pasokan komoditas global pasca pandemi COVID-19 yang memberikan dampak cukup signifikan bagi inflasi, faktor krisis geopolitik menjadi hal yang turut memperburuk berbagai persoalan dunia.

Di tengah tantangan perlambatan perekonomian global tersebut, perekonomian Indonesia justru mampu membukukan kinerja yang cukup tangguh. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%. Meskipun melambat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,31%, capaian ini menjadi hal positif di mana perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia.

Tangguhnya perekonomian Indonesia tak lepas dari inflasi nasional yang menunjukkan tren normalisasi dengan perlambatan inflasi terjadi lebih cepat dari perkiraan.

growth, from 4.1% in 2022 to 4% in 2023. Still quoting the IMF's WEO data, although world inflation will decline, inflation is still a considerable challenge that significantly impacts the world economy. Global inflation is expected to decrease from 8.7% in 2022 to 6.9% in 2023. In addition to the problem of global commodity supply imbalances after the COVID-19 pandemic, which has significantly impacted inflation, the geopolitical crisis factor has also exacerbated various world problems.

Amid the challenges of the global economic slowdown, the Indonesian economy was able to record a fairly resilient performance. Citing data from Statistics Indonesia (BPS), the Indonesian economy grew by 5.05%. Although slowing down from the previous year with a growth of 5.31%, this is a positive achievement where the Indonesian economy can grow beyond world economic growth.

The resilience of the Indonesian economy is inseparable from national inflation, which shows a normalizing trend with inflation slowing down faster than expected.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 ditutup di level 2,61% dengan inflasi inti yang rendah pada level 1,80%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51%. Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter diharapkan mampu terus dilanjutkan agar perekonomian Indonesia mampu untuk tetap stabil di masa mendatang.

Consumer Price Index (CPI) inflation in December 2023 closed at 2.61%, with low core inflation at 1.80%, lower than the 2022 CPI inflation recorded at 5.51%. The success of the Government of Indonesia in formulating monetary policy is expected to continue so that the Indonesian economy can remain stable in the future.

Kunci penting bagi Indonesia dalam membentuk fondasi pembangunan yang kokoh adalah perkembangan ekosistem ketenagalistrikan sebagai pendukung utama tercapainya target Pemerintah Indonesia untuk dapat menurunkan sumber daya energi berbasis fosil yang pada akhirnya mampu mewujudkan *net zero emission*. Sebagaimana juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia 2020-2024, Pemerintah Indonesia mencanangkan konversi sumber daya energi dari berbasis fosil tidak terbarukan menuju pengelolaan sumber daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini terlihat dari pengembangan dan pengadaan infrastruktur pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang terdiri dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang mampu teralisasi sebanyak 2.704 unit dari target sebanyak 1.035 unit di tahun 2023. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi KBLBB yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebanyak 1.400 unit.

An important key for Indonesia in establishing a solid development foundation is the development of the electricity ecosystem as the primary support for the achievement of the Government of Indonesia's target to reduce fossil-based energy resources, which will ultimately be able to realize net zero emissions. As also stated in the National Mid-Term Development Plan (RPJMN) for the 2020-2024 period and the 2020-2024 Strategic Plan of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) of the Republic of Indonesia, the Government of Indonesia has launched the conversion of energy resources from non-renewable fossil-based to the management of New and Renewable Energy (EBT) resources. This is evident from the development and procurement of Battery-Based Electric Motorized Vehicle (KBLBB) charging infrastructure consisting of Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) and Public Electric Vehicle Battery Exchange Stations (SPBKLU), which were able to be realized as many as 2,704 units from a target of 1,035 units in 2023. The figure increased quite significantly compared to the previous year, with the realization that KBLBB spread across various regions of Indonesia by as many as 1,400 units.

Konversi sumber energi berbasis EBT juga telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021-2030, di mana pada periode ini porsi sumber EBT akan menjadi lebih besar yakni 51,6%, sementara sumber energi fosil lebih rendah dengan komposisi sebesar 48%. Meskipun mendapatkan sejumlah tantangan terutama dari sisi investasi dan pendanaan, target besar Pemerintah Indonesia menuju energi bersih patut diapresiasi, terutama oleh Perusahaan yang telah memulai inisiatif pengembangan bisnis kontraktor tambang, khususnya untuk produk nikel.

The conversion of EBT-based energy sources has also been stated in the 2021-2030 Long-Term Electricity Procurement Plan (RUPTL), in which the portion of EBT sources will be larger at 51.6%, while fossil energy sources are lower with a composition of 48%. Despite several challenges, especially regarding investment and funding, the Government of Indonesia's enormous target towards clean energy should be appreciated, particularly by the Company that has started the initiative to develop the mining contractor business, especially for nickel products.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN SERTA FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intensif Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perusahaan serta inisiatif strategis kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki forum rapat gabungan yang membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan dan arahan Dewan

SUPERVISION OF CORPORATE STRATEGIES AND POLICIES IMPLEMENTATION AS WELL AS THE ADVISORY FREQUENCY AND METHOD TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners' supervisory role is carried out through the Board of Commissioners' intensive involvement in regularly providing directives on preparing the Company's work plans and strategic initiatives to the Board of Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors have a joint meeting forum that discusses various agendas on work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require

Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat internal dan 9 (sembilan) kali rapat gabungan dengan Direksi, termasuk rapat dengan Direksi baru hasil keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 untuk membahas langkah-langkah strategi pencapaian RKAP Tahun 2023. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan tersebut mencapai 95,83%, yang menunjukkan keseriusan baik Dewan Komisaris maupun Direksi untuk mengelola Perusahaan meningkatkan level kompetensinya. Beberapa agenda pembahasan yang cukup penting dalam rapat gabungan tersebut terutama mencakup:

1. Evaluasi kinerja Perusahaan, termasuk evaluasi atas kinerja Perusahaan tahun 2022 serta perumusan kebijakan strategis Perusahaan tahun 2023;
2. Pemantauan atas kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan, khususnya pemantauan atas pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023;
3. Pemantauan atas utilisasi aset yang dimiliki Perusahaan;
4. Evaluasi penerapan kebijakan mutu pelayanan (QHSE), pelayanan, sistem teknologi informasi, pengadaan dan pengelolaan SDM, baik kendala dan tantangan di tahun 2022 maupun strategi tahun 2023;
5. Pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil *Assessment* Maturitas tahun 2022 dan pelaksanaan penilaian *Assessment* Maturitas Tahun 2023;
6. Pemantauan penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP), *Whistleblowing System* (WBS), dan Pengendalian Gratifikasi;
7. Pemantauan atas permasalahan legal dan dampak potensialnya bagi Perusahaan;
8. Pemantauan hasil *Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tahun buku 2022 serta tindak lanjutnya hingga akhir tahun 2023;
9. Pemantauan kinerja entitas anak;
10. Pemantauan kemajuan Aksi Korporasi yang telah disetujui Dewan Komisaris; dan
11. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan Direksi, khususnya dalam mengelola operasional Perusahaan dan menjaga kualitas mutu kepada pelanggan. Pada setiap Rapat Gabungan dengan Direksi, rekomendasi Dewan Komisaris atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi di tahun 2023 antara lain adalah:

1. Agar Perusahaan melakukan langkah-langkah dengan fokus perolehan kontrak baru pada proyek *mining operation* maupun *mining infrastructure*;

the approval and direction of the Board of Commissioners. The meeting is a form of coordination to discuss the periodic reports of the Board of Directors and provide responses, notes, and advice as outlined in the meeting minutes.

Throughout 2023, the Board of Commissioners held seven internal meetings and nine joint meetings with the Board of Directors, including a meeting with the new Board of Directors as a result of the resolution of the Annual GMS for the 2022 fiscal year to discuss strategic measure to achieve the 2023 RKAP. The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the joint meetings reached 95.83%, which shows the earnestness of the Board of Commissioners and the Board of Directors in managing the Company and increasing their competence. Some of the essential discussion agendas in the joint meeting include:

1. Evaluation of the Company's performance, including evaluation of the Company's performance in 2022 and formulation of the Company's strategic policy for 2023;
2. Monitoring of the Company's financial performance and Key Performance Indicator (KPI) achievements, particularly monitoring of the achievement of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) in 2023;
3. Monitoring of the utilization of Company assets;
4. Evaluation of the implementation of quality policies (QHSE), information technology systems, human resources procurement and management, constraints and challenges in 2022, and strategies in 2023;
5. Monitoring the implementation of recommendations from the 2022 Maturity Assessment results and the implementation of the 2023 Maturity Assessment;
6. Monitoring the Anti-Bribery Management System (SMAP), Whistleblowing System (WBS), and Gratuity Control implementation;
7. Monitoring of legal issues and their potential impact on the Company;
8. Monitoring the results of the Good Corporate Governance (GCG) Assessment for the 2022 fiscal year and its follow-up until the end of 2023;
9. Monitoring the performance of subsidiaries;
10. Monitoring the progress of Corporate Actions approved by the Board of Commissioners; and
11. Preparation for the General Meeting of Shareholders (GMS).

The Board of Commissioners appreciates the various strategic policies carried out by the Board of Directors, especially in managing the Company's operations and maintaining quality to customers. In every Joint Meeting with the Board of Directors, the Board of Commissioners' recommendations on the management of the Company by the Board of Directors in 2023 include:

1. For the Company to take measures with a focus on acquiring new contracts in mining operations and mining infrastructure projects;

2. Direksi agar membuat program peningkatan penjualan baik dari proyek yang sudah didapat maupun yang akan didapat dan dapat melanjutkan efisiensi biaya, berupaya mengurangi beban keuangan maupun operasional untuk memenuhi target akhir tahun;
3. Agar dapat mengoptimalkan peranan Departemen Manajemen Risiko, mengedukasi ataupun mensosialisasikan hak, kewajiban dan kewenangan pada personil proyek agar dapat melakukan tindakan sesuai kapasitasnya;
4. Menghimbau Direksi untuk mensosialisasikan berbagai sistem yang ada di lingkup Perusahaan hingga ke unit-unit terkecil di semua unsur terkait agar dapat terimplementasikan dengan baik, termasuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham mayoritas, PT PP (Persero) Tbk;
5. Direksi agar melaksanakan rekomendasi hasil validasi pencapaian KPI Triwulanan dan membuat strategi untuk mencapainya sehingga target KPI di akhir tahun dapat dipenuhi; dan
6. Direksi beserta jajarannya harus tetap menjalankan kegiatan operasi dan bisnis sesuai dengan ketentuan dan prinsip GCG.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN DASAR PENILAIANNYA

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan penilaian mandiri melalui mekanisme penilaian internal Perusahaan, untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dari laporan tersebut, Dewan Komisaris melaporkan kepada pemegang saham dalam forum RUPS.

Untuk tahun 2023, penilaian kinerja Direksi mengacu kepada Kontrak Manajemen yang tertuang dalam dokumen RKAP tahun buku 2023 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 27 Desember 2022. Kriteria penilaian mencakup aspek keuangan mencakup beberapa hal seperti EBITDA, ROIC-WACC, *Debt to EBITDA*, dan *Debt to Invested Capital*; aspek pelanggan mencakup *Performance Index* QHSE dan komposisi *revenue from external project*; aspek proses bisnis internal mencakup proyek *On Time On Budget*, *Fatality Rate*, *Equipment Utilization Rate* (EUR), *Free Cash Flow*, dan nilai divestasi; serta aspek *Learning & Growth* mencakup HC *Readiness*, kepatuhan implementasi manajemen risiko, *Success Rate Legal Settlement*, penerapan GCG, implementasi penggunaan ERP, dan tingkat internalisasi budaya Perusahaan.

2. For the Board of Directors to create a program to increase sales from projects that have been obtained and those that will be obtained and can continue cost efficiency, trying to reduce financial and operational expenses to meet year-end targets;
3. To optimize the role of the Risk Management Department, educate or disseminate the rights, obligations, and authorities of project personnel so that they can take action per their capacity;
4. To urge the Board of Directors to disseminate various systems within the Company to the smallest units in all related elements so that they can be implemented properly, including building and maintaining good relations with the majority shareholder, PT PP (Persero) Tbk;
5. For the Board of Directors to implement the recommendations of the validation results of the Quarterly KPI achievements and make strategies to achieve them so that the KPI targets at the end of the year can be met; and
6. The Board of Directors and its staff must continue to carry out operations and business activities per the provisions and principles of GCG.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT ON COMPANY MANAGEMENT AND THE ASSESSMENT BASIS

The Board of Directors' performance is assessed by self-assessment through the Company's internal assessment mechanism, which is then reported to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners then submits the report to the shareholders in the GMS forum.

For 2023, the Board of Directors performance assessment refers to the Management Contract contained in the RKAP document for the 2023 fiscal year, which was approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors on December 27, 2022. The assessment criteria include financial aspects, including EBITDA, ROIC-WACC, Debt to EBITDA, and Debt to Invested Capital; customer aspects, including QHSE Performance Index and composition of revenue from external project; internal business process aspects, including On-Time On-Budget projects, Fatality Rate, Equipment Utilization Rate (EUR), Free Cash Flow, and divestment value; and Learning & Growth aspects, including HC Readiness, compliance with risk management implementation, Legal Settlement Success Rate, GCG implementation, ERP usage implementation, and the level of Corporate culture internalization.

Realisasi Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2023
Board of Directors Performance Assessment Realization in 2023

Dari hasil penilaian yang telah dilakukan, KPI Korporat PPRE menunjukkan skor 2,71 dari skala 4 dengan predikat "Cukup".

Dewan Komisaris mengapresiasi atas realisasi penilaian kinerja Direksi. Demikian pula dengan keberhasilan PPRE dalam mengembangkan bisnisnya pada jasa kontraktor pertambangan. Kenaikan perolehan kontrak baru pada segmen konstruksi khususnya pada jasa kontraktor pertambangan yang tumbuh hingga 48,80% menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam melihat peluang yang ada, dan menciptakan nilai tambah dengan tetap bersandar pada kompetensi inti dan aset yang dimiliki. Dewan Komisaris berharap, Direksi dapat meneruskan berbagai inisiatif yang telah dilakukan di tahun 2023 sebagai basis fondasi bagi kelanjutan perkembangan Perusahaan ke depan.

From the results of the assessment that has been carried out, the PPRE Corporate KPI shows a score of 2.71 out of 4 with a "Fair" predicate.

The Board of Commissioners appreciates the realization of the Board of Directors' performance assessment, including PPRE's success in developing its business in mining contractor services. The increase in the acquisition of new contracts in the construction segment, especially in mining contracting services, which grew by 48.80%, highlights the Company's ability to grasp existing opportunities and create added value while relying on its core competencies and assets. The Board of Commissioners hopes that the Board of Directors can continue the various initiatives carried out in 2023 as a foundation for the Company's continued development in the future.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA TAHUN 2024

Dalam dokumen WEO yang dirilis IMF pada Januari 2024, perekonomian dunia di tahun 2024 diproyeksikan hanya mampu tumbuh sebesar 3,1% dan belum menunjukkan titik baliknya pasca perlambatan ekonomi di tahun 2023. Bertahannya perekonomian Amerika Serikat dan beberapa negara besar lainnya, serta krisis geopolitik yang belum juga menunjukkan hasil yang positif, akan menjadi faktor pembentuk dampak negatif atas perekonomian dunia di tahun 2024. Meskipun di sisi lain, pesatnya pasar negara berkembang, kebijakan fiskal Tiongkok yang menunjukkan arah menuju perbaikan, serta inflasi global yang diperkirakan akan melambat menjadi 5,8%, akan membantu perekonomian dunia menemukan keseimbangannya.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS IN 2024

In the WEO document released by the IMF in January 2024, the world economy in 2024 is projected to only grow by 3.1% and has not yet shown a turning point after the 2023 economic slowdown. The persistence of the United States economy and several other major countries, as well as the geopolitical crisis that has not yet shown positive results, will be factors that negatively impact the world economy in 2024. On the other hand, the rapid growth of emerging markets, China's fiscal policies that are showing improvement, and global inflation that is expected to slow down to 5.8% will assist the world economy in finding its balance.

Tantangan terbesar Pemerintah Indonesia di tahun 2024 adalah mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap pada level yang tangguh, sebagaimana telah terbukti pada saat pandemi COVID-19 hingga akhir tahun 2023. Tantangan ini semakin lebar, terutama karena adanya transisi pemerintahan yang terjadi di tahun 2023 pasca perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilangsungkan pada Februari 2024, dengan target pergantian Presiden Republik Indonesia akan dilakukan pada Oktober 2024. Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, Perusahaan tentu berperan aktif dalam menjaga proses transisi rezim tersebut.

The prevalent challenge for the Government of Indonesia in 2024 is to keep the Indonesian economy at a resilient level, as has been proven during the COVID-19 pandemic until the end of 2023. The challenge is expanded, mainly due to the transition of government in 2023 after the General Election (Pemilu) in February 2024, with the target of succeeding the President of the Republic of Indonesia in October 2024. As part of the Nation, the Company certainly plays an active role in maintaining the regime transition process.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia tentu memiliki harapan besar akan profil perekonomian yang stabil dan tetap kuat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 berada pada angka 5,0% hingga 5,2%. Target perekonomian yang stabil ini tak lepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang kondusif.

Facing these conditions, the Government of Indonesia certainly has high expectations for a stable and solid economic profile. In the Draft State Budget (RAPBN) for the 2024 Fiscal Year, the Government of Indonesia targets national economic growth in 2024 to be at 5.0% to 5.2%. The stable economic target is inseparable from the commitment of the Government of Indonesia to organize simultaneous conducive elections and regional head elections.

Inflasi nasional diharapkan mampu terjaga pada kisaran 2,8% hingga 4%, terutama dengan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Rata-rata nilai tukar Rupiah akan bergerak pada kisaran Rp14.850 hingga 15.000 per Dolar Amerika Serikat, sedangkan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi berada pada level 6,7%. Untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada angka USD80 hingga USD82 per barel.

National inflation is expected to be maintained at 2.8% to 4%, mainly by optimizing the State Budget (APBN) role to mitigate inflationary pressures due to climate change and external fluctuations. The average Rupiah exchange rate will move from Rp14,850 to 15,000 per US Dollar, while the average 10-year Government Securities interest rate is predicted to be 6.7%. The Indonesian crude oil price (ICP) is estimated at USD80 to USD82 per barrel.

Pada sektor ketenagalistrikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan Renstra Kementerian ESDM Republik Indonesia periode 2020-2024 menargetkan infrastruktur KBLBB sebanyak 1.030 unit pada tahun 2024. Hal ini tentu memberikan gambaran tentang keseriusan Pemerintah Indonesia untuk dapat mewujudkan target *roadmap net zero emission* di tahun 2030, yang tentunya menjadi prospek bagi pelaku usaha untuk dapat sesegera mungkin menyelaraskan operasi dan usahanya terhadap dinamika ini.

In the electricity sector, the National Mid-Term Development Plan (RPJMN) for 2020-2024 and the 2020-2024 Strategic Plan of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia target 1,030 KBLBB infrastructure units by 2024. It demonstrates the seriousness of the Government of Indonesia in realizing the net zero emission roadmap target in 2030, which is certainly a prospect for business entities to align their operations and businesses with these dynamics immediately.

Dewan Komisaris menyambut baik dengan proyeksi kinerja Perusahaan tahun 2024 yang telah disusun Direksi dan telah disetujui bersama-sama Dewan Komisaris. RKAP Perusahaan untuk tahun 2024 telah ditandatangani bersama-sama Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 3 Januari 2024. Dewan Komisaris berkomitmen untuk mendukung Direksi dalam mengelola proyeksi kinerja Perusahaan tahun 2024, di mana diproyeksikan nilai kontrak baru dapat meningkat 15-20% dan pendapatan dapat tumbuh di atas 50%. Potensi besar Perusahaan untuk dapat menumbuhkembangkan bisnisnya, terutama di sektor jasa konstruksi pertambangan, sebagai terobosan penting dalam menjaga kelangsungan usahanya hingga masa mendatang.

The Board of Commissioners welcomes the Company's projected performance in 2024, which has been prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners. The 2024 Company RKAP was signed jointly by the Board of Commissioners and the Board of Directors on January 3, 2024. The Board of Commissioners is committed to supporting the Board of Directors in managing the Company's performance projections for 2024, where it is projected that the value of new contracts can increase by 15-20% and revenue can grow by more than 50%. The Company has great potential to grow its business, especially in the mining construction services sector, as an important breakthrough in maintaining business continuity into the future.

PANDANGAN ATAS PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai perusahaan terbuka dengan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari kelompok usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan berkepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip GCG terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Tanggung Jawab), Independensi (Kemandirian) dan *Fairness* (Kewajaran) yang dikenal sebagai TARIF ini menjadi dasar bagi Perusahaan dan seluruh entitas usaha di Indonesia untuk dapat menghadirkan pengelolaan organisasi bisnis yang akuntabel dan *compliance*.

Dewan Komisaris memandang, penerapan prinsip GCG di lingkungan Perusahaan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Direksi dan seluruh jajarannya terus berupaya untuk mengembangkan implementasi prinsip GCG, terutama terhadap kepatuhan atas peraturan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Komisaris meyakini komitmen PP Presisi dalam penerapan GCG dapat memaksimalkan nilai-nilai perusahaan, untuk meningkatkan nilai pemangku kepentingan, meningkatkan kinerja dan daya saing serta meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif.

Keberadaan organ-organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi memberikan bukti bahwa pengelolaan GCG di lingkup Perusahaan berjalan dengan baik. Kerja sama dalam hubungan yang harmonis antara Komite Audit di bawah Dewan Komisaris dan Audit Internal di bawah Direksi menunjukkan adanya keseriusan Perusahaan untuk dapat membentuk proses audit internal yang seimbang dan terukur.

OUTLOOK ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a public company with shares listed on the Indonesia Stock Exchange, as well as part of the State-Owned Enterprises (SOE) business group, the Company has an interest in implementing GCG principles. GCG principles consisting of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness, also known as TARIF, are the basis for the Company and all business entities in Indonesia to present accountable and compliant business organization management.

The Board of Commissioners views that the implementation of GCG principles within the Company continues to improve. The Board of Directors and all of its staff continue to strive to develop the implementation of GCG principles, especially in compliance with applicable regulations of the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority (OJK). The Board of Commissioners believes that PP Presisi's commitment to implementing GCG can maximize corporate values, increase stakeholder value, improve performance and competitiveness, as well as improve a conducive work environment.

The supporting organs that assist the Board of Commissioners and the Board of Directors provide evidence that GCG management within the Company is performing well. The harmonious relationship between the Audit Committee under the Board of Commissioners and Internal Audit under the Board of Directors shows the Company's urgency in establishing a balanced and measurable internal audit process.

Secara khusus, Dewan Komisaris menyambut baik tindak lanjut dan pemenuhan keputusan pemegang saham yang tertuang dalam keputusan pemegang saham dalam 2 (dua) kali forum RUPS yang diselenggarakan masing-masing pada tanggal 23 Februari 2023 dan 24 Mei 2023. Salah satu poin penting dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023 adalah aspirasi pemegang saham agar Perusahaan dapat meratifikasi Peraturan Menteri BUMN No. Per-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, No. Per-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, dan No. Per-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap seluruh keputusan pemegang saham dan terus berupaya melakukan pemantauan atas seluruh keputusan yang telah diambil oleh pemegang saham dalam RUPS.

In particular, the Board of Commissioners welcomed the follow-up and fulfillment of the shareholders' decisions contained in the shareholders' resolutions in two GMS forums held on February 23, 2023, and May 24, 2023. One of the important points in the AGM held on May 24, 2023, was the shareholders' aspiration for the Company to ratify the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, and No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Board of Commissioners appreciates all shareholder decisions and continues to monitor all decisions made by shareholders at the GMS.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasinya atas penilaian penerapan GCG untuk mendapatkan hasil atau *output* tata kelola dan evaluasi atas sejauh apa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di lingkup Perusahaan. Khususnya penilaian yang dilakukan melalui metode yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris menyambut baik atas penilaian terakhir yang dilakukan pada awal tahun 2023 untuk kinerja GCG Perusahaan tahun buku 2022, dengan penilaian dilakukan oleh *assessor* independen, dalam hal ini Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menunjukkan hasil skor 86,822 dengan predikat "Sangat Baik". Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari hasil *Area of Improvement* yang tertuang dalam penilaian penerapan GCG tahun 2022 ini, di mana tindak lanjut ini menjadi bagian penting dari langkah korporasi Perusahaan untuk dapat meningkatkan penerapan GCG untuk dapat mencapai tingkat yang komprehensif.

The Board of Commissioners also appreciates the assessment of GCG implementation to obtain results or output of governance and evaluate the extent to which GCG principles have been applied within the Company. In particular, the assessment is carried out through the method in the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The Board of Commissioners welcomed the latest assessment conducted in early 2023 for the Company's GCG performance in the 2022 fiscal year, with the assessment conducted by an independent assessor, in this case, the Development Finance Comptroller (BPKP) Team, showing a score of 86.822 with the "Excellent" predicate. The Board of Commissioners continues to supervise the follow-up of the results of the Areas of Improvement contained in the assessment of GCG implementation in 2022, where this follow-up is an important part of the Company's corporate steps to improve GCG implementation to reach a comprehensive level.

Sejalan dengan tidak diberlakukannya lagi Surat Sekretaris Kementerian BUMN di atas sesuai Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN RI No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, Dewan Komisaris memberikan arahan agar PP Presisi terus berkoordinasi dengan entitas induk sekaligus pemegang saham mayoritas, PT PP (Persero) Tbk, untuk mendapatkan acuan terbaru dari evaluasi penerapan GCG.

In line with the discontinuation of the above Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs per the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-12/S.MBU/08/2023, dated August 16, 2023, on the Revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises, the Board of Commissioners provides a directive that PP Presisi continues to coordinate with the parent entity as well as and the majority shareholder, PT PP (Persero) Tbk, to obtain the latest reference of the evaluation of GCG implementation.

Catatan penting bagi perkembangan GCG di lingkup Perusahaan adalah pengendalian internal dan pengelolaan risiko sesuai dengan bisnis inti dan penyesuaian terhadap tren pengelolaan risiko dewasa ini. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris telah berupaya untuk mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai salah satu agenda besar terkait perkembangan GCG.

An important note for the GCG development within the Company is internal control and risk management per the core business and adjustments to current risk management trends. The Board of Directors and the Board of Commissioners have endeavored to develop internal control and risk management systems as one of the major agendas related to GCG development.

PANDANGAN ATAS PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) PERUSAHAAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS PERUSAHAAN

Perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG tak lepas dari kemampuan Perusahaan untuk menghadirkan sistem pelaporan pelanggaran yang mandiri dan bebas dari kepentingan manapun. Keberadaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS) memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

Perusahaan telah melengkapi WBS-nya melalui pembentukan Tim Pelaksana Penerapan WBS yang dibentuk secara mandiri sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 11/SK/DIR/PPRE/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Perubahan Tim Pelaksana Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT PP Presisi Tbk. Tim Pelaksana Penerapan WBS berperan menerima seluruh laporan yang masuk melalui WBS Perusahaan dan menindaklanjuti laporan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.

Dalam sistem WBS yang diterapkan di lingkungan Perusahaan, Dewan Komisaris berperan sebagai penanggung jawab pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Komisaris Utama dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang bukan terlapor, jika terlapor anggota Dewan Komisaris. Pelaksanaan telaah atas laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris serta Komite Audit dan apabila diperlukan investigasi akan menggunakan investigator/auditor luar yang independen.

Di sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pelaporan dan/atau pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perusahaan.

OUTLOOK ON THE MANAGEMENT OF THE COMPANY'S WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) AND THE BOARD OF COMMISSIONERS' ROLE IN THE COMPANY'S WBS

The development of the GCG implementation principles is inseparable from the Company's ability to present a whistleblowing system that is independent and free from any interest. The Whistleblowing System (WBS) enables a reporting mechanism that guarantees confidentiality and protection for whistleblowers.

The Company has completed its WBS through the establishment of a WBS Implementation Team formed independently per the Decree of the Board of Directors No. 11/SK/DIR/PPRE/I/2022 dated January 14, 2022, on Changes in the Implementation Team for the Implementation of the Whistleblowing System Policy of PT PP Presisi Tbk. The WBS Implementation Team receives all incoming reports through the Company's WBS and follows up on reports by maintaining the confidentiality of the reporter's identity and the reported party.

In the Company's WBS system, the Board of Commissioners is in charge of implementing the Whistleblowing System. If the Board of Directors commits the violation, the violation report is submitted to the President Commissioner and/or Board of Commissioners Member who is not the reported party if the reported party is a Board of Commissioners member. The review of the violation report is submitted to the Board of Commissioners and the Audit Committee, and if necessary, the investigation will use an independent investigator/auditor.

Throughout 2023, no reports and/or complaints were submitted through the Company's WBS channel.

PENILAIAN ATAS KINERJA ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tak lepas dari peran kinerja organ pendukungnya, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Kepatuhan. Penilaian terhadap kinerja ketiga organ pendukung tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pelaporan yang telah diberikan oleh

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

The implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties is inseparable from the performance of its supporting organs, which consist of the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Compliance Committee. Performance assessment of the three supporting organs is carried out by implementing

masing-masing organ, yang kemudian tertuang dalam *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing organ pendukung.

Di tahun 2023 Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja ketiga organ pendukung Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya organ pendukung tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memandang Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Di sepanjang tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:
   a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Dewan Komisaris dan Komitenya.
   b. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
   c. Memastikan Dewan Komisaris dan organ pendukungnya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan menerapkan prinisp-prinsip GCG.
2. Komite Audit melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat di sepanjang tahun 2023 sebanyak 9 (sembilan) kali, di mana 3 (tiga) kali diantaranya merupakan rapat internal dan 6 (enam) lainnya merupakan rapat gabungan dengan mengundang Komite Kepatuhan. Komite Audit juga mengkaji dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris memiliki referensi yang memadai untuk memberikan pendapat dan saran atas laporan manajemen, hasil temuan unit audit internal dan auditor eksternal, serta usulan Direksi yang memerlukan persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris, seperti rekomendasi Komite Audit atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2023.

   Dari sisi penilaian berbasis kuantitas, Komite Audit mencatatkan capaian KPI hingga 99% dari bobot yang ditargetkan.

3. Komite Kepatuhan telah menyelenggarakan rapat di sepanjang tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kali. Komite Kepatuhan juga melakukan telaahan atas berbagai kepatuhan yang diperlukan oleh manajemen untuk dapat memenuhi regulasi, seperti perkembangan penerapan keberlanjutan, KPI, SMAP, *assessment* GCG, prosedur manajemen aset Perusahaan, proses nominasi hingga pengangkatan Direksi Perusahaan, serta manajemen risiko Perusahaan.

   Dari sisi penilaian berbasis kuantitas, Komite Kepatuhan mencatatkan capaian KPI hingga 99% dari bobot yang ditargetkan.

their duties and functions and the reporting provided by each organ, which is then contained in each supporting organ's Key Performance Indicator (KPI).

In 2023, the Board of Commissioners assessed that the performance of the three supporting organs of the Board of Commissioners has been functioning well and follows the objectives of the establishment of these supporting organs, as follows:

1. The Board of Commissioners considers that the Secretary to the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities to support the Board of Commissioners in carrying out its duties. Throughout 2022, the Secretary to the Board of Commissioners has carried out the following tasks and activities:
   a. Organizing and documenting the Meetings of the Board of Commissioners and its Committees.
   b. Liaison between the BOC and internal and external parties of the Company.
   c. Ensuring that the Board of Commissioners and its supporting organs comply with applicable laws and regulations and implement GCG principles.
2. The Audit Committee performs its duties effectively and has held nine meetings throughout 2023, of which three were internal, and six were joint meetings with the Compliance Committee. The Audit Committee also reviews and provides input to the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners has adequate references to offer opinions and suggestions on management reports, the findings of the internal audit unit and external auditors, as well as proposals from the Board of Directors that require approval or recommendations from the Board of Commissioners, such as the Audit Committee's recommendation for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements for the 2023 fiscal year.

   In terms of quantity-based assessment, the Audit Committee recorded a KPI achievement of 99% of the targeted weight.

3. The Compliance Committee held six meetings throughout 2023. The Compliance Committee also reviewed various compliances required by management to meet regulations, such as the progress of sustainability implementation, KPIs, SMAP, GCG assessment, the Company's asset management procedures, the nomination and appointment process of the Board of Directors, and the Company's risk management.

   In terms of quantity-based assessment, the Compliance Committee recorded KPI achievements of up to 99% of the targeted weight.

Dewan Komisaris memberikan apresiasinya atas seluruh masukan yang telah diberikan organ-organ pendukung untuk menunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners appreciates all inputs the supporting organs provide to support the Board of Commissioners' supervisory duties.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

INFORMATION ON CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

Berdasarkan keputusan pemegang saham yang tertuang dalam RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dengan kronologi yang dapat dilihat di bawah ini.

Based on the shareholder decision in the 2022 Annual GMS dated May 24, 2023, there were changes to the Board of Commissioners composition with the following chronology.

Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2023

Chronology of Changes in the Board of Commissioners Composition in 2023

Periode 1 Januari 2023 s.d 24 Mei 2023 January 1, 2023 to May 24, 2023	**Periode 24 Mei 2023 s.d 31 Desember 2023** May 24, 2023 to December 31, 2023	**Keterangan** Description
Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama) (President Commissioner)		Yul Ari Pramuraharjo diberhentikan dengan hormat dari jabatan Komisaris Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. Pemberhentian beliau dilakukan untuk memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN. Yul Ari Pramuraharjo was honorably dismissed as a President Commissioner since the 2022 Annual GMS on May 24, 2023. His dismissal was to enforce the provisions regarding concurrent positions as stated in the Regulation of the Minister of SOE.
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	**Albert Simangunsong** (Komisaris) (Commissioner)	-
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	**Indra Jaya Rajagukguk** (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	-
Nur Rochmad (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	**Nur Rochmad** (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023, Nur Rochmad diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Independen. Pada kesempatan yang sama, Nur Rochmad diangkat untuk menjabat Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. At the Annual GMS held on May 24, 2023, Nur Rochmad was dismissed from his position as an Independent Commissioner. Simultaneously, Nur Rochmad was appointed as the President Commissioner, concurrently as an Independent Commissioner.
	Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	Muhammad Zahid diangkat untuk menjabat Komisaris sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. Muhammad Zahid was appointed as a Commissioner since the 2022 Annual GMS on May 24, 2023.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Thus, the Board of Commissioners' composition until the end of 2023 is as follows.

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Board of Commissioners Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Service Period
Nur Rochmad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner	• Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. • Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. • Deed of Meeting Resolution Statement No. 41, dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta. • Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.	24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-2 Second
Indra Jaya Rajagukguk	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 18, dated October 19, 2020, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.	8 Oktober 2020 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 October 8, 2020, to the GMS which will be held in 2025	Ke-1 First
Albert Simangunsong	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.	20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 April 20, 2022, to the GMS which will be held in 2027	Ke-1 First
Muhammad Zahid	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 41, dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.	24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-1 First

Tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sejak 31 Desember 2023 hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini per tanggal 23 April 2024.

There are no changes to the composition of the Board of Commissioners from December 31, 2023, until the signing of this annual report on April 23, 2024.

AKHIR KATA

Dewan Komisaris mengajak seluruh insan PP Presisi untuk memanjatkan syukur atas seluruh pencapaian kinerja yang telah ditorehkan Perusahaan di tengah situasi yang masih diliputi tantangan ekonomi dunia. Kepada seluruh pemegang saham dan investor, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam merumuskan berbagai langkah kebijakan yang cukup tepat di tengah tantangan yang ada. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perusahaan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal. Dewan Komisaris sungguh berharap, keberhasilan di tahun 2023 menjadi catatan penting bagi seluruh pihak untuk dapat terus membangun kebersamaan dan merumuskan langkah yang tepat untuk membawa Perusahaan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

CONCLUDING WORDS

The Board of Commissioners invites all PP Presisi personnel to express gratitude for all the performance achievements that the Company has achieved amidst a situation laden with world economic challenges. The Board of Commissioners would like to thank all shareholders and investors for the trust they have given. The Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors for the cooperation and commitment that has been demonstrated in formulating various policy measures that are quite appropriate amidst the existing challenges. The Board of Commissioners also appreciates all Company employees who have provided optimal contributions. The Board of Commissioners truly hopes that success in 2023 will be an important note for all parties to continue to build togetherness and formulate the proper measures to take the Company towards better growth.

Jakarta, 23 April 2024
Jakarta, April 23, 2024

Atas nama Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk
On behalf of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk

Nur Rochmad
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Mewakili Direksi dan seluruh Insan PP Presisi, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja PT PP Presisi Tbk untuk tahun buku 2023. Pencapaian kinerja baik operasi dan bisnis di tahun 2023 memperlihatkan komitmen Perusahaan untuk dapat menumbuhkembangkan bisnisnya dan terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

INISIATIF DAN KEBIJAKAN STRATEGIS SERTA PENCAPAIAN TAHUN 2023

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023 memberikan gambaran langkah antisipatif yang berhasil dilakukan Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merespon tantangan perlambatan perekonomian global yang terjadi. Sebagaimana dikutip dari data BPS, industri nasional secara keseluruhan mampu tumbuh dengan baik meskipun sebagian besar mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Indonesia terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%, diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Directors and all PP Presisi personnel, allow me to present the performance report of PT PP Presisi Tbk for the 2023 fiscal year. The operational and business performance achievement in 2023 shows the Company's commitment to growing its business and providing added value for shareholders and stakeholders.

STRATEGIC INITIATIVES AND POLICIES, ACHIEVEMENTS IN 2023

The condition of the Indonesian economy in 2023 provides an overview of anticipatory measures that have been successfully taken by the Government of Indonesia together with all stakeholders in responding to the challenges of the global economic slowdown that occurred. As quoted from BPS data, the national industry as a whole grew well even though most of it experienced a slowdown compared to the previous year. Regarding production, the highest growth in the Indonesian economy occurred in the Transportation and Warehousing business sector at 13.96%, followed by Other Services at 10.52% and the Accommodation Provision and Food and Beverage at 10.01%. Meanwhile, the Manufacturing Industry, which has

Kapasitas peralatan yang mumpuni, operasi yang unggul, standar kualitas yang baik, serta aspek K3 yang dijunjung tinggi, menjadi keunggulan PP Presisi dalam menghadirkan produk dan layanannya, khususnya dalam memasuki bisnis jasa konstruksi pertambangan.

Qualified equipment capacity, excellent operations, good quality standards, and upheld OHS aspects are the advantages of PP Presisi in presenting its products and services, especially in entering the mining construction service business.

I Gede Upeksa Negara

Direktur Utama
President Director

memiliki peran dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya tumbuh 4,64%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 1,30%, dan Lapangan Usaha Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 4,85%.

Pada sektor pertambangan, sektor ini menjadi komoditas penyumbang devisa negara terutama dengan program Pemerintah Indonesia terkait hilirisasi tambang dalam rangka memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Meningkatnya harga komoditas terutama minyak bumi yang terutama didorong oleh kondisi geopolitik Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina memberikan pengaruh rantai pasok dunia yang menyebabkan peningkatan harga pada sektor energi, memberikan imbas positif devisa negara. Di lain sisi, kenaikan harga minyak tersebut pun menyebabkan kenaikan harga BBM di Indonesia.

Dengan semakin meningkatnya harga minyak bumi dan demi mendukungnya perkembangan sumber energi terbarukan, ekosistem ketenagalistrikan tumbuh dengan cukup baik. Hal ini juga sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk dapat menumbuhkembangkan ketenagalistrikan sebagai alternatif sumber daya energi yang dapat menggantikan ekosistem sumber daya energi berbasis fosil. Hal ini terlihat dari industri ketenagalistrikan, di mana infrastruktur pengisian Kendaraan Bermotor Listrik

a dominant role in the Gross Domestic Product (GDP), only grew by 4.64%; Agriculture, Forestry, Fisheries, as well as Wholesale and Retail Trade grew by 1.30%, while the Car and Motorcycle Repair Business Field grew by 4.85%.

The mining sector is one of the commodities that contributes to the country's foreign exchange, especially with the Government of Indonesia's program for downstream mining to provide added value to Indonesia. The increase in commodity prices, especially oil, mainly driven by the geopolitical conditions of Russia-Ukraine and Israel-Palestine, impacted the world supply chain and led to price increases in the energy sector, thus positively impacting foreign exchange. On the other hand, the rise in oil prices also led to an increase in the price of fuel oil in Indonesia.

With increasing oil prices and supporting the development of renewable energy sources, the electricity ecosystem is developing quite well. It is also in line with the Government of Indonesia's target to develop electricity as an alternative energy resource that can replace the ecosystem of fossil-based energy resources. It is evident from the electricity industry, where the national Battery-Based Electric Motorized Vehicle (KBLBB) charging infrastructure consisting of Public Electric Vehicle Charging Stations

Berbasis Baterai (KBLBB) nasional yang terdiri dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) mencatat kenaikan yang cukup tajam. Perkembangan luar biasa dari ekosistem ketenagalistrikan untuk mendukung sumber daya EBT tentu berdampak positif bagi Indonesia. Nikel, sebagai salah satu komoditas unggulan yang dimiliki Indonesia, menjadi penopang penting dalam pembentukan ekosistem tersebut.

Perusahaan melihat hal ini sebagai peluang dan kesempatan untuk dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya. Setelah di tahun 2019 Perusahaan mulai merambah pekerjaan pembangunan infrastruktur tambang yang ditandai dengan menjadi kontraktor utama pada proyek Jalan Angkut Batubara Kalimantan Tengah-Kalimantan Timur, Perusahaan terus berupaya melakukan transformasi lini bisnis untuk dapat mempertajam fokus bisnisnya. Di tahun 2021, Perusahaan ditunjuk sebagai kontraktor tambang nikel pada Proyek Weda Bay sebagai salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia yang berlokasi di Halmahera. Di tahun yang sama, Perusahaan juga memperoleh kontrak baru untuk pekerjaan jasa pertambangan nikel pada Proyek Morowali, Sulawesi Tengah.

Penajaman fokus pada bisnis jasa pertambangan tentu tidak dilakukan hanya karena adanya peluang dan kesempatan. Berbekal peralatan berat yang dimiliki Perusahaan, yang disertai juga dengan pengalaman Perusahaan pada berbagai proyek infrastruktur dan konstruksi nasional berskala besar, tentu menjadi modal utama dalam keputusan untuk memperkuat bisnis jasa pertambangan tersebut. Nikel menjadi produk penting, di mana penambangan produk nikel memiliki basis peralatan yang lebih kurang sama dengan aset yang dimiliki oleh Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2023, proyek yang dikerjakan Perusahaan pada proyek *mining services* meliputi:

1. *Hauling Roads Upgrade* Weda Bay *Nickel;*
2. *Secondary Hauling* Weda Bay *Nickel;*
3. *Mining Development* Weda Bay *Nickel;*
4. *Hauling Road Upgrade* Heng Jaya;
5. *Mining Haul Road and Bridge from* Kao Rahai *to* Tofu Weda Bay Nickel;
6. Pembangunan Jembatan Makarti, Morowali;
7. *Camp Sonic Bay* Weda Bay *Project;*
8. *Mines of* Bahadopi *Block 2 and 3 Project Above Ground and Infrastructure;*
9. *Quarry Development* PT Vale Indonesia; dan
10. *Mining Development and Operation* Weda Bay *Nickel*.

Sementara itu, pasar Perusahaan yang telah digeluti sebelumnya masih menjadi domain penting yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi Perusahaan. Secara umum, Perusahaan terus berkomitmen untuk mendukung proyek konstruksi yang dilakukan oleh entitas induk, PT PP (Persero) Tbk. Dukungan ini tercermin dari pasokan aset peralatan berat dari Perusahaan atas

(SPKLU) and Public Electric Vehicle Battery Exchange Stations (SPBKLU) recorded a sharp increase. The remarkable development of the electricity ecosystem to support renewable resources positively impacts Indonesia. As one of Indonesia's leading commodities, Nickel is an essential pillar in forming such an ecosystem.

The Company views this as an opportunity to increase its business capacity. After the Company began to venture into mining infrastructure development work in 2019, marked by becoming the main contractor for the Central Kalimantan-East Kalimantan Coal Transport Road project, the Company continues to strive to transform its business lines to sharpen its business focus. In 2021, the Company was appointed as a nickel mining contractor at the Weda Bay Project as one of the largest nickel mines in Indonesia in Halmahera. The same year, the Company also obtained a new contract for nickel mining services at the Morowali Project, Central Sulawesi.

The sharpening focus on the mining services business is certainly not done only because of opportunities and opportunities. The Company's heavy equipment and experience in various large-scale national infrastructure and construction projects are undoubtedly significant assets in the decision to strengthen the mining services business. Nickel is an essential product, where the mining of nickel products has more or less the same equipment base as the assets owned by the Company.

Until the end of 2023, the Company's projects in mining services include:

1. Weda Bay Nickel Hauling Roads Upgrade;
2. Weda Bay Nickel Secondary Hauling;
3. Weda Bay Nickel Mining Development;
4. Heng Jaya Hauling Road Upgrade;
5. Mining Haul Road and Bridge from Kao Rahai to Tofu Weda Bay Nickel;
6. Makarti Bridge Construction in Morowali;
7. Weda Bay Project Camp Sonic Bay;
8. Above Ground and Infrastructure Project for Mines of Bahadopi Block 2 and 3;
9. PT Vale Indonesia Quarry Development; and
10. Weda Bay Nickel Mining Development and Operation.

Meanwhile, the Company's existing markets remain an important domain that is expected to be a source of revenue for the Company. In general, the Company continues to be committed to supporting construction projects carried out by the parent entity, PT PP (Persero) Tbk. The support is reflected in the Company's supply of heavy equipment assets for various infrastructure projects owned by PTPP,

berbagai proyek infrastruktur yang dimiliki PTPP, seperti proyek pembangunan Ibukota Nusantara dan berbagai proyek lainnya.

such as the Nusantara Capital City construction project and various other projects.

Untuk pekerjaan pada proyek konstruksi gedung, Perusahaan memutuskan untuk menghentikan dukungannya. Salah satu pendekatan penting dari keputusan ini adalah risiko yang cukup besar pada sektor konstruksi gedung. Pemeliharaan aset peralatan yang cukup spesifik untuk konstruksi gedung, yang tidak diimbangi dengan margin yang cukup, menjadi pertimbangan penting untuk menghentikan dukungan Perusahaan atas sektor ini.

For work on building construction projects, the Company decided to halt its support. One of the important approaches to this decision is the considerable risk in the building construction sector. Maintaining equipment assets specific to building construction, not offset by sufficient margins, is an important consideration to end the Company's support for this sector.

Aspek permodalan juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan Perusahaan. Hingga akhir tahun 2023, permodalan Perusahaan mengalami penguatan yang cukup positif. Hal ini terlihat dari rasio utang berbunga terhadap ekuitas yang membaik, dari sebelumnya 61,52% menjadi 51,70%. Hal ini tak lepas dari menurunnya jumlah pinjaman berbunga bersih sejalan juga dengan penguatan saldo ekuitas Perusahaan.

The capital aspect is also an important factor in the Company management. Until the end of 2023, the Company's capital has strengthened positively. This is evident from the improved interest-bearing debt-to-equity ratio, which has increased from 61.52% to 51.70%. It was attributable to the decline in net interest-bearing loans and the strengthening of the Company's equity balance.

Dengan keberhasilan dalam memperkuat fokus bisnisnya, di tahun 2023 Perusahaan mampu membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp6,75 triliun, tumbuh 28,72% atau setara Rp1,51 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,24 triliun. Nilai perolehan kontrak baru yang didapatkan Perusahaan di tahun 2023 terutama didapatkan dari jasa kontrak pertambangan yang tumbuh hingga 48,80% dari tahun sebelumnya, dan berkontribusi hingga 65,95% terhadap keseluruhan nilai perolehan kontrak baru yang didapatkan Perusahaan di tahun 2023.

With the success in strengthening its business focus, the Company was able to book new contract acquisitions in 2023 of Rp6.75 trillion, growing 28.72% or equivalent to Rp1.51 trillion compared to the previous year of Rp5.24 trillion. The value of new contracts acquired by the Company in 2023 was mainly obtained from mining contract services, which grew by 48.80% from the previous year and contributed up to 65.95% of the total value of new contracts acquired by the Company in 2023.

Di sisi lain, Perusahaan mencatat pendapatan sebesar Rp3,40 triliun, dan laba bersih sebesar Rp172,78 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan ini merupakan dampak dari mundurnya perolehan kontrak baru dari target yang ditentukan, sehingga Perusahaan belum dapat mencatatkan pendapatan secara maksimal. Meskipun mengalami penurunan, keberhasilan PP Presisi dalam melakukan transformasi bisnis cukup berhasil di mana hal ini terlihat dari perolehan nilai kontrak baru untuk segmen Konstruksi yang merupakan lini bisnis utama yang terdiri dari *mining services* dan *civil work* yang meningkat, terutama dari *mining services* jasa pertambangan yang tumbuh sebesar 48,80%, dari Rp2,99 triliun di tahun 2022 menjadi Rp4,45 triliun di tahun 2023. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis PP Presisi di masa mendatang.

On the other hand, the Company recorded revenue of Rp3.40 trillion and net profit of Rp172.78 billion, a decrease compared to the previous year. The decline in revenue resulted from the delay in acquiring new contracts from the specified target; hence, the Company has not been able to record maximum revenue. Despite the decline, PP Presisi's success in carrying out business transformation was quite successful, which is evident from the acquisition of new contract values for the Construction segment, the main business line consisting of mining services and civil work. The segment grew, especially from mining services, which grew by 48.80%, from Rp2.99 trillion in 2022 to Rp4.45 trillion in 2023. The success is expected to be the foundation for PP Presisi's business development in the future.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN PROSES IMPLEMENTASI STRATEGI

THE BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN STRATEGY FORMULATION AND STRATEGY IMPLEMENTATION PROCESSES

Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dirumuskan dalam rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh

The Company's strategic strategies and policies are formulated in the work plan and budget prepared by

Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Proses penyusunan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang menjadi acuan target-target Perusahaan, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI) Unit masing-masing Divisi/ Biro yang akan diturunkan sampai dengan *Performance Appraisal*. Setelahnya akan diselenggarakan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas lebih lanjut dan menyetujuinya.

Direksi bersama jajaran manajemen, melalui masukan dari Dewan Komisaris, terus melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kebijakan Perusahaan serta implementasinya di seluruh level organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan Perusahaan masih relevan dengan perkembangan bisnis dan penerapannya telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target Perusahaan. Direksi berperan aktif untuk memastikan bahwa seluruh level organisasi memahami serta menerapkan strategi Perusahaan secara konsisten pada masing-masing unit bisnis. Untuk itu, Direksi terlibat langsung dalam pengawasan implementasi strategi serta memastikan bahwa seluruh bagian organisasi memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide-ide dan inovasi yang dapat mendukung tercapainya tujuan Perusahaan.

Pertumbuhan kontrak baru Perusahaan difokuskan pada jasa pertambangan, serta pada jasa konstruksi sipil. Melalui 2 (dua) fokus lini bisnis tersebut, Perusahaan melakukan peningkatan posisi dengan menjadi kontraktor utama melalui perolehan kontrak-kontrak baru jasa pertambangan sedangkan untuk konstruksi sipil Perusahaan akan tetap bersinergi dengan PTPP.

Untuk dapat memenangkan persaingan di pasar jasa pertambangan dan sipil, Perusahaan melakukan penerapan *cost leadership* melalui efisiensi biaya produksi, penggunaan material yang efisien, serta menerapkan sistem kerjasama strategis bagi pengadaan *sparepart* dan perawatan maupun perbaikan alat (*Full Maintenance Contract* atau FMC). Perusahaan juga melakukan upaya dalam pemenuhan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang jasa pertambangan khususnya *project operation manager*, mekanik dan operator. Selain itu, dalam melakukan efisiensi perusahaan melakukan kontrak payung untuk mengikat harga material dan solar dengan harga yang lebih murah. Pada bidang jasa pertambangan, Perusahaan juga menerapkan *rise and fall* untuk menjaga stabilitas fluktuasi kurs dan solar maupun melakukan kontrak jasa pekerjaan di luar biaya material dan solar dalam bentuk Kontrak Payung.

Di sisi *Capital Expenditure* (CapEx), Perusahaan mengoptimalkan utilisasi alat berat yang dimiliki untuk digunakan pada jasa pertambangan nikel. Hal tersebut juga menjadi upaya Perusahaan untuk memitigasi risiko pada sektor konstruksi agar aset Perusahaan dapat terus

the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners in a Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The process of formulating the Company's strategic strategies and policies is outlined in the form of the Work Plan and Budget (RKAP), which serves as a reference for the Company's targets, to be then outlined in the form of Key Performance Indicators (KPI) for each Division/Bureau Unit which will be derived up to the Performance Appraisal. Afterward, a Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors will be held to discuss and approve it further.

The Board of Directors and management, with input from the Board of Commissioners, continue to periodically evaluate the Company's strategies and policies and their implementation at all levels of the organization. It is done to ensure that the Company's strategies and policies are still relevant to business developments and that their implementation aligns with the Company's goals and targets. The Board of Directors plays an active role in ensuring that all levels of the organization understand and implement the Company's strategy consistently in each business unit. To that end, the Board of Directors is directly involved in overseeing the strategy implementation and ensuring that all parts of the organization have equal opportunities to convey ideas and innovations that can support the achievement of the Company's goals.

The Company's new contract growth is focused on mining services, as well as on civil construction services. Through the two)focused business lines, the Company is improving its position by becoming the main contractor by acquiring new mining services contracts. Meanwhile, the Company will continue to synergize with PTPP for civil construction.

To win the competition in the mining and civil services market, the Company implements cost leadership through production cost efficiency, efficient use of materials, and implementation of a strategic cooperation system for the procurement of spare parts and maintenance and repair of equipment (Full Maintenance Contract–FMC). The Company also made efforts to fulfill competent human resources in mining services, especially project operation managers, mechanics, and operators. In addition, the Company conducts umbrella contracts to bind material and diesel prices at lower prices to improve efficiency. In the mining services, the Company also applies rise and fall to maintain the stability of exchange rates and diesel fuel fluctuations, as well as contracting work services outside the cost of materials and diesel fuel in the form of Umbrella Contracts.

On the Capital Expenditure (CapEx) side, the Company optimized using owned heavy equipment for nickel mining services. This is also the Company's effort to mitigate risks in the construction sector so that the Company's assets can continue to generate margins for the Company's

menghasilkan margin bagi keberlanjutan Perusahaan dengan perolehan kontrak yang lebih panjang.

sustainability by obtaining longer contracts.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023

Jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RKAP tahun 2023, realisasi kinerja operasi dan bisnis Perusahaan relatif menunjukkan bahwa Perusahaan masih berada di jalur yang tepat. Meskipun Pendapatan dan laba bersih menunjukan masih belum mencapai target namun Perusahaan dapat menurunkan beban dengan penerapan program *cost leadership* yang dijalankan serta penerapan optimalisasi alat untuk memaksimalkan produksi sehingga *gross profit margin* meningkat pada angka 17,45% di tahun 2023.

Perusahaan juga berupaya menjaga EBITDA tetap berada pada angka positif di tengah tantangan yang harus dihadapi. Dengan mundurnya beberapa proyek yang sebelumnya diharapkan akan didapatkan pada triwulan I 2023 namun terealisasi menjadi triwulan IV 2023, hal ini menyebabkan Perusahaan belum dapat mencatatkan pendapatan di tahun 2023.

THE 2023 TARGET ACHIEVEMENTS

When compared with the targets stated in the 2023 RKAP, the realization of the Company's operational and business performance relatively shows that the Company is still on the right track. Although revenue and net profit show they have not reached the target, the Company can reduce expenses by implementing the cost leadership program and equipment optimization to maximize production and increase the gross profit margin by 17.45% in 2023.

The Company also attempted to manage EBITDA at a positive number amidst the challenges it has to face. The postponement of several projects previously expected to be obtained in the first quarter of 2023 but were realized in the fourth quarter of 2023 has resulted in the Company not recording revenue in 2023.

KENDALA, TANTANGAN, DAN SOLUSINYA

Secara umum, PP Presisi menemukan sejumlah tantangan dalam pengelolaan operasi dan bisnis yang dilakukan. Beberapa hal yang patut diperhitungkan dalam perspektif umum seperti kenaikan BBM dan bahan material lainnya, pengalihan biaya infrastruktur dalam APBN untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang berimbas pada berkurangnya nilai kontrak pekerjaan yang tersedia, hingga faktor cuaca yang dapat mempengaruhi pencapaian produktivitas operasi. PP Presisi mampu merumuskan langkah antisipatif untuk memitigasi hal-hal tersebut, baik upaya mengikat harga dengan pihak ketiga melalui kontrak payung untuk dapat menghindari kenaikan biaya akibat tingginya harga material, percepatan proses produksi ketika cuaca panas, maupun transformasi bisnis dan upaya mencari peluang pada sektor jasa pertambangan untuk dapat menjawab kendala berkurangnya nilai kontrak pekerjaan yang tersedia.

Secara khusus, pada langkah transformasi bisnis pada sektor jasa pertambangan, berbagai faktor internal menjadi tantangan bagi PP Presisi dalam peralihan bisnis yang dilakukan Perusahaan. Terutama dalam proses mengawal bisnis tersebut untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, khususnya dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan investor.

Tantangan terbesar muncul dari berbagai penyesuaian proses bisnis dari jasa pertambangan, khususnya pola kerja pada pekerjaan sipil ke pekerjaan jasa pertambangan. Di sisi lain, dengan karakteristik *grade control* atau kontrol kualitas yang diperlukan dalam proses penambangan nikel, hal ini tentu membutuhkan sejumlah penyesuaian.

OBSTACLES, CHALLENGES, AND SOLUTIONS

In general, PP Presisi encountered several challenges in managing its operations and business. Some things that should be considered from a general perspective, such as the increase in fuel and other materials, the transfer of infrastructure costs in the state budget to cope with the COVID-19 pandemic impact on the reduced value of available work contracts, and weather factors that can affect the achievement of operating productivity. PP Presisi was able to formulate preemptive measures to mitigate these matters, e.g., efforts to bind prices with third parties through umbrella contracts to be able to avoid cost increases due to high material prices, accelerating the production process during hot weather, as well as business transformation and efforts to seek opportunities in the mining services sector to answer the constraints of the reduced value of available work contracts.

In particular, in the business transformation measure in the mining services sector, various internal factors are a challenge for PP Presisi in the business transition carried out by the Company, especially in the business overseeing process to achieve the expected results, especially in providing added value for shareholders and investors.

The most significant challenge arises from the various business process adjustments from mining services, especially the work patterns in civil works and mining services. On the other hand, the characteristics or quality control required in the nickel mining process certainly require several adjustments.

Keberadaan tenaga profesional yang direkrut untuk proses *grade control* menjadi salah satu penyesuaian besar yang dilakukan Perusahaan. Berkembangnya industri pertambangan nikel nasional tentunya menciptakan daya saing tersendiri bagi para pelaku usaha, khususnya para penambang, untuk mendapatkan tenaga profesional yang berkualitas. Tak hanya itu, Perusahaan juga mengedepankan integritas dalam proses rekrutmen tenaga ahli, agar visi dan misi serta budaya korporasi tetap dapat menjadi prinsip utama dalam seluruh cakupan kegiatan yang dilakukan, termasuk operasi di lapangan.

The professionals recruited for the process are one of the major adjustments made by the Company. The development of the national nickel mining industry certainly creates its own competitiveness for business actors, especially miners, to get qualified professionals. Moreover, the Company prioritizes integrity in recruiting experts so that the vision, mission, and corporate culture remain the main principles in the entire scope of activities, including field operations.

Adanya sejumlah kesamaan antara aset peralatan yang dimiliki Perusahaan dengan kebutuhan dalam jasa pertambangan tentu menjadi hal positif bagi Perusahaan untuk mengembangkan operasinya di sektor ini.

The similarities between the Company's equipment assets and the need for mining services are certainly positive things for the Company in developing its operations in this sector.

Di samping itu, penyesuaian yang dilakukan tentunya membutuhkan proses dan energi yang tidak sedikit. Seperti membelokkan kapal bermuatan besar, dibutuhkan komitmen seluruh Insan PP Presisi untuk dapat melakukan penyesuaian atas proses yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan, baik dari sisi penyesuaian struktur organisasi, arahan manajemen kepada seluruh karyawan, pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kompetensi, hingga alur proses operasi dan bisnis yang mampu beradaptasi cepat atas perubahan yang terjadi.

In addition, the adjustments require a lot of process and energy. Like turning a large ship, it takes the commitment of all PP Presisi personnel to make adjustments to the occurring process. Various efforts have been made regarding organizational structure adjustments, management direction to all employees, training and education for competency development, and the flow of operations and business processes that can adapt quickly to the changes.

PROSPEK USAHA TAHUN 2024

Optimisme Indonesia untuk tumbuh dengan cukup baik di tahun 2024 menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan. Terutama dengan gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024, transisi rezim tentunya akan memberikan gairah tersendiri bagi industri dan pelaku usaha. Di sisi lain, konsumsi pemerintah dan masyarakat atas pesta demokrasi tentunya akan menciptakan nilai tambah bagi pembentukan PDB nasional.

BUSINESS PROSPECTS FOR 2024

Indonesia's optimism to grow well in 2024 is an important foundation for the success of the Nation in responding to challenges. The regime transition will excite industries and businesses, particularly with the 2024 General Elections (Pemilu) and Regional Elections (Pilkada). On the other hand, government and public consumption of democratic parties will certainly create added value for the national GDP.

Di tahun 2024, Perusahaan memproyeksikan mampu meningkatkan nilai kontrak baru hingga 15-20% dan pendapatan di atas 50%. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perusahaan akan terus melanjutkan fokus pada 2 (dua) lini bisnis utamanya, jasa pertambangan dan sipil. Untuk jasa pertambangan, Perusahaan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup jasa pertambangan, mulai dari pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan pertambangan, perbaikan infrastruktur, peningkatan infrastruktur hingga kegiatan utama jasa pertambangan mencakup pekerjaan *Mining Operation* sampai *Secondary Ore hauling*. Perusahaan juga akan melakukan optimalisasi operasional bisnis tambang serta kinerja peralatan melalui pengembangan sistem tersentralisasi yaitu SIMAP, yang didukung dengan melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi *key personil* di lini bisnis tambang.

In 2024, the Company projects that it will be able to increase the value of new contracts by up to 15-20% and revenue by more than 50%. To achieve these goals, the Company will continue to focus on its two main business lines, i.e., mining and civil services. For mining services, the Company will provide integrated services in the entire scope of mining services, starting from the construction of main and supporting infrastructure for mining activities, infrastructure repair, infrastructure improvement, to the main mining services activities, including Mining Operation work to Secondary Ore hauling. The Company will also optimize mining business operations and equipment performance by developing a centralized system (SIMAP), supported by fulfilling and improving key personnel's competence in the mining business line.

Pada lini bisnis jasa konstruksi sipil, Perusahaan akan berupaya meningkatkan kinerja, peningkatan kapabilitas operasional dan juga *project management* serta berupaya dalam melakukan percepatan peningkatan pengelolaan investasi dan divestasi alat berat. Fokus Perusahaan di sektor jasa konstruksi sipil dikembangkan untuk menyokong proyek dari kelompok usaha PTPP sehingga untuk proyek eksternal akan lebih diprioritaskan untuk lini bisnis jasa pertambangan. Adapun sasaran segmentasi pasar Perusahaan akan berfokus pada proyek kelompok usaha PTPP untuk lini bisnis konstruksi, sedangkan untuk proyek jasa pertambangan akan berfokus pada pasar swasta baik secara berkesinambungan maupun potensi-potensi jasa pertambangan mineral lainnya.

In the civil construction services business line, the Company will strive to improve performance, operational capabilities, and project management, as well as accelerate investment management and divestment of heavy equipment. The Company's focus in the civil construction services sector is developed to support the PTPP business group projects so that external projects will be prioritized for the mining services business line. The Company's market segmentation target will focus on PTPP group projects for the construction business line. In contrast, the mining services projects will focus on the private market on an ongoing basis and other potential mineral mining services.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai perusahaan terbuka sekaligus sebagai bagian dari kelompok usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Struktur GCG Perusahaan telah dikembangkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan proses atau mekanisme GCG sebagai aturan main yang memberikan definisi secara jelas tentang tugas, peran dan fungsi masing-masing organ dalam struktur GCG. Manajemen telah mengupayakan seluruh kelengkapan organ, khususnya pada organ yang mendukung Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, yang berperan aktif dalam menjalankan fungsi kepatuhan, keterbukaan, dan audit internal di lingkup Perusahaan.

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a public company and part of a State-Owned Enterprises (BUMN) group, the Company is required to carry out business management in compliance with applicable laws and regulations. The Company's GCG structure has been developed per the prevailing laws and regulations. Similarly, the GCG process or mechanism is the rule that provides a clear definition of the duties, roles, and functions of each organ in the GCG structure. Management has strived for the completeness of all organs, especially those that support the Board of Directors, i.e., the Corporate Secretary and Internal Audit, which play an active role in carrying out compliance, disclosure, and internal audit functions within the Company.

Pemenuhan aspirasi pemegang saham juga menjadi hal penting dalam pengelolaan GCG yang sesuai dengan praktik terbaik. Hal ini diwujudkan oleh manajemen melalui tindak lanjut atas hasil keputusan pemegang saham yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di sepanjang tahun 2023, terdapat 2 (dua) kali penyelenggaraan RUPS di mana seluruh keputusan pemegang saham telah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen.

Fulfilling the aspirations of shareholders is also essential in managing GCG following best practices. This is realized by management through follow-up on the results of shareholder resolutions contained in the General Meeting of Shareholders (GMS). Throughout 2023, there were two GMSs in which all shareholder decisions were properly implemented by management.

Melanjutkan proses di tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan juga melaksanakan penilaian penerapan GCG untuk mendapatkan hasil atau *output* dan evaluasi atas sejauh apa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di lingkup Perusahaan. Penilaian dilakukan melalui metode yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Penilaian terakhir dilakukan pada awal tahun 2023 untuk kinerja GCG Perusahaan tahun buku 2022, dengan penilaian dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil penilaian menunjukkan 86,822 dengan predikat "Sangat

Continuing the process in previous years, the Company also assessed GCG implementation to obtain results or output and evaluate the extent to which GCG principles have been implemented within the Company. The assessment is carried out using the method in the Letter of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The last assessment was carried out in early 2023 for the Company's GCG performance in the 2022 fiscal year, with the assessment conducted by the Development Finance Comptroller (BPKP). The assessment result was 86.822 with an "Excellent" predicate. Meanwhile, the 2023 fiscal year assessment

Baik". Sedangkan untuk penilaian tahun buku 2023 tidak dilakukan sejalan dengan tidak diberlakukannya lagi Surat Sekretaris Kementerian BUMN di atas, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari entitas induk sekaligus pemegang saham mayoritas, PT PP (Persero) Tbk.

Tidak hanya itu, evaluasi penerapan GCG Perusahaan juga dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan lampirannya. Evaluasi atas Surat Edaran OJK ini merupakan standar penerapan GCG yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus diterapkan Perusahaan. Dari evaluasi yang dilakukan, Perusahaan akan mendapatkan beberapa hal terkait evaluasi untuk peningkatan dan penguatan penerapan GCG di masa mendatang.

Fondasi terpenting dalam pelaksanaan prinsip GCG adalah penerapan kode etik sebagai etika bisnis yang berlandaskan pada nilai integritas. Manajemen menempatkan nilai-nilai budaya korporasi sebagai salah satu landasan bagi pembentukan etika bisnis yang akan menciptakan pengelolaan operasi dan bisnis berbasis akuntabilitas. Melalui integritas, implementasi etika bisnis akan memiliki dasar yang kuat, yang akan menjadi modal bagi Perusahaan untuk tumbuh lebih baik di masa-masa mendatang.

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN RISIKO DAN INISIATIF KEBERLANJUTAN, SERTA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perusahaan mengembangkan strategi keberlanjutan tak lepas dari bisnis inti yang dikembangkan. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa risiko-risiko material di luar risiko usaha dan risiko korporasi yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap aspek keberlanjutan Perusahaan, diantaranya adalah risiko kecelakaan kerja, risiko konflik sosial dengan masyarakat, dan pencemaran lingkungan. Strategi dan inisiatif yang dilakukan Perusahaan tak lepas dari upaya mengembangkan operasi dan bisnis yang berkelanjutan, di mana risiko-risiko tersebut menjadi fokus penting yang dikembangkan secara berkesinambungan.

Salah satunya adalah kesadaran Insan PP Presisi dan seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan berbagai proyek jasa pertambangan maupun konstruksi sipil, manajemen menerapkan prosedur tetap dan kontrol terkait K3 yang cukup ketat. Berbagai inisiatif juga dilakukan untuk mendukung terus tumbuhnya kesadaran seluruh Insan PP Presisi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai nilai dan rantai pasokan Perusahaan.

was not carried out in line with the non-enforcement of the Letter of the Secretary of the Ministry of SOE above while waiting for further directives from the parent entity and the majority shareholder, PT PP (Persero) Tbk.

Furthermore, the Company's GCG implementation was evaluated based on OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for the Governance of Public Companies and its attachments. The evaluation of the OJK Circular Letter is a standard of GCG implementation covering five aspects, eight principles, and 25 recommendations for implementing GCG aspects and principles that the Company must implement. From the evaluation, the Company would get several matters related to the evaluation to improve and strengthen the future GCG implementation.

The most important foundation in implementing GCG principles is implementing a code of ethics as a business ethic based on the value of integrity. Management places the values of corporate culture as one of the foundations for establishing business ethics that will create accountability-based business and operations management. Through integrity, the implementation of business ethics will have a strong foundation, which will be an asset for the Company to grow better in the future.

DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY INITIATIVES, AS WELL AS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

The Company develops sustainability strategies that are inseparable from the core business it develops. Based on the identification that has been carried out, there are several material risks outside of business risks and corporate risks that have the potential to have an impact on the Company's sustainability aspects, including the risk of work accidents, the risk of social conflict with the community, and environmental pollution. The strategies and initiatives carried out by the Company are inseparable from efforts to develop sustainable operations and business, where these risks become an important focus that is developed continuously.

One is the awareness of PP Presisi personnel and all stakeholders of the importance of Occupational Safety and Health (OHS). With various mining services and civil construction projects, management implements fixed and strict procedures and controls related to OHS. Multiple initiatives are also carried out to support the continued growth of awareness of all PP Presisi personnel and stakeholders involved in the Company's value chain and supply chain.

Risiko konflik sosial dengan masyarakat dan pencemaran lingkungan juga menjadi bagian penting dari pemetaan risiko keberlanjutan yang dilakukan Perusahaan. Adanya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjadi salah satu kunci penting untuk dapat menjawab potensi risiko yang mungkin muncul dari operasi dan bisnis yang dikembangkan Perusahaan.

The risk of social conflict with the community and environmental pollution is also an essential part of the sustainability risk mapping carried out by the Company. The Social and Environmental Responsibility programs are also mandated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. It is one of the critical keys to answering potential risks that may arise from operations and businesses developed by the Company.

Sebagaimana telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023 Perusahaan juga menyusun Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Melalui publikasi Laporan Keberlanjutan tersebut, Perusahaan berharap dapat menyampaikan dengan cukup komprehensif tentang strategi dan berbagai upaya inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan, khususnya dampak yang mampu dikelola atas seluruh upaya yang telah dilakukan.

As has been done in previous years, the Company also prepared a Sustainability Report in 2023 as an integral document of this Annual Report. Through the publication of the Sustainability Report, the Company hopes to convey the strategies and various sustainability initiatives that have been carried out reasonably comprehensively, especially the impacts that can be managed for all the efforts that have been carried out.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Berdasarkan keputusan pemegang saham yang tertuang dalam RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023 dan RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023, terdapat perubahan susunan Direksi dengan kronologi yang dapat dilihat di bawah ini.

INFORMATION ON CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

Based on the shareholders' resolutions contained in the Extraordinary GMS on February 23, 2023, and the 2022 Annual GMS on May 24, 2023, there are changes in the Board of Directors composition with the following chronology.

Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2023
Chronology of Changes in the Board of Directors Composition in 2023

Periode 1 Januari s.d 23 Februari 2023 January 1 to February 23, 2023	**Periode 23 Februari s.d 24 Mei 2023** February 23 to May 24, 2023	**Periode 24 Mei s.d 31 Desember 2023** May 24 to December 31, 2023	**Keterangan** Description
Rully Noviandar (Direktur Utama) (President Director)	**Rully Noviandar** (Direktur Utama) (President Director)		Rully Noviandar diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. Oleh Pemegang Saham, beliau ditugaskan di tempat yang lain. Rully Noviandar was honorably dismissed as the President Director as of the 2022 Annual GMS dated May 24, 2023. By Shareholders, he was assigned to a different location.
M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	**M Arif Iswahyudi** (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	**M Arif Iswahyudi** (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	-
M Darwis Hamzah (Direktur Operasi) (Director of Operations)			M Darwis Hamzah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Operasi sejak RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023. Oleh Pemegang Saham, beliau ditugaskan di tempat yang lain. M. Darwis Hamzah was honorably dismissed as the Director of Operations as of the Extraordinary GMS dated February 23, 2023. By Shareholders, he was assigned to a different location.

Periode 1 Januari s.d 23 Februari 2023 January 1 to February 23, 2023	**Periode 23 Februari s.d 24 Mei 2023** February 23 to May 24, 2023	**Periode 24 Mei s.d 31 Desember 2023** May 24 to December 31, 2023	**Keterangan** Description
Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	**Rebimun** (Direktur Operasi) (Director of Operations)	**Rebimun** (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Pada RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2023, Rebimun diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM. Pada kesempatan yang sama, Rebimun diangkat untuk menjabat Direktur Operasi. In the Extraordinary GMS held on February 23, 2023, Rebimun was dismissed as the Director of Business Planning and HCM. Simultaneously, Rebimun was appointed as the Director of Operations.
	Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	**Yudi Setiawan** (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	Yudi Setiawan diangkat untuk menjabat Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM sejak RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023. Yudi Setiawan was appointed as the Director of Business Planning and HCM as of the Extraordinary GMS dated February 23, 2023.
		I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) (President Director)	I Gede Upeksa diangkat untuk menjabat Direktur Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. I Gede Upeksa was appointed as the President Director as of the 2022 Annual GMS dated May 24, 2023.

Dengan demikian, susunan Direksi hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Thus, the composition of the Board of Directors until the end of 2023 is as follows.

Susunan Direksi Perusahaan
Board of Directors Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Service Period
I Gede Upeksa Negara	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Deed of Meeting Resolution Statement No. 40, dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta.	24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-1 First
Mohammad Arif Iswahyudi	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal Director of Finance, Risk Management, and Legal	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta.	20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 April 20, 2022, to the GMS which will be held in 2027	Ke-1 First
Rebimun	Direktur Operasi Director of Operations	• Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. • Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. • Deed of Meeting Resolution Statement No. 14, dated February 23, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta. • Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta.	23 Februari 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 February 23, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-2 Second

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
Yudi Setiawan	Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM Director of Business Planning and HCM	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Deed of Meeting Resolution Statement No. 14, dated February 23, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta.	23 Februari 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 February 23, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-1 First

Tidak terdapat perubahan susunan Direksi sejak 31 Desember 2023 hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini per tanggal 23 April 2024.

There has been no change in the Board of Directors composition since December 31, 2023, until the signing of this annual report as on April 23, 2024.

APRESIASI DAN OPTIMISME

Izinkan Direksi menyampaikan ucap syukur atas kelangsungan usaha Perusahaan, yang merupakan buah dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh pihak yang terlibat. Kepada Dewan Komisaris selaku representasi pemegang saham, Direksi menyampaikan rasa terima kasihnya atas arahan, nasihat dan pengawasan yang telah dilakukan. Demikian pula kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemegang saham dan investor, pelanggan, pemasok, maupun mitra usaha lainnya, Direksi menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terbina dengan baik.

Kepada seluruh karyawan, izinkan Direksi menyampaikan apresiasinya atas seluruh dedikasi yang telah diberikan, khususnya dalam menghadapi kondisi tahun 2023 yang penuh tantangan. Semoga semangat kebersamaan ini menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk dapat dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

APPRECIATION AND OPTIMISM

Allow the Board of Directors to express gratitude for the continuity of the Company's business, which is the fruit of the hard and smart work of all parties involved. To the Board of Commissioners as the representation of shareholders, the Board of Directors expresses gratitude for the given directive, advice, and supervision. Likewise, the Board of Directors appreciates the well-fostered collaboration with all stakeholders, shareholders and investors, customers, suppliers, and other business partners.

To all employees, allow the Board of Directors to express appreciation for all the dedication, especially in facing the challenging conditions of 2023. May the spirit of togetherness be the foundation for the Company to grow sustainably and provide added value to shareholders and all stakeholders.

Jakarta, 23 April 2024
Jakarta, April 23, 2024

Atas nama Manajemen PT PP Presisi Tbk,
On behalf of the Management of PT PP Presisi Tbk,

I Gede Upeksa Negara
Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT PP PRESISI TBK

STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT PP PRESISI TBK

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2023 Annual Report of PT PP Presisi Tbk has been disclosed completely and responsibly.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 23 April 2024
Jakarta, April 23, 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

NUR ROCHMAD
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner

INDRA JAYA RAJAGUKGUK
Komisaris Independen
Independent Commissioner

ALBERT SIMANGUNSONG
Komisaris
Commissioner

MUHAMMAD ZAHID
Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT PP PRESISI TBK

STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT PP PRESISI TBK

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2023 Annual Report of PT PP Presisi Tbk has been disclosed completely and responsibly.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 23 April 2024
Jakarta, April 23, 2024

Direksi
Board of Directors

I GEDE UPEKSA NEGARA
Direktur Utama
President Director

MOHAMMAD ARIF ISWAHYUDI
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal
Director of Finance, Risk Management & Legal

REBIMUN
Direktur Operasi
Director of Operations

YUDI SETIAWAN
Direktur Perencanaan Bisnis & HCM
Director of Business Planning & HCM

PP
PRESISI
Batching Plant KIT Batang,
Jawa Tengah

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Proyek Batching Plant KIT Batang, Jawa Tengah
KIT Batang Batching Plant Project, Central Java

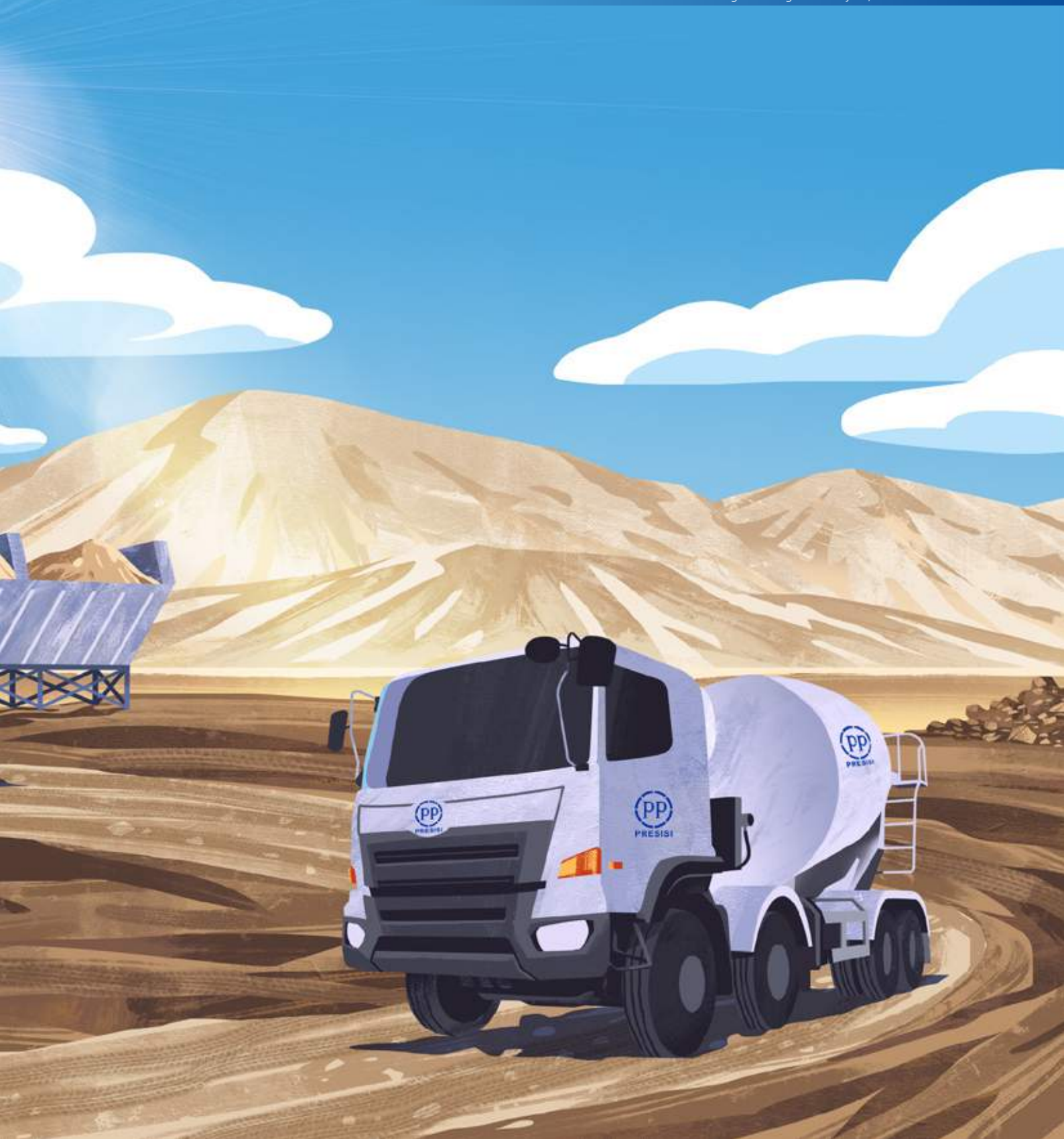

IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT PP Presisi Tbk

Status Hukum
Legal Status

Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Terbuka (Tbk)
Limited Liability Company (PT), Public Company (Tbk)

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

6 Mei 2004
May 6, 2004

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp2.400.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Subscribed and Fully Paid-in Capital

Rp1.022.427.100.000,-

Kode Saham
Ticker Code

PPRE

Hubungan Investor
Investor Relations

Corporate Secretary

Dyah Novian Tri Hadini
E-mail: corsec@pp-presisi.co.id

Media Sosial
Social Media

Instagram : @ptpp_presisi
Youtube : PT PP Presisi
Linkedin : PT PP Presisi Tbk

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Incorporation

Didirikan dengan nama PT Prima Jasa Aldodua berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 6 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Chotib, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012, Tambahan No. 20149.
Established under PT Prima Jasa Aldodua per the Deed of Establishment No. 2 dated May 6, 2004, drawn up before Notary Muhammad Chotib, S.H., and validated by the Minister of Law and Human Rights by Decree No. C-16498HT.01.01.TH.2004 dated July 1, 2004, and promulgated in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012, Supplement No. 20149.

Bidang Usaha
Line of Business

Jasa konstruksi, *Engineering Procurement and Construction* (EPC), pekerjaan mekanikal elektrikal, pengangkutan dan pergudangan, jasa penyewaan, perdagangan, jasa pertambangan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis, industri pengolahan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, dan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.
Construction services, Engineering Procurement and Construction (EPC), mechanical-electrical works, transportation and warehousing, rental services, trading, mining, architectural and engineering activities, as well as technical consulting, processing industry, capability improvement services in the construction sector, engineering and planning services, as well as development and optimization of the Company's resources utilization.

Alamat Kantor
Office Address

Plaza PP
Wisma Robinson Lt. 1 Jl. TB Simatupang
No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760
Telepon: +6221 8414 119
E-mail: corsec@pp-presisi.co.id

Workshop
Jl. Raya Narogong KM 15 Pangkalan 6
Bekasi, 17153
Telepon: +6221 8248 3255 / 240
E-mail: headoffice@pp-presisi.co.id

Kepemilikan Saham
Shareholding

- PT PP (Persero) Tbk **76,99%**
- Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan **0,02%**
- Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan **5,88%**
- Saham yang dibeli kembali | Repurchased Shares **1,06%**
- Masyarakat | Public **16,06%**

Lembaga Pencatatan Saham
Stock Listing Agency

Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190

Tanggal Pencatatan Saham
Listing Date

24 November 2017
November 24, 2017

Jumlah Karyawan
Total Number of Employees

285 orang
285 people

Entitas Anak
Subsidiary

PT Lancarjaya Mandiri Abadi

Situs Web
Website

www.pp-presisi.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief Corporate History

SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

PT PP Presisi Tbk, disebut juga "Perusahaan" atau "PP Presisi" atau "PPRE", didirikan pada tahun 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldodua yang menyediakan jasa penyewaan peralatan alat berat. Kemudian, Perusahaan diakuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk pada tanggal 6 Juni 2014. Pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh PT PP (Persero) Tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah mengantarkan Perusahaan untuk melakukan transformasi bisnis dengan memasuki lini bisnis *mining services, civil work, foundation, erector*, dan *heavy equipment rental* yang secara terintegrasi memberikan nilai tambah kepada para pelanggan.

Di tahun 2017, seiring dengan peningkatan kapabilitasnya, PPRE melakukan akuisisi 51% atas kepemilikan PT Lancarjaya Mandiri Abadi. Di tahun yang sama, PPRE melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga resmi menyandang status sebagai perusahaan publik.

Sejalan dengan pengembangan bisnis yang dilakukan, PPRE meningkatkan sistem dan kontrol melalui penerapan *Enterprise Resource Planning System, Application, and Product* (ERP-SAP). Perusahaan juga menerapkan praktik terbaik sesuai standar ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, serta ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai bagian dari pengembangan keunggulan operasional yang berkelanjutan. Proses ini kemudian dilanjutkan di tahun 2021 ketika PPRE meningkatkan kapabilitasnya dengan melakukan ekspansi pada potensi bisnis pertambangan melalui layanan jasa kontraktor tambang.

Untuk menjawab dinamika, Perusahaan mengklasterisasi lini bisnis menjadi *mining services, civil work, structure work, production plant,* dan *heavy equipment rental.* Hal ini menjadi komitmen Perusahaan untuk terus mengembangkan bisnis di bidang konstruksi dengan menyediakan kebutuhan pelanggan, meningkatkan pelayanan di semua bidang konstruksi dan non-konstruksi, serta memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menghasilkan manfaat bagi pemangku kepentingan. Berbagai pengembangan usaha masih akan terus dilakukan dengan memperhatikan pengendalian aspek lingkungan dan sosial.

BRIEF HISTORY OF COMPANY DEVELOPMENT

PT PP Presisi Tbk, also known as "the Company" or "PP Presisi" or "PPRE", was established in 2004 under PT Prima Services Aldodua, engaging in heavy equipment rental services. Then, the Company was acquired by PT PP (Persero) Tbk on June 6, 2014. The acquisition by PT PP (Persero) Tbk, as a State-Owned Enterprise (SOE), has brought the Company to make a business transformation by entering the integrated businesses of mining services, civil work, foundation, erector and heavy equipment rental to offer added value to the customers.

In 2017, along with increasing its capabilities, PPRE acquired 51% ownership of PT Lancarjaya Mandiri Abadi. In the same year, PPRE conducted an Initial Public Offering and listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX); hence, it officially holds the status of a public company.

In line with its business development, the Company improved its systems and controls by implementing an Enterprise Resource Planning System, Application, and Product (ERP-SAP). The Company also applied the best practices according to the ISO 9001:2015 standard on Quality Management Systems, ISO 14001:2015 standard on Environmental Management Systems, and ISO 45001:2018 standard on Occupational Health and Safety Management Systems as part of developing sustainable operational excellence. The process continued in 2021 when PPRE enhanced its capabilities by expanding into the potential mining business through mining contracting services.

To answer the business dynamics, the Company's businesses were further clustered into mining services, civil work, structure work, production plant, and heavy equipment rental. It has been the Company's commitment to continue developing its business in the construction sector by providing comprehensive services to fulfill customer needs, improving services in all construction and nonconstruction sectors, as well as maximizing all of its potential to generate benefits for stakeholders. Various business developments will continue to be carried out by taking into account the control of environmental and social aspects.

Sebagai langkah upaya dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* dan meningkatkan *positioning* Perusahaan, di tahun 2022 Perusahaan terus berfokus pada lini bisnis utamanya yaitu *mining services* dan *civil work* sebagai kontraktor utama. Perolehan kontrak pada jasa pertambangan dan sipil sebagai kontraktor utama juga merupakan upaya Perusahaan dalam memitigasi risiko dengan perolehan kontrak yang lebih panjang pada jasa pertambangan sebagai *recurring income*. Selain itu, bisnis lain Perusahaan seperti *production plant*, *structure work* dan *heavy equipment rental* tetap menjadi bisnis *supporting* bagi bisnis utama Perusahaan. Ditopang dengan semangat juang yang tinggi, ke depannya Perusahaan akan terus mengarahkan fokus pada setiap Perolehan kontrak baru yang ada pada bisnis utama Perusahaan.

To provide added value for stakeholders and improve the Company's position in 2022, the Company continued to focus on its main business, namely mining services and civil work, as the main contractor. Obtaining contracts for mining and civil services as the main contractor is also the Company's effort to mitigate risks by obtaining longer contracts for mining services as a recurring income. Moreover, the Company's other businesses, such as production plants, structure work, and heavy equipment rental, continued to support the Company's main business. Supported by a high fighting spirit, the Company will continue to focus on obtaining new contracts in its main business.

Peningkatan *positioning* Perusahaan untuk semakin berfokus pada lini bisnis utama yaitu *mining services* dan *civil work*, menjadi arah kedepan Perusahaan untuk dapat mewujudkan target Perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah untuk seluruh *stakeholder*. Pada tahun 2024 Perusahaan berfokus pada perluasan pangsa pasar pada proyek-proyek *mining services*, melalui momentum kebijakan Pemerintah dalam hilirisasi tambang mineral dengan semakin meningkatnya pembangunan smelter serta kebutuhan akan energi terbarukan yang memacu perkembangan industri mobil listrik yang akan didukung dengan peningkatan kebutuhan akan bahan baku tambang khususnya nikel sebagai bahan baku dalam industri baterai EV. Selain fokus pada *positioning* Perusahaan sebagai *mining contractor*, perusahaan juga melakukan *refocusing* pada peningkatan kualitas internal Perusahaan dari mulai peningkatan utilisasi dan kinerja alat berat, optimalisasi kinerja peralatan, peningkatan kompetensi *key personil* di lini bisnis *mining*, serta memaksimalkan teknologi terintegrasi.

The Company continues to increase its positioning to focus on the main business lines, i.e., mining services and civil work, as future direction to realize its targets, which can provide added value to all stakeholders. In 2024, the Company will focus on expanding its market share in mining services projects by seizing the momentum of Government policy in mineral mining downstream with the increasing construction of smelters and the need for renewable energy. It will spur the development of the electric car industry, which will be supported by an increase in the need for mining raw materials, especially nickel, which is a raw material in the EV battery industry. Apart from focusing on positioning the Company as a mining contractor, the Company is also refocusing on improving the Company's internal quality, starting from increasing heavy equipment utilization and performance, optimizing equipment performance, increasing the competency of key personnel in the mining business line, as well as maximizing integrated technology.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN STATUS PERUSAHAAN

Dalam perjalanannya hingga tahun 2023, PPRE telah mengalami 5 (lima) kali perubahan nama, sebagaimana dijelaskan pada bagan di bawah ini:

INFORMATION ABOUT CHANGES IN COMPANY NAME AND STATUS

Throughout its journey to 2023, PPRE has undergone five name changes, as explained in the following table:

PT PRIMA JASA ALDODUA

1 Juli 2004
July 1, 2004

Didirikan dengan nama PT Prima Jasa Aldodua berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 6 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Chotib, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-16498HT.01.01. TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012, Tambahan No. 20149.

Established under PT Prima Jasa Aldodua per the Deed of Establishment No. 2 dated May 6, 2004, drawn up before Notary Muhammad Chotib, S.H. and validated by the Minister of Law and Human Rights by Decree No. C-16498HT.01.01. TH.2004, dated July 1, 2004, and promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012, Supplement No. 20149.

PT PP ALAT KONSTRUKSI

4 Juli 2014
July 4, 2014

Menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PP Alat Konstruksi) berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 16 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., akta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-05280.40.20.2014 Tanggal 4 Juli 2014 dan akta telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU- 18939.40.22.2014 Tanggal 4 Juli 2014.

Became PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PP Alat Konstruksi) per the Deed of Minutes of Meeting No. 16 dated June 6, 2014, drawn up before Wiwiek Widhi Astuti, S.H., and validated by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-05280.40.20.2014 dated July 4, 2014, and the deed has been received and recorded in the Ministry of Law and Human Rights Sismibakum through Receipt of Notification Letter No. AHU-18939.40.22.2014 dated July 4, 2014.

PT PP PERALATAN KONSTRUKSI

23 September 2014
September 23, 2014

Menjadi PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi (PP Peralatan Konstruksi) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit, S.H., M.H., akta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-08361.40.20.2014 Tanggal 23 September 2014 dan akta telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-31393.40.22.2014 Tanggal 22 September 2014.

Became PT Pembangunan Perumahan Perumahan Konstruksi (PP Peralatan Konstruksi) per the Circulaire Resolution in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 54 dated September 19, 2014, drawn up before Ilmiawan Dekrit, S.H., M.H., and validated by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-08361.40.20.2014 dated September 23, 2014, and the deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System (Sisminbakum) of Ministry of Law and Human Rights Sismibakum through Receipt of Notification Letter No. AHU-31393.40.22.2014 dated September 22, 2014.

PT PP PRESISI

31 Mei 2017
May 31, 2017

Menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) berdasarkan Akta No. 18 tanggal 5 Mei 2017 melalui Surat Keputusan No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn. pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan akta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011798. AH.01.02 TAHUN 2017 Tanggal 31 Mei 2017.

Became PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) per Deed No. 18 dated May 5, 2017, through Decree No. AHU-0011798. AH.01.02.TAHUN2017, dated May 5, 2017, drawn up before Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., replacing Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. and validated by the Ministry of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0011798.AH.01.02 TAHUN2017 dated May 31, 2017.

PT PP PRESISI TBK

14 Agustus 2017
August 14, 2017

Karena terjadinya perubahan bentuk PPRE menjadi Perusahaan Terbuka, sehingga merujuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal Perusahaan berbentuk Perusahaan Terbuka, maka nama PT Pembangunan Perumahan Presisi atau disingkat PT PP Presisi ditambahkan "Tbk", sehingga menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk atau disingkat PT PP Presisi Tbk, hal ini sesuai dengan Akta No. 27 tanggal 14 Agustus 2017 yang mana akta dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-001.6606. AH.01.02.TAHUN2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan akta telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0162216 Tanggal 14 Agustus 2017.

Due to a change in company status to become a Public Company, thus referring to Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the name PT Pembangunan Perumahan Presisi, abbreviated as PT PP Presisi, is added "Tbk". Hence, the name became PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk, abbreviated as PT PP Presisi Tbk, per the Deed No. 27 dated August 14, 2017, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., through the Decree of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-001.6606. AH.01.02.TAHUN2017, dated August 14, 2017, and the deed has been received and recorded in the Ministry of Law and Human Rights Sismibakum through Receipt of Letter Notification No. AHU-AH.01.03-0162216, dated August 14, 2017.

Perubahan nama dilakukan karena adanya diversifikasi layanan serta transformasi bisnis. Di samping itu, perubahan status terjadi pasca Perusahaan resmi melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) dan mengubah status badan hukumnya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dengan perdagangan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

The name changes were made due to service diversification and business transformation. The Company officially conducted an Initial Public Offering (IPO) and changed its legal entity status to a public company (Tbk) by trading shares listed on the Indonesia Stock Exchange.

JEJAK LANGKAH

Milestones

2004

Mei | May
Perusahaan didirikan dengan nama PT Prima Jasa Aldodua yang menyediakan jasa penyewaan peralatan.
The Company was established under PT Prima Jasa Aldodua, which provides equipment rental services.

2014

Juni | June
Perusahaan diakuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk dan mengubah nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi atau disingkat PT PP ALKON.
The Company was acquired by PT PP (Persero) Tbk and changed its name to PT Pembangunan Perumahan Alat Kontruksi or PT PP ALKON.

September | September
Mengubah nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi atau disingkat PT PP ALAT.
The Company changed its name to PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi or PT PP ALAT.

2015

Juni | June
Memulai transformasi bisnis dengan memasuki lini bisnis *formwork*.
Starting business transformation by entering the formwork business.

September | September
Memasuki bisnis *ready mix*.
Entering the ready mix business.

2016

Memasuki usaha pekerjaan sipil dengan fokus pada proyek jalan tol dan bendungan.
Entering the civil work business focusing on toll road and dam projects.

2017

Mei | May
Mengubah nama kembali menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi disingkat PT PP Presisi.
The Company changed its name again to PT Pembangunan Perumahan, abbreviated as PT PP Presisi.

Juni | June
Mengakuisisi 51,00% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
Acquiring 51.00% shares of PT Lancarjaya Mandiri Abadi.

Juni | June
Peningkatan modal oleh PT PP (Persero) Tbk.
PT PP (Persero) Tbk increased its capital in the Company.

Agustus | August
Perusahaan melakukan perubahan status menjadi Perusahaan Terbuka sehingga nama Perusahaan menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk atau disingkat PT PP Presisi Tbk.
The Company changed its status to be a Public Company; thus, the Company's name became PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk, abbreviated as PT PP Presisi Tbk.

November | November
Perusahaan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia.
The Company is listed as an issuer on Indonesia Stock Exchange.

2018

Januari | January
Menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kumkang Kind Co Ltd, Korea Selatan tentang teknologi baru *formwork*.
Signing a Memorandum of Understanding (MoU) with Kumkang Kind Co Ltd, South Korea, on new formwork technology.

Juni | June
- Memasuki bisnis *erector*.
- Meningkatkan pengangkutan batu bara menjadi layanan penambangan terintegrasi.
- Entering the erector business.
- Enhancing coal hauling into integrated mining services.

Desember | December
- Perusahaan mulai merambah pekerjaan perbaikan infrastruktur yang ditandai dengan Proyek Pelebaran Jalan Tol Jagorawi.
- Perusahaan dan PT Sepuluh Sumber Anugerah mulai merambah bidang usaha bio-remediasi dan pengelolaan limbah lainnya dengan mendirikan PT Presisi Sumber Anugerah dengan kepemilikan saham PPRE sebesar 51,0%.
- The Company embarked on the infrastructure improvement works marked by the Jagorawi Toll Road Widening Project.
- The Company and PT Sepuluh Sumber Anugerah began to penetrate bioremediation and other waste management businesses by establishing PT Presisi Sumber Anugerah with a share ownership of 51.0%.

Januari | January
Perusahaan melalui Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi meningkatkan peran dari subkontraktor menjadi kontraktor utama pada proyek Jalan Tol Non-Trans Jawa Selatan Lot. 9 Balekambang-Kedungsalam, Malang.
Through the Subsidiary PT Lancarjaya Mandiri Abadi, the Company upgraded its role from a subcontractor to a main contractor for the Non-Trans South Java Toll Road project, Lot. 9 BalekambangKedungsalam, Malang.

Februari | February
Meningkatkan peran menjadi kontraktor utama pada Proyek *Overlay* Bandara Minangkabau.
The Company upgraded its role to be the main contractor for the Overlay of Minangkabau Airport Project.

Juli | July
Meningkatkan kapabilitas Perusahaan di bidang *soil improvement* melalui strategi aliansi internasional yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Perusahaan dengan PT Pratama Widya dan Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., untuk melakukan kerja sama dalam bidang solusi dan teknologi alat berat, fondasi, serta *soil improvement* melalui integrasi dan kolaborasi seluruh pihak terhadap proyek konstruksi di Indonesia serta dimungkinkannya proses alih teknologi di dalamnya.
The Company increased its capability in soil improvement through an international alliance strategy marked by the signing of an MoU between the Company, PT Pratama Widya, and Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., to collaborate in heavy equipment solution and technology, foundation, soil improvement through integration and collaboration among all parties on construction projects in Indonesia, as well as enable technology transfer process in it.

November | November
Perusahaan mulai merambah pekerjaan pembangunan infrastruktur tambang yang ditandai dengan menjadi kontraktor utama pada proyek Jalan Angkut Batu bara Kalimantan Tengah-Kalimantan Timur.
The Company embarked on the mining infrastructure construction marked by becoming a main contractor for the Coal Hauling Road project in Central Kalimantan-East Kalimantan.

2020

Januari | January
Perusahaan melakukan pembelian kembali saham senilai 1,06%.
The Company performed a shares buyback of 1.06%.

Februari | February
Perusahaan menandatangani MoU dengan PT Antam Resourcindo untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan infrastruktur jalan tambang termasuk jasa pengangkutan yang dibutuhkan oleh PT Antam Resourcindo.
The Company signed an MoU with PT Antam Resourcindo to cooperate in the construction of mining road infrastructure, including the transportation services required by PT Antam Resourcindo.

April | April
Acara *Ground Breaking* Bandara Dhoho Kediri dilakukan secara virtual. Acara ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Perhubungan. *Ground Breaking* merupakan tonggak permulaan dari pembangunan bandara yang akan dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh PT Lancarjaya Mandiri Abadi selaku Entitas Anak.
Dhoho Airport Groundbreaking event at Kediri, which was conducted virtually. The Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs and the Minister of Transportation led the event. The groundbreaking is the initial airport construction milestone, which will be carried out by a consortium led by PT Lancarjaya Mandiri Abadi as the Company's Subsidiary.

Agustus | August
Perusahaan melakukan pengerjaan proyek Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Kawasan Industri Terpadu Batang yang termasuk proyek strategis nasional.
The Company started the development of the Mandalika Special Economic Zone and Batang Integrated Industrial Estate project, which are national strategic projects.

Desember | December
Perusahaan memperoleh kontrak baru perbaikan Proyek Dermaga Belinyu Kawasan Pangkal Balam yang berlokasi di Bangka Belitung milik PT Pelindo II.
The Company won a new contract to repair the Belinyu Pier in the Pangkal Balam Area, located in Bangka Belitung and owned by PT Pelindo II.

2021

Februari | February

- Mendapatkan Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Ruas Pekanbaru-Padang Seksi Padang Lubuk Alung-Sicincin Zona 1 dan 2 melalui Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
- Merambah bisnis tambang nikel sebagai kontraktor tambang nikel pada Proyek Weda Bay untuk pekerjaan *mining development* dari mulai jalan *hauling*, infrastruktur, dan *stockpile area* yang merupakan perluasan dari pembangunan jalan *hauling* yang sedang dilakukan. Weda Bay merupakan salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia yang berlokasi di Halmahera.
- Acquired Trans Sumatra Toll Road Construction Project, Pekanbaru-Padang Segment, Padang Lubuk Alung-Sicincin Zone 1 and 2 Sections via a Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
- Entered the nickel mining business as a nickel mining contractor at Weda Bay Project for mining development work, starting from hauling road, infrastructure, and stockpile area projects, an expansion of the ongoing hauling road construction. Weda Bay, located in Halmahera, is one of the largest nickel mines in Indonesia.

Maret | March

- Memperoleh kontrak baru pada pekerjaan Kereta Api Pare-Pare melalui Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
- Memperoleh kontrak baru di bisnis jasa pertambangan nikel pada Proyek Morowali untuk pekerjaan *mining construction* dari mulai *overburden removal*, dan *ore hauling*.
- Mendapatkan kontrak baru untuk pekerjaan Proyek Rekonstruksi Paved Shoulder Taxiway-Sepinggan, PPRE bertindak sebagai kontraktor utama dalam perbaikan taxiway pada Bandara Sepinggan-Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Acquired a new contract for Pare-Pare Railway via a Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
- Acquired a new contract in the nickel mining service business at Morowali Project for mining construction work from overburden removal to ore hauling project.
- Acquired a new contract for the Paved Shoulder Taxiway-Sepinggan Reconstruction Project. PPRE is the main contractor for taxiway repair at Sepinggan Airport, Balikpapan, East Kalimantan.

April | April

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Proyek Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Proyek tersebut dikerjakan oleh PPRE sebagai sub kontraktor melalui sinergi dengan Entitas Induk PT PP (Persero) Tbk.

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widod; the Minister of Public Works and Public Housing, Basuki Hadimuljono; Head of the Ministry of Investment/Investment Coordinating Board (BKPM), Bahlil Lahadalia; and the Governor of Central Java Ganjar Pranowo visited Batang Integrated Industrial Estate Project in Central Java. PPRE carried out the project as a sub-contractor through synergy with the Parent Entity, PT PP (Persero) Tbk.

Mei | May

- Mendapatkan kontrak baru pada Proyek Smelter Grade Alumina Refinery Mempawah dalam pekerjaan *site development* melalui sinergi dengan Entitas Induk PT PP (Persero) Tbk.
- Memperoleh Proyek Provision Service of Earthworks Phase 2 Batuta Chemical Industrial Park Project melalui Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
- Acquired a new contract for the Smelter Grade Alumina Refinery Project, Mempawah, for site development work through synergy with the Parent Entity, PT PP (Persero) Tbk.
- Acquired the Provision Earthworks Phase 2 Batuta Chemical Industrial Park Project via a Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi.

Juni | June

- Melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) dengan total nilai kontrak lebih dari Rp1 triliun bersama Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi. Pekerjaan jalan tol tersebut merupakan satu-satunya kontrak jalan tol yang ditenderkan pada tahun 2021.
- Melaksanakan *ground breaking ceremony* Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3.
- Memperoleh kontrak baru Pekerjaan *Overlay Runway Tapering Stopway* Peningkatan Fasilitas Mengakomodir A330 dan Pemenuhan Fasilitas Sisi Udara Tahap 1 di Bandara Sentani Jayapura.
- Menerima penghargaan Bronze Winner BUMN Marketeers Awards 2021 sebagai The Most Promising Company in Strategic Marketing.
- Carried out the construction work of the Cinere-Jagorawi (Cijago) Toll Road with a total contract value of more than Rp1 trillion with a Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi. The toll road project was the only toll road contract tendered in 2021.
- Ground Breaking Ceremony of Cinere- Jagorawi Toll Road Project Section 3.
- Acquired a new contract for Overlay Runway Tapering Stopway Project, Facilities Improvement to Accommodate A330s Aircraft and Fulfillment of Phase 1 of Airside Facilities at Sentani-Jayapura Airport.
- Received the Bronze Winner award in the 2021 SOE Marketeers Awards as The Most Promising Company in Strategic Marketing.

Juli | July

- Mendapatkan kontrak baru sebagai kontraktor utama pada Proyek Rehabilitasi Jalan Pamanukan-Sewo-Lohbener-Jatibarang-Palimanan pada segmen efektif sepanjang 12,27 km.
- Melakukan *benchmark* manajemen peralatan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Menandatangani MoU dengan PT Putra Bulian Properti dan PT Wahana Catur Mas melalui Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi. MoU ini merupakan langkah awal dari kerja sama pembangunan infrastruktur pertambangan di Jambi.
- Acquired a new contract as the main contractor for the Pamanukan-Sewo-Lohbener-Jatibarang-Palimanan Road Rehabilitation Project in a 12.27 km-long road segment.
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk performed benchmarking to PPRE for equipment management.
- Signed an MoU with PT Putra Bulian Properti and PT Wahana Catur Mas via a Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi. The MoU is the first step of cooperation in developing mining infrastructure in Jambi.

Agustus | August

- Menyelesaikan Lintasan Sirkuit Mandalika sepanjang 4,3 km sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh Federation Internationale de Motocyclisme. Lintasan Sirkuit Mandalika merupakan bagian dari Proyek Pembangunan Kawasan Sirkuit Mandalika Lombok yang rencananya akan digunakan dalam ajang balap Super Bike dan MotoGP tahun 2022.
- Memperoleh kontrak baru pada Proyek Pembangunan Jalan Hauling PT Triaryani Jambi melalui Entitas Anak PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
- Successfully completed the 4.3 km Mandalika Circuit Track per the International Standard issued by the Federation Internationale de Motocyclisme. Mandalika Circuit Track is a part of the Mandalika Lombok Circuit Area Development Project, which will be used in Super Bike and MotoGP racing events in 2022.
- Acquired a new Hauling Road Construction Project contract at PT Triaryani Jambi via a Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi.

Oktober | October

- Memperoleh penghargaan GRC TOP Awards 2021#4 Stars yang diselenggarakan oleh TOP Business.
- Menerima penghargaan TJSL & CSR Awards 2021 Pilar Ekonomi #4 Stars yang diselenggarakan oleh BUMN Track.
- Melakukan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan dan masyarakat setempat bekerja sama dengan Puskesmas setempat.
- Received the GRC TOP Awards 2021 #4 Stars, organized by TOP Business.
- Received the TJSL & CSR Awards 2021 Economy Pillar #4 Stars, organized by BUMN Track.
- Organized COVID-19 vaccinations for employees and the local community in collaboration with the local Puskesmas.

November | November

Menerima penghargaan The Best 50 Public Listed Companies 2021 dari Forbes Indonesia.
Received The Best 50 Public Listed Companies 2021 award from Forbes Indonesia.

2022

Januari | January

PPRE telah melaksanakan agenda CEO *Message* 2022 yang dipimpin oleh Direktur Utama, tujuan diadakannya CEO *Message* ini adalah untuk meningkatkan semangat serta motivasi karyawan di awal tahun.
PPRE carried out the CEO Message 2022 agenda led by the President Director. The purpose is to increase employee enthusiasm and motivation at the beginning of the year.

Februari | February

Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional, PT PP (Persero) Tbk memberikan penghargaan kepada PPRE sebagai anak perusahaan dengan implementasi HSE terbaik pada acara puncak Bulan K3 Nasional.
In commemoration of National OHS Month, PT PP (Persero) Tbk awarded PPRE as a Subsidiary with the best HSE implementation at the peak event of National OHS Month.

Maret | March

PPRE telah meraih penghargaan Terbaik III pada ajang 11th Anugerah BUMN 2022 dengan kategori bertumbuh dan bertahan. Semoga penghargaan ini dapat menjadi semangat untuk kedepannya dapat menjadi perusahaan yang lebih baik dan kompeten.
PPRE has won the Best III award at the 11th Anugerah BUMN 2022 event in the growth and survival category. Hopefully, the award can be an encouragement to become a better and more competent company.

April | April

PPRE telah melangsungkan RUPST 2022 dengan 7 mata acara yang dipaparkan terkait kinerja perusahaan dan presentasi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) tahun 2022 serta adanya perubahan anggota Direksi & Komisaris.
PPRE held the 2022 Annual GMS with seven agendas regarding company performance, the 2022 Company Budget Work Plan (RKAP) presentation, and changes in Board of Directors and Board of Commissioners members.

Mei | May

Penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan Jalur KA Lintas Medan - Binjai yang diwakili oleh Direktur Operasional PPRE dan Direktur Duta Pratama Indah KSO.
Work contract signing for the construction of Cross Medan-Binjai Railway Line represented by the Director of Operational of PPRE and the Director of Duta Pratama Indah JO.

Juni | June

Penandatanganan kontrak Proyek Pembangunan Saringan Sampah Kali Ciliwung yang diwakili oleh Direktur Operasional PPRE dan PT Runggu Prima Jaya dengan status JO.
Contract signing for Ciliwung River Garbage Filter Development Project represented by the Director of Operational of PPRE and PT Runggu Prima Jaya with JO status.

Juli | July
Penandatangan kerjasama atau MoU antara PPRE dengan PT Position Partner sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan daya saing terkait teknologi alat berat.
The signing of cooperation or MoU between PPRE and PT Position Partner as a form of synergy to increase competitiveness related to heavy equipment technology.

Agustus | August
Telah dianugerahkan penghargaan kepada PPRE atas dedikasi Perusahaan untuk melaksanakan CSR/TJSL, dengan memenangkan salah satu penghargaan perusahaan dengan program pilar lingkungan terbaik, acara tersebut diadakan oleh BUMN Track & ISVI.
PPRE was awarded for its dedication to implementing CSR by winning one of the awards as a company with the best environmental pillar program. The event was held by BUMN Track & ISVI.

September | September
Penandatanganan kontrak Proyek Pembangunan Jembatan GORR Gorontalo yang diwakili oleh Direktur Operasional PPRE dan Tim PUPR Kota Gorontalo.
The contract signing of the GORR Gorontalo Bridge Construction Project, which was represented by the Director of Operational PPRE and Gorontalo City PUPR Team.

Oktober | October
PPRE telah berhasil kembali menorehkan prestasi dengan memperoleh penghargaan Governance, Risk, and Compliance (GRC) Award dan memperoleh 4 bintang sebagai salah satu Perusahaan yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip GRC dalam setiap kegiatan bisnis, selain itu penghargaan juga sekaligus diperoleh oleh Direktur Utama Rully Noviandar sebagai The Most Committed GRC Leader 2022 atas komitmen dan dedikasi penerapan GRC pada Perusahaan.
PPRE has successfully obtained the Governance, Risk, and Compliance (GRC) Award and four stars as one of the Companies consistently implementing GRC principles in every business activity. An award was also received by the President Director, Rully Noviandar, as The Most Committed GRC Leader 2022 for his commitment and dedication to implementing GRC at the Company.

November | November
- Penandatanganan Kontrak Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki yang diwakili oleh Tim PP Presisi-Yalapersada KSO dan Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan.
- *Groundbreaking Ceremony* Proyek Pelabuhan Saumlaki untuk persiapan akan dimulainya proyek tersebut. Agenda tersebut dihadiri oleh pejabat setempat dan kontraktor yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut.
- The contract signing of SKPT Saumlaki Ukurlaran Fishing Port Development Project, represented by PP Presisi-Yalapersada JO Team and the Directorate General of Marine Affairs and Fisheries.
- Groundbreaking Ceremony for Saumlaki Port Project as a preparation for the commencement of the project. The agenda was attended by local officials and contractors involved in project construction.

Desember | December
Pelaksanaan uji layak fungsi jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3A dihadiri oleh Tim KSO Proyek, TLKJ, BPJT, JBH, Korlantas dan Kemenhub dengan tujuan untuk menciptakan hasil aspal yang berkualitas sesuai standar.
Implementation of the functional feasibility test for Cinere-Jagorawi Toll Road Section 3A, attended by Project JO Team, TLKJ, BPJT, JBH, Korlantas, and the Ministry of Transportation to create quality asphalt products per the standards.

2023

Januari | January
- Penandatangan Kontrak Proyek Pembangunan Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN) yang dihadiri oleh Direktur Operasi Perusahaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak PPK Jembatan Pulau Balang Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang Kementerian PUPR. Penandatanganan proyek Pembangunan Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN) dengan fokus pada pekerjaan struktur dan sipil.
- Peringatan bulan K3 Nasional Proyek Weda Bay Nikel dengan mendapatkan penghargaan juara ke-2 untuk Kategori *Best Performance Contractor* dan mendapatkan penghargaan 2.000.000 *Manhours Work Without Lost Time Accident*.
- Contract Signing for the Construction of the National Capital City (IKN) Logistics Pier, attended by the Director of Operations and the Jembatan Pulau Balang PPK Contract Signing Officer from the Implementation Work Unit of the Ministry of PUPR. The contract signing focuses on structural and civil works projects.
- Commemoration of National OHS month for the Weda Bay Nickel Project by winning Second place in the Best Performance Contractor Category and receiving the 2,000,000 Manhours Work Without Lost Time Accident award.

Februari | February
Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 PPRE dengan agenda pergantian Direktur Operasi dan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM, yang dihadiri oleh Manajemen Perusahaan.
Implementation of the 2023 Extraordinary GMS of PPRE to succeed the Director of Operations and Director of Business Planning & HCM, attended by Company Management.

Mei | May
Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PPRE dengan beberapa agenda yang ditetapkan. Salah satu hasil keputusan rapat terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Implementation of the Annual GMS of PPRE for the 2022 Fiscal Year with several agendas set. One of the meeting resolutions was a change in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors members.

Juni | June
- Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- *Pre-Construction Meeting* (PCM) Proyek Dermaga IKN dihadiri oleh Direktur Operasi PPRE.
- Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) Audits.
- Pre-Construction Meeting (PCM) for the IKN Pier Project, attended by the Director of Operations.

Juli | July
First cut mining operation Weda Bay Nickel Project dihadiri oleh SVP QHSE PT PP (Persero) Tbk, Direktur Utama dan Direktur Operasi PPRE serta Tim Weda Bay.
The first cut mining operation of the Weda Bay Nickel Project attended by the SVP QHSE of PT PP (Persero) Tbk, President Director and Director of Operations of PPRE, and the Weda Bay Team.

Agustus | August

- Peresmian proyek Hengjaya yang dihadiri oleh Direktur Operasi Perusahaan, Direksi Hengjaya, dan pihak IMIP. Acara diadakan sebagai bentuk peresmian jalan akses yg dibuka dari Hengjaya Site Tangofa menuju IMIP melalui jalur darat yang mana akan meningkatkan produksi *supply* material tambang tersebut.
- Penerimaan penghargaan TJSL & CSR Awards 2023 dengan kategori Pilar Lingkungan dan Pilar Sosial yang dihadiri oleh Direktur Utama Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Uji Laik Fungsi (ULF) Ruas Tol Cinere - Uji Laik Fungsi (ULF) Ruas Tol Cinere - Jagorawi Seksi 3B. Dihadiri oleh Tim BPJT dan Bina Marga Kementerian PUPR, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, serta Korlantas POLRI.
- The Hengjaya project inauguration attended by the Director of Operations, Hengjaya Board of Directors, and IMIP. The event was held as a form of the inauguration of the access road opened from the Hengjaya Site Tangofa to IMIP via land, which will increase the production of the mining material supply.
- Receiving the 2023 TJSL & CSR Awards in the Environmental Pillar and Social Pillar categories, attended by the President Director. The Company is committed to participating in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment in a way that benefits society.
- Functional Worthiness Test (ULF) for the Cinere Toll Road and ULF for the Cinere-Jagorawi Toll Section 3B. The event was attended by the BPJT and Bina Marga Team of the Ministry of PUPR, the Directorate General of Land Transportation of the Ministry of Transportation, and the Indonesian Police Traffic Corps.

September | September

PPRE meraih 2 penghargaan sebagai TOP GRC Bintang 4 dan kategori The Most Committed GRC Leader 2023 untuk Direktur Utama PPRE dalam ajang GRC Award 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business.
PPRE won two awards as the TOP GRC 4 Star and The Most Committed GRC Leader 2023 category for the President Director of PPRE in the 2023 GRC Award event organized by Top Business Magazine.

Oktober | October

Opening Ceremony Hauling Road & Bridge Tofu Weda Bay Nickel Project dengan telah diselesaikannya pekerjaan Pembangunan Jembatan Tofu yang akan digunakan untuk jalan *hauling.* Acara diresmikan oleh *Manager Operation Construction* WBN dan dihadiri oleh GM *Mining Operation*, PJO HR Tofu PPRE.
The Opening Ceremony for the Hauling Road & Bridge with the completion of Tofu Bridge Construction work that will be sued for hauling roads. The event was officiated by the Construction Operations Manager of WBN and attended by the GM of Mining Operations and PJO HR of PPRE.

November | November

Program TJSL *grand launching* Urban Farming Food Estate bersama komunitas Kampung Kita Depok dihadiri oleh Tim Corsec PPRE, Sekda Depok, Mantan Walikota Depok Periode 2006-2016, Mantan Wakil Walikota Depok Periode 2016-2021 dan Tokoh Masyarakat Sekitar.
The Grand Launching for Urban Farming Food Estate TJSL program with Kampung Kita Depok community. The event was attended by the Corsec PPRE Team, the Depok Regional Secretary, the Former Mayor of Depok for the 2006-2016 Period, the Former Deputy Mayor of Depok for the 2016-2021 Period, and Local Community Figures.

Desember | December

- Kunjungan Kerja Menteri PUPR ke Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi didampingi oleh TLKJ, Dirjen Bina Marga, PPK Lahan, BUJT, Jasamarga, CSJ dan Tim Proyek Cijago, sebagai bagian dari *monitoring* penyelesaian pekerjaan proyek.
- PPRE melaksanakan *annual public expose* tahun 2023 dengan agenda pembahasan *company update, performance* dan *corporate strategic*.
- The Minister of PUPR's Working Visit to the Cinere-Jagorawi Toll Road Project, accompanied by TLKJ, Director General of Highways, PPK Lahan, BUJT, Jasamarga, CSJ, and the Cijago Project Team, as part of monitoring the project completion.
- PPRE conducted an annual public expose in 2023 with an agenda to discuss company updates, performance, and corporate strategies.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission, and Corporate Culture

Visi
Vision

> **Menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia dan regional.**

To be a leading integrated heavy equipment-based construction company in Indonesia and the region.

Misi
Mission

- Menyediakan jasa konstruksi spesialis dengan diferensiasi produk dan pelayanan prima.
- Meningkatkan bisnis terintegrasi yang memiliki layanan berdaya saing tinggi dan nilai tambah yang optimal bagi pemangku kepentingan.
- Mengedepankan aspek QSHE dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan proses bisnis.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan produktif dan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.

- Providing specialist construction services with product differentiation and excellent service.
- Enhancing integrated business which has high competitive services as well as optimum added values for stakeholders.
- Prioritizing Quality, Safety, Health, and Environmental (QSHE) and good corporate governance in conducting business processes.
- Developing professional and productive human resources with corporate values.

Reviu Visi dan Misi oleh Manajemen

Visi dan misi Perusahaan senantiasa ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Pernyataan terkait Visi dan Misi Perusahaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/PPRE/DIR/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Visi dan Misi Perusahaan. Visi dan Misi tersebut telah disetujui dan ditinjau secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi guna menyesuaikan dengan dinamika bisnis saat ini.

Vision and Mission Review by Management

The Company's vision and mission are regularly reviewed by involving the Board of Directors, Board of Commissioners, and other management levels to ensure their relevance to the business development. The statement regarding the Company's Vision and Mission has been approved and signed by the Board of Directors as stated in the Decree of Board of Directors No. 028/SK/PPRE/DIR/IX/2018 dated September 17, 2018, on Corporate Vision and Mission. The Vision and Mission have been approved and reviewed periodically by the Board of Commissioners and Board of Directors to adapt to current business dynamics.

Budaya dan Nilai-nilai Utama Perusahaan

PPRE sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah menerapkan nilai budaya AKHLAK sebagai penyempurnaan dari budaya perusahaan, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagaimana arahan Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Corporate Culture and Values

As part of a State-Owned Enterprise (SOE), PPRE has implemented AKHLAK cultural values as a refinement of corporate culture, i.e., Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative, as directed by the Ministry of SOE via the Circular Letter of the Minister of SOE No. SE-7/MBU/07/2020 on Core Values for Human Resources of State-Owned Enterprises.

AKHLAK

A manah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Panduan Perilaku:
1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

K ompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Panduan Perilaku:
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

H armonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan
Panduan Perilaku:
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

L oyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Panduan Perilaku:
1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

A daptif: Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Panduan Perilaku:
1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

K olaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis
Panduan Perilaku:
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

A manah (Trustworthy): Uphold the trust given
Code of Conduct:
1. Fulfill promises and commitments.
2. Responsibility for the duties, decisions, and actions taken.
3. Uphold moral and ethical values.

K ompeten (Competent): Continue to learn and develop capabilities
Code of Conduct:
1. Improve self-competence in facing dynamic challenges.
2. Help others learn.
3. Complete tasks with the best quality.

H armonis (Harmonious): Mutual care and respect for differences
Code of Conduct:
1. Appreciate anybody regardless of their background.
2. Keen on helping others.
3. Establish a productive working environment.

L oyal (Loyal): Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State
Code of Conduct:
1. Maintain the good name of fellow employees, Leaders, SOEs, and State.
2. Willingness to sacrifice for the greater good.
3. Obedient to the leaders as long as it doesn't contradict the law and ethics.

A daptif (Adaptive): Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change
Code of Conduct:
1. Quickly adapt to be better.
2. Continuously adapt following technological development.
3. Act proactively.

K olaboratif (Collaborative): Build synergic cooperation
Code of Conduct:
1. Offer opportunities to various parties to contribute.
2. Be open to cooperation in creating added value.
3. Encourage the use of various resources for common goals.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN

Meaning of Company Logo

PP
PRESISI

Logogram

Terdiri dari huruf "PP" dan 8 garis lengkung dengan ketentuan warna sebagai berikut.
Consists of the letters "PP" and 8 curved lines with the following color requirements.

- Warna dasar : Putih
  Base color : White
- Warna logo (lambang) : Biru tua
  Color of the logo (symbol) : Dark blue

Logotype

Logotype "PRESISI" menggunakan *font* Sans Serif yang mewakili ketegasan dan kekokohan. Pemilihan font Sans Serif juga menambahkan nilai integritas perusahaan melalui produk yang kokoh.
The "PRESISI" logotype uses a Sans Serif font representing assertiveness and robustness. The font choice also adds value to the Company's integrity through solid products.

Warna dasar putih berarti Perusahaan berkarya tanpa pamrih.

A white color base means the Company is ready to work selflessly.

Warna logo (lambang) biru tua berarti berkarya dengan setia dan patuh.

The dark blue logo (symbol) color means to work upholding loyalty and obedience principles.

PP

PP adalah singkatan dari Pembangunan Perumahan.

PP is an abbreviation of Pembangunan Perumahan (Residential Development).

8 garis lengkung berarti:

The eight curved lines mean:

- Perusahaan berkarya di 8 penjuru angin (di mana saja).
  The Company operates in eight corners of the wind (any place).
- Perusahaan didirikan pada bulan kedelapan (Agustus).
  The Company was established in the eighth month (August).
- Lingkaran yang terbentuk oleh 8 garis lengkung berarti kesatuan tujuan yang utuh.
  A circle formed by the eight curved lines means a complete unity of purpose.

KEGIATAN USAHA SERTA PRODUK DAN LAYANAN JASA

Business Activities, Products and Services

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR DAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan yang terakhir diubah dan disahkan melalui Akta No. 40 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris, di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0042779.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022, maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa konstruksi, *Engineering Procurement and Construction* (EPC), jasa mekanikal elektrikal, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, perdagangan, jasa pertambangan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis, industri pengolahan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, dan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION AND CONDUCTED BUSINESS ACTIVITIES

Per the Articles of Association of the Company, which was last amended and ratified by Deed No. 40 dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, and validated by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0042779. AH.01.02. of 2022 dated June 23, 2022, the purposes and objectives of the Company are to engage in construction services, Engineering Procurement and Construction (EPC), mechanical electrical services, transportation and warehousing, rental and leasing activities without option rights, employment, travel agents and other business support, trading, mining services, architectural and engineering activities as well as technical consulting, processing industry, capacity building services in construction, engineering, and planning services, as well as developing and optimizing the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain or pursue profits in increasing the Company's value by applying Limited Liability Company principles.

Therefore, the Company may carry out the following business activities.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities per the Articles of Association	**Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha** Information of Business Activities Implementation
Konstruksi Construction	
Konstruksi gedung Building construction	√
Konstruksi prapabrikasi bangunan gedung Prefabricated construction of buildings	√
Konstruksi jalan dan jalan rel Road and railway construction	√
Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah Irrigation canal system, communication, and wastewater construction	√
Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya Irrigation canal system, communication, and other wastewater construction	x
Konstruksi bangunan sipil lainnya Other civil building construction	√
Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya Other special civil building construction	√

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities per the Articles of Association	**Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha** Information of Business Activities Implementation
Konstruksi prapabrikasi bangunan sipil Prefabricated construction of civil buildings	√
Pembongkaran Demolition	√
Penyiapan lahan Land preparation	√
Instalasi sistem kelistrikan Electrical system installation	√
Instalasi saluran air (*plumbing*), pemanas, dan pendingin Plumbing, heating, and cooling installation	√
Instalasi konstruksi lainnya Other construction installation	√
Penyelesaian konstruksi bangunan Building construction completion	√
Konstruksi khusus lainnya Other special construction	x
Pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringannya Electrical mechanical work including grid installation	√
***Engineering Procurement & Construction* (EPC)**	
Perminyakan Oil	x
Agro industri Agro-industry	x
Kelistrikan Electricity	x
Telekomunikasi Telecommunication	x
Petrokimia Petrochemical	x
Pengangkutan dan Pergudangan Transportation and Warehousing	
Angkutan jalan rel untuk penumpang Rail transport for passengers	x
Angkutan jalan rel untuk barang Rail transport for cargo	x
Angkutan bus dalam trayek Routed bus transport	x
Angkutan bus tidak dalam trayek Non-routed bus transport	x
Angkutan melalui saluran pipa Pipeline transport	x
Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek Routed, non-bus land for passengers	x
Angkutan darat lainnya untuk penumpang Other land transport for passengers	x
Angkutan darat untuk barang Land transport for cargo	x
Angkutan jalan rel perkotaan dan wisata untuk penumpang Rail transport for city and tourism area for passengers	x
Angkutan jalan rel lainnya Other rail transport	x
Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang Domestic sea transport for passengers	x
Angkutan laut luar negeri untuk penumpang Overseas sea transport for passengers	x

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities per the Articles of Association	**Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha** Information of Business Activities Implementation
Angkutan laut dalam negeri untuk barang Domestic sea transport for cargo	x
Angkutan laut luar negeri untuk barang Overseas sea transport for cargo	x
Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan untuk penumpang River, lake, and crossing transport for passengers	x
Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan untuk barang River, lake and crossing transport for cargo	x
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Rental and Leasing Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support	
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya Rental and leasing without option right for cars, buses, trucks, and similar vehicles	√
Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif Rental and leasing activities without option right for creative industry machines and equipment	x
Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya Rental and leasing activities without option right for machinery, tools, and other tangible goods	x
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Rental and Leasing Activities without Option Right for Transportation Right	
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih Rental and leasing activities without option right for non-motorized land transportation vehicles with four or more wheels	x
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air Rental and leasing activities without option right for water transportation	x
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi lainnya Rental and leasing activities without option right of other means transportation	x
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trading, Car and Motorcycle Repair and Service	
Perdagangan mobil Car trading	√
Reparasi dan perawatan mobil Car repair and service	x
Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil Car spareparts and accessories trading	x
Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya Motorcycle trading, reparation, and service as well as motorcycle spareparts and accessories trading	x
Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak Fee or contract-based wholesale trading	x
Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya Wholesale of machinery, equipment and other supplies	x
Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan Wholesale of building material and supplies	√
Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL Wholesale of other products including scraps and parts that cannot be classified in other places	x
Perdagangan besar berbagai macam barang Wholesale of various items	x
Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko In-store retail trading for building equipment and material, paints and glasses	x
Industri Pengolahan Processing Industry	
Industri barang refraktori (tahan api) Refractory industry	x
Industri bahan bangunan dari tanah liat atau keramik Clay or ceramic-based building material industry	x

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities per the Articles of Association	**Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha** Information of Business Activities Implementation
Industri semen, kapur, dan gips Cement, lime and plaster industry	x
Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes Cement, lime, gypsum and asbestos-based industry	x
Industri barang dari batu Stone-based industry	x
Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL Other non-metal mineral-based industry that cannot be classified in other places	x
Industri barang logam siap pasang untuk bangunan Metal goods industry ready to install for buildings	x
Industri logam dasar besi dan baja Iron and steel base metal industry	x
Industri pembuatan kapal, perahu dan struktur bangunan terapung Shipbuilding, boat, and floating structure construction industry	x
Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Mining and Excavation Supporting Activities	
Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam Oil and gas mining supporting activities	x
Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya Other mining and excavation supporting activities	√
Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Professional, Scientific, and Technical Activities	
Aktivitas kantor pusat Head office activities	√
Aktivitas konsultasi manajemen Management consulting activities	x
Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu Architectural and engineering activities as well as related technical consultancy	x
Analisis dan uji teknis Technical analysis and testing	x
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa Research and development of natural science as well as technological and engineering sciences	x
Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi Capability improvement services in construction field	x
Jasa *engineering* dan perencanaan Engineering and planning services	√
Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/ angkutan darat serta perdagangan umum Engage in supplier business, agency services, import and export handling services and freight/land transport services, as well as general trading	x
Melakukan Usaha dalam Bidang Agro Industri yang Meliputi Pabrik Kelapa Sawit, Gula Biodiesel, Bioethanol, Biogas dan Biomassa Energi Termasuk Pengoperasian, Produksi, Pemeliharaan serta Pendistribusian Engage in Agro Industry Sector Business, including Palm Oil Mills, Biodiesel Sugar, Bioethanol, Biogas, and Biomass Energy, including Operation, Production, Maintenance, and Distribution	
Industri minyak mentah/murni kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak goreng kelapa sawit Crude palm oil and cooking palm oil industry	x
Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya Crude oil and other vegetable and animal fatty oil industry	x
Industri gula Sugar industry	x
Industri bahan bakar dan minyak pelumas hasil pengilangan minyak bumi Fuel and lubricating oil industry from petroleum refining activities	x
Industri kimia dasar Basic chemical industry	x
Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik Engage in Agro Industry sector includes factory	x

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities per the Articles of Association	**Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha** Information of Business Activities Implementation
Melakukan Usaha dalam Bidang Jasa dan Teknologi Informasi dan Kepariwisataan Engage in the Service Sector and Tourism and Information Technology	
Aktivitas agen perjalanan Travel agency activities	x
Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata Tourism information and tourist attraction	x
Melakukan usaha dalam bidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam Engage in industrial services sector for variety of metal special processing and metal goods	x
Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di Bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur) Termasuk Jalan Tol, dan Industri Investment and/or Business Management in Basic Infrastructure and Facilities, Including Toll Roads and Industry	
Infrastruktur jalan tol, kereta api, dan pelabuhan Toll road, railway, and port infrastructure	x
Energi dan energi terbarukan Energy and renewable energy	x
Industri Pabrikasi Fabrication Industry	
Reparasi produk logam pabrikasi: reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap Fabrication metal product reparation: repair of ready-to-install metal products for buildings, tanks, water reservoirs, and steam generators	x
Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor Repair of other transport, non-motorized vehicles	x
Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, rambu dan sejenisnya Sawmill and wood, rattan, and bamboo preservation industry	x
Industri *veneer*, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya Plywood, veneer, and similar wood industry	x
Industri barang bangunan dari kayu Wood-based building material industry	x
Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi Finished goods material and component fabrication	x
Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung Mechanical and electrical for construction, industry, and building	√
Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lainnya yang menunjang usaha pokok Perusahaan tersebut di atas Electronic, and other business communication to support the Company's main business	x
Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi Finished goods material and Component Fabrication	x
Overseas (proyek seberang lautan) Overseas	x
Industri alat angkutan lainnya golongan pokok ini mencakup alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya Other means of transportation industry, main classes include other means of transportation such as manufacture of axes and boats, railroad lorry/carriage and locomotives, aircraft and spacecraft along with the spare parts	x
Penyedia tenaga listrik Electricity supply	x
Penunjang tenaga listrik Electricity support	x
Pengadaan distribusi gas alam dan buatan Natural and artificial gas procurement and distribution	x
Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es Procurement of steam/hot water, cold air, and ice production	x

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities per the Articles of Association	**Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha** Information of Business Activities Implementation
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Procurement of Water, Waste Management and Recycling, Waste and Garbage Disposal and Cleaning	
Treatment air Water treatment	√
Pengumpulan air limbah Wastewater collection	x
Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya Non-hazardous waste collection	√
Pengumpulan limbah berbahaya Hazardous waste collection	√
Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya Hazardous wastewater treatment and disposal	x
Pengadaan Air Water Procurement	
Industri minuman ringan Soft drink industry	x
Industri air kemasan dan air minum isi ulang Bottled water and drinking water refill industry	x
Industri minuman lainnya Other beverage industry	x
***Treatment* dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya** Non-Hazardous Waste Treatment and Disposal	
Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya Non-hazardous waste treatment and disposal	√
Produksi kompos sampah organik Organic waste compost production	x
Treatment dan pembuangan limbah berbahaya Hazardous waste treatment and disposal	x
Pengelolaan Sampah dan Pemulihan Material Waste Management and Material Recovery	
Pemulihan material Material recovery	x
Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya Waste and other waste remediation activities and management	x
Transportasi dan pergudangan Transportation and warehousing	x
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Warehousing and Transportation Support Services	
Pergudangan dan penyimpanan Warehousing and storage	x
Aktivitas penunjang angkutan darat Land transport support activities	x
Aktivitas penunjang angkutan perairan Water transport support activities	x
Penanganan kargo (bongkar muat barang) Cargo handling (loading and unloading)	x
Aktivitas kebandarudaraan dan jasa pelayanan navigasi penerbangan Airport activities and flight navigation services	x
Aktivitas penunjang angkutan lainnya Other transportation support activities	x

√ = Sudah Dilaksanakan :: x = Belum Dilaksanakan
√ = Executed :: x = Not Executed Yet

SURAT IZIN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan telah mendapatkan surat izin usaha dari lembaga yang berwenang.

BUSINESS LICENSE

The Company has obtained necessary business licenses from authorized institutions to carry out its business activities.

Nama Surat Izin Business License Name	Lembaga Pemberi Issuance Body	Masa Berlaku Validity Period
Nomor Induk Berusaha Business Identification Number	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	30 Oktober 2018 sampai dengan Perusahaan Sudah Tidak Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya October 30, 2018, until the Company Stopped Running Its Business and/or Activities
Izin Usaha Jasa Pertambangan Mining Service Business License	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	16 Agustus 2023 s.d 22 Juni 2028 August 16, 2023 to June 22, 2028
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Konstruksi Gedung Perbelanjaan) Construction Business Entity Certificate (Shopping Building Construction)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	6 Januari 2023 s.d. 5 Januari 2026 January 6, 2023 to January 5, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Konstruksi Gedung Lainnya) Construction Business Entity Certificate (Other Building Construction)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	4 April 2023 s.d. 3 April 2026 April 4, 2023 to April 3, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) Construction Business Entity Certificate (Road Civil Building Construction)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	21 Desember 2022 s.d. 20 Desember 2025 December 21, 2022 to December 20, 2025
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Flyover* dan *Underpass*) Construction Business Entity Certificate (Civil Building Construction of Bridges, Elevated Roads, Flyovers and Underpasses)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	3 Februari 2023 s.d. 2 Februari 2026 February 3, 2023 to February 2, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Konstruksi Jalan Rel) Construction Business Entity Certificate (Railroad Construction)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	6 Maret 2023 s.d. 5 Maret 2026 March 6, 2023 to March 5, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Konstruksi Bangunan Jaringan Irigasi dan Drainase) Construction Business Entity Certificate (Irrigation and Drainage Network Building Construction)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	28 Februari 2023 s.d. 27 Februari 2026 February 28, 2023 to February 27, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air) Construction Business Entity Certificate (Water Resources Infrastructure Building Construction)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	26 Januari 2023 s.d. 25 Januari 2026 January 26, 2023 to January 25, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan) Construction Business Entity Certificate (Non-Fishery Port Building Construction)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	2 Februari 2023 s.d. 1 Februari 2026 February 2, 2023 to February 1, 2026

Nama Surat Izin Business License Name	**Lembaga Pemberi** Issuance Body	**Masa Berlaku** Validity Period
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Instalasi Mekanikal) Construction Business Entity Certificate (Mechanical Installation)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	2 Januari 2023 s.d. 1 Januari 2026 January 2, 2023 to January 1, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Instalasi Minyak dan Gas) Construction Business Entity Certificate (Oil and Gas Installation)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	2 Januari 2023 s.d. 1 Januari 2026 January 2, 2023 to January 1, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang) Construction Business Entity Certificate (Foundation and Pile Installation)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	1 April 2023 s.d. 31 Maret 2026 April 1, 2023 to March 31, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Perkerasan Aspal) Construction Business Entity Certificate (Asphalt Pavement)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	1 April 2023 s.d. 31 Maret 2026 April 1, 2023 to March 31, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Pekerjaan Struktur Beton) Construction Business Entity Certificate (Concrete Structure Work)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	8 April 2023 s.d. 7 April 2026 April 8, 2023 to April 7, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Pemasangan Kerangka Baja) Construction Business Entity Certificate (Erection of Steel Framework)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	8 April 2023 s.d. 7 April 2026 April 8, 2023 to April 7, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator) Construction Business Entity Certificate (Construction Equipment Rental With Operator)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	25 Januari 2023 s.d. 24 Januari 2026 January 25, 2023 to January 24, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Penyiapan Lahan Konstruksi) Construction Business Entity Certificate (Construction Land Preparation)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	11 Maret 2023 s.d. 10 Maret 2026 March 11, 2023 to March 10, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Pekerjaan Tanah) Construction Business Entity Certificate (Earthwork)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	8 April 2023 s.d. 7 April 2026 April 8, 2023 to April 7, 2026
Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (Pemasangan Perancah (*Steiger*)) Construction Business Entity Certificate (Erection of Scaffolding (Steiger))	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Investments/Investment Coordinating Board	20 Maret 2023 s.d. 19 Maret 2026 March 20, 2023 to March 19, 2026
Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Oil and Gas Supporting Business Capacity Certificate	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources	1 Oktober 2023 sampai dengan Perusahaan Sudah Tidak Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya October 1, 2023, until the Company Stopped Running Its Business and/or Activities

PRODUK DAN JASA

Sampai dengan tahun 2023, Perusahaan dan Entitas Anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi telah memiliki alat berat sebanyak 3.074 unit yang terdiri dari:

PRODUCTS AND SERVICES

Until 2023, the Company and its Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi, have 3,074 heavy equipment units consisting of:

2.912 *Large Scale Fleet (Mobile)*	Unit
Articulated Dump truck	9
Asphalt Distributor	4
Asphalt Finisher	9
Baby Roller	6
Backhoe Loader	3
Breaker	83
Bulldozer	147
Car Mix	3
Cold Milling	1
Cold Recycling	0
Compressor	15
Concrete Paver	10
Concrete Pump	12
Crawler Dump Truck	1
Dump Truck	1.496
Excavator	511
Flat Deck	4
Forklift	4
Fuel Truck	29
Generating Set	87
Grapple	1
Impact Roller	1
Manhauler	24
Mine Pump	1
Motor Grader	38
Pile Hammer	3
Ripper	17
Self Loader	2
Skid Steer Loader	2
Submersible Pump	1
Tandem Roller	15
Telehandler	1
Tower Lamp	17
Tractor	1
Truck Boogie	1
Truck Box	1
Truck Crane	7
Truck Dolly	1
Truck Head	0
Truck Mixer	88
Truck Service	4
Tyre Roller	18
Vibro Roller	146
Water Tank Truck	38
Wheel Excavator	10
Wheel Loader	35
Truck Mounted Crane	5

162 *Large Scale Fleet (Non-Mobile)*	Unit
Asphalt Mixing Plant	6
Batching Plant	18
Cement Deep Mixing	2
Crane Pancang	2
Crawler Crane	15
CSD	2
Drilling Rig	9
Launcher Gantry	2
Passenger Hoist	22
Placing Boom	1
Stone Crusher	17
Tower Crane	66

LINI BISNIS

Konstruksi

Mining Services

Perusahaan mengembangkan *Capacity Engineering* melalui diversifikasi pada bidang jasa pertambangan secara komprehensif mulai dari *overburden*, *ore hauling*, hingga *barging*. Didukung oleh pengalaman Perusahaan pada bidang pertambangan. Perusahaan secara berkesinambungan mengoptimalkan aset dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan. Berikut daftar proyek yang dikerjakan pada tahun 2023.

BUSINESS LINES

Construction

Mining Services

The Company develops Capacity Engineering through comprehensive diversification in the mining services sector from overburden and ore hauling to barging. Supported by its experiences in the mining sector. the Company continuously optimizes its assets and equipment to provide the best service to every customer. The list of projects undertaken in 2023 is as follows.

Proyek *Mining Services* Tahun 2023
Mining Services Projects in 2023

Nama Proyek Project Name	**Status Pengerjaan** Status		
	Selesai Completed	**Dalam Proses** In Progress	**Belum Dimulai** Not Started Yet
Hauling Roads Upgrade Weda Bay Nickel Hauling Roads Upgrade Weda Bay Nickel	√		
Secondary Hauling Weda Bay Nickel Secondary Hauling Weda Bay Nickel		√	
Mining Development Weda Bay Nickel Mining Development Weda Bay Nickel		√	
Hauling Road Upgrade Heng Jaya Hauling Road Upgrade Heng Jaya	√		
Mining Haul Road and Bridge From Kao Rahai To Tofu Weda Bay Nickel Mining Haul Road and Bridge From Kao Rahai To Tofu Weda Bay Nickel		√	
Pembangunan Jembatan Makarti, Morowali Construction of Makarti Bridge, Morowali	√		
Camp Sonic Bay Weda Bay Project Camp Sonic Bay Weda Bay Project	√		
Mines of Bahadopi Block 2 and 3 Project Above Ground and Infrastructure Mines of Bahadopi Block 2 and 3 Project Above Ground and Infrastructure		√	
Quarry Development PT Vale Indonesia Quarry Development PT Vale Indonesia		√	
Mining Development and Operation Weda Bay Nickel Mining Development and Operation Weda Bay Nickel		√	

Civil Work

Cakupan *civil work* Perusahaan, yaitu pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi atau kanal, bendungan, terowongan, struktural gedung, jalan, jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan pengeboran, dan pembukaan lahan. Saat ini, pekerjaan sipil yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi pekerjaan proyek infrastruktur, di antaranya pekerjaan proyek jalan, bendungan, dan dermaga. Dalam masing-masing proyek, Perusahaan melakukan pekerjaan pembukaan lahan, *cut and fill*, pengerasan lapisan jalan, beton, serta *rigid/flexible pavement*. Berikut daftar proyek yang dikerjakan pada tahun 2023.

Civil Work

The Company's civil works include the construction of ports, airports, railroads, coastal safeguards, irrigation channels or canals, reservoirs, tunnels, building structures, roads, bridges, swamp reclamations, pipe installations, drillings, and land clearing. Currently, the civil works carried out by the Company include infrastructure projects, among others, works on roads, reservoirs, and docks. In every project, the Company performs land clearing, cut and fill, road paving, concrete, and rigid/flexible pavement. The list of projects undertaken in 2023 is as follows.

Proyek *Civil Works* Tahun 2023
Civil Works Projects in 2023

Nama Proyek Project Name	**Status Pengerjaan** Status		
	Selesai Completed	**Dalam Proses** In Progress	**Belum Dimulai** Not Started Yet
Perusahaan Company			
Tol Indrapura Kisaran Indrapura Kisaran Toll Road		√	
Tol Cinere Kukusan Cinere Kukusan Toll Road	√		
Dermaga Ibu Kota Nusantara (IKN) The New State Capital (IKN) Pier	√		
Pemancangan PMJ Land Tower PMJ Land Tower Construction		√	
KSO Pembangunan Jalur KA Lintas Medan - Binjai KSO Medan-Binjai Railway Line Construction		√	
KSO Saringan Sampah KSO Garbage Filter	√		
KSO Jembatan GORR Gorontalo KSO GORR Gorontalo Bridge		√	
KSO Pelabuhan SKPT Saumlaki KSO SKPT Saumlaki Port		√	
Entitas Anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi Subsidiary, PT Lancarjaya Mandiri Abadi			
Pembangunan Bangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Construction of the State Palace Building and Ceremonial Grounds in the Presidential Palace Area in the National Capital		√	
Pembangunan Gedung Kemensetneg Construction of the Ministry of State Secretariat Building	√		
Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 Construction Services Construction of Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Package 3	√		
Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden Pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Presidential Office Building Construction in the Presidential Palace Area in the National Capital		√	
Pembangunan Rumah Susun ASN 1 Construction of ASN 1 Flats		√	
Pembangunan Jalan Akses Seksi Tol 6C-1: SP. 3 ITCI Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Timur KIPP Construction of Toll Road Section 6C-1 Access Road: SP. 3 ITCI Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Timur KIPP		√	
Pekerjaan Jalan Kerja Kawasan Sub BWP 1.B dan 1.C Sub-BWP Area Work Road Pack 1.B and 1.C	√		
Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 Construction Work of Cinere-Jagorawi Toll Road Section 3	√		
VO IKPP Karawang (Box Cvl, Overpass, Sungai Ex Pbs, Boiler) VO IKPP Karawang (Box Cvl, Overpass, Ex Pbs River, Boiler)	√		
VO *Landscape & Toll Road Connection* Bandara Kediri VO Kediri Airport Landscape & Toll Road Connection		√	

Selain itu, *civil work* juga mencakup *structure work* yang merupakan pekerjaan struktur dasar dari bangunan konstruksi/fondasi seperti penggalian tanah dan penguatan struktur tanah untuk memperkuat daya tanah yang menjamin kestabilan fondasi. Selain pekerjaan fondasi, Perusahaan juga memberikan layanan jasa pekerjaan *formwork*, yaitu konstruksi pendukung sementara dalam pembuatan beton.

Apart from that, civil work also includes structure work or the basic structural work of building construction/ foundations, such as excavating soil and strengthening soil structures to improve the strength of the soil, which ensures the stability of the foundation, the Company provides formwork services, i.e., temporary support construction in concrete production.

Berikut daftar proyek yang dikerjakan pada tahun 2023.

The list of projects undertaken in 2023 is as follows.

Proyek *Structure Work* Tahun 2023
Structure Work Projects in 2023

Nama Proyek Project Name	**Status Pengerjaan** Status		
	Selesai Completed	**Dalam Proses** In Progress	**Belum Dimulai** Not Started Yet
Capital Square Surabaya Surabaya Capital Square	√		
Warehouse Depok Depok Warehouse	√		
KOM Karawang KOM Karawang	√		
MIG Data Center MIG Data Center	√		

Ready Mix/Production Plant

Lini bisnis *production plant*, Perusahaan terdiri dari *ready mix*, *batching plant*, *asphalt mix plant*, dan *stone crusher*. *Batching plant* baik pada *ready mix (cement)* maupun *asphalt* dan *crusher* berperan dalam mengolah material-material campuran atau batuan dasar menggunakan formulasi khusus, sehingga menghasilkan beton cor siap pakai maupun material aspal dan batu *split* yang siap disajikan pada area proyek.

Ready Mix/Production Plant

The Company's production plant business consists of the ready mix, batching plant, asphalt mix plant, and stone crusher. Batching plants in the ready mix (cement), as well as asphalt and crusher, have a role in processing mixed materials or bedrock using special formulations, resulting in ready-to-use cast concrete as well as asphalt and split stone materials ready to be used in the desired project area.

Berikut daftar proyek yang dikerjakan pada tahun 2023.

The list of projects undertaken in 2023 is as follows.

Proyek *Production Plant* Tahun 2023
Production Plant Projects in 2023

Nama Proyek Project Name	**Status Pengerjaan** Status		
	Selesai Completed	**Dalam Proses** In Progress	**Belum Dimulai** Not Started Yet
Batching Plant Indrapura Kisaran Batching Plant Indrapura Kisaran	√		
Batching Plant KIT Batang Batching Plant KIT Batang	√		
Batching Plant Ipal Batang Batching Plant Ipal Batang	√		
Batching Plant Xinhai Batang Batching Plant Xinhai Batang	√		
Batching Plant Bangunan Pabrik Siap Pakai Batang Ready-to-Use Factory Building Batching Plant in Batang	√		

Penyewaan Alat Berat

Penyewaan alat berat merupakan lini bisnis Perusahaan sebelum melakukan transformasi bisnis. Sampai saat ini, Perusahaan tetap mempertahankan bisnis tersebut. Perusahaan memberikan jasa yang lengkap dengan memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan, prima, dan perawatan berjangka.

Heavy Equipment Rental

Heavy equipment rental is the Company's business before performing a business transformation. The Company is still retaining this business. The Company provides complete services by ensuring the availability of reliable, excellent equipment and periodic maintenance.

JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI

Business Network and Operational Area

Proyek PPRE PPRE Projects	
• Jalan Tol Indrapura Kisaran Indrapura Kisaran Toll Road • Mining Development Weda Bay Nickel Mining Development Weda Bay Nickel • Hauling Roads Upgrade Weda Bay Nickel Weda Bay Nickel Hauling Roads Upgrade • Mining Haul Road and Bridge from Kao Rahai To Tofu Weda Bay Nickel Mining Haul Road and Bridge from Kao Rahai To Tofu Weda Bay Nickel	• Secondary Hauling Weda Bay Nickel Weda Bay Nickel Secondary Hauling • Hauling Road Upgrade Hengjaya Hengjaya Hauling Road Upgrade • Mandalika International Circuit Mandalika International Circuit • Cinere-Jagorawi Toll Road Cinere-Jagorawi Toll Road • Logistic Port IKN IKN Logistics Port

Proyek PT Lancarjaya Mandiri Abadi
PT Lancarjaya Mandiri Abadi Projects

- Bangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan IKN
  State Palace Building and Ceremonial Grounds in IKN Area
- Gedung Kemensetneg
  Ministry of State Secretariat Building
- Probowangi Paket 3
  Probowangi Package 3
- Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan IKN
  Presidential Office Building in IKN Area
- Rumah Susun ASN 1
  ASN 1 Flats
- Jalan Tol 6C
  6C Toll Road
- Sub BWP 1.B dan 1.C
  Sub-BWP Pack 1.B and 1.C
- Tol Cinere Kukusan Seksi 3
  Cinere Kukusan Toll Road Section 3
- IKPP Karawang
  Karawang IKPP
- *Landscape & Toll Road Connection* Bandara Kediri
  Kediri Airport Landscape & Toll Road Connection

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

Membership in Associations

Sebagai entitas anak dari PT PP (Persero) Tbk yang bergerak di bidang jasa konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia, PPRE telah terdaftar dalam keanggotaan asosiasi industri, yakni sebagai berikut:

As a subsidiary of PT PP (Persero) Tbk, a leading heavy equipment-based integrated construction service provider in Indonesia, PPRE has been registered with industry association membership, as follows:

No	**Nama Asosiasi** Association Name	**Mulai Bergabung** Join Date	**Skala Asosiasi** Association Scale	**Posisi Perusahaan di Asosiasi** Company's Position in the Association
1	Asosiasi Emiten Indonesia Association of Indonesian Issuers	29 Januari 2019 January 29, 2019	Nasional National	Anggota Member
2	Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS) Association of National Construction Executor (ASPEKNAS)	21 Desember 2022 December 21, 2022	Nasional National	Anggota Member
3	Perkumpulan Pelaksana Pekerjaan Infrastruktur Mandiri Association of Independent Infrastructure Work Executors	27 Desember 2022 December 27, 2022	Nasional National	Anggota Member
4	Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) Indonesian Mining Services Association (ASPINDO)	5 Januari 2023 January 5, 2023	Nasional National	Anggota Member

Workshop PT PP Presisi Tbk, Bekasi

Head Office PT PP Presisi Tbk, Jakarta

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Struktur Organisasi PPRE
Organizational Structure of PPRE

per 31 Desember 2023
as of December 31, 2023

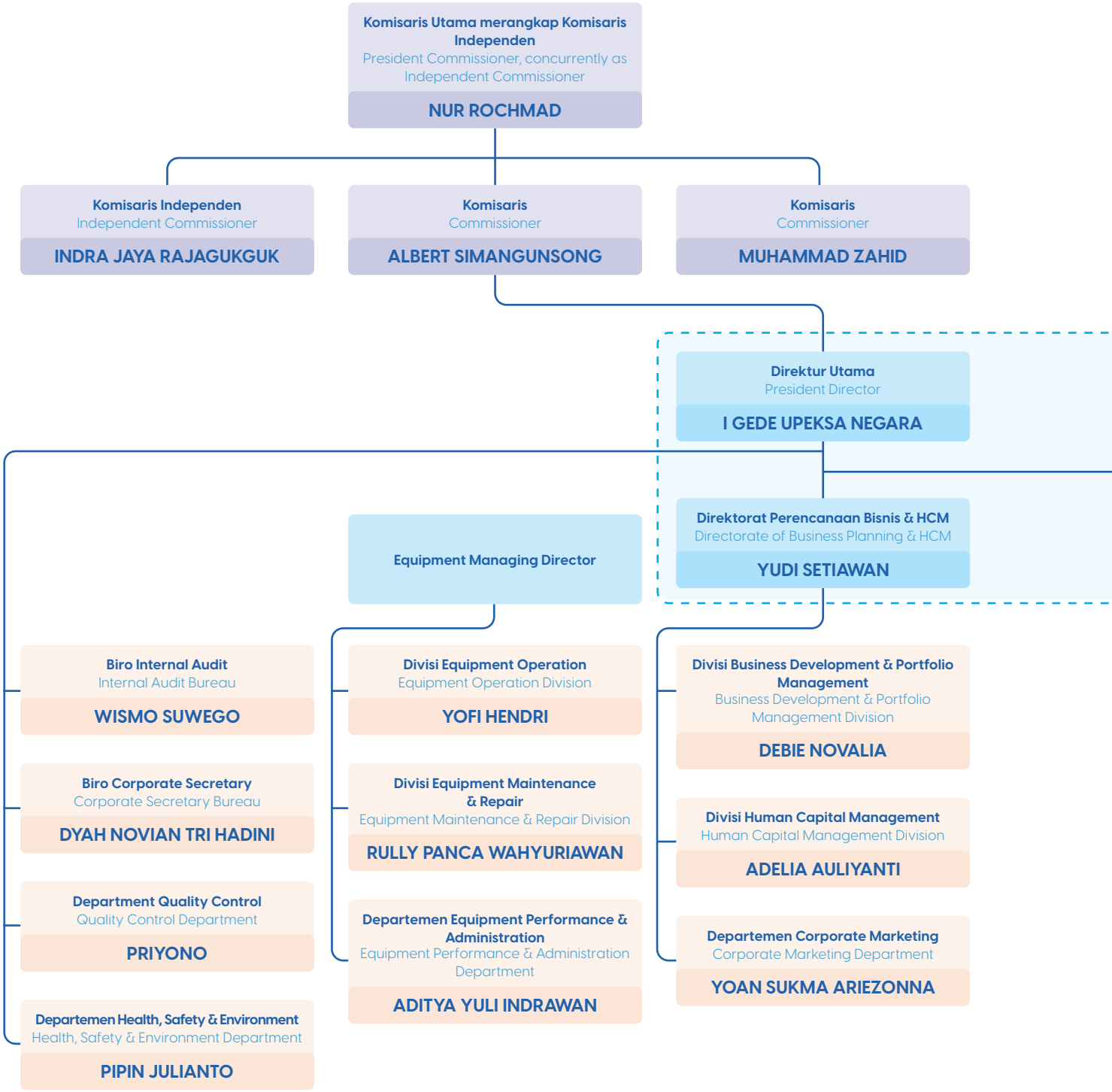

Dengan terus memperhatikan perkembangan bisnis ke depan, PPRE telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dan diharapkan setiap lini organisasi mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tujuan Perusahaan. Struktur organisasi Perusahaan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 244/SK/PPRE/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Keeping future business developments in mind, PPRE has established the appropriate organizational structure and each organizational line is expected to be able to carry out its function and duties according to the Company's objectives. The Company's organizational structure has been established through Decree No. 244/SK/PPRE/VIII/2023 on August 7, 2023.

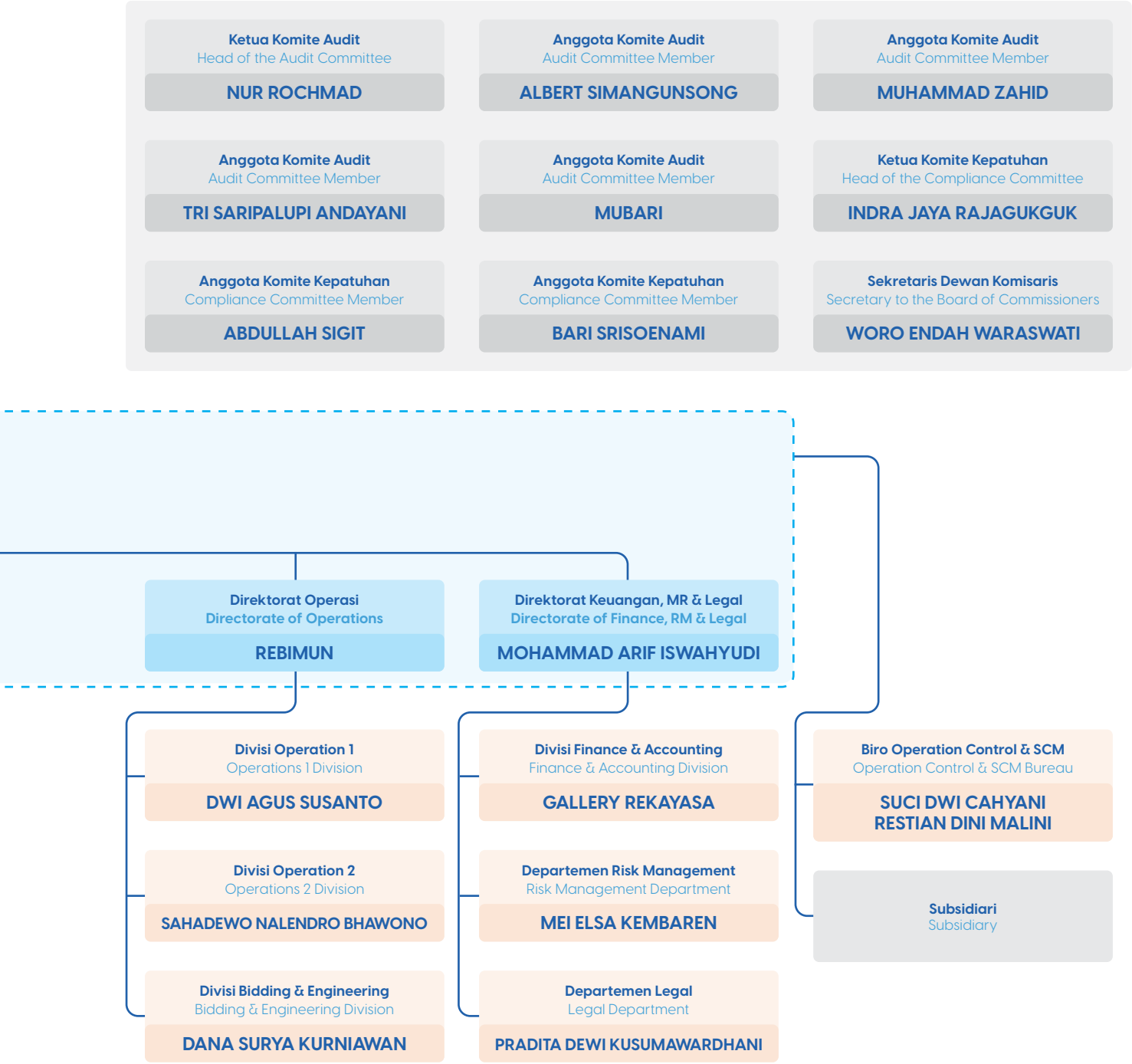

SUSUNAN DAN PROFIL DEWAN KOMISARIS

Structure and Profile of the Board of Commissioners

Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Chronology of Changes in the Board of Commissioners

Periode 1 Januari s.d 24 Mei 2023 January 1 to May 24, 2023	**Periode 24 Mei s.d 31 Desember 2023** May 24 to December 31, 2023	**Keterangan** Description
Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama) (President Commissioner)		Yul Ari Pramuraharjo diberhentikan dengan hormat dari jabatan Komisaris Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. Pemberhentian beliau dilakukan untuk memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN. Yul Ari Pramuraharjo was honorably dismissed as a President Commissioner since the 2022 Annual GMS on May 24, 2023. His dismissal was to enforce the provisions regarding concurrent positions as stated in the Regulation of the Minister of SOE.
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	**Albert Simangunsong** (Komisaris) (Commissioner)	-
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	**Indra Jaya Rajagukguk** (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	-
Nur Rochmad (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	**Nur Rochmad** (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023, Nur Rochmad diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Independen. Pada kesempatan yang sama, Nur Rochmad diangkat untuk menjabat Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. At the Annual GMS held on May 24, 2023, Nur Rochmad was dismissed from his position as an Independent Commissioner. Simultaneously, Nur Rochmad was appointed as the President Commissioner, concurrently as an Independent Commissioner.
	Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	Muhammad Zahid diangkat untuk menjabat Komisaris sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. Muhammad Zahid was appointed as a Commissioner since the 2022 Annual GMS on May 24, 2023.

NUR ROCHMAD

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner

Periode Jabatan: 24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode Kedua
Term of Office: May 24, 2023, until the GMS that will be held in 2028, Second Term

Data Pribadi	Personal Data
Warga negara Indonesia	Indonesian
Usia 64 tahun	64 years old
Kelahiran Jepara, 21 Maret 1959	Born in Jepara on March 21, 1959
Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia	Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat pada jajaran Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada tanggal 24 Mei 2023 yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 40 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 20 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022. Jabatan ini merupakan periode kedua dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

History of Appointment and Legal Basis

Serving in the Company's Board of Commissioners as an Independent Commissioner on May 24, 2023, appointed according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 40 dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of five years until the GMS that will be held in 2028. Previously, he has served as an Independent Commissioner since April 20, 2022, according to the Deed of Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholder No. 39 dated April 27, 2022. This position is his second term of office on the Company's Board of Commissioners.

Pendidikan

- Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2009)
- Magister (S2) Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya (2001)
- Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang (1983)

Education

- Doctor of Law from Universitas Padjadjaran, Bandung (2009)
- Master of Law from Universitas Airlangga, Surabaya (2001)
- Bachelor of Law from Universitas Diponegoro, Semarang (1983)

Sertifikasi Profesi

Tidak ada

Professional Certification

None

Riwayat Profesi

- Senior Advisor Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 (2021-sekarang)
- Staff Ahli Otoritas Jasa Keuangan (2020-2022)
- Komisaris Independen PT PP (Persero) Tbk (2019-2022)
- Ketua Komite Audit PT PP (Persero) Tbk (2019-2022)
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2015-2019)
- Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (2015)
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2014)
- Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (2013)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (2012)
- Kepala Pusat Penerangan Hukum (2011)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (2010)
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2008)
- Pengkaji pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2007)
- Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Umum Lain Keamanan dan Ketertiban Umum pada Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (2006)
- Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2004)
- Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (2003)
- Kepala Kejaksaan Negeri Bandung (2001)
- Kepala Bagian Rumah Tangga Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2001)
- Kepala Kejaksaan Negeri Bali (2000)
- Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (1999)
- Kasi Pidsus Kejaksaan Republik Indonesia - Tanjung Perak (1995)
- Kasi Pidsus Kejaksaan Republik Indonesia - Temanggung (1994)
- Kasi Datun Kejaksaan Republik Indonesia - Kendari (1992)
- Kasi Pidsus Pada Kejaksaan Republik Indonesia - Sultra (1991)
- Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Republik Indonesia - Brebes (1989)
- Jaksa Fungsional Pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (1987)
- Pegawai Tata Usaha Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (1984)

Professional History

- Senior Advisor at Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 (2021-present)
- Expert Staff at the Financial Services Authority (2020-2022)
- Independent Commissioner at PT PP (Persero) Tbk (2019-2022)
- Head of Audit Committee at PT PP (Persero) Tbk (2019-2022)
- Deputy Attorney General on General Crimes at the Indonesian Attorney General's Office (2015-2019)
- Chairman of the Indonesian Prosecutor Association (2015)
- Deputy Attorney General on Civil Affairs and Administration at the Indonesian Attorney General's Office (2014)
- Deputy III at the Indonesian Coordinating Ministry of Politics, Law, and Security (2013)
- Head of the Provincial Prosecutor's Office of North Sumatera (2012)
- Head of Legal Information Center (2011)
- Head of the Provincial Prosecutor's Office of Gorontalo (2010)
- Deputy Head of the Provincial Prosecutor's Office of DKI Jakarta (2008)
- Reviewer of the Deputy Attorney General on Special Crimes at the Indonesian Attorney General's Office (2007)
- Head of Subdirectorate on Other Crimes, General Security and Public Order at the Directorate of Executionary Legal Action and Examination of Deputy Attorney General on General Crimes (2006)
- Assistant on General Crimes at the Provincial Prosecutor's Office of DKI Jakarta (2004)
- Intelligence Assistant at the Provincial Prosecutor's Office of East Java (2003)
- Head of Prosecutor's Office of Bandung (2001)
- Head of Household Section of the Indonesian Attorney General's Office (2001)
- Head of Prosecutor's Office of Bali (2000)
- Head of Administration Section of the Provincial Prosecutor's Office of East Java (1999)
- Head of Special Crime Section of the Indonesian Prosecutor's Office - Tanjung Perak (1995)
- Head of Special Crime Section of the Indonesian Prosecutor's Office - Temanggung (1994)
- Head of Civil Affairs and State Administration of the Indonesian Prosecutor's Office - Kendari (1992)
- Head of Special Crime Section of the Indonesian Prosecutor's Office - North Sulawesi (1991)
- Functional Attorney at the Indonesian Prosecutor's Office - Brebes (1989)
- Functional Attorney at the Deputy Attorney General on Special Crimes (1987)
- Administrative Employee at the Deputy Attorney General on General Crimes (1984)

Rangkap Jabatan	Concurrent Position
Di dalam Perusahaan: Ketua Komite Audit (2022-sekarang) **Di luar Perusahaan**: Senior Advisor Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 (2021-sekarang)	**In the Company**: Head of Audit Committee (2022-present) **Outside the Company**: Senior Advisor at Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 (2021-present)
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.
Penghargaan	**Awards**
• Penghargaan Satya Lencana Karyasatya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia (2012) • Penghargaan Jasa dan Kontribusi penanganan Kasus MV Silver Sea 2 Kategori Penuntutan dari kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2017) • Hasan Wirayuda Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri (2018) • Bintang Jasa Nararya dari Presiden Republik Indonesia (2019)	• The 20-Year Satya Lencana Karyasatya Award from the President of Indonesia (2012) • Appreciation of Service and Contribution for handling the MV Silver Sea 2 Case in the Prosecution Category from the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2017) • The Hasan Wirayuda Indonesian Citizen Protection Award from the Ministry of Foreign Affairs (2018) • The Bintang Jasa Nararya Award from the President of Indonesia (2019)
Kepemilikan Saham di PPRE	**Share Ownership in PPRE**
Per 31 Desember 2023 beliau tidak memiliki saham di PPRE.	As of December 31, 2023, he does not own any shares in PPRE.

Keterangan: Pernyataan independensi dari Komisaris Independen dapat dilihat dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Laporan Tahunan ini.
Note: The statement of independence from the Independent Commissioner can be viewed in the Good Corporate Governance chapter in this Annual Report.

INDRA JAYA RAJAGUKGUK

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan: 8 Oktober 2020 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office: October 8, 2020, until the GMS that will be held in 2025, First Term

Data Pribadi	Personal Data
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 44 tahun	44 years old
Kelahiran Pamingke, 22 Februari 1979	Born in Pamingke on February 22, 1979
Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia	Domiciled at DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum	History of Appointment and Legal Basis
Menjabat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 18 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.	Serving as an Independent Commissioner as of October 8, 2020, according to the Deed of Resolution of the Extraordinary GMS No. 18 dated October 19, 2020, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of service of five years until the GMS that will be held in 2025. This position is his first term of office, and previously, he has never served on the Company's Board of Commissioners.
Pendidikan	**Education**
Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Padjajaran (2004).	Bachelor of Law from Universitas Padjajaran (2004).
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Tidak ada	None
Riwayat Profesi	**Professional History**
• Wakil Komite Audit PT PP Presisi Tbk (2021) • Ketua Komite Audit PT PP Presisi Tbk (2020-2021) • Legal Manager PT Tagar Hexa Utama (2016-2020) • Redaktur PT Tunas Karya Media (Baranews.co) (2014-2019) • Staf Pemasaran Konstruksi PT Bintang Milenium Perkasa (2010-2016) • Advokat Kantor Hukum Johnson Siregar dan Partner (2008-2009) • Legal and Corporate Secretary Bank Bumi Asih (2005-2006)	• Deputy Head of Audit Committee at PT PP Presisi Tbk (2021) • Head of Audit Committee at PT PP Presisi Tbk (2020-2021) • Legal Manager at PT Tagar Hexa Utama (2016-2020) • Editor at PT Tunas Karya Media (Baranews.co) (2014-2019) • Construction Marketing Staff at PT Bintang Milenium Perkasa (2010-2016) • Advocate at Johnson Siregar and Partner Law Firm (2008-2009) • Legal and Corporate Secretary at Bank Bumi Asih (2005-2006)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Ketua Komite Kepatuhan (2021-sekarang) **Di luar Perusahaan**: Tidak ada	**In the Company**: Head of Compliance Committee (2021-present) **Outside the Company**: None
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham di PPRE	**Share Ownership in PPRE**
Per 31 Desember 2023 beliau tidak memiliki saham di PPRE.	As of December 31, 2023, he does not own shares in PPRE.

Keterangan: Pernyataan independensi dari Komisaris Independen dapat dilihat dalam bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Laporan Tahunan ini.
Note: The statement of independence from the Independent Commissioner can be viewed in the Good Corporate Governance chapter in this Annual Report.

ALBERT SIMANGUNSONG

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027, Periode Pertama
Term of Office: April 20, 2022, until the GMS that will be held in 2027, First Term

Data Pribadi	Personal Data
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 50 tahun	50 years old
Kelahiran Jakarta, 1 Desember 1973	Born in Jakarta on December 1, 1973
Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia	Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum	History of Appointment and Legal Basis
Menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.	Serving as a Commissioner as of April 20, 2022, according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 39 dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of five years until the GMS that will be held in 2027. This term of office is the first term, and previously, he has never served on the Company's Board of Commissioners.
Pendidikan	**Education**
• Magister (S2) Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia, Jakarta (2007) • Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta (1999)	• Master of Social and Political Science from Universitas Indonesia, Jakarta (2007) • Bachelor of Civil Engineering from Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta (1999)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Tidak ada	None
Riwayat Profesi	**Professional History**
Direktur Utama PT Arto Group (1999-2002)	President Director of PT Arto Group (1999-2002)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Wakil Ketua Komite Audit (2022-sekarang) **Di luar Perusahaan**: Tidak ada	**In the Company**: Deputy Head of the Audit Committee (2022-present) **Outside the Company**: None
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham di PPRE	**Share Ownership in PPRE**
Per 31 Desember 2023 beliau tidak memiliki saham di PPRE.	As of December 31, 2023, he does not own shares in PPRE.

MUHAMMAD ZAHID

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode Pertama
Term of Office: May 24, 2023, until the GMS that will be held in 2028, First Term

Data Pribadi	Personal Data
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 53 tahun	53 years old
Kelahiran Gresik, 15 Mei 1970	Born in Gresik on May 15, 1970
Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum	History of Appointment and Legal Basis
Menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 24 Mei 2023 yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 41 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.	Serving as a Commissioner as of May 24, 2023, appointed according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 41 dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of five years until the GMS that will be held in 2028. This term of office is the first term, and previously, he has never served on the Company's Board of Commissioners.
Pendidikan	**Education**
Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2003)	Bachelor of Economics from Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2003)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Tidak ada	None
Riwayat Profesi	**Professional History**
• SVP Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PP (Persero) Tbk (2021-sekarang) • Tim PUB Obligasi IV PT PP (Persero) Tbk Tahun 2024 (2023) • Tim Organisasi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT PP (Persero) Tbk (2023) • Senior Manajer Keuangan dan SDM Infra 2 PT PP (Persero) Tbk (2017-2021) • Asisten Keuangan Cabang 4, Jawa Barat PT PP (Persero) Tbk (2016-2017) • Asisten Keuangan Cabang 3, Jakarta PT PP (Persero) Tbk (2014-2016) • Asisten Keuangan Cabang 4, Jawa Barat PT PP (Persero) Tbk (2007-2014) • Site Administration Manager (SAM) Kantor Cabang IX (Siak) - PT PP (Persero) Tbk (2007) • Site Administration Manager (SAM) Kantor Cabang IV (Riau) - PT PP (Persero) Tbk (2006-2007) • Site Administration Manager (SAM) Kantor Cabang IV, (Dumai) - PT PP (Persero) Tbk (2004-2008)	• SVP of Accounting and Finance Division of PT PP (Persero) Tbk (2021-present) • Shelf Registration Bonds IV Public Offering Team of PT PP (Persero) Tbk of 2024 (2023) • Anti-Bribery Compliance Organization Team (FKAP) Anti-Bribery Management System of PT PP (Persero) Tbk (2023) • Senior Manager of Finance and Infra 2 HC of PT PP (Persero) Tbk (2017-2021) • Financial Assistant of Branch 4, West Java, PT PP (Persero) Tbk (2016-2017) • Financial Assistant of Branch 3, Jakarta, PT PP (Persero) Tbk (2014-2016) • Financial Assistant of Branch 4, West Java, PT PP (Persero) Tbk (2007-2014) • Site Administration Manager (SAM) of Branch Office IX (Siak) - PT PP (Persero) Tbk (2007) • Site Administration Manager (SAM) of Branch Office IV (Riau) - PT PP (Persero) Tbk (2006-2007) • Site Administration Manager (SAM) of Branch Office IV (Dumai) - PT PP (Persero) Tbk (2004-2008)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Wakil Ketua Komite Audit (2023-sekarang) **Di luar Perusahaan**: SVP Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PP (Persero) Tbk (2021-sekarang)	**In the Company**: Deputy Head of the Audit Committee (2023-present) **Outside the Company**: SVP of Finance and Accounting Division of PT PP (Persero) Tbk (2021-present)
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya. Namun memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali dalam hal jabatannya sebagai SVP Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PP (Persero) Tbk.	He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. However, he is affiliated with the major and controlling shareholder related to his position as the SVP of Finance and Accounting Division of PT PP (Persero) Tbk.
Kepemilikan Saham di PPRE	**Share Ownership in PPRE**
Per 31 Desember 2023 beliau memiliki saham di PPRE sebanyak 967.300 lembar saham.	As of December 31, 2023, he owns as many as 967,300 shares in PPRE.

SUSUNAN DAN PROFIL DIREKSI

Structure and Profile of the Board of Directors

Kronologis Perubahan Susunan Direksi
Chronology of Changes in the Board of Directors

Periode 1 Januari s.d 23 Februari 2023 January 1 to February 23, 2023	**Periode 23 Februari s.d 24 Mei 2023** February 23 to May 24, 2023	**Periode 24 Mei s.d 31 Desember 2023** May 24 to December 31, 2023	**Keterangan** Description
Rully Noviandar (Direktur Utama) (President Director)	**Rully Noviandar** (Direktur Utama) (President Director)		Rully Noviandar diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. Oleh Pemegang Saham, beliau ditugaskan di tempat yang lain. Rully Noviandar was honorably dismissed as the President Director as of the 2022 Annual GMS dated May 24, 2023. By Shareholders, he was assigned to a different location.
M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	**M Arif Iswahyudi** (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	**M Arif Iswahyudi** (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	-
M Darwis Hamzah (Direktur Operasi) (Director of Operations)			M Darwis Hamzah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Operasi sejak RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023. Oleh Pemegang Saham, beliau ditugaskan di tempat yang lain. M. Darwis Hamzah was honorably dismissed as the Director of Operations as of the Extraordinary GMS dated February 23, 2023. By Shareholders, he was assigned to a different location.
Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	**Rebimun** (Direktur Operasi) (Director of Operations)	**Rebimun** (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Pada RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2023, Rebimun diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM. Pada kesempatan yang sama, Rebimun diangkat untuk menjabat Direktur Operasi. In the Extraordinary GMS held on February 23, 2023, Rebimun was dismissed as the Director of Business Planning and HCM. Simultaneously, Rebimun was appointed as the Director of Operations.
	Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	**Yudi Setiawan** (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	Yudi Setiawan diangkat untuk menjabat Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM sejak RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023. Yudi Setiawan was appointed as the Director of Business Planning and HCM as of the Extraordinary GMS dated February 23, 2023.
		I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) (President Director)	I Gede Upeksa diangkat untuk menjabat Direktur Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. I Gede Upeksa was appointed as the President Director as of the 2022 Annual GMS dated May 24, 2023.

I GEDE UPEKSA NEGARA

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode Pertama
Term of Office: May 24, 2023 until the GMS that will be held in 2028, First Term

Data Pribadi	Personal Data
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 51 tahun	51 years old
Kelahiran Buleleng, 28 Agustus 1972	Born in Buleleng on August 28, 1972
Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia	Domiciled in Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum	History of Appointment and Legal Basis
Menjabat sebagai Direktur Utama pada tanggal 24 Mei 2023 yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 40 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.	Serving as the President Director as of May 24, 2023, appointed according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 40 dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of five years until the GMS that will be held in 2028. This position is his first term of office, and previously, he has never served on the Company's Board of Directors.
Pendidikan	**Education**
Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997).	Bachelor of Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997).
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Tidak ada	None
Riwayat Profesi	**Professional History**
• Komisaris Utama PT PP Tirta Riau (2022-2023) • Direktur Utama PT PP Infrastruktur (2022-2023) • Direktur Utama PT Properti Tbk (2021-2022) • Direktur Komersial PT PP Infrastruktur (2021) • Komisaris PT Kawasan Industri Terpadu Batang (2020-2021) • Komisaris PT Citra Waspphutowa (2020-2021) • Komisaris PT CIP Surabaya (2019-sekarang) • SVP Head of Business Development & Investment Division PT PP (Persero) Tbk (2018-2021) • General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 1 Division PT PP (Persero) Tbk (2017-2018) • General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 2 Division PT PP (Persero) Tbk (2017) • Kepala Cabang VI PT PP (Persero) Tbk (2015-2017) • Junior Professional Project Manager PT PP (Persero) Tbk (2013-2015) • Project Manager PT PP (Persero) Tbk (2009-2013) • Site Operation Manager PT PP (Persero) Tbk (2007-2009) • Site Engineer Manager PT PP (Persero) Tbk (2004-2007)	• President Commissioner of PT PP Tirta Riau (2022-2023) • President Director of PT PP Infrastruktur (2022-2023) • President Director of PT Properti Tbk (2021-2022) • Director of Commercial of PT PP Infrastruktur (2021) • Commissioner of PT Kawasan Industri Terpadu Batang (2020-2021) • Commissioner of PT Citra Waspphutowa (2020-2021) • Commissioner of PT CIP Surabaya (2019-present) • SVP Head of Business Development & Investment Division at PT PP (Persero) Tbk (2018-2021) • General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 1 Division at PT PP (Persero) Tbk (2017-2018) • General Manager, Head of Operation Department Infrastructure 2 Division at PT PP (Persero) Tbk (2017) • Head of Branch VI at PT PP (Persero) Tbk (2015-2017) • Junior Professional Project Manager at PT PP (Persero) Tbk (2013-2015) • Project Manager at PT PP (Persero) Tbk (2009-2013) • Site Operation Manager at PT PP (Persero) Tbk (2007-2009) • Site Engineer Manager at PT PP (Persero) Tbk (2004-2007)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Tidak ada **Di luar Perusahaan**: Komisaris PT CIP Surabaya (sejak 2019)	**In the Company**: None **Outside the Company**: Commissioner of PT CIP Surabaya (since 2019)
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham di PPRE	**Share Ownership in PPRE**
Per 31 Desember 2023 beliau memiliki saham di PPRE sebanyak 1.499.800 lembar saham.	As of December 31, 2023, he owns as many as 1,499,800 shares in PPRE.

MOHAMMAD ARIF ISWAHYUDI

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal
Director of Finance, Risk Management & Legal

Periode Jabatan: 20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027, Periode Pertama
Term of Office: April 20, 2022, until the GMS that will be held in 2027, First Term

Data Pribadi	Personal Data
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 41 tahun	41 years old
Kelahiran Surabaya, 5 Desember 1982	Born in Surabaya on December 5, 1982
Berdomisili di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia	Domiciled in Surabaya, East Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum	History of Appointment and Legal Basis
Menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022, di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.	Serving as the Director of Finance, Risk Management & Legal as of April 20, 2022, according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 39 dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of five years until the GMS that will be held in 2027. This position is his first term of office, and previously, he has never served on the Company's Board of Directors.
Pendidikan	**Education**
• Magister (S2) Investasi dan Keuangan dari Universitas Bournemouth, United Kingdom (2018) • Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya (2005)	• Master of Investment and Finance from the University of Bournemouth, United Kingdom (2018) • Bachelor of Economics in Accounting from Universitas Airlangga, Surabaya (2005)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
• Investor Relations dari Indonesia Investor Relations Institute (2021) • Registered Security Analyst dari CSA Institute (2018)	• Investor Relations from Indonesia Investor Relations Institute (2021) • Registered Security Analyst from the CSA Institute (2018)
Riwayat Profesi	**Professional History**
Senior Manager Investor Relation PT PP (Persero) Tbk (2017-2022)	Investor Relations Senior Manager at PT PP (Persero) Tbk (2017-2022)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Tidak ada **Di luar Perusahaan**: Tidak ada	**In the Company**: None **Outside the Company**: None
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham di PPRE	**Share Ownership in PPRE**
Per 31 Desember 2023 beliau tidak memiliki saham di PPRE.	As of December 31, 2023, he does not own any shares in PPRE.

REBIMUN

Direktur Operasi
Director of Operations

Periode Jabatan: 23 Februari 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode kedua
Term of Office: February 23, 2023, until the GMS that will be held in 2028, Second Term

Data Pribadi	Personal Data
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 48 tahun	48 years old
Kelahiran Purworejo, 10 Desember 1975	Born in Purworejo on December 10, 1975
Berdomisili di Bandung, Jawa Barat, Indonesia	Domiciled in Bandung, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum	History of Appointment and Legal Basis
Menjabat pada jajaran Direksi Perusahaan sebagai Direktur Operasi pada tanggal 23 Februari 2023 yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 14 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 39 tanggal 27 April 2022. Jabatan ini merupakan periode kedua dalam jajaran Direksi Perusahaan.	Serving in the Company's Board of Directors as the Director of Operations as of February 23, 2023, appointed according to the Deed of Resolution Statement of the Annual GMS No. 14 dated February 23, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of five years until the GMS that will be held in 2028. Previously, he has served as the Director of Business Planning & HCM as of April 20, 2022, according to the Deed of Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders No. 39 dated April 27, 2022. This position is his Second term of office on the Company's Board of Directors.
Pendidikan	**Education**
Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Sangga Buana YPKP (2006)	Bachelor of Civil Engineering from Universitas Sangga Buana YPKP (2006)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Tidak ada	None
Riwayat Profesi	**Professional History**
• Direktur Perencanaan Bisnis & HCM PT PP Presisi Tbk (2022-2023) • Project Manager Proyek Tol Semarang Demak PT PP (Persero) Tbk (2019-2022) • Project Manager Runway 3 Soetta PT PP (Persero) Tbk (2017-2019) • Project Manager WINRIP Paket 08 PT PP (Persero) Tbk (2016-2017)	• Director of Business Planning & HCM of PT PP Presisi Tbk (2022-2023) • Project Manager of the Semarang-Demak Toll Road Project at PT PP (Persero) Tbk (2019-2022) • Project Manager of Runway 3 of Soetta at PT PP (Persero) Tbk (2017-2019) • Project Manager of WINRIP Pack 8 at PT PP (Persero) Tbk (2016-2017)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Tidak ada **Di luar Perusahaan**: Tidak ada	**In the Company**: None **Outside the Company**: None
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham di PPRE	**Share Ownership in PPRE**
Per 31 Desember 2023 beliau tidak memiliki saham di PPRE.	As of December 31, 2023, he does not own any shares in PPRE.

YUDI SETIAWAN

Direktur Perencanaan Bisnis & HCM
Director of Business Planning & HCM

Periode Jabatan: 23 Februari 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode Pertama
Term of Office: February 23, 2023, until the GMS that will be held in 2028, First Term

Data Pribadi	Personal Data
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 44 tahun	44 years old
Kelahiran Bandar Lampung, 2 Juni 1979	Born in Bandar Lampung on June 2, 1979
Berdomisili di Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia	Domiciled in West Bandung, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum	History of Appointment and Legal Basis
Menjabat sebagai Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 14 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta untuk masa jabatan 5 (lima) tahun hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028. Jabatan ini merupakan periode pertama, sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.	Serving as the Director of Business Planning and HCM as of February 23, 2023, according to the Deed of Resolution Statement of the Extraordinary GMS No. 14 dated February 23, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, for a term of office of five years until the GMS that will be held in 2028. This position is his first term of office, and previously, he has never served on the Company's Board of Directors.
Pendidikan	**Education**
• Magister (S2) Manajemen dari Universitas Pancasila (2020) • Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Negeri Lampung (2002)	• Master of Management from Universitas Pancasila (2020) • Bachelor of Civil Engineering from Universitas Negeri Lampung (2002)
Sertifikasi Profesi	**Professional Certification**
Tidak ada	None
Riwayat Profesi	**Professional History**
• GM Operasi Divisi Gedung PT PP (Persero) Tbk (2021-2023) • GM Operasi Divisi Gedung 2 PT PP (Persero) Tbk (2017-2021) • Kepala Departemen Teknik Divisi Infrastruktur 1 PT PP (Persero) Tbk (2017) • Kepala Bagian Teknik Divisi Operasi IV PT PP (Persero) Tbk (2015-2017) • Project Manager PT PP (Persero) Tbk (2014-2015) • Asisten Operasi Cabang IX Divisi Operasi I PT PP (Persero) Tbk (2012-2014) • Project Manager PT PP (Persero) Tbk (2009-2012) • Site Engineering Manager PT PP (Persero) Tbk (2005-2009) • Staf Teknik, Quality Control, Pengendalian Operasional Proyek PT PP (Persero) Tbk (2002-2005)	• GM of Operations of the Building Division at PT PP (Persero) Tbk (2021-2023) • GM of Operations of the Building 2 Division at PT PP (Persero) Tbk (2017-2021) • Head of Engineering Department, Infrastructure 1 Division at PT PP (Persero) Tbk (2017) • Head of Engineering Section, Operations IV Division at PT PP (Persero) Tbk (2015-2017) • Project Manager at PT PP (Persero) Tbk (2014-2015) • Operations Assistant of Branch IX, Operations I Division at PT PP (Persero) Tbk (2012-2014) • Project Manager at PT PP (Persero) Tbk (2009-2012) • Site Engineering Manager at PT PP (Persero) Tbk (2005-2009) • Project Engineering, Quality Control, and Operational Control Staff at PT PP (Persero) Tbk (2002-2005)
Rangkap Jabatan	**Concurrent Position**
Di dalam Perusahaan: Tidak ada **Di luar Perusahaan**: Tidak ada	**In the Company**: None **Outside the Company**: None
Hubungan Afiliasi	**Affiliations**
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	He is not affiliated directly or indirectly either with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or with major and controlling shareholders.
Kepemilikan Saham di PPRE	**Share Ownership in PPRE**
Per 31 Desember 2023 beliau memiliki saham di PPRE sebanyak 1.251.800 lembar saham.	As of December 31, 2023, he owns as many as 1,251,800 shares in PPRE.

PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officials

DYAH NOVIAN TRI HADINI

Vice President, Corporate Secretary

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 21 Agustus 2023	Serving since August 21, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 35 tahun	35 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 21 Agustus 2023	Joined the Company on August 21, 2023
Dasar Pengangkatan: SK No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023	Basis of Appointment: Decree No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 21, 2023

WISMO SUWEGO

Vice President, Internal Audit

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak tanggal 22 Mei 2023	Serving since May 22, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 37 tahun	37 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 28 April 2023	Joined the Company on April 28, 2023
Dasar Pengangkatan: SK No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 22 Mei 2023	Basis of Appointment: Decree No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 dated May 22, 2023

SUCI DWI CAHYANI

Vice President, Operation Control

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak tanggal 10 Juli 2023	Serving since July 10, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 37 tahun	37 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 4 Desember 2019	Joined the Company on December 4, 2019
Dasar Pengangkatan: SK No. 143/SK/DIR/PPRE/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023	Basis of Appointment: Decree No. 143/SK/DIR/PPRE/VII/2023 dated July 10, 2023

RESTIAN DINI MALINI

Vice President, Supply Chain Management

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak tanggal 10 Juli 2023	Serving since July 10, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 38 tahun	38 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 1 Juli 2020	Joined the Company on July 1, 2020
Dasar Pengangkatan: SK No. 142/SK/DIR/PPRE/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023	Basis of Appointment: Decree No. 142/SK/DIR/PPRE/VII/2023 dated July 10, 2023

YOFI HENDRI

Vice President, Equipment Operation

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak tanggal 7 Agustus 2023	Serving since August 7, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 46 tahun	46 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 17 Juli 2023	Joined the Company on July 17, 2023
Dasar Pengangkatan: SK No. 247/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023	Basis of Appointment: Decree No. 247/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 7, 2023

RULLY PANCA WAHYURIAWAN

Vice President, Equipment Maintenance & Repair

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak tanggal 10 Juli 2023	Serving since July 10, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 39 tahun	39 years old
Bergabung di Perusahaan sejak tanggal 1 Juli 2011	Joined the Company on July 1, 2011
Dasar Pengangkatan: SK No. 245/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023	Basis of Appointment: Decree No. 245/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 7, 2023

DEBIE NOVALIA

Vice President, Business Development & Portfolio Management

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 6 November 2023	Serving since November 6, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 34 tahun	34 years old
Bergabung di Perusahaan sejak tanggal 1 Juli 2020	Joined the Company on July 1, 2020
Dasar Pengangkatan: SK No. 415/SK/DIR/PPRE/XI/2023 tanggal 6 November 2023	Basis of Appointment: Decree No. 415/SK/DIR/PPRE/XI/2023 dated November 6, 2023

ADELIA AULIYANTI

Vice President, Human Capital Management

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak tanggal 10 Juli 2023	Serving since July 10, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 37 tahun	37 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 1 Juni 2020	Joined the Company on June 1, 2020
Dasar Pengangkatan: SK No. 241/SK/DIR/PPRE/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023	Basis of Appointment: Decree No. 241/SK/DIR/PPRE/VII/2023 dated July 10, 2023

DWI AGUS SUSANTO

Vice President, Operation 1

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 7 Agustus 2023	Serving since August 7, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 52 tahun	52 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 7 Agustus 2023	Joined the Company on August 7, 2023
Dasar Pengangkatan: SK No. 246/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023	Basis of Appointment: Decree No. 246/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 7, 2023

SAHADEWO NALENDRO BHAWONO

Vice President, Operation 2

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 7 Agustus 2023	Serving since August 7, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 40 tahun	40 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 3 April 2023	Joined the Company on April 3, 2023
Dasar Pengangkatan: SK No. 248/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023	Basis of Appointment: Decree No. 248/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 7, 2023

DANA SURYA KURNIAWAN

Vice President, Bidding & Engineering

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak tanggal 10 Juli 2023	Serving since July 10, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 38 tahun	38 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 1 November 2020	Joined the Company on November 1, 2020
Dasar Pengangkatan: SK No. 138/SK/DIR/PPRE/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023	Basis of Appointment: Decree No. 138/SK/DIR/PPRE/VII/2023 dated July 10, 2023

GALLERY REKAYASA

Vice President, Finance & Accounting

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 11 September 2023	Serving since September 11, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 36 tahun	36 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 11 September 2023	Joined the Company on September 11, 2023
Dasar Pengangkatan: SK No. 324/SK/PPRE/DIR/IX/2023	Basis of Appointment: Decree No. 324/SK/PPRE/DIR/IX/2023

PRIYONO

Manager, Quality Control

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 17 Juli 2023	Serving since July 17, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 32 tahun	32 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 12 Juli 2012	Joined the Company on July 12, 2012
Dasar Pengangkatan: Surat Penempatan Tugas No. 331/M/HCM/PPRE/VII/23 tanggal 13 Juli 2023	Basis of Appointment: Letter of Duty Assignment No. 331/M/HCM/PPRE/VII/23 dated July 13, 2023

PIPIN JULIANTO

Manager, Health, Safety & Environment

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 17 Juli 2023	Serving since July 17, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 31 tahun	31 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 3 April 2017	Joined the Company on April 3, 2017
Dasar Pengangkatan: Surat Penempatan Tugas No. 335/M/HCM/PPRE/VII/23 tanggal 13 Juli 2023	Basis of Appointment: Letter of Duty Assignment No. 335/M/HCM/PPRE/VII/23 dated July 13, 2023

ADITYA YULI INDRAWAN

Manager, Equipment Performance & Administration

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 28 Agustus 2023	Serving since August 28, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 33 tahun	33 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 27 Februari 2017	Joined the Company on February 27, 2017
Dasar Pengangkatan: Memo No. 531/M/HCM/PPRE/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023	Basis of Appointment: Memo No. 531/M/HCM/PPRE/VIII/23 dated August 28, 2023

YOAN SUKMA ARIEZONNA

Marketing Manager

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 3 April 2023	Serving since April 3, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 36 tahun	36 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 1 Oktober 2020	Joined the Company on October 1, 2020
Dasar Pengangkatan: Memo No. 169/M/HCM/PPRE/III/23 tanggal 31 Maret 2023	Basis of Appointment: Memo No. 169/M/HCM/PPRE/III/23 dated March 31, 2023

MEI ELSA KEMBAREN

Manager, Risk Management

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 17 Juli 2023	Serving since July 17, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 32 tahun	32 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 17 Februari 2020	Joined the Company on February 17, 2020
Dasar Pengangkatan: Memo No. 408/M/HCM/PPRE/VII/23 tanggal 13 Juli 2023	Basis of Appointment: Memo No. 408/M/HCM/PPRE/VII/23 dated July 13, 2023

PRADITA DEWI KUSUMAWARDHANI

Manager, Legal

Data Pribadi	Personal Data
Menjabat sejak 17 Juli 2023	Serving since July 17, 2023
Warga negara Indonesia	Indonesian Citizen
Usia 30 tahun	30 years old
Bergabung di Perusahaan sejak 17 Juli 2023	Joined the Company on July 17, 2023
Dasar Pengangkatan: Memo No. 364/M/PP/SPT-HCM/2023 tanggal 13 Juli 2023	Basis of Appointment: Memo No. 364/M/PP/SPT-HCM/2023 dated July 13, 2023

DEMOGRAFI SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital Demographics

Di akhir tahun 2023, Perusahaan didukung oleh 285 karyawan, di mana jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,51% jika dibandingkan dengan jumlah karyawan di akhir tahun 2022 sebanyak 295 orang.

At the end of 2023, the Company is supported by 285 employees, which decreased by 3.51% compared to the number of employees at the end of 2022, namely 295 personnel.

Perkembangan Jumlah Karyawan Periode 2019-2023
Growth in the Number of Employees in 2019-2023

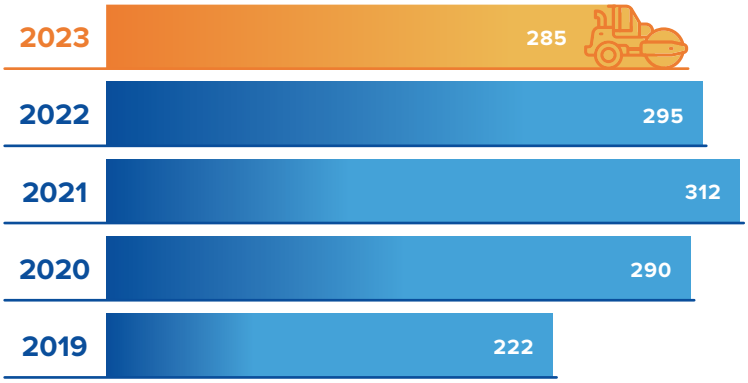

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Total Employees and Employee Composition Based on Employment Status

(orang | personnel)

Status Kepegawaian Employment Status	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	Orang Personnel	%
Tetap Permanent	167	43	210	73,68	172	37	209	70,85	1	0,48
Kontrak Contract	68	7	75	26,32	76	10	86	29,15	(11)	(12,78)
Jumlah Total	**235**	**50**	**285**	**100,00**	**248**	**47**	**295**	**100,00**	**(10)**	**(3,39)**

L = Laki-laki | P = Perempuan
L = Male | P = Female

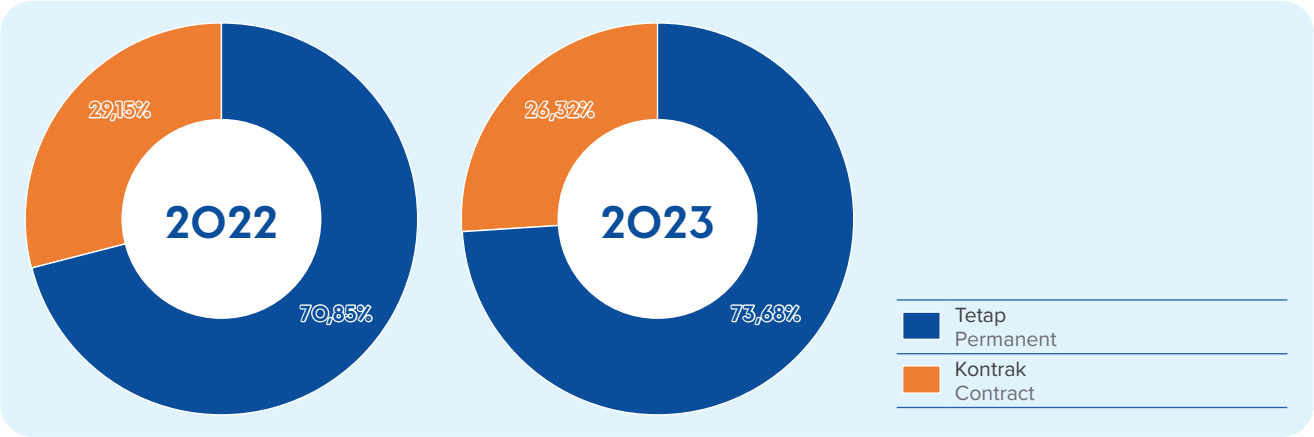

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan
Total Employees and Employee Composition Based on Position Level

(orang | personnel)

Level Jabatan Position Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	Orang Personnel	%
Staf/*Officer* Staff/Officer	207	38	245	85,96	221	39	260	88,14	(15)	(5,77)
Manager Manager	17	8	25	8,77	16	5	21	7,12	4	19,05
Kepala Biro Head of Bureau	-	-	-	-	2	2	4	1,36	(4)	(100,00)
Vice President Vice President	7	4	11	3,86	5	1	6	2,03	5	83,33
Direktur Director	4	-	4	1,40	4	-	4	1,36	-	-
Jumlah Total	**235**	**50**	**285**	**100,00**	**248**	**47**	**295**	**100,00**	**(10)**	**(3,39)**

L = Laki-laki | P = Perempuan
L = Male | P = Female

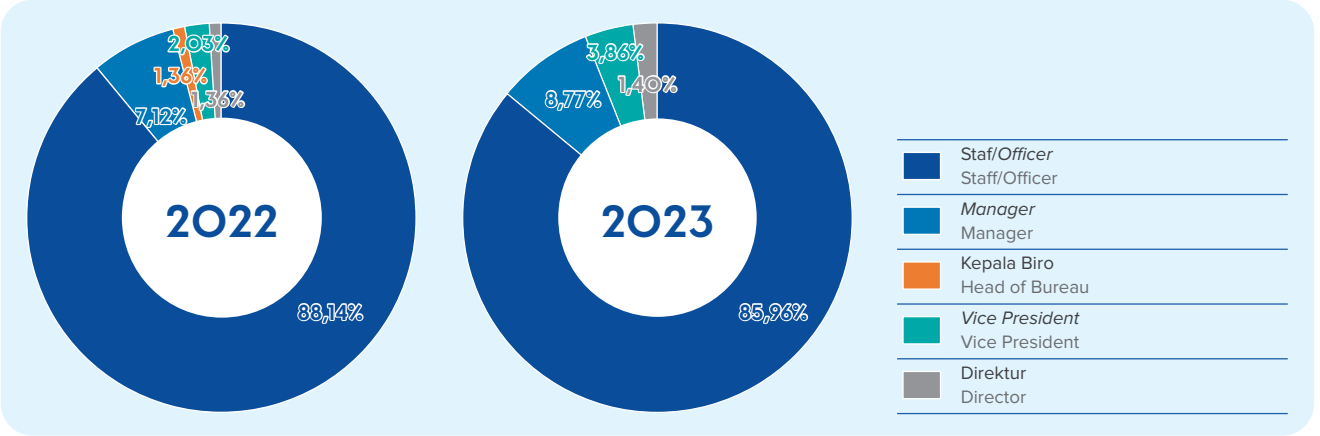

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja
Total Employees and Employee Composition Based on Work Location

(orang | personnel)

Lokasi Kerja Work Location	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	Orang Personnel	%
Proyek Project	103	4	107	37,54	118	7	125	42,37	(18)	(14,40)
Unit Kantor Pusat Head Office Unit	132	46	178	62,46	130	40	170	57,63	8	4,71
Jumlah Total	**235**	**50**	**285**	**100,00**	**248**	**47**	**295**	**100,00**	**(10)**	**(3,39)**

L = Laki-laki | P = Perempuan
L = Male | P = Female

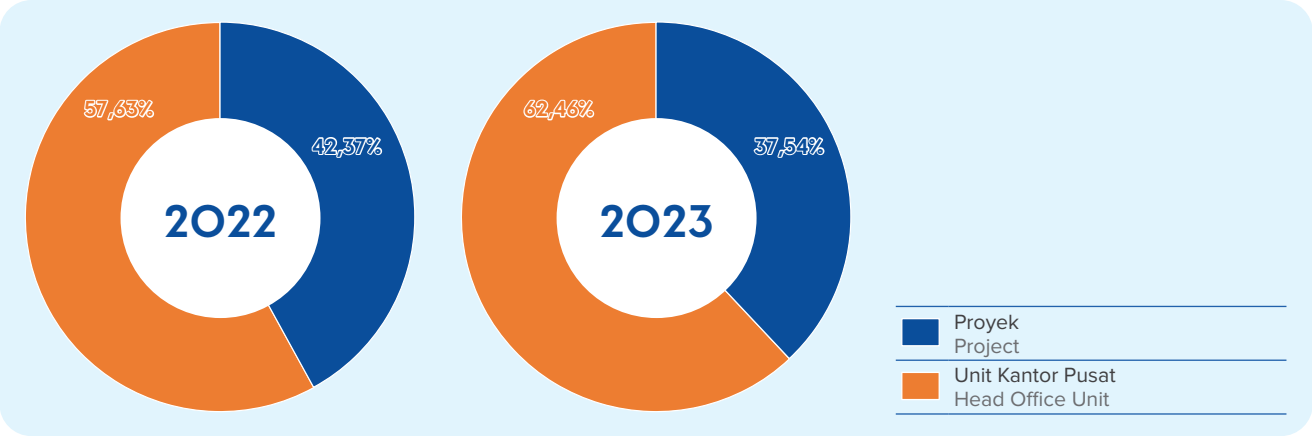

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Total Employees and Employee Composition Based on Educational Level

(orang | personnel)

Jenjang Pendidikan Educational Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	Orang Personnel	%
Magister (S2) Master's Degree	8	3	11	3,86	8	2	10	3,39	1	10,00
Sarjana (S1) Bachelor's Degree	155	44	199	69,82	164	40	204	69,15	(5)	(2,45)
Diploma (D1-D3) Diploma	25	2	27	9,47	22	3	25	8,47	2	8,00
SMA dan Sederajat High School and Equivalent	47	1	48	16,48	54	2	56	18,98	(8)	(14,29)
Jumlah Total	**235**	**50**	**285**	**100%**	**248**	**47**	**295**	**100%**	**295**	**(3,39)**

L = Laki-laki | P = Perempuan
L = Male | P = Female

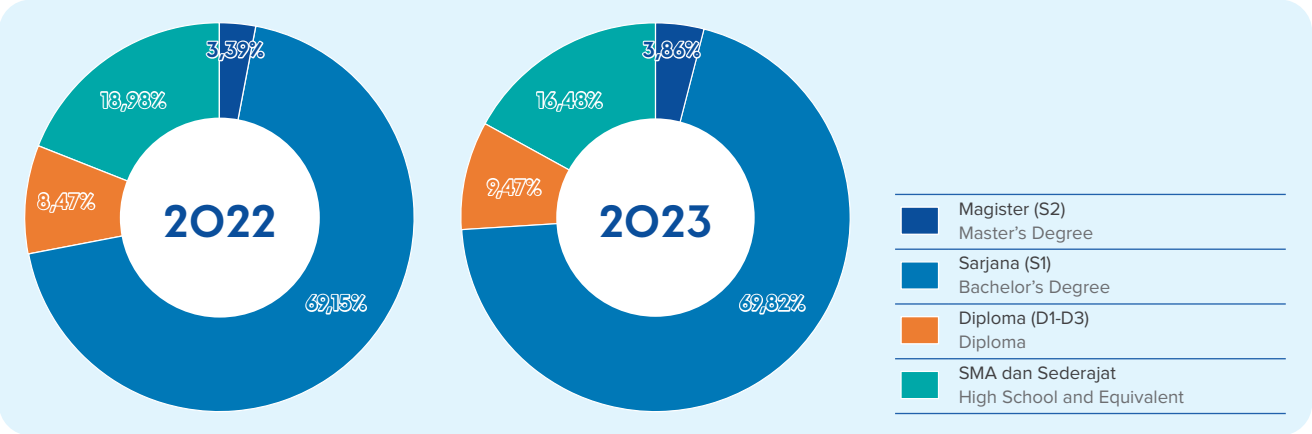

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia
Total Employees and Employee Composition Based on Age Range

(orang | personnel)

Rentang Usia Age Range	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	L (orang) (personnel)	P (orang) (personnel)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	Orang Personnel	%
> 50 tahun > 50 years old	26	-	26	9,12	39	-	39	13,22	(13)	(33,33)
41-50 tahun 41-50 years old	29	1	30	10,53	29	1	30	10,17	-	-
31-40 tahun 31-40 years old	73	14	87	30,53	63	10	72	24,41	15	20,83
19-30 tahun 19-30 years old	107	35	142	49,82	117	36	154	52,20	(12)	(7,79)
Jumlah Total	**235**	**50**	**285**	**100,00**	**248**	**47**	**295**	**100,00**	**(10)**	**(3,39)**

L = Laki-laki | P = Perempuan
L = Male | P = Female

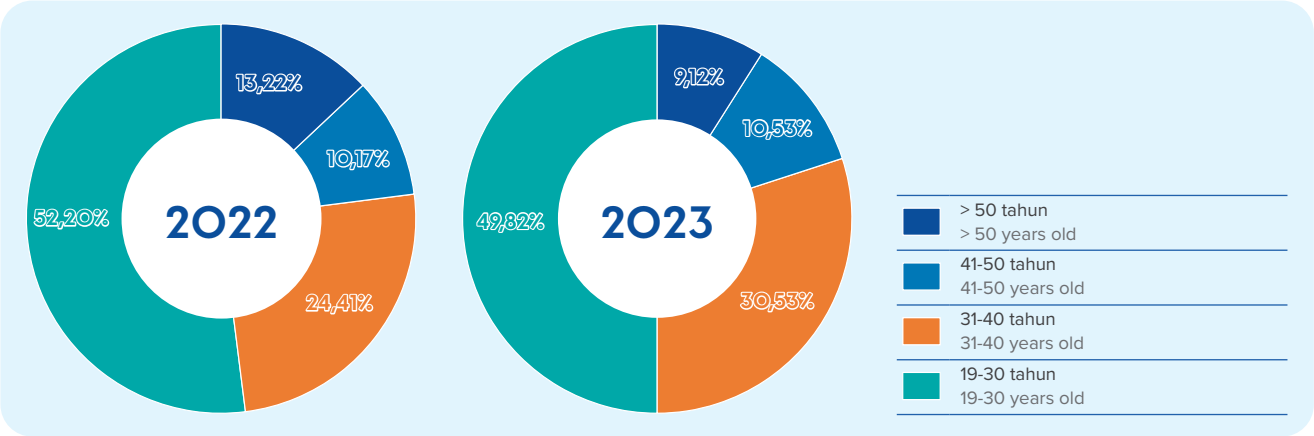

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Total Employees and Employee Composition Based on Gender

(orang | personnel)

Jenis Kelamin Gender	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah (orang) Total (personnel)	Komposisi (%) Composition (%)	Orang Personnel	%
Laki-laki Male	235	82,46	248	84,07	(13)	(5,24)
Perempuan Female	50	17,54	47	15,93	3	6,38
Jumlah Total	**285**	**100,00**	**295**	**100,00**	**(10)**	**(3,39)**

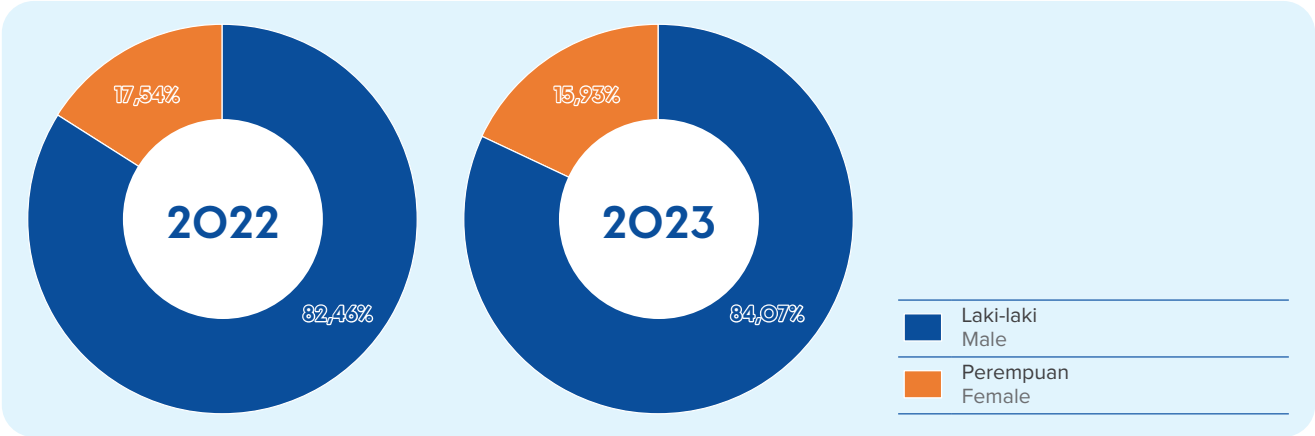

Rincian tentang pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dan komitmen PPRE untuk tumbuh bersama seluruh karyawan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Details on the fulfillment of employment rights and PPRE's commitment to growing alongside all employees can be viewed in the Sustainability Report as an inseparable document from this Annual Report.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

Chronology of Share Issuance and Listing

Informasi terkait pencatatan saham Perusahaan yang telah diterbitkan di Bursa Efek Indonesia diuraikan sebagai berikut:

The information regarding Company share listing issued in the Indonesia Stock Exchange is described as follows:

Uraian Description	**Tanggal Pelaksanaan** Date of Implementation	**Total Saham yang Diterbitkan (Lembar Saham)** Total Issued Shares (Shares)	**Harga Nominal (Rp)** Nominal Price (Rp)	**Harga Penawaran (Rp)** Offering Price (Rp)	**Total Saham Beredar (Lembar Saham)** Total Distributed Shares (Shares)
Penawaran Umum Saham Perdana Initial Public Share Offering	24 November 2017 November 24, 2017	10.224.271.000	100	430	10.224.271.000
Pembelian Kembali Saham Share Repurchase	6 Februari 2020 s.d 30 Juli 2021 February 6, 2020 to July 30, 2021	-	95-208	-	10.224.271.000

Workshop PT PP Presisi Tbk, Bekasi

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Information

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER COMPOSITION

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
Composition of Company Shareholders as of December 31, 2022, and December 31, 2023

Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	**31 Desember 2023** December 31, 2023			**31 Desember 2022** December 31, 2022		
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	**Nilai** (Rp) Value (Rp)	**Kepemilikan Saham (%)** Share Ownership (%)	**Jumlah Saham (lembar)** Total Shares (shares)	**Nilai** (Rp) Value (Rp)	**Kepemilikan Saham (%)** Share Ownership (%)
Kepemilikan di atas 5% More than 5% ownership						
PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99
Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP) Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP)	600.782.728	60.078.272.800	5,88	579.393.971	57.939.397.100	5,67
Subjumlah Kepemilikan di atas 5% Subtotal for more than 5% ownership	**8.472.262.728**	**847.226.272.800**	**82,86**	**8.450.873.971**	**845.087.397.100**	**82,66**
Kepemilikan di bawah 5% Less than 5% ownership						
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	1.570.000	157.000.000	0,02	1.570.000	157.000.000	0,02
Publik (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%) Public (each less than 5% ownership)	1.642.379.572	164.237.957.200	16,06	1.663.768.329	166.376.832.900	16,27
Subjumlah Kepemilikan di bawah 5% Subtotal for less than 5% ownership	**1.643.949.572**	**164.394.957.200**	**16,08**	**1.665.338.329**	**166.533.832.900**	**16,29**
Jumlah Saham Beredar Total Distributed Shares	**10.116.212.300**	**1.011.621.230.000**	**98,94**	**10.116.212.300**	**1.011.621.230.000**	**98,94**
Saham Tresuri (Saham yang Dibeli Kembali) Treasury Shares (Repurchased Shares)						
Jumlah Saham Tresuri Total Treasury Shares	108.058.700	10.805.870.000	1,06	108.058.700	10.805.870.000	1,06
Jumlah Saham Total Shares	**10.224.271.000**	**1.022.427.100.000**	**100,00**	**10.224.271.000**	**1.022.427.100.000**	**100,00**

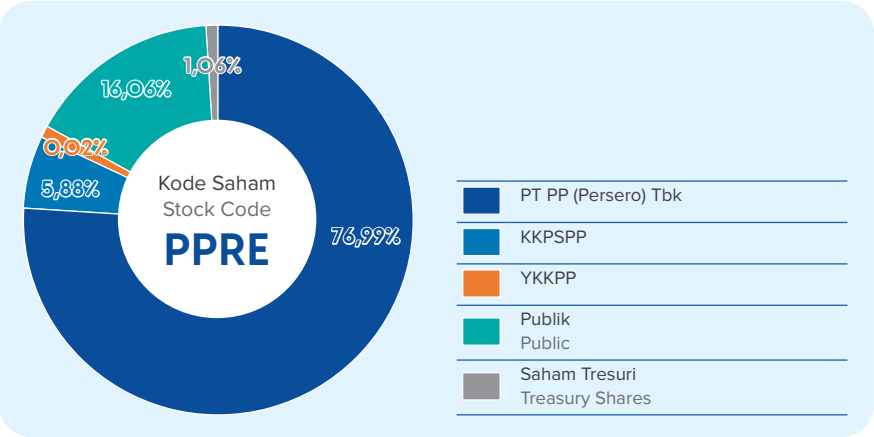

Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan ("Transaksi") paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya Transaksi. Selanjutnya, Perusahaan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas Transaksi tersebut paling lambat 10 hari sejak terjadinya Transaksi. Terkait hal tersebut, Perusahaan telah menyampaikan laporan bulanan atas kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023 dari PT Datindo Entrycom melalui *e-reporting* kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Information of Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

According to the Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.04/2017 on Ownership Report or Every Change in Public Company Share Ownership, every member of the Board of Commissioners and Board of Directors are obligated to submit information to the Company regarding their ownership and every change of the ownership of the Company's shares ("Transaction") at most three days after the Transaction occurs. Furthermore, the Company submits a report to the Financial Services Authority for the Transaction at most ten days after the Transaction occurs. Regarding the matter, the Company has submitted monthly reports of share ownership by members of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2023 from PT Datindo Entrycom through e-reporting to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.

Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, baik Langsung Maupun Tidak Langsung
Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors, Directly and Indirectly

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham PPRE secara Langsung Direct PPRE Share Ownership				Kepemilikan PPRE secara Tidak Langsung Indirect PPRE Share Ownership			
	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022		31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
Yul Ari Pramuraharjo Komisaris Utama President Commissioner	sudah tidak menjabat no longer in position		530.800	0,0051	sudah tidak menjabat no longer in position		-	-
Nur Rochmad Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-

Pemegang Saham Shareholders	**Kepemilikan Saham PPRE secara Langsung** Direct PPRE Share Ownership				**Kepemilikan PPRE secara Tidak Langsung** Indirect PPRE Share Ownership			
	31 Desember 2023 December 31, 2023		**31 Desember 2022** December 31, 2022		**31 Desember 2023** December 31, 2023		**31 Desember 2022** December 31, 2022	
	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Shares)	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership Percentage (%)	**Jumlah Saham (Lembar)** Total Shares (Shares)	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership Percentage (%)	**Jumlah Saham (Lembar)** Total Shares (Shares)	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership Percentage (%)	**Jumlah Saham (Lembar)** Total Shares (Shares)	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership Percentage (%)
Indra Jaya Rajagukguk Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Simangunsong Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhammad Zahid Komisaris Commissioner	967.300	0,009	belum menjabat have not served		-	-	belum menjabat have not served	
Direksi Board of Directors								
Rully Noviandar Direktur Utama President Director	sudah tidak menjabat no longer in position		1.527.600	0,014	sudah tidak menjabat no longer in position		-	-
I Gede Upeksa Negara Direktur Utama President Director	1.499.800	0,014	belum menjabat have not served		-	-	belum menjabat have not served	
M Arif Iswahyudi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal Director of Finance, Risk Management, and Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Rebimun Direktur Operasi Director of Operations	-	-	-	-	-	-	-	-
Yudi Setiawan Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM Director of Business Planning and HCM	1.251.800	0,012	belum menjabat have not served		-	-	belum menjabat have not served	
Muhammad Darwis Hamzah	sudah tidak menjabat no longer in position		1.874.855	0,018	sudah tidak menjabat no longer in position		-	-
Jumlah Total	**3.718.900**	**0,035**	**3.933.255**	**0,0371**	**-**	**-**	**-**	**-**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status
Shareholder Composition Based on Status

Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	31 Desember 2023 December 31, 2023			31 Desember 2022 December 31, 2022		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Kepemilikan Lokal Local Ownership						
Perorangan Individual						
Individu Lokal Local Individual	6.253	976.229.675	9,548	6.876	1.020.210.329	9,98
Institusi Institution						
Koperasi Cooperative	3	627.527.822	6,138	3	607.066.265	5,94
Yayasan Foundation	2	4.070.000	0,040	2	4.070.000	0,04
Dana Pensiun Pension Fund	4	253.839.200	2,483	4	253.839.200	2,48
Asuransi Insurance	3	150.332.100	1,470	3	150.332.100	1,47
Bank Bank	1	23.600.000	0,231	1	23.600.000	0,23
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	35	7.995.701.306	78,203	40	7.962.830.806	77,882
Lembaga Pemerintah Government Agencies	-	-	-	1	2.011.000	0,02
Reksadana Mutual Funds	4	62.423.585	0,611	3	80.242.300	0,78
Jumlah Kepemilikan Lokal Total Local Ownership	**6.305**	**10.093.723.688**	**98,723**	**6.933**	**10.104.202.000**	**98,882**
Kepemilikan Asing Foreign Ownership						
Individu Asing Foreign Individual	10	1.808.412	0,018	12	1.238.500	0,01
Institusi Asing Foreign Institution	9	20.680.200	0,202	6	10.771.800	0,11
Jumlah Kepemilikan Asing Total Foreign Ownership	**19**	**22.488.612**	**0,220**	**18**	**12.010.300**	**0,12**
Saham Treasuri Treasury Shares		108.058.700	1,057		108.058.700	1,057
Jumlah Total	**6.324**	**10.224.271.000**	**100,00**	**6.951**	**10.224.271.000**	**100,00**

Workshop PT PP Presisi Tbk, Bekasi

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir

PT PP (Persero) Tbk merupakan pemegang saham utama/ pengendali sekaligus entitas induk Perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas mencapai 76,99%. Sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas induk Perusahaan, mayoritas saham PT PP (Persero) Tbk dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebanyak 51,00%.

PT PP (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "PTPP", merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nama NV Pembangunan Perumahan berdasarkan Akta No. 48 tanggal 26 Agustus 1953. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi jasa konstruksi (gedung, sipil/infrastruktur, EPC, spesialis, *plant* dan peralatan) dan investasi (infrastruktur, properti, dan energi). Pada 9 Februari 2010, PTPP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PTPP.

Information of Major/Controlling Shareholders up to Ultimate Shareholder Entities

PT PP (Persero) Tbk is the major/controlling shareholder as well as the Company's parent entity with a major shareholding of 76.99%. As the major/controlling shareholder as well as the Company's parent entity, the majority of PT PP (Persero) Tbk's shares are owned by the Government of Indonesia, as much as 51.00%.

PT PP (Persero) Tbk, hereinafter referred to as "PTPP", is a State-Owned Enterprise established by the government of Indonesia under the name of NV Pembangunan Perumahan according to Deed No. 48 dated August 26, 1953. The scope of the Company's activities covers construction services (building, civil/infrastructure, EPC, specialist, plants, and equipment) and investment (infrastructure, property, and energy). On February 9, 2010, PTPP listed its shares on the Indonesia Stock Exchange with the stock code PTPP.

PT PP (Persero) Tbk		
Nama Perusahaan Company Name	:	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk atau disingkat PT PP (Persero) Tbk PT Pembangunan Perumahan Tbk Limited Liability Company (Persero), abbreviated into PT PP (Persero) Tbk
Informasi Perubahan Nama Information on Name Change	:	• 1971 - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan • 1961 - Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan • 1953 - NV Pembangunan Perumahan • 1971 - PT Pembangunan Perumahan Limited Liability Company (Persero) • 1961 - Pembangunan Perumahan State Enterprise (PN) • 1953 - NV Pembangunan Perumahan
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	26 Agustus 1953 August 26, 1953
Tanggal Beroperasi Date of Operations	:	26 Agustus 1953 August 26, 1953
Status Badan Hukum Legal Entity Status	:	Perseroan Terbatas (PT); Perusahaan Terbuka (Tbk); Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT); Public Company (Tbk); State-Owned Entity (SOE)
Dasar Hukum Pembentukan Legal Basis of Establishment	:	Akta No. 78 tanggal 15 Maret 1973, dibuat di hadapan Notaris Kartini Muljadi dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 249 tanggal 4 Juni 1974 Deed No. 78 dated March 15, 1973, made before Notary Kartini Muljadi and has gained the approval of the Indonesian Ministry of Justice No. Y.A.5/105/2 dated March 30, 1974, and has been announced in the Official Gazette of Indonesia No. 249 dated June 4, 1974
Bidang Usaha Business Sector	:	Konstruksi (Gedung, Sipil/Infrastruktur, EPC, Spesialis, *Plant* dan Peralatan) dan Investasi (Infrastruktur, Properti dan Energi) Construction (Building, Civil/Infrastructure, EPC, Specialist, Plant, and Equipment) and Investment (Infrastructure, Property, and Energy)

Kepemilikan Saham Share Ownership	:	• Pemerintah Republik Indonesia (51,00%) • Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) (0,03%) • Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%) (48,74%) • Saham Treasury (0,23%) • The Government of Indonesia (51.00%) • Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) (0.03%) • Public (each less than 5%) (48.74%) • Treasury Shares (0.23%)
Modal Dasar Authorized Capital	:	Rp750.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid-Up Capital	:	Rp500.000.000.000,-
Pencatatan Saham di Bursa Saham Share Listing on the Stock Exchange	:	9 Februari 2010, Bursa Efek Indonesia February 9, 2010, Indonesia Stock Exchange
Kode Saham di Bursa Saham Stock Code on the Stock Exchange	:	PTPP
Obligasi Bonds	:	• Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023 • Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023 • Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Seri B • Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Seri B • Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A dan Seri B • Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A dan Seri B • Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B • PTPP Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase III of 2023 • PTPP Shelf Registration Bonds III Phase III of 2023 • PTPP Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase II of 2022 Series A and Series B • PTPP Shelf Registration Bonds III Phase II of 2022 Series A and Series B • PTPP Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I of 2021 Series A and Series B • PTPP Shelf Registration Bonds III Phase I of 2021 Series A and Series B • PTPP Shelf Registration Bonds II Phase II of 2019 Series B
Jaringan Kelompok Usaha Business Group Network	:	9 Entitas Anak Langsung, 22 Entitas Anak Tidak langsung, 25 Entitas Asosiasi, dan 2 Kerja Sama Operasi (KSO) 9 Direct Subsidiaries, 22 Indirect Subsidiaries, 25 Associated Entities, and 2 Joint Operations (KSO)
Alamat Address	:	Plaza PP - Wisma Subiyanto Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 DKI Jakarta, Indonesia Plaza PP - Wisma Subiyanto Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, East Jakarta 13760 DKI Jakarta, Indonesia
Telepon Phone	:	+62 21 840 3883 (*hunting*)
Surel E-mail	:	corsec@ptpp.co.id
Situs Web Website	:	www.ptpp.co.id
Media Sosial Social Media	:	Facebook : PTPPTBK X : @PTPP_ID Instagram : @PTPP_ID YouTube : PT PP PERSERO TBK Linkedin : PT PP (PERSERO) TBK Tik Tok : PTPP_ID
Kontak Perusahaan Company Contact	:	Corporate Secretary Tel. : +62 21 840 3883 ext. 1016 Email : corsec@ptpp.co.id

Dewan Komisaris Board of Commissioners	:	• Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Istiono (Komisaris Independen) • Jaya Kesuma (Komisaris Independen) • Ernadhi Sudarmanto (Komisaris) • Hedy Rahadian (Komisaris) • Loso Judijanto (Komisaris) • Dhony Rahajoe (President Commissioner, concurrently as an Independent Commissioner) • Istiono (Independent Commissioner) • Jaya Kesuma (Independent Commissioner) • Ernadhi Sudarmanto (Commissioner) • Hedy Rahadian (Commissioner) • Loso Judijanto (Commissioner)
Direksi Board of Directors	:	• Novel Arsyad (Direktur Utama) • Agus Purbianto (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) • Yul Ari Pramuraharjo (Direktur Operasi bidang Infrastruktur) • Yuyus Juarsa (Direktur Operasi bidang Gedung) • Eddy Herman Harun (Direktur Operasi bidang EPC) • Sinur Linda Gustina M. (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) • Novel Arsyad (President Director) • Agus Purbianto (Director of Finance and Risk Management) • Yul Ari Pramuraharjo (Director of Infrastructure Operation) • Yuyus Juarsa (Director of Building Operation) • Eddy Herman Harun (Director of EPC Operation) • Sinur Linda Gustina M. (Director of Corporate Strategy and HCM)
Sekilas Kinerja Keuangan (per 31 Desember 2023) Brief Financial Performance (as of December 31, 2023)	:	• Jumlah Aset = Rp56.525.042.574.560,- • Jumlah Liabilitas = Rp41.381.651.241.880,- • Jumlah Ekuitas = Rp15.143.391.332.680,- • Pendapatan Usaha = Rp212.248.656.269,- • Laba Bersih Tahun Berjalan = Rp127.089.519.355,- • Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk = Rp481.365.877.654,- • Laba per Saham Dasar = Rp78,- • Total Assets = Rp56,525,042,574,560,- • Total Liabilities = Rp41,381,651,241,880,- • Total Equity = Rp15,143,391,332,680,- • Revenue = Rp212,248,656,269,- • Net Profit for the Year = Rp127,089,519,355,- • Net Profit for the Year Attributable to Owners of Parent Entity = Rp481,365,877,654,- • Basic Earnings per Share = Rp78,-

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA PTPP

PTPP Group and Business Group Structure

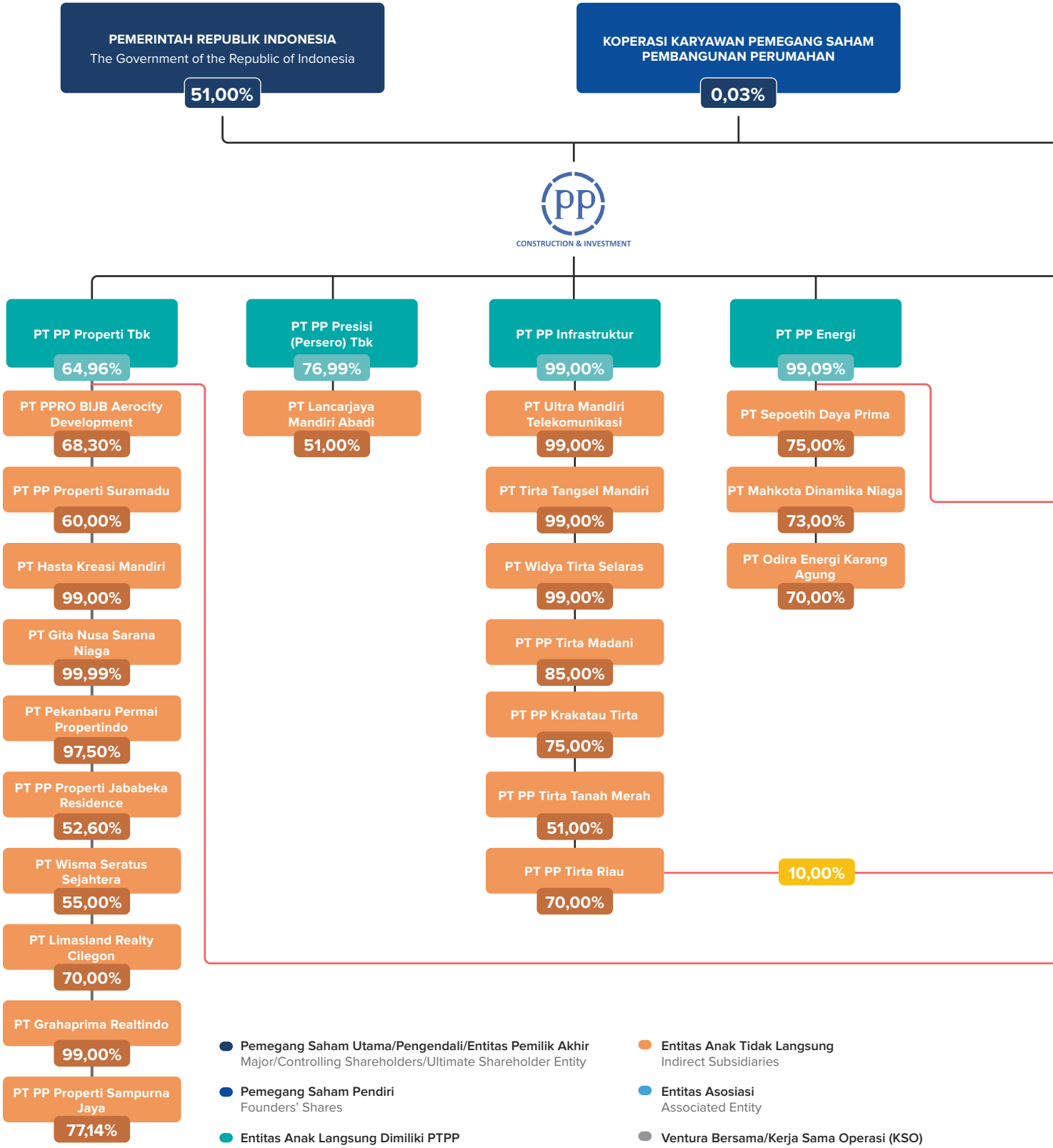

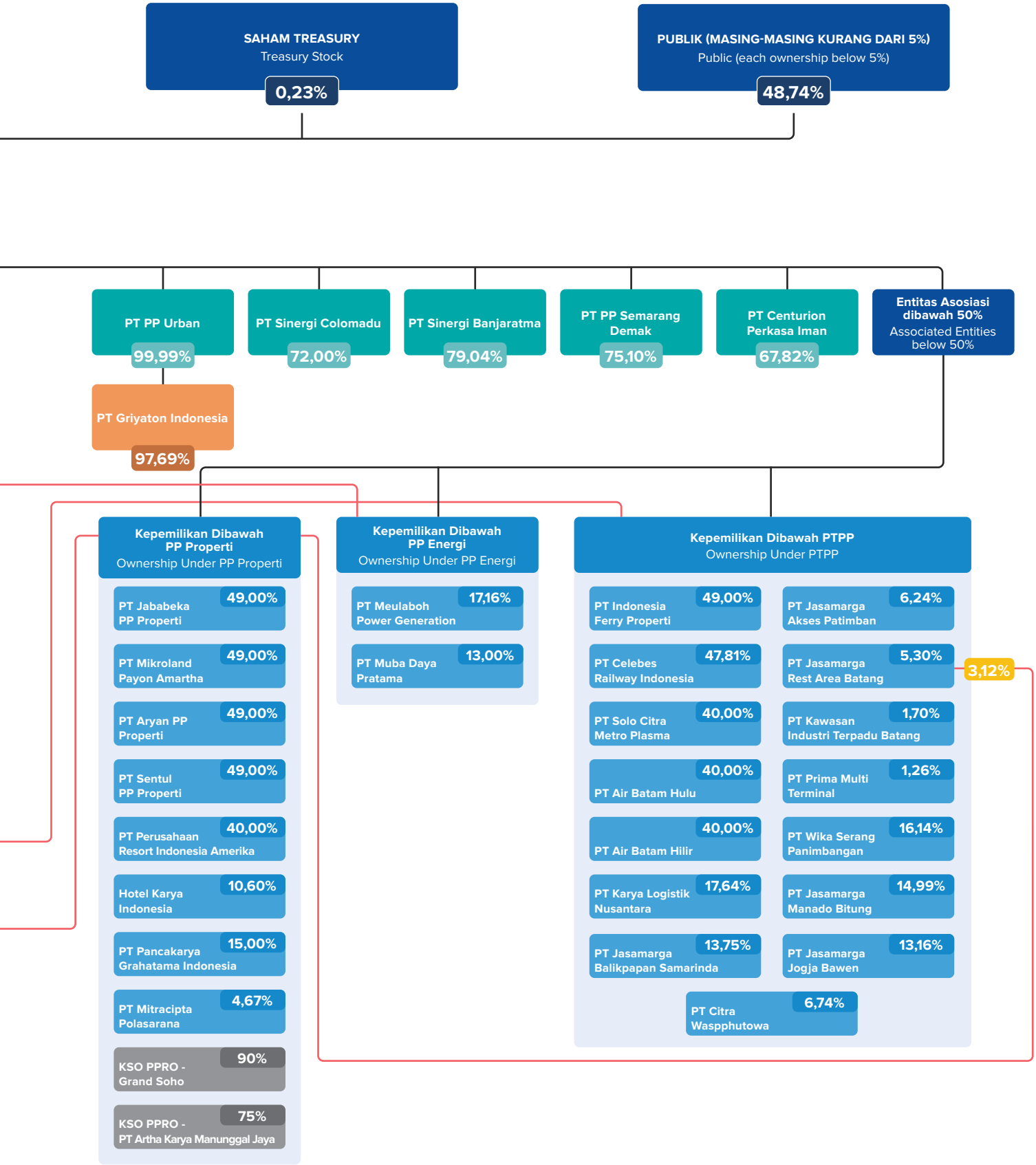
SAHAM TREASURY
Treasury Stock
0,23%
PUBLIK (MASING-MASING KURANG DARI 5%)
Public (each ownership below 5%)
48,74%
PT PP Urban
99,99%
PT Sinergi Colomadu
72,00%
PT Sinergi Banjaratma
79,04%
PT PP Semarang Demak
75,10%
PT Centurion Perkasa Iman
67,82%
Entitas Asosiasi dibawah 50%
Associated Entities below 50%
PT Griyaton Indonesia
97,69%
Kepemilikan Dibawah PP Properti
Ownership Under PP Properti
PT Jababeka PP Properti 49,00%
PT Mikroland Payon Amartha 49,00%
PT Aryan PP Properti 49,00%
PT Sentul PP Properti 49,00%
PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika 40,00%
Hotel Karya Indonesia 10,60%
PT Pancakarya Grahatama Indonesia 15,00%
PT Mitracipta Polasarana 4,67%
KSO PPRO - Grand Soho 90%
KSO PPRO - PT Artha Karya Manunggal Jaya 75%
Kepemilikan Dibawah PP Energi
Ownership Under PP Energi
PT Meulaboh Power Generation 17,16%
PT Muba Daya Pratama 13,00%
Kepemilikan Dibawah PTPP
Ownership Under PTPP
PT Indonesia Ferry Properti 49,00%
PT Celebes Railway Indonesia 47,81%
PT Solo Citra Metro Plasma 40,00%
PT Air Batam Hulu 40,00%
PT Air Batam Hilir 40,00%
PT Karya Logistik Nusantara 17,64%
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda 13,75%
PT Jasamarga Akses Patimban 6,24%
PT Jasamarga Rest Area Batang 5,30%
3,12%
PT Kawasan Industri Terpadu Batang 1,70%
PT Prima Multi Terminal 1,26%
PT Wika Serang Panimbangan 16,14%
PT Jasamarga Manado Bitung 14,99%
PT Jasamarga Jogja Bawen 13,16%
PT Citra Waspphutowa 6,74%

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA

Group Structure and Business Group

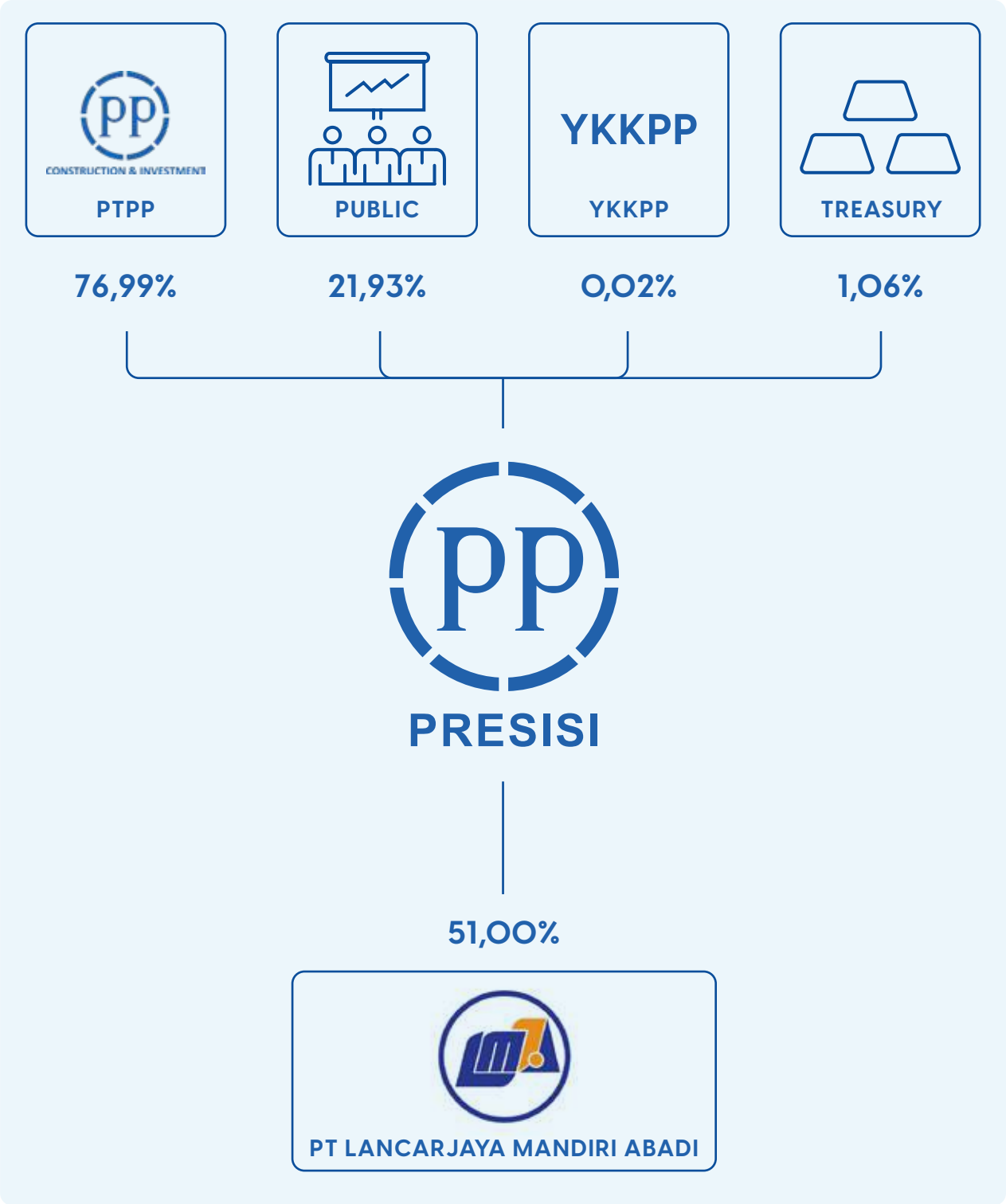

DAFTAR ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, DAN VENTURA BERSAMA

List of Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) Entitas Anak.

As of December 31, 2023, the Company only has one Subsidiaries.

Nama Entitas Anak Name of Subsidiary	Bidang Usaha Business Sector	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal oleh Perusahaan Year of Equity Participation by the Company	Kepemilikan oleh Perusahaan (%) Ownership by the Company (%)		Jumlah Aset (Rp-miliar) Total Assets (Rp-billion)		Status Operasi Operation Status
						2023	2022	2023	2022	
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	Jasa Konstruksi Construction Services	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	1994	1994	1994	51,00	51,00	2.367,18	2.431,62	Beroperasi Operating

PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI

PPRE telah mengakuisisi saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi sejumlah 331.500 lembar saham dari pihak ketiga, mewakili 51,00% kepemilikan saham dengan harga Rp798.000.000.000. Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Pasal 3, maksud dan tujuan bidang usaha PT Lancarjaya Mandiri Abadi adalah:

1. Melakukan usaha di bidang konstruksi (*general contractor*);
2. Melakukan usaha di bidang pertambangan dan penggalian;
3. Melakukan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi terutama penyewaan alat berat dan *dump truck*;
4. Kontraktor pertambangan bahan angkut (mineral & batu bara).

PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI

PPRE has acquired 331,500 shares of PT Lancarjaya Mandiri Abadi from a third party, representing 51.00% share ownership with a price of Rp798,000,000,000. According to the latest Articles of Association Article 3, the business purpose and objectives of PT Lancarjaya Mandiri Abadi are:

1. Engaging in construction (general contractor) business;
2. Engaging in mining and excavation business;
3. Engaging in the business of wholesale and retail trades, car repair and maintenance, rental and services in the sector of construction equipment, especially heavy equipment and dump truck rental;
4. Contractor for mining transport material (minerals & coal).

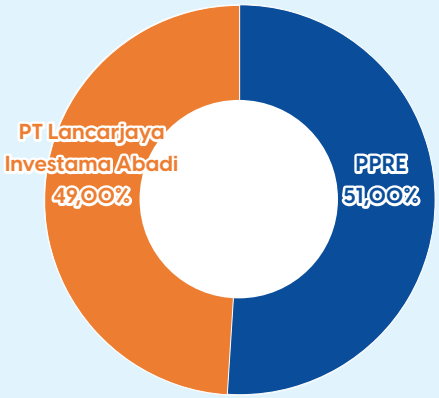

PT Lancarjaya Mandiri Abadi

Jl. Raya Narogong KM. 12,5 No. 18
Bekasi, Jawa Barat 17152, Indonesia
Telepon: 021-8250-365, 021-8250-366
Jl. Raya Narogong KM. 12,5 No. 18
Bekasi, West Java 17152, Indonesia
Phone: 021-8250-365, 021-8250-366

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

Chronology of Other Securities Issuance and Listing

Pada tahun 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I sebesar Rp202.980.000.000. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu Obligasi Seri A dan Seri B. Obligasi Seri A diterbitkan sebesar Rp102.275.000.000 berjangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun. Sementara Obligasi Seri B diterbitkan sebesar Rp100.705.000.000 berjangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun.

In 2022, the Company issued PP Presisi Shelf Registration Bonds I Phase I amounting to Rp202,980,000,000. This bond consists of two series, namely Series A Bonds and Series B Bonds. The Series A Bonds were issued amounting to Rp102,275,000,000 with a term of three years and a fixed interest rate of 9.50% per year. Meanwhile, the Series B Bonds were issued amounting to Rp100,705,000,000 with a term of five years and a fixed interest rate of 10.50% per year.

Nama Efek Securities Name	**Tanggal Penerbitan** Date of Issuance	**Tenor** Tenor	**Nilai Efek (Rp)** Securities Value (Rp)	**Tanggal Jatuh Tempo** Due Date	**Tingkat Suku Bunga (%)** Interest Rate (%)	**Peringkat** Rating	**Wali Amanat** Trustee	**Status Pembayaran** Payment Status
Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 Seri A PP Presisi Shelf Registration Bonds I Phase I of 2022 Series A	23 Juni 2022 June 23, 2022	3 Tahun 3 Years	102.275.000.000	30 Juni 2025 June 30, 2025	9,50%	• 2023: idBBB+ (PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) • 2022: idBBB+ (PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	• PT BNI Sekuritas • PT BRI Danareksa Sekuritas • PT CIMB Niaga Sekuritas	Belum Lunas Not Yet Paid Off
Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 Seri B PP Presisi Shelf Registration Bonds I Phase I of 2022 Series B	23 Juni 2022 June 23, 2022	5 Tahun 5 Years	100.705.000.000	30 Juni 2027 June 30, 2027	10,50%	• 2023: idBBB+ (PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) • 2022: idBBB+ (PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	• PT BNI Sekuritas • PT BRI Danareksa Sekuritas • PT CIMB Niaga Sekuritas	Belum Lunas Not Yet Paid Off

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Institutions and Professional Supporting the Capital Market

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTANT FIRM		
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant Firm (KAP)	:	**Hertanto, Grace, Karunawan** Registrasi KMK: 929/KM.1/2014 KMK Registration No. 929/KM.1/2014
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	:	**Bambang Karunawan, CPA.** Registrasi: AP.0912 Registration No. AP.0912
Jasa yang Diberikan Provided Service	:	**Jasa Audit**: Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2023 **Jasa Non Audit**: • Audit Kepatuhan terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan PSA No. 62 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. • Evaluasi Kinerja PPRE untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN RI No. KEP-100/MBU/ 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. **Audit Service**: Audit of the consolidated financial statements as of December 31, 2023 **Non-Audit Service**: • Compliance Audit on the Compliance with Applicable Laws and Regulations according to the provisions of the PSA No. 62 and the State Financial Audit Standards of the BPK for the year ended on December 31, 2023. • Evaluation on the Performance of PPRE for the Fiscal Year ended on December 31, 2023, according to the Resolution of the Indonesian State Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 on the SOE Soundness Level Assessment.
Periode Penugasan Assignment Period	:	4 Oktober 2023 s.d. 1 Maret 2024 October 4, 2023, to March 1, 2024
Waktu Terbit Laporan Date of Statements Issuance	:	1 Maret 2024 March 1, 2024
Biaya Fee	:	**Jasa Audit**: Rp360.360.450 (tidak termasuk pajak) **Jasa Non Audit**: • Audit Kepatuhan terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Rp20.000.000 (tidak termasuk pajak) • Evaluasi Kinerja atas Penilaian Kinerja Rp20.000.000 (tidak termasuk pajak) **Audit Service**: Rp360,360,450 (not including tax) **Non-Audit Services**: • Compliance Audit on the Compliance with Applicable Laws and Regulations Rp20,000,000 (not including tax) • Performance Evaluation Rp20,000,000 (not including tax)

NOTARIS NOTARY		
Nama Name	:	Fathiah Helmi, S.H.
Alamat Address	:	Graha Irama Jl. H. R. Rasuna Said No. 6 Kavling 1-2, Jakarta Selatan, 12710, Indonesia T: (+62 21) 529 07304-06 F: (+62 21) 526 1136 Graha Irama Jl. H. R. Rasuna Said No. 6 Kavling 1-2, South Jakarta, 12710, Indonesia T: (+62 21) 529 07304-06 F: (+62 21) 526 1136
Jasa yang Diberikan Provided Service	:	Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa Deed of Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders

KONSULTAN HUKUM LEGAL CONSULTANT		
Nama Name	:	Jusuf Indradewa & Rekan Jusuf Indradewa & Partner
Alamat Address	:	Menara BCA (Grand Indonesia) Lantai 50 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia T: (+62 21) 5890 3993 BCA Tower (Grand Indonesia) 50th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 1, Central Jakarta, 10310, Indonesia T: (+62 21) 5890 3993
Jasa yang Diberikan Provided Service	:	Konsultan Hukum Pendampingan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan fasilitas kredit lainnya Legal Consultant for Assisting the Public Offering of Shelf Registration Bonds and other credit facilities

JASA PENILAI APPRAISAL AGENCY		
Nama Name	:	KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan Dasa'at Yudistira and Partner Public Appraisal Agency (KJPP)
Alamat Address	:	Jl. Alam Jaya No. 25, Lampung
Jasa yang Diberikan Provided Service	:	Penilaian Aset Alat Appraisal of Equipment Assets

BIRO ADMINISTRASI EFEK SHARE REGISTRAR		
Nama Name	:	PT Datindo Entrycom
Alamat Address	:	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta, 10120 T: (+62 21) 350 8077 F: (+62 21) 350 8078
Jasa yang Diberikan Provided Service	:	Menyediakan jasa administrasi efek Providing securities registration services

WALI AMANAT TRUSTEE		
Nama Name	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Alamat Address	:	Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
Jasa yang Diberikan Provided Service	:	Wali amanat penerbitan obligasi Trustee in bond issuance

PEMERINGKAT EFEK RATING AGENCY		
Nama Name	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Alamat Address	:	Equity Tower 30th Floor Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan Provided Service	:	Jasa pemeringkatan obligasi Bonds rating services

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Information on Corporate Website

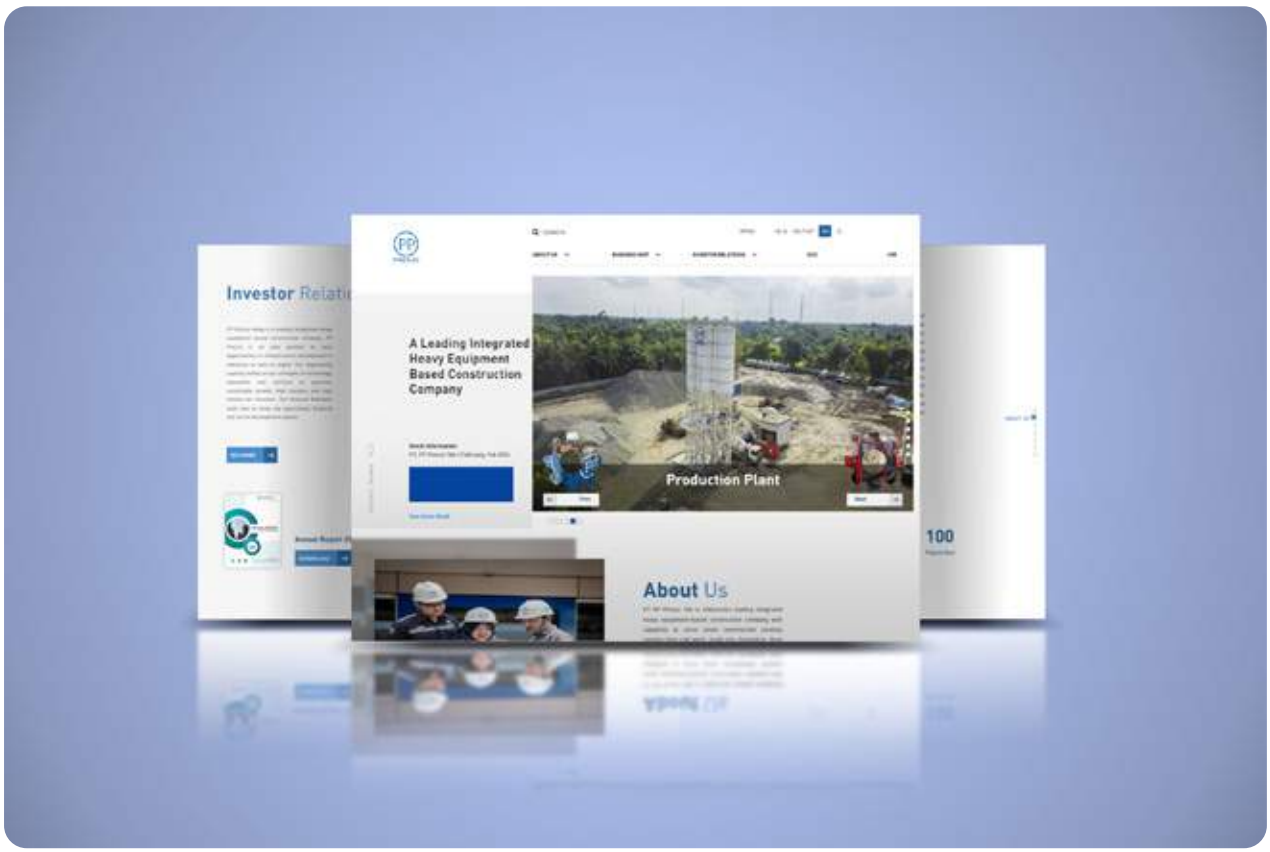

Perusahaan memiliki situs web resmi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan terhadap publik yang menyajikan informasi secara komunikatif dan ter-*update* dengan alamat www.pp-presisi.co.id. Situs web ini merupakan portal resmi PPRE yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, serta mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang PPRE kepada khalayak luas. Situs web resmi PPRE yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan amanat Pasal 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan menyampaikan informasi mengenai, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

The Company has an official website as a means to achieve public transparency which provides information in a communicative and updated manner at the address www.pp-presisi.co.id. This website is PPRE's official portal that is openly accessible at any time and any place, straightforward and simple, aiming to provide comprehensive, accurate, and actual information about PPRE for the public. PPRE's official website is available in two languages, namely Indonesian and English, also according to Article 6 of the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 8/POJK.4/2015 on the Website of Issuers or Public Company, which obligates the delivery of the following information:

1. General Information of the Issuer or Public Company;
2. Information for Investors;
3. Information on Corporate Governance;
4. Information on Corporate Social Responsibility.

Uraian Description	**Ketersediaan** Availability	**Keterangan** Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Information regarding shareholders up to individual ultimate shareholders	√	Terdapat pada halaman Tentang Kami > Struktur Perusahaan https://pp-presisi.co.id/struktur-perusahaan Available on About Us > Company Structure https://pp-presisi.co.id/struktur-perusahaan
Isi Kode Etik Content of the Code of Conduct	√	Terdapat pada halaman GCG > Kode Etik https://pp-presisi.co.id/kode-etik Available on GCG > Code of Conduct https://pp-presisi.co.id/kode-etik
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information regarding the General Meeting of Shareholders (GMS) including at least the agenda materials discussed in the GMS, summarized minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of GMS announcement, date of GMS summons, date of the GMS, date of the announcement of the summarized minutes of the GMS	√	Terdapat pada halaman Hubungan Investor > RUPS https://pp-presisi.co.id/rups Available on Investor Relations > RUPS https://pp-presisi.co.id/rups
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial statements (last 5 years)	√	Terdapat pada halaman Hubungan Investor > Laporan https://pp-presisi.co.id/laporan Available on Investor Relations > Report https://pp-presisi.co.id/laporan
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	Terdapat pada halaman Tentang Kami > Direksi https://pp-presisi.co.id/boards Available on About Us > Boards https://pp-presisi.co.id/boards
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	√	**Dewan Komisaris** Terdapat pada halaman GCG > Piagam https://pp-presisi.co.id/piagam **Direksi** Terdapat pada halaman GCG > Piagam https://pp-presisi.co.id/piagam **Komite Audit** Terdapat pada halaman GCG > Piagam https://pp-presisi.co.id/piagam **Komite Kepatuhan** Terdapat pada halaman GCG > Piagam https://pp-presisi.co.id/piagam **Unit Audit Internal** Terdapat pada halaman GCG > Unit Audit Internal https://pp-presisi.co.id/unit-internal-audit **Board of Commissioners** Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam **Board of Directors** Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam **Audit Committee** Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam **Compliance Committee** Available on GCG > Charters https://pp-presisi.co.id/piagam **Internal Audit Unit** Available on GCG > Internal Audit Unit https://pp-presisi.co.id/unit-internal-audit

√ : Tersedia | x : Tidak Tersedia
√ : Available | x : Not Available

Semua informasi yang disajikan dalam *website* Perusahaan senantiasa diperbarui secara berkala untuk memberikan informasi ter-*update* bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Perusahaan juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Instagram, Youtube, dan LinkedIn.

All of the information presented on the Company's website is always updated regularly to provide the most updated information for all stakeholders and the public. The Company also has social media accounts as a part of information and communication transparency towards all stakeholders, including Instagram, YouTube, and LinkedIn.

Head Office PT PP Presisi Tbk, Jakarta

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

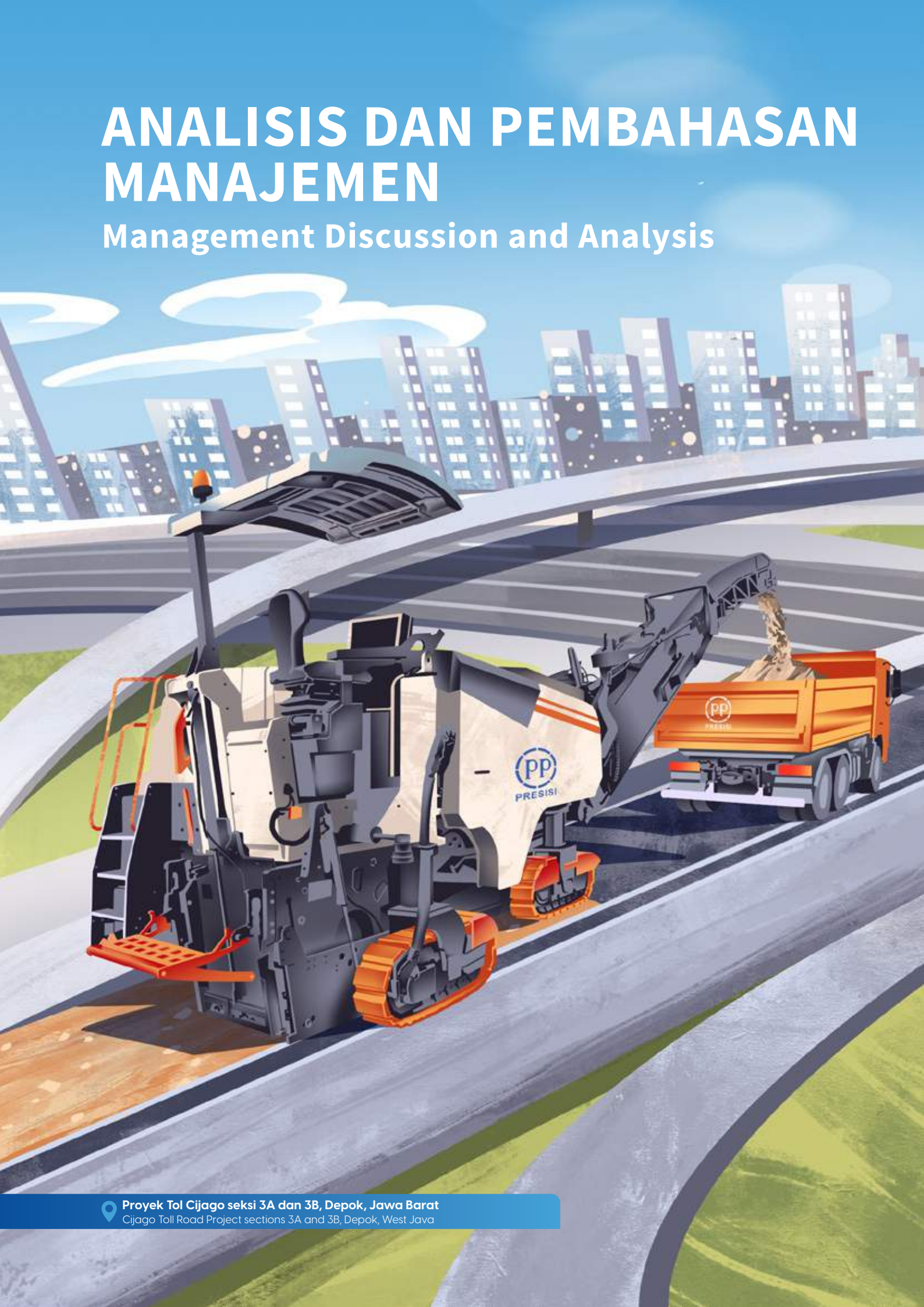

Proyek Tol Cijago seksi 3A dan 3B, Depok, Jawa Barat
Cijago Toll Road Project sections 3A and 3B, Depok, West Java

Proyek Tol Cijago Seksi 3A dan 3B,
Depok, Jawa Barat

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Economic and Industrial Review

Workshop PT PP Presisi Tbk, Bekasi

Perekonomian dunia di tahun 2023 memberikan gambaran atas tantangan yang terus terjadi. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh International Monetary Fund (IMF) dalam dokumen *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2023 memproyeksikan perekonomian global tahun 2023 tumbuh hanya sebesar 3%, melambat dari tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,5%. Berbagai tantangan seperti inflasi yang masih membayangi akibat rentannya pasokan komoditas global pasca pandemi COVID-19, serta isu krisis geopolitik, memberikan hambatan yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian dunia.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia di tahun 2024 memberikan gambaran langkah antisipatif yang berhasil dilakukan Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merespon tantangan perlambatan perekonomian global yang terjadi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31%.

The world economy in 2023 provides an overview of the challenges that continue to occur. The data published by the International Monetary Fund (IMF) in the October 2023 edition of the World Economic Outlook (WEO) document projects the global economy in 2023 to grow by only 3%, slowing down from 2022 with growth of 3.5%. Various challenges, such as inflation that still looms due to the vulnerability of global commodity supplies after the COVID-19 pandemic and geopolitical crises, provide considerable obstacles to the development of the world economy.

On the other hand, Indonesia's economy in 2024 provides an overview of anticipatory steps that have been successfully taken by the Government of Indonesia together with all stakeholders in responding to the challenges of the global economic slowdown that occurred. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), the Indonesian economy in 2023 recorded a growth of 5.05%, slightly slower than in 2022 at 5.31%.

Sebagaimana dikutip dari data BPS, industri nasional secara keseluruhan mampu tumbuh dengan baik meskipun sebagian besar mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Indonesia terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%, diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya tumbuh 4,64%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 1,30%, dan Lapangan Usaha Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 4,85%.

As quoted from BPS data, the national industry as a whole grew well even though most of it experienced a slowdown compared to the previous year. In terms of production, the highest growth in the Indonesian economy occurred in the Transportation and Warehousing business at 13.96%, followed by Other Services at 10.52%, and the Provision of Accommodation and Drinking Food at 10.01%. Meanwhile, the Manufacturing Industry, which has a dominant role in forming the Gross Domestic Product (GDP), only grew by 4.64%. Agriculture, Forestry, and Fisheries, as well as Wholesale and Retail Trade grew by 1.30%, and the Car and Motorcycle Repair Business Field grew by 4.85%, respectively.

Kunci penting bagi Indonesia dalam membentuk fondasi pembangunan yang kokoh adalah perkembangan ekosistem ketenagalistrikan sebagai pendukung utama tercapainya target Pemerintah Indonesia untuk dapat menurunkan sumber daya energi berbasis fosil yang pada akhirnya mampu mewujudkan *net zero emission*. Sebagaimana juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia 2020-2024, Pemerintah Indonesia mencanangkan konversi sumber daya energi dari berbasis fosil tidak terbarukan menuju pengelolaan sumber daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini terlihat dari pengembangan dan pengadaan infrastruktur pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang terdiri dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang mampu terealisasi sebanyak 2.704 unit dari target sebanyak 1.035 unit di tahun 2023. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi KBLBB yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebanyak 1.400 unit.

An important key for Indonesia in establishing a solid development foundation is the development of the electricity ecosystem, which is a prominent supporter of achieving the Government of Indonesia's target to reduce fossil-based energy resources that are ultimately able to realize net zero emission. As also stated in the National Mid-Term Development Plan (RPJMN) for 2020-2024 and the 2020-2024 Strategic Plan of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) of the Republic of Indonesia, the Government of Indonesia has launched the conversion of energy resources from non-renewable fossil-based to the management of New and Renewable Energy (EBT) resources. This can be seen from the development and procurement of Battery-Based Electric Vehicles (KBLBB) charging infrastructure consisting of Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) and Public Electric Vehicle Battery Charging Stations (SPBKLU), which were realized as many as 2,704 units from a target of 1,035 units in 2023. This figure increased relatively high compared to the previous year with the realization that KBLBB spread across various regions of Indonesia by as many as 1,400 units.

Konversi sumber energi berbasis EBT juga telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021-2030, di mana pada periode ini porsi sumber EBT akan menjadi lebih besar yakni 51,6%, sementara sumber energi fosil lebih rendah dengan komposisi sebesar 48%. Meskipun mendapatkan sejumlah tantangan terutama dari sisi investasi dan pendanaan, target besar Pemerintah Indonesia menuju energi bersih patut diapresiasi, terutama oleh Perusahaan yang telah memulai inisiatif pengembangan bisnis kontraktor tambang, khususnya untuk produk nikel.

The conversion of EBT-based energy sources has also been stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) for 2021-2030, where in this period, the portion of EBT sources will be greater at 51.6%, while fossil energy sources are lower with a composition of 48%. Despite several challenges, especially in terms of investment and funding, the Indonesian Government's big target towards clean energy should be appreciated, especially by the Company that has started the initiative to develop the mining contractor business, especially for nickel products.

INISIATIF DAN KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2023

Initiatives and Strategic Policies in 2023

Strategi dan Kebijakan Pengembangan di Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi, pasar pertambangan khususnya nikel serta konstruksi, masih cukup memberikan dampak positif pada Perusahaan. Hal ini juga didukung dengan beberapa strategi Perusahaan di tahun 2023 yang mampu membawa pencapaian target yang cukup baik. Perusahaan membagi 3 (tiga) strategi dalam menjalankan strateginya di tahun 2023.

Strategi Operasi

1. *Refocusing core business* pada *mining services* dan *civil work;*
2. Peningkatan peluang pada jasa pertambangan seiring dengan kebijakan Pemerintah pada hilirisasi tambang;
3. Peningkatan peluang pada jasa pertambangan lainnya (area *blue ocean*);
4. Bersinergi dengan Entitas Induk dalam peluang kontrak baru pada *civil work;*
5. Peningkatan kapabilitas segmen prospektif dengan kemitraaan strategis.

Strategi HCM/*People Strategy*

1. Peningkatan kapabilitas SDM untuk menunjang kebutuhaan *Mining*;
2. Peningkatan kapabilitas *marketing* dan lelang;
3. Peningkatan kapasitas dan *performance* alat berat;
4. Peningkatan kapabilitas manajemen proyek dan administrasi kontrak;
5. Peningkatan personil mekanik.

Strategi Kinerja

1. Fokus pada peningkatan produktivitas alat dengan program teratur *maintenance* dan kebutuhan *spare part;*
2. Fokus pada program divestasi alat non produktif;
3. Peningkatan manajemen alat secara komprehensif agar terintegrasi dengan operasi;
4. Peningkatan kapasitas keuangan melalui pembaiayaan jangka panjang seperti obligasi, MTN dan lain-lain;
5. Pengendalian operasi dan biaya melalui program digitalisasi sistem terintegrasi.

Strategy and Development Policies in 2023

Economic growth, the mining market (especially nickel), and construction still positively impact the Company. It is also supported by several Company strategies in 2023, which can bring a reasonably good target achievement. The Company classifies three strategies in implementing its strategy in 2023.

Operation Strategy

1. Refocusing core business on mining services and civil works;
2. Increasing opportunities in mining services in line with the Government's policy on downstream mining;
3. Increasing opportunities in other mining services (blue ocean area);
4. Synergizing with the Parent Entity in new contract opportunities in civil work;
5. Enhancing capabilities of prospective segments with strategic partnerships.

HCM/People Strategy

1. Increasing human resources capability to support Mining needs;
2. Improving marketing and auction capabilities;
3. Increasing heavy equipment capacity and performance;
4. Improving project management and contract administration capabilities;
5. Improving mechanical personnel.

Performance Strategy

1. Focusing on increasing equipment productivity with regular maintenance programs and spare part needs;
2. Focusing on divestment program of non-productive equipment;
3. Improving comprehensive equipment management to be integrated with operations;
4. Increasing financial capacity through long-term financing such as bonds, MTN, etc;
5. Controlling operations and costs through an integrated system digitization program.

Analisis Industri dan Posisi Perusahaan dalam Industri

1. Strategi kebijakan Pemerintah dalam mempertahankan tingkat suku bunga di level 5,75%, mengindikasi masih terdapat alat kebijakan moneter lainnya yang dapat digunakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas Rupiah seperti melakukan intervensi valuta asing dan menjaga imbal hasil obligasi di level yang menarik;
2. Sejumlah kebijakan Pemerintah dalam stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa melalui Term Devisa Hasil Ekspor (DSE) mencapai 122 korporasi, dimana meningkat dari sebelumnya yang hanya 50 Korporasi. Upaya Pemerintah ini dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ditanggapi perspektif *market* terhadap prospek perekonomian Indonesia yang akan lebih baik kedepannya;
3. Pemulihan ekonomi Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, sehingga dapat menaikan pendapatan ekspor dan cadangan devisa bagi Indonesia yang dapat memperkuat nilai tukar rupiah;
4. Katalis positif lainnya dari sektor infrastruktur, yang mana kebijakan Pemerintah dalam melakukan revisi UU IKN, pada periode Pemerintah selanjutnya/periode 2024-2029 wajib melakukan Pembangunan proyek IKN;
5. Hilirisasi tambang dan perluasan program kebijakan Pemerintah dalam hilirisasi tambang diwujudkan melalui peningkatan pembangunan smelter guna mendukung energi terbarukan dan perkembangan industri kendaraan listrik;
6. Seiring dengan peningkatan hilirisasi tambang dan kelanjutan program IKN sehingga peluang bagi Perusahaan jasa konstruksi tambang seperti PPRE yang memiliki kapasitas alat dan SDM dalam mengambil peluang bisnis menjadi kontraktor tambang dan sipil.

Industry Analysis and Company's Position in the Industry

1. The Government's policy strategy of maintaining the interest rate at 5.75% indicates that there are other monetary policy tools that the Government can use to maintain Rupiah stability, such as foreign exchange intervention and maintaining bond yields at attractive levels;
2. Several Government policies to stabilize the Rupiah exchange rate and strengthen foreign exchange reserves through Term Foreign Exchange Earnings (DSE) reached 122 corporations, which increased from the previous 50 corporations. The Government's efforts in maintaining the Rupiah exchange rate stability have responded to the market's perspective on Indonesia's economic prospects, which will be better in the future;
3. Indonesia's economic recovery is caused by the increase in commodity prices so that it can increase export revenues and foreign exchange reserves for Indonesia, which can strengthen the Rupiah exchange rate;
4. Another positive catalyst from the infrastructure sector, where the Government's policy in revising the IKN Law in the next Government period/2024-2029 period must carry out IKN project development;
5. Mining downstreaming and expansion of the Government's policy program in mining downstreaming is realized through increasing smelter development;
6. Along with the increase in mining downstream and the continuation of the IKN program, there are opportunities for mining construction service companies such as PPRE, which have the equipment and human resource capacity to take business opportunities to become mining and civil contractors.

Rincian Masalah yang Muncul di Sepanjang Tahun 2023 dan Langkah Penyelesaian yang Dilakukan

Di tahun 2023, PPRE menghadapi sejumlah permasalahan yang memiliki dampak baik signifikan maupun kurang signifikan, sebagai berikut:

1. Kekurangan Kebutuhan mekanik - kerjasama dengan pihak ke tiga dan akan dilakukan *training center* untuk pelatihan mekanik dan operator.
2. Kinerja alat - peningkatan produktivitas alat dengan memaksimalkan utilisasi alat pada proyek sipil, tambang maupun persewaan.
3. Alat berat yang tidak optimal untuk dilakukan divestasi pada alat yang kurang optimal dan nilai buku nol.

Details of Issues Throughout 2023 and the Steps to Resolve Them

In 2023, PPRE faces several problems that have significant and less significant impacts, as follows:

1. Lack of mechanical needs - Collaboration with third parties and a training center will be provided for mechanic and operator training.
2. Tool performance - Increasing tool productivity by maximizing tool utilization on civil, mining, and rental projects.
3. Non-optimal heavy equipment. Requires divestment of less-than-optimal equipment with a zero book value.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Operations Review per Business Segment

Dalam menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar bagi penyusunan laporan tahunan, Perusahaan menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi. Informasi pelaporan segmen operasi disajikan berdasarkan laba atau rugi operasi yang diukur dengan cara yang konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

In preparing financial statements, which are the basis for preparing annual reports, the Company applies PSAK 5 on Operating Segments. Operating segment reporting information is presented based on operating profit or loss measured in a manner consistent with operating profit or loss in the Company's consolidated financial statements.

Segmen operasi sesuai laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disajikan melalui segmen primer yaitu segmen yang dikelompokkan berdasarkan jenis usaha atau produk yang dihasilkan, dan segmen sekunder yaitu segmen geografis di mana Perusahaan dan entitas anak beroperasi dan terdaftar. Seluruh kegiatan konstruksi dan penjualan barang Perusahaan dilakukan di Indonesia dengan pelanggan dalam negeri, tidak terdapat rantai bisnis yang didapatkan dari kegiatan di luar negeri. Segmen primer Perusahaan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni konstruksi, *ready mix*, dan penyewaan alat berat.

According to the Company's consolidated financial statements, operating segments are presented through primary segments, i.e., segments grouped based on the type of business or products produced, and secondary segments, i.e., geographic segments where the Company and its subsidiaries operate and are registered. All construction activities and sales of the Company's goods are carried out in Indonesia with domestic customers, with no business chain obtained from activities abroad. The Company's primary segment is divided into three groups, i.e., construction, ready mix, and heavy equipment rental.

Segmen Usaha PP Presisi
Business Segment of PP Presisi

Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan kontribusi masing-masing segmen terhadap Pendapatan serta Aset konsolidasian Perusahaan.

To provide an initial overview of the business scale of each segment and its contribution to the Company, the following is the contribution of each segment to the Company's consolidated Revenue and Assets.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Primer Terhadap Pendapatan PP Presisi
Segment Amount and Contribution to PP Presisi Revenue

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Konstruksi Construction	3.212,76	94,47	3.407,24	93,73	(194,48)	(5,71)
Ready Mix	80,62	2,37	110,34	3,04	(29,72)	(26,93)
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	107,49	3,16	117,61	3,24	(10,13)	(8,61)
Jumlah Pendapatan Konsolidasian Total Consolidated Revenues	**3.400,87**	**100,00**	**3.635,19**	**100,00**	**(234,32)**	**(6,45)**

Komposisi Pendapatan Segmen Primer Terhadap Pendapatan PP Presisi
Primary Segment Revenue Composition on PP Presisi Revenue

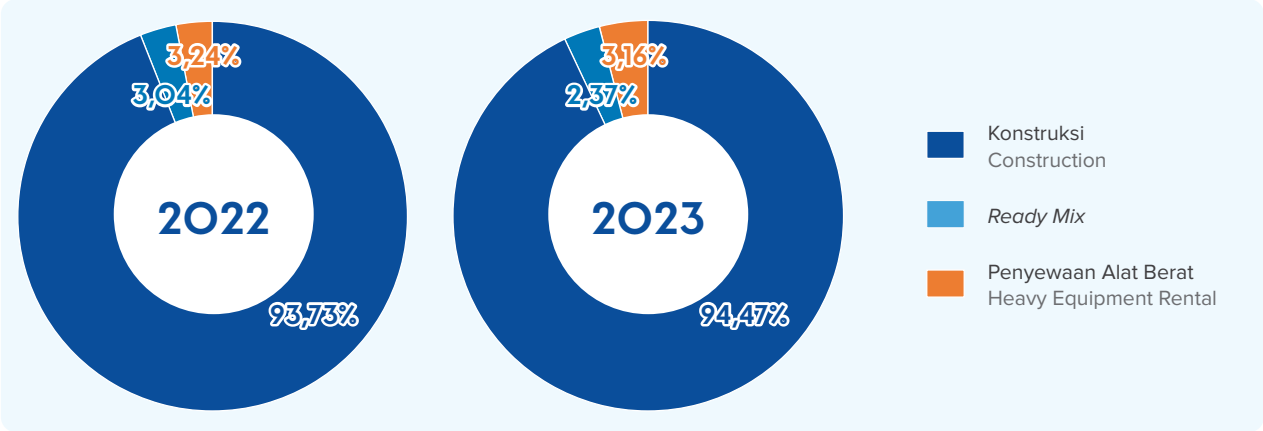

Pendapatan Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp3,40 triliun, mengalami penurunan 6,45% atau setara dengan Rp234,33 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3,63 triliun. Pendapatan tahun 2022 dan 2023 didominasi oleh pendapatan dari Segmen Konstruksi, masing-masing sebesar 93,73% di tahun 2022 dan 94,47% di tahun 2023 terhadap jumlah pendapatan Perusahaan.

The Company's revenue in 2023 is Rp3.40 trillion, a 6.45% decrease or the equivalent of Rp234.33 billion compared to 2022 of Rp3.63 trillion. Revenues in 2022 and 2023 are dominated by revenues from the Construction Segment, amounting to 93.73% in 2022 and 94.47% in 2023, respectively, of the Company's total revenues.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Primer Terhadap Aset PP Presisi
Segment Amount and Contribution to PP Presisi Assets

Segmen Segment	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Jumlah (Rp-miliar)** Total (Rp-billion)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Nominal (Rp-miliar)** Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Konstruksi Construction	6.771,37	94,51	7.112,59	93,73	(341,23)	(4,80)
Ready Mix	168,70	2,35	230,33	3,04	(61,63)	(26,76)
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	224,92	3,14	245,52	3,24	(20,60)	(8,39)
Jumlah Aset Konsolidasian Total Consolidated Assets	**7.164,99**	**100,00**	**7.588,44**	**100,00**	**(423,45)**	**(5,58)**

Komposisi Kontribusi Segmen Primer Terhadap Aset PP Presisi
Primary Segment Contribution Composition on PP Presisi Assets

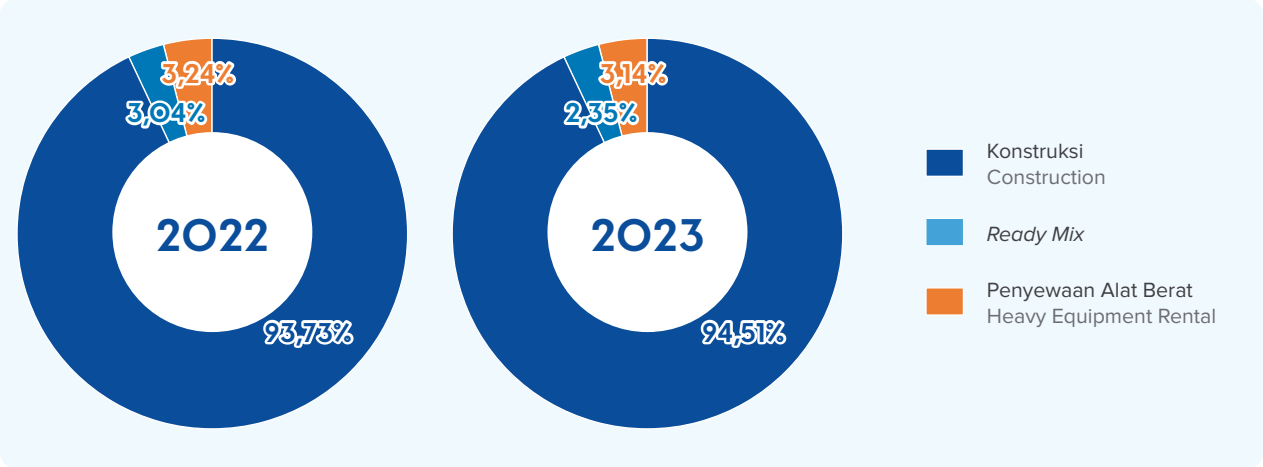

Jumlah Aset Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp7,16 triliun, mengalami penurunan 5,58% atau setara dengan Rp423,45 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp7,59 triliun. Jumlah Aset Perusahaan didominasi oleh nilai Aset dari segmen Konstruksi, dengan kontribusi masing-masing sebesar 93,73% di tahun 2022 dan 94,51% di tahun 2023 terhadap Jumlah Aset Perusahaan.

Total Company Assets in 2023 is Rp7.16 trillion, a 5.58% decrease or the equivalent of Rp423.45 billion compared to 2022 of Rp7.59 trillion. The Company's Total Assets are dominated by the value of Assets from the Construction segment, with respective contributions of 93.73% in 2022 and 94.51% in 2023 to the Company's Total Assets.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Primer Terhadap Kontrak Baru PP Presisi
Total Primary Segments and Contribution to New PP Presisi Contracts

Segmen Segment	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Jumlah (Rp-miliar)** Total (Rp-billion)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Nominal (Rp-miliar)** Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Konstruksi Construction	6.457,78	95,65	5.171,82	98,60	1.285,96	24,86
Ready Mix	181,58	2,69	6,03	0,11	175,55	2.911,28
Penyewaan Alat Berat Heavy Equipment Rental	112,27	1,66	67,47	1,29	44,80	66,40
Jumlah Kontrak Baru Konsolidasian Total Consolidated New Contracts	**6.751,63**	**100,00**	**5.245,32**	**100,00**	**1.506,31**	**28,72**

Komposisi Pendapatan Segmen Primer Terhadap Kontrak Baru PP Presisi
Composition of Primary Segment Contribution to New PP Presisi Contracts

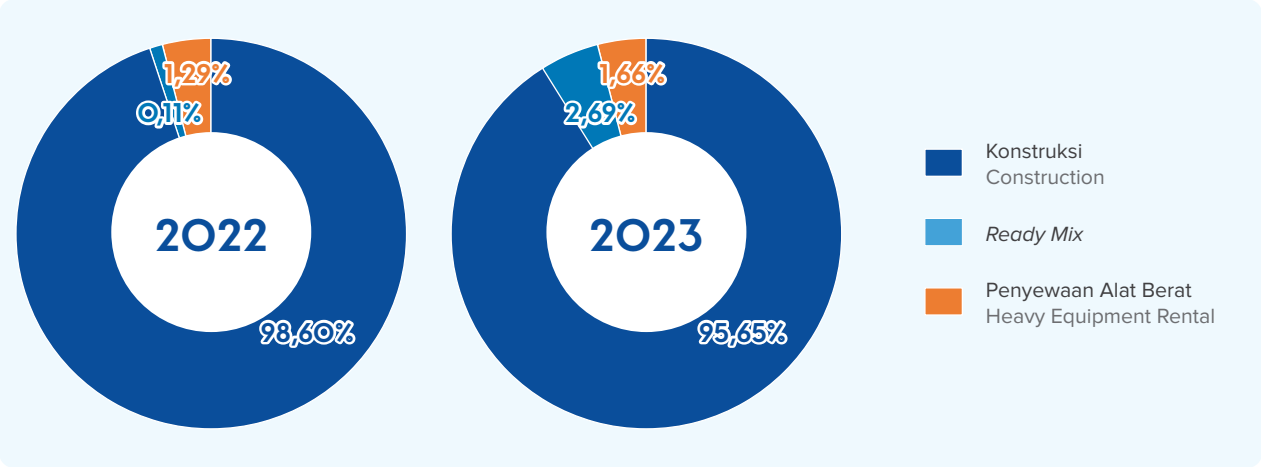

Jumlah perolehan Kontrak Baru Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp6,75 triliun, tumbuh 28,72% atau setara dengan Rp1,51 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5,24 triliun. Perolehan Kontrak Baru Perusahaan ini didominasi oleh segmen Konstruksi, dengan kontribusi masing-masing sebesar 98,60% di tahun 2022 dan 95,65% di tahun 2023 terhadap jumlah perolehan Kontrak Baru Perusahaan.

Dari tabel dan bagan di atas, terlihat bahwa segmen Konstruksi menjadi penopang utama dalam bisnis yang dijalankan Perusahaan. Kegiatan usaha yang dikembangkan Perusahaan dan profitabilitas masing-masing segmen diuraikan di bawah ini.

The Company's acquisition of new contracts in 2023 was Rp6.75 trillion, growing 28.72% or equivalent to Rp1.51 trillion compared to 2022 of Rp5.24 trillion. The Company's acquisition of new contracts is dominated by the Construction segment, with respective contributions of 98.60% in 2022 and 95.65% in 2023 to the Company's total acquisition of new contracts.

The above table and chart show that the Construction segment is the primary support for the Company's business. The business activities developed by the Company and the profitability of each segment are described below.

KONSTRUKSI

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen Konstruksi

Segmen Konstruksi yang dijalankan Perusahaan melayani pekerjaan-pekerjaan jasa pertambangan seperti *hauling road, mining development, hauling road maintenance, secondary hauling* dan *mining operation* dan dari konstruksi sipil seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan non-tol, bandara, pelabuhan/dermaga, bendungan, bangunan bertingkat, serta pembangkit listrik. Segmen usaha konstruksi merupakan *core* bisnis Perusahaan yang terdiri dari *civil work* dan *mining services*, dimana lini bisnis *civil work* termasuk didalamnya lini bisnis *structure work* yang merupakan lini bisnis *supporting* Perusahaan.

CONSTRUCTION

Construction Segment Operations and Business Model

The Company's Construction segment serves mining service jobs such as hauling roads, mining development, hauling road maintenance, secondary hauling and mining operations, and infrastructure development of toll roads, non-toll roads, airports, ports/docks, dams, high-rise buildings, and power plants. The construction business segment is the Company's core business, which consists of civil work and mining services. The civil work business line includes the structure work business line, which is the Company's supporting business line.

Sampai dengan tahun 2023 portofolio proyek Perusahaan telah mengerjakan berbagai macam proyek konstruksi mulai dari *mining services* pada pekerjaan *hauling road, hauling road maintenage, hauling road upgrading, mining operation*, sampai dengan *civil work* pada pekerjaan perkerasan tanah sampai dengan pengaspalan. Pareto proyek yang telah dikerjakan Perusahaan antara lain; *hauling road* Wedabay, *hauling road maintenage* Wedabay, *hauling road upgrading* Wedabay, *mining operation* Wedabay, *Hauling Road* Hengjaya, Pembangunan Jembatan Sungai Makarti, *Hauling Road* Vale, Jalan Tol Cinere Jagorawi, Jalan Tol Indrapura Kisaran, Bandara Dhoho Kediri, *Runway* Bandara Halim Perdanakusuma, IKPP Karawang, Peningkatan Jalan Empu Nala, Pekerjaan Jalan Sumbu IKN, dan Pekerjaan Dermaga IKN.

Until 2023, the Company's project portfolio has worked on various construction projects ranging from mining services on hauling road work, hauling road maintenance, hauling road upgrading, mining operations to civil work on ground pavement work and asphalting. Pareto projects that the Company has worked on include Wedabay hauling road, Wedabay hauling road maintenance, Wedabay hauling road upgrading, Wedabay mining operation, Hengjaya Hauling Road, Vale Hauling Road, Cinere Jagorawi Toll Road, Indrapura Kisaran Toll Road, Dhoho Kediri Airport, Halim Perdanakusuma Airport Runway, IKPP Karawang, IKN Axis Road Works, and IKN Port Works.

Strategi Pengembangan Segmen Konstruksi

Strategi pengembangan pada segmen konstruksi dilakukan Perusahaan dengan awal mula pekerjaan *civil work* bersinergi dengan entitas induk untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional seperti proyek jalan tol, bandara dan dermaga, seiring dengan peningkatan target serta peningkatan *positioning* Perusahaan, Perusahaan dipercaya untuk mengerjakan proyek jalan tol sebagai *main contractor* pada proyek jalan tol Cinere Jagorawi. Pada tahun 2021 bersamaan dengan COVID-19 yang melanda Global dan Indonesia khususnya dimana COVID-19 sangat berdampak bagi seluruh sektor bisnis termasuk sektor konstruksi yang menjadi tantangan terbesar Perusahaan, dari tantangan tersebut Perusahaan melihat peluang bisnis pada sektor *mining service* khususnya pada sektor tambang nikel, yang mana sektor tersebut masih sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dikerjakan pada proyek sipil (*cut & fill*) dengan alat-alat yang digunakan *similar* dengan alat yang digunakan pada proyek *mining service*. Sampai dengan 2023 Perusahaan telah berhasil mengerjakan lebih dari 15 proyek pada proyek *mining services*.

Development Strategy of the Construction Segment

The Company conducted the development strategy in the construction segment by starting civil works in synergy with the parent entity to work on national strategic projects such as toll roads, airports, and dock projects. Along with increasing targets and increasing the Company's positioning, the Company was trusted to work on toll road projects as the main contractor on the Cinere Jagorawi toll road project. In 2021, at the same time as COVID-19 hit globally and Indonesia, in particular, COVID-19 had a massive impact on all business sectors, including the construction sector, which is the Company's biggest challenge. From these challenges, the Company sees business opportunities in the mining services sector, especially in the nickel mining sector, which is still following the scope of work carried out on civil projects (cut & fill), with the tools used being similar to the tools used on mining service projects. Until 2023, the Company has successfully worked on approximately 10 mining services projects. Until 2023, the Company has successfully worked on more than 15 mining services projects.

Kinerja dan Produktivitas Segmen Konstruksi

Kinerja dan produktivitas segmen Konstruksi dapat dilihat dari pemasaran yang tercermin dari perolehan kontrak baru, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Construction Segment Performance and Productivity

The performance and productivity of the Construction segment are evident from marketing, which is reflected in the acquisition of new contracts, as shown in the following table.

Perihal Subject	**2023 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**2022 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Persentase** (%) Percentage (%)
Mining Services	2.005,19	2.179,41	(174,22)	(7,99)
Civil Work	4.452,59	2.992,41	1.460,18	48,80
Jumlah Total	**6.457,78**	**5.171,82**	**1.285,96**	**24,86**

Perolehan kontrak baru untuk segmen Konstruksi di tahun 2023 tercatat sebesar Rp6,46 triliun, meningkat 24,86% atau setara Rp1,28 triliun dibandingkan tahun sebelumnya

New contracts acquisition for the Construction segment in 2023 was recorded at Rp6.46 trillion, a 24.86% increase or the equivalent of Rp1.28 trillion compared to the previous

sebesar Rp5,17 triliun. Kenaikan ini terutama didapatkan dari proyek *civil work,* di mana hal ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk melakukan perluasan bisnis pada lini jasa pertambangan.

year's Rp5.17 trillion. The increase was mainly obtained from civil work projects, which aligns with the Company's strategy to expand its business in the mining services line.

Profitabilitas Segmen Konstruksi

Berikut disampaikan kinerja profitabilitas dari segmen Konstruksi.

Construction Segment Profitability

The following is the profitability of the construction segment.

Pos Akun Items	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Rp-miliar) Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp-billion)				
Pendapatan Revenue	3.212,76	3.407,24	(194,48)	(5,71)
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(2.661,59)	(2.835,98)	174,38	(6,15)
Laba Kotor Gross Profit	551,17	571,27	(20,10)	(3,52)
Beban Usaha Operating Expenses	(82,53)	(82,79)	0,26	(0,32)
Pendapatan Keuangan Finance Income	1,40	1,95	(0,55)	(28,18)
Pendapatan Lainnya Other Incomes	49,49	25,41	24,07	94,73
Beban Lainnya Other Expenses	(41,63)	(56,99)	15,36	(26,95)
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	14,60	34,06	(19,46)	(57,13)
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	(17,23)	(0,91)	(16,32)	1.792,59
Beban Keuangan Finance Costs	(209,50)	(212,72)	3,21	(1,51)
Pajak Taxes	(96,38)	(102,22)	5,84	(5,71)
Laba Bersih Setelah Pajak Net Profit After Tax	169,38	177,06	(7,68)	(4,34)
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)				
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	17,16	16,77	0,39	
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-miliar) Consolidated Financial Position (Rp-billion)				
Jumlah Aset Total Assets	6.771,37	7.112,59	(341,23)	(4,80)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**3.639,85**	**4.159,81**	**(519,96)**	**(12,50)**

Pendapatan segmen Konstruksi di tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan mundurnya perolehan kontrak baru pada proyek *mining services* dan *civil work* dari target yang ditentukan, sehingga Perusahaan belum dapat mencatatkan pendapatan secara maksimal. Namun Perusahaan dapat meningkatkan margin laba kotor di mana hal ini didorong oleh efisiensi dalam harga pokok penjualan sebagai dampak pengikatan harga material dalam kontrak payung dengan pemasok.

Construction segment revenues in 2023 have declined due to the delay in acquiring new contracts for mining services and civil work projects from the specified target; hence, the Company has not been able to record maximum revenue. However, the Company can increase its gross profit margin, which is driven by efficiency in the cost of goods sold due to binding material prices in umbrella contracts with suppliers.

READY MIX

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen *Ready Mix*

Kegiatan usaha *Ready Mix* di masing-masing proyek *civil work* memiliki *batching plant* yang memproduksi beton *ready mix*, yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dari segi waktu dan sumber daya kebutuhan beton pada proyek. Strategi ini juga menjamin kualitas beton yang dihasilkan tetap terjaga secara konsisten. Produksi beton dan agregat siap pakai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek infrastruktur dan Pembangunan gedung.

Sampai dengan 2023 proyek *ready mix* yang telah dikerjakan Perusahaan antara lain *Batching Plant* Indrapura Kisaran, *Batching Plant* Karawang, *Batching Plant* KIT Batang, *Batching Plant* Ipal Batang, *Batching Plant* Takenaka, *Batching Plant* KIT-B Xinhai, Upah Giling *Batching Plant* Jambi, *Batching Plant* Gedung Bank Indonesia Karawang, *Batching Plant* Batang Bangunan Pabrik Siap Pakai, *Batching Plant* Jalan Tol Jambi, *Batching Plant* Jakarta Cikampek.

Strategi Pengembangan Segmen *Ready Mix*

Pengembangan *Batching Plant* Perusahaan di tahun 2023 mengalami perkembangan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan hanya menyediakan 1 *batching plant* dalam 1 proyek, sesuai dengan kebutuhan beton pada proyek tersebut. Namun tahun 2023 contohnya pada proyek Batang, Perusahaan hanya menyediakan 1 *batching plant* untuk dapat men-*supply* ke beberapa kontrak di area Batang, jika diakumulasikan *batching plant* Batang ini sudah melayani hingga 14 kontrak, hal ini menjadi efisiensi kinerja *batching plant* dengan tetap menunjang *revenue* penjualan.

Kinerja dan Produktivitas Segmen *Ready Mix*

Kinerja dan produktivitas segmen *Ready Mix* dapat dilihat dari pemasaran yang tercermin dari perolehan kontrak baru *Production Plant*, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

READY MIX

Ready Mix Segment Operations and Business Model

The Ready Mix business activity in each civil work project has a batching plant that produces ready mix concrete, which aims to achieve efficiency in terms of time and resources for concrete needs on the project. The strategy also ensures that the quality of the concrete produced is consistently maintained. Ready-to-use concrete and aggregate production is carried out to meet the needs of infrastructure projects and building construction.

Until 2023, ready mix projects that the Company has carried out include the Indrapura Kisaran Batching Plant, Karawang Batching Plant, KIT Batang Batching Plant, Ipal Batang Batching Plant, Takenaka Batching Plant, KIT-B Xinhai Batching Plant, Upah Giling Jambi Batching Plant, Bank Indonesia Karawang Building Batching Plant, Batang Ready-to-Use Factory Batching Plant, Jambi Toll Road Batching Plant, Jakarta Cikampek Batching Plant.

Development Strategy of the Ready Mix Segment

The development of the Company's Batching Plant in 2023 has progressed. In previous years, the Company only provided one batching plant in one project. In the Batang project, the Company offers several batching plants to meet the need for ready-mixed concrete products. However, in 2023, for example, in the Batang project, the Company only provided one batching plant to supply several contracts in the area. If aggregated, the Batang batching plant has already served up to 14 contracts. It increases the batching plant performance efficiency while still supporting sales revenue.

Ready Mix Segment Performance and Productivity

The performance and productivity of the Ready Mix segment are evident from the acquisition of new contracts in Production Plants, as shown in the following table.

Perihal Subject	**2023 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**2022 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Ready Mix	181,58	6,03	175,55	2.911,28

Perolehan kontrak baru untuk segmen *Ready Mix* di tahun 2023 tercatat sebesar Rp181,58 miliar, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,03 miliar. Kenaikan ini tidak lepas dari peningkatan kebutuhan produk beton *ready mix* pada proyek *civil work.*

New contracts acquisition for the Ready Mix segment in 2023 was recorded at Rp112.03 billion, a significant increase compared to the previous year's Rp6.03 billion. The increase is inseparable from the rise in demand for ready-mix concrete products in civil work projects.

Profitabilitas Segmen *Ready Mix*

Ready Mix Segment Profitability

Berikut disampaikan kinerja profitabilitas dari segmen *Ready Mix*.

The following is the profitability of the ready mix segment.

Pos Akun Items	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Rp-miliar) Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp-billion)				
Pendapatan Revenue	80,62	110,34	(29,72)	(26,93)
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(80,03)	(107,66)	27,63	(25,67)
Laba Kotor Gross Profit	0,59	2,67	(2,09)	(78,09)
Beban Usaha Operating Expenses	(0,12)	(0,47)	0,35	(74,39)
Pendapatan Keuangan Finance Income	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya Other Incomes	0,08	0,25	(0,17)	(68,61)
Beban Lainnya Other Expenses	(0,08)	(0,01)	(0,07)	493,57
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	-	-	-	-
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	(0,02)	(0,05)	0,03	(53,87)
Beban Keuangan Finance Costs	(0,33)	(1,69)	1,36	(80,35)
Pajak Taxes	-	-	-	-
Laba Bersih Setelah Pajak Net Profit After Tax	0,11	0,70	(0,59)	(84,31)
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)				
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	0,73	2,43	(1,69)	
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-miliar) Consolidated Financial Position (Rp-billion)				
Jumlah Aset Total Assets	168,70	230,33	(61,63)	(26,76)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**90,02**	**134,71**	**(44,69)**	**(33,17)**

Pendapatan segmen *Ready Mix* di tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan mundurnya perolehan kontrak baru pada proyek *ready mix* dari target yang ditentukan, sehingga Perusahaan belum dapat mencatatkan pendapatan secara maksimal pada tahun 2023.

Ready Mix segment revenue in 2023 experienced a decline due to the delay in obtaining new contracts for ready mix projects from the specified target. Therefore, the Company was not able to record maximum revenue in 2023.

PENYEWAAN ALAT BERAT

Kegiatan Operasi dan Model Bisnis Segmen Penyewaan Alat Berat

Penyewaaan alat berat merupakan lini bisnis Perusahaan sebelum melakukan transformasi bisnis. Sampai dengan saat ini Perusahaan masih mempertahankan bisnis penyewaan alat berat dengan memberikan jasa yang lengkap serta memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan dan prima, dan perawatan berjangka. Alat yang disewakan oleh Perusahaan berfokus pada alat-alat angkut orang dan barang seperti *tower crane, passenger hoist,* alat berat *earth moving* seperti *excavator* dan *vibro* dan juga *formwork*. Untuk alat berat lainnya digunakan untuk men*support* proyek-proyek konstruksi pada *mining services* maupun *civil work.*

Strategi Pengembangan Segmen Penyewaan Alat Berat

Perusahaan tidak melakukan pengembangan bisnis pada jasa persewaan alat atau rental *heavy equipment*, Perusahaan hanya mempertahankan lini bisnis persewaan alat berat karena merupakan lini bisnis sejak Perusahaan didirikan.

Kinerja dan Produktivitas Segmen Penyewaan Alat Berat

Kinerja dan produktivitas segmen Penyewaan Alat Berat dapat dilihat dari pemasaran yang tercermin dari perolehan kontrak baru, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

HEAVY EQUIPMENT RENTAL

Heavy Equipment Rental Segment Operations and Business Model

Heavy equipment rental was the Company's business line before the business transformation. To date, the Company maintains its heavy equipment rental business by providing complete services and ensuring the availability of reliable and excellent equipment and periodic maintenance. The equipment rented by the Company focuses on equipment for transporting people and goods, such as tower crane, passenger hoist, heavy earth-moving equipment such as excavator dan vibrators, and formwork. Other heavy equipment supports construction projects in mining services and civil work.

Development Strategy of the Heavy Equipment Rental Segment

The Company does not conduct business development in tool rental services or heavy equipment rental. The Company maintains the heavy equipment rental business line because it has been a business line since the Company was founded.

Heavy Equipment Rental Segment Performance and Productivity

The performance and productivity of the Heavy Equipment Rental segment are evident from marketing, which is reflected in the acquisition of new contracts, as shown in the following table.

Perihal Subject	**2023 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**2022 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Penyewaan Alat Berat	112,27	67,47	44,80	66,40

Perolehan kontrak baru untuk segmen Penyewaan Alat Berat di tahun 2023 tercatat sebesar Rp112,27 miliar, meningkat 66,40% atau setara Rp44,80 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67,47 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan keberhasilan utilisasi alat pada pekerjaan *formwork* di proyek gedung.

New contracts acquisition for the Heavy Equipment Rental segment in 2023 was recorded at Rp112.27 billion, a 66.40% increase or the equivalent of Rp44.80 billion compared to the previous year's Rp67.47 billion. The increase was mainly due to the successful tool utilization in formwork work in building projects.

Profitabilitas Segmen Penyewaan Alat Berat

Berikut disampaikan kinerja profitabilitas dari segmen Penyewaan Alat Berat.

Heavy Equipment Rental Segment Profitability

The following is the profitability of the heavy equipment rental segment.

Pos Akun Items	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Rp-miliar) Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp-billion)				
Pendapatan Revenue	107,49	117,61	(10,13)	(8,61)
Harga Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(65,67)	(79,17)	13,50	(17,05)
Laba Kotor Gross Profit	41,81	38,44	3,37	8,76
Beban Usaha Operating Expenses	(7,58)	(5,99)	(1,58)	26,38
Pendapatan Keuangan Finance Income	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya Other Incomes	4,86	3,32	1,55	46,65
Beban Lainnya Other Expenses	(4,80)	(4,47)	(0,33)	7,40
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	0,11	-	0,11	-
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	(1,43)	(0,19)	(1,25)	666,66
Beban Keuangan Finance Costs	(20,68)	(15,92)	(4,76)	29,88
Pajak Taxes	(9,01)	(11,28)	2,27	(20,15)
Laba Bersih Setelah Pajak Net Profit After Tax	3,29	3,91	(0,62)	(15,82)
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)				
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	38,90	32,69	6,21	
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp-miliar) Consolidated Financial Position (Rp-billion)				
Jumlah Aset Total Assets	224,92	245,52	(20,60)	(8,39)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**120,02**	**143,59**	**(23,57)**	**(16,41)**

Pendapatan segmen penyewaan alat berat di tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan mundurnya perolehan kontrak baru pada proyek persewaaan alat berat dari target yang ditentukan, sehingga Perusahaan belum dapat mencatatkan pendapatan secara maksimal pada tahun 2023.

Revenue from the heavy equipment rental segment decreased in 2023 due to the delay in obtaining new contracts for heavy equipment rental projects from the specified targets; hence, they cannot be recorded as revenue in 2023.

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspect

Pada tahun 2023, Perusahaan kembali melakukan perluasan pasar dengan fokus memperkuat lini bisnis *mining services*, sebagai lini bisnis utama Perusahaan. Perkuatan pada lini bisnis utama tersebut tercermin dari sisi capex dan optimalisasi alat, Perusahaan menutilisasi alat berat yang dimiliki untuk digunakan pada jasa pertambangan. Tercatat Perusahaan telah melakukan investasi alat *mining* sebesar Rp303,47 miliar atau mencapai 89,9% dari total realisasi Capex tahun 2023 yang sebesar Rp414,02 miliar, serta menutilisasi alat berat pada proyek *mining services* dengan perolehan kontrak baru pada tahun 2023 sebesar 67% pada *mining services*.

Penguatan lini bisnis *mining services* ini, merupakan langkah Perusahaan untuk memanfaatkan peluang pasar, seiring dengan gencarnya program hilirisasi tambang mineral yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya pertambangan nikel, di tengah mulai maraknya perkembangan mobil listrik di dunia. Sementara itu, di samping *focus* pada lini bisnis *mining services*, Perusahaan juga tetap memperkuat lini bisnis pada jasa pekerjaan *civil work*, yang juga merupakan *core* bisnis Perusahaan. Sedangkan untuk lini bisnis *ready mix, structure work,* dan *heavy equipment rental* sebagai lini bisnis *supporting*. Untuk lini bisnis *structure work* yang menjadi bagian dalam lini bisnis *civil work*, kedepan Perusahaan akan bersinergi dengan Entitas Induk dalam pekerjaannya. Adapun, di tahun 2023, selain fokus pada proyek-proyek *carry over*, Perusahaan juga berfokus pada proyek baru yang telah didapat guna meningkatkan kinerja Perusahaan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki.

In 2023, the Company expanded its market with a focus on strengthening the mining services business line as the Company's main business line. The main business line strengthening is reflected in capex and equipment optimization of its heavy equipment for mining services. It is recorded that the Company has invested in mining equipment amounting to Rp303.47 billion or 89.9% of the total Capex realization in 2023 of Rp414.02 billion, as well as utilizing heavy equipment in mining services projects with the acquisition of new contracts in 2023 amounting to 67% on mining services.

Strengthening the mining services line of business is the Company's measure to take advantage of market opportunities, in line with the government's constant downstream mineral mining program, especially nickel mining, amidst the rapid development of electric cars worldwide. Meanwhile, in addition to focusing on the mining services line of business, the Company also continues to strengthen its civil work services business line, which is its core business. Meanwhile, the ready mix, structure work, and heavy equipment rental business lines are supporting business lines. The Company will synergize with the Parent Entity in its work for the structure work business line, which is part of the civil work business line. Meanwhile, in 2023, apart from focusing on carry-over projects, the Company also focused on new projects that have been acquired to improve the Company's performance. Construction of Infrastructure and Facilities for the Ukurlaran SKPT Saumlaki Fishing Port.

INFORMASI TENTANG PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN

Information on National Strategic Projects or Other Assignments

Perusahaan pada tahun 2023 mengerjakan proyek strategis nasional antara lain: Proyek Jalan Tol Cinere Jagorawi, Proyek Dermaga Ibu Kota Negara (IKN), Proyek Jalan Tol Indrapura Kisaran.

In 2023, the Company worked on national strategic projects, including the Cinere Jagorawi Toll Road Project, the National Capital (IKN) Pier Project, and the Indrapura Kisaran Toll Road Project.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Research and Development

Penelitian dan pengembangan terkait kegiatan bisnis operasional perusahaan berfokus pada peningkatan *engineering capacity* perusahaan secara internal meliputi:

1. Kajian pengembangan jasa pertambangan
   Pengembangan produksi jasa pertambangan melalui kajian perolehan alat berat untuk mendukung perolehan proyek baru di jasa pertambangan yang dilakukan secara internal. Kajian tersebut meliputi kajian teknis, risiko, bisnis, dan legal.

   Kajian teknis dilaksanakan dengan menilai parameter teknis seperti spesifikasi kebutuhan alat berat, produktivitas alat berat, *after sales service* atas perolehan alat berat, dan biaya operasional atas alat berat.

   Kajian bisnis dilaksanakan untuk melihat kelayakan suatu kegiatan investasi alat berat apakah layak dilaksanakan dilihat dari nilai proyeksi dari perolehan kontrak baru, jenis pekerjaan, proyeksi keuangan atas operasional alat berat, dan penilaian parameter bisnis berupa IRR, NPV, dan *Payback Period* untuk setiap kegiatan investasi alat berat.

   Kajian risiko dilaksanakan dengan pendekatan *quantitative risk assessment* terhadap kegiatan korporasi investasi perusahaan sehingga setiap risiko yang teridentifikasi dapat dilihat dampaknya kepada perusahaan secara nyata, terukur, dan menghasilkan daftar risiko yang lebih komprehensif yang dapat dimitigasi dengan baik oleh perusahaan.

   Kajian legal dilaksanakan untuk mendukung kegiatan aksi korporasi perusahaan agar sesuai dengan tata kelola hukum yang berlaku di NKRI.

Research and development related to the Company's operational business activities focuses on increasing the company's engineering capacity internally, including:

1. Study of mining services development
   Development of mining services production through heavy equipment acquisition studies to support the acquisition of new projects in mining services carried out internally. The study includes technical, risk, business, and legal studies.

   Technical studies are carried out by assessing technical parameters, i.e., heavy equipment specification requirements, heavy equipment productivity, after-sales service for heavy equipment acquisition, and operational costs on heavy equipment usage.

   Business studies are carried out to see the feasibility of a heavy equipment investment activity, whether it is feasible to carry out, the projected value of obtaining a new contract, type of works, financial projections for heavy equipment operations, and assessment of business parameters in the form of IRR, NPV, and payback period for each heavy equipment investment.

   Risk studies are carried out using a quantitative risk assessment approach to the company's corporate investment activities so that each identified risk's tangible, measurable impact on the Company is visible and produces a more comprehensive list of risks that can be adequately mitigated by the company.

   Legal studies are carried out to support the corporate actions, so they comply with the legal governance applicable in Indonesia.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Financial Review and Other Material Information

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

STANDARDS FOR INFORMATION PRESENTATION AND COMPLIANCE WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refer to the Financial Statements for the years ended on December 31, 2023, and December 31, 2022, which have been audited by the Public Accounting Firm of Hertanto, Grace, Karunawan. Presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements have been prepared and presented following the Indonesian Financial Accounting Standards, i.e., the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statements of Financial Position

Aset

Assets

Jumlah Aset Tahun 2022-2023
Total Assets in 2022-2023

Aset Assets	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets	4.965,57	69,30	4.904,80	64,64	60,77	1,24
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2.199,42	30,70	2.683,64	35,36	(484,22)	(18,04)
Jumlah Aset Total Assets	**7.164,99**	**100,00**	**7.588,44**	**100,00**	**(423,45)**	**(5,58)**

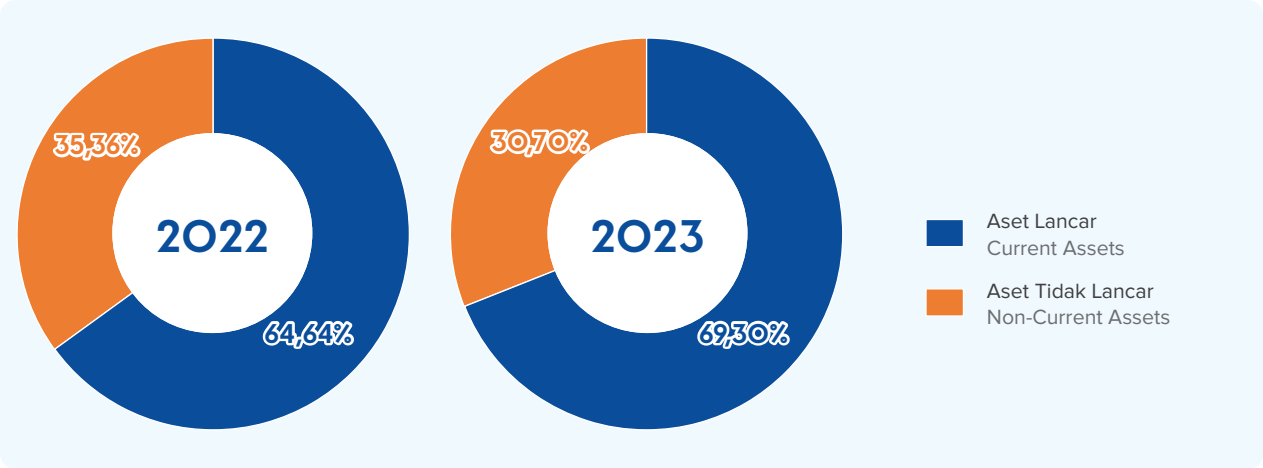

Aset Perusahaan terbagi atas aset lancar dan aset tidak lancar, di mana komposisi aset lancar dan aset tidak lancar di akhir tahun 2023 masing-masing sebesar 69,30% dan 30,70%.

Jumlah Aset Perusahaan tahun 2023 sebesar Rp7,16 triliun, mengalami penurunan 5,58% atau setara dengan Rp423,45 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp7,59 triliun. Penjelasan rinci atas kinerja aset Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

The Company's assets are divided into current and non-current assets, where the composition of current and non-current assets at the end of 2023 is 69.30% and 30.70%, respectively.

Total Company Assets in 2023 is Rp7.16 trillion, a 5.58% decrease or the equivalent of Rp423.45 billion compared to 2022 of Rp7.59 trillion. A detailed explanation of the performance of the Company's assets is available below.

Perkembangan Jumlah Aset 2019-2023
Total Assets Development in 2019-2023
Rp-miliar | Rp-billion

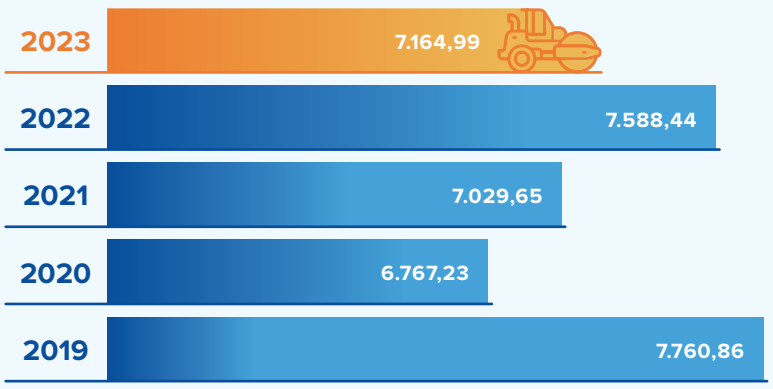

ASET LANCAR

Aset Lancar Tahun 2022-2023
Current Assets in 2022-2023

Aset Lancar Current Assets	**2023 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**2022 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Persentase** (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	161,75	305,61	(143,87)	(47,07)
Bank yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Bank	-	29,50	(29,50)	-
Investasi Jangka Pendek Short-Term Investments	107,76	109,47	(1,72)	(1,57)
Piutang Usaha - Bersih Trade Receivables - Net	1.506,63	808,91	697,72	86,25
Piutang Retensi - Bersih Retention Receivables - Net	195,79	171,22	24,56	14,34
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih Gross Amount Due from Customers - Net	2.475,02	2.911,27	(436,25)	(14,98)
Piutang Sewa Pembiayaan Finance Lease Receivables	7,02	6,42	0,60	9,38
Piutang Lain-lain Other Receivables	30,02	24,61	5,41	21,99

Aset Lancar Current Assets	**2023 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**2022 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Persentase** (%) Percentage (%)
Persediaan Inventories	167,65	154,03	13,62	8,84
Uang Muka Advances	36,74	37,07	(0,32)	(0,87)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	237,01	306,14	(69,13)	(22,58)
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	40,18	40,53	(0,35)	(0,87)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**4.965,57**	**4.904,80**	**60,77**	**1,24**

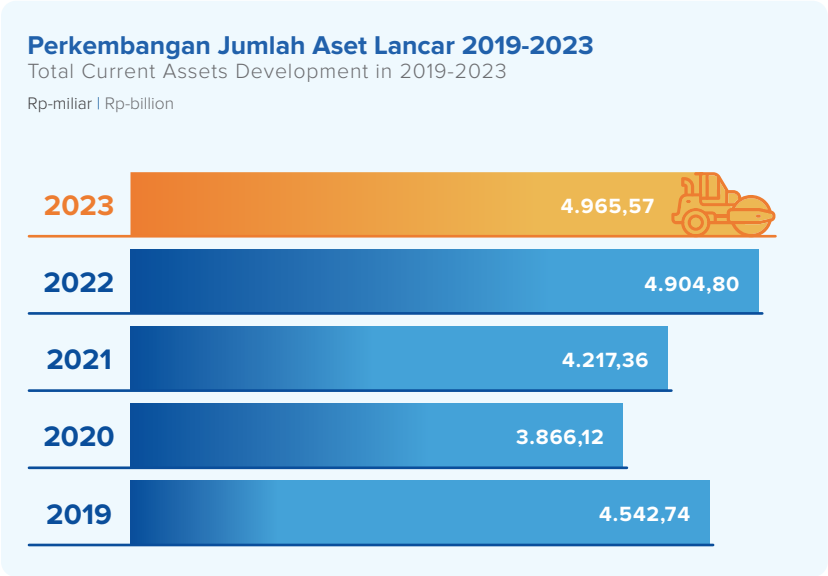

Aset lancar Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp4,97 triliun, mengalami kenaikan 1,24% atau setara dengan Rp60,77 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4,90 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya piutang usaha Perusahaan.

Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas Perusahaan di akhir tahun 2023 sebesar Rp161,75 miliar, mengalami penurunan 47,07% atau setara Rp143,87 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp305,61 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan kas dan setara kas untuk melakukan pembayaran kepada rekan pihak ketiga dan aktifitas investasi sebagaimana akan dijelaskan secara rinci pada bagian Laporan Arus Kas Konsolidasian.

The Company's current assets in 2023 are Rp4.97 trillion, a 1.24% increase or the equivalent of Rp60.77 billion compared to 2022 of Rp4.90 trillion. The increase was mainly due to the increase in the Company's trade receivables.

Cash and Cash Equivalents

The Company's Cash and Cash Equivalents balance at the end of 2023 is Rp161.75 billion, a 47.07% decrease or equivalent to Rp143.87 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp305.61 billion. The decrease was due to the use of cash and cash equivalents to make payments to third-party partners and investment activities, which will be explained in the Consolidated Statement of Cash Flows section.

Bank yang Dibatasi Penggunaannya
Tidak terdapat Nilai Bank yang Dibatasi Penggunaannya dibukukan oleh Perusahaan di akhir tahun 2023, namun pada tahun 2022 Perusahaan membukukan Nilai Bank yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp29,50 miliar.

Restricted Bank
The Company recorded no Restricted Bank Value at the end of 2023, however the Company recorded a Restricted Bank Value of Rp29.50 billion in 2022.

Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan deposito berjangka yang dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima Perusahaan dan entitas anak dari bank.

Saldo Investasi Jangka Pendek di akhir tahun 2023 sebesar Rp107,76 miliar, mengalami penurunan 1,57% atau setara Rp1,72 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp109,47 miliar.

Short-Term Investment
Short-term investments are time deposits used as collateral for loans received by the Company and its subsidiaries from banks.

The Short-Term Investment balance at the end of 2023 is Rp107.76 billion, a 1.57% decrease or the equivalent of Rp1.72 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp109.47 billion.

Piutang Usaha - Bersih
Nilai Piutang Usaha - Bersih Perusahaan hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp1,51 triliun, tercatat meningkat 86,25% atau setara Rp697,72 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp808,91 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan atas progres yang telah ditagihkan sehingga dapat dikonversi menjadi piutang usaha.

Perusahaan menggunakan rasio tingkat kolektibilitas piutang sebagaimana dapat dilihat pada bagian "Tingkat Kolektibilitas Piutang" dalam bab ini.

Trade Receivables - Net
The Company's Trade Receivables - Net value until the end of 2023 reached Rp1.51 trillion, recording an 86.25% increase or equivalent to Rp697.72 billion compared to the end of 2022 of Rp808.91 billion. The increase was due to an increase in progress that had been billed so that it could be converted into trade receivables.

The company uses the receivables collectibility ratio as in the "Receivables Collectibility Level" section in this chapter.

Piutang Retensi - Bersih
Piutang retensi merupakan pendapatan Perusahaan dan entitas anak yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan dalam masa pemeliharaan.

Saldo Piutang Retensi - Bersih di akhir tahun 2023 mencapai Rp195,79 miliar, tercatat meningkat 14,34% atau setara Rp24,56 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp171,22 miliar. Kenaikan ini disebabkan penambahan proyek-proyek yang telah memasuki masa pemeliharaan.

Retention Receivables - Net
Retention receivables represent the income of the Company and subsidiaries retained by the employer as collateral during the maintenance period.

Retention Receivables - Net balance at the end of 2023 reached Rp195.79 billion, recording a 14.34% increase or equivalent to Rp24.56 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp171.22 billion. The increase was due to the addition of projects that had entered the maintenance period.

Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih
Nilai Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Bersih hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp2,47 triliun, mengalami penurunan 14,98% atau setara Rp436,25 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp2,91 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pengakuan tagihan bruto menjadi piutang usaha.

Gross Amount Due from Customers - Net
The value of Gross Amount Due from Customers - Net until the end of 2023 reached Rp2.47 trillion, a 14.98% decrease or the equivalent of Rp436.25 billion compared to the end of 2022 of Rp2.91 trillion. The decrease was caused by the recognition of gross amounts as trade receivables.

Piutang Sewa Pembiayaan
Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai penyewa untuk alat berat pada proyek *hauling* milik PT Weda Bay Nickel. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 4 tahun.

Financial Lease Receivables
The Company entered a finance lease agreement as a lessee for heavy equipment on a hauling project owned by PT Weda Bay Nickel. The finance lease term is four years.

Saldo Piutang Sewa Pembiayaan di akhir tahun 2023 mencapai Rp7,02 miliar, tercatat meningkat 9,38% atau setara Rp601,83 juta dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp6,42 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembelian alat berat pada proyek *mining services* yang sedang dikerjakan oleh Perusahaan.

Piutang Lain-lain
Nilai Piutang Lain-lain hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp30,02 miliar, meningkat 21,99% atau setara Rp5,41 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp24,61 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh aktivitas divestasi yang dilakukan Perusahaan.

Persediaan
Akun Persediaan merupakan persediaan bahan untuk pembuatan bekisting kolom, bekisting dinding dan bahan *batching plant* serta suku cadang.

Saldo Persediaan Perusahaan di akhir tahun 2023 mencapai Rp167,65 miliar, tercatat meningkat 8,84% atau setara Rp13,62 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp154,03 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya persediaan bahan untuk pembuatan *bekisting* kolom, *bekisting* dinding dan bahan *batching plant* serta suku cadang proyek-proyek Perusahaan yang sedang berjalan.

Uang Muka
Nilai Uang Muka hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp36,74 miliar, mengalami penurunan 0,87% atau setara Rp323,62 juta dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp37,07 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penyelesaian pekerjaan oleh *supplier*.

Pajak Dibayar di Muka
Saldo Pajak Dibayar di Muka di akhir tahun 2023 mencapai Rp237,01 miliar, tercatat mengalami penurunan 22,58% atau setara Rp69,13 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp306,14 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pencairan restitusi pajak.

Biaya Dibayar di Muka
Nilai Biaya Dibayar di Muka hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp40,18 miliar, mengalami penurunan 0,87% atau setara Rp352,66 juta dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp40,53 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya proyek baru yang sudah didapat dan berkontrak sehingga mampu menyerap biaya dibayar dimuka.

The balance of Finance Lease Receivables at the end of 2023 reached Rp7.02 billion, a 9.38% increase or equivalent to Rp601.83 million compared to the balance at the end of 2022 of Rp6.42 billion. The increase is due to the emerging need for purchasing heavy equipment for mining services projects being undertaken by the Company.

Other Receivables
The value of Other Receivables until the end of 2023 reached Rp30.02 billion, a 21.99% increase or the equivalent of Rp5.41 billion compared to the end of 2022 of Rp24.61 billion. The increase is due to divestment activities conducted by the Company.

Inventories
The Inventory Account represents supplies of materials for making column formwork, wall formwork, batching plant materials, as well as spare parts.

The Company's inventory balance at the end of 2023 reached Rp167.65 billion, an 8.84% increase or equivalent to Rp13.62 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp154.03 billion. The increase is due to an increase in the inventory of materials for the production of column formwork, wall formwork, batching plant materials, and spare parts for ongoing projects of the Company.

Advances
The value of Advances until the end of 2023 reached Rp36.74 billion, a 0.87% decrease or the equivalent of Rp323.62 million compared to the end of 2022 of Rp37.07 billion. The decrease is due to the completion of work by suppliers.

Prepaid Taxes
The balance of Prepaid Taxes at the end of 2023 reached Rp237.01 billion, recording a 22.58% decrease or the equivalent of Rp69.13 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp306.14 billion. The decrease was due to tax refund disbursement.

Prepaid Expenses
The value of Prepaid Expenses until the end of 2023 reached Rp40.18 billion, a 0.87% decrease or the equivalent of Rp352.66 million compared to the end of 2022 of Rp40.53 billion. The decrease was due to new projects obtained and contracted; hence, they could absorb prepaid expenses.

ASET TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSETS

Aset Tidak Lancar Tahun 2022-2023
Non-Current Assets in 2022-2023

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Piutang Sewa Pembiayaan Finance Lease Receivables	5,04	12,06	(7,02)	(58,20)
Piutang Lain-lain Other Receivables	-	110,19	(110,19)	-
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture	11,67	162,64	(150,97)	(92,82)
Aset Hak Guna - Bersih Right-of-Use Assets - Net	431,89	436,85	(4,96)	(1,14)
Aset Tetap - Bersih Property and Equipment - Net	1.500,70	1.712,08	(211,38)	(12,35)
Goodwill	246,86	246,86	-	-
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	3,25	2,96	0,30	9,98
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**2.199,42**	**2.683,64**	**(484,22)**	**(18,04)**

Perkembangan Jumlah Aset Tidak Lancar 2019-2023
Total Non-Current Assets Development in 2019-2023

Rp-miliar | Rp-billion

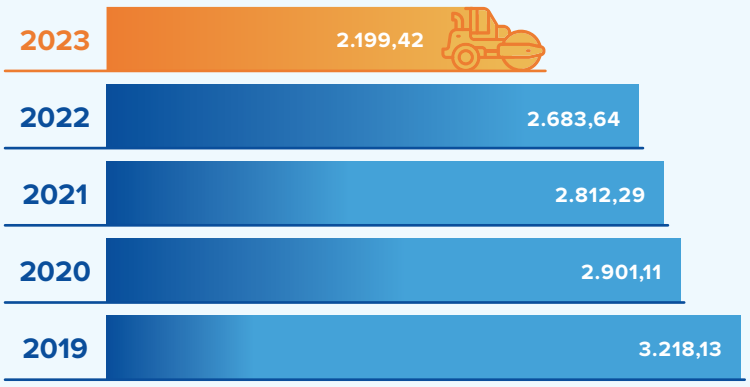

Jumlah aset tidak lancar Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp2,20 triliun, mengalami penurunan 18,04% atau setara dengan Rp484,22 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,68 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya nilai investasi pada entitas asosiasi serta berkurangnya saldo aset tetap, sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

The Company's total non-current assets in 2023 amounted to Rp2.20 trillion, an 18.04% decrease or the equivalent of Rp484.22 billion compared to 2022 of Rp2.68 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in the investment value in associate entities and a decrease in fixed asset balances, as explained in detail below.

Piutang Sewa Pembiayaan

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai penyewa untuk alat berat pada proyek *hauling* milik PT Weda Bay Nickel. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 4 tahun.

Saldo Piutang Sewa Pembiayaan di akhir tahun 2023 mencapai Rp5,04 miliar, tercatat mengalami penurunan 58,20% atau setara Rp7,02 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp12,06 miliar.

Investasi pada Ventura Bersama

Perusahaan memiliki Investasi pada Ventura Bersama yaitu pada entitas LMA Konsorsium, Kerja Sama Operasi (KSO) PPRE - RPJ, KSO PP Presisi - Duta Pratama Indah, KSO PT PPRE - Sarana, dan KSO PP Presisi - Yalapersada.

Nilai Investasi pada Ventura Bersama hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp11,67 miliar, mengalami penurunan 92,82% atau setara Rp150,97 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp162,64 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penyelesaian proyek pada Ventura Bersama.

Aset Hak Guna - Bersih

Perusahaan dan entitas anak menyewa beberapa aset termasuk kendaraan, alat berat dan *tower crane*. Masa sewa rata-rata adalah 3 tahun. Perusahaan memiliki opsi untuk membeli peralatan manufaktur tertentu dengan jumlah nominal pada akhir masa sewa. Kewajiban Perusahaan dijamin dengan hak milik pesewa atas aset yang disewa untuk sewa tersebut.

Saldo Aset Hak Guna - Bersih di akhir tahun 2023 mencapai Rp431,89 miliar, tercatat mengalami penurunan 1,14% atau setara Rp4,96 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp436,85 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh akumulasi penyusutan atas Aset Hak Guna dan adanya penjualan atas Aset tersebut.

Aset Tetap - Bersih

Nilai Aset Tetap - Bersih hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp1,50 triliun, mengalami penurunan 12,35% atau setara Rp211,38 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp1,71 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh akumulasi penyusutan atas Aset Tetap.

Finance Lease Receivables

The company entered a finance lease agreement as a lessee for heavy equipment on a hauling project owned by PT Weda Bay Nickel. The finance lease term is four years.

The balance of Finance Lease Receivables at the end of 2023 reached Rp5.04 billion, recorded as a 58.20% decrease or the equivalent of Ro7.02 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp12.06 billion.

Investment in Joint Ventures

The Company has investments in Joint Ventures, namely in the LMA Consortium entity, Joint Operation (KSO) PPRE - RPJ, KSO PP Presisi - Duta Pratama Indah, KSO PT PPRE - Sarana, and KSO PP Presisi - Yalapersada.

The investment value in Joint Ventures until the end of 2023 reached Rp11.67 billion, a 92.82% decrease or the equivalent of Rp150.97 billion compared to the end of 2022 of Rp162.64 billion. The decrease was due to the completion of the Joint Venture project.

Right-to-Use Assets - Net

The Company and its subsidiaries rent several assets, including vehicles, heavy equipment, and tower cranes. The average lease term is three years. The Company has the option to purchase certain manufacturing equipment for a nominal amount at the end of the lease term. The Company's obligations are guaranteed by the lessee's ownership rights to the assets leased for the lease.

The Right-to-Use Assets - Net balance at the end of 2023 reached Rp431.89 billion, recorded as a 1.14% decrease or the equivalent of Rp4.96 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp436.85 billion. The decrease is due to the accumulation of depreciation on the Right-of-Use Asset and the sale of these assets.

Property and Equipment - Net

Property and Equipment - Net until the end of 2023 reached Rp1.50 trillion, a 12.35% decrease or the equivalent of Rp211.38 billion compared to the end of 2022 of Rp1.71 trillion. The decrease is due to the accumulation of depreciation on Property and Equipment.

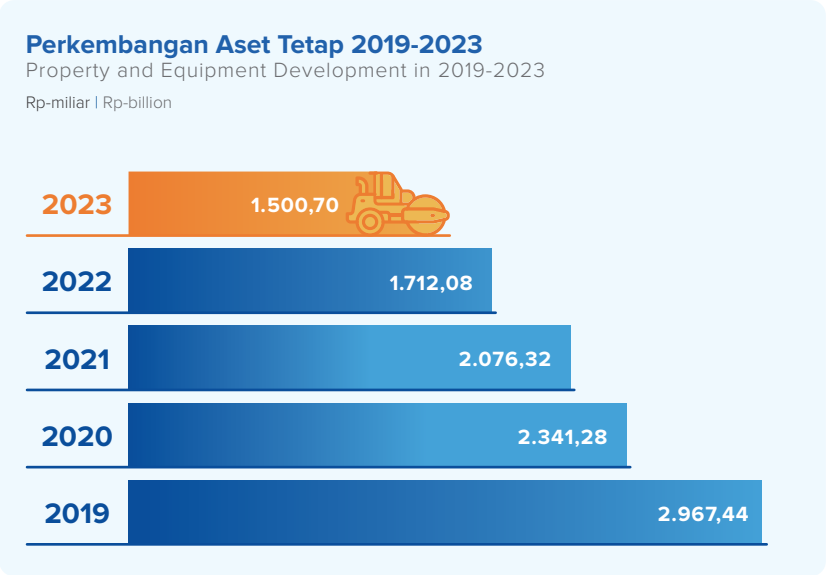

Goodwill

Merupakan *goodwill* atas transaksi kombinasi bisnis entitas anak, LMA, pada tahun 2017.

Saldo *Goodwill* di akhir tahun 2023 tidak mengalami perubahan dengan saldo di akhir tahun 2022, yaitu sebesar Rp246,86 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas *goodwill* tersebut di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang mengharuskan Perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai atas *goodwill*, selain dari pengujian tahunan yang diungkapkan pada Laporan Keuangan teraudit.

Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Perusahaan berupa *software* dengan kepemilikan lisensi resmi dari SAP, Microsoft Office, Online I-matrix Batching Plant, Autocad dan Visio.

Nilai Aset Tidak Berwujud hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp3,25 miliar, meningkat 9,98% atau setara Rp295,44 juta dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp2,96 miliar. Kenaikan ini disebabkan peningkatan pada pengembangan sistem Perusahaan.

Goodwill

Represents goodwill from the business combination transaction of the subsidiary, LMA, in 2017.

The goodwill balance at the end of 2023 did not change compared to the balance at the end of 2022, which was Rp246.86 billion.

Management believes that there is no indication of impairment of the goodwill mentioned above for the years ended December 31, 2023, and 2022, which would require the Company to carry out an impairment test for goodwill other than the annual test disclosed in the audited Financial Statements.

Intangible Assets

The Company's Intangible Assets are in the form of software with official license ownership from SAP, Microsoft Office, Online I-matrix Batching Plant, Autocad, and Visio.

The value of Intangible Assets until the end of 2023 reached Rp3.25 billion, a 9.98% increase or the equivalent of Rp295.44 million compared to the end of 2022 of Rp2.96 billion. The increase was due to improvements in the Company's system development.

Liabilitas

Liabilities

Jumlah Liabilitas Tahun 2022-2023
Total Liabilities in 2022-2023

Liabilitas Liabilities	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Jumlah (Rp-miliar)** Total (Rp-billion)	**Kontribusi (%)** Contribution (%)	**Nominal (Rp-miliar)** Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.223,01	83,72	3.795,39	85,52	(572,38)	(15,08)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	626,89	16,28	642,72	14,48	(15,83)	(2,46)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**3.849,90**	**100,00**	**4.438,11**	**100,00**	**(588,22)**	**(13,25)**

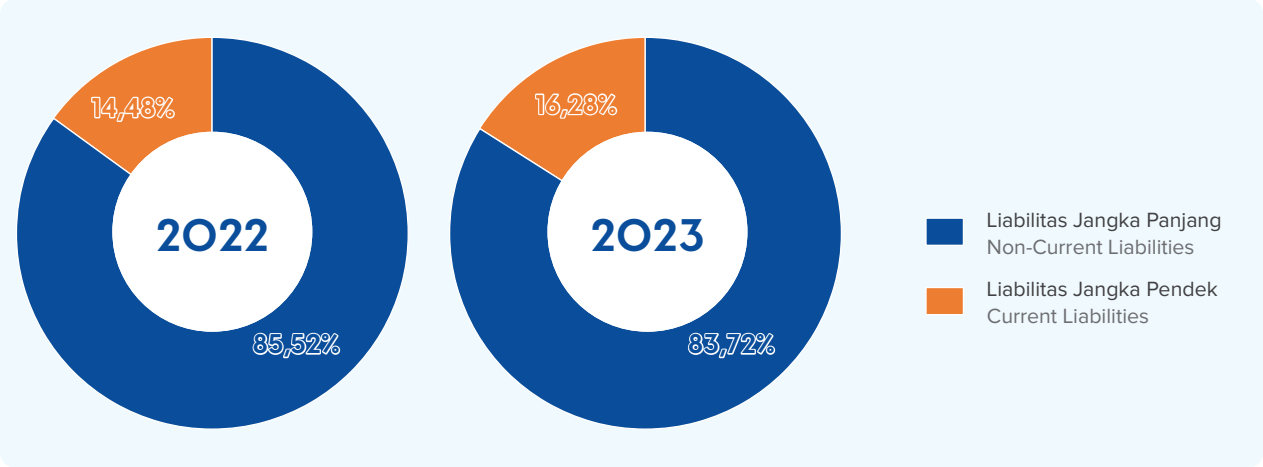

Liabilitas Perusahaan terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka Panjang. Komposisi liabilitas Perusahaan pada akhir tahun 2023 terdiri dari 83,72% liabilitas jangka pendek dan 16,28% liabilitas jangka panjang.

Jumlah liabilitas Perusahaan di tahun 2023 mengalami penurunan 13,25% atau setara dengan Rp588,22 miliar, dari Rp4,44 triliun di tahun 2022 menjadi Rp3,85 triliun di tahun 2023. Penjelasan rinci atas kinerja liabilitas Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

The Company's liabilities consist of current and non-current liabilities. The Company's liabilities at the end of 2023 consist of 83.72% current liabilities and 16.28% non-current liabilities.

The Company's total liabilities in 2023 decreased by 13.25% or the equivalent of Rp588.22 billion, from Rp4.44 trillion in 2022 to Rp3.85 trillion in 2023. A detailed explanation of the Company's liability performance is available below.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

CURRENT LIABILITIES

Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2022-2023
Current Liabilities in 2022-2023

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Utang Usaha Trade Payables	1.112,30	1.460,91	(348,61)	(23,86)
Uang Muka Pemberi Kerja Advances from Project Owner	41,77	158,62	(116,85)	(73,66)
Utang Lain-lain Other Payables	102,81	138,68	(35,87)	(25,86)
Utang pembelian Aset Tetap Property and Equipment Purchase Payables	78,12	-	78,12	-
Utang Pajak Taxes Payables	327,20	265,25	61,96	23,36
Utang Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	1.017,52	1.286,62	(269,11)	(20,92)
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun Current Maturity of Long-Term Bank Loans	187,13	282,05	(94,92)	(33,65)
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun Current Maturity of Long-Term Liabilities	356,15	203,25	152,90	75,23
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**3.223,01**	**3.795,39**	**(572,38)**	**(15,08)**

Perkembangan Liabilitas Jangka Pendek 2019-2023
Current Liabilities Development in 2019-2023
Rp-miliar | Rp-billion

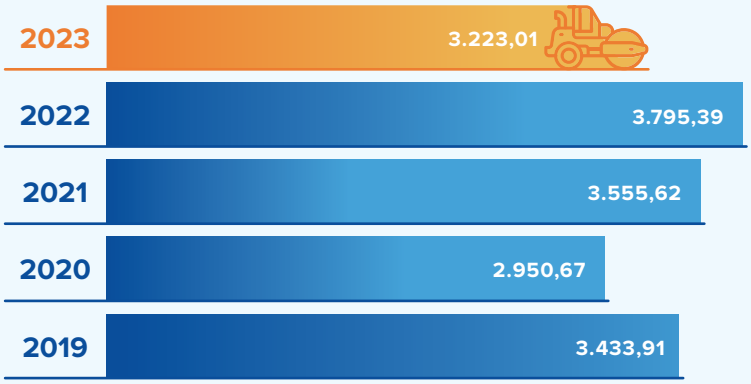

Per 31 Desember 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,22 triliun, mengalami penurunan 15,08% atau setara dengan Rp572,38 miliar dibandingkan liabilitas jangka pendek tahun 2022 sebesar Rp3,79 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya utang usaha dan utang bank jangka pendek, sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Utang Usaha
Saldo Utang Usaha di akhir tahun 2023 mencapai Rp1,11 triliun, tercatat mengalami penurunan 23,86% atau setara Rp348,61 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp1,46 triliun. Penurunan ini disebabkan karena pembayaran atas utang yang sudah jatuh tempo.

Utang Pajak
Nilai Utang Pajak hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp327,20 miliar, meningkat 23,36% atau setara Rp61,96 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp265,25 miliar.

Utang Bank Jangka Pendek
Saldo Utang Bank Jangka Pendek di akhir tahun 2023 mencapai Rp1,02 triliun, tercatat mengalami penurunan 20,92% atau setara Rp269,11 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp1,29 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo.

Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun
Nilai Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp187,13 miliar, mengalami penurunan 33,65% atau setara Rp94,92 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp282,05 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka Panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang telah jatuh tempo.

As of December 31, 2023, the Company recorded short-term liabilities of Rp3.22 trillion, a 15.08% decrease or equivalent to Rp572.38 billion compared to short-term liabilities in 2022 of Rp3.79 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in trade receivables and short-term bank loans, as explained in detail below.

Trade Payables
The balance of Trade Payables at the end of 2023 reached Rp1.11 trillion, recorded as a 23.86% decrease or the equivalent of Rp348.61 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp1.46 trillion. The decrease to payments made on debts that were due.

Taxes Payables
The value of Taxes Payables until the end of 2023 reached Rp327.20 billion, a 23.36% increase or the equivalent of Rp61.96 billion compared to the end of 2022, which was Rp265.25 billion.

Short-Term Bank Loans
The Short-Term Bank Loan balance at the end of 2023 reached Rp1.02 trillion, which is recorded as a 20.92% decrease or the equivalent of Rp269.11 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp1.29 trillion. The decrease is due to the repayment of short-term bank loans that have matured.

Current Maturity of Long-Term Bank Loans

The value of the Current Maturity of Long-Term Bank Loans until the end of 2023 reached Rp187.13 billion, a 33.65% decrease or the equivalent of Rp94.92 billion compared to the end of 2022 of Rp282.05 billion. The decrease is due to the repayment of long-term bank loans that matured within 1 year and have matured.

Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun

Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun termasuk Liabilitas Sewa.

Saldo Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 (Satu) Tahun di akhir tahun 2023 mencapai Rp356,15 miliar, tercatat meningkat 75,23% atau setara Rp152,90 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp203,25 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembelian alat berat pada proyek *mining services* yang sedang dikerjakan oleh Perusahaan.

Current Maturity of Long-Term Liabilities

Current Maturity of Long-Term Liabilities, including Lease Liabilities.

The balance of Current Maturity of Long-Term Liabilities at the end of 2023 reached Rp356.15 billion, recording a 75.23% increase or the equivalent of Rp152.90 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp203.25 billion. The increase is due to the emerging need for purchasing heavy equipment for mining services projects being undertaken by the Company.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

NON-CURRENT LIABILITIES

Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2022-2023
Non-Current Liabilities in 2022-2023

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-Employment Benefits Liabilities	17,21	14,76	2,45	16,62
Utang Bank Jangka Panjang - Bersih Long-Term Bank Loans - Net	117,20	114,05	3,14	2,76
Liabilitas Jangka Panjang - Bersih Long-Term Liabilities - Net	290,24	311,99	(21,75)	(6,97)
Utang Obligasi Bonds Payable	202,25	201,92	0,33	0,16
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**626,89**	**642,72**	**(15,83)**	**(2,46)**

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2019-2023
Non-Current Liabilities Development in 2019-2023

Rp-miliar | Rp-billion

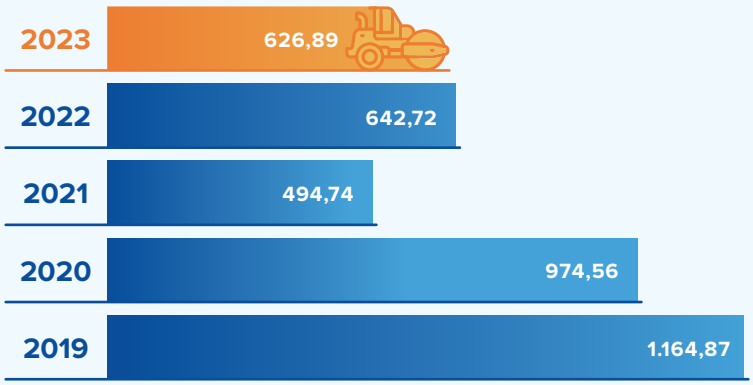

Jumlah liabilitas jangka panjang Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp626,89 miliar, mengalami penurunan 2,46% atau setara dengan Rp15,83 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang tahun 2022 sebesar Rp642,7 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya liabilitas jangka panjang - bersih, sebagaimana dijelaskan secara rinci di bawah ini.

The Company's total non-current liabilities in 2023 amounted to Rp626.89 billion, a 2.46% decrease or the equivalent of Rp15.83 billion compared to the total non-current liabilities in 2022 of Rp642.7 billion. The decrease was primarily due to a reduction in long-term liabilities - net, as explained in detail below.

Utang Bank Jangka Panjang - Bersih

Nilai Utang Bank Jangka Panjang - Bersih hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp117,20 miliar, meningkat 2,79% atau setara Rp3,14 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp114,05 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan atas utang bank jangka panjang baru.

Long-Term Bank Loans - Net

The value of Long-Term Bank Loans - Net until the end of 2023 reached Rp117.20 billion, a 2.79% increase or the equivalent of Rp3.14 billion compared to the end of 2022 of Rp114.05 billion. The increase is due to the addition of new long-term bank loans.

Liabilitas Jangka Panjang - Bersih

Liabilitas Jangka Panjang - Bersih termasuk liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa.

Long-Term Liabilities - Net

Long-Term Liabilities - Net includes long-term liabilities after deducting the portion due within one year and lease liabilities.

Saldo Liabilitas Jangka Panjang - Bersih di akhir tahun 2023 mencapai Rp290,24 miliar, tercatat mengalami penurunan 6,97% atau setara Rp21,75 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp311,99 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan utang sewa pembiayaan jangka Panjang yang telah jatuh tempo.

The balance of Long-Term Liabilities - Net at the end of 2023 reached Rp290.24 billion, recording a 6.97% decrease or the equivalent of Rp21.75 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp311.99 billion. The decrease is due to the repayment of long-term finance lease payables that have matured.

Utang Obligasi

Nilai Utang Obligasi hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp202,25 miliar, meningkat 0,16% atau setara Rp325,40 juta dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp201,92 miliar. Kenaikan ini disebabkan atas biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi.

Bonds Payable

The value of Bonds Payable by the end of 2023 reached Rp202.25 billion, a 0.16% increase or the equivalent of Rp325.40 million compared to the end of 2022 of Rp201.92 billion. The increase is due to the unamortized bond issuance costs.

Ekuitas

Equity

Ekuitas Tahun 2022-2023
Equity in 2022-2023

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Modal Saham Share Capital	1.022,43	1.022,43	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital	749,56	749,56	-	-
Saham Treasuri Treasury Shares	(18,63)	(18,63)	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	46,09	40,56	5,54	13,65

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	97,18	92,15	5,04	5,47
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	532,66	457,48	75,18	16,43
SubJumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Subtotal Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	2.429,29	2.343,54	85,75	3,66
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali Equity Attributable to Non-Controlling Interest	885,80	806,78	79,01	9,79
Jumlah Ekuitas Total Equity	**3.315,09**	**3.150,33**	**164,77**	**5,23**

Di tahun 2023, Perusahaan membukukan nilai Ekuitas sebesar Rp3,31 triliun, mengalami kenaikan 5,23% atau setara dengan Rp164,77 miliar dibandingkan Ekuitas tahun 2022 sebesar Rp3,15 triliun. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya saldo laba sebagai dampak dari tumbuhnya laba Perusahaan dari tahun sebelumnya.

In 2023, the Company recorded an Equity value of Rp3.31 trillion, a 5.23% increase or equivalent to Rp164.77 billion compared to Equity in 2022 of Rp3.15 trillion. This was mainly due to the increase in retained earnings and the Company's profit growth from the previous year.

Perkembangan Jumlah Ekuitas 2019-2023
Total Equity Development in 2019-2023
Rp-miliar | Rp-billion

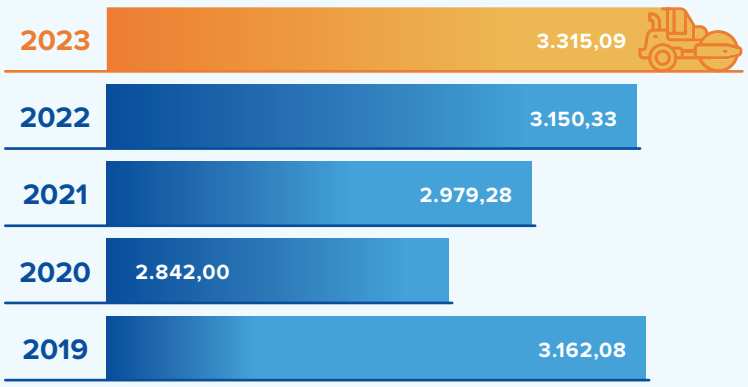

Modal Saham
Modal Saham adalah modal yang disetorkan oleh pemilik modal/pemegang saham Perusahaan.

Tidak terdapat perubahan modal dasar antara tahun 2022 dan tahun 2023, yaitu sebesar Rp1,02 triliun.

Tambahan Modal Disetor
Tambahan Modal Disetor adalah selisih lebih harga saham saat penerbitan dibandingkan dengan nilai nominal harga saham per lembar.

Share Capital
Share Capital is capital paid in by the capital owner/shareholder of the Company.

There was no change in authorized capital between 2022 and 2023, which is Rp1.02 trillion.

Additional Paid-in Capital
Additional Paid-in Capital is the difference between the share price at issuance and the nominal value per share price.

Saldo Tambahan Modal Disetor tidak mengalami perubahan nilai di tahun 2022 dan 2023, yaitu sebesar Rp749,56 miliar.

The balance of Additional Paid-in Capital did not change in value in 2022 and 2023, i.e., Rp749.56 billion.

Saham Treasuri

Pada tahun 2020, Perusahaan membeli kembali saham melalui Bursa Efek Indonesia sebesar 108.058.700 lembar saham dengan nilai perolehan sebesar Rp18,63 miliar yang dicatat sebagai saham treasuri yang merupakan pengurang ekuitas.

Treasury Shares

In 2020, the Company repurchased 108,058,700 shares via the Indonesia Stock Exchange with an acquisition value of Rp18.63 billion, recorded as treasury shares, which is a reduction in equity.

Nilai Saham Treasuri tidak mengalami perubahan nilai di tahun 2022 dan 2023, yaitu sebesar Rp18,63 miliar.

The value of Treasury Shares did not change in 2022 and 2023, i.e., Rp18.63 billion.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain terdiri dari selisih nilai atas revaluasi aset tetap.

Other Comprehensive Income

Other comprehensive income consists of the difference in value from the revaluation of fixed assets.

Saldo Penghasilan Komprehensif Lain di akhir tahun 2023 mencapai Rp46,09 miliar, tercatat meningkat 13,65% atau setara Rp5,54 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp40,56 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh selisih nilai atas revaluasi aset tetap Perusahaan.

The balance of Other Comprehensive Income at the end of 2023 reached Rp46.09 billion, recording a 13.65% increase or the equivalent of Rp5.54 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp40.56 billion. The increase is due to the difference in value from the Company's property and equipment revaluation.

Saldo Laba

Saldo Laba adalah akumulasi jumlah laba bersih yang telah dibukukan dikurangi dengan dividen yang telah dibayarkan yang menjadi porsi pemilik entitas induk. Saldo Laba terdiri dari Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya, serta Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya.

Retained Earnings

Retained Earnings are the accumulated net profit that has been recorded minus the dividends that have been paid, which are the portion of the owners of the parent entity. Retained Earnings consist of Appropriated Retained Earnings as well as Unappropriated Retained Earnings.

- **Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya**

  Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya adalah akumulasi jumlah laba bersih yang wajib dicadangkan oleh Perusahaan senilai 5% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan.

  Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya tahun 2023 sebesar Rp97,18 miliar, mengalami kenaikan 5,47% atau setara dengan Rp5,04 miliar dibandingkan Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya tahun 2022 sebesar Rp92,15 miliar.

- **Appropriated Retained Earnings**

  Appropriated Retained Profit is the accumulated net profit that must be reserved by the Company in the amount of 5% of the net profit that can be attributed to the owners of the parent entity following the results of the Annual GMS resolution.

  Appropriated Retained Earnings in 2023 amounted to Rp97.18 billion, a 5.47% increase or the equivalent of Rp5.04 billion compared to Appropriated Retained Earnings in 2022 of Rp92.15 billion.

- **Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya**

  Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya adalah akumulasi jumlah laba bersih telah dibukukan dikurangi dengan pencadangan saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan dikurangi dengan dividen yang telah dibayarkan.

  Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya tahun 2023 sebesar Rp532,66 miliar, mengalami kenaikan 16,43% atau setara dengan Rp75,18 miliar dibandingkan Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya tahun 2022 sebesar Rp457,48 miliar.

- **Unappropriated Retained Earnings**

  Unappropriated Retained Profit is the accumulated net profit that has been recorded minus the reserve for retained earnings whose use has been determined and reduced by dividends that have been paid.

  Unappropriated Retained Earnings in 2023 amounts to Rp532.66 billion, a 16.43% increase or the equivalent of Rp75.18 billion compared to Unappropriated Retained Earnings in 2022 of Rp457.48 billion.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah jumlah ekuitas yang dimiliki induk Perusahaan yang muncul akibat adanya laporan keuangan konsolidasi.

Saldo Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk di akhir tahun 2023 mencapai Rp2,43 triliun, tercatat mengalami kenaikan 3,66% atau setara Rp85,75 miliar dibandingkan saldo di akhir tahun 2022 sebesar Rp2,34 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya perubahan nilai ekuitas pada Entitas Anak.

Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

Equity attributable to owners of the parent entity is the amount of equity owned by the parent company, which arises from the consolidated financial statements.

The equity attributable to owners of the parent entity balance at the end of 2023 reached Rp2.43 trillion, recording a 3.66% increase or the equivalent of Rp85.75 billion compared to the balance at the end of 2022 of Rp2.34 trillion. The increase is due to changes in the equity value of Subsidiaries.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali adalah jumlah ekuitas yang dimiliki Kepentingan Non Pengendali yaitu pemilik selain induk Perusahaan yang muncul akibat adanya laporan keuangan konsolidasi.

Saldo Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp885,80 miliar, meningkat 9,79% atau setara Rp79,01 miliar dibandingkan akhir tahun 2022 sebesar Rp806,78 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya perubahan nilai ekuitas pada ekuitas anak.

Equity Attributable to Non-Controlling Interest

Equity Attributable to Non-Controlling Interest is the amount of equity owned by Non-Controlling Interests, i.e., owners other than the parent company, arising from the consolidated financial statements.

The Equity Attributable to Non-Controlling Interest balance until the end of 2023 reached Rp885.80 billion, a 9.79% increase or the equivalent of Rp79.01 billion compared to the end of 2022 of Rp806.78 billion. This increase is caused by changes in the subsidiary's equity value.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2022-2023
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2022-2023

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in billion Rupiah, unless otherwise stated)	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	3.400,87	3.635,20	(234,33)	(6,45)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(2.807,30)	(3.022,81)	215,51	(7,13)
Laba Kotor Gross Profit	593,57	612,38	(18,82)	(3,07)
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	14,71	34,06	(19,35)	(56,82)
Beban Usaha Operating Expenses	(90,23)	(89,26)	(0,97)	1,08
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	(18,68)	(1,15)	(17,53)	1.528,56
Pendapatan/(Beban) Keuangan Finance Income (Costs)	(229,11)	(228,37)	(0,74)	0,32
Pendapatan/(Beban) Lainnya Other Income (Costs)	7,92	(32,50)	40,42	124,37
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(96,38)	(102,22)	5,84	(5,71)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	181,79	192,94	(11,15)	(5,78)

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in billion Rupiah, unless otherwise stated)	**2023 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**2022 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(9,01)	(11,28)	2,27	(20,15)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	172,78	181,66	(8,88)	(4,89)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	8,17	7,56	0,61	8,06
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	180,95	189,22	(8,27)	(4,37)
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	80,22	100,75	(20,54)	(20,38)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	92,57	80,91	11,66	14,41
	172,78	181,66	(8,88)	(4,89)
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	85,75	106,06	(20,30)	(19,15)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	95,20	83,16	12,03	14,47
	180,95	189,22	(8,27)	(4,37)
Laba Dasar per Saham (dalam Rupiah penuh) Basic Earnings per Share (in full Rupiah)	7,85	9,85	(2,00)	(20,30)

Pendapatan

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian "Tinjauan Operasi per Segmen Usaha" di atas, Pendapatan Perusahaan dibentuk dari 3 (tiga) segmen usaha, yaitu Konstruksi, *Ready Mix*, dan Penyewaan Alat Berat.

Di tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp3,40 triliun, mengalami penurunan 6,45% atau setara dengan Rp234,33 miliar dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp3,63 triliun. Penurunan ini disebabkan mundurnya perolehan kontrak baru dari target yang ditentukan, sehingga Perusahaan belum dapat mencatatkan pendapatan secara maksimal.

Revenue

As stated in the "Operational Review per Business Segment" above, the Company's Revenue consists of three business segments, namely Construction, Ready Mix, and Heavy Equipment Rental.

In 2023, the Company succeeded in recording a revenue of Rp3.40 trillion, a 6.45% decrease or equivalent to Rp234.33 compared to the 2022 revenue of Rp3.63 trillion. The decrease was due to the delay in acquiring new contracts from the specified target; thus, the Company was not able to record maximum revenues.

Beban Pokok Pendapatan

Sejalan dengan Pendapatan Perusahaan, Beban Pokok Pendapatan juga dibentuk dari 3 (tiga) segmen usaha yang dimiliki.

Beban pokok pendapatan tahun 2023 tercatat sebesar Rp2,81 triliun, mengalami penurunan 7,13% atau setara dengan Rp215,51 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3,02 triliun. Lebih tingginya penurunan pada beban pokok pendapatan dibandingkan penurunan pendapatan mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam menerapkan efisiensi pada proses produksinya.

Cost of Revenue

In line with the Company's Revenue, the Cost of Revenue also comprises the three business segments it owns.

The 2023 cost of revenue was recorded at Rp2.81 trillion, a 7.13% decrease or equivalent to Rp215.51 billion compared to the 2022 amount of Rp3.02 trillion. The higher decrease in the cost of revenue compared to the decrease in revenue reflects the Company's success in implementing efficiency in its production process.

Perkembangan Pendapatan dan Beban Pokok Pendapatan 2019-2023
Progress of Revenue and the Cost of Revenue in 2019-2023

Rp-miliar | Rp-billion

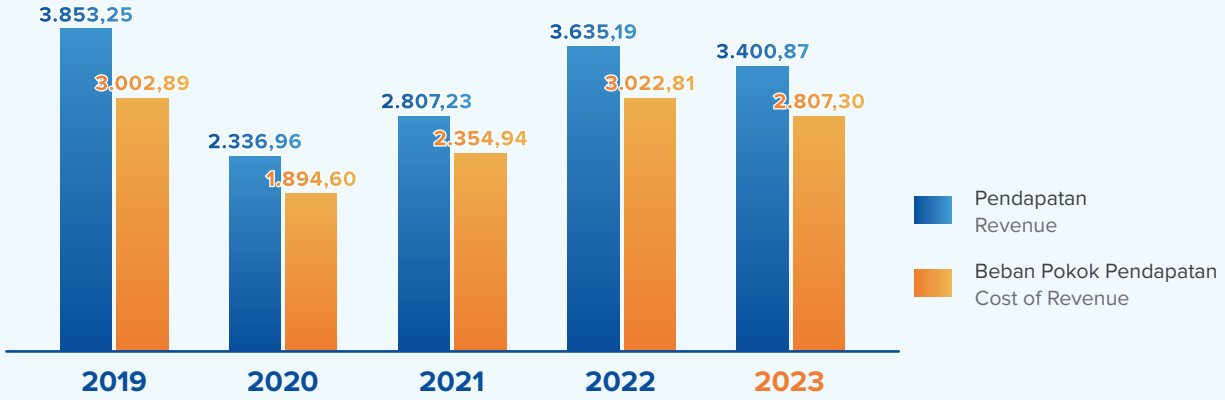

Bagian Laba Ventura Bersama

Bagian Laba Ventura Bersama merupakan keuntungan atau kerugian dari entitas ventura bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO). Per 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 5 (lima) ventura bersama yang berkontribusi terhadap profitabilitas Perusahaan.

Share in Profit of Joint Venture

The Share in Profit of Joint Venture is the profit or loss from joint venture entities in the form of a Joint Operation (KSO). On December 31, 2023, the Company has five joint ventures that contribute to the Company's profitability.

Bagian Laba Ventura Bersama dan Kontribusi Masing-masing Ventura Bersama Tahun 2022-2023
Share in Profit of Joint Venture and the Contribution of Each Joint Venture in 2022-2023

Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
LMA Konsorsium LMA Konsorsium	10,71	72,80	21,44	62,95	(10,73)	(50,07)
KSO PPRE - RPJ PPRE - RPJ KSO	-	-	3,58	10,50	(3,58)	-
KSO PP Presisi - Sarana PP Presisi - Sarana KSO	0,50	3,40	7,62	22,36	(7,12)	(93,43)
KSO PPRE - Yala Persada Indonesia PPRE - Yala Persada Indonesia KSO	1,25	8,50	0,81	2,38	0,44	54,07
KSO PP Presisi - Duta Pratama Indah PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	2,25	15,30	0,61	1,80	1,64	267,05
Jumlah Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit of Joint Venture	**14,71**	**100,00**	**34,06**	**100,00**	**(19,35)**	**(56,82)**

Di tahun 2023, Bagian Laba Ventura Bersama tercatat sebesar Rp14,71 miliar, mengalami penurunan 56,82% atau setara dengan Rp19,35 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp34,06 miliar. Penurunan ini disebabkan selesainya proyek pada proyek KSO.

In 2023, the Share in Profit of Joint Venture was recorded at Rp14.71 billion, a 56.82% decrease or equivalent to Rp19.35 billion compared to the 2022 amount of Rp34.06 billion. The decrease was due to the completion of the KSO project.

Perkembangan Bagian Laba Ventura Bersama 2019-2023
Progress of Share in Profit of Joint Venture in 2019-2023

Rp-miliar | Rp-billion

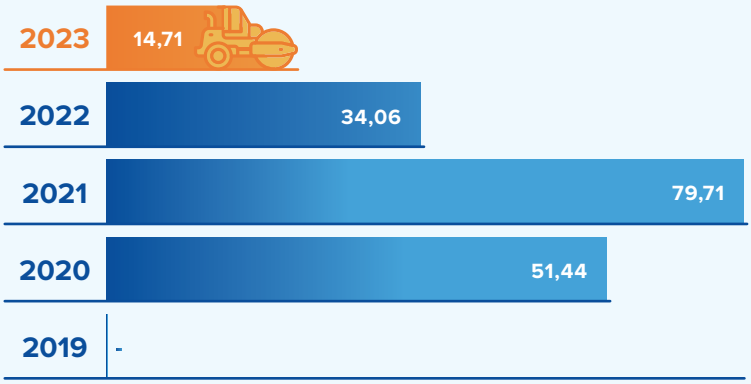

Beban Usaha
Beban usaha Perusahaan terdiri dari biaya pegawai, biaya umum, biaya penyusutan gedung, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Operating Expenses
The Company's operating expenses comprise employee expenses, other expenses, and amortization of intangible assets.

Beban Usaha Tahun 2022-2023
Operating Expenses in 2022-2023

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Beban Pegawai Employee Expenses	65,86	61,20	4,66	7,61
Beban Umum Other Expenses	17,55	20,09	(2,54)	(12,65)
Beban Penyusutan Gedung Depreciation Building	5,22	5,90	(0,68)	(11,50)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Amortization of Intangible Assets	1,60	2,06	(0,47)	(22,67)
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**90,23**	**89,26**	**0,97**	**1,08**

Di tahun 2023, beban usaha Perusahaan sebesar Rp90,23 miliar, mengalami kenaikan 1,08% atau setara dengan Rp967,55 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp89,26 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan beban pegawai.

In 2023, the Company's operating expenses were Rp90.23 billion, a 1.08% increase or equivalent to Rp967.55 million compared to the 2022 amount of Rp89.26 billion. This increase is mainly due to the increase in employee expenses.

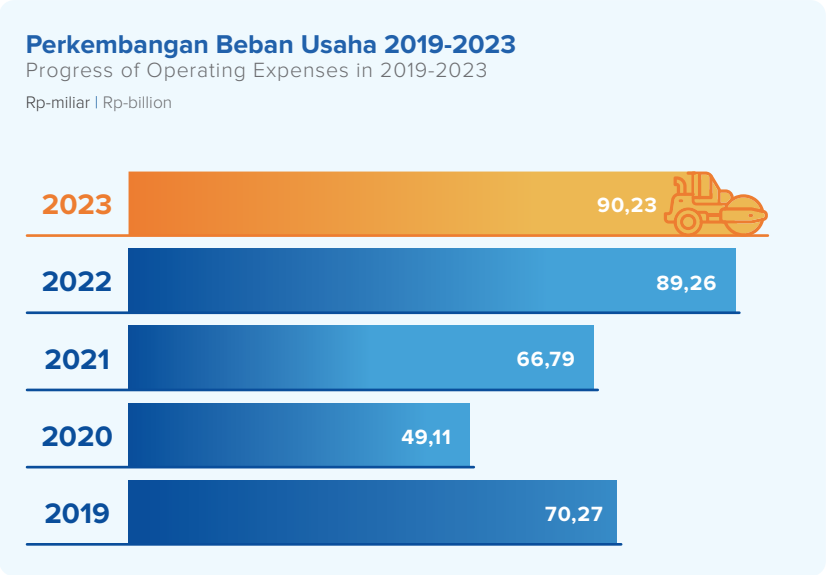

Kerugian Penurunan Nilai

Di tahun 2023, Kerugian Penurunan Nilai Perusahaan sebesar Rp18,68 miliar, mengalami kenaikan 1.528,56% atau setara dengan Rp17,53 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,15 miliar. Kenaikan ini disebabkan untuk mengurangi risiko kerugian akibat dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Impairment Losses

In 2023, the Company's Impairment Losses were Rp18.68 billion, a 1,528.56% increase or equivalent to Rp17.53 billion compared to the 2022 amount of Rp1.15 billion. The increase is due to reducing the risk of loss because of unpaid trade receivables.

Pendapatan/(Beban) Keuangan

Rincian Pendapatan dan Beban Keuangan dapat dilihat di bawah ini.

Finance Income (Costs)

Details on Finance Income and Costs are displayed below.

Pendapatan/(Beban) Keuangan Tahun 2022-2023
Finance Income (Costs) in 2022-2023

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Keuangan Finance Income				
Pendapatan Keuangan dari Sewa Finance Income from Lease	1,40	1,95	(0,55)	(28,18)
SubJumlah Pendapatan Keuangan Subtotal Finance Income	1,40	1,95	(0,55)	(28,18)
Beban Keuangan Finance Costs				
Beban Bunga dari Utang Bank Interest Expense on Bank Loans	(196,59)	(194,80)	(1,79)	0,92
Sewa Pembiayaan Finance Lease Liabilities	(33,93)	(35,53)	1,61	(4,52)
SubJumlah Beban Keuangan Subtotal Finance Costs	(230,51)	(230,33)	(0,19)	0,08
Jumlah Pendapatan/(Beban) Keuangan Total Finance Income (Costs)	**(229,11)**	**(228,37)**	**(0,74)**	**0,32**

Di tahun 2023, Pendapatan Keuangan tercatat sebesar Rp1,40 miliar, mengalami penurunan 28,18% atau setara dengan Rp550,22 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,95 miliar. Sedangkan Beban Keuangan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp230,51 miliar, mengalami kenaikan 0,08% atau setara dengan Rp187,68 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp230,33 miliar. Kenaikan beban keuangan disebabkan meningkatnya beban bunga dari utang bank.

In 2023, Finance Income was recorded at Rp1.40 billion, a 28.18% decrease or equivalent to Rp550.22 million compared to the 2022 amount of Rp1.95 billion. Meanwhile, the Finance Costs in 2023 were recorded at Rp230.51 billion, a 0.08% increase or equivalent to Rp187.68 million compared to the 2022 amount of Rp230.33 billion. The increase in financial expenses is due to the increase in interest expense on bank loans.

Pendapatan/(Beban) Lainnya
Rincian Pendapatan dan Beban Lainnya dapat dilihat di bawah ini.

Other Incomes (Expenses)
Details on Other Incomes and Expenses are displayed below.

Pendapatan/(Beban) Lainnya Tahun 2022-2023
Other Incomes (Expenses) in 2022-2023

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Lainnya Other Incomes				
Pendapatan di Luar Usaha Non-Operating Income	44,87	21,88	22,99	105,06
Pendapatan Jasa Giro - Bersih Current Account Income - Net	4,56	3,94	0,62	15,71
Bagi Hasil Murabahah Murabahah Profit Sharing	0,63	2,24	(1,61)	(71,70)
Pemulihan Kerugian Nilai Piutang Recovery of Impairment Losses	3,95	0,56	3,39	611,20
Pendapatan Bunga Deposito - Bersih Deposito Interest Income - Net	0,42	0,36	0,06	15,43
SubJumlah Pendapatan Lainnya Subtotal Other Incomes	54,43	28,98	25,45	87,83
Beban Lainnya Other Expenses				
Administrasi bank Bank Administration	(28,63)	(41,05)	12,42	(30,25)
Beban di Luar Usaha Non-Operating Expense	(17,55)	(20,26)	2,71	(13,37)
Amortisasi Emisi Obligasi Amortization of Bond Issuance	(0,33)	(0,16)	(0,16)	100,00
SubJumlah Beban Lainnya Subtotal Other Expenses	(46,51)	(61,47)	14,97	(24,34)
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lainnya Total Other Incomes (Expenses)	**7,92**	**(32,50)**	**40,42**	**124,37**

Di tahun 2023, Pendapatan Lainnya tercatat sebesar Rp54,43 miliar, mengalami kenaikan 87,83% atau setara dengan Rp25,45 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp28,98 miliar. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya pendapatan di luar usaha.

In 2023, Other Incomes were recorded at Rp54.43 billion, an 87.83% increase or equivalent to Rp25.45 billion compared to the 2022 amount of Rp28.98 billion. This increase is due to the increase in non-operating income.

Sedangkan Beban Lainnya di tahun 2023 tercatat sebesar Rp46,51 miliar, mengalami penurunan 24,34% atau setara dengan Rp14,97 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp61,47 miliar. Penurunan ini disebabkan turunnya beban administrasi bank.

Meanwhile, Other Expenses in 2023 were recorded at Rp46.51 billion, a 24.34% decrease or equivalent to Rp14.97 billion compared to the 2022 amount of Rp61.47 billion. This decrease is due to the decrease in bank administration expenses.

Beban Pajak Penghasilan
Di tahun 2023, Perusahaan mencatat Beban Pajak Penghasilan sebesar Rp9,01 miliar, mengalami penurunan 20,15% atau setara dengan Rp2,27 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp11,28 miliar. Penurunan ini tak lepas dari turunnya pendapatan Perusahaan.

Income Tax Expense
In 2023, the Company recorded an Income Tax Expense of Rp9.01 billion, a 20.15% decrease or equivalent to Rp2.27 billion compared to the 2022 amount of Rp11.28 billion. This decrease cannot be separated from the decrease in Company revenue.

Laba Bersih Tahun Berjalan
Laba Bersih Tahun Berjalan Perusahaan di tahun 2023 sebesar Rp172,78 miliar, mengalami penurunan 4,89% atau setara dengan Rp8,88 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp181,66 miliar. Turunnya pendapatan Perusahaan memberikan dampak terhadap pencapaian laba bersih Perusahaan.

Net Profit for the Year
The Company's Net Profit for the Year 2023 was Rp172.78 billion, a 4.89% decrease or equivalent to Rp8.88 billion compared to the 2022 amount of Rp181.66 billion. The decrease in Company revenue impacts the Company's net profit achievement.

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan 2019-2023
Progress of Net Profit for the Year in 2019-2023
Rp-miliar | Rp-billion

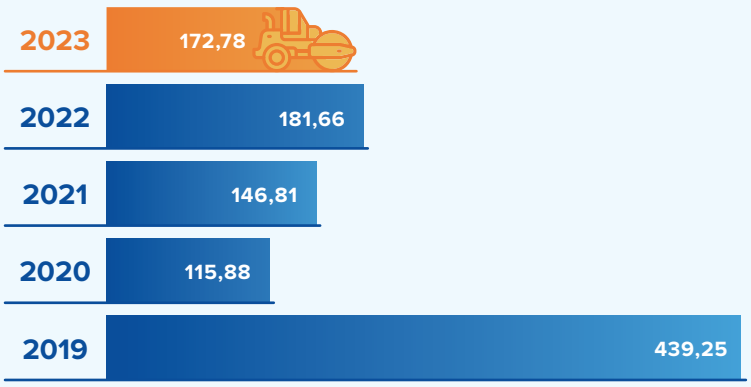

Penghasilan Komprehensif Lain
Di tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp8,17 miliar, mengalami kenaikan 8,06% atau setara dengan Rp609,21 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp7,56 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh selisih lebih nilai revaluasi aset.

Other Comprehensive Income
In 2023, the Company succeeded in recording other comprehensive income of Rp8.17 billion, an 8.06% increase or equivalent to Rp609.21 million compared to the 2022 amount of Rp7.56 billion. The increase is due to the difference in the revaluation of asset values.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Per 31 Desember 2023, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp180,95 miliar, mengalami penurunan 4,37% atau setara dengan Rp8,27 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp189,22 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya laba bersih tahun berjalan sehingga memberikan dampak terhadap penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Total Comprehensive Income for the Year
On December 31, 2023, the total comprehensive income for the year was Rp180.95 billion, a 4.37% decrease or equivalent to Rp8.27 billion compared to the 2022 amount of Rp189.22 billion. The decrease is caused by a decrease in the net profit for the year, impacting the comprehensive income for the year.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk adalah pembagian laba Bersih Tahun Berjalan untuk Perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan dari entitas anak yang terkonsolidasi. Laba ini digunakan sebagai dasar untuk pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan.

Net Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity
Net Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity is the distribution of the Net Profit for the Year for the Company proportional to the consolidated ownership of subsidiaries. The profit is used as a basis for dividend distribution for the Company's shareholders.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2023 sebesar Rp80,22 miliar, mengalami penurunan sebesar 20,38% atau setara dengan Rp20,54 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp100,75 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan perusahaan sehingga berpengaruh pada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

The Net Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity in 2023 was Rp80.22 billion, a 20.38% decrease or equivalent to Rp20.54 billion compared to the 2022 amount of Rp100.75 billion. This decrease is primarily due to the decrease in Company revenue, which affects the profit for the year attributable to owners of the parent entity.

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 2019-2023
Progress of Net Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity in 2019-2023
Rp-miliar | Rp-billion

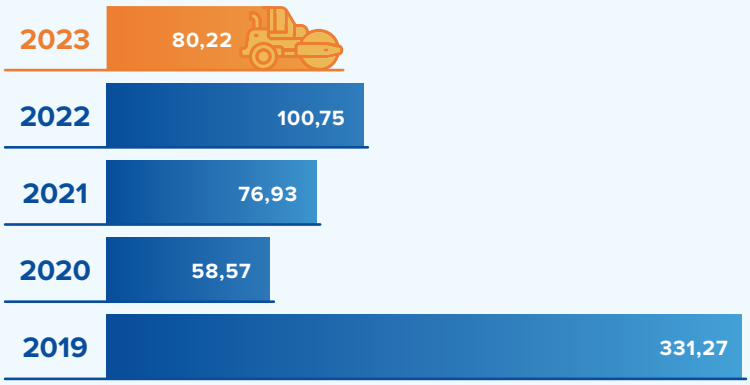

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali adalah pembagian laba Bersih Tahun Berjalan untuk pemegang saham lainnya pada entitas anak sesuai dengan porsi kepemilikan pada entitas anak yang terkonsolidasi.

Net Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interest
Net Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interest is the distribution of the Profit for the Year for other shareholders in the subsidiaries proportional to the consolidated ownership of subsidiaries.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali tahun 2023 sebesar Rp92,57 miliar, mengalami kenaikan sebesar 14,41% atau setara dengan Rp11,66 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp80,91 miliar.

The Net Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interest in 2023 was Rp92.57 billion, a 14.41% increase or equivalent to Rp11.66 billion compared to the 2022 amount of Rp80.91 billion.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah pembagian laba komprehensif Tahun Berjalan untuk perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan dari entitas anak yang terkonsolidasi.

Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity
The Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity is the distribution of the Comprehensive Income for the Year for the Company proportional to the consolidated ownership of subsidiaries.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2023 sebesar Rp85,75 miliar, mengalami penurunan sebesar 19,15% atau setara dengan Rp20,30 miliar

The Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity in 2023 was Rp85.75 billion, a 19.15% decrease or equivalent to Rp20.30 billion compared to the 2022 amount of Rp106.06 billion.

dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp106,06 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan Perusahaan sehingga berdampak terhadap penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

This decrease is mainly due to the decline in Company revenue, which affects the comprehensive income for the year attributable to owners of the parent entity.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali adalah pembagian laba komprehensif Tahun Berjalan untuk pemegang saham lainnya sesuai dengan porsi kepemilikan dari entitas anak yang terkonsolidasi.

The Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interest

The Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interest is the distribution of the Comprehensive Income for the Year for other shareholders proportional to the consolidated ownership of subsidiaries.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali tahun 2023 sebesar Rp95,20 miliar, mengalami kenaikan sebesar 14,47% atau setara dengan Rp12,03 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp83,16 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada entitas anak.

The Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interest in 2023 was Rp95.20 billion, a 14.47% increase or equivalent to Rp12.03 billion compared to the 2022 amount of Rp83.16 billion. The increase is primarily due to increased revenue in the subsidiary.

Laba Dasar per Saham

Laba Dasar per Saham dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Berikut disampaikan perhitungan Laba Dasar per Saham tahun 2023 dan 2022.

Basic Earnings per Share

Basic Earnings per Share is calculated by dividing the net profit attributable to the Company's owner by the weighted average number of shares outstanding during the year. Below is the calculation of Basic Earnings per Share in 2023 and 2022.

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp-miliar) Net Profit for the Year (Rp-billion)	172,78	181,66	(8,88)	(4,89)
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan (Rp-miliar) Net Profit Attributable to Owners of the Company (Rp-billion)	80,22	100,75	(20,54)	(20,38)
Rata-rata Tertimbang Saham Beredar (miliar lembar) Weighted Average of Shares Outstanding	10,22	10,22	-	-
Laba Dasar per Saham (Rupiah penuh) Basic Earnings per Share (full Rupiah)	**7,85**	**9,85**	**(2,00)**	**(20,30)**

Laba Dasar per Saham tahun 2023 sebesar Rp7,85 per lembar saham, turun 20,30% atau setara dengan Rp2,00 per lembar saham dibandingkan Laba Bersih per Saham Dasar tahun 2022 sebesar Rp9,85 per lembar saham.

The Basic Earnings per Share in 2023 were Rp7.85 per share, a 20.30% decrease or equivalent to Rp2.00 per share compared to the 2022 Basic Earnings per Share at Rp9.85 per share.

Perkembangan Laba Dasar per Saham 2019-2023
Progress of Basic Earnings per Share in 2019-2023

Rp | Rp

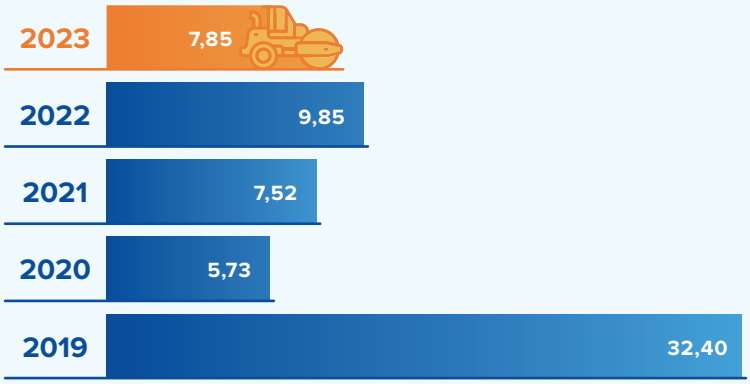

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated statement of cash flows

Arus Kas Konsolidasian Tahun 2022-2023
Consolidated Cash Flows in 2022-2023

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	67,37	311,09	(243,72)	(78,34)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	209,32	(76,35)	285,67	374,14
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(420,55)	(184,51)	(236,04)	127,93
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(143,87)	50,23	(194,09)	(386,43)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	305,61	255,39	50,23	19,67
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	161,75	305,61	(143,87)	(47,07)

Pada akhir tahun 2023, Kas dan Setara Kas Perusahaan mengalami penurunan 47,07% atau setara Rp143,87 miliar, dari Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2022 sebesar Rp305,61 miliar menjadi Rp161,75 miliar di akhir tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan, sebagaimana akan diuraikan secara rinci di bawah ini.

At the end of 2023, the Company's Cash and Cash Equivalents decreased by 47.07% or equivalent to Rp143.87 billion, from Cash and Cash Equivalents amounting to Rp305.61 billion at the end of 2022 to Rp161.75 billion at the end of 2023. This decrease is primarily due to decreased cash flows from operating and financing activities, as detailed below.

Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 2019-2023
Cash and Cash Equivalents at the End of Year 2019-2023
Rp-miliar | Rp-billion

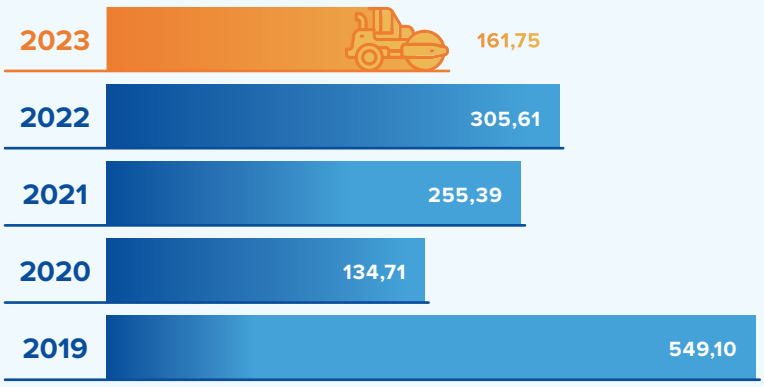

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Cash Flows from Operating Activities

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	2.980,31	3.075,81	(95,50)	(3,11)
Pembayaran kas kepada: Cash paid to:				
Pemasok dan subkontraktor Suppliers and subcontractors	(2.183,23)	(2.178,64)	(4,59)	0,21
Direksi dan karyawan Board of Directors and employees	(415,33)	(440,19)	24,85	(5,65)
Kas yang dihasilkan dari operasi Cash generated from operation	381,75	456,99	(75,24)	(16,46)
Pembayaran pajak-pajak Taxes payment	(169,98)	(75,50)	(94,47)	125,12
Restitusi pajak Tax refund	84,38	159,93	(75,55)	(47,24)
Pembayaran bunga Payment of finance cost	(228,79)	(230,33)	1,54	(0,67)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	**67,37**	**311,09**	**(243,72)**	**(78,34)**

Di tahun 2023, Perusahaan membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp67,37 miliar, mengalami penurunan 78,34% atau setara dengan Rp243,72 miliar dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp311,09 miliar. Hal ini terutama disebabkan berkurangnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran pajak-pajak, kas yang dihasilkan dari operasi, serta restitusi pajak.

In 2023, the Company recorded net cash provided by operating activities at Rp67.37 billion, a 78.34% decrease or equivalent to Rp243.72 billion compared to the net cash provided by operating activities in 2022 amounting to Rp311.09 billion. This is mainly due to decreased cash receipts from customers, tax payments, cash generated from operations, and tax refunds.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Cash Flows from Investing Activities

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Perolehan aset tetap Acquisition of property and equipment	(63,91)	(8,70)	(55,20)	634,35
Penerimaan penjualan aset tetap Proceed from sale of property and equipment	39,82	20,29	19,54	96,29
Pembelian aset tak berwujud Acquisition of intangible assets	(1,89)	(1,30)	(0,59)	45,12
Penerimaan bunga Interest received	7,01	8,49	(1,48)	(17,45)
Deposito dijaminkan Collateralized deposit	1,72	46,62	(44,90)	(96,32)
Penambahan bank yang dibatasi penggunaannya Addition restricted bank	-	(29,50)	29,50	-
Penerimaan bank yang dibatasi penggunaannya Received from restricted bank	29,50		29,50	-
Penerimaan investasi ventura bersama Proceed from joint venture investment	86,88	2,57	84,30	3.278,68
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi Proceed other receivables from related parties	110,19		110,19	-
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi Loan given to related parties	-	(114,82)	114,82	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari/Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Provided by/Used in Investing Activities	**209,32**	**(76,35)**	**285,67**	**374,14**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Perusahaan tahun 2023 mengalami kenaikan 374,14% atau setara dengan Rp285,67 miliar, dimana pada 2023 arus kas bersih Perusahaan yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp209,32 miliar, sedangkan pada tahun 2022 arus kas bersih Perusahaan yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022 sebesar Rp76,35 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penerimaan piutang lain-lain, serta berkurangnya pemberian pinjaman kepada pihak berelasi.

The Company's net cash flows from investing activities in 2023 increased by 374.14% or equivalent to Rp285.67 billion, in which in 2023, the Company's net cash provided by investing activities was Rp209.32 billion, while in 2022, the Company's net cash used in investing activities was Rp76.35 billion. This increase is mainly due to the proceeds from other receivables and a decrease in the loan given to related parties.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Cash Flows from Financing Activities

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pembayaran dividen Payment of dividend	(54,26)	(18,18)	(36,08)	198,51
Penerimaan utang bank Proceed from bank loans	2.982,71	2.737,31	245,40	8,96
Pembayaran utang bank Payment of bank loans	(3.343,59)	(2.967,49)	(376,10)	12,67
Pembayaran utang non bank Payment of non bank loans	(173,67)	(138,08)	(35,59)	25,78

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Penerbitan obligasi Bonds issuance	-	201,92	(201,92)	-
Penerimaan pinjaman pihak berelasi Proceed loan from related party	180,46	-	180,46	-
Pembayaran pinjaman pihak berelasi Payment of loan from related party	(12,20)	-	(12,20)	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	**(420,55)**	**(184,51)**	**(236,04)**	**127,93**

Di tahun 2022, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp420,55 miliar, mengalami kenaikan 127,93% atau setara dengan Rp236,04 miliar dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2022 sebesar Rp184,51 miliar. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya pembayaran utang bank.

In 2022, the net cash used in financing activities was recorded at Rp420.55 billion, a 127.93% increase or equivalent to Rp236.04 billion from the net cash used in financing activities in 2022 amounting to Rp184.51 billion. This increase is due to the increase in the payment of bank loans.

PROFITABILITAS: KEMAMPUAN PERUSAHAAN DALAM MENGHASILKAN LABA ATAU KEUNTUNGAN

Perusahaan memiliki pengukuran atas kemampuan dalam menghasilkan laba atau keuntungan, yang tercermin dari Rasio Pertumbuhan serta Rasio Profitabilitas.

PROFITABILITY: THE COMPANY'S ABILITY TO GENERATE PROFIT

The Company has a measurement for its ability to generate profit, as shown in the Growth Ratio and the Profitability Ratios.

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Rasio Pertumbuhan Growth Ratio			
Pendapatan (%) Revenue (%)	(6,44)	29,49	(35,94)
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios			
Margin Laba Bruto (%) Gross Margin (%)	17,45	16,85	0,06
Margin Laba Usaha (%) Operating Margin (%)	15,23	15,33	(0,09)
Margin Laba Bersih (%) Net Margin (%)	2,36	2,77	(0,41)
Margin EBITDA (%) EBITDA Margin (%)	30,00	29,37	0,63
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) Return on Asset Ratio (%)	1,12	1,33	(0,21)
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas (%) Return on Equity Ratio (%)	2,42	3,20	3,20
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga (kali) EBITDA to Interest Coverage Ratio (times)	4,43	4,63	(0,21)
Rasio Utang terhadap EBITDA (kali) Debt to EBITDA Ratio (times)	1,94	2,23	0,29

Keterangan: Perhitungan laba bersih menggunakan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.
Note: The net profit calculation used the net profit attributable to owners of the Parent Entity.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

ABILITY TO PAY DEBTS

The Company's ability to pay debts is measured through the solvency ratio and liquidity ratio. The solvency ratio is the ratio that measures the Company's ability to pay all its debts, short-term and long-term. Meanwhile, the liquidity ratio is the ratio that measures the Company's ability to pay short-term debts.

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar (kali) Current Ratio (times)	1,54	1,29	0,24
Rasio Kas (kali) Cash Ratio (times)	0,05	0,09	(0,04)
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio			
Rasio Kewajiban Berbunga terhadap Jumlah Ekuitas (kali) Interest-bearing Debt-to-Equity Ratio (times)	0,60	0,76	(0,16)
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (kali) Total Liabilities Debt-to-Asset Ratio (times)	0,54	0,58	(0,16)
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (kali) Total Liabilities Debt-to-Equity Ratio (times)	1,16	1,41	(0,25)

Rasio Likuiditas

Pada tahun 2023, rasio lancar Perusahaan sebesar 1,54 kali, meningkat 0,24 kali dibandingkan dengan rasio lancar tahun 2022 sebesar 1,29 kali. Sementara rasio kas Perusahaan sebesar 0,05 kali, menurun 0,04 kali dibandingkan dengan rasio kas tahun sebelumnya sebesar 0,09 kali. Peningkatan kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

Liquidity Ratio

In 2023, the Company's current ratio was 1.54 times a increase 0.24 times from the 2022 current ratio at 1.29 times. Meanwhile, the Company's cash ratio was 0.05 times, a decrease 0.04 times from the previous year's cash ratio at 0.09 times. The Company's improved ability to pay short-term debts.

Rasio Solvabilitas

Pada tahun 2023, rasio kewajiban berbunga terhadap ekuitas sebesar 0,60 kali, menurun 0,16 kali dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,76 kali. Sedangkan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas sebesar 1,16 kali, menurun 0,25 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,41 kali. Sementara, rasio liabilitas terhadap jumlah aset sebesar 0,54 kali, mengalami penurunan 0,04 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,58 kali. Pencapaian rasio solvabilitas tersebut menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam membayar seluruh utang jangka pendek maupun jangka panjang.

Solvency Ratio

In 2023, the interest-bearing debt-to-equity ratio was 0.60 times, a decrease 0.16 times from the 2022 ratio at 0.76 times. Meanwhile, the debt-to-equity ratio was 1.16 times, a decrease 0.25 times from the previous year's ratio at 1.41 times. Moreover, the debt-to-asset ratio was 0.54 times, a decrease 0.04 times from the previous year's ratio at 0.58 times. The Achieving these solvency ratios illustrates the Company's ability to pay off all short-term and long-term debts.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung Rasio Perputaran Piutang dan Jangka Waktu Penagihan Rata-Rata. Semakin kecil Rasio Perputaran Piutang dan Jangka Waktu Penagihan Rata-Rata menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

The Company's ability to collect receivables can be determined by calculating the Receivables Turnover Ratio and the Average Billing Period. The less the Receivables Turnover Ratio and the Average Billing Period are, the faster the Company can collect receivables.

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Rasio Perputaran Piutang (kali) Receivables Turnover Ratio (times)	0,84	1,03	(0,19)
Jangka Waktu Penagihan Rata-Rata (hari) Average Billing Period (days)	433	355	78,29

Pada tahun 2023, rasio perputaran piutang Perusahaan sebesar 0,83 kali, menurun 0,19 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,03 kali. Sementara, jangka waktu penagihan rata-rata selama 433 hari, lebih cepat 78,29 hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana jangka waktu penagihan rata-rata selama 355 hari. Hal ini memberikan gambaran kolektibilitas pencairan piutang menjadi lebih baik karena PPRE mendapat kontrak *mining* dengan umur piutang lebih cepat.

In 2023, the Company's receivables turnover ratio was 0.83 times, an decrease 0.19 times from the previous year's ratio at 1.03 times. Meanwhile, the average billing period was 433 days, 78.29 days faster than the previous year's, in which the average billing period was 355 days. This provides better collectibility of receivables disbursement picture because PPRE received a mining contract with a faster maturity of receivables.

Untuk dapat menggambarkan piutang usaha jangka pendek dan jangka panjang, berikut disampaikan piutang usaha berdasarkan umur piutang.

To depict the short-term and long-term trade receivables, below are the trade receivables based on the aging of receivables.

Piutang Usaha Berdasarkan Umur Piutang
Trade Receivables based on Aging of Receivables

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
> 1 s.d 12 bulan > 1 to 12 months	1.514,42	793,14	721,27	90,94
> 12 s.d 15 bulan > 12 to 15 months	16,83	26,57	(9,74)	(36,65)
> 15 s.d 18 bulan > 15 to 18 months	9,76	12,47	(2,71)	(21,73)
> 18 s.d 21 bulan > 18 to 21 months	4,62	7,06	(2,44)	(34,51)
> 21 s.d 24 bulan > 21 to 24 months	51,06	4,33	46,73	1.078,96
> 24 s.d 27 bulan > 24 to 27 months	10,89	53,56	(42,67)	(79,66)
> 27 s.d 30 bulan > 27 to 30 months	0,74	1,40	(0,65)	(46,77)

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	2022 (Rp-miliar) (Rp-billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
> 30 s.d 33 bulan > 30 to 33 months	0,25	0,24	0,01	2,65
> 33 s.d 36 bulan > 33 to 36 months	0,12	4,50	(4,38)	(97,24)
> 36 bulan > 36 months	34,72	33,45	1,26	3,78
Sub Jumlah Subtotal	1.643,42	936,73	706,69	75,44
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai Less: allowance for impairment losses	(136,79)	(127,82)	(8,97)	7,02
Jumlah Piutang Usaha - Bersih Total Trade Receivables - Net	**1.506,63**	**808,91**	**697,72**	**86,25**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

The Management believes that the allowance for impairment losses of receiveables is sufficient to cover possible losses from uncollectible trade receivables in the future.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

KEBIJAKAN DAN DASAR PEMILIHAN STRUKTUR MODAL

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha, Perusahaan mengelola permodalannya dengan memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur modal secara aktif dan berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi pengeluaran barang modal, dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

POLICY AND BASIS FOR DETERMINING CAPITAL STRUCTURE

To maintain business continuity, the Company manages its capital by providing returns to shareholders and providing benefits to other stakeholders as well as sustaining an optimal capital structure to reduce capital costs.

The Company actively and periodically reviews and manages its capital structure by considering future capital requirements and capital efficiency, current and future profitability, operating cash flow projections, capital expenditures projections, and projections of strategic investment opportunities.

STRUKTUR MODAL

Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing* atau rasio utang berbunga bersih terhadap ekuitas dengan perhitungan yang ditunjukkan sebagai berikut.

CAPITAL STRUCTURE

The company monitors its capital based on the net gearing ratio or the interest-bearing debt-to-equity ratio with the following calculation.

Struktur Modal Tahun 2022-2023
Capital Structure in 2022-2023

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp-billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pinjaman Berbunga Interest-Bearing Loans						
Jumlah Pinjaman Berbunga Total Interest-Bearing Loans	1.875,41	37,29	2.273,08	44,67	(397,67)	(17,49)
Dikurangi: Less:						
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	(161,75)	(3,22)	(335,12)	(6,59)	173,37	(51,73)
Jumlah Pinjaman Berbunga - Bersih Total Interest-Bearing Debt - Net	**1.713,67**	**34,08**	**1.937,97**	**38,09**	**(224,30)**	**(11,57)**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**3.315,09**	**65,92**	**3.150,33**	**61,91**	**164,77**	**5,23**
Jumlah Struktur Modal Total Capital Structure	**5.028,76**	**100,00**	**5.088,29**	**100,00**	**(59,54)**	**(1,17)**
Rasio Utang Berbunga - Bersih terhadap Ekuitas (%) Interest-Bearing Debt-to-Equity Ratio (%)	**51,70**		**61,52**		**(9,82)**	

Komposisi Struktur Modal Perusahaan Tahun 2022-2023
The Company's Capital Structure Composition in 2022-2023

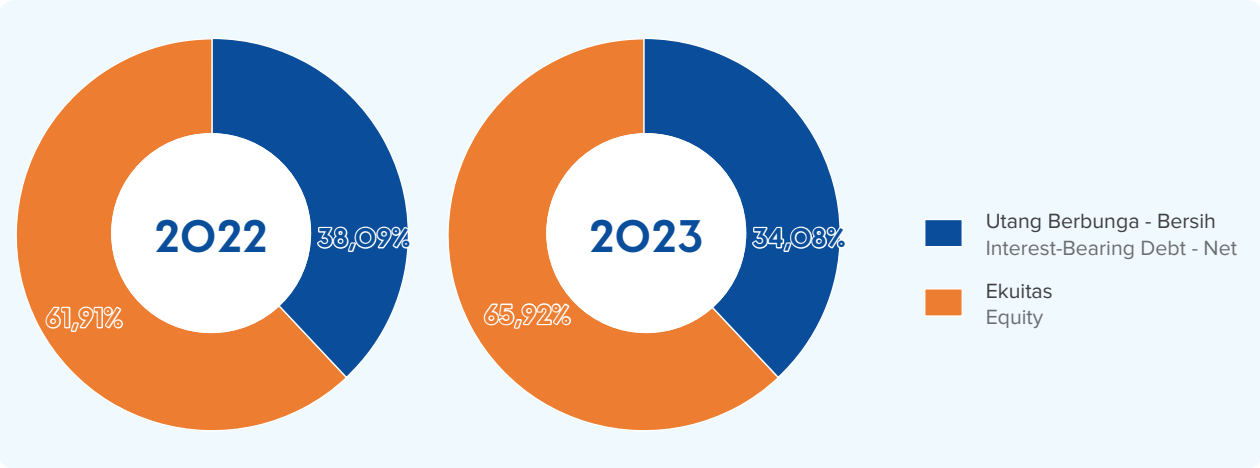

KEBIJAKAN DAN DASAR PENENTU KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL SERTA MANAJEMEN RISIKO PERMODALAN

Perusahaan mengelola modalnya untuk memastikan dapat mempertahankan kelangsungan usaha di samping memaksimalkan optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri jumlah pinjaman dikurangi kas dan setara kas, liabilitas - bersih dan jumlah ekuitas Manajemen secara berkala melakukan kajian atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari kajian tersebut, Manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

POLICY AND BASIS FOR DETERMINING CAPITAL STRUCTURE POLICY AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

The Company manages its capital to ensure it can maintain business continuity while maximizing the optimization of liability and equity balances.

The Company's capital structure consists of total loans minus cash and cash equivalents, net liabilities and total equity. Management periodically reviews the Company's capital structure. As part of the review, Management considered the cost of capital and associated risks.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitment for Capital Goods Investment

Di tahun 2023 Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang bukan dalam bentuk pendanaan.

In 2023, the Company does not have any material commitment to capital goods investment that is not in the form of funding.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Realization of Capital Goods Investment

Perusahaan melakukan investasi barang modal bertujuan untuk mencukupi kebutuhan alat berat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pengerjaan proyek-proyek yang dijalankan oleh Perusahaan. Adapun informasi investasi barang modal yang dijalankan Perusahaan di tahun 2023, adalah sebagai berikut:

The Company makes investments in capital goods to meet the need for heavy equipment to complete the projects that the Company runs. The information on the Company's investment in capital goods in 2023 is as follows:

Jenis Investasi Type of Investment	**Tujuan Investasi** Purpose of Investment	**Nilai** (Rp-miliar) Value (Rp-billion)
Investasi alat persewaan Investment in rental equipment	Operasional Operations	4,51
Alat sub pekerjaan sipil Sub-civil construction tools	Proyek Pekerjaan Sipil Civil Construction Projects	81,89
Investasi alat *mining* Investment in mining tools	Proyek *Mining* Mining Projects	327,62
Jumlah Total		**414,02**

Jumlah investasi barang modal tahun 2023 sebesar Rp414,02 miliar, mengalami kenaikan 22,66% atau setara dengan Rp76,49 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp337,53 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan kebutuhan alat berat pada perolehan proyek-proyek baru PPRE.

The 2023 capital goods investment was Rp414.02 billion, a 22.66% increase or equivalent to Rp76.49 billion compared to the 2022 amount of Rp337.53 billion. The increase is mainly due to the need for heavy equipment for PPRE's newly acquired projects.

	2023 **(Rp-miliar)** (Rp-billion)	**2022** **(Rp-miliar)** (Rp-billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal **(Rp-miliar)** Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	414,02	337,53	76,49	22,66

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Information and Material Facts Subsequent to the Date of Accountant Report

PP Presisi tidak melakukan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, tidak terdapat mitigasi dampak nilai tukar mata uang asing yang dilakukan Perusahaan.

PP Presisi does not make transactions in foreign currencies. Therefore, the Company takes no mitigation measures for the impact of the foreign exchange rate.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERUSAHAAN SERTA LABA OPERASI PERUSAHAAN, DAN INFORMASI PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Impact of Price Changes on Sales or Net Revenue and Profit of the Company, and the Information on Material Increase or Decrease from Sales or Net Revenue

Pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat informasi perihal peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan. Dengan demikian, pada Laporan Tahunan ini, tidak terdapat informasi terkait peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan, serta sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.

In the Consolidated Financial Statements of the Company for the years ended on December 31, 2023, and December 31, 2022, there is no information regarding material increases or decreases in sales or net income of the Company. Therefore, in this Annual Report, there is no information related to material increases or decreases in sales or net income of the Company, as well as the extent to which such changes can be attributed, among other things, to the number of goods or services sold, and/or the existence of new products or services.

Baik di tahun 2023 maupun di tahun 2022, tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan serta laba operasi Perusahaan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan serta laba operasi Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Both in 2023 and 2022, there were no impacts of price changes on the sales or net income of the Company, as well as the operating profit of the Company. Thus, there is no information regarding the impact of price changes on the sales or net income of the Company, as well as the operating profit of the Company for the past two years.

INFORMASI TENTANG DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Information on the Impact of Exchange Rates against Foreign Currency

Dalam kegiatan operasi dan bisnisnya, PPRE tidak memiliki transaksi dalam bentuk mata uang asing. PPRE tidak menerapkan kebijakan lindung nilai dalam transaksi dengan menggunakan mata uang asing.

In its operations and business activities, PPRE does not have transactions in foreign currency. PPRE does not implement a hedging policy in transactions using foreign currencies.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023

Target Achievement in 2023

Pencapaian Target Tahun 2023
Target Achievement in 2023

	Realisasi 2023 2023 Realization	**Target 2023** 2023 Target	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2023 (%)** Realization Against 2023 Target
Pemasaran Marketing			
Kontrak Baru (Rp-miliar) New Contract (Rp-billion)	6.751,63	7.643,60	88,33
Keuangan Finance			
Pendapatan (Rp-miliar) Revenue (Rp-billion)	3.400,88	5.795,44	58,68
Laba Kotor (Rp-miliar) Gross Profit (Rp-billion)	593,58	777,48	76,35
Laba Sebelum Pajak Penghasilan (Rp-miliar) Profit before Income Tax (Rp-billion)	181,79	387,12	46,96
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp-miliar) Net Profit for the Year (Rp-billion)	172,78	223,49	77,31
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: Net Profit for the Year Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk (Rp-miliar) Owners of the Parent Entity (Rp-billion)	80,22	132,10	60,73
Kepentingan Non-Pengendali (Rp-miliar) Non-Controlling Interest (Rp-billion)	92,57	91,39	101,29
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (Rp-miliar) Total Comprehensive Income for the Year (Rp-billion)	180,95	223,49	80,97
Jumlah Aset (Rp-miliar) Total Assets (Rp-billion)	7.164,99	7.998,28	89,58
Jumlah Liabilitas (Rp-miliar) Total Liabilities (Rp-billion)	3.849,90	4.654,56	82,71
Jumlah Ekuitas (Rp-miliar) Total Equity (Rp-billion)	3.315,09	3.343,72	99,14

	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2023 (%) Realization Against 2023 Target
Struktur Modal Capital Structure			
Pinjaman Berbunga-Bersih (Rp-miliar) Net Interest-Bearing Loans (Rp-billion)	1.713,67	2.187,21	70,76
Rasio Utang Berbunga - Bersih terhadap Modal (%) Interest-Bearing Debt - Net to Assets Ratio (%)	51,70	53,20	2,90
Pengelolaan SDM HC Management			
Jumlah Karyawan (orang) Total Employees (personnel)	285	326	87,42

Pemasaran

PPRE berhasil meraih kontrak baru sebesar Rp6,75 triliun atau mencapai 88,33% dari target tahun 2023. Salah satu tantangan atas capaian kontrak baru di 2023 adalah mundurnya beberapa target perolehan kontrak baru pada kuartal 1 menjadi kuartal akhir 2023. PPRE berhasil meraih kontrak baru *mining development* & *mining operation* senilai Rp2,8 triliun. *Hauling road maintenance tofu* Rp428,9 miliar, *mining development* vale senilai Rp954,7 miliar, bandara VVIP IKN senilai Rp124,6 miliar.

Marketing

PPRE acquired Rp6.75 trillion of new contracts, or 88.33% of the 2023 target. One of the challenges in acquiring new contracts in 2023 was the postponement of several targets for new contract acquisitions in the first quarter to the final quarter of 2023. PPRE succeeded in obtaining new contracts for mining development & mining operations worth Rp2.8 trillion, tofu hauling road maintenance worth Rp428.9 billion, vale mining development worth Rp954.7 billion, and VVIP IKN airport worth Rp124.6 billion.

Pendapatan dan Profitabilitas

Pada Pendapatan, PPRE membukukan realisasi pendapatan sebesar Rp3,4 triliun atau mencapai 58,68% dari target 2023. Kontribusi terbesar atas pendapatan usaha PPRE tahun 2023 berasal dari segmen jasa pertambangan dan konstruksi dengan total Rp2,8 triliun, selain itu lini bisnis *ready mix* dan persewaan alat berat memberikan kontribusi terhadap pendapatan 2023 sebesar Rp600 miliar.

Pada laba bersih, Perusahaan membukukan Rp172,78 miliar atau mencapai 77,31% dari target tahun 2023. *Exposure* utama pada laba bersih adalah karena pencapaian perolehan kontrak baru yang mundur dari target yang telah di tentukan sehingga mempengaruhi pendapatan dan laba bersih secara keseluruhan.

Revenue and Profitability

In Revenue, PPRE recorded realized revenue of Rp3.4 trillion or 58.68% of the 2023 target. The most significant contribution to PPRE's 2023 revenue came from the mining and construction services segment, with a total of Rp2.8 trillion. Moreover, the ready mix and heavy equipment rental business lines contribute Rp600 billion of 2023 revenue.

The Company recorded Rp172.78 billion net profit or 77.31% of the 2023 target. The main exposure to net profit was due to the achievement of new contract acquisitions, which was behind the predetermined target, thus affecting overall revenue and net profit.

Struktur Modal

Struktur modal Grup terdiri dari utang termasuk utang bank dan liabilitas sewa pembiayaan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, kas dan setara kas dan modal tersedia bagi para pemegang saham dari Grup, modal saham dan laba ditahan, dimana rasio hutang terhadap modal 51,7% atau lebih rendah disbanding dengan tahun 2022 sebesar 61,5%.

Capital Structure

The Group's capital structure consists of debt, including bank loans and finance lease liabilities disclosed in the consolidated financial statements notes, cash and cash equivalents, and capital available to the Group's shareholders share capital and retained earnings, where the debt to capital ratio is 51.7 % or lower compared to 2022 of 61.5%.

Sumber Daya Manusia

PPRE memiliki karyawan dengan budaya kerja unggul yang merupakan aset paling berharga dalam mencapai visi Menjadi Perusahaan pada akhir tahun 2023, PPRE memiliki 285 karyawan. mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 295 hal itu menyelaraskan pada penyesuaian efisiensi dan strategi Perusahaan. Adapun beberapa program pencapaian target yang menjadi highlight Divisi HCM, antara lain:

a. Internalisasi Budaya;
b. Pemenuhan Sertifikasi Tenaga Ahli & Pengelola Risiko;
c. *Human Capital Readiness.*

Human Resources

PPRE has employees with a superior work culture, which is the most valuable asset in achieving the vision by the end of 2023. PPRE has 285 employees, which decreased by 295 in 2023. This is in line with adjustments to the Company's efficiency and strategy. Several target achievement programs highlighted by the HCM Division include:

a. Cultural Internalization;
b. Fulfillment of Expert & Risk Manager Certification;
c. Human Capital Readiness.

PROSPEK USAHA TAHUN MENDATANG SERTA RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

Business Outlook for the Upcoming Year and the Company's Strategic Plan and Performance Projection for 2024

PROSPEK USAHA TAHUN 2O24

Melalui dokumen WEO yang dirilis IMF pada April 2024, perekonomian global tahun 2024 diprediksi hanya tumbuh 3,2%, tumbuh melandai dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 mencanangkan pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 5,2%, yang terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah seiring dengan gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Transisi pemerintahan diharapkan akan memberikan gairah tersendiri bagi industri dan pelaku usaha.

Dalam RAPBN 2024, anggaran infrastruktur nasional mencapai Rp422,7 triliun dengan kenaikan sebesar 5,8% dari tahun 2023, merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir ini. Anggaran Infrastruktur ini diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. Berdasarkan Nota Keuangan tahun 2024, anggaran infrastruktur direncanakan akan didistribusikan sebesar Rp213,7 triliun kepada kementerian dan lembaga negara yang akan digunakan untuk pembangunan jalan di daerah, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), renovasi stadion, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Lalu dalam Nota Keuangan tahun 2024 juga disebutkan mengenai peluang infrastruktur pada sektor

THE 2O24 BUSINESS OUTLOOK

Through the World Economic Outlook (WEO) document released by the IMF in April 2024, global economic growth for 2024 is predicted to be only 3.2%, a minor growth compared to the economic growth in 2023. On the other hand, the Government of Indonesia, in the State Revenue and Expenditure Budget Draft (RAPBN) for 2024, aims for national economic growth of 5.2%, primarily driven by increased household consumption and government spending in line with the General Election (Pemilu) and Regional Election (Pilkada). The transition of the government is expected to provide exceptional momentum for the industry and business players.

In the 2024 RAPBN, the national infrastructure budget reaches Rp422.7 trillion, a 5.8% increase from the 2023 budget, the highest in the last five years. This infrastructure budget is directed towards basic service provision, improving connectivity, and supporting economic recovery. According to the 2024 Financial Note, the infrastructure budget is planned to be distributed amounting to Rp213.7 trillion to ministries and state institutions for road construction in regions, development of the Nusantara Capital City (IKN), stadium renovations, as well as education and health infrastructure development. Furthermore, the 2024 Financial Note also mentions opportunities in the New and Renewable Energy (EBT) sector infrastructure. In line with the national energy policy

Energi Baru Terbarukan (EBT). Sejalan dengan kebijakan energi nasional yaitu tercapainya target bauran energi nasional, pengembangan EBT secara masif diharapkan dapat menarik minat penanam modal/investasi yang dapat menggerakkan sektor perekonomian Indonesia.

of achieving the national energy mix target, massive EBT development is expected to attract investor interest that can drive Indonesia's economic sector.

Selain itu, di tahun 2024 prospek industri pertambangan masih akan menunjukkan tren positif. Terutama dengan canangan Pemerintah Indonesia akan hilirisasi hasil tambang yang dapat mendorong nilai tambah dalam rantai nilai pertambangan nasional. Hal ini tentu akan menjadi aspek potensial yang akan memberikan kesempatan bagi PP Presisi untuk dapat terus menumbuhkembangkan layanan jasa konstruksi di sektor pertambangan.

Moreover, in 2024, the prospects for the mining industry are still expected to show positive trends, especially with the Indonesian Government's plan for downstreaming mining products, which can stimulate added value in the national mining value chain. This will undoubtedly be a potential aspect that will provide opportunities for PP Presisi to continue to develop construction services in the mining sector.

RENCANA KERJA DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

THE COMPANY'S WORK PLAN AND PERFORMANCE PROJECTION FOR 2024

Strategi dan Rencana Kerja Tahun 2024

Strategies and Work Plan for 2024

Menyikapi potensi dan tantangan sebagaimana tergambar dalam prospek usaha tahun 2024 di atas, Perusahaan telah menyusun strategi korporat dengan melakukan percepatan pemulihan operasional dan bisnis guna meningkatkan profitabilitas yang akan berfokus pada 2 (dua) lini bisnis utama, yakni *Mining Services* dan *Civil Work*.

In response to the potential and challenges outlined in the 2024 business prospects above, the Company has formulated a corporate strategy by accelerating operational and business recovery to enhance profitability, focusing on two main lines of business, Mining Services and Civil Work.

Untuk *Mining Services*, Perusahaan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup iasa pertambangan mulai dari pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan pertambangan hingga kegiatan utama iasa perlambangan mencakup pekerjaan *Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore hauling*, hingga *Road Maintenance*. Perusahaan juga akan melakukan optimalisasi operasional bisnis pertambangan serta kinerja peralatan melalui pengembangan system tersentralisasi yaitu SIMAP, didukung dengan melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi *key* personil di lini bisnis tambang.

For Mining Services, the Company will provide integrated services throughout the scope of mining services, ranging from the construction of main infrastructure and supporting mining activities to the main mining services, including Mining Operation, Mining Infrastructure Development, Secondary Ore Hauling, and Road Maintenance. The Company will also optimize mining business operations and equipment performance by developing a centralized system called SIMAP, which will be supported by fulfilling and enhancing the competence of key personnel in the mining business line.

Pada lini bisnis *Civil Work*, Perusahaan akan berupaya meningkatkan kinerja, kapabilitas operasional dan juga *project management* serta berupaya dalam melakukan percepatan peningkatan pengelolaan investasi dan divestasi alat berat. Fokus Perusahaan di sektor *Civil Work* adalah untuk menyokong proyek dari PP Group sehingga untuk proyek ekstemal akan lebih diprioritaskan untuk lini bisnis *Mining*.

In the Civil Work business line, the Company will strive to improve performance, operational capabilities, and project management, and will endeavor to accelerate the improvement of heavy equipment investment and divestment management. The Company's focus in the Civil Work sector is to support projects from the PP Group, and thus, external projects will be prioritized for the Mining business line.

Adapun sasaran segmentasi pasar Perusahaan akan berfokus pada proyek PP Group untuk lini bisnis konstruksi. sedangkan unfuk proyek jasa pertambangan akan berfokus kepada pasar swasta.

For the Company's market segmentation targets, the focus will be on PP Group projects for the construction business line, while for mining service projects, the focus will be on the private market.

Proyeksi Kinerja Tahun 2024

Performance Projection for 2024

Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2024
The Company's Performance Projection in 2024

Uraian Description	**Proyeksi Tahun 2024 Dibandingkan Realisasi Tahun 2023** 2024 Projection Against 2023 Realization
Pemasaran Marketing	
Kontrak Baru New Contract	15%-18%
Kinerja Keuangan Financial Performance	
Pendapatan Revenue	70%-80%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	35%-50%
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Net Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity	70%-80%
EBITDA EBITDA	20%-30%
Struktur Modal Capital Structure	
Rasio Utang Berbunga - Bersih terhadap Modal Interest-Bearing Debt – Net to Assets	0,60%-0,84%
Dividen Dividend	
Pembayaran Dividen di Tahun 2024 atas Hasil Usaha Tahun 2023 Dividend Payment in 2024 for the 2023 Business Outcome	199%-(59%)
Pengembangan SDM HC Development	
Jumlah Karyawan Total Employees	2%-5%
Investasi SDM untuk Pelatihan dan Pendidikan HC Investment for Training and Education	>50%

PROSPEK USAHA TAHUN 2024

Optimisme Perseroan dalam mencapai proyeksi kinerja diatas di tahun 2024, Perusahaan memroyeksikan mampu meningkatkan nilai kontrak baru hingga 15-20% dan pendapatan di atas 50%. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perusahaan akan terus melanjutkan fokus pada 2 (dua) lini bisnis utamanya, jasa pertambangan dan sipil. Untuk jasa pertambangan, Perusahaan akan memberikan jasa secara terintegrasi pada seluruh lingkup jasa pertambangan, mulai dari pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan pertambangan, perbaikan infrastruktur, peningkatan infrastruktur hingga kegiatan utama jasa pertambangan mencakup pekerjaan *Mining Operation* sampai *Secondary Ore hauling*. Perusahaan juga akan melakukan optimalisasi operasional bisnis.

THE 2024 BUSINESS OUTLOOK

The Company is optimistic about achieving the above performance projections in 2024. Therefore, the Company projects to increase the value of new contracts by 15-20% and revenue by more than 50%. To achieve this target, the Company will continue to focus on its two main business lines, mining and civil services. For mining services, the Company will provide integrated services across the entire scope of mining services, from building main infrastructure and supporting mining activities, infrastructure improvements, infrastructure improvements to main mining service activities, including Mining Operation work to Secondary Ore hauling. The Company will also optimize business operations.

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Dividend Policy and Payout

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasa Perusahaan Pasal 22 tentang penggunaan laba dan pembagian dividen. Laba bersih Perusahaan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Perusahaan.

DIVIDEND POLICY

It is according to the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as Article 22 of the Company's Articles of Association regarding profit utilization and dividend distribution. The Company's net profit can be distributed to Shareholders as dividends after setting aside mandatory reserve funds required by law. Dividend distribution must be approved by the Shareholders through an Annual GMS resolution based on the Company's recommendation.

PEMBAGIAN DIVIDEN

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023, pemegang saham menyetujui atas penggunaan laba bersih Perusahaan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp100.751.654.542 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp5.037.582.727 atau 5% dari Laba Bersih digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas; dan
2. Sebesar Rp95.714.071.815 atau 95% Saldo Laba Ditahan.

Mengacu pada hasil keputusan tersebut, maka di tahun 2023 Perusahaan tidak membagikan laba atas hasil usaha tahun buku 2022.

Adapun pembagian dividen yang dilakukan Perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

DIVIDEND PAYOUT

Under the resolution of the Annual GMS for Fiscal Year 2022 held on May 24, 2023, the shareholders approve the use of the Company's net profit attributable to owners of the parent entity for the Fiscal Year that ended on December 31, 2022, amounting to Rp100,751,654,542 with the following details:

1. An amount of Rp5,037,582,727 or 5% of the Net Profit was used as a Mandatory Reserve to comply with Article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company; and
2. An amount of Rp95,714,071,815 or 95% is recorded as a Retained Earnings Balance.

Referring to the resolution, in 2023, the Company did not distribute the profit generated by its business in fiscal year 2022.

The dividend paid out by the Company in the last five years is as follows:

Tahun Pembagian Payout Year	**Tahun Dividen** Dividend Year	**Tanggal Pengumuman** Announcement Date	**Tanggal Pembayaran** Payment Date	**Dividen Kas yang Dibagikan (Rupiah)** Paid Cash Dividend (Rupiah)	**Dividen per Lembar Saham (Rp/Lembar Saham)** Dividend per Share (Rp/share)	**Rasio Pembagian Dividen (%)** Dividend Payout Ratio (%)
2023	2022	24 Mei 2023 May 24, 2023	Perusahaan tidak membagikan dividen sesuai keputusan pemegang saham yang tertuang dalam forum RUPS. The Company did not pay dividends following the resolution of the shareholders stated in the GMS forum.			
2022	2021	20 April 2022 April 20, 2022	20 Mei 2022 May 20, 2022	7.692.916.304	0,76	10,0
2021	2020	9 Juni 2021 June 9, 2021	9 Juli 2021 July 9, 2021	11.713.871.788	1,16	20,0
2020	2019	3 Juni 2020 June 3, 2020	3 Juli 2020 July 3, 2020	66.255.088.159	6,50	20,0
2019	2018	10 April 2019 April 10, 2019	10 Mei 2019 May 10, 2019	97.948.516.180	9,58	30,0

PERPAJAKAN DAN PNBP: KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Taxes and PNBP: Contribution to the State

Perusahaan berkomitmen untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara, melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Kontribusi pajak dari Perusahaan tahun 2023 mencapai Rp324,19 miliar, mengalami kenaikan 47,67% dari pembayaran pajak di tahun 2022 senilai Rp219,53 miliar. Berikut disampaikan tabel kontribusi pajak Perusahaan.

The Company is committed to contributing to the state by fulfilling its tax obligations. The Company's tax contribution in 2023 was Rp324.19 billion, a increase 47.67% from the 2022 tax payment amounting to Rp219.53 billion. The Company's tax contribution is displayed in the following table.

	2023 (Rp-miliar) (Rp-billion)	**2022 (Rp-miliar)** (Rp-billion)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-miliar) Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
PPh 23 Jasa | Income Tax 23 Services	1,56	1,41	0,16	11,11
PPh 23 Sewa | Income Tax 23 Rentals	1,14	1,03	0,11	11,11
PPh 4(2) Konstruksi | Income Tax 4(2) Constructions	3,37	3,03	0,34	11,11
PPh 4(2) Sewa Tanah | Income Tax 4(2) Land Rentals	1,14	1,02	0,11	11,11
PPh 21 | Income Tax 21	11.38	10,24	1,14	11,11
PPh 25 | Income Tax 25	4,63	4,17	0,46	11,11
PPN | VAT	300,96	198,62	102,34	51,52
Jumlah Pajak yang Dibayarkan | Total Tax Paid	324,19	219,53	104,66	47,67

Perkembangan pembayaran pajak yang dipenuhi oleh Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The progress of tax payment made by the Company throughout the last five years can be viewed in the following part.

Perkembangan Pembayaran Pajak PP Presisi Tahun 2019-2023
Progress of Tax Payment of PP Presisi in 2019-2023 (Rp-miliar)

Rp-miliar | Rp-billion

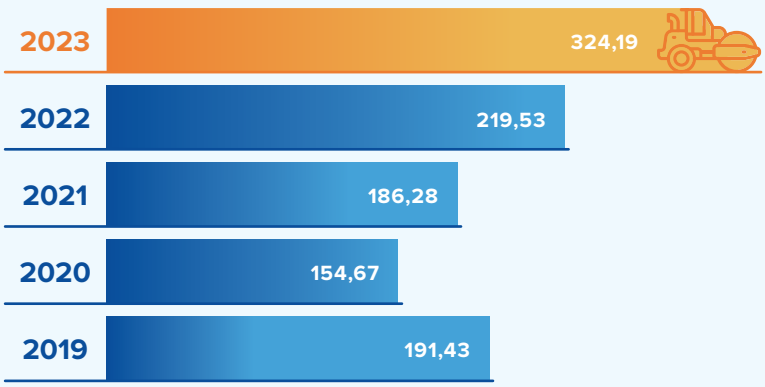

Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Perusahaan tidak memiliki kewajiban tertentu terkait setoran kepada negara berupa PNBP.

For Non-Tax State Revenue (PNBP), the Company does not have certain obligations regarding deposits to the state in the form of PNBP.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Use of Proceeds from Public Offering

INFORMASI TENTANG LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM

Pada 24 November 2022, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan dana bersih yang diperoleh sebesar Rp984,7 miliar.

Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 001/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2022. Adapun rincian realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

INFORMATION ON THE REPORT OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING OF SHARES

On November 24, 2022, the Company performed an Initial Public Offering and obtained net proceeds of Rp984.7 billion.

Report on the use of proceeds from the Company's public offering have been submitted to the Financial Services Authority through Letter No. 001/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2022. The details of the realization of proceeds from public offering as of December 31, 2022 are as follows:

No	Jenis Penawaran Umum Types of Public Offering	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Public Offering Proceeds			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus dan RUPS Plan for Use of Funds According to Prospectus and GMS		Realisasi Penggunaan Dana Realization of Use of Funds		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Funds from Public Offering
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Amount of Public Offering Proceeds	Biaya Penawaran Umum Public Offering Costs	Hasil Bersih Net Proceeds	Belanja Modal Capital Expenditures	Modal Kerja Working Capital	Belanja Modal Capital Expenditures	Modal Kerja Working Capital	
1	Penawaran Umum Saham Perdana Initial Public Offering	24 November 2017 Perdana	1.011.025.030.000	26.342.768.461	984.682.261.539	689.277.583.077	295.404.678.462	689.277.583.077	295.404.678.462	-

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Berikut disampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 per 31 Desember 2023 yang telah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Januari 2024.

REPORT OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING OF SHARES

Herein is presented the report of the use of funds from the Public Offering of Shelf-Registered Bonds I PP Presisi Phase I of 2022 on December 31, 2023, which was submitted to the Indonesia Stock Exchange (IDX) on January 15, 2024.

Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Fund Received form the Public Offering IDR

Jenis Penawaran Umum Type of public offering	Nama Emisi Name of Issuance	Tanggal Efektif Listing Date	Jumlah Hasil Penawaran Umum (satuan mata uang) Amount of Proceed from the Public Offering (in Currency)	Biaya Penawaran Umum (satuan mata uang) Cost of Public Offering (in Currency)	Hasil Realisasi Bersih (satuan mata uang) Net Realization (in Currency)	Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus (satuan mata uang) Plan for use of proceed according to the Prospectus (in Currency)	Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus (satuan mata uang) Realized Use of Fund according to the Prospectus (in Currency)	Sisa Dana (satuan mata uang) Remaining Fund (in Currency)
IPO Obligasi/ Sukuk IPO Bonds/ Sukuk	Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 Sustainable Bonds I PP Presisi Phase I 2022	30 Juni 2022 June 30, 2022	202.980.000.000	4.967.460.969	198.012.539.031	198.012.539.031	136.672.262.006	61.340.277.025

Rincian Realisasi Penawaran Umum
Details of Public Offering Realization

Jenis Penawaran Umum Type of public offering	**Kode Nama Efek** Name/Code of Securities	**Tanggal Efektif** Listing Date	**Realisasi List** Realization Plan			
			Hasil Realisasi Bersih (satuan mata uang) Net Realization (in Currency)	**Uraian** Description	**Jumlah (satuan mata uang)** Amount (in Currency)	**Persentase** Percentage
IPO Obligasi/Sukuk IPO Bonds/ Sukuk	Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 Sustainable Bonds I PP Presisi Phase I 2022	30 Juni 2022 June 30, 2022	198.012.539.031	Belanja Modal Capital Expenditure	77.268.500.297	39%
			198.012.539.031	Modal Kerja Working Capital	59.403.761.709	30%

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

INFORMASI MATERIAL MENGENAI DIVESTASI

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan divestasi 2 (dua) unit aset *Cutter Suction Dredger* (CSD) pada bulan Desember 2023 dengan nilai transaksi sebesar Rp7.350.000.000 melalui mekanisme lelang umum dan skema pembayaran bertahap (cicilan) selama 6 (enam) bulan serta Perusahaan melakukan divestasi 2 (dua) unit aset *Cement Deep Mixing* (CDM) pada bulan Desember 2023 dengan nilai transaksi sebesar Rp25.361.051.374 melalui mekanisme lelang umum dan skema pembayaran bertahap (cicilan) selama 12 bulan.

Perusahaan telah menyampaikan informasi divestasi di atas melalui keterbukaan informasi kepada OJK melalui surat No. 014/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

MATERIAL INFORMATION REGARDING DIVESTMENT

In 2023, the Company divested two units of Cutter Suction Dredger (CSD) assets in December 2023 with a transaction value of Rp7,350,000,000 through a public auction mechanism and a phased payment scheme (installments) for six months. The Company also divested two units of Cement Deep Mixing (CDM) assets in December 2023 with a transaction value of Rp25,361,051,374 through a public auction mechanism and a phased payment scheme (installments) for twelve months.

The Company has provided the above divestment information through information disclosure to the OJK via letter No. 014/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/III/2024 dated March 28, 2024.

INFORMASI LAINNYA MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Di tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan Investasi, Ekspansi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal.

OTHER INFORMATION REGARDING INVESTMENTS, EXPANSION, MERGERS/ ACQUISITIONS, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

In 2023, the Company did not undertake Investments, Expansions, Mergers/Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI

Di tahun 2023, Perusahaan melakukan transaksi bersama pihak berelasi dengan tetap memperhatikan kewajaran dari setiap transaksi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor), yang meliputi:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor;
   c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau Entitas Induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak, dan Entitas Anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau Entitas Asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah Entitas Asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam poin (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada Entitas Induk dari entitas pelapor.

POLICIES ON RELATED PARTIES

In 2022, the Company entered into transactions with related parties while still attending to the fairness of each transaction. Related parties are persons or entities related to the Company (reporting entity), which include:

1. A person or a close family member is related to a reporting entity if the person:
   a. Controls or jointly controls the reporting entity;
   b. Significantly influences the reporting entity; or
   c. Is a key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.
2. An entity is related to a reporting entity if one of the following conditions qualifies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that the Parent Entity, Subsidiary, and Sub-Subsidiary are related to other entities);
   b. An entity is an Associate Entity or a joint venture with another entity (or an Associate Entity or a joint venture that is a member of a business group the other entity is a member);
   c. Both entities are a joint venture of the same third party;
   d. An entity is a joint venture of a third entity and another entity is an Associate Entity of the third entity;
   e. The entity is a post-employment benefit plan for the work benefit from either a reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is an entity sponsoring the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
   f. Controlled or jointly controlled entity by a person as identified in point (1);
   g. The person identified in point (1) (a) significantly influences an entity or is an entity's key personnel of the management (or the parent of the entity); or
   h. The entity, or a member of a group to which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or the

NAMA PIHAK BERELASI BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN

Nama-nama pihak berelasi dan bertransaksi, beserta sifat hubungan dengan Perusahaan diungkapkan dalam tabel berikut.

Parent Entity of the reporting entity.

NAME OF RELATED PARTIES IN TRANSACTIONS AND NATURE OF RELATIONS

The name of related parties and parties in transactions as well as their nature of relations with the Company is disclosed in the following table.

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relation	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT PP (Persero) Tbk	Pemegang saham pengendali langsung Perusahaan, pemberi kerja Direct controlling shareholder of the Company, project owner	Piutang usaha, Piutang retensi, Tagihan bruto pemberi kerja, Uang muka pemberi kerja, Utang lain-lain, Pendapatan usaha Trade receivables, Retention receivables, Gross amount due from customers, Advances from project owner, Other payables, Revenue
YKKPP (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan)	Pemegang saham Shareholder	Utang lain-lain, Pendapatan usaha Other payables, Revenue
PT PP Properti Tbk	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha, Uang muka pemberi kerja, Pendapatan usaha Trade receivables, Advances from project owner, Revenue
PT PP Urban	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha, Piutang retensi, Utang usaha, Pendapatan usaha Trade receivables, Retention receivables, Trade payables, Revenue
PT PP Infrastruktur	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha, Pendapatan usaha Trade receivables, Revenue
PT PP Energi	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan usaha Revenue
PT Grahaprima Realtindo	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Tagihan bruto pemberi kerja Trade receivables, Gross amount due from customers
PT PPRO Sampurna Jaya	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Piutang retensi, Tagihan bruto pemberi kerja, Uang muka pemberi kerja Trade receivables, Retention receivables, Gross amount due from customers, Advances from project owner
PT PP Properti Suramadu	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Piutang retensi, Uang muka pemberi kerja Trade receivables, Retention receivables, Advances from project owner
PT Limasland Realty Cilegon	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Piutang retensi, Tagihan bruto pemberi kerja, Uang muka pemberi kerja Trade receivables, Retention receivables, Gross amount due from customers, Advances from project owner
PT Odira Energy Karang Agung	Entitas affiliasi Affiliated entity	Pendapatan usaha Revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Kas dan setara kas, Utang bank Cash and cash equivalents, Bank loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Kas dan setara kas, Utang bank Cash and cash equivalents, Bank loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek Cash and cash equivalents, Short-term investments
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Kas dan setara kas, Utang bank Cash and cash equivalents, Bank loans
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas affiliasi Affiliated entity	Kas dan setara kas, Utang bank Cash and cash equivalents, Bank loans
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha Trade Receivables
PT Angkasa Pura I (Persero)	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Tagihan bruto pemberi kerja, Pendapatan usaha Trade receivables, Gross amount due from customers, Revenue
PT Angkasa Pura II (Persero)	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang retensi, Tagihan bruto pemberi kerja Retention receivables, Gross amount due from customers
PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas affiliasi Affiliated entity	Utang usaha Trade payables

Pihak yang Berelasi Related Parties	**Sifat Hubungan** Nature of Relation	**Sifat Transaksi** Nature of Transaction
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas affiliasi Affiliated entity	Tagihan bruto pemberi kerja, Pendapatan usaha Gross amount due from customers, Revenue
PT Dahana (Persero)	Entitas affiliasi Affiliated entity	Utang usaha Trade payables
PT Hutama Karya Infrastruktur	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Piutang retensi Trade Receivables, Retention receivables
PP Presisi - Sarana KSO	Ventura bersama Joint venture	Piutang lain-lain, Investasi pada ventura bersama, Bagian laba ventura bersama Other receivables, Investment in joint venture, Share in profit of joint venture
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	Ventura bersama Joint venture	Piutang lain-lain, Investasi pada ventura bersama, Bagian laba ventura bersama Other receivables, Investment in joint venture, Share in profit of joint venture
KSO PPRE -RPJ	Ventura bersama Joint venture	Investasi pada ventura bersama, Bagian laba ventura bersama Investment in joint venture, Share in profit of joint venture
KSO PPRE - Yala Persada Indonesia	Ventura bersama Joint venture	Investasi pada ventura bersama, Bagian laba ventura bersama Investment in joint venture, Share in profit of joint venture
LMA Konsorsium	Ventura bersama Joint venture	Piutang usaha, Tagihan bruto pemberi kerja, Piutang lain-lain, Utang usaha, Investasi pada ventura bersama, Uang muka pemberi kerja, Pendapatan usaha, Bagian laba ventura bersama Trade receivables, Gross amount due from customers, Other receivables, Trade payables, Investment in joint venture, Advances from project owner, Revenue, Share in profit of joint venture
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang retensi, Tagihan bruto pemberi kerja, Pendapatan usaha Retention receivables, Gross amount due from customers, Revenue
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Utang usaha Trade Payables
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Utang usaha Trade Payables
PT Varia Usaha Beton	Entitas affiliasi Affiliated entity	Utang usaha Trade Payables
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Piutang retensi, Tagihan bruto pemberi kerja Trade receivables, Retention receivables, Gross amount due from customers
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Utang usaha Trade Payables
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Piutang retensi, Tagihan bruto pemberi kerja Trade receivables, Retention receivables, Gross amount due from customers
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Piutang usaha, Pendapatan usaha Trade receivables, Revenue
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas affiliasi Affiliated entity	Utang usaha Trade Payables
PT Multi Terminal Indonesia	Entitas affiliasi Affiliated entity	Utang usaha Trade Payables
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Personil manajemen kunci Key management personnel	Kompensasi dan remunerasi Compensation and remuneration
Karyawan Kunci Key Employees	Personil manajemen kunci Key management personnel	Kompensasi dan remunerasi Compensation and remuneration

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara umum. Selain itu, transaksi dengan pihak berelasi juga dilakukan karena peran strategis Perusahaan sebagai *sub contractor* dan *main contractor* yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang didukung oleh kepemilikan alat berat yang sangat dibutuhkan.

Harga jual dan harga pembelian ditentukan berdasarkan perjanjian dan memiliki syarat dan kondisi yang sama pada pihak berelasi dan ketiga.

FAIRNESS AND REASONS FOR TRANSACTIONS

Transactions with related parties are made according to generally applicable business practices. Moreover, the transactions with related parties are also made because of the Company's strategic role as a subcontractor and main contractor capable of performing construction works supported by its ownership of required heavy equipment.

The selling and purchasing prices are determined based on agreements and have the same terms and conditions for related parties and third parties.

REALISASI TRANSAKSI DAN SALDO TRANSAKSI

Realisasi transaksi dan saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan manajemen kunci, serta sifat hubungannya diungkapkan dalam tabel berikut.

TRANSACTION REALIZATION AND BALANCES

Transaction realization and balances with related parties and key management as well as their nature of relations are disclosed in the following table.

Saldo Aset dari Pihak Berelasi
Assets from Related Parties

	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Kontribusi Terhadap Aset Perusahaan (%)** Contribution to Company Assets (%)	**Jumlah (Rp-miliar)** Total (Rp-billion)	**Kontribusi Terhadap Aset Perusahaan (%)** Contribution to Company Assets (%)	**Nominal (Rp-miliar)** Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	68,15	0,95	166,25	2,19	(98,10)	(59,01)
Investasi jangka pendek Short term investments	90,00	1,26	90,00	1,19	-	-
Piutang Usaha Trade receivables	698,87	9,75	342,99	4,52	355,88	103,76
Piutang Retensi Retention receivables	157,07	2,19	129,90	1,71	27,17	20,91
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Gross amount due from customers	628,76	8,78	888,69	11,71	(259,93)	(29,25)
Piutang lain-lain Other receivables	6,69	0,09	114,82	1,51	(108,13)	(94,17)
Jumlah Aset dari Pihak Berelasi Total Assets from Related Parties	**1.649,54**	**23,02**	**1.732,66**	**22,83**	**(83,11)**	**(4,80)**
Jumlah Aset Konsolidasian Total Consolidated Assets	7.164,99		7.588,44		(423,45)	(5,58)

Saldo Liabilitas dari Pihak Berelasi
Liabilities from Related Parties

	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Kontribusi Terhadap Liabilitas Perusahaan (%)** Contribution to Company Liabilities (%)	**Jumlah (Rp-miliar)** Total (Rp-billion)	**Kontribusi Terhadap Liabilitas Perusahaan (%)** Contribution to Company Liabilities (%)	**Nominal (Rp-miliar)** Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Utang usaha Trade payables	42,84	1,11	200,83	4,53	(157,99)	(78,67)
Utang Lain-lain Other payables	395,33	10,27	262,81	5,92	132,52	50,43
Uang Muka Pemberi Kerja Advances from project owner	1,57	0,04	69,07	1,56	(67,50)	(97,73)
Utang bank jangka pendek Short-term bank loans	660,93	17,17	775,22	17,47	(114,29)	(14,74)
Utang bank jangka Panjang Long-term bank loans	55,82	1,45	183,97	4,15	(128,15)	(69,66)
Jumlah Liabilitas dari Pihak Berelasi Total Liabilities from Related Parties	**1.156,50**	**30,04**	**1.491,91**	**33,62**	**(335,41)**	**(22,48)**
Jumlah Liabilitas Konsolidasian Total Consolidated Liabilities	3.849,90		4.438,11		(588,22)	(13,25)

Transaksi dari Pihak Berelasi atas Pendapatan
Transactions of Related Parties on Revenue

	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Kontribusi Terhadap Pendapatan Perusahaan (%)** Contribution to Company Revenue (%)	**Jumlah (Rp-miliar)** Total (Rp-billion)	**Kontribusi Terhadap Pendapatan Perusahaan (%)** Contribution to Company Revenue (%)	**Nominal (Rp-miliar)** Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Pendapatan dari Pihak Berelasi Revenue from Related Parties	870,53	25,60	1.070,15	29,44	(199,62)	(18,65)
Jumlah Pendapatan Konsolidasian Total Consolidated Revenue	3.400,87		3.635,20		(234,33)	(6,45)

Transaksi dari Pihak Berelasi atas Beban Umum Administrasi
Transactions of Related Parties on Administration General Expense

	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-miliar) Total (Rp-billion)	**Kontribusi Terhadap Beban Usaha Perusahaan (%)** Contribution to Company Operating Expenses (%)	**Jumlah (Rp-miliar)** Total (Rp-billion)	**Kontribusi Terhadap Beban Usaha Perusahaan (%)** Contribution to Company Operating Expenses (%)	**Nominal (Rp-miliar)** Nominal (Rp-billion)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Komisaris Board of Commissioners	2,46	2,72	2,20	2,46	0,25	11,58
Direksi Board of Directors	7,95	8,81	6,26	7,01	1,69	27,02
Karyawan Kunci Key Employees	16,21	17,97	15,63	17,52	0,58	3,70
Jumlah Beban Usaha dari Pihak Berelasi Total Operating Expenses from Related Parties	**26,62**	**29,50**	**24,10**	**26,99**	**2,52**	**10,48**
Jumlah Beban Usaha Konsolidasian Total Consolidated Operating Expenses	90,23		89,26		0,97	1,08

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME *REVIEW* ATAS TRANSAKSI SERTA PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Perusahaan memiliki kebijakan terkait transaksi yang terdapat hubungan afiliasi yang didasarkan pada Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sedangkan untuk Transaksi Material mendasarkan pada Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, antara lain membuat Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen, membuat kajian hukum internal terkait transaksi yang dilakukan, serta Penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi Perusahaan.

Direksi menyatakan bahwa tidak terdapat transaksi berelasi yang melanggar prosedur terkait prinsip transaksi yang wajar sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Seluruh transaksi berelasi di atas merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, di mana PP Presisi telah mengungkapkannya sebagaimana penjelasan saldo dan transaksi di atas sejalan dengan informasi yang tertuang dalam Laporan Keuangan teraudit tahun buku 2023 dalam catatan No. 41.

COMPANY POLICY ON THE MECHANISM OF REVIEW ON TRANSACTIONS AND THE COMPLIANCE WITH RELEVANT PROVISIONS

The Company has policies related to transactions with affiliations based on Regulation of OJK No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Transactions with Conflict of Interest, while Material Transactions are based on Regulation of OJK No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities, including by stating a Fairness Opinion from an Independent Assessor, making an internal legal review related to the transaction carried out, and Integrity Pact Signing by the Board of Directors. The follow-up of the policies are as follows:

The Board of Directors stated that no related transactions violate procedures related to the principle of fair transactions as stipulated in Regulation of OJK No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Transactions with Conflict of Interest. All of the above-related transactions are business activities carried out to generate revenue and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously, where PP Presisi has disclosed them as an explanation of the above balances and transactions in line with the information contained in the audited Financial Statements for the 2023 fiscal year in note No. 41.

Direksi telah memastikan bahwa seluruh transaksi berelasi yang ada telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi/berelasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*). Dewan Komisaris dan Komite Audit telah menelaah dan menyetujui transaksi afiliasi/berelasi di atas, dan telah memastikan bahwa seluruh transaksi afiliasi/berelasi di atas telah melalui prosedur yang memadai, dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, dan telah memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).

Di tahun 2023 tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen.

The Board of Directors has ensured that all affiliated/related transactions have gone through adequate procedures to ensure that the affiliated/related transactions are conducted per generally accepted business practices and following the principles of fairness and reasonableness of business. The Board of Commissioners and the Audit Committee have reviewed and approved the affiliated/related transactions above and have ensured that all affiliated/related transactions have gone through adequate procedures, are conducted following generally accepted business practices, and have met the arm's length principles.

In 2023, there were no related party transactions and/or conflict of interest transactions that required independent shareholder approval.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Occurrence

Selama Tahun 2023, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi dialami atau dilakukan Perseroan.

Throughout 2023, there was no financial information containing extraordinary and rare events occurring or carried out by the Company.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Changes in Laws and Regulations and Their Impact on Company Performance

Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN BUMN Ministerial Regulation No. 01/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and BUMN Social and Environmental Responsibility Programs		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Implemented Regulations and/or Legislation	:	Mengatur pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya BUMN wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Regulate the implementation of guidance and assistance programs for entrepreneurs from economically weak groups and development of communities around BUMN that are oriented towards achieving sustainable goals that are integrated, directed and have measurable impacts. BUMN is obliged to implement BUMN social and environmental responsibility programs.
Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Direksi menyusun perencanaan Program TJSL BUMN sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan Program TJSL BUMN. BUMN is obliged to implement the BUMN TJSL Program by fulfilling the provisions stipulated in this Ministerial Regulation. the Board of Directors prepares plans for the BUMN TJSL Program as a strategy and implementation guide to ensure the effectiveness and success of the BUMN TJSL Program.

Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN BUMN Ministerial Regulation No. 02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Implemented Regulations and/or Legislation	:	Mengatur tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan BUMN dan kegiatan korporasi yang memiliki dampak signifikan bagi BUMN. Regulates the implementation of BUMN corporate governance and corporate activities that have a significant impact on BUMN.
Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	Membuat dan melakukan penyesuaian terhadap SOP BUMN yang dimiliki sesuai dengan norma waktu dan ketentuan dalam peraturan menteri BUMN dimaksud. Make adjustments to existing BUMN SOPs in accordance with time norms and provisions in the Minister of BUMN Regulation in question.

Peraturan Menteri BUMN No. 03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN BUMN Ministerial Regulation No. 03/MBU/03/2023 concerning BUMN Organs and Human Resources		
Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Implemented Regulations and/or Legislation	:	Mengatur tentang pedoman tata kelola organ dan Sumber Daya Manusia BUMN Regulates guidelines for the governance of BUMN bodies and Human Resources
Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company	:	• Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama pada anak perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan. Sehingga, jabatan Komisaris Utama yang dirangkap oleh Direksi BUMN berakhir karena hukum sejak berlakunya Peraturan Menteri tersebut. • Direksi BUMN yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya, sehingga penghasilannya menjadi pendapatan lain-lain BUMN induk (*holding*) yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN. • Melakukan penyesuaian terhadap SOP BUMN yang dimiliki sesuai dengan norma waktu dan ketentuan dalam peraturan Menteri BUMN dimaksud. • Directors of BUMN are prohibited from holding concurrent positions as President Commissioner in subsidiaries/affiliated companies of the BUMN concerned. Thus, the position of President Commissioner who was concurrently held by the BUMN Directors ended by law since the enactment of the Ministerial Regulation. • BUMN Directors who serve as members of the Board of Commissioners in a subsidiary/affiliated company of a BUMN may not receive all income as a member of the Board of Commissioners that they hold, so that their income becomes other income of the parent BUMN (holding) paid by the subsidiary/joint company/company affiliated with BUMN. • Make adjustments to existing BUMN SOPs in accordance with the time norms and provisions in the Minister of BUMN Regulation in question.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Changes in Accounting Policy and Their Impact on the Company

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan dengan operasi Perseroan dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada Laporan Keuangan Perseroan secara konsolidasian tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

1. PSAK 1 (amendemen) 2022 Penyajian Laporan Keuangan terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan Sewa terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.
2. PSAK 73 (amendemen) 2022 Sewa terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.
3. PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi.

In the current year, the Company has applied standards and several amendments/adjustments/interpretations of the Statements of the Financial Accounting Standards (PSAK) relevant to the Company's operations effective in the accounting period starting from January 1, 2023. Implementing the new/revised PSAK does not alter the Company's accounting policies or impose material impacts reported in the Company's consolidated Financial Statements for the year or the previous years, as disclosed below.

1. PSAK 1 (amendment) 2022 - The Presentation of the Financial Statements related to non-current liabilities with covenant of Leases about lease liability in sales and leaseback.
2. PSAK 73 (amendment) 2022 Leases related to lease liability in sales and leaseback.
3. PSAK 74 (amendment) Insurance Contract.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Corporate Soundness Level

PPRE memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Atas dasar landasan tersebut, Perusahaan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia atau "Pefindo" untuk melakukan penilaian atas pemeringkatan.

Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Pefindo pada tanggal 14 Maret 2024, peringkat PPRE di tahun 2023 adalah "idBBB+/*Stable* (Triple B Plus; *Stable Outlook*)" untuk periode 13 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025.

PPRE underwent a Company Soundness Level assessment following the Regulation of the Indonesian Minister of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 regarding Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. In that regard, the Company appointed PT Pemeringkat Efek Indonesia or "Pefindo" to conduct a rating assessment.

Based on the results issued by Pefindo on March 14, 2024, PPRE's rating in 2023 was "idBBB+/Stable (Triple B Plus; Stable Outlook)" for the period starting from March 13, 2024, to March 1, 2025.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Information on Business Continuity

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan memastikan bahwa tidak terdapat hal-hal apapun baik internal ataupun eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan operasional Perusahaan sepanjang tahun 2023. Hal tersebut merupakan hasil dari efektivitas pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko Perusahaan di tahun 2023.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA, DAN ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko yang mungkin dihadapi, Perusahaan telah menetapkan sistem manajemen risiko yang baik, berupa penetapan sejumlah risiko utama beserta upaya mitigasinya. Di samping itu, manajemen Perusahaan juga melakukan evaluasi dan *assessment*

MATTERS WITH THE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT BUSINESS CONTINUITY

The Company ensures that no internal or external matters significantly influenced the operational activities throughout 2023. This is a result of the effectiveness of risk management carried out by the Risk Management Unit in 2023.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS WITH THE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT BUSINESS CONTINUITY, AND ASSUMPTIONS USED BY THE MANAGEMENT IN ITS ASSESSMENT

As a part of mitigating the risks that the Company may encounter, the Company has implemented a proper risk management system by determining several main risks and their measures of mitigation. Moreover, the Company periodically evaluates and assesses matters

terkait hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan secara rutin. Evaluasi tersebut dilakukan melalui analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) yang bertujuan untuk melihat faktor internal, serta Kesempatan (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*) untuk mengidentifikasi faktor eksternal. Manajemen melakukan analisis SWOT dengan tujuan sebagai asumsi dasar kelangsungan bisnis Perusahaan dalam menghadapi dampak yang signifikan terhadap perubahan kondisi bisnis dan kondisi perekonomian. Adapun berdasarkan hasil *assessment* Manajemen, bahwa di tahun 2023 tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Hal tersebut juga terbukti dengan hasil kinerja positif yang berhasil dibukukan Perusahaan di tahun 2023, yang juga menjadi dasar optimisme Perusahaan dalam mencapai pertumbuhan kinerja selanjutnya.

that significantly affect the Company's business continuity. The evaluation implements the SWOT analysis, comprising Strengths and Weaknesses, which aims to consider internal factors, as well as Opportunities and Threats, to identify external factors. The Management conducts the SWOT analysis as the basic assumption for the Company's business continuity in facing significant impacts on the changes in business and economic conditions. Based on the results of Management's assessment, there were no matters that had a significant impact on the Company's business continuity in 2023. This is also proven by the positive performance results recorded by the Company in 2023, which is also the basis for the optimism in achieving further performance growth.

Dalam melaksanakan penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, digunakan beberapa asumsi dan pertimbangan. Asumsi dan pertimbangan yang digunakan Perusahaan, antara lain analisis SWOT, kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, permasalahan internal dan perkara hukum yang dihadapi, serta kondisi ekonomi mikro dan makro pada saat ini maupun masa yang akan datang.

In assessing the Company's capabilities in continuing its business in the future, several assumptions and considerations are used. The implemented assumptions and considerations include the SWOT analysis, financial performance, liquidity, solvency, profitability, internal issues, and litigations, as well as current and future microeconomic and macroeconomic conditions.

PETA JALAN USAHA DAN RENCANA JANGKA PANJANG

Business Roadmap and Long-Term Plans

PT PP Presisi Tbk selaku anak perusahaan dari PT PP (Persero) Tbk yang bergerak di industri konstruksi dan jasa pertambangan berbasis alat berat memiliki 5 (lima) program jangka panjang untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam 5 tahun ke depan antara lain:

1. **Optimalisasi kinerja operasional lini bisnis konstruksi**

   Optimalisasi kinerja operasional konstruksi yang berfokus pada perolehan pasar eksternal dan internal dari PP Group untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lini bisnis konstruksi PT PP Presisi Tbk ditargetkan menjadi salah satu pareto dalam perolehan pasar perusahaan dengan perolehan proyek baru yang *profitable* dan sejalan dengan kepemilikan alat berat PT PP Presisi Tbk.

As a subsidiary of PT PP (Persero) Tbk, which operates in the heavy equipment-based construction and mining services industry, PT PP Presisi Tbk has five long-term programs to increase the company's profitability in the next five years, including:

1. **Optimizing the operational performance of the construction business line**

   Optimizing the construction's operational performance, which focuses on gaining external and internal markets from PP Group to increase company profitability. PT PP Presisi Tbk's construction business line is targeted to become one of the Company's market targets by acquiring profitable new projects that are in line with PT PP Presisi Tbk's ownership of heavy equipment.

Untuk menghadirkan proyek yang *profitable* di lini bisnis konstruksi, perusahaan harus meningkatkan tata kelola *project management* dan administrasi kontrak guna menghasilkan kesepakatan kontrak yang baik dan adil untuk meningkatkan profitabilitas dari proyek yang diperoleh.

Dalam tahap operasional proyek perusahaan melakukan sentralisasi pengendalian kinerja operasi berbasis digital untuk mengendalikan biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan proyek yang berjalan sehingga proses monitoring dan evaluasi berjalan beriringan dan menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan target kinerja operasi perusahaan.

2. **Optimalisasi dan pengembangan pada lini bisnis jasa pertambangan**
   Saat ini PT PP Presisi sudah memiliki kontrak kerja jasa pertambangan yaitu jasa pertambangan komoditas nikel. Jasa pertambangan nikel sudah mulai diperoleh dari tahun 2021 dan mengalami perkembangan yang pesat secara perolehan pasar dan kinerja operasional tambang perusahaan. Dalam strategi jangka panjang perusahaan melirik untuk perolehan jasa tambang pada komoditas lain di tahun mendatang salah satunya adalah bauksit.

   Untuk meningkatkan ekspansi dalam jasa pertambangan perusahaan juga merencanakan penambahan *Engineering Capacity* dari alat berat melalui proses investasi alat berat yang selektif sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian pada perusahaan kedepannya dengan prinsip *Common Use Heavy Equipment* yaitu investasi alat berat yang dapat digunakan pada bermacam macam jenis pekerjaan sehingga apabila terjadi *market breakdown*, alat berat tersebut dapat dialihkan ke lini bisnis yang lain.

3. **Meningkatkan efektifitas *occupancy rate* alat berat**

   Meningkatkan *occupancy rate* alat berat kedepannya akan dilakukan melalalui program divestasi alat berat dan perolehan proyek baru untuk mengutilisasi alat berat yang sudah dimiliki oleh perusahaan.

   Program divestasi alat berat berfokus pada pelepasan kepemilikan aset alat berat yang sudah tidak produktif dilihat dari usia alat, kondisi pasar untuk alat tersebut, dan kemampuan teknis alat dalam menghasilkan produktivitas untuk pekerjaan operasional proyek di PT PP Presisi Tbk. Perusahaan menargetkan untuk prioritas utama program divestasi ini dari alat berat yang sudah tidak memiliki target pasar.

To present profitable projects in the construction business line, the Company must improve project management and contract administration to produce good and fair contract agreements to increase the profitability of the acquired projects.

In the project's operational phase, the Company centralizes digital-based operational performance control to control the costs, quality, and implementation time of the ongoing project so that the monitoring and evaluation process goes hand in hand and produces good results following the Company's operational performance targets.

2. **Optimization and development of the mining services business line**
   Currently, PT PP Presisi has a mining services work contract, i.e., nickel commodity mining services. Nickel mining services started to be provided in 2021 and have experienced rapid development in market acquisition and the Company's mining operational performance. In its long-term strategy, the Company is looking to obtain mining services for other commodities in the coming year, one of which is bauxite.

   To increase expansion in mining services, the Company also plans to increase the heavy equipment's Engineering Capacity through a heavy equipment investment selection process so that it does not cause future losses with the Common Use Heavy Equipment principle, i.e., investing in heavy equipment that can be used for various types of work so that the heavy equipment can be transferred to another business line if a market breakdown occurs.

3. **Increase the effectiveness of heavy equipment occupancy rates**
   In the future, increasing the heavy equipment occupancy rate will be carried out through a heavy equipment divestment program and new project acquisition to utilize heavy equipment owned by the Company.

   The heavy equipment divestment program focuses on releasing ownership of non-productive heavy equipment assets based on the equipment's age, market conditions, and technical capabilities to generate productivity for operational work at PT PP Presisi Tbk. The Company targets the divestment program as the main priority of heavy equipment that no longer has a target market.

4. **Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya di lini bisnis jasa pertambangan**
   Lini bisnis pertambangan selain padat alat juga padat *manpower* sehingga peningkatan kapabilitas personil perlu ditingkatkan guna mendukung target profitabilitas perusahaan pada lini bisnis jasa pertambangan.

   Peningkatan kompetensi pegawai di lini bisnis pertambangan akan dilaksanakan dengan 2 (dua) metode pendekatan yaitu dengan pengembangan secara internal melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian pegawai dari *level bottom – top Management* dan pelaksanaan *pro hire* untuk posisi-posisi strategis yang diperlukan oleh perusahaan.

5. **Meningkatkan kapasitas keuangan perusahaan**
   Peningkatan kapasitas keuangan perusahaan untuk kegiatan operasional baik modal kerja operasi maupun investasi yang dilakukan secara selektif untuk mendukung target perusahaan dalam mencapai profitabilitas yang baik. Peningkatan kapasitas keuangan dilaksanakan dengan meningkatkan perolehan kas bersih operasi dari lini bisnis konstruksi dan jasa pertambangan serta perolehan pendanaan jangka panjang, baik dari skema pendanaan bank maupun penerbitan umum.

4. **Increasing employee competency, particularly in the mining services business line**
   The mining business line, apart from being equipment-intensive, is also manpower-intensive. Therefore, personnel capabilities must be increased to support the Company's profitability targets.

   Increasing employee competency in the mining business line will be carried out using two approaches: internal development through training and certification of employee skills from the bottom-top management level and implementing pro-hire for strategic positions required by the Company.

5. **Increase the Company's financial capacity**
   Increasing the Company's financial capacity for operational activities, both operational working capital and investments, are carried out selectively to support the Company's targets in achieving good profitability. Increasing financial capacity is carried out by increasing net operating cash generation from the construction and mining services business lines, as well as obtaining long-term funding from bank funding schemes and general issuance.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Proyek Dermaga IKN, Kalimantan Timur
IKN Port Project, East Kalimantan

KOMITMEN DAN PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Commitment and Development of Good Corporate Governance Implementation

LANDASAN PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu kunci dalam membangun keberlanjutan usaha. Untuk itu, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta *best practice*. Berbagai kebijakan, pedoman, dan prosedur dimutakhirkan secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan operasional dan finansial untuk dapat mewujudkan pertumbuhan dan keberlangsungan usaha ke depannya.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG di Perusahaan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia:
   a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
   b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
   c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
   d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

FOUNDATION FOR THE APPLICATION AND IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is one of the keys to creating business sustainability. For this reason, the Company strives to improve the quality of GCG implementation with applicable rules, regulations, and best practices as the basis. Various policies, guidelines, and procedures are updated regularly and adjusted to the latest conditions. The Company is committed to implementing GCG principles in every operational and financial activity to realize future business growth and sustainability.

Basis for Corporate Governance Implementation

The GCG implementation in the Company refers to the following laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia:
   a. Law No. 8 of 1995 on Capital Market;
   b. Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
   c. Law No. 13 of 2003 on Manpower; and
   d. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange Regulations:
   a. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies;
   b. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies;
   c. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 the Disclosure of Information or Material Fact by Issuers or Public Companies;
   d. Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 on Amendment to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on Planning and Organizing of General Meeting of Shareholders in Public Companies;

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
j. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit;
k. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat;
l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka; dan
m. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dirilis oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

e. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Boards of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
f. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
g. Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
h. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for Work Implementation of Audit Committee;
i. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter;
j. Annex to the Decree of Chairperson of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam and LK) No. Kep-496/ BL/2008, dated November 28, 2008, on the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter;
k. Annex to the Decree of Jakarta Stock Exchange's Board of Directors No. Kep-305/BEJ/07-2004, dated July 19, 2004, on Regulation No. I-A on the Registration of Shares and Equities Securities Other than Shares issued by the listed Company;
l. Financial Services Authority Regulation No. 11/IPOJK.04/2017 on Report of Ownership or Any Changes in Public Company Shareholding; and
m. Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprise No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

3. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021 released by the National Committee for Governance Policy (KNKG).
4. The Articles of Association.

Tujuan dan Sasaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dengan penerapan prinsip GCG di atas, Perusahaan memiliki sejumlah tujuan dan sasaran sebagai berikut:

GCG Implementation Objectives and Targets

By implementing the above-mentioned GCG principles, the Company has the following targets and objectives:

Tujuan Objective	**Sasaran** Targets
a. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal, sehingga meningkatkan nilai perusahaan, serta mewujudkan kesinambungan Perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan dari pemangku kepentingan lainnya. To achieve maximum growth and returns, thereby increasing the Company value and realizing the long-term sustainability without waiving other stakeholders' interests.	Terlaksananya sistem manajemen strategi yang handal, sehingga mampu merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sejalan dengan rencana strategi Perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang. The implementation of a reliable strategy management system to formulate vision, mission, objectives, and targets in line with the Company's short-term and long-term strategic planning.
b. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. To control and direct a good relationship between Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and all stakeholders per the prevailing laws and regulations.	Adanya keterbukaan serta komunikasi dua arah, baik dengan regulator, pelaku pasar modal, dan pemangku kepentingan lainnya. Disclosure and two-way communication with regulators, capital market players, and other stakeholders.

Tujuan Objective	**Sasaran** Targets
c. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan bagi tercapainya daya saing secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. To support the Company's internal control and development activities to achieve national and international competitiveness, thereby increasing market confidence that can encourage investment flows and sustainable national economic growth.	Berfungsinya organ-organ pendukung kegiatan pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan. The functioning of the Company's internal control supporting organs and development activities.
d. Mengelola sumber daya secara lebih amanah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. To manage resources more reliably by applying the precautionary principle.	Ditegakkannya komitmen dan aturan main dari praktik penyelenggaraan bisnis yang beretika. Enforcement of commitments and rules of ethical business practices.
e. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. To increase accountability to the stakeholders.	Tersedianya sumber daya manusia yang andal, unggul, profesional, dan bebas dari benturan kepentingan. Availability of reliable, superior, professional human capital without conflicts of interest.
f. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan. To improve the Company's work culture.	Dipastikannya seluruh jajaran Perusahaan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui penghargaan dan sanksi. Ensure that all Company levels know and can carry out their duties, obligations, and responsibilities under the prevailing regulations and know the penalties and rewards.
g. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan dengan meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan. To make a value-added Company to improve the welfare of all Company personnel by increasing the stakeholders' benefits.	Ditingkatkannya kepedulian pada masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Increased awareness of the surrounding community and environmental sustainability.

Implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Adapun implementasi di lingkup Perusahaan, dijelaskan pada tabel berikut:

GCG Principles Implementation in the Company

In implementing GCG principles, the Company management and employees refer to five basic principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation within the Company's scope is explained in the following table:

Transparansi Transparency	
Penjelasan: Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai Perusahaan.	**Description:** Transparency in the decision-making process and transparency in presenting relevant information about the Company.
Implementasi: • Proses pengambilan keputusan Pemegang Saham melalui RUPS telah memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perusahaan. • Proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan telah dilaksanakan pada rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan bersama Direksi. • Proses pengambilan keputusan Direksi berfungsi untuk melakukan pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan melalui mekanisme rapat Direksi dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. • Perusahaan telah memiliki prosedur standar untuk menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, dan sasaran yang telah disampaikan pada unit kerja serta dikelola menggunakan *software* yang baik. • Laporan keuangan diunggah di situs web Perusahaan dan situs web Bursa Efek Indonesia. • Seluruh kebijakan Perusahaan telah dituangkan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui saluran komunikasi yang disediakan.	**Implementation:** • The Shareholders' decision-making process through the GMS has met the requirements in the Articles of Association. • The Board of Commissioners decision-making process has supervisory and advisory purposes to the Board of Directors and has been conducted at Board of Commissioners meetings and joint meetings with the Board of Directors. • The Board of Directors decision-making process to carry out the Company's management has been conducted through the Board of Directors meetings mechanism and joint meetings with the Board of Commissioners. • The Company has standard procedures for establishing the vision, mission, strategy, policies, and targets that have been submitted to the work unit and are managed using proper software. • Financial statements are uploaded on the Company's and Indonesia Stock Exchange's website. • All Company policies have been written down and communicated to all stakeholders through available communication channels.

Akuntabilitas Accountability	
Penjelasan: Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.	**Description:** The clarity in the organization's functions, implementation, and accountability, hence the Company's management can be performed effectively.
Implementasi: • Perusahaan telah memiliki struktur organisasi, deskripsi pekerjaan untuk masing-masing jabatan, dan penilaian *key performance indicator* untuk Direksi dan Dewan Komisaris. • Perusahaan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan telah melalui proses persetujuan dari Pemegang Saham Mayoritas dan dijelaskan secara rinci kepada seluruh unit kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas setiap tahun. • Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara transparan setiap triwulan. • Auditor eksternal telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perusahaan dengan opini auditor independen adalah wajar dalam seluruh hal yang material. • Perusahaan telah mempertanggungjawabkan dan mendapat pengesahan atas laporan tahunan pada saat RUPS. • Perusahaan telah memberikan penghargaan dan sanksi kepada karyawan yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran.	**Implementation:** • The Company has an organizational structure, job description for every job title, and assessment of key performance indicators for the Board of Directors and Board of Commissioners. • The Company has a Corporate Annual Work Plan and Budget approved by the Board of Commissioners, has gone through the approval process from Majority Shareholders and explained in detail to all working units as a reference in carrying out their duties every year. • The Company has performed its duties and responsibilities and accounted for its activities transparently every quarter. • The external auditor audited the Company's financial statements with unqualified opinion. • The Company has been held accountable for and obtained ratification of the annual report at the GMS. • The Company has given rewards to outstanding employees and penalties to those committing violations.

Tanggung Jawab Responsibility	
Penjelasan: Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	**Description:** Conformity in Company management with applicable laws and regulations as well as sound corporate principles.
Implementasi: • Perusahaan memiliki Anggaran Dasar, infrastruktur GCG, dan kebijakan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). • Perusahaan dan seluruh karyawan selalu bersikap bijaksana dan berhati-hati sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan. • Perusahaan setiap 2 tahun melakukan audit penerapan GCG oleh auditor eksternal serta *self assessment* setiap 2 (dua) tahun sekali. Hasil penilaian menunjukkan tidak terjadi peningkatan yang signifikan dan material atas temuan audit kepatuhan. • Perusahaan telah berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan Perusahaan, melalui program CSR dalam batas kewajaran dan kepatutan. • Seluruh karyawan dan manajemen telah menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan untuk tunduk kepada Kode Etik dan etika bisnis yang telah ditetapkan.	**Implementation:** • The Company has Articles of Association, GCG infrastructure, and corporate social responsibility (CSR) management policies. • The Company and all employees are always prudent and careful in behaving per risk management policies and ensure their task implementation adheres to the regulations. • The Company conducts a GCG implementation audit by external auditors every two years and a self-assessment every two years. The assessment showed no significant and material increase in the compliance audit findings. • The Company has contributed to the surrounding community through CSR programs within the limits of fairness and decency. • All employees and management have signed a Declaration of Compliance to comply with the established Code of Conduct and business ethics.

Independensi Independence	
Penjelasan: Perusahaan mengelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.	**Description:** The Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party not adhering to applicable laws and regulations as well as GCG principles.
Implementasi: • Perusahaan telah memiliki kebijakan benturan kepentingan (*conflict of interest*). • Perusahaan telah memiliki Nilai-nilai Perusahaan yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. • Organ Perusahaan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi, telah melaksanakan perannya tanpa ada intervensi dan mendominasi pihak lain. • Perusahaan telah menerapkan GCG dengan hasil penilaian yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. • Pemegang Saham telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional dan independen. • Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsi *checks and balances* melalui komunikasi formal, seperti rapat dan persetujuan/penolakan Dewan Komisaris atas usulan Direksi.	**Implementation:** • The Company has a conflict-of-interest policy. • The Company has Corporate Values (trustworthy, competent, harmonious, loyal, adaptive, and collaborative). • The Company's organs, consisting of the GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors, have carried out their role without any intervention and domination of other parties. • The Company has carried out GCG with gradually improving assessment results from year to year. • Shareholders have delegated part of their authority to the Board of Commissioners and Board of Directors to encourage professional and independent management of the Company. • The Board of Commissioners and Board of Directors have carried out the checks and balances function through formal communication, such as Board of Commissioners meetings and approval/rejection of the Board of Directors proposal.

Kewajaran Fairness	
Penjelasan: Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Implementasi:** • Perusahaan telah memiliki peraturan yang mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan. • Perusahaan telah memiliki kebijakan teknis operasional untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. • Perusahaan memberikan perlakuan yang proporsional kepada seluruh mitra kerja. • Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat melalui forum pertemuan, saluran komunikasi elektronik (situs web), dan *Whistleblowing System* (WBS).	**Description:** Fairness and equality in fulfilling the rights of every individual and other stakeholders based on agreements as well as prevailing laws and regulations. **Implementation:** • The Company has regulations governing rights and obligations relating to all stakeholders. • The Company has an operational technical policy to provide services to all stakeholders through ISO 9001:2015 on Quality Management System. • The Company provides proportional treatment to all business partners. • The Company has provided an opportunity for all stakeholders to express their opinions through meeting forums, electronic communication channels (website), and a whistleblowing system (WBS).

Jejak Langkah Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Berikut jejak langkah perkembangan penerapan GCG Perusahaan.

Corporate Governance Implementation Milestones in the Company

The following are the Company's milestones on GCG implementation development.

2016-2017	1. Meletakkan landasan dasar penerapan GCG: • Merumuskan pedoman Kode Etik yang ditandatangani pada 14 September 2017. Kode Etik tersebut merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya serta Nilai-nilai Perusahaan, menjadi Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja yang akan dijadikan sebagai acuan bagi insan Perusahaan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. • Melakukan *business process mapping* untuk memastikan kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Membentuk Infrastruktur GCG yang dibutuhkan: • Organ Perusahaan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Biro Corporate Secretary dan Biro Internal Audit. • Pedoman Kerja bagi masing-masing Organ Perusahaan. 3. Menyiapkan laporan tahunan 2018 yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang relevan. 4. Mempersiapkan *assessment* pelaksanaan GCG untuk tahun 2018. 5. Merumuskan Pedoman GCG.	1. Set the foundation for GCG implementation: • Formulated the Code of Conduct guidelines, signed on September 14, 2017. The Code of Conduct is a form of the Company commitment to running and describing the Corporate Culture and Values as a guideline for Business and Work Ethics that will be used by Company personnel to be complied with and implemented. • Conducted business process mapping to ensure the standard operating procedures (SOP) needs. 2. Established the GCG infrastructure as needed: • The Company's organs, i.e., the Board of Commissioners and Board of Directors, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee, Corporate Secretary Bureau, and Internal Audit Unit Bureau. • Work Guidelines for every Company Organ. 3. Prepared the 2018 annual report referring to the Financial Services Authority Regulations and other relevant regulations. 4. Prepared GCG assessment in 2018. 5. Formulated the Code of GCG.

2018	1. Mengesahkan Pedoman GCG pada 17 September 2018. 2. Melakukan sosialisasi Pedoman Kode Etik dan Pedoman GCG kepada seluruh insan Perusahaan. 3. Penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan oleh seluruh insan Perusahaan. 4. Melakukan *assessment* atas penerapan GCG Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 5. Penyempurnaan situs web Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang relevan serta untuk meningkatkan aspek keterbukaan. 6. Penyempurnaan laporan tahunan untuk tahun buku 2019 dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang relevan, serta meletakkan dasar yang kuat untuk penyusunan laporan yang mengacu kepada kriteria Annual Report Award.	1. Ratified the Code of GCG on September 17, 2018. 2. Disseminated the Code of Conduct and Code of GCG to all Company personnel. 3. Signed the Declaration of Compliance by all Company personnel. 4. Conducted GCG assessment by the Development Finance Comptroller (BPKP). 5. Improved the Company's website based on the Financial Services Authority Regulations and other relevant regulations and improved transparency. 6. Improved the annual report for the 2019 fiscal year based on the Financial Services Authority Regulations and other relevant regulations and set down a solid foundation for preparing the report that refers to the Annual Report Award criteria.
2019	1. Tindak lanjut terhadap hasil *assessment* pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh BPKP. 2. Mempersiapkan proses pelaksanaan *self assessment* GCG selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian skor agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan Entitas Induk. 3. Harmonisasi GCG antara Perusahaan dengan Entitas Anak. 4. Pembuatan laporan tahunan dengan mengacu pada kriteria Annual Report Award.	1. Followed up on the GCG assessment results conducted by BPKP. 2. Prepare the process for implementing the following GCG self-assessment to increase score achievement to align with the targets set by the Parent Entity. 3. GCG harmonization between the Company and Subsidiary. 4. Preparation of annual report based on the Annual Report Award criteria.
2020	1. Tindak lanjut terhadap hasil *assessment* pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh BPKP. 2. Mempersiapkan proses pelaksanaan *assessment* GCG dengan BPKP. 3. Pembuatan laporan tahunan dengan mengacu pada kriteria Annual Report Award dan ikut serta dalam Annual Report Award. 4. Mengawasi praktik GCG pada Entitas Anak.	1. Followed up on the GCG assessment results conducted by BPKP. 2. Prepare the GCG assessment implementation process with BPKP. 3. Preparation of annual report based on the Annual Report Award criteria and participated in the Annual Report Awards. 4. Supervised GCG practices in Subsidiaries.
2021	1. Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* pelaksanaan GCG. 2. Mempersiapkan proses *assessment* pelaksanaan GCG melalui *self assessment* yang didampingi oleh konsultan. 3. Mempersiapkan sosialisasi pelaksanaan GCG pada Entitas Anak. 4. Penetapan *Management Policy*, Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan. 5. Perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.	1. Followed up on the GCG assessment recommendations. 2. Prepared the GCG assessment process via a self-assessment method accompanied by a consultant. 3. Prepared the GCG implementation dissemination in Subsidiaries. 4. Establishment of a Management Policy and Standard for the Anti-Bribery Management System. 5. Obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification.
2022	1. Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* pelaksanaan GCG. 2. Mempersiapkan proses *assessment* pelaksanaan GCG oleh BPKP. 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan implementasi GCG Perusahaan dengan merujuk pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.	1. Followed up on the GCG assessment recommendations. 2. Prepared the GCG assessment process conducted by BPKP. 3. Improved the GCG infrastructure and implementation quality by referring to the ASEAN Corporate Governance Scorecard.
2023	1. Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* pelaksanaan GCG. 2. Meningkatkan infrastruktur IT untuk menunjang program monitoring penerapan *good corporate governance*. 3. Pemutakhiran pedoman-pedoman GCG yang berlaku dan penyempurnaan standar etika Perusahaan. 4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI).	1. Followed up on the GCG assessment recommendations. 2. Improving IT infrastructure to support the good corporate governance implementation monitoring program. 3. Update applicable GCG guidelines and improving the Company's ethical standards. 4. Conformity of the Corporate Governance to the Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) and Implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI).

STRUKTUR DAN PROSES/MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola Perusahaan terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur GCG Perusahaan sebagai berikut.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND PROCESS/MECHANISM

The Company's governance structure consists of main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. The management system adheres to a two-tier system, the Board of Commissioners and Board of Directors, which have clear authorities and responsibilities per their respective functions as mandated in the articles of association and regulations. Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's GCG structure is as follows.

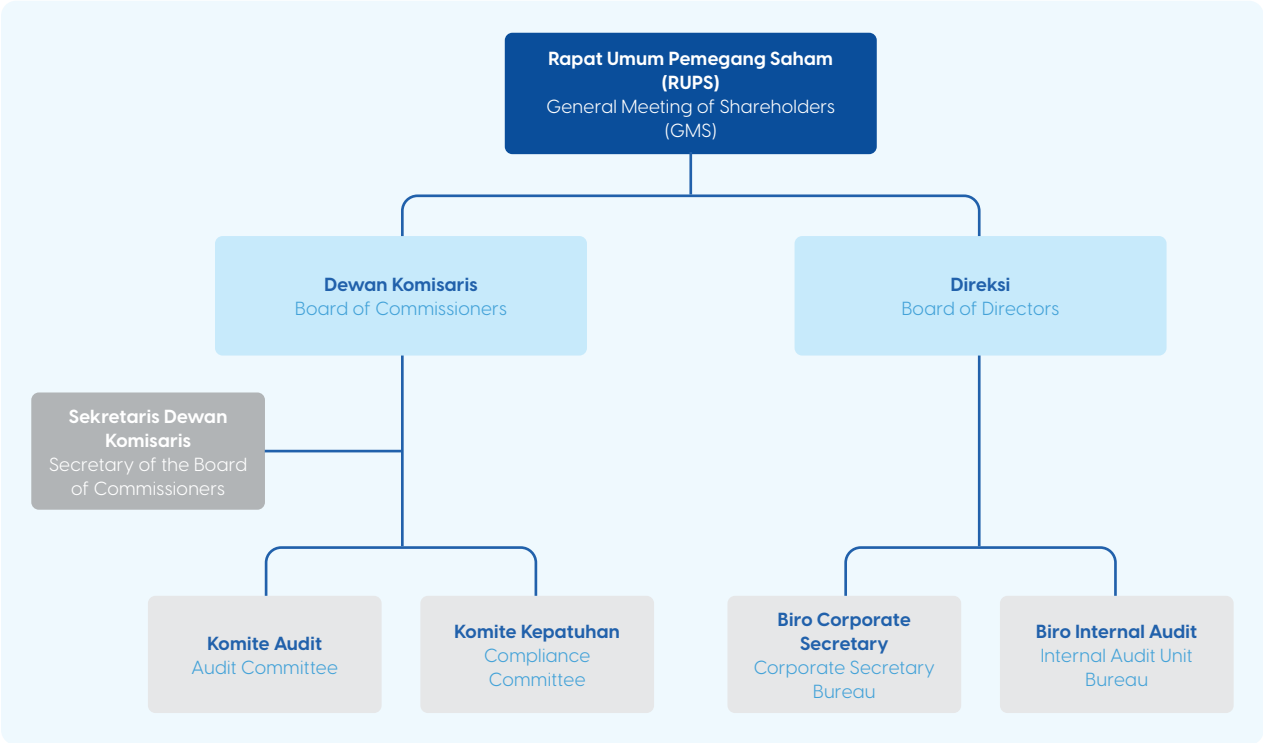

Agar organ dan struktur tata kelola di atas dapat berjalan dengan baik, termasuk aturan main yang membatasi ruang antar organ, Perusahaan mengembangkan proses atau mekanisme tata kelola yang dituangkan dalam bentuk perangkat kebijakan tata kelola, yaitu:

1. Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir disahkan melalui Akta No. 40 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., notaris di Jakarta Selatan.
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yang terakhir disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui lembar pengesahan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT PP Presisi Tbk tahun 2023 yang ditandatangani bersama pada pada 27 Desember 2023.

For the governance organs and structures to proceed well, including the rules that limit spaces between organs, the Company develops governance processes or mechanisms outlined in governance policy tools, namely:

1. The Articles of Association, most recently ratified through Deed No. 40 dated April 27, 2022, made before Notary Fathiah Helmi S.H., a notary in South Jakarta.
2. Corporate Governance Guidelines were most recently approved by the Board of Commissioners and Board of Directors through the 2023 Good Corporate Governance (GCG) Guidelines ratification sheet of PT PP Presisi Tbk, jointly signed on December 27, 2023.

3. Kode Etik, yang terakhir disahkan melalui Surat No. 154/EXT/KOM/PPRE/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Persetujuan untuk Bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT PP Presisi Tbk.
4. *Board Manual* Dewan Komisaris yang terakhir disahkan melalui lembar pengesahan yang ditandatangani bersama pada tanggal 28 November 2023.
5. *Board Manual* Direksi, yang terakhir disahkan melalui Surat No. 2706/EXT/DIR/PPRE/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Pengesahan Pedoman *Board of Director* (BOD) PT PP Presisi Tbk Tahun 2023.
6. Piagam Komite Audit, yang terakhir disahkan melalui lembar pengesahan No. 01/PKA/PPRE/2023 yang ditandatangani bersama pada tanggal 26 September 2023.
7. Piagam Komite Kepatuhan, yang terakhir disahkan melalui lembar pengesahan No. 01/PKK/PPRE/2023 yang ditandatangani bersama pada tanggal 26 September 2023.
8. Pedoman Audit Internal, yang terakhir disahkan pada tanggal 23 November 2020 dan saat ini dalam proses pemutakhiran.
9. *Company Policy* tentang penetapan kebijakan di bidang kualitas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan, manajemen risiko, manajemen anti penyuapan, serta keamanan informasi, yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Juni 2023.
10. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah direvisi dan disahkan bersama-sama oleh Direksi melalui lembar pengesahan bersama SMAP No. PPRE/BD/P/007 tanggal 21 Maret 2023.
11. Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang disahkan melalui memo No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 perihal Penetapan Pejabat yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyenggaraan Negara (LHKPN).
12. Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang disahkan bersama-sama oleh Direksi dengan No. PPRE/SDM/P/007 tanggal 23 Mei 2023.

3. Code of Conduct, most recently ratified through Letter No. 154/EXT/KOM/PPRE/X/2023 dated October 19, 2023 on Joint Agreement to Sign the Code of Conduct Guidelines of PT PP Presisi Tbk.
4. The Board of Commissioners Board Manual, most recently ratified through a ratification sheet signed on November 28, 2023.
5. The Board of Directors Manual, most recently ratified through Letter No. 2706/EXT/DIR/PPRE/XII/2023 dated December 14, 2023 on Ratification Notification of Board of Directors (BOD) Guidelines of PT PP Presisi Tbk for 2023.
6. The Audit Committee Charter, most recently ratified through approval sheet No. 01/PKA/PPRE/2023, was signed on September 26, 2023.
7. Compliance Committee Charter, most recently ratified through approval sheet No. 01/PKK/PPRE/2023, was signed on September 26, 2023.
8. Internal Audit Guidelines, last approved on November 23, 2020, and are being updated.
9. Company Policy on establishing policies in quality, Occupational Safety and Health (OHS) and the environment, risk management, anti-bribery management, as well as information security, ratified by the President Director on June 1, 2023.
10. Anti-Bribery Management System (SMAP) guidelines, which have been revised and jointly approved by the Board of Directors through joint SMAP ratification sheet No. PPRE/BD/P/007 dated March 21, 2023.
11. Guidelines for State Official Wealth Report (LHKPN), which were ratified through memo No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 on the Determination of Officials Required to Submit State Official Wealth Report (LHKPN).
12. Gratuity Control Guidelines, approved jointly by the Board of Directors with No. PPRE/SDM/P/007 dated May 23, 2023.

Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Untuk memastikan penerapan GCG berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang bernilai tinggi, Perusahaan memiliki Tim Pelaksana Penerapan GCG yakni Kepala Biro Satuan Pengawasan yang diangkat melalui Surat Keputusan Direksi No. 320/SK/DIR/PPRE/DIR/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Perubahan Tim Pelaksana Penerapan *Good Corporate Governance* Direksi PT PP Presisi Tbk. Adapun Susunan Tim Pelaksana Penerapan GCG Perusahaan sebagai berikut.

Unit in Charge of Corporate Governance Implementation

To ensure GCG implementation proceeds well and produces high-value results, the Company has a GCG Implementation Team, i.e., the Head of the Internal Audit Unit Bureau appointed per the Decree of Board of Directors No. 243/SK/DIR/PPRE/DIR/X/2022 dated October 10, 2022, on the replacement of GCG Implementation Team for PT PP Presisi Tbk Board of Directors. The current composition of the GCG Implementation Team is as follows.

Jabatan di Tim Pelaksana Penerapan GCG Position in the GCG Implementation Team	**Posisi di Perusahaan** Position in the Company	**Nama Pejabat** Officer Name
Ketua Chairman	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal Director of Finance, Risk Management & Legal	Mohammad Arif Iswahyudi
Wakil Ketua Tim Vice Chairman	Vice President, Corporate Secretary Vice President, Corporate Secretary	Dyah Novian Tri Hadini
Sekretaris Secretary	Junior Officer, GCG & Administration Junior Officer, GCG & Administration	Ridho Akbar
Anggota Member	Vice President, Internal Auditor Vice President, Internal Auditor	Wismo Suwego
	Vice President, Supply Chain Management Vice President, Supply Chain Management	Restian Dini Malini
	Vice President, Operation 1 Vice President, Operation 1	Dwi Agus Susanto
	Vice President, Operation 2 Vice President, Operation 2	Sahadewo Nalendro Bhawono
	Vice President, Equipment Operation Vice President, Equipment Operation	Yofi Hendri
	Vice President, Equipment Maintenance & Repair Vice President, Equipment Maintenance & Repair	Rully Panca Wahyuriawan
	Vice President, Bidding & Engineering Vice President, Bidding & Engineering	Dana Surya Kurniawan
	Vice President, Human Capital Management Vice President, Human Capital Management	Adelia Auliyanti
	Vice President, Business Development & Portfolio Management Vice President, Business Development & Portfolio Management	Debie Novalia
	Vice President, Finance & Accounting Vice President, Finance & Accounting	Gallery Rekayasa
	Marketing Manager Marketing Manager	Yoan Sukma Ariezonna
	Manager, External Relation Manager, External Relation	Caroline Wahyuninggar
	Manager, Risk Management Manager, Risk Management	Mei Elsa Kembaren
	Manager, Legal Manager, Legal	Pradita Dewi Kusumawardhani
	Manager, Equipment Performance & Admin Manager, Equipment Performance & Admin	Aditya Yuli Indrawan
	Manager, Quality Control Manager, Quality Control	Priyono
	Manager, Health, Safety & Environment Manager, Health, Safety & Environment	Pipin Julianto

Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana Penerapan GCG Perusahaan sebagai berikut:

1. Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim bertanggung jawab dalam pemantauan dan penerapan GCG Perusahaan yaitu:
   a. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;
   b. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga;
   c. Menyusun rencana kerja untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman GCG; dan
   d. Memastikan keselarasan pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.
2. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab mendukung tugas Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim sebagai berikut:
   a. Menyempurnakan Buku Pokok-Pokok Materi Penerapan GCG Perusahaan disesuaikan agar sejalan dan selaras dengan kepatuhan Perusahaan;
   b. Mengajukan inisiatif kepada Direksi Perusahaan untuk mengembangkan pengelolaan pelaksanaan GCG;
   c. Menentukan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan penerapan GCG;
   d. Merangkap tugas yang ada;
   e. Merekomendasikan konsultan GCG;
   f. Menjadi *counterpart* konsultan GCG;
   g. Melakukan pemantauan/asistensi pelaksanaan GCG Perusahaan secara berkala (apabila diperlukan);
   h. Memonitor semua dokumen Perusahaan yang diperlukan pada saat pelaksanaan *assessment* oleh konsultan GCG, dokumen disimpan dan diarsip di tempat yang layak untuk keperluan *assessment* yang berlaku;
   i. Menindaklanjuti hasil *assessment* maupun *self assessment;* dan
   j. Membantu Ketua Tim dalam memastikan keselarasan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.
3. Tugas dan kewajiban Anggota Tim adalah mendukung tugas Ketua Tim antara lain sebagai berikut:
   a. Bertanggung jawab menyusun dan melengkapi semua dokumen Perusahaan yang diperlukan pada saat pelaksanaan *assessment* oleh Konsultan GCG, dokumen disimpan dan di arsip di tempat yang layak untuk keperluan *assessment* yang berlaku;
   b. Menindaklanjuti hasil *assessment* maupun *self assessment;* dan
   c. Membantu Ketua Tim, Wakil Ketua dan Sekretaris dalam memastikan keselarasan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

The GCG Implementation Team's duties and obligations are as follows:

1. The Chairman and Vice Chairman are responsible for GCG monitoring and implementation, including:
   a. Monitoring and maintaining the Company's business activities to not deviate from applicable provisions;
   b. Monitoring and maintaining the Company's compliance with agreements and commitments made by the Company with third parties;
   c. Preparing a work plan to ensure that the Company complies with the Code of GCG; and
   d. Ensuring the alignment of GCG implementation within the Company.
2. The Secretary has the duty and responsibility to support the Chairman and Vice Chairman's duties as follows:
   a. Completing the adjustment of GCG Implementation Principal Book to be in line with the Company's compliance;
   b. Propose initiatives to the Board of Directors to improve the GCG implementation management;
   c. Determining the budget for GCG implementation and development;
   d. Concurrently perform existing duties;
   e. Giving recommendations on GCG consultant;
   f. Become the counterpart for GCG consultants;
   g. Monitoring/assisting on GCG implementation periodically (if necessary);
   h. Keeping track of all Company documents required during the assessment conducted by the GCG consultant. Documents are stored and archived in a suitable place for the assessment purposes;
   i. Following up the results of assessment and self-assessment; and
   j. Assisting the Team Chairman in ensuring the alignment of GCG implementation within the Company.
3. Team Members have the duty and responsibility to support the Team Chairman's duties as follows:
   a. Responsible for compiling and completing all Company documents required during the assessment by the GCG Consultant. Documents are stored and archived in a suitable place for the assessment purposes;
   b. Following up on the results of the assessment and self-assessment; and
   c. Assisting the Team Chairman, Vice Chairman, and Secretary to ensure the alignment of GCG implementation within the Company.

EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kualitas pelaksanaan GCG senantiasa dievaluasi secara berkala untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik yang sehat (*best practice*). Hasil penilaian tersebut merupakan rekomendasi yang digunakan sebagai landasan tindakan manajemen agar pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat dilakukan secara efektif.

Guna menghindari kerancuan dalam pemanfaatan laporan penilaian penerapan GCG ini, perlu ditegaskan bahwa penilaian penerapan GCG dilakukan bukan bertujuan untuk membandingkan pencapaian penerapan praktik-praktik GCG di antara Organ Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kriteria yang Digunakan dalam Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penilaian penerapan GCG Perusahaan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator/parameter tersebut sebagai berikut.

CORPORATE GOVERNANCE EVALUATION, MONITORING, AND QUALITY IMPROVEMENT

The GCG implementation quality is evaluated periodically to obtain an overview of GCG implementation conditions in relation to applicable regulations and best practices. The assessment results are recommendations used as a basis for management actions so that Good Corporate Governance implementation can be carried out effectively.

To avoid confusion in using the GCG assessment report, it is important to note that GCG assessment is not carried out to compare GCG practice implementation among the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders/GMS Organs.

GCG Assessment Criteria

The assessment of the Company's GCG implementation uses a measuring instrument consisting of six aspects with predetermined weight as stipulated in the Copy of Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 on the Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises. The indicators/parameters are as follows.

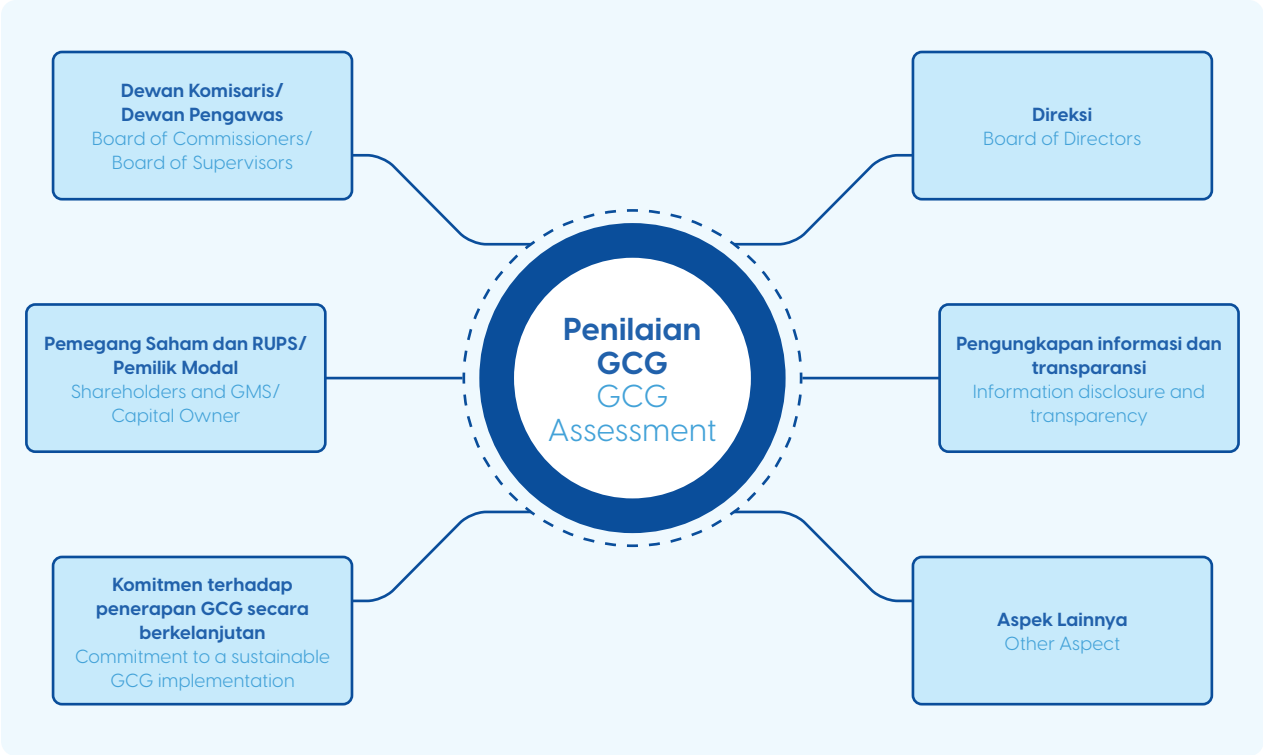

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun Buku 2023

Berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2023 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan penilaian dan evaluasi GCG Perusahaan untuk tahun 2023 tidak lagi dilaksanakan oleh Perusahaan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh PT PP (Persero) Tbk sebagai BUMN yang berstatus entitas induk Perusahaan melalui surat No. 022/EXT/PP/CORSEC/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Arahan Tindak Lanjut *Assessment Good Corporate Governance* (GCG) pada Anak Perusahaan BUMN Tahun Buku 2023, di mana PTPP memutuskan bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) tentang *Assessment* GCG masih dalam proses penyusunan, sehingga untuk *Assessment* GCG tahun 2023 ditiadakan selama Juknis tersebut belum terbit.

Corporate Governance Implementation Assessment for the 2023 Fiscal Year

Per the copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-12/S.MBU/08/2023, dated August 16, 2023, on the Revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2023 on the Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises, the Company will not conduct the GCG assessment and evaluation for the 2023 implementation. This is also confirmed by PT PP (Persero) Tbk as an SOE with the parent entity status through letter No. 022/EXT/PP/CORSEC/2024 dated February 5, 2024, on the Follow-up Directives for Good Corporate Governance (GCG) Assessments in SOE Subsidiaries for the 2023 Fiscal Year, in which PTPP decided that Technical Instructions (Juknis) regarding GCG Assessments are still in the process of being prepared so that the 2023 GCG Assessment is omitted as long as the technical instructions have not been published.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun Buku 2022 dan Perbaikan yang Telah Dilakukan

Corporate Governance Implementation Assessment for the 2022 Fiscal Year and Improvements Made

Penilaian Penerapan GCG Tahun Ukur 2022
GCG Implementation Assessment for the 2022 Measuring Year

Jenis Penilaian Assessment Type	:	*Assessment*/Penilaian Assessment
Assessor/Penilai Assessor	:	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Development Finance Comptroller (BPKP)
Tahun Buku Fiscal Year	:	2022
Tempat Place	:	Kantor Pusat PPRE Head Office of PPRE
Waktu Pengukuran Assessment Time	:	Januari s.d Maret 2023 January to March 2023
Waktu Terbit Laporan Report Issuance Date	:	10 Maret 2023 March 10, 2023

Berikut hasil penilaian penerapan GCG Perusahaan untuk tahun ukur 2022.

The following are the results of the GCG implementation assessment for the 2022 measuring year.

Aspek Pengujian Assessment Aspect	**Bobot** Weight	**Pencapaian Tahun 2022** 2022 Achievement		
		Skor Score	**Pencapaian** Achievement	**Predikat** Predicate
Komitmen terhadap Penerapan GCG secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable GCG Implementation	7,00	6,613	94,474	Sangat Baik Excellent
Pemegang Saham dan RUPS Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,616	95,730	Sangat Baik Excellent
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	32,831	93,802	Sangat Baik Excellent

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun 2022 2022 Achievement		
		Skor Score	Pencapaian Achievement	Predikat Predicate
Direksi Board of Directors	35,00	31,544	90,125	Sangat Baik Excellent
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	9,000	80,209	Baik Good
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0,000	0,000	-
Skor Keseluruhan Total Score	**100,00**	**86,822**	**86,82**	**Sangat Baik** Excellent

Skor GCG Tahun 2019-2022
GCG Scores in 2019-2022

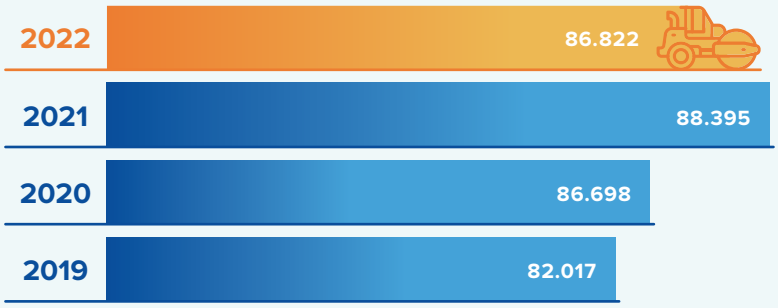

Komitmen Perusahaan dalam menyempurnakan implementasi GCG di antaranya dilakukan dengan menindaklanjuti setiap temuan dalam penilaian GCG yang menghasilkan rekomendasi. Berikut informasi rekomendasi dan hasil tindak lanjut *self assessment* penerapan GCG tahun 2022 dan rekomendasi *assessment* GCG tahun 2023 yang akan ditindaklanjuti di tahun 2023.

The Company's commitment to improving GCG implementation was done by following up every recommendation from GCG assessment findings. Information on recommendations and follow-up on the GCG self-assessment results in 2021 and recommendations for GCG assessment in 2022 that will be followed up in 2023 are as follows.

No.	Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023 Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow Up
I	**Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan** Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation			
1	Perusahaan belum menyusun laporan mengenai pelaksanaan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun. The Company has not prepared a good corporate governance implementation report to be submitted to the GMS and the Board of Commissioners at least once a year.	√	2023	Sudah termuat pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PPRE No. 40 tanggal 24 Mei 2023 di halaman 36-37. Included in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PPRE No. 40 dated May 24, 2023, pages 36-37.

No.	Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023 Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	**Periode Tindak Lanjut** Follow Up Period	**Bentuk Tindak Lanjut** Follow Up
2	Sebagian karyawan belum menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. Some employees have not regularly signed statements of compliance with the Code of Conduct.	√	2023	Perusahaan telah mewajibkan karyawan untuk menandatangani pakta integritas berdasarkan memo No. 023/M/HCM/PPRE/I/23 tanggal 26 Januari 2023 dan seluruh karyawan telah menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku. The Company has required the employees to sign an integrity pact based on memo No. 023/M/HCM/PPRE/I/23 dated January 26, 2023, and all employees have periodically signed a code of conduct compliance statement.
II	**Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal** Shareholders and GMS/Capital Owners			
1	Belum ada SK penetapan terhadap Lembaga Independen yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penyelenggara asesmen talenta Direksi BUMN. There is no decree determining that the Independent Institution appointed by the Company is the SOE Board of Directors talent assessment organizer.	√	2023	Untuk penyelenggara *assessment* talenta Direksi dilakukan oleh PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas PT PP Presisi Tbk sesuai dengan juknis *talent pool* yang dimiliki oleh PT PP (Persero) Tbk. The Board of Directors' talent assessment is carried out by PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder of PT PP Presisi Tbk, following the technical guidelines for the talent pool owned by PT PP (Persero) Tbk.
2	Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP belum dilaksanakan tepat waktu. RJPP draft or RJPP revision ratification/approval has not been carried out on time.	√	2023	RJPP yang berlaku masih mengacu pada RJPP tahun 2021-2024, sehingga belum akan dilakukan persetujuan terkait pembaharuan RJPP. The current RJPP still refers to the 2021-2024 RJPP; therefore, there will be no approval for RJPP renewal.
3	Belum ada kontrak kinerja individual Direksi yang memuat target kinerja individu dan belum ada penilaian kinerja Direksi secara Individu. There is no individual performance contract for Board of Directors containing individual performance targets and no individual Board of Directors assessment.	√	2023	Perusahaan telah menyampaikan KPI Direktorat (KPI Direksi secara Individu) melalui surat Direksi No. 891/EXT/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, perihal: Penyampaian Target KPI Korporat dan Direktorat Tahun Buku 2023. The Company has submitted the Directorate's KPI (Individual Board of Director's KPI) through the Board of Director's letter No. 891/EXT/DIR/PPRE/V/2023 dated May 9, 2023, on the Submission of Corporate and Directorate KPI Targets for the 2023 Fiscal Year.
III	**Dewan Komisaris/Dewan Pengawas** Board of Commissioners/Supervisory Board			
1	Belum dilakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis sejak tahun 2018. A suitability review for the Company's vision and mission to changes in the business environment since 2018 has not been conducted.	√	2023	Melalui Komite telah dilaksanakan Telaah Visi Misi PPRE sesuai Surat Keputusan Direksi PPRE dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui surat No. 015/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 18 Oktober 2023. Dengan kesimpulan bahwa bahwa VISI dan MISI Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/PPRE/DIR/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Visi dan Misi Perusahaan, masih sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, RJPP dan RKAP. Through the Committee, a PPRE Vision and Mission Review has been carried out in accordance with the Decree of the PPRE Board of Directors and reported to the Board of Commissioners via letter No. 015/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated October 18, 2023. The review concluded that the Company's Vision and Mission are in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 028/SK/PPRE/DIR/IX/2018 dated September 10, 2018, on the Company's Vision and Mission and still in line with the Articles of Association, RJPP, and RKAP.

No.	Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023 Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	**Periode Tindak Lanjut** Follow Up Period	**Bentuk Tindak Lanjut** Follow Up
2	Belum dilakukan telaah secara menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa. A comprehensive review of goods and services procurement policies has not been conducted.	√	2023	Perusahaan telah melakukan pemutakhiran terhadap kebijakan barang dan jasa sesuai dengan pedoman No. PPRE/RP/W/005 tanggal 12 Juni 2023. The Company has updated its goods and services following the guideline no. PPRE/RP/W/005 dated June 12, 2023.
3	Belum dilakukan telaahan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. A review/or research/examination has not been conducted on the proposed Board of Directors candidates before submitting them to the Shareholders.	√	2023	Komite Kepatuhan telah mempelajari Peraturan Menteri BUMN No. Per-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, khususnya pada Bab V yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Untuk itu Dewan Komisaris melakukan konsultasi ke PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas melalui surat No. 166/EXT/KOM/PPRE/XI/2023 tanggal 06 November 2023 perihal: Permohonan Arahan Terkait Proses Pengangkatan Direksi PT PP Presisi Tbk; dan sudah ada arahan dari Pemegang Saham Mayoritas terkait tersebut diatas disampaikan melalui surat No. 918/EXT/PP/HCM/2023 tanggal 12 November 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan terkait Proses Pengangkatan Direksi PT PP Presisi Tbk (PPRE) yang pada dasarnya untuk mengusulkan Calon Direktur dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan (dalam hal ini PPRE) adalah kewenangan Direksi PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas dengan tetap mengacu ketentuan Anggaran Dasar, untuk itu PPRE diminta untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar. The Compliance Committee has reviewed the Regulation of the Minister of SOEs No. Per-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, on SOE Organs and Human Resources, particularly Chapter V, which regulates the Procedures for Appointing Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries. For this reason, the Board of Commissioners consulted PT PP (Persero) Tbk as the Major Shareholder through letter No. 166/EXT/KOM/PPRE/XI/2023 dated November 6, 2023, on the Request for Directive Regarding the Appointment Process for the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk. There have been directives from the Major Shareholder related to the request, submitted through letter No. 918/EXT/PP/HCM/2023 dated November 12, 2023, on the Response to Request for Directive Regarding the Appointment Process for the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk (PPRE) which proposes Candidates for Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries (in this case PPRE) is the authority of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder while still referring to the provisions of the Articles of Association, for which PPRE is asked to make adjustments to the Articles of Association.

No.	**Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022** GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	**Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023** Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	**Periode Tindak Lanjut** Follow Up Period	**Bentuk Tindak Lanjut** Follow Up
4	Belum terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. There has been no assessment of the Board of Directors performance based on a review of criteria, targets, and main performance indicators covered in the Board of Directors Management Contract individually, along with their respective achievements.	√	2023	Perusahaan telah menyampaikan KPI Direktorat (KPI Direksi secara Individu) melalui surat Direksi No. 891/EXT/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, perihal: Penyampaian Target KPI Korporat dan Direktorat Tahun Buku 2023. Terkait penyampaian KPI tersebut, Komite Kepatuhan telah melakukan koordinasi dengan Corporate Secretary pada tanggal 16 Mei 2023. Hasil penilaian terhadap kinerja Direksi secara Individu tahun buku 2023 akan disampaikan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Mayoritas, dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2023. The Company has submitted Directorate KPIs (Individual Director KPIs) through the Board of Directors' letter No. 891/EXT/DIR/PPRE/V/2023 dated May 9, 2023, on the Submission of Corporate and Directorate KPI Targets for the 2023 Fiscal Year. Regarding the KPI submission, the Compliance Committee coordinated with the Corporate Secretary on May 16, 2023. The individual Board of Director's performance assessment results for the 2023 fiscal year will be submitted by the Board of Commissioners to the Major Shareholders, in the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners in 2023.
5	Belum terdapat pembahasan/evaluasi atas penilaian kinerja Dewan Komisaris beserta Komite Komisaris yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. There has been no discussion/evaluation for the performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Committee included in the minutes of the Board of Commissioners Meeting.	√	2023	Sudah dilaksanakan atas penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite tahun buku 2022. Pembahasan atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite dilaksanakan pada saat Rapat Dewan Komisaris Triwulan IV 2023 tanggal 7 Februari 2023. The Board of Commissioners and Committees performance assessment for the 2022 fiscal year has been conducted. Discussion on the Board of Commissioners and Committees' performance assessment results was held during the Board of Commissioners Meeting for the Fourth Quarter of 2023 on February 7, 2023.
6	Uraian tugas Komite Kepatuhan yang dibentuk belum disesuaikan dengan uraian tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. The established Compliance Committee task description has not been adjusted to the job description mandated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-06/MBU/04/2021 on Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.	√	2023	*Review* sudah dilaksanakan. Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris telah selesai di-*review* sesuai Peraturan yang berlaku Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk. Piagam Komite Kepatuhan 2023 sesuai surat No. 013/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 25 September 2023. Piagam Komite Audit tahun 2023 sesuai surat No. 013/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 25 September 2023. The review has been carried out. The Division of Duties of the Board of Commissioners Members has been reviewed following the applicable regulations, i.e., the Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 12, 2023, on the Division of Duties and Authority of the Board of Commissioners Members of PT PP Presisi Tbk. Compliance Committee Charter 2023 in accordance with letter No. 013/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated September 25, 2023.

No.	Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023 Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow Up
7	Komite Dewan Komisaris belum melakukan penyusunan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris. The Board of Commissioners Committee has not prepared quarterly reports to the Board of Commissioners.	√	2023	Sudah dilaksanakan di tahun 2023 Already implemented in 2023
IV	**Direksi** Board of Directors			
1	Biaya pelatihan Direksi belum dianggarkan secara terpisah dalam RKAP. The Board of Directors' training costs have not been budgeted separately in the RKAP.	√	2023	Biaya pelatihan Direksi telah dianggarkan dan tercantum dalam pedoman biaya umum Perusahaan. The Board of Directors' training costs have been budgeted and listed in the Company's general cost guidelines.
2	Direksi yang mengikuti program pelatihan belum menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani. Board of Directors members who participated in training programs have not prepared a report on the training results.	√	2023	Bagi Direksi yang mengikuti pelatihan, masing-masing Direksi telah menyusun dan menandatangani Laporan Training Direksi untuk setiap pelatihan yang diikuti di tahun 2023. Every Board of Directors member who participated in training has prepared and signed the Board of Directors Training Report for every training attended in 2023.
3	Penyampaian rancangan RJPP kepada Dewan Komisari untuk mendapat persetujuan belum tepat waktu. The submission of the RJPP draft to the Board of Commissioners for approval was not timely.	x	-	Rancangan RJPP masih belum akan dilakukan perubahan sehingga proses penyusunan hingga persetujuan belum dapat dilakukan kembali pada tahun 2023. There will be no changes to the RJPP draft, so the preparation and approval process cannot be carried out in 2023.
4	Penyampaian rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan belum tepat waktu. The submission of the RKAP draft to the Board of Commissioners for approval was not timely.	x	-	Telah dilakukan upaya penyampaian rancangan RKAP untuk mendapatkan persetujuan tepat waktu. Namun masih memiliki kendala dalam proses pendalaman proyeksi RKAP yang melibatkan beberapa pihak. Efforts have been made to submit the RKAP draft to obtain timely approval. However, there are still obstacles in the process of developing the RKAP projections, which involve several parties.
5	*Work Instruction* Penempatan Personil belum memuat prosedur promosi, demosi dan mutasi pegawai di perusahaan. The Work Instruction for Personnel Placement has not contain procedures for employee promotion, demotion, and transfer in the Company.	√	2023	Pada dokumen *Work Instruction*/Penempatan Personil dengan No. PPRE/SDM/W/001 yang telah direvisi dan berlaku pada 2 Mei 2023, telah memuat prosedur promosi, demosi, dan mutasi pegawai di Perusahaan. The Work Instruction/Personnel Placement document No. PPRE/SDM/W/001, which has been revised and took effect on May 2, 2023, contains procedures for employee promotion, demotion, and transfer in the Company.
6	Rencana Suksesi satu level jabatan di bawah Direksi belum disampaikan kepada Dewan Komisaris. The Succession Plan for one level below the Board of Directors has not been submitted to the Board of Commissioner.	√	2023	Rencana suksesi VP Equipment telah disampaikan kepada Dewan Komisaris sesuai surat No. 1516/EXT/DIR/PPRE/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment. VP Equipment's succession plan has been submitted to the Board of Commissioners per letter No. 1516/EXT/DIR/PPRE/VII/2023 dated August 1, 2023, on the Appointment Notification of the Vice President of Equipment.

No.	Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023 Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	**Periode Tindak Lanjut** Follow Up Period	**Bentuk Tindak Lanjut** Follow Up
7	Kontrak Kinerja belum ditandatangani oleh pejabat dua level diatasnya. The Performance Contract has not been signed by officials two levels above the employee.	√	2023	Telah dibuat kontrak manajemen yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit berkaitan dengan KPI Unit masing-masing maupun parameter pada KPI korporat tahun 2023. A management contract, which has been signed by every unit leader regarding the KPIs of their respective units as well as the parameters of the corporate KPIs for 2023, has been created.
8	Belum terdapat penilaian terhadap tingkat pencapaian target kinerja masing-masing Direktur (individu). There has been no assessment of the performance target achievement level for every Board of Directors member.	√	2023	Perusahaan telah menyampaikan KPI Direktorat (KPI Direksi secara Individu) melalui surat Direksi No. 891/EXT/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, perihal: Penyampaian Target KPI Korporat dan Direktorat Tahun Buku 2023, dan telah dilakukan penilaian terhadap KPI masing-masing Direktur hingga Triwulan IV 2023. The Company has submitted the Directorate's KPI (Individual Board of Director's KPI) through the Board of Director's letter No. 891/EXT/DIR/PPRE/V/2023 dated May 9, 2023, on the Submission of Corporate and Directorate KPI Targets for the 2023 Fiscal Year, and assessment has been carried out on each Director's KPI until the Fourth Quarter of 2023.
9	Perusahaan belum melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan/ kinerja perusahaan. The Company has not carried out corporate soundness level evaluation.	√	2023	Perusahaan telah mengajukan dan telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menambahkan ruang lingkup audit atas laporan evaluasi kinerja PPRE untuk tahun buku 2023. The Company has proposed and been approved by the Public Accounting Firm (KAP) to add to the audit scope of the PPRE performance evaluation report for the 2023 fiscal year.
10	Pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan belum memuat prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa; hak-hak dan kewajiban pemasok serta perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Company procurement guidelines for goods and services has not contain principles for procurement of goods and services; the rights and obligations of suppliers and the Company follow the applicable laws and regulations.	√	2023	Pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan telah memuat prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa; hak-hak dan kewajiban pemasok serta perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pedoman tersebut dapat diakses melalui laman *website* pada kanal https://pp-presisi.co.id/vendor. The Company's procurement guidelines for goods and services contain the principles of procurement of goods and services; the rights and obligations of suppliers and the Company follow the applicable laws and regulations. These guidelines are available online at https://pp-presisi.co.id/vendor.
11	Perusahaan belum memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja individu bagi karyawan. The Company does not have an individual performance appraisal system policy for employees.	x	-	Perusahaan memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja bagi karyawan yang termuat pada dokumen Prosedur *Performance Appraisal* Pegawai No. PPRE/SDM/P/005 yang berlaku pada 10 Februari 2020, namun terkait KPI kuantitatif masih ditetapkan sampai level Divisi. The Company has an individual performance appraisal system policy for employees contained in the Employee Performance Appraisal Procedure document No. PPRE/SDM/P/005, which took effect on February 10, 2020, but the quantitative KPIs are still set at the Division level.
12	Perusahaan belum memiliki pengaturan hubungan induk dengan anak perusahaan (*subsidiary governance*). The Company does not have subsidiary governance.	√	2023	Hubungan yang mengatur antara PP Presisi dengan Anak Perusahaan diatur pada Prosedur *Corporate Parenting* No. PPRE/BD/P/006 tanggal 6 November 2023. The governing relationship between PP Presisi and its Subsidiaries is regulated in Corporate Parenting Procedure No. PPRE/BD/P/006 dated November 6, 2023.

No.	Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023 Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow Up
13	Perusahaan belum melakukan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. The Company has not conducted a compliance audit on statutory regulations.	√	2023	Perusahaan telah menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Kepatuhan Terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Jasa Audit Umum No. 023/SPK/DIR/PPRE/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023. The Company has appointed KAP Hertanto, Grace, Karunawan to conduct an audit of Compliance with Applicable Laws and Regulations and BPK State Financial Audit Standards for the year ending on December 31, 2023, based on Work Order Letter for General Audit Services Work Package No. 023/SPK/DIR/PPRE/VII/2023 dated July 3, 2023.
14	Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur. The Company does not have a policy on the protection of creditors' rights and interests.	√	2023	Kebijakan terkait perlindungan dan hak kepentingan kreditur diatur dalam Pedoman Kebijakan Mengenai Hak & Kewajiban Terhadap Kreditur & Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PPRE Tahun 2023. Policies related to the protection and rights of creditors' interests are regulated in the Policy Guidelines Regarding Rights & Obligations towards Creditors & Management of the Use of Long-Term Loans of PPRE Year 2023.
15	Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya. The Company does not have a policy on long-term loan management per their intended purpose and repayment.	√	2023	Kebijakan terkait perlindungan dan hak kepentingan kreditur diatur dalam Pedoman Kebijakan Mengenai Hak & Kewajiban Terhadap Kreditur & Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PPRE Tahun 2023. Policies related to the protection and rights of creditors' interests are regulated in the Policy Guidelines Regarding Rights & Obligations towards Creditors & Management of the Use of Long-Term Loans of PPRE in 2023.
16	Perusahaan belum memiliki kebijakan terkait partisipasi karyawan. The Company does not have a policy on employee participation.	√	2023	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait partisipasi karyawan dalam bentuk SK Direksi No. 006/SK/DIR/PPRE/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Partisipasi Karyawan Dalam Pembuatan Kebijakan Perusahaan, dan pada tahun 2023 telah dibentuk LKS Bipartit yang akan dijadikan sebagai salah satu instrumen partisipasi karyawan terhadap kebijakan Perusahaan. The Company has a policy related to employee participation in the Decree of the Board of Directors No. 006/SK/DIR/ PPRE/V/2019 dated May 2, 2019, on Employee Participation in Making Company Policies. In 2023, a Bipartite LKS has been established, which will be used as an instrument for employee participation in Company policies.
17	Perusahaan belum mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target salah satunya terdapat penurunan capaian target deviden dan KPI. The Company has not met the Shareholders' expectations on target achievement, e.g., a decrease in the dividend targets and KPI achievements.	√	2023	Di tahun 2023, Manajemen telah melakukan sejumlah inisiatif untuk dapat mengoptimalkan kinerja Perusahaan dengan tujuan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham khususnya terkait pembagian dividen dan pencapaian KPI. In 2023, Management has carried out several initiatives to optimize the Company's performance with the aim of meeting the Shareholders' expectations, especially regarding dividend distribution and KPI achievement.

No.	**Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022** GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	**Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023** Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	**Periode Tindak Lanjut** Follow Up Period	**Bentuk Tindak Lanjut** Follow Up
18	Penyampaian Laporan manajemen triwulanan kepada Dewan Komisaris belum seluruhnya tepat waktu. The quarterly management reports submission to the Board of Commissioners is not timely.	√	2023	Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan Komisaris telah dilakukan tepat waktu. The quarterly management reports submission to the Board of Commissioners is timely.
19	Alasan ketidakhadiran anggota Direksi dalam rapat belum didokumentasikan. The reasons for the Board of Directors members' absence at meetings have not been documented.	√	2023	Ketidakhadiran Anggota Direksi dalam rapat sudah didokumentasikan oleh Sekretaris Direksi dan termuat pada dokumen Risalah Rapat. The Board of Directors Secretary has documented the Board of Directors members' absence at meetings and includes them in the Minutes of Meeting document.
20	Fungsi Audit Internal belum melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh intern SPI maupun oleh Assessor Independen. The Internal Audit Function has not implemented a quality assurance and improvement program for the Internal Audit Function, which covers all aspects of the internal supervision function activities carried out by SPI and independent assessors.	√	2023	IA akan melakukan Penilaian Program Jaminan Kualitas dan peningkatan fungsi Auditor Internal secara *Self Assessment* (IACM) yang berada di level 2. The Internal Auditor function by Self-Assessment (IACM) which is at level 2.
21	Pengangkatan Sekretaris Perusahaan belum melalui persetujuan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has not approved the Corporate Secretary appointment.	√	2023	Perubahan *Corporate Secretary* sudah disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan surat No. 030/SP-DEKOM/PPRE/VIII/2023 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. The change in Corporate Secretary has been submitted to the Board of Commissioners and received approval from the Board of Commissioners per letter No. 030/SP-DEKOM/PPRE/VIII/2023 on the Corporate Secretary Appointment.

No.	Rekomendasi *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2022 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2023 Follow Up Until the End of 2023		
		Status Status	**Periode Tindak Lanjut** Follow Up Period	**Bentuk Tindak Lanjut** Follow Up
V	**Pengungkapan Informasi dan Transparansi** Information Disclosure and Transparency			
1	Laporan Tahunan belum memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan secara lengkap, yaitu: • Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun; • Uraian tentang dampak Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. The Annual Report has not contain a separate section on management's complete Analysis and Description of Company Performance, namely: • Description of the impact of price changes on the Company's sales or net income for two years or since the Company started its business, if it has only started its business for less than two years; • A description of the impact of material information and facts that occur after the date of the accountant's report on future business performance and risks.	√	2023	Sudah ditindaklanjuti di dalam penyusunan Laporan Tahunan tahun buku 2022 pada halaman 223-224. This has been followed up in the Annual Report for the 2022 fiscal year on pages 223-224.
2	Perusahaan belum mengikuti ajang Annual Report Award (ARA) dan belum mendapatkan penghargaan di bidang Publikasi. The Company has not participated in the Annual Report Award (ARA) event nor received any Publication awards.	√	2023	Pada tahun 2022 tidak dilaksanakan kegiatan Annual Report Award (ARA). ARA baru kembali diselenggarakan pada tahun 2023, dan Perusahaan mengikutsertakan buku *Annual Report* PPRE 2022 pada ajang tersebut. In 2022, the Annual Report Award (ARA) was not held. ARA was held again in 2023, and the Company participated in the PPRE 2022 Annual Report book at the event.
VI	**Aspek Lainnya** Other Aspects			
Tidak ada None				

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Dalam rangka meningkatkan penerapan GCG, Perusahaan senantiasa menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015. Peraturan tersebut mencakup 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus dilaksanakan Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF CODE OF GOVERNANCE FOR PUBLIC COMPANIES

To improve GCG implementation, the Company carries out all operational activities following Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2015 and Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015. The regulation covers five aspects, eight principles, and 25 recommendations from the Financial Services Authority regarding the GCG aspects and principles the Company must implement.

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Aspect 1: Relations between a Public Company and Shareholders on Ensuring Shareholders Rights	
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1: Improving GMS Convention	
Rekomendasi 1 Recommendation 1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham. The Public Company has a voting technical procedure or method, either open or closed, prioritizing the Shareholders' independence and interest.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Perusahaan mengatur cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) pada RUPS dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir disahkan melalui Akta No. 40 tanggal 27 April 2022 dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. **Fulfilled.** The Company regulates the technical methods or procedures for collecting votes at the GMS in the Company's Articles of Association, which were most recently ratified through Deed No. 40 dated April 27, 2022, and the Rules for the General Meeting of Shareholders of the Company.
Rekomendasi 2 Recommendation 2	Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of Public Company's Board of Commissioners and Board of Directors attend the Annual GMS.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi** Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPRE hadir pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 24 Mei 2023. **Fulfilled.** All Board of Commissioners and Board of Directors members of PPRE attended the Annual GMS held on May 24, 2023.
Rekomendasi 3 Recommendation 3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun. The GMS report summary is available on the Public Company's website for at least one year.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi** Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan. **Fulfilled.** The GMS report summary is available on the Company's website.
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dan Investor Principle 2: Improving the Quality of the Public Company's Communication with its Shareholders or Investors	
Rekomendasi 4 Recommendation 4	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor. The Public Company has a policy on communication with its Shareholders or Investors.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor. Kebijakan tersebut diatur dalam Work Instruction dengan No. PPRE/SEK/P/006 tanggal 26 April 2022 tentang Pengelolaan Informasi Perusahaan yang diketahui Biro Corporate Secretary. **Fulfilled.** The Company has a communication policy with the Shareholders or investors. The policy is stipulated in the Work Instruction No. PPRE/SEK/P/006 dated April 26, 2020, on Management of Company Information known to the Corporate Secretary Bureau.
Rekomendasi 5 Recommendation 5	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dalam situs web. The Public Company disclosed its communication with Shareholders or investors on a website.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Work Instruction Strategi Komunikasi telah dipublikasikan pada situs web Perusahaan dan Presisi Online. **Fulfilled.** The Communication Strategy Work Instruction is disclosed through the Company's website and Presisi Online.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: The Board of Commissioners' Roles and Functions	
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3: Strengthening the Board of Commissioners' Membership and Composition	
Rekomendasi 6 Recommendation 6	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The determination of the number of Board of Commissioners members considers the Public Company's condition.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015, dan Anggaran Dasar Perusahaan. **Fulfilled.** The determination of the number and appointment of Board of Commissioners members is determined by the GMS and has considered the Company's condition, which refers to applicable regulations, Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, and Articles of Association.
Rekomendasi 7 Recommendation 7	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of Board of Commissioners members' composition considers variety in required expertise, knowledge, and experience.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Mayoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. **Fulfilled.** The composition of Board of Commissioners members has fulfilled the various expertise, knowledge, and experience aspects required following the Company's line of business. The Board of Commissioners members are determined by the GMS considering the composition of Independent Commissioners per the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers/Public Companies and the Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 which has considered the diversity of expertise, knowledge, and experience required based on the Majority Shareholders' recommendation per the Articles of Association.
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Principle 4: Improving the Quality of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities Implementation	
Rekomendasi 8 Recommendation 8	Dewan Komisaris memiliki kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess its performance.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris tahun 2021. **Fulfilled.** The self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners' performance is outlined in the 2021 Board of Commissioners Work Procedure Guidelines.
Rekomendasi 9 Recommendation 9	Kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the Board of Commissioners' performance is disclosed in the Public Company's Annual Report.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Dewan Komisaris Perusahaan telah mempunyai *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan kriteria pengukuran capaian kinerja secara kolegial. **Fulfilled.** The Company's Board of Commissioners has its Key Performance Indicators (KPI) and criteria to measure collegial performance achievements.
Rekomendasi 10 Recommendation 10	Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of any Board of Commissioners member in case they are involved in financial crimes.

Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan tercantum dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris Perusahaan. **Fulfilled.** Policies related to the resignation of Board of Commissioners members involved in financial crimes are listed in the Board of Commissioners Manual.
Rekomendasi 11 Recommendation 11	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or Committee carrying out the Remuneration and Nomination Functions arranges the succession policy in nominating the Board of Directors members.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dijalankan oleh Komite Kepatuhan. **Fulfilled.** The Nomination and Remuneration Function is carried out by the Compliance Committee.
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: The Board of Directors' Function and Roles	
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 5: Strengthening the Board of Directors' Membership and Composition	
Rekomendasi 12 Recommendation 12	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of Board of Directors members considers the Public Company's condition and decision-making effectiveness.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Penentuan jumlah Direksi telah disesuaikan dengan kegiatan dan skala usaha Perusahaan saat ini. Susunan anggota Direksi per 31 Desember 2023 sebagai berikut: Direktur Utama: I Gede Upeksa Negara Direktur Perencanaan Bisnis & HCM: Yudi Setiawan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal: Mohammad Arif Iswahyudi Direktur Operasi: Rebimun **Fulfilled.** The determination of the number of Board of Directors has been adjusted to the current Company's activities and business scale. The composition of Board of Directors members as of December 31, 2023, is as follows. President Director : I Gede Upeksa Negara Director of Business Planning & HCM: Yudi Setiawan Director of Finance, Risk Management & Legal: Mohammad Arif Iswahyudi Director of Operation: Rebimun
Rekomendasi 13 Recommendation 13	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of Board of Directors composition considers the required expertise, knowledge, and experience diversity.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Pengusulan dan pengangkatan Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan tanggung jawab yang diemban di Perusahaan. **Fulfilled.** The Board of Directors nomination and appointment have considered the diversity of expertise, knowledge, and experience relevant to the responsibilities carried out in the Company.
Rekomendasi 14 Recommendation 14	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. The Board of Directors member controlling accounting or financial matters has the accounting expertise and/or knowledge.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Direktur Keuangan Perusahaan memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan investasi di universitas ternama dan memiliki pengalaman dibidang keuangan, operasional, hubungan investor dan pasar modal yang dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan. **Fulfilled.** The Company's Director of Finance has a financial and investment education background from a renowned university with experience in finance, operations, investor relations, and capital markets, which is available in the Company Profile chapter.

Prinsip 6: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 6: Strengthening the Board of Directors' Membership and Composition	
Rekomendasi 15 Recommendation 15	Direksi mempunyai kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess its performance.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Direksi Perusahaan telah memiliki kebijakan penilaian kinerja *self assessment* untuk menilai kinerja Direksi. **Fulfilled.** The Board of Directors has a self-assessment policy to assess its performance.
Rekomendasi 16 Recommendation 16	Kebijakan *self assessment* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the Board of Directors performance is disclosed in the Public Company's annual report.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** *Self Assessment* untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan. **Fulfilled.** The self-assessment to assess the Board of Directors performance has been disclosed in the annual report in the Corporate Governance section.
Rekomendasi 17 Recommendation 17	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy related to the resignation of any Board of Directors member in case they are involved in financial crimes.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi Perusahaan. **Fulfilled.** Policies regarding the resignation of Board of Directors members involved in financial crimes are listed in the Board of Directors Manual.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholders' Participation	
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7: Improving Corporate Governance Aspect through Stakeholders' Participation	
Rekomendasi 18 Recommendation 18	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Public Company has a policy to prevent insider trading.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* terdapat pada Kode Etik yang di dalamnya mengatur terkait dengan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah, menyimpan, serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. **Fulfilled.** The policy to prevent insider trading is in the Code of Conduct, which regulates acquiring information through legitimate means, storing and using it following the applicable business ethics principles.
Rekomendasi 19 Recommendation 19	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*. The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Perusahaan menetapkan kebijakan anti korupsi dan *anti fraud* yang dituangkan dalam Kode Etik, Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Perusahaan agar tidak melakukan penyelewengan dan penyimpangan sejenisnya. Selain itu, sejak tahun 2021, Perusahaan telah menerapkan SMAP sebagai bentuk keseriusan Perusahaan dalam menerapkan kebijakan anti KKN. **Fulfilled.** The Company established anti-corruption and anti-fraud policies as outlined in the Code of Conduct. The Company also conducts dissemination to all employees not to commit fraud and similar violations. In addition, since 2021, the Company has implemented SMAP as a form of the Company's commitment to implementing anti-KKN policies.
Rekomendasi 20 Recommendation 20	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy on selecting and improving supplier or vendor's capability.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Kebijakan Perusahaan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diatur di dalam *Work Instruction* Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No. PPRE/RP/W/005 tanggal 16 November 2023. **Fulfilled.** The Company's selection and capacity-building policies of suppliers or vendors have been regulated in the Work Instruction of Goods and Services Procurement No. PPRE/ RP/W/005 dated November 16, 2023.

Rekomendasi 21 Recommendation 21	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy on the fulfillment of creditor rights.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban Perusahaan terhadap kreditur secara tepat waktu yang dituangkan dalam Pedoman Kebijakan Mengenai Hak & Kewajiban terhadap Kreditur & Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PPRE Tahun 2023. **Fulfilled**. The Company is committed to carrying out its timely obligations to creditors as outlined in Policy Guidelines on the Rights & Obligations of Creditors & Management of the Use of Long-Term Loans of PPRE of 2023.
Rekomendasi 22 Recommendation 22	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *Whistleblowing System*. The Public Company has a Whistleblowing System policy.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Perusahaan memiliki mekanisme penegakan prosedur pengaduan pelanggaran yang tertuang dalam Pedoman *Whistleblowing System* PPRE Tahun 2023. **Fulfilled.** The Company has a mechanism for enforcing the whistleblowing procedure as stated in the Whistleblowing System Guideline of PPRE of 2023.
Rekomendasi 23 Recommendation 23	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Public Company has a policy on long-term incentives granted to Board of Directors and employees.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Perusahaan dalam memberikan insentif penghasilan atas penghargaan kepada Direksi dan karyawan berdasarkan atas prosedur Perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan. **Fulfilled.** The Company provides income incentives as an award to the Board of Directors and employees based on the Company's procedures as stated in the Company Regulations.
Aspek 5: Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Transparency	
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8: Improving Information Transparency Implementation	
Rekomendasi 24 Recommendation 24	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company vastly takes benefits of information technology other than using the website as a media for information transparency.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Selain memanfaatkan situs web dalam keterbukaan informasi, Perusahaan juga menggunakan berbagai jenis media sosial. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi lain adalah dengan memanfaatkan sistem keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan situs web Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Perusahaan juga telah menyusun *roadmap* tentang jadwal pengembangan proyek-proyek berbasis teknologi informasi dalam kurun waktu 5 tahun, yang dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. **Fulfilled.** In addition to using the website for information disclosure, the Company also uses various types of social media. Another use of information technology is an information disclosure system integrated with the Indonesian Stock Exchange and Financial Services Authority's websites. The Company has also prepared a five-year roadmap for the information technology-based projects development from 2020 to 2024.
Rekomendasi 25 Recommendation 25	Laporan tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. The Public Company's annual report discloses the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership of at least 5%, in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership through the Major and Controlling Shareholders.
Status dan Penerapan Status and Implementation	**Terpenuhi.** Dalam laporan tahunan Perusahaan 2023 dan situs web, Perusahaan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dan mencantumkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih. **Fulfilled.** In the Company's 2023 annual report and website, the Company has disclosed the ultimate beneficial owner and listed share ownership of 5% or more.

ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Organs

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham Publik. Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan adalah PT PP (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 76,99%. Sementara 51,00% saham PT PP (Persero) Tbk dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, entitas pemilik akhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.

Hak Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi hak-hak Pemegang Saham, yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola (GCG *Code*) sehingga Pemegang Saham dapat menggunakan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun hak pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak menghadiri sebagai berikut:
   a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua;
   b. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Shareholder is a person or legal entity that legally owns one or more shares in the Company. The Company's shareholders consist of Major/Controlling Shareholders and Public Shareholders. Shareholders as capital owners have rights and responsibilities per the laws and regulations and the Company's Article Association.

The Major and Controlling Shareholder of PPRE is PT PP (Persero) Tbk, with a total share ownership of 76.99%. Meanwhile, 51.00% of PT PP (Persero) Tbk's shares are owned by the Indonesian Government. Thus, the ultimate owner entity of the Company is the Indonesian Government through the Ministry of SOE.

Shareholders Rights

The Company is committed to protecting Shareholders Rights regulated in the Company's Article Association and Corporate Governance Guidelines (GCG Code) so that the Shareholders can exercise their rights per the applicable regulations. The Shareholders have the following rights:

1. Shareholders, either alone or represented by a power of attorney, are entitled to attend the GMS.
2. Shareholders entitled to attend the GMS are shareholders whose names are recorded in the Company's shareholders register one working day before the GMS summons.
3. In the case of a second and third GMS, the terms for shareholders entitled to attend are as follows:
   a. For the second GMS, shareholders who are entitled to attend are the shareholders who are recorded in the Company's shareholders register one working day before the summon for the second GMS;
   b. For the third GMS, shareholders who are entitled to attend are shareholders recorded in the Company's shareholders register one working before the summon for the third GMS.
4. In the event of a re-summon, as referred to in paragraph 12 point (2) of this article, shareholders entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are recorded in the Company's shareholders register one working day before the GMS resummon.

5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
6. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
7. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
8. Dalam hal RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Perusahaan memberikan jaminan terhadap akses informasi yang setara kepada seluruh Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perusahaan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham Perusahaan antara lain:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perusahaan;
3. *Website* Perusahaan;
4. *Newsletter*;
5. *Company Update*;
6. *One on one meeting*/NDR *Meeting*;
7. *Analyst Meeting*;
8. *Press Release*;
9. Media Sosial;
10. *Public Expose*.

RUPS dan Jenis-jenisnya

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan/atau Direksi, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan minimal sekali dalam setahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan RUPS Lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang waktu penyelenggaraannya bisa terjadi di luar waktu RUPS Tahunan.

5. If the summons revision does not result in a repeated summon, as referred to in paragraph 12 point (2) of this article, shareholders who are entitled to attend follow the terms of shareholders as referred to in point (2).
6. If the GMS is held by Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 point (9) and Article 11 paragraph 12 point (13), the list of shareholders may be submitted by the securities administration bureau and the Central Securities Depository to the GMS organizer.
7. At the time of GMS implementation, shareholders are entitled to obtain information on the meeting agenda and its related materials as long as they do not conflict with the Company's interests.
8. In the case of GMS, each share gives the owner the right to cast one vote.

Information Access to Shareholders

The Company guarantees equal access to information to all Shareholders. Access owned by the Company to be easily reached by its Shareholders, among others, are:

1. The Audited Annual Financial Statements;
2. The Annual Report;
3. The Corporate Website;
4. Newsletters;
5. Company updates;
6. One-on-one meetings/NDR Meeting;
7. Analyst Meetings;
8. Press Releases;
9. Social Media;
10. Public Expose.

GMS Types

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the corporate governance structure. The GMS has rights and authority not given to the Board of Commissioners and Board of Directors within the limits specified in applicable laws and regulations and the Articles of Association. This authority includes holding Board of Commissioners and Board of Directors accountable concerning Company management, Articles of Association amendment, appointing and dismissing the Board of Commissioners and/or Board of Directors, deciding on the distribution of tasks and management authority among the Board of Directors, etc.

The GMS consists of an Annual GMS held at least once a year no later than six months after the end of the fiscal year. Meanwhile, the other GMS, i.e., the Extraordinary GMS, can be held outside the time of the Annual GMS.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2023

Di sepanjang tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu yaitu RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2023, dan RUPS Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023.

- **RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Februari 2023**

GMS Implementation in 2023

Throughout 2023, the Company held two Annual GMSs, namely an Extraordinary GMS held on February 23, 2023, and the 2022 fiscal year Annual GMS held on May 24, 2023.

- **Extraordinary GMS on February 23, 2023**

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Februari 2023
Extraordinary GMS Implementation on February 23, 2023

Hari/Tanggal Day/Date	:	Kamis, 23 Februari 2023 Thursday, February 23, 2023
Waktu Time	:	Pukul 09.30 s.d. selesai WIB 09.30 a.m. WIB until it's completed
Tempat Venue	:	Plaza PP, Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760 Plaza PP, First Floor Auditorium - Wisma Subiyanto Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Penghitung Suara Independen Independent Vote Counter	:	Biro Administrasi Efek (PT Datindo Entrycom) Share Registrar (PT Datindo Entrycom)

Tahapan pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

The stages of Extraordinary GMS implementation on February 23, 2023, are as follows:

Perihal Event	Pemenuhan Fulfilment
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS kepada Regulator GMS Implementation Notification to the Regulator	09 Januari 2023 January 9, 2023
Pengumuman RUPS GMS Announcement	17 Januari 2023 January 17, 2023
Pemanggilan RUPS GMS Summons	1 Februari 2023 February 1, 2023
Penyelenggaraan RUPS GMS Implementation	23 Februari 2023 February 23, 2023
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS GMS Minutes Submission Summary Announcement	27 Februari 2023, melalui situs web Perusahaan dan situs web Bursa Efek Indonesia February 27, 2023, via the Company's website and Indonesia Stock Exchange website
Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK GMS Minutes Submission to OJK	27 Maret 2023 March 27, 2023

RUPS Luar Biasa ini dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa nya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (*e-proxy*) melalui *online* eASY.KSEI sejumlah 8.471.123.304 saham atau sebesar 83,73% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

The Extraordinary GMS was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) via online eASY. KSEI totaling 8,471,123,304 shares or 83.73% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, taking into account the Shareholders Register per January 31, 2023, until 16.00 WIB.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa ini telah dituangkan melalui Akta Berita Acara RUPS No. 14 Tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

Adapun hasil keputusan RUPS Luar Biasa ini beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

The Extraordinary GMS Resolutions have been stated in the Deed of GMS Minutes No. 14 Dated February 23, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta.

The Extraordinary GMS resolutions, along with its implementation and follow-up by Company Management until the end of 2023, are as follows.

Mata Acara RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Februari 2023 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	Extraordinary GMS Agenda Resolutions on February 23, 2023, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Mata Acara 1: Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan. **Jumlah Penanya:** Tidak ada. **Hasil Penghitungan Suara:** Setuju = 8.471.112.204 saham atau 99,99% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. Abstain = 11.100 saham atau 0,01% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*. Tidak Setuju = Nihil. **Keputusan:** Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yaitu: 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perusahaan: • Sdr. Rebimun sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM; yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bulan April Tahun 2022, sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perusahaan; • Sdr. M Darwis Hamzah sebagai Direktur Operasi; yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bulan Oktober Tahun 2020, sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perusahaan. 2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Perusahaan: • Sdr. Yudi Setiawan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM; • Sdr. Rebimun sebagai Direktur Operasi. Dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	**Agenda 1:** Approval of Changes to Company Management Composition. **Total Questioner:** None. **Voting Results:** Agree = 8,471,112,204 shares or 99.99% of the total shares present at the Meeting. Abstain = 11,100 shares or 0.01% of the total shares present at the Meeting*. Disagree = Nil. **Resolutions:** Approve changes to the Company Management composition, namely: 1. Honorably dismiss the following names as Company management: • Rebimun as the Director of Business Planning & HCM; appointed per the Annual General Meeting of Shareholders Resolution in April 2022 since the Meeting conclusion with thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving as Company management; • M Darwis Hamzah as the Director of Operations; appointed per the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders in October 2020, since the Meeting conclusion with thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving as Company management. 2. Appoint the following names as Company management: • Yudi Setiawan as the Director of Business Planning & HCM; • Rebimun as the Director of Operations. With a term of office following the provisions of the Articles of Association, considering the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas maka susunan Pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama: Yul Ari Pramuraharjo
   Komisaris: Albert Simangunsong
   Komisaris Independen: Indra Jaya Rajagukguk
   Komisaris Independen: Nur Rochmad

   Direksi
   Direktur Utama: Rully Noviandar
   Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal: M Arif Iswahyudi
   Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM: Yudi Setiawan
   Direktur Operasi: Rebimun

4. Anggota pengurus Perusahaan yang menjabat sebagaimana disebutkan angka 3 di atas, dilarang merangkap jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

5. Memberikan kuasa dan wewenang Perusahaan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan perubahan susunan pengurus Perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Keputusan rapat telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Sejak rapat ditutup, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menyesuaikan dengan keputusan RUPS ini.

3. With the dismissal and appointment of members of the Company management as referred to above, the composition of the Company Management is as follows:

   Board of Commissioners
   President Commissioner: Yul Ari Pramuraharjo
   Commissioner: Albert Simangunsong
   Independent Commissioner: Indra Jaya Rajagukguk
   Independent Commissioner: Nur Rochmad

   Board of Directors
   President Director: Rully Noviandar
   Director of Finance, Risk Management, and Legal: M Arif Iswahyudi
   Director of Business Planning and HCM: Yudi Setiawan
   Director of Operations: Rebimun

4. Members of the Company management who hold positions as stated in point 3 above are prohibited from holding other positions prohibited by statutory regulations by holding concurrent positions as Board of Directors or Board of Commissioners members of State-Owned Enterprises. In such cases, the person must resign or be dismissed from that position.

5. Grant the Company's power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to declare in a separate Notarial deed and take all necessary actions related to changes to the Company management composition per the applicable laws and regulations, including notifying changes to the Company management composition to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per the applicable regulations.

Resolution Follow-Up:
The meeting resolutions have been institutionalized in this GMS deed. Since the meeting's conclusion, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors has been adjusted to this GMS resolution.

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
* Per the provisions of Article 47 of OJK Regulation no. 15/POJK.04/2020 on the Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

- **RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Tanggal 24 Mei 2023**
- **The 2022 Fiscal Year Annual GMS on May 24, 2023**

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Tanggal 24 Mei 2023
The 2022 Fiscal Year Annual GMS Implementation on May 24, 2023

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 24 Mei 2023 Wednesday, May 24, 2023
Waktu Time	:	Pukul 11.32 s.d. 13.35 WIB 11.32 a.m. to 1.35 p.m. WIB
Tempat Venue	:	Plaza PP, Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760 Plaza PP, First Floor Auditorium - Wisma Subiyanto Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Penghitung Suara Independen Independent Vote Counter	:	Biro Administrasi Efek (PT Datindo Entrycom) Share Registrar (PT Datindo Entrycom)

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

The stages of the 2022 fiscal year Annual GMS implementation are as follows:

Perihal Event	**Pemenuhan** Fulfilment
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS kepada Regulator GMS Implementation Notification to the Regulator	27 Maret 2023 March 27, 2023
Pengumuman RUPS GMS Announcement	3 April 2023 April 3, 2023
Pemanggilan RUPS GMS Summons	2 Mei 2023 May 2, 2023
Penyelenggaraan RUPS GMS Implementation	24 Mei 2023 May 24, 2023
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS GMS Minutes Submission Summary Announcement	26 Mei 2023, melalui situs web Perusahaan dan situs web Bursa Efek Indonesia May 26, 2023, via the Company's website and Indonesia Stock Exchange website
Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK GMS Minutes Submission to OJK	11 Desember 2023 December 11, 2023

RUPS Tahunan tahun buku 2022 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (*e-proxy*) melalui *online* eASY.KSEI sejumlah 8.643.163.038 saham atau sebesar 85,44% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

The 2022 fiscal year Annual GMS was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) via online eASY.KSEI totaling 8,643,163,038 shares or 85.44% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, taking into account the Shareholders Register per April 28, 2023, until 4.00 p.m. WIB.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 telah dituangkan melalui Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 40 Tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

The 2022 fiscal year Annual GMS Resolutions have been stated in the Deed of GMS Minutes No. 40 dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta.

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

The 2022 fiscal year Annual GMS resolutions, along with its implementation and follow-up by Company Management until the end of 2023, are as follows.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2022 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Kegiatan Perusahaan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan *Audited* Tahun Buku 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.	**Agenda 1:** Approval of the Company's Annual Report, including the Company Activity Report, Board of Commissioner's Supervisory Report for the 2022 fiscal year, and Ratification of the Company's Audited Financial Statements for December 31, 2022, Fiscal Year, as well as providing full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management and the Board of Commissioners for their supervisory actions which have been carried out in the 2022 Fiscal Year.
Jumlah Penanya/Penanggap: Tidak ada.	**Total Questioner:** None.
Hasil Penghitungan Suara: Setuju = 8.643.022.038 saham atau 99,9983687% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. Abstain = 141.000 saham atau 0,0016313% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*. Tidak Setuju = Nihil.	**Voting Results:** Agree = 8,643,022,038 shares or 99.9983687% of the total shares present at the Meeting. Abstain = 141,100 shares or 0.0016313% of the total shares present at the Meeting*. Disagree = Nil.
Keputusan: Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perusahaan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat di dalam laporannya No. 00037/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2023 Tanggal 7 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.	**Resolutions:** Approved the Company's Annual Report, including the Company Activity Report, Board of Commissioner's Supervisory Report, and ratified the Company's Audited Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2022, audited by Hertanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm (KAP) according to its report No. 00037/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2023 dated March 7, 2023, with a "Fair in all material respects) opinion, as well as providing full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out in the Fiscal Year ended on December 31, 2022, to the extent that such actions are not criminal acts and reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Keputusan mata acara 1 telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah diterbitkan pada tanggal 28 April 2023, sedangkan Laporan Keuangan *Audited* Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2023.	**Resolution Follow-Up:** The resolution for agenda item 1 has been institutionalized in this GMS deed. The Company's Annual Report for the 2022 fiscal year was published on April 28, 2023, while the Company's Audited Financial Statements for the 2022 fiscal year were published on March 7, 2023.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2022 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Mata Acara 2: Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022. **Jumlah Penanya/Penanggap:** Tidak ada. **Hasil Penghitungan Suara:** Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*. Tidak Setuju = Nihil. **Keputusan:** Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 sebesar Rp100.751.654.542,- yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai berikut: 1. Sebesar Rp5.037.582.727,- atau 5% dari Laba Bersih digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Sebesar Rp95.714.071.815,- atau 95% Saldo Laba Ditahan. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Keputusan mata acara 2 ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Di tahun 2023 Perusahaan tidak membagikan dividen saham sesuai keputusan RUPS ini.	**Agenda 2:** Approval of the appropriation of the Company's net profit for the fiscal year ended on December 31, 2022. **Total Questioner:** None. **Voting Results:** Agree = 8,643,021,738 shares or 99.9983652% of the total shares present at the Meeting. Abstain = 141,300 shares or 0.0016348% of the total shares present at the Meeting*. Disagree = Nil. **Resolutions:** Approved the stipulation of appropriation of the Net Profit for the 2022 Fiscal Year of Rp100,751,654,542.- attributable to owners of the Parent Entity as follows. 1. Rp5,037,582,727, or approximately 5% of Net Profit, is used as a Mandatory Reserve to fulfill Article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; 2. Rp95,714,071,815.- or 95% as Retained Earnings. **Resolution Follow-Up:** The resolution for agenda item 2 has been institutionalized in this GMS deed. The Company does not distribute share dividends according to this GMS resolution.
Mata Acara 3: Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2022, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2023. **Jumlah Penanya/Penanggap:** Tidak ada. **Hasil Penghitungan Suara:** Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat*. Tidak Setuju = Nihil. **Keputusan:** Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besarnya tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2022 serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Berdasarkan Arahan dari Pemegang Saham Mayoritas dan Surat Keputusan Direksi No. 188/SK/PPRE/DIR/VIII/2023 tanggal 27 Juli 2023 serta mengacu pada Arahan dari Pemegang Saham Mayoritas bahwa Tahun Buku 2022 tidak dilakukan pembagian tantiem bagi Dewan Komisaris & Direksi untuk tahun buku 2022, melainkan pemberian insentif bagi karyawan.	**Agenda 3:** Approval of Bonus for the 2021 Fiscal Year, Determination of Salary and/or Honorarium along with facilities and other benefits for Boards of Directors and Board of Commissioners members in 2023. **Total Questioner:** None. **Voting Results:** Agree = 8,643,021,738 shares or 99.9983652% of the total shares present at the Meeting. Abstain = 141,300 shares or 0.0016348% of the total shares present at the Meeting*. Disagree = Nil. **Resolutions:** Approved to give authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of bonus for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2022 Fiscal Year, as well as determine the honorarium along with other facilities and allowances for Board of Directors and Board of Commissioners members for 2022. **Resolution Follow-Up:** Based on Directives from the Majority Shareholders and Decree of the Board of Directors No. 188/SK/PPRE/DIR/VIII/2023 dated July 27, 2023, and refers to the Majority Shareholders directive that there will be no distribution of bonuses for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2022 fiscal year, but instead the provision of incentives for employees.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2022 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Mata Acara 4: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2023.	**Agenda 4:** Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for the 2023 fiscal year.
Jumlah Penanya/Penanggap: Tidak ada.	**Total Questioner:** None.
Hasil Penghitungan Suara: Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat* Tidak Setuju = Nihil.	**Voting Results:** Agree = 8,643,021,738 shares or 99.9983652% of the total shares present at the Meeting. Abstain = 141,300 shares or 0.0016348% of the total shares present at the Meeting*. Disagree = Nil.
Keputusan: 1. Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023; 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.	**Resolutions:** 1. Approved to appoint the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statement for the 2023 Fiscal Year and other periods within the 2023 Fiscal Year; 2. Delegating the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of fee for audit services, additional scope of work required, and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm; 3. Delegating the authority to the Board of Commissioners to determine a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan, for any reason, cannot complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statement for the 2023 Fiscal Year and other periods within the 2023 Fiscal Year, including determining the fee for audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Penetapan KAP Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 telah dilakukan melalui Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Penetapan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 telah dilakukan Dewan Komisaris melalui Persetujuan Besaran Honorarium Jasa Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 oleh Dewan Komisaris dengan mepertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit.	**Resolution Follow-Up:** The appointment of KAP Hertanto, Grace, Karunawan to carry out a general audit of the Company's Consolidated Financial Statement for the 2023 Fiscal Year and other periods within the 2023 Fiscal Year has been carried out through the Approval of the Annual General Meeting of Shareholders Resolution. The determination of the amount of compensation for audit services, additional scope of work required, and other reasonable requirements for KAP Hertanto, Grace, Karunawan, to carry out a general audit of the Company's Consolidated Financial Statement for the 2023 Fiscal Year and other periods within the 2023 Fiscal Year has been carried out by the Board of Commissioners through the Approved Amount of Public Accounting Services' Honorarium for Audit Services of the Company's Consolidated Financial Statement for the 2023 Fiscal Year, considering recommendations from the Audit Committee.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2022 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Mata Acara 5: Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. **Jumlah Penanya/Penanggap:** Tidak ada. **Hasil Penghitungan Suara:** Setuju = 8.643.022.038 saham atau 99,9983687% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. Abstain = 141.000 saham atau 0,0016313% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat* Tidak Setuju = Nihil. **Keputusan:** Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN: 1. No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; 3. No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Keputusan mata acara ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Telah diberlakukan pada Perusahaan.	**Agenda 5:** Confirmation to Implement the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises. **Total Questioner:** None. **Voting Results:** Agree = 8,643,022,038 shares or 99.9983687% of the total shares present at the Meeting. Abstain = 141,100 shares or 0.0016313% of the total shares present at the Meeting*. Disagree = Nil. **Resolutions:** Approved the confirmation to implement the Regulation of the Minister of SOE: 1. No. PER-1/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on the Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; 2. No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on the Governance and Significant Corporate Activities Guidelines for State-Owned Enterprises; 3. No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. along with their future changes. **Resolution Follow-Up:** The resolution for this agenda item has been institutionalized in this GMS deed. The regulations have been implemented in the Company.
Mata Acara 6: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan. **Jumlah Penanya/Penanggap:** Tidak ada. **Keputusan:** Karena sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Pelaporan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, Perusahaan telah melaporkan di dalam Rapat atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 1 Tahap 1 PT PP Presisi Tbk per tanggal 31 Desember 2022, kepada OJK melalui Surat No. 007/EXT/CS/PPRE/OJK-IDX/PPRE/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.	**Agenda 6:** Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds. **Total Questioner:** None. **Resolutions:** Because it is a report, there is no decision-making process. The reporting is carried out to comply with Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds, the Company has reported at the Meeting on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shelf-Registered Bonds 1 Phase 1 of PT PP Presisi Tbk per December 31, 2022, to the OJK via Letter No. 007/EXT/CS/PPRE/OJK-IDX/PPRE/I/2023 dated January 16, 2023.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2022 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Mata Acara 7: Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.	**Agenda 7:** Approval for Changes in Company Management.
Jumlah Penanya/Penanggap: Tidak ada.	**Total Questioner:** None.
Hasil Penghitungan Suara: Setuju = 8.643.021.738 saham atau mewakili 99,9983652% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat Abstain = 141.300 saham atau mewakili 0,0016348% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat* Tidak Setuju = Nihil.	**Voting Results:** Agree = 8,643,021,738 shares, representing 99.9983652% of the total shares present at the Meeting. Abstain = 141,300 shares, representing 0.0016348% of the total shares present at the Meeting*. Disagree = Nil.
Keputusan: Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yaitu: 1. Memberhentikan dengan hormat: • Sdr. Yul Ari Pramuraharjo sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 2 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Komisaris Utama sejak tanggal diundangkannya Permen No. 03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan ditetapkannya pemberhentian sementara Komisaris Utama Perusahaan pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat No. 182/EXT/PP/DU/2023; • Sdr. Nur Rochmad sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 22 tanggal 20 April 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. 2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr. Rully Noviandar sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 05 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. 3. Sehubungan dengan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 maka memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sehubungan dengan tindakan-tindakannya selama masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut telah diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Perusahaan secara akurat dan benar serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk dan peraturan perundang-undangan. 4. Menyetujui mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Perusahaan: • Sdr. Nur Rochmad sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen; • Sdr. Muhammad Zahid sebagai Komisaris; • Sdr. I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Utama. Dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	**Resolutions:** Approved Changes in the Company Management, as follows: 1. Honorably dismiss: • Yul Ari Pramuraharjo as the President Commissioner, who was appointed per Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk No. 2 dated June 9, 2021, by Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, and ratify all actions taken in connection with the implementation of his duties and authority as the President Commissioner since the date of promulgation of Ministerial Regulation No. 03/2023 on March 24, 2023, until the temporary dismissal of the President Commissioner determined on May 16, 2023, per Letter No. 182/EXT/PP/DU/2023; • Nur Rochmad as the Independent Commissioner, who was appointed per Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk No. 22 dated April 20, 2022, by Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta. 2. Approved to honorably dismiss Rully Noviandar as the President Director, who was appointed per the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT PP Presisi Tbk No. 05 dated June 3, 2020, by Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a Notary in Jakarta. 3. Due to the dismissal of the Board of Commissioners and Board of Directors referred to in points 1 and 2, they are granted full release and repayment (Acquit et de Charge) for the actions during their term of office as long as these actions have been disclosed in the Company's books and records in full, accurate, correct, and do not violate the provisions of the Articles of Association of PT PP Presisi Tbk and statutory regulations. 4. Approved to appoint the following name as the Company management: • Nur Rochmad as the President Commissioner and Independent Commissioner; • Muhammad Zahid as a Commissioner; • I Gede Upeksa Negara as the President Director. With a term of office following the provisions of the Articles of Association, taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the GMS's right to dismiss at any time.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2022 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
5. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 4 di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:	5. Pursuant with matters on points 1, 2, and 4 above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
Dewan Komisaris Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Nur Rochmad Komisaris: Albert Simangunsong Komisaris: Muhammad Zahid Komisaris Independen: Indra Jaya Rajagukguk	**Board of Commissioners** President Commissioner and Independent Commissioner: Nur Rochmad Commissioner: Albert Simangunsong Commissioner: Muhammad Zahid Independent Commissioner: Indra Jaya Rajagukguk
Direksi Direktur Utama: I Gede Upeksa Negara Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal: Mohammad Arif Iswahyudi Direktur Perencanaan Bisnis & HCM: Yudi Setiawan Direktur Operasi: Rebimun	**Board of Directors** President Director: I Gede Upeksa Negara Director of Finance, Risk Management & Legal: Mohammad Arif Iswahyudi Director of Business Planning & HCM: Yudi Setiawan Director of Operations: Rebimun
6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.	6. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed in point 4 are prohibited from holding other positions prohibited by statutory regulations by holding concurrent positions as Board of Commissioners or Board of Directors members of State-Owned Enterprises. In such cases, the person must resign or be dismissed from that position.
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan susunan Pengurus Perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan susunan pengurus Perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	7. Grant the Company's power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to declare in a separate Notarial deed and take all necessary actions related to changes to the Company management composition per the applicable laws and regulations, including notifying changes to the Company management composition to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per the applicable regulations.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Keputusan mata acara ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Per 31 Desember 2023 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menyesuaikan dengan keputusan RUPS ini.	**Resolution Follow-Up:** The resolution for this agenda item has been institutionalized in this GMS deed. As of December 31, 2023, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors has adjusted to this GMS resolution.

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
* Per the provisions of Article 47 of OJK Regulation no. 15/POJK.04/2020 on the Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 pada tanggal 20 April 2022.

2022 GMS Resolutions and the Follow-Ups

Throughout 2023, the Company held one GMS, namely the 2021 Fiscal Year Annual GMS held on April 20, 2022.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 20 April 2022
The 2021 Fiscal Year Annual GMS Implementation on April 20, 2022

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 20 April 2022 Wednesday, April 20, 2022
Waktu Time	:	Pukul 10.00 s.d. 11.30 WIB 10.00 a.m. to 11.30 a.m. WIB
Tempat Venue	:	Plaza PP, Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760 Plaza PP, First Floor Auditorium - Wisma Subiyanto Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Penghitung Suara Independen Independent Vote Counter	:	Biro Administrasi Efek (PT Datindo Entrycom) Share Registrar (PT Datindo Entrycom)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2021 telah dituangkan melalui Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 22 Tanggal 20 April 2022 yang dibuat di hadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta.

The 2021 fiscal year Annual GMS Resolutions have been stated in the Deed of GMS Minutes No. 22 dated April 20, 2022, made before Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta.

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2021 beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

The 2021 fiscal year Annual GMS resolutions, along with its implementation and follow-up by Company Management until the end of 2023, are as follows.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2021 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Keputusan Agenda 1: Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00023/2.1000/ AU.1/03/0632-2/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan.	**Agenda 1 Resolution:** Approved the 2021 Fiscal Year Anual Report, including the Board of Commissioners' supervisory report and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year audited by Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan per its report No. 00023/2.1000/ AU.1/03/0632-2/1/II/2022 dated February 18, 2022, as well as awarded a full release and discharge from liabilities (volledig acquit at de charge) to the Boards of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions performed during the fiscal year ended on December 31, 2021, to the extent that such actions are not criminal acts and reflected in the Company's report books.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Keputusan mata acara 1 telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2021 telah diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2022, sedangkan Laporan Keuangan *Audited* Perusahaan untuk tahun buku 2021 telah diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022.	**Resolution Follow-Up:** The resolution for agenda item 1 has been institutionalized in this GMS deed. The Company's Annual Report for the 2021 fiscal year was published on March 29, 2022, while the Audited Financial Statements for the 2021 fiscal year were published on February 18, 2022.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2021 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Keputusan Agenda 2: 1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan Tahun Buku 2021 sebesar Rp76.929.163.044,- sebagai berikut: • Sebesar Rp7.692.916.304,- atau sejumlah Rp0,76,- per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. • Sebesar Rp3.846.458.152,- atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Sisa sebesar Rp65.389.788.587,- atau 85% dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan. 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2021 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Keputusan mata acara 2 ini telah dilembagakan dalam akta RUPS ini. Perusahaan telah membagikan dividen dengan besaran sesuai hasil keputusan rapat ini pada tanggal 20 Mei 2022.	**Agenda 2 Resolution:** 1. Approved the stipulation of appropriation of net profit attributable to owners of the Parent Entity for the 2021 fiscal year in the amount of Rp76,929,163,044 as follows: • Rp7,692,916,304,- or amounted to Rp0.76,- per share distributed as a cash dividend to the shareholders. • Rp3,846,458,152,- or about 5% are used as a mandatory reserve in the context of fulfilling Article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. • The remaining Rp65,389,788,587,- or 85% are recorded as Retained Earnings. 2. Gave the authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors to determine the schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2021 Fiscal Year and to publish in the newspaper per the prevailing regulations. **Resolution Follow-Up:** The resolution for agenda item 2 has been institutionalized in this GMS deed. The Company has distributed dividends in the amount per the results of this meeting resolution on May 20, 2022.
Keputusan Agenda 3: Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk: 1. Menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022. 2. Menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2022. **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Dewan Komisaris mengeluarkan surat No. 110/EXT/KOM/PPRE/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Tantiem, Honorarium, Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima tantiem untuk kinerja tahun 2021. Selain itu untuk gaji/honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya dilimpahkan kepada Dewan Komsiaris atas rekomendasi dari PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas.	**Agenda 3 Resolution:** Approved to give authority and power to the Board of Commissioners to: 1. Determine the amount of bonus for the 2021 Fiscal Year, honorarium, as well as other facilities and allowances for Board of Commissioners members for 2022. 2. Determine the amount of bonus for the 2021 Fiscal Year, salary, along with other facilities and benefits for Board of Directors members for 2022. **Resolution Follow-Up:** The Board of Commissioners issued letter No. 110/EXT/KOM/PPRE/X/2022 dated October 17, 2022, on the Determination of Bonus, Honorarium, Salaries, Allowances, and Other Facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2022. Based on the letter, it is determined that the Board of Commissioners and Board of Directors did not receive bonuses for the 2021 performance. Apart from that, salaries/honorariums, as well as allowances and other facilities, are delegated to the Board of Commissioners based on recommendations from PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2021 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Keputusan Agenda 4: Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk: 1. Melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.	**Agenda 4 Resolution:** Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners with due regard to recommendations from the Audit Committee to: 1. Appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2022. 2. Determine the fee for audit services, additional scope of work required, and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm. 3. Determine a replacement Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year for any reason, including determining the fee for audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Berdasarkan RUPST Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, Evaluasi dan telaah terhadap kinerja KAP oleh Komite Audit Dewan Komisaris dan Surat Rekomendasi dari Pemegang Saham Mayoritas PT PP Persero Tbk Dewan Komisaris menyetujui untuk menunjuk kembali KAP HGK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022.	**Resolution Follow-Up:** Based on the 2022 AGMS on April 20, 2022, the evaluation and review of KAP's performance by the Audit Committee of the Board of Commissioners and the Letter of Recommendation from the Majority Shareholder of PT PP Persero Tbk, the Board of Commissioners approved to reappoint KAP HGK to audit the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.
Keputusan Agenda 5: 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020. 2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas. 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**Agenda 5 Resolution:** 1. Approved the amendment to the Company's Articles of Association, i.e., the adjustment for Article 3 on the Purpose and Objectives and the Main Business Activities of the Company to conform with the 2020 Indonesian Standard Business Classification (KBLI 2020) while considering the provisions of applicable laws and regulations and not changing the purposes, objectives, and the Company's business activities referred to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities (hereinafter as "POJK 17/2020"), thus not complying to POJK 17/2020. 2. Approved to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the changes referred to in point 1 of the resolution above. 3. Approved to provide the Board of Directors with authority or power with substitution rights to take all necessary actions related to the Meeting Agenda resolution, including restating the entire Articles of Association in a separate Notarial Deed, including requesting approval and/or announcing the amendment of the Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and take all necessary actions in this regard per the applicable laws and regulations.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 40 Tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.	**Resolution Follow-Up:** The Company has amended its articles of association as stated in Deed No. 40 dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta.

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2021 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
Keputusan Agenda 6: Karena sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Dalam rangka memenuhi Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum, telah melaporkan di dalam Rapat Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per tanggal 31 Desember 2020, yang telah dilaporkan melalui Surat Perusahaan No. 001/EXT/CS/PPRE/OJK-IDX/PPRE/I/2022 tanggal 12 Januari 2022.	**Agenda 6 Resolution:** Because it is a report, there is no decision-making process. To comply with the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Initial Public Offering, the Company has reported it in the Meeting on the Realization of the Use of Proceeds from Initial Public Offering as of December 31, 2020, that has been reported through the Company's Letter No. 001/EXT/CS/PPRE/OJK-IDX/ PPRE/I/2022 dated January 12, 2022.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Karena sifatnya laporan maka keputusan rapat ini tidak membutuhkan tindak lanjut.	**Resolution Follow-Up:** Because it is a report, this meeting resolution doesn't require a follow-up.
Keputusan Agenda 7: Menyetujui perubahan Pengurus Perusahaan yaitu: 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr. Sumardi sebagai Komisaris Independen Perusahaan yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT PP Presisi Tbk No. 4 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. 2. Menyetujui mengangkat Sdr. Albert Simangunsong sebagai Komisaris Perusahaan. 3. Menyetujui mengangkat Sdr. Nur Rochmad sebagai Komisaris Independen Perusahaan. 4. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan: • Sdr. Mhd. Wira Zukhrial sebagai Direktur Peralatan & SCM. • Sdr. Benny Pidakso sebagai Direktur Keuangan, HCM & Manajemen Risiko. yang diangkat masing-masing berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT PP Presisi Tbk No. 8 tanggal 7 Mei 20219 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT PP Presisi Tbk No. 7 tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. 5. Menyetujui mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perusahaan sebagai berikut: • Direktur Peralatan & SCM menjadi Direktur Perencanaan Bisnis & HCM. • Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & HCM sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal. 6. Menyetujui mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan: • Sdr. Rebimun sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM. • Sdr. Mohammad Arif Iswahyudi sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal. 7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas maka susunan Pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Komisaris Utama: Yul Ari Pramuraharjo Komisaris: Albert Simangunsong Komisaris Independen: Indra Jaya Rajagukguk Komisaris Independen: Nur Rochmad **Direksi** Direktur Utama: Rully Noviandar Direktur Perencanaan Bisnis & HCM: Rebimun Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & Legal: Mohammad Arif Iswahyudi Direktur Operasi: Muhammad Darwis Hamzah	**Agenda 7 Resolution:** Approve the following changes in the Company Management: 1. Approved to honorably dismiss Sumardi as the Independent Commissioner who was appointed per the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of Limited Liability Company of PT PP Presisi Tbk No. 4 dated July 1, 2021, made before Notary Fathiah Helmi, S.H. 2. Approved to appoint Albert Simangunsong as a Company Commissioner. 3. Approved to appoint Nur Rochmad as the Independent Commissioner. 4. Approved to honorably dismiss the following names as the Board of Directors members: • Mhd. Wira Zukhrial as the Director of Equipment & SCM. • Benny Pidakso as the Director of Finance, HCM & Risk Management. each appointed per the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of Limited Liability Company PT PP Presisi Tbk No. 8 dated May 7, 2019, made before Notary Fathiah Helmi, S.H. and the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders Resolutions of Limited Liability Company PT PP Presisi Tbk No. 7 dated February 7, 2017, made before Notary Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. 5. Approved to change the following position nomenclature of the Board of Directors: • The Director of Equipment & SCM to the Director of Business Planning & HCM. • The Director of Finance, Risk Management & HCM as the Director of Finance, Risk Management & Legal. 6. Approved the appointment of the following names as Board of Directors members: • Rebimun as the Director of Business Planning & HCM • Mohammad Arif Iswahyudi as the Director of Finance, Risk Management & Legal. 7. Per the dismissal and appointment of members of the Company management, the composition of the Company Management is as follows: **Board of Commissioners** President Commissioner: Yul Ari Pramuraharjo Commissioner: Albert Simangunsong Independent Commissioner: Indra Jaya Rajagukguk Independent Commissioner: Nur Rochmad **Board of Directors** President Director: Rully Noviandar Director of Business Planning & HCM: Rebimun Director of Finance, Risk Management & Legal: Mohammad Arif Iswahyudi Director of Operations: Muhammad Darwis Hamzah

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	The 2021 Fiscal Year Annual GMS Agenda Resolutions, along with the Meeting Resolution Follow-Up
8. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 2, 3, dan 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.	8. Board of Commissioners and Board of Directors members appointed in points 2, 3, and 6 and are still serving in other positions prohibited by laws and regulations to concurrently serve as the Board of Commissioners or Board of Directors in Subsidiaries of State-Owned Enterprises, the person must resign or be dismissed from the position.
9. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.	9. Approved to grant power of attorney with substitution rights to the Board of Directors to declare the Meeting resolution in a Notarial Deed to be made before a Notary or an authorized official and make necessary adjustments or improvements if required by the authority to implement the Meeting resolutions.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah mengikuti hasil keputusan rapat ini.	**Resolution Follow-Up:** The Board of Commissioners and Board of Directors composition has followed this meeting's resolutions.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ dalam perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan saran atau masukan secara umum dan/atau khusus kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman Dewan Komisaris

Perusahaan memiliki Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris yang ditujukan untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Pedoman tersebut telah efektif dan diperbarui pada 28 November 2023.

Kriteria Penentuan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kriteria untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a corporate organ with the duty to supervise and provide general and/ or specific advice or input to the Board of Directors following the Articles of Association. The Board of Commissioners' supervision includes supervision of the Board of Directors' policies in managing the Company and ensuring that the Company has implemented GCG principles. The Board of Commissioners' accountability to the GMS is a form of accountability for supervision over the Company's management in implementing GCG principles.

Board of Commissioners Manual

The Company has guidelines for the Board of Commissioners' duties implementation intended to provide direction for the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties. The guidelines have been effective and updated on November 28, 2023.

Board of Commissioners Selection Criteria

Under the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners, candidates for Board of Commissioners members must meet the following criteria to be appointed as the Board of Commissioners members:

1. Have good characters, morals, and integrity.
2. Proficient in performing legal actions.

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Komisaris Utama. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Adapun masa jabatan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) periode paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir apabila tidak lagi memenuhi kriteria dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2023

Di tahun 2023 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sejalan dengan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 24 Mei 2023. Berikut disampaikan kronologi susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2023 dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023.

3. Within five years prior to appointment and during their term of office:
   a. Have never been declared bankrupt.
   b. Have never been a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a company bankruptcy.
   c. Have never been convicted of committing a crime that caused losses to the State finances and/or crimes related to the financial sector.
   d. Have never been a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during their office:
      - Ever failed to hold an Annual GMS;
      - Their accountability report as a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners was denied by the GMS or did not submit their accountability report as a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS;
      - Ever caused a company that has obtained permit, approval, or registration from the Financial Services Authority for failing to fulfill the obligation of submitting an annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority.
4. Have the commitment to comply with the laws and regulations.
5. Have the skills and/or knowledge in fields required by the Company.

Board of Commissioners Composition and Term of Office

The Board of Commissioners composition must consist of at least two members, one of whom is appointed as the President Commissioner. If the Board of Commissioners consists of two members, the other will be an Independent Commissioner. One period of the Board of Commissioners' term of office is a maximum of five years while not reducing the right of GMS to dismiss the Board of Commissioners prior to the end of their term of office if they no longer fulfill the criteria by still taking into account the Articles of Association.

Board of Commissioners Structure and Composition in 2023

In 2023, there were changes in the Board of Commissioners composition following the resolutions of the 2022 fiscal year Annual GMS on May 24, 2023. The following is the chronology of changes in the Board of Commissioners composition as of December 31, 2023.

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2023

Chronology of Changes in the Board of Commissioners Composition in 2023

Periode 1 Januari s.d 24 Mei 2023 January 1 to May 24, 2023	Periode 24 Mei 2023 s.d 31 Desember 2023 May 24 to December 31, 2023	Keterangan Description
Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama) (President Commissioner)		Yul Ari Pramuraharjo diberhentikan dengan hormat dari jabatan Komisaris Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. Pemberhentian beliau dilakukan untuk memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN. Yul Ari Pramuraharjo was honorably dismissed as a President Commissioner since the 2022 Annual GMS on May 24, 2023. His dismissal was to enforce the provisions regarding concurrent positions as stated in the Regulation of the Minister of SOE.
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	-
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	-
Nur Rochmad (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023, Nur Rochmad diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Independen. Pada kesempatan yang sama, Nur Rochmad diangkat untuk menjabat Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. At the Annual GMS held on May 24, 2023, Nur Rochmad was dismissed from his position as an Independent Commissioner. Simultaneously, Nur Rochmad was appointed as the President Commissioner, concurrently as an Independent Commissioner.
	Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	Muhammad Zahid diangkat untuk menjabat Komisaris sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. Muhammad Zahid was appointed as a Commissioner since the 2022 Annual GMS on May 24, 2023.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023

Board of Commissioners Composition as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
Nur Rochmad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner	• Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. • Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. • Deed of Meeting Resolution Statement No. 41, dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta. • Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.	24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-2 Second
Indra Jaya Rajagukguk	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 18, dated October 19, 2020, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.	8 Oktober 2020 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 October 8, 2020, to the GMS which will be held in 2025	Ke-1 First

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
Albert Simangunsong	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.	20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 April 20, 2022, to the GMS which will be held in 2027	Ke-1 First
Muhammad Zahid	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 41, dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.	24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-1 First

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

All Board of Commissioners members' profiles are available in the Company Profile section of this Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, yakni:

1. Tugas Dewan Komisaris
   a. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi sebagai Dewan Komisaris secara profesional.
   b. Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
   c. Memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
   d. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
   e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatanganinya.
   f. Memastikan bahwa laporan tahunan Perusahaan dan laporan yang dibuat Direksi telah memenuhi standar pelaporan yang berlaku.
   g. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan melaporkan kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
   h. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
   i. Memberikan nasihat, saran dan pengawasan kepada Direksi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Board of Commissioners Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners duties and responsibilities are stipulated in the Board of Commissioners Manual, namely:

1. Duties of the Board of Commissioners
   a. Continuously improve their competence and knowledge to professionally carry out their functions as the Board of Commissioners.
   b. Approve the Company's development plan, Long-Term Plan, Annual Work Plan and Budget.
   c. Provide advice and suggestions to the Board of Directors for the Company's benefit following the Company's goals and objectives.
   d. Supervise the management of the Company by the Board of Directors.
   e. Inspect and review the annual report prepared by the Board of Directors and sign it.
   f. Ensure that the annual report and other reports prepared by the Board of Directors have complied with applicable reporting standards.
   g. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors following the Board of Commissioners' supervisory duties and report any issues deemed important for the Company management to the GMS.
   h. Follow the development of the Company's activities and immediately report to the GMS if the Company shows signs of a significant setback with suggestions on the necessary corrective steps.
   i. Provide advice, suggestions, and supervision to the Board of Directors to implement GCG principles.

j. Memberikan persetujuan atas usulan Direksi tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro Internal Audit.
k. Memantau efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal Perusahaan secara periodik.
l. Memantau efektivitas pelaksanaan tata kelola teknologi informasi Perusahaan secara periodik.
m. Melakukan koordinasi dan mengevaluasi akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS.
n. Melaksanakan proses penunjukan calon akuntan publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan.
o. Memastikan bahwa akuntan publik, Kepala Biro Internal Audit, Komite Audit, dan Komite lainnya memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dokumen-dokumen lainnya, dan informasi mengenai Perusahaan sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
p. Menentukan dan menyampaikan kepada Direksi tentang nominasi atas dasar aspirasi Pemegang Saham Mayoritas.
q. Melakukan tugas pengawasan lainnya dan tugas khusus yang ditentukan oleh RUPS.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
   a. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris kolektif kolegial.
   b. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.
   c. Bertanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris karena kesalahan dan kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi.
   d. Anggota Dewan Komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila Dewan Komisaris dapat membuktikan:
      - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
      - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang telah mengakibatkan kepailitan;
      - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kepailitan tersebut.

j. Approve the Board of Directors' recommendation on appointing and dismissing the Head of the Internal Audit Unit Bureau.
k. Periodically monitor the effectiveness of the internal control function.
l. Periodically monitor the effectiveness of information technology governance.
m. Coordinate and evaluate the public accountant who audits the Company's books to be submitted as a proposal to the GMS.
n. Carry out the appointment process for the public accountant candidate following the Company's provisions for goods and services procurement.
o. Ensure that the public accountant, Head of the Internal Audit Bureau, Audit Committee, and other Committees have access to accounting records, supporting data, other documents, and Company information as long as it is necessary to carry out their duties.
p. Determine and convey the nomination to the Board of Directors based on the Majority Shareholders' aspirations.
q. Perform other supervisory duties and special tasks determined by the GMS.

2. Responsibilities of the Board of Commissioners
   a. Every Board of Commissioners member cannot act individually but based on a collegial collective Board of Commissioners decision.
   b. Every Board of Commissioners member is personally responsible for any Company's loss if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties.
   c. Every Board of Commissioners member is jointly responsible for errors and negligence in supervising the Board of Directors.
   d. Board of Commissioners members are not responsible for losses if the Board of Commissioners can prove that they:
      - Have carried out supervision in good faith and prudence for the Company's benefit and following the Company's goals and objectives;
      - Have no personal interest, directly or indirectly, in the Board of Directors actions resulted in bankruptcy;
      - Have advised the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of the bankruptcy.

Wewenang Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, meliputi:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), kerja sama lisensi, bangun guna serah (*Build, Operate, and Transfer*/BOT), bangun serah guna (*Build, Transfer, and Operate*/BTO), bangun guna milik (*Build, Operate, and Own*/BOO), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
3. Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
4. Menetapkan struktur organisasi 1 tingkat di bawah Direksi;
5. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, Entitas Anak, dan Perusahaan Patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
6. Mendirikan Entitas Anak dan/atau Perusahaan Patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, Entitas Anak, dan Perusahaan Patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
7. Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, Entitas Anak, dan Perusahaan Patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
9. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Entitas Anak dan Perusahaan Patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
10. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
11. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;

Board of Commissioners Authority

Following the Articles of Association and the Board of Commissioners Manual, the Board of Commissioners is authorized to give approval to the Board of Directors in carrying out certain legal actions, including:

1. Release/transfer and/or pledge the Company's assets with a value exceeding a certain amount as determined by the Board of Commissioners, except for assets recorded as inventory, with due observance of the provisions in the capital market;
2. Cooperate with business entities or other parties by entering a Joint Operation (KSO), Business Cooperation (KSU), licensing cooperation, Build, Operate, and Transfer (BOT), Build, Transfer, and Operate (BTO), Build, Operate, and Own (BOO), and other agreements of the same nature whose term or value exceeds that stipulated by the Board of Commissioners;
3. Establish and change the Company's logo;
4. Establish an organizational structure one level below the Board of Directors;
5. Make capital investments with a certain value determined by the Board of Commissioners in other companies, Subsidiaries, and Joint Ventures not in the context of saving receivables by taking into account the capital market provisions;
6. Establish Subsidiaries and/or Joint Ventures with a certain value determined by the Board of Commissioners in other companies, Subsidiaries, and Joint Ventures by taking into account the capital market provisions;
7. Propose Company representative to become candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries who make significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the Board of Commissioners;
8. Release equity participation with a certain value determined by the Board of Commissioners in other companies, Subsidiaries, and Joint Ventures by taking into account the capital market provisions;
9. Perform a merger, consolidation, takeover, separation, and dissolvent of Subsidiaries and Joint Ventures with a certain value determined by the Board of Commissioners by taking into account the capital market provisions;
10. Bind the Company as guarantor (borg or avalist) with a certain value determined by the Board of Commissioners by taking into account the capital market provisions;
11. Receive medium/long term loans and give medium/long term loans with a certain value determined by the Board of Commissioners by taking into account the capital market provisions;

12. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada Entitas Anak cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
13. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
14. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
15. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.

Seluruh kewenangan Dewan Komisaris tersebut senantiasa memperhatikan peraturan perundangan dan Peraturan Perusahaan serta Pemegang Saham Mayoritas (apabila ada). Sementara itu, kewenangan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

12. Lend non-operational short/medium/long term loans, except for loans to Subsidiaries that only required a report to the Board of Commissioners;
13. Write off bad debts and dead inventories from the Company's books for any value exceeding the limit set by the Board of Commissioners;
14. Take actions included in material transactions as stipulated by capital market laws and regulations with a certain value determined by the Board of Commissioners, unless such actions are included in material transactions that are excluded by prevailing capital market laws and regulations;
15. Take actions not stipulated in the Company's Work Plan and Budget.

All Board of Commissioners authority must always pay attention to the laws and regulations as well as the Company and the Majority Shareholders' Regulations (if any). Meanwhile, other authorities are carried out following the provisions of applicable laws, regulations, and the Articles of Association.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Dewan Komisaris

Pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk. Berikut uraian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Division of Duties and Responsibilities of Every Board of Commissioners Member

The division of Board of Commissioners duties and responsibilities has been regulated in the Decree of the Board of Commissioners No. 006/SK/DEKOM/PPRE/2022, dated April 25, 2022, on the Division of Duties and Authorities for the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk. The following describes the division of the Board of Commissioners' duties and responsibilities.

Nur Rochmad **(Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)** (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	
• Koordinator Kegiatan Anggota Dewan Komisaris; • Kepatuhan dalam melaksanakan perundangan; • Penyelenggaraan hingga keputusan RUPST/RUPSLB; • Hubungan dengan Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya; • Kebijakan dan pelaksanaan Organisasi Perusahaan; • Kebijakan dan pelaksanaan bidang operasional Perusahaan; dan • Kebijakan dan pelaksanaan KPI Dewan Komisaris dan Direksi.	• Activity Coordinator for the Board of Commissioners Members; • Compliance in law implementation; • Implementation of AGMS/EGMS resolutions; • Relations with Shareholders and other stakeholders; • Company Organization policies and implementation; • Policies and implementation of the Company's operational areas; and • KPI policies and implementation for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Indra Jaya Rajagukguk **(Komisaris Independen)** (Independent Commissioner)	
• Kepatuhan dalam melaksanakan perundangan; • Kebijakan dan monitoring pelaksanaan GCG; • Kebijakan dan pelaksanaan KPI Dewan Komisaris dan Direksi; • Kebijakan dan pelaksanaan bidang CSR; • Monitoring pelaksanaan penerapan GCG aspek Dewan Komisaris; • Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan, remunerasi dan nominasi); dan • Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan Investasi/Aksi Korporasi.	• Compliance in law implementation; • GCG implementation policies and monitoring; • KPI policies and implementation for the Board of Commissioners and Board of Directors; • CSR policy and implementation; • Monitoring the GCG implementation on the Board of Commissioners aspects; • HR policies and management (development, remuneration, and nomination); and • Policy, implementation, and monitoring of Investment/Corporate Action approvals.

Albert Simangunsong **(Komisaris)** (Commissioner)	
• Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal); • Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; • Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT; • Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP; • Kebijakan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan peralatan; • Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan *supply chain* & ERP; • Kebijakan dan penerapan OSHE (Mutu, K-3 & Lingkungan), *Green Construction* dan Sertifikasi; dan • Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan Investasi/Aksi korporasi.	• Audit implementation (internal and external) policy and monitoring; • Risk Management policies and implementation; • Business and IT development policies and implementation; • Annual RKA and RJPP preparation policy and monitoring; • Equipment management implementation policy and monitoring; • Supply chain & ERP procurement policy and implementation; • OSHE (Quality, OHS, and the Environment), Green Construction, and Certification policies and implementation; and • Policy, implementation, and monitoring of Investment/ Corporate Action approvals.

Muhammad Zahid **(Komisaris)** (Commissioner)	
• Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal); • Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; • Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan); • Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT; • Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan *supply chain* & ERP; • Kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan Perusahaan; • Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP; dan • Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan Investasi/Aksi korporasi.	• Audit implementation (internal and external) policy and monitoring; • Risk Management policies and implementation; • HR policies and management (development); • Business and IT development policies and implementation; • Supply chain & ERP procurement policy and implementation; • Company financial policy and implementation; • Annual RKA and RJPP preparation policy and monitoring; • Policy, implementation, and monitoring of Investment/ Corporate Action approvals.

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris Baru

Perusahaan senantiasa memberikan program orientasi kepada semua anggota Dewan Komisaris yang baru dengan memberikan pemahaman mengenai peran, tugas dan tanggung jawab mereka, dan kepatuhan terhadap praktik dan kebijakan tata kelola perusahaan. Tanggung jawab pengadaan program tersebut berada pada Biro Corporate Secretary. Pelaksanaan pengenalan Perusahaan didokumentasikan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun metode pengenalan Perusahaan tersebut dapat berupa:

Onboarding Program for New Board of Commissioners

The Company organizes an onboarding program for new Board of Commissioners members by providing knowledge about their roles, duties and responsibilities, and compliance with corporate governance practices and policies. The responsibility for holding the program lies with the Corporate Secretary Bureau. The onboarding program implementation is documented and reported to the Board of Commissioners and Board of Directors. The methods for Company's onboarding can be in the form of:

Presentasi, Pertemuan, Diskusi, dan Sejenisnya Presentations, Meetings, Discussions, etc.	**Peninjauan Lapangan dan Lokasi Proyek** Field and Project Location Survey
Kunjungan ke kantor pusat, baik Divisi atau Biro maupun Entitas Anak Perusahaan. Visit to the Head Office, Division, Bureau, and Subsidiaries.	Pengkajian dokumen/program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan Perusahaan, Entitas Anak, serta proyek-proyek yang ditangani. Review other documents/programs deemed relevant to the Company and Subsidiary's needs, as well as projects being worked on.

Sementara materi untuk program pengenalan Perusahaan meliputi:

1. Gambaran singkat Perusahaan, antara lain mengenai Visi, Misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka Panjang;
2. Struktur organisasi, pejabat Direksi, dan manajer Perusahaan;
3. Posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;
4. Sistem tata kelola Perusahaan, kewenangan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, mekanisme kerja di antara ketiga organ tersebut serta kegiatan penyempurnaan sistem GCG yang dilakukan oleh Perusahaan;
5. Organ-organ pendukung pelaksanaan sistem tata kelola Perusahaan, seperti Komite Audit, Komite Kepatuhan, Sekretaris Dewan Komisaris, Biro Corporate Secretary, Biro Internal Audit dan akuntan publik;
6. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Di tahun 2023 terdapat pengangkatan Muhammad Zahid sebagai Komisaris. Pelaksanaan program orientasi dan pengenalan Perusahaan kepada beliau dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1 dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Kepatuhan dan Biro Corporate Secretary PPRE.

The materials for the Company's onboarding program are:

1. A brief description of the Company, e.g., the Company's Vision, Mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operation performance, strategies, as well as short and long-term business plans;
2. Organizational structure, Board of Directors members, and Company managers;
3. Competitive position, risks and other strategic issues;
4. Corporate governance system, GMS authority, Board of Commissioners and Board of Directors, working mechanism among the three organs and the Company's GCG system improvement activities;
5. Supporting organs for the corporate governance system implementation, such as the Audit Committee, Compliance Committee, Secretary to the Board of Commissioners, Corporate Secretary Bureau, Internal Audit Unit Bureau, and public accountants;
6. Board of Commissioners duties and responsibilities as well as prohibited matters.

In 2023, Muhammad Zahid was appointed as a Commissioner. The Company's orientation and onboarding program for him was carried out on June 20, 2023, in the Wisma Robinson Meeting Room, Floor 1 and attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Compliance Committee, and Corporate Secretary Bureau of PPRE.

Program Kerja dan Realisasi Tugas serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Di tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diwujudkan melalui program kerja sebagai berikut:

Work Program and Realization of Board of Commissioners Duties and Responsibilities

In 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities realized through the following work program:

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
1	Kebijakan Perusahaan	Monitoring, saran atas penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan: • Kepatuhan Manajemen terhadap peraturan yang berlaku. • Peraturan Internal/Kebijakan/SOP.	Monitoring pada kelengkapan data Aksi Korporasi yang diajukan. *Review* terhadap peraturan BUMN yang di tetapkan di tahun 2023, telah diselesaikan: • Pedoman Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang disahkan tanggal 25 Januari 2023. • Piagam Komite Kepatuhan tahun 2023 yang disahkan tanggal 26 September 2023. • Piagam Komite Audit tahun 2023 yang disahkan tanggal 26 September 2023. • Pedoman Pelaksanaan GCG PPRE tahun 2023 yang disahkan tanggal 27 Desember 2023. • Pedoman Kode Etik Perusahaan Tahun 2023. • Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PPRE
	Company Policy	Monitoring and suggestions on the implementation of regulations and laws that apply to the Company: • Management compliance with applicable regulations. • Internal Regulations/Policies/SOP.	Monitoring the completeness of submitted Corporate Action data. Review of SEO regulations set in 2023 and have been completed: • Guidelines for Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, approved on January 25, 2023. • Compliance Committee Charter for 2023, ratified on September 26, 2023. • Audit Committee Charter for 2023, ratified on September 26, 2023. • PPRE GCG Implementation Guidelines for 2023, ratified on December 27, 2023. • The 2023 Company Code of Conduct Guidelines. • Guidelines for PPRE Board of Commissioners Duty Implementation.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
2	Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pengendalian dan Kepatuhan Manajemen	a. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama/Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala 2 bulan sekali. » Evaluasi kinerja: - Pemasaran. - Operasional. - Akuntansi dan Keuangan. » Evaluasi kinerja investasi (yang disetujui) dan program strategis perusahaan. » Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Dewan Komisaris.	Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Koordinasi Direktur-Komisaris telah dilaksanakan berkala 2 bulan sekali dan setiap pembahasan Kinerja Triwulanan. Selama tahun 2022 rapat koordinasi dilaksanakan sebagai berikut: • Rapat Komisaris sebanyak 7 x • Rapat Gabungan sebanyak 9 x Persentase kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi tersebut = 100% Agenda Rapat Koordinasi sesuai dengan yang direncanakan oleh Dewan Komisaris.
		b. Memberikan persetujuan atas aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar	Persetujuan Dewan Komisaris diberikan berdasarkan Hasil Telaah Komite yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Telaah.
		c. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang usulan RKAP Dewan Komisaris tahun 2023.	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris 2024 disampaikan ke Perusahaan sesuai surat No. 145/EXT/ KOM/ PPRE/XI/2023 tanggal 3 November 2023 perihal: Penyerahan Program Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2024; dan Surat No. 143/EXT/KOM/PPRE/ IX/2023 tanggal 27 September 2023, perihal: Penyerahan Rencana Anggaran Biaya Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2024.
		d. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi, kepada PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas	Penetapan Remunerasi merupakan wewenang Pemegang Saham Mayoritas = PT PP (Persero) Tbk. BAR RUPT pada tahun 2023 - Mata Acara Ketiga Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2022 dan Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2023. Untuk Remunerasi Direski dan Dewan Komisaris Tahun 2022, menggunakan Keputusan dari PSM tahun 2023. Dewan Komisaris tidak memberikan usulan ke PSM. Meskipun demikian, sesuai surat dari Komisaris Utama kepada Komite, No. 054/INT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, perihal: Pembuatan Telaah Aksi Korporasi Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2023, yang mendasarkan pada surat dari PSM Direksi PT PP (Persero) Tbk No. 160/EXT/PP/DU/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2023. Hasil telaah dari Komite Audit dan Komite Kepatuhan, disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat No. 040/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal: Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2023.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
	Supervision and Directive of Management Control and Compliance	a. Carrying out Board of Commissioners Meetings and/or Joint Meetings with the Board of Directors periodically every two months. » Performance evaluation: - Marketing. - Operational. - Accounting and Finance. » Evaluation of (approved) investment performance and strategic company programs. » Other matters that require Board of Commissioners decisions.	Board of Commissioners meetings and Board of Directors-Board of Commissioners Coordination Meetings are held periodically every two months and every quarterly performance discussion. Throughout 2022, the following coordination meetings were held: • 7 x Board of Commissioners Meetings • 9 x Joint Meetings The percentage of attendance of the Board of Commissioners in the coordination meeting = 100% The agenda for the Coordination Meeting is as planned by the Board of Commissioners.
		b. Providing approval for corporate actions proposed by the Board of Directors following the Articles of Association	Approval from the Board of Commissioners is given based on the Committee Review Results, which are reported to the Board of Commissioners in the form of a Review Report.
		c. Submitting a written report regarding the Board of Commissioners' 2023 RKAP proposal.	The 2024 Board of Commissioners Work Plan and Budget was submitted to the Company per letter No. 145/EXT/ KOM/ PPRE/ XI/2023 dated November 3, 2023, on the Work Program Submission for the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk for 2024; and Letter No. 143/EXT/KOM/PPRE/ IX/2023, dated September 27, 2023, on the Budget Plan Submission for the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk for 2024.
		d. Proposing remuneration for the Board of Directors per the applicable regulations and the Board of Directors performance assessment to PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.	Remuneration Determination is the authority of the Majority Shareholder = PT PP (Persero) Tbk. AGMS BAR in 2023 - Third Agenda: Approval of Bonus Determination for 2022 and Determination of Salary and/or Honorarium along with other facilities and allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in 2023. Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners in 2022 follows the 2023 Majority Shareholders' Resolution. The Board of Commissioners did not provide proposals to the Majority Shareholder. However, according to the letter from the President Commissioner to the Committee, No. 054/INT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 2, 2023, on Preparation of a Corporate Action Review Determining Board of Directors' Salaries, Board of Commissioners' Honorarium and Allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023, which is based on a letter from PT PP (Persero) Tbk Board of Directors Majority Shareholders No. 160/EXT/PP/ DU/2023 dated July 21, 2023, on the Determination of the Board of Directors Salaries, Board of Commissioners' Honorarium and Allowances for the Board of Commissioners and Directors for 2023. The review results from the Audit Committee and Compliance Committee were submitted to the Board of Commissioners via letter No. 040/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2023 dated August 11, 2023, on the Report on the Review Results of the Audit Committee and Compliance Committee on Corporate Actions for Determining the Board of Directors Salaries, Honorarium for the Board of Commissioners and Allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
3	Manajemen Risiko	a. Menelaah kebijakan penerapan Sistem Manajemen Risiko (E-Risk)	Diskusi dengan Unit Manajemen Risiko dilaksanakan 8 Juni 2023, dan Telaah Kebijakan Manajemen Risiko sudah dilaporkan ke Komisaris Utama melalui surat No. 007/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal: Telaah Kebijakan Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk Tahun 2023.
		b. Monitoring, saran atas pelaksanaan manajemen risiko	Arahan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko telah disampaikan melalui surat sebagai berikut: • 016/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, perihal: Arahan terhadap Hasil Laporan Manajemen Triwulan IV 2022; dan • 110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, perihal: Arahan Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk Tahun 2023.
	Risk Management	a. Review the Risk Management System (E-Risk) implementation policy.	Held a discussion with the Risk Management Unit on June 8, 2023, and the Risk Management Policy Review was reported to the President Commissioner via letter No. 007/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 9, 2023, on the Review of PT PP Presisi Tbk Risk Management Policy for 2023.
		b. Risk management implementation monitoring and suggestions.	The Board of Commissioners directive on the Risk Management Implementation has been conveyed through the following letter: • 016/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 1, 2023, on the Directives for the Results of the 2022 Quarter IV Management Report; and • 110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023 dated July 27, 2023, on Directives for the Implementation of PT PP Presisi Tbk Risk Management Policy in 2023.
4	Sistem Teknologi Informasi	a. Menelaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi	• Dewan Komisaris mendisposisikan kepada Komite Audit untuk menelaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi dan dilaporkan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 012/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 10 April 2023, perihal: Review/Telaah Kebijakan Sistem Teknologi Informasi.
		b. Monitoring, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi	• Dewan Komisaris menyampaikan arahan melalui surat No. 041/EXT/KOM/PPRE/IV/2023 tanggal 11 April 2023, perihal: Arahan terhadap Kebijakan Sistem Teknologi Informasi. • Monitoring dan pemberian saran, juga dilaksanakan saat Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.
	Information Technology System	a. Review Information Technology System policies.	• The Board of Commissioners has directed the Audit Committee to review the Information Technology System policy and report it to the Board of Commissioners via letter No. 012/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated April 10, 2023, on the Information Technology System Policy Review.
		b. Monitoring and suggestions for Information Technology System implementation.	• The Board of Commissioners has provided directives through letter No. 041/EXT/KOM/PPRE/IV/2023 dated April 11, 2023, on the Directives for Information Technology System Policy. • Monitoring and advice provision was also conducted during the Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
5	Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	a. Menelaah kebijakan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan) di inlinekan dengan Program Kerja Divisi. b. Monitoring, saran atas penerapan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	• Dewan Komisaris mendisposisikan kepada Komite Audit untuk menelaah kebijakan QHSE dan dilaporkan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 28 Februari 2023, perihal: Review/Telaah Kebijakan Mutu/ QHSE PT PP Presisi Tbk. • Dewan Komisaris menyampaikan arahan melalui surat No. 018/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, perihal: Arahan terhadap Kebijakan Mutu (QSHE) PT PP Presisi Tbk • Monitoring dan pemberian saran, juga dilaksanakan saat Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. • Dewan Komisaris didampingi Komite Audit telah melakukan kunjungan Proyek: » Kunjungan Proyek Pembangunan Dermaga Logistik Pembangunan Ibukota Negara (IKN) pada tanggal 20 Maret 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Kualitas Proyek agar tetap terjaga. - Legalitas tanah agar dipastikan tidak ada masalah. - Narasi di kontrak addendum harus jelas. - Perihal QHSE jangan sampai ada kejadian *fatality*. - Agar Program CSR dapat dijalankan. » Kunjungan Proyek Tol Trans Sumatera Ruas Indrapura - Kisaran pada tanggal 18 Agustus 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Koordinasi dan komunikasi lebih baik dengan *Owner* (Divisi Infra-1/PP Group). - Monitoring dan Evaluasi Peralatan Berat untuk meningkatkan Produktivitas. - Justifikasi, Data Pendukung lainnya atas Addendum Kontrak dapat dipertanggungjawabkan secara legalitas. - Monitoring dan Evaluasi atas Sisa Waktu Pelaksanaan dengan segala Kendala dan Upaya. - Selalu *Update Profile* Risiko, Mitigasi dalam Pengelolaan Manajemen Risiko. - Pengelolaan, Perawatan atas Peralatan (Aset Perusahaan) di Proyek dan *Work Shop* sesuai dengan SOP yang berlaku. » Kunjungan Proyek Weda Bay Nickel *Project* pada tanggal 31 Agustus 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Implementasi QSHE sesuai *target Owner* dan Manajemen. - Implementasi Manajemen *Traffic* Transportasi di lingkungan kerja sesuai SOP dari *Owner*. - Monitoring dan Evaluasi atas Manajemen Peralatan (Produksi, *Maintenance* dan Jam Kerja Operator/Peralatan). - Peningkatan Produksi dan Percepatan nilai produksi untuk peningkatan *cash flow*. - Kelengkapan Data Pendukung Legalisasi Kontrak dan Addendum. - *Update* dan Monitoring atas *Profile* Risiko, Mitigasi dalam Pengelolaan Risiko.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
			» Kunjungan Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 14 September 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Keselamatan kerja prioritas utama untuk menunjang proses produksi. - Implementasi atas SOP *quality control* sebagai komitmen jaminan *quality* ke *customer*. - Tetap menjaga hubungan sosial dilingkungan kerja. - Selalu *update profile* risiko dan mitigasi dalam pengelolaan risiko. - Kunjungan proyek Quarry Vale dan IGP Mines of Bahadopi pada tanggal 28 November 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Implementasi QSHE harus sesuai target *owner* dan manajemen. - Kelengkapan data pendukung untuk legalitas kontrak dan *addendum* harus valid. - Percepatan produksi dan kualitas produksi untuk meningkatkan *cash flow* Perusahaan. - Manajemen peralatan berat, mulai monitoring produksi, *maintenance/service* untuk maksimalkan produksi alat berat yang ada. - Kualitas koordinasi dan komunikasi dengan *owner* (PP Group).
	QHSE (Quality, OHS, and Environment) Management	a. Review QSHE (Quality, OHS, and Environment) Management policies in line with the Division Work Program. b. QSHE (Quality, OHS, and Environment) Management implementation monitoring and suggestions.	• The Board of Commissioners has directed the Audit Committee to review the QHSE policy and report it to the Board of Commissioners via letter No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated February 28, 2023, on Quality/QHSE Policy Review of PT PP Presisi Tbk. • The Board of Commissioners has directed the Audit Committee to review the QHSE policy and report it to the Board of Commissioners via letter No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated February 28, 2023, on the Quality/QHSE Policy Review of PT PP Presisi Tbk. • The Board of Commissioners has provided directives through letter No. 018/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 1, 2023, on the Directives for Quality (QHSE) Policy of PT PP Presisi Tbk. • Monitoring and advice provision was also conducted during the Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors. • The Board of Commissioners, accompanied by the Audit Committee, has carried out Project visits: » The Logistics Pier Construction for National Capital City (IKN) Development Project Visit on March 20, 2023, with several directives, including: - To maintain project quality. - To ensure no problems regarding land legality. - Clear narrative in the addendum contract. - No fatality regarding QHSE. - To implement CSR Program. » Indrapura - Kisaran Section of the Trans Sumatra Toll Road Project Visit on August 18, 2023, with several directives, including: - Better coordination and communication with the Owner (Infra-1 Division/PP Group). - Monitoring and Evaluation of Heavy Equipment to increase Productivity. - To legally justify the Justification and other Supporting Data for the Contract Addendum. - To Monitor and Evaluate the Remaining Implementation Time with all Constraints and Efforts. - To always Update Risk Profile and Mitigation in Risk Management. - Management and maintenance of equipment (company assets) in projects and workshops per applicable SOPs.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
			» Weda Bay Nickel Project Visit on August 31, 2023, with several directives, including: - QSHE Implementation according to Owner and Management targets. - Transportation Traffic Management Implementation in the work environment according to the Owner's SOP. - Monitoring and Evaluation of Equipment Management (Production, Maintenance, and Operator/Equipment Working Hours). - Increased Production and Acceleration of production value to improve cash flow. - Complete Supporting Data for Contracts and Addendums Legalization. - Update and Monitor Risk Profiles, Mitigation in Risk Management. » Batang Integrated Industrial Area on September 14, 2023, with several directives, including: - Top Priority Work Safety to support the Production process. - Implementation of Quality Control SOPs as a Quality Guarantee commitment to Customers. - Maintain social relations in the work environment. - Always update the Risk Profile and Mitigation in risk management - Quarry Vale and IGP Mines of Bahadopi Project Visits on November 28, 2023, with several directives including: - QSHE implementation must follow the Owner and Management targets. - Complete supporting data for Contract Legality and Addendum must be valid. - Acceleration of production and production quality to generate Cash in to Management - Heavy Equipment Management, from Production Monitoring, Maintenance/Service to maximizing existing Heavy Equipment production. - Quality of coordination and communication with the Owner (PP Group).

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
6	Pengendalian & Kepatuhan: Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), *Whistle Blowing System* (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi	a. *Review* terhadap hasil pelaksanaan Auditor Internal (SPI)	Telah dilakukan telaah oleh Komite Audit dan dilaporkan ke Dewan Komisaris melalui surat Nomor: • 014/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 18 April 2023 perihal: Hasil *Review* Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2022. • 018/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 24 Juli 2023, perihal: Hasil *Review* Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan II Tahun 2022. • 026/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 25 Oktober 2023, perihal: Hasil *Review* Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan III Tahun 2022. Telah dilaksanakan *review* terhadap Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Perusahaan Tahun 2022, sesuai surat No. 004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 22 Februari 2023.
		b. Monitoring dan saran atas penerapan sistem pengendalian internal perusahaan (SPIP)	Sesuai surat arahan Dewan Komisaris No. 010/EXT/KOM/PPRE/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal: Arahan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Tahun 2022; Dewan Komisaris memberikan saran agar: • Adanya peningkatan dan pengembangan komponen lingkungan pengendalian. • Peningkatan kinerja pengendalian khususnya pada aspek SDM. • Direksi agar memonitor pelaksanaan rekomendasi tersebut diatas, sehingga pelaksanaan kegiatan proses pengendalian bisnis menjadi lebih baik. Evaluasi/telaah penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) tahun buku 2022 telah dilaksanakan dan disampaikan sesuai surat No. 004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 22 Februari 2023. Dewan Komisaris menyampaikan arahan sesuai surat No. 010/EXT/KOM/PPRE/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal: Arahan SPIP Tahun 2022
		c. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS	Laporan WBS disampaikan secara rutin melalui Laporan Kegiatan SPI Triwulanan dan selama tahun 2023 tidak ada laporan terkait WBS.
		d. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi	Kebijakan Gratifikasi berkaitan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan untuk mendukung penerapan SMAP, Dewan Komisaris telah menyampaikan Tinjauan Dewan Pengarah atas SMAP PPRE melalui surat No. 065/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 30 Mei 2023. Tahun 2023 tidak ada pelaporan terkait Gratifikasi dan WBS.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
	Control & Compliance: Supervision of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistleblowing System (WBS) and gratuity management system im-plementation	a. Review of the Internal Audi-tor (SPI) implementation results.	The Audit Committee has conducted a review and reported it to the Board of Commission-ers via letter number: • 014/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated April 18, 2023, on the SPI Activity Report Review Results for the First Quarter of 2022. • 018/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated July 24, 2023, on the SPI Activity Report Review Results for the Second Quarter of 2022. • 026/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated October 25, 2023, on the SPI Activity Re-port Review Results for the Third Quarter of 2022. The Company's 2022 Internal Control System Evaluation Results Report has been reviewed, per letter No. 004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated February 22, 2023.
		b. The Company's Internal Control System (SPIP) moni-toring and suggestions.	Per the Board of Commissioners' directive letter no. 010/EXT/KOM/PPRE/II/2023 dated February 22, 2023, on the Directives for Im-plementing the Company's Internal Control System in 2022; the Board of Commissioners suggested: • For the improvement and development of the Environment Control component. • Improvement in control performance, especially in the HC aspect. • The Board of Directors should monitor the implementation of the recommendations above, thus, the implementation of the business control process is better. Evaluation/review of the Company's Internal Control System (SPIP) implementation for the 2022 fiscal year has been completed and submitted per letter No. 004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated Febru-ary 22, 2023. The Board of Commissioners conveys direc-tives per letter No. 010/EXT/KOM/PPRE/II/2023 dated February 22, 2023, on SPIP Directives for 2022.
		c. Monitoring, suggestions, and follow-up on WBS re-port.	WBS reports are submitted regularly through the Quarterly SPI Activity Report, and there were no reports related to WBS in 2023.
		d. Monitoring, suggestions, and follow-up on gratuity reports.	The Gratuity Policy is related to the Anti-Bribery Management System. To support SMAP implementation, the Board of Commis-sioners has submitted a PPRE SMAP Steering Committee Review through letter No. 065/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 30, 2023. In 2023, there was no reporting related to Gratuity and WBS.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
7	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	a. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya.	Dewan Komisaris memberikan disposisi kepada Komite Audit untuk mengevaluasi atas Proses Bisnis khususnya pengadaan baik *threshold* penandatangan Kontrak dengan Vendor, dan sinkronisasi dengan Prosedur yang berlaku; dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sesuai surat No. 040/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Laporan Komite Audit atas *Review* terhadap Kebijakan Pengadaan, Mutu dan Pelayanan.
		b. Pengelolaan SDM meliputi Rekrutmen, Manajemen Karier, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai.	• Dewan Komisaris memberikan arahan terkait usulan perubahan Struktur Organisasi disampaikan dalam surat No. 026/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal: Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi BOD-1 PT PP Presisi Tbk. • Dewan Komisaris memberikan arahan terkait usulan perubahan Struktur Organisasi disampaikan dalam surat No. 056/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal: Persetujuan atas Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. • Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi, setelah melalui proses telaah Komite Audit bekerjasama dengan Komite Kepatuhan, melalui surat Dewan Komisaris memberikan arahan diantaranya terkait: » 033/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris ahs Usulan Perubahan Kepala Divisi 0perasi I. » 055/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal (SPI) PT PP Presisi Tbk. » 118/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. » 119/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment. » 130/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 perihal Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 1. » 131/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 2.
		c. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.	Dewan Komisaris mendisposisikan kepada Komite Audit untuk mengevaluasi Pedoman Akuntansi PPRE yang disampaikan Perusahaan di awal Desember 2022 sesuai surat No. 043/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 27 Desember 2023, dan Dewan Komisaris menyampaikan arahan melalui surat No. 193/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, perihal: Arahan Penyusunan Pedoman Akuntansi.
		d. Pengelolaan Entitas Anak.	Komite Kepatuhan telah melakukan Telaah terhadap Usulan Calon Komisaris Utama PT Lancarjaya Mandiri Abadi (PT LMA) dan dilaporkan ke Dewan Komisaris sesuai surat No. 021/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 11 Desember 2023. Arahan Dewan Komisaris terkait tersebut diatas disampaikan melalui surat No.178/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 pada 12 Desember 2023. Komite Kepatuhan hadir dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 28 Desember 2023, sesuai surat No. 186/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Undangan Rapat Kinerja PT Lancarjaya Mandiri Abadi selaku Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
	Policy Monitoring Implemen-tation	a. Procurement Policy and Implementation.	The Board of Commissioners provides a disposition to the Audit Committee to evaluate Business Processes, particularly procurement, on thresholds for signing Contracts with Vendors and synchronization with applicable Procedures. It was submitted to the Board of Commissioners per letter No.040/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated December 15, 2023, on the Results of the Audit Committee Report on the Procurement, Quality and Service Policies Review.
		b. HR Management, including Recruitment, Career Management, Promotion, Employee Transfer, and Demotion.	• The Board of Commissioners provides directives on the proposed changes to the Organizational Structure submitted in letter No. 026/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 15, 2023, on the Approval of Changes to the BOD-1 Organizational Structure of PT PP Presisi Tbk. • The Board of Commissioners provides directives on the proposed changes to the Organizational Structure submitted in letter No. 056/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 16, 2023, on the Approval of Changes to the Company's Organizational Structure. • In connection with changes to the Organizational Structure, after going through a review process by the Audit Committee in collaboration with the Compliance Committee, through a letter from the Board of Commissioners, the Board of Commissioners provided directives related to: » 033/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 30, 2023, on the Responses and Directives of the Board of Commissioners on the Proposal to Change the Head of Operations Division I. » 055/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 16, 2023, on the Approval of the Dismissal and Appointment of the Head of the Internal Supervisory Unit (SPI) Bureau of PT PP Presisi Tbk. » 118/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 14, 2023, on the Directives on Approval for the Appointment of the Corporate Secretary. » 119/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 14, 2023, on the Directives on Notification of Appointment of the Vice President of Equipment. » 130/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 30, 2023, on the Directives on Notification of Appointment of the Vice President of Operations 1. » 131/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 31, 2023, on the Directives on Notification of the Appointment of Vice President of Operations 2.
		c. Accounting Policies and Financial Statement Preparation.	The Board of Commissioners has directed the Audit Committee to evaluate the PPRE Accounting Guidelines submitted by the Company in early December 2022 per letter No. 043/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated December 27, 2023. The Board of Commissioners conveyed directives through letter No. 193/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 28, 2023, on the Directives for Preparing Accounting Guidelines.
		d. Subsidiaries Management.	The Compliance Committee has reviewed the proposed candidate for PT Lancarjaya Mandiri Abadi (PT LMA) President Commissioner and reported it to the Board of Commissioners per letter No. 021/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated December 11, 2023. The Board of Commissioners' directive regarding the matter was conveyed via letter No. 178/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 on December 12, 2023. The Compliance Committee was present at the Coordination Meeting on December 28, 2023, per letter No. 186/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 21, 2023, on the Invitation to the Performance Meeting of PT Lancarjaya Mandiri Abadi as a Subsidiary of PT PP Presisi Tbk.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
8	Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak	a. Telaah pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi.	Menjadi wewenang Pemegang Saham Mayoritas (PSM) sehingga Dewan Komisaris tidak melakukan pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi.
		b. Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.	Telah dilaksanakan, melalui Organ Dewan Komisaris dan hasil telaah Komite disampaikan melalui surat No. 020/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Penetapan Tantiem Tahun 2021 dan Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2022. Hal ini mengacu SK Direksi PT PP (Persero) Tbk no 107/SK/PP/DIR/ 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pemberian Insentif Untuk Pegawai Atas Kinerja Unit Tahun 2021.
	Remuneration, Nomination, and Succession of the Board of Directors, as well as the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries	a. Review the proposed Board of Directors remuneration and nominations.	It is the authority of the Majority Shareholder (PSM). Thus, the Board of Commissioners does not propose remuneration and nominations for the Board of Directors.
		b. The bonuses/performance incentives proposal considers the Board of Directors performance assessment (KPI) results and the Company's soundness level achievement.	It has been implemented through the Board of Commissioners. The results of the Committee's review were conveyed through letter No. 020/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2022 dated October 13, 2022, on the Report on the Audit Committee and Compliance Committee Review Results regarding Corporate Actions for Determining Bonus for 2021 and Determining Salaries and/or Honorarium along with other facilities and allowances for Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2022. This refers to the Decree of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk No. 107/SK/PP/DIR/ 2022 dated July 5, 2022, on Providing Incentives to Employees for Unit Performance in 2021.
9	Pengawasan Eksternal/KAP	Usulan Penunjukan KAP tahun buku 2023	Disampaikan Dewan Komisaris melalui surat No. 089/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, perihal: Penunjukan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2023 dan surat No. 096/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Persetujuan Besaran Honorarium Jasa Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2023.
		Evaluasi efektivitas kinerja KAP tahun buku 2022 dan *review* terhadap hasil pelaksanaan audit.	Evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit dan disampaikan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 011/INT/KA/DEKOM PPRE/2023 tanggal 7 April 2023; perihal: Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit Terhadap Kantor akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan ("KAP HGK") untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2022.
	External Monitoring/KAP	Proposed KAP Appointment for the 2023 fiscal year.	It was conveyed by the Board of Commissioners via letter No. 089/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 20, 2023, on Re-appointment of PT PP Presisi Tbk Public Accounting Firm (KAP) for the 2023 Fiscal Year and letter No. 096/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 27, 2023, on Approval of the Amount of Honorarium for Public Accounting Services for the Company's Financial Statements Audit Services in 2023.
		KAP performance effectiveness evaluation for the 2023 fiscal year and review of the audit implementation results.	Evaluation of the External Auditor performance is carried out by the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners via letter No. 011/INT/KA/DEKOM PPRE/2023 dated April 7, 2023, on the Results of the Audit Committee's Evaluation and Review of the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan ("KAP HGK") for the Fiscal Year Ending on December 31, 2022.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
10	GCG	a. Pelaksanaan *Self Assessment* penerapan GCG 2022;	*Assessment* penerapan GCG Tahun Buku 2022 telah dilaksanakan sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023 oleh Tim BPKP Perwakilan DKI Jakarta; *exit meeting* telah dilaksanakan pada 10 Maret 2023 dengan *score* 86,822 (Kategori sangat baik).
		b, *Review* Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG tahun buku 2022,	Telah dilaksanakan oleh Organ Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Komisaris Utama sesuai surat No. 008/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal: Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG PT PP Presisi Tbk Tahun buku 2022. Arahan Dewan Komisaris disampaikan ke Perusahaan melalui surat No. 087/EXT/KOM/PPRE/VI/ 2023 tanggal 19 Juni 2023.
		c. Monitoring saran atas penerapan prinsip-prinsip GCG, termasuk didalamnya pelaksanaan Tindak Lanjut AOI hasil *assessment/self.*	Monitoring pada kelengkapan data Aksi Korporasi yang diajukan. Monitoring Pelaksanaan AOI oleh Direksi dilaksanakan melalui Rapat Gabungan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi: Pembahasan Kinerja sd Triwulan III 2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang salah satu agendanya penyampaian Progres Pelaksanaan Rekomendasi *Assessment* penerapan GCG tahun 2022. *Progress* Tindak Lanjut AOI aspek Dewan Komisaris disampaikan Komite Kepatuhan kepada Komisaris Utama pada 30 Oktober 2023 melalui surat No. 015B/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dan *progress* Tindak Lanjut AOI aspek Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023 melalui surat No. 003/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 22 Januari 2024. Melaksanakan koordinasi dengan Manajemen dalam rangka persiapan *Self Assessment* Penerapan GCG tahun buku 2023, pada: • Dilaksanakan saat diskusi dengan Tim PPRE yang diwakli oleh Corporate Secretary dan Legal pada tanggal 22 Desember 2023 dengan agenda mengevaluasi draft Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PPRE tahun 2023 yang diajukan Perusahaan. • Juga dilaksanakan diskusi dengan SVP Internal Audit PPRE. • Sedangkan *progress* pelaksanaan TL AOI Hasil *Assessment* Penerapan GCG 2022 aspek Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023 disampaikan ke Perusahaan melalui surat No.013/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 22 Januari 2024.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
	GCG	a. Self-Assessment for the 2022 GCG implementation.	The GCG implementation assessment for the 2022 Fiscal Year was carried out from January 18, 2023, to March 10, 2023, by the DKI Jakarta Representative BPKP Team. The exit meeting was held on March 10, 2023, with a score of 86.822 (excellent category).
		b. Review the Self-Assessment Results Report on GCG Implementation for the 2022 fiscal year.	It has been implemented by the Board of Commissioners and reported to the President Commissioner per letter No. 008/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 12, 2023, on the Report on the Results of the GCG Implementation Assessment of PT PP Presisi Tbk for the 2022 fiscal year. The Board of Commissioners' directive was conveyed to the Company via letter No. 087/EXT/KOM/PPRE/VI/ 2023 dated June 19, 2023.
		c. Monitoring the GCG principles implementation, including the implementation of AOI follow-up on assessment/self-assessment results.	Monitoring the completeness of submitted Corporate Action data. Monitoring of the AOI Implementation by the Board of Directors was conducted through a Joint Meeting with the Board of Commissioners: Discussion of Performance up to the Third Quarter of 2023 on October 26, 2023. One of the agendas was the presentation of the Implementation Progress for the 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations. The progress of the AOI Follow-up on the Board of Commissioners aspect was conveyed by KK to the President Commissioner on October 30, 2023, via letter No. 015B/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 and the AOI Follow-up progress on the Board of Commissioners aspect on December 31, 2023, via letter No. 003/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 dated January 22, 2024. Carried out coordination with Management in preparation for the Self-Assessment of GCG Implementation in the 2023 fiscal year on: • Carried out during discussions with the PPRE Team represented by the Corporate Secretary and Legal on December 22, 2023, with the agenda of evaluating the PPRE Good Corporate Governance (GCG) 2023 draft Guidelines submitted by the Company. • Discussions were also held with the SVP Internal Audit of PPRE. • Meanwhile, the progress of implementing the TL AOI on the 2022 GCG Implementation Assessment results for the Board of Commissioners aspect per December 31, 2023, was conveyed to the Company via letter No.013/EXT/KOM/PPRE/2024, dated January 22, 2024.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
11	RUPST dan RUPSLB	Pendapat dan Tanggapan terhadap hal-hal yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB.	
		• RUPST: BA Pimpinan RUPST, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;	RUPST tahun buku 2022 dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengaasan Dewan Komisaris 2022 melalui surat No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2022 PT PP (Persero) Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
		• RUPSLB: BA Pimpinan RUPSLB	Tertuang sesuai dengan surat Dewan Komisaris No. 009/EXT/KOM/PPRE/II/2023 tanggal 20 Februari perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk tentang Penunjukan Ketua/Pimpinan Rapat dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Tahun Buku 2023.
	AGMS and EGMS	Opinions and Responses to matters discussed at the AGMS and EGMS.	
		• AGMS: Minutes of the AGMS Chairman, Board of Commissioners Supervisory Duty Report.	The AGMS for the 2022 fiscal year was held on May 24, 2023. Report on the Implementation of the 2022 Board of Commissioners Duties Coordination via letter No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 15, 2023, on the Board of Commissioners Responses and Suggestions on PT PP (Persero) Tbk Audited Financial Statement for the 2022 Fiscal Year and Report Submission on the Board of Commissioners Supervision Tasks and Performance Realization for the 2022 Fiscal Year.
		• EGMS: EGMS BA Chairman	Contained per the Board of Commissioners letter No. 009/EXT/KOM/PPRE/II/2023 dated February 20 on the Submission of the PT PP Presisi Tbk Board of Commissioners Minutes of the Meeting regarding the Appointment of the Meeting Chairman/Leader in the framework of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) for the 2023 Fiscal Year.

No.	**Kebijakan** Policy	**Program Kerja** Work Program	**Realisasi/Kegiatan** Realization/Activity
12	Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action* Investment, Business Development, and Corporate Action		Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kelengkapan dokumen, prosesnya, dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan atau *threshold* dari PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas. Persetujuan Dewan Komisaris atas Aksi Korporasi Tahun 2023, diantaranya: 1. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi BoD-1 PPRE (15 Maret 2023). 2. Arahan Terkait kekosongan Sekretaris Perusahaan (21 Maret 2023). 3. Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Kepala Divisi Operasi 1 (30 Maret 2023). 4. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan dari Perbankan (7 April 2023). 5. Persetujuan Perubahan/Penambahan Plafon Fasilitas Kredit dari Lembaga Pembiayaan (11 April 2023). 6. Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal (SPI) PPRE (16 Mei 2023). 7. Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Komisaris Utama PPRE dan Pengangkatan Plt. Komisaris Utama PPRE (16 Mei 2023). 8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Fasilitas Kredit Perbankan (29 Mei 2023). 9. Penegasan Kelanjutan atau Pembubaran atas Anak Perusahaan PPRE yaitu PT Presisi Sumber Anugerah (“PT PSA”) (13 Juni 2023). 10. Pemberian Arahan terkait Permohonan Perubahan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan dalam aksi Korporasi PT Lancarjaya Mandiri Abadi (5 Agustus 2023). 11. Pemberian Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (14 Agustus 2023). 12. Pemberian Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment (14 Agustus 2023). 13. Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris Dan Tunjangan Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi Untuk Tahun 2023 (18 Agustus 2023). 14. Pemberian Arahan terkait Persetujuan Perolehan Fasilitas Tambahan Baru Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas *Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada Perbankan (23 Agustus 2023). 15. Pemberian Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 1 (30 Agustus 2023). 16. Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 2 (31 Agustus 2023). 17. Persetujuan Izin Untuk Menghadiri Undangan dari PT United Tracktors Tbk (15 September 2023). 18. Penegasan Persetujuan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas *Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada Perbankan (27 September 2023). 19. Pemberian Arahan terkait Permohonan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Aset Manajemen dalam Prosedur Sistem Aset Manajemen (SMA) PPRE (17 Oktober 2023). 20. Persetujuan untuk bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PPRE (19 Oktober 2023).

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
			21. Pemberian Arahan atas Permintaan Persetujuan Usulan Calon Komisaris Utama PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) (12 Desember 2023). 22. Pemberian Arahan Pencapaian KPI Korporat Triwulan III Tahun 2023 (15 Desember 2023). 23. Pemberian Arahan atas Pedoman Kebijakan mengenai Hak dan Kewajiban terhadap Kreditur dan Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PPRE Tahun 2023 (26 Desember 2023). 24. Pemberian Persetujuan untuk bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PPRE Tahun 2023 (28 Desember 2023). Provide approval, recommendation, and directives for Investment, Business Development, and Corporate Action plans under the authority limits granted by the Articles of Association and/or threshold of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder. The Board of Commissioners approval for Corporate Actions in 2023, including: 1. Approval of Changes to the BOD-1 Organizational Structure of PT PP Presisi Tbk (March 15, 2023). 2. Directives on the Vacant Company Secretary Post (March 21, 2023). 3. Board of Commissioners Response and Directive on the Proposed Change to the Division Head of Operations 1 (March 30, 2023). 4. Approval to Extend the Period of Standby Loan Construction Working Capital Credit Facility from Banks (April 7, 2023). 5. Approval of Changes/Additions to the Credit Facility Limit from the Financial Institution (April 11, 2023). 6. Approval of the Dismissal and Appointment of the Head of the SPI Bureau (May 16, 2023). 7. Notification of Temporary Dismissal of PPRE President Commissioner and Appointment of Acting PPRE President Commissioner (May 16, 2023). 8. Approval of Time Extension of Banking Credit Facility (May 29, 2023). 9. Confirmation of the Continuation or Dissolution of PPRE's Subsidiary, i.e., PT Presisi Sumber Anugerah ("PT PSA") (June 13, 2023). 10. Directives on Requests for Changes to Authority Limits and/or Criteria in PT Lancarjaya Mandiri Abadi Corporate Actions (August 5, 2023). 11. Directives for Approval of the Corporate Secretary Appointment (August 14, 2023). 12. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Equipment (August 14, 2023). 13. Determination of Board of Directors' Salaries, Board of Commissioners' Honorarium, and Allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023 (August 18, 2023). 14. Directives for Approving New Additional Facilities, Transactional Working Capital Credit Facilities, and Extensions of the Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility in Banking (August 23, 2023).

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
			15. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Operations 1 (August 30, 2023). 16. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Operations 2 (August 31, 2023). 17. Approval of Permission to Attend the Invitation from PT United Tractors Tbk (September 15, 2023). 18. Confirmation of Approval to Extend the Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility in Banking (September 27, 2023). 19. Directives on the Application for Signing the Asset Management Commitment Declaration in the Asset Management System (SMA) Procedure of PT PP Presisi Tbk (October 17, 2023). 20. Approval to jointly sign the Code of Conduct Guidelines of PT PP Presisi Tbk with the Board of Directors (October 19, 2023). 21. Directives for Approval of the Proposed President Commissioner Candidate of PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) (December 12, 2023). 22. Directives for KPI Achievement in the Third Quarter of 2023 (December 15, 2023). 23. Directives for Policy Guidelines on the Rights and Obligations of Creditors and Management of the Long-Term Loans Use of PT PP Presisi Tbk in 2023 (December 26, 2023). 24. Approval to jointly sign the 2023 PPRE Good Corporate Governance (GCG) Guidelines (December 28, 2023).
13	Penyusunan RKA Tahunan 2023 dan RJPP	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKA tahunan 2023 dan *Review* RJPP; a. Pandangan dan Masukan Dewan Komisaris terkait Penyusunan RKA Tahunan 2023 & RJPP b. Pembahasan BOD dan BOC atas Rancangan RKA Tahunan 2023 & RJPP c. Pengesahan RKA Tahunan 2023 & RJPP	 Arahan Dewan Komisaris sesuai surat No. 144/ EXT/KOM/ PPRE/ IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Penyusunan RKAP dan KPI. Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris atas Draft RKAP sesuai dengan surat No. 148/EXT/KOM/PPRE/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023. • Korporat 2024: mengacu kepada surat OC SCM PP No. 230/EXT/ PP/OC SCM/2023 perihal Penyusunan RKAP/K Tahun 2024 Anak Perusahaan PTPP, • Telaah *draft* RKAP 2024 dilakukan oleh Komite Audit; dan • Dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 26 Oktober 2023 Pengesahan RKAP Tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024.
	2023 Annual RKA and RJPP Preparation	Suggestions and Approval on the 2023 annual RKA and RJPP Review preparation: a. Views and input from the Board of Commissioners on the 2023 Annual RKA & RJPP preparation. b. Board of Directors and Board of Commissioners Discussion on the 2025 Annual RKA & RJPP Draft. c. The 2023 Annual RKA & RJPP Ratification.	The Board of Commissioners directives per letter No. 144/EXT/ KOM/PPRE/IX/2023 dated September 27, 2023, on RKAP and KPI preparation. The Board of Commissioners Responses and Directives on the RKAP Draft per letter No. 148/EXT/KOM/PPRE/X/2023 dated October 6, 2023. • 2024 Corporate: referring to the PP OC SCM letter No. 230/ EXT/PP/OC SCM/2023 on 2024 RKAP/K Preparation for PTPP Subsidiaries, • The 2024 RKAP draft review carried out by the Audit Committee; and • Discussed at the Coordination Meeting with the Board of Commissioners and Board of Directors on October 26, 2023 The 2024 RKAP ratification was carried out on January 3, 2024.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
14	Laporan Manajemen	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Pemegang Saham Mayoritas	Telah terealisasi penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I 2023 kepada PSM melalui surat No. 092/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 pada tanggal 22 Juni 2023, perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja Triwulan II 2023 disampaikan kepada PSM melalui surat No. 136/EXT/KOM/ PPRE/IX/2023 tanggal 14 September 2023. Laporan Kinerja Triwulan III 2023 disampaikan kepada PSM melalui surat No. 179/EXT/KOM/ PPRE/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. Laporan Kinerja Tahun 2023 *Audited*, akan disampaikan bersamaan penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 sebelum RUPST tahun buku 2023 dilaksanakan.
		b. Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan.	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Tahun Buku 2022 telah disampaikan ke PT PP (Persero) Tbk melalui surat No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2022 PT PP Presisi Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Tahun Buku 2023 disampaikan bersamaan dengan Evaluasi Kinerja tahun 2023 (*Audited*), akan dilaporkan ke PT PP (Persero) Tbk - PSM; sebelum pelaksanaan RUPST tahun buku 2023 pada tahun 2024.
		c. Persetujuan Laporan Tahunan (*Annual Report*)	• Data terkait Dewan Komisaris untuk *Annual Report* Tahun 2022, telah disampaikan ke Tim Penyusunan *Annual Report* tahun buku 2022. • Telah terealisasi mereviu draft *Annual Report* tahun buku 2022. • *Annual Report* tahun buku 2022 telah selesai dan sudah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 28 April 2023. • *Annual Report* tahun buku 2023 masih dalam proses penyusunan.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
	Management Report	a. Quarterly Performance Reports Preparation to the Majority Shareholders.	The 2023 Quarter I Performance Report submission to PSM has been realized via letter No 092/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 22, 2023, on the Supervision Task Report of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk for the First Quarter of 2023. The 2023 Quarter II Performance Report was submitted to PSM via letter No. 136/EXT/KOM/PPRE/IX/2023 dated September 14, 2023. The 2023 Quarter III Performance Report was submitted to PSM via letter No. 179/EXT/KOM/ PPRE/XII/2023 dated December 13, 2023. The 2023 Audited Performance Report will be presented with the 2023 Board of Commissioners Supervisory Task Report before the 2023 AGMS is held.
		b. Annual Board of Commissioners Supervisory Duty Report Preparation.	The Annual Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the 2022 Fiscal Year has been submitted to PT PP (Persero) Tbk via letter No. 054/EXT/ KOM/PPRE/V/2023 dated May 15, 2023, on the Board of Commissioners Responses and Suggestions regarding the Audited Financial Statement for the 2022 Fiscal Year of PT PP (Persero) Tbk and the Board of Commissioners Supervision Tasks Report Submission and Performance Realization for the 2022 Fiscal Year. The Board of Commissioners 2023 Fiscal Year Annual Supervisory Task Report is submitted with the 2023 Performance Evaluation (Audited) and will be reported to PT PP (Persero) Tbk - PSM; before holding the AGMS for the 2023 fiscal year in 2024.
		c. Annual Report Approval.	• Data related to the Board of Commissioners for the 2022 Annual Report has been submitted to the 2022 Annual Report Preparation Team. • The 2022 Annual Report draft has been reviewed. • The 2022 Annual Report has been completed and signed by the Board of Commissioners on April 28, 2023. • The 2023 Annual Report is still being prepared.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
15	Pengembangan Dewan Komisaris	Seminar, *workshop* atau sebagai nara sumber	Telah dilaksanakan dengan realisasi pengembangan Dewan Komisaris, sebagai berikut: a. *CG Methodology and Environmental and Social Management System* - Kementerian BUMN, yang dihadiri oleh: » Bpk Nur Rochmad. » Bpk Indra Jaya Rajagukguk. » Bpk Muhammad Zahid. » Bpk Albert Simangunsong. b. *GRC Integrated Information for Supervisory Board* - Kementerian BUMN, yang dihadiri oleh: » Bpk Nur Rochmad. » Bpk Muhammad Zahid. » Bpk Albert Simangunsong. Program pengenalan Dewan Komisaris Baru hasil RUPS tanggal 24 Mei 2023. Telah terealisasi pada tanggal 20 Juni 2023, sesuai surat Dewan Komisaris No. 1109 /EXT/DIR/PPRE/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023, perihal: Jadwal Pengenalan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Baru PT PP Presisi Tbk.
	Board of Commissioners Development	Seminar, workshop, or as a guest speaker	The Board of Commissioners' development has been implemented as follows: a. CG Methodology and Environmental and Social Management System - Ministry of SOE, attended by: » Mr Nur Rochmad. » Mr. Indra Jaya Rajagukguk. » Mr Muhammad Zahid. » Mr Albert Simangunsong. b. GRC Integrated Information for Supervisory Board - Ministry of SOE, attended by: » Mr Nur Rochmad. » Mr Muhammad Zahid. » Mr Albert Simangunsong. The onboarding program for the New Board of Commissioners was based on the resolution of the GMS on May 24, 2023. It was realized on June 20, 2023, per the letter of Board of Commissioners No. 1109/EXT/DIR/PPRE/VI/2023 dated June 9, 2023, on the Schedule for Onboarding New Members of the Board of Commissioners and Board Directors of PT PP Presisi Tbk.
16	Tindak lanjut hasil keputusan, dan arahan Dewan Komisaris	Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi/arahan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris bersama dengan Organ Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Manajemen/Perusahaan, berdasarkan Minit Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, secara rutin telah dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
	Follow up on the Board of Com-missioners decisions and directives	Monitoring the follow-up to the Board of Commissioners decisions, recommendations/directives	The Board of Commissioners and its Organs coordinate with the Management/Company based on the Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meetings routinely held by the Secretary to the Board of Commissioners.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
17	Evaluasi Kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris	Evaluasi Laporan kegiatan Komite Audit dan Komite Kepatuhan dengan periode:	
		• Tahunan	• Laporan Komite Kepatuhan Tahun 2022 telah disampaikan sesuai dengan surat No. 004/INT/KK/DEKOMPPRE/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja Komite Kepatuhan Tahun 2022. • Laporan Komite Audit Tahun 2022 telah disampaikan sesuai dengan surat No. 007/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Audit PT PP Presisi Tbk Tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja Komite Audit Tahun 2022.
		• Semesteran tahun 2023	• Laporan Kegiatan Komite Kepatuhan Triwulan I tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 005/INT/KK/DEKOMPPRE/2023 pada tanggal 28 April 2023, perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Triwulan I Tahun 2023; • Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan I tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 016/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan I 2023; • Laporan Kegiatan Komite Kepatuhan Triwulan II tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 011/INT/KK/DEKOMPPRE/2023 pada tanggal 26 Juli 2023 perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Triwulan II Tahun 2023. • Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan II tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 021/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal: Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan II 2023; • Laporan Kegiatan Komite Kepatuhan Triwulan III tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 016/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 pada tanggal 6 November 2023 perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Triwulan III Tahun 2023. • Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan III tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 038/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal: Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan III 2023.
		• Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 baik secara Kolegial maupun Penilaian Dewan Komisaris Individu (*self assessment*), termasuk Penilaian Kinerja Komite Audit dan Komite Kepatuhan akan dibahas oleh Dewan Komisaris di Triwulan I 2024 saat Rakom bulan April 2024, serta akan dilaporkan dalam Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 yang disampaikan ke PSM sebelum RUPST 2023.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Realisasi/Kegiatan Realization/Activity
	Performance Evaluation of Committees under the Board of Commissioners	Evaluation of Audit Committee and Compliance Committee activity reports for the following periods: • Annually	• The 2022 Compliance Committee Report has been submitted per letter No. 004/INT/ KK/DEKOMPPRE/2023 dated March 2, 2023, on the 2022 PT PP Presisi Tbk Compliance Committee Work Plan Implementation Report Submission and the Compliance Committee Performance Evaluation for 2022. • The 2022 Audit Committee Report has been submitted per letter No. 007/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated March 3, 2023, on the 2022 PT PP Presisi Tbk Audit Work Plan Implementation Report Submission and the Audit Committee Performance Evaluation for 2022.
		• Semester 2023	• The Compliance Committee Activity Report for the First Quarter of 2023 was submitted via letter No. 005/INT/KK/DEKOMPPRE/2023 dated April 28, 2023, on PT PP Presisi Tbk Compliance Committee Work Plan Implementation Report Submission for the First Quarter of 2023. • The Audit Committee Activity Report for the First Quarter of 2023 was submitted via letter No. 016/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated May 22, 2023, on the Audit Committee Work Program Realization Report for the First Quarter of 2023. • The Compliance Committee Activity Report for the Second Quarter of 2023 was submitted via letter No. 011/INT/KK/DEKOMPPRE/2023 dated July 26, 2023, on the PT PP Presisi Tbk Compliance Committee Work Plan Implementation Report Submission for the Second Quarter of 2023. • The Audit Committee Activity Report for the Second Quarter of 2023 was submitted via letter No. 021/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated August 8, 2023, on the Audit Committee Work Program Realization Report for the Second Quarter of 2023. • The Compliance Committee Activity Report for the Third Quarter of 2023 was submitted via letter No. 016/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated November 6, 2023, on the PT PP Presisi Tbk Compliance Committee Work Plan Implementation Report Submission for the Third Quarter of 2023. • The Audit Committee Activity Report for the Third Quarter of 2023 was submitted via letter No. 038/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated December 12, 2023, on the Audit Committee Work Program Realization Report for the Third Quarter of 2023.
		• Performance Evaluation	Evaluation of the Board of Commissioners Performance for the 2023 Fiscal Year, i.e., collegial and individual assessment of the Board of Commissioners (self-assessment), including the Audit Committee and Compliance Committee Performance Assessment, will be discussed by the Board of Commissioners in the First Quarter of 2024 during the Board of Commissioners meeting in April 2024 and will be reported in the Report of the Board of Commissioners Supervision Task Implementation for the 2023 Fiscal Year which will be submitted to the Major Shareholder before the 2023 AGMS.

Di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan beberapa persetujuan maupun rekomendasi, sebagai berikut:

Throughout 2023, the Board of Commissioners has issued the following approvals and recommendations:

No.	Nomor surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1	001/EXT/KOM/PPRE/I/2023	5 Januari 2023 January 5, 2023	Penerimaan Hasil Revisi *Draft Charter* SPI PT PP Presisi Tbk Tahun 2022. Acceptance of the 2022 SPI Draft Charter Revision Results of PT PP Presisi Tbk.
2	002/EXT/KOM/PPRE/I/2023	17 Januari 2023 January 17, 2023	Arahan SPI TW IV 2022. SPI Directions for Q IV of 2022.
3	004/EXT/KOM/PPRE/I/2023	23 Januari 2023 January 23, 2023	Penerimaan Hasil Revisi *Draft* Pedoman Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan PT PP Presisi Tbk. Acceptance of the Revised Guidelines Draft for Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions of PT PP Presisi Tbk.
4	010/EXT/KOM/PPRE/II/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023	Arahan SPIP Tahun 2022. SPIP Directives for 2022.
5	013/EXT/KOM/PPRE/II/2023	24 Februari 2023 February 24, 2023	Jawaban Cuti Direksi. Response on the Board of Directors' Leave.
6	016/EXT/KOM/PPRE/II/2023	1 Maret 2023 March 1, 2023	Arahan terhadap Hasil Laporan Manajemen Triwulan IV 2022. Directives for the Fourth Quarter 2022 Management Report Results.
7	017/EXT/KOM/PPRE/II/2023	1 Maret 2023 March 1, 2023	Surat Saran dan Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Laporan Keuangan TW IV 22. Board of Commissioners Suggestion and Response Letter to Q IV 22 Finance Statement.
8	018/EXT/KOM/PPRE/II/2023	1 Maret 2023 March 1, 2023	Arahan terhadap Kebijakan Mutu (QSHE) PT PP Presisi Tbk Directives for PT PP Presisi Tbk Quality (QSHE) Policy.
9	026/EXT/KOM/PPRE/III/2023	15 Maret 2023 March 15, 2023	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi *Board of Directors*-1 PT PP Presisi Tbk. Approval of Changes to the Board of Directors-1 Organizational Structure of PT PP Presisi Tbk.
10	029/EXT/KOM/PPRE/III/2023	21 Maret 2023 March 21, 2023	Arahan Terkait Sekretaris Perusahaan yang Lowong. Directives on the Vacant Company Secretary Post.
11	033/EXT/KOM/PPRE/III/2023	30 Maret 2023 March 30, 2023	Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Kepala Divisi Operasi 1. Board of Commissioners Response and Directive on the Proposed Change to the Head of the Operations of Division 1.
12	037/EXT/KOM/PPRE/IV/2023	11 April 2023 April 11, 2023	Persetujuan Perubahan/Penambahan Plafon Fasilitas Kredit Dari Lembaga Pembiayaan. Approval of Changes/Additions to the Credit Facility Limit from the Financial Institution.
13	039/EXT/KOM/PPRE/IV/2023	13 April 2023 April 13, 2023	Arahan Terkait Masa Purnabakti Kepala Biro SPI PPRE. Directives on the Retirement Period for the Head of the SPI Bureau in PPRE.
14	041/EXT/KOM/PPRE/IV/2023	11 April 2023 April 11, 2023	Arahan terhadap Kebijakan Sistem Teknologi Informasi. Directives for Information Technology System Policy.
15	042/EXT/KOM/PPRE/IV/2023	17 April 2023 April 17, 2023	Arahan Laporan Kegiatan SPI TW I 2023. Directives for the SPI Q1 2023 Activity Report.
16	054/EXT/KOM/PPRE/V/2023	15 Mei 2023 May 15, 2023	Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 PT PP Presisi Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022. Responses and Suggestions from the Board of Commissioners on the Audited Financial Statement for the 2022 Fiscal Year of PT PP Presisi Tbk and the Submission of the Supervisory Duties and Realization of the Board of Commissioners Performance for the 2022 Fiscal Year.
17	055/EXT/KOM/PPRE/V/2023	16 Mei 2023 May 16, 2023	Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro SPI. Approval of the Dismissal and Appointment of the Head of the SPI Bureau.
18	056/EXT/KOM/PPRE/V/2023	16 Mei 2023 May 16, 2023	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk. Approval of Changes to the Organizational Structure of PT PP Presisi Tbk.

No.	Nomor surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
19	064/EXT/KOM/PPRE/V/2023	29 Mei 2023 May 29, 2023	Persetujuan Perpanjangan Waktu Fasilitas Kredit Perbankan. Approval of Time Extension of Banking Credit Facility.
20	066/EXT/KOM/PPRE/V/2023	30 Mei 2023 May 30, 2023	Hasil Tinjauan Dewan Pengarah Atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT PP Presisi Tbk Tahun 2023. Results of the Steering Committee's Review of PT PP Presisi Tbk's Anti-Bribery Management System (SMAP) in 2023.
21	069/EXT/KOM/PPRE/VI/2023	5 Juni 2023 June 5, 2023	Perkenalan Anggota Direksi Baru PT PP Presisi Tbk. Introduction of New Board of Directors Members in PT PP Presisi Tbk.
22	072/EXT/KOM/PPRE/VI/2023	6 Juni 2023 June 6, 2023	Persetujuan Permohonan Cuti Haji. Approval of Hajj Leave Application.
23	087/EXT/KOM/PPRE/VI/2023	19 Juni 2023 June 19, 2023	Arahan terhadap Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2022. Directives for the Self-Assessment Results of GCG Implementation in PT PP Presisi Tbk for the 2022 Fiscal Year.
24	089/EXT/KOM/PPRE/VI/2023	20 Juni 2023 June 20, 2023	Penunjukan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2023. Reappointment of the Public Accounting Firm (KAP) PT PP Presisi Tbk for the 2023 Fiscal Year.
25	096/EXT/KOM/PPRE/VI/2023	27 Juni 2023 June 27, 2023	Persetujuan Besaran Honorarium Jasa Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023. Approval on the Honorarium for Public Accounting Services on the Company's 2023 Fiscal Year Financial Statement.
26	099/EXT/KOM/PPRE/VII/2023	5 Juni 2023 June 5, 2023	Arahan Himbauan Reviu KPI Direktorat PT PP Presisi Tbk Tahun 2023. Directives for KPI Directorate Review Appeals of PT PP Presisi Tbk in 2023.
27	109/EXT/KOM/PPRE/VII/2023	25 Juli 2023 July 25, 2023	Arahan Laporan Kegiatan SPI TW II 2023. Directives for the SPI Q2 2023 Activity Report.
28	110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023	27 Juli 2023 July 27, 2023	Arahan Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk Tahun 2023. Directives for Implementing the Risk Management Policy of PT PP Presisi Tbk in 2023.
29	115/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023	5 Agustus 2023 August 5, 2023	Arahan terkait Permohonan Perubahan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan dalam aksi Korporasi PT Lancarjaya Mandiri Abadi. Directives on the Requests for Changes to Limits and/or Authority Criteria in PT Lancarjaya Mandiri Abadi Corporate Actions.
30	118/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023	14 Agustus 2023 August 14, 2023	Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Directives for Approval of the Corporate Secretary Appointment.
31	119/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023	14 Agustus 2023 August 14, 2023	Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Equipment.
32	121/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023	18 Agustus 2023 August 18, 2023	Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tunjangan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Untuk Tahun 2023. Determination of Board of Directors' Salaries, Board of Commissioners' Honorarium, and Allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023.
33	123/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Arahan terkait Persetujuan Perolehan Fasilitas Tambahan Baru Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas *Non Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada Perbankan. Directives for Approving New Additional Facilities, Transactional Working Capital Credit Facilities, and Extensions of the Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility in Banking.
34	130/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 1. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Operations 1.
35	131/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 2. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Operations 2.
36	138/EXT/KOM/PPRE/IX/2023	15 September 2023 September 15, 2023	Persetujuan Izin Untuk Menghadiri Undangan dari PT United Tractors Tbk. Approval of Permission to Attend the Invitation from PT United Tractors Tbk.

No.	Nomor surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Subject
37	142/EXT/KOM/PPRE/IX/2023	27 September 2023 September 27, 2023	Penegasan Persetujuan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas *Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada Perbankan. Confirmation of Approval to Extend the Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility to Banks.
38	144/EXT/KOM/PPRE/IX/2023	27 September 2023 September 27, 2023	Penyusunan RKAP dan KPI. Preparation of RKAP and KPI.
39	148/EXT/KOM/PPRE/X/2023	6 Oktober 2023 October 6, 2023	Arahan Draft Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PP Presisi Tbk tahun 2024. Directives for the 2024 Company Work Plan and Budget Draft of PT PP Presisi Tbk.
40	151/EXT/KOM/PPRE/X/2023	17 Oktober 2023 October 17, 2023	Arahan terkait Permohonan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Aset Manajemen dalam Prosedur Sistem Aset Manajemen (SMA) PT PP Presisi Tbk. Directives on the Application for Signing the Asset Management Commitment Declaration in the Asset Management System (SMA) Procedure of PT PP Presisi Tbk.
41	154/EXT/KOM/PPRE/X/2023	19 Oktober 2023 October 19, 2023	Persetujuan untuk bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT PP Presisi Tbk. Approval to jointly sign the Code of Conduct Guidelines of PT PP Presisi Tbk with the Board of Directors.
42	157/EXT/KOM/PPRE/X/2023	26 Oktober 2023 October 26, 2023	Arahan Laporan Kegiatan SPI TW III 2023. Directives for the SPI Q3 2023 Activity Report.
43	161/EXT/KOM/PPRE/XI/2023	1 November 2023 November 1, 2023	Tanggapan atas Permohonan Penjelasan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Direksi PT PP Presisi Tbk. Response to Request for Explanation of Limits and/or Criteria for the Authority of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk.
44	165/EXT/KOM/PPRE/XI/2023	6 November 2023 November 6, 2023	Arahan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG). Directives for Good Corporate Governance (GCG) Implementation.
45	170/EXT/KOM/PPRE/XI/2023	15 November 2023 November 15, 2023	Tanggapan atas Pemberitahuan Pengalihan Tugas dan Wewenang Direksi. Response to Notification of the Board of Directors Transfer of Duties and Authorities.
46	172/EXT/KOM/PPRE/XI/2023	28 November 2023 November 28, 2023	Arahan Terkait Proses Pengangkatan Direksi PT PP Presisi Tbk. Directives on the Board of Directors Appointment Process in PT PP Presisi Tbk.
47	174/EXT/KOM/PPRE/XII/2023	4 Desember 2023 December 4, 2023	Tanggapan atas Pengalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi. Response to the Transfer of Authority and Responsibilities of the Board of Directors.
48	178/EXT/KOM/PPRE/XII/2023	12 Desember 2023 December 12, 2023	Arahan Persetujuan Usulan Calon Komisaris Utama PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA). Directives for Approval of the Proposed President Commissioner Candidate of PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA).
49	181/EXT/KOM/PPRE/XII/2023	15 Desember 2023 December 15, 2023	Arahan Pencapaian KPI Triwulan III Tahun 2023. Directives for KPI Achievement in the Third Quarter of 2023.
50	185/EXT/KOM/PPRE/XII/2023	19 Desember 2023 December 19, 2023	Arahan terkait Pemberitahuan Atas Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit *Non Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* dan Perpanjangan serta Penurunan atas Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional pada Perbankan. Directives for Notification on Extensions of the Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility and Extension and Reduction of Transactional Working Capital Credit at Banks.
51	190/EXT/KOM/PPRE/XII/2023	26 Desember 2023 December 26, 2023	Arahan atas Pedoman Kebijakan mengenai Hak dan Kewajiban terhadap Kreditur dan Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PT PP Presisi Tbk Tahun 2023. Directives for Policy Guidelines on the Rights and Obligations of Creditors and Management of the Long-Term Loans Use of PT PP Presisi Tbk in 2023.
52	192/EXT/KOM/PPRE/XII/2023	28 Desember 2023 December 28, 2023	Persetujuan Penandatanganan Bersama Pedoman GCG Tahun 2023. Approval of Joint Signing of the 2023 GCG Guidelines.
53	193/EXT/KOM/PPRE/XII/2023	28 Desember 2023 December 28, 2023	Arahan terhadap Penyusunan Pedoman Akuntansi. Directives for Preparing Accounting Guidelines.

Dewan Komisaris juga berwenang melakukan kunjungan kerja/peninjauan lapangan dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat terkait pelaksanaan tugasnya. Berikut kunjungan yang telah dilakukan Dewan Komisaris di tahun 2023.

The Board of Commissioners is also authorized to conduct work visits/field reviews to supervise and provide advice related to the implementation of its duties. The following are the Board of Commissioners' work visits in 2023.

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Kunjungan Date	Proyek Project
Nur Rochmad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner	18 Agustus 2023 August 18, 2023	Tol Trans Sumatera Ruas Indrapura-Kisaran, Sumatera Utara Indrapura-Kisaran Section of the Trans Sumatra Toll Road, North Sumatra
		14 September 2023 September 1, 2023	Kunjungan Kawasan Industri Terpadu Batang - *Batching Plant* PPRE Visit to Batang Integrated Industrial Area - PPRE Batching Plant
Muhammad Zahid	Komisaris Commissioner	1 September 2023 September 1, 2023	Kunjungan Proyek Weda Bay Nickel Project Weda Bay Nickel Project Visit
Albert Simangunsong	Komisaris Commissioner	20 Maret 2023 March 20, 2023	Kunjungan Proyek Pembangunan Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Logistics Pier Construction for the National Capital City (IKN) Development Project Visit
		1 September 2023 September 1, 2023	Kunjungan Proyek Weda Bay Nickel Project Weda Bay Nickel Project Visit
		28 November 2023 November 28, 2023	Kunjungan Proyek Quarry Vale dan IGP Mines of Bahodopi Vale Quarry and IGP Mines of Bahodopi Project Visit
Indra Jaya Rajagukguk	Komisaris Independen Independent Commissioner	20 Maret 2023 March 20, 2023	Kunjungan Proyek Pembangunan Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Logistics Pier Construction for the National Capital City (IKN) Development Project Visit
		11 Oktober 2023 October 11, 2023	Kunjungan *Warehouse* PPRE PPRE Warehouse Visit
		28 November 2023 November 28, 2023	Kunjungan Proyek Quarry Vale dan IGP Mines of Bahodopi Vale Quarry and IGP Mines of Bahodopi Project Visit

Rencana Program Kerja Dewan Komisaris 2024

Dalam memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab agar berjalan dengan baik, Dewan Komisaris telah menyusun rencana program pengawasan sebagai acuan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun yang akan datang yang telah disahkan pada 3 November 2023. Adapun rencana program kerja Dewan Komisaris meliputi:

Board of Commissioners 2024 Work Program Plan

To ensure smooth implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners has prepared a supervisory program plan as a reference for carrying out its duties in the coming year, which has been ratified on November 3, 2023. The Board of Commissioners' work program plan includes:

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program
1	Kebijakan Perusahaan Company Policy	• Monitoring, saran atas penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan: • Kepatuhan Manajemen terhadap peraturan yang berlaku; • Peraturan Internal/Kebijakan/SOP. Monitoring and suggestions on the implementation of regulations and laws that apply to the Company: • Management compliance with applicable regulations; • Internal Regulations/Policies/SOP.

No.	**Kebijakan** Policy	**Program Kerja** Work Program
2	Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pengendalian dan Kepatuhan Manajemen Supervision and Directive on Management Control and Compliance	a. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama/Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala 2 bulan sekali. i. Evaluasi kinerja: - Pemasaran; - Operasional; - Akuntansi dan Keuangan. ii. Evaluasi kinerja investasi (yang disetujui) dan program strategis perusahaan. iii. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Dewan Komisaris. b. Memberikan persetujuan atas aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar. c. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang usulan RKAP Dewan Komisaris tahun 2025. d. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi, kepada PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas a. Carrying out Board of Commissioners Meetings and/or Joint Meetings with the Board of Directors periodically every two months. i. Performance evaluation: - Marketing; - Operational; - Accounting and Finance. ii. Evaluation of (approved) investment performance and strategic company programs. iii. Other matters that require BOC decisions. b. Providing approval for corporate actions proposed by the Board of Directors following the Articles of Association. c. Submitting a written report regarding the Board of Commissioners' 2025 RKAP proposal. d. Proposing remuneration for the Board of Directors per the applicable regulations and the Board of Directors performance assessment to PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.
3	Manajemen Risiko Risk Management	• Menelaah kebijakan penerapan Sistem Manajemen Risiko; • Monitoring, saran atas pelaksanaan manajemen risiko. • Reviewing the Risk Management System implementation policy; • Risk management implementation monitoring and suggestions.
4	Sistem Teknologi Informasi Information Technology System	• Menelaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi; • Monitoring, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi. • Review Information Technology System policies; • Information Technology Systems implementation monitoring and suggestions.
5	Manajemen QHSE (Mutu, K3 dan Lingkungan) QHSE Management (Quality, OHS, and Environment)	• Menelaah kebijakan Manajemen QHSE (Mutu, K3 dan Lingkungan) di inlinekan dengan Program Kerja Divisi; • Monitoring, saran atas penerapan Manajemen QHSE (Mutu, K3 dan Lingkungan). • Review QHSE Management policies (Quality, OHS, and Environment) in line with the Division Work Programs; • QHSE Management (Quality, OHS, and Environment) implementation monitoring and suggestions.
6	Pengendalian & Kepatuhan: Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), *Whistleblowing System* (WBS) dan sistem pengelolaan Gratifikasi Control & Compliance: Supervising the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistleblowing System (WBS), and gratuity management system	• *Review* terhadap hasil pelaksanaan Auditor Internal (SPI); • Monitoring dan saran atas penerapan sistem pengendalian internal perusahaan (SPIP); • Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS; • Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi. • Review of the Internal Auditor (SPI) implementation results; • The Company's Internal Control System (SPIP) monitoring and suggestions; • Monitoring, suggestions, and follow-up on WBS reports; • Monitoring, suggestions, and follow-up on gratuity reports.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program
7	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Policy Implementation Monitoring	• Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya; • Pengelolaan SDM meliputi Rekrutmen, Manajemen Karier, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai. • Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. • Pengelolaan Entitas Anak. • Procurement Policy and Implementation; • HR Management, including Recruitment, Career Management, Promotion, Employees Transfer and Demotion. • Accounting Policies and Financial Statement Preparation. • Subsidiaries Management.
8	Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak Remuneration, Nomination, and Succession of the Board of Directors, as well as the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries	• Telaah pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi; • Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. • Review the proposed Board of Directors remuneration and nominations; • The bonuses/performance incentives proposal considers the Board of Directors performance assessment (KPI) results and the Company's soundness level achievement.
9	Pengawasan External/KAP External Supervision/KAP	• Usulan Penunjukan KAP tahun buku 2023; • Evaluasi efektivitas kinerja KAP tahun buku 2023 dan review terhadap hasil pelaksanaan audit. • Proposed KAP Appointment for the 2023 fiscal year; • KAP performance effectiveness evaluation for the 2023 fiscal year and review of the audit implementation results.
10	GCG GCG	• Pelaksanaan *Self Assessment* penerapan GCG 2023; • *Review* Laporan Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG tahun buku 2023; • Monitoring atas penerapan prinsip- prinsip GCG, termasuk didalamnya pelaksanaan Tindak Lanjut AOI hasil *assessment/self assessment*. • Self-Assessment for the 2023 GCG implementation; • Review of the Self Assessment Results Report on GCG Implementation on the 2023 fiscal year; • Monitoring the GCG principles implementation, including the implementation of AOI follow-up on assessment/self-assessment results.
11	RUPST dan RUPSLB AGMS and EGMS	Pendapat dan Tanggapan terhadap hal-hal yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB. • RUPST: BA Pimpinan RUPST, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. • RUPSLB: BA Pimpinan RUPSLB. Opinions and Responses to matters discussed at the AGMS and EGMS. • AGMS: Minutes of the AGMS Chairman, Board of Commissioners Supervisory Duty Report. • EGMS: EGMS BA Chairman
12	Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action* Investment, Business Development, and Corporate Action	Memberikan persetujuan dan rekomendasi serta arahan terhadap rencana Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*, sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan anggaran Dasar dan atau threshold PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas. Provide approval, recommendation, and directives for Investment, Business Development, and Corporate Action plans under the authority limits granted by the Articles of Association and/or threshold of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.
13	Penyusunan RKA Tahunan 2025 dan RJPP 2025 Annual RKA and RJPP Preparation	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKA tahunan 2025 dan *Review* RJPP: • Pandangan dan Masukan Dewan Komisaris terkait Penyusunan RKA Tahunan 2025 & RJPP; • Pembahasan *Board of Directors* dan *Board of Commissioners* atas Rancangan RKA Tahunan 2025 & RJPP; • Pengesahan RKA Tahunan 2025 & RJPP. Suggestions and Approval on the 2025 annual RKA and RJPP Review preparation: • Views and input from the Board of Commissioners on the 2025 Annual RKA & RJPP preparation; • Board of Directors and Board of Commissioners Discussion on the 2025 Annual RKA & RJPP Draft; • The 2025 Annual RKA & RJPP Ratification.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program
14	Laporan Manajemen Management Report	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Pemegang Saham Mayoritas; • Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan. • Persetujuan Laporan Tahunan (*Annual Report*) • Quarterly Performance Reports Preparation to the Majority Shareholders; • Annual Board of Commissioners Supervisory Duty Report Preparation. • Annual Report Approval.
15	Pengembangan Dewan Komisaris Board of Commissioners Development	Seminar, *workshop* atau sebagai narasumber Seminar, workshop, or as a guest speaker
16	Tindak lanjut hasil keputusan, dan arahan Dewan Komisaris Follow up on the Board of Commissioners decisions and directives	Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi/arahan Dewan Komisaris Monitoring the follow-up to the Board of Commissioners decisions, recommendations/ directives
17	Evaluasi Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris Performance Evaluation of Committees under the Board of Commissioners	Penyampaian Laporan kegiatan Komite Audit dan Komite Kepatuhan secara Triwulanan Quarterly submission of Audit Committee and Compliance Committee activity reports

Penilaian Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

- **Penilaian Kinerja Komite Audit**
  Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan menggunakan sistem *key performance indicator* dan dilaksanakan setiap tahun. Berikut disampaikan kriteria dan hasil penilaian kinerja Komite Audit tahun 2023.

Performance Assessment on the Board of Commissioners Supporting Organs

- **Audit Committee Performance Assessment**
  The Audit Committee performance assessment is conducted annually by the Board of Commissioners using the key performance indicator system. The following are the criteria and results of the 2023 Audit Committee performance assessment.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Komite Audit
Criteria and Results of Audit Committee Performance Assessment

No.	Indikator Kinerja Performance Indicator	Deskripsi Description	Satuan Unit	Target Target	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Capaian KPI (%) KPI Achievement (%)
Aspek Penilaian Objektif (85%) Objective Assessment Aspects (85%)							
1	Pelaksanaan Program Kerja Komite Committee Work Program Implementation	Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Komite Achievement against the predetermined target in the Committee Work Program	Kali Times	14	75,00	14	75,00
2	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Dalam Rapat Komite dan Rapat Dewan Komisaris tahun 2023 In the Committee Meetings and Board of Committee Meetings in 2023	Kali Times	8	10,00	7	8,75
Aspek Penilaian Subjektif (15%) Subjective Assessment Aspect (15%)							
3	Kompetensi & Kerja sama Anggota Komite Competency & Cooperation with Committee Members	Kecukupan Kompetensi Competency Adequacy	1=cukup 0=kurang 1=Adequate 0=Inadequate	1	10,00	1	10,00
		Soliditas kerja sama, keterlibatan dalam diskusi, inisiatif untuk diskusi antar Komite Cooperation solidarity, involvement in discussions, initiative for inter-committee discussions	1=aktif/baik 0=tidak baik 1=active/good 0=inadequate	1	5,00	1	5,00
TOTAL NILAI | TOTAL SCORE					**100,00**		**99**

- **Penilaian Kinerja Komite Kepatuhan**
  Demikian pula penilaian kinerja Komite Kepatuhan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan menggunakan sistem *key performance indicator* dan dilaksanakan setiap tahun. Berikut disampaikan kriteria dan hasil penilaian kinerja Komite Kepatuhan tahun 2023.

- **Compliance Committee Performance Assessment**
  The Compliance Committee performance assessment is also conducted annually by the Board of Commissioners using the key performance indicator system. The following are the criteria and results of the 2023 Audit Committee performance assessment.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Komite Kepatuhan
Criteria and Results of Compliance Committee Performance Assessment

No.	Indikator Kinerja Performance Indicator	Deskripsi Description	Satuan Unit	Target Target	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Capaian KPI (%) KPI Achievement (%)
Aspek Penilaian Objektif (85%) Objective Assessment Aspects (85%)							
1	Pelaksanaan Program Kerja Komite Committee Work Program Implementation	Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Komite Achievement against the predetermined target in the Committee Work Program	Kali Times	14	75,00	14	75,00
2	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Dalam Rapat Komite dan Rapat Dewan Komisaris tahun 2023 In the Committee Meetings and Board of Committee Meetings in 2023	Kali Times	8	10,00	7	8,75
Aspek Penilaian Subjektif (15%) Subjective Assessment Aspect (15%)							
3	Kompetensi & Kerja sama Anggota Komite Competency & Cooperation with Committee Members	Kecukupan Kompetensi Competency Adequacy	1=cukup 0=kurang 1=Adequate 0=Inadequate	1	10,00	1	10,00
		Soliditas kerja sama, keterlibatan dalam diskusi, inisiatif untuk diskusi antar Komite Cooperation solidarity, involvement in discussions, initiative for inter-committee discussions	1=aktif/baik 0=tidak baik 1=active/good 0=inadequate	1	5,00	1	5,00
TOTAL NILAI I TOTAL SCORE					**100,00**		**99**

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Komite Audit dan Komite Kepatuhan di atas, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh pelaksanaan tugas oleh seluruh anggota komite telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan penilaian kinerja yang ditetapkan.

Sesuai *area of improvement* dari *Assessor Independent* hasil *assessment* penerapan GCG tahun 2022, pada tahun 2023 fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Komite Kepatuhan.

Based on the results of the Audit Committee and Compliance Committee performance assessments above, the Board of Commissioners considers that all committee members have adequately performed their tasks under the established procedures and performance evaluation.

In accordance with the area of improvement from the Independent Assessor as a result of the 2022 GCG implementation assessment, the Nomination and Remuneration functions in 2023 were carried out by the Compliance Committee.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan seperti ditentukan oleh regulator. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% dari total Dewan Komisaris.

INDEPENDENT COMMISSIONER

The Independent Commissioner is a Board of Commissioners member from outside the Company and fulfills the requirements set by the regulator. Under the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the number of Independent Commissioners is at least 30% of the total number of Board of Commissioners.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen

Komposisi Komisaris Independen sekurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Adapun per 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen dari total anggota Dewan sebanyak 4 (empat) orang atau 50,00%.

Independent Commissioners' Composition and Membership

The Independent Commissioners' composition must be at least 30% of the total Board of Commissioners members. As of December 31, 2023, the Company has two Independent Commissioners from four Board of Commissioners members or 50.00%.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Dasar Pengangkatan dan Periode Menjabat** Basis of Appointment and Term of Office
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 18, dated October 19, 2020, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta.

Kriteria dan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan berikut selama memegang jabatannya sebagai Komisaris Independen.

Independent Criteria and Independence

The Independent Commissioner must meet the following requirements while serving as an Independent Commissioner.

Kriteria Independensi Independence Criteria	**Nur Rochmad**	**Indra Jaya Rajagukguk**
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya. An individual who works or reserves the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company activities within the last six months, except for the reappointment as the Company's Independent Commissioner in the following period.	√	√
Mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Owns shares, directly or indirectly, in the Company.	x	x
Mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi ataupun Pemegang Saham Utama Perusahaan. Affiliated with the Company, Board of Commissioners members, Board of Directors members, or Major Shareholders of the Company	x	x
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut. Has business relations, directly or indirectly, with the Company's business activities.	x	x

√ : Ya | x : Tidak
√ : Yes | x : No

Seluruh Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi dan telah dinyatakan oleh masing-masing Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui setiap tahun.

All Independent Commissioners have met the independence criteria and have been declared by every Independent Commissioner by signing an annually updated statement.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang penuh atas kepengurusan Perusahaan. Direksi bekerja dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Pedoman Direksi

Perusahaan memiliki Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Direksi yang ditujukan sebagai pedoman kerja Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dituangkan didalam Pedoman *Board of Director* (BOD) PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 yang telah berlaku dan diperbarui pada 14 Desember 2023.

Kriteria Penentuan Direksi

Berdasarkan Pedoman *Board of Director* (BOD) PT PP Presisi Tbk, kriteria yang harus dipenuhi Direksi pada saat diangkat selama menjabat meliputi:

1. Persyaratan Formal yaitu:
   a. Orang perseorangan;
   b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
   c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a Corporate Organ with the responsibility and full authorization of Company management. The Board of Directors works by paying attention to the Company's interests and objectives and considering the interests of Shareholders and all stakeholders.

Board of Directors Manual

The Company has Guidelines for the Board of Directors' Duties implementation, intended as working guidelines for the Board of Directors to carry out their duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, competently, independently, and accountably. This is contained in the Board of Directors Manual of PT PP Presisi Tbk of 2023, which came into effect and was updated on December 14, 2023.

Board of Directors Selection Criteria

Based on the Board of Directors Manual, the Board of Directors must meet the criteria at the time of appointment and during the term of office. These criteria include:

1. Formal Requirements:
   a. An individual;
   b. Able to carry out legal actions;
   c. Never been declared bankruptcy within five years prior to appointment;

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

2. Persyaratan Materiel yaitu:
   a. Keahlian;
   b. Integritas;
   c. Kepemimpinan;
   d. Pengalaman;
   e. Jujur;
   f. Perilaku yang baik; dan
   g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

3. Persyaratan Lainnya yaitu:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
   c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
   d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap sebagai jabatan anggota Direksi;
   f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
   g. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
   h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua)tahun terakhir.

Pemenuhan persyaratan di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada

d. Never been a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing an SOE, Subsidiary, and/or other business entities to declare bankruptcy within five years prior to appointment; and
e. Never been convicted of committing a crime causing losses to the State, SOE, Subsidiary, and/or other business entities' finances and/or crimes related to the financial sector within five years prior to appointment.

2. Material Requirements:
   a. Expertise;
   b. Integrity;
   c. Leadership;
   d. Experience;
   e. Honest;
   f. Good behavior; and
   g. High dedication to advancing and developing the Company.

3. Other Requirements
   a. Not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member in the House of Representatives, Regional Representatives Council, Provincial Legislative Council, and Regional Legislative Council/City Council;
   b. Not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head, including acting head/deputy regional head;
   c. Not serving as a Board of Directors member of a relevant SOE or Subsidiary for two periods;
   d. Not currently serving as an official in a ministry/institution, Board of Commissioners/Supervisory Board member in another SOE, Board of Directors member in another SOE, Board of Directors member in a Subsidiary and/or other business entity;
   e. Not holding a position prohibited by the statutory regulations to be concurrent with the Board of Directors member post;
   f. Have the dedication and devote full time to carrying out their duties as stated in a statement letter from the person concerned;
   g. Physically and spiritually healthy, not currently suffering from an illness that could hinder the performance of their duties as a Board of Directors member, proven by a health certificate from the hospital; and
   h. Have a tax number (NPWP) and have carried out the obligation to pay taxes for the last two years.

Fulfillment of the above requirements must be included in a statement letter signed by the prospective Board of Directors members, and the letter must be submitted to

Perusahaan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan. Apabila calon Direksi yang baru diangkat diketahui tidak memenuhi persyaratan maka:

1. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan;
2. Pengangkatan calon Direksi tersebut batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui bahwa pengangkatan anggota Direksi tersebut tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan di dalam media pengumuman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Apabila anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut telah melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan sebelum pembatalan pengangkatan, maka perbuatan hukum yang dilakukan tersebut tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perusahaan; dan
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan setelah pembatalan pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Anggota Direksi Apabila Terlibat dalam Kejahatan Keuangan

Masa Jabatan Direksi berakhir apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Jumlah anggota Dewan Direksi sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. Sementara masa jabatan anggota Direksi yang ditetapkan dalam RUPS dalam 1 (satu) periode tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun atau terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode,

the Company. The statement letter must be thoroughly reviewed and documented by the Company. If the newly appointed Board of Directors candidate is found not to meet the requirements, then:

1. The Company is obliged to hold a GMS to replace the Board of Directors members who do not meet the requirements;
2. The appointment of the Board of Directors candidate is null and void by law from when the other Board of Directors members or the Board of Commissioners are aware of the non-fulfillment based on valid evidence. The relevant Board of Directors member is notified in writing by considering the applicable laws and regulations;
3. No later than two working days after it is discovered that the appointment of the Board of Directors member does not meet the requirements, other Board of Directors members or the Board of Commissioners must announce the revocation of the appointment of the relevant Board of Directors member in a media announcement while considering the Capital Market regulations, and no later than seven working days, notify the Minister of Law and Human Rights to be recorded per the statutory regulations;
4. If the Board of Directors member who does not meet the requirements has taken legal action on behalf of the Company before the appointment revocation, then the taken legal action remains binding and becomes the Company's responsibility; and
5. Legal actions carried out for and on behalf of the Company after the appointment revocation of the Board of Directors member who does not fulfill these requirements are invalid and are the personal responsibility of the Board of Directors member concerned.

Resignation Policies for Board of Directors Members Involved in Financial Crimes

The Board of Directors' term of office ends if it is proven that they do not fulfill the requirements as a Board of Directors member based on the provisions of the Company's Articles of Association and statutory regulations.

Board of Directors Composition and Term of Office

The total number of the Board of Directors members is at least two people, one of whom is appointed as the President Director and, if necessary, one can be appointed as the Deputy President Director. Meanwhile, the term of office of the Board of Directors members determined in the GMS in one period may not exceed five years or starting from the appointment date determined by the GMS and ends at the closing of the fifth Annual GMS at the end of one period, taking into account the laws and regulations in

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

the Capital Market sector, while not reducing the right of GMS to dismiss the Board of Directors prior to the end of their term of office.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2023

Di tahun 2023 terdapat perubahan susunan Direksi sejalan dengan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023 dan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 24 Mei 2023. Berikut disampaikan kronologi susunan Direksi di sepanjang tahun 2023 dan susunan Direksi per 31 Desember 2023.

Board of Directors Structure and Composition in 2023

In 2023, there were changes in the Board of Directors composition following the resolutions of the Extraordinary GMS on February 23, 2023, and the 2022 fiscal year Annual GMS on May 24, 2023. The following is the chronology of changes in the Board of Directors composition as of December 31, 2023.

Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2023

Chronology of Changes in the Board of Directors Composition in 2023

Periode 1 Januari s.d 23 Februari 2023 January 1 to February 23, 2023	**Periode 23 Februari s.d 24 Mei 2023** February 23 to May 24, 2023	**Periode 24 Mei 2023 s.d 31 Desember 2023** May 24 to December 31, 2023	**Keterangan** Description
Rully Noviandar (Direktur Utama) (President Director)	Rully Noviandar (Direktur Utama) (President Director)		Rully Noviandar diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023 dengan alasan Oleh Pemegang Saham, beliau ditugaskan ditempat yang lain. Rully Noviandar was honorably dismissed as the President Director as of the 2022 Annual GMS on May 24, 2023. He was assigned to a different location by the Shareholders.
Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	-
M Darwis Hamzah (Direktur Operasi) (Director of Operations)			M Darwis Hamzah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Operasi sejak RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023 dengan alasan Oleh Pemegang Saham, beliau ditugaskan ditempat yang lain. M. Darwis Hamzah was honorably dismissed as the Director of Operations as of the Extraordinary GMS on February 23, 2023. He was assigned to a different location by the Shareholders.
Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Pada RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2023, Rebimun diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM. Pada kesempatan yang sama, Rebimun diangkat untuk menjabat Direktur Operasi. In the Extraordinary GMS held on February 23, 2023, Rebimun was dismissed as the Director of Business Planning and HCM. Simultaneously, Rebimun was appointed as the Director of Operations.
	Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	Yudi Setiawan diangkat untuk menjabat Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM sejak RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023. Yudi Setiawan was appointed as the Director of Business Planning and HCM as of the Extraordinary GMS on February 23, 2023.
		I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) (President Director)	I Gede Upeksa diangkat untuk menjabat Direktur Utama sejak RUPS Tahunan 2022 tanggal 24 Mei 2023. I Gede Upeksa was appointed as the President Director as of the 2022 Annual GMS on May 24, 2023.

Susunan Keanggotaan Direksi per 31 Desember 2023

Board of Directors Composition as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Service Period
I Gede Upeksa Negara	Direktur Utama President Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Deed of Meeting Resolution Statement No. 40, dated May 24, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta.	24 Mei 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 May 24, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-1 First
Mohammad Arif Iswahyudi	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal Director of Finance, Risk Management, and Legal	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta.	20 April 2022 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 April 20, 2022, to the GMS which will be held in 2027	Ke-1 First
Rebimun	Direktur Operasi Director of Operations	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 23 Februari 2023 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Deed of Meeting Resolution Statement No. 14, dated February 23, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta. Deed of Meeting Resolution Statement No. 39, dated April 27, 2022, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta.	23 Februari s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 February 23, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-2 Second
Yudi Setiawan	Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM Director of Business Planning and HCM	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Deed of Meeting Resolution Statement No. 14, dated February 23, 2023, made before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in South Jakarta.	23 Februari 2023 s.d. RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 February 23, 2023, to the GMS which will be held in 2028	Ke-1 First

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

All Board of Directors members' profiles are available in the Company Profile section of this Annual Report.

Independensi Direksi

Independensi Direksi merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga. Hal tersebut bertujuan agar Direksi senantiasa bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan. Untuk menjaga independensi, maka Perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan Perusahaan atau mempengaruhi Direksi dalam menjalankan usaha Perusahaan;
2. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus usaha Perusahaan.

Board of Directors Independence

The Board of Directors' independence is one of the important things that must be preserved. It aims to ensure that the Board of Directors always acts optimally in the interests of the Company. To maintain independence, the Company establishes the following provisions:

1. Apart from the Company's organs, other parties are prohibited from interfering in Company management or influencing the Board of Directors in carrying out the Company's business;
2. The Board of Directors members are prohibited from carrying out activities that may interfere with their independence in managing the Company's business.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi, tugas wewenang, dan kewajiban Direksi sebagai berikut.

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan secara tanggung renteng apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
7. Tugas Direksi berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara:
   a. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
   b. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Board of Directors Duties, Authorities, Responsibilities

Based on the Guidelines for the Board of Directors' Duties implementation, the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors are as follows.

1. The Board of Directors has the duty to carry out and be responsible for Company management for the interest of the Company, following the Company's goals and objectives set forth in the Articles of Association and representing the Company inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as regulated in the laws and regulations and Articles of Association and/or GMS resolutions.
2. In carrying out their duties and responsibilities in Company management, the Board of Directors is required to organize the Annual GMS and other GMS as stipulated in applicable laws and regulations and the Articles of Association.
3. Every Board of Directors member must carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and prudence.
4. Every Board of Directors member is jointly responsible for the Company's losses caused by the Board of Directors members' mistakes or negligence in carrying out their duties.
5. The Board of Directors members cannot be jointly held responsible for the Company's losses if they can prove that:
   a. The loss is not due to their fault or negligence;
   b. They have carried out management in good faith, full of responsibility, and prudence for the interest and following the Company's goals and objectives;
   c. They do not have a conflict of interest, directly or indirectly, over management actions that result in losses; and
   d. They have taken measures to prevent said losses.
6. The Board of Directors is authorized to carry out the management with appropriate policies, following the goals and objectives stipulated in the Articles of Association.
7. The Board of Directors' duties based on the Regulation of the Minister of SOE State No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises:
   a. The Board of Directors must carry out their duties in good faith for the interests of the Company and be fully responsible for the Company management implementation;
   b. The Board of Directors is obliged to manage the Company following the authority and responsibilities of the Board of Directors as regulated in the articles of association, laws, and regulations;

c. Salah seorang Anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penempatan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan;
d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit intern; temuan auditor eksternal; nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris; laporan BPK; laporan BPKP; dan/atau temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
9. Direksi mempunyai hak dan berwenang untuk:
   a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
   b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
   c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
   e. Mengangkat dan memberhentikan Corporate Secretary dan/atau internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
   f. Menghapuskan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan;
   g. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris, yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
   h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam

c. One member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors Meeting as the person responsible for Good Corporate Governance assignment and monitoring in the Company;
d. The Board of Directors is obliged to follow up on findings and recommendations from the risk management, compliance, and internal audit functions; external auditor's findings; Board of Commissioners' advice and supervision results; BPK report; BPKP report; and/or other findings and recommendations that the Board of Directors must follow up based on statutory provisions.

8. The Board of Directors is tasked with carrying out all actions related to Company management for the interests of the Company and following the aims and objectives of the Company as well as representing the Company inside and outside the Court on all matters and all events with limitations regulated in laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.
9. The Board of Directors has the right and authority to:
   a. Establish Company management policies;
   b. Regulate the Board of Directors' transfer of powers to represent the Company inside and outside the court to one or several Board of Directors members specifically appointed for this purpose or to one or several Company employees, either individually or jointly and/or other bodies;
   c. Manage provisions on the Company's employment affairs, including determining salary, retirement, pension plan, and other income for the Company's employees following the applicable laws and regulations;
   d. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
   e. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and/or Internal Audit with the Board of Commissioners' approval;
   f. Write off bad debts per the provisions stipulated in the Articles of Association and subsequently be reported to the Board of Commissioners and accounted for in the annual report;
   g. No longer collect interest receivables, fines, fees, and other receivables other than the principal that is carried out in the framework of restructuring and/ or settlement of receivables and other actions to settle the Company's receivables, with the obligation to report to the Board of Commissioners, in which the provisions and procedures for reporting are determined by the Board of Commissioners;
   h. Perform any actions and other activities regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company to other parties and/or other parties to the Company, and represent the Company inside and outside the court on all matters

dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

i. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:
   - Menetapkan, mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan strategis dan operasional yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan, yakni seluruh kebijakan yang dapat secara material mempengaruhi kondisi anak perusahaan dan dapat memberikan nilai tambah yang dituangkan dalam *blue print* untuk diratifikasi dalam RUPS anak perusahaan;
   - Merencanakan, memutuskan mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan *cash management*, logistik, pengadaan, *capital expenditure dan lainnya*;
   - Menetapkan kebijakan strategis dan operasional yang belum ditetapkan dalam blue print sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 huruf a angka 9 point 1 Anggaran Dasar Perusahaan (Akta No. 40/2022);
   - Menetapkan kebijakan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi anak perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris anak perusahaan;
   - Memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusahaan atas tindakan yang bersifat operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran anak perusahaan melalui mekanisme RUPS;
   - Mendapatkan laporan dan penjelasan berkala baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan serta memberikan keputusan di dalam maupun di luar forum RUPS anak perusahaan menetapkan nilai atau jangka waktu kerjasama antara anak perusahaan dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, sewa-menyewa, aset, kerjasama operasi (KSO), bangunan guna serah (BOT), bangunan milik serah (BowT), bangunan serah guna (BT0), dan perjanjian sejenisnya;
   - Menyetujui penyertaan modal dan jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan oleh anak perusahaan pada perusahaan lain;
   - Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;
   - Menyetujui pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud;

and all events, with limitations as regulated in the laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

i. With consideration to laws and regulations and the Company's Articles of Association, the Board of Directors as shareholders and/or majority shareholders in every subsidiary has the authority, among other things, to:
   - Determine, manage, control, and monitor strategic and operational policies that will be implemented by the subsidiary, i.e., all policies that can materially influence the subsidiary's condition and can provide added value as outlined in the blueprint to be ratified at the subsidiary's GMS;
   - Plan, decide, manage, and control strategic activities and functions, including handling cash management, logistics, procurement, capital expenditure, etc.;
   - Determine strategic and operational policies that have not been stipulated in the blueprint as referred to in Article 12 paragraph 2 letter a number 9 point 1 of the Company's Articles of Association (Deed No. 40/2022);
   - Establish organizational structure policies one level below the subsidiary's Board of Directors by considering input from the subsidiary's Board of Commissioners;
   - Provide approval to the subsidiary's Board of Directors for operational actions that have not been determined in the subsidiary's Work Plan and Budget through the GMS mechanism;
   - Obtain periodic reports and explanations from the subsidiaries' Board of Directors and/or Board of Commissioners and provide resolutions inside and outside the subsidiary's GMS forum to determine the value or term of cooperation between subsidiaries and business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leases, assets, joint operations (KSO), build, operate, and transfer (BOT), build, own transfer (BOwT), build, transfer, and operate (BTO), and other similar agreements;
   - Approve capital participation and the amount of capital investment to be made by subsidiaries in other companies;
   - Approve the establishment of subsidiaries and/or joint ventures from said subsidiaries;
   - Approve the release of capital participation in subsidiaries and/or joint ventures of said subsidiaries;

- Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau anak perusahaan dari anak perusahaan dimaksud, dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- Menyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/atau menyetujui penjualan terhadap persediaan barang tidak dapat digunakan oleh anak perusahaan;
- Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merek dagang anak perusahaan;
- Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dani atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;
- Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/ atau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;
- Menyetujui pembelian aset lahan dan/atau *land bank* untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

10. Direksi berkewajiban untuk:
    a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
    b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
    c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
    d. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepengurusan Perusahaan, laporan mengenai kegiatan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau;
    e. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

- Approve the merger, consolidation, takeover, separation, and dissolvent of subsidiaries and/or subsidiaries of said subsidiaries, with a certain value determined by the Board of Commissioners;
- Approve the write-off of uncollectible receivables and/or approve the sale of unusable inventory by the subsidiary;
- Determine and/or change the logo and trademarks of subsidiaries;
- Approve the establishment of foundations, funding organizations, or associations with legal entities, directly or indirectly related to those formed by subsidiaries;
- Approve the imposition of fixed and routine costs and obligations for foundations, organizations, and/or associations with legal entities formed by subsidiaries;
- Approve the purchase of land and/or land bank assets for property business activities or used as fixed assets by first obtaining approval from the Board of Commissioners and a certain value determined by the Board of Commissioners;

10. The Board of Directors is obliged to:
    a. Undertake and ensure the management of the Company's business and activities following its purposes, objectives, and business activities;
    b. Establish, in time, the Company's Long-Term Plan, the Company's Annual Work Plan and Budget, and other work plans and their amendments to be submitted to the Board of Commissioners for approval;
    c. Prepare the Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, and minutes of the Board of Directors meetings;
    d. Prepare the Annual Report, which, among others, contains the Financial Statements as a form of Company management accountability, reports on the Company's activities, reports on the Social and Environmental Responsibility implementation, details of problems arising during the fiscal year that affect the Company's business activities, reports on supervisory duties carried out by the Board of Commissioners during the past fiscal year, names of Board of Directors members and Board of Commissioners members, salaries and allowances for Board of Directors members and salaries or honoraria and allowances for Board of Commissioners members of the Company for the past year;
    e. Prepare Financial Statements based on the Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant to be audited;

f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun buku Perusahaan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
g. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
h. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
j. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya;
k. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya;
l. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan Peraturan Perundangan khususnya di bidang Pasar Modal;
o. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal;
q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS;
r. Menyusun piagam Direksi;
s. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta organ pendukung yang dimiliki Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
t. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan konstruksi dan investasi setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;

f. Deliver the Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners within a maximum period of four months after the Company's fiscal year ends to the GMS for approval and ratification;
g. Provide an explanation to the GMS on the Annual Report;
h. Delivering the Balance Sheet and Income Statement that has been approved by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights following the provisions of laws and regulations;
i. Prepare other reports mandated by the provisions of laws and regulations;
j. Maintaining the Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, Board of Commissioners Meeting Minutes and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Report, and the Company's financial documents as well as other Company documents;
k. Maintain the following in the Company: Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, Board of Commissioners Meeting Minutes and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Report, and the Company's financial documents as well as other Company documents;
l. Procure and maintain the Company's bookkeeping and administration per the norms applicable to a Company;
m. Prepare an accounting system following the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of handling, recording, storing, and supervising;
n. Provide periodic reports following the applicable provisions, as well as other reports anytime at the request of the Board of Commissioners, by observing the laws and regulations, particularly regulations in the Capital Market sector;
o. Prepare the Company's organizational structure, complete with the details and duties;
p. Provide explanation on all matters questioned or requested by members of the Board of Commissioners by observing the laws and regulations and applicable regulations, particularly in the Capital Market sector;
q. Perform other obligations following the provisions of the Articles of Association and those stipulated by the GMS;
r. Prepare the Board of Directors charter;
s. Together with the Board of Commissioners, develop a code of conduct that applies to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employees, and the Company's supporting organs, following the provisions of the prevailing laws and regulations;
t. Establish guidelines and/or policies for the governance of construction and investment activities after obtaining prior approval from the Board of Commissioners;

u. Mengidentifikasi jenis-jenis perubahan lingkungan bisnis yang dapat berpengaruh pada kinerja Perusahaan, terkait aspek-aspek: perubahan kondisi politik nasional, arah pembangunan nasional, perubahan regulasi pemerintah, regulasi pasar modal, kondisi ekonomi makro, perubahan teknologi, persaingan pada lingkungan usaha sejenis. Perubahan lingkungan bisnis dapat dibahas dalam Rapat Direksi, *Management Review*, dan atau pertemuan rutin yang lain. Mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang berdampak signifikan dilaporkan ke Dewan Komisaris.

11. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
12. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
    a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. Telah melakukan pengurusan, dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
    d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh napat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
15. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
    a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;

u. Identify types of changes in the business environment that may affect the Company's performance related to: changes in national political conditions, national development directions, changes in government regulations, capital market regulations, macroeconomic conditions, technological changes, and competition in similar business environments. Changes in the business environment can be discussed in the Board of Directors Meeting, Management Review, and/or other regular meetings. Changes in the business environment and problems that have a significant impact are reported to the Board of Commissioners.

11. In carrying out their duties, the Board of Directors must devote their full energy, thoughts, attention, and devotion to their duties, obligations, and the achievement of the Company's objectives.
12. The Board of Directors members shall comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
13. In carrying out their duties, each Board of Directors member is obliged to carry out their duties in good faith and with full responsibility for the interests and business of the Company by considering business risks and heeding the applicable laws and regulations.
14. Every Board of Directors member is jointly responsible for the Company's losses caused by the Board of Directors members' mistakes or negligence in carrying out their duties. The Board of Directors members cannot be held responsible for the Company's losses if the concerned Board of Directors member can prove that:
    a. The loss is not due to their fault or negligence;
    b. They have carried out management in good faith, full of responsibility, and prudence for the interest and following the Company's goals and objectives;
    c. They do not have a conflict of interest, directly or indirectly, over management actions that result in losses;
    d. They have taken measures to prevent the losses. Actions taken by Board of Directors members other than those decided by Board of Directors meetings are the responsibility of the person concerned until the action in question is approved by a Board of Directors Meeting.
15. The following Board of Directors actions must obtain written approval from the Board of Commissioners to:
    a. Release/transfer and/or pledge the Company's assets with a value exceeding a certain amount as determined by the Board of Commissioners, except for assets recorded as inventory, with due observance of the provisions in the capital market;

b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi (KSO), kontrak manajemen, kerja sama lisensi Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer*/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Own/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan di bawah 5 (lima) tahun;
c. Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai yang ditetapkan Komisaris pada Perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
g. Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
i. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*bond* atau *avalist*) dengan nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
j. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
k. Memberikan pinjaman jangka pendek menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
l. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
m. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan

b. Cooperate with business entities or other parties by entering a Joint Operation (KSO), management contract, licensing cooperation, Build, Operate, and Transfer (BOT), Build, Operate, and Own (BOO), and other agreements of the same nature whose term is more than three years to less than five years;
c. Establish and change the Company's logo;
d. Establish an organizational structure one level below the Board of Directors;
e. Make capital investments, release equity participation, including changes to the capital structure with a certain value determined by the Board of Commissioners in other companies, subsidiaries, and joint ventures not in the context of saving receivables by taking into account the capital market provisions;
f. Establish subsidiaries and/or joint ventures with a certain value determined by the Board of Commissioners in other companies, subsidiaries, and joint ventures by taking into account the capital market provisions;
g. Propose Company representative to become candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of subsidiaries who make significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the Board of Commissioners;
h. Perform a merger, consolidation, takeover, separation, and dissolvent of subsidiaries and joint ventures with a certain value determined by the Board of Commissioners by taking into account the capital market provisions;
i. Bind the Company as guarantor (borg or avalist) with a certain value determined by the Board of Commissioners by taking into account the capital market provisions;
j. Receive medium/long term loans and give medium/long term loans with a certain value determined by the Board of Commissioners by taking into account the capital market provisions;
k. Lend non-operational short/medium/long term loans, except for loans to Subsidiaries that only required a report to the Board of Commissioners;
l. Write off bad debts and dead inventories from the Company's books for any value exceeding the limit set by the Board of Commissioners;
m. Take actions included in material transactions as stipulated by capital market laws and regulations with a certain value determined by the Board of Commissioners, unless such actions are included in material transactions that are excluded by

tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

n. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) RKAP;
o. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan (Akta No. 40/2022) menggunakan pembiayaan oleh Perusahaan terlebih dahulu (proyek *turnkey/ pre-financing*) dengan nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
p. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
q. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/ atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Direksi.

16. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada point 15.a, 15.b, 15.e, 15.t, 15.g, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.1 dan 15.p dituangkan dalam Surat Penetapan Dewan Komisaris.
17. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan poin 15.a, 15.b, 15.e, 15.t, 15.9, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.1 dan 15.p dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan PT PP (Persero)Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas.
18. Tindakan Direksi sebagaimana yang dimaksud pada poin 15.b, sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
19. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada point 15.b, 15.e, 15.1, 15.9, 15.h, sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/ atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
20. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 15 sampai dengan poin 19 ditetapkan berdasarkan Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang telah dituangkan dalam Anggaran Dasar Terakhir Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. 40/2022.
21. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin 17, 18, 19 dan 20.

prevailing capital market laws and regulations;

n. Take actions not stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
o. Carry out the main business activities as intended in Article 3 of the Company's Articles of Association (Deed No. 40/2022) using turnkey projects/ pre-financing with certain values and criteria determined by the Board of Commissioners;
p. Purchasing land and/or land bank assets for property business activities or used as fixed assets, with a certain value determined by the Board of Commissioners;
q. Make investments with certain value limits and/or criteria determined by the Board of Commissioners based on recommendations from the Board of Directors.

16. Determination of limits and/or criteria by the Board of Commissioners for matters as referred to in points 15.a, 15.b, 15.e, 15.t, 15.g, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.1 and 15.p are stated in the Board of Commissioners Determination Letter.
17. The Board of Commissioners approval specifically regarding points 15.a, 15.b, 15.e, 15.t, 15.9, 15.h, 15.i, 15.j, 15.k, 15.1 and 15.p with limitations and/or certain criteria, determined by the Board of Commissioners after obtaining approval from PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.
18. The Board of Directors' actions referred to in point 15.b, as long as they are necessary to carry out the main business activities that are commonly carried out in the relevant business sector with due observance of the provisions of laws and regulations, do not require approval from the Board of Commissioners and/or the GMS.
19. The Board of Directors' actions as referred to in points 15.b, 15.e, 15.1, 15.9, 15.h, as long as necessary to participate in tenders and/or to carry out projects and/or fulfill requirements and/or carry out main business activities which are commonly carried out in the relevant business sector with due observance of the provisions of laws and regulations, do not require approval from the Board of Commissioners and/or the GMS.
20. The Board of Directors' actions, as referred to in points 15 to 19, are determined based on the 2022 Annual GMS Results, which have been outlined in the Company's Latest Articles of Association based on the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No. 40/2022.
21. Within a maximum period of thirty days from receipt of the request or complete explanation and documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners must provide a decision as referred to in points 17, 18, 19, and 20.

22. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
    a. Mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau
    b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan;
    c. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), kerja sama lisensi, bangun guna serah (BOT), bangun serah guna (BT0), bangun guna milik (BOO), dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama untuk melaksanakan kegiatan usaha utama yang nilainya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar.
23. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
    a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dengan nilai atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di Pasar Modal;
    c. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di pasar modal;
    d. Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.
24. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 22 dan 23 yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perusahaan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
25. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.
26. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.
27. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perusahaan, setiap Anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
28. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 27, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

22. The Board of Directors must seek GMS approval to:
    a. Transferring the Company's assets; or
    b. Pledge the Company's assets as debt collateral;
    c. Cooperate with business entities or other parties in the form of Joint Operation (KSO), Business Cooperation (KSU), license cooperation, Build, Operate, and Transfer (BOT), Build, Transfer, and Own (BTO), Build, Operate, and Own (BOO), and other agreements of the same nature to carry out the main business activities whose value constitutes more than 50% of the total net assets of the Company in one or more transactions, whether related to each other or not. Except as an executor of the Company's business activities following Article 3 of the Articles of Association.
23. The following actions may only be carried out by the Board of Directors after obtaining a written response from the Board of Commissioners and obtaining approval from the GMS to:
    a. Perform actions regarded as material transactions stipulated by the prevailing laws and regulations in the capital market with a value above 50% of the Company's equity unless such actions are included in material transactions that are excluded by the prevailing laws and regulations in the capital market;
    b. Perform transactions that contain conflicts of interest as stipulated in the prevailing laws and regulations in the capital market;
    c. Perform other transactions to comply with the prevailing laws and regulations in the capital market;
    d. Carry out special assignments given by the central government to carry out public benefit functions as well as national research and innovation.
24. Legal actions, as referred to in points 22 and 23, which are carried out without the approval of the GMS, remain binding on the Company as long as the other parties to the legal action have good intentions.
25. The GMS can reduce restrictions on the actions of the Board of Directors or determine other limits on the Board of Directors other than those regulated in the Articles of Association.
26. Management policies are determined at the Board of Directors Meeting.
27. To carry out the Company management, every Board of Directors member has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company following the Company's management policies and authority determined per the Board of Directors resolution.
28. Unless otherwise stipulated in the Company's management policy as referred to in point 27, the President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the Court.

29. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka:
    a. Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu Anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas tugas Direktur Utama dar/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;
    b. Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis Anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis Anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan;
    c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis Anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
30. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
31. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
32. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
33. Direksi dalam mengurus Perusahaan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
34. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
    a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; atau;
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

29. If the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, then:
    a. The Deputy President Director has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the President Director's duties, or the President Director appoints a Board of Directors member in writing authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director and/or the Deputy President Director if the Deputy President Director is absent or unavailable at the same time;
    b. The Deputy President Director appoints a Board of Directors member in writing authorized to carry out the duties of the Deputy President Director, or the Deputy President Director appoints a Board of Directors member in writing authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director and/or Deputy President Director if the President Director is absent or unavailable;
    c. If the GMS does not appoint a Deputy President Director, in the event that the President Director is absent or is unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, the President Director appoints a Board of Directors member in writing authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the President Director's duties.
30. In the event that the President Director does not appoint, the Board of Directors member who has been in office the longest has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the President Director's duties.
31. For certain actions on their responsibility, the Board of Directors also has the right to appoint one or more people as their representatives or proxies by giving them or them the authority for certain actions as regulated in a power of attorney.
32. The division of duties and authority of every Board of Directors member is determined by the GMS. In the event that the GMS does not determine the division of duties and authority, the division of duties and authority among the Board of Directors is determined based on a Board of Directors resolution.
33. In managing the Company, the Board of Directors carries out the instructions given by the GMS as long as they do not conflict with the Legislative Regulations and/or the Articles of Association.
34. The Board of Directors Members are not authorized to represent the Company if:
    a. There is a case in court between the Company and the concerned Board of Directors member; or
    b. The concerned Board of Directors member has a conflict of interest with the Company.

35. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana di maksud dalam poin 37 yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
    c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
36. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
37. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Hak Direksi

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi, hak Direksi sebagai berikut.

1. Mendapatkan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut;
    b. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS;
    c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
    d. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS dan baru terbebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan;

35. In the event that there are circumstances as referred to in point 37, the person entitled to represent the Company is:
    a. Other Board of Directors members who do not have a conflict of interest with the Company;
    b. The Board of Commissioners in the event that all Board of Directors members have a conflict of interest with the Company; or
    c. Other parties appointed by the GMS in the event that all Board of Directors members or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
36. In the event that there is more than one Board of Directors member who has been in office the longest, then the Board of Directors member who has been in office the longest and the oldest has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the President Director's duties.
37. Submit a State Officials' Wealth Report based on the Decree of the Board of Directors No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 dated January 26, 2021.

Board of Directors' Rights

Based on the Guidelines for the Board of Directors' Duties implementation, the Board of Directors' rights are as follows.

1. Receive a salary along with other facilities and/or allowances, including bonuses and retirement benefits, the type and amount of which are determined by the GMS, and this authority can be delegated to the Board of Commissioners.
2. Resign from their position before their term of office ends by submitting a written resignation request regarding their intentions to the Company, with the following conditions:
    a. The Company is obliged to hold a GMS to decide on requests for resignation of the Board of Directors member no later than 90 days after receiving the resignation letter;
    b. The Company is required to disclose the information to the public and submit it to OJK no later than two working days after receiving the Board of Directors resignation request and the GMS results;
    c. Before the resignation is effective, the relevant Board of Directors member is still obliged to complete their duties and responsibilities following the Articles of Association and laws and regulations;
    d. Resigned Board of Directors Members can still be held accountable as the Board of Directors members from the time of their appointment until the date of their resignation approval at the GMS and will only be free from responsibility after obtaining responsibility release at the Annual GMS;

e. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

e. In the event that the Board of Directors members' resignation results in the number of Board of Directors members being less than two people, the resignation is valid if determined by the GMS and new Board of Directors members have been appointed, thereby meeting the minimum requirements for the number of Board of Directors members.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Direksi telah mengatur pembagian kerja di antara para anggota sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya, Direksi telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/DIR/PPRE/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perubahan Nomenklatur dan Pembagian Tugas Direksi. Berikut uraian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi serta realisasinya.

Division of Duties and Responsibilities of Every Board of Directors Member

The Board of Directors has regulated the division of duties among its members as determined in the appointment of Board of Directors members by the GMS. Furthermore, the Board of Directors has determined the division of duties and responsibilities of each member following the Decree of the Board of Directors No. 04/SK/DIR/PPRE/I/2023 dated January 2, 2023. The following describes the division of the Board of Directors' duties and responsibilities along with the realization.

I Gede Upeksa Negara **(Direktur Utama)** (President Director)	
• Pengelolaan Kesekretariatan Perusahaan; • Pengelolaan pengawasan internal Perusahaan; • Pengelolaan kualitas proyek; • Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan Kerja; • Penyusunan RJPP dan RKAP; • Pengelolaan manajemen rantai pasok; • Pengendalian operasi dan bisnis; • Pengendalian Anak Perusahaan melalui *parenting;* dan • Pengembangan teknologi pendukung operasional.	• Company Secretariat Management; • Management of the Company's internal controls; • Project quality management; • Health, Safety, and Work Environment Management; • RJPP and RKAP preparation; • Management of supply chain management; • Operation and business control; • Subsidiaries control through parenting; and • Development of operational supporting technology.

Mohammad Arif Iswahyudi **(Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal)** (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	
• Pengelolaan akuntansi dan pajak; • Pengelolaan keuangan; • Pengelolaan manajemen risiko; • Pengelolaan legal; • Penyusunan RJPP dan RKAP; • Pengelolaan manajemen rantai pasok; • Pengendalian Operasi dan Bisnis; • Pengendalian Anak Perusahaan melalui *parenting;* dan • Pengembangan teknologi pendukung operasional.	• Accounting and tax management; • Financial management; • Management of risk management; • Legal management; • RJPP and RKAP preparation; • Management of supply chain management; • Operations and Business Control; • Subsidiaries control through parenting; and • Development of operational supporting technology.

Rebimun **(Direktur Operasi)** (Director of Operations)	
• Pengelolaan teknik dan tender; • Pengelolaan operasional proyek *Civil work;* • Pengelolaan operasional proyek *structure Work;* • Pengelolaan operasional proyek *Mining*; • Pengelolaan kinerja operasional; • Penyusunan RJPP dan RKAP; • Pengelolaan manajemen rantai pasok; • Pengendalian Operasi dan Bisnis; • Pengendalian Anak Perusahaan melalui *parenting;* dan • Pengembangan teknologi pendukung operasional.	• Engineering and tender management; • Civil work project operational management; • Operational management of the Work structure project; • Management of mining project operations; • Operational performance management; • RJPP and RKAP preparation; • Management of supply chain management; • Operations and Business Control; • Subsidiaries control through parenting; and • Development of operational supporting technology.

Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	
• Pengelolaan bisnis dan portofolio perusahaan; • Perencanaan strategi dan sistem korporasi; • Pengelolaan manajemen alat perusahaan • Pengelolaan sumber daya manusia; • Pengelolaan pemasaran perusahaan; • Penyusunan RJPP dan RKAP; • Pengelolaan manajemen rantai pasok; • Pengendalian Operasi dan Bisnis; • Pengendalian Anak Perusahaan melalui *parenting;* dan • Pengembangan teknologi pendukung operasional.	• Business and company portfolio management; • Strategic planning and corporate systems; • Management of company tool management; • Human resource management; • Company marketing management; • RJPP and RKAP preparation; • Management of supply chain management; • Operations and Business Control; • Subsidiaries control through parenting; and • Development of operational supporting technology.

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Perusahaan senantiasa memberikan program orientasi kepada semua anggota Direksi yang baru dengan memberikan pemahaman mengenai peran, tugas dan tanggung jawab mereka, dan kepatuhan terhadap praktik dan kebijakan tata kelola perusahaan. Tanggung jawab pengadaan program tersebut berada pada Biro Corporate Secretary atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Biro Corporate Secretary. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lain yang sesuai dengan kebutuhan. Program pengenalan ini dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direksi baru. Adapun metode pengenalan Perusahaan tersebut dapat berupa:

Onboarding Program for New Board of Directors Members

The Company organizes an onboarding program for new Board of Directors members by providing knowledge about their roles, duties and responsibilities, and compliance with corporate governance practices and policies. The responsibility for holding the program lies with the Corporate Secretary Bureau or anybody performing the Corporate Secretary Bureau's function. The Company's onboarding programs can include presentations, meetings, visits to the Company and document reviews, or other programs as needed. The onboarding program is held for a maximum of one month after the appointment of new Board of Directors members. The onboarding method can be in the form of:

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles Implementation	Gambaran umum Perusahaan The Company's Overview	Visi dan Misi Perusahaan Corporate Vision and Mission	Budaya Perusahaan Corporate Culture
Struktur Organisasi dan *Job Description* Organizational Structure and Job Description	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors	Rencana Jangka Panjang Perusahaan The Company's Long-Term Plan (RJPP)	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan The Company's Budget and Work Plan (RKAP)
Audit Internal dan Audit Eksternal Internal and External Audit	Komite Audit Audit Committee	Komite Kepatuhan Compliance Committee	Sistem-Sistem yang Berlaku di Perusahaan Applicable Systems in the Company

Di tahun 2023 terdapat pengangkatan Yudi Setiawan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM dan I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Utama yang baru. Pelaksanaan program orientasi dan pengenalan Perusahaan kepada beliau Dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023 yang dilaksanakan di Plaza PP, Wisma Robinson, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta Komite Audit, Komite Kepatuhan, Sekretaris Dewan Komisaris dan Corporate Secretary.

In 2023, Yudi Setiawan was appointed Director of Business Planning and HCM, while I Gede Upeksa Negara was appointed President Director. The Company's orientation and onboarding program for them was carried out on June 20, 2023, in the Wisma Robinson Meeting Room, Floor 1, and attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Compliance Committee, Secretary to the Board of Commissioners and Corporate Secretary.

Laporan Pelaksanaan Kerja Direksi

The Board of Directors' Work Implementation Report

Laporan Kunjungan Kerja Direksi di sepanjang Tahun 2023
The Board of Directors Work Visit in 2023

No.	Tanggal Date	Agenda Kerja Work Agenda
1	20 Januari 2023 January 20, 2023	Kunjungan kerja Kementerian Perhubungan ke Proyek Pembangunan Dermaga Logistik. Ministry of Transportation's working visit to the Logistics Pier Construction Project.
2	31 Januari 2023 January 31, 2023	Kunjungan Direktur Utama dan Direktur Keuangan ke Proyek *hauling* Weda bay Nikel. The President Director and Director of Finance's Visit to the Weda Bay Nickel hauling project.
3	2 Februari 2023 February 2, 2023	Kunjungan Direktur Operasi ke Proyek Dermaga Logistik IKN dengan Pembahasan Metode Pemancangan. The Director of Operations's Visit to the IKN Logistics Pier Project with a discussion of Piling Methods.
4	10 Februari 2023 February 10, 2023	Kunjungan Kerja Direksi ke Proyek Vale Dihadiri Oleh Direktur Utama, Direktur Operasi dan Direktur Keuangan, Manrisk & Legal. The Board of Directors' Working Visit to the Vale Project, Attended by the President Director, Director of Operations, and Director of Finance, Risk Management & Legal.
5	1 Maret 2023 March 1, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Jembatan Gorontalo. PPRE Director of Operations' visit to the Gorontalo Bridge Project.
6	16 Maret 2023 March 16, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Dermaga IKN. PPRE Director of Operations' visit to IKN Pier Project.
7	20-21 Maret 2023 March 20-21, 2023	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris PPRE ke Pembangunan Proyek Dermaga Logistik IKN. PPRE Board of Commissioners' Working Visit to IKN Logistics Pier Construction Project.
8	14 April 2023 April 14, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Dermaga IKN. PPRE Director of Operations' visit to IKN Pier Project.

No.	Tanggal Date	Agenda Kerja Work Agenda
9	25-26 Mei 2023 May 25-26, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Jembatan Makarti Hengjaya. PPRE Director of Operations' visit to the Makarti Hengjaya Bridge Project.
10	6 Juni 2023 June 6, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Dermaga IKN terkait program monitoring *progress* pekerjaan proyek. PPRE Director of Operations' visit to IKN Pier Project regarding the project work progress monitoring program.
11	20-21 Juni 2023 June 20-21, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Dermaga IKN terkait *pre construction meeting*. PPRE Director of Operations' visit to IKN Pier Project on the pre-construction meeting.
12	7 Juli 2023 July 7, 2023	Kunjungan Direktur Utama & Direktur Operasi PPRE ke Proyek Weda bay Nikel. PPRE President Director & Director of Operations' visit to the Weda Bay Nickel Project.
13	7 Juli 2023 July 7, 2023	Kunjungan Direktur Keuangan, MR & Legal ke Proyek Vale. The Director of Finance, RM & Legal's visit to the Vale Project.
14	12- 14 Juli 2023 July 12-14, 2023	Kunjungan Direktur Utama PPRE ke Proyek Weda bay Nikel. PPRE President Director's visit to the Weda Bay Nickel Project.
15	14 Juli 2023 July 14, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Vale. PPRE Director of Operations' visit to the Vale Project.
16	24 Juli 2023 July 24, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Pembangunan Jalan KA Lintas Medan Binjai. PPRE Director of Operations' visit to the Medan Binjai Cross Railway Construction Project.
17	25 Juli 2023 July 25, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Pembangunan Jalan Tol Indrapura Kisaran Medan. PPRE Director of Operations' visit to the Indrapura Kisaran Medan Toll Road Construction Project.
18	31 Juli 2023 July 31, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Jalan Tol Cinere Jagorawi. PPRE Director of Operations' visit to the Cinere Jagorawi Toll Road Project.
19	2 Agustus 2023 August 2, 2023	Kunjungan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM ke Proyek Jalan Tol Cinere Jagorawi. The Director of Business Planning & HCM's Visit to the Cinere Jagorawi Toll Road Project.
20	8-9 Agustus 2023 August 8-9, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ukularan SKPT Saumlaki. PPRE Director of Operations' visit to the SKPT Saumlaki Ukularan Fishing Port Infrastructure and Facilities Construction.
21	18 Agustus 2023 August 18, 2023	Kunjungan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM ke Proyek Pembangunan Jalan Tol Indrapura Kisaran. The Director of Business Planning & HCM's Visit to the Indrapura Kisaran Toll Road Construction Project.
22	31-01 Agustus 2023 August 31-01, 2023	Kunjungan Direktur Utama & Direktur Operasi PPRE ke Proyek Weda bay Nikel. PPRE President Director & Director of Operations' Visit to the Weda Bay Nickel Project.
23	14 September 2023 September 14, 2023	Kunjungan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM PPRE ke Proyek Batching Plant KIT Batang. PPRE Director of Business Planning & HCM's Visit to the KIT Batang Batching Plant Project.
24	21 September 2023 September 21, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Dermaga IKN. PPRE Director of Operations' Visit to IKN Pier Project.
25	4 Oktober 2023 October 4, 2023	Kunjungan Direktur Utama PPRE ke Proyek Vale. PPRE President Director's Visit to the Vale Project.
26	6 Oktober 2023 October 6, 2023	Kunjungan Direktur Utama PPRE ke Proyek Dermaga IKN. PPRE President Director's Visit to IKN Pier Project.
27	10 Oktober 2023 October 10, 2023	Kunjungan Direktur Operasi PPRE ke Proyek Vale. PPRE Director of Operations' Visit to the Vale Project.
28	11 Oktober 2023 October 11, 2023	Kunjungan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM PPRE ke *Workshop* Cariu. PPRE Director of Business Planning & HCM's Visit to the Cariu Workshop.
29	28 Oktober 2023 October 28, 2023	Kunjungan Direktur Utama dan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM PPRE ke *Workshop* Cariu. PPRE President Director and Director of Business Planning & HCM's Visit to the Cariu Workshop.
30	31 Oktober 2023 October 31, 2023	Kunjungan Direktur Utama & Direktur Operasi PPRE ke Proyek Dermaga IKN. PPRE President Director & Director of Operations' Visit to IKN Pier Project.

Informasi tentang Keberadaan Komite Pendukung Direksi

Hingga akhir tahun 2023 Direksi tidak membentuk komite untuk mendukung kinerja Direksi.

Information on the Board of Directors Supporting Committee

Until the end of 2023, the Board of Directors did not establish a committee to support the Board of Directors' performance.

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menentukan Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan memiliki kebijakan formal dalam bentuk tertulis terkait kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam *Board Manual*, di mana *Board Manual* PP Presisi menyebutkan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan harus sedemikian rupa disesuaikan dengan besarnya kegiatan kompleksitas bisnis Perusahaan dan struktur organisasi sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.

INFORMATION TRANSPARENCY ON THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Policy on the Board of Commissioners and Board of Directors' Composition Diversity

In determining the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company has a written formal policy regarding the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition, which is regulated in the Board Manual, where PP Presisi Board Manual states that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors must be adjusted to the Company's immense complexity of activities and organizational structure to enable effective, precise, and fast decision-making, to achieve the Company's goals.

Nama Name	**Kewarganegaraan** Nationality	**Usia** Age	**Gender** Gender	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Keahlian** Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	Indonesia	64	Pria Male	Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Sarjana Hukum Doctorate in Law, Master of Law, Bachelor of Law	• Ilmu Hukum • Teknik Stratejik • Risiko Bisnis • *Legal & Compliance* • SDM/*Human Capital* • Sistem *Management & Safety* • Law • Strategic Engineering • Business Risk • Legal & Compliance • Human capital • Management & Safety Syste
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia	44	Pria Male	Sarjana Hukum Bachelor of Law	• Ilmu Hukum • Bisnis/Niaga • Pemasaran • Komunikasi • *Legal & Compliance* • Legal studies • Business • Marketing • Communication • Legal & Compliance
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia	50	Pria Male	Magister Ilmu Sosial dan Politik dan Sarjana Teknik Sipil Master of Social and Political Science, Bachelor of Civil Engineering	• *Engineering & Maintenance* • Bisnis/Niaga/ Pemasaran • Jasa Keuangan • SDM/*Human Capital* • Engineering & Maintenance • Business/Marketing • Financial Service • Human Capital

Nama Name	**Kewarganegaraan** Nationality	**Usia** Age	**Gender** Gender	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Keahlian** Expertise
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia	53	Pria Male	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economics	• Ilmu Ekonomi • Risiko Bisnis • Telekomunikasi & Media • Infrastruktur • *Treasury* • Economics • Business Risk • Telecommunication & Media • Infrastructure • Treasury
Direksi Board of Directors					
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) (President Director)	Indonesia	51	Pria Male	Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering	Teknik Sipil Civil Engineering
Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	Indonesia	41	Pria Male	Magister Investasi dan Keuangan dan Sarjana Ekonomi Akuntansi Master of Investment and Finance, Bachelor of Economic Accounting	• Keuangan • Pengembangan Usaha/R&D • SDM/*Human Capital* • Bisnis/Niaga/ Pemasaran • Finance • Business Development/R&D • Human Capital • Business/Marketing
Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Indonesia	48	Pria Male	Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering	• Risiko Bisnis • Sistem *Management & Safety* • Logistik/*Supply Chain/Asset*/GA • Operasi/Produksi/ Proyek • Business Risk • Management & Safety System • Logistics/Supply Chain/Assets/GA • Operations/Productions/Projects
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	Indonesia	44	Pria Male	Magister Manajemen dan Sarjana Teknik Sipil Master of Management, Bachelor of Civil Engineering	• *Construction Management* dan *Project Management* • *Engineering Process* • Administrasi Kontrak & *Legal Aspect* • *Procurement* • Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 • HSE Management (OHSAS 18001) • Pengembangan SDM • Bidang Konstruksi • *Improvement Program* • *Green Building* dan *Green Contractor* • Internal Auditor • *Risk Management* • Construction Management dan Project Management • Engineering Process • Contract Administration & Legal Aspect • Procurement • Quality Management System ISO 9001-2015 • HSE Management (OHSAS 18001) • HR Development • Construction • Improvement Program • Green Building dan Green Contractor • Internal Auditor • Risk Management

Lebih lengkap tentang profil masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More details about the profiles of every Board of Commissioners and Board of Directors are available in the Company Profile section of this Annual Report.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

Rapat Dewan Komisaris

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman GCG, di mana Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat internal paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Sementara, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui *teleconference* dengan tetap memperhatikan persyaratan keabsahan pengambilan keputusan.

Board of Commissioners Meetings

The Board of Commissioners' meeting organization refers to the GCG Code, where the Board of Commissioners must hold an internal meeting at least once every two months and held if attended by a majority of all Board of Commissioners members. Meanwhile, joint meetings with the Board of Directors are held at least once every four months. Meetings can be held in person or via teleconference while still considering the requirements for the decision-making validity.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat internal dengan frekuensi kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Throughout 2023, the Board of Commissioners held seven internal meetings, with the attendance frequency of each Board of Commissioners member available in the following table:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2023

Board of Commissioners' Attendance Recapitulation on Internal Board of Commissioners Meetings in 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Jumlah Wajib Rapat** Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	7	7	100,00
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	7	7	100,00
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	7	7	100,00
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	4	4	100,00
Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama)* (President Commissioner)*	3	3	100,00
Rata-rata Kehadiran | Average Attendance			100,00

* Yul Ari Pramuraharjo tidak lagi menjabat sejak 24 Mei 2023. Pada tanggal yang sama, Muhammad Zahid resmi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.
* Yul Ari Pramuraharjo no longer held office since May 24, 2023. On the same date, Muhammad Zahid officially served on the Company's Board of Commissioners.

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Minutes of Board of Commissioners Meetings and Board of Commissioners Attendance

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #01

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
7 Februari 2023; Ruang Rapat Amanah 1 & 2 Plaza PP

AGENDA RAPAT:
- Realisasi Kinerja Perusahaan s.d. Desember 2022;
- Evaluasi Kebijakan Mutu (QHSE) dan Pelayanan;
- Implementasi Sistem IT;
- Pengadaan dan Pengelolaan SDM;
- *KPI* Perusahaan;
- *Update* Aksi Perusahaan;
- *Progress* Pelaksanaan Rekomendasi Hasil *Assessment* Maturitas 2021
- SMAP, WBS, dan Gratifikasi;
- Persiapan *Assessment* Penerapan GCG: Aspek Dewan Komisaris Tahun 2022;
- Progres Rencana Tindak Lanjut AOI Hasil *Self Assessment* Penerapan GCG Tahun 2021 per Desember 2022;
- Lain-lain.

PESERTA RAPAT:
- Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama)
- Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris)
- Nur Rochmad (Komisaris)
- Albert Simangunsong (Komisaris)
- Abdullah Sigit (Anggota Komite Kepatuhan)
- Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan)
- Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit)
- Mubari (Anggota komite Audit)
- Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #01

MEETING DATE AND VENUE:
February 7, 2023; Amanah Meeting Room 1 & 2 at Plaza PP

MEETING AGENDA:
- Realization of Company Performance up to December 2022;
- Evaluation of Quality Policy (QHSE) and Services;
- IT System Implementation;
- Procurement and HR Management;
- Corporate KPI;
- Update on Corporate Actions;
- Progress in Implementing Recommendations from the 2021 Maturity Assessment Results
- SMAP, WBS, and Gratuity;
- Preparation for GCG Implementation Assessment: Board of Commissioners Aspects in 2022;
- Progress of AOI's Follow-up Plan on the Results of the 2021 GCG Implementation Self-Assessment up to December 2022;
- Others.

MEETING PARTICIPANT:
- Yul Ari Pramuraharjo (President Commissioner)
- Indra Jaya Rajagukguk (Commissioner)
- Nur Rochmad (Commissioner)
- Albert Simangunsong (Commissioner)
- Abdullah Sigit (Compliance Committee Member)
- Bari Srisoenami (Compliance Committee Member)
- Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member)
- Mubari (Audit Committee Member)
- Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #02

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
30 Maret 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1

AGENDA RAPAT:
- Evaluasi Kinerja s.d. Februari 2023;
- Kinerja Peralatan s.d. Februari 2023;
- Sistem-sistem di Perusahaan;
- Hasil Laporan Keuangan *Audited* tahun 2022;
- Sekilas Laporan Kunjungan Dewan komisaris ke Proyek IKN;
- *Update* Aksi Korporasi s.d. Februari 2022;
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris tahun 2022;
- Hasil *Assessment* Penerapan GCG Tahun 2022;
- Manajemen Risiko;
- KPI Korporat tahun 2022.

PESERTA RAPAT:
- Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama)
- Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris)
- Nur Rochmad (Komisaris)
- Albert Simangunsong (Komisaris)
- Abdullah Sigit (Anggota Komite Kepatuhan)
- Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan)
- Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit)
- Mubari (Anggota komite Audit)
- Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)

DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #02

MEETING DATE AND VENUE:
March 30, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room

MEETING AGENDA:
- Performance Evaluation up to February 2023;
- Equipment Performance up to February 2023;
- Systems in the Company;
- 2022 Audited Financial Statement Results;
- Overview of the Board of Commissioners' Visit Report to the IKN Project;
- Update on Corporate Actions up to February 2022;
- Performance Assessment of the Board of Commissioners in 2022;
- The 2022 GCG Implementation Assessment Results;
- Risk Management;
- Corporate KPIs in 2022.

MEETING PARTICIPANT:
- Yul Ari Pramuraharjo (President Commissioner)
- Indra Jaya Rajagukguk (Commissioner)
- Nur Rochmad (Commissioner)
- Albert Simangunsong (Commissioner)
- Abdullah Sigit (Compliance Committee Member)
- Bari Srisoenami (Compliance Committee Member)
- Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member)
- Mubari (Audit Committee Member)
- Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #03	BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #03
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 10 Mei 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1	**MEETING DATE AND VENUE:** May 10, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Evaluasi Kinerja s.d. Triwulan 2023; • Rekomendasi Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 dan Rencana Tindak Lanjut; • Kebijakan Mutu (QHSE) dan Pelayanan; • Kebijakan IT; • *Update* Aksi Korporasi s.d Triwulan I 2023 (Mei 2023); • KPI Korporate Triwulan I 2023.	**MEETING AGENDA:** • Performance Evaluation up to Quarter 1 of 2023; • Recommendations for the 2022 Financial Statement Audit and Follow-up Plans; • Quality Policy (QHSE) and Service; • IT Policy; • Update on Corporate Actions up to Quarter 1 of 2023 (May 2023); • Corporate KPI for Quarter 1 of 2023.
PESERTA RAPAT: • Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris) • Nur Rochmad (Komisaris) • Albert Simangunsong (Komisaris) • Abdullah Sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Mubari (Anggota komite Audit) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)	**MEETING PARTICIPANT:** • Yul Ari Pramuraharjo (President Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Commissioner) • Nur Rochmad (Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • Abdullah Sigit (Compliance Committee Member) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Mubari (Audit Committee Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #04	BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #04
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 7 Juni 2023; Ruang Rapat Grand Mahakam Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** June 7, 2023; Grand Mahakam Jakarta Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Perubahan Struktur Organisasi Dewan Komisaris; • Pembagian Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; • Pembagian Tugas Komite.	**MEETING AGENDA:** • Changes in the Organizational Structure of the Board of Commissioners; • Division of Board of Commissioners Authority, Duties, and Responsibilities; • Division of Committee Duties.
PESERTA RAPAT: • Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris) • Muhammad Zahid (Komisaris) • Albert Simangunsong (Komisaris) • Abdullah Sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Mubari (Anggota Komite Audit) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)	**MEETING PARTICIPANT:** • President (Commissioner, concurrently as Independent Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Commissioner) • Muhammad Zahid (Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • Abdullah Sigit (Compliance Committee Member) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Mubari (Audit Committee Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #05	BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #05
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 28 Juli 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1	**MEETING DATE AND VENUE:** July 28, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Evaluasi Kinerja s.d. Bulan Mei 2023; • Kinerja Peralatan s.d. Bulan Mei 2023; • *Update* Divestasi Alat; • *Update* Aksi Korporasi s.d. Bulan Juni 2023; • *KPI* Direktorat; • Hasil *Assessment* Penerapan GCG Tahun 2022	**MEETING AGENDA:** • Performance Evaluation up to May 2023; • Equipment Performance up to May 2023; • Equipment Divestment Update; • Corporate Actions Update up to June 2023; • Directorate KPI; • The 2022 GCG Implementation Assessment Results.
PESERTA RAPAT: • Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris) • Muhammad Zahid (Komisaris) • Albert Simangunsong (Komisaris) • Abdullah Sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Mubari (Anggota komite Audit) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)	**MEETING PARTICIPANT:** • President (Commissioner, concurrently as Independent Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Commissioner) • Muhammad Zahid (Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • Abdullah Sigit (Compliance Committee Member) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Mubari (Audit Committee Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #06	BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #06
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 28 Juli 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1	**MEETING DATE AND VENUE:** July 28, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Evaluasi Kinerja s.d. Juni 2023 - Analisa Kinerja Keuangan; • Status Proyek; • *Update* Divestasi Alat; • IT & ERP Triwulan II 2023; • Implementasi MR; • Hasil *Assessment* Penerapan GCG Tahun 2022; • *Update* Aksi Korporasi s.d. Bulan Juli 2023; • KPI Direktorat; • KPI Korporat Triwulan II 2023.	**MEETING AGENDA:** • Performance Evaluation up to June 2023 - Financial Performance Analysis; • Project Status; • Equipment Divestment Update; • IT & ERP for Quarter II of 2023; • MR Implementation; • The 2022 GCG Implementation Assessment Results; • Corporate Actions Update up to July 2023; • Directorate KPI; • Corporate KPI for Quarter II of 2023.
PESERTA RAPAT: • Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris) • Muhammad Zahid (Komisaris) • Albert Simangunsong (Komisaris) • Abdullah Sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Mubari (Anggota komite Audit) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)	**MEETING PARTICIPANT:** • President (Commissioner, concurrently as Independent Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Commissioner) • Muhammad Zahid (Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • Abdullah Sigit (Compliance Committee Member) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Mubari (Audit Committee Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #07	BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #07
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 26 Oktober 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1	**MEETING DATE AND VENUE:** October 26, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Update Aksi Korporasi s.d. Bulan Juli 2023; • Progress Pelaksanaan AOI - GCG 2022: Penanggungjawab Perusahaan; • Arahan Penerapan GCG 2023; • Progres Tindak Lanjut AOI Penerapan GCG 2022 : Aspek Dewan Komisaris.	**MEETING AGENDA:** • Corporate Actions Update up to July 2023; • AOI Implementation Progress - GCG 2022: Company Person in Charge; • Directives for 2023 GCG Implementation; • AOI Follow-up Progress on GCG Implementation 2022: Board of Commissioners Aspects.
PESERTA RAPAT: • Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris) • Muhammad Zahid (Komisaris) • Albert Simangunsong (Komisaris) • Abdullah Sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Mubari (Anggota komite Audit) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)	**MEETING PARTICIPANT:** • President (Commissioner, concurrently as Independent Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Commissioner) • Muhammad Zahid (Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • Abdullah Sigit (Compliance Committee Member) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Mubari (Audit Committee Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk melakukan pembahasan mengenai agenda-agenda yang lebih spesifik.

Sepanjang 2023, Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk mengadakan rapat gabungan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan tersebut disajikan sebagai berikut.

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

In addition, the Board of Commissioners is also required to hold joint meetings with the Board of Directors at least once every four months to discuss more specific agendas.

Throughout 2023, the Board of Commissioners invited the Board of Directors to hold nine joint meetings, with the attendance rate of every Board of Commissioners and the Board of Directors member in the joint meetings presented below.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris Mengundang Direksi Tahun 2023

Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Joint Meetings in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jumlah Wajib Rapat** Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	9	9	100,00
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	9	9	100,00
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	9	9	100,00

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jumlah Wajib Rapat** Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Muhammad Zahid (Komisaris)** (Commissioner)**	6	6	100,00
Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama)** (President Commissioner) **	3	3	100,00
Direksi Board of Directors			
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)** (President Director)**	6	6	100,00
Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	9	7	77,78
Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal) (Director of Finance, Risk Management & Legal)	9	8	88,89
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)* (Director of Business Planning and HCM)*	8	7	87,50
Rully Noviandar (Direktur Utama)** (President Director)**	3	3	100,00
Muhammad Darwis Hamzah (Direktur Operasi)* (Director of Operations)*	1	1	100,00
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			**95,83**

* M Darwis Hamzah tidak lagi menjabat sejak 23 Februari 2023. Pada tanggal yang sama, Yudi Setiawan diangkat untuk menjabat Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM menggantikan Rebimun yang diangkat menjadi Direktur Operasi.
** Sejak 24 Mei 2023, Yul Ari Pramuraharjo, dan Rully Noviandar tidak lagi menjabat. Pada tanggal yang sama Muhammad Zahid menjabat menjadi Komisaris dan I Gede Upeksa Negara resmi menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan.
* M Darwis Hamzah no longer served since February 23, 2023. On the same date, Yudi Setiawan was appointed as the Director of Business Planning and HCM to succeed Rebimun, who was appointed as the Director of Operations.
** Since May 24, 2023, Yul Ari Pramuraharjo and Rully Noviandar no longer served. On the same date, Muhammad Zaid started serving as a Commissioner and Gede Upeksa Negara was appointed as the President Director.

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Minutes of Board of Commissioners Meetings and Board of Directors Joint Meetings and Board of Commissioners and Board of Directors Attendance

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #01	BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #01
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 7 Februari 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lantai 1	**MEETING DATE AND VENUE:** February 7, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Evaluasi Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang Masih Dinyatakan Belum Selesai (*Closed*); • Evaluasi Kinerja Tahun 2022; • Hambatan Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Tahun 2022 & Strategi 2023 serta *Progress* Pelaksanaan Tindak Lanjut *Timeline* Program Kerja 2022; • Laporan Keuangan Intern 2022 & Pencapaian KPI Perusahaan; • Evaluasi Penerapan Kebijakan Mutu (QHSE), Pelayanan, Sistem Teknologi Informasi, Pengadaan dan Pengelolaan SDM (Kendala di Tahun 2022 dan Rencana Perbaikan di Tahun 2023); • *Update Progress* Pelaksanaan Rekomendasi Hasil *Assessment* Maturitas Tahun 2022 dan Persiapan *Assessment* Maturitas Tahun 2023; • Implementasi SMAP, WBS, dan Gratifikasi; • *Update* Permasalahan Legal di Tahun 2022; • Persiapan *Assessment* GCG 2022; • *Executive Summary* PT LMA; • Persiapan RUPSLB Tahun 2023; dan • Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan komisaris PPRE.	**MEETING AGENDA:** • Evaluation of the Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meetings Still Declared Incomplete (Closed); • Performance Evaluation for 2021; • Obstacles to Implementing the 2022 Company Work Program & 2023 Strategy and Progress in Implementing the 2022 Work Program Timeline Follow-up; • Internal Financial Report 2022 & Corporate KPI Achievement; • Evaluation of the Implementation of Quality Policy (QHSE), Services, Information Technology Systems, Human Resource Procurement and Management (Constraints in 2022 and Improvement Plans in 2023); • Update Progress on Recommendations from the 2022 Implementation Maturity Assessment Results and Preparation for the 2023 Maturity Assessment; • SMAP, WBS, and Gratuity Implementation; • Legal Issues Update in 2022; • The 2022 GCG Assessment Preparation; • PT LMA Executive Summary; • The 2023 EGMS Preparation; and • Other matters requiring resolutions and directives from the Board of Commissioners of PPRE.
PESERTA RAPAT: • Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) • Nur Rochmad (Komisaris Independen) • Albert Simangunsong (Komisaris) • M. Darwis Hamzah (Direktur Operasi) • Rully Noviandar (Direktur Utama) • M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Adelia Auliyanti (Corporate Secretary)	**MEETING PARTICIPANT:** • Yul Ari Pramuraharjo (President Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner) • Nur Rochmad (Independent Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • M. Darwis Hamzah (Director of Operations) • Rully Noviandar (President Director) • M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Adelia Auliyanti (Corporate Secretary)
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan.	**ABSENT MEMBER:** Rebimun (Director of Business Planning and HCM), due to unavoidable duty.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #02	BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #02
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 30 Maret 2023; Zoom Meeting	**MEETING DATE AND VENUE:** March 30, 2023; Zoom Meeting
AGENDA RAPAT: • Evaluasi Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang masih dinyatakan belum selesai (*closed*); • Perkenalan Anggota Direksi Baru PPRE; • Evaluasi Kinerja s.d. Februari 2023; • *Progress* penyusunan *Annual Report* Tahun 2022; • Hasil *Score Assessment* Penerapan GCG Tahun 2022; • Kebijakan Manajemen Risiko; • Hasil Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022; • Laporan Laba Rugi *Audited* (dibandingan Laporan Intern); • Neraca *Audited* dan Risiko; • KPI Korporat 2022 *Audited*; • Temuan Auditor; • Laporan Perjalanan Dinas Direksi (Hino Invitation); • Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan komisaris PPRE.	**MEETING AGENDA:** • Evaluation of the Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meetings Still Declared Incomplete (Closed); • Introduction of New Board of Directors Members of PPRE; • Performance Evaluation up to February 2023; • Progress in the 2022 Annual Report preparation; • The 2022 GCG Implementation Assessment Score Results; • Risk Management Policy; • The 2022 Audited Financial Statements Results; • Audited Profit and Loss Report (compared to the Internal Report); • Audited Balance Sheet and Risk; • Audited 2022 Corporate KPI; • Auditor's Findings; • Board of Directors' Official Travel Report (Hino Invitation); • Other matters requiring resolutions and directives from the Board of Commissioners of PPRE.
PESERTA RAPAT: • Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) • Nur Rochmad (Komisaris Independen) • Albert Simangunsong (Komisaris) • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Rebimun (Direktur Operasi) • M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Adelia Auliyanti (Corporate Secretary)	**MEETING PARTICIPANT:** • Yul Ari Pramuraharjo (President Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner) • Nur Rochmad (Independent Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • Rully Noviandar (President Director) • Rebimun (Director of Operations) • M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Adelia Auliyanti (Corporate Secretary)
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #03

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
10 Mei 2023; Zoom Meeting

AGENDA RAPAT:
- Evaluasi Risalah Rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang masih belum dinyatakan belum selesai (*closed*);
- Evaluasi kinerja s.d. Triwulan I 2023;
- Perkembangan Kinerja LMA (Laporan *Executive Summary*);
- Rekomendasi Audit Laporan Keuangan tahun 2022 dan Rencana Tindak lanjutnya;
- Pencapaian KPI Manajemen PPRE Triwulan I 2023 dan Usulan KPI Direktorat PPRE;
- Kebijakan Mutu (QHSE) dan Pelayanan;
- Kebijakan Sistem Teknologi Informasi, Pengadaan dan Pengelolaan SDM;
- *Update* Permasalahan Legal PPRE;
- *Update Progress* Aksi Korporasi yang telah disetujui Dewan Komisaris;
- Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PPRE.

PESERTA RAPAT:
- Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama)
- Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
- Nur Rochmad (Komisaris)
- Albert Simangunsong (Komisaris)
- Rully Noviandar (Direktur Utama)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #03

MEETING DATE AND VENUE:
May 10, 2023; Zoom Meeting

MEETING AGENDA:
- Evaluation of the Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meetings Still Declared Incomplete (Closed);
- Performance evaluation up to QI 2023;
- LMA Performance Development (Executive Summary Report);
- Recommendations for the 2022 Financial Statement Audit and Follow-up Plans;
- KPI Management Achievement of PPRE for Quarter I of 2023 and Proposed Directorate KPI of PPRE;
- Quality (QHSE) and Service Policy;
- Information Technology System, HR Procurement and Management Policy;
- PPRE Legal Issues Update;
- Update on corporate actions progress approved by the Board of Commissioners;
- Other matters requiring resolutions and directives from the Board of Commissioners of PPRE.

MEETING PARTICIPANT:
- Yul Ari Pramuraharjo (President Commissioner)
- Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
- Nur Rochmad (Commissioner)
- Albert Simangunsong (Commissioner)
- Rully Noviandar (President Director)
- Rebimun (Director of Operations)
- M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #04

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
14 Juni 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt.1

AGENDA RAPAT:
- Investasi atau Pemetaan Alat-alat yang dijaminkan;
- List Posisi Keberadaan alat termasuk didalamnya: Jenis Alat, Jumlah Alat dan Status Alat.

PESERTA RAPAT:
- Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)
- Muhammad Zahid (Komisaris)
- Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
- Albert Simangunsong (Komisaris)
- I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
Cuti haji.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #04

MEETING DATE AND VENUE:
June 14, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room

MEETING AGENDA:
- Investment or Mapping of Collateralized Equipment;
- The List of Tool Positions Includes: Tool Types, Total Tools, and Tool Status.

MEETING PARTICIPANT:
- Nur Rochmad (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)
- Muhammad Zahid (Commissioner)
- Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
- Albert Simangunsong (Commissioner)
- I Gede Upeksa Negara (President Director)
- Rebimun (Director of Operation)
- M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)

ABSENT MEMBER:
Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
Hajj leave.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #05

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
20 Juni 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1

AGENDA RAPAT:
- Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- Visi dan Misi Perusahaan;
- Budaya Perusahaan;
- Gambaran Umum Perusahaan;
- Struktur Organisasi dan *Job Description*;
- Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
- Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
- Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
- Audit Internal dan Audit eksternal;
- Komite Audit dan Komite Kepatuhan;
- Sistem-sistem yang berlaku di Perusahaan.

PESERTA RAPAT:
- Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)
- Muhammad Zahid (Komisaris)
- Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
- Albert Simangunsong (Komisaris)
- I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #05

MEETING DATE AND VENUE:
June 20, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room

MEETING AGENDA:
- Good Corporate Governance (GCG) principles implementation;
- Corporate Vision and Mission;
- Corporate Culture;
- General Company Description;
- Organizational structure and Job Description;
- Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as prohibited matters;
- Company's Long-Term Plan (RJPP);
- Company's Budget and Work Plan (RKAP);
- Internal Audit and External Audit;
- Audit Committee and Compliance Committee;
- Applicable systems in the Company.

MEETING PARTICIPANT:
- Nur Rochmad (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)
- Muhammad Zahid (Commissioner)
- Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
- Albert Simangunsong (Commissioner)
- I Gede Upeksa Negara (President Director)
- Rebimun (Director of Operation)
- M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #06

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
28 Juli 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1

AGENDA RAPAT:
- Evaluasi Risalah Rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang masih belum dinyatakan belum selesai (*closed*);
- Evaluasi Kinerja s.d. Mei 2023;
- Realisasi Program Kerja RKAP tahun 2023 s.d. Mei 2023;
- Pengelolaan SDM Perusahaan;
- *Update* Divestasi Perusahaan;
- *Update* Permasalahan Legal PPRE;
- Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PPRE.

PESERTA RAPAT:
- Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)
- Muhammad Zahid (Komisaris)
- Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen)
- Albert Simangunsong (Komisaris)
- I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #06

MEETING DATE AND VENUE:
July 28, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room

MEETING AGENDA:
- Evaluation of the Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meetings Still Declared Incomplete (Closed);
- Performance Evaluation up to May 2023;
- 2023 RKAP Work Program Realization up to May 2023;
- Company HR Management;
- Company Divestment Update;
- PPRE Legal Issues Update;
- Other matters requiring resolutions and directives from the Board of Commissioners of PPRE.

MEETING PARTICIPANT:
- Nur Rochmad (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)
- Muhammad Zahid (Commissioner)
- Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner)
- Albert Simangunsong (Commissioner)
- I Gede Upeksa Negara (President Director)
- Rebimun (Director of Operation)
- M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #07	BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #07
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 28 Juli 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1.	**MEETING DATE AND VENUE:** July 28, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Evaluasi Risalah Rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang masih belum dinyatakan belum selesai (*closed*); • Evaluasi Kinerja s.d Triwulan II 203 dan Prognosa s.d Triwulan III dan IV 2023; • Evaluasi Program Kerja s.d Triwulan II 2023 dan Strategi Program Kerja s.d Triwulan III dan IV 2023; • Kebijakan Pengadaan dan Pengelolaan SDM; • Kebijakan Sistem Teknologi Informasi; • Kebijakan Mutu (QHSE) dan Pelayanan; • *Update* Permasalahan Legal PPRE; • Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PPRE.	**MEETING AGENDA:** • Evaluation of the Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meetings Still Declared Incomplete (Closed); • Performance Evaluation up to Quarter II of 2023 and Prognosis up to Quarters III and IV of 2023; • Work Program Evaluation up to Quarter II of 2023 and Work Program Strategy up to Quarters III and IV of 2023; • HR Procurement and Management Policy; • Information Technology System Policy; • Quality (QHSE) and Service Policy; • PPRE Legal Issues Update; • Other matters requiring resolutions and directives from the Board of Commissioners of PPRE.
PESERTA RAPAT: • Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Muhammad Zahid (Komisaris) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) • Albert Simangunsong (Komisaris) • I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) • Rebimun (Direktur Operasi) • M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Perencanaan Bisnis dan HCM) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)	**MEETING PARTICIPANT:** • Nur Rochmad (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner) • Muhammad Zahid (Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • I Gede Upeksa Negara (President Director) • Rebimun (Director of Operation) • M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #08	BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #08
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 26 Oktober 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1.	**MEETING DATE AND VENUE:** October 26, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Evaluasi Risalah Rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang masih belum dinyatakan belum selesai (*closed*); • Evaluasi Kinerja s.d. Triwulan III 2023 dan Prognosa s.d. Triwulan IV 2023; • Persiapan Penyusunan RKAP Tahun 2024 & RJPP; • Perkembangan Kinerja LMA (Laporan *Executive Summary*); • *Progress* Pelaksanaan Rekomendasi Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 dan Audit Intern SPI, serta Rekomendasi *Assessment* GCG tahun 2022; • Persiapan Evaluasi SPIP Tahun 2023; • Persiapan Audit KAP Tahun 2023; • Kebijakan Mutu (QHSE) dan Pelayanan; • Kebijakan Sistem Teknologi Informasi; • Kebijakan Pengadaan dan Pengelolaan SDM; • *Update* Permasalahan Legal PPRE; • Arahan Pelaksanaan GCG tahun 2023; • Hal-hal lain yang memerlukan keputusan dan arahan dari Dewan Komisaris PPRE.	**MEETING AGENDA:** • Evaluation of the Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meetings Still Declared Incomplete (Closed); • Performance Evaluation up to Quarter III of 2023 and Prognosis up to Quarter IV of 2023; • 2024 RKAP & RJPP Preparation; • LMA Performance Development (Executive Summary Report); • Progress in Implementing Recommendations for the 2022 Financial Statement Audit and SPI Internal Audit, as well as 2022 GCG Assessment Recommendations; • Preparations for the 2023 SPIP Evaluation; • KAP Audit Preparations for 2023; • Quality (QHSE) and Service Policy; • Information Technology System Policy; • HR Procurement and Management Policy; • PPRE Legal Issues Update; • 2023 GCG Implementation Directive; • Other matters requiring resolutions and directives from the Board of Commissioners of PPRE.
PESERTA RAPAT: • Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Muhammad Zahid (Komisaris) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) • Albert Simangunsong (Komisaris) • I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) • Rebimun (Direktur Operasi) • M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Perencanaan Bisnis dan HCM) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)	**MEETING PARTICIPANT:** • Nur Rochmad (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner) • Muhammad Zahid (Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • I Gede Upeksa Negara (President Director) • Rebimun (Director of Operation) • M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #09	BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING #09
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 28 Desember 2023; Ruang Rapat Wisma Robinson Lt. 1	**MEETING DATE AND VENUE:** December 28, 2023; First Floor Wisma Robinson Meeting Room
AGENDA RAPAT: • Kinerja PT Lancarjaya Mandiri Abadi dari tahun 2021 s.d. tahun 2023, termasuk di dalamnya: • Laba/Rugi; • Neraca Keuangan; dan • Prognosa tahun 2024 dan tahun 2025. • Data Aset Alat PT Lancarjaya Mandiri Abadi; • Data Proyek K1-K6 PT Lancarjaya Mandiri Abad.	**MEETING AGENDA:** • PT Lancarjaya Mandiri Abadi Performance from 2021 to 2023, including: • Profit and loss; • Balance sheet; and • Prognosis for 2024 and 2025. • PT Lancarjaya Mandiri Abadi Equipment Asset Data; • PT Lancarjaya Mandiri Abad K1-K6 Project Data.
PESERTA RAPAT: • Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Muhammad Zahid (Komisaris) • Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) • Albert Simangunsong (Komisaris) • I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) • Yudi Setiawan (Perencanaan Bisnis dan HCM) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)	**MEETING PARTICIPANT:** • Nur Rochmad (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner) • Muhammad Zahid (Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner) • Albert Simangunsong (Commissioner) • I Gede Upeksa Negara (President Director) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG TIDAK HADIR: • Rebimun (Direktur Operasi), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan. • M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal), Cuti Ibadah Umroh.	**ABSENT MEMBER:** • Rebimun (Director of Operation), due to unavoidable duty. • M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal), Umrah pilgrimage leave.

Rapat Direksi

Penyelenggaraan rapat Direksi tertuang dalam Piagam Tata Kerja Direksi, di mana Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat mengadakan rapat di luar jadwal tersebut jika dipandang perlu. Rapat dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui *teleconference* dengan tetap memperhatikan persyaratan keabsahan pengambilan keputusan.

Berikut rincian pelaksanaan rapat Direksi selama tahun 2023.

Board of Directors Meetings

The holding of Board of Directors meetings is stated in the Board of Directors Manual, in which the Board of Directors is required to hold regular Board of Directors meetings at least once a month and may hold meetings outside of the schedule if deemed necessary. Meetings can be held in person or via teleconference while still considering the requirements for the decision-making validity.

The details of the Board of Directors meetings in 2023 are as follows.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal Direksi Tahun 2023

Attendance Recapitulation of the Board of Directors in Internal Board of Directors Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)** (President Director)**	33	32	96,97
Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	54	49	90,74
Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal) (Director of Finance, Risk Management & Legal)	54	49	90,74
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)* (Director of Business Planinng and HCM)*	47	40	85,11

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Rully Noviandar (Direktur Utama)** (President Director)**	21	18	85,71
Muhammad Darwis Hamzah (Direktur Operasi)* (Director of Operations)*	7	5	71,43
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			86,78

* M Darwis Hamzah tidak lagi menjabat sejak 23 Februari 2023. Pada tanggal yang sama, Yudi Setiawan diangkat untuk menjabat Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM menggantikan Rebimun yang diangkat menjadi Direktur Operasi.

** Rully Noviandar tidak lagi menjabat Direktur Utama sejak 24 Mei 2023. Posisinya digantikan oleh I Gede Upeksa Negara.

* M Darwis Hamzah no longer served since February 23, 2023. On the same date, Yudi Setiawan was appointed as the Director of Business Planning and HCM to succeed Rebimun, who was appointed as the Director of Operations.

** Rully Noviandar no longer served as the President Director as of May 24, 2023. He was succeeded by I Gede Upeksa Negara.

Risalah Rapat Direksi dan Kehadiran Direksi

Minutes of Board of Directors Meetings and Board of Directors Attendance

RAPAT DIREKSI #01	BOARD OF DIRECTORS MEETING #01
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 4 Januari 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** January 4, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Realisasi *cashflow* tahun 2022 • Evaluasi kinerja *business development* dan rencana *capex* 2023 • Update program divestasi • Update Divisi Operasi 3 proyek WBN • Kinerja Desember 2022	**MEETING AGENDA:** • Cash flow realization in 2022 • Business development performance evaluation and 2023 capex plans • Divestment program update • Operations Division 3 Update on the WBN project • December 2022 performance
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • M. Darwis Hamzah (Direktur Operasi) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Erwin Tri Susanto (Kepala Departemen HCM & GA) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Priyono (Manager, Quality Control) • Pipin Julianto (Manager, Health, Safety & Environment) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Syamsir Alamsyah Tanjung (Kepala Biro SPI) • Priyadi Wuliyanto (Kepala Biro PPB) • Rachmadi (Marketing Manager) • Caca Sucarsa (Kepala Divisi Operasi) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro PPB) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Luluk Mussafiah (Staff Keuangan)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Business Planning and HCM) • M. Darwis Hamzah (Director of Operations) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Erwin Tri Susanto (Head of HCM & GA Department) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Priyono (Manager, Quality Control) • Pipin Julianto (Manager, Health, Safety & Environment) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Syamsir Alamsyah Tanjung (Head of Internal Audit Bureau) • Priyadi Wuliyanto (Head of PPB Bureau) • Rachmadi (Marketing Manager) • Caca Sucarsa (Head of Operations Division) • Eka Marpaung (Equipment General Manager) • Suci Dwi Cahyani (Head of PPB Bureau) • Martadion (Head of Finance Division) • Luluk Mussafiah (Finance Staff)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #02	BOARD OF DIRECTORS MEETING #02
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 10 Januari 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** January 10, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Divestasi alat berat • Divestasi alat ringan	**MEETING AGENDA:** • Heavy equipment divestment • Light equipment divestment
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Debie Novalia (Kepala Departemen PRC STR) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Caca Sucarsa (Kepala Divisi Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Rebimun (Director of Business Planning and HCM) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Eka Marpaung (General Manager Equipment) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Debie Novalia (Head of PRC STR Department) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Caca Sucarsa (Head of Operations Division)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) Sedang melakukan *site visit* proyek Henjaya • M. Darwis Hamzah (Direktur Operasi) Mengikuti rapat HCM	**ABSENT MEMBER:** • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) On a site visit to the Henjaya project • M. Darwis Hamzah (Director of Operations) Attending HCM meeting

RAPAT DIREKSI #03	BOARD OF DIRECTORS MEETING #03
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 17 Januari 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** January 17, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Prognosa Operasi 3 • Prognosa Operasi 1 • Prognosa Operasi 2	**MEETING AGENDA:** • Operations 3 Prognosis • Operations 1 Prognosis • Operations 2 Prognosis
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • M. Darwis Hamzah (Direktur Operasi) • Rachmadi (Marketing Manager) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Priyono (Manager, Quality Control) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Agus Supriatna (PL) • Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1) • Surya Mustaffa (Kepala Divisi Operasi 3) • Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro POB) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi 2) • Priyadi (Kepala Biro Busdev) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Business Planning and HCM) • M. Darwis Hamzah (Director of Operations) • Rachmadi (Marketing Manager) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Priyono (Manager, Quality Control) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Agus Supriatna (PL) • Yoan Sukma (Head of Operations Division 1) • Surya Mustaffa (Head of Operations Division 3) • Suci Dwi Cahyani (Head of POB Bureau) • Caca Sucarca (Head of Operations Division 2) • Priyadi (Head of Busdev Bureau) • Martadion (Head of Finance Division)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #04	BOARD OF DIRECTORS MEETING #04
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 2 Februari 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** February 2, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Evaluasi BP Proyek Batang. • Kelanjutan Proyek Saringan Sampah. • Rencana Program Saham Buyback. • Rencana Penerbitan Obligasi PUB 1 tahap 2. • Laporan Penggunaan Dana Obligasi.	**MEETING AGENDA:** • BP Batang Project Evaluation. • Waste Filter Project Continuation. • Share Buyback Program Plan. • PUB Bond Issuance Plan 1 phase 2. • Report on Bond Funds Use.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rachmadi (Marketing Manager) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Firman (Kaprod Operasi) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Reffi Dwi Insani (Kaprod Operasi) • Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1) • Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro POB) • Priyadi (Kepala Biro Busdev) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Business Planning and HCM) • Rachmadi (Marketing Manager) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Firman (Operation Head) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Reffi Dwi Insani (Head of Operations Division) • Yoan Sukma (Head of Operations Division 1) • Suci Dwi Cahyani (Head of POB Bureau) • Priyadi (Head of Busdev Bureau) • Martadion (Head of Finance Division) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: M. Darwis Hamzah (Direktur Operasi) Sedang melakukan *site visit* Gorontalo	**ABSENT MEMBER:** M. Darwis Hamzah (Director of Operations) On a Gorontalo site visit

RAPAT DIREKSI #05	BOARD OF DIRECTORS MEETING #05
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 13 Februar 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** February 13, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Kinerja Januari 2023.	**MEETING AGENDA:** January 2023 Performance.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • M. Darwis Hamzah (Direktur Operasi) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1) • Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro POB) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Business Planning and HCM) • M. Darwis Hamzah (Director of Operations) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Caca Sucarca (Head of Operations Division) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Head of Operations Division 1) • Suci Dwi Cahyani (Head of POB Bureau) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #06

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
14 Februari 2023; Kantor PPRE

AGENDA RAPAT:
- Progres proyek Tol Cijago
- *Site visit* materi pefindo proyek Cijago.
- *Site visit* materi pefindo proyek Weda Bay.
- *Threshold* PT LMA.
- Kelanjutan *cashflow* RPDM.
- *Cashflow* Januari.

PESERTA RAPAT:
- Rully Noviandar (Direktur Utama)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- M. Darwis Hamzah (Direktur Operasi)
- Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T)
- Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi)
- Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary)
- Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1)
- Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro POB)
- Martadion (Kepala Divisi Keuangan)
- Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT)
- Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal)
- Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko)
- Syamsir Alamsyah (Kepala Biro SPI)
- Priyadi (Kepala Biro Busdev)

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF DIRECTORS MEETING #06

MEETING DATE AND VENUE:
February 14, 2023; PPRE Office

MEETING AGENDA:
- Cijago Toll Road project progress
- Pefindo material site visit for the Cijago project.
- Pefindo material site visit for the Weda Bay project.
- PT LMA threshold.
- RPDM cashflow continuation.
- January Cashflow.

MEETING PARTICIPANT:
- Rully Noviandar (President Director)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Rebimun (Director of Business Planning and HCM)
- M. Darwis Hamzah (Director of Operations)
- Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division)
- Caca Sucarca (Head of Operations Division)
- Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau)
- Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Yoan Sukma (Head of Operations Division 1)
- Suci Dwi Cahyani (Head of POB Bureau)
- Martadion (Head of Finance Division)
- Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT)
- Agil Ferzia (Head of Legal Department)
- Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department)
- Syamsir Alamsyah (Head of SPI Bureau)
- Priyadi (Head of Busdev Bureau)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT DIREKSI #07

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
21 Februari 2023; Kantor PPRE

AGENDA RAPAT:
- Proyeksi kinerja operasi 1.
- Proyeksi kinerja operasi 2.
- Proyeksi kinerja operasi 3.
- Progres divestasi.
- Kontraktual proyek vale.

PESERTA RAPAT:
- Rully Noviandar (Direktur Utama)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- M. Darwis Hamzah (Direktur Operasi)
- Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T)
- Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi)
- Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary)
- Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1)
- Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro POB)
- Martadion (Kepala Divisi Keuangan)
- Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT)
- Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal)
- Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko)
- Hamzah (General Manager Operasi - Proyek Cijago)
- Eko Septianto (General Manager Operasi - Proyek WBN)

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF DIRECTORS MEETING #07

MEETING DATE AND VENUE:
February 21, 2023; PPRE Office

MEETING AGENDA:
- Operations 1 performance projection.
- Operations 2 performance projection.
- Operations 3 performance projection
- Divestment progress.
- Project vale contractual.

MEETING PARTICIPANT:
- Rully Noviandar (President Director)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Rebimun (Director of Business Planning and HCM)
- M. Darwis Hamzah (Director of Operations)
- Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division)
- Caca Sucarca (Head of Operations Division)
- Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau)
- Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Yoan Sukma (Head of Operations Division 1)
- Suci Dwi Cahyani (Head of POB Bureau)
- Martadion (Head of Finance Division)
- Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT)
- Agil Ferzia (Head of Legal Department)
- Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department)
- Hamzah (General Manager Operations - Cijago Project)
- Eko Septianto (General Manager Operations - WBN Project)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT DIREKSI #08	BOARD OF DIRECTORS MEETING #08
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 28 Februari 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** February 28, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Pengelolaan dana Obligasi • Proposal *Adjustment* sewa internal alat. • *Update* pemasaran. • *Benchmark* PT Pama.	**MEETING AGENDA:** • Bond fund management • Internal equipment rental adjustment proposal. • Marketing updates. • PT Pama benchmarks.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1) • Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro POB) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Syamsir Alamsyah (Kepala Biro SPI) • Priyadi (Kepala Biro Busdev) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Caca Sucarca (Head of Operations Division) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Head of Operations Division 1) • Suci Dwi Cahyani (Head of POB Bureau) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Syamsir Alamsyah (Head of SPI Bureau) • Priyadi (Head of Busdev Bureau) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #09	BOARD OF DIRECTORS MEETING #09
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 8 Maret 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** March 8, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Cashflow* bulan Februari. • *Update* kinerja Legal. • *Mapping* alat terhadap proyek baru & eksisting. • *Update* kinerja Weda Bay.	**MEETING AGENDA:** • February cashflow. • Update on Legal performance. • Mapping tools for new & existing projects. • Weda Bay performance updates.
PESERTA RAPAT: • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiwan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1) • Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro POB) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi) • Priyadi W (Kepala Biro Busdev) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Syamsir Alamsyah (Surya Mustafa)	**MEETING PARTICIPANT:** • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Head of Operations Division 1) • Suci Dwi Cahyani (Head of POB Bureau) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Caca Sucarca (Head of Operations Division) • Priyadi W (Head of Busdev Bureau) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Syamsir Alamsyah (Surya Mustafa)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Rully Noviandar (Direktur Utama) Sedang melakukan kunjungan PT Hino ke Jepang.	**ABSENT MEMBER:** Rully Noviandar (President Director) On a PT Hino visit to Japan.

RAPAT DIREKSI #10	BOARD OF DIRECTORS MEETING #10
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 15 Maret 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** March 15, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* kinerja WBN. • *Hospitality* Sonic Bay. • *Mining operation* WBN. • Progres proyek Tol Cijago.	**MEETING AGENDA:** • WBN performance updates. • Sonic Bay Hospitality. • WBN Mining operations. • Cijago Toll Road project progress.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1) • Suci Dwi Cahyani (Kepala Biro POB) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Head of Operations Division 1) • Suci Dwi Cahyani (Head of POB Bureau) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Caca Sucarca (Head of Operations Division)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #11	BOARD OF DIRECTORS MEETING #11
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 16 Maret 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** March 16, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: *Talent pool* Board of Directors-1	**MEETING AGENDA:** Board of Directors-1 talent pool
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Fairuz (Kepala Departemen HCM)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Fairuz (Head of HCM Department)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #12	BOARD OF DIRECTORS MEETING #12
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 24 Maret 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** March 24, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Road MAP* PPRW. • Perbaikan tata kelola pengadaan sparepart.	**MEETING AGENDA:** • PPRW Road MAP. • Improvement for spare parts procurement management.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Eka Marpaung (General Manager MR) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Restian Dini Malini (Vice President, Supply Chain Management) • Priyadi (Kepala Biro Busdev) • Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi 2)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Eka Marpaung (General Manager MR) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Restian Dini Malini (Vice President, Supply Chain Management) • Priyadi (Head of Busdev Bureau) • Yoan Sukma (Head of Operations Division 1) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Caca Sucarca (Head of Operations Division 2)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #13	BOARD OF DIRECTORS MEETING #13
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 24 Maret 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** March 24, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Divestasi Jam Datun • *Update* divestasi kendaraan operasional. • *Update* proyek-proyek *structure work.* • *Update* Proyek AEON. • *Update* Proyek *Warehouse* Depok.	**MEETING AGENDA:** • Jam Datun Divestment • Update on operational vehicle divestment. • Structure work projects update. • AEON Project Update. • Depok Warehouse Project Update.
PESERTA RAPAT: • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasi) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Priyadi W (Kepala Biro Busdev) • Yoan Sukma (Kepala Divisi Operasi 1) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Tyas (Kaprod Structure work) • Sandi (Kaprod Structure work) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal)	**MEETING PARTICIPANT:** • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Priyadi W (Head of Busdev Bureau) • Yoan Sukma (Head of Operations Division 1) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Caca Sucarca (Head of Operations Division) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Tyas (Head of Structure Work) • Sandi (Kaprod Structure work) • Agil Ferzia (Head of Legal Department)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: • Rully Noviandar (Direktur Utama), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan. • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) Menghadiri undangan PUPR.	**ABSENT MEMBER:** • Rully Noviandar (President Director), due to unavoidable duty. • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) Fulfilling a PUPR invitation

RAPAT DIREKSI #14	BOARD OF DIRECTORS MEETING #14
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 03 April 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** April 3, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Update kinerja proyek Halim. • KPI Korporat. • *Update* progres divestasi.	**MEETING AGENDA:** • Halim project performance update. • Corporate KPI. • Divestment progress update.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Priyadi W (Kepala Biro Busdev) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Yanuar (SEM)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Priyadi W (Head of Busdev Bureau) • Eka Marpaung (General Manager Equipment) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Yanuar (SEM)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #15	BOARD OF DIRECTORS MEETING #15
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 4 April 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** April 4, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Kinerja bulan Maret dan proyeksi bulan April.	**MEETING AGENDA:** March performance and April projections.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Eko Septiyanto (General Manager WBN) • Ganta (Kepala Departemen OBC)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Eka Marpaung (General Manager Equipment) • Eko Septiyanto (WBN General Manager) • Ganta (Head of OBC Department)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #16	BOARD OF DIRECTORS MEETING #16
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 11 April 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** April 11, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Cashflow.* • *Update* kinerja proyek Vale. • PP *Award* dan logo HUT PPRE. • Struktur organisasi.	**MEETING AGENDA:** • Cashflow. • Update on Vale project performance. • PP Award and PPRE Anniversary logo. • Organizational structure.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Syamsir Alamsyah (Kepala Biro SPI) • Priyadi (Kepala Biro Busdev) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Caca Sucarca (Head of Operations Division) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Syamsir Alamsyah (Head of SPI Bureau) • Priyadi (Head of Busdev Bureau) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #17	BOARD OF DIRECTORS MEETING #17
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 12 April 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** April 12, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: *Update* kinerja proyek Vale.	**MEETING AGENDA:** Update on Vale project performance.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Kepala Biro Busdev) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Head of Busdev Bureau) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Eka Marpaung (General Manager Equipment)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #18	BOARD OF DIRECTORS MEETING #18
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 02 Mei 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** May 2, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Update kinerja proyek WBN.	**MEETING AGENDA:** Update on WBN project Performance.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Kepala Biro Busdev) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Head of Busdev Bureau) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management & IT) • Eka Marpaung (General Manager Equipment)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #19	BOARD OF DIRECTORS MEETING #19
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 9 Mei 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** May 9, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Kinerja April-Mei	**MEETING AGENDA:** April-May performance.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 1)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Eka Marpaung (General Manager Equipment) • Shadewo (Head of Operations Division 1)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #20	BOARD OF DIRECTORS MEETING #20
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 12 Mei 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** May 12, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Finalisasi RAPT *tender* MDO dan MO.	**MEETING AGENDA:** RAPT finalization for MDO and MO tenders.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #21	BOARD OF DIRECTORS MEETING #21
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 17 Mei 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** May 17, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* pemasaran bulan April-Mei. • *Update* divestasi kendaraan operasional. • *Update* divestasi alat berat.	**MEETING AGENDA:** • Marketing update for April-May. • Update on operational vehicle divestment. • Update on heavy equipment divestment.
PESERTA RAPAT: • Rully Noviandar (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Kepala Biro Busdev) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Restu Arif (Staff Officer SCM) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 1) • Caca Sucarca (Kepala Divisi Operasi SW) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Yocha (Kepala Divisi PQ)	**MEETING PARTICIPANT:** • Rully Noviandar (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Head of Busdev Bureau) • Eka Marpaung (General Manager Equipment) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Restu Arif (SCM Staff Officer) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Shadewo (Head of Operations Division 1) • Caca Sucarca (Head of SW Operations Division) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Yocha (Head of PQ Division)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #22	BOARD OF DIRECTORS MEETING #22
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 31 Mei 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** May 31, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Proses bisnis PPRE. Pengenalan & paparan pedoman Board of Directors.	**MEETING AGENDA:** PPRE business process. Board of Directors guidelines introduction and presentation.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #23	BOARD OF DIRECTORS MEETING #23
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 6 Juni 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** June 6, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Program pendidikan karyawan. • Perubahan *layout* meja kerja karyawan.	**MEETING AGENDA:** • Employee education program. • Changes in employee work desk layout.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Kepala Biro Busdev) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Adelia Aulitanti (Kepala Divisi Human Capital) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Agil Ferzia (Manager Legal) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Head of Busdev Bureau) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Eka Marpaung (General Manager Equipment) • Adelia Aulitanti (Head of Human Capital Division) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Agil Ferzia (Legal Manager) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) Menghadiri agenda rapat PTPP. • Rebimun (Direktur Operasi) Menghadiri rapat proyek IKN.	**ABSENT MEMBER:** • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) Attending PTPP meeting agenda. • Rebimun (Director of Operations) Attending IKN project meeting.

RAPAT DIREKSI #24	BOARD OF DIRECTORS MEETING #24
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 6 Juni 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** June 6, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Laporan hasil audit internal proyek Tofu dan Sonic Bay.	**MEETING AGENDA:** Report on the Tofu and Sonic Bay projects internal audit results.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Rebimun (Direktur Operasi) Menghadiri rapat proyek IKN.	**ABSENT MEMBER:** Rebimun (Director of Operations) Attending IKN project meeting.

RAPAT DIREKSI #25	BOARD OF DIRECTORS MEETING #25
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 6 Juni 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** June 6, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Perubahan proses bisnis Perusahaan.	**MEETING AGENDA:** Changes in the Company's business processes.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operation 2) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Kepala Biro Busdev) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Adelia Aulitanti (Kepala Divisi Human Capital) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 1) • Fairuz Utami (Manager HCM)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 2) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Priadi W (Head of Busdev Bureau) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Eka Marpaung (General Manager Equipment) • Adelia Aulitanti (Head of Human Capital Division) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Agil Ferzia (Head of Legal Department) • Shadewo (Head of Operations Division 1) • Fairuz Utami (HCM Manager)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #26	BOARD OF DIRECTORS MEETING #26
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 7 Juni 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** June 7, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Kinerja bulan Mei-Juni.	**MEETING AGENDA:** May-June performance.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 2) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 1) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Retenani Perdaniati (Kepala Departemen ACC) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 2) • Shadewo (Head of Operations Division 1) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Martadion (Head of Finance Division) • Retenani Perdaniati (Head of ACC Department) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #27	BOARD OF DIRECTORS MEETING #27
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 13 Juni 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** June 13, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • GPS and *safety device for heavy equipment for mining by trans track*. • Kinerja keuangan realisasi Mei-proyeksi Juni 2023 dan *cashflow* sd Juni 2023 • *Update* kinerja proyek Weda Bay. • *Update* kinerja proyek AEON Delta Mas. • Rencana pengalihan *treasury stock*.	**MEETING AGENDA:** • GPS and safety device for mining heavy equipment by trans track. • Financial performance for May, June 2023 projection, and cash flow until June 2023 • Weda Bay project performance updates. • AEON Delta Mas project performance update. • Treasury stock transfer planning.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasi) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair 1) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Agil Ferzia (Manager Legal) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Priyadi (Kepala Biro Busdev) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 2) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 1) • Pipin Julianto (Manager, Health, Safety & Environment)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair 1) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Agil Ferzia (Legal Manager) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Priyadi (Head of Busdev Bureau) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 2) • (Head of Operations Division 1) • Pipin Julianto (Manager, Health, Safety & Environment)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) Cuti ibadah haji.	**ABSENT MEMBER:** Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) Hajj leave.

RAPAT DIREKSI #28	BOARD OF DIRECTORS MEETING #28
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 22 Juni 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** June 22, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Pembahasan proyek MO WBN.	**MEETING AGENDA:** MO WBN project discussion.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasi) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Surya Musatafa (Kepala Divisi Operasi 2) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T) • Priyadi W (Kepala Biro Budev) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Agil Ferzia (Manager Legal) • Eko Spetiyanto (General Manager WBN)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Surya Musatafa (Head of Operations Division 2) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division) • Priyadi W (Head of Budev Bureau) • Martadion (Head of Finance Division) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager) • Agil Ferzia (Legal Manager) • Eko Spetiyanto (WBN General Manager)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) Cuti ibadah haji.	**ABSENT MEMBER:** Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) Hajj leave.

RAPAT DIREKSI #29	BOARD OF DIRECTORS MEETING #29
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 26 Juni 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** June 26, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* Pemasaran bulan Juni - Juli • *Update single* sistem • *Update* investasi proyek MO • *Update* proyek CH-MHU. • *Update* FS investasi proyek MO.	**MEETING AGENDA:** • June-July Marketing update. • Single system update. • MO project investment update. • CH-MHU project update. • MO project FS investment update.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasi) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary) • Pepyka Agitha (Biro Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Agil Ferzia (Manager Legal) • Mei Elsa Kembaren (Kepala Departemen Manajemen Risiko) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Priyadi (Kepala Biro Busdev) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 2) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 1) • Pipin Julianto (Manager, Health, Safety & Environment) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Priadi W (Kepala Biro Busdev) • Eka Marpaung (General Peralatan) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Yanuar (Proyek) • Dana Surya Kurniawan (Kepala Divisi T&T)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau) • Pepyka Agitha (Corporate Secretary Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Agil Ferzia (Legal Manager) • Mei Elsa Kembaren (Head of Risk Management Department) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Priyadi (Head of Busdev Bureau) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 2) • Shadewo (Head of Operations Division 1) • Pipin Julianto (Manager, Health, Safety & Environment) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Priadi W (Head of Busdev Bureau) • Eka Marpaung (General Equipment) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager) • Yanuar (Project) • Dana Surya Kurniawan (Head of T&T Division)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) Cuti ibadah haji.	**ABSENT MEMBER:** Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) Hajj leave.

RAPAT DIREKSI #30	BOARD OF DIRECTORS MEETING #30
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 04 Juli 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** July 4, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Kinerja bulan Juni- bulan Juli. • Remunerasi dan komisaris PT LMA.	**MEETING AGENDA:** • June-July performance. • Remuneration and PT LMA commissioner.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasi) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Corporate Secretary)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Adelia Auliyanti (Head of Corporate Secretary Bureau)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) Cuti ibadah haji.	**ABSENT MEMBER:** Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) Hajj leave.

RAPAT DIREKSI #31	BOARD OF DIRECTORS MEETING #31
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 11 Juli 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** July 11, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Manajemen peralatan.	**MEETING AGENDA:** Equipment management.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasi) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Priyadi (Kepala Biro Busdev) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 2) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Priadi W (Kepala Biro Busdev) • Eka Marpaung (General Manager Peralatan) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Priyadi (Head of Busdev Bureau) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 2) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Priadi W (Head of Busdev Bureau) • Eka Marpaung (General Manager Equipment) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) Cuti ibadah haji.	**ABSENT MEMBER:** Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) Hajj leave.

RAPAT DIREKSI #32	BOARD OF DIRECTORS MEETING #32
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 18 Juli 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** July 18, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Kebutuhan operator dan *driver*. • Rencana divestasi alat berat wbn dan evaluasi *forecast consumable* part. • Finalisasi investasi proyek MO WBN.	**MEETING AGENDA:** • Operator and driver necessity. • WBN heavy equipment divestment plan and consumable parts forecast evaluation. • MO WBN project investment finalization.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasi) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Pepyka agitha (Biro Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Priyadi W (Kepala Biro Busdev) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 2) • Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3) • Eko Septianto (General Manager WBN) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Fairuz Utami (Manager HCM) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Pipin Julianto (Manager, Health, Safety & Environment) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Rizki Dianugrah (Direktur Operasi PT LMA)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Pepyka agitha (Corporate Secretary Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Martadion (Head of Finance Division) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Priyadi W (Head of Busdev Bureau) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 2) • Surya Mustafa (Head of Operations Division 3) • Eko Septianto (General Manager WBN) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Fairuz Utami (HCM Manager) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Pipin Julianto (Manager, Health, Safety & Environment) • Yoan Sukma (Marketing Manager) • Rizki Dianugrah (Operation Director PT LMA)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) Cuti ibadah haji.	**ABSENT MEMBER:** Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) Hajj leave.

RAPAT DIREKSI #33

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
1 Agustus 2023; Kantor PPRE

AGENDA RAPAT:
- Standarisasi periode kerja & cuti proyek.
- Standarisasi remunerasi *manpower* alat.
- Tata kelola *sparepart*.
- *Review* proses kasbon & BL proyek.
- Divestasi kendaraan operasional.
- *Review* proses hasil evaluasi *tender* PUPR & sistem jasa konstruksi.

PESERTA RAPAT:
- I Gede Upeksa N (Direktur Utama)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair 1)
- Fairuz Utami (Manager HCM)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Yoan Sukma (Marketing Manager)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Martadion (Kepala Divisi Keuangan)
- Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management)
- Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
- Pradita Dewi K (Manager, Legal)
- Priyadi (Kepala Biro Busdev)
- Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 2)
- Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 3)
- Priyadi W (Kepala Biro Busdev)
- Eka Marpaung (General Peralatan)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)
- Dwi Agus (Vice President, Operation Control)

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF DIRECTORS MEETING #33

MEETING DATE AND VENUE:
August 1, 2023; PPRE Office

MEETING AGENDA:
- Project work & leave period standardization.
- Equipment manpower remuneration standardization.
- Spare parts management.
- Loan disbursement & BL process review in projects.
- Operational vehicle divestment.
- PUPR tender evaluation results process & construction services system review.

MEETING PARTICIPANT:
- I Gede Upeksa N. (President Director)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Rebimun (Director of Operations)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair 1)
- Fairuz Utami (HCM Manager)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Yoan Sukma (Marketing Manager)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Martadion (Head of Finance Division)
- Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management)
- Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
- Pradita Dewi K (Manager, Legal)
- Priyadi (Head of Busdev Bureau)
- Surya Mustafa (Head of Operations Division 2)
- Surya Mustafa (Head of Operations Division 3)
- Priyadi W (Head of Busdev Bureau)
- Eka Marpaung (General Equipment)
- Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager)
- Dwi Agus (Vice President, Operation Control)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT DIREKSI #34

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
4 Agustus 2023; Kantor PPRE

AGENDA RAPAT:
- Persiapan pameran teknologi.
- Struktur organisasi divisi peralatan.
- Struktur organisasi proyek WBN.
- Realisasi kinerja Juli dan proyeksi kinerja Agustus.

PESERTA RAPAT:
- I Gede Upeksa N (Direktur Utama)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair 1)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Martadion (Kepala Divisi Keuangan)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Pradita Dewi K (Manager, Legal)
- Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
- Priyadi (Kepala Biro Busdev)
- Surya Mustafa (Kepala Divisi Operasi 2)
- Dwi Agus (Vice President, Operation 1)
- Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)
- Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering)

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF DIRECTORS MEETING #34

MEETING DATE AND VENUE:
August 4, 2023; PPRE Office

MEETING AGENDA:
- Preparation of technology exhibitions.
- Equipment division organizational structure.
- WBN project organizational structure.
- July performance realization and projected August performance.

MEETING PARTICIPANT:
- I Gede Upeksa N. (President Director)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Rebimun (Director of Operations)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair 1)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Martadion (Head of Finance Division)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Pradita Dewi K (Manager, Legal)
- Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
- Priyadi (Head of Busdev Bureau)
- Surya Mustafa (Head of Operations Division 2)
- Dwi Agus (Vice President, Operation 1)
- Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager)
- Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT DIREKSI #35	BOARD OF DIRECTORS MEETING #35
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 08 Agustus 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** August 8, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* kinerja proyek vale. • *Update* rencana investasi. • Potensi *buyer* divestasi alat CDM. • *Update* RAPT proyek Weda Bay (HRM). • Kajian FS investasi pendanaan. • *Update* pemasaran PPRE & LMA • Sosialisasi hasil GCG tahun 2022.	**MEETING AGENDA:** • Vale project performance updates. • Update on investment planning. • Potential buyers for CDM equipment divestment. • RAPT of the Weda Bay project (HRM) update. • FS investment funding review. • PPRE & LMA marketing updates • Dissemination of the 2022 GCG results.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Musatafa (Kepala Divisi Operasi 2) • Priyadi W (Kepala Biro BUSDEV) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation) • Sevtian (Kaprod) • Eko Septianto (General Manager WBN)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Musatafa (Head of Operations Division 2) • Priyadi W (Head of BUSDEV Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Martadion (Head of Finance Division) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations) • Sevtian (Kaprod) • Eko Septianto (WBN General Manager)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #36	BOARD OF DIRECTORS MEETING #36
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 14 Agustus 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** August 14, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Materi proyek inkis untuk kunjungan Dewan Komisaris.	**MEETING AGENDA:** Inkis project materials for the Board of Commissioners visit.
PESERTA RAPAT: • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Richo Rirobi (General Manager Proyek)	**MEETING PARTICIPANT:** • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Richo Rirobi (Project General Manager)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) Menghadiri rapat internal PT PP. • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) Menghadiri rapat internal PT PP.	**ABSENT MEMBER:** • I Gede Upeksa N. (President Director) Attending PT PP internal meeting. • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) Attending PT PP internal meeting.

RAPAT DIREKSI #37	BOARD OF DIRECTORS MEETING #37
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 15 Agustus 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** August 15, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* proyek dan alat *bekisting*. • Finalisasi struktur organisasi proyek WBN. • *Update* pemasaran PPRE & LMA.	**MEETING AGENDA:** • Update on projects and formwork tools. • Finalization of the WBN project organizational structure. • PPRE & LMA marketing updates.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • M Arif Iswahyudi (Direktur MR & Legal) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Musatafa (Kepala Divisi 2) • Priyadi W (Kepala Biro Busdev) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Martadion (Kepala Divisi Keuangan) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation) • Risky Dianugrah (Direktur Operasi LMA) • Yoan Sukma A (Marketing Manager) • Rachmadi (Manager Marketing)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • M Arif Iswahyudi (Director MR & Legal) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Surya Musatafa (Head of Division 2) • Priyadi W (Head of Busdev Bureau) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Martadion (Head of Finance Division) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Caroline Wahyuninggar (External Relations Manager) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations) • Risky Dianugrah (LMA Operations Director) • Yoan Sukma A (Marketing Manager) • Rachmadi (Marketing Manager)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #38	BOARD OF DIRECTORS MEETING #38
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 25 Agustus 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** August 25, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* proyek saringan sampah kali Ciliwung. • Investasi alat proyek WBN. • Permohonan persetujuan seragam proyek *mining*.	**MEETING AGENDA:** • Update on the Ciliwung River waste filter project. • WBN project tool investment. • Application for uniform mining project approval.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #39	BOARD OF DIRECTORS MEETING #39
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 4 September 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** September 4, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Realisasi kinerja Agustus dan proyeksi September 2023.	**MEETING AGENDA:** August performance realization and September 2023 projection.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #40	BOARD OF DIRECTORS MEETING #40
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 5 September 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** September 5, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Realisasi *cashflow* Agustus dan proyek September 2023. • Evaluasi IOT sistem arvento & *transtrack*. • Remunerasi & *update* personil. • *Update* divestasi alat berat.	**MEETING AGENDA:** • August cash flow realization and September 2023 projects. • Evaluation of arvento & transtrack IOT systems. • Remuneration & personnel updates. • Update on heavy equipment divestment.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Kepala Divisi Equipment Maintenance & Repair) • Priyadi W (Kepala Biro BDPM) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Rizki Dianugrah (Direktur Operasi PT LMA)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Head of Equipment Maintenance & Repair Division) • Priyadi W (Head of BDPM Bureau) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Shadewo (Head of Operations Division 2) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Rizki Dianugrah (Operation Director PT LMA)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Rebimun (Direktur Operasi) Menghadiri meeting dengan Pelindo.	**ABSENT MEMBER:** Rebimun (Director of Operations) Attending a meeting with Pelindo.

RAPAT DIREKSI #41	BOARD OF DIRECTORS MEETING #41
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 11 September 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** September 11, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* pemasaran PPRE & LMA. • Penentuan sewa internal alat proyek Weda Bay. • *Update* proyek saringan sampah. • *Hold point* 100% proyek Pakubuwono Menteng. • *Hold point* proyek 100% proyek nagoya batam. • Prognosa kinerja s.d Desember 2023.	**MEETING AGENDA:** • PPRE & LMA marketing updates. • Determination of internal equipment rental for the Weda Bay project. • Update on the waste filter project. • 100% hold point for the Pakubuwono Menteng project. • 100% hold point for the Nagoya Batam project. • Performance prognosis until December 2023.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Eko Septiyanto (General Manager WBN) • Wahyu Widiarto (Manager Operasi 2) • Firman Firdaus (Kaprod) • Priyadi W (Kepala Biro BDPM) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Head of Equipment Maintenance & Repair Division) • Eko Septiyanto (WBN General Manager) • Wahyu Widiarto (Operations Manager 2) • Firdaus Word (Kaprod) • Priyadi W (Head of BDPM Bureau) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #42	BOARD OF DIRECTORS MEETING #42
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 15 September 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** September 15, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: Prognosa kinerja s.d Desember 2023 konsolidasian.	**MEETING AGENDA:** Consolidated performance prognosis until December 2023.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Pricilia Y (Manager OBC) • Adimas (Manager ACC) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Pricilia Y (OBC Manager) • Adimas (ACC Manager) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #43

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
26 September 2023; Kantor PPRE

AGENDA RAPAT:
- Hp 100% proyek-proyek *structure work*.
- Periode kerja dan istirahat (*roster*) lapangan proyek Weda Bay.
- Penawaran *overlay taxiway* Bandara Udara Syamsudin Noor.
- *Hold point* 100% proyek tol Cinere Jagorawi.

PESERTA RAPAT:
- I Gede Upeksa N (Direktur Utama)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting)
- Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2)
- Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Hamzah Adiguna W (General Manager Cijago)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)
- Eko Septiyanto (OM-MI WBN)
- Wahyu Widiarto (Manager Operasi 2)

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF DIRECTORS MEETING #43

MEETING DATE AND VENUE:
September 26, 2023; PPRE Office

MEETING AGENDA:
- 100% HP for structure work projects.
- Work and rest periods (roster) for the Weda Bay project.
- Syamsudin Noor Airport taxiway overlay offer.
- 100% hold point for the Cinere Jagorawi toll road project.

MEETING PARTICIPANT:
- I Gede Upeksa N. (President Director)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Rebimun (Director of Operations)
- Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting)
- Shadewo (Head of Operations Division 2)
- Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Hamzah Adiguna W (General Manager Cijago)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations)
- Eko Septiyanto (OM-MI WBN)
- Wahyu Widiarto (Operations Manager 2)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT DIREKSI #44

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
3 Oktober 2023; Kantor PPRE

AGENDA RAPAT:
- *Update* pemasaran PPRE & LMA.
- *Proxy* penandatanganan dokumen perusahaan.
- Hasil audit internal proyek KAI Medan-Binjai.
- *Heavy equipments planning maintenance management improvement.*
- RKAP 2024.
- Pelaporan LPKM di OSS.
- *Cashflow* proyek.
- *Update* divestasi CSD & CDM.

PESERTA RAPAT:
- I Gede Upeksa N (Direktur Utama)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Dwi Agus (Vice President, Operation 1)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)
- Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Priyadi W (Kepala Biro BDPM)
- Pradita Dewi K (Manager, Legal)
- Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2)
- Aditya Yuli (Manager, Equipment Performance & Administrasi)
- Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit)

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF DIRECTORS MEETING #44

MEETING DATE AND VENUE:
October 3, 2023; PPRE Office

MEETING AGENDA:
- PPRE & LMA marketing updates.
- Company documents proxy signing.
- KAI Medan-Binjai project Internal audit results.
- Improvement in heavy equipment planning maintenance management.
- 2024 RKAP.
- LPKM reporting in OSS.
- Project cash flow.
- CSD & CDM divestment update.

MEETING PARTICIPANT:
- I Gede Upeksa N. (President Director)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Rebimun (Director of Operations)
- Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Dwi Agus (Vice President, Operation 1)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations)
- Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Priyadi W (Head of BDPM Bureau)
- Pradita Dewi K (Manager, Legal)
- Shadewo (Head of Operations Division 2)
- Aditya Yuli (Manager, Equipment Performance & Administration)
- Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT DIREKSI #45	BOARD OF DIRECTORS MEETING #45
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 17 Oktober 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** October 17, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Threshold* PT LMA. • *Update* peralatan di proyek & manajemen peralatan di UKP. • *Update* proyek dermaga IKN. • Paparan tagihan proyek Dermaga Delinyu.	**MEETING AGENDA:** • PT LMA threshold. • Equipment updates in projects & equipment management in UKP. • IKN pier project update. • Delinyu Pier project bill description.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #46	BOARD OF DIRECTORS MEETING #46
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 20 Oktober 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** October 20, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* manajemen peralatan. • *Update* divestasi kendaraan operasional. • *Update* progres proyek Pelabuhan Saumlaki.	**MEETING AGENDA:** • Equipment management updates. • Update on divestment of operational vehicles. • Update on the progress of the Saumlaki Port project.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #47	BOARD OF DIRECTORS MEETING #47
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 24 Oktober 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** October 24, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* manajemen peralatan. • *Update* investasi proyek WBN. • Progres improvement proyek Vale. • Remunerasi mekanik.	**MEETING AGENDA:** • Equipment management updates. • WBN project investment updates. • Vale project improvement progress. • Remuneration for mechanics.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #48	BOARD OF DIRECTORS MEETING #48
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 07 November 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** November 7, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* manajemen peralatan • Realisasi kinerja Oktober dan proyek kinerja November 2023. • Pengajuan NIB untuk pelaporan LKPM TW IV-2023. • *Update outsourcing.* • Realisasi *cashflow* Oktober dan proyeksi *cashflow* November 2023.	**MEETING AGENDA:** • Equipment management updates • October performance realization and November 2023 project performance. • NIB submission for Q4-2023 LKPM reporting. • Outsourcing updates. • October cash flow realization and projected November 2023 cash flow.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Wahyu Widiarto (Manager Operasi 2) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Yoan Sukma (Marketing Manager)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Wahyu Widiarto (Operations Manager 2) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Shadewo (Head of Operations Division 2) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Yoan Sukma (Marketing Manager)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #49	BOARD OF DIRECTORS MEETING #49
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 14 November 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** November 14, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update single* sistem. • *Update* manajemen peralatan.	**MEETING AGENDA:** • Single system update. • Equipment management updates.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Wahyu Widiarto (Manager Operation 2) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2) • Aditya Indrawan (Manager Equipment Performance & Admin) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Wahyu Widiarto (Operation Manager 2) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Shadewo (Head of Operations Division 2) • Aditya Indrawan (Equipment Performance Manager & Admin) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT DIREKSI #50	BOARD OF DIRECTORS MEETING #50
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 21 November 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** November 21, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • Struktur organisasi *admin equipment* di proyek Weda Bay. • *Update* manajemen peralatan. • *Review* kontrak proyek Vale. • *Update* pemasaran PPRE.	**MEETING AGENDA:** • Equipment admin organizational structure in the Weda Bay project. • Equipment management updates. • Vale project contracts review. • PPRE marketing updates.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2) • Aditya Indrawan Manager Equipment Performance & Admin • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Yoan Sukma A (Marketing Manager) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Shadewo (Head of Operations Division 2) • Aditya Indrawan Manager Equipment Performance & Admin • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Yoan Sukma A (Marketing Manager) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Rebimun (Direktur Operasi) Cuti haji.	**ABSENT MEMBER:** Rebimun (Director of Operations) Hajj leave.

RAPAT DIREKSI #51	BOARD OF DIRECTORS MEETING #51
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 30 November 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** November 30, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* pemasaran PPRE & LMA. • *Update* manajemen peralatan.	**MEETING AGENDA:** • PPRE & LMA marketing updates. • Equipment management updates.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Aditya Indrawan (Manager Equipment Performance & Admin) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Rizki Dianugrah (Direktur Operasi PT LMA) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Yoan Sukma A (Marketing Manager) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Aditya Indrawan (Equipment Performance Manager & Admin) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Rizki Dianugrah (Operation Director PT LMA) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Shadewo (Head of Operations Division 2) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Yoan Sukma A (Marketing Manager) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Rebimun (Direktur Operasi) Cuti haji.	**ABSENT MEMBER:** Rebimun (Director of Operations) Hajj leave.

RAPAT DIREKSI #52

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
5 Desember 2023; Kantor PPRE

AGENDA RAPAT:
Realisasi kinerja November dan proyeksi Desember 2023.

PESERTA RAPAT:
- I Gede Upeksa N (Direktur Utama)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Dwi Agus (Vice President, Operation 1)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)
- Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Wahyu Widiarto (Manager Operasi 2)
- Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management)
- Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2)
- Aditya Indrawan (Manager Equipment Performance & Admin)
- Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Surya M (OM WBN)
- Eko S (OM WBN)

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF DIRECTORS MEETING #52

MEETING DATE AND VENUE:
December 5, 2023; PPRE Office

MEETING AGENDA:
November performance realization and December 2023 projections.

MEETING PARTICIPANT:
- I Gede Upeksa N. (President Director)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Rebimun (Director of Operations)
- Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Dwi Agus (Vice President, Operation 1)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations)
- Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Wahyu Widiarto (Operations Manager 2)
- Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management)
- Shadewo (Head of Operations Division 2)
- Aditya Indrawan (Equipment Performance Manager & Admin)
- Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Surya M (OM WBN)
- Eko S (OM WBN)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT DIREKSI #53

TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT:
7 Desember 2023; Kantor PPRE

AGENDA RAPAT:
- *Update* pemasaran PPRE & LMA
- Kajian bisnis alat BP
- *Update* manajemen peralatan
- *Program* peningkatan kinerja *hauling*.

PESERTA RAPAT:
- I Gede Upeksa N (Direktur Utama)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal)
- Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)
- Rebimun (Direktur Operasi)
- Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Dwi Agus (Vice President, Operation 1)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation)
- Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Wahyu Widiarto (Manager Operasi 2)
- Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management)
- Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management)
- Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
- Pradita Dewi K (Manager, Legal)
- Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2)
- Aditya Indrawan (Manager Equipment Performance & Admin)
- Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Surya M (OM WBN)
- Eko S (OM WBN)

DIREKSI YANG TIDAK HADIR:
-

BOARD OF DIRECTORS MEETING #53

MEETING DATE AND VENUE:
December 7, 2023; PPRE Office

MEETING AGENDA:
- PPRE & LMA marketing updates.
- BP equipment business review.
- Equipment management updates.
- Hauling performance improvement program.

MEETING PARTICIPANT:
- I Gede Upeksa N. (President Director)
- Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal)
- Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM)
- Rebimun (Director of Operations)
- Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting)
- Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control)
- Dwi Agus (Vice President, Operation 1)
- Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations)
- Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary)
- Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair)
- Wahyu Widiarto (Operation 2 Manager)
- Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management)
- Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management)
- Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management)
- Pradita Dewi K (Manager, Legal)
- Shadewo (Head of Operations Division 2)
- Aditya Indrawan (Equipment Performance Manager & Admin)
- Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering)
- Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management)
- Surya M (OM WBN)
- Eko S (OM WBN)

ABSENT MEMBER:
-

RAPAT DIREKSI #54	BOARD OF DIRECTORS MEETING #54
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 19 Desember 2023; Kantor PPRE	**MEETING DATE AND VENUE:** December 19, 2023; PPRE Office
AGENDA RAPAT: • *Update* pemasaran PPRE & LMA. • *Update* operasional dan manajemen peralatan. • Kajian alat TC. • *Update* divestasi alat berat, alat ringan dan kendaraan operasional. • *Punishment* sistem. • *Review* PIC UPG (unit pengendali gratifikasi).	**MEETING AGENDA:** • PPRE & LMA marketing updates. • Operational updates and equipment management. • TC tool review. • Update on heavy equipment, light equipment, and operational vehicles divestment. • Punishment system. • UPG (gratuity control unit) PIC review.
PESERTA RAPAT: • I Gede Upeksa N (Direktur Utama) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) • Rebimun (Direktur Operasi) • Gallery Rekayasa (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operation) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Shadewo (Kepala Divisi Operasi 2) • Aditya Indrawan (Manager Equipment Performance & Admin) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Yoan Sukma A (Marketing Manager) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Rizky Dianugrah (Direktur Operasi PT LMA)	**MEETING PARTICIPANT:** • I Gede Upeksa N. (President Director) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning and HCM) • Rebimun (Director of Operations) • Engineering Gallery (Vice President, Finance & Accounting) • Suci Dwi Cahyani (Vice President, Operation Control) • Dwi Agus (Vice President, Operation 1) • Yofi Hendri (Vice President, Equipment Operations) • Dyah Novian Tri Hadini (Vice President, Corporate Secretary) • Rully Panca (Vice President, Equipment Maintenance & Repair) • Debie N (Vice President, Business Development & Portfolio Management) • Restian Dini (Vice President, Supply Chain Management) • Shadewo (Head of Operations Division 2) • Aditya Indrawan (Equipment Performance Manager & Admin) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Pradita Dewi K (Manager, Legal) • Dana Surya Kurniawan (Vice President, Bidding & Engineering) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Yoan Sukma A (Marketing Manager) • Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) • Rizky Dianugrah (Operation Director PT LMA)
DIREKSI YANG TIDAK HADIR: Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) Cuti Ibadah Umroh	**ABSENT MEMBER:** Mohammad Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management, and Legal) Umrah pilgrimage leave.

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada saat RUPS diselenggarakan, baik RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023 maupun RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 24 Mei 2023 adalah sebagai berikut.

Board of Commissioners and Board of Directors Attendance Rate in the GMS

The attendance rate of the Board of Commissioners and Board of Directors who served when the GMS was held, both the Extraordinary GMS on February 23, 2023, and the 2022 Fiscal Year Annual GMS on May 24, 2023, were as follows.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPS

Attendance Recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors in the GMS

Nama dan Jabatan Name and Position	**RUPS Luar Biasa Tanggal 23 Februari 2023** EGMS on February 23, 2023	**RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Tanggal 24 Mei 2023** The 2022 Fiscal Year AGMS on May 24, 2023	**% Kehadiran** Attendance %	**Alasan Ketidakhadiran** Reason for Absence
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama) (President Commissioner)	x	x	0,00	Adanya penugasan yang tidak dapat ditinggalkan Unavoidable assignment
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	√	√	100,00	-
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	√	√	100,00	-
Nur Rochmad (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	√	√	100,00	-
Direksi Board of Directors				
Rully Noviandar (Direktur Utama) (President Director)	√	√	100,00	-
Rebimun (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM) (Director of Business Planning & HCM)	√	√	100,00	-
Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan Manajemen Risiko, & Legal) (Director of Finance, Risk Management & Legal)	√	√	100,00	-
Muhammad Darwis Hamzah (Direktur Operasi) (Director of Operations)	√	Tidak lagi menjabat No longer in office	100,00	-
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning & HCM)	Tidak lagi menjabat No longer in office	√	100,00	-
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			**88,89**	

Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti pelatihan, *workshop*, seminar, konferensi, dan lain sebagainya untuk peningkatan kapasitas dan pemutakhiran pengetahuan Dewan Komisaris atas isu-isu terkini terkait Perusahaan. Berikut informasi kebijakan program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris Perusahaan.

1. Dewan Komisaris berwenang memperoleh pembelajaran pelatihan bagi Dewan Komisaris dan merencanakannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
2. Pembelajaran/pelatihan bagi anggota Dewan dapat diselenggarakan oleh internal ataupun eksternal Perusahaan;
3. Metode pembelajaran/pelatihan untuk peningkatan kompetensi antara lain berupa pelatihan, *workshop*, seminar, konferensi, dan sebagainya;
4. Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk kegiatan pelatihan bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang akan datang pada triwulan IV tahun berjalan;
5. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris;
6. Pelaksanaan program pelatihan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan sekurangnya mencakup tempat dan waktu penyelenggaraan, tema/topik pelatihan, penyelenggara, pelatih/pengajar, peserta, jadwal pelatihan, materi pelatihan, dan manfaat hasil pelatihan.

Kebijakan program peningkatan kompetensi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya untuk menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan;
2. Anggota Direksi perlu mendapatkan pendidikan berkelanjutan yang dikombinasikan dalam *self-study* dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, seminar, *workshop*, *conference*, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi;
3. Pendidikan berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri dan atas beban Perusahaan.

Competency Improvement Programs for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Company is committed to improving the quality of the Board of Commissioners' duties and responsibilities by providing opportunities to attend training, workshops, seminars, conferences, etc., to increase the capacity and update the Board of Commissioners knowledge on the latest issues related to the Company. The following is information on the competency improvement program policy for the Board of Commissioners.

1. The Board of Commissioners has the authority to obtain training lessons for the Board of Commissioners and plan them in the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
2. Learning/training for Board members can be organized internally or externally by the Company;
3. Learning/training methods to increase competency include training, workshops, seminars, conferences, etc.;
4. The Board of Commissioners prepares a Company Work Plan and Budget for training activities for every Board of Commissioners member in the fourth quarter of the current year;
5. The training Implementation for the Board of Commissioners members is realized following the Board of Commissioners work plan;
6. The training program implementation is reported to the Board of Commissioners, including at least the place and time of implementation, training themes/topics, organizers, trainers/teachers, participants, training schedule, training materials, and benefits from the training results.

The competency improvement program policy for the Board of Directors is as follows:

1. The Board of Directors members must continuously increase and update their knowledge to carry out their Company management duties;
2. The Board of Directors members need to receive continuous education combined with self-study and participation in special education, training, seminars, workshops, and conferences, which can help increase the effectiveness of the Board of Directors functions;
3. The continuous education can be carried out domestically and abroad at the Company's expense.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Type	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	Pelatihan Training	GRC Integrated Information for Supervisory Board	*Online*, 5 Oktober 2023 Online, October 5, 2023	Kementerian BUMN bekerjasama dengan FKSPI Ministry of SEO in cooperation with FKSPI
	Pelatihan Training	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, October 25, 2023	Kementerian BUMN bekerjasama dengan International Finance Corporation (IFC) Ministry of SEO in cooperation with International Finance Corporation (IFC)
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	Pelatihan Training	GRC Integrated Information for Supervisory Board	*Online*, 5 Oktober 2023 Online, October 5, 2023	Kementerian BUMN bekerjasama dengan FKSPI Ministry of SEO in cooperation with FKSPI
	Pelatihan Training	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, October 25, 2023	Kementerian BUMN bekerjasama dengan International Finance Corporation (IFC) Ministry of SEO in cooperation with International Finance Corporation (IFC)
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	Pelatihan Training	GRC Integrated Information for Supervisory Board	*Online*, 5 Oktober 2023 Online, October 5, 2023	Kementerian BUMN bekerjasama dengan FKSPI Ministry of SEO in cooperation with FKSPI
	Pelatihan Training	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, October 25, 2023	Kementerian BUMN bekerjasama dengan International Finance Corporation (IFC) Ministry of SEO in cooperation with International Finance Corporation (IFC)
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Pelatihan Training	GRC Integrated Information for Supervisory Board	*Online*, 5 Oktober 2023 Online, October 5, 2023	Kementerian BUMN bekerjasama dengan FKSPI Ministry of SEO in cooperation with FKSPI
	Pelatihan Training	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, October 25, 2023	Kementerian BUMN bekerjasama dengan International Finance Corporation (IFC) Ministry of SEO in cooperation with International Finance Corporation (IFC)

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Direksi Board of Directors				
I Gede Upeksa Negara, S.T. (Direktur Utama) (President Director)	Pelatihan Training	Benchmarking Manajemen Peralatan Dengan PT LMA Equipment Management Benchmarking with PT LMA	Jakarta, 9 Juni 2023 Jakarta, June 9, 2023	PPRE
Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	Webinar	Market Update Obligasi Bersama BNI Sekuritas Market Update on Bonds with BNI Sekuritas	*Online*, 10 Mei 2023 Online, May 10, 2023	BNI Sekuritas
	Pelatihan Training	Credit Spotlight : Indonesia Stays The Course As Global Uncertainties Rise	*Online*, 30 Mei 2023 Online, May 30, 2023	S&P Global Ratings and PEFINDO
	Pelatihan Training	Benchmarking Manajemen Peralatan Dengan PT LMA Equipment Management Benchmarking with PT LMA	Jakarta, 9 Juni 2023 Jakarta, June 9, 2023	PPRE
	Webinar	Pre IPO dan Post IPO Pre-IPO and Post-IPO	*Online*, 10 Agustus 2023 Online, August 10, 2023	BUMN School of Excellence
	Webinar	Pemeringkatan & Penerbitan Bursa Efek Bersifat Utang & Sukuk Rating and Issuance of Debt and Sharia Bonds Stock Exchanges	*Online*, 10 Agustus 2023 Online, August 10, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
	Webinar	Introduction to ESG & IFC Performation Standards	*Online*, 16 Agustus 2023 Online, August 16, 2023	BUMN School of Excellence
Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Pelatihan Training	Enterprise Risk Management (ERM)	Jakarta, 29 Juli & 11 Agustus 2023 Jakarta, July 9 & August 11, 2023	PT Golden Regency Consulting (GRC Training)
Yudi Setiawan (Direktur Operasi) (Director of Operations)	Pelatihan Training	Enterprise Risk Management (ERM)	Jakarta, 29 Juli & 11 Agustus 2023 Jakarta, July 9 & August 11, 2023	PT Golden Regency Consulting (GRC Training)
	Pelatihan Training	HR for Non HR Management	Jakarta, 18-19 Oktober 2023 Jakarta, October 18-19, 2023	PT Golden Regency Consulting (GRC Training)

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris wajib diselenggarakan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris lainnya. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat memiliki 1 (satu) periode yang paling lama 5 (lima) tahun masa jabatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kelima. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Demikian pula sebelum jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perusahaan. Dalam kasus pemberhentian anggota Dewan Komisaris, wajib disertai dengan alasan pemberhentian, pemberian kesempatan untuk membela diri dan keputusan pemberhentian setelah yang bersangkutan membela diri.

Prosedur Pengangkatan serta Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara Direksi

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi wajib diselenggarakan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi yang diangkat memiliki 1 (satu) periode yang paling lama 5 (lima) tahun masa jabatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kelima. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Demikian pula sebelum jabatan berakhir, anggota Direksi dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perusahaan. Dalam kasus pemberhentian anggota Direksi, wajib disertai dengan alasan pemberhentian, pemberian kesempatan untuk membela diri, dan keputusan pemberhentian setelah yang bersangkutan membela diri.

Sementara itu, prosedur pemberhentian sementara Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris setiap waktu apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. Selanjutnya, pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan dari pemberhentian. Selain itu, RUPS Luar Biasa perlu diselenggarakan untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula. Sedangkan, anggota Direksi yang diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut guna membela diri.

Board of Commissioners and Board of Directors Nomination

Board of Commissioners Appointment and Dismissal

The Board of Commissioners appointment and dismissal must be performed through the GMS in accordance with the Articles of Association by considering recommendations from other Board of Commissioners members. The appointed Board of Commissioners member has one term of office at a maximum of five years that ends in the closing of the fifth Annual GMS since the appointment. After the term of office ends, the Board of Commissioners members can be reappointed according to the GMS resolution. Similarly, before the term ends, the Board of Commissioners members may resign by submitting a written notice regarding the matter to the Company. In the event of the Board of Commissioners members' dismissal, the dismissal reason, opportunity to defend themselves, and dismissal resolution must be included after the said member defends themself.

Board of Directors Appointment, Dismissal, and Temporary Dismissal Procedure

The Board of Directors appointment and dismissal procedure must be performed through the GMS in accordance with the Articles of Association of the Company by considering recommendations from the Board of Commissioners. The appointed Board of Directors member has one term of office at a maximum of five years that ends in the closing of the fifth Annual GMS since the appointment. After the term of office ends, the Board of Directors members can be reappointed according to the GMS resolution. Similarly, before the term ends, the Board of Directors members may resign by submitting a written notice regarding the matter to the Company. In the event of the Board of Directors members' dismissal, the dismissal reason, opportunity to defend themselves, and dismissal resolution must be included after the said member defends themself.

Meanwhile, the Board of Directors temporary dismissal procedure is conducted through Board of Commissioners meetings that can be held at any time when a Board of Directors member acts against the Articles of Association and prevailing laws and regulations, neglects their obligations, or there is an urgent reason for the Company's interest. Furthermore, the temporary dismissal must be notified to the person concerned with the reason for their dismissal. In addition, the Company needs to hold an Extraordinary GMS to decide whether the said member will be permanently terminated or return to their original position. The temporary dismissed Board of Directors member shall be given the opportunity to attend the Extraordinary GMS to defend themself.

Penyusunan Sistem Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

Dewan Komisaris berwenang melakukan penyusunan dan pengawasan sistem nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berasal dari internal Perusahaan serta sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi atas dasar aspirasi Pemegang Saham Mayoritas, dengan kegiatan:

1. Analisis sistem nominasi yang berlaku di Perusahaan;
2. Perbandingan dengan perusahaan sejenis lainnya.

Komite Audit bertanggung jawab membantu pelaksanaan penyusunan sistem nominasi. Hasil penyusunan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas di tingkat Dewan Komisaris.

Adapun skema proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara adalah:

Nomination System Preparation for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners has the authorization to prepare and supervise the nomination system for the Board of Commissioners and Board of Directors candidates from the Company as well as the remuneration system for the Board of Commissioners and Board of Directors based on the Major Shareholders aspirations, with the following activities:

1. Analysis of the nomination system applied in the Company;
2. Comparison with other similar companies.

The Audit Committee are responsible for assisting the nomination system. The preparation results are submitted to the Board of Commissioners to be discussed at the Board of Commissioners level.

The nomination process scheme for the Board of Commissioners and/or Board of Directors members referring to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises are:

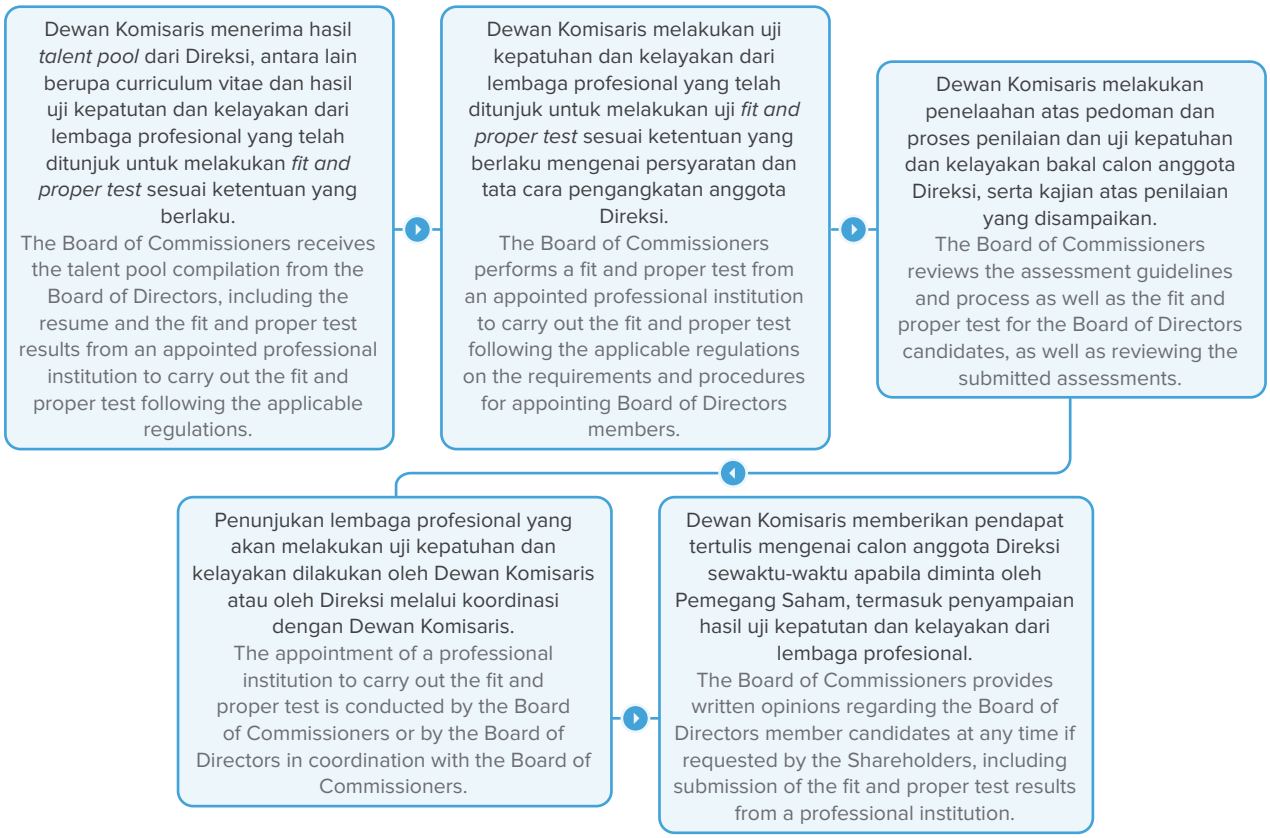

Pengangkatan seorang calon anggota Direksi wajib mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang

The appointment of a Board of Directors candidate must follow the fit and proper test process, which refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Candidates appointed as Board of Directors members must meet the formal requirements and other requirements stipulated in No. PER-3/MBU/03/2023

ditetapkan dalam No. PER-3/MBU/03/2023 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun sumber bakal calon Direksi yang dapat mengisi posisi sebagai manajemen kunci Perusahaan sebagai berikut.

1. Anggota Kepala Divisi/Biro Entitas Induk yang sedang menjabat;
2. Anggota Direksi Entitas Anak yang sedang menjabat;
3. Pejabat internal Entitas Anak setingkat di bawah Direksi;
4. Pejabat internal BUMN yang bersangkutan serendah-rendahnya 2 (dua) tingkat di bawah Direksi, atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Entitas Anak yang bersangkutan dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Direksi;
5. Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2023 mengacu kepada Kontrak Manajemen yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2023 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 27 Desember 2022. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment*, yang kemudian dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui forum RUPS. Dewan Komisaris belum memiliki penilaian yang dilakukan secara individu.

Berikut disampaikan kriteria dan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2023.

and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

The sources of potential Board of Directors candidates who can fill positions as key management of the Company are:

1. Current Head of Division/Bureau of the Parent Entity;
2. Current Board of Directors member of the Subsidiary;
3. Subsidiary's internal officers one level below the Board of Directors;
4. Relevant SOE internal officer that is at least two levels below the Board of Directors or a lower position following the related Subsidiary's level in the relevant SOE's organizational structure, which is determined by the Board of Directors;
5. Other sources who have good reputations, are relevant, and can be accounted for.

Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors' Performance

Board of Commissioners Performance Assessment

The Board of Commissioners performance assessment in 2023 refers to the Management Contract contained in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) document for the 2023 fiscal year, which was approved by the Board of Commissioners and Board of Directors on December 27, 2022. The Board of Commissioners' performance assessment is carried out by a self-assessment, which is then reported to the Shareholders through the GMS forum. The Board of Commissioners does not have an individual assessment yet.

Below are the criteria and results of the Board of Commissioners' performance assessment in 2023.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Criteria and Results of the Board of Commissioners Performance Assessment

No	Indikator Kinerja Utama Main Performance Indicators	Deskripsi Descriptions	Satuan Unit	Target Target	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Capaian Kpi (%) Kpi Achievement (%)
Aspek Proses Bisnis Internal (35%) Internal Business Process Aspects (35%)							
1	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners Meeting	Rapat Internal Dewan Komisaris bersama organ pendukung, dan dapat mengundang pejabat satu level di bawah Direksi Internal Board of Commissioners meetings with supporting organs and may invite officials one level below the Board of Directors	Kali Times	8,00	10,00	7,00	8,75

No	Indikator Kinerja Utama Main Performance Indicators	Deskripsi Descriptions	Satuan Unit	Target Target	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Capaian Kpi (%) Kpi Achievement (%)
2	Pelaksanaan GCG Dewan Komisaris GCG Implementation by the Board of Commissioners	Capaian nilai GCG aspek Dewan Komisaris berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 The achievement of GCG values for the Board of Commissioners aspect based on the Circular Letter of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012	Skor Score	90,00	15,00	93,08	15,00
3	Jangka Waktu Pemberian Keputusan atas Usulan Tindakan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris Period for Decisions Provision on Proposed Actions Requiring Board of Commissioners Approval	Rata-rata jangka waktu pemberian keputusan Dewan Komisaris setelah dokumen diterima secara lengkap (AD=30 hari) Average period for granting a Board of Commissioners decision after receiving complete documents (AD=30 days)	Hari Day	30,00	10,00	30,00	10,00
Aspek Pengawasan dan Pemberian Arahan (55%) Supervision and Directive Provision Aspects (55%)							
4	Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors	Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi Board of Commissioners meeting inviting the Board of Directors	Kali Times	8,00	10,00	9,00	10,00
5	Arahan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan dan Jalannya Perusahaan The Board of Commissioners directives on the Company's Policies and Operations	Arahan-arahan kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan sebagaimana kewajiban Dewan Komisaris yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Arahan berupa surat sebanyak 28 dan arahan di dalam Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 8 kali Directions to the Board of Directors in managing the company per the obligations of the Board of Commissioners as stated in the Articles of Association. Directives in the form of 28 letters and eight directives in Coordination Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors	Surat/ MoM Ragab Letter/ Minutes of Joint Meetings	8,00	15,00	35,00	15,00
6	Kunjungan Anggota Dewan Komisaris untuk memonitor kemajuan proyek Visit of the Board of Commissioners members to monitor project progress	Jumlah kunjungan Anggota Dewan Komisaris ke lokasi usaha, proyek dan/atau investasi Number of visits by the Board of Commissioners members to business, project, and/or investment locations	Kali	2,00	10,00	6,00	10,00
7	Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Periodik Perusahaan Submission of the Board of Commissioners' Response to the Company's Periodic Report	Tanggapan Dewan Komisaris atas laporan triwulanan dan laporan tahunan (laporan triwulan IV termasuk dalam lingkup laporan tahunan) The Board of Commissioners' response to quarterly reports and annual reports (quarter IV reports are included in the annual report)	Surat Letter	3,00	10,00	3,00	10,00

No	Indikator Kinerja Utama Main Performance Indicators	Deskripsi Descriptions	Satuan Unit	Target Target	Bobot (%) Weight (%)	Realisasi Realization	Capaian Kpi (%) Kpi Achievement (%)
8	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan kepada RUPS Submission of Supervisory Task Report to the GMS	Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku bersangkutan kepada RUPS Report on the Board of Commissioners supervisory duties during the relevant fiscal year to the GMS	Surat Letter	1,00	10,00	1,00	10,00
Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan (10%) Learning and Growth Aspects (10%)							
9	Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Training Participated by the Board of Commissioners Members	Jumlah diklat/seminar/ *benchmarking* yang diikuti masing-masing Anggota Dewan Komisaris Number of training/seminars/ benchmarking attended by each Board of Commissioners Member	Kali Times	4,00	10,00	4,00	10,00
Total Nilai Total Score					**100,00**		**99,00**

Dari hasil penilaian di atas, Dewan Komisaris dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian serta telah mencapai target yang ditentukan oleh Perusahaan.

From the assessment results above, the Board of Commissioners is considered to have carried out its duties and responsibilities properly per the procedures and assessment criteria and has achieved the targets set by the Company.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Perusahaan tahun 2023 mengacu kepada Kontrak Manajemen yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2023 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 27 Desember 2022. Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara *self assessment* melalui mekanisme penilaian internal Perusahaan, yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta Pemegang Saham melalui forum RUPS.

Berikut disampaikan kriteria dan hasil penilaian kinerja Direksi tahun 2023.

Board of Directors Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Directors in 2023 refers to the Management Contract in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) document for the 2023 fiscal year, which was approved by the Board of Commissioners and Board of Directors on December 27, 2022. The Board of Directors performance assessment is carried out via self-assessment through an internal Company assessment mechanism, which is then reported to the Board of Commissioners and Shareholders through the GMS forum.

Below are the criteria and results of the Board of Directors' performance assessment in 2023.

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Criteria and Results of the Board of Directors Performance Assessment

No.	Perspektif Perspective	KPI		Sasaran Strategis Sasaran Strategis	Bobot (%) Bobot (%)	Skor Skor	Skor x Bobot Skor x Bobot
1	*Financial (3-5 items, 24%-50%)*	1.1	EBITDA	*Increase Profitability*	8,0%	1	0,08
		1.2	ROIC-WACC	*Increase Profitability*	7,0%	4	0,28
		1.3	*Debt to EBITDA*	*Increase Profitability*	8,0%	3	0,24
		1.4	*Debts to Invested Capital*	*Increase Profitability*	8,0%	4	0,32
					31,0%		
2	*Customer (2-3 Items, 7%-50%)*	2.1	*Performance Index QHSE*	*Increase Stakeholder Satisfaction*	5,0%	4	0,20
		2.2	*% Revenue from External Project*	*Increase Stakeholder Satisfaction*	7,0%	2	0,14
					12,0%		

No.	Perspektif Perspective	KPI		Sasaran Strategis Sasaran Strategis	Bobot (%) Bobot (%)	Skor Skor	Skor x Bobot Skor x Bobot
3	*Internal Business Process (3-6 Items, 13%-50%)*	3.1	*Proyek On Time On Budget* On-Time, On-Budget Projects	*Improve Contruction Operational Process*	7,0%	3	0,21
		3.2	*Fatality Rate*	*Improve Contruction Operational Process*	5,0%	4	0,20
		3.3	*Equipment Utilization Rate* (PPRE)	*Improve Contruction Operational Process*	6,0%	1	0,06
		3.4	*Free Cash Flow*	*Improve Financial Capacity*	7,0%	4	0,28
		3.5	Nilai Divestasi Divestment Value	*Improve Financial Capacity*	8,0%	1	0,08
					33,0%		
4	*Learning & Growth (2-6 Item, 10%-50%)*	4.1	HC *Readiness*	*Improve Talent and Organization Management*	3,0%	1	0,03
		4.2	Kepatuhan Implementasi Manajemen Risiko Risk Management Implementation Compliance	*Improve Company Governance*	4,0%	4	0,16
		4.3	*Success Rate Legal Settlement*	*Improve Company Governance*	4,0%	4	0,16
		4.4	Penerapan GCG (AP) GCG Implementation (AP)	*Improve Company Governance*	3,0%	2	0,06
		4.5	Implementasi Penggunaan ERP ERP Usage Implementation	*Improve Company Governance*	4,0%	3	0,12
		4.6	Tingkat Internalisasi Budaya Perusahaan Corporate Culture Internalization Level	*Improve Talent and Organization Management*	3,0%	2	0,06
		4.7	Produktivitas Karyawan Employee Productivity	*Improve Talent and Organization Management*	3,0%	1	0,03
					24,0%		
			TOTAL		**100,00%**		**2,71**

Dari hasil penilaian di atas, Direksi dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian serta telah mencapai target yang ditentukan oleh Perusahaan.

From the assessment results above, the Board of Directors is considered to have carried out its duties and responsibilities properly per the procedures and assessment criteria and has achieved the targets set by the Company.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Dasar Pemberian Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penentuan prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan No. 110/SK/PP/DIR/2023 tentang Penetapan Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris Anak Perusahaan Utama dan Non Utama tahun 2023.

Basis for the Board of Commissioners and Board of Directors' Remuneration

The determination of procedures, basis for determination, structure, and amount of remuneration for every Board of Commissioners and Board of Directors member refers to Decree No. 110/SK/PP/DIR/2023 on the Determination of Remuneration for Board of Directors & Board of Commissioners of Main and Non-Main Subsidiaries in 2023.

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Komisaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Pemegang Saham Mayoritas dari Entitas Induk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Remuneration Proposal and Determination Procedure

The Board of Commissioners and Board of Directors remuneration determination is conducted by the President Commissioner. This is in accordance with the resolution of the Majority Shareholders of the Parent Entity by considering the Board of Commissioners' recommendations.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Adapun struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

The remuneration structure and components for the Board of Commissioners and Board of Directors are presented as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
Gaji dan Honorarium Salary and Honorarium	• Perhitungan honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. • Perhitungan honorarium anggota Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama. • The calculation of the President Commissioner's honorarium is 45% of the President Director's salary. • The calculation of the Commissioner's honorarium is 90% of the honorarium for the President Commissioner.	• Gaji Direktur Utama diberikan dengan perhitungan *grade* sebagaimana tertuang dalam pedoman internal entitas induk, PT PP (Persero) Tbk. Gaji Direktur Utama juga menjadi perhitungan dasar bagi besaran honorarium Komisaris dan gaji Direksi lainnya. • Direktur: diberikan sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. • The President Director's salary is calculated using a grade as stated in the internal guidelines of the parent entity, PT PP (Persero) Tbk. The President Director's salary is also the basic calculation for the honorarium of Commissioners and other Directors' salaries. • Director: given 85% of the President Director's salary.

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Tunjangan Allowance	Tunjangan Transportasi: dibayarkan 20% dari honorarium. Transportation allowance: paid 20% of the honorarium.	• Tunjangan Posisi dan Tunjangan Jabatan: dibayarkan dengan besaran berdasarkan *grade* sebagaimana tertuang dalam pedoman internal entitas induk, PT PP (Persero) Tbk. • Tunjangan Perumahan: dibayarkan 40% dari gaji, diberikan maksimal senilai Rp27.500.000. • Tunjangan Operasional: sebesar tunjangan variabel sesuai *job grade* (termasuk transportasi, BBM dan Komunikasi). • Position Allowance and Position Allowance: paid at a rate based on grade as stated in the internal guidelines of the parent entity, PT PP (Persero) Tbk. • Housing Allowance: paid 40% of salary, given a maximum amount of Rp27,500,000. • Operational Allowance: equal to variable allowance according to job grade (including transportation, fuel, and communications).
Tantiem Bonus	Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan, yang penentuan jumlahnya dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris setelah mendapat rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi. The Company may provide bonuses to Boards of Commissioners and Directors members based on a GMS resolution validating the annual report, of which authority to define the amount is delegated to the Board of Commissioners after receiving a recommendation from the Nomination and Remuneration Function.	

Selain struktur dan komponen tersebut, Perusahaan tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya. Perusahaan juga tidak memiliki kebijakan opsi saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Apart from the abovementioned structures and components, the Company does not provide other forms of remuneration. The Company also has no share option policy for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Kebijakan Dasar Terkait Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja, pendapatan aktiva, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan faktor-faktor yang lain yang relevan, serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Basic Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Determination, and the Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Determination in 2023

The Board of Commissioners' remuneration is determined by considering several factors such as performance, asset income, inflation rate, the Company's financial condition and capability, and other relevant factors, and does not conflict with prevailing laws and regulations.

Perhitungan Besaran Gaji dan Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi
Calculation of the Board of Commissioners and Board of Directors Salary and Honorarium

Direktur Utama President Director	:	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh entitas induk, PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan) 100% (determined per the internal guidelines established by the parent entity, PT PP (Persero) Tbk as the Main/Controlling Shareholder of the Company)
Direksi Lainnya Other Directors	:	Sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama 85% of the President Director's Salary
Komisaris Utama President Commissioner	:	Sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama 45% of the President Director's Salary
Komisaris Lainnya Other Commissioners	:	Sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's Honorarium

Sesuai dengan RUPS Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023, RUPS memutuskan untuk menyetujui memberikan wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2022 serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

In accordance with the 2022 fiscal year Annual GMS held on May 24, 2023, the GMS decided to approve the authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of bonus for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 fiscal year as well as determining the amount of salary/honorarium, allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 fiscal year.

Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS di atas, Dewan Komisaris telah menetapkan besaran tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 sesuai dengan rekomendasi pemegang saham mayoritas.

Following up on the abovementioned GMS resolutions, the Board of Commissioners has determined the amount of bonus for the Board of Directors and Board of Commissioners and determined the amount of salary/honorarium, allowances, and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 fiscal year following the recommendations of the majority shareholders.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan surat keputusan di atas adalah sebagai berikut:

Remuneration Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

Information on the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the abovementioned decree is as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Masa Menjabat di Tahun 2023** Term of Office in 2023	**Gaji atau Honorarium per Bulan** Monthly Salary or Honorarium	**Tunjangan Perumahan** Housing Allowance	**Tunjangan Kendaraan / Transportasi** Vehicle/ Transportation Allowance	**Tunjangan Hari Raya** Holiday Allowance	**Asuransi Purna Jabatan** Post-Employment Insurance	**Fasilitas Kesehatan** Health Facility	**Fasilitas Bantuan Hukum** Legal Facility	**Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan** Remuneration Tax Borne by the Company	**Fasilitas Kendaraan** Vehicle Facility	**Tantiem/ Insentif Kinerja** Bonus/ Performance Incentive	**Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2023 (Rp)** Total Remuneration Paid in 2023 (Rp)
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	1 tahun penuh 1 full year	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	x	✓	417.457.705
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	1 tahun penuh 1 full year	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	x	✓	407.140.311
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	1 tahun penuh 1 full year	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	x	✓	395.234.624
Muhammad Zahid (Komisaris)* (Commissioner)*	Mei s.d Desember May to December	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	x	✓	199.998.750
Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama)* (President Commissioner)*	Januari s.d Mei January to May	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	x	✓	230.157.290
Subjumlah Subtotal												1.649.988.680

Nama dan Jabatan Name and Position	**Masa Menjabat di Tahun 2023** Term of Office in 2023	**Gaji atau Honorarium per Bulan** Monthly Salary or Honorarium	**Tunjangan Perumahan** Housing Allowance	**Tunjangan Kendaraan / Transportasi** Vehicle/ Transportation Allowance	**Tunjangan Hari Raya** Holiday Allowance	**Asuransi Purna Jabatan** Post-Employment Insurance	**Fasilitas Kesehatan** Health Facility	**Fasilitas Bantuan Hukum** Legal Facility	**Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan** Remuneration Tax Borne by the Company	**Fasilitas Kendaraan** Vehicle Facility	**Tantiem/ Insentif Kinerja** Bonus/ Performance Incentive	**Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan di Tahun 2023 (Rp)** Total Remuneration Paid in 2023 (Rp)
Direksi Board of Directors												
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama)* (President Director)*	Mei s.d Desember May to December	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	484.012.436
Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	1 tahun penuh 1 full year	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	643.057.295
Rebimun (Direktur Operasi)* (Director of Operations)*	1 tahun penuh 1 full year	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	643.057.295
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM)* (Director of Business Planning and HCM)*	Februari s.d Desember February to December	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	533.228.031
Rully Noviandar (Direktur Utama)* (President Director)*	Januari s.d Mei January to May	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	557.209.062
M Darwis Hamzah (Direktur Operasi)* (Director of Operations)*	Januari s.d Februari January to February	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	169.511.364
Subjumlah Subtotal												3.078.804.687
Jumlah Total												3.030.075.483

* Pada RUPS Luar Biasa tanggal 23 Februari 2023 dan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 24 Mei 2023, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan
* On Extraordinary GMS on February 23, 2023, and the 2022 Fiscal Year Annual GMS on May 24, 2023, there are changes to the Board of Commissioners and Board of Directors' composition.

Rasio Gaji

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan sebagai berikut:

Salary Ratio

Information on the salary ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees is as follows:

Uraian Description	2023	2022
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee Level to Lowest Employee Level	9,0 : 1	5,3 : 1
Direksi Tertinggi terhadap Direksi Terendah Highest Director Level to Lowest Director Level	2,0 : 1	1,5 : 1
Dewan Komisaris Tertinggi terhadap Dewan Komisaris Terendah Highest Commissioner Level to Lowest Commissioner Level	1,1 : 1	1,1 : 1
Direksi Tertinggi terhadap Dewan Komisaris Tertinggi Highest Director Level to Highest Commissioner Level	2,0 : 1	2,2 : 1
Direksi Tertinggi terhadap Karyawan Tertinggi Highest Director Level to Highest Employee Level	2,5 : 1	2,4 : 1

Hubungan antara Remunerasi dan Kinerja Perusahaan

Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dikaitkan dengan:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri yang sama dan sejenis dengan kegiatan usaha Perusahaan dan yang sama skala industrinya dengan Perusahaan;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
3. Target kinerja dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan *variable*;
5. Kesesuaian peraturan dan perundang-undangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan;
6. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perusahaan.

Correlation between Remuneration and the Company's Performance

The determination of the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration amount is based on each member's duties, responsibilities, and authorities, which correlates with:

1. Remuneration that applies to the same and similar industry with the Company's business and has the same industry scale as the Company;
2. The Boards of Commissioners and Boards of Directors' duties, responsibilities, and authorities related to the achievement of the Company's goals and performance;
3. Performance targets and performance of every Board of Commissioners and Board of Directors member;
4. The balance between fixed and variable allowances;
5. Conformity with laws and regulations in taxation and employment;
6. The principles of transparency, internal balance, and competitiveness with companies outside the Company.

Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja serta Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2023 Perusahaan tidak melaksanakan Program Opsi Kepemilikan Saham baik oleh Manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) maupun oleh Karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP). Perusahaan juga belum memiliki kompensasi jangka panjang berbasis kinerja yang diberikan baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan.

Long-Term Performance-Based Compensation Policy and Employee and/or Management Stock Option Plan

Until the end of 2023, PTPP does not carry out any Stock Option Programs, neither by the Management (Management Stock Option Program or MSOP) nor by Employees (Employee Stock Option Program or ESOP), for providing performance-based long-term compensation. The Company also has no long-term performance-based compensation to the Board of Commissioners, Board of Directors, or employees.

Pengungkapan Transaksi dan Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga kepada Sekretaris Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari sejak terjadinya transaksi.

Di sepanjang tahun 2023, tidak terdapat transaksi saham PPRE oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Disclosure of the Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

Share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors members in the Company and other companies is regularly disclosed through a share ownership register of the Board of Commissioners and Board of Directors members. All Board of Commissioners and Board of Directors members must inform the purchase and sale of securities transactions to the Corporate Secretary and Financial Services Authority (OJK) no later than ten days from the transaction.

Throughout 2023, there is no PPRE stock transaction by the Board of Commissioners and Board of Directors.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, dan Entitas Pemilik Akhir

Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, dan/atau entitas pemilik akhir. Transparansi hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi, baik di bidang keuangan maupun keluarga, disampaikan melalui tabel di bawah.

Affiliations between the Board of Commissioners, Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, and Ultimate Beneficial Owner

The current Board of Commissioners and Board of Directors has no financial relations, management relations, share ownership and/or family relations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, and/or ultimate beneficial owner. The affiliation transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors, financial and family, is presented in the following table.

Nama dan Jabatan Name and Position	**Hubungan Keuangan dengan** Financial Relations with				**Hubungan Keluarga dengan** Familial Relations with			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama / Pengendali** PT PP (Persero) Tbk as the Main/ Controlling Shareholder	**Negara Republik Indonesia sebagai Entitas Pemilik Akhir** The Republic of Indonesia as the Ultimate Beneficial Owner	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama / Pengendali** PT PP (Persero) Tbk as the Main/ Controlling Shareholder	**Negara Republik Indonesia sebagai Entitas Pemilik Akhir** The Republic of Indonesia as the Ultimate Beneficial Owner
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)	x	x	x	x	x	x	x	x
Indra Jaya Rajagukguk (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	x	x	x	x	x	x	x	x
Albert Simangunsong (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x	x	x	x	x	x
Muhammad Zahid (Komisaris) (Commissioner)	x	x	√	x	x	x	x	x

Nama dan Jabatan Name and Position	**Hubungan Keuangan dengan** Financial Relations with				**Hubungan Keluarga dengan** Familial Relations with			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama / Pengendali** PT PP (Persero) Tbk as the Main/ Controlling Shareholder	**Negara Republik Indonesia sebagai Entitas Pemilik Akhir** The Republic of Indonesia as the Ultimate Beneficial Owner	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama / Pengendali** PT PP (Persero) Tbk as the Main/ Controlling Shareholder	**Negara Republik Indonesia sebagai Entitas Pemilik Akhir** The Republic of Indonesia as the Ultimate Beneficial Owner
Direksi Board of Directors								
I Gede Upeksa Negara (Direktur Utama) (President Director)	x	x	x	x	x	x	x	x
Mohammad Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) (Director of Finance, Risk Management, and Legal)	x	x	x	x	x	x	x	x
Rebimun (Direktur Operasi) (Director of Operations)	x	x	x	x	x	x	x	x
Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM) (Director of Business Planning and HCM)	x	x	x	x	x	x	x	x

√ : Ada | x : Tidak Ada
√ : Any | x : None

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Komite Audit

Perusahaan memiliki Komite Audit yang berperan dalam membantu efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris terhadap tugas Direksi dalam mengelola Perusahaan, khususnya pengawasan dalam hal pengendalian internal serta pelaporan keuangan dan manajemen.

Pedoman Komite Audit
Dalam membantu tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 26 September 2023 yang berisi panduan kerja Komite Audit termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan rapat Komite Audit.

Kriteria Penentuan Komite Audit
Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi serta kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya tata kelola yang sehat. Anggota Komite Audit Perusahaan pada saat diangkat dan menjabat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

SUPPORTING ORGANS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Audit Committee

The Company has an Audit Committee to assist the effectiveness of the Board of Commissioners' oversight function on the Board of Directors' duties in managing the Company, particularly in terms of internal control as well as financial and management reporting.

Audit Committee Charter
In assisting the Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities, the Audit Committee is equipped with an Audit Committee Charter signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on September 26, 2023. It contains work guidelines for the Audit Committee, including duties, responsibilities, and meeting implementation.

Audit Committee Appointment Criteria
All Committee members shall have high commitment and integrity as well as the ability and expertise in their work field to support the implementation of sound governance. Audit Committee Members must meet the following requirements at appointment and in office.

1. Have high integrity, ability, knowledge, and experience following their field of work and are capable of communicating properly;

2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Mematuhi Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan Perusahaan;
4. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain kepada perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Komposisi Komite Audit Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perusahaan, terdapat penambahan anggota Komite Audit di mana Sdr. Muhammad Zahid diangkat untuk menjadi anggota Komite Audit. Dengan demikian, komposisi dan susunan Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

2. Understand the financial statements, corporate business, particularly those related to the Company's services or business activities, audit process, risk management, laws and regulations in the capital market sector as well as other related laws and regulations;
3. Comply with the Audit Committee Code of Conduct established by the Company;
4. Have at least one member with educational background and expertise in accounting and finance;
5. Willing to improve their competencies continuously through education and training;
6. Not a person working in a public accounting firm, legal consulting firm, public appraisal service office, or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last six months;
7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six months, except for an Independent Commissioner;
8. Do not have direct or indirect shares in the Company;
9. In the event that an Audit Committee member acquires Company shares, directly or indirectly, as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of six months after the shares were acquired;
10. Not affiliated with Board of Commissioners members, Board of Directors members, or Major Shareholders;
11. Do not have business relationships, directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Term of Office Conditions

The term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of three years and can be extended once for a two-year term of office without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Audit Committee Structure and Composition in 2023

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 13, 2023, on Changes in the Company's Audit Committee Members, there were additional Audit Committee members where Muhammad Zahid was appointed to become an Audit Committee member. Thus, the Audit Committee's composition and structure as of December 31, 2023, are as follows.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2023 / Audit Committee Composition on December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Nur Rochmad	Ketua/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Head/President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/DEKOM/PPRE/2022 tanggal 25 April 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 007/SK/DEKOM/PPRE/2022 dated April 25, 2022	Mengikut masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	
Albert Simangunsong	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/DEKOM/PPRE/2022 tanggal 25 April 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 007/SK/DEKOM/PPRE/2022 dated April 25, 2022	Mengikut masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	
Muhammad Zahid	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 13 Juni 2023 Decree of the Board of Commissioners No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 13, 2023	Mengikut masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	
Tri Saripalupi Andayani	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011/SK/PPRE-DEKOM/2022 tanggal 28 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 011/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 28, 2022	2022 s.d. 2025 2022 to 2025	Ke-2 Second
Mubari	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011/SK/PPRE-DEKOM/2022 tanggal 28 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 011/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 28, 2022	2022 s.d. 2025 2022 to 2025	Ke-2 Second

Profil Komite Audit / Audit Committee Profile

Nur Rochmad
Ketua Komite Audit/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Head of the Audit Committee/President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Nur Rochmad dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Head of the Audit Committee, Nur Rochmad, is available in the profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Albert Simangunsong
Anggota Komite Audit/Komisaris
Audit Committee Member/Commissioner

Profil Anggota Komite Audit Albert Simangunsong dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Audit Committee Member, Albert Simangunsong, is available in the profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Muhammad Zahid
Anggota Komite Audit/Komisaris
Audit Committee Member/Commissioner

Profil Anggota Komite Audit Muhammad Zahid dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Audit Committee Member, Muhammad Zahid, is available in the profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Tri Saripalupi Andayani

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Audit Committee Member/Independent Party

Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.d. 28 Mei 2025, Periode Ke-2
Term of Office: May 28, 2022 to May 28, 2025, Second Period

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Surabaya, 12 April 1971
Domisili Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Airlangga (2013)

Sertifikasi Profesi
- *Certificate of* Manajemen Umum Dana Pensiun dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (2023)
- *Certificate of* Manajemen Risiko Dana Pensiun dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (2023)

Riwayat Profesi
- Direktur Utama Dana Pensiun PT PP (Persero) Tbk (2023-sekarang)
- Direktur PT Gitanusa Sarana Niaga (2022-2023)
- Senior Manager Head of Supply Chain Department PT PP (Persero) Tbk (2017-2019)
- Procurement Manager PT PP (Persero) Tbk (2013-2016)
- Account Payable Manager PT PP (Persero) Tbk (2010-2013)
- Account Manager PT PP (Persero) Tbk (2006-2010)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Direktur Utama Dana Pensiun PT PP (Persero) Tbk (2023-sekarang).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Personal Data
Indonesian citizen
52 years old
Born in Surabaya, April 12, 1971
Domiciled in Surabaya, East Java, Indonesia

Education
Bachelor of Accounting from Airlangga University (2013)

Professional Certification
- Certificate of Pension Funds General Management from the Indonesian Pension Fund Association (2023)
- Certificate of Pension Fund Risk Management from the Indonesian Pension Fund Association (2023)

Professional History
- President Director of PT PP (Persero) Tbk Pension Fund (2023-present)
- Director of PT Gitanusa Sarana Niaga (2022-2023)
- Senior Manager Head of the Supply Chain Department of PT PP (Persero) Tbk (2017-2019)
- Procurement Manager of PT PP (Persero) Tbk (2013-2016)
- Account Payable Manager of PT PP (Persero) Tbk (2010-2013)
- Account Manager of PT PP (Persero) Tbk (2006-2010)

Concurrent Positions
In the Company: None.
Outside the Company: President Director of PT PP (Persero) Tbk Pension Fund (2023-present)

Affiliations
Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, PT PP (Persero) Tbk as the main/controlling shareholder or the Indonesian Government as the Company's ultimate beneficial owner.

Mubari

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Audit Committee Member/Independent

Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.d. 28 Mei 2025, Periode Ke-2
Term of Office: May 28, 2022 to May 28, 2025, Second Period

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Batang, 23 November 1974
Domisili DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Bhayangkara Surabaya (2018)

Sertifikasi Profesi
Tidak ada

Riwayat Profesi
- Manajer Production Cost PT PP (Persero) Tbk (2017-2019)
- Production Cost Officer PT PP (Persero) Tbk (2013-2017)
- Procurement Officer PT PP (Persero) Tbk (2012-2013)
- Cost Control Officer PT PP (Persero) Tbk (2012)
- Purchasing Officer PT PP (Persero) Tbk (2011-2012)
- Staf Site Engineering Manajer Biaya PT PP (Persero) Tbk (2010-2011)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Personal Info
Indonesian citizen
49 years old
Born in Batang, November 23, 1974
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Education
Bachelor of Civil Engineering from Bhayangkara University Surabaya (2013)

Professional Certification
None

Professional History
- Production Cost Manager of PT PP (Persero) Tbk (2017-2019)
- Production Cost Officer of PT PP (Persero) Tbk (2013-2017)
- Procurement Officer of PT PP (Persero) Tbk (2012-2013)
- Cost Control Officer of PT PP (Persero) Tbk (2012)
- Purchasing Officer of PT PP (Persero) Tbk (2011-2012)
- Site Engineering Cost Manager Staff of PT PP (Persero) Tbk (2010-2011)

Concurrent Positions
In the Company: None.
Outside the Company: None.

Affiliations
Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, PT PP (Persero) Tbk as the main/controlling shareholder or the Indonesian Government as the Company's ultimate beneficial owner.

Independensi dan Hubungan Afiliasi Komite Audit
Seluruh anggota Komite audit telah memenuhi persyaratan independensi yang diuraikan sebagai berikut.

Audit Committee Independence and Affiliation
All Audit Committee members have met the following independence requirements.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Nur Rochmad	Albert Simangunsong	Muhammad Zahid	Tri Saripalupi Andayani	Mubari
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. A person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's operations in the last six months.	√	√	√	x	x
Mempunyai saham baik langsung atau tidak langsung pada Perusahaan. Have shares, directly or indirectly, in the Company.	x	x	√	x	x
Mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Affiliated with the Boards of Commissioners or Board of Directors members or Major Shareholders of the Company.	x	x	x	x	x
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Have direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	x	x	√	x	x

√ : Ya | x : Tidak
√ : Yes | x : No

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit sebagai berikut.

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan kantor akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Biro Internal Audit dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Biro Internal Audit;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;

Audit Committee Duties and Responsibilities
The Audit Committee's duties and responsibilities based on the Audit Committee Charter are as follows.

1. Reviewing financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;
2. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations related to the Company's activities;
3. Provide independent opinion in the event of dissenting opinion between the management and public accountant for the services provided;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of a public accounting firm based on independence, scope, and fees;
5. Reviewing the audit implementation by the Internal Audit Unit Bureau and monitoring the implementation of follow-up actions from the Internal Audit Unit Bureau findings by the Board of Directors;
6. Reviewing the risk management activities carried out by the Board of Directors;
7. Review and provide advice to the Board of Commissioners on potential conflicts of interest in the Company;

8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan;
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

8. Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information;
9. Reviewing the adequacy of audits conducted by public accountants to ensure that all important risks have been considered;
10. Examine allegations of errors in the Board of Directors meeting resolutions or irregularities in implementing said resolutions.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Antar Komite Audit

Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite Audit tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 12 Juni 2023. Uraian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Komite Audit diuraikan sebagai berikut.

Division of Audit Committee Duties and Responsibilities

The division of duties and responsibilities of every Audit Committee member is stipulated in the Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2023, dated June 12, 2023. The division of duties and responsibilities of every Audit Committee member is described as follows.

Nur Rochmad (Ketua I Head of the Committee**)**	
• Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal). • Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; • Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT; • Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan); • Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP; • Kebijakan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan peralatan; • Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan *supply chain* & ERP; • Kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan Perusahaan; • Kebijakan dan penerapan QSHE (Mutu, K3 & Lingkungan), *Green Construction*, dan sertifikasi; • Kebijakan, pelaksanaan, dan monitoring atas persetujuan investasi/aksi korporasi.	• Policy and monitoring of audit implementation (internal and external). • Risk Management policy and implementation; • Business development and IT policy and implementation; • HR policy and management (development); • Annual RKA and RJPP preparation and monitoring policy; • Equipment management implementation policy and monitoring; • Supply chain & ERP procurement policy and implementation; • Corporate finance policy and implementation; • QHSE (Quality, OHS, and Environment), green construction, and certification policy and implementation; • Investment/corporate actions approval policy, implementation, and monitoring.

Albert Simangunsong (Anggota I Member**)**	
• Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal). • Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; • Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT; • Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP; • Kebijakan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan peralatan; • Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan *supply chain* & ERP; • Kebijakan dan penerapan QSHE (Mutu, K3 & Lingkungan), *Green Construction* dan Sertifikasi. • Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan investasi /Aksi Korporasi.	• Policy and monitoring of audit implementation (internal and external). • Risk Management policy and implementation; • Business development and IT policy and implementation; • Annual RKA and RJPP preparation and monitoring policy; • Equipment management implementation policy and monitoring; • Supply chain & ERP procurement policy and implementation; • QHSE (Quality, OHS, and Environment), green construction, and certification policy and implementation; • Investment/corporate actions approval policy, implementation, and monitoring.

Muhammad Zahid (Anggota I Member**)**	
• Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal); • Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; • Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan); • Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT; • Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan *supply chain* & ERP; • Kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan Perusahaan; • Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP; dan • Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan Investasi/Aksi korporasi.	• Policy and monitoring of audit implementation (internal and external). • Risk Management policy and implementation; • HR policy and management (development); • Business development and IT policy and implementation; • Supply chain & ERP procurement policy and implementation; • Corporate finance policy and implementation; • Annual RKA and RJPP preparation and monitoring policy; • Investment/corporate actions approval policy, implementation, and monitoring.

Tri Saripalupi Andayani (Anggota I Member)	
• Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal). • Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; • Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT; • Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan); • Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP; • Kebijakan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan peralatan; • Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan *supply chain* & ERP; • Kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan Perusahaan; • Kebijakan dan penerapan QSHE (Mutu, K3 & Lingkungan), *Green Construction* dan Sertifikasi; dan • Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan investasi/Aksi korporasi.	• Policy and monitoring of audit implementation (internal and external). • Risk Management policy and implementation; • Business development and IT policy and implementation; • HR policy and management (development); • Annual RKA and RJPP preparation and monitoring policy; • Equipment management implementation policy and monitoring; • Supply chain & ERP procurement policy and implementation; • Corporate finance policy and implementation; • QHSE (Quality, OHS, and Environment), green construction, and certification policy and implementation; • Investment/corporate actions approval policy, implementation, and monitoring.

Mubari (Anggota I Member)	
• Kebijakan dan monitoring pelaksanaan audit (internal dan eksternal). • Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko; • Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan IT; • Kebijakan dan pengelolaan SDM (pengembangan); • Kebijakan penyusunan dan monitoring RKA Tahunan dan RJPP; • Kebijakan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan peralatan; • Kebijakan dan pelaksanaan pengadaan *supply chain* & ERP; • Kebijakan dan pelaksanaan bidang keuangan Perusahaan; • Kebijakan dan penerapan QSHE (Mutu, K3 & Lingkungan), *Green Construction* dan Sertifikasi; dan • Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan investasi/Aksi korporasi.	• Policy and monitoring of audit implementation (internal and external). • Risk Management policy and implementation; • Business development and IT policy and implementation; • HR policy and management (development); • Annual RKA and RJPP preparation and monitoring policy; • Equipment management implementation policy and monitoring; • Supply chain & ERP procurement policy and implementation; • Corporate finance policy and implementation; • QHSE (Quality, OHS, and Environment), green construction, and certification policy and implementation; • Investment/corporate actions approval policy, implementation, and monitoring.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris, Anggota Komite Audit dapat mengikuti program pengembangan (Pendidikan atau Pelatihan) setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

Audit Committee Competency Development

In accordance with the Board of Commissioners' policy, Audit Committee Members may participate in development programs (Education or Training) at least once a year.

Komite Audit Audit Committee	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Type	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Tri Saripalupi Andayani	Pelatihan GRC Masterclass Program 2023 2023 GRC Training Masterclass Program	Joint Venture between SOE and Private Sector	*Online*, 19 Oktober 2023 Online, October 19, 2023	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) dan Ashrust LLP Ministry of SEO in cooperation with International Finance Corporation (IFC) and Ashrust LLP
Mubari	Pelatihan GRC Masterclass Program 2023 2023 GRC Training Masterclass Program	Joint Venture between SOE and Private Sector	*Online*, 19 Oktober 2023 Online, October 19, 2023	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) dan Ashrust LLP Ministry of SEO in cooperation with International Finance Corporation (IFC) and Ashrust LLP

Rapat Komite Audit

Penyelenggaraan rapat Komite Audit tertuang dalam Piagam Komite Audit, di mana rapat tersebut dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Berikut rincian pelaksanaan rapat Komite Audit selama tahun 2023.

Audit Committee Meeting

The holding of Audit Committee meetings is stipulated in the Audit Committee Charter, in which meetings are held at least once every three months and attended by more than half of the members. The Audit Committee meeting resolutions are taken based on deliberation for consensus. The following are details of Audit Committee meetings in 2023.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Komite Audit Tahun 2023

Attendance Recapitulation of the Audit Committee in Committee Meetings in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jumlah Wajib Rapat** Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Nur Rochmad (Ketua/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)* (Head of the Committee/President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner)*	9	-	-
Albert Simangunsong (Anggota/Komisaris) (Member/Commissioner)	9	-	-
Muhammad Zahid (Anggota/Komisaris)** (Member/Commissioner)**	1	-	-
Tri Saripalupi Andayani (Anggota) (Member)	9	9	100,00
Mubari (Anggota) (Member)	9	2	22,22
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			**61,11**

* Kehadiran Nur Rochmad, Albert Simangunsong dan Muhammad Zahid sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit telah dijalankan melalui rapat Dewan Komisaris yang mengundang Komite Audit. Tentang rapat Dewan Komisaris dapat dilihat pada pembahasan "Rapat Dewan Komisaris dan Direksi" di atas.
** Muhammad Zahid menjabat sejak 13 Juni 2023.
* The attendance of Nur Rochmad, Albert Simangunsong, and Muhammad Zahid as the Head and Member of the Audit Committee has been fulfilled through the Board of Commissioners meetings that included the Audit Committee. More about the Board of Commissioners meeting is available in the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting in this chapter.
** Muhammad Zahid has been serving since June 13, 2023.

Risalah Rapat Komite Audit dan Kehadiran Komite Audit

Minutes of Audit Committee Meetings and Audit Committee Attendance

RAPAT KOMITE AUDIT #01	AUDIT COMMITTEE MEETING #01
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 16 Februari 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** February 16, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: *Assessment* GCG PPRE.	**MEETING AGENDA:** GCG Assessment in PPRE.
PESERTA RAPAT: • Teni Sumarni (Anggota tim) • Elvandi (HSE) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Abddullah Sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Afriski Trisna Putra (CC & PMO) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Febria Dwi Norti (staff) • Retnani Perdaniati (Kadep Acc) • Rizka Mediana Putri (Anggota Tim) • Onalia Pabunga (Auditor Muda) • Hardi Sulistianto (Anggota BPKP) • Syamsir Alamsyah (Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern) • Enggar (Staff SPI)	**MEETING PARTICIPANT:** • Teni Sumarni (Team Member) • Elvandi (HSE) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Abddullah Sigit (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Afriski Trisna Putra (CC & PMO) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Febria Dwi Norti (Staff) • Retnani Perdaniati (Accounting Division Head) • Rizka Mediana Putri (Team Member) • Onalia Pabunga (Junior Auditor) • Hardi Sulistianto (BPKP Member) • Syamsir Alamsyah (Head of the Internal Audit Unit) • Enggar (SPI Staff)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: Mubari (Anggota Komite Audit), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan.	**ABSENT MEMBER:** Mubari (Audit Committee Member), due to unavoidable duty.

RAPAT KOMITE AUDIT #02	AUDIT COMMITTEE MEETING #02 (
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 20 Februari 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** February 20, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: *Kick Off Meeting* GCG PPRE.	**MEETING AGENDA:** PPRE GCG Kick Off Meeting.
PESERTA RAPAT: • Afriski Trisna Putra (CC & PMO) • Teni Sumarni (Anggota tim) • Onalia Pabunga (Auditor Muda) • Rizka Mediana Putri (Anggota Tim) • Hardi Sulistianto anggota BPKP) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Abddullah sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Syamsir Alamnsyah (Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern) • Enggar (Staff SPI) • M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manrisk & HCM) • Roy (Coordinator Pengawas Bidang AN 1)	**MEETING PARTICIPANT:** • Afriski Trisna Putra (CC & PMO) • Teni Sumarni (Team Member) • Onalia Pabunga (Junior Auditor) • Rizka Mediana Putri (Team Member) • Hardi Sulistianto (BPKP Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Abddullah sigit (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Syamsir Alamnsyah (Head of the Internal Audit Unit) • Enggar (SPI Staff) • M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management & HCM) • Roy (AN 1 Monitoring Coordinator)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: Mubari (Anggota Komite Audit), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan.	**ABSENT MEMBER:** Mubari (Audit Committee Member), due to unavoidable duty.

RAPAT KOMITE AUDIT #03	AUDIT COMMITTEE MEETING #03
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 24 Februari 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** February 24, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: Wawancara Penerapan GCG PPRE.	**MEETING AGENDA:** PPRE GCG Implementation Interview.
PESERTA RAPAT: • Afriski Trisna Putra (CC & PMO) • Teni Sumarni (Anggota tim) • Onalia Pabunga (Auditor Muda) • Rizka Mediana Putri (Anggota Tim) • Hardi Sulistianto (Anggota BPKP) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Abddullah sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Adelia Auliyanti (Kepala Biro Sekretaris Perusahaan) • M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manrisk & HCM) • Yul Ari Pramuraharjo (Komisaris Utama PPRE) • Kiki Firmansyah (Perwakilan GCG PT PP Persero Tbk) • Reinhart (Perwakilan GCG PT PP Persero Tbk)	**MEETING PARTICIPANT:** • Afriski Trisna Putra (CC & PMO) • Teni Sumarni (Team Member) • Onalia Pabunga (Junior Auditor) • Rizka Mediana Putri (Team Member) • Hardi Sulistianto (BPKP Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Abddullah sigit (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Adelia Auliyanti (Head of the Corporate Secretary Bureau) • M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management & HCM) • Yul Ari Pramuraharjo (President Commissioner of PPRE) • Kiki Firmansyah (GCG Representative from PT PP Persero Tbk) • Reinhart (GCG Representative from PT PP Persero Tbk)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: Mubari (Anggota Komite Audit), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan.	**ABSENT MEMBER:** Mubari (Audit Committee Member), due to unavoidable duty.

RAPAT KOMITE AUDIT #04	AUDIT COMMITTEE MEETING #04
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 3 Maret 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** March 3, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: *Processing Scoring Assessment* GCG PPRE.	**MEETING AGENDA:** Processing the GCG Assessment Scoring of PPRE.
PESERTA RAPAT: • Teni Sumarni (Anggota tim) • Elvandi (HSE) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Abddullah sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Afriski Trisya Putra (CC & PMO) • Febria Dwi Norti (Staff) • Retnani Perdaniati (Kadep Acc) • Rizka Mediana Putri (Anggota Tim) • Onalia Pabunga (Auditor Muda) • Hardi Sulistianto (Anggota BPKP) • Syamsir Alamsyah (Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern) • Enggar (Staff SPI)	**MEETING PARTICIPANT:** • Teni Sumarni (Team Member) • Elvandi (HSE) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Abddullah Sigit (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Afriski Trisna Putra (CC & PMO) • Febria Dwi Norti (Staff) • Retnani Perdaniati (Accounting Division Head) • Rizka Mediana Putri (Team Member) • Onalia Pabunga (Junior Auditor) • Hardi Sulistianto (BPKP Member) • Syamsir Alamsyah (Head of the Internal Audit Unit) • Enggar (SPI Staff)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: Mubari (Anggota Komite Audit), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan.	**ABSENT MEMBER:** Mubari (Audit Committee Member), due to unavoidable duty.

RAPAT KOMITE AUDIT #05	AUDIT COMMITTEE MEETING #05
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 7 Maret 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** March 7, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: • Pra *Exit Assessment* GCG PPRE.	**MEETING AGENDA:** GCG Pre-Exit Assessment of PPRE.
PESERTA RAPAT: • Hardi Sulistianto (Auditor Madya) • Rizka Mediana Putri (Anggota Tim) • Afriski Trisya Putra (CC & PMO) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Abddullah sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Onalia Pabunga (Auditor Muda) • Teni Sumarni (Anggota tim) • Syamsir Alamsyah (Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern) • Enggar (Staff SPI) • Kiki Firmasnyah (Perwakilan Pemegang Saham)	**MEETING PARTICIPANT:** • Hardi Sulistianto (Mid-Level Auditor) • Rizka Mediana Putri (Team Member) • Afriski Trisna Putra (CC & PMO) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Abddullah Sigit (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Adelia Auliyanti (Vice President, Human Capital Management) • Onalia Pabunga (Junior Auditor) • Teni Sumarni (Team Member) • Syamsir Alamsyah (Head of the Internal Audit Unit) • Enggar (SPI Staff) • Kiki Firmasnyah (Shareholder Representative)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: Mubari (Anggota Komite Audit), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan.	**ABSENT MEMBER:** Mubari (Audit Committee Member), due to unavoidable duty.

RAPAT KOMITE AUDIT #06	AUDIT COMMITTEE MEETING #06
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 29 Maret 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** March 29, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: Rapat Temuan Hasil *Audited* Tahun 2022 dari KAP.	**MEETING AGENDA:** 2022 Audited Results Findings Meeting from KAP.
PESERTA RAPAT: • Mubari (Anggota) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Bambang Karunawan (KAP)	**MEETING PARTICIPANT:** • Mubari (Member) • Tri Saripalupi Andayani (Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Bambang Karunawan (KAP)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

RAPAT KOMITE AUDIT #07	AUDIT COMMITTEE MEETING #07
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 2 Juni 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** June 2, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: Sosialisasi dan Implementasi SMAP PPRE.	**MEETING AGENDA:** PPRE SMAP Dissemination and Implementation.
PESERTA RAPAT: • Nur Rochmad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) • Indra Jaya Rajagukghuk (Komisaris Independen) • Albert Simangunsong (Anggota Komite Audit) • Muhammad Zahid (Komisaris) • I Gede Upeksa (Direktur Utama) • M Arif Iswahyudi (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal) • Rebimun (Direktur Operasional) • Yudi Setiawan (Direktur Perencanaan Bisnis & HCM) • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Abddullah sigit (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Mubari (Anggota komite Audit) • Priyadi Wuliyanto (Kepala Biro Perencanaan dan Pengendalian) • Debbie Novalia (Kepala Departemen Perencanaan Strategi dan Sistem) • Afriski Trisya Putra (CC & PMO) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)	**MEETING PARTICIPANT:** • Nur Rochmad (President Commissioner, concurrently as Independent Commissioner) • Indra Jaya Rajagukguk (Independent Commissioner) • Albert Simangunsong (Audit Committee Member) • Muhammad Zahid (Commissioner) • I Gede Upeksa (President Director) • M Arif Iswahyudi (Director of Finance, Risk Management and Legal) • Rebimun (Director of Operations) • Yudi Setiawan (Director of Business Planning & HCM) • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Abddullah sigit (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Mubari (Audit Committee Member) • Priyadi Wuliyanto (Head of Planning and Control Bureau) • Debbie Novalia (Head of Strategy and Systems Planning Department) • Afriski Trisya Putra (CC & PMO) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: Mubari (Anggota Komite Audit), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan.	**ABSENT MEMBER:** Mubari (Audit Committee Member), due to unavoidable duty.

RAPAT KOMITE AUDIT #08	AUDIT COMMITTEE MEETING #08
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 8 Juni 2023; *Lounge* Wisma Subiyanto Lt.1	**MEETING DATE AND VENUE:** June 8, 2023; Wisma Subiyanto Lounge, 1st Floor
AGENDA RAPAT: Pemaparan Kebijakan Manajemen Risiko PPRE	**MEETING AGENDA:** PPRE Risk Management Policy Description.
PESERTA RAPAT: • Bari Srisoenami (Anggota Komite Kepatuhan) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Ayu Novianti (Risk Management Madya) • Natanael Parisian (Risk Management Madya)	**MEETING PARTICIPANT:** • Bari Srisoenami (Compliance Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Mei Elsa Kembaren (Manager, Risk Management) • Ayu Novianti (Risk Management Madya) • Natanael Parisian (Risk Management Madya)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: Mubari (Anggota Komite Audit), adanya tugas yang tidak bisa ditinggalkan.	**ABSENT MEMBER:** Mubari (Audit Committee Member), due to unavoidable duty.

RAPAT KOMITE AUDIT #09	AUDIT COMMITTEE MEETING #09
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 13 Desember 2023; Online - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** December 13, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: Rapat Progres Audit KAP Tahun 2023.	**MEETING AGENDA:** The 2023 KAP Audit Progress Meeting.
PESERTA RAPAT: • Mubari (Anggota Komite Audit) • Tri Saripalupi Andayani (Anggota Komite Audit) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Bambang Karunawan (KAP) • Agung Nugroho (KAP) • Ahmad Yanuar R (KAP) • Adimas A.P (Manager Accounting) • Reza Abidin (Junior Officer Accounting) • Febria Dwi (Junior Officer Accounting) • Fata Imanda (Officer Corporate Control) • Vendy Ardianto (Senior Officer Accounting)	**MEETING PARTICIPANT:** • Mubari (Audit Committee Member) • Tri Saripalupi Andayani (Audit Committee Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Bambang Karunawan (KAP) • Agung Nugroho (KAP) • Ahmad Yanuar R (KAP) • Adimas A.P (Manager Accounting) • Reza Abidin (Junior Officer Accounting) • Febria Dwi (Junior Officer Accounting) • Fata Imanda (Officer Corporate Control) • Vendy Ardianto (Senior Officer Accounting)
KOMITE AUDIT YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER:** -

Program Kerja dan Realisasi Tugas serta Tanggung Jawab Komite Audit

Di tahun 2023, Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya melalui kebijakan dan program kerja sebagai berikut.

Audit Committee's Work Program and Duties and Responsibilities Realization

In 2023, the Audit Committee has conducted its duties and responsibilities properly through the following policies and work programs.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
1	Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pengendalian dan Kepatuhan Manajemen	a. Melaksanakan koordinasi internal Komite Audit, mengikuti Rakom - Rapat Dewan Komisaris.	Terealisir mengikuti & menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris selama tahun 2023, pada tanggal: 1. 07 Februari 2. 31 Maret 3. 10 Mei 4. 21 Juni 5. 28 Juli 6. 26 Oktober yang dilanjutkan mengikuti Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
		b. Meneliti kelengkapan data atas aksi korporasi yang diajukan Direksi.	Bekerja sama dengan Komite Kepatuhan, memastikan bahwa Aksi Korporasi telah dijalankan sesuai Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar dan dan atau *threshold* PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas, selama tahun 2023 terealisasi.
		c. Menyampaikan usulan Rencana Kerja/RKAP Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan, dan disampaikan ke Perusahaan sesuai surat Dewan Komisaris: - No. 143/EXT/KOM/ PPRE/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal: Penyerahan Rencana Anggaran Biaya Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2024. - No. 145/EXT/KOM/ PPRE/XI/2023 tanggal 3 November 2023 perihal: Penyerahan Program Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2024.
	Supervision and Direction of Management Control and Compliance	a. Carry out the Audit Committee Internal Coordination and participated in Board of Commissioners meetings.	Has attended and prepared materials for the Board of Commissioners Coordination Meeting throughout 2023, on: 1. February 7 2. March 31 3. May 10 4. June 21 5. July 28 6. October 26 following a joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.
		b. Examining the completeness of the data on corporate actions proposed by the Board of Directors.	In collaboration with the Compliance Committee, ensuring that Corporate Actions are carried out following the Laws and Regulations, the Articles of Association, and/or the threshold of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder are realized in 2023.
		c. Submit a Board of Commissioners Work Plan/RKAP proposal	Has been implemented and submitted to the Company per the Board of Commissioners letter: - No. 143/EXT/KOM/ PPRE/IX/2023 dated September 27, 2023, on the Submission of PT PP Presisi Tbk Board of Commissioners Cost Budget Plan for 2024. - No. 145/EXT/KOM/ PPRE/XI/2023 dated November 3, 2023, on the Submission of PT PP Presisi Tbk Board of Commissioners Work Program for 2024.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
2	Pengendalian dan Kepatuhan Program Kerja Perusahaan	a. *Review* terhadap hasil pelaksanaan dan audit tahunan. b. *Review* Laporan Triwulanan realisasi pelaksanaan Program Kerja Perusahaan. i. Evaluasi Kinerja: ii. Evaluasi kinerja investasi dan program strategis perusahaan.	Evaluasi hasil LHP KAP Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan surat No. 011/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 7 April 2023. Dilaksanakan di dalam Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Laporan per Triwulan sesuai surat: 1. No. 013/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Review Laporan Keuangan Audited PT PP Presisi Tbk Tahun 2022. 2. Minit Rakom Triwulan I 2023. 3. Minit Rakom Triwulan II 2023. 4. Minit Rakom Triwulan III 2023.
	Corporate Work Program Control and Compliance	a. Review of annual audit implementation results. b. Review of Company's Work Program Quarterly Implementation Report. i. Performance evaluation. ii. Evaluation of the company's investment performance and strategic programs.	The 2022 KAP LHP results are evaluated per letter No. 011/INT/KA/DEKOMPPRE/2023, dated April 7, 2023. Implemented in the Board of Commissioners Coordination Meeting and Quarterly Reports per letter: 1. No. 013/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated April 17, 2023, on the Review of PT PP Presisi Tbk Audited Financial Statement for 2022. 2. Minutes of Coordination Meeting for the First Quarter of 2023. 3. Minutes of Coordination Meeting for the Second Quarter of 2023. 4. Minutes of Coordination Meeting for the Third Quarter of 2023.
3	Sistem Teknologi Informasi	- Menelaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi. - SAP. - Program Pendukungnya. - Monitoring, saran atas penerapan Sistem Teknologi Informasi.	Telaah kebijakan Sistem Teknologi Informasi dilaksanakan dan dilaporkan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 012/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 10 April 2023, perihal: *Review*/Telaah Kebijakan Sistem Teknologi Informasi. Dewan Komisaris menyampaikan arahan melalui surat No. 041/EXT/KOM/PPRE/IV/2023 tanggal 11 April 2023, perihal: Arahan terhadap Kebijakan Sistem Teknologi Informasi.
	Information Technology System	- Review the Information Technology System policy. - SAP. - Support Program. - Information Technology System implementation monitoring and suggestions.	The Information Technology System policy review was implemented and reported to the Board of Commissioners via letter No. 012/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated April 10, 2023, on the Information Technology System Policy Review. The Board of Commissioners submitted directives through letter No. 041/EXT/KOM/PPRE/IV/2023 dated April 11, 2023, on the Directives for Information Technology System Policy.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
4	Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan)	- Menelaah kebijakan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan). - Monitoring, saran atas penerapan Manajemen QSHE (Mutu, K3 dan Lingkungan).	Telaah kebijakan QHSE dilaksanakan oleh Komite Audit dan dilaporkan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 28 Februari 2023, perihal: *Review*/Telaah Kebijakan Mutu/ QHSE PT PP Presisi Tbk. • Komite Audit membantu memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam memberikan arahan kepada Perusahaan sesuai dengan surat No. 018/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, perihal: Arahan terhadap Kebijakan Mutu (QSHE) PT PP Presisi Tbk. • Monitoring dan pemberian saran, juga dilaksanakan saat Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. • Dewan Komisaris didampingi Komite Audit telah melakukan kunjungan Proyek: » Kunjungan Proyek Pembangunan Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tanggal 20 Maret 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Kualitas Proyek agar tetap terjaga; - Legalitas tanah agar dipastikan tidak ada masalah; - Narasi di kontrak addendum harus jelas; - Perihal QHSE jangan sampai ada kejadian *fatality*; dan - Agar Program CSR dapat dijalankan. » Kunjungan Proyek Tol Trans Sumatera Ruas Indrapura - Kisaran pada tanggal 18 Agustus 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Koordinasi dan komunikasi lebih baik dengan Owner (Divisi Infra-1/PP Group); - Monitoring dan Evaluasi Peralatan Berat untuk meningkatkan Produktivitas; - Justifikasi, Data Pendukung lainnya atas Addendum Kontrak dapat dipertanggungjawabkan secara legalitas; - Monitoring dan Evaluasi atas Sisa Waktu Pelaksanaan dengan segala Kendala dan Upaya; - Selalu *Update Profile* Risiko, Mitigasi dalam Pengelolaan Manajemen Risiko; - Pengelolaan, Perawatan atas Peralatan (Aset Perusahaan) di Proyek dan *Workshop* dengan Benar dan Baik. » Kunjungan Proyek Weda Bay Nickel Project pada tanggal 31 Agustus 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Implementasi QSHE sesuai target *Owner* dan Manajemen; - Implementasi Manajemen *Traffic* Transportasi di lingkungan kerja sesuai SOP dari *Owner*; - Monitoring dan Evaluasi atas Manajemen Peralatan (Produksi, *Maintenance* dan Jam Kerja Operator/Peralatan); - Peningkatan Produksi dan Percepatan nilai produksi untuk menjadi *Cash in*; - Kelengkapan Data Pendukung Legalisasi Kontrak dan Addendum; - *Update* dan Monitoring atas *Profile* Risiko, Mitigasi dalam Pengelolaan Risiko. » Kunjungan Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 14 September 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Keselamatan Kerja Prioritas Utama untuk menunjang proses Produksi; - Implementasi atas SOP *Quality Control* sebagai komitmen Jaminan *Quality* ke *Customer*; - Tetap menjaga hubungan sosial dilingkungan kerja; - Selalu *update Profile* Risiko dan Mitigasi dalam pengelolaan Risiko. » Kunjungan Proyek *Quarry* Vale dan IGP Mines of Bahadopi pada tanggal 28 November 2023, dengan beberapa arahan antara lain: - Implementasi QSHE harus sesuai target *Owner* dan Manajemen; - Kelengkapan data pendukung untuk Legalitas Kontrak dan *Addendum* harus Valid; - Percepatan produksi dan kualitas produksi untuk menghasilkan *Cash in* ke Manajemen; - Manajemen Peralatan Berat, mulai Monitoring Produksi, *Maintenance/Service* untuk memaksimalkan produksi Alat Berat yang ada; - Kualitas koordinasi dan komunikasi dengan *Owner* (PP *Group*).

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
	QHSE (Quality, OHS, and Environment) Management	- Reviewing the QSHE (Quality, OHS, and Environment) Management policies. - Monitoring and advice on implementing QSHE Management (Quality, OHS, and Environment).	The QHSE policy review is carried out by the Audit Committee and reported to the Board of Commissioners via letter No. 006/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated February 28, 2023, on the Review/Examination of the Quality/QHSE Policy of PT PP Presisi Tbk. • The Audit Committee helps provide recommendations to the Board of Commissioners in providing directives to the Company per letter No. 018/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 1, 2023, on the Directions for Quality (QSHE) Policy of PT PP Presisi Tbk. • Monitoring and advice provisions are also carried out during the Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors. • The Board of Commissioners, accompanied by the Audit Committee, has carried out Project visits: » The Logistics Pier Construction for National Capital City (IKN) Development Project Visit on March 20, 2023, with several directives, including: - To maintain project quality; - To ensure no problems regarding land legality; - Clear narrative in the addendum contract; - No fatality regarding QHSE; and - To implement the CSR Program » Indrapura - Kisaran Section of the Trans Sumatra Toll Road Project Visit on August 18, 2023, with several directives, including: - Better coordination and communication with the Owner (Infra-1 Division/PP Group); - Monitoring and Evaluation of Heavy Equipment to increase Productivity; - To legally justify the Justification and other Supporting Data for the Contract Addendum; - To Monitor and Evaluate the Remaining Implementation Time with all Constraints and Efforts; - To always Update Risk Profile, Mitigation in Risk Management; - Management, Maintenance of Equipment (Company Assets) in Projects and Workshops Correctly and Properly. » Weda Bay Nickel Project Visit on August 31, 2023, with several directives including: - QSHE Implementation according to Owner and Management targets; - Transportation Traffic Management Implementation in the work environment according to the Owner's SOP; - Monitoring and Evaluation of Equipment Management (Production, Maintenance and Operator/Equipment Working Hours); - Increased Production and Acceleration of production value to become Cash in; - Complete Supporting Data for Contracts and Addendums Legalization; - Update and Monitor Risk Profiles, Mitigation in Risk Management. · Batang Integrated Industrial Area on September 14, 2023, with several directives, including: - Top Priority Work Safety to support the Production process; - Implementation of Quality Control SOPs as a Quality Guarantee commitment to Customers; - Maintain social relations in the work environment; - Always update the Risk Profile and Mitigation in risk management · Quarry Vale and IGP Mines of Bahadopi Project Visits on November 28, 2023, with several directives including: - QSHE implementation must follow the Owner and Management targets; - Complete supporting data for Contract Legality and Addendum must be valid; - Acceleration of production and production quality to generate Cash in to Management; - Heavy Equipment Management, from Production Monitoring, Maintenance/ Service to maximizing existing Heavy Equipment production; - Quality of coordination and communication with the Owner (PP Group).

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
5	Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP), *Whistle Blowingsystem* (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi	a. *Review* terhadap hasil Pelaksanaan Auditor Internal (SPI). b. Monitoring dan saran atas penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP). c. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS. d. Monitoring saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi.	*Review* dilakukan Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan surat: - 014/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 18 April 2023 perihal: Hasil Reviu Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2022; - 018/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 24 Juli 2023, perihal: Hasil Reviu Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan II Tahun 2022; dan - 026/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 25 Oktober 2023, perihal: Hasil Reviu Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan III Tahun 2022. Reviu terhadap Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Perusahaan Tahun 2021, sesuai surat No. 004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 22 Februari 2023 Arahan Dewan Komisaris sesuai dengan surat No. 010/EXT/KOM/PPRE/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal: Arahan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Tahun 2022; Dewan Komisaris memberikan saran agar: - Adanya peningkatan dan pengembangan komponen Lingkungan Pengendalian; - Peningkatan kinerja pengendalian khususnya pada aspek SDM; - Direksi agar memonitor pelaksanaan rekomendasi tersebut diatas, sehingga pelaksanaan kegiatan proses pengendalian bisnis menjadi lebih baik. Evaluasi/telaah penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) tahun buku 2022 telah dilaksanakan dan disampaikan sesuai surat No. 004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 22 Februari 2023. Laporan WBS disampaikan secara rutin melalui Laporan Kegiatan SPI Triwulanan dan selama tahun 2023 tidak ada laporan terkait WBS. Selama tahun 2023 tidak terdapat laporan terkait Gratifikasi dan secara rutin sudah disampaikan dalam Laporan Kegiatan SPI.
	Supervision of the Company's Internal Control System (SPIP), Whistleblowing System (WBS) and gratuity management system Implementation	a. Review of the Internal Auditor (SPI) implementation results. b. The Company's Internal Control System (SPIP) monitoring and suggestions. c. Monitoring, suggestions, and follow-up on WBS report. d. Monitoring, suggestions, and follow-up on gratuity reports.	The Audit Committee has conducted a review and reported it to the Board of Commissioners via letter number: - 014/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated April 18, 2023, on the SPI Activity Report Book Review Results for the First Quarter of 2022; - 018/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated July 24, 2023, on the SPI Activity Report Book Review Results for the Second Quarter of 2022; and - 026/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated October 25, 2023, on the SPI Activity Report Book Review Results for the Third Quarter of 2022. The Company's 2022 Internal Control System Evaluation Results Report has been reviewed, per letter No. 004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated February 22, 2023. Per the Board of Commissioners' directive letter No. 010/EXT/KOM/PPRE/II/2023 dated February 22, 2023, on the Directives for Implementing the Company's Internal Control System in 2022; the Board of Commissioners suggested: - For the improvement and development of the Environment Control component; - Improvement in control performance, especially in the HC aspect; - The Board of Directors should monitor the implementation of the recommendations above; thus, the implementation of business control process activities is better. Evaluation/review of the Company's Internal Control System (SPIP) implementation for the 2022 fiscal year has been completed and submitted per letter No. 004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated February 22, 2023. The Board of Commissioners conveys directives per letter No. 010/EXT/KOM/PPRE/II/2023 dated February 22, 2023, on SPIP Directives for 2022. WBS reports are submitted regularly through the Quarterly SPI Activity Report, and there were no reports related to WBS in 2023. In 2023, there was no reporting related to Gratuity and WBS, which has been reported periodically in Internal Audit activity reports.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
6	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	a. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya. b. Pengelolaan SDM meliputi Rekrutmen, Manajemen Karier, Promosi, Mutasi dan Demosi Pegawai. c. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan d. Pengelolaan Entitas Anak.	Komite Audit mengevaluasi atas Proses Bisnis khususnya pengadaan baik threshold penandatangan Kontrak dengan Vendor, dan sinkronisasi dengan Prosedur yang berlaku; dan disampaikan Komite Audit kepada Dewan Komisaris sesuai surat No.040/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Laporan Komite Audit atas Review terhadap Kebijakan Pengadaan, Mutu dan Pelayanan. Komite Audit memberikan usulan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya menjadi salah satu dasar Dewan Komisaris dalam memberikan arahan terkait: - Surat No.026/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal: Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi BOD-1 PT PP Presisi Tbk; - Surat No.056/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal: Persetujuan atas Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi, setelah melalui proses telaah Komite Audit bekerjasama dengan Komite Kepatuhan, melalui surat Dewan Komisaris memberikan arahan diantaranya terkait: 1. 033/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Kepala Divisi 0perasi I; 2. 055/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal (SPI) PPRE; 3. 118/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan; 4. 119/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment; 5. 130/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 perihal Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 1; dan 6. 131/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 2. Komite Audit mengevaluasi Pedoman Akuntansi PPRE yang disampaikan Perusahaan di awal Desember 2022 sesuai surat No. 043/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 27 Desember 2023. Komite Audit dibantu oleh Komite Kepatuhan telah melakukan telaah terhadap Aksi Korporasi Permohonan Arahan Perubahan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan dalam aksi Korporasi PT Lancarjaya Mandiri Abadi sesuai surat No. 036/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2023 tanggal 26 Juli 2023. Komite Audit hadir dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 28 Desember 2023, sesuai surat No. 186/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Undangan Rapat Kinerja PT Lancarjaya Mandiri Abadi selaku Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
		a. Procurement Policy and Implementation. b. HR Management, including Recruitment, Career Management, Promotion, Employee Transfer, and Demotion. c. Accounting Policies and Financial Statement Preparation. d. Subsidiaries Management.	The Audit Committee evaluates Business Processes, particularly procurement, on thresholds for signing Contracts with Vendors and synchronization with applicable Procedures. The Audit Committee submitted it to the Board of Commissioners per letter No. 040/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated December 15, 2023, on the Results of the Audit Committee Report on the Procurement, Quality and Service Policies Review. The Audit Committee provided suggestions to the Board of Commissioners, which became the foundation for the Board of Commissioners to provide directives related to - Letter No. 026/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 15, 2023, on the Approval of Changes to the BOD-1 Organizational Structure of PT PP Presisi Tbk. - Letter No. 056/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 16, 2023, on the Approval of Company Organizational Structure Changes. In connection with changes to the Organizational Structure, after going through a review process by the Audit Committee in collaboration with the Compliance Committee, through a letter from the Board of Commissioners, the Board of Commissioners provided directives related to: 1. 033/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 30, 2023, on the Responses and Directives of the Board of Commissioners on the Proposal to Change the Head of Operations Division I. 2. 055/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 16, 2023, on the Approval of the Dismissal and Appointment of the Head of the Internal Supervisory Unit (SPI) Bureau of PT PP Presisi Tbk. 3. 118/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 14, 2023, on the Directives on Approval for the Appointment of the Corporate Secretary. 4. 119/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 14, 2023, on the Directives on Notification of Appointment of the Vice President of Equipment. 5. 130/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 30, 2023, on the Directives on Notification of Appointment of the Vice President of Operations 1. 6. 131/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 31, 2023, on the Directives on Notification of the Appointment of Vice President of Operations 2. The Audit Committee evaluated the PPRE Accounting Guidelines submitted by the Company in early December 2022 per letter No. 043/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated December 27, 2023. The Audit Committee, assisted by the Compliance Committee, has reviewed the Corporate Action Request for Directives for Changes in Limitations and/or Criteria for Authority in the Corporate Action of PT Lancarjaya Mandiri Abadi per letter No. 036/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2023 dated July 26, 2023. The Audit Committee was present at the Coordination Meeting on December 28, 2023, per letter No. 186/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 21, 2023, on the Invitation to the Performance Meeting of PT Lancarjaya Mandiri Abadi as a Subsidiary of PT PP Presisi Tbk.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
7	Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak	a. Telaah pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi. b. Pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.	Menjadi wewenang Pemegang Saham Mayoritas (PSM) sehingga Dewan Komisaris tidak melakukan pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi. Telah dilaksanakan, dan hasil telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan disampaikan melalui surat No. 020/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Penetapan Tantiem Tahun 2021 dan Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2022. Hal ini mengacu SK Direksi PT PP (Persero) Tbk no 107/SK/PP/DIR/ 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pemberian Insentif Untuk Pegawai Atas Kinerja Unit Tahun 2021.
	Remuneration, Nomination, and Succession of the Board of Directors, as well as the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries	a. Review the proposed Board of Directors remuneration and nominations. b. The bonuses/ performance incentives proposal considers the Board of Directors performance assessment (KPI) results and the Company's soundness level achievement.	It is the authority of the Majority Shareholder (PSM); hence, the Board of Commissioners does not propose remuneration and nominations for the Board of Directors. Implemented, and the results of the Audit Committee and Compliance Committee reviews were conveyed through letter No. 020/INT/KA&KK/DEKOMPPRE/2022 dated October 13, 2022, on the Report on the Audit Committee and Compliance Committee Review Results regarding Corporate Actions for Determining Bonus for 2021 and Determining Salaries and/or Honorarium along with other facilities and allowances for Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2022. This refers to the Decree of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk No. 107/SK/PP/DIR/ 2022 dated July 5, 2022, on Providing Incentives to Employees for Unit Performance in 2021.
8	Pengawasan Eksternal/ KAP	a. Usulan Penunjukan KAP. b. Evaluasi efektivitas kinerja KAP. *Review* terhadap hasil pelaksanaan Audit.	Sesuai dengan surat No. 089/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, perihal: Penunjukan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2023 dan surat No. 096/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Persetujuan Besaran Honorarium Jasa Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2023. Evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit dan disampaikan ke Dewan Komisaris melalui surat No. 011/INT/KA/DEKOM PPRE/2023 tanggal 7 April 2023; perihal: Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit Terhadap Kantor akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan ("KAP HGK") untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022.
	External Monitoring/ KAP	a. Proposed KAP Appointment for the 2023 fiscal year. b. KAP performance effectiveness evaluation for the 2023 fiscal year and review of the audit implementation results.	Per letter No. 089/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 20, 2023, on Reappointment of PT PP Presisi Tbk Public Accounting Firm (KAP) for the 2023 Fiscal Year and letter No. 096/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 27, 2023, on Approval of the Amount of Honorarium for Public Accounting Services for the Company's Financial Statements Audit Services in 2023. Evaluation of the External Auditor performance is carried out by the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners via letter No. 011/INT/KA/DEKOM PPRE/2023 dated April 7, 2023, on the Results of the Audit Committee's Evaluation and Review of the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan ("KAP HGK") for the Fiscal Year Ending on December 31, 2022.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
9	RUPST dan RUPSLB	Pendapat dan Tanggapan terhadap hal-hal yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB	Komite Audit bersama dengan Komite Kepatuhan Saat RUPST tahun buku 2022, telah disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022 sesuai surat No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/ 2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 PT PP (Persero) Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022. Terdapat RUPSLB pada tahun 2023 dengan Agenda Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.
	AGMS and EGMS	Opinions and Responses to matters discussed at the AGMS and EGMS.	During the 2022 fiscal year AGMS, the Audit Committee and Compliance Committee submitted the report on the Implementation of the 2022 Board of Commissioners Supervisory Duties per letter No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 15, 2023, on the Board of Commissioners Responses and Suggestions on PT PP (Persero) Tbk Audited Financial Statement for the 2022 Fiscal Year and Report Submission on the Board of Commissioners Supervision Tasks and Performance Realization for the 2022 Fiscal Year. There was an EGMS in 2023 with an agenda for approving changes to the composition of the company's management.
10	Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*	Memberikan persetujuan dan arahan terhadap rencana Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action.*	Bersama dengan Komite Kepatuhan melakukan telaah terhadap kelengkapan dokumen, prosesnya, dan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan atau *threshold* PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas. Telaah Aksi Korporasi: 1. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi BoD-1 PPRE (15 Maret 2023); 2. Arahan Terkait kekosongan Sekretaris Perusahaan (21 Maret 2023); 3. Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Kepala Divisi Operasi 1 (30 Maret 2023); 4. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi *Standby Loan* dari Perbankan (7 April 2023); 5. Persetujuan Perubahan/Penambahan Plafon Fasilitas Kredit dari Lembaga Pembiayaan (11 April 2023); 6. Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal (SPIPPRE (16 Mei 2023); 7. Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Komisaris Utama PPRE dan Pengangkatan Plt. Komisaris Utama PPRE (16 Mei 2023). 8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Fasilitas Kredit Perbankan (29 Mei 2023); 9. Penegasan Kelanjutan atau Pembubaran atas Anak Perusahaan PPRE yaitu PT Presisi Sumber Anugerah ("PT PSA") (13 Juni 2023); 10. Pemberian Arahan terkait Permohonan Perubahan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan dalam aksi Korporasi PT Lancarjaya Mandiri Abadi (5 Agustus 2023); 11. Pemberian Arahan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (14 Agustus 2023); 12. Pemberian Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment (14 Agustus 2023); 13. Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris Dan Tunjangan Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi Untuk Tahun 2023 (18 Agustus 2023); 14. Pemberian Arahan terkait Persetujuan Perolehan Fasilitas Tambahan Baru Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas *Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada Perbankan (23 Agustus 2023); 15. Pemberian Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 1 (30 Agustus 2023); 16. Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 2 (31 Agustus 2023); 17. Persetujuan Izin Untuk Menghadiri Undangan dari PT United Tractors Tbk (15 September 2023); 18. Penegasan Persetujuan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas *Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada Perbankan (27 September 2023); 19. Pemberian Arahan terkait Permohonan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Aset Manajemen dalam Prosedur Sistem Aset Manajemen (SMA) PPRE (17 Oktober 2023); 20. Persetujuan untuk bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PPRE (19 Oktober 2023); 21. Pemberian Arahan atas Permintaan Persetujuan Usulan Calon Komisaris Utama PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) (12 Desember 2023); 22. Pemberian Arahan Pencapaian KPI Korporat Triwulan III Tahun 2023 (15 Desember 2023); 23. Pemberian Arahan atas Pedoman Kebijakan mengenai Hak dan Kewajiban terhadap Kreditur dan Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PPRE Tahun 2023 (26 Desember 2023); 24. Pemberian Persetujuan untuk bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PPRE Tahun 2023 (28 Desember 2023).

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
	Investment, Business Develop-ment, and Corporate Action	Provide approvals and directives for Investment, Business Development and Corporate Action plans.	With the Compliance Committee, reviewed the documentation completeness, process, etc., per the applicable laws and regulations, Articles of Association, and/or threshold of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder. Corporate Action Reviews: 1. Approval of Changes to the BOD-1 Organizational Structure of PT PP Presisi Tbk (March 15, 2023). 2. Directives on the Vacant Company Secretary Post (March 21, 2023). 3. Board of Commissioners Response and Directive on the Proposed Change to the Division Head of Operations 1 (March 30, 2023). 4. Approval to Extend the Period of Standby Loan Construction Working Capital Credit Facility from Banks (April 7, 2023). 5. Approval of Changes/Additions to the Credit Facility Limit from the Financial Institution (April 11, 2023). 6. Approval of the Dismissal and Appointment of the Head of the SPI Bureau (May 16, 2023). 7. Notification of Temporary Dismissal of PPRE President Commissioner and Appointment of Acting PPRE President Commissioner (May 16, 2023). 8. Approval of Time Extension of Banking Credit Facility (May 29, 2023). 9. Confirmation of the Continuation or Dissolution of PPRE's Subsidiary, i.e., PT Presisi Sumber Anugerah ("PT PSA") (June 13, 2023). 10. Directives on Requests for Changes to Authority Limits and/or Criteria in PT Lancarjaya Mandiri Abadi Corporate Actions (August 5, 2023). 11. Directives for Approval of the Corporate Secretary Appointment (August 14, 2023). 12. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Equipment (August 14, 2023). 13. Determination of Board of Directors' Salaries, Board of Commissioners' Honorarium, and Allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023 (August 18, 2023). 14. Directives for Approving New Additional Facilities, Transactional Working Capital Credit Facilities, and Extensions of the Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility in Banking (August 23, 2023). 15. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Operations 1 (August 30, 2023). 16. Directives on the Appointment Notification for the Vice President of Operations 2 (August 31, 2023). 17. Approval of Permission to Attend the Invitation from PT United Tractors Tbk (September 15, 2023). 18. Confirmation of Approval to Extend the Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility in Banking (September 27, 2023). 19. Directives on the Application for Signing the Asset Management Commitment Declaration in the Asset Management System (SMA) Procedure of PT PP Presisi Tbk (October 17, 2023). 20. Approval to jointly sign the Code of Conduct Guidelines of PT PP Presisi Tbk with the Board of Directors (October 19, 2023). 21. Directives for Approval of the Proposed President Commissioner Candidate of PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) (December 12, 2023). 22. Directives for KPI Achievement in the Third Quarter of 2023 (December 15, 2023). 23. Directives for Policy Guidelines on the Rights and Obligations of Creditors and Management of the Long-Term Loans Use of PT PP Presisi Tbk in 2023 (December 26, 2023). 24. Approval to jointly sign the 2023 PPRE Good Corporate Governance (GCG) Guidelines (December 28, 2023).

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
11	Penyusunan RKA Tahunan 2023 dan RJPP	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKA tahunan 2023 dan Review RJPP: a. Tanggapan Dewan Komisaris (Pandangan dan Masukan) atas Rancangan RKA Tahunan 2023 & RJPP.	1. Review terhadap RKAP 2024 sesuai surat No. 025/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 05 Oktober 2023 perihal: Hasil Telaah/Review KA terhadap Draft RKAP PT PP Presisi Tbk tahun buku 2024; 2. Arahan Dewan Komisaris terhadap RKAP 2024 sesuai surat No. 148/EXT/KOM/PPRE/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal: Arahan Draft Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PP Presisi Tbk tahun 2024.
		b. Rapat Gabungan Pengesahan RKA Tahunan 2023 & RJPP.	Pengesahan RKAP Tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024.
	2023 Annual RKA and RJPP Preparation	Suggestions and Approval on the 2023 annual RKA and RJPP Review preparation: a. Views and input from the Board of Commissioners on the 2023 Annual RKA & RJPP preparation.	1. Review of the 2024 RKAP per letter No. 025/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated October 5, 2023, on the Results of Audit Committee's Study/Review of the RKAP Draft of PT PP Presisi Tbk for the 2024 fiscal year; 2. Directives from the Board of Commissioners on the 2024 RKAP per letter No. 148/EXT/KOM/PPRE/X/2023 dated October 6, 2023, on the Directives for the Draft Work Plan and Company Budget of PT PP Presisi Tbk for 2024.
		b. Board of Directors and Board of Commissioners Discussion on the 2025 Annual RKA & RJPP Draft.	Ratification of the 2024 RKAP was carried out on January 3, 2024.

No.	Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Kegiatan/Realisasi Activity/Realization
12	Laporan Manajemen	a. Tanggapan Komisaris atas Laporan Periodik (Laporan Keuangan yang dipublikasikan). b. Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. c. Persetujuan Laporan Tahunan *(Annual Report)*.	Komite Audit telah melakukan telaah sesuai dengan surat No. 013/INT/KA/ DEKOMPPRE/2023 tanggal 17 April 2023 perihal: *Review* Laporan Keuangan Audited PT PP Presisi Tbk Tahun 2022. 1. Laporan Kinerja tahun 2023 disampaikan sesuai surat No. 054/EXT/KOM/ PPRE/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 PT PP Presisi Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022; 2. Surat No. 092/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 pada tanggal 22 Juni 2023, perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Triwulan I Tahun 2023; 3. Surat No. 136/EXT/KOM/ PPRE/IX/2023 tanggal 14 September 2023 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Triwulan II Tahun 2023; 4. Surat No. 179/EXT/KOM/ PPRE/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Triwulan III Tahun 2023. Telah dilaksanakan saat penyusunan Annual Report tahun 2023, diwakili oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Kepatuhan Untuk penyusunan Annual Report tahun 2023 dilaksanakan di Triwulan I tahun 2024.
	Management Report	a. Commissioner's Response to Periodic Reports (published Financial Statements). b. Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report. c. Annual Report Approval.	The Audit Committee has reviewed, per letter No. 013/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated April 17, 2023, on the Review of PT PP Presisi Tbk Audited Financial Statement for 2022. 1. The 2023 Performance Report is submitted per letter No. 054/EXT/KOM/ PPRE/V/2023 dated May 15, 2023, on the Board of Commissioners Responses and Suggestions regarding PT PP Presisi Tbk Audited Financial Statement for the 2022 Fiscal Year and Report Submission of the Board of Commissioners Supervisory Duties and Performance Realization for the 2022 Fiscal Year; 2. Letter No. 092/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 22, 2023, on PT PP Presisi Tbk Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the First Quarter of 2023; 3. Letter No. 136/EXT/KOM/ PPRE/IX/2023 dated September 14, 2023, on PT PP Presisi Tbk Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the Second Quarter of 2023; 4. Letter No. 179/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 13, 2023, on PT PP Presisi Tbk Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the Third Quarter of 2023. Carried out during the 2023 Annual Report preparation, represented by the Secretary to the Board of Commissioners and the Compliance Committee. The 2023 Annual Report will be prepared in the first quarter of 2024.
13	Tindak lanjut hasil keputusan, rekomen-dasi dan arah Dewan Komisaris	Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arah Dewan Komisaris	Koordinasi dengan Komite Kepatuhan, Sekretaris Dewan Komisaris maupun Manajemen/Perusahaan, berdasarkan Risalah Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.
	Follow up on the results of Board of Com-missioners decisions, recommen-dations, and directives	Monitoring the follow-up to the results of Board of Commissioners decisions, recommendations, and directions	Coordination with the Compliance Committee, Secretary to the Board of Commissioners and Management/Company, based on the Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors Coordination Meeting.

No.	**Kebijakan** Policy	**Program Kerja** Work Program	**Kegiatan/Realisasi** Activity/Realization
14	Evaluasi Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris	Evaluasi kinerja Komite Audit: - Tahunan - Semester I	Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Surat No. 007/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Audit PT PP Presisi Tbk Tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja Komite Audit Tahun 2022. Evaluasi Kinerja Komite Audit, per Triwulan, di antaranya: - Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan I tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 016/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan I 2023; - Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan II tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 021/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal: Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan II 2023; - Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan III tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 038/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal: Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan III 2023.
	Performance Evaluation of Committees under the Board of Commissioners	Audit Committee performance evaluation: - Annual - Semester I	It has been submitted to the Board of Commissioners per Letter No. 007/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated March 3 2023, on PT PP Presisi Tbk Audit Committee Work Plan Implementation Report Submission for 2022 and Audit Committee Performance Evaluation for 2022. Audit Committee Performance Evaluation, every Quarter, including: - Audit Committee Activity Report for the First Quarter of 2023 submitted via letter No. 016/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated May 22, 2023, on the Audit Committee Work Program Realization Report for the First Quarter of 2023; - Audit Committee Activity Report for the Second Quarter of 2023 submitted via letter No. 021/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated August 8, 2023, on the Audit Committee Work Program Realization Report for the Second Quarter of 2023; - Audit Committee Activity Report for the Third Quarter of 2023 submitted via letter No. 038/INT/KA/DEKOMPPRE/2023 dated December 12, 2023, on the Audit Committee Work Program Realization Report for the Third Quarter of 2023.

Penelaahan Komite Audit

Di tahun 2023, Komite Audit telah melakukan penelaahan atas pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

Audit Committee Review

In 2023, the Audit Committee reviewed the Company business activities supervision with the following details.

No	Nomor surat Letter Number	Tanggal Date	Tentang Concerning
1	002/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	17 Januari 2023 January 17, 2023	Hasil *Review* Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan IV Tahun 2022. Review Results of SPI Activity Report Book for the Fourth Quarter of 2022.
2	004/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023	*Review* Satuan Pengendalian Internal Perusahaan Tahun 2022. Review of the Company's Internal Control Unit in 2022.
3	005/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	28 Februari 2023 February 28, 2023	*Review* Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2022. Management Report Review for the Fourth Quarter of 2022.
4	006/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	28 Februari 2023 February 20, 2023	*Review*/Telaah Kebijakan Mutu/QHSE PT PP Presisi Tbk. Review/Examination of PT PP Presisi Tbk's Quality/QHSE Policy.
5	009/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	27 Maret 2023 March 27, 2023	Laporan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Proyek IKN. Report of the Board of Commissioners' Visit to the IKN Project.
6	011/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	7 April 2023 April 7, 2023	Laporan Hasil Evaluasi dan Telaah Komite Audit terhadap Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan ("KAP HGK") untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022. Audit Committee Evaluation and Review Report of the Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) for the Fiscal Year Ending on December 31, 2022.
7	012/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	10 April 2023 April 10, 2023	Laporan Hasil Telaah/*Review* Komite Aduit terkait Kebijakan Sistem Teknologi Informasi. Audit Committee Review Results on Information Technology System Policy.
8	013/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	17 April 2023 April 17, 2023	*Review* Laporan Keuangan Audited PT PP Presisi Tbk Tahun 2022. Review of PT PP Presisi Tbk Audited Financial Statement for 2022.
9	014/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	17 April 2023 April 17, 2023	Hasil *Review* Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2023. Review Results of SPI Activity Report Book for the First Quarter of 2023.
10	015/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	18 April 2023 April 18, 2023	*Review* Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2023. Management Report Review for the First Quarter of 2023.
11	018/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	24 Juli 2023 July 24, 2023	Hasil *Review* Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan II Tahun 2023. Review Results of SPI Activity Report Book for the Second Quarter of 2023.
12	022/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	25 Agustus 2023 August 25, 2023	Laporan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Proyek Inkis. Report of the Board of Commissioners' Visit to the Inkis Project.
13	023/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	8 September 2023 September 8, 2023	Laporan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Proyek Weda Bay. Report of the Board of Commissioners' Visit to the Weda Bay Project.
14	024/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	13 September 2023 September 13, 2023	*Review* Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2023. Management Report Review for the Second Quarter of 2023.
15	025/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	5 Oktober 2023 October 5, 2023	Penyampaian telaah Draft RKAP 2024. Submission of the 2024 RKAP Draft review.
16	026/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	25 Oktober 2023 October 25, 2023	Hasil *Review* Buku Laporan Kegiatan SPI Triwulan III Tahun 2023. Review Results of SPI Activity Report Book for the Third Quarter of 2023.
17	027/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	25 Oktober 2023 October 25, 2023	Laporan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Gudang Cariu. Report of the Board of Commissioners Visit to Cariu Warehouse.
18	028/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	25 Oktober 2023 October 25, 2023	Laporan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Proyek KIT Batang. Report on the Board of Commissioners Visit to the KIT Batang Project.
19	031/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	29 November 2023 November 29, 2023	*Review* Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2023. Management Report Review for the Third Quarter of 2023.
20	032/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	6 Desember 2023 December 6, 2023	Laporan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Proyek Vale. Report of the Board of Commissioners' Visit to the Vale Project.
21	033/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	6 Desember 2023 December 6, 2023	Hasil Laporan Komite Audit atas *Review* terhadap Kebijakan IT PPRE. Audit Committee Report on PPRE IT Policy Review.

No	Nomor surat Letter Number	Tanggal Date	Tentang Concerning
22	035/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	8 Desember 2023 December 8, 2023	Hasil Laporan Komite Audit atas *Review* terhadap Kebijakan Pengembangan Karier. Audit Committee Report on Development Policy Review.
23	037/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	11 Desember 2023 December 11, 2023	Hasil Laporan Komite Audit atas *Review* terhadap Kebijakan Akuntansi. Audit Committee Report on Accounting Policy Review.
24	038/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	12 Desember 2023 December 12, 2023	Laporan Realisasi Program Kerja Komite Audit Triwulan III 2023. Audit Committee Work Program Realization Report for the Third Quarter of 2023.
25	040/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	15 Desember 2023 December 15, 2023	Hasil Laporan Komite Audit atas *Review* terhadap Kebijakan Pengadaan, Mutu dan Pelayanan. Audit Committee Report on Procurement, Quality, and Service Policy Review.
26	043/INT/KA/DEKOMPPRE/2023	27 Desember 2023 December 27, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit terkait Penyusunan Pedoman Akuntansi PT PP Presisi Tbk. Audit Committee Review Results on the Preparation of PT PP Presisi Tbk Accounting Guidelines.

Komite Audit juga telah mengeluarkan penelaahan bersama Komite Kepatuhan atas pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2023. Berikut informasi penelaahan yang dikeluarkan Komite Audit dan Komite Kepatuhan.

The Audit Committee has also issued joint reviews with the Compliance Committee on the Company's business activities supervision in 2023. The following are the reviews issued by the Audit Committee and Compliance Committee.

Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Date	Perihal Subject
Disposisi Telaah Review Disposition		
008/INT/KOM/PPRE/III/2023	2 Maret 2023 March 2, 2023	Pembuatan Telaah atas Surat PT PP (Persero) Tbk tentang Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk Tahun 2023. Reviewing the PT PP (Persero) Tbk Letter on Recommendations for the Organizational Structure Changes in PT PP Presisi Tbk in 2023.
011/INT/KOM/PPRE/III/2023	9 Maret 2023 March 9, 2023	Pembuatan Telaah atas Pemberitahuan Pemindahtugasan Kepala Biro Sekretaris Perusahaan PT PP Presisi Tbk. Reviewing the Transfer Notification of the Head of the Corporate Secretary Bureau of PT PP Presisi Tbk.
013/INT/KOM/PPRE/III/2023	16 Maret 2023 March 16, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Persetujuan terkait usulan perubahan Kepala Divisi Operasi I. Reviewing the Corporate Action Approval on the proposed change to the Head of the Operations Division I.
017/INT/KOM/PPRE/III/2023	29 Maret 2023 March 29, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Pemberitahuan Dan/Atau Permohonan Persetujuan Atas Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan dari Perbankan. Reviewing the Corporate Action Request for Notification and/or Request for Approval for Extension of Term of Standby Loan Approval on Construction Working Capital Credit Facility from Banks.
018/INT/KOM/PPRE/IV/2023	11 April 2023 April 11, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Kredit dari dari Lembaga Pembiayaan. Reviewing the Corporate Actions Requesting Approval for Changes/Additions to the Credit Facility from a Financial Institution.
020/INT/KOM/PPRE/IV/2023	12 April 2023 April 12, 2023	Pembuatan Telaah atas Pemberitahuan Pemindah tugasan Kepala Biro Sekretaris Perusahaan PT PP Presisi Tbk. Reviewing the Transfer Notification of the Head of the Corporate Secretary Bureau of PT PP Presisi Tbk.
027/INT/KOM/PPRE/V/2023	2 Mei 2023 May 2, 2023	Pembuatan *Review* atas surat Usulan Perubahan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal. Reviewing the proposal letter for the change to the Head of the Internal Audit Unit Bureau.
037/INT/KOM/PPRE/V/2023	25 Mei 2023 May 25, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Pada Perbankan. Reviewing the Corporate Action for Approval of Loan Extension on Banks.

Nomor Surat Letter Number	**Tanggal Surat** Letter Date	**Perihal** Subject
050/INT/KOM/ PPRE/VII/2023	17 Juli 2023 July 17, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Arahan Terkait Perubahan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan dalam aksi Korporasi PT Lancarjaya Mandiri Abadi. Reviewing the Corporate Action Requesting Directives on Changes in Limits and/or Criteria of Authority in Corporate Actions of PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
053/INT/KOM/PPRE/ VII/2023	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment. Reviewing the Corporate Action on the Appointment Notification of the Vice President of Equipment.
054/INT/KOM/PPRE/ VIII/2023	2 Agustus 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2023. Reviewing the Corporate Action to Determine the Board of Directors Salaries, Board of Commissioners Honorarium, and Allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023.
055/INT/KOM/ PPRE/VIII/2023	2 Agustus 2023 August 2, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Penjelasan Batas dan/atau Kriteria Kewenangan Direksi PT PP Presisi Tbk. Reviewing the Corporate Action Request for Explanation of Limit and/or Criteria of Authority of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk.
060/INT/KOM/ PPRE/VIII/2023	11 Agustus 2023 August 11, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 1. Reviewing the Corporate Action on the Appointment Notification of the Vice President of Operations 1.
061/INT/KOM/PPRE/ VIII/2023	14 Agustus 2023 August 14, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 2. Reviewing the Corporate Action on the Appointment Notification of the Vice President of Operations 2.
066/INT/KOM/ PPRE/IX/2023	13 September 2023 September 13, 2023	Pembuatan Telaah alas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Investasi Alat Berat. Reviewing the Corporate Action Requesting for Heavy Equipment Investment Approval.
070/INT/KOM/ PPRE/X/2023	3 Oktober 2023 October 3, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT PP Presisi Tbk Tahun 2023. Reviewing the Corporate Action Requesting Approval for PT PP Presisi Tbk Code of Conduct Guidelines for 2023.
075/INT/KOM/PPRE/ XII/2023	5 Desember 2023 December 5, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Penyampaian Realisasi KPI Korporat PT PP Presisi Tbk Triwulan III Tahun 2023. Reviewing the Corporate Action in Submitting the Corporate KPIs Realization of PT PP Presisi Tbk in the Third Quarter of 2023.
Hasil Telaah Review Results		
009/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	3 Oktober 2023 October 3, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Persetujuan Aksi Korporasi Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 sesuai surat dari PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas No.028/E/ IPPIDSH/2023 tanggal 1 Maret 2023. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on Corporate Action Approval on Recommendations for the Organizational Structure Changes in PT PP Presisi Tbk in 2023 following the letter from PT PP (Persero) Tbk as the Major Shareholder No. 028/E/IPPIDSH/2023 dated March 1, 2023.
012/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	16 Maret 2023 March 16, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Surat Pemberitahuan Pemindahtugasan Kepala Biro Sekretaris Perusahaan PT PP Presisi Tbk. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Transfer Notification of the Head of the Corporate Secretary Bureau of PT PP Presisi Tbk.
015/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	28 Maret 2023 March 28, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Terkait Usulan Perubahan Kepala Divisi Operasi I. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action Approval on the proposed change to the Head of the Operations Division I.

Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Date	Perihal Subject
017/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	6 April 2023 April 6, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Permohonan Pemberitahuan Dan/Atau Permohonan Persetujuan Atas Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi *Standby Loan* dari Perbankan. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action Request for Notification and/or Request for Approval for Extension of Term of Standby Loan Approval on Construction Working Capital Credit Facility from Banks.
018/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	11 April 2023 April 11, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Kredit dari Lembaga Pembiayaan. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Actions Requesting Approval for Changes/Additions to the Credit Facility from a Financial Insitution.
020/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	14 April 2023 April 14, 2023	Laporan Hasil *Review* Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas surat Perusahaan terkait Pemberitahuan Masa Purnabakti Kepala Biro SPI PT PP Presisi Tbk. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Retirement Period Notification of the Head of the SPI Bureau of PT PP Presisi Tbk.
024/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	8 Mei 2023 May 8, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Usulan Perubahan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action for Proposed Changes to the Head of the Internal Audit Unit Bureau.
031/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	29 May 2023 May 29, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Pada Perbankan. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action for Approval of Loan Extension on Banks.
034/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	12 Juni 2023 June 12, 2023	Permohonan Penegasan Kelanjutan atau Pembubaran atas Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk yaitu PT Presisi Sumber Anugerah (“PT PSA”). Request for Dissolution Continuation Confirmation of PT Presisi Sumber Anugerah (PT PSA), a PT PP Presisi Tbk subsidiary.
036/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	26 Juli 2023 July 26, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Permohonan Arahan Terkait Perubahan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan dalam aksi Korporasi PT Lancarjaya Mandiri Abadi. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action Requesting Directives on Changes in Limits and/or Criteria of Authority in Corporate Actions of PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
038/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	11 Agustus 2023 August 11, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi permohonan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris perusahaan PT PP presisi Tbk. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action to Approve the Appointment of the Head of the Corporate Secretary Bureau of PT PP Presisi Tbk.
039/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	11 Agustus 2023 August 11, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action Appointment Notification of the Vice President of Equipment.
040/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	11 Agustus 2023 August 11, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2023. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action in Determining Board of Directors Salaries, Board of Commissioners Honorarium, and Allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023.
041/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	16 Agustus 2023 August 16, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Permohonan Penjelasan Batas dan/atau Kriteria Kewenangan Direksi PT PP Presisi Tbk. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action Request for Explanation of Limits and/or Criteria for the Authority of the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk.

Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Letter Date	Perihal Subject
043/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	22 Agustus 2023 August 22, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Perolehan Fasilitas Tambahan Baru Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas, *Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada Perbankan. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action Request for Approval of the Acquisition of New Additional Transactional Working Capital Credit Facility and Extension of the Period of Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility at Banks.
045/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 1. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action on the Appointment Notification of the Vice President of Operations 1.
046/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	24 Agustus 2023 August 24, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 2. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action on the Appointment Notification of the Vice President of Operations 2.
049/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	22 September 2023 September 22, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Investasi Alat Berat. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action Requesting for Heavy Equipment Investment Approval.
052/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	18 Oktober 2023 October 18, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Permohonan Persetujuan Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT PP Presisi Tbk. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action Requesting Approval for PT PP Presisi Tbk Code of Conduct Guidelines for 2023.
056/INT/KA&KK/ DEKOMPPRE/2023	14 Desember 2023 December 14, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Penyampaian Realisasi KPI Korporat PT PP Presisi Tbk Triwulan III Tahun 2023. Audit Committee and Compliance Committee Review Results Report on the Corporate Action in Submitting the Corporate KPIs Realization of PT PP Presisi Tbk in the Third Quarter of 2023.

Rekomendasi dan Saran Komite Audit

Berikut rekomendasi dan saran Komite Audit di tahun 2023, yang telah disampaikan melalui hasil telaah ataupun surat Dewan Komisaris.

1. Perusahaan agar melakukan langkah-langkah dengan fokus perolehan kontrak baru pada proyek *mining operation* maupun *mining infrastructure*;
2. Perusahaan agar membuat program peningkatan penjualan baik dari proyek yang sudah didapat maupun yang akan didapat dan dapat melanjutkan efisiensi biaya, berupaya mengurangi beban keuangan maupun operasional untuk memenuhi target akhir tahun;
3. Perusahaan agar memaksimalkan peranan Departemen Manajemen Risiko, mengedukasi ataupun mensosialisasikan hak, kewajiban dan kewenangan pada personil proyek agar dapat melakukan tindakan sesuai kapasitasnya;
4. Perusahaan dihimbau untuk mensosialisasikan sistem-sistem yang ada di Perusahaan sampai ke unit-unit terkecil di semua unsur yang terkait sehingga dapat terimplementasikan dengan baik, termasuk membangun dan meniaga hubungan yang baik dengan PT PP (Persero) Tbk selaku PSM;
5. Direksi agar melaksanakan rekomendasi hasil validasi pencapaian KPI Triwulanan dan membuat strategi untuk mencapainya sehingga target KPI akhir tahun dapat dipenuhi;

Audit Committee Recommendation and Suggestion

The following are the Audit Committee recommendations and suggestions in 2023 that have been submitted via review results or Board of Commissioners letters.

1. The Company must take steps to focus on obtaining new contracts for mining operations and mining infrastructure projects;
2. The Company must create a program to increase sales from existing and future projects and continue cost efficiency, seeking to reduce financial and operational burdens to meet year-end targets;
3. The Company must maximize the role of the Risk Management Department, educate or disseminate the rights, obligations, and authority of project personnel so they can take action according to their capacity;
4. The Company is encouraged to disseminate existing systems in the Company down to the smallest units in all related elements so that they can be implemented well, including establishing and maintaining good relationships with PT PP (Persero) Tbk as the Major Shareholder;
5. The Board of Directors must implement recommendations from the results of Quarterly KPI achievements validation and create strategies to achieve them so that end-of-year KPI targets can be met;

6. Direksi beserta jajarannya harus tetap menjalankan Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan *Good Corporate Governance* yang baik.

Komite Kepatuhan

Komite Kepatuhan merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Kepatuhan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pedoman Komite Kepatuhan
Dalam membantu tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris, Komite Kepatuhan dilengkapi dengan Piagam Komite Kepatuhan yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 26 September 2023.

Kriteria Penentuan Komite Kepatuhan
Berdasarkan Piagam Komite Kepatuhan, persyaratan yang harus dipenuhi anggota Komite Kepatuhan pada saat diangkat dan selama menjabat meliputi:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memahami bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan perencanaan strategis, kewenangan pengambilan keputusan, pendelegasian kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban pada Perusahaan, sistem tata kelola Perusahaan dan sistem manajemen yang digunakan, sistem rekrutmen manajemen dan perencanaan karier pada Perusahaan, sistem penilaian kinerja serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang- undangan terkait lainnya;
3. Mematuhi Kode Etik Komite Kepatuhan yang telah ditetapkan Perusahaan;
4. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang tata kelola Perusahaan;
6. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
9. Dalam hal anggota Komite Kepatuhan memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak

6. The Board of Directors and their staff must continue to run the Company following the provisions and Good Corporate Governance.

Compliance Committee

The Compliance Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board in carrying out their duties and functions. The Compliance Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

Compliance Committee Charter
In carrying out its duties and responsibilities, the Compliance Committee refers to the Compliance Committee Charter, signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on September 26, 2023.

Compliance Committee Appointment Criteria
Based on the Compliance Committee Charter, the requirements that must be fulfilled by Compliance Committee members when appointed and during their tenure include:

1. Have high integrity, ability, knowledge, and experience following their field of work and are capable of communicating properly;
2. Understand the Company's business, especially those related to strategic planning, decision-making authority, delegation of authority and accountability mechanisms to the Company, the Company's governance system and management system applied, management recruitment system and career planning, performance assessment system, as well as prevailing laws and regulations in capital market sector and other related laws and regulations;
3. Comply with the Compliance Committee Code of Conduct established by the Company;
4. Willing to improve their competencies continuously through education and training;
5. Have at least one member with educational background and expertise in corporate governance;
6. Not a person working in a public accounting firm, legal consulting firm, public appraisal service office, or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to the Company within the last six months;
7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last six months, except for an Independent Commissioner;
8. Do not have direct or indirect shares in the Company;
9. In the event that a Compliance Committee member acquires Company shares, directly or indirectly, as a

langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of six months after the shares were acquired;

10. Not affiliated with Board of Commissioners members, Board of Directors members, or Major Shareholders;

11. Do not have business relationships, directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Term of Office Conditions

The term of office of Compliance Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of three years and can be extended once for a two-year term of office without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Susunan dan Komposisi Komite Kepatuhan Tahun 2023

Di tahun 2023, tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Kepatuhan, dengan demikian komposisi dan susunan Komite Kepatuhan di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Compliance Committee Structure and Composition in 2023

In 2023, there were no changes in the Compliance Committee membership composition. Therefore, the Compliance Committee's composition and structure in 2023 are as follows.

Susunan Komite Kepatuhan per 31 Desember 2023

Compliance Committee Composition on December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Indra Jaya Rajagukguk	Ketua/Komisaris Independen Head/Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/SK/PPRE-DEKOM/2021 tanggal 23 Oktober 2021 Decree of the Board of Commissioners No. 008/SK/PPRE-DEKOM/2021 dated October 23, 2021	Mengikut masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	
Abdullah Sigit	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/SK/PPRE-DEKOM/2022 tanggal 28 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 012/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 28, 2022	2022 s.d 2025 2022 to 2025	Ke-2 Second
Bari Srisoenami	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/SK/PPRE-DEKOM/2022 tanggal 28 Mei 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 012/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 28, 2022	2022 s.d 2025 2022 to 2025	Ke-2 Second

Profil Komite Kepatuhan

Compliance Committee Profile

Indra Jaya Rajagukguk

Ketua Komite Kepatuhan/Komisaris Independen
Head of the Compliance Committee/Independent Commissioner

Profil Anggota Komite Kepatuhan Indra Jaya Rajagukguk dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Head of the Compliance Committee, Indra Jaya Rajagukguk, is available in the profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Abdullah Sigit

Anggota Komite Kepatuhan/Pihak Independen
Compliance Committee Member/Independent Party

Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.d. 28 Mei 2025, Periode Ke-2
Term of Office: May 28, 2022 to May 28, 2025, Second Period

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun
Kelahiran Yogyakarta, 29 Oktober 1967
Domisili DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1991)

Sertifikasi Profesi
Tidak ada

Riwayat Profesi
- Senior Manager - Advisor Communication PT PP (Persero) Tbk (2017-2018)
- Legal Affair Lead PT PP (Persero) Tbk (2016-2017)
- Legal Affair PT PP (Persero) Tbk (2013-2016)
- Legal Officer Proyek Patria Park PT Prakarsa Dirga Aneka (2006-2013)
- Legal Officer PT Prakarsa Dirga Aneka (2001-2006)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Personal Data
Indonesian citizen
56 years old
Born in Yogyakarta, October 29, 1967
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Education
Bachelor of Law from Gadjah Mada University (1991)

Professional Certification
None

Professional History
- Senior Manager - Advisor Communication of PT PP (Persero) Tbk (2017-2018)
- Legal Affair Lead of PT PP (Persero) Tbk (2016-2017)
- Legal Affair of PT PP (Persero) Tbk (2013-2016)
- Patria Park Project Legal Officer of PT Prakarsa Dirga Aneka (2006-2013)
- Legal Officer of PT Prakarsa Dirga Aneka (2001-2006)

Concurrent Positions
In the Company: None.
Outside the Company: None.

Affiliations
Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, PT PP (Persero) Tbk as the main/controlling shareholder or the Indonesian Government as the Company's ultimate beneficial owner.

Bari Srisoenami

Anggota Komite Kepatuhan/Pihak Independen
Compliance Committee Member/Independent Party

Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.d. 28 Mei 2025, Periode Ke-2
Term of Office: May 28, 2022 to May 28, 2025, Second Period

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun
Kelahiran Surakarta, 29 Maret 1962
Domisili DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1988)

Sertifikasi Profesi
Tidak ada

Riwayat Profesi
Menjabat di PT PP (Persero) Tbk sebagai:
- Financial Audit Biro Satuan Pengawasan Intern (2017-2018)
- Auditor Keuangan Biro Satuan Pengawasan Intern (2004-2017)
- Accounting (2001-2004)
- Auditor Keuangan Biro Satuan Pengawasan Intern (1999-2001)
- Accounting (1988-1999)

Selain jabatan tersebut, beliau memiliki pengalaman di bidang tata kelola perusahaan:
- Menjadi Koordinator Tim Pelaksana *Self Assessment* Penerapan GCG PT PP (Persero) Tbk (2012-2018)
- Menjadi Sekretaris Tim Pelaksana Penerapan GCG PT PP (Persero) Tbk (2008-2020)
- Membantu Kepala SPI PT PP (Persero) Tbk dalam pelaksanaan *Assessment* Penerapan GCG oleh Assessor Independen (2004-2018)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Personal Data
Indonesian citizen
61 years old
Born in Surakarta, March 29, 1962
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Education
Bachelor of Accounting from Gadjah Mada University (1988)

Professional Certification
None

Professional History
Served at PT PP (Persero) Tbk as:
- Financial Audit Bureau of the Internal Audit Unit (2017-2018)
- Financial Auditor of the Internal Audit Bureau (2004-2017)
- Accounting (2001-2004)
- Financial Auditor of the Internal Audit Bureau (1999-2001)
- Accounting (1988-1999)

In addition to these positions, has experience in corporate governance:
- The Coordinator of the GCG Implementation Self Assessment Team of PT PP (Persero) Tbk (2012-2018)
- The Secretary of the GCG Implementation Team of PT PP (Persero) Tbk (2008-2020)
- Assisting the Head of SPI of PT PP (Persero) Tbk in the GCG Implementation Assessment by Independent Assessor (2004-2018)

Concurrent Positions
In the Company: None.
Outside the Company: None.

Affiliations
Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, PT PP (Persero) Tbk as the main/controlling shareholder or the Indonesian Government as the Company's ultimate beneficial owner.

Independensi dan Hubungan Afiliasi Komite Kepatuhan

Seluruh anggota Komite Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi yang diuraikan sebagai berikut.

Compliance Committee Independence and Affiliation

All Compliance Committee members have met the following independence requirements.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Indra Jaya Rajagukguk	Abdullah Sigit	Bari Srisoenami
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. A person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's operations in the last six months.	√	x	x
Mempunyai saham baik langsung atau tidak langsung pada Perusahaan. Have shares, directly or indirectly, in the Company.	x	x	x

Kriteria Independensi Independence Criteria	Indra Jaya Rajagukguk	Abdullah Sigit	Bari Srisoenami
Mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Affiliated with the Boards of Commissioners or Board of Directors members or Major Shareholders of the Company.	x	x	x
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Have direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	x	x	x

√ : Ya | x : Tidak
√ : Yes | x : No

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Komite Kepatuhan berdasarkan Piagam Komite Kepatuhan sebagai berikut.

1. Melakukan penelaahan atas mekanisme penerbitan informasi yang wajib dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap regulasi pasar modal yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan serta ketentuan tata kelola BUMN sebagaimana diatur oleh regulator;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan penilai sistem tata kelola atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan asesor GCG yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, kompetensi, dan biaya;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan penilaian GCG oleh asesor internal maupun eksternal, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG;
6. Menelaah mekanisme penanganan pengaduan yang berkaitan dengan sistem tata kelola dan penerapan etika Perusahaan, termasuk di dalamnya sistem pengaduan dan pencegahan gratifikasi;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan;
9. Menelaah hubungan tata kelola antara Entitas Induk dengan Entitas Anak termasuk pola hubungan pembinaan Entitas Anak di dalam grup Perusahaan;
10. Membuat program kerja tahunan yang memuat telaah untuk memastikan bahwa GCG telah dilaksanakan.

Compliance Committee Duties and Responsibilities

The Compliance Committee's duties and responsibilities based on the Compliance Committee Charter are as follows.

1. Review the mechanism for disclose information that must be released by the Company to the public and/or authorities;
2. Reviewing the Company's compliance with capital market regulations relating to the Company's activities as well as SOE governance provisions as regulated by the regulator;
3. Provide an independent opinion in the event of dissenting opinion between the Management and the governance system assessor for the services provided;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of GCG assessor based on independence, scope of assignment, competence, and fee;
5. Reviewing the GCG assessment implementation of by internal and external assessors, as well as monitoring the follow-up implementation of GCG assessment results recommendations;
6. Reviewing the complaint handling mechanism relating to the corporate governance system and the implementation of ethics, including whistleblowing system and gratuity prevention;
7. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners on potential conflicts of interest within the Company;
8. Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information;
9. Review the governance relationship between the Parent Entity and Subsidiary, including the guidance relationships pattern between Subsidiary in the Company group;
10. Prepare an annual Work Program that includes review to ensure that GCG has been implemented.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Komite Kepatuhan

Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite Kepatuhan tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK/PPREDEKOM/2023 tanggal 12 Juni 2023. Uraian mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Komite Kepatuhan diuraikan sebagai berikut.

Division of Compliance Committee Duties and Responsibilities

The division of duties and responsibilities of every Compliance Committee member is stipulated on the Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/PPREDEKOM/2023 dated June 12, 2023. The division of duties and responsibilities of every Audit Committee member is described as follows.

Indra Jaya Rajagukguk (Ketua | Head of the Compliance Committee**)**	
• Kepatuhan dalam melaksanakan perundangan.	• Compliance in implementing laws and regulations.
• Kebijakan dan monitoring pelaksanaan GCG.	• GCG implementation policy and monitoring.
• Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.	• Risk management policy and implementation.
• Kebijakan dan pelaksanaan *key performance indicator* Dewan Komisaris dan Direksi.	• Key performance indicators policy and implementation for the Board of Commissioners and Board of Directors.
• Kebijakan dan pelaksanaan bidang tanggung jawab sosial Perusahaan.	• Corporate social responsibility policy and implementation.
• Kebijakan, pelaksanaan dan monitoring atas persetujuan investasi/aksi korporasi.	• Investment/corporate actions approval policy, implementation, and monitoring.
• Pengawasan pelaksanaan GCG aspek Dewan Komisaris.	• GCG implementation supervision on the Board of Commissioners aspects.

Abdullah Sigit (Anggota | Member**)**	
• Melakukan penelaahan atas mekanisme penerbitan informasi yang wajib dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas.	• Reviewing the mechanism for disclosing information that is mandatory for the Company to issue to the public and/or authorities.
• Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap regulasi pasar modal yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan serta ketentuan tata kelola BUMN sebagaimana diatur oleh regulator.	• Conduct a review of the Company's compliance with capital market regulations related to the Company's activities as well as SOE governance provisions as regulated by the regulator.
• Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan penilai sistem GCG atas jasa yang diberikannya.	• Provide an independent opinion in the event of a dissenting opinion between management and GCG system assessor for the services provided.
• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan asesor GCG yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, kompetensi, dan biaya.	• Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of GCG assessor based on independence, scope of assignment, competence, and fee.
• Melakukan penelaahan atas pelaksanaan penilaian GCG oleh asesor internal maupun eksternal, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG.	• Reviewing the GCG implementation assessment by internal and external assessors, as well as monitoring the follow-up implementation of the GCG assessment results recommendations.
• Menelaah mekanisme penanganan pengaduan yang berkaitan dengan sistem tata kelola dan penerapan etika Perusahaan, termasuk di dalamnya WBS dan pencegahan gratifikasi.	• Examine the mechanism for handling complaints related to the corporate governance system and application of ethics, including WBS and gratuity prevention.
• Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.	• Review and provide advice to the Board of Commissioners on potential conflict of interest of the Company.
• Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.	• Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.
• Menelaah hubungan tata kelola antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, termasuk pola hubungan pembinaan Entitas Anak di dalam grup Perusahaan, dan	• Review the governance relationship between the Parent Entity and Subsidiary, including the guidance relationships pattern between Subsidiary in the Company group.
• Membuat program kerja tahunan yang memuat telaah untuk memastikan bahwa GCG telah dilaksanakan.	• Create an annual work program that includes a review to ensure that GCG has been implemented.

Bari Srisoenami (Anggota I Member)	
• Melakukan penelaahan atas mekanisme penerbitan informasi yang wajib dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas.	• Reviewing the mechanism for disclosing information that is mandatory for the Company to issue to the public and/or authorities.
• Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap regulasi pasar modal yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan serta ketentuan tata kelola BUMN sebagaimana diatur oleh regulator.	• Conduct a review of the Company's compliance with capital market regulations related to the Company's activities as well as SOE governance provisions as regulated by the regulator.
• Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan penilai sistem GCG atas jasa yang diberikannya.	• Provide an independent opinion in the event of a dissenting opinion between management and GCG system assessor for the services provided.
• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan asesor GCG yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, kompetensi, dan biaya.	• Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of GCG assessor based on independence, scope of assignment, competence, and fee.
• Melakukan penelaahan atas pelaksanaan penilaian GCG oleh asesor internal maupun eksternal, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG.	• Reviewing the GCG implementation assessment by internal and external assessors, as well as monitoring the follow-up implementation of the GCG assessment results recommendations.
• Menelaah mekanisme penanganan pengaduan yang berkaitan dengan sistem tata kelola dan penerapan etika Perusahaan, termasuk di dalamnya WBS dan pencegahan gratifikasi.	• Examine the mechanism for handling complaints related to the corporate governance system and application of ethics, including WBS and gratuity prevention.
• Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.	• Review and provide advice to the Board of Commissioners on potential conflict of interest of the Company.
• Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.	• Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.
• Menelaah hubungan tata kelola antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, termasuk pola hubungan pembinaan Entitas Anak di dalam grup Perusahaan.	• Review the governance relationship between the Parent Entity and Subsidiary, including the guidance relationships pattern between Subsidiary in the Company group.
• Membuat program kerja tahunan yang memuat telaah untuk memastikan bahwa GCG telah dilaksanakan.	• Create an annual work program that includes a review to ensure that GCG has been implemented.

Pengembangan Kompetensi Komite Kepatuhan

Sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris, Anggota Komite Kepatuhan dapat mengikuti program pengembangan (Pendidikan atau Pelatihan) setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

Compliance Committee Competency Development

According to the policy of the Board of Commissioners, Members of the Compliance Committee may attend development programs (education or training) at least once a year.

Komite Kepatuhan Compliance Committee	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Abdullah Sigit	Pelatihan GRC Masterclass Program 2023 The 2023 GRC Masterclass Training Program	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, October 25, 2023	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) Ministry of SOE, in cooperation with the International Finance Corporation (IFC)
Bari Srisoenami	Pelatihan GRC Masterclass Program 2023 The 2023 GRC Masterclass Training Program	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	*Online*, 25 Oktober 2023 Online, October 25, 2023	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) Ministry of SOE, in cooperation with the International Finance Corporation (IFC)

Rapat Komite Kepatuhan

Kebijakan penyelenggaraan rapat Komite Kepatuhan tertuang dalam Piagam Komite Kepatuhan, di mana rapat tersebut dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Komite Kepatuhan. Berikut rincian pelaksanaan rapat Komite Kepatuhan selama tahun 2023.

Compliance Committee Meetings

The policy regarding Compliance Committee meetings is stated in the Compliance Committee Charter, in which the meetings are held periodically at least once a month, and attended by more than half the total members of the Compliance Committee. Below are the details on the Compliance Committee meetings held throughout 2023.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Kepatuhan pada Rapat Komite Kepatuhan Tahun 2023

Recapitulation of Compliance Committee Attendance in Compliance Committee Meetings in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jumlah Wajib Rapat** Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**% Kehadiran** % Attendance
Indra Jaya Rajagukguk* (Ketua/Komisaris Independen) (Head/Independent Committee)	-	-	-
Abdullah Sigit** (Anggota) (Member)	6	6	100,00
Bari Srisoenami** (Anggota) (Member)	6	6	100,00
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			**100,00**

* Kehadiran Indra Jaya Rajagukguk sebagai Ketua Komite Kepatuhan telah dijalankan melalui rapat Dewan Komisaris yang mengundang Komite Kepatuhan. Tentang rapat Dewan Komisaris dapat dilihat pada pembahasan "Rapat Dewan Komisaris dan Direksi" di atas.
** Kehadiran Abdullah Sigit dan Bari Srisoenami pada rapat Komite Audit yang mengundang Komite Kepatuhan dapat dilihat pada pembahasan Rapat Komite Audit diatas.
* The attendance of Indra Jaya Rajagukguk as the Head of the Compliance Committee has been performed through Board of Commissioners meetings that invite the Compliance Committee. Matters regarding the Board of Commissioners meetings can be viewed in the "Board of Commissioners and Board of Directors Meetings" part as discussed previously.
** The attendance of Abdullah Sigit and Bari Srisoenami in Audit Committee meetings that invite the Compliance Committee area available in the Audit Committee Meeting section above.

Risalah Rapat Komite Kepatuhan dan Kehadiran Komite Kepatuhan

Minutes of Compliance Committee Meetings and Compliance Committee Attendance

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #01	COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #01
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 18 Januari 2023; *Lounge* Wisma Subiyanto Lt.1.	**MEETING DATE AND VENUE:** January 18, 2023; Wisma Subiyanto Lounge 1st Floor
AGENDA RAPAT: Keberlanjutan PT PSA.	**MEETING AGENDA:** Sustainability of PT PSA.
PESERTA RAPAT: • Abdullah Sigit (Anggota) • Bari Srisoenami (Anggota) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Agil Ferzia (Kepala Departemen Legal) • Latifah Tiara N.P (Staff Legal)	**MEETING PARTICIPANT:** • Abdullah Sigit (Member) • Bari Srisoenami (Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Agil Ferzia (Head of the Legal Department) • Latifah Tiara N.P (Legal Staff)
KOMITE KEPATUHAN YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER OF COMPLIANCE COMMITTEE:** -

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #02	COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #02
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 16 Mei 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** May 16, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: KPI Perusahaan PPRE.	**MEETING AGENDA:** Corporate KPI of PPRE
PESERTA RAPAT: • Abdullah Sigit (Anggota) • Bari Srisoenami (Anggota) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Afriski Trisya Putra (CC & PMO)	**MEETING PARTICIPANT:** • Abdullah Sigit (Member) • Bari Srisoenami (Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Afriski Trisya Putra (CC & PMO)
KOMITE KEPATUHAN YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER OF COMPLIANCE COMMITTEE:** -

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #03	COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #03
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 26 Mei 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** May 26, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	**MEETING AGENDA:** Anti-Bribery Management System (SMAP)
PESERTA RAPAT: • Abdullah Sigit (Anggota) • Bari Srisoenami (Anggota) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Debbie Novalia (Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Sistem) • Andini Nugrahardani (Pengembangan Bisnis Muda)	**MEETING PARTICIPANT:** • Abdullah Sigit (Member) • Bari Srisoenami (Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Debbie Novalia (Head of Strategy and Systems Planning Department) • Andini Nugrahardani (Emergent Business Development)
KOMITE KEPATUHAN YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER OF COMPLIANCE COMMITTEE:** -

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #04	COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #04
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 25 Juli 2023; *Lounge* Wisma Subiyanto Lt.1.	**MEETING DATE AND VENUE:** July 25, 2023; Wisma Subiyanto Lounge 1st Floor
AGENDA RAPAT: Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi GCG Tahun 2022	MEETING AGENDA: Follow-Up Plans for the 2022 GCG Recommendation
PESERTA RAPAT: • Abdullah Sigit (Anggota) • Bari Srisoenami (Anggota) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Ridho Akbar (Junior Officer, GCG & Administration)	**MEETING PARTICIPANT:** • Abdullah Sigit (Member) • Bari Srisoenami (Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Caroline Wahyuninggar (Manager External Relation) • Ridho Akbar (Junior Officer, GCG & Administration)
KOMITE KEPATUHAN YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER OF COMPLIANCE COMMITTEE:** -

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #05	COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #05
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 10 Oktober 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** October 10, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: Koordinasi Prosedur Aset Manajemen PPRE	**MEETING AGENDA:** Coordination for Asset Management Procedure at PPRE
PESERTA RAPAT: • Abdullah Sigit (Anggota) • Bari Srisoenami (Anggota) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris) • Reinhart.P (Perwakilan GCG PT PP (Persero) Tbk) • Andini Nugrahardan (Pengembangan Bisnis Muda)	**MEETING PARTICIPANT:** • Abdullah Sigit (Member) • Bari Srisoenami (Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners) • Reinhart P (GCG Representative from PT PP (Persero) Tbk) • Andini Nugrahardan (Emergent Business Development)
KOMITE KEPATUHAN YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER OF COMPLIANCE COMMITTEE:** -

RAPAT KOMITE KEPATUHAN #06	COMPLIANCE COMMITTEE MEETING #06
TANGGAL DAN TEMPAT RAPAT: 25 November 2023; *Online* - Jakarta	**MEETING DATE AND VENUE:** November 25, 2023; Online - Jakarta
AGENDA RAPAT: Proses Pengangkatan Direksi PPRE	**MEETING AGENDA:** Process of PPRE's Board of Directors Appointment
PESERTA RAPAT: • Abdullah Sigit (Anggota) • Bari Srisoenami (Anggota) • Woro Endah Waraswati (Sekretaris Dewan Komisaris)	**MEETING PARTICIPANT:** • Abdullah Sigit (Member) • Bari Srisoenami (Member) • Woro Endah Waraswati (Secretary to the Board of Commissioners)
KOMITE KEPATUHAN YANG TIDAK HADIR: -	**ABSENT MEMBER OF COMPLIANCE COMMITTEE:** -

Program Kerja dan Realisasi Tugas serta Tanggung Jawab Komite Kepatuhan

Di tahun 2023, Komite Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya melalui kebijakan dan program kerja sebagai berikut.

Work Programs and the Realization of Compliance Committee's Duties and Responsibilities

In 2023, the Compliance Committee has carried out its duties and responsibilities through the following policies and work programs.

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
Kebijakan Perusahaan Company Policy	Monitoring, saran atas penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan: a. Kepatuhan Manajemen terhadap peraturan yang berlaku. b. Peraturan Internal Kebijakan/SOP.	*Updating* Peraturan Perundangan terkait PPRE. *Review* Pedoman-pedoman yang berhubungan dengan Dewan Komisaris dan lain-lain	Monitoring pada kelengkapan data Aksi Korporasi yang diajukan. *Review* terhadap Peraturan Menteri BUMN yang ditetapkan di tahun 2023, telah diselesaikan: - *Review* Piagam Komite Audit 2023. - *Review* Piagam Komite Kepatuhan 2023. - *Review* Kode Etik Perusahaan 2023. - Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PPRE Tahun 2023. - Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PPRE tahun 2023.
	Monitoring, suggestions for the implementation of laws and regulations applicable to the Company: a. Management compliance with applicable regulations. b. Policy/SOP Internal Regulations.	Updating on Laws and Regulations Related to PPRE Reviewing guidelines related to the Board of Commissioners and others	Monitoring the data fulfillment of the proposed Corporate Action Reviewing the Regulations of the Minister of SOE determined in 2023, the following has been completed: - Review of the 2023 Audit Committee Charter - Review of the 2023 Compliance Committee Charter - Review of the 2023 Company's Code of Conduct - The 2023 Board of Commissioners Manual of PPRE - The 2023 Good Corporate Governance (GCG) Guidelines of PPRE

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pengendalian dan Kepatuhan Manajemen	a. Melaksanakan koordinasi intimal Komite Kepatuhan, mengikuti Rakom-Rapat Dewan Komisaris. b. Sesuai arahan, mengikuti Ragab - Rapat Bersama/ Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala 2 bulan sekali.	Rapat internal Komite Kepatuhan, atau rapat koordinasi dengan Komite Audit jika diperlukan dan menyiapkan materi Rakom sesuai agenda rapat.	- Terealisasi mengikuti & menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris selama tahun 2023, pada tanggal: 1. 07 Februari. 2. 30 Maret. 3. 10 Mei. 4. 28 Juli. 5. 26 Oktober. yang dilanjutkan mengikuti Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, dengan tingkat kehadiran KK 97%. - Mengikuti Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 14 Juni 2023 dengan membahas khusus Kinerja Peralatan PPRE sesuai undangan No. 075/EXT/KOM/PPRE/VII/2023, 8 Juni 2023. - Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Dewan Komisaris pada tanggal 21 Juni 2023 membahas evaluasi kinerja Perusahaan s.d. Mei 2023, Peralatan dan permasalahan Legal. Tidak dilanjutkan rapat koordinasi bersama Direksi. - Diskusi koordinasi antara anggota komite Kepatuhan terkait PT PSA pada 18 Januari 2023. - Diskusi Anggota Komite dengan Perusahaan: 1. 18 Januari 2023 dengan Legal terkait Keberlanjutan PT PSA (anak Perusahan PPRE). 2. 16 Mei 2023 dengan Corporate Secretary terkait KPI Direktorat. 3. 26 Mei 2023 dengan tim SMAP terkait SMAP. 4. 25 Juli 20023 dengan Tim GCG Perusahaan terkait AOI hasil *assessment*. 5. 10 Oktober 2023 dengan BDPM terkait prosedur Aset Manajemen. 6. 22 Desember 2023 dengan *Corporate Secretary*, diskusi terkait buku Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PPRE Tahun 2023 dan *self assessment* penerapan GCG. - Diskusi Anggota Komite Kepatuhan, Komite Audit dengan Perusahaan: 1. 16 Februari 2023 terkait proses *Assessment* Penerapan GCG. 2. 20 Februari 2023 *kick of meeting* hasil *assessment* penerapan GCG 2022. 3. 24 Februari 2023 wawancara terkait penerapan GCG 2022. 4. 03 Maret 2023 *scoring* hasil *assessment* penerapan GCG 2022. 5. 07 Maret 2023 *pra exit meeting assessment* penerapan GCG 2022. 6. 02 Juni 2023 Mengikuti sosialisasi SMAP secara *online*. 7. 8 Juni 2023 dengan Tim Manajemen Risiko terkait Kebijakan MR 2023.

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
Monitoring and Directing Management Control and Compliance	a. Intensive coordination with the Compliance Committee, attending Meetings of the Board of Commissioners. b. According to directives, attending Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors periodically once in two months.	Holding internal meetings within the Compliance Committee or coordination meetings with the Audit Committee, if necessary, in preparing materials for the Board of Commissioners meetings according to the meeting agenda.	- Have attended and prepared materials for the Coordination Meeting of the Board of Commissioners throughout 2023, on: 1. February 7; 2. March 30; 3. May 10; 4. July 28; 5. October 26 continued by the attendance in the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with a 97% attendance rate of the Compliance Committee. - Attending the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors on June 14, 2023, specifically discussing PPRE's Equipment Performance according to invitation No. 075/EXT/KOM/PPRE/VII/2023, June 8, 2023. - Attending the Coordination Meeting of the Board of Commissioners on June 21, 2023, discussing the Company's performance evaluation up to May 2023, equipment, and Legal issues. Not continued with a coordination meeting with the Board of Directors. - Coordination discussion among the Compliance Committee members regarding PT PSA on January 18, 2023. - Compliance Committee Discussion with the Company: 1. January 18, 2023, with Legal regarding the Sustainability of PT PSA (PPRE's Subsidiary). 2. May 16, 2023, with the Corporate Secretary regarding the Directorate KPI. 3. May 26, 2023, with the SMAP team regarding SMAP. 4. July 25, 2023, with the Company's GCG Team regarding the assessment result's AOI. 5. October 10, 2023, with BDPM regarding Management Asset procedures. 6. December 22, 2023, with the Corporate Secretary, discussing the 2023 Good Corporate Governance (GCG) Guidelines of PPRE and the self-assessment of GCG implementation. - Discussion of the Compliance Committee and Audit Committee Members with the Company: 1. February 16, 2023, regarding the GCG Implementation Assessment process. 2. February 20, 2023, kick-off meeting discussing the result of the 2022 GCG implementation assessment. 3. February 24, 2023, interview on the 2022 GCG implementation. 4. March 3, 2023, the scoring result of the 2022 GCG implementation assessment. 5. March 7, 2023, pre-exit meeting of the 2022 GCG implementation assessment. 6. June 2, 2023, attending online SMAP dissemination. 7. June 8, 2023, with the Risk Management team discussing the 2023 Risk Management Policy.

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
	a. Memberikan Persetujuan atas Aksi Korporasi yang dilakukan oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar. a. Approving the Corporate Action taken by the Board of Directors according to the Articles of Association.	Meneliti kelengkapan data atas aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi, telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan atau Threshold PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas, serta Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas. Reviewing the data completeness of the corporate action proposed by the Board of Directors, whether it has complied with applicable laws and regulations, the Articles of Association and/or Threshold of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder, and Provisions determined by the Majority Shareholder.	Terealisasi, Dewan Komisaris memberikan Persetujuan atas Aksi Korporasi yang diajukan Direksi, dengan melalui telaah terlebih dahulu dari Komite yang mengacu pada Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar dan *Threshold* PPRE yang berlaku. (lihat penjelasan No. 9). Implemented, the Board of Commissioners has approved the Corporate Action proposed by the Board of Directors which has undergone reviews by Committees referring to applicable laws and regulations as well as the Articles of Association and Threshold of PPRE (see explanation No. 9).
	b. Menyampaikan Laporan secara tertulis tentang usulan RKAP Dewan Komisaris Tahun 2024. b. Submitting written reports regarding the Board of Commissioners' 2024 RKAP proposal.	Membuat usulan Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2024 bersama Komite Audit; termasuk rencana agenda rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi. Menyusun anggaran biaya bersama Komite Audit dan Sekretaris Komisaris. Preparing a proposal for the Board of Commissioners' 2024 Work Program with the Audit Committee, including plans for coordination meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors. Preparing the cost budget with the Audit Committee and the Secretary to the Board of Commissioners.	Telah dilaksanakan, dan disampaikan ke Perusahaan sesuai surat Dewan Komisaris: - No. 143/EXT/KOM/PPRE/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal: Penyerahan Biaya Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2024. - No. 145/EXTKO/PPRE/XI/2023 tanggal 3 November 2023 perihal: Penyerahan Program Kerja Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tahun 2024. Implemented and submitted to the Company according to the letter of the Board of Commissioners: - No. 143/EXT/KOM/PPRE/IX/2023 dated September 27, 2023, regarding the Submission of the 2024 Budget of the Board of Commissioners of PT Presisi Tbk. - No. 145/EXTKO/PPRE/XI/2023 dated November 3, 2023, regarding the Submission of the 2024 Work Program of the Board of Commissioners of PT Presisi Tbk.

Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization
Manajemen Risiko Risk Management	Menelaah kebijakan penerapan Sistem Manajemen Risiko. Reviewing the policies of the Risk Management System Implementation	Mengevaluasi Kebijakan Perusahaan tentang Manajemen Risiko. Evaluating Company Policies on Risk Management	Diskusi dengan Unit Manajemen Risiko dilaksanakan 8 Juni 2023, dan Telaah Kebijakan Manajemen Risiko sudah dilaporkan ke Komisaris Utama melalui surat No. 007/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal: Telaah Kebijakan Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 Arahan kepada Perusahaan disampaikan melalui surat No. 110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, perihal: Arahan Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko PT PP Presisi Tbk Tahun 2023. A discussion with the Risk Management Unit was carried out on June 8, 2023, and the Review of Risk Management Policies has been reported to the President Commissioner through letter No. 007/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 9, 2023, regarding the Review of the 2023 Risk Management Policies of PT PP Presisi Tbk. Directives for the Company have been given through letter No. 110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023 dated July 27, 2023, regarding the Directives for the Implementation of the 2023 Risk Management Policies of PT PP Presisi Tbk.
		Mengevaluasi Realisasi Laporan Manajemen Risiko tahun 2022, dan mengusulkan pemberian arahan. Evaluating the realization of the 2022 Risk Management Report and proposing directives.	Arahan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko telah disampaikan melalui surat No. 016/EXT/KOM/PPRE/II/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Arahan terhadap Hasil Laporan Manajemen Triwulan IV 2022. The Board of Commissioners' Directives on Risk Management Implementation have been delivered through letter No. 016/EXT/KOM/PPRE/II/2023 dated March 1, 2023, regarding the Directives on the Management Report Result for the Fourth Quarter in 2022.
	Monitoring, saran atas pelaksanaan manajemen risiko. Monitoring suggestions for risk management implementation	Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Risiko PPRE dan mengevaluasi kegiatan Manajemen Risiko tahun 2023 serta mengusulkan pemberian arahan. Coordinating with PPRE's Risk Management Team and Evaluating the Risk Management activities in 2023 as well as giving directives.	Sesuai SK Dewan Komisaris No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2O23 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk, monitoring pelaksanaan Manajemen Risiko dan dilaksanakan oleh komite Audit. According to the Decree of the Board of Directors No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2O23 dated June 12, 2023, regarding the Division of Duties and Authority of the Board of Commissioners Members at PT PP Presisi Tbk, the Risk Management Implementation is monitored by the Audit Committee.
Pengendalian & Kepatuhan: Pengawasan Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) dan sistem pengelolaan gratifikasi. Control & Compliance: Monitoring the Implementation of the Whistleblowing System (WBS) and gratuity management.	a. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan WBS. a. Monitoring the suggestions and follow-ups on WBS reports. b. Monitoring, saran dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi. b. Monitoring the suggestions and follow-ups on gratuity reports.	Memberikan Arahan atau menyampaikan Laporan, setelah melakukan koordinasi dengan Manajemen, terkait penerapan WBS. Giving Directives or submitting Reports, after coordinating with the Management, regarding WBS implementation.	Laporan WBS disampaikan secara rutin melalui Laporan Kegiatan SPI Triwulanan dan selama tahun 2023 tidak ada laporan terkait WBS. WBS reports are submitted regularly through the Quarterly SPI Activity Report, and throughout 2023, there were no reports on WBS. Kebijakan Gratifikasi berkaitan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan untuk mendukung penerapan SMAP, Dewan Komisaris telah menyampaikan Tinjauan Dewan Pengarah atas SMAP PT PP Presisi Tbk melalui surat No. 065/EXI/KOM/PPRE/Y/2023 tanggal 30 Mei 2023. Gratuity policies regarding the Anti-Bribery Management System, and to support SMAP implementation, the Board of Commissioners have delivered the Supervisory Board Review on the SMAP of PT PP Presisi Tbk through letter No. 065/EXI/KOM/PPRE/Y/2023 dated May 30, 2023.

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Monitoring Policy Implementation	Pengelolaan Entitas Anak. Subsidiary Management.	Usulan arahan/saran berdasarkan reviu/ evaluasi kebijakan dalam pengelolaan Anak Perusahaan dari sisi Tata Kelola Perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proposal of directives/ suggestions based on policy review/evaluation of Subsidiary management in Good Corporate Governance and compliance with applicable Laws and Regulations.	- KK telah melakukan Telaah terhadap Usulan Calon Komisaris Utama PT Lancarjaya Mandiri Abadi (“PT LMA”) dan dilaporkan ke Dewan Komisaris sesuai surat No. 021/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 11 Desember 2023. Arahan Dewan Komisaris terkait tersebut di atas disampaikan melalui surat No. 178/ EXT/KOM/PPRE/XII/2023 pada 12 Desember 2023. - KK hadir dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 28 Desember 2023, sesuai surat No. 186/EXT/KOM/ PPRE/XIII/2023 tanggal 21 Desember 2023, perihal: Undangan Rapat Kinerja PT Lancar Jaya Mandiri Abadi selaku Anak Perusahaan PT PP Presisi Tbk. - The Compliance Committee has reviewed the Proposal of the Board of Commissioners Candidates of PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("PT LMA") and reported it to the Board of Commissioners according to letter No. 021/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated December 11, 2023. The Board of Commissioners' Directives regarding the issue were delivered through letter No. 178/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 12, 2023. - The Compliance Committee was present at the Coordination Meeting on December 28, 2023, according to letter No. 186/EXT/KOM/PPRE/XIII/2023, dated December 21, 2023, regarding the Invitation for the Performance Meeting of PT Lancarjaya Mandiri Abadi as the Subsidiary of PT PP Presisi Tbk.

Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization
Remunerasi, Nominasi dan Suksesi Direksi serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak. Remuneration, Nomination, and Succession of the Board of Directors and the Subsidiaries' Board of Directors and Board of Commissioners	Pencapaian KPI Korporat. The achievement of Corporate KPI.	Monitoring penyampaian realisasi KPI Direksi secara triwulanan. Monitoring the delivery of the Board of Directors KPI achievement quarterly.	Realisasi pencapaian KPI Korporat PPRE tahun 2022 lelah dilaporkan ke PSM melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2022 dengan surat No. 054/EXT/KOM/PPRE/ 2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 PT PP Presisi Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022. Realisasi pencapaian KPI Korporat periode Triwulanan disampaikan dalam Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan kepada PSM. - lihat penjelasan No. 11a Dewan Komisaris melalui surat No. 181/EXT/KOM/PPRE/ XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, perihal: Arahan Pencapaian KPI Triwulan III Tahun 2023. The 2022 Achievement of PPRE's Corporate KPI was reported to the Majority Shareholder through the Report of the 2022 Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties with letter No. 054/ EXT/KOM/PPRE/2023 dated May 15, 2023, regarding the Response and Suggestions of the Board of Commissioners on the Audited Financial Statements of PT PP Presisi Tbk for the Fiscal Year 2022 as well as the Submission of the Supervisory Task Report and Performance Realization of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022. The Quarterly Corporate KPI achievement is presented in the Quarterly Performance Evaluation Report to the Majority Shareholder. - see explanation No. 11a The Board of Commissioners, through letter No. 181/ EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 15, 2023, regarding the Directives on the KPI Achievement for the Third Quarter of 2023.

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
	Telaah pengusulan remunerasi dan nominasi Direksi, dan pengusulan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja KPI Direksi dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. Reviewing the proposal for the remuneration and nomination of the Board of Directors, and the proposal for performance bonuses/ incentives considers the Board of Directors' KPI assessment result and the corporate soundness level achievement.	Membantu Komite Audit Jika diperlukan. Assisting the Audit Committee if necessary.	Sesuai SK Dewan Komisaris No. 009/SK/DEKOM/ PPRE/2023 tanggal 12 Juni 2023 dilaksanakan oleh Komite Kepatuhan bekerja sama dengan Komite Audit. Komite Kepatuhan menjalankan kegiatan ini dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/ MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan di bulan Maret 2023; dan KK telah mempelajari Peraturan diatas khususnya Bab V tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Dewan Komisaris terkait nominasi, melakukan konsultasi ke PT PP (Persero) Tbk selaku PSM melalui surat No. 166/EXT/KOM/PPRE/XI/2023 tanggal 06 November 2023 perihal: Permohonan Arahan Terkait Proses Pengangkatan Direksi PT PP Presisi Tbk. Arahan dari PSM terkait tersebut diatas disampaikan melalui surat No. 918/EXT/PP/HCM/2023 tanggal 12 November 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan terkait Proses Pengangkatan Direksi PT PP Presisi Tbk (PPRE) yang pada dasarnya untuk mengusulkan Calon Direktur dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan (PPRE) adalah kewenangan Direksi PT PP (Persero) Tbk selaku PSM. It has complied with the Decree of the Board of Commissioners No. 009/SK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 12, 2023, carried out by the Compliance Committee in collaboration with the Audit Committee. The Compliance Committee conducts these activities while referring to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises established in March 2023; and the Compliance Committee has studied the Regulation above, especially Chapter V regarding the Procedures for the Appointment of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Subsidiaries. Regarding nominations, the Board of Commissioners consulted with PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder through letter No. 166/EXT/KOM/PPRE/ XI/2023 dated November 06, 2023, regarding the Request for Directives regarding the Process of Appointing Directors of PT PP Presisi Tbk. The directives from the Majority Shareholder regarding the aforementioned matter were informed through letter No. 918/EXT/PP/HCM/2023 dated November 12, 2023, regarding the Response to the Request for Directives regarding the Process of Appointing Directors of PT PP Presisi Tbk (PPRE), which fundamentally suggests that proposing Candidates of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Subsidiaries (PPRE) is the authority of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.

Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization
GCG GCG	a. Pelaksanaan *Assessment* penerapan GCG 2022. a. Conducting the 2022 Assessment of GCG implementation.	- Bekerja sama dengan Komite Audit, Sekretaris Dewan Komisaris mengumpulkan dokumen untuk pemenuhan parameter Aspek Dewan Komisaris. - Bekerja sama dengan PSM diwakili Biro Corsec dan Div. HCM PT PP (Persero) Tbk. - Berkoordinasi dengan tim Manajemen. - Cooperating with the Audit Committee and the Secretary to the Board of Commissioners to collect documents to fulfill the Board of Commissioners Aspect parameters. - Cooperating with the Majority Shareholder represented by the Corporate Secretary Bureau and the HCM Division of PT PP (Persero) Tbk. - Coordinating with the Management team.	*Assessment* penerapan GCG Tahun Buku 2022 telah dilaksanakan sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023 oleh Tim BPKP Perwakilan DKI Jakarta; *exit meeting* telah dilaksanakan pada 10 Maret 2023 dengan score 86,822 (Kategori sangat baik). The GCG implementation assessment for fiscal year 2022 has been conducted from January 18, 2023, to March 10, 2023, by the DKI Jakarta Representative of the BPKP Team; the exit meeting was held on March 10, 2023, with a score of 86.822 (Excellent Category).
	b. *Review* Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG tahun buku 2022. b. Reviewing the Report on the 2022 Assessment of GCG Implementation.	Membuat telaah laporan, melaporkan ke Dewan Komisaris, dan mengusulkan pemberian arahan. Preparing report reviews, reporting to the Board of Commissioners, and proposing directives.	Telah dilaksanakan dan dilaporkan ke Komisaris Utama sesuai surat No. 008/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal: Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG PT PP Presisi Tbk Tahun buku 2022. Arahan Dewan Komisaris disampaikan ke Perusahaan melalui surat No. 087/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. It has been implemented and reported to the President Commissioner according to letter No. 008/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 12, 2023, regarding the Report on the GCG Implementation Assessment Result of PT PP Presisi Tbk for Fiscal Year 2022. The Board of Commissioners' directives are given to the Company through letter No. 087/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 19, 2023,
	c. Monitoring atas penerapan prinsip -prinsip GCG, termasuk di dalamnya pelaksanaan Tindak Lanjut AOI hasil *assessment/self assessment*. c. Monitoring the implementation of GCG principles, including the implementation of AOI Follow-Ups resulting from the assessment/ self-assessment.	- Telaah kelengkapan Aksi Korporasi. - Reviewing the Corporate Action requirements.	Monitoring pada kelengkapan data Aksi Korporasi yang diajukan (lihat penjelasan No. 9). Monitoring the data completeness for the proposed Corporate Action (see explanation No. 9).

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
		- Monitoring pelaksanaan AOI secara keseluruhan oleh Manajemen, dengan menindaklanjuti AOI aspek Dewan Komisaris. - The Management monitors the AOI implementation comprehensively by following up on the Board of Commissioners aspect's AOI.	Monitoring Pelaksanaan AOI oleh Direksi dilaksanakan melalui Rapat Gabungan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi: Pembahasan Kinerja sampai dengan Triwulan III 2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang salah satu agendanya penyampaian Progress Pelaksanaan Rekomendasi *Assessment* penerapan GCG tahun 2022. *Progress* Tindak Lanjut AOI aspek Dewan Komisaris disampaikan KK kepada Komisaris Utama pada 30 Oktober 2023 melalui surat No. 015B/INT/KK DEKOM/PPRE/2023 dan *progress* Tindak Lanjut AOI aspek Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023 melalui surat No. 003/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 tanggal 22 Januari 2024. The Board of Directors monitors the AOI Implementation through a Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors: Discussion of Performance up to the Third Quarter of 2023 on October 26, 2023, of which one of the agenda items was delivering the Progress of Implementing Recommendations Resulting from the 2022 GCG Implementation Assessment. The Compliance Committee delivers the AOI Follow-Up Progress on the Board of Commissioners aspect to the Board of Commissioners on October 30, 2023, through letter No. 015B/INT/KK DEKOM/PPRE/2023 and the AOI Follow-Up progress on the Board of Commissioners aspect on December 31, 2023, through letter No. 003/INT/KK/DEKOM/PPRE/2024 dated January 22, 2024.
		- Melaksanakan koordinasi dengan Manajemen dalam rangka persiapan *self Assessment* Penerapan GCG tahun buku 2023. - Coordinating with the Management to prepare for the GCG Implementation Self-Assessment for Fiscal Year 2023.	- Dilaksanakan saat diskusi dengan Tim Perusahaan yang diwakili oleh Corporate Secretary dan Legal pada tanggal 22 Desember 2023 dengan agenda mengevaluasi draft Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PPRE tahun 2023 yang diajukan Perusahaan. - Juga melaksanakan diskusi dengan SVP Internal Audit PPRE. - Sedangkan *progress* pelaksanaan TL AOI Hasil *Assessment* Penerapan GCG 2022 aspek Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023 disampaikan ke Perusahaan melalui surat No. 013/EXT/KOM/PPRE/2024 tanggal 22 Januari 2024. - Implemented during the discussion with the Company's Team represented by the Corporate Secretary and Legal on December 22, 2023, with the agenda of evaluating PPRE's 2023 Good Corporate Governance (GCG) Guidelines draft proposed by the Company. - Also discussing with the SVP of PPRE's Internal Audit. - Meanwhile, the progress of implementing AOI Follow-Ups Resulting from the 2022 GCG Implementation on the Board of Commissioners aspect on December 31, 2023, was delivered to the Company through letter No. 013/EXT/KOM/PPRE/2024 dated January 22, 2024.

Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization
RUPST dan RUPSLB Annual GMS and Extraordinary GMS	Pendapatan & Tanggapan terhadap hal-hal yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB. - RUPST: BA Pimpinan RUPST, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;	Penyampaian laporan yang memerlukan pengesahan RUPS, misal: Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris usulan KAP, dan lain-lain.	RUPST tahun buku 2022 dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2022 melalui surat No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 PT PP (Persero) Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
	- RUPSLB:BA Pimpinan RUPSLB.	Penyampaian laporan yang memerlukan pengesahan RUPSLB (jika diperlukan).	Tahun 2023 tidak ada RUPSLB.
	Opinions and Responses to issues discussed in the Annual GMS and Extraordinary GMS - Annual GMS: BA of the Annual GMS Chairperson, Report of the Board of Commissioners' Supervisory Duties	Delivering reports that require GMS ratification, such as the Report of the Board of Commissioners' Supervisory Duties, KAP recommendations, etc.	The 2022 Annual GMS was held on May 24, 2023. The 2022 Report of the Board of Commissioners Supervisory Duty Implementation through letter No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 15, 2023, regarding the Board of Commissioners' Responses and Suggestions on the Audited Financial Statements of PT PP (Persero) Tbk for Fiscal Year 2022 and the Delivery of the Report of the Board of Commissioners' Supervision and Performance Realization for Fiscal Year 2022.
	- Extraordinary GMS: BA of the Extraordinary GMS Chairperson	Delivering reports that require Extraordinary GMS ratification (if necessary).	There was no Extraordinary GMS in 2023.

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*	Memberikan persetujuan dan rekomendasi serta arahan terhadap rencana Investasi, Pengembangan Bisnis dan *Corporate Action*, sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar dan atau *Threshold* PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas.	Telaah terhadap Kelengkapan dokumen prosesnya, dan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan atau *Threshold* PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas: akan disampaikan usulan arahan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Komite Audit.	Bekerja sama dengan Komite Audit, Telaah terhadap kelengkapan dokumen, prosesnya, dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan atau threshold dari PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas. Persetujuan Dewan Komisaris atas Aksi Korporasi Tahun 2023, di antaranya: 1. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi BOD-1 PPRE (15 Maret 2023); 2. Arahan Terkait kekosongan *Corporate Secretary* (21 Maret 2023) 3. Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Kepala Divisi Operasi 1. 4. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi *Standby Loan* dari Perbankan (7 April 2023); 5. Persetujuan Perubahan/ Penambahan Plafon Fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan (11 April 2023); 6. Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal (SPI) PPRE. (16 Mei 2023); 7. Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Komisaris Utama PPRE dan Pengangkatan Plt. Komisaris Utama PPRE (16 Mei 2023); 8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Fasilitas Kredit Perbankan (29 Mei 2023); 9. Penegasan Kelanjutan atau Pembubaran atas Anak Perusahaan PPRE yaitu PT Presisi Sumber Anugerah ('PT PSA') (13 Juni 2023); 10. Pemberian Arahan terkait Permohonan Perubahan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan dalam aksi Korporasi PT Lancar Jaya Mandiri Abadi (5 Agustus 2023); 11. Pemberian Arah Persetujuan Pengangkatan *Corporate Secretary* (14 Agustus 2023); 12. Pemberian Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment (14 Agustus 2023); 13. Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris Dan Tunjangan Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi Untuk Tahun 2023 (18 Agustus 2023); 14. Pemberian Arahan terkait Persetujuan Perolehan Fasilitas Tambahan Baru Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas *Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada Perbankan (23 Agustus 2023); 15. Pemberian Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Operation 1 (30 Agustus 2023); 16. Arahan terkait Pemberitahuan Pengangkatan Vice President operation 2 (31 Agustus 2023); 17. Persetujuan Izin Untuk Menghadiri Undangan dari PT United Tractors Tbk (15 September 2023); 18. Penegasan Persetujuan Perpanjangan Jangka waktu Fasilitas *Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade* pada PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (27 September 2023); 19. Pemberian Arahan terkait Permohonan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Aset Manajemen dalam Prosedur Sistem Aset Manajemen (SMA) PPRE (17 Oktober 2023); 20. Persetujuan untuk bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PPRE (19 Oktober 2023); 21. Pemberian Arahan atas Permintaan Persetujuan Usulan Calon Komisaris Utama PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) (12 Desember 2023); 22. Pemberian Arahan Pencapaian KPI Korporat Triwulan III Tahun 2023 (15 Desember 2023); 23. Pemberian Arahan atas Pedoman Kebijakan mengenai Hak dan Kewajiban terhadap Kreditur dan Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PPRE Tahun 2023 (26 Desember 2023); 24. Pemberian Persetujuan untuk bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PPRE Tahun 2023 (28 Desember 2023).

Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization
Investment, Business Development, and Corporate Action	Giving approval, recommendations, and directives for Investment, Business Development, and Corporate Action plans, according to the limitation of authority granted by the Articles of Association and/or the Threshold of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder.	Reviewing the document requirements in its process and others according to applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or the Threshold of PT PP (Persero) as the Majority Shareholder: directives and recommendations will be proposed to the Board of Commissioners. This activity is carried out by cooperating with the Audit Committee.	Cooperating with the Audit Committee, reviewing the document requirements, processes, and others based on applicable laws and regulations, Articles of Association, and/or the Threshold of PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder. Approval of the 2023 Corporate Actions by the Board of Commissioners, including: 1. Approval for Changes to BOD-1 PPRE Organizational Structure (March 15, 2023); 2. Directives Regarding the vacancy of the Corporate Secretary (March 21, 2023); 3. Response and Directives from the Board of Commissioners regarding the Proposal for Changes to the Head of the Operations 1 Division. 4. Approval for the Extension of Term of Standby Loan on Construction Working Capital Credit Facility from Banks (April 7, 2023); 5. Approval for Changes/Additions to Credit Facility Ceilings from Funding Institutions (April 11, 2023); 6. Approval for the Termination and Appointment of the Head of the Internal Audit Bureau (SPI) of PPRE (May 16, 2023); 7. Notification of Temporary Dismissal of PPRE's President Commissioner and the Appointment of PPRE's Acting President Commissioner (May 16, 2023); 8. Approval for the Extension of Term of Bank Credit Facility (May 29, 2023); 9. Affirmation of Continuation or Dissolution of PPRE's Subsidiary, namely PT Presisi Sumber Anugerah ('PT PSA') (June 13, 2023); 10. Directives on the Request for Amendment of the Limitations and/or Criteria of Authority in Corporate Actions of PT Lancar Jaya Mandiri Abadi (August 5, 2023); 11. Directives for the Approval of Corporate Secretary Appointment (August 14, 2023); 12. Directives on the Notification of Appointment of Vice President Equipment (August 14, 2023); 13. Determination of Salaries for the Board of Directors, Honorarium for the Board of Commissioners, and Allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023 (August 18, 2023); 14. Directives on the Approval for the Acquisition of New Additional Facilities, namely the Transactional Working Capital Credit Facility and the Extension of Term for Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility at Banks; 15. Directives on the Notification of the Appointment of Vice President Operation 1 (August 30, 2023); 16. Directives on Notification of Appointment of Vice President Operation 2 (August 31, 2023); 17. Approval for Attending Invitations from PT United Tractors Tbk (September 15, 2023); 18. Affirmation of the Approval for the Extension of Term for Non-Cash Loan Switchable Cash Loan Trade Facility at Banks (September 27, 2023); 19. Directives on the Request for Signing Declaration of Asset Management Commitment in the Asset Management System (SMA) Procedure at PPRE (October 17, 2023); 20. Approval for the Board of Directors to jointly sign PPRE's Code of Conduct (October 19, 2023); 21. Directives for the Approval Request for Proposed President Commissioner Candidates of PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) (December 12, 2023); 22. Directives on the Corporate KPI Achievement for the Third Quarter of 2023 (December 15, 2023); 23. Directives on Policy Guidelines regarding the Rights and Obligations to Creditors and the Management of Long-Term Loan Utilization of PPRE in 2023 (December 26, 2023); 24. Approval for Directors to jointly sign PPRE's 2023 Good Corporate Governance (GCG) Guidelines (December 28, 2023).

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
Penyusunan RKA Tahunan 2024 dan RJPP Preparation of the 2024 Annual RKA and RJPP	Saran dan Persetujuan atas penyusunan RKA tahunan 2024 dan *Review* RJPP: a. Pandangan dan Masukan Dewan Komisaris terkait Penyusunan RKA Tahunan 2024 & RJPP. b. Pembahasan BOD dan BOC atas Rancangan RKA Tahunan 2024 & RJPP. c. Pengesahan RKA Tahunan 2024 & RJPP. Suggestion and Approval for the preparation of the 2024 annual RKA and RJPP Review: a. The Board of Commissioners' Opinions and Input regarding the Preparation of the 2024 Annual RKA & RJPP. b. The Board of Directors and the Board of Commissioners Discussion on the 2024 Annual RKA & RJPP Plans. c. Ratification of the 2024 Annual RKA & RJPP.	Komite Kepatuhan dalam kegiatan ini membantu Komite Audit. Komite Kepatuhan mereviu Kontrak Manajemen (KPI) yang disampaikan oleh Manajemen dalam draft RKAP 2024. Me-*review* Berita Acara pengesahan RKAPT 2024. In this activity, the Compliance Committee assists the Audit Committee. The Compliance Committee reviews the Management Contract (KPI) stated by the Management in the 2024 RKAP draft. Reviewing the Minutes of the 2024 Annual RKAP ratification.	- Arahan Dewan Komisaris sesuai surat No. 144/EXT/KOM/PPRE/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal: Penyusunan RKAP dan KPI Korporat 2024; mengacu kepada surat OC SCM PP No. 230/EXT/PP/OC SCM/2023 perihal: Penyusunan RKAP/K Tahun 2024 anak Perusahaan PTPP; - Telaah draft RKAP 2024 dilakukan oleh Komite Audit; - Dan dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Dewan komisaris dan Direksi pada tanggal 26 Oktober 2023. Masih menunggu arahan dari PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas. - The Board of Commissioners' directives are according to letter No. 144/EXT/KOM/PPRE/IX/2023 dated September 27, 2023, regarding the Preparation of the 2024 RKAP and Corporate KPI, referring to the letter of the OC SCM PP No. 230/EXT/PP/OC SCM/2023 regarding the 2024 RKAP/K of PTPP's Subsidiaries; - The 2024 RKAP draft was reviewed by the Audit Committee; - It was also discussed in the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors on October 26, 2023. Still awaiting directives from PT PP (Persero) as the Majority Shareholder.
Laporan Manajemen Management Report	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan kepada Pemegang Saham Mayoritas (PSM). a. Preparation of the Quarterly Performance Report for the Majority Shareholder (PSM).	Komite Kepatuhan memonitor penyampaian Laporan pencapaian Kinerja yang disiapkan oleh Komite Audit. The Compliance Committee monitors the delivery of the Performance Achievement Report prepared by the Audit Committee.	Telah terealisasi penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I 2023 kepada PSM melalui surat No. 092/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 pada tanggal 22 Juni 2023, perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja Triwulan II 2023 disampaikan kepada PSM melalui surat No. 136/EXT/KOM/PPRE/XI2023 tanggal 14 September 2023. Laporan Kinerja Triwulan III 2023 disampaikan kepada PSM melalui surat No. 179/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. The Performance Report of the First Quarter of 2023 has been delivered to the PSM through letter No. 092/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 22, 2023, regarding the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT PP Presisi Tbk in the First Quarter of 2023. The Report of the Second Quarter of 2023 was submitted to PSM through letter No. 136/EXT/KOM/PPRE/XI2023 dated September 14, 2023. The Report of the Second Quarter of 2023 was submitted to the PSM through letter No. 179/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 13, 2023.

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
	b. Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan.	Penyusunan Laporan bekerja sama dengan Komite Audit; dan untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan *audited* disampaikan ke PT PP (Persero) Tbk paling lambat 1 minggu sebelum RUPS.	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Tahun Buku 2023 telah disampaikan ke PT PP (Persero) Tbk melalui surat No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal: Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 PT PP (Persero) Tbk serta Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan dan Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun Buku 2022. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Tahun Buku 2023 disampaikan bersamaan dengan Evaluasi Kinerja tahun 2023 (*Audited*), akan dilaporkan ke PT PP (Persero) Tbk - PSM; sebelum pelaksanaan RUPST tahun buku 2023 pada tahun 2024.
	b. Preparation of the Annual Report of the Board of Commissioners' Supervisory Duties.	The preparation of the Report involves cooperation with the Audit Committee, and the Annual Report of the Board of Commissioners' Supervisory Duties is submitted to PT PP (Persero) Tbk at least a week before the GMS.	The Annual Report of the Board of Commissioners' Supervisory Duties for Fiscal Year 2023 has been submitted to PT PP (Persero) Tbk through letter No. 054/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 15, 2023, regarding the Board of Commissioners' Response and Suggestions on the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2022 of PT PP (Persero) Tbk and the Submission of the Report of the Board of Commissioners' Supervisory Duties and Performance for Fiscal Year 2022. The 2023 Report of the Board of Commissioners' Supervisory Duties was submitted along with the 2023 Performance Evaluation (Audited), which will be reported to PT PP (Persero) Tbk - PSM before the holding of the Annual GMS for Fiscal Year 2023 in 2024.
	c. Persetujuan Laporan Tahunan (*annual Report*)	- Menyampaikan data yang diperlukan dalam penyusunan *Annual Report* terkait Dewan Komisaris dan Organya. - Me-*review draft Annual Report* yang disampaikan Konsultan *Annual Report* / Manajemen.	- Data terkait Dewan Komisaris untuk *Annual Report* 2022, lelah disampaikan ke Tim Penyusunan *Annual Report* 2022. - Telah terealisasi me-*review draft Annual Report* 2022. - *Annual Report* 2022 telah selesai dan sudah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 28 April 2023 - *Annual Report* 2023 masih dalam proses penyusunan.
	c. Approval of the Annual Report	- Submitting the data required in creating the Annual Report regarding the Board of Commissioners and its Organs. - Reviewing the Annual Report draft submitted by the Annual Report Consultant/Management.	- The data related to the Board of Commissioners for the 2022 Annual Report has been submitted to the 2022 Annual Report Preparation Team. - The review of the 2022 Annual Report draft has been completed. - The 2022 Annual Report has been finalized and signed by the Board of Commissioners on April 28, 2023. - The 2023 Annual Report is still in the process of preparation.

Kebijakan Policy	**Program Kerja** Work Program	**Rencana Kegiatan** Activity Plan	**Realisasi Tahun 2023** 2023 Realization
Pengembangan Dewan Komisaris	Seminar, *Workshop* sebagai narasumber	- Pelaksanaan program pengenalan Dewan Komisaris Baru hasil RUPS jika ada. Hal ini dilaksanakan bekerja sama dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris perusahaan.	Telah terealisasi pada tanggal 20 Juni 2023, sesuai surat Dewan Komisaris No. 1109/EXT/DIR/PPRE/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023, perihal: Jadwal Pengenalan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Baru PT PP Presisi Tbk.
		- Monitoring Pelaksanaan pelatihan Dewan Komisaris dan pembuatan Pelatihan.	Terealisasi, dan monitoring dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
Board of Commissioners Development	Seminar, Workshop as speakers	- Implementation of the Induction Program for New Members of the Board of Commissioners resulting from the GMS, if any. It is implemented by cooperating with the Secretary to the Board of Commissioners and the Corporate Secretary.	Implemented on June 20, 2023, according to the letter of the Board of Commissioners No. 1109/EXT/DIR/PPRE/VI/2023 dated June 09, 2023, regarding the Induction Schedule of the New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PP Presisi Tbk.
		- Monitoring the Implementation of the Board of Commissioners training and training preparation.	Implemented, and the monitoring is carried out by the Secretary of the Board of Commissioners.
Tindak lanjut hasil keputusan, dan arahan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi/arahan Dewan Komisaris.	Koordinasi dengan Komite Audit maupun Manajemen/Perusahaan, berdasarkan Minit Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.	Secara rutin dilakukan oleh Sekretaris Dewan komisaris.
Follow-ups on resolutions, and directives from the Board of Commissioners	The Board of Commissioners on the follow-ups of the resolutions, and the Board of Commissioners' recommendations/ directives.	Coordination with the Audit Committee and the Management/Company according to the Minutes of the Coordination Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.	Regularly conducted by the Secretary to the Board of Commissioners.

Kebijakan Policy	Program Kerja Work Program	Rencana Kegiatan Activity Plan	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization
Evaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris	Evaluasi Laporan kegiatan Komite Audit dan komite Kepatuhan dengan periode - Semester I. - Tahunan.	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Komite Kepatuhan (KK) tahun 2023 secara berkala dengan periode Triwulan.	Pada tahun 2023, Laporan disusun Triwulanan. Laporan KK Tahun 2022 telah disampaikan sesuai dengan surat No. 004/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Tahun 2022 dan Evaluasi Kinerja Komite Kepatuhan Tahun 2022. Laporan Kegiatan KK Triwulan I tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 005/INT/DEKOM/PPRE/2023 pada tanggal 28 April 2023, perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kegiatan KK Triwulan II tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 011/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 pada tanggal 26 Juli 2023 perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kegiatan KK Triwulan III tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 016/INT/DEKOM/PPRE/2023 pada tanggal 6 November 2023 perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk Triwulan III Tahun 2023.
Performance evaluation of Committees under the Board of Commissioners	Evaluating the Audit Committee and Compliance Committee's Activity Reports for the following period: - The First Semester. - Annual.	Preparing the 2023 Compliance Committee Activity Report quarterly.	In 2023, Quarterly Reports were prepared. The 2022 Compliance Committee Report has been submitted according to letter No. 004/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated March 2, 2023, regarding the Submission of the 2022 Implementation Report of the Compliance Committee Work Plan of PT PP Presisi Tbk and 2022 Evaluation of the Compliance Committee's Performance in 2022. The Compliance Committee Activity Report for the First Quarter of 2023 was submitted through letter No. 005/INT/DEKOM/PPRE/2023 dated April 28, 2023, regarding the Submission of the Implementation Report of the Compliance Committee Work Plan of PT PP Presisi Tbk for the First Quarter of 2023. The Compliance Committee Activity Report for the Second Quarter of 2023 was submitted through letter No. 011/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023 dated July 26, 2023, regarding the Submission of the Implementation Report of the Compliance Committee Work Plan of PT PP Presisi Tbk for the Second Quarter of 2023. The Compliance Committee Activity Report for the Third Quarter of 2023 was submitted through letter No. 016/INT/DEKOM/PPRE/2023 dated November 6, 2023, regarding the Submission of the Implementation Report of the Compliance Committee Work Plan of PT PP Presisi Tbk for the Third Quarter of 2023.

Penelaahan Komite Kepatuhan

Di tahun 2023, Komite Kepatuhan telah melakukan penelaahan atas pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan dengan rincian sebagai berikut.

Compliance Committee Review

In 2023, the Compliance Committee reviewed the supervision of the Company's business activities as described in the following details.

Nomor Surat Letter Number	**Tanggal Surat** Letter Date	**Perihal** Topic
Disposisi Telaah Review Disposition		
068/INT/KOM/PPRE/IX/2023	27 September 23 September 27, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Permohonan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Aset Manajemen dalam Prosedur Sistem Aset Manajemen (SMA) PT PP Presisi Tbk. Preparation of the Review on Corporate Action Regarding the Request for Signing Declaration of Asset Management Commitment in the Asset Management System (SMA) Procedure of PT PP Presisi Tbk.
074/INT/KOM/PPRE/XI/2023	24 November 2023 November 24, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Tanggapan Permohonan Arahan Terkait Proses Pengangkatan Direksi PT PP Presisi Tbk. Preparation of the Review on Corporate Action Response to the Request for Guidance Regarding the Process of Appointing the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk.
076/INT/KOM/PPRE/XII/2023	7 Desember 2023 December 7, 2023	Pembuatan Telaah atas Aksi Korporasi Pemberitahuan Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("PT LMA"). Preparation of the Review on Corporate Action Notification of Proposed Changes to the Composition of the Board of Commissioners of PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("PT LMA").
Hasil Telaah Review Results		
007/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	9 Juni 2023 June 9, 2023	Laporan Hasil Telaah/*Review* Komite Kepatuhan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Tahun 2023. Report of the Compliance Committee's Review Results on Risk Management Policies in 2023.
008/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	12 Juni 2023 June 12, 2023	Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2022. Report of the Assessment Result of GCG Implementation at PT PP Presisi Tbk for Fiscal Year 2022.
009/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	14 Juni 2023 June 14, 2023	Hasil Review Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2023. Review Results on the 2023 Board of Commissioners Manual.
013/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	25 September 2023 September 25, 2023	Hasil Review Piagam Komite Audit dan Komite Kepatuhan Tahun 2023. Review Results on the 2023 Audit Committee Charter and Compliance Committee Charter.
014/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	12 Oktober 2023 October 12, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Audit dan Komite Kepatuhan terkait Aksi Korporasi Permohonan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Aset Manajemen dalam Prosedur Sistem Aset Manajemen (SMA) PT PP Presisi Tbk. Report of the Audit Committee and Compliance Committee's Review Results regarding the Corporate Action: Request for the Signing of Asset Management Commitment Declaration in the Asset Management System (SMA) Procedure of PT PP Presisi Tbk.
015/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	18 Oktober 2023 October 18, 2023	Hasil *Review* Komite Kepatuhan terhadap Visi Misi Perusahaan (PT PP Presisi Tbk). Results of the Compliance Committee's Review on the Company's (PT PP Presisi Tbk) Vision and Mission.
019/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	27 November 2023 November 27, 2023	Laporan Hasil Telaah Komite Kepatuhan atas Aksi Korporasi Tanggapan Permohonan Arahan Terkait Proses Pengangkatan Direksi PT PP Presisi Tbk. Report of the Compliance Committee's Review Results on Corporate Action: Response to the Request for Directives regarding the Process of Appointing the Board of Directors of PT PP Presisi Tbk.
021/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	11 Desember 2023 December 11, 2023	Laporan Hasil *Review* Komite Kepatuhan atas Pemberitahuan Usulan Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("PT LMA"). Report of the Compliance Committee's Review Results on the Announcement of the Suggestion of Changing the Composition of the Board of Commissioners of PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("PT LMA").
022/INT/KK/DEKOM/PPRE/2023	12 Desember 2023 December 12, 2023	Evaluasi CSR PT PP Presisi Tbk TW III Tahun 2023. Evaluation of the CSR of PT PP Presisi Tbk in the Third Quarter of 2023.

Adapun penelaahan Komite Kepatuhan bersama Komite Audit atas pengawasannya terhadap kegiatan usaha Perusahaan pada tahun 2023 telah termuat pada bab Tata Kelola Perusahaan bagian Komite Audit dalam laporan tahunan ini.

Rekomendasi dan Saran Komite Kepatuhan

Berikut rekomendasi dan saran Komite Kepatuhan di tahun 2023, yang telah disampaikan melalui hasil telaah ataupun surat Dewan Komisaris kepada Direksi, antara lain:

1. Berdasarkan Surat Direksi PPRE No. 565/EXT/DIR/PPRE/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Pemberitahuan Pemindahtugasan Kepala Biro Sekretaris Perusahaan PT PP Presisi Tbk dan permintaan arahan Dewan Komisaris terkait penanggung jawab yang akan mengisi jabatan Sekretaris Perusahaan melalui Surat Dewan Komisaris No. 029/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, Dewan Komisaris memberikan arahan sebagai berikut:
   a. Segera mencari *talent pool* Sekretaris Perusahaan yang memenuhi persyaratan antara lain berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2014, baik dari lingkungan intern PPRE maupun dari Lingkungan *Holding* PTPP;
   b. Selama belum didapatkan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana *point* 1, maka untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris perusahaan, Dewan Komisaris merekomendasikan rangkap jabatan sekretaris perusahaan oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal;
   c. Meminta persetujuan pengangkatan jabatan sekretaris perusahaan kepada Dewan Komisaris; dan
   d. Menyampaikan laporan menyangkut pengangkatan dan pemberhentian sekretaris perusahaan kepada OJK paling lambat dua hari kerja dan mencantumkan pada situs web, dengan di tembuskan ke Dewan Komisaris Perusahaan.

2. Berdasarkan Surat Direksi PPRE No. 597/EXT/DIR/PPRE/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang usulan perubahan Kepala Divisi Operasi 1, melalui Surat Dewan Komisaris No. 033/EXT/KOM/PPRE/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, Dewan Komisaris memberikan arahan sebagai berikut:
   a. Anggaran Dasar Perusahaan No. 40 tanggal 27 April 2022, Pasal 16 ayat 7.i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris; dan
   b. Surat Pemegang Saham Mayoritas No. 10/EXT/PP/DSH/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi pada Anak Perusahaan PT PP (Persero) Tbk (“Threshold”); bahwa

A joint review by the Compliance Committee and the Audit Committee on their supervision over the Company’s business activities in 2023 has been included in the Corporate Governance chapter under the Audit Committee’s part in this annual report.

Compliance Committee Recommendation and Suggestions

Below are the Compliance Committee’s recommendations and suggestions in 2023, that have been delivered in review results or Board of Commissioners letter to the Board of Directors:

1. According to the Letter of the Board of Directors of PPRE No. 565/EXT/DIR/PPRE/III/2023 dated March 8, 2023, regarding the Notification of Transfer for the Head of the Corporate Secretary Bureau of PT PP Presisi Tbk and the request for guidance from the Board of Commissioners regarding the person responsible for filling the position of the Corporate Secretary through the Letter of the Board of Commissioners No. 029/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 21, 2023, the Board of Commissioners provides the following directives:
   a. Immediately seek a talent pool for the Corporate Secretary who meets the requirements, including the POJK No. 35/POJK.04/2014, both internally within PPRE and within the Holding of PTPP;
   b. Until a suitable candidate meeting the requirements as stated in point 1 is found, the Board of Commissioners recommends the concurrent position of Corporate Secretary to be held by the Director of Finance, Risk Management and Legal;
   c. Request for approval for the appointment of Corporate Secretary from the Board of Commissioners; and
   d. Submit reports regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary to the OJK no later than two working days and post it on the website, with a copy to the Company’s Board of Commissioners.

2. According to the Letter of the Board of Directors of PPRE No. 597/EXT/DIR/PPRE/III/2023 dated March 15, 2023, regarding proposed changes to the Head of Operation 1 Division, through Board of Commissioners Letter No. 033/EXT/KOM/PPRE/III/2023 dated March 30, 2023, the Board of Commissioners provides the following directives:
   a. Article 16 paragraph 7.i. of the Company’s Articles of Association No. 40 dated April 27, 2022, states that the actions of the Board of Directors below must obtain written approval from the Board of Commissioners; and
   b. The Letter of the Majority Shareholder No. 10/EXT/PP/DSH/2022 dated March 15, 2022, regarding the Limitations and/or Criteria of Authority of the Board of Commissioners and Board of Directors at Subsidiaries of PT PP (Persero) Tbk (“Threshold”); that

c. Dewan Komisaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan personil sebagaimana tercantum dalam Surat Direksi PPRE No. 597/EXT/DIR/PPRE/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang usulan perubahan Kepala Divisi Operasi 1, namun demikian Dewan Komisaris memberikan arahan agar Perusahaan dalam melakukan proses penempatan personill memperhatikan kompetensi calon BoD-1, dan melaksanakan Aksi Korporasi tersebut dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan terkait dan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

3. Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal (SPI).
   Berdasarkan Surat Direksi PPRE No. 717/EXT/DIR/PPRE/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pemberitahuan Masa Purnabakti Kepala Biro SPI PT PP Presisi Tbk, dan surat No. 853/EXT/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Tambahan Informasi Atas Usulan Perubahan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal PT PP Presisi Tbk, untuk itu Dewan Komisaris telah melaksanakan wawancara dengan calon Kepala SPI dan melalui Surat Dewan Komisaris No. 055/EXT/KOM/PPRE/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, Dewan Komisaris menyetujui pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal (SPI) yang baru serta memberikan beberapa arahan sebagai berikut :

   a. Agar Kepala Biro Satuan Pengawas Internal (SPI) yang baru memaintain atau mengelola/memelihara masa sertifikasi Internal Auditor yang saat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sesuai Peraturan dari Badan sertifikasi;
   b. Mengembangkan wawasan ilmu Auditor atau pengetahuan ke-SPI-an dengan diberikan kesempatan oleh Perusahaan untuk mengikuti pendidikan/seminar terkait dengan ilmu pemeriksaan, pengetahuan dalam Pasar Modal dan pengetahuan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Auditor/Kepala Satuan pengawas Internal;
   c. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan agar mengevalusi kepatuhan pelaksanaan Prosedur dan Manajemen Risiko yang berlaku di Perusahaan, baik di Proyek maupun di Unit Kantor Pusat.

4. Pemantauan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi antara lain sebagai berikut:
   a. Melalui surat 069/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, Dewan Komisaris mengingatkan pelaksanaan program Perkenalan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru PPRE menindaklanjuti Hasil RUPST tahun buku 2022 mata acara 7 perihal

c. The Board of Commissioners does not have the authority to approve personnel changes as stated in the Letter of the Board of Directors of PPRE No. 597/EXT/DIR/PPRE/III/2023 dated March 15, 2023, regarding proposed changes to the Head of Operation 1 Division. However, the Board of Commissioners advised the Company to consider the competency of the Board of Directors-1 candidate in the personnel placement process and implement the Corporate Action while still considering the Articles of Association and relevant Company Regulations as well as prioritizing Good Corporate Governance.

3. Appointment of Head of the Internal Audit Bureau (SPI).

   According to the Letter of the Board of Directors of PPRE No. 717/EXT/DIR/PPRE/III/2023 dated March 31, 2023, regarding the Notification of the Retirement of the Head of the SPI Bureau of PT PP Presisi Tbk, and letter No. 853/EXT/DIR/PPRE/V/2023 dated May 2, 2023, regarding Additional Information on the Proposal for Changes to the Head of the Internal Audit Bureau of PT PP Presisi Tbk, the Board of Commissioners has conducted interviews with the candidates for Head of the SPI and through the Letter of the Board of Commissioners No. 055/EXT/KOM/PPRE/V/2023 dated May 16, 2023, the Board of Commissioners approves the appointment of the new Head of the Internal Audit Bureau (SPI) and provides the following directives:
   a. The new Head of the Internal Audit Bureau (SPI) must maintain or manage/maintain the Internal Auditor certification period currently in effect until December 31, 2022, according to the Regulations of the certifying body;
   b. Develop auditing knowledge or internal audit knowledge through opportunities given by the Company to attend education/seminars related to audit science, knowledge of the Capital Market, and other knowledge that supports the implementation of duties as an Auditor/Head of the Internal Audit Unit;

   c. In carrying out audit tasks, evaluate compliance with the applicable Procedures and Risk Management in the Company, both in Projects and in the Central Office Unit.

4. Monitoring the Good Corporate Governance (GCG) implementation, the Board of Commissioners advised the Board of Directors as follows:

   a. Through letter 069/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 5, 2023, the Board of Commissioners reminds the implementation of the Induction program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PPRE following up on

Perubahan Pengurus Perusahaan, termasuk arahan materi yang disampaikan.

b. Arahan Hasil *Assessment* Penerapan GCG PPRE Tahun 2022 disampaikan Dewan Komisaris melalui surat 087/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang pada dasarnya Perusahaan agar:
   - Segera menyusun rencana tindak lanjut atas usulan rekomendasi Hasil *Assessment* tersebut dan dilaksanakan di tahun 2023;
   - Ketua Tim Pelaksanaan Penerapan GCG PPRE agar memonitor Pelaksanaan usulan rekomendasi tersebut.
c. Pemberian arahan terkait proses pengangkatan Corporate Secretary dan Kepala Biro Internal Audit.
d. Arahan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terkait dengan diberlakukannya Peraturan Kementerian BUMN No. Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, ditetapkan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sudah tidak berlaku.
e. Arahan terkait proses pengangkatan Direksi Perusahaan, disampaikan Dewan Komisaris melalui surat 172/EXT/KOM/PPRE/XI/2023 tanggal 28 November 2023 dimana proses pengangkatan Direksi Perusahaan harus mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. Per-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN khususnya Bab V yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, dan surat arahan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam hal ini PT PP (Persero) Tbk No. 918/EXT/PP/HCM/2023 tanggal 16 November 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Terkait Proses Pengangkatan Direksi PT PP Presisi Tbk. Untuk itu Perusahaan agar segera mengusulkan perubahan ketentuan Anggaran Dasar PPRE kepada Pemegang Saham Mayoritas terkait pasal yang mengatur pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi Perusahaan, dan selanjutnya ditetapkan dalam RUPST tahun buku 2023.
f. Arahan kepada Perusahaan atas Pedoman Kebijakan mengenai Hak dan Kewajiban terhadap Kreditur dan Pengelolaan Penggunaan Pinjaman Jangka Panjang PPRE. Tahun 2023, disampaikan melalui 190/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang pada dasarnya Pedoman Hak dan Kewajiban terhadap Kreditur agar dibuat selaras dengan Anggaran Dasar, *Threshold* PPRE,

the Annual GMS Result for fiscal year 2022 item 7 regarding Changes in Company Management, including the material guidance presented.

b. The results of the GCG Application Assessment for PPRE in 2022 are delivered by the Board of Commissioners through letter No. 087/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 dated June 19, 2023, essentially requiring the Company to:
   - Immediately develop a follow-up plan for the recommendations of the Assessment Results and implement them in 2023;
   - The Chairperson of PPRE's GCG Implementation Team should monitor the implementation of these recommendations.
c. Directing the process of appointing the Corporate Secretary and Head of the Internal Audit Bureau.
d. Directives for the Good Corporate Governance Implementation related to the implementation of the Regulation of the Ministry of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Good Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, which stipulates that the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, regarding the Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOEs, is no longer valid.
e. Directives for the process of appointing the Company's Board of Directors, conveyed by the Board of Commissioners through letter No. 172/EXT/KOM/PPRE/XI/2023 dated November 28, 2023, where the process of appointing the Company's Board of Directors must refer to the Regulation of the Ministry of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organization and Human Resources of SOEs, especially Chapter V which regulates the Procedure for Appointing Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries, and directive letter from the Majority Shareholder, in this case PT PP (Persero) Tbk, No. 918/EXT/PP/HCM/2023 dated November 16, 2023 regarding the Response to the Request for Guidance on the Process of Appointing Directors of PT PP Presisi Tbk. Therefore, the Company should promptly propose changes to the provisions of PPRE's Articles of Association to the Majority Shareholder regarding the article governing the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Company's Board of Directors, and subsequently stipulated in the Annual GMS for fiscal year 2023.
f. Directives for the Company on the Policy Guidelines regarding the Rights and Obligations to Creditors and Management of the Use of Long-term Loans for PPRE. In 2023, it was informed through 190/EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 26, 2023, in which essentially the Guidelines on Rights and Obligations to Creditors should be made in line with the Articles of Association,

Prosedur dan WI serta Peraturan Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan hubungan dengan pihak Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank khususnya, serta parenting dengan pihak PTPP sebagai Pemegang Saham Mayoritas mengingat hubungan dengan pihak Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank merupakan kegiatan pengurusan/ operasional yang strategis dan menentukan jalannya Perusahaan.

g. Persetujuan penyempurnaan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT PP Presisi Tbk Tahun 2023 disampaikan melalui surat No. 192/ EXT/KOM/PPRE/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Persetujuan untuk Bersama-sama Direksi menandatangani Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT PP Presisi Tbk Tahun 2023.

h. Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), di tahunan 2023 Dewan Komisaris melalui Komite nya telah melaksanakan rekomendasi Hasil *Assessment* Penerapan GCG tahun 2022 khusus aspek Dewan Komisaris.

5. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.
Berdasarkan Surat Direksi PPRE No. 1668/EXT/DIR/ PPRE/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Permohonan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, untuk itu melalui Surat Dewan Komisaris No.118/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Dewan Komisaris menyetujui pengangkatan Sekretaris Perusahaan yang baru serta memberikan beberapa arahan sebagai berikut:

a. Selama menjabat harus melengkapi persyaratan sekurang-kurangnya: cakap melakukan perbuatan hukum; memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan; memahami kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dapat berkomunikasi dengan baik; dan berdomisili di Indonesia.

b. Bahwa sesuai POJK No. 35/POJK.04/2014 tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan cukup penting, Untuk itu diharapkan Sekretaris Perusahaan terus meningkatkan kompetensinya sehingga memenuhi persyaratan yang diminta POJK No. 35/POJK.04/2014, dan

c. Meminta Direksi Perusahaan untuk melaksanakan Aksi Korporasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, Peraturan Perundang-undangan yang terkait serta dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PPRE's Thresholds, Procedures and WI, and other Company Regulations related to the relationships with Bank and Non-Bank Financial Institutions in particular, and parenting with PTPP as the Majority Shareholder considering the relationship with Bank and Non-Bank Financial Institutions is a strategic managerial/operational activity of the Company and determines its continuity.

g. Approval for the refinement of the 2023 Good Corporate Governance (GCG) Guidelines of PT PP Presisi Tbk informed through letter No. 192/ EXT/KOM/PPRE/XII/2023 dated December 28, 2023, regarding the Approval for Joint Signing of the 2023 Good Corporate Governance (GCG) Guidelines of PT PP Presisi Tbk.

h. In the Good Corporate Governance (GCG) implementation in 2023, the Board of Commissioners through its Committees has implemented recommendations from the 2022 GCG Implementation Assessment, especially on the aspects of the Board of Commissioners.

5. Appointment of the Corporate Secretary.
According to the Letter of the Board of Directors of PPRE No. 1668/EXT/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 8, 2023, regarding the Request for Approval of Appointment of the Corporate Secretary, through the Letter of the Board of Commissioners No.118/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 14, 2023, the Board of Commissioners approves the appointment of the new Corporate Secretary and provides the following directives:

a. During the term of office, the Corporate Secretary must fulfill at least the following requirements: capable of performing legal acts; having knowledge and understanding in the fields of law, finance, and corporate governance; understanding the activities of Issuers or Public Companies; able to communicate effectively; and domiciled in Indonesia;

b. According to POJK No. 35/POJK.04/2014, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are quite significant, and therefore the Corporate Secretary is expected to continuously improve his competence to meet the requirements requested by POJK No. 35/POJK.04/2014; and

c. Request the Company's Board of Directors to implement the Corporate Action as mentioned above according to the Articles of Association, Company Regulations, relevant laws and regulations, and by prioritizing Good Corporate Governance.

6. Berdasarkan Surat Direksi PPRE No. 1516/EXT/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pemberitahuan Pengangkatan Vice President Equipment, melalui Surat Dewan Komisaris No. 199/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Dewan Komisaris memberikan arahan sebagai berikut:

   a. Pengangkatan Vice President Equipment adalah kewenangan Direksi PPRE setelah terlebih dahulu dimintakan parenting dari Pemegang Saham Mayoritas dalam hal ini antara lain dengan Divisi HCM PTPP;
   b. Pengangkatan Vice President Equipment, harus memberikan nilai tambah bagi kinerja Perusahaan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Peralatan yang menjadi lebih efektif, daya saing yang tinggi, produktivitas yang tinggi dan memberikan keuntungan bagi Perusahaan;
   c. Direksi agar segera menyampaikan usulan Struktur Organisasi yang baru, untuk dikonsultasikan ke Pemegang Saham Mayoritas; dan
   d. Meminta Direksi Perusahaan untuk melaksanakan Aksi Korporasi; proses rekrutmen karyawan serta penetapan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang terkait serta dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perusahaan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan langsung oleh PT PP (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan.

Proses nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada ketentuan terkait sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Calon Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas kepada Kementerian BUMN selaku entitas pemilik akhir Perusahaan. Kementerian BUMN kemudian memutuskan nama Dewan Komisaris dan Direksi terpilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS selaku forum tertinggi Perusahaan.

6. According to the Letter of the Board of Directors of PPRE No. 1516/EXT/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 1, 2023, regarding the Notification of Appointment of Vice President Equipment, through the Letter of the Board of Commissioners No. 199/EXT/KOM/PPRE/VIII/2023 dated August 14, 2023, the Board of Commissioners provides the following directives:
   a. The appointment of the Vice President Equipment is the authority of PPRE's Board of Directors after first requesting for parenting from the Majority Shareholder, in this case with the HCM Division of PTPP;
   b. The appointment of the Vice President Equipment must provide added value to the Company's performance, especially in terms of more effective Equipment management, high competitiveness, high productivity, and providing benefits to the Company;
   c. The Board of Directors is requested to immediately submit proposals for the new Organizational Structure to be consulted with the Majority Shareholder; and
   d. Request the Company's Board of Directors to implement Corporate Action and the employee recruitment process and appointment as mentioned above according to the Articles of Association, Company Regulations, relevant laws and regulations, and by prioritizing Good Corporate Governance.

Nomination and Remuneration Function

The Company did not form a Nomination and Remuneration Committee. The nomination and remuneration function is run directly by PT PP (Persero) Tbk, the Company's majority shareholder.

The nomination and remuneration process for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to relevant provisions as stated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises. Candidates of the Board of Commissioners and Board of Directors are proposed by PT PP (Persero) Tbk as the Majority Shareholder to the Ministry of SOE as the ultimate owner entity of the Company. The Ministry of SOE will then decide on the elected Board of Commissioners and Board of Directors candidates to be appointed by the GMS as the highest forum of the Company.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peranan penting untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam melaporkan pelaksanaan tugasnya terkait tata administrasi dan pendokumentasian kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris.

Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris
Dalam membantu tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dilengkapi dengan Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris yang disahkan pada 23 Agustus 2023.

Ketentuan Masa Jabatan
Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan dan staf Sekretariat Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Komisaris 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perusahaan yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK/PPRE-DEKOM/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengangkat Woro Endah Waraswati untuk menjabat Sekretaris Dewan Komisaris.

Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners has a significant role in supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties. The Secretary to the Board of Commissioners is directly responsible to the Board of Commissioners in reporting their duty implementation regarding the administration and documentation of the Board of Commissioners' activities.

Guidelines of the Secretary to the Board of Commissioners
In supporting the Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities, the Secretary to the Board of Commissioners is provided with the Guidelines of the Secretary to the Board of Commissioners approved on August 23, 2023.

Term of Office Provisions
The term of office for the Company's Secretary to the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Secretariat staff is determined by the Board of Commissioners to be three years, and they can be reappointed for two years in the same company, without prejudice to the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Profile of the Secretary to the Board of Commissioners
According to the Decree of the Board of Commissioners No. 013/SK/PPRE-DEKOM/2022 dated May 27, 2022, on the Term of Office Extension for the Secretary to the Board of Commissioners, the Board of Commissioners appointed Woro Endah Waraswati as the Secretary to the Board of Commissioners.

Woro Endah Waraswati

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Periode Jabatan: 28 Mei 2022 s.d. 28 Mei 2025, Periode Ke-2
Term of Office: May 28, 2022, to May 28 2025, Second Term

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 31 tahun
Kelahiran Jakarta, 22 Januari 1992
Domisili DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Sastra dari Universitas Al-Azhar Indonesia (2009)

Sertifikasi Profesi
Tidak ada

Riwayat Profesi
- Administrator Pondok Indah Hospital Group (2017-2018)
- Management Staff pada Food and Beverage Company di Osaka, Japan (2016- 2017)
- Administrator PT International Test Center (2014-2016)
- Secretary for Chairman PT Ganergindo International (2013-2014)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun dengan PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama/pengendali serta Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir Perusahaan.

Personal Data
Indonesian Citizen
31 years old
Born in Jakarta on January 22, 1992
Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia

Education
Bachelor of Literature from Universitas Al-Azhar Indonesia (2009)

Professional Certification
None

Professional History
- Administrator at Pondok Indah Hospital Group (2017-2018)
- Management Staff at a Food and Beverage Company in Osaka, Japan (2016- 2017)
- Administrator at PT International Test Center (2014-2016)
- Secretary for Chairman at PT Ganergindo International (2013-2014)

Concurrent Position
In the Company: None
Outside the Company: None

Affiliations
Not affiliated with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or PT PP (Persero) Tbk as the major/controlling shareholder as well as the Government of Indonesia as the ultimate owner entity of the Company.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2023 beserta realisasinya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners in 2023 and their implementation are described in the following table.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	**Realisasi 2023** 2023 Realization
Memastikan tersedianya informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan. Ensuring the availability of information for the Board of Commissioners to make decisions.	Sekretaris Dewan Komisaris telah mempersiapkan dan menyediakan informasi, data, laporan, saran dan dokumen yang menjadi materi kajian Dewan Komisaris dan Dewan Komite, pada kegiatan berikut: • Penunjukan kantor akuntan publik; • Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023; • Persetujuan pembiayaan; • Persetujuan pengeluaran modal; • Laporan keuangan tahun 2023; • Penyusunan *Top Sheet* Dewan Komisaris per 2 bulan dan Triwulanan; • Penetapan Honorarium dan Tunjangan Direktur Komisaris Tahun 2023; • Pengangkatan Sekretaris Perusahaan; • Pengangkatan Ketua SPI; • Persetujuan aksi korporasi; • Pengukuhan bersama Dewan Komisaris dan Direksi atas Pedoman yang berlaku di Perusahaan; • Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi; dan • Persetujuan Dewan Komisaris lainnya The Secretary to the Board of Commissioners has prepared and provided information, data, reports, advice, and documents to be review materials for the Board of Commissioners and the Committee Board on the following activities: • Appointment of public accounting firms; • The 2023 Company Work Plan and Budget; • Approval of financing; • Approval of capital expenditures; • The 2023 financial statements; • Preparation of Top Sheet for the Board of Commissioners every two months and quarterly; • Determination of Honorarium and Allowances for Directors and Commissioners in 2023; • Appointment of the Corporate Secretary; • Appointment of the Head of SPI; • Approval of corporate actions; • Joint ratification by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the guidelines applicable to the Company; • Approval of Changes in the Organizational Structure; and • Other approvals by the Board of Commissioners.
Memastikan tersedianya informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ensuring the availability of information/ data for the needs of the Board of Commissioners, including information regarding regulations and provisions relevant to the Board of Commissioners' duties and responsibilities.	Sekretaris Dewan Komisaris memastikan Perusahaan mempersiapkan informasi untuk Dewan Komisaris, seperti: • Laporan Kinerja Perusahaan; • Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (SPI); • Laporan Manajemen per Triwulan; • Laporan Kinerja dan Perkembangan Anak Perusahaan; • Laporan Manajemen Risiko; • Pedoman/Piagam yang berlaku di Perusahaan; dan • Laporan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris. The Secretary to the Board of Commissioners ensures that the Company prepares information for the Board of Commissioners, such as: • Company Performance Report; • Internal Audit Unit (SPI) Activity Report; • Quarterly Management Reports; • Performance and Development Reports of Subsidiaries; • Risk Management Report; • Guidelines/Charters applicable to the Company; and • Other reports as needed by the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Realisasi 2023 2023 Realization
Memastikan penyelenggaraan rapat-rapat Komisaris, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin dengan berbagai pihak serta menyiapkan risalah rapat untuk disahkan pada rapat berikutnya. Ensuring the holding of Board of Commissioners meetings, both regular and non-regular, with various parties and preparing the minutes of meetings to be approved in the next meeting.	Dalam rapat Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris berperan dalam hal: • Berkoordinasi dengan pihak terkait perihal Agenda tanggal dan tempat pelaksanaan; • Mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum rapat berlangsung; • Memastikan kesiapan perlengkapan di *venue* rapat; • Melakukan pembuatan risalah rapat (bersinergi dengan pihak-pihak terkait); dan • Penyampaian risalah rapat kepada Dewan Komisaris dan perwakilan Direksi (Sekretaris Perusahaan). Adapun hal tersebut di atas dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris di setiap kegiatan Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Komite-komite Dewan Komisaris. In the Board of Commissioners meetings, the Secretary to the Board of Commissioners is involved in: • Coordinating with relevant parties regarding the agenda, date, and venue of the meeting; • Preparing necessary documents before the meeting; • Ensuring the readiness of equipment at the meeting venue; • Drafting meeting minutes (in synergy with relevant parties); and • Delivering meeting minutes to the Board of Commissioners and representatives of the Board of Directors (Corporate Secretary). The above-mentioned activities are carried out by the Secretary to the Board of Commissioners in every Internal Board of Commissioners Meeting, Coordination Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, and the Board of Commissioners Committee Meeting.
Melakukan pemantauan atas tindak lanjut keputusan yang telah diambil oleh Dewan Komisaris di dalam rapat. Monitoring the follow-ups of decisions made by the Board of Commissioners in meetings.	Selama tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah menyiapkan laporan pelaksanaan putusan rapat dan melakukan pemantauan serta koordinasi dengan pihak terkait atas tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan. Throughout 2023, the Secretary to the Board of Commissioners prepared reports of the implementation of meeting resolutions, monitored, and coordinated with relevant parties on the progress of implementing the resolution outcomes.
Melaporkan atas adanya keterlambatan tindak lanjut keputusan yang telah diambil oleh Dewan Komisaris di dalam rapat. Reporting the delay in following up on decisions made by the Board of Commissioners in meetings.	Sekretaris Dewan Komisaris melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi keterlambatan tindak lanjut keputusan Dewan Komisaris. The Secretary to the Board of Commissioners reports and coordinates with relevant parties in case of delays in implementing the resolutions of the Board of Commissioners.
Mengkorrdinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham; Bagian Dewan Komisaris Coordinating the preparation of advice and opinions regarding the agenda and materials of the General Meeting of Shareholders on the Board of Commissioners' part.	Sekretaris Dewan Komisaris mengakomodir kebutuhan data yang diperlukan Dewan Komite dalam menyusun materi yang akan dibacakan oleh Dewan Komsiaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. The Secretary to the Board of Commissioners accommodates the data required by the Committees of the Board of Commissioners in preparing materials to be presented by the Board of Commissioners at the General Meeting of Shareholders and coordinates with relevant parties.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	**Realisasi 2023** 2023 Realization
Memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan dan protokoler dalam lingkungan Dewan Komisaris baik untuk keperluan Komisaris dan Komite-Komitenya. Ensuring the implementation of secretarial and protocol activities in the scope of the Board of Commissioners, be it for the need of the Board of Commissioners or its Committees.	Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan seperti: • Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam struktur Dewan Komisaris sehingga koordinasi dan integrasi terwujud dengan baik; • Memantau, mengawasi, dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; • Terselenggaranya rapat Internal Dewan Komisaris; • Terselenggaranya rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi; • Terselenggaranya rapat Internal Komite Dewan Komisaris; • Menyiapkan dokumentasi pertemuan rutin kesekretariatan dan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dan Komite; • Memberikan dukungan kepada Komite dalam proses telaah Aksi Korporasi; • Memberikan dukungan kepada Komite dalam penyusunan Program Kerja Dewan Komisaris dan Anggaran Biaya Dewan Komisaris; • Mengkoordinasi kegiatan kesekretariatan Komite Dewan Komisaris • Terlaksananya Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dan Komite melalui Pelatihan dan seminar; • Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan kebutuhan Dewan Komisaris dan Komite; • Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, dan informasi kepada Dewan Komisaris dan Komite; • Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan. The Secretary of the Board of Commissioners has carried out secretarial activities such as: • Coordinating the implementation of activities within the Board of Commissioners structure to ensure good coordination and integration; • Monitoring, supervising, and evaluating the implementation of tasks within the Secretariat to assess task implementation progress; • Conducting Internal Board of Commissioners meetings; • Conducting Coordination meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors; • Conducting Internal Meetings of the Board of Commissioners Committees; • Preparing documentation for routine secretarial meetings and all activities of the Board of Commissioners and Committees; • Supporting Committees in the corporate action review process; • Supporting Committees in drafting the Board of Commissioners Work Program and Budget; • Coordinating secretarial activities of the Board of Commissioners Committees; • Ensuring competency development of the Board of Commissioners and Committees through training and seminars; • Administering and coordinating the procurement of the needs of the Board of Commissioners and Committees; • Coordinating and implementing the collection, processing, and presentation of data and information to the Board of Commissioners and Committees; • Coordinating and implementing archive management.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Realisasi 2023 2023 Realization
Melakukan kegiatan administratif dalam lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris dan Komite. Carrying out administrative activities within the work scope of the Board of Commissioners, be it for the need of the Board of Commissioners or its Committees.	Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan administratif seperti: • Administrasi pada kegiatan Dewan Komisaris; • Administrasi pada kegiatan Komite Audit dan Komite Kepatuhan; • Administrasi surat keluar dan atau masuk Dewan Komisaris; • Administrasi Dokumen Dewan Komisaris dan Komite; dan • Administrasi Dokumen Sekretaris Dewan Komisaris. The Secretary to the Board of Commissioners has performed administrative tasks such as: • Administration of the Board of Commissioners' activities; • Administration of the Audit Committee and Compliance Committee's activities; • Administration of incoming and outgoing letters of the Board of Commissioners; • Administration of Board of Commissioners and Committee documents; and • Administration of the documents of the Secretary to the Board of Commissioners.
Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Protecting the confidentiality of all classified documents.	Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan inventarisasi dokumen pada kabinet khusus, terkunci dan tertutup untuk dokumen milik Dewan Komisaris, dokumen Komite-Komite Dewan Komisaris, dan dokumen Perusahaan yang bersifat rahasia. The Secretary to the Board of Commissioners has conducted a document inventory in a special cabinet, locked and closed, for documents belonging to the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' Committees as well as confidential Company documents.
Pelaksanaan pedoman Sekretaris Dewan Komisaris. Implementing the guidelines of the Secretary to the Board of Commissioners.	Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti dan mengimplementasikan tugas Sekretaris Dewan Komisaris seperti yang tercantum pada Pedoman Sekretaris Dewan Komisaris yang disahkan pada tanggal 23 Agustus 2023. The Secretary to the Board of Commissioners has followed and implemented the duties of the Secretary to the Board of Commissioners as outlined in the Guidelines of the Secretary of the Board of Commissioners ratified on August 23, 2023.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dapat mengikuti program pengembangan (Pendidikan atau Pelatihan) setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

Competency Development of the Secretary to the Board of Commissioners

According to the policy of the Board of Commissioners, the Secretary to the Board of Commissioners may participate in development programs (education or training) at least once a year.

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Material	**Tempat/Tanggal** Place/Date	**Penyelenggara** Organizer
Pelatihan GRC Masterclass Program 2023 The 2023 GRC Masterclass Program	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	*Online*-Jakarta, 25 Oktober 2023 Online-Jakarta, October 25, 2023	Kementerian BUMN bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC) SOE Ministry, in cooperation with the International Finance Corporation
Sharing Session Digital Talent Series	Cyber Security Odyssey	*Online*-Jakarta, 17 Oktober 2023 Online-Jakarta, October 17, 2023	Human Capital Manajement PPRE Human Capital Management of PPRE
Sosialisasi Penerapan SMAP Dissemination of SMAP Implementation	Sosialisasi Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) SNI ISO 37002;2016 Dissemination of SMAP (Anti-Bribery Management System) SNI ISO 37002 : 2016	14 September 2023 September 14, 2023	Human Capital Manajement PPRE Human Capital Management of PPRE

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Corporate Secretary

Biro Corporate Secretary dibentuk sebagai organ pendukung Direksi untuk menjaga hubungan antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan melalui publikasi aktivitas Perusahaan, serta memelihara kewajaran, konsistensi, dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi.

Pedoman Biro Corporate Secretary

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Biro Corporate Secretary mengacu pada *key performance indicator* Biro Corporate Secretary, Pedoman GCG, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Penentuan Biro Corporate Secretary

Sesuai dengan *Board Manual* Direksi, persyaratan yang harus dipenuhi Kepala Biro Corporate Secretary selama menjabat, meliputi:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perusahaan;
3. Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
4. Dapat berkomunikasi dengan baik;
5. Berdomisili di Indonesia.

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Corporate Secretary

The Corporate Secretary Bureau was established as a supporting organ of the Board of Directors to maintain the relations between the Company and stakeholders by publishing Company activities and maintaining the fairness, consistency, and transparency of corporate governance matters and corporate actions.

Corporate Secretary Bureau's Guidelines

The implementation of the Corporate Secretary Bureau's duties and responsibilities refers to the Corporate Secretary Bureau's key performance indicators, GCG Guidelines, and the Regulation of the Financial Services Authority No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Corporate Secretary Bureau's Appointment Criteria

According to the Board Manual, the requirements that must be met by the Head of the Corporate Secretary Bureau in their term are:

1. Capable of taking legal actions;
2. Knowledgable and insightful in legal, financial, and corporate governance matters;
3. Understanding the Company's business activities;
4. Able to communicate well;
5. Domiciled in Indonesia.

Kepala Biro Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

The Head of the Corporate Secretary Bureau is appointed and dismissed through the decision of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Profil Kepala Biro Corporate Secretary

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Vice President Corporate Secretary, Dyah Novian Tri Hadini dipercaya untuk menjabat posisi Kepala Biro Corporate Secretary Perusahaan. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

Profile of the Head of the Corporate Secretary Bureau

According to the Decree of the Board of Directors No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 21, 2023, on the Appointment of Vice President Corporate Secretary, Dyah Novian Tri Hadini was entrusted as the Head of the Corporate Secretary Bureau of the Company. This appointment has been reported to the Financial Services Authority (OJK) through letter No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 21, 2023.

Dyah Novian Tri Hadini

Vice President, Corporate Secretary

Vice President, Corporate Secretary

Menjabat sejak 21 Agustus 2023
Serving since August 21, 2023

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 35 tahun
Kelahiran Magelang, 27 November 1988
Domisili Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Arsitek Institut Teknologi Bandung (2011)

Sertifikat Profesi
Tidak ada

Bergabung di Perusahaan
21 Agustus 2023 sebagai Vice President, Corporate Secretary

Riwayat Profesi
- Senior Manager Corporate & Digital Communication PT PP (Persero) Tbk (2020-2023)
- Project Manager PT PP Properti Tbk (2019-2020)
- Design Manager PT PP Properti Tbk (2017-2019)
- Site Engineering Manager PT PP Properti Tbk (2015-2017)
- Architect Engineer PT PP Properti Tbk (2012-2015)
- Architect Engineer/Business Development PT PP Properti Tbk (2012)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Personal Data
Indonesian Citizen
35 years old
Born in Magelang on November 27, 1988
Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Education
Bachelor of Architecture from Institut Teknologi Bandung (2011)

Professional Certification
None

Joined the Company
August 21, 2023, as a Vice President, Corporate Secretary

Professional History
- Corporate & Digital Communication Senior Manager at PT PP (Persero) Tbk (2020-2023)
- Project Manager at PT PP Properti Tbk (2019-2020)
- Design Manager at PT PP Properti Tbk (2017-2019)
- Site Engineering Manager at PT PP Properti Tbk (2015-2017)
- Architect Engineer at PT PP Properti Tbk (2012-2015)
- Architect Engineer/Business Development at PT PP Properti Tbk (2012)

Concurrent Position
In the Company: None
Outside the Company: None

Struktur Organisasi Biro Corporate Secretary

Struktur organisasi Biro Corporate Secretary ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 244/SK/PPRE/DIR/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan yang tergabung dalam Biro Corporate Secretary sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk GA dan VP Corporate Secretary.

Corporate Secretary Bureau's Organizational Structure

The organizational structure of the Corporate Secretary Bureau was established by the Board of Directors through Decree No. 244/SK/PPRE/DIR/VIII/2023 dated August 7, 2023, on the Change of the Company's Organizational Structure. As of December 31, 2023, there were ten employees in the Corporate Secretary Bureau, including the GC and VP Corporate Secretary.

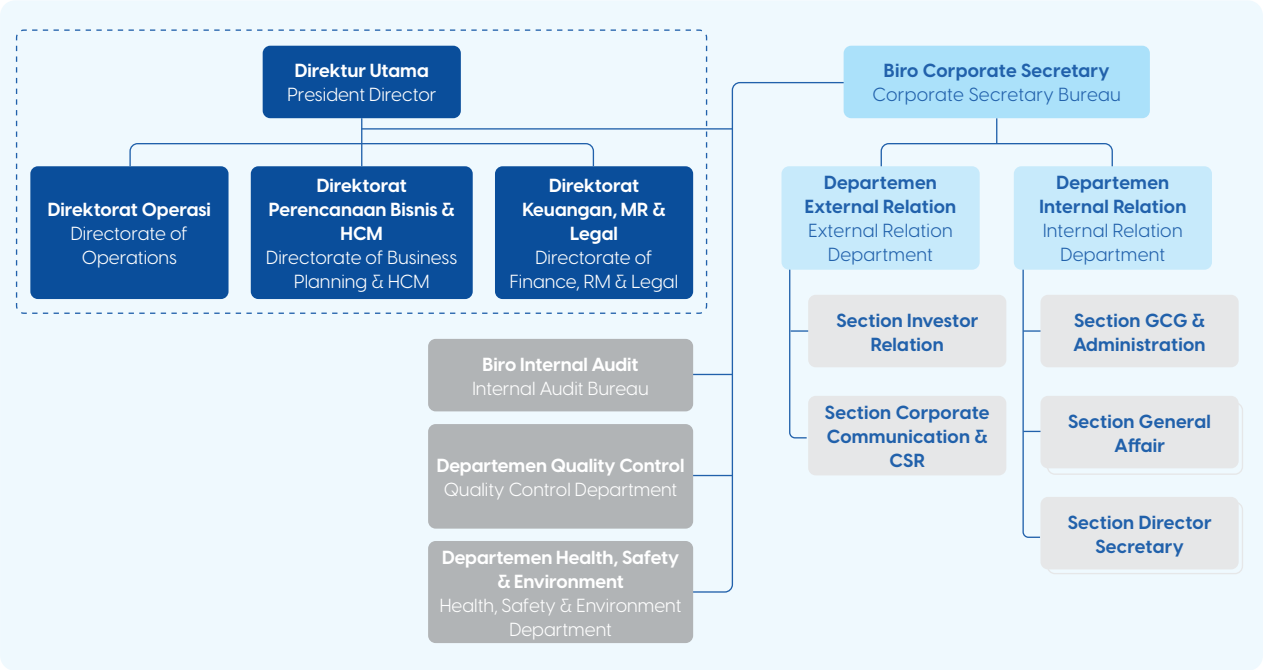

Sertifikasi Profesi Biro Corporate Secretary

Sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh karyawan Biro Corporate Secretary sebagai berikut.

Corporate Secretary Bureau's Professional Certification

Professional certifications owned by Corporate Secretary Bureau employees are as follows.

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certifying Institution
Caroline W. (Manager External Relation) (Manager External Relation)	Certified Investor Relations - Professional Education for Investor Relations by I2RI since 2003	Indonesia Investor Relations Institute
	Certificate Business Management Program - Financial Management	Prasetiya Mulya - Executive Learning Institute
	Certificate Business Management Program - General Business Management	Prasetiya Mulya - Executive Learning Institute

Tugas dan Tanggung Jawab serta Realisasi Biro Corporate Secretary

Tugas dan tanggung jawab Biro Corporate Secretary di tahun 2023 beserta realisasinya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Corporate Secretary Bureau's Duties, Responsibilities, and Their Implementation

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary Bureau in 2023 and their implementation are described in the following table.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization
Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Being up to date on capital market developments, especially on applicable capital market laws and regulations.	Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan menginformasikannya kepada manajemen. Being up to date on capital market developments, especially applicable capital market laws and regulations, and conveying them to the management.
Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Advising the Board of Directors to comply with capital market laws and regulations.	Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Masukkan tersebut mengenai keterbukaan informasi dan aksi korporasi. Advising the Board of Directors to comply with capital market laws and regulations. The advice was regarding information transparency and corporate actions.
Membantu Direksi dalam pelaksanaan GCG. Aiding the Board of Directors in implementing GCG.	• Melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan; • Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; • Menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa; • Menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan • Melaksanakan program orientasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi. • Implementing information transparency towards the public, including information availability on the Company's website; • Delivering reports to the Financial Services Authority on time; • Holding and documenting the Annual GMS and Extraordinary GMS; • Holding and Documenting Board of Commissioners and/or Board of Directors meetings; and • Carrying out orientation programs for the Board of Commissioners and/or Board of Directors.
Sebagai penghubung Perusahaan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Liaising the Company with Shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.	Memastikan kepentingan dari Pemegang Saham, regulator, Otoritas Jasa Keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya dapat tersampaikan kepada Direksi, dan sebaliknya. Ensuring that the interests of Shareholders, regulators, the Financial Services Authority, and other stakeholders are conveyed to the Board of Directors, and vice versa.
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Protecting the confidentiality of classified documents, data, and information, except to fulfill obligations according to laws and regulations or decided otherwise in laws and regulations.	Mengelola dokumen-dokumen Perusahaan dengan baik dan terstruktur. Managing Company documents properly and structurally.
Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perusahaan. Prohibited from directly or indirectly acquiring personal gain that causes a loss for the Company.	Biro Corporate Secretary tidak mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perusahaan. The Corporate Secretary Bureau does not directly or indirectly acquire personal gain that causes a loss for the Company.
Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Attend education and/or training.	Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan melalui seminar dan *workshop*. Implementing education and training programs through seminars and workshops.
Menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari perusahaan. Delivering information to the public, which is official information from the Company.	Informasi yang disampaikan kepada Masyarakat merupakan informasi resmi. The information delivered to the public is official.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization
Mengelola rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta mencatat agenda, risalah rapat, kebijakan, keputusan dan data-data yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Managing joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors and recording agendas, minutes of the meetings, policies, decisions, and data produced in the meetings.	Mendokumentasikan pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Documenting the joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.
Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum. Supporting the Board of Directors in generally resolving Company issues.	Menangani dan mengoordinasikan permasalahan secara umum. Generally handling and coordinating problem resolution.
Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG. Monitoring the implementation of applicable regulations while adhering to GCG principles.	Memastikan agar jalannya aplikasi peraturan yang berlaku tetap berpedoman pada prinsip GCG. Ensuring that the implementation of applicable regulations adheres to GCG principles.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan pemodal. Providing services to the public or stakeholders by providing the information required by investors.	Biro Corporate Secretary selalu memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, investor, analis, dan media agar tersampaikan informasi yang dibutuhkan pemodal. Media penyampaian informasi tersebut di antaranya melalui laporan tahunan, situs web perusahaan, media cetak, media sosial, paparan publik, dan siaran pers. The Corporate Secretary Bureau consistently serves the Shareholders, investors, analysts, and media to deliver the information required by investors. The media used in delivering the information includes annual reports, the Company's website, print media, social media, public expose, and press releases.

Korespondensi Biro Corporate Secretary

Di tahun 2023, Biro Corporate Secretary melakukan keterbukaan informasi yang telah disusun dan dilaporkan secara berkala kepada regulator serta pihak berkepentingan lainnya. Hal ini merupakan wujud kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut keterbukaan informasi kepada masyarakat di media massa, situs web Bursa Efek Indonesia, dan Sistem Pelaporan Emiten Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, yang telah dilakukan oleh Biro Corporate Secretary yang dilakukan di tahun 2023.

Corporate Secretary Bureau's Correspondence

In 2023, the Corporate Secretary Bureau implemented information transparency which has been prepared and reported periodically to regulators and other parties of interest. This is the embodiment of the Company's compliance with applicable laws and regulations.

Below is the information transparency towards the public on mass media, the Indonesia Stock Exchange website, and the Financial Services Authority's Issuer Reporting System that was implemented by the Corporate Secretary Bureau in 2023.

No Surat Letter No.	Tanggal Date	Tujuan Addressee	Perihal Subject
001/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2023	2 Januari 2023 January 2, 2023	OJK-IDX	Keterbukaan Informasi ke OJK-IDX tentang jangka waktu dan perubahan fasilitas kredit pada perbankan Information Transparency to OJK-IDX on period and changes of bank credit facility
002/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2023	4 Januari 2023 January 4, 2023	OJK-IDX	Permohonan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik kepada OJK Request for Information by Issuers and Public Companies to OJK
003/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2023	4 Januari 2023 January 4, 2023	OJK-IDX	Koreksi KI ke OJK - IDX tentang jangka waktu dan perubahan fasilitas kredit perbankan KI Correction to OJK-IDX on period and changes of credit facility at PT Bank BRI (Persero) Tbk
004/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2023	4 Januari 2023 January 4, 2023	OJK-IDX	Press Release: "PP Presisi Peroleh Kontrak Baru Rp99,6 miliar Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)" Press Release: "PP Presisi Acquired New Contract of Rp99.6 billion on the Logistical Port Construction Project Pack in the Development of the State Capital (IKN)"

No Surat Letter No.	Tanggal Date	Tujuan Addressee	Perihal Subject
005/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	5 Januari 2023 January 5, 2023	OJK-IDX	Laporan Daftar Pemegang Saham Desember 2022 Report of the December 2022 Shareholder List
006/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	9 Januari 2023 January 9, 2023	OJK-IDX	Surat Pemberitahuan Ke OJK Rencana RUPS Luar Biasa Information Letter to OJK regarding the Extraordinary GMS Plan
007/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	12 Januari 2023 January 12, 2023	OJK-IDX	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022 per 31 Desember 2023 Report of the Use of Proceeds from the Public Offering of Shelf Registration Bonds I Phase I of 2022 in December 31, 2023
008/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	17 Januari 2023 January 17, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Pengumuman RUPS Luar Biasa PPRE Announcement of the Extraordinary GMS of PPRE
009/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	20 Januari 2023 January 20, 2023	OJK-IDX	Bukti Iklan RUPS Luar Biasa PPRE Proof of Advertisement for PPRE Extraordinary GMS
010/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	24 Januari 2023 January 24, 2023	OJK-IDX	Laporan Informasi/Fakta Material Press Release "Dalam Rangka Bulan K3 Nasional, PPRE Sabet Penghargaan Di Proyek Weda Bay Nickel" Report of Material Information/Facts on Press Release "In The Event of National OHS Month, PPRE Achieves Awards in The Weda Bay Nickel Project"
011/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	31 Januari 2023 January 31, 2023	OJK-IDX	Permohonan Meeting kepada OJK Request for Meeting with the Financial Services Authority
012/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	31 Januari 2023 January 31, 2023	OJK-IDX	Permohonan Diskusi Terkait Pengalihan Saham Treasury PPRE Request for Discussion regarding the Transfer of PPRE Shares
013/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	1 Februari 2023 February 1, 2023	OJK-IDX	Publikasi Pemanggilan RUPS Luar Biasa PPRE Publication of Summons of the Extraordinary GMS of PPRE
014/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	1 Februari 2023 February 1, 2023	OJK-IDX	Pemanggilan RUPS Luar Biasa PPRE Extraordinary GMS of PPRE Summons
015/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/I/2023	1 Februari 2023 February 1, 2023	OJK-IDX	Bukti Pemanggilan RUPS Luar Biasa PPRE Proof of Extraordinary GMS of PPRE Summons
016/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/II/2023	13 Februari 2023 February 13, 2023	OJK-IDX	Daftar Pemegang Saham per Januari 2023 List of Shareholders in January 2023
017/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/II/2023	14 Februari 2023 February 14, 2023	OJK-IDX	Jawaban Permintaan Penjelasan IDX Response to the Request for IDX
018/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/II/2023	16 Februari 2023 February 16, 2023	OJK-IDX	Revisi DPS per Desember 2022 DPS Revision in December 2022
019/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/II/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023	OJK-IDX	Tanggapan Atas Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-198/ PM.21/2023 Response to the Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. S-198/PM.21/2023
020/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/II/2023	27 Februari 2023 February 27, 2023	OJK-IDX	Tanggapan Atas Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-293/ PM.21/2023) Response to the Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. S-293/PM.21/2023
021/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/II/2023	27 Februari 2023 February 27, 2023	OJK-IDX	Pelaporan Perubahan Pengurus Perusahaan Report of the Change in Company Management
022/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/II/2023	27 Februari 2023 February 27, 2023	OJK-IDX	Bukti Iklan Ringkasan RUPS Luar Biasa PPRE Proof of Advertisement of the Extraordinary GMS of PPRE Summary
023/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/II/2023	27 Februari 2023 February 27, 2023	OJK-IDX	Tanggapan Terhadap Surat OJK No. 5-293/PM.21.2023 Response to the Letter of OJK No. 5-293/PM.21.2023
024/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/III/2023	7 Maret 2023 March 7, 2023	OJK-IDX	Daftar Pemegang Saham per Februari 2023 List of Shareholders in February 2023
025/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/III/2023	8 Maret 2023 March 8, 2023	OJK-IDX	Bukti Iklan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 Proof of Financial Statement Advertisement on December 31, 2022
026/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/III/2023	8 Maret 2023 March 8, 2023	OJK-IDX	Laporan Keuangan Tahunan Audited 31 Desember 2022 Annual Audited Financial Statements per December 31, 2022
027/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/III/2023	9 Maret 2023 March 9, 2023	OJK-IDX	Revisi Laporan Keuangan Audited Tahunan 31 Desember 2022 Annual Audited Financial Statements Revision per December 31, 2022

No Surat Letter No.	**Tanggal** Date	**Tujuan** Addressee	**Perihal** Subject
030/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/III/2023	27 Maret 2023 March 27, 2023	OJK-IDX	Pemberitahuan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Announcement of the 2022 Annual GMS Agenda
031/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/III/2023	29 Maret 2023 March 29, 2023	OJK-IDX	Keterbukaan Informasi ke OJK tentang Corporate Secretary
032/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/IV/2023	3 April 2023 April 3, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 Submission of the Announcement Advertisement for the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) for Fiscal Year 2022
033/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/IV/2023	3 April 2023 April 3, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Submission of the Proof of Announcement Advertisement for the Annual GMS of for Fiscal Year 2022
034/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/IV/2023	10 April 2023 April 10, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Daftar Pemegang Saham per Maret 2023 Submission of Shareholder List on March 2023
035/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/IV/2023	18 April 2023 April 18, 2023	OJK-IDX	Perubahan Jadwal RUPS Tahunan Change of Annual GMS Schedule
036/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/IV/2023	28 April 2023 April 28, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Submission of Annual Report & Sustainability Report
037/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/IV/2023	2 Mei 2023 May 2, 2023	OJK-IDX	Publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Publication of Annual GMS Summons for Fiscal Year 2022
038/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/IV/2023	3 Mei 2023 May 3, 2023	OJK-IDX	Bukti Publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Proof of the Publication of Annual GMS Summons for Fiscal Year 2022
039/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/IV/2023	9 Mei 2023 May 9, 2023	OJK-IDX	Tanggapan Terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-764/ PM.21/2023 Response to the Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. S-764/PM.21/2023
040/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/V/2023	19 Mei 2023 May 19, 2023	OJK-IDX	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik tentang Pengurus Perusahaan Transparency regarding Information Requiring Public Knowledge on Company Management
041/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/V/2023	24 Mei 2023 May 24, 2023	OJK-IDX	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik tentang Internal Audit Transparency regarding Information Requiring Public Knowledge on Internal Audit
042/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/V/2023	26 Mei 2023 May 26, 2023	OJK-IDX	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year
043/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/V/2023	26 Mei 2023 May 26, 2023	OJK-IDX	Perubahan Pengurus Perusahaan berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Changes in Company Management based on the Results of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year
045/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VI/2023	8 Juni 2023 June 8, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Press Release PPRE "Penyelesaian Proyek Jalan Tol Cinere - Jagorawi Seksi III" Submission of the Press Release of PT PP Presisi Tbk "Completion of Section III Cinere - Jagorawi Toll Road Project"
046/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VI/2023	9 Juni 2023 June 9, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Daftar Pemegang Saham per Mei 2023 Submission of Shareholder List in May 2023
047/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VI/2023	13 Juni 2023 June 13, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Bukti Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Audited 2022 Submission of the Proof of Late Delivery of the 2022 Audited Consolidated Financial Statements
046A/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2023	31 Mei 2023 May 31, 2023	OJK-IDX	Tanggapan Atas Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan 2022 Response to the Review on the 2022 Annual Financial Statements
048/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VI/2023	14 Juni 2023 June 14, 2023	OJK-IDX	Perubahan Anggota Komite Audit Change of the Audit Committee Members
049/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VI/2023	30 Juni 2023 June 30, 2023	OJK-IDX	Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 Report of the Appointment of a Public Accountant Firm to Audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023

No Surat Letter No.	Tanggal Date	Tujuan Addressee	Perihal Subject
050/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VII/2023	10 Juli 2023 July 10, 2023	OJK-IDX	Laporan Pemegang Saham Bulan Juni 2023 Report of June 2023 Shareholders
051/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VII/2023	11 Juli 2023 July 11, 2023	OJK-IDX	Laporan Evaluasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik Evaluation Report on Public Accountant Firm Appointment
052/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VII/2023	13 Juli 2023 July 13, 2023	OJK-IDX	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022 per 31 Juni 2023 Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of Shelf Registration Bonds I Phase I of 2022 on June 31, 2023
053/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VII/2023	24 Juli 2023 July 24, 2023	OJK-IDX	Tanggapan Terhadap Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-1561/ PM.21/2023 Response to the Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. S-1561/PM.21/2023
054/EXT/CS/OJK-IDX/ PPRE/VII/2023	24 Juli 2023 July 24, 2023	OJK-IDX	Revisi Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan 1 Tahap 1 Report Revision on the Use of Proceeds from the Public Offering of Shelf Registration Bonds 1 Phase 1
055/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/VII/2023	28 Juli 2023 July 28, 2023	OJK-IDX	Laporan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Report on the Evaluation and Recommendation of Audit Committee on the Audit Service on Annual Historical Financial Information
056/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/VII/2023	9 Agustus 2023 August 9, 2023	OJK-IDX	Laporan Pemegang Saham Bulan Juli 2023 Report of July 2023 Shareholders
057/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/VIII/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	OJK-IDX	Keterbukaan Informasi tentang Pengangkatan VP Corporate Secrtary Information Transparency on the Appointment of VP Corporate Secretary
058/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/IX/2023	8 September 2023 September 8, 2023	OJK-IDX	Laporan *Press Release* - PPRE raih 2 Penghargaan sekaligus dalam Ajang Penghargaan Top GRC Awards 2023 Report of Press Release - PPRE Achieved Two Awards Simultaneously in the 2023 Top GRC Awards
059/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/IX/2023	8 September 2023 September 8, 2023	OJK-IDX	Laporan Daftar Pemegang Saham Agustus 2023 Report of August 2023 Shareholders
060/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/IX/2023	8 September 2023 September 8, 2023	OJK-IDX	Laporan *Press Release* - PPRE Raih 2 Penghargaan dalam Ajang TJSL & CSR Awards 2023 Report of Press Release - PPRE Achieved Two Awards in the 2023 TJSL & CSR Awards
061/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/X/2023	9 September 2023 September 9, 2023	OJK-IDX	Laporan Daftar Pemegang Saham (DPS) September 2023 Report of the September 2023 Shareholder List (DPS)
063/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/XI/2023	7 November 2023 November 7, 2023	OJK-IDX	*Press Release* "PPRE Raih Kontrak Baru Dengan Total Rp4,9 triliun Sampai Dengan September 2023" Press Release "PPRE Acquires New Contract Amounting to Rp4.9 trillion up to September 2023"
064/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/XI/2023	7 November 2023 November 7, 2023	OJK-IDX	Laporan Daftar Pemegang Saham Oktober 2023 Report of the October 2023 Shareholder List
065/EXT/CS/OJK/IDX/ PPRE/XI/2023	21 November 2023 November 21, 2023	OJK-IDX	*Press Release*: "PPRE Wujudkan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Berkelanjutan Melalui Program Urban Farming Food Estate Kota Depok" Press Release: "PPRE Actualizes Commitment to Sustainable Social and Environmental Responsibility through Depok Urban Farming Food Estate Program"

No Surat Letter No.	**Tanggal** Date	**Tujuan** Addressee	**Perihal** Subject
066/EXT/CS/OJK/IDX/PPRE/XI/2023	22 November 2023 November 22, 2023	OJK-IDX	Informasi Tambahan Penyelenggaraan *Virtual Public Expose* PPRE Tahun 2023 Additional Information on the 2023 Virtual Public Expose of PPRE
067/EXT/CS/OJK/IDX/PPRE/XII/2023	1 Desember 2023 December 1, 2023	OJK-IDX	Informasi Tambahan *Reschedule* Penyelenggaraan *Virtual Public Expose* PPRE Tahun 2023 Additional Information on the Rescheduling of the 2023 Virtual Public Expose of PPRE
068/EXT/CS/OJK/IDX/PPRE/XII/2023	11 Desember 2023 December 11, 2023	OJK-IDX	Risalah RUPST Tahun Buku 2022 Minutes of the AGMS for Fiscal Year 2022
070/EXT/CS/OJK/IDX/PPRE/XII/2023	13 Desember 2023 December 13, 2023	OJK-IDX	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (November 2023) Monthly Report of Securities Holder Registration (November 2023)
071/EXT/CS/OJK/IDX/PPRE/XII/2023	15 Desember 2023 December 15, 2023	OJK-IDX	Penyampaian Materi *Public Expose* Tahun 2023 Submission of the 2023 Public Expose Material
072/EXT/CS/OJK/IDX/PPRE/XII/2023	21 Desember 2023 December 21, 2023	OJK-IDX	Laporan Hasil *Public Expose* Tahunan PPRE Tahun 2023 Report on the Result of the 2023 Annual Public Expose of PPRE

Hubungan Investor

Perusahaan terus berupaya menjaga komunikasi dengan para Pemegang Saham, investor, analis, dan media untuk membangun dan mengembangkan kepercayaan publik, serta meningkatkan pemahaman tentang kegiatan bisnis Perusahaan. Komunikasi rutin juga diharapkan mampu memperkuat *goodwill* dan reputasi Perusahaan di kalangan investor, analis, serta media.

Di tahun 2023, kegiatan hubungan investor Perusahaan yang dilakukan dalam bentuk *daring* maupun *luring* dengan rincian sebagai berikut:

Investor Relations

The Company consistently strives to maintain communication with Shareholders, investors, analysts, and the media to build and develop public trust and improve the comprehension of the Company's business activities. Regular communication is also expected to strengthen the Company's goodwill and reputation among investors, analysts, and the media.

In 2023, the Company's investor relations activities were carried out virtually and offline as described by the following details:

Jenis Kegiatan Type of Activity	**Frekuensi** Frequency
Analyst Meeting	12
Company Update Presentation Material	4
Siaran *Press Release* | Press Release Broadcast	24
Newsletter	4
Public Expose	1

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Sebagai bentuk perwujudan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi, Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan untuk mengakses informasi dan data perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap melalui situs web www.pp-presisi.co.id. Selain sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, situs web ini juga merupakan upaya Perusahaan dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan dan transparansi kepada

Access to Company Information and Data

As an embodiment of transparency principles and compliance with laws and regulations regarding information transparency, the Company continuously facilitates access to its information and data in a timely, accurate, and comprehensive manner through the website www.pp-presisi.co.id. Besides functioning as a means of delivering information to the public, this website is also a form of the Company's effort to implement corporate governance and transparency towards all stakeholders.

seluruh pemangku kepentingan. Situs web tersebut memuat berbagai informasi mengenai profil perusahaan, unit bisnis, hubungan investor, GCG, tanggung jawab sosial perusahaan dan informasi lainnya. Di samping itu, Perusahaan menyediakan sarana penyampaian informasi dengan menghubungi kantor pusat Perusahaan secara langsung dan melalui media sosial Perusahaan dengan alamat sebagai berikut:

The website contains various information regarding the company profile, business units, investor relations, GCG, corporate social responsibility, and other information. Moreover, the Company provides an information delivery facility through direct contact with the Company's head office and social media with the following address:

Vice President Corporate Secretary - Dyah Novian Tri Hadini	
PT PP Presisi Tbk Plaza PP Wisma Robinson Lt. 1 Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760 T | +6221 841 4119 F | +6221 823 0353 E | corsec@pp-presisi.co.id W | www.pp-presisi.co.id	PT PP Presisi Tbk Plaza PP Wisma Robinson 1st Floor Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, East Jakarta, 13760 T | +6221 841 4119 F | +6221 823 0353 E | corsec@pp-presisi.co.id W | www.pp-presisi.co.id

1. **Laporan Tahunan**
   Perusahaan mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut dapat diakses melalui situs web Perusahaan dengan alamat www.pp-presisi.co.id. Selain itu, laporan tahunan juga tersedia dalam bentuk cetak.

2. **Situs Web Perusahaan dengan Alamat www.pp-presisi.co.id**
   Situs web berperan penting dalam tata kelola keterbukaan informasi. Di mana pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan. Situs web memungkinkan penyampaian informasi yang tidak terbatas dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah.

   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Perusahaan Publik, Perusahaan telah memiliki media untuk penyediaan informasi publik berupa situs web yang ditangani secara langsung oleh Biro Corporate Secretary dan Departemen IT. Dalam hal ini, situs web dapat diakses melalui laman www.pp-presisi.co.id yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

   Di samping itu, Perusahaan senantiasa memperbarui situs web secara berkala dalam rangka memberikan informasi terbaru terkait Perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, situs web Perusahaan juga menyediakan nomor kontak, alamat *e-mail*, dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

1. **Annual Report**
   The Company discloses financial information, important information, and other Company matters in annual reports and financial statements. These reports are accessible at the Company website at www.pp-presisi.co.id. Furthermore, the annual report is also available in printed form.

2. **Company Website at www.pp-presisi.co.id**

   Websites have an important role in information transparency governance, in which information disclosure and availability on the Company website will benefit the public and stakeholders. Websites allow unlimited information to be delivered rapidly, accurately, and inexpensively.

   According to the Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies, the Company has owned a means to provide public information in the form of a website directly handled by the Corporate Secretary Bureau and the IT Department. In this case, the website is accessible at www.pp-presisi.co.id in Indonesian and English.

   Moreover, the Company continues to update the website regularly to provide the latest Company information to stakeholders and to comply with applicable laws and regulations. Furthermore, the Company website also provides contact numbers, e-mail, and a postal address that are accessible for further communication with stakeholders.

3. Media Cetak

Perusahaan juga menyediakan sejumlah sarana komunikasi berbentuk media cetak, yaitu Buletin, *Newsletter*, Brosur, dan *Leaflet* (pada saat pameran).

3. Print Media

The Company also provides several means of communication in print media form, namely Bulletins, Newsletters, Brochures, and Leaflets (during exhibitions).

4. Paparan Publik

Perusahaan senantiasa melakukan paparan publik tahunan atau paparan publik kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum tentang aktivitas operasi dan proses usaha Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perusahaan memandang bahwa paparan publik yang dilakukan akan membantu Perusahaan dalam menyampaikan informasi yang lebih luas dan menjangkau khalayak lebih banyak. Untuk itu, Perusahaan melakukan pemaparan publik yang disajikan dalam bentuk presentasi kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang diundang.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah mengadakan paparan publik dengan rincian sebagai berikut.

4. Public Expose

The Company consistently holds annual public exposure or public expose for Shareholders, stakeholders, and the general public discussing the Company's operational activities and business process. Regarding this matter, the Company deems that the public expose will help the Company to deliver information with a greater range and reach more audiences. For this reason, the Company holds public expose in the form of presentations to Shareholders, stakeholders, and invited parties.

Per December 31, 2023, the Company has held public expose with the following details.

Waktu Pelaksanaan Event Time	Tempat Pelaksanaan Event Venue	Pihak yang Menghadiri Attending Parties
20 Desember 2023 December 20, 2023	Virtual Zoom Meeting Virtual Zoom Meeting	Seluruh Direksi PPRE All of PPRE's Board of Directors Members

5. Siaran Pers

Dalam rangka menyebarkan informasi terkait kegiatan, Perusahaan telah menerbitkan siaran pers sepanjang tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

5. Press Release

To disseminate information regarding activities, the Company has issued press releases throughout 2023 with the following details:

Tanggal Date	Judul Siaran Title of Press Release
4 Januari 2023 January 4, 2023	PP Presisi Peroleh Kontrak Baru Rp99,6 Miliar Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). PP Presisi Acquire New Contract of Rp99.6 Billion on the Logistical Port Construction Project Pack in the Development of the State Capital (IKN).
16 Januari 2023 January 16, 2023	Dalam Rangka Bulan K3 Nasional, PPRE Sabet Penghargaan di Proyek Weda Bay Nickel. In the Event of the National OHS Month, PPRE Achieves Awards in the Weda Bay Nickel Project.
24 Januari 2023 January 24, 2023	IDX: PPRE Raih Sejumlah Kontrak Baru dengan Total Rp5,245 Triliun Sepanjang 2022". IDX: PPRE Acquires Several New Contracts Amounting to Rp5.245 Trillion throughout 2022.
9 Februari 2023 February 9, 2023	PT PP Presisi Tbk Tuntaskan Pengangkatan Girder Pada Proyek Tol Cinere Jagorawi. PT PP Presisi Tbk Completes Girder Lifting at the Cinere Jagorawi Toll Road Project.
22 Februari 2023 February 22, 2023	Adakan RUPSLB, PT PP Presisi Tbk Umumkan Susunan Pengurus Perusahaan Terbaru. Holding Extraordinary GMS, PT PP Presisi Tbk Announces the Latest Composition of Company Management.
9 Maret 2023 March 9, 2023	Proyek Jalan Tol Cinere Jagorawi Milik PT PP Presisi Tbk Meraih Sertifikat Laik Operasi. The Cinere Jagorawi Toll Road Project of PT PP Presisi Tbk Achieve Certificate of Operation Worthiness.
9 Maret 2023 March 9, 2023	TOK! Laba Bersih Konsolidasian 2022 PP Presisi Meningkat 23,7% Menjadi Sebesar Rp182 miliar. BANG! PP Presisi's 2022 Consolidated Net Profit Increased by 23.7% to Rp182 billion.
5 Mei 2023 May 5, 2023	PT PP Presisi Tbk Umumkan Kinerja Positif pada Triwulan Pertama Tahun 2023 dengan Peningkatan Aset dan Laba. PT Presisi Tbk Announces Positive Performance in the First Quarter of 2023 with the Increase in Assets and Profit.

Tanggal Date	Judul Siaran Title of Press Release
24 Mei 2023 May 24, 2023	Pemegang Saham PPRE Setujui Perubahan Pengurus Perusahaan. PPRE's Shareholders Approve the Change of Company Management.
25 Mei 2023 May 25, 2023	PT PP Presisi Tbk Sukses Menyelenggarakan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka HUT Perusahaan ke-19. PT PP Presisi Tbk Successfully Holds Corporate Social Responsibility Activities in the Event of the Company's 19th Anniversary.
31 Mei 2023 May 31, 2023	PPRE Terus Fokuskan Ke Lini Bisnis Jasa Pertambangan Sebagai Kontraktor Tambang Nickel. PPRE Continues to Focus on Mining Services Business Line as a Nickel Mining Contractor.
7 Juni 2023 June 7, 2023	PT PP Presisi Tbk Perkuat Komitmen Pembangunan Nasional Lewat Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3. PT PP Presisi Tbk Strengthens National Construction Commitment through the Section 3 Cinere-Jagorawi Toll Road Project.
13 Juni 2023 June 13, 2023	Strategi Pemulihan Terbaik II: Anugerah BUMN 2023 untuk PT PP Presisi Tbk. Best Recovery Strategy II: 2023 Anugerah BUMN for PT PP Presisi Tbk.
4 Juli 2023 July 4, 2023	PT PP Presisi Tbk Wujudkan Komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Rencanakan CSR Berkelanjutan. PT PP Presisi Tbk Actualizes Social Responsibility Commitment and Plans Sustainable CSR.
18 Juli 2023 July 18, 2023	PT PP Presisi Tbk Menyambungkan Indonesia: Jembatan Makarti, Solusi Logistik Industri Pertambangan. PT PP Presisi Tbk Connects Indonesia: Makarti Bridge, the Solution for Mining Industry Logistics
16 Agustus 2023 August 16, 2023	Kunjungan Strategis PT Kompas Media Group ke Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3: Sinergi Membangun, Dedikasi Tinggi Menciptakan Konektivitas. Strategic Visit of PT Kompas Media Group to the Section 3 Cinere-Jagorawi Toll Road Project: Synergy to Build, High Dedication to Create Connectivity.
18 Agustus 2023 August 18, 2023	PP Presisi Melakukan Uji Laik Fungsi Proyek Jalan Tol Cinere Jagorawi (Cijago). PP Presisi Holds Function Eligibility Test on Cinere Jagorawi (Cijago) Toll Road Project.
18 Agustus 2023 August 18, 2023	PT PP Presisi Tbk Selesaikan Proyek Main Hauling Road Milik PT Hengjaya Mineralindo: Langkah Maju Infrastruktur Pertambangan. PT PP Presisi Tbk Completes the Main Hauling Road Project of PT Hengjaya Mineralindo: Advancement of Mining Infrastructures.
7 September 2023 September 7, 2023	PP Presisi raih 2 Penghargaan sekaligus Dalam Ajang Penghargaan Top GRC Awards 2023. PP Presisi Achieves Two Awards Simultaneously in the 2023 Top GRC Awards.
8 September 2023 September 8, 2023	PP Presisi Raih 2 Penghargaan Dalam Ajang TJSL & CSR Awards 2023. PP Presisi Achieves Two Awards in the 2023 TJSL & CSR Awards.
31 Oktober 2023 October 31, 2023	PP Presisi Raih Kontrak Baru Dengan Total Rp4,9 triliun Sampai Dengan September 2023. PP Presisi Acquires New Contract Amounting to Rp4.9 trillion per September 2023.
20 November 2023 November 20, 2023	PP Presisi Wujudkan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Berkelanjutan Melalui Program Urban Farming Food Estate Kota Depok. PP Presisi Actualizes Commitment to Sustainable Social and Environmental Responsibility through Depok Urban Farming Food Estate Program.
20 Desember 2023 December 20, 2023	PP Presisi Genjot Revenue Melalui Bisnis Jasa Pertambangan. PP Presisi Boosted Revenue through Mining Services Business.

Pengembangan Kompetensi Biro Corporate Secretary

Di sepanjang tahun 2023, Biro Corporate Secretary tidak mengikuti program pendidikan dan pelatihan.

Penilaian Kinerja Biro Corporate Secretary

Penilaian atas kinerja Biro Corporate Secretary dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* Korporat. Penilaian terhadap kinerja Biro Corporate Secretary dilakukan melalui aspek penilaian sebagai berikut.

1. *Financial*:
   a. Efektivitas program CSR.
2. *Costumer*:
   a. Tingkat kepuasan unit internal terkait.
   b. Tingkat kepuasan eksternal terhadap Biro Corporate Secretary.
   c. Skor *Brand Awareness*.

Corporate Secretary Bureau's Competency Development

Throughout 2023, the Corporate Secretary Bureau did not attend any education and training programs.

Corporate Secretary Bureau's Performance Assessment

Assessment of the Corporate Secretary Bureau's performance is carried out by the Board of Directors according to the procedures and criteria set in the Corporate Key Performance Indicator. The assessment of the Corporate Secretary Bureau's performance uses the following assessment aspects:

1. Financial:
   a. Effectiveness of CSR programs.
2. Customer:
   a. Satisfaction level of relevant internal units.
   b. External satisfaction level towards the Corporate Secretary Bureau.
   c. Brand Awareness Score.

3. *Internal Process Business*:
   a. Tingkat keberhasilan RUPS.
   b. Tingkat pelaksanaan rapat Direksi.
   c. Peningkatan citra perusahaan melalui *press release*.
   d. Peningkatan citra perusahaan melalui hubungan dengan investor.
   e. Tingkat pelaporan perusahaan ke pasar modal.
4. *Learning and Growth*:
   a. Jumlah temuan berdasarkan hasil audit GCG (*area of improvement*) yang ditindaklanjuti.
   b. Skor implementasi GCG.
   c. *Human resource readiness*.

Hasil penilaian di tahun 2023 menunjukkan skor sebesar 2,95 dari skor maksimum 4,00 dengan kriteria berikut:

3. Internal Process Business:
   a. GMS success rate.
   b. Board of Directors meeting implementation rate.
   c. Company reputation growth through press release.
   d. Company reputation growth through investor relations.
   e. Company reporting rate to the capital market.
4. Learning and Growth:
   a. Number of findings based on followed-up GCG audit results (area of improvement).
   b. GCG implementation score.
   c. Human resources readiness.

The assessment results in 2023 show a score of 2.95 out of a maximum score of 4.00 with the following criteria:

No	KPI	Tipe Evidence Evidence Type	Target 2023 (Sesuai RKAPK) Target 2023 (According to RKAPK)			Type YTD	Status	Nilai Value
			FINAL	Real FINAL	Pencapaian Achievement			
1.	Learning & Growth - Improve Talent and Organization Management **HC Readiness 2023** Persentase ketersediaan suksesor talent dengan kategori Qualified (Ready) untuk level jabatan BOD-1 dan BOD-2 AP Percentage of availability of talent successors with the Qualified (Ready) category for BOD-1 and BOD-2 AP position levels	Laporan hasil *assessment* HR Readiness HR Readiness assessment report	25	10	40%	Last Value	Disetujui Approved	0.05
2.	Learning & Growth - Improve Company Governance **Penerapan GCG 2023 (AP)** Skor GCG berdasarkan assessment tahun 2022 yang dilakukan di Triwulan 1 tahun 2023 **GCG 2023 Implementation (AP)** GCG score based on 2022 assessment conducted in Quarter 1 of 2023	Laporan Unit Unit Report	90.01	86,84	96,48%	Last Value	Disetujui Approved	0,20
3.	Financial - Increase Profitability **Efektifitas program CSR (*standalone*)** Jumlah dana tersalurkan/jumlah dana tersedia dalam tahun berjalan **Effectiveness of CSR programs (standalone)** Amount of funds disbursed/amount of funds available in the current year	Laporan Unit Unit Report	100	100	100%	Last Value	Disetujui Approved	0,40
4.	Customer - Increase Stakeholder Satisfaction **Tingkat Kepuasan Unit Internal** Survey Kepuasan Pelanggan Internal (Menyebarkan Kuesioner Kepada Pihak Internal) **Internal Unit Satisfaction Level** Internal Customer Satisfaction Survey (distributing questionnaires to internal parties)	Laporan Unit Unit Report	90	108	120%	Average	Disetujui Approved	0,30

No	KPI	Tipe Evidence Evidence Type	Target 2023 (Sesuai RKAPK) Target 2023 (According to RKAPK)			Type YTD	Status	Nilai Value
			FINAL	Real FINAL	Pencapaian Achievement			
5.	Customer - Increase Stakeholder Satisfaction **Tingkat kepuasan eksternal terhadap Biro Sekper (*standalone*)** Survey kepuasan pelanggan eksternal (Investor, Analyst, Media) dari populasi media dan analis sesuai dengan data base PP Presisi **Level of external satisfaction with the Sekper Bureau (standalone)** External customer satisfaction survey (Investor, Analyst, Media) from the media population and analysts in accordance with PP Presisi data base	Laporan Unit Unit Report	90	112,75	125,28%	Average	Disetujui Approved	0,30
6.	Customer - Increase Stakeholder Satisfaction **Skor brand awareness (*standalone*)** Berdasarkan hasil survey populasi pertriwulan (menyebarkan kuesioner kepada pihak eksternal) **Brand awareness score (standalone)** Based on the results of quarterly population surveys (distributing questionnaires to external parties)	Laporan Unit Unit Report	85	53	62,35%	Last Value	Disetujui Approved	0,10
7.	Internal Business Process - Improve Supporting Operational Process **Tingkat Keberhasilan RUPS (*standalone*)** Kehadiran pemegang saham/Kehadiran mencapai kuorum sesuai ketentuan OJK (sesuai dengan yang disahkan oleh Notaris) **GMS Success Rate (standalone)** Attendance of shareholders/Attendance reaches quorum in accordance with OJK provisions (as authorized by a Notary)	Laporan Unit Unit Report	85	85,4	100,47%	Last Value	Disetujui Approved	0,23
8.	Internal Business Process - Improve Supporting Operational Process **Tingkat Pelaksanaan Rapat Direksi (*standalone*)** Jumlah pelaksanaan rapat & komunikasi internal (Rapat Direksi)/Jumlah rencana pelaksanaan sesuai RKA **Level of Implementation of Board of Directors Meeting (standalone)** Number of meetings & internal communication (Board of Directors Meeting)/Number of implementation plans according to RKA	Laporan Unit Unit Report	40	283,4	708,5%	Accumulated	Disetujui Approved	0,40

No	KPI	Tipe Evidence Evidence Type	Target 2023 (Sesuai RKAPK) Target 2023 (According to RKAPK)			Type YTD	Status	Nilai Value
			FINAL	Real FINAL	Pencapaian Achievement			
9.	Internal Business Process - Improve Supporting Operational Process **Peningkatan Citra Perusahaan melalui press release (*standalone*)** Jumlah pemberitaan positif terhadap total pemberitaan pertriwulanan **Improving Corporate Image through press release (standalone)** Number of positive news to quarterly news totals	Laporan Unit Unit Report	60	411	685%	Accumulated	Disetujui Approved	0,30
10.	Internal Business Process - Improve Supporting Operational Process **Peningkatan Citra Perusahaan melalui hubungan dengan investor (*standalone*)** Jumlah rata-rata peningkatan DPS setiap akhir triwulan **Improving Corporate Image through investor relations (standalone)** Average number of DPS increases at the end of each quarter	Laporan Unit Unit Report	25	0,37	1,46%	Average	Disetujui Approved	0,08
11.	Internal Business Process - Improve Supporting Operational Process **Tingkat Pelaporan Perusahaan ke Pasar Modal (*standalone*)** Jumlah laporan rutin & non rutin yang memenuhi ketentuan/Total jumlah laporan rutin **Level of Corporate Reporting to Capital Market (standalone)** Number of routine & non-routine reports that meet the conditions/Total number of routine reports	Laporan Unit Unit Report	32	982,8	3071,25%	Accumulated	Disetujui Approved	0,30
12.	Learning & Growth - Improve Company Governance **Jumlah Temuan Berdasarkan Hasil Audit GCG (*Area of Improvement*) yang ditindaklanjuti** Jumlah temuan berdasarkan hasil audii GCG yang ditIndaklanjuti/ Total Jumlah Temuan **Number of Findings Based on GCG (Area of Improvement) Audit Results that are followed up** Number of findings based on GCG results followed up/Total Number of Findings	Laporan Unit Unit Report	100	100	100%	Last Value	Disetujui Approved	0,30
Total Nilai Total Value								29,50
Skor Final Final Score								2,95

Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Internal Audit

Biro Internal Audit dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan, kajian serta usulan perbaikan untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Pedoman Biro Internal Audit

Biro Internal Audit memiliki Piagam Kerja Biro Internal Audit yang telah dimutakhirkan pada 6 Januari 2023 dan telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Persyaratan Profesional Biro Internal Audit

Auditor Biro Internal Audit harus memiliki integritas dan perilaku yang profesional, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya, independen, memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup, serta sesuai *job requirement* yang ditetapkan, antara lain:

1. Kepala Biro Internal Audit memiliki tingkat Pendidikan minimal Strata 1 (S1) baik jurusan teknik ataupun keuangan, mempunyai pengalaman minimal sebagai *Project Manager*, Manajer Pengembangan Sistem, Kepala Bagian Teknik, atau Kepala Bagian Keuangan;
2. Internal Auditor bidang operasional memiliki pendidikan minimal S1 jurusan teknik, mempunyai pengalaman di bidang pengendalian operasi minimal setingkat *Site Engineering Manager*;
3. Internal Auditor bidang keuangan memiliki pendidikan minimal S1 jurusan Akuntansi atau Keuangan minimal setingkat *Site* Administrasi *Manager*;
4. Internal Auditor bidang GCG memiliki pendidikan minimal S1 jurusan Teknik atau Non Teknik minimal setingkat *Site* Administrasi *Manager atau Site Engineering Manager*;
5. Memiliki pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
7. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
8. Memahami prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko;
9. Kepala Biro Internal Audit dan Auditor Biro Internal Audit wajib mendapatkan sertifikasi dengan mengikuti pendidikan dari lembaga pendidikan Internal Auditor;
10. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus;
11. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Biro Internal Audit segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Internal Audit Unit

The Internal Audit Bureau was established to aid the Board of Directors in evaluating the effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance processes by examining, reviewing, and suggesting improvements to secure the Company's investment and assets.

Internal Audit Bureau's Guidelines

The Internal Audit Bureau has an Internal Audit Charter that was updated on January 6, 2023, and signed by the Board of Commissioners and Board of Directors.

Internal Audit Bureau's Professional Requirement

Auditors of the Internal Audit Bureau must maintain their integrity and act professionally, honestly, and objectively in the implementation of their duties, be independent, sufficiently competent and experienced, and adhere to the job requirement that has been set, as described below:

1. The Head of the Internal Audit Bureau's education level is at least at the Bachelor's level, majoring in either engineering or finance, experienced at least as a Project Manager, System Development Manager, Head of the Engineering Section, or Head of the Finance Section;
2. The Internal Auditor of operations holds at least a Bachelor's degree in engineering, experienced in operational control at least equivalent to the Site Engineering Manager;
3. The Internal Auditor of finance holds at least a Bachelor's degree in accounting or finance at least equivalent to Site Administration Manager;
4. The Internal Auditor for GCG must have at the minimum a Bachelor's degree in Engineering or Non-Engineering, at least equivalent to Site Administration Manager or Site Engineering Manager level;
5. Knowledgeable about audit methods and other fields of science relevant to their area of duties;
6. Knowledgeable about laws and regulations in the capital market as well as other relevant laws and regulations;
7. Capable of effectively interacting and communicating orally and in writing;
8. Understand the principles of GCG and risk management;
9. The Head and Auditors of the Internal Audit Bureau must be certified through education programs from Internal Auditor educational institutions;
10. Willing to improve their professional knowledge, skills, and capabilities continuously;
11. Every appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Bureau must be reported immediately to the Financial Services Authority;

12. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugas.

Profil Vice President Internal Auditor

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawas Internal, Wismo Suwego dipercaya untuk menjabat posisi Kepala Biro Internal Audit Perusahaan. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Keterbukaan Informasi No. 041/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2023, tanggal 24 Mei 2023.

12. Have integrity and act professionally, independently, honestly, and objectively in carrying out their duties.

Profile of the Vice President Internal Auditor

According to the Decree of the Board of Directors No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 dated Mei 22, 2023, on the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit, Wismo Suwego was entrusted as the Head of the Internal Audit Bureau of the Company. This appointment has been reported to OJK through Letter of Information Transparency No. 041/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2023 dated May 24, 2023.

Wismo Suwego

Vice President Internal Auditor
Vice President Internal Auditor

Menjabat sejak 22 Mei 2023
Serving since May 22, 2023

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 37 tahun
Kelahiran Semarang, 22 November 1986
Domisili Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Borobudur, Jakarta (2011)

Sertifikat Profesi
Certified Qualified Internal Audit (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019).

Bergabung di Perusahaan
Sejak tanggal 22 Mei 2023 sebagai Vice President Internal Auditor

Riwayat Profesi
- Senior Operasional Auditor PT PP (Persero) Tbk (2023)
- Operational Auditor PT PP (Persero) Tbk (2022-2023)
- Junior Operational Auditor PT PP (Persero) Tbk (2017-2020)
- Site Engineering Manager Cabang IV - DVO 2 PT PP (Persero) Tbk (2015-2017)
- Site Engineering Cabang IV - DVO 2 PT PP (Persero) Tbk (2011-2015)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada.
Di luar Perusahaan: Tidak ada.

Personal Data
Indonesian Citizen
37 years old
Born in Semarang on November 22, 1986
Domiciled in East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Education
Bachelor of Civil Engineering, Universitas Borobudur, Jakarta (2011)

Professional Certification
Certified Qualified Internal Audit (QIA) from Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019).

Joined the Company
Joined the Company on May 22, 2023 as Vice President Internal Auditor

Professional History
- Senior Operasional Auditor PT PP (Persero) Tbk (2023)
- Operational Auditor PT PP (Persero) Tbk (2022-2023)
- Junior Operational Auditor PT PP (Persero) Tbk (2017-2020)
- Site Engineering Manager PT PP (Persero) Tbk (2015-2017)
- Site Engineering PT PP (Persero) Tbk (2011-2015)

Concurrent Position
In the Company: None.
Outside the Company: None.

Struktur dan Kedudukan Biro Internal Audit

Biro Internal Audit dipimpin oleh seorang Vice President Internal Auditor yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama juga dapat memberhentikan Vice President Internal Auditor atas persetujuan Dewan Komisaris, jika Vice President Internal Auditor tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Biro Internal Audit sebagaimana diatur

Internal Audit Bureau's Structure and Position

The Internal Audit Bureau is led by a Vice President Internal Auditor appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The President Director may also dismiss the Vice President Internal Auditor with the approval of the Board of Commissioners if the Vice President Internal Auditor does not meet the requirements of an Auditor of the Internal

dalam Piagam Kerja Biro Internal Audit dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. Vice President Internal Auditor bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sedangkan, Auditor duduk dalam Biro Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Vice President Internal Auditor.

Biro Internal Audit minimal terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Vice President Internal Auditor, 1 (satu) orang auditor internal bidang operasional, dan 1 (satu) orang auditor internal bidang keuangan dan asesor GCG.

Susunan Tim Pemeriksa setiap objek, terdiri dari Ketua Tim dan anggota penanggung jawab pemeriksaan dirangkap oleh Vice President Internal Auditor. Kedudukan Biro Internal Audit dalam struktur organisasi harus setara dengan peran dan tanggung jawab dalam pengungkapan pandangan dan pemikiran dari hasil evaluasi yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan manajemen dan pihak lain.

Adapun struktur organisasi Biro Internal Audit ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 244/SK/PPRE/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan.

Audit Bureau as regulated in the Internal Audit Bureau Charter and/or fails or is incapable of performing their duties. The Vice President Internal Auditor is responsible to the President Director. Meanwhile, Auditors in the Internal Audit Bureau are directly responsible to the Vice President Internal Auditor.

The Internal Audit Bureau consists of at least one person acting as the Vice President Internal Auditor, one internal auditor for operations, and one internal auditor for finance and GCG assessor.

The composition of the Audit Team of each object consists of a Team Leader and members in charge of the audit, held concurrently by the Vice President Internal Auditor. The position of the Internal Audit Bureau in the organizational structure must be equivalent to its role and responsibilities in disclosing perspectives and insights from evaluations that cannot be affected or pressed by the management and other parties.

The organizational structure of the Internal Audit Bureau was established according to the Decree of the Board of Directors No. 244/SK/PPRE/VIII/2023 dated August 7, 2023, on the Changes in the Company's Organizational Structure.

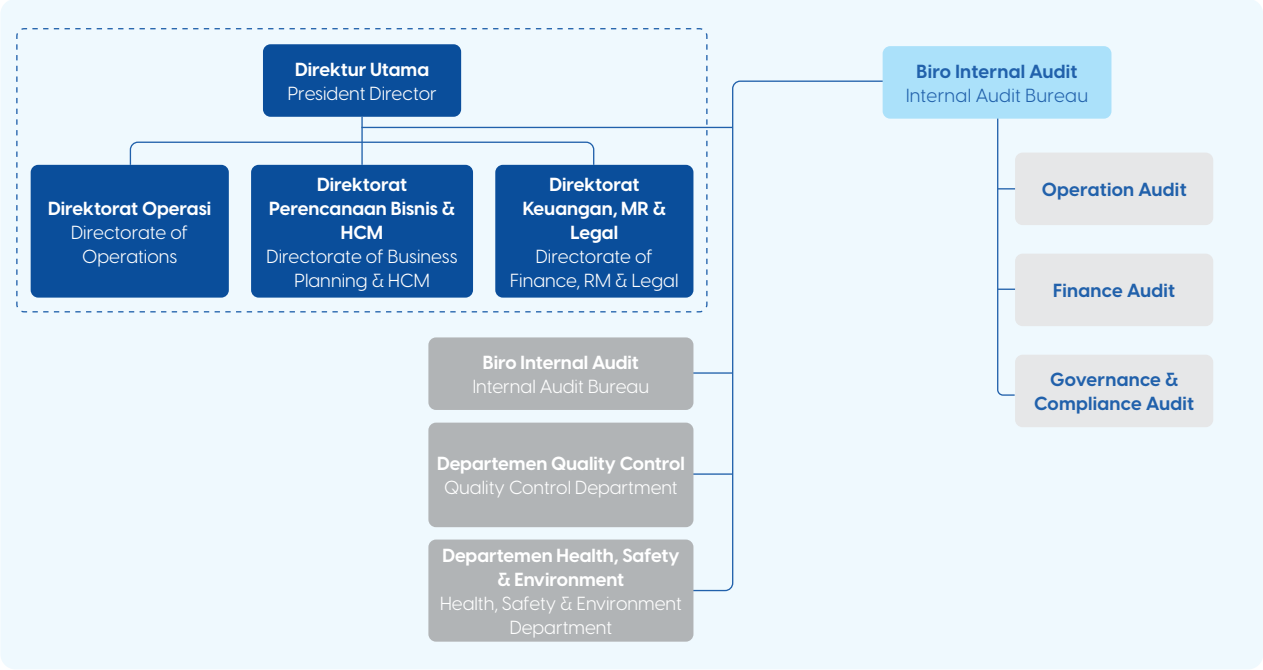

Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan yang tergabung dalam Biro Internal Audit sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut.

On December 31, 2023, the number of employees in the Internal Audit Bureau was three employees with the following details.

Nama Name	Jabatan Position
Wismo Suwego	Vice President, Internal Audit Vice President, Internal Audit
Erwin Simon Siregar	Auditor Internal Bidang Keuangan Internal Auditor for Finance
Enggartiasto Dwi Prakoso	Auditor Internal Bidang Operasional dan Asesor GCG Internal Auditor for Operations and GCG Assessor

Sertifikasi Profesi Biro Internal Audit

Pelaksanaan fungsi audit internal di Perusahaan mengacu pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari The Institute of Internal Auditors. Adapun sertifikasi profesi yang dimiliki Kepala Biro Internal Audit dan auditor sebagai berikut.

Internal Audit Bureau's Professional Certification

The implementation of internal audit functions in the Company refers to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors. The professional certifications owned by the Head of the Internal Audit Bureau and auditors are as follows.

Nama Name	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certifying Institution
Wismo Suwego (Vice President, Internal Audit) (Vice President, Internal Audit)	Certified Qualified Internal Audit (QIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Educational Foundation (YPIA)

Visi dan Misi Biro Internal Audit

Visi

Menjadi mitra strategis yang profesional, independen, objektif dan memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam pencapaian visi dan misi perusahaan.

Misi

1. Meningkatkan dan melindungi nilai perusahaan dengan memberikan *assurance*, saran dan wawasan berbasis risiko yang objektif.
2. Melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses GCG.
3. Mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001:2016.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga menjadi auditor internal yang profesional, integritas, objektif, kerahasiaan dan kompetensi.

Kode Etik Biro Internal Audit

Untuk menerapkan budaya Etik dalam profesi Internal Audit, Auditor Internal PT PP Presisi Tbk mengacu pada Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal atau Kode Etik Audit Internal yang berlaku secara Internasional, yang meliputi prinsip-prinsip perilaku dan aturan perilaku yang mengatur integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi:

1. Integritas
   Auditor Internal memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk penilaian (*Judgement*) yang handal. Aturan Perilaku:
   a. Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab;
   b. Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur oleh hukum dan profesi;
   c. Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi Auditor Internal atau Perusahaan;
   d. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan Perusahaan yang etis dan telah sesuai dengan hukum.
2. Objektivitas
   Auditor Internal menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar dalam mengumpulkan,

Internal Audit Bureau's Vision and Mission

Vision

Becoming a professional, independent, objective, and value-adding strategic partner for the management in achieving the company's vision and mission.

Mission

1. Enhancing and safeguarding the company's value by providing objective risk-based assurance, advice, and insights.
2. Conducting systematic evaluations to enhance the effectiveness of internal control implementation, risk management, and GCG processes.
3. Supporting the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) following ISO 37001:2016.
4. Improving human resource capabilities to become professional, integrity-driven, objective, confidential, and competent internal auditors.

Code of Conduct of the Internal Audit Bureau

To instill an ethical culture in the Internal Audit profession, the Internal Auditors of PT PP Presisi Tbk adhere to the Code of Conduct established by the Internal Audit Association or the International Code of Conduct for Internal Auditors, encompassing principles of behavior and conduct governing integrity, objectivity, confidentiality, and competence:

1. Integrity
   Internal Auditors uphold integrity by building trust, which forms the basis for reliable judgments. Code of Conduct:
   a. Work honestly, diligently, and responsibly;
   b. Comply with the law and disclose information as required by law and profession;
   c. Avoid involvement in illegal activities or any activity that tarnishes the reputation of the Internal Auditor profession or the Company;
   d. Respect and contribute to the ethical achievement of the Company's goals under the law.
2. Objectivity
   Internal Auditors demonstrate high objectivity according to the standards in collecting, evaluating,

mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor Internal melakukan penilaian secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat pendapat (*judgement*). Aturan Perilaku:

a. Tidak terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengurangi atau dianggap mengurangi objektivitas Auditor Internal dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
b. Tidak menerima apa pun yang dapat melemahkan atau dianggap melemahkan pertimbangan profesional;
c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diaudit.

3. Kerahasiaan
Auditor Intemal menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut. Aturan Perilaku:
a. Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat melaksanakan tugas;
b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian sasaran Perusahaan yang etis dan legitimasi.

4. Kompetensi
Auditor Internal menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aturan Perilaku:
a. Hanya terlibat dalam audit apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam audit tersebut;
b. Melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan standar praktik profesional Internal audit;
c. Senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa yang diberikan.

and communicating information about audited activities or processes. They make balanced assessments, considering all relevant circumstances, uninfluenced by personal or other interests in forming judgments. Code of Conduct:

a. Avoid involvement in the Company's operational activities that may reduce or be perceived to reduce the objectivity of Internal Auditors in assessing, including activities or relationships that may pose conflicts of interest;
b. Do not accept anything that may weaken or be perceived to weaken professional judgment;
c. Disclose all material facts known, which, if not disclosed, could distort the reporting of audited activities.

3. Confidentiality
Internal Auditors respect the value and ownership of received information and do not disclose it without the approval of authorized personnel unless there is a legal or professional obligation to do so. Code of Conduct:
a. Act cautiously in using and safeguarding information obtained during tasks;
b. Do not use information for personal gain or in any way contrary to the law or that disrupts the ethical and legitimate achievement of Company objectives.

4. Competence
Internal Auditors utilize the necessary knowledge, skills, and experience to perform audit tasks. Code of Conduct:
a. Only engage in audits when possessing the necessary knowledge, skills, and experience for that audit;
b. Perform Internal Audit oversight functions according to internal audit professional practice standards;
c. Continuously enhance skills, effectiveness, and quality of provided services.

Independensi Biro Internal Audit

Perusahaan menjamin independensi Biro Internal Audit dengan memastikan seluruh kegiatan operasional telah dikendalikan dan dikelola dengan efektif, transparan dan objektif sesuai dengan pengetahuan serta keterampilan auditor dalam menjalankan tugas. Melalui independensi Biro Internal Audit, Perusahaan berharap dapat meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan.

Internal Audit Bureau's Independence

The Company guarantees the independence of the Internal Audit Bureau by ensuring that all operational activities have been effectively, transparently, and objectively controlled and managed according to the auditors' knowledge and expertise in carrying out their duties. Through the independence of the Internal Audit Bureau, the Company expects to increase the Company's value and improve its operations.

Tugas dan Tanggung Jawab serta Realisasi Biro Internal Audit

Berdasarkan Piagam Kerja Biro Internal Audit, tugas dan tanggung jawab utama Biro Internal Audit adalah membantu Direktur Utama dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah pemeriksaan internal bidang operasional dan keuangan untuk memastikan bahwa peraturan perusahaan serta pengelolaan proyek berjalan sesuai dengan harapan Perusahaan. Pemeriksaan audit internal secara berkala sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan atau (Program Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan). Adapun tugas dan tanggung jawab Biro Internal Audit secara umum sebagai berikut.

Internal Audit Bureau's Duties, Responsibilities, and Their Implementation

According to the Internal Audit Bureau Charter, the main duty and responsibility of the Internal Audit Bureau is to aid the President Director in carrying out their responsibilities, especially in terms of internal audit for operations and finance to ensure that the Company's regulations and project management was implemented according to the Company's expectations. The periodic internal audit is according to the Annual Audit Work Program (or the Company's Annual Work Plan and Budget). The general duties and responsibilities of the Internal Audit Bureau are as follows.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	**Realisasi 2023** 2023 Realization
Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan termasuk perhitungan anggaran biaya yang berkaitan dengan audit dan meminta arahan Direksi dalam penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan. Preparing the annual audit work program including the calculations of audit-related budget and requesting directives from the Board of Directors in preparing the annual audit work program.	Sudah Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan The Annual Audit Work Program has been prepared.
Melakukan identifikasi permasalahan perusahaan untuk dapat menetapkan objek pemeriksaan di bidang operasional maupun keuangan perusahaan. Identifying the Company's issues to be able to determine audit objects in Company operations and finance.	Sudah Melakukan Identifikasi Identification has been implemented.
Melakukan pemeriksaan terhadap objek yang telah ditetapkan. Auditing determined objects.	Sudah melakukan Pemeriksaan The audit has been implemented.
Melakukan kajian untuk mengetahui akar permasalahan atas terjadinya penyimpangan. Researching to find out the core of the problem in the case of irregularities.	Sudah melakukan kajian Research has been implemented.
Melakukan penilaian kecukupan atas sistem pengendalian internal. Assessing the adequacy of the internal control system.	Sudah melakukan penilaian Assessment has been implemented.
Memberikan usulan perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Direktur Utama. Providing improvement suggestions and objective information regarding the audited activities for the President Director.	Sudah melakukan usulan perbaikan Improvement suggestions have been implemented.
Menyiapkan dan mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan. Preparing and documenting the audit worksheets.	Sudah menyiapkan dan mendokumentasi kertas kerja pemeriksaan The audit worksheets have been prepared and documented.
Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Preparing the audit result report and submitting it to the President Director and the Board of Commissioners.	Sudah membuat laporan hasil pemeriksaan The audit result report has been prepared.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Realisasi 2023 2023 Realization
Mengawasi pelaksanaan rekomendasi (tindak lanjut) dari hasil pemeriksaan yang disampaikan ke audit. Penanggung jawab memonitor pelaksanaan tindak lanjut adalah Ketua Tim. Monitoring the implementation of recommendations (follow-up) resulting from the audit presented to the auditee. The person in charge of monitoring the follow-up is the Team Leader.	Sudah mengawasi Pelaksanaan rekomendasi. The recommendation implementation has been monitored.
Bekerja sama dengan Komite Audit. Cooperating with the Audit Committee.	Sudah bekerja sama dengan Komite Audit. Cooperation with the Audit Committee has been carried out.
Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Conducting special audits if necessary.	Bila diperlukan. If necessary.
Melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan. Penilaian dilakukan oleh asesor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Assessing the internal audit's quality assurance and function improvement program comprehensively. The assessment is conducted by an independent assessor at least once in five years.	Sudah melakukan penilaian atas program jaminan kualitas. Quality assurance programs have been assessed.
Menjadi *counterpart* saat dilakukan penilaian penerapan GCG oleh asesor independen. Becoming a counterpart during the assessment of GCG implementation by an independent assessor.	Tahun 2023 tidak dilakukan *assessment* penerapan GCG oleh asesor independen. In 2023, there was no GCG implementation assessment by an independent assessor.
Melakukan *assessment* penerapan GCG setiap 2 (dua) tahun sekali. Assessing the GCG implementation once in two years.	Tahun 2023 sudah melakukan *assessment* In 2023, an assessment was carried out.
Mengawasi pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian GCG. Monitoring the implementation of recommendations resulting from GCG assessment.	Sudah melakukan pengawasan. Monitoring has been implemented.
Meninjau ulang secara berkala buku pedoman yang berhubungan dengan pelaksanaan GCG di Perusahaan dan melakukan revisi jika terjadi ketidaksesuaian dengan Undang-undang/peraturan yang berlaku. Periodically reviewing guideline books related to GCG implementation in the Company and revising them in case of inconsistency with applicable laws/ regulations.	Sudah melakukan peninjauan ulang. Reviews have been carried out.
Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas. Auditing and assessing efficiency and effectiveness.	Sudah melakukan pemeriksaan dan penilaian. Audits and assessments have been carried out.
Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. Preparing programs to evaluate the quality of implemented internal audit activities.	Sudah menyusun program untuk mengevaluasi mutu. Quality evaluation programs have been prepared.

Pengembangan Kompetensi Biro Internal Audit **Internal Audit Bureau's Competency Development**

Nama Name	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certifying Institution
Wismo Suwego Vice President, Internal Audit Vice President, Internal Audit	Pelatihan Internal Audit Tingkat Dasar Basic Level of Internal Audit Training	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Educational Foundation
	Certified Risk Management Officer	Pendidikan, Pembinaan, Manajemen (PPM) PPM School of Management
	Pelatihan Internal Audit Tingkat Lanjutan Advanced Level of Internal Audit Training	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Educational Foundation
	Pelatihan Internal Audit Tingkat Manajerial Managerial Level of Internal Audit Training	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Educational Foundation
	Pengukuhan gelar Qualified Internal Auditor Inauguration of the Qualified Internal Auditor title	Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor Certification Board, Qualified Internal Auditor

Nama Name	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certifying Institution
Erwin Simon Siregar Senior Officer, Finance Auditor Senior Officer, Finance Auditor	Dasar-Dasar Audit Audit Fundamentals	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan Accounting and Finance Development Center
	Internal Audit berbasis Risiko Risk-based Internal Audit	PP University
	Audit berbasis Risiko dan Audit Kinerja Pencegahan Tipikor dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Korporasi BUMN, BUMD, Pemerintahan, Lembaga, TNI/Polri, sesuai Perpres No. 12 tahun 2021 JO-Perpres No. 16 tahun 2018 Risk-based Audit and Audit of Anti-Corruption Prevention Performance in Goods and Services Procurement in SOE, ROE, Government, Institutions, TNI/Police, according to the Regulation of the President No. 12 of 2021 JO-Regulation of the President No. 16 of 2018	Komite Anti Korupsi Indonesia The Indonesian Anti-Corruption Committee
Enggartiasto Dwi Prakoso Junior Officer, Operation Auditor Junior Officer, Operation Auditor	Dasar-Dasar Audit Audit Fundamentals	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) Accounting and Finance Development Center (PPAK)
	Audit Operasional Operational Audit	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) Accounting and Finance Development Center (PPAK)
	Komunikasi dan Psikologi Audit Audit Communication and Psychology	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) Accounting and Finance Development Center (PPAK)
	Audit Kecurangan Fraud Audit	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) Accounting and Finance Development Center (PPAK)

Pelaporan Biro Internal Audit

- Kebijakan Pelaporan
  Pelaporan Biro Internal Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit wajib diadakan secara berkala, paling sedikit setiap 3 bulan sekali dalam setahun.

- Pelaksanaan Pelaporan
  Di tahun 2023, Biro Internal Audit telah membuat laporan triwulan secara rutin, baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun Komite Audit. Adapun pelaporan yang diberikan mencakup kegiatan audit Biro Internal Audit, temuan khusus, dan pengendalian internal.

Internal Audit Bureau's Reporting

- Reporting Policy
  Report of the Internal Audit Bureau with the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Audit Committee must be held periodically at least quarterly in a year.

- Reporting Implementation
  In 2023, the Internal Audit Bureau has routinely made quarterly reports for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Audit Committee. The report submitted covers the Internal Audit Bureau's audit activities, specific findings, and internal control.

Laporan Hasil Pemeriksaan Tugas Biro Internal Audit
Tugas dan tanggung jawab Biro Internal Audit di tahun 2023 beserta realisasinya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Report of the Internal Audit Bureau's Audit Result
The duties and responsibilities of the Internal Audit Bureau in 2023 and its realization are described in the following table.

Audit | *Audit*

Triwulan Quarter	Rencana Plan	Realisasi Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
I	Proyek Mig Data Center The Mig Data Center Project	Proyek Mig Data Center The Mig Data Center Project	100%
I	Proyek Kom Karawang The Kom Karawang Project	Proyek Kom Karawang The Kom Karawang Project	100%
II	Proyek Camp Sonic The Camp Sonic Project	Proyek Camp Sonic The Camp Sonic Project	100%
II	Proyek Weda Bay Tofu The Weda Bay Tofu Project	Proyek Weda Bay Tofu The Weda Bay Tofu Project	100%
III	Proyek Saringan Sampah The Waste Filter Project	Proyek Saringan Sampah The Waste Filter Project	100%

Triwulan Quarter	Rencana Plan	Realisasi Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
III	Proyek KA Lintas Medan - Binjai The Medan - Binjai Train Track Project	Proyek KA Lintas Medan - Binjai The Medan - Binjai Train Track Project	100%
IV	Proyek Jembatan Gorr The Gorr Bridge Project	Proyek Jembatan Gorr The Gorr Bridge Project	100%
IV	Proyek Hengjaya The Hengjaya Project	Proyek IKN The IKN Project	100%
IV	Proyek Saumlaki The Saumlaki Project	Proyek Saumlaki The Saumlaki Project	100%

Non-Audit

1. Monitoring Hasil Audit.
2. Penyusunan PKT/PKPT.
3. Mengikuti seminar dari luar, Iuran FKSPI, dll.
4. *Self Assessment* GCG.
5. Evaluasi SPIP.
6. Menyusun Laporan Triwulan (TW) dan Laporan *Whistleblowing System* (WBS).

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Selama tahun 2023, Internal Audit telah melakukan pemeriksaan yang berfokus pada *governance* (*compliance*), implementasi *risk management* dan *internal control* terhadap total 9 proyek yang dikerjakan dan terdapat 143 temuan dan rekomendasi yang diberikan, di mana sebanyak 92 temuan telah ditindaklanjuti dan akan terus dilakukan monitoring atas tindaklanjutnya.

Pelaksanaan Koordinasi dan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit

Di samping pelaksanaan tugas terkait pemenuhan fungsi audit internal, Biro Internal Audit juga secara rutin melaporkan berbagai hal terkini terkait pelaksanaan tugas fungsi audit internal, baik berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, maupun laporan kepada Direksi. Di sepanjang tahun 2023, Biro Internal Audit menghadiri rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit sebanyak 6 kali. Tentang risalah rapat yang dihadiri Biro Internal Audit dapat dilihat pada risalah rapat Direksi dan Komite Audit di atas.

Penilaian Kinerja Biro Internal Audit

Penilaian atas kinerja Biro Internal Audit dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* Korporat. Penilaian terhadap kinerja Biro *Internal Audit* dilakukan dengan aspek penilaian sebagai berikut.

1. *Costumer*:
   a. Tingkat kepuasan unit internal terkait.
2. *Internal Process Business*:
   a. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan sesuai surat tugas (operasional, kepatuhan, dan investasi);

Non-Audit

1. Audit Result Monitoring.
2. PKT/PKPT Preparation.
3. Attending external seminars, FKSPI Contribution, etc.
4. GCG Self-Assessment.
5. SPIP Evaluation.
6. Preparing Quarterly (TW) Reports and Whistleblowing System (WBS) Reports.

Audit Findings and Follow-Up

Throughout 2023, the Internal Audit conducted examinations focusing on governance (compliance), implementation of risk management, and internal control for a total of nine projects, resulting in 143 findings and recommendations, of which 92 findings have been followed up and will continue to be monitored for follow-ups.

Coordination and Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Audit Committee

Besides implementing duties related to performing the internal audit function, the Internal Audit Bureau also regularly reports the most recent issues regarding the duty implementation of the internal audit function, either through coordination with the Board of Commissioners and/or Audit Committee or report to the Board of Directors. Throughout 2023, the Internal Audit Bureau attended joint meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee six times. Minutes of the meetings attended by the Internal Audit Bureau can be viewed in the minutes of meetings of the Board of Directors and Audit Committee disclosed above.

Internal Audit Bureau's Performance Assessment

Assessment of the Internal Audit Bureau's performance is conducted by the Board of Directors according to the procedures and criteria set in the Corporate Key Performance Indicator. The assessment of the Internal Audit Bureau's performance uses the following assessment aspects:

1. Customer:
   a. Satisfaction level of relevant internal units.
2. Internal Business Process:
   a. Timeliness in completing the report of supervisory results according to assignment letters (operations, compliance, and investment);

b. Pelaksanaan audit sesuai program kerja tahunan (operasional, kepatuhan dan investasi);
c. Jumlah laporan hasil pengawasan yang dihasilkan (operasional, kepatuhan dan investasi).

3. *Learning and Growth*:
   a. Penerapan GCG;
   b. Jumlah sertifikasi auditor/pelatihan;
   c. Kepatuhan implementasi manajemen risiko;
   d. *Human resource readiness*.

Hasil penilaian di tahun 2023 menunjukkan skor sebesar 3,75 dari skor maksimum 4,00 dengan kategori "Istimewa".

Fungsi Quality Control

Departemen Quality Control (QC) dibentuk dalam rangka mengelola aspek *Quality* di tingkat Perusahaan mengenai tata kelola dan strategi Perusahaan agar mutu kualitas pekerjaan terjaga melalui prosedur, kebijakan dan kualifikasi sertifikasi yang tervalidasi sesuai kebutuhan. Departemen Quality Control juga dibentuk untuk memastikan berjalannya proses kualitas mutu atas produk dan layanan yang diberikan Perusahaan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Agar seluruh produk dan layanan PPRE memiliki acuan yang jelas dan berstandar internasional PPRE telah mengimplementasikan ISO 9001:2015 sejak tahun 2017.

Profil Kepala Departemen Quality Control (QC)
Berdasarkan Surat Penempatan Tugas No. 331/M/HCM/PPRE/VII/23 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penugasan sebagai Manager, Quality Control, Priyono dipercaya untuk menjabat posisi Manager Departemen Quality Control Perusahaan.

b. Audit implementation according to annual work programs (operations, compliance, and investment);
c. Total reports created on supervisory results (operations, compliance, and investment).

3. Learning and Growth:
   a. GCG implementation;
   b. Number of auditor's certification/training;
   c. Compliance in risk management implementation;
   d. Human resources readiness.

The assessment results in 2023 show a score of 3.75 out of a maximum score of 4.00, with the category "Special".

Quality Control Function

The Quality Control (QC) Department was established to manage Quality aspects at the Company level related to the Company's governance and strategies to maintain work quality through procedures, policies, and qualifications of valid certifications as needed. The Quality Control Department was also established to ensure the progress of quality processing on the products and services provided by the Company to be able to meet stakeholders' expectations. To have a clear and internationally standardized reference, PPRE has implemented ISO 9001:2015 since 2017.

Profile of the Head of the Quality Control (QC) Department
According to the Letter of Duty Assignment No. 331/M/HCM/PPRE/VII/23 dated July 13, 2023, on the Assignment as a Manager, Quality Control, Priyono was entrusted as the Head of the Quality Control Department of the Company.

Priyono

Manager Quality Control
Manager Quality Control

Menjabat sejak 13 Juli 2023
Serving since July 13, 2023

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 32 tahun
Kelahiran Grobogan, 18 Januari 1991
Domisili Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2015)

Sertifikat Profesi
- SKA Madya Teknik Gedung, LPJK, dikeluarkan tahun 2020, dan berlaku hingga 17 September 2023
- SKA Madya Teknik Jalan, LPJK, dikeluarkan tahun 2020, dan berlaku hingga 18 Maret 2023
- SKK TOT, BNSP, dikeluarkan tahun 2021, dan berlaku hingga 22 April 2024
- SKK Ahli Madya Teknik Jembatan , BNSP, dikeluarkan tahun 2022, dan berlaku hingga 28 November 2027
- SKK Ahli Madya Manajemen Mutu , BNSP, dikeluarkan tahun 2022, dan berlaku hingga 24 November 2027
- SKK Ahli Utama K3 Konstruksi , BNSP, dikeluarkan tahun 2023, dan berlaku hingga 16 Juni 2028
- Sertifikasi Training Project Management Professional, Avenew Akademi Inovasi, dikeluarkan tahun 2022

Bergabung di Perusahaan
Sejak tanggal 12 Juli 2012 sebagai Staff Teknik

Riwayat Profesi
- Manager Quality Control PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2023-sekarang)
- Kepala Departemen Quality Control PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2022-2023)
- Quality Control Coordinator PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2018-2022)
- Quality Control Officer PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Cabang V/ Proyek Revitalisasi Pabrik Gula Colomadu Karanganyar (2017-2018)
- Quality Control Officer PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Cabang V/ Proyek Apartemen Pertamina Cilacap (2016-2017)
- Quality Control Officer PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Cabang V/ Proyek The Samator Surabaya (2013-2016)
- Staff Teknik PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Cabang V/Proyek RS Kariadi Semarang & RSI Harapan Anda Tegal (2012-2013)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Personal Data
Indonesian Citizen
32 years old
Born in Grobogan on January 18, 1991
Domiciled in Bogor Regency, West Java, Indonesia

Education
Bachelor of Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2015)

Professional Certification
- Associate SKA on Building Engineering, LPJK, issued in 2020 and valid until September 17, 2023
- Associate SKA on Road Engineering, LPJK, issued in 2020 and valid until March 18, 2023
- TOT SKK, BNSP, issued in 2021 and valid until April 22, 2024
- Associate Expert SKK on Bridge Engineering, BNSP, issued in 2022 and valid until November 28, 2027
- Associate Expert SKK on Quality Management, BNSP, issued in 2022 and valid until November 24, 2027
- Senior Expert SKK on Construction OHS, BNSP, issued in 2023 and valid until June 16, 2028
- Professional Project Management Certification Training, Avenew Akademi Inovasi, issued in 2022

Joined the Company
Joined the Company on July 12, 2022, as an Engineering Staff

Professional History
- Manager of Quality Control at PT PP Presisi Tbk/Head Office Unit (2023-present)
- Head of the Quality Control Departement at PT PP Presisi Tbk/ Head Office Unit (2022-2023)
- Quality Control Coordinator at PT PP Presisi Tbk/Head Office Unit (2018-2022)
- Quality Control Officer at PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Branch V/Colomadu Karanganyar Sugar Plant Revitalization Project (2017-2018)
- Quality Control Officer at PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Branch V/Cilacap Pertamina Apartment Project (2016-2017)
- Quality Control Officer at PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Branch V/The Samator Surabaya Project (2013-2016)
- Engineering Staff at PT PP (Persero) Tbk/DVO 3/Branch V/ Kariadi Hospital Semarang & Harapan Anda Islamic Hospital Tegal (2012-2013)

Concurrent Position
In the Company: None
Outside the Company: None

Struktur Organisasi Departemen Quality Control

Struktur organisasi Departemen Quality Control ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 244/SK/PPRE/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan yang tergabung dalam Departemen *Quality Control* sebanyak 4 (empat) orang.

Quality Control Department's Organizational Structure

The organizational structure of the Quality Control Department was established by the Board of Directors according to Decree No. 244/SK/PPRE/VIII/2023 dated August 7, 2023, on Changes in the Company's Organizational Structure. On December 31, 2023, there were 4 (four) employees in the Quality Control Department.

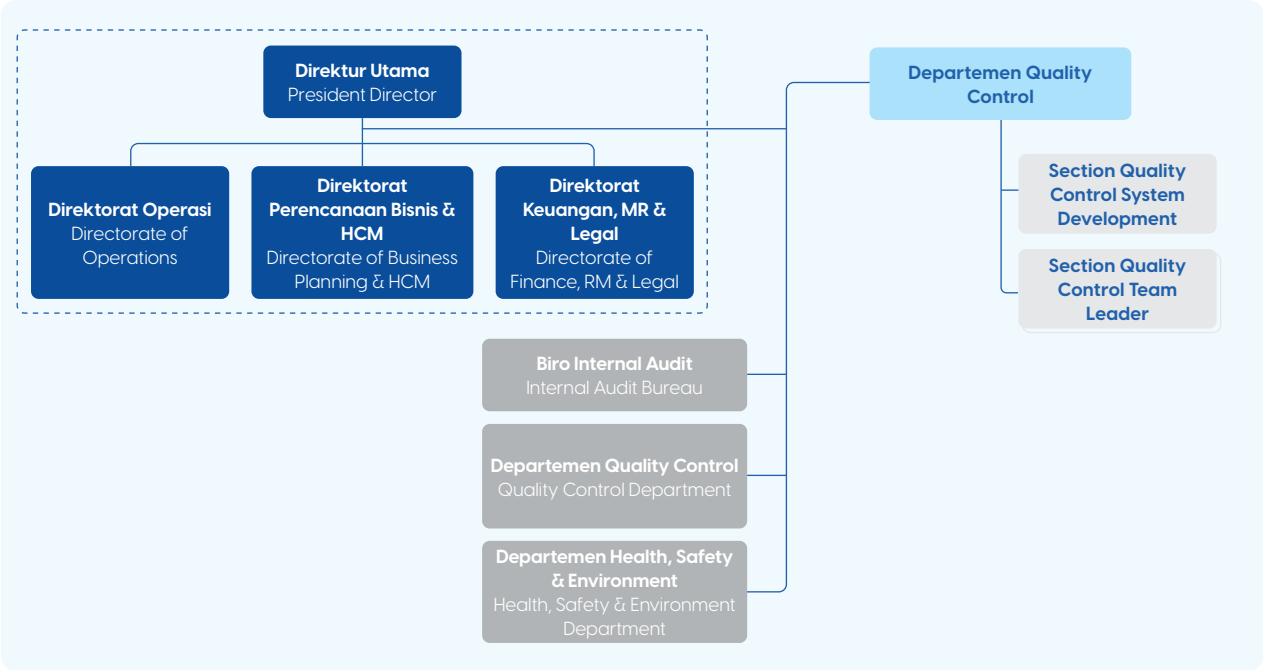

Tugas dan Tanggung Jawab serta Realisasi Departemen Quality Control

Tugas dan tanggung jawab Departemen Quality Control adalah:
Memastikan penerapan dan pengelolaan *quality control* di proyek dapat berjalan dengan baik serta mengembangkan kebijakan terkait dengan *quality control* dalam rangka pengelolaan sistem kualitas di proyek.

Quality Control Department's Duties, Responsibilities, and Their Implementation

The duties and responsibilities of the Quality Control Department are:
Ensuring the quality control implementation and management are carried out properly and developing policies related to quality control in quality system management at projects.

Pengembangan Kompetensi Departemen Quality Control

Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi karyawan Departemen Quality Control dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan Quality Control.

Departemen Quality Control telah mengikuti pengembangan kompetensi selama tahun 2023 sebagai berikut.

Quality Control Department's Competency Development

The Company facilitates the implementation of development programs for the Quality Control Department's employees to improve their competency. These programs are expected to be able to positively impact the productivity and effectiveness of Quality Control management.

The Quality Control department has developed its competence throughout 2023 as described below.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Priyono Manager Quality Control Quality Control Manager	SKK Ahli Utama K3 Konstruksi Senior Expert SKK on Construction OHS	K3 Konstruksi Construction OHS	*Online*, 16 Juni 2023 Online, June 16, 2023	BNSP
	SKK Ahli Utama K3 Konstruksi Senior Expert SKK on Construction OHS	K3 Konstruksi Construction OHS	*Online*, 16 Juni 2023 Online, June 16, 2023	BNSP
	Pelatihan Pengontrolan Kualitas Kadar Penambangan Bijih Nikel Laterit Training on Quality Control of Lateritic Nickel Mining Rate	Pengontrolan Kualitas Kadar Penambangan Bijih Nikel Laterit Quality Control of Lateritic Nickel Mining Rate	*Online*, 07 Oktober 2023 Online, October 7, 2023	Miners Education
Yogi Tio Junior Officer Quality Control System Development Junior Officer of Quality Control System Development	Inspection and Problem Solving for Quality	Manajemen Mutu Quality Control	Jakarta, 26-28 Juli 2023 Jakarta, July 26-28, 2023	PT PP (Persero) Tbk
	Pelatihan Pengontrolan Kualitas Kadar Penambangan Bijih Nikel Laterit Training on Quality Control of Lateritic Nickel Mining Rate	Pengontrolan Kualitas Kadar Penambangan Bijih Nikel Laterit Quality Control of Lateritic Nickel Mining Rate	*Online*, 07 Oktober 2023 Online, October 7, 2023	Miners Education
Gita Mulia Junior Officer Quality Control System Development Junior Officer of Quality Control System Development	Inspection and Problem Solving for Quality	Manajemen Mutu Quality Control	Jakarta, 26-28 Juli 2023 Jakarta, July 26-28, 2023	PT PP (Persero) Tbk
	Pelatihan Pengontrolan Kualitas Kadar Penambangan Bijih Nikel Laterit Training on Quality Control of Lateritic Nickel Mining Rate	Pengontrolan Kualitas Kadar Penambangan Bijih Nikel Laterit Quality Control of Lateritic Nickel Mining Rate	*Online*, 07 Oktober 2023 Online, October 7, 2023	Miners Education
Adi Indra Junior Officer Quality Control Team Leader Junior Officer of Quality Control Team Leader	Inspection and Problem Solving for Quality	Manajemen Mutu Quality Control	Jakarta, 26-28 Juli 2023 Jakarta, July 26-28, 2023	PT PP (Persero) Tbk
	Training Interpretation and Internal Audit IMS Training on Interpretation and IMS Internal Audit	ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015	*Offline*, 23-24 November 2023 Offline, November 23-24, 2023	PT PP (Persero) Tbk & PT Decra Group Indonesia
	Pelatihan Pengontrolan Kualitas Kadar Penambangan Bijih Nikel Laterit Training on Quality Control of Lateritic Nickel Mining Rate	Pengontrolan Kualitas Kadar Penambangan Bijih Nikel Laterit Quality Control of Lateritic Nickel Mining Rate	*Online*, 07 Oktober 2023 Online, October 7, 2023	Miners Education

Laporan Pelaksanaan Tugas Departemen Quality Control (QC)

Di tahun 2023, Departemen Quality Control melaksanakan program kerja yaitu:

1. *Renewal* ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018;
2. Internal Audit PPRE;
3. *Corporate Audit & Inspection* Biro QHSE;
4. *Training QA & QC Management;*
5. *Site visit* dan *Inspection & Sharing Quality Control;*
6. *Management Walkthrough;*
7. *Management Review* dan Sarasehan Departemen Quality Control;
8. FGD Biro QHSE EPC-AP;
9. *Management Review* Triwulan Biro QHSE;
10. *Update* Prosedur/WI/Standar *Quality*;
11. Pengembangan Sistem *Quality*.

Penilaian Kinerja Departemen Quality Control (QC)

Penilaian atas kinerja Departemen Quality Control dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* Korporat. Penilaian terhadap kinerja Departemen Quality Control dilakukan melalui aspek penilaian sebagai berikut.

1. Internal Audit QHSE;
2. *Customer Satisfaction Survey/Survey* Kepuasan Pelanggan;
3. *Closing NC QHSE;*
4. *QHSE Compliance;*
5. Respon terhadap *customer complaint*;
6. Pemenuhan Inspeksi QHSE.

Hasil penilaian di tahun 2023 menunjukkan skor sebesar 3,45 dari skor maksimum 4,00 dengan kategori “Baik”

Fungsi Health, Safety & Environment

Departemen Health, Safety & Environment (HSE) dibentuk dalam rangka memastikan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat berjalan dengan baik dan konsisten di proses bisnis Perusahaan dan juga memastikan regulasi yang sudah ditentukan pemerintah terkait aspek keselamatan bisa diidentifikasi dan diterapkan oleh Perusahaan.

Profil Kepala Departemen Health, Safety & Environment (HSE)

Berdasarkan Surat Penempatan Tugas No. 335/M/HCM/PPRE/VII/23 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penugasan Sebagai Manager Health, Safety & Environment. Pipin Julianto dipercaya untuk menjabat posisi Manager Departemen Health, Safety & Environment.

Report on the Control (QC) Control Department’s Duty Implementation

In 2023, the Quality Control Department implements the following work programs:

1. Renewal of ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018;
2. Internal Audit of PPRE;
3. Corporate Audit & QHSE Bureau Inspection;
4. QA & QC Management Training;
5. Site Visit and Inspection, Quality Control Sharing;
6. Management Walkthrough;
7. Management Review and Quality Control Department Gathering;
8. FGD of the QHSE EPC-AP Bureau;
9. Quarterly Management Review of the QHSE Bureau;
10. Procedure/WI/Quality Standard Update;
11. Quality System Development.

Quality Control (QC) Department’s Performance Assessment

The assessment of the Quality Control Department’s performance is carried out by the Board of Directors according to the procedures and criteria set in the Corporate Key Performance Indicator. The assessment of the Quality Control Department’s performance uses the following aspects.

1. QHSE Internal Audit;
2. Customer Satisfaction Survey
3. QHSE NC Closing
4. QHSE Compliance
5. Response to customers’ complaints;
6. QHSE Inspection Fulfillment.

The 2023 assessment results showed a score of 3.45 from a maximum of 4.00 under the category of “Good”

Health, Safety & Environment Function

The Health, Safety & Environment (HSE) Department was established to ensure that the occupational health and safety management system (SMK3) can be implemented seamlessly and consistently within the Company’s business process and ensure that the regulations established by the government related to safety aspects can be identified and implemented by the Company.

Profile of the Head of the Health, Safety & Environment (HSE) Department

According to the Decree of the Board of Directors No. 335/M/HCM/PPRE/VII/23 dated July 13, 2023, on the Assignment of the Manager of Health, Safety & Environment Department, Pipin Julianto was entrusted as the Head of the Health, Safety & Environment Department.

Pipin Julianto

Manager Health, Safety & Environment
Manager Health, Safety & Environment Department

Menjabat sejak 17 Juli 2023
Serving since July 17, 2023

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 31 tahun
Kelahiran Lamongan, 27 Juli 1992
Domisili Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik K3 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2014)

Sertifikat Profesi
- Ahli K3 Utama, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (2023), berlaku hingga 2026
- Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan, BNSP (2020), berlaku hingga 2024
- Ahli K3 Konstruksi Madya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (2020), berlaku hingga 2023
- Investigator Insiden, BNSP (2021), berlaku hingga 2025
- Certified Training of Trainer (TOT), BNSP (2021), berlaku hingga 2024

Bergabung di Perusahaan
Sejak tanggal 3 April 2017 sebagai Health, Safety & Environment Officer

Riwayat Profesi
- Manager Health, Safety & Environment PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2023-sekarang)
- Kepala Departemen HSE PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2022-2023)
- Health, Safety & Environment Coordinator PT PP Presisi Tbk/ Unit Kantor Pusat (2018-2022)
- Health, Safety & Environment Officer PT PP Presisi Tbk/Unit Kantor Pusat (2017-2018)
- Health, Safety & Environment Coordinator Cabang V PT PP Persero Tbk (2015-2017)
- Health, Safety & Environment Officer Proyek Cabang V (2014-2015)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: Tidak ada
Di luar Perusahaan: Tidak ada

Personal Data
Indonesian Citizen
31 years old
Born in Lamongan on July 27, 1992
Domiciled in Bogor, West Java, Indonesia

Education
Bachelor of OHS Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2014)

Professional Certification
- Senior Expert on OHS, National Professional Certification Agency (BNSP) (2023), valid until 2026
- First Operational Supervisor (POP) of Mining, BNSP (2020), valid until 2024
- Associate Expert on Construction OHS, Construction Service Development Institution (LPJK) (2020), valid until 2023
- Incident Investigator, BNSP (2021), valid until 2025
- Certified Training of Trainer (TOT), BNSP (2021), valid until 2024

Joined the Company
Joined the Company on April 3, 2017, as Health, Safety & Environment Officer

Professional History
- Manager of Health, Safety & Environment at PT PP Presisi Tbk/ Head Office Unit (2023-present)
- Head of the HSE Department at PT PP Presisi Tbk/Head Office Unit (2022-2023)
- Health, Safety & Environment Coordinator at PT PP Presisi Tbk/ Head Office Unit (2018-2022)
- Health, Safety & Environment Officer at PT PP Presisi Tbk/ Head Office Unit (2017-2018)
- Health, Safety & Environment Coordinator Branch V at PT PP Persero Tbk (2015-2017)
- Health, Safety & Environment Officer at Branch V Project (2014-2015)

Concurrent Position
In the Company: None
Outside the Company: None

Struktur Organisasi Departemen Health, Safety & Environment

Struktur organisasi Departemen Health, Safety & Environment (HSE) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 244/SK/PPRE/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan yang tergabung dalam Departemen Health, Safety & Environment sebanyak 4 (empat) orang.

Health, Safety & Environment Department's Organizational Structure

The organizational structure of the Health, Safety & Environment (HSE) Department was established by the Board of Directors according to Decree No. 244/SK/PPRE/VIII/2023 dated August 7, 2023, on the Changes in the Company's Organizational Structure. On December 31, 2023, there were four employees in the Health, Safety & Environment Department.

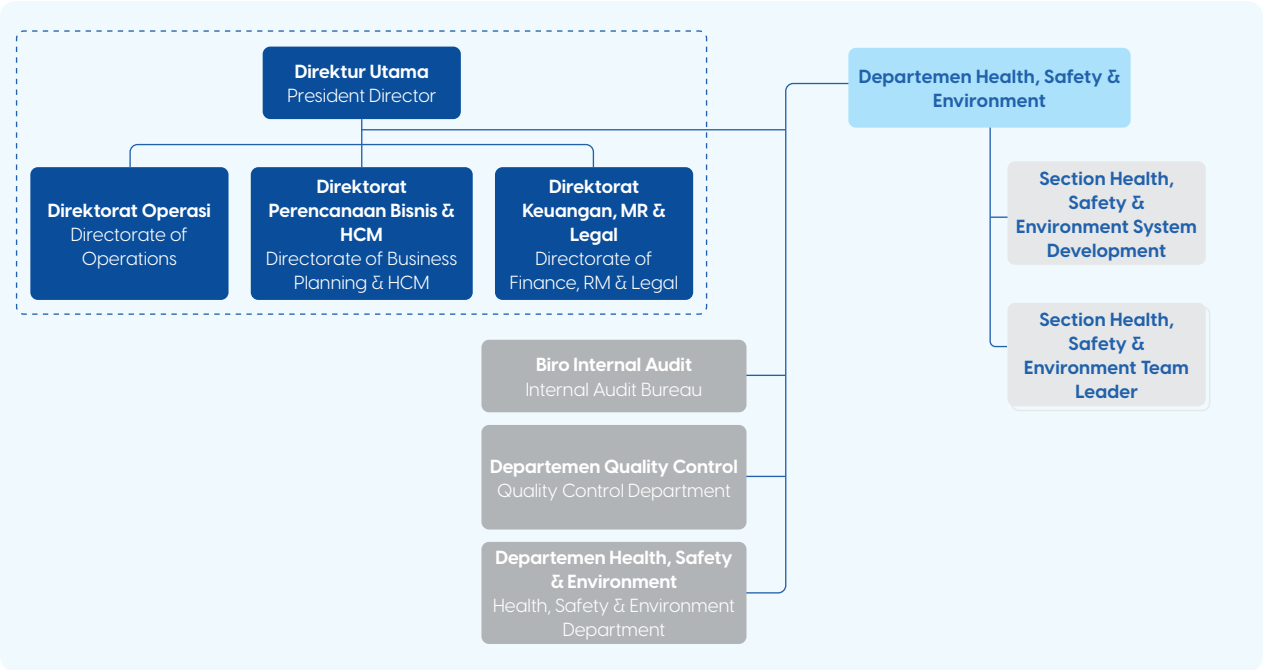

Tugas dan Tanggung Jawab serta Realisasi Departemen Health, Safety & Environment (HSE)

Tugas dan tanggung jawab Departemen Health, Safety & Environment adalah:

1. Mengembangkan kebijakan, standar, dan sistem manajerial HSE di Perusahaan;
2. Memastikan sistem manajemen ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, dan SMK3 telah diimplementasikan;
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya *safety* di Perusahaan;
4. Melakukan sosialisasi, *sharing knowledge*, pengalaman, *safety culture* serta pengembangan *skill* di lingkungan perusahaan;
5. Melakukan inspeksi HSE ke proyek secara langsung;
6. Memberikan asistensi terhadap perencanaan, implementasi dan evaluasi HSE yang telah dibuat oleh Proyek;
7. Memastikan ketersediaan dokumen HSE yang dibutuhkan untuk proses tender;
8. Memberikan bantuan dalam pemecahan permasalahan HSE di lingkungan perusahaan;
9. Berperan sebagai *counterpart* dalam proses audit HSE dengan pihak eksternal.

Health, Safety & Environment (HSE) Department's Duties, Responsibilities, and Their Implementation

The tasks and responsibilities of the Health, Safety & Environment Department are as follows:

1. Developing policies, standards, and HSE management systems in the Company;
2. Ensuring that ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, and the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) are implemented;
3. Developing and implementing a safety culture in the Company;
4. Conducting dissemination, knowledge sharing, experience sharing, safety culture, and skill development within the company environment;
5. Directly inspecting HSE on projects;
6. Assisting in planning, implementation, and evaluation of HSE made by the Projects;
7. Ensuring the availability of HSE documents required for tender processes;
8. Assisting in resolving HSE issues within the company environment;
9. Acting as a counterpart in the HSE audit process with external parties.

Pengembangan Kompetensi Departemen Health, Safety & Environment (HSE)

Health, Safety & Environment (HSE) Department Competency Development

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Pipin Julianto Manager HSE Manager HSE	Sertifikasi Certification	K3 Konstruksi Construction OHS	*Online*, 16 Juni 2023 Online, June 16, 2023	BNSP
	Training	Implementasi SMKP di perusahaan pertambangan SMKP implementation in mining companies	Bogor, 7 Oktober 2023 Bogor, October 7, 2023	PPRE & PP University
Pratiwi Handayani System Development System Development	*Training*	K3 Umum General OHS	*Online*, Desember 2022 Online, December 2022	Kemenaker RI The Indonesian Ministry of Employment
	Training	K3 Minyak dan Gas Bumi Oil and Natural Gas OHS	Jakarta, 16 Desember 2022 Jakarta, December 16, 2022	BNSP PPSDM Migas Oil and Gas PPSDM BNSP
	Training	IMS ISO 45001, 9001, 14001 IMS ISO 45001, 9001, 14001	Jakarta, 22 November 2023 Jakarta, November 22, 2023	Decra
Ichwan Zunaidi HSE Team Leader HSE Team Leader	*Training*	Implementasi SMKP di perusahaan pertambangan SMKP implementation in mining companies	Bogor, 7 Oktober 2023 Bogor, October 7, 2023	PPRE & PP University
Elvandi HSE Team Leader HSE Team Leader	*Training*	Implementasi SMKP di perusahaan pertambangan SMKP implementation in mining companies	Bogor, 7 Oktober 2023 Bogor, October 7, 2023	PPRE & PP University
	Sertifikasi Certification	Ahli Utama Konstruksi Senior Expert on Construction	*Online*, 4 Oktober 2023 Online, October 4, 2023	P3SM (Pusat Pembinaan Pelatihan Dan Sertifikasi Mandiri) P3SM (Center of Development, Training, and Independent Certification)
	Sertifikasi Certification	Perundangan pertambangan Implementasi K3 dan KO Pertambangan Mining Laws, OHS Implementation and Mining KO	*Online*, 22-26 Januari 2024 Online, January 22-26, 2024	Javaro Training and Consulting

Sertifikasi Profesi Health, Safety & Environment (HSE)

Untuk memperkuat kinerja pengawasan HSE dalam kegiatan operasinya, Perusahaan memberikan sertifikasi profesi bagi karyawan Departemen Health, Safety & Environment. Adapun sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Departemen Health, Safety & Environment sebagai berikut.

Health, Safety & Environment (HSE) Department Professional Certification

To strengthen the HSE supervisory performance in its operations, the Company provides professional certification for the Health, Safety & Environment Department employees. The professional certifications owned by the Health, Safety & Environment Department employees are as follows.

Nama Name	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certifying Institution
Pipin Julianto Manager HSE Manager HSE	Ahli K3 Utama | Senior Expert on OHS POP Pertambangan | Mining POP Ahli K3 Madya Konstruksi | Associate Expert on OHS TOT (*Training of Trainer*) | TOT (Training of Trainer) AGT *Cofined Space* | AGT Confined Space Ahli K3 Umum | General Expert on OHS Inspektor *Crane* Petugas P3K | First Aid Officer	BNSP| BNSP BNSP | BNSP LPJK | LPJK BNSP | BNSP BNSP | BNSP Kemnaker RI | The Indonesian Ministry of Employment BNSP | BNSP Kemnaker RI | The Indonesian Ministry of Employment

Nama Name	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certifying Institution
Elvandi HSE Team Leader HSE Team Leader	Ahli K3 Umum | General Expert on OHS Ahli K3 Konstruksi | Expert on Construction OHS POP Pertambangan | Mining POP	Kemnaker RI | The Indonesian Ministry of Employment BNSP | BNSP BNSP | BNSP
Ichwan Zunaidi HSE Team Leader HSE Team Leader	Ahli K3 Umum | General Expert on OHS Ahli Utama K3 Konstruksi | Senior Expert on Construction OHS POP Pertambangan | Mining POP	Kemnaker RI | The Indonesian Ministry of Employment BNSP | BNSP BNSP | BNSP
Pratiwi Handayani HSE Sistem & Development HSE Sistem & Development	Ahli K3 Umum | General Expert on OHS Pengawas MIGAS | Oil and Gas Supervisor	Kemnaker RI | The Indonesian Ministry of Employment BNSP PPSDM Migas | Oil and Gas PPSDM BNSP

Laporan Pelaksanaan Tugas Departemen Health, Safety & Environment

Di tahun 2023, Departemen Health, Safety & Environment melaksanakan program kerja yaitu:

1. *Renewal* ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018;
2. Internal Audit PP Presisi;
3. *Corporate Audit & Inspection* Biro QHSE;
4. *Training HSE Management System;*
5. *Site visit* dan *Inspection & Sharing* HSE;
6. *Management Walkthrough* HSE;
7. *Management Review* dan Sarasehan Departemen HSE;
8. FGD Biro QHSE EPC-AP;
9. *Management Review* Triwulan Biro QHSE;
10. *Update* Prosedur/WI/Standar HSE
11. Pengembangan Sistem HSE

Penilaian Kinerja Departemen Health, Safety & Environment

Penilaian atas kinerja Departemen Health, Safety & Environment dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* Korporat. Penilaian terhadap kinerja Departemen Health, Safety & Environment dilakukan melalui aspek penilaian sebagai berikut.

1. Internal Audit Quality, Health, Safety & Environment (QHSE);
2. Closing NC QHSE;
3. QHSE Compliance;
4. Legal Compliance HSE;
5. Pemenuhan Inspeksi QHSE.

Hasil penilaian di tahun 2023 menunjukkan skor sebesar 3,45 dari skor maksimum 4,00 dengan kategori “Baik”.

Fungsi Manajemen Risiko

Perusahaan membentuk Departemen Risk Management sebagai fungsi *regulator, fasilitator,* monitoring, dan *advisory* dalam pelaksanaan manajemen risiko setiap bisnis proses yang dijalankan oleh Perusahaan agar risiko yang ada dapat direduksi seminimal mungkin.

Report on the Health, Safety & Environment Department’s Duty Implementation

In 2023, the HSE Department implemented the following work program:

1. Renewing ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018;
2. Internal Audit of PP Presisi;
3. Corporate Audit & Inspection of the QHSE Bureau;
4. HSE Management System Training;
5. Site visit & HSE Inspection & Sharing;
6. HSE Management Walkthrough;
7. Management Review and HSE Department Gathering;
8. FGD of the EPC-AP QHSE Bureau;
9. Quarterly Management Review of the QHSE Bureau;
10. Updating the HSE Procedure/WI/Standards;
11. HSE System Development.

Health, Safety & Environment Department’s Performance Assessment

The assessment of the Health, Safety & Environment Department’s performance is carried out by the Board of Directors according to the procedures and criteria set in the Corporate Key Performance Indicator. The assessment of the Health, Safety & Environment Department’s performance uses the following aspects.

1. Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) Internal Audit;
2. QHSE NC Closing;
3. QHSE Compliance;
4. HSE Legal Compliance;
5. QHSE Inspection Requirement.

The 2023 assessment results showed a score of 3.45 from a maximum of 4.00 under the “Good” category.

Risk Management Function

The Company established the Risk Management Department to perform regulator, facilitator, monitoring, and advisory functions in the risk management of every business process run by the Company to reduce existing risks to the minimum.

Pedoman Departemen Risk Management
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Departemen Risk Management mengacu pada Prosedur Manajemen Risiko No. PPRE/MR/P/003 poin 6.19 tentang Tugas dan Fungsi Departemen Risk Management.

Profil Manager Risk Management
Berdasarkan Memo VP - HCM No. 408/M/HCM/PPRE/VII/23 tanggal 13 Juli 2023 tentang Penugasan Sebagai Manager Risk Management di UKP, Mei Elsa Kembaren dipercaya untuk menjabat posisi Manager Risk Management.

Risk Management Department Guidelines
The implementation of the Risk Management Department's duties and responsibilities refers to the Risk Management Procedure No. PPRE/MR/P/003 point 6.19 regarding the Risk Management Department's Duties and Function.

Profile of the Manager of Risk Management Department
According to the Memo of VP - HCM No. 408/M/HCM/PPRE/VII/23 dated July 13, 2023, on the Assignment as the Manager of Risk Management at UKP, Mei Elsa Kembaren was entrusted as the Manager of Risk Management Department.

Mei Elsa Kembaren

Manager Risk Management
Manager of Risk Management

Menjabat sejak 17 Juli 2023
Serving since July 17, 2023

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 32 tahun
Kelahiran Medan, 27 Mei 1991
Domisili Tangerang Selatan, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik Sipil Politeknik Universitas Sumatera Utara (2012)

Sertifikat Profesi
Sertifikasi profesi yang dimiliki, meliputi:
- *Certified Risk Management Professional*, Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko - LSPMR, berlaku mulai 29 September 2021 hingga 29 September 2023
- *Certified Banking Legal Consultant*, Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia, berlaku mulai 22 Desember 2022 hingga 22 Desember 2025

Bergabung di Perusahaan
Sejak tanggal 17 Februari 2020 sebagai Production Control Utama (POB)

Riwayat Profesi
- Manager Risk Management, PT PP Presisi Tbk (2023-sekarang)
- Kepala Departemen Manajemen Risiko, PT PP Presisi Tbk (2020-2023)
- Production Control Utama, POB PT PP Presisi Tbk (2020)
- Production & Cost Control, PT PP (Persero) Tbk (2020)
- Junior Officer Production & Cost Control Section, PT PP (Persero) Tbk (2018-2020)

Rangkap Jabatan
Di dalam Perusahaan: tidak ada
Di luar Perusahaan: Anggota Komite PT Lancarjaya Mandiri Abadi Bagian Operasi dan Risiko (2023-sekarang)

Personal Data
Indonesian Citizen
32 years old
Born in Medan on May 27, 1991
Domiciled at South Tangerang, West Java, Indonesia

Education
Bachelor of Civil Engineering from Politeknik Universitas Sumatera Utara (2012)

Professional Certification
Her professional certifications are as follows:
- Certified Risk Management Professional, Risk Management Professional Certification Institute - LSPMR, valid from September 29, 2021, to September 29, 2023
- Certified Banking Legal Consultant, the Indonesian Legal Professional Certification Institute, valid from December 22, 2022, to December 22, 2025

Joined the Company
Joined the Company on February 17, 2020, as a Senior Production Control (POB)

Professional History
- Manager of Risk Management, PT PP Presisi Tbk (2023-present)
- Head of the Risk Management Department, PT PP Presisi Tbk (2020-2023)
- Senior Production Control, POB of PT PP Presisi Tbk (2020)
- Production & Cost Control, PT PP (Persero) Tbk (2020)
- Junior Officer of Production & Cost Control Section, PT PP (Persero) Tbk (2018-2020)

Concurrent Position
In the Company: None
Outside the Company: Committee Member at PT Lancarjaya Abadi, Operations and Risk Section (2023-present)

Struktur dan Kedudukan Departemen Risk Management
Departemen Risk Management berada langsung di bawah Direksi, sehingga setiap bentuk pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Direksi. Manager Risk Management beserta personelnya ditunjuk dan dimutasikan oleh Direksi.

Adapun struktur organisasi Departemen Risk Management ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 244/SK/PPRE/DIR/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan pada Fungsi Manajemen Peralatan.

Risk Management Department's Structure and Position
The Risk Management Department is directly under the Board of Directors, and thus every implementation of its duty is accountable directly to the Board of Directors. The Manager of Risk Management Department and their personnel are appointed and transferred by the Board of Directors.

The organizational structure of the Risk Management Department was established by the Decree of the Board of Directors No. 244/SK/PPRE/DIR/VIII/2023 dated August 7, 2023, on the Changes in the Company's Organizational Structure on the Equipment Management Function.

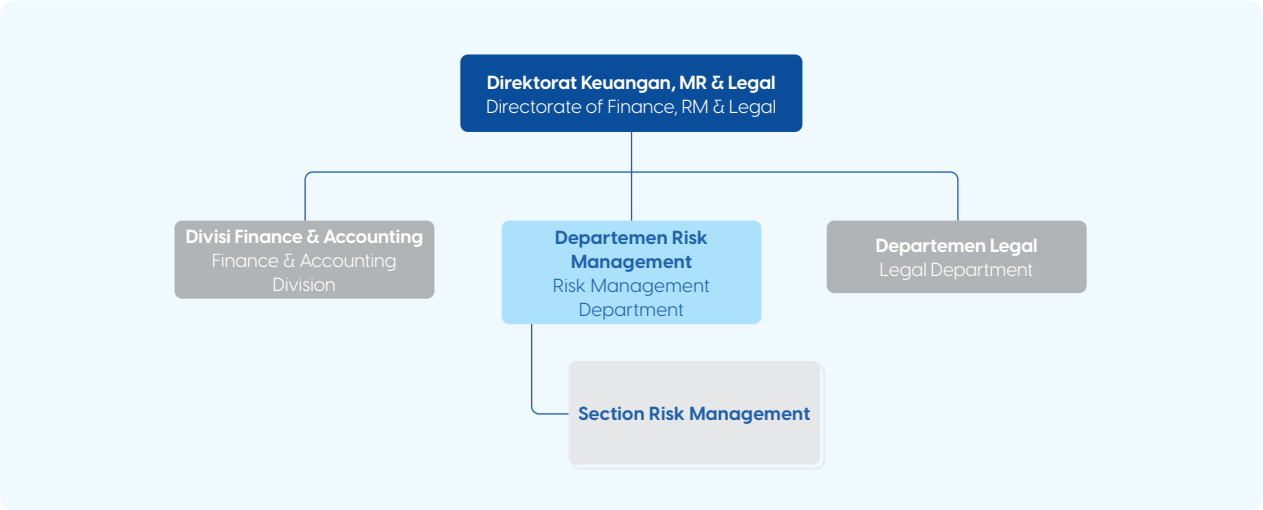

Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan yang tergabung dalam Departemen Manajemen Risiko sebanyak 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut.

On December 31, 2023, there were four employees in the Risk Management Department with the following details.

Nama Name	Jabatan Position
Mei Esa Kembaren	Manager Risk Management Manager of Risk Management
Nathanael Parasian	Officer Risk Management Risk Management Officer
Ayu Noviana Isman	Senior Officer Risk Management Senior Officer of Risk Management
Nila Yunieka	Junior Officer Risk Management Junior Officer of Risk Management

Sertifikasi Manajemen Risiko
Sertifikasi profesi yang dimiliki Departemen Manajemen Risiko sebagai berikut.

Risk Management Certification
Professional certifications owned by the Risk Management Department are as follows.

Nama Name	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certifying Institution
Mei Elsa Kembaren (Manager Risk Management) (Manager of Risk Management)	Certified Risk Management Professional (CRMP) Certified Banking Legal Consultant (CBLC)	• Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) • Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia • Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR) • Indonesian Legal Professional Certification Institute

Nama Name	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certifying Institution
Nathanael Parasian (Officer Risk Management) (Officer of Risk Management)	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
Ayu Noviana Isman (Senior Officer Risk Management) (Senior Officer of Risk Management)	Certified Risk Management Professional (CRMP) Certified Risk Associate (CRA) Manajemen Risiko Madya	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR) Capital Market Professional Certification Board
Nila Yunieka (Junior Officer Risk Management) (Junior Officer of Risk Management)	Ahli Muda Teknik Bendungan Besar Junior Expert of Large Dam Engineering	Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Institute

Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Manajemen Risiko

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Departemen Risk Management, sesuai Prosedur Manajemen Risiko No. PPRE/MR/P/003 poin 6.19 tentang Tugas dan Fungsi Departemen Risk Management, yaitu:

1. *Regulator*
   a. Mendesain kebijakan manajemen risiko Perusahaan;
   b. Menyusun Prosedur dan *Work Instruction* terkait manajemen risiko.
2. *Fasilitator*
   a. Menyiapkan infrastruktur manajemen risiko seperti aplikasi untuk mempermudah pengelolaan manajemen risiko (eRisk);
   b. Memfasilitasi pembahasan manajemen risiko bersama Tim Manajemen Risiko;
   c. Memberikan pengetahuan terkait manajemen risiko baik internal maupun eksternal.
3. Monitoring
   a. Memantau daftar risiko dan selalu meng-*update* nilai kepatuhan implementasi manajemen risiko unit;
   b. Meninjau efektivitas rencana penanganan.
4. *Advisory*
   a. Sebagai Ketua Tim Manajemen Risiko yang memberikan saran dan masukan berdasarkan daftar risiko kepada pengambil keputusan;
   b. Membahas dan memberikan masukan terkait manajemen risiko tender/proyek/aksi korporasi/program kerja/program khusus/risiko penyuapan sesuai permohonan unit lain.

Laporan Pelaksanaan Tugas Departemen Manajemen Risiko

Di tahun 2023, Departemen Risk management melaksanakan program kerja yaitu:

1. *Review* Prosedur & WI Manajemen Risiko;
2. *Update* Prosedur & WI Manajemen Risiko;
3. Sosialisasi Prosedur & WI Manajemen Risiko;
4. Pengembangan dan *maintenance* infrastruktur Manajemen Risiko berbasis *online* (eRisk);
5. Sosialisasi hasil pengembangan infrastruktur Manajemen Risiko berbasis *online* (eRisk);

Risk Management Department's Duties and Responsibilities

In general, the Risk Management Department's duties and responsibilities are according to the Risk Management Procedure No. PPRE/MR/P/003 point 6.19 on the Risk Management Department's Duties and Function, namely:

1. Regulator
   a. Planning the Company's risk management policies;
   b. Preparing the Procedure and Work Instruction related to risk management.
2. Facilitator
   a. Preparing risk management infrastructures, such as applications to ease risk management handling (eRisk);
   b. Facilitating risk management discussion with the Risk Management Team;
   c. Providing insights on internal and external risk management.
3. Monitoring
   a. Monitoring the risk register and updating the compliance score of risk management in units;
   b. Reviewing the effectiveness of mitigation plans.
4. Advisory
   a. The Risk Management Team Leader provides recommendations and suggestions for the decision-makers based on the risk register;
   b. Discussing and providing suggestions regarding risk management in tender/project/corporate action/work program/special program/bribery risk according to other units' requests.

Report on the Risk Management Department's Duty Implementation

In 2023, the Risk Management Department carried out the following work programs:

1. Reviewing Risk Management Procedure & WI;
2. Updating Risk Management Procedure & WI;
3. Disseminating Risk Management Procedure & WI;
4. Developing and maintaining online-based Risk Management infrastructure (eRisk);
5. Disseminating development results of online-based Risk Management infrastructure (eRisk);

6. *Update* Bank Data Risiko sebagai *database* dan *lesson learned;*
7. Pendampingan penyusunan kajian risiko tender, kajian risiko proyek, kajian risiko program kerja, kajian risiko aksi korporasi serta kajian risiko program khusus;
8. Evaluasi dan monitoring kepatuhan penerapan Manajemen Risiko Proyek dan UKP sebagai salah satu indikator penilaian KPI dan persyaratan audit bersinergi dengan Biro Operation Control & SCM dan Internal Audit;
9. Asesmen *Risk Maturity Index;*
10. Pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko;
11. Program *Parenting* Anak Perusahaan.

Penilaian Kinerja Departemen Risk Management

Penilaian atas kinerja Departemen Risk Management dilakukan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* Korporat. Penilaian terhadap kinerja Departemen Risk Management dilakukan melalui aspek penilaian sebagai berikut.

1. *Costumer*:
   a. Tingkat kepuasan unit internal terkait.
2. *Internal Process Business*:
   a. Realisasi pembahasan kajian manajemen risiko *tender*;
   b. Realisasi pembahasan kajian manajemen risiko aksi korporasi dan program khusus.
3. *Learning and Growth*:
   a. Penerapan GCG;
   b. Kepatuhan implementasi manajemen risiko korporat;
   c. *Risk maturity index*;
   d. Pelaporan manajemen risiko korporat;
   e. *Human resource readiness*.

Hasil penilaian di tahun 2023 menunjukkan skor sebesar 31,00 dari skor maksimum 40,00 dengan kategori B (Baik).

Tim Manajemen Risiko

Selain membentuk Departemen Risk Management, Perusahaan membentuk Tim Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam mengelola risiko bisnis Perusahaan pada level menengah, tinggi dan ekstrim. Berikut susunan Tim Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 254/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Perubahan Tim Manajemen Risiko sebagai berikut.

6. Updating Risk Data Bank as a database and lesson learned;
7. Assisting the preparation of tender risk review, project risk review, work program risk review, corporate action risk review, and special program risk review;
8. Evaluating and monitoring the compliance of Project Risk Management implementation and UKP as one of the KPI indicators and audit requirements in synergy with the teams from the Operation Control Bureau & SCM and Internal Audit;
9. Risk Maturity Index Assessment;
10. Risk Management Training and Certification;
11. Subsidiary Parenting Program.

Risk Management Department's Performance Assessment

The assessment of the Risk Management Department's performance is conducted by the Board of Directors according to the procedures and criteria set in the Corporate Key Performance Indicator. The assessment of the Risk Management Department's performance uses the following aspects.

1. Customer:
   a. Satisfaction level of relevant internal units.
2. Internal Process Business:
   a. Discussion of tender risk management review;
   b. Discussion of corporate action and special program risk management review.
3. Learning and Growth:
   a. GCG Implementation;
   b. Compliance in the implementation of corporate risk management;
   c. Risk maturity index;
   d. Reporting of the corporate risk management;
   e. Human resources readiness.

The 2023 assessment results showed a score of 31.00 from a maximum of 40.00 under the B (Good) category.

Risk Management Team

Besides forming the Risk Management Department, the Company established the Risk Management Team to aid the Board of Directors in managing the Company's business risks at the moderate, high, and extreme levels. The composition of the Risk Management Team according to the Decree of the Board of Directors No. 254/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 dated August 9, 2023, on the Changes in the Risk Management Team is as follows.

Jabatan Position	Pejabat yang Menjabat Serving Officials
Ketua Leader	Manager Risk Management Manager of Risk Management

Jabatan Position	Pejabat yang Menjabat Serving Officials
Anggota Tetap Permanent Members	Vice President Corporate Secretary Vice President OC & Supply Chain Management Vice President Finance & Accounting Vice President Business Development & Portfolio Management Vice President Equipment Operation Vice President Equipment Maintenance Vice President Human Capital Management Manager Equipment Performance & Admin Marketing Manager Manager Legal
Anggota Tidak Tetap Temporary Members	Vice President Operation 1 Vice President Operation 2 Vice President Bidding & Engineering Manager Quality Control Manager Health, Safety & Environment Expert (Internal/Eksternal) | Expert (Internal/External)

Berikut disampaikan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko Perusahaan:

1. Melakukan pembahasan manajemen risiko di setiap proses bisnis Perusahaan sebelum dipaparkan kepada Direksi;
2. Melakukan koordinasi antara anggota tetap, anggota tidak tetap dan unit pemilik risiko;
3. Melakukan penilaian risiko bersama pemilik risiko berupa identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko;
4. Melakukan pengelolaan terhadap potensi risiko yang ada;
5. Memaparkan dan mengajukan persetujuan atas hasil pengelolaan risiko kepada Direksi;
6. Melakukan monitoring dan *review* terhadap implementasi manajemen risiko sesuai prosedur dan *Work Instruction* yang berlaku.

Below are the duties and responsibilities of the Company's Risk Management Team:

1. Discussing risk management in every business process in the Company before presenting it to the Board of Directors;
2. Coordinating among permanent members, temporary members, and risk owner unit;
3. Assessing risks with the risk owner which includes risk identification, risk analysis, and risk evaluation;
4. Managing potential risks;
5. Presenting and requesting approval for risk management results to the Board of Directors;
6. Monitoring and reviewing risk management implementation according to applicable procedures and Work Instructions.

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kewajaran laporan yang disajikan oleh Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris memberikan masukan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Sementara itu, penentuan kantor akuntan publik dilakukan melalui keputusan RUPS.

PUBLIC ACCOUNTANT

The Public Accountant is appointed to examine the validity and fairness of the statements presented by the Board of Directors. Furthermore, the Board of Commissioners provides suggestions on the results of the audit conducted by the public accountant. Meanwhile, the public accountant firm was determined through a GMS resolution.

Kriteria Penentuan Kantor Akuntan Publik

Criteria for Determining Public Accountant Firm

Auditor eksternal tidak memiliki hubungan afiliasi dan terbebas dari benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak lain yang memiliki kepentingan pada Perusahaan.
The external auditor is not affiliated and is free from conflict of interest with the Board of Commissioners, Board of Directors, and other parties with interest in the Company.

Kantor akuntan publik harus memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
The public accountant firm must be reputable and registered in the Financial Services Authority.

Kantor akuntan publik harus memiliki kinerja yang baik dan menjunjung tinggi kode etik profesi.
The public accountant firm must have excellent performance and uphold the professional code of conduct.

Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit

Directives and assignment from the Board of Commissioners to the Audit Committee

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023, terkait penunjukan Akuntan Publik, pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Atas hasil keputusan tersebut, Perusahaan telah melakukan penetapan KAP Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 melalui RUPS. Penetapan

According to the Annual GMS result for Fiscal Year 2022 held on May 24, 2023, regarding the Public Accountant appointment, the shareholders decided as follows:

1. Appointing Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountant Firm to conduct a general audit on the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 and other periods in Fiscal Year 2023;
2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the fee amount for the audit service, the necessary expansion of work scope, and other requirements that are fair for the Public Accountant Firm;
3. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm in the case that Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountant Firm, for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 and other periods in Fiscal Year 2023, including determining the fee amount for the audit service and other requirements for the substitute Public Accountant Firm.

Regarding the decision, the Company has determined KAP Hertanto, Grace, Karunawan to conduct a general audit on the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 and other periods in Fiscal Year 2023 through GMS. The determination of fee amount for the

besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 telah dilakukan Dewan Komisaris melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 096/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 perihal Persetujuan Besaran Honorarium Jasa Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023.

audit service, the necessary expansion of work scope, and other requirements which are fair for KAP Hertanto, Grace, Karunawan to conduct a general audit on the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 and other periods in Fiscal Year 2023 have been carried out by the Board of Commissioners through Letter of Approval of the Board of Commissioners No. 096/EXT/KOM/PPRE/VI/2023 regarding the Approval for the Honorarium Amount for the Public Accountant Service of Auditing the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023.

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2023 PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTANT FIRM FOR FISCAL YEAR 2023		
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant Firm (KAP)	:	Hertanto, Grace, Karunawan Registrasi KMK: 929/KM.1/2014 KMK Registration No. 929/KM.1/2014
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	:	Bambang Karunawan, CPA Registrasi: AP. 0912
Jasa yang Diberikan Provided Service	:	• Jasa Audit: Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 • Jasa Non Audit: » Audit Kepatuhan terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan PSA No. 62 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. » Evaluasi Kinerja PPRE untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN RI No. KEP-100/MBU/ 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. • Audit Service: Audit on the Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022 • Non-Audit Services: » Compliance Audit on the Compliance with Applicable Laws and Regulations according to the provisions of the PSA No. 62 and the State Financial Audit Standards of the BPK for the year ended on December 31, 2023. » PPRE's Performance Evaluation for the Fiscal Year ended on December 31, 2023, according to the Resolution of the Indonesian State Ministry of SOE No. KEP-100/MBU/ 2002 on the SOE Soundness Level Assessment.
Periode Penugasan Assignment Period	:	4 Oktober 2023 s.d 1 Maret 2024 October 4, 2023 until March 1, 2024
Waktu Terbit Laporan Time of Statements Issuance	:	1 Maret 2024 March 1, 2024
Biaya Fee	:	• Jasa Audit: Rp360.360.450 (tidak termasuk pajak) • Jasa Non Audit: » Audit Kepatuhan terhadap Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Rp20.000.000 (tidak termasuk pajak) » Evaluasi Kinerja atas Penilaian Kinerja Rp20.000.000 (tidak termasuk pajak) • Audit Service: Rp360,360,450 (not including tax) • Non-Audit Services: » Compliance Audit on the Compliance with Applicable Laws and Regulations Rp20,000,000 (not including tax) » Performance Evaluation Rp20,000,000 (not including tax)

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Akuntan Publik Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut untuk tahun buku 2018 hingga 2023 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

For transparency purposes, the Public Accountants of the Company's Financial Statements for six consecutive years from fiscal year 2018 to 2023 can be viewed in the following table:

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accountant Firm	**Akuntan** Accountant	**Jasa** Service	**Opini** Opinion	**Biaya Jasa Audit (tidak termasuk pajak) (Rp)** Audit Fee (not including tax) (Rp)
2023	Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014 Registration No. 929/KM.1/2014	Bambang Karunawan, CPA No. Izin: AP.0912 License No. AP.0912	Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2023 Audit of consolidated financial statements per December 31, 2023	Wajar tanpa modifikasian Unqualified	360.360.450
2022	Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014 Registration No. 929/KM.1/2014	Bambang Karunawan, CPA No. Izin: AP.0912 License No. AP.0912	Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2022 Audit of consolidated financial statements per December 31, 2022	Wajar tanpa modifikasian Unqualified	315.000.000
2021	Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014 Registration No. 929/KM.1/2014	Restiawan Adimuryanto No. Izin: AP.0632 License No. AP.0912	Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 Audit of consolidated financial statements per December 31, 2021	Wajar tanpa modifikasian Unqualified	300.0000.000
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014 Registration No. 929/KM.1/2014	Restiawan Adimuryanto No. Izin: AP.0632 License No. AP.0912	Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2020 Audit of consolidated financial statements per December 31, 2020	Wajar tanpa modifikasian Unqualified	330.0000.000
2019	Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014 Registration No. 929/KM.1/2014	Bambang Karunawan, CPA No. Izin: AP.0912 License No. AP.0912	Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019 Audit of consolidated financial statements per December 31, 2019	Wajar tanpa modifikasian Unqualified	300.0000.000
2018	Hertanto, Grace, Karunawan (Member Firm of TIAG) No. Registrasi: 929/KM.1/2014 Registration No. 929/KM.1/2014	Bambang Karunawan, CPA No. Izin: AP.0912 License No. AP.0912	Audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2018 Audit of consolidated financial statements per December 31, 2018	Wajar tanpa modifikasian Unqualified	250.0000.000

PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan sistem yang disusun dalam rangka mengelola dan menjaga keuangan, operasional, serta sebagai indikator umum dalam mengukur penerapan GCG berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku. Pada 15 Desember 2022, Perusahaan telah memperbarui sistem pengendalian internal yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sistem Pengendalian Internal Keuangan dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengendalian internal melalui kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan. Adapun pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi, yang diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perusahaan dilakukan dengan memastikan bahwa:
   a. Tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi dari awal sampai akhir proses;
   b. Penetapan dan pemisahan tanggung jawab dan tugas secara jelas, atas transaksi kepada karyawan yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, peninjauan, dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset;
   c. Pelaksanaan pemeriksaan secara independen.
2. Pengendalian fisik aset di lingkungan Perusahaan, yang diarahkan untuk menjaga aset dari penggunaan yang salah, kecurangan atau menjaga kerugian/kehilangan aset.
3. Otorisasi oleh karyawan berwenang untuk setiap transaksi ekonomis Perusahaan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang valid dilaksanakan, telah diotorisasi serta dilakukan oleh karyawan yang bertindak sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan prosedur/*Work Instruction* atau ketentuan yang berlaku.

The Internal Control System (SPI) is a system built to manage and maintain finance and operations as well as serving as a general indicator in measuring GCG implementation according to applicable regulations and guidelines. On December 15, 2022, the Company updated an internal control system that had been approved by the President Director.

Financial and Operational Internal Control System and Compliance with Laws and Regulations

The Company is committed to improving the internal control system through compliance with applicable laws and regulations, ensuring the availability of valid, comprehensive, and accurate financial statements and management reports, and achieving efficiency and effectiveness in the Company's business activities. The operational and financial control as well as compliance with laws and regulations within the Company are as follows:

1. The separation of functions, aimed to reduce mistakes, fraud, and wastefulness. The separation of function within the Company is carried out while ensuring that:
   a. No one is allowed to control all of the major aspects of a transaction from the beginning to the end of the process;
   b. A clear setting and division of duties and responsibilities on the transaction with different employees regarding authorization, processing and recording, fund payment or receipt, review, and audit, as well as asset storing and handling functions;
   c. The implementation of independent audits.
2. Controlling physical assets within the Company, aiming to protect the assets from misuse, fraud, or damage/loss.
3. Authorization by authorized employees for every economic transaction of the Company. The control aims to ensure that only valid transactions are made, authorized, and carried out by employees acting according to their capacity and responsibilities and adhering to the applicable procedures/Work Instructions or provisions.

4. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi untuk menjamin tersedianya informasi yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan keputusan.
5. Dokumentasi yang tepat dan benar atas pengendalian transaksi.

4. Accurate and timely recording of transactions to ensure the availability of relevant and trustworthy information for decision-making.
5. Accurate and valid documentation of transactional control.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kriteria *Committee of Sponsoring Organization* (COSO)

Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Perusahaan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional, yaitu *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Adapun komponen pengendalian internal menurut COSO sebagai berikut.

Conformity of the Internal Control System and the Committee of Sponsoring Organization (COSO) Criteria

The Internal Control System applied by the Company refers to an internationally recognized framework, namely the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The internal control components according to COSO are as follows.

Seluruh insan Perusahaan wajib berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan. Pernyataan komitmen penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

All Company personnel are obligated to actively participate in managing and implementing the Company's internal control system. The statement of commitment to implementing the Company's internal control system is as follows.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dimulai dari tahap pemahaman, pemetaan, perbaikan, implementasi dan pemantauan. Di mana kesesuaian sistem pengendalian internal COSO yang telah diimplementasikan oleh Perusahaan ditunjukkan sebagai berikut.

Internal Control System Implementation

The implementation of the Company's Internal Control System begins with comprehension, mapping, improvement, implementation, and monitoring. The conformity of the COSO internal control system that has been implemented by the Company is as follows.

Aktivitas Activity	**Implementasi** Implementation
Lingkungan Pengendalian Control Environment	
Penegakan integritas dan nilai etika Enforcement of integrity and ethical values	• Menyusun dan menerapkan aturan perilaku yang berisi standar etika dan pedoman perilaku bagi karyawan di lingkungan Perusahaan. • Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku oleh setiap tingkat pimpinan di Perusahaan dalam bentuk tindakan dan ucapan. • Menegakkan tindakan disiplin terhadap penyimpangan kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. • Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian internal. • Menghilangkan peluang/godaan untuk berperilaku tidak etis, dengan: » Menetapkan target dan sasaran yang realistis/dapat dicapai dan tidak menuntut karyawan untuk mencapai sasaran yang tidak realistis; » Memberikan penghargaan yang sepadan kepada karyawan atas prestasi kerjanya. Penghargaan diberikan dalam rangka penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika. • Setting and implementing a code of conduct containing ethical standards and behavioral guidelines for employees within the Company. • Demonstration of the implementation of the code of conduct by leaders at every level in the Company through actions and words. • Enforcing disciplinary actions upon deviations from policies and procedures or violations of the code of conduct. • Explaining or being held accountable for interventions or neglect of internal control. • Eradicating opportunities/temptations of unethical behavior by: » Setting realistic/feasible targets and objectives and not demanding employees to achieve unrealistic objectives; » Fairly rewarding employees for their work achievement. The rewards are given to enforce integrity and compliance with ethical values.
Komitmen terhadap kompetensi (Departemen Human Capital Management & General Affair) Commitment to competency (Human Capital Management & General Affairs Department)	• Mengidentifikasi dan mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di lingkungan Perusahaan; • Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di lingkungan Perusahaan; • Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu karyawan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; • Memilih pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam tugas dan fungsi kegiatan. • Identifying and defining necessary actions to fulfill the duties and functions in every position within the Company; • Preparing competency standards for every duty and function in every position within the Company; • Running training and coaching programs to assist employees in maintaining and improving their work competency; • Selecting employees with managerial capabilities and expansive technical experiences in the activity duties and responsibilities.

Aktivitas Activity	**Implementasi** Implementation
Kepemimpinan yang kondusif (Direksi) Conducive leadership (Board of Directors)	• Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan Keputusan; • Menerapkan manajemen berbasis kinerja; • Mendorong setiap unit kerja menerapkan sistem pengendalian internal Perusahaan; • Melindungi aset dan informasi dari akses dana atau penggunaan yang tidak sah; • Melakukan interaksi yang intensif dengan pejabat struktural; • Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, kegiatan atau program, dan saran dari pejabat struktural; • Menunjukkan sikap yang adil atau tidak memihak dalam memberi tugas kepada pejabat struktural. • Considering risks in decision-making; • Implementing performance-based management; • Encouraging each work unit to apply the Company's internal control system; • Protecting assets from information from invalid fund access or misuse; • Intensively interacting with structural officials; • Positively responding to reports related to finance, budgeting, activities or programs, and suggestions from structural officials; • Acting fairly and impartially in assigning structural officials.
Pembentukan struktur organisasi Perusahaan yang sesuai kebutuhan (Establishment of the Company's organizational structure as needed)	• Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Perusahaan; • Memberikan kejelasan mengenai uraian pekerjaan pada semua karyawan; • Memberikan kejelasan hubungan jenjang pelaporan internal di lingkungan Perusahaan; • Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian serta perbaikan terhadap struktur organisasi dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis; • Menetapkan jumlah karyawan yang sesuai untuk formasi manajerial dan non-manajerial. • Adapting to the size and nature of the Company's activities; • Providing clarity about job descriptions for all employees; • Providing clarity about the internal reporting hierarchy within the Company; • Evaluating, adjusting, and improving the organizational structure in the event of changes in the strategic environment; • Determining the appropriate number of employees for managerial and non-managerial positions.
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (Appropriate delegation of authority and responsibilities)	• Wewenang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya melalui uraian pekerjaan dan ketentuan otoritas Perusahaan; • Pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan mempunyai keterkaitan dengan unit kerja lain di lingkungan Perusahaan; • Pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana harus memahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya terkait dengan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan. • Authority is granted to appropriate structural officials, functional officials, and executors according to their level of responsibility through job descriptions and the Company's authority provisions; • Structural officials, functional officials, and executors must understand that the authority and responsibility given are related to other work units within the Company; • Structural officials, functional officials, and executors must understand that the implementation of their responsibilities and authority is related to the implementation of the Company's internal control system.
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM (Departemen Human Capital Management & General Affair) Preparation and implementation of fair policies on HC development (Human Capital Management & General Affair Department)	• Melakukan evaluasi atas ketaatan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan; • Menelusuri latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; • Supervisi periodik yang memadai terhadap karyawan. • Evaluating the compliance in the implementation of the Company's internal control system; • Tracking the backgrounds of employee candidates in the recruitment process; • Sufficient periodic supervision of employees.
Perwujudan peran Biro Internal Audit yang efektif Effective implementation of Internal Audit Bureau's roles	• Melakukan evaluasi atas ketaatan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan; • Memberikan penilaian atas kecukupan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan; • Memberikan saran perbaikan atas penerapan sistem pengendalian Perusahaan. • Evaluating the compliance in the implementation of the Company's internal control system; • Assessing the sufficiency of the implementation of the Company's internal control system; • Giving improvement recommendations for the Company's internal control system.

Aktivitas Activity	Implementasi Implementation
Penilaian Risiko Risk Assessment	
Penetapan tujuan Perusahaan Determining Company objectives	Direksi dan Manajemen menetapkan misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Tujuan perusahaan yang telah ditetapkan kemudian dikomunikasikan pada seluruh karyawan. Selain itu, Manajemen menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis Perusahaan. The Board of Directors and Management establish the mission, goals, and objectives that are outlined in the Company's Long-Term Work Plan, the Company's Budget Work Plan, and the Company's Articles of Association. The Company's objectives that have been set are then communicated to all employees. Furthermore, the Management establishes operational strategies that are consistent with the Company's strategic plan.
Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan Determining objectives at activity level	Telah disusun dalam bentuk target kinerja maupun program kerja masing-masing unit kantor pusat dan divisi yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, menunjang, dan tidak bertentangan. Performance targets and work programs for each unit of the head office and division have been formulated, which have been stated in the Company's Work Plan and Budget. The objective at the activity level is to complement, support, and not contradict each other.
Identifikasi risiko dan analisa risiko Risk identification and risk analysis	Perusahaan telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang disampaikan dalam Pedoman GCG. The Company already has a risk management policy conveyed in the GCG Guidelines.
Aktivitas Pengendalian Control Activities	
Peninjauan ulang atas kinerja perusahaan (Biro Corporate Secretary) Review on the Company's performance (Corporate Secretary Bureau)	Meninjau ulang kinerja Perusahaan dilakukan setiap 2 (dua) bulan dalam rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi serta membahas pencapaian kinerja Divisi dilakukan setiap bulan dalam *Management Review*. Reviewing the Company's performance every two months in a meeting with the Board of Commissioners and Directors and discussing the achievement of the performance of each division every month in the Management Review.
Pembinaan SDM (Departemen Human Capital Management & General Affair) HC Development (Human Capital Management & General Affairs Department)	• Terdapat komunikasi yang jelas kepada karyawan 2 (dua) level di bawah Direksi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta realisasi pencapaian targetnya. • Perusahaan telah menyusun program pembinaan sumber daya manusia selama 1 (satu) tahun yang terdiri dari *inhouse training* yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dan program *public training*. • Perusahaan telah memiliki prosedur dalam Peraturan Perusahaan mulai rekrutmen sampai dengan pemberhentian karyawan. • There is clear communication to employees two levels below the Board of Directors regarding the Company's Work Plan and Budget and the realization of its target achievement. • The Company has prepared a human resource development program for a year which consists of in-house training conducted by internal and external parties and a public training program. • The Company has owned a procedure in the Company Regulations starting from recruitment to termination of employees.

Aktivitas Activity	Implementasi Implementation
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi Control on information system management	• Menetapkan *Master Plan* sebagai pedoman dalam pengembangan TI. • Kebijakan tentang keamanan data tertuang dalam Work Instruction. • Determining a Master Plan as a guideline in IT development. • Policies regarding data security are stated in a Work Instruction.
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	
Memiliki situs web (www.pt-presisi. co.id) yang merupakan media saluran komunikasi dengan pihak eksternal Perusahaan Owning a website (www.pt-presisi. co.id) which is a communication channel with external parties of the Company	Dalam situs web telah dikomunikasikan, antara lain: berita terbaru Perusahaan saat ini, Visi, Misi dan tujuan perusahaan, Kode Etik, Pedoman GCG, dan laporan tahunan. On the website, the following have been communicated: the latest news about the Company, the Company's Vision, Mission, and objectives, the Code of Conduct, GCG Guidelines, and annual reports.
Pemantauan Monitoring	
Pemantauan untuk pengendalian biaya pelaksanaan proyek (Divisi Operasional) Monitoring the project cost control (Operations Division)	Perusahaan memiliki kebijakan terkait yang diatur dalam SOP, ERP (SIMAP, SAP), *Fleet Management* (Traxia), dan *Project Management*. The Company has relevant policies regulated in the SOP, ERP (SIMAP, SAP), Fleet Management (Traxia), and Project Management.

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal

Dalam pelaksanaannya, evaluasi atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara komprehensif dilakukan oleh Biro Internal Audit. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendukung asersi Direksi tentang efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan yang diterapkan.

Lebih jauh, evaluasi penerapan sistem pengendalian internal dilakukan dengan menilai 5 (lima) komponen Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada Pedoman Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern BUMN/BUMD/BUL yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun keterangan terkait penilaian sistem pengendalian internal untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Effectiveness of the Internal Control System Implementation

In its implementation, the Internal Control System's adequacy and effectiveness are evaluated comprehensively by the Internal Audit Bureau. This aims to support the Board of Directors' assertion regarding the effectiveness of the implementation of the Company's internal control system.

Furthermore, the evaluation of the internal control system implementation is conducted by assessing five components of the Company's Internal Control System based on the Guidelines for the Evaluation of the Internal Control System Implementation for SOE/ROE/Other Business Entities developed by the Financial and Development Supervisory Agency. The details related to the assessment of the internal control system in 2023 are as follows:

Dasar Metodologi Basis of Methodology	:	Penyebaran Kuesioner, menggunakan pertanyaan dengan jawaban Y atau T dan Penelaahan Dokumen yang relevan Distribution of questionnaires, using Yes or No questions and reviewing relevant documents
Penilai Assessor	:	Biro Internal Audit Internal Audit Bureau
Penugasan Assignment	:	Memo Direktur Utama No.408/M/DIR/PPRE/XII/22 tanggal 15 Desember 2022 Memo of the President Director No. 408/M/DIR/PPRE/XII/22 dated December 15, 2022
Pelaksanaan Implementation	:	P-51 tahun 2022 sampai dengan P-7 tahun 2023 P-51 in 2022 to P-7 in 2023

Hasil penilaian sistem pengendalian internal tahun 2023 menjadi dasar bagi Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Human Capital Management dalam memberikan sertifikasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan tahun buku 2023.

Berikut rincian capaian penerapan sistem pengendalian internal per komponen untuk tahun 2023.

The 2023 internal control system assessment results serve as the basis for the President Director and Director of Finance, Risk Management & Human Capital Management in certifying the Company's Annual Financial Statements for fiscal year 2023.

Below are the details of the internal system control implementation per component in 2023.

Komponen Penerapan Sistem Pengendalian Internal Components of Internal Control System Implementation	**Bobot** Weight	**Pencapaian Tahun 2023** 2023 Achievement	
		Skor Score	**Pencapaian (%)** Achievement (%)
Lingkungan Pengendalian | Control Environment	25,00	21,41	85,65
Penilaian Risiko | Risk Assessment	25,00	21,80	87,21
Aktivitas Pengendalian | Control Activities	20,00	17,69	88,46
Informasi dan Komunikasi | Information and Communication	17,50	15,77	90,12
Pemantauan | Monitoring	12,50	11,74	93,91
Total | Total	100,00	88,42	
Predikat | Predicate		**"Efektif** | Effective"	

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Hasil evaluasi yang telah disampaikan di atas memberikan gambaran tentang kecukupan Sistem Pengendalian Internal PPRE. Melalui hasil penilaian tersebut, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris berpendapat bahwa Sistem Pengendalian Internal PTPP telah mencukupi dan berjalan efektif.

Statements of the Board of Commissioners and Board of Directors on the Sufficiency of Internal Control System

The evaluation results presented above provide an overview of the adequacy of the PPRE Internal Control System. Through these assessment results, the Board of Directors and the Board of Commissioners believe that the PTPP Internal Control System is sufficient and operates effectively.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Management System

Sistem manajemen risiko merupakan sebuah upaya Perusahaan untuk meminimalisir tingkat kemungkinan dan/atau dampak atas sebuah risiko melalui proses penentuan konteks & kriteria, penilaian risiko (identifikasi, analisis dan evaluasi risiko), *recording & reporting*, *communication & consultation*, serta monitoring *& review*.

Beberapa arahan terkait implementasi manajemen risiko perusahaan yang diberikan oleh Dewan Komisaris antara lain:

1. Arahan penerapan kebijakan manajemen risiko PT PP Presisi Tbk tahun 2023 sesuai surat No. 110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023. Arahan tersebut meliputi:
   a. Memonitor kemungkinan risiko aktual (risiko terjadi/tidak terjadi) dan dampak (nilai kerugian yang terjadi) risiko aktual serta kepatuhan *risk owner* dalam melaksanakan realisasi penanganan risikonya melalui Departemen Risk Management;
   b. Memonitor kepatuhan pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan melalui Biro SPI.

Selain itu, Perusahaan juga memiliki mandat dan komitmen terkait manajemen risiko, sebagai berikut:

1. Perusahaan mewajibkan seluruh organisasi menerapkan manajemen risiko dalam setiap proses bisnisnya;
2. Indikator kinerja utama manajemen risiko diselaraskan dengan indikator kinerja Perusahaan;
3. Manajemen risiko terintegrasi ke dalam proses perencanaan strategis dan operasi perusahaan dalam mencapai sasaran Perusahaan;
4. Seluruh proses bisnis Perusahaan wajib patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku;
5. Departemen Risk Management sebagai unit tertinggi pengelola risiko tingkat Perusahaan dibantu oleh masing-masing *Risk Owner*/*Fasilitator* Risiko di setiap unit bisnis Perusahaan;
6. Perusahaan menempatkan personel yang cakap dan memadai di Departemen Risk Management dan masing-masing bisnis unit (fasilitator risiko) dalam menjalankan manajemen risiko;
7. Perusahaan senantiasa melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam penerapan manajemen risiko;
8. Perusahaan secara berkala melakukan pengawasan dan meninjau ulang kerangka kerja manajemen risiko.

The risk management system is an effort by the Company to minimize the likelihood and/or impact of risks through the process of determining context & criteria, risk assessment (risk identification, analysis, and evaluation), recording & reporting, communication & consultation, and monitoring & review.

Some directions related to the implementation of corporate risk management given by the Board of Commissioners include:

1. Directives of the risk management policy implementation of PT PP Presisi Tbk of 2023 according to letter No. 110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023 dated July 27, 2023. The directives include:
   a. Monitoring the possibility of actual risks (occurring/non-occurring risk) and impact (cost of occurring loss) of actual risks and the risk owner's compliance in implementing their risk management through the Risk Management Department;
   b. Monitoring the compliance of internal control system implementation through the SPI Bureau.

Moreover, the Company also has the following mandates and commitments related to risk management:

1. The Company obligates all organizations to implement risk management in all of their business processes;
2. The risk management main performance indicator is adjusted to the Company's main performance indicator;
3. The risk management is integrated into the Company's strategic and operational planning process to achieve Company objectives;
4. All of the Company's business lines must comply with applicable laws and regulations;
5. The Risk Management Department, as the top unit in corporate-level risk management, is aided by every Risk Owner/Facilitator in all business units of the Company;
6. The Company places capable and proper personnel in the Risk Management Department and each business unit (risk facilitator) in implementing risk management;
7. The Company always communicates and consults the stakeholders in implementing risk management;
8. The Company periodically supervises and reviews the risk management framework.

Roadmap Penerapan Manajemen Risiko 2021-2024

The 2021-2024 Roadmap for Risk Management Implementation

Roadmap	Membangun Infrastruktur Building Infrastructures	Membangun Kapasitas Building Capacity	Integrasi Manajemen Risiko Risk Management Integration	Membangun Budaya Sadar Risiko Building Risk-Awareness Culture	
Kegiatan Activity	• Kebijakan manajemen risiko. • Panduan manajemen risiko. • prosedur proses manajemen risiko. • Fungsi Manajemen Risiko. • Fasilitator Risiko di tiap Unit. • Sarana dan prasarana dan lain-lain. • Risk management policies. • Risk management guidelines. • Risk management process procedures. • Risk Management Function. • Risk Facilitator in every Unit. • Other facilities and infrastructures.	• Membangun sistem manajemen risiko. • Sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko untuk Fasilitator Risiko. • Evaluasi atas implementasi manajemen risiko yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Fasilitator Risiko. • Building risk management system. • Risk management dissemination and training for Risk Facilitators. • Evaluation of the risk management implemented by each Risk Facilitator.	• Integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan bisnis dan anggaran. • Integrasi manajemen risiko ke dalam internal audit. • Integrasi manajemen risiko ke dalam manajemen proyek. • Integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis lainnya (contoh: Aksi Korporasi dan Investasi). • Integrating risk management into the business and budget planning process. • Integrating risk management into the internal audit. • Integrating risk management into project management.	• Pengkajian budaya risiko. • Pelatihan budaya risiko. • Membangun budaya risiko yang terbuka. • Penerapan manajemen risiko menjadi bagian penilaian kinerja unit. • Penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko perusahaan. • Reviewing risk culture. • Training programs on risk culture. • Developing an open risk culture. • Risk management implementation becomes an aspect of unit performance assessment. • Assessment of the maturity level of the Company's risk management implementation.	
Keluaran Output	• Struktur tata kelola risiko. • Kejelasan akuntabilitas penerapan manajemen risiko pada: » Lini kesatu. » Lini kedua. » Lini ketiga. • Risk governance structure. • Clarity regarding the accountability in risk management implementation in: » The first line. » The second line. » The third line.	• Manajer dan karyawan paham dan mampu mengelola risiko. • Sistem informasi manajemen risiko berjalan dengan baik dan mendukung proses penerapan manajemen risiko. • Managers and employees understand and can manage risks. • The risk management information system works properly and supports the risk management implementation process.	• Anggaran berbasis risiko. • Audit berbasis risiko. • Pengambilan keputusan berbasis risiko. • Perencanaan strategis berbasis risiko. • Risk-based budget. • Risk-based audit. • Risk-based decision-making. • Risk-based strategic planning.	• Meningkatnya kesadaran terhadap risiko sebagai bagian dari pengelolaan bisnis. • Perilaku sadar risiko mulai menjadi kebiasaan. • *Score* maturitas penerapan manajemen risiko sesuai target. • The growing awareness of risks as a part of business management. • Risk-awareness behavior becomes a habit. • The maturity score of risk management implementation achieves the target.	Manajemen Risiko Menciptakan dan Melindungi Nilai Risk Management Creates and Preserve Value

Roadmap	**Membangun Infrastruktur** Building Infrastructures	**Membangun Kapasitas** Building Capacity	**Integrasi Manajemen Risiko** Risk Management Integration	**Membangun Budaya Sadar Risiko** Building Risk-Awareness Culture
Hasil Result	• Kesiapan untuk menerapkan manajemen risiko. • Readiness to implement risk management.	• Manajemen risiko lebih berdasarkan manfaat daripada kepatuhan. • Risk management is more based on benefit than compliance.	• Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses bisnis. • Risk management is an integrated part of the business plan.	• Budaya sadar risiko menjadi bagian dari budaya organisasi. • Risk-awareness culture becomes a part of Company culture.
	Evaluasi Evaluation	Evaluasi Evaluation	Evaluasi Evaluation	Evaluasi Evaluation
Proses penerapan Manajemen Risiko yang Berkesinambungan Continuous Process of Risk Management Implementation				

Prinsip Manajemen Risiko

Dalam mengelola risiko, Perusahaan berpedoman pada ISO:31000:2018 yang memuat prinsip manajemen risiko dengan uraian sebagai berikut.

Risk Management Principles

In managing risks, the Company refers to ISO 31000:2018 which contains risk management principles as described below.

	Uraian *Description*
Tujuan Manajemen Risiko Risk Management Objectives	
Penciptaan dan Perlindungan Nilai Value Creation and Preservation	Pelaksanaan manajemen risiko perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mendorong timbulnya inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Dengan adanya manajemen risiko diharapkan Perusahaan mampu mengetahui risiko dan peluang yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, sehingga diharapkan akan muncul tindakan pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan maupun dampak kerugian atas terjadinya risiko, termasuk didalamnya melakukan inovasi atau tindakan bisnis lain yang dianggap perlu sebagai upaya memanfaatkan peluang yang ada. The Company's risk management aims to improve performance, encourage the emergence of innovation, and support target achievement. The risk management in the Company is expected to identify potential risks and opportunities in the future, and thus the emergence of preventive measures is expected to minimize the possibility and impacts of losses from occurring risks, including creating innovations or implementing other business measures deemed necessary as an effort to benefit from existing opportunities.
Prinsip Manajemen Risiko Risk Management Principles	
Terintegrasi Integrated	Manajemen risiko bukan merupakan kegiatan atau tanggung jawab satu unit saja (Departemen Risk Management) melainkan merupakan tanggung jawab keseluruhan unit pada sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan hasil identifikasi yang relevan atas risiko, tidak ada yang lebih mengetahui kondisi real suatu unit kecuali unit itu sendiri, sehingga pada setiap unit telah dilakukan penunjukan Fasilitator Risiko untuk mengakomodir implementasi manajemen risiko unit tersebut. Untuk kondisi yang memerlukan pembahasan lintas unit, Perusahaan telah mewadahi pembahasan risiko melalui Tim Manajemen Risiko Perusahaan yang beranggotakan keseluruhan unit di Perusahaan. Risk management is not the activity or responsibility of one unit only (Risk Management Department), but also the responsibility of all units in a company. This is because to obtain relevant risk identification results, no one knows the real conditions of a unit better than the unit itself. Therefore, each unit has appointed a Risk Facilitator to accommodate the implementation of the unit's risk management. For conditions that require cross-unit discussion, the Company has facilitated risk discussion through the Company's Risk Management Team consisting of all units in the Company.
Terstruktur dan Komprehensif Structured and Comprehensive	Implementasi manajemen risiko harus dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan komprehensif agar hasil implementasi tersebut terukur dan dapat dibandingkan. Sebagai upaya perwujudan manajemen risiko yang terstruktur dan komprehensif, Perusahaan menyusun kebijakan manajemen risiko, Prosedur dan WI manajemen risiko serta mengembangkan platform pengelolaan risiko secara *online* (eRisk). Dengan upaya tersebut diharapkan keselarasan pemahaman dan pola pikir dalam implementasi manajemen risiko dapat terwujud. Risk management implementation must be carried out systematically, structured, and comprehensively so that the results of the implementation can be measured and compared. To realize structured and comprehensive risk management, the Company prepares risk management policies, Risk Management Procedures, and WIs, and develops an online risk management platform (eRisk). These efforts are expected to align the comprehension and mindsets in risk management implementation.

	Uraian *Description*
Disesuaikan Adjusted	Untuk memastikan implementasi manajemen risiko dapat mendukung ketercapaian sasaran, maka Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian atas kerangka kerja dan proses manajemen risiko Perusahaan dengan tetap mempertimbangkan faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. To ensure that risk management implementation can support target achievement, the Company periodically evaluates and adjusts the Company's risk management framework and process, while still considering external and internal factors that can affect target achievement.
Inklusif Inclusive	Keterlibatan pemangku kepentingan sebagai contoh jajaran Direksi dan manajemen merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya perwujudan implementasi manajemen risiko yang baik dalam hal ini menumbuhkan budaya sadar risiko di lingkungan Perusahaan. Dalam hal peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi manajemen risiko, Perusahaan telah melakukan beberapa upaya antara lain penyusunan komitmen berupa *Risk Management Policy*, pembentukan Tim Manajemen Risiko Perusahaan, penunjukan Fasilitator Risiko unit, penerapan *three lines* model, pelaporan hasil implementasi manajemen risiko kepada Direksi dan Komisaris setiap tiga bulan sekali dan lain-lain. The involvement of stakeholders, such as the Board of Directors and management, is a significant factor in implementing excellent risk management, in this case fostering a risk-awareness culture within the Company. In terms of increasing stakeholder involvement in risk management implementation, the Company has made several efforts, including drafting a commitment in the form of a Risk Management Policy, forming the Company's Risk Management Team, appointing Unit Risk Facilitators, implementing a three-line model, reporting the results of risk management implementation to the Board of Directors and the Board of Commissioners every three months, and so forth.
Dinamis Dynamic	Ketika kegiatan atau proses bisnis Perusahaan mengalami perubahan, maka hal ini dapat mempengaruhi perubahan ketentuan implementasi manajemen risiko Perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan *review* berkala atas kesesuaian metode dan kerangka kerja manajemen risiko sehingga tetap selaras dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Perusahaan. Untuk itu Perusahaan selalu melakukan *review* dan penyesuaian kebijakan hingga Prosedur atau WI manajemen risiko setiap dua tahun sekali atau sesuai kebutuhan. When the Company's business activities or processes change, this can affect changes in the provisions for the Company's risk management implementation. Therefore, it is necessary to conduct periodic monitoring and review of the suitability of the risk management methods and framework so that they remain in line with the targets that the Company wants to achieve. To this end, the Company always reviews and adjusts the policy and the Risk Management Procedures or WI every two years or as deemed necessary.
Informasi Terbaik yang Tersedia Best Available Information	Ketersediaan informasi yang memadai sangat diperlukan dalam proses implementasi manajemen risiko Perusahaan. Informasi yang jelas atas sebuah kegiatan memudahkan *risk owner* dalam menyusun risiko yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu untuk menentukan estimasi nilai kemungkinan dan dampak kerugian yang mungkin timbul, dapat digunakan data historis (data jumlah kejadian dan dampak atas risiko serupa) yang pernah terjadi dalam platform eRisk maupun *expert judgement*. The availability of adequate information is highly necessary in the process the risk management implementation in the Company. Clear information about an activity helps the risk owner identify the risks that may occur in the activity process. Moreover, to determine the estimated value of the probability of occurrence and the impact of the losses that may arise, historical data (data on the number of occurrences and impacts of similar risks) that have occurred in the eRisk platform or expert judgment can be used.
Faktor Manusia dan Budaya Human and Cultural Factor	Penerapan manajemen risiko Perusahaan telah mempertimbangkan faktor manusia dan budaya di dalamnya. Salah satu upaya penerapan manajemen risiko yang memperhatikan faktor manusia dan budaya adalah dengan membangun platform eRisk untuk menyediakan sarana implementasi manajemen risiko yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh *risk owner* mulai UKP hingga proyek-proyek *remote area* sehingga diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kualitas dan tingkat kesadaran (budaya) implementasi manajemen risiko di lingkungan Perusahaan. The Company's risk management implementation has considered human and cultural factors within it. One of the risk management efforts that considers human and cultural factors is building an eRisk platform to provide a means of implementing risk management that can be easily accessed by all risk owners, from UKP to remote area projects. This effort is expected to improve the quality and awareness level (culture) of risk management implementation within the Company.
Peningkatan Berkelanjutan Continuous Improvement	Dalam upaya peningkatan kualitas implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan, Perusahaan secara rutin melakukan asesmen maturitas manajemen risiko untuk mengetahui gambaran kondisi implementasi manajemen risiko yang sudah dilaksanakan dan aspek apa saja yang dapat ditingkatkan dalam upaya perbaikan implementasi manajemen risiko Perusahaan ke depan. To continuously improve the quality of risk management implementation, the Company regularly conducts risk management maturity assessments to obtain an overview of the risk management that has been implemented and what aspects can be improved to enhance the Company's risk management implementation in the future.

Proses Manajemen Risiko

Perusahaan melaksanakan 8 (delapan) tahapan dalam proses implementasi manajemen risiko sebagai berikut:

Risk Management Process

The Company undergoes the following eight stages in the risk management implementation process:

Penentuan Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria	Determining Scope, Context, and Criteria
Penentuan lingkup, konteks dan kriteria dilakukan di awal kajian manajemen risiko untuk memberi batasan dalam proses identifikasi risiko.	The scope, context, and criteria are determined at the beginning of the risk management review to provide limitations in the risk identification process.
Identifikasi Risiko	Risk Identification
Dalam proses identifikasi risiko, beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain: • Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi sasaran/tujuan pencapaian yang ditargetkan. • Identifikasi dalam manajemen risiko kuantitatif dilaksanakan pada proses bisnis dengan menggunakan prinsip pareto, sehingga jumlah risiko terbatas, hanya risiko utama dan berbahaya yang teridentifikasi. • Identifikasi risiko dilakukan sesuai nomenklatur, apabila risiko yang teridentifikasi tidak terdaftar pada nomenklatur maka dapat dipilih opsi lain-lain dan menuliskan risiko baru.	During the process of identifying risks, several provisions that require attention are: • The identified risks are events that may affect the achievement of established objectives/goals. • Identification in quantitative risk management is carried out in the business process using the Pareto principle, limiting the number of risks, and only identifying main and threatening risks. • Risk identification is conducted according to nomenclatures, if the identified risks are not listed in the nomenclature, other options can be selected and new risks can be stated.
Analisis Risiko	Risk Analysis
Analisis risiko menggunakan metode kuantitatif di mana penentuan nilai dampak menggunakan data histori, *expert judgement*, dan asumsi *risk owner*. Sedangkan penentuan nilai kemungkinan menggunakan rumus distribusi *poisson*.	Risk analysis uses a quantitative method in which the determination of impact value uses historical data, expert judgment, and the risk owner's assumptions. Meanwhile, the determination of the possibility value uses the *Poisson* distribution formula.
Evaluasi Risiko	Risk Evaluation
Setelah dilakukan analisis risiko dan ditetapkan nilai kemungkinan serta dampaknya, untuk selanjutnya risiko dipetakan dengan ketentuan sebagai berikut: • Kuadran I (satu): Kemungkinan di bawah batas toleransi, dampak di bawah batas toleransi. • Kuadran II (dua): Kemungkinan di atas batas toleransi, dampak di bawah batas toleransi. • Kuadran III (tiga): Kemungkinan di bawah batas toleransi, dampak di atas batas toleransi. • Kuadran IV (empat): Kemungkinan di atas batas toleransi, dampak di atas batas toleransi.	After the risk is analyzed and the possibility and impact values are determined, risks are mapped with the following rules: • Quadrant I: Possibility below the tolerance limit, impact below the tolerance limit. • Quadrant II: Possibility above the tolerance limit, impact below the tolerance limit. • Quadrant III: Possibility below the tolerance limit, impact above the tolerance limit. • Quadrant IV: Possibility above the tolerance limit, impact above the tolerance limit.
Risk Treatment	Risk Treatment
Penentuan *risk treatment* didasarkan pada posisi risiko di dalam peta risiko. Masing-masing kuadran dalam peta risiko memiliki tingkat urgensi yang berbeda berurut dari kuadran I (satu) meningkat hingga batas maksimal di kuadran IV (empat). • Kuadran I (satu): Rendah: Terima. • Kuadran II (dua): Menengah: Cegah. • Kuadran III (tiga): Tinggi: Mitigasi. • Kuadran IV (empat): Ekstrim: Cegah & Mitigasi.	The determination of risk treatment is based on the risk's position in the risk matrix. Each quadrant in the risk matrix has a different urgency level, increasing from quadrant I to a maximum limit at quadrant IV. • Quadrant I: Low: Accept. • Quadrant II: Moderate: Prevent. • Quadrant III: High: Mitigate. • Quadrant IV: Extreme: Prevent & Mitigate.
Monitoring dan *Review* Risiko	Risk Monitoring and Review
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan aplikasi eRisk (platform manajemen risiko *online*) setiap bulan sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) untuk manajemen risiko konstruksi dan untuk manajemen risiko nonkonstruksi dilakukan setiap triwulan.	Monitoring and evaluation are carried out through the eRisk (online risk management platform) application every month before the 25th of the month for construction risk management and quarterly for non-construction risk management.
Konsultasi dan Komunikasi Risiko	Risk Consultation and Communication
Konsultasi dan komunikasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan setiap saat ketika *risk owner* memerlukan *second opinion* dalam melakukan proses manajemen risiko.	Consultation and communication of risk management implementation are carried out when risk owners need a second opinion in the process of managing risks.
Recording **dan** *Reporting*	Recording and Reporting
Recording dan *reporting* pelaksanaan manajemen risiko dilaksanakan melalui platform manajemen risiko berbasis *online* (eRisk).	Recording and reporting risk management implementation is carried out through the online-based risk management platform (eRisk).

Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi Risiko

Berdasarkan kajian yang dilakukan selama tahun 2023, 3 risiko terbesar yang dihadapi Perusahaan serta upaya mitigasinya diuraikan sebagai berikut:

Risk Types and Mitigation Efforts

According to reviews throughout 2023, the three greatest risks faced by the Company and its mitigation measures are described as follows:

Risiko Performance Performance Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	Realisasi kinerja Perusahaan belum mencapai target The Company's performance has not reached its targets
Upaya Mitigasi Mitigation Measures	• *Refocusing* lini bisnis *civil work* dan *mining services* • Peningkatan *competitiveness tender* • Peningkatan pengendalian kinerja Perusahaan • Peningkatan pengendalian investasi perusahaan dengan melakukan penilaian risiko secara menyeluruh dan menganalisa kelayakan investasi yang akan dijalankan • Peningkatan efisiensi di semua lini bisnis • Refocusing on civil work and mining services business lines • Increasing tender competitiveness • Improving the Company's performance control • Improving the Company's investment control by comprehensively assessing risks and analyzing the propriety of upcoming investments • Improving efficiency in all business lines

Risiko Performance Performance Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	Pelaksanaan Proyek belum mencapai target *delivery* waktu dan biaya Project implementation has not achieved delivery time and cost targets
Upaya Mitigasi Mitigation Measures	• Klaim keterlambatan dan kerugian yang diakibatkan oleh *owner* • Klausul kontrak yang mengakomodir kompensasi atas perubahan *design* • Pemberdayaan representatif *expertise* terkait metode pelaksanaan & biaya proyek • Peningkatan kompetensi dan dukungan rekan bisnis dengan harga kompetitif • *Development Integrated System Management* korporat • *Contract agreement* dengan *owner*, *partner* KSO dan *vendor* lebih memperhatikan keseimbangan hak & kewajiban, serta lingkup pekerjaan • Claiming lateness and damage caused by owners • Contract clauses accommodate compensations due to design changes • Developing the expertise of representatives regarding execution methods and project costs • Increasing the business partners competency and support with competitive prices • Developing the corporate Integrated System Management • Contract agreements with owners, KSO partners, and vendors prioritize a balance of rights and obligations, as well as the scope of work

Risiko Operational Operational Risk	
Deskripsi Risiko Risk Description	Produktivitas alat belum mencapai target Equipment productivity has not reached targets
Upaya Mitigasi Mitigation Measures	• Memastikan kesiapan alat berat dalam kondisi *ready for use* • Perawatan dan perbaikan alat secara terjadwal dan terdokumentasi dengan rapi • Melaksanakan *checklist* alat yang *idle*, penyesuaian kelengkapan alat berat dan melakukan perbaikan apabila terdapat kerusakan sehingga meminimalisir alat *idle* • Pemberlakuan dan monitoring pemeriksaan dan pengecekan harian pada alat operasi • Ensuring heavy equipment readiness in a ready-for-use condition • Scheduled and well-documented equipment maintenance and repairs • Implementing checklists for idle equipment, adjusting heavy equipment completeness, and making repairs if there is damage to minimize equipment idleness • The implementation and monitoring of daily inspections and checks on operational equipment

Evaluasi Efektivitas Implementasi Sistem Manajemen Risiko

Pada tahun 2023 Perusahaan melakukan penilaian kepatuhan penerapan manajemen risiko konstruksi dan non-konstruksi. Berdasarkan evaluasi tersebut, tingkat kepatuhan penerapan manajemen risiko Perusahaan di tahun 2023 mencapai nilai 88,07% dari target 85% dengan rincian sebagai berikut.

Evaluation of the Effectiveness of Risk Management System Implementation

In 2023, the Company assesses the compliance of construction and non-construction risk management implementation. According to the evaluation, the Company's compliance level in risk management implementation in 2023 is 88.07% compared to a target of 85% with the following details.

Triwulan Quarter	Skor Score
Triwulan I tahun 2023 Quarter I of 2023	87,06%
Triwulan II tahun 2023 Quarter II of 2023	87,06%
Triwulan III tahun 2023 Quarter III of 2023	87,29%
Triwulan IV tahun 2023 Quarter IV of 2023	89,81%
Skor Rata-Rata Average Score	**88,07%**

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi menilai implementasi sistem manajemen risiko secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik, namun pada beberapa bagian masih diperlukan perbaikan. Pada tahun 2023, Perusahaan berupaya untuk menyempurnakan implementasi manajemen risiko melalui berbagai cara, antara lain:

1. Peningkatan frekuensi keterlibatan penerapan manajemen risiko dalam berbagai proses bisnis Perusahaan (pengajuan tender, pelaksanaan proyek, pelaksanaan aksi korporasi, pelaksanaan program kerja, pelaksanaan program khusus, pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan, *review* kontrak dan adendum kontrak);
2. Pengembangan sarana manajemen risiko berbasis *online* (eRisk) berikut program sosialisasi eRisk;
3. *Refreshment* manajemen risiko untuk *risk owner*;
4. *Review*, evaluasi dan pembaharuan Prosedur & WI manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Perusahaan;
5. Evaluasi & monitoring kepatuhan implementasi manajemen risiko;
6. *Assessment* maturitas manajemen risiko.

Sementara itu, hal yang perlu ditingkatkan dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan sesuai arahan Dewan Komisaris melalui surat No. 110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yaitu perlu dilakukan monitoring atas:

1. Kemungkinan risiko aktual (risiko terjadi/tidak terjadi) dan dampak (nilai kerugian yang terjadi) risiko aktual;
2. Kepatuhan *risk owner* dalam melaksanakan realisasi penanganan risikonya.

Board of Commissioners and Board of Directors Statement on Risk Management System Adequacy

The Board of Commissioners and Board of Directors regard that the risk management system as a whole has been implemented well despite several areas of improvement. In 2023, the Company strives to refine risk management implementation through various means, namely:

1. Increasing the frequency of risk management involvement in the Company's business processes (tender proposal, project implementation, corporate action, work program implementation, special program implementation, anti-bribery management system implementation, contract review, and contract addendum);
2. Developing an online-based risk management facility (eRisk) along with eRisk dissemination;
3. Risk management refreshment for risk owners;
4. Reviewing, evaluating, and updating risk management Procedures and WI applicable within the Company;
5. Evaluating & monitoring the compliance in risk management implementation;
6. Assessing risk management maturity.

Meanwhile, the area of improvement in the risk management implementation in the Company, according to the Board of Commissioners' directives through Letter No. 110/EXT/KOM/PPRE/VII/2023 dated July 27, 2023, monitoring is required over:

1. The possibility of actual risks (occurring/non-occurring risk) and impact (cost of occurring damage) of actual risks;
2. Risk owners' compliance in implementing their risk management.

Rencana Sistem Manajemen Risiko ke Depan

Pengembangan sistem manajemen risiko Perusahaan tahun 2024 mengacu pada peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN antara lain.

1. Melakukan evaluasi dan *update roadmap* manajemen risiko Perusahaan menyesuaikan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko sebelumnya;
2. Pemenuhan *mandatory* kuantitas dan kualifikasi organ pengelola risiko sesuai intensitas risiko Perusahaan;
3. Penyesuaian KPI manajemen risiko Perusahaan;
4. Proses manajemen risiko (penyusunan profil risiko, penilaian risiko, perlakuan risiko, evaluasi dan pelaporan manajemen risiko) menyesuaikan ketentuan BUMN;
5. Penyesuaian WI dan Prosedur manajemen risiko sesuai ketentuan proses manajemen risiko BUMN.

Future Plans for the Risk Management System

The 2024 development of the Company's risk management system refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines of Governance and Significant Corporate Activities of SOEs as described below.

1. Evaluating and updating the Company's risk management roadmap according to the result of the previous risk management's maturity level assessment;
2. Fulfilling mandatory quantity and qualification of risk managing organs according to the Company's risk intensity;
3. Adjusting the Company's risk management KPI;
4. Risk management process (creating risk profile, risk assessment, risk treatment, risk management evaluation and reporting) according to SOE provisions;
5. Adjusting risk management WI and Procedures according to the SOE risk management provisions.

Workshop PT PP Presisi Tbk, Bekasi

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Governance

Pada era modern ini, hampir semua jenis dan bidang usaha memerlukan peran Teknologi Informasi (TI). Perusahaan menyadari bahwa optimalisasi penggunaan TI akan menunjang Perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan dan tantangan, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan bisnis.

Untuk itu, Perusahaan senantiasa merancang, mengembangkan, dan menerapkan Teknologi Informasi yang tepat dengan berdasarkan pada *IT Master Plan* dan *IT Work Instruction*.

In this modern era, almost all business types and sectors require the involvement of Information Technology (IT). The Company realizes that optimizing the use of IT will support the Company in adapting to changes and challenges, thus accelerating business growth.

To this end, the Company always designs, develops, and implements appropriate Information Technology based on the IT Master Plan and IT Work Instruction.

IT Master Plan	*IT Work Instruction*
IT Master Plan merupakan sebuah *blueprint* yang dirancang sebagai pondasi awal pengembangan sistem informasi Perusahaan yang terintegrasi. Terbentuknya *IT Master Plan* merupakan informasi strategis terkait inisiatif TI untuk memenuhi kebutuhan bisnis spesifik di unit bisnis penggunaan jasa TI serta strategi pendekatan pelaksanaannya. Dokumen ini memberikan gambaran tingkat tinggi terhadap prioritas pelaksanaan inisiatif TI serta bagaimana inisiatif TI dalam meningkatkan dukungan TI terhadap bisnis Perusahaan. IT Master Plan is a blueprint designed as the initial foundation for the development of an integrated information system in the Company. The IT Master Plan establishment is strategic information related to IT initiatives to meet specific business needs in IT service business units and the strategy for its implementation approach. This document provides a high-level overview of the priority in implementing IT initiatives and how IT initiatives can improve IT support for the Company's business.	*IT Work Instruction* merupakan pedoman terstruktur yang berkaitan dengan proses kerja Departemen TI. Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam mendukung pengembangan TI adalah dengan membentuk *Champion Team Project* Sentralisasi Pengendalian melalui Surat Keputusan Direksi No. 114/SK/DIR/PPRE/VII/2020 pada tanggal 21 Juli 2020 tentang Pembentukan *Champion Team Project* Sentralisasi Pengendalian Tahun 2020. IT Work Instruction is a structured guideline related to the IT Department's work process. One form of the Company's commitment to supporting IT development is forming the Champion Team Project for Control Centralization through the Decree of the Board of Directors No. 114/SK/DIR/PPRE/VII/2020 dated July 21, 2020, regarding the Formation of the Champion Team Project for Control Centralization in 2020.

Struktur Organisasi TI

Pengelolaan TI Perusahaan berada di bawah Divisi Business Development & Portfolio Management, di mana Divisi ini akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan dan pengembangan TI Perusahaan. Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan Departemen IT & ERP Business Operation, berjumlah 5 (lima) orang. Adapun struktur organisasi TI Perusahaan adalah sebagai berikut:

IT Organization Structure

The Company's IT management is under the Business Development & Portfolio Management Division, which will be responsible for all IT management and development processes in the Company. On December 31, 2023, the number of employees in the IT & ERP Business Operation Department is five personnel. The Company's IT organizational structure is as follows:

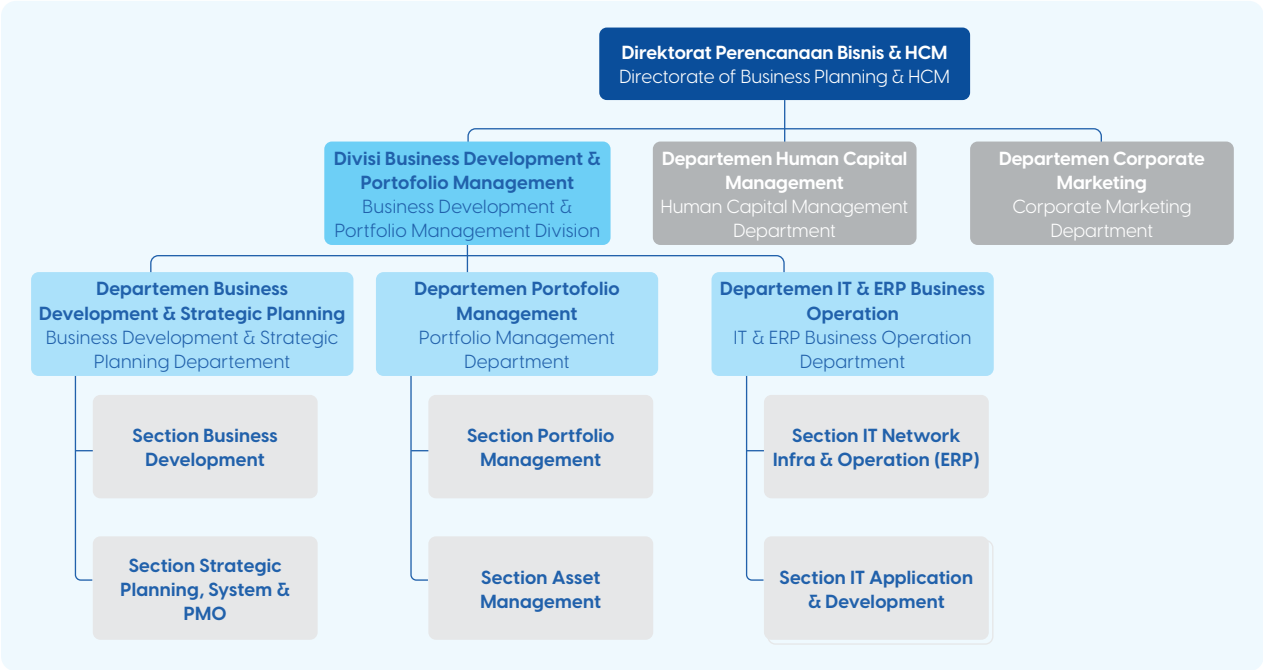

Adapun tugas dan tanggung jawab Departemen IT & ERP Business Operation adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang penyusunan dan pengelolaan *IT Master Plan*, program kerja TI, tata kelola TI, dan layanan TI agar selaras dengan target, strategi, dan kebutuhan bisnis Perusahaan;
2. Melakukan pengembangan sistem informasi baru atau perubahan sesuai dengan kebutuhan maupun kebijakan Perusahaan;
3. Mengelola operasional infrastruktur TI, fasilitas TI, dan fasilitas *end user computing* untuk menjamin ketersediaan, keamanan, keandalan, serta keakuratan layanan TI dalam menunjang kinerja dan bisnis Perusahaan.

The duties and responsibilities of the IT & ERP Business Operation Department are as follows:

1. Planning, coordinating, directing, carrying out, and evaluating activities in the preparation and management of the IT Master Plan, IT governance, and IT services to be aligned with the Company's target, strategy, and business needs;
2. Developing a new information system or changes according to Company needs and policies;
3. Managing the operations of IT infrastructure, IT facilities, and computing end-user facilities to ensure the availability, security, reliability, and accuracy of IT services in supporting the Company.

SIMAP *Online*

Perusahaan telah mengembangkan SIMAP atau disebut juga SIMAP *Online* (Sistem Informasi Manajemen Presisi *Online*) pada tahun 2018. SIMAP merupakan platform digital berbasis web *original* yang dapat diakses pada www.simap.pp-presisi.co.id, dengan tujuan untuk memudahkan dan memusatkan proses bisnis Perusahaan menjadi sentralisasi sistem serta untuk menyelesaikan berbagai masalah dan ketidakefisienan proses kerja yang timbul karena prosesnya yang belum terintegrasi secara *online*.

1. Dampak Positif SIMAP *Online*:
   a. Mutu Perusahaan naik 3x lipat, dengan cepatnya informasi yang didapat;

Online SIMAP

The Company has developed SIMAP, also known as SIMAP Online (Sistem Informasi Manajemen Presisi Online - Online Precision Management System), in 2018. SIMAP is an original web-based digital platform that can be accessed at www.simap.pp-presisi.co.id, aiming to facilitate and centralize the Company's business process into a centralized system and to resolve various work issues and inefficiency that arise from its process that has not been integrated online.

1. Positive Impacts of SIMAP Online:
   a. The Company's quality increases by threefold due to the rapid information gain;

b. Manajerial dapat mengambil keputusan lebih tepat dengan data akurat dan tepat waktu;
c. Menjadi lebih terkendali dan menghemat biaya;
d. 99% tidak ada berkas yang hilang.

2. SIMAP *Online* dapat digunakan untuk:
   a. Personel Proyek dan Unit Kantor Pusat Perusahaan.

3. Sasaran Inovasi:
   a. Memantau segala laporan keuangan dan kinerja di proyek, termasuk berkas perizinan dan legalitas menghindari hilang dan kedaluwarsa;
   b. Menghemat biaya dalam koordinasi laporan dengan proyek, dengan satu informasi yang sama, dan tidak membayar denda keterlambatan perizinan;
   c. Memastikan kualitas mutu dengan meningkatkan informasi yang akurat dan cepat dari pihak internal dan eksternal;
   d. Mendapatkan laporan yang *valid* agar cepat dalam membuat keputusan manajerial;
   e. Meningkatkan waktu dalam mendapatkan laporan yang berhubungan dengan laporan proyek dengan pemberian akses ke semua proyek untuk SIMAP;
   f. Mempermudah dan mempercepat proses pelaporan tanpa rapat *offline*, dengan sistem yang berbasis web, menyediakan *data center* yang dibutuhkan lintas divisi dan memiliki keterangan rinci;
   g. Meningkatkan standar QHSE perusahaan dengan mengkaji dan memonitoring laporan *Non-Conformance* QHSE secara tepat waktu;
   h. Meningkatkan *Go Green Campaign* dalam lingkungan perusahaan dengan mengurangi penggunaan kertas.

E-Procurement

Di tahun 2021, Perusahaan telah mengembangkan *E-Procurement* (*E-PROC*), yaitu platform untuk pendaftaran *vendor* internal dan eksternal yang dapat diakses pada www.eproc.pp-presisi.co.id. Melalui *E-PROC*, *vendor* dapat melakukan pendaftaran secara *online* serta sebagai *database* keseluruhan *vendor* Perusahaan. Adapun fitur baru yang telah dikembangkan yaitu Peta Harga yang berfungsi sebagai *database* dan acuan harga material.

Sistem Informasi Karyawan Terpadu

START

Di tahun 2021, Perusahaan juga telah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang ditujukan untuk karyawan sebagai wadah informasi/data personal masing-masing karyawan yang disebut Sistem Informasi Karyawan Terpadu (START). Sistem ini memudahkan karyawan dalam melakukan pengecekan data antara lain biodata, absensi,

b. The Management can make better decisions with accurate and prompt data;
c. Better controlled and cost-efficient;
d. No missing files at a 99% rate.

2. SIMAP Online may be used for:
   a. Project Personnel and the Company's Head Office Units.

3. Innovation Targets:
   a. Monitoring all financial statements and performance in projects, including permit and legal documents to prevent loss and expiration;
   b. Saving cost in report coordination with projects, having the same information, and not paying charges due to permit lateness;
   c. Ensuring quality by improving information accuracy and speed from internal and external parties;
   d. Acquiring valid reports for prompt managerial decision-making;
   e. Improving time efficiency in acquiring reports related to project reports by providing access to all projects in the case of SIMAP;
   f. Simplifying and accelerating the reporting process without offline meetings through a web-based system, providing a data center needed across divisions, and having detailed information;
   g. Improving the Company's QHSE standards by reviewing and monitoring Non-Conformance QHSE reports promptly;
   h. Boosting the Go Green Campaign within the Company by reducing paper use.

E-Procurement

In 2023, the Company developed E-Procurement (E-PROC), which is a platform for internal and external vendor registration accessible at www.eproc.pp-presisi.co.id. Through E-PROC, vendors may register online, and it serves as a database of all Company vendors. The new feature that has been developed is the Price Map which functions as the material price's database and reference.

Integrated Employee Information System

START

In 2021, the Company also developed a web-based information system for the employees as a center of information/personal data of each employee, known as the Integrated Employee Information System (START). This system facilitates employees in checking data, including biodata, attendance, leave, and other features that can

cuti, dan fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional karyawan sehari-hari. Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini membantu pekerjaan karyawan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih efisien dan hemat waktu. START dapat diakses untuk kebutuhan internal di www.start-pp-presisi.co.id.

eRisk

Sejak tahun 2021, Perusahaan telah mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berbasis *web* (eRisk) yang dapat diakses melalui www.erisk.pp-presisi.co.id. Tujuan pengembangan platform eRisk yaitu mempermudah proses pelaksanaan manajemen risiko meliputi penentuan konteks & kriteria, penilaian risiko (identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko), *recording & reporting*, *communication & consultation* serta monitoring *& review* risiko secara *real time*. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan atas penggunaan eRisk antara lain:

1. Risiko dapat diketahui dan dilaporkan secara *real time*;
2. Fitur dampak terhadap risiko sebagai *early warning system*;
3. Adanya sistem pemeringkatan risiko sehingga *user/ risk owner* dapat mengetahui risiko mana yang perlu segera mendapatkan penanganan untuk mencegah terjadinya kerugian;
4. Fitur segmentasi risiko dapat memberikan gambaran kepada user terkait risiko apa yang paling sering terjadi sehingga diharapkan user dapat melakukan upaya pencegahan atas terjadinya risiko serupa di masa yang akan datang;
5. Informasi terkait risiko dapat diakses hingga *top management*.

Portal Web

Perusahaan telah mengembangkan Portal Web yang dapat digunakan karyawan dalam mengakses berbagai situs web internal Perusahaan. Dalam hal ini, sasaran pengembangan Portal Web adalah untuk memudahkan karyawan untuk mencari aplikasi internal yang telah dikembangkan oleh Perusahaan. Setiap Insan PPRE dapat mengakses halaman ini melalui www.portal.pp-presisi.co.id.

Roadmap TI

Perusahaan telah menyusun *Roadmap* Pengembangan TI untuk tahun 2021-2024 dalam rangka memperkuat sistem TI Perusahaan. *Roadmap* tersebut disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola TI yang diselaraskan dengan arahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lebih jauh, *Roadmap* Pengembangan TI ini harus disesuaikan dengan strategi bisnis Perusahaan. Adapun *Roadmap* Pengembangan TI Perusahaan adalah sebagai berikut:

be used for the employees' daily operational needs. The features provided in this application improved the employees' work, which previously was done manually, to be more efficient and time-saving. START can be accessed for internal needs at HYPERLINK "http://www.start-pp-presisi.co.id"www.start-pp-presisi.co.id.

eRisk

Since 2021, the Company has developed a web-based risk management information system (eRisk) accessible at www.erisk.pp-presisi.co.id. The aim of developing the eRisk platform is to simplify the risk management implementation process, including the determination of context & criteria, risk assessment (risk identification, analysis, and evaluation), risk recording & reporting, communication & consultation, as well as monitoring & review in real-time. Several benefits for the Companies from using eRisk are:

1. The risks can be recognized and reported in real-time;
2. The risk impact feature functions as an early warning system;
3. There is a risk rating system that informs users/ risk owners about which risks that must be treated immediately to prevent losses;
4. The risk segmentation feature can provide an overview for users about the type of risks that occur the most so that the users can take preventive measures on the possibility of similar risks in the future;
5. Information about risks is accessible up to the top management level.

Web Portal

The Company has developed a Web Portal that employees can use to access various internal websites of the Company. In this case, the Web Portal development aims to facilitate employees in searching for internal applications that have been developed by the Company. Every PPRE personnel can access this page at www.portal.pp-presisi.co.id.

IT Roadmap

The Company has created an IT Development Roadmap for 2021-2024 to strengthen the Company's IT system. The Roadmap was created as a part of IT governance implementation which is aligned with the directives of the Regulation of the Financial Services Authority. Furthermore, this IT Development Roadmap must be adjusted according to the Company's business strategy. The Company's IT Development Roadmap is as follows:

Inisiatif Pengembangan Development Initiatives	**2021 Triwulan** Quarter				**2022 Triwulan** Quarter				**2023 Triwulan** Quarter				**2024 Triwulan** Quarter			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pemeliharaan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *System Application and Product* (SAP) Maintenance of the Enterprise Resource Planning (ERP) and the System Application and Product (SAP)																
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi (SIMAP) Development of the Administration Management Information System (SIMAP)																
E-Procurement																
Data Center Consolidation																
Disaster Recovery Center																
Pengoptimalan Jaringan dan Perangkat Network and Device Optimization																
Software License																
Pemeliharaan Pedoman TI Maintenance of IT Guidelines																
Pelatihan Training																

Realisasi Program Kerja TI Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melakukan berbagai program di bidang Teknologi Informasi. Adapun realisasi program kerja TI tahun 2023 yang dilakukan Departemen IT & ERP adalah sebagai berikut:

IT Work Program Realization in 2023

In 2023, the Company has carried out various programs in Information Technology. The IT work program realization in 2023 by the IT & ERP Department is as follows:

Pengembangan Sistem Informasi Information System Development	**Jaringan dan Infrastruktur** Network and Infrastructure	**Tata Kelola TI** IT Governance
Single System ERP ERP Single System	Pemeliharaan PC dan Laptop Maintenance of PC and Laptops	Software License Renewal
Pengembangan SIMAP - *Asset Management* SIMAP - Asset Management Development	Pemeliharaan Bandwidth dan Hotspot Maintenance of Bandwidth and Hotspot	Evaluasi Pedoman IT Evaluation of IT Guidelines
Pengembangan SIMAP - QSHE SIMAP - QSHE Development		Pelatihan (Network Security) Training (Network Security)
Pengembangan SIMAP - *Marketing* SIMAP - Marketing Development		
Pengembangan SIMAP - CMS SIMAP - CMS Development		
Pengembangan SIMAP- STC SIMAP - STC Development		
Pengembangan SIMAP - *Maintenance Management* Peralatan SIMAP - Maintenance Management Development		

Investasi TI

Di tahun 2023, Perusahaan telah melakukan beberapa investasi pada teknologi informasi diantaranya pembelian lisensi *software*, perpanjangan SAP termasuk EULA, SAP MO, dan SAP ATS. Total investasi pada tahun 2023 disampaikan sebagai berikut.

IT Investment

In 2023, the Company made several investments in information technology, including the purchase of software licenses and SAP extensions, including EULA, SAP MO, and SAP ATS. The total investment in 2023 is as described below.

Investasi Teknologi Informasi Tahun 2023

Information Technology Investment in 2023

Jenis dan Peruntukan Type and Purpose	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Pembelian Lisensi *Software* Purchase of Software License	507.110.000
EULA SAP	251.305.584
SAP Managed Operation	643.800.000
SAP ATS	226.401.427
Jumlah Total	**1.628.617.011**

Realisasi investasi TI pada tabel di atas mengalami kenaikan 61% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp619.462.626. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya kebutuhan investasi TI di tahun tersebut.

The IT investment realization in the previous table increased by 61% compared to the amount in 2022 which was Rp619.462.626. This increase is due to the emerging need for IT investment in the year.

Perbandingan jumlah investasi pada teknologi informasi dapat disampaikan sebagai berikut.

The comparison of information technology investment is as follows.

Perbandingan Investasi Teknologi Informasi

Comparison of Information Technology Investment

	Realisasi 2023 (Rp) 2023 Realization (Rp)	Realisasi 2022 (Rp) 2022 Realization (Rp)	Kenaikan (Penurunan) 2022-2023 (%) 2022-2023 Increase (Decrease) (%)	Anggaran 2023 (Rp) 2023 Budget (Rp)	Pencapaian Anggaran 2023 (%) 2023 Budget Achievement (%)
Investasi Teknologi Informasi Information Technology Investment	1.628.617.011	1.009.154.385	61%	5.166.844.389	31%

Program Kerja TI Tahun 2024

IT Work Program in 2024

Perusahaan telah menyusun rencana strategi terkait pengembangan TI di tahun 2024 mendatang. Rencana pengembangan tersebut meliputi:

The Company has devised strategic plans for IT development in the upcoming 2024. The development plans include:

Pengembangan Sistem Informasi Information System Development	Jaringan dan Infrastruktur Network and Infrastructure	Tata Kelola TI IT Governance
Pengembangan Sistem Pengendalian ERP SAP SAP ERP Controlling System Development	• Pemeliharaan *Bandwidth* dan *Hotspot* Bandwidth and Hotspot Maintenance • Pemeliharaan PC dan Laptop PC and Laptop Maintenance • Pemeliharaan Server Server Maintenance	• Pembelian lisensi *software* (*software license renewal*) Purchase of software license (software license renewal) • Pelatihan Training
Pengembangan Sistem Monitoring *& Maintenance* Peralatan Monitoring System Development & Equipment Maintenance		
Laporan Keuangan Proyek Financial Statements of Projects		
PPRE *Library*		
QC Non Conformance (NC)		
HSE Log Incident & Corrective Action		
Website Lelang		
Sistem Pengendalian Internal Perusahaan		
Dashboard Manpower		
Pengembangan *E-Procurement*		

PERKARA PENTING

Litigation

Permasalahan Hukum

Di tahun 2023, tidak terdapat permasalahan dan/atau perkara hukum yang melibatkan Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris dan Direksi.

Sanksi Administrasi

Tidak terdapat adanya sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, di sepanjang tahun 2023.

Pengungkapan Permasalahan Terkait Perpajakan

Tidak terdapat adanya permasalahan perpajakan di tahun 2023.

Pengungkapan Permasalahan Terkait Lingkungan Hidup

Perusahaan tidak menemukan adanya permasalahan terkait pengaduan atas pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2023.

Pengungkapan Permasalahan Terkait Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan

Di tahun 2023, Perusahaan tidak menemukan adanya persoalan terkait hubungan industrial/ketenagakerjaan.

Legal Issues

In 2023, there were no legal issues and/or cases that involves the Company and/or the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Administrative Sanctions

There were no administrative sanctions imposed by relevant authorities to the Company as well as members of the Board of Commissioners and the Board of Directors throughout 2023.

Disclosure of Tax-Related Issues

There were no tax issues in 2023.

Disclosure of Environmental Issues

The Company does not encounter any issues related to reports on environmental management in 2023.

Disclosure of Industrial Relations/Employment Issues

In 2023, the Company does not encounter any issues related to industrial relations/employment.

KODE ETIK

Code of Conduct

Perusahaan telah memiliki Kode Etik yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan kesesuaian perilaku Insan PPRE dengan apa yang diharapkan oleh Perusahaan. Kode Etik Perusahaan ini telah disusun sejak 17 September 2018 dan dimutakhirkan kembali tanggal 20 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Lebih jauh, Kode Etik juga memuat filsafat bisnis dan nilai-nilai yang ada dalam mengatur dan mengelola Perusahaan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Perusahaan.

The Company has owned a Code of Conduct created to influence, develop, control, and implement behavioral conformity of PPRE personnel to Company expectations. The Company's Code of Conduct has been devised since September 17, 2018, and updated on October 20, 2023, signed by the Board of Commissioners and Board of Directors. Furthermore, the Code of Conduct also contains existing business philosophy and values in regulating and managing the Company thoroughly in achieving business objectives as stated in the Company's Vision and Mission.

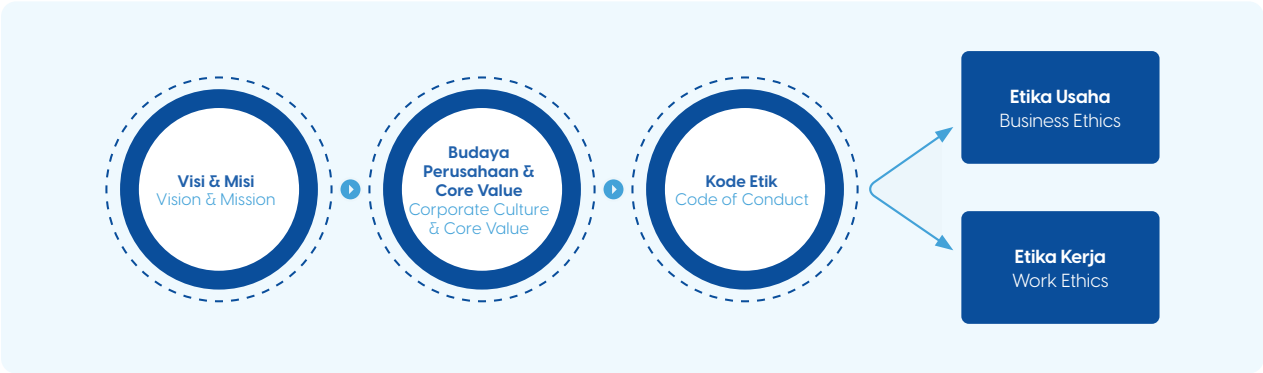

Etika Usaha Business Ethics	
Etika Usaha berkaitan dengan standar perilaku yang diterapkan oleh Perusahaan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan pemangku kepentingan. Etika Usaha mengatur hal-hal tentang: • Etika Perusahaan terhadap pegawai. • Etika Perusahaan terhadap pelanggan. • Etika Perusahaan terhadap penyedia barang dan jasa (pemasok). • Etika Perusahaan terhadap kompetitor (pesaing). • Etika Perusahaan terhadap regulator. • Etika Perusahaan terhadap masyarakat sekitar. • Etika Perusahaan terhadap pemegang saham (*shareholder*) • Etika Perusahaan terhadap kreditur. • Etika Perusahaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. • Etika Perusahaan terhadap media. • Etika Perusahaan terhadap komunitas/organisasi seprofesi. • Etika Perusahaan terhadap Anti KKN.	Business ethics refers to the standards of behavior applied by the Company in its interactions and relationships with stakeholders. Business Ethics govern matters such as: • Company ethics towards employees. • Company ethics towards customers. • Company ethics towards providers of goods and services (suppliers). • Company ethics towards competitors. • Company ethics toward regulators. • Company ethics towards the surrounding community. • Company ethics toward shareholders. • Company ethics toward creditors. • Company ethics related to occupational safety and health as well as the environment. • Company ethics towards the media. • Company ethics towards professional communities/ organizations. • Company ethics towards Anti-Corruption, Anti-Collusion, and Anti-Nepotism.

Etika Kerja Work Ethics	
Etika Kerja berkaitan dengan standar perilaku insan Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam berinteraksi. Etika Kerja mengatur hal-hal tentang: • Ketaatan terhadap hukum dan kebijakan PPRE. • Hubungan sesama pegawai. • Hubungan atasan dan bawahan. • Hubungan eksternal: » Hubungan dengan komunitas setempat. » Transaksi dengan rekanan dan pemasok. » Kontribusi dan aktivitas politik. » Hadiah dari fasilitas lain yang merupakan bentuk gratifikasi. » kebijakan perlindungan aset Perusahaan. » Integritas dan akurasi pembukuan. » Pelaksanaan pengendalian gratifikasi. » Pelaporan pengaduan atas pelanggaran » Kerahasiaan data dan informasi. » Pelanggaran terhadap kode etik. » Pengawasan kode etik.	Work Ethics refers to the standards of behavior for Company personnel while working and interacting with others. Work Ethics govern the following matters: • Compliance with laws and PPRE policies. • Employee relationships. • Superior-subordinate relationships. • External relationships: » Relationships with the local community. » Transactions with partners and suppliers. » Contributions and political activities. » Gifts from other facilities as a form of gratuity. » Company asset protection policies. » Integrity and accuracy of bookkeeping. » Gratuity control implementation. » Reporting complaints about violations » Data and information confidentiality. » Violations of the code of conduct. » Code of conduct supervision.

Komitmen Kode Etik

Agar seluruh insan PPRE memahami dan bersedia dengan penuh tanggung jawab melaksanakan Kode Etik, maka:

1. Seluruh insan PPRE wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan yang merupakan komitmen seluruh insan PPRE untuk melaksanakan Kode Etik. Surat Pernyataan Kepatuhan ini diperbarui setiap tahun;
2. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan bagi seluruh insan PPRE;
3. Setiap insan PPRE menerima 1 (satu) salinan Pernyataan Kepatuhan dan menandatangani formulir Pernyataan Kepatuhan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Kode Etik. Salinan Pernyataan Kepatuhan tersebut didokumentasikan oleh Biro Corporate Secretary;
4. Seluruh Pejabat Perusahaan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kode Etik tersebut.

Commitment to the Code of Conduct

To help all PPRE personnel understand and encourage them to willingly and responsibly implement the Code of Conduct:

1. All PPRE personnel are required to sign the Statement of Compliance, which is a commitment by all PPRE personnel to uphold the Code of Conduct. This Statement of Compliance is updated annually;
2. The Board of Directors is responsible for ensuring that all PPRE personnel sign the Declaration of Compliance;
3. Each PPRE personnel receives a copy of the Statement of Compliance and signs a Statement of Compliance form stating that they have received, understood, and agree to comply with the Code of Conduct. Copies of the Statement of Compliance are documented by the Corporate Secretary Bureau.
4. All Company Officials are responsible for setting an example for their subordinates in implementing the Code of Conduct.

Bentuk Sosialisasi dan Upaya Penyebarluasan Kode Etik

Dalam rangka mendorong pelaksanaan Kode Etik dengan baik, Perusahaan melakukan penyebarluasan dan pemahaman Kode Etik kepada seluruh insan Perusahaan. Di mana Perusahaan melakukan sosialisasi dengan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pemahaman GCG serta standar etika yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Adapun tujuan Perusahaan dalam melakukan sosialisasi Kode Etik di lingkup Perusahaan di antaranya untuk:

1. Mewujudkan pemahaman isi dari Kode Etik;
2. Mewujudkan kesadaran dari seluruh karyawan untuk melaksanakan Kode Etik;

Forms of Dissemination and Measures to Distribute the Code of Conduct

To promote the good implementation of the Code of Conduct, the Company disseminates and ensures understanding of the Code of Conduct to all Company personnel. The Company disseminates it by delivering materials related to the notion of GCG and the ethical standards applicable to the Company's environment.

The Company's objectives in disseminating the Code of Conduct within its environment include:

1. To achieve an understanding of the Code of Conduct's contents;
2. To create awareness among all employees to implement the Code of Conduct;

3. Memberikan pengertian bahwa Kode Etik merupakan bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh karyawan Perusahaan.

Di tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan sosialisasi atas keberadaan kode etik, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Direksi tanggal 8 Agustus 2023 terkait sosialisasi GCG;
2. Pelatihan GCG tanggal 30 November 2023 yang diikuti oleh para karyawan;
3. Sosialisasi kepada karyawan baru yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Sebagaimana yang telah disebutkan, seluruh Insan Perusahaan bertanggung jawab dalam melaksanakan penerapan Kode Etik di lingkup Perusahaan. Pengungkapan bahwa Kode Etik berlaku bagi seluruh level organisasi tertuang dalam bentuk Surat Pernyataan Kepatuhan yang ditandatangani oleh setiap karyawan. Dengan demikian, Kode Etik berarti berlaku bagi seluruh insan Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Dalam hal ini, Perusahaan berharap seluruh insan PPRE mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik dalam setiap aktivitasnya, sehingga akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen kepatuhan terhadap Kode Etik, Perusahaan telah membuat Surat Pernyataan Kepatuhan Pegawai Melaksanakan Kode Etik yang wajib ditandatangani oleh seluruh insan Perusahaan.

3. To provide an understanding that the Code of Conduct is an integral part of business practices and performance appraisals for all Company employees.

In 2023, the Company disseminates the Code of Conduct through several activities as follows:

1. Board of Directors meeting on August 8, 2023, on GCG dissemination;
2. GCG training program on November 30, 2023, attended by all employees;
3. Dissemination for new employees on May 8, 2023.

Compliance with the Code of Conduct

As previously mentioned, all Company personnel are responsible for implementing the Code of Conduct within the Company. The disclosure that the Code of Conduct applies to all levels of the organization is stated in the form of a Statement of Compliance signed by each employee. Thus, the Code of Conduct applies to all Company personnel, starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees. In this case, the Company expects all PP Precision to have the awareness to practice excellent ethics in every activity so that it will improve and strengthen the Company's reputation.

As a form of commitment to compliance with the Code of Conduct, the Company has created a Statement of Employee Compliance to Implement the Code of Conduct which must be signed by all Company personnel.

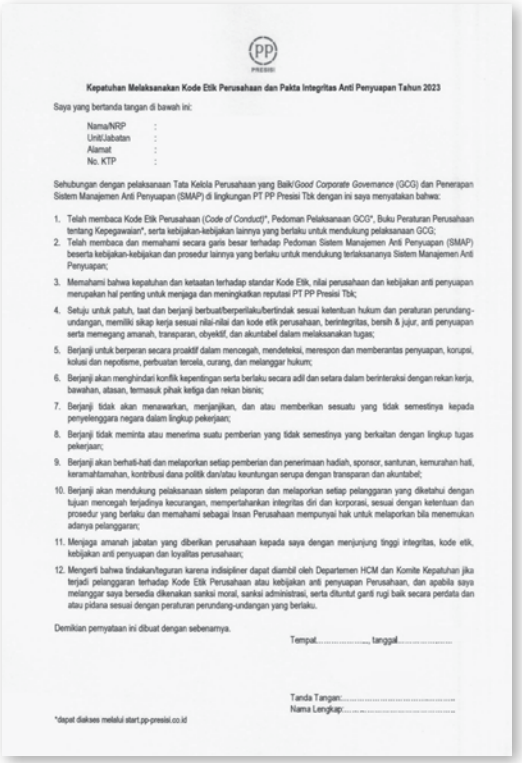

Kepatuhan Melaksanakan Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas Anti Penyuapan Tahun 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NRP :
Unit/Jabatan :
Alamat :
No. KTP :

Sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan PT PP Presisi Tbk dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Telah membaca Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*)*, Pedoman Pelaksanaan GCG*, Buku Peraturan Perusahaan tentang Kepegawaian*, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan GCG;
2. Telah membaca dan memahami secara garis besar terhadap Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) beserta kebijakan-kebijakan dan prosedur lainnya yang berlaku untuk mendukung terlaksananya Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
3. Memahami bahwa kepatuhan dan ketaatan terhadap standar Kode Etik, nilai perusahaan dan kebijakan anti penyuapan merupakan hal penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi PT PP Presisi Tbk;
4. Setuju untuk patuh, taat dan berjanji berbuat/berperilaku/bertindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, memiliki sikap kerja sesuai nilai-nilai dan kode etik perusahaan, berintegritas, bersih & jujur, anti penyuapan serta memegang amanah, transparan, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Berjanji untuk berperan secara proaktif dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan memberantas penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme, perbuatan tercela, curang, dan melanggar hukum;
6. Berjanji akan menghindari konflik kepentingan serta berlaku secara adil dan setara dalam berinteraksi dengan rekan kerja, bawahan, atasan, termasuk pihak ketiga dan rekan bisnis;
7. Berjanji tidak akan menawarkan, menjanjikan, dan atau memberikan sesuatu yang tidak semestinya kepada penyelenggara negara dalam lingkup pekerjaan;
8. Berjanji tidak meminta atau menerima suatu pemberian yang tidak semestinya yang berkaitan dengan lingkup tugas pekerjaan;
9. Berjanji akan berhati-hati dan melaporkan setiap pemberian dan penerimaan hadiah, sponsor, santunan, kemurahan hati, keramahtamahan, kontribusi dana politik dan/atau keuntungan serupa dengan transparan dan akuntabel;
10. Berjanji akan mendukung pelaksanaan sistem pelaporan dan melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui dengan tujuan mencegah terjadinya kecurangan, mempertahankan integritas diri dan korporasi, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan memahami sebagai Insan Perusahaan mempunyai hak untuk melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran;
11. Menjaga amanah jabatan yang diberikan perusahaan kepada saya dengan menjunjung tinggi integritas, kode etik, kebijakan anti penyuapan dan loyalitas perusahaan;
12. Mengerti bahwa tindakan/teguran karena indisipliner dapat diambil oleh Departemen HCM dan Komite Kepatuhan jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan atau kebijakan anti penyuapan Perusahaan, dan apabila saya melanggar saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi baik secara perdata dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat....., tanggal.....

Tanda Tangan:.....
Nama Lengkap:.....

*dapat diakses melalui start.pp-presisi.co.id

Upaya Penegakan Kode Etik

Sebagai bentuk keseriusan Perusahaan dalam menegakkan Kode Etik, setiap pelanggaran Kode Etik yang terjadi akan segera ditindaklanjuti. Masing-masing Kepala Unit menjadi penanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan Kode Etik dan dipantau oleh Pengelola Sistem Pelanggaran. Di samping itu, Perusahaan juga senantiasa melakukan penyebarluasan Kode Etik dilakukan dengan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap Kode Etik.

Setiap insan PPRE bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Kode Etik ke dalam setiap perilakunya. Tanggung jawab untuk memonitor hubungan pribadi dan profesional terletak pada masing-masing pribadi, di mana setiap insan PPRE wajib:

1. Mematuhi dan menaati hukum dan peraturan yang berlaku di Perusahaan, termasuk Budaya Perusahaan;
2. Menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan;
4. Melindungi harta kekayaan Perusahaan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Pelaporan atas pelanggaran Kode Etik dilakukan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka karyawan wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui kotak WBS, kepada atasan langsung, dan Kepala Biro Internal Audit atau melalui surat langsung, *e-mail*, ataupun faksimili;
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk atau fitnah;
3. Pelapor harus mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan juga harus merahasiakan identitas pelapor;
4. Setiap laporan yang diterima wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Jenis Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Perusahaan akan menindaklanjuti pelanggaran terhadap Kode Etik sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang telah ditetapkan. Di mana pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh setiap insan PPRE akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Enforcement of the Code of Conduct

As a form of the Company's commitment to enforcing the Code of Conduct, any violation of the Code of Conduct will be immediately followed up. Each Head of Unit is responsible for supervising compliance with the Code of Conduct and is monitored by the Violation System Manager. Moreover, the Company continuously propagates the Code of Conduct through dissemination, implementation, and evaluation of the Code of Conduct.

Each PPRE employee is responsible for implementing the Code of Conduct into their every behavior. The responsibility for monitoring personal and professional relationships lies with each individual, where each PPRE personnel is required to:

1. Comply with and obey the laws and regulations applicable in the Company, including the Company Culture;
2. Avoid activities that can cause conflicts of interest;
3. Keep and maintain the confidentiality of Company business information and information related to parties having business relationships with the Company;
4. Protect the Company's assets.

Mechanism for Reporting Code of Conduct Violation

Violations of the Code of Conduct are reported through the following means:

1. If violations or misconduct occur, employees are obligated to report the violation through the WBS box, to the direct superior, and the Head of the Internal Audit Bureau or through direct letter, e-mail, or facsimile;
2. The disclosure must be done in goodwill and not a personal complaint or based on bad intentions or defamation;
3. The reporting party must clearly state their identity in the report they file, accompanied by relevant supporting evidence. The party receiving the report must keep the reporting party's identity confidential;
4. Every admitted report must be followed up according to applicable procedures and mechanisms.

Type of Sanctions for Code of Conduct Violations

The Company will follow up on violations of the Code of Conduct according to the established Company Regulations, in which violations of the Code of Conduct committed by each PPRE employee will be sanctioned according to applicable laws and regulations, as described below:

Pihak yang Melanggar Violating Party	Keputusan Decision
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Sanksi diputuskan oleh Pemegang Saham. The sanction is decided by Shareholders.
Direksi Board of Directors	Sanksi diputuskan oleh Dewan Komisaris. The sanction is decided by the Board of Commissioners.
Karyawan Employee	Sanksi diputuskan oleh atasan langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan atasan langsung di lingkungan masing-masing. The sanction is decided by the direct superior or the Board of Directors according to the level of violation after a report regarding the committed violation is received. The Board of Directors directs the rehabilitative measures, disciplinary sanctions, and/or other measures as well as preventive measures that must be taken by the direct superior in each section.
Mitra Kerja atau Pemangku Kepentingan lainnya Work Partner or Other Stakeholders	Sanksi ditentukan sesuai ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib. The sanction is decided according to contract provisions. If it is related to criminal offenses, the report may be passed to the authorities.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan

Berikut disampaikan jumlah pelanggaran kode etik, termasuk pelanggaran Peraturan Perusahaan, yang terjadi di lingkup Perusahaan.

Number of Code of Conduct Violations and Imposed Sanctions

Below is the number of violations of the code of conduct, including violations of Company Regulations, which occur within the Company.

Kategori Sanksi Sanction Category	2023	2022
Surat Peringatan I Warning Letter I	-	1
Surat Peringatan II Warning Letter I	-	-
Surat Peringatan III (Sanksi Administrasi) Warning Letter III (Administrative Sanction)	-	-
Surat Peringatan III (Pengunduran Diri) Warning Letter III (Resignation)	-	-

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Policies on Conflict of Interest

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan, setiap insan PPRE senantiasa:

1. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
2. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lainnya;
3. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta dalam proses pengambilan Keputusan;
4. Direksi membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan atas setiap keputusan yang dibuat olehnya.

To avoid conflict of interest, all PPRE personnel continuously:

1. Prioritize Company interests above personal, family, or other party's interests in carrying out their duties and responsibilities;
2. Avoid positional abuse for personal, family, or other party's interests or gain;
3. If a conflict of interest occurs, the person concerned is prohibited from decision-making processes;
4. The Board of Directors made a statement of not having a conflict of interest in every decision it makes.

KEBIJAKAN PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*

Policies on Insider Trading Prevention

Perusahaan melarang insan PPRE yang memiliki akses informasi material untuk menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya, baik dalam melakukan jual beli saham Perusahaan, maupun dalam mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.

The Company prohibits PPRE personnel with access to material information from abusing their positions and jobs, be it in trading Company shares or in disclosing material information that may affect the investors' informed decisions. Material information is information that has not been widely published which can encourage someone to purchase, sell, or hold Company shares.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Policies on Anti-Corruption

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, Perusahaan senantiasa menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan khususnya korupsi. Dalam hal ini, Perusahaan juga selalu mengedepankan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan mengacu pada kebijakan tentang anti korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Perusahaan telah menetapkan kebijakan terhadap perilaku KKN yang tertulis dalam Kode Etik dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan menyampaikan materi Kode Etik serta penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan oleh setiap karyawan.

Adapun pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkup Perusahaan sesuai dengan Pedoman SMAP No. PPRE/BD/P/007 adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Nilai-Nilai dan Kode Etik Perusahaan serta tidak mentolerir penyuapan (*zero tolerance*) dalam menjalankan aktivitas dan operasional Perusahaan;
2. Mematuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan anti penyuapan;
3. Memenuhi dan menjalankan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara efektif, konsisten, dan efisien dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan;
4. Mendorong dan melatih insan Perusahaan untuk peduli dalam melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan dengan itikad baik melaporkan setiap bentuk pelanggaran tanpa khawatir tindakan balasan;
5. Membangun hubungan dan sinergi yang berlandaskan pada prinsip integritas dan nilai anti penyuapan pada setiap interaksi Perusahaan dengan semua pihak berkepentingan;
6. Menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang independen dengan wewenang untuk pemenuhan persyaratan anti penyuapan Perusahaan;
7. Mengambil sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran ketidakpatuhan dan penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

To create a fair work environment, the Company consistently avoids actions, behaviors, or deeds that can create conflicts of interest, especially corruption. In this case, the Company also continuously prioritizes its interests above the interests of individuals, families, groups, or factions. In its implementation, the Company refers to the anti-corruption policy contained in Law No. 20 of 2001 on the Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. Furthermore, the Company has established a policy against Corruption, Collusion, and Nepotism which is written in the Code of Conduct and disseminated to all employees by delivering Code of Conduct materials, and each employee signs a Statement of Compliance.

The implementation of the Anti-Bribery Management System within the Company according to SMAP Guidelines No. PPRE/BD/P/007 is as follows:

1. Enforcing the Company's Values and Code of Conduct and not tolerating bribery (zero tolerance) in carrying out the Company's activity and operations;
2. Complying with all anti-bribery laws and regulations;
3. Fulfilling and implementing the Anti-Bribery Management System effectively, consistently, and efficiently through continuous improvement;
4. Encouraging and training Company personnel to be concerned with the implementation of the Anti-Bribery Management System and, in goodwill, report every form of violation without worrying about retribution;
5. Building relationships and synergy based on integrity principles and anti-bribery values in every Company interaction with all parties of interest;
6. Establishing an independent Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) with the authority to fulfill anti-bribery requirements in the Company;
7. Impose strict sanctions upon all forms of violations, resistance, and deviations from this anti-bribery policy according to applicable provisions.

PPRE telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) pada tanggal 9 Juni 2011, dan dalam implementasinya PPRE telah melaksanakan beberapa program kerja salah satunya adalah pelaksanaan sosialisasi anti penyuapan.

PPRE acquired an ISO 37000:2016 SMAP (Anti-Bribery Management System) Certificate on June 9, 2011, and in its implementation, PPRE has carried out several work programs, including anti-bribery disseminations.

Sepanjang tahun 2023, PPRE telah melaksanakan agenda sosialisasi SMAP yaitu sebagai berikut:

Throughout 2023, PPRE has actualized the following the SMAP dissemination agenda:

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Peserta Participant	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Realization of Scheduled Event
1.	Sosialisasi SMAP Internal Internal SMAP Dissemination	Semua Karyawan All Employees	3 Maret 2023 14 September 2023 March 3, 2023 September 14, 2023
2.	Sosialisasi SMAP kepada Rekan Bisnis SMAP Dissemination for Business Partners	Rekan Bisnis Business Partners	10 Maret 2023 26 September 2023 March 10, 2023 September 26, 2023
3.	Sosialisasi SMAP Buku Saku, Pemasangan *Banner*, Sosial Media, *Website*, Kuesioner Persepsi Anti Penyuapan, Surat Himbauan Direksi SMAP Dissemination Pocket Book, Banner Installation, Social Media, Website, Questionnaire on Anti-Bribery Perception, Appeal Letter of the Board of Directors	Semua Karyawan All Employees	Maret-April 2023 March-April 2023
4.	Sosialisasi Pemahaman SMAP ke Direksi & Dewan Komisaris SMAP Comprehension Dissemination for the Board of Directors & Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners	31 Mei 2023 May 31, 2023
5.	*Training* Pemahaman SMAP ke *Key Person* Proyek SMAP Comprehension Training for Project Key Persons	*Key Person* Proyek Project Key Persons	31 Agustus 2023 August 31, 2023

Dokumentasi Sosialisasi SMAP Tahun 2023

Documentation of SMAP Dissemination in 2023

Figure 1 Sosialisasi SMAP Internal
Figure 1 - Internal SMAP Dissemination

14 September 2023
September 14, 2023

Figure 2 Sosialisasi SMAP Internal
Figure 2 - Internal SMAP Dissemination

3 Maret 2023
March 3, 2023

Figure 3 Pemasangan Banner SMAP
Figure 3 - SMAP Banner Installation

Figure 4 Buku Saku SMAP
Figure 4 - SMAP Pocket Book

Figure 5 Sosial Media PPRE
Figure 5 - PPRE Social Media

Figure 6 *Website* PPRE
Figure 6 - PPRE Website

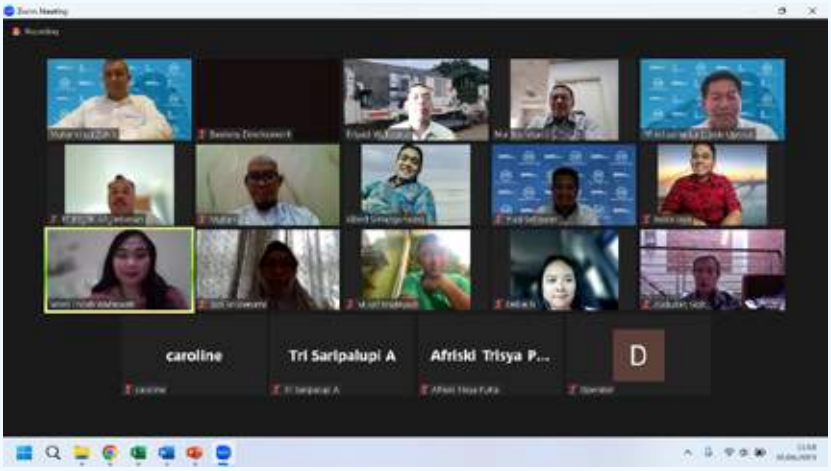

Figure 7 Sosialisasi SMAP ke BOC & BOD
Figure 7 - SMAP Dissemination to the Board of Commissioners and Board of Directors

Figure 8 Training Key Person Proyek
Figure 8 - Training for Project Key Persons

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Policies on Gratuity Control

Dalam rangka menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang efektif berlaku pada 23 Mei 2023. Di mana setiap insan PPRE, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan dan Entitas Anak dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban maupun tugasnya.

Berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, gratifikasi dikategorikan menjadi sebagai berikut.

To uphold the principles of good corporate governance, the Company has established the Guidelines of Gratuity Control effective as of May 23, 2023, in which every PPRE personnel, namely the Board of Commissioners, the Board of Directors, all employees who directly work for and on behalf of the Company and its Subsidiaries, are prohibited from receiving and/or giving gratuities related to their positions and contrary to their duties or obligations.

Based on the Guidelines of Gratuity Control, gratuities are categorized as follows.

Kategori Gratifikasi Gratuity Category	**Uraian** Description
Gratifikasi yang wajib dilaporkan Gratuities that must be reported	• *Fee marketing*. • Uang pelicin, uang pulsa, dan uang lainnya. • Hadiah/cinderamata/bingkisan dari pihak lain untuk kepentingan insan Perusahaan. • Parsel atau bingkisan hari-hari keagamaan. • Uang transportasi, tiket, dan akomodasi perjalanan dinas dari pihak lain yang tidak tertuang dalam kontrak kerja. • Diskon/potongan harga/pemberian atau keuntungan lainnya dari pihak lain yang diberikan secara tidak wajar untuk kepentingan insan Perusahaan. • Fee marketing. • Grease payment, credit phone money, and other fees. • Gifts/souvenirs/parcels from other parties for the interest of the Company personnel. • Religious holiday parcels or packages. • Money for transportation, tickets, and accommodations for official travel from other parties which is not stated in the work contract. • Discounts/price cuts/other gifts or benefits from other parties given unfairly for the interest of the Company personnel.
Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan terkait kedinasan Gratuities that must be reported and related to official work	• Fasilitas transportasi, akomodasi, honorarium, uang saku, dan jamuan makan dari pihak lain, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban insan Perusahaan, tidak terdapat pembiayaan ganda, berdasarkan undangan resmi dari pihak lain, penunjukan atau penugasan resmi dari perusahaan dan/atau diatur dalam suatu ikatan kerja Bersama pihak lain. • Cinderamata, plakat dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada undangan resmi dari pihak lain, penunjukkan atau penugasan resmi dari PPRE. • Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka mewakili Perusahaan. • Honor mengajar terkait kedinasan. • Undangan olahraga bersama dari instansi lain sebagai wakil resmi perusahaan yang menunjang aktivitas Perusahaan. • Transportation facilities, accommodations, honorarium, pocket money, and meals from other parties, in activities related to the Company personnel's duty implementation or obligations, without double funding, based on official invitations from other parties, appointment or official assignment by the Company and/or regulated in a work relationship with other parties. • Souvenirs, placards from the organizing committees of seminars, workshops, and training from agencies or institutions of which participation is based on official invitations from other parties, official appointment, or assignment by PPRE. • Rewards from open contests or competitions representing the Company. • Fee from work-related teaching. • Joint sports invitations from other agencies as an official representative of the Company supporting Company activities.

Kategori Gratifikasi Gratuity Category	Uraian Description
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan tidak terkait kedinasan Gratuities that are not required to be reported and not related to official duties	• Hadiah langsung/undian, souvenir, hibah, sumbangan, *voucher*, *point reward*, dan diskon/rabat yang berlaku umum dari individu atau institusi lainnya. • Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. • Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum. • Penerimaan yang terkait dengan kegiatan upacara adat atau keagamaan seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan, potong gigi, dan uang duka cita yang terkait dengan musibah atau bencana dengan batasan nilai paling tinggi Rp1.000.000,-. • Hadiah dari sesama insan perusahaan pada momen tertentu antara lain promosi, mutasi, pensiun, pisah sambut, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dll) yang tidak melebihi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama. • Pemberian sesama insan Perusahaan yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang tidak melebihi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama. • Hidangan atau sajian yang berlaku umum. • Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya. • Tidak diketahui identitas pemberi. • Generally accepted direct rewards/lotteries, souvenirs, grants, donations, vouchers, point rewards, and discounts from other individuals or institutions. • Generally accepted profit or interest from placement of funds, investment, or private share ownership. • Generally accepted benefit from cooperatives, employee organizations, or similar organizations based on membership. • Receipt of money related to traditional or religious ceremonies such as weddings, birth ceremonies, Aqiqah, baptism, circumcision, tooth filing, and condolence money related to calamities and disasters with a maximum limit of Rp1,000,000. • Gift from fellow Company personnel for certain events including promotions, mutations, retirement, farewell-and-welcoming events, as well as birthdays, not in the form of money (checks, bill of exchange, giro transfer, shares, deposits, vouchers, phone credits, etc.) that does not exceed Rp500,000 (five hundred thousand rupiah) per gift per person, with a maximum total of Rp1,000,000 (one million rupiah) in a year from the same person. • Gift from fellow Company personnel not in the form of money or not equivalent to money that does not exceed Rp500,000 (five hundred thousand rupiah) per gift per person, with a maximum total of Rp1,000,000 (one million rupiah) in a year from the same person. • Generally accepted food or dish. • Receipt of which the handover process is unknown. • The benefactor's identity is unknown.

Unit Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Perusahaan telah menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi di tingkat pusat, dengan Direksi bertindak sebagai penanggung jawab. Adapun susunan pengurus Unit Pengendali Gratifikasi di tingkat pusat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 468/SK/DIR/PPRE/XII/2023 tentang Perubahan Formasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PP Presisi Tbk tanggal 19 Desember 2023.

Managing Unit of Gratuity Reporting

The Company has established a Gratuity Control Unit at the central level, with the Board of Directors in charge. The composition of the Gratuity Control Unit at the central level is based on the Decree of the Board of Directors No. 468/SK/DIR/PPRE/XII/2023 regarding Changes to the Formation of the Gratuity Control Unit within PT PP Presisi Tbk dated December 19, 2023.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Adapun mekanisme pelaporan gratifikasi di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap insan PPRE wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada Perusahaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Mechanism for Reporting Gratuities

The mechanism to report gratuity in the Company is as follows:

1. Every PPRE personnel is required to report any receipt of gratuities to the Company no later than twenty working days from the date the gratuity is received or through the Gratuity Control Unit no later than seven working days from the date the gratuity is received.

2. Laporan gratifikasi dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui situs web atau *e-mail* Unit Pengendalian Gratifikasi (gratifikasi@pp-presisi.co.id) dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
3. Laporan gratifikasi paling kurang memuat data berikut:
   a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
   b. Jabatan insan Perusahaan yang bersangkutan;
   c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
   d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
   e. Nilai gratifikasi yang diterima;
   f. Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Guna Pedoman Pengendalian Gratifikasi diketahui oleh seluruh insan PPRE dan pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, maka perlu adanya beberapa tindakan berikut:

1. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap unit kerja di lingkungan Perusahaan, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa, dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak lain;
2. Memerintahkan Unit Pengendalian Gratifikasi untuk secara berkala memberikan informasi kepada seluruh insan PPRE dan pihak lain terkait dengan adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
3. Menugaskan kepada seluruh unit kerja di Perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan pihak lain untuk menginformasikan Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
4. Unit Pengendalian Gratifikasi memonitor pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi mengenai implementasinya.

Laporan Pengendalian Gratifikasi

Di tahun 2023, terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi dari karyawan Perusahaan yang melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dari pemasok. PPRE telah menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang dirumuskan dalam pedoman gratifikasi yang dimiliki Perusahaan.

2. The gratuity can be reported with or without handing over money and/or goods through the Gratuity Control Unit's website or e-mail (gratifikasi@pp-presisi.co.id) and/or in writing using the determined form.
3. The report on gratuity contains at least the following data:
   a. Full name and address of gratuity recipient and benefactor;
   b. Position of the concerned Company personnel;
   c. Place and date of gratuity acquirement;
   d. Description of received gratuity;
   e. Value of received gratuity;
   f. Chronology of gratuity acquirement.

Dissemination of Gratuity Control Policies

To ensure that the Gratuity Control Guidelines are known by all PPRE personnel and other parties associated with the Company, the following measures are necessary:

1. Incorporating provisions prohibiting the acceptance of gratuities in every work unit within the Company, announcements in the goods and services procurement process, goods and services procurement contracts, and letters sent to other parties;
2. Directing the Gratuity Control Unit to periodically provide information to all PPRE personnel and other parties regarding the existence of the Guidelines of Gratuity Control;
3. Assigning all departments within the Company that have working relationships with other parties to disseminate the Guidelines of Gratuity Control;
4. The Gratuity Control Unit monitors the implementation of the Guidelines of Gratuity Control and provides reports regularly to the Board of Directors regarding its implementation.

Report of Gratuity Control

In 2023, there was one gratuity report from a Company's employee who reported a gratuity acceptance from suppliers. PPRE has followed up on the report according to the steps formulated in the gratuity guidelines owned by the Company.

KEBIJAKAN TENTANG PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH/SUAP/DONASI DAN LAINNYA

Policies on Giving and Receiving Gifts/Bribery/Donation and Others

Seluruh insan PPRE dilarang untuk menerima dan/atau memberi hadiah, cendera mata, jamuan bisnis ataupun fasilitas lainnya, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan melanggar ketentuan yang berlaku dengan ketentuan:

1. Hadiah yang diterima karena berkaitan dengan undian yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang ada hubungannya dengan Perusahaan serta diserahkan dan dicatat sebagai aset Perusahaan;
2. Mengadakan jamuan bisnis dengan mitra usaha dan/atau pemangku kepentingan selama ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam batas-batas yang wajar di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap Perusahaan;
3. Menyerahkan atau menerima hadiah dan/atau cendera mata dari pihak ketiga yang kegiatannya dibiayai oleh Perusahaan harus menjadi milik Perusahaan;
4. Semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah, cendera mata dan jamuan bisnis harus mendapat otorisasi pejabat Perusahaan yang berwenang;
5. Dilarang untuk menerima/memberikan suap atau menjanjikan memberi/menerima suap;
6. Dilarang mengarahkan orang lain di luar Perusahaan untuk melakukan penyuapan dalam segala bentuknya, baik dalam melakukan aktivitas bisnis di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan;
7. Dilarang memberikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung suatu hadiah atau pembayaran lainnya yang tidak wajar kepada pihak lain di luar Perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan transaksi bisnis Perusahaan;
8. Donasi pada prinsipnya diberikan kepada pihak luar sepanjang sesuai dengan kebijakan Perusahaan, batas kepatutan, untuk tujuan sosial, seperti donasi untuk bencana alam.

Selanjutnya, Perusahaan juga telah memiliki Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Di mana kebijakan tersebut mengatur insan Perusahaan agar:

1. Menegakkan nilai-nilai Kode Etik Perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan Operasional Perusahaan;
2. Mematuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan anti penyuapan;

All members of PPRE are prohibited from receiving and/or giving gifts, souvenirs, business entertainment, or other facilities that may influence decision-making and violate applicable regulations with the following provisions:

1. Rewards received from lotteries organized by third parties related to the Company must be handed over and recorded as Company assets;
2. Business entertainment with business partners and/or stakeholders is held as long as it is for the Company's interests, with expenses that can be justified and within reasonable limits in places that do not create a negative image of the Company;
3. Gifts and/or souvenirs given or received from third parties whose activities are funded by the Company should be the property of the Company;
4. All expenses related to gift-giving, souvenirs, and business entertainment must be approved by authorized Company officials;
5. It is prohibited to receive/give bribes or promise to give/receive bribes;
6. It is prohibited to direct others outside the Company to engage in bribery in any form, both in conducting business activities within the Company's environment and outside the Company's environment;
7. It is prohibited to directly or indirectly provide or offer a gift or other unreasonable payment to parties outside the Company to gain profit or special treatment in conducting the Company's business transactions;
8. Donations are generally given to external parties as long as they comply with Company policies, propriety limits, and for social purposes, such as natural disaster donations.

Furthermore, the Company has also established an Anti-Bribery Management System Policy, wherein the policy regulates company personnel to:

1. Uphold the values of the Company's Code of Conduct in carrying out Company activities and operations;
2. Comply with all provisions of anti-bribery regulations and laws;

3. Memenuhi dan menjalankan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan secara efektif, konsisten, dan efisien dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan;
4. Mendorong dan melatih insan Perusahaan untuk peduli dan terlibat dengan itikad baik dalam melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan tanpa kekhawatiran;
5. Menentang segala bentuk penyuapan (*zero tolerance*) dalam setiap aktivitas penyelenggaraan Perusahaan;
6. Disiplin dan patuh terhadap nilai-nilai, kode etik, ketentuan, peraturan, kebijakan dan prosedur anti penyuapan;
7. Membangun hubungan dan sinergi yang berlandaskan pada prinsip integritas dan nilai anti penyuapan pada setiap interaksi Perusahaan dengan semua pihak berkepentingan;
8. Menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang independen dengan wewenang untuk pemenuhan persyaratan anti penyuapan Perusahaan;
9. Mengambil sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran, ketidakpatuhan, dan penyimpangan dari Kebijakan Anti Penyuapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 (*anti bribery management systems - requirements with guidance for use*) pada 9 Juni 2021 oleh Komite Akreditasi Nasional.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan tidak menerima laporan terkait pemberian dan penerimaan hadiah atau suap. Adapun pemberian donasi yang dilakukan juga telah sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan untuk tujuan sosial.

3. Fulfill and implement the requirements of the anti-bribery management system effectively, consistently, and efficiently with continuous improvement efforts;
4. Encourage and train Company personnel to be concerned and engage in good faith in implementing the anti-bribery management system without doubt;
5. Oppose all forms of bribery (zero tolerance) in every aspect of Company operations;
6. Be disciplined and comply with anti-bribery values, code of conduct, provisions, regulations, policies, and procedures;
7. Build relationships and synergy based on the principles of integrity and anti-bribery values in every interaction of the Company with all stakeholders;
8. Establish an independent Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) with the authority to fulfill the Company's anti-bribery requirements;
9. Impose strict sanctions against all forms of violations, non-compliance, and deviations from the Anti-Bribery Policy according to applicable provisions;
10. Carry out ISO 37001:2016 certification (anti-bribery management systems - requirements with guidance for use) on June 9, 2021, by the National Accreditation Committee.

Up to December 31, 2023, the Company had not received reports regarding the granting and acceptance of gifts or bribes. The donations made have complied with the Company's policies for social purposes.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

State Official Wealth Report (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, penyelenggara yang wajib melapor LHKPN adalah pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan pejabat yang memiliki fungsi strategis. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Perusahaan pun telah menetapkan Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, di mana kebijakan ini mengatur tata cara penyampaian, unit pengelola, pejabat yang wajib menyampaikan laporan, serta sanksi bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, pemeriksaan LHKPN diharapkan mampu mewujudkan penyelenggara negara yang mematuhi asas-asas umum penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Basic Principles of the State Official Wealth Report

According to Article 2 of Law No. 28 of 1999, the officials who are required to report LHKPN are state officials according to provisions of applicable laws and regulations and officials with strategic functions. Related to this policy, the Company has also issued a Decree of the Board of Directors No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 dated January 26, 2021, which regulates the procedures for submission, the management unit, officials who are required to submit reports, and sanctions for officials who do not submit LHKPN. Thus, the LHKPN examination is expected to be able to bring forth state administrators who comply with the general principles of being free from the practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other reprehensible acts.

Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 28 tahun 1999, penyelenggara yang wajib melapor LHKPN adalah pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan pejabat yang memiliki fungsi strategis. Sebagai bentuk aplikasi peraturan tersebut, Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Mandatory Reporters of State Official Wealth Report

According to Article 2 of Law No. 28 of 1999, officials who are required to report LHKPN are state officials according to provisions of applicable laws and regulations and officials with strategic functions. As an implementation of the regulation, the Company issued the Decree of the Board of Directors No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 dated January 26, 2021.

Pejabat Perusahaan Wajib LHKPN

Company Officials Required to Submit LHKPN

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan
The Company Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak
Subsidiaries' Board of Commissioners and Board of Directors

Seluruh pegawai pada level jabatan Kepala Divisi/ Kepala Biro
All employees at Division Head/ Bureau Head level

Seluruh pegawai pada level Kepala Departemen
All employees at Department Head level

Seluruh pegawai pada level Kepala Proyek (Kepala Produksi dan *Project Leader*)
All employees at Project Head Level (Production Head and Project Leader)

Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Unit pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkup Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/ SK/PPRE/ DIR/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Administrators of the State Official Wealth Report

The LHKPN administrating unit within the Company was formed according to the Decree of the Board of Directors No. 013/SK/PPRE/DIR/I/2021 dated January 26, 2021.

Uraian Description	**Jabatan** Position
Penanggung Jawab Responsible Party	Direktur Utama President Director
Pembina Supervisor	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Human Capital Management Director of Finance, Risk Management & Human Capital Management
Admin Unit Unit Administrator	Kepala Departemen Human Capital Management & General Affair Head of the Human Capital Management & General Affairs Department

Transparansi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat Perusahaan Tahun 2023

Adapun rincian transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan wajib lapor di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Transparency of Company Official's State Official Wealth in 2023

The transparency of LHKPN submission by Company officials who are mandatory reporters in 2023 is as follows:

Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Officials Required to Submit the State Official Wealth Report	**Jumlah Wajib Lapor (orang)** Total Mandatory Reporters (personnel)	**Telah Melaporkan** Has Reported	
		Jumlah (orang) Total (personnel)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Dewan Komisaris Perusahaan The Company's Board of Commissioners	2	2	100,00
Direksi Perusahaan The Company's Board of Directors	4	4	100,00
Direksi Entitas Anak Subsidiaries' Board of Directors	2	2	100,00
Pegawai pada Level Jabatan Kepala Divisi/Kepala Biro Employees at the Head of Division/Head of Bureau Level	10	10	100,00
Pegawai pada Level Kepala Departemen Employees at the Head of Department Level	15	15	100,00
Pegawai pada Level Kepala Proyek (Kepala Produksi dan Project Leader) Employees at the Head of Project Level (Head of Production and Project Leader)	3	3	100,00
Jumlah Total	**36**	**36**	**100,00**

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK AKTIVITAS POLITIK

Policies on Political Activity Funding

Perusahaan melarang fasilitas, dana, atau sumber daya Perusahaan digunakan untuk kampanye politik, penggalangan dana politik, partisipasi politik, menyumbang kandidat partai dan non-partai politik dimanapun di seluruh dunia. Keputusan yang diambil oleh seorang insan PPRE untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya personalnya bagi kampanye atau aktivitas politik harus benar-benar merupakan pilihan insan Perusahaan itu sendiri.

The Company prohibits its facilities, funds, or resources from being used for political campaigns, political fundraising, political participation, and donations for candidates of political parties and non-parties anywhere in the world. The decisions made by a PPRE personnel to contribute their time, money, or private resources for political campaigns or activities must genuinely be the choice that the Company personnel make.

Head Office PT PP Presisi Tbk, Jakarta

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

Perusahaan senantiasa menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS). Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dan penipuan yang terjadi di lingkup Perusahaan. Selain itu, mempraktikkan WBS guna mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang terkelola dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bagi Perusahaan dalam menyusun evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan. Di samping itu, WBS menjadi bagian dari mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat sebuah pelanggaran. Sementara bagi pelapor pelanggaran, sistem ini memastikan perlindungan dan kerahasiaan identitasnya. Terkait dengan WBS, Komisaris Utama dan Direktur Utama telah menetapkan kebijakan terkait WBS di Perusahaan pada 9 November 2020.

The Company consistently implements Good Corporate Governance. One of the efforts made is to implement a whistleblowing system (WBS). It aims to prevent fraud and deception that occurs within the Company. Moreover, WBS is implemented to develop a properly managed violation-reporting system, which can be used as a basis for the Company to compile the necessary evaluations and follow-up actions. In addition, WBS is a part of the early warning system mechanism for the possibility of problems arising from a violation. Meanwhile, for the whistleblower, this system ensures the protection and confidentiality of their identity. Regarding the WBS, the President Commissioner and the President Director established a policy related to WBS in the Company on November 9, 2020.

Pihak Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/PPRE/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, Tim Pengelola WBS di Perusahaan adalah sebagai berikut.

Whistleblowing System Manager

Accordance to Directors Decree No. 178/SK/DIR/PPRE/X/2020 dated October 7, 2020, the WBS Managing Team at the Company is as follows.

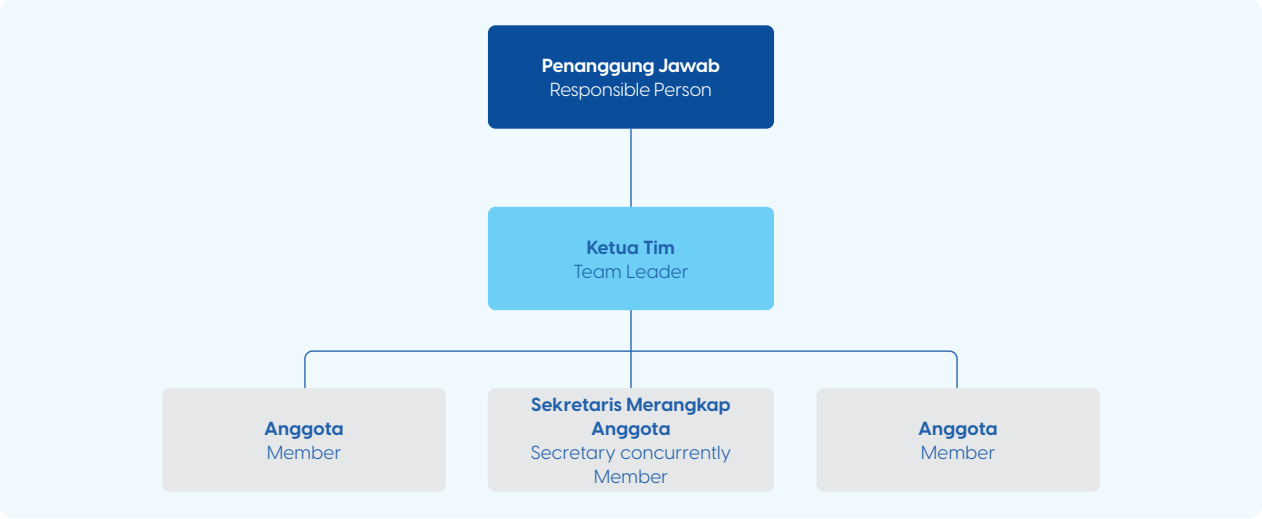

Ruang Lingkup Laporan Pelanggaran

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh WBS adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;

Scope of Violation Report

The scope of the report that will be followed up by WBS includes conduct that causes losses for the Company, namely:

1. Deviations from applicable laws and regulations;

2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
3. Benturan kepentingan;
4. Gratifikasi.

Mekanisme Penyampaian dan Prosedur Pengelolaan Laporan Pelanggaran

Pelapor dapat menyampaikan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkup Perusahaan kepada Tim Pengelola WBS. Laporan dapat disampaikan secara tertulis, yaitu dengan menyampaikan surat resmi melalui *e-mail* atau pos ke Perusahaan ke alamat resmi berikut:

Tim Pengelola WBS
PT PP Presisi Tbk
Biro Internal Audit
Jl. Raya Narogong KM 15,
Pangkalan 6 Bekasi,
Jawa Barat, 17153
T: +6221 8248 3255
E: pengaduan@pp-presisi.co.id

Lebih jauh, laporan pelanggaran yang disampaikan secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan pelanggaran yang akan disampaikan. Perusahaan akan memberikan tanda terima atas pengaduan pelanggaran yang diajukan secara tertulis dengan disertai identitas pelapor. Perusahaan akan menindaklanjuti laporan pengaduan yang terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan. Perusahaan juga menerima laporan dari pelapor anonim. Namun, Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporan tersebut, sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Ketentuan terkait prosedur pengelolaan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan surat resmi ke Tim Pengelola WBS Perusahaan. Laporan dalam bentuk *e-mail* atau secara tertulis disampaikan ke kontak Tim Pengelola WBS;
2. Tim Pengelola WBS menindaklanjuti laporan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor serta Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor. Sementara itu, laporan yang dapat ditindaklanjuti adalah laporan dengan pelapor yang menyertakan media komunikasi seperti *e-mail* atau nomor ponsel untuk berkomunikasi;
3. Pelaporan dengan itikad baik dapat diberikan perlindungan hukum dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;

2. Positional abuse for other interests outside the Company;
3. Conflict of interest;
4. Gratuity.

Mechanism for Violation Report Submission and Management Procedures

Whistleblowers can report indications of violations occurring within the Company to the WBS Management Team. The report can be submitted in writing, specifically by sending an official letter through e-mail or by post to the Company at this official address:

WBS Management Team
PT PP Presisi Tbk
Internal Audit Bureau
Jl. Raya Narogong KM 15,
Pangkalan 6 Bekasi,
West Java, 17153
T: +6221 8248 3255
E: pengaduan@pp-presisi.co.id

Furthermore, the violation report submitted in writing must be attached with a copy of identity and supporting evidence, such as documents related to the violations that will be reported. The Company will provide a receipt for the violation report submitted in writing attached with the whistleblower's identity. The Company will follow up on the report related to the event or evidence within at most a year before the report is submitted. The Company also receives reports from anonymous whistleblowers. However, the Company is not obligated to respond since it would be difficult to communicate and clarify the report, and thus there is a possibility that the report cannot be processed further.

Provisions on the report management procedure are as follows:

1. Whistleblowers send an official letter to the Company's WBS Management Team. Reports through e-mail or in writing are given to the WBS Management Team's contact person;
2. The WBS Management Team follows up on reports while protecting the confidentiality of the whistleblower's identity, and the Company guarantees protection for the whistleblower. Meanwhile, reports that can be followed up are those in which whistleblowers include communication channels such as e-mail addresses or phone numbers to communicate;
3. Reports in good faith may be granted legal protection and rewards according to applicable provisions;
4. Reported parties who are proven to commit violations will be subject to sanctions according to applicable regulations;

5. Perusahaan wajib melakukan rehabilitasi (pengembalian nama baik) terlapor apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Pengelolaan Laporan Pengaduan dan Mekanisme Tindak Lanjut

1. Pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Perusahaan (Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran) jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha di lingkungan PPRE.
2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menerima dan menyeleksi laporan Pengaduan Pelanggaran yang diterima sebagai tahap verifikasi awal, apakah terdapat indikasi atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran serta dapat ditindaklanjuti, meliputi:
   a. Pihak Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang kurangnya memuat nama/alamat/nomor telepon/email dan fotokopi identitas diri;
   b. Bagi Pelapor anonim dapat diterima dengan syarat menyertakan bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ruang lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran;
   c. Terdapat permasalahan dugaan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, tempat dan tanggal peristiwa serta kerugian yang ditimbulkan.

   Bila YA laporan Pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan poin 3, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.
3. Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaporkan hasil verifikasi awal tersebut kepada:
   a. Dewan Komisaris dan Komite Audit (jika terlapor anggota Direksi);
   b. Anggota Dewan Komisaris yang bukan terlapor (jika terlapor anggota Dewan Komisaris);
   c. Komisaris Utama (jika terlapor anggota organ pendukung Dewan Komisaris);
   d. Direksi (jika terlapor Pegawai);
   e. Dewan Komisaris dan Direksi (jika terlapor Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran).
4. Pelaksanaan penanganan lebih lanjut, sesuai materi yang dilaporkan menjadi tanggung jawab dan atas arahan:
   a. Dewan Komisaris dan Komite Audit (jika terlapor anggota Direksi);
   b. Anggota Dewan Komisaris yang bukan terlapor (jika terlapor anggota Dewan Komisaris);

5. The Company is obligated to rehabilitate (restore the good name of) reported parties if not proven to have committed violations.

Report Management and Follow-Up Mechanisms

1. The reporting party must submit written reports to the Company (Whistleblowing Management Team) when violations occur in business activities within PPRE.
2. The Whistleblowing Management Team receives and selects the Whistleblowing reports as an initial verification stage, determining whether there are any indications of violations or whether it has met the Whistleblowing System reporting criteria and can be followed up, the criteria being:
   a. The Reporting Party provides information on personal identity, at least containing the name/address/phone number/e-mail and a copy of the personal identity;
   b. Reports from anonymous Reporting Parties are accepted provided that there is sufficient evidence to be followed up on according to the scope of the Whistleblowing System;
   c. There are statements of violation indications, involved parties, place and date of the violation, and incurred losses.

   If the report meets the criteria (YES), it will be followed up according to provisions in point 3, and if it does not meet the criteria (NO), the Whistleblowing System process is completed.
3. The Whistleblowing Management Team reports the initial verification results to:
   a. The Board of Commissioners and the Audit Committee (if the reported party is a Board of Directors member);
   b. A Board of Commissioners member who is not the reported party (if the reported party is a Board of Commissioners member);
   c. The President Commissioner (if the reported party is a member of the Board of Commissioners' supporting organs);
   d. The Board of Directors (if the reported party is an Employee);
   e. The Board of Commissioners and Board of Directors (if the reported party is a Whistleblowing System Management Team member).
4. Further handling of the issue, according to the submitted materials, is the responsibility and under directives of:
   a. The Board of Commissioners and Audit Committee (if the reported party is a Board of Directors member);
   b. A Board of Commissioners member who is not the reported party (if the reported party is a Board of Commissioners member);

c. Komisaris Utama (jika terlapor anggota organ pendukung Dewan Komisaris);

d. Direksi (jika terlapor Pegawai);

e. Serta Dewan Komisaris dan Direksi (jika terlapor Anggota Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran).

Dari laporan tersebut di atas point 4, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan rekomendasi langkah selanjutnya. Bila tidak terbukti, maka laporan Pengaduan akan ditutup. Apabila Pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Perlindungan Terhadap Pelapor

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor. Dalam hal ini, Perusahaan akan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak mana pun. Perusahaan juga menyediakan perlindungan bagi pelapor dari perlakuan seperti:

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record*).

Lebih jauh, Perusahaan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan) bagi pelapor yang beritikad baik. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan pengelolaan WBS maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

Sanksi dan Apresiasi

Perusahaan memberikan sanksi dan apresiasi terhadap pelapor dan terlapor terkait pengaduan yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat menyediakan perlindungan hukum bagi pelapor yang beritikad baik;
2. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan perusahaan dapat diselamatkan. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan pelapor;

c. The President Commissioner (if the reported party is a member of the Board of Commissioners' supporting organs);
d. The Board of Directors (if the reported party is an Employee);
e. The Board of Commissioners and Board of Directors (if the reported party is a Whistleblowing System Management Team member).

In further report handling beyond point 4, the Board of Directors and/or Board of Commissioners recommends further handling steps. If the report is not proven, the Whistleblowing report will be closed. If the Whistleblowing report is proven or requires follow-ups, sanctions will be imposed according to applicable provisions or passed on to investigators for further stages according to applicable provisions and regulations.

Protection for Whistleblowers

As mentioned previously, the Company ensures the confidentiality of the whistleblowers and the reported parties' identities. In this case, the Company will guarantee protection for whistleblowers from all kinds of threats, intimidation, or unpleasant acts from any parties, provided that the whistleblowers protect the confidentiality of the reported violation from any party. The Company also protects the whistleblowers from acts such as:

1. Unfair work termination;
2. Demotion;
3. Abuse or discrimination in any form;
4. Detrimental record of their personal file (personal file record).

Furthermore, the Company provides legal protection (if necessary) for whistleblowers with good faith. The protection for whistleblowers also applies to parties managing the WBS as well as parties providing information related to the violation report.

Sanctions and Appreciation

The Company imposes sanctions and appreciates whistleblowers and reported parties for admitted reports under the following provisions:

1. The Company may provide legal protection for whistleblowers with good faith;
2. The Company may reward whistleblowers for violations that can be proven, salvaging the Company's assets/finances. The rewards are given through policies of the Board of Directors while considering the aspect of whistleblowers' confidentiality or protection;

3. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Perusahaan wajib mengembalikan nama baik atau rehabilitasi bagi terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Laporan Pelaporan Pelanggaran

Di tahun 2023, tidak terdapat pengaduan pelanggaran yang diterima oleh WBS yang dimiliki Perusahaan.

3. Reported parties proven to commit violations are subject to sanctions according to applicable provisions;
4. The Company is obligated to restore the good name or rehabilitate if reported parties are not proven to commit violations.

Violation Reporting

In 2023, there was no violation report received through the Company's WBS.

KEBIJAKAN TERHADAP KREDITUR

Policies on Creditors

Berkaitan dengan kebijakan terhadap kreditur, kebijakan tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kredit. Di mana kebijakan tersebut mengatur tentang pengelolaan kredit jangka panjang dan jangka pendek, hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengatur hak-hak dan kewajiban keuangan dan non-keuangan, kebijakan sebagai penjamin dan kebijakan penggunaan dana.

Regarding policies on creditors, they have been regulated in the Credit Agreement, which regulates the management of long-term and short-term credits. The Company's rights and obligations towards creditors are stated in an agreement that regulates financial and non-financial rights and obligations, policies as guarantors, and policies on fund use.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

Policies on Goods and/or Services Procurement

Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan dalam rancangan kerja untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna barang maupun jasa. Pengadaan barang dan jasa atau sering dikenal *procurement* adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/satuan kerja/swasta yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012, 2012:2).

Oleh Karena Itu Perusahaan harus bertindak adil dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh vendor yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemilihan *supplier*/vendor/subkontraktor ini didasarkan pada persaingan bebas, di mana *supplier*/ vendor/subkontraktor bebas untuk mengikuti proses kualifikasi yang diadakan oleh Perusahaan. *Supplier*/ vendor/subkontraktor yang lulus dalam proses kualifikasi tersebut berhak menjadi rekanan Perusahaan.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa tercantum dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No. PPRE/ RP/W/005/DIVSCM/P/001 tanggal 16 November 2023.

Background

Goods and services procurement is an activity within the work plan to fulfill the needs of goods and services users. Goods and services procurement, also known as procurement, is an activity to obtain goods/services by ministries/institutions/work units/private companies, and its process begins with the planning of required goods and services until all activities to obtain the goods/services are completed (Regulation of the President No. 70 of 2012 Article 2).

Therefore, the company must act fairly in providing equal opportunities to all vendors with the same qualifications without discrimination. The selection of suppliers/vendors/ subcontractors is based on free competition, where suppliers/vendors/subcontractors are free to participate in the qualification process held by the Company. Suppliers/ vendors/subcontractors who pass the qualification process are entitled to become the Company's partners.

The Policy for Goods and Services Procurement is stated in the Procedure of Goods and Services Procurement No. PPRE/RP/W/005/DIVSCM/P/001 dated November 16, 2023.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Prosedur pengadaan barang dan jasa adalah untuk memberikan panduan dalam proses pengadaan barang dan jasa agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan memenuhi spesifikasi teknis yang berlaku umum dan/atau dipersyaratkan dalam perjanjian oleh pemilik proyek.

Purpose and Objectives

The purpose and objective of creating the Procedure of Goods and Services Procurement is to guide the procurement process of goods and services to ensure the production of quality goods and services that meet the generally applicable technical specifications and/or as required in the agreement by the project owner.

Ketentuan Umum

1. Kewenangan Pengelolaan Pengadaan
   a. Pengadaan material/jasa oleh Biro Operation Control & SCM;
   b. Pengadaan oleh proyek.
2. Penentuan Item Pengadaan Z dan non Z dan Perencanaan Pembayaran
3. Ketentuan proses pelaksanaan pengadaan
   a. Persyaratan Vendor;
   b. Ketentuan jumlah minimal Vendor;
   c. Ketentuan penandatanganan evaluasi seleksi dan negosiasi.

General Provisions

1. Procurement Management Authority
   a. Procurement of material/services by the Operation Control & SCM Bureau;
   b. Procurement by projects.
2. Determination of Z and non-Z Procurement Items and Payment Plans
3. Procurement process provisions
   a. Vendor requirements;
   b. The minimum number of Vendors;
   c. Provisions for signing, evaluation, selection, and negotiation.

4. Penyusunan Kontrak
   a. Tahapan Reviu Kontrak;
   b. Proses reviu dan tanda tangan;
   c. Reviu dokumen kontrak;
   d. Bentuk jenis perjanjian yang diterbitkan oleh Perseroan;
   e. Kontrak OA maupun non OA;
   f. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kontrak.
5. Penyusunan MSCS (Material & *Service Control Sheet*)
6. Penyusunan PO
   a. Tahapan pembuatan PO;
   b. Aturan penandatanganan PO;
   c. Penyusunan Kontrak OA maupun non OA.

4. Contract Preparation
   a. Contract Review Stages;
   b. Review and signing process;
   c. Contract document review;
   d. The forms and types of agreement issued by the Company;
   e. OA and non-OA Contracts;
   f. Parties involved in contract preparation.
5. Preparation of the MSCS (Material & Service Control Sheet)
6. Preparation of the PO
   a. PO preparation stages;
   b. PO signing regulations;
   c. Preparation of OA and non-OA Contracts.

Definsi

Definitions

Istilah Term	**Pengertian** Definition
Material/Jasa Non Z Non-Z Material/Services	Pengadaan oleh Biro Operation Control & SCM yang bersifat Pareto/Strategis/Kritikal/*High Risk/Value* Potensial/Rutin dan bersifat *Stock/Non Stock* Procurement by the Operation Control & SCM Bureau that is Pareto/Strategic/Critical/High Risk/Has Potential Value/Routine and Has a Stock/Non-Stock Characteristic
Material/Jasa Z Z Material/Services	Pengadaan oleh Proyek yang bersifat Non-Pareto/Strategis/Kritikal/*High Risk/Value* Potensial/Rutin dan bersifat *Stock/Non Stock* Procurement by Projects that is not Pareto/Strategic/Critical/High Risk/Has Potential Value/Routine and Has a Stock/Non-Stock Characteristic
Kontrak OA OA Contracts	*Outline Agreement* Kontrak payung yang dikeluarkan oleh SCM Pusat untuk seluruh proyek PPRE, merupakan kontrak pusat dan berlaku nasional Outline Agreement An umbrella contract issued by the Central SCM for all PPRE projects, is a central contract, and nationally applicable
Kontrak Non-OA Non-OA Contracts	*Non-Outline Agreement* Kontrak khusus satu (1) proyek Non-Outline Agreement Special contract for one project
PR	*Purchase Requisition* (Permintaan Pembelian) Dokumen permintaan pengadaan Purchase Requisition A document requesting procurement
PO	*Purchase Order* (Perintah Pembelian) Surat pesanan yang mengacu pada kontrak dan PR Purchase Order A letter of order referring to contracts and the PR
MSCS	*Material and Service Control Sheet* Dokumen *control* pengadaan barang dan jasa yang memonitor realisasi proses pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pengadaan sampai proyek selesai Material and Service Control Sheet A document of goods and services procurement control that monitors the realization of the procurement process according to the procurement needs and schedules until the project is completed
Vendor	Badan Usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, badan hukum atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa. Bentuk Vendor Perseroan yaitu Subkontraktor (Pengadaan penyedia Barang dan Jasa), *Supplier* (Pengadaan penyedia Barang), Mandor (Pengadaan Penyedia Jasa), *Transporter* dan Penyewaan Alat Enterprises, including State-Owned Enterprises, Region-Owned Enterprises, Private Enterprises, legal entities, or individuals engaging in goods and services procurement business. The types of Company Vendors are Subcontractors (Providers of Goods and Services), Suppliers (Goods Providers), Foremen (Service Providers), as well as Transporters and Equipment Rentals

Peraturan

Prosedur/WI lain yang berkaitan dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN adalah:

1. PPRE/RP/W/004 tentang Pendaftaran Vendor non Z;
2. PPRE/RP/P/004 tentang Prosedur *Stock Opname;*
3. PPRE/SCM/W/019 tentang Prosedur *Material Control.*

Referensi

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
3. Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7. Anggaran Dasar Perseroan;
8. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
9. ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan;
10. ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
11. OHSAS 18001:2007 tentang Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja;
12. Cetak biru (*blueprint*) implementasi ERP SAP di PPRE;
13. Memo dari Direksi No. 405/M/DIR/PPRE/IX/2023 tentang ketentuan kasbon dan BL/BTL.

Regulation

Other procedures/WI related to the Regulation of the Minister of SOE No. Per-08/MBU/12/2019 dated December 12, 2019, regarding the general guidelines for the goods and services procurement for SOE, are:

1. PPRE/RP/W/004 regarding non-Z Vendor Registration;
2. PPRE/RP/P/004 regarding Inventory Procedures;
3. PPRE/SCM/W/019 regarding Material Control Procedures.

References

1. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and its amendments;
2. Law No. 2 of 2017 regarding Construction Services and its amendments;
3. Law No. 8 of 1983 regarding the Tax for Goods and Services Value Increase and Sales Tax for Luxury Goods as several times amended, currently by Law No. 42 of 2009;
4. Regulation of the President No. 16 of 2018 regarding Governmental Goods/Services Procurement and its amendments;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-08/MBU/12/2019 of 2019 regarding the General Guidelines for Goods and Services Procurement in State-Owned Enterprises;
6. Regulation of the Governmental Goods/Services Procurement Agency No. 9 of 2018 regarding the Guidelines for Goods/Services Procurement through Providers;
7. The Company's Articles of Association;
8. ISO 9001:2015 on Quality Management System;
9. ISO 14001:2015 on Environmental Management System;
10. ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System;
11. OHSAS 18001:2007 on Occupational Health and Safety Management System;
12. Blueprint of the ERP SAP implementation in PPRE;
13. Memo from the Board of Directors No. 405/M/DIR/PPRE/IX/2023 on provisions of cash receipts and BL/BTL.

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Conformity of the Corporate Governance to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Untuk terus mempertahankan dan utamanya meningkatkan penerapan prinsip GCG, Perusahaan telah membuat referensi silang terhadap penilaian ACGS untuk mempermudah perolehan data, sebagai berikut:

To sustain and, mainly, to improve the implementation of GCG principles, the Company has created a cross reference on the ACGS assessment to simplify data collection, as follows:

Nomor Indeks Index Number	Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
Level 1			
A.	Prinsip A. Hak Pemegang Saham Principle A. Rights of Shareholders		
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights		
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yang berarti seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan *dividen skrip*, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari. Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered a Scrip dividend, did the company pay the dividend within 60 days?	-	
A.2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham di mana peraturannya telah diinformasikan terlebih dahulu, termasuk prosedur pemungutan suara yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.		
A.2.1	Apakah pemegang saham mempunyai kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, benefit natura, dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direksi/komisaris non-eksekutif? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind, and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	√	
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non pengendali untuk mengusulkan calon direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for the Board of Directors/Commissioners?	x	
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih direksi/komisaris? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	√	
A.2.4	Apakah perusahaan mengadakan pemungutan suara sebelum rapat dimulai? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meetings?	√	

Nomor Indeks Index Number	**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
A.2.5	Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan apakah pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent GMS record that the shareholders were allowed to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	√	
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPS terkini? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent GMS?	√	
A.2.7	Apakah perusahaan menyediakan informasi mengenai daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent GMS?	√	
A.2.8	Apakah perusahaan menyediakan informasi mengenai daftar dewan direksi dan CEO (jika dia bukan anggota dewan direksi) yang menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent GMS?	√	
A.2.9	Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara in-absensia? Does the company allow voting in absentia?	√	
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui pemungutan suara (dan bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terkini? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent GMS?	√	
A.2.11	Apakah Perusahaan mengungkapkan pihak independen yang telah ditunjuk (pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the Annual GMS?	√	
A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan hasil pemungutan suara RUPS/RUPSLB terkini kepada publik pada hari kerja berikutnya untuk semua keputusan yang telah ditetapkan? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent GMS/Extraordinary GMS for all resolutions?	√	
A.2.13	Apakah Perusahaan memberikan pemberitahuan mengenai RUPS dan RUPSLB setidaknya 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat? Does the company provide at least 21-day notice for all GMS and Extraordinary GMS?	√	
A.2.14	Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam panggilan RUPS/surat edaran dan/atau dokumen tambahan mengenai agenda rapat? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item that requires shareholders' approval in the notice of GMS/circulars and/or the accompanying statement?	√	
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara atau topik pembicaraan pada rapat umum dengan persentase tertentu? Does the company give shareholders the opportunity to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request general meetings subject to a certain percentage?	√	
A.3	Pasar untuk mengendalikan perusahaan harus berfungsi secara efisien dan transparan. Markets for corporate control should be allowed to function efficiently and transparently.		
A.3.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen skrip, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari. Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered a Scrip dividend, did the company pay the dividend within 60 days?	√	

Nomor Indeks Index Number		Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
A.4	Pelaksanaan hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi. The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.			
	A.4.1	Apakah perusahaan menyampaikan kebijakan atau langkah-langkahnya untuk mendorong keterlibatan pemegang saham dalam aktivitas perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	√	
A.5	Saham dan hak suara Shares and voting rights			
	A.5.1	Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara pada masing-masing kelas saham tersebut (misalnya melalui situs web perusahaan/laporan/bursa/situs web regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicize the voting rights attached to each class of shares (e.g., through the company website/reports/the stock exchange/the regulator's website)?	√	
A.6	Pemanggilan RUPS Notice of GMS			
	A.6.1	Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, misalnya, tidak ada penggabungan beberapa agenda menjadi satu keputusan yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	√	
	A.6.2	Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran terbaru perusahaan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent GMS/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	√	
		Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian sebagai berikut: Does the notice of GMS/circulars have the following details:		
	A.6.3	Apakah profil direksi/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direksi di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	√	
	A.6.4	Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali telah teridentifikasi secara jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	√	
	A.6.5	Apakah dokumen *proxy* telah tersedia? Were the proxy documents made easily available?	√	
A.7	*Insider trading* untuk mendapatkan keuntungan pribadi harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.			
	A.7.1	Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi saham perseroan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within three business days?	√	
A.8	Transaksi pihak berelasi oleh direksi dan pejabat eksekutif utama. Related party transactions by directors and key executives.			

Nomor Indeks Index Number		**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
	A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari direksi/komisaris independen untuk meninjau materi transaksi pihak berelasi (TPB) untuk menentukan apakah TPB tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
	A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direksi/komisaris) untuk tidak ikut serta dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu jika ada konflik? Does the company have a policy requiring board members (directors/ commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	√	
	A.8.3	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pinjaman kepada direksi dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan sesuai dengan *market rates*? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and market rates?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
A.9		Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang Protecting minority shareholders from abusive actions		
	A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa TPB dilakukan untuk memastikan bahwa TPB tersebut adil dan wajar? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way as to ensure that they are fair and at arm's length?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
	A.9.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
C.		Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience		
C.1		Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi penting yang bersifat retrospektif dan berwawasan ke depan, di mana hal ini dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara. Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable, and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision.		
		Informasi penting terkait keberlanjutan harus disertakan Material sustainability-related information should be specified		
	C.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics material to the organization's strategy?	√	
	C.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu? Does the company identify climate change as an issue?	√	

Nomor Indeks Index Number		Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
	C.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e., GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	√	
		Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus menyediakan metrik yang jelas dan diungkapkan secara berkala dan mudah diakses. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form.		
	C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability targets?	√	
	C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress related to its previously set targets?	√	
	C.1.6	Apakah perusahaan memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporannya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report/Reporting is reviewed and/or approved by the Board or Board Committee?	√	
C.2		Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan. Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders, and stakeholders to exchange views on sustainability matters.		
	C.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang berdampak bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the company's business?	√	
	C.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang berdampak bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	√	
C.3		Salah satu fungsi dari tata kelola perusahaan adalah memastikan bahwa dewan mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang signifikan dalam menjalankan fungsi utama mereka, seperti meninjau, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim. The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring, and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management, and internal control systems, including concerning climate-related physical and transition risks.		
		Dewan harus menilai apakah struktur permodalan perusahaan sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan ketahanannya terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios.		
	C.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan melakukan peninjauan setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan risiko yang dapat ditoleransi? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	√	

Nomor Indeks Index Number		**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
C.4		Kerangka tata kelola perusahaan harus mengatur hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan *wealth*, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial. The corporate governance framework should recognize the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active cooperation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.		
		Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose a policy and practices that address:		
	C.4.1	Keberadaan dan upaya perusahaan dalam mengatasi kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	√	
	C.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	√	
	C.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten sehingga dapat mendorong pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	√	
	C.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	√	
	C.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programs and procedures?	√	
	C.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	√	
	C.4.7	Apakah perusahaan mempunyai laporan/bagian terpisah yang membahas upaya dalam mengatasi masalah lingkungan/ekonomi dan sosial? Does the company have a separate report/section discussing its environmental/economic and social efforts?	√	
C.5		Apabila kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh undang-undang, maka pemangku kepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka. Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violating their rights.		
	C.5.1	Apakah perusahaan memberikan kontak yang dapat dihubungi melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report, which stakeholders (e.g., customers, suppliers, the general public, etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	√	
C.6		Metode dalam melibatkan partisipasi karyawan pada perusahaan harus terus berkembang. Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.		
	C.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya? Does the company explicitly disclose its policies and practices on health, safety, and welfare for its employees?	√	
	C.6.2	Apakah perusahaan secara jelas menerangkan mengenai kebijakan dan praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programs for its employees?	√	

Nomor Indeks Index Number	Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
C.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan penghargaan/ kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
C.7	Pemangku kepentingan termasuk karyawan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan kekhawatiran mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan karena pengaduan ini. Stakeholders, including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board, and their rights should not be compromised for doing this.		
C.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan *whistleblowing* yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak yang dapat dihubungi melalui website perusahaan atau laporan tahunan. Does the company have a whistleblowing policy that includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behavior and provides contact details via the company's website or annual reports?	√	
C.7.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkap dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/ person who reveals alleged illegal/unethical behavior from retaliation?	√	
D.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
D.1	Struktur kepemilikan yang transparan Transparent ownership structure		
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik yang memiliki 5% kepemilikan saham atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	√	
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (yang dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	√	
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) oleh direksi (komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	√	
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham manajemen senior secara langsung dan tidak langsung (dianggap)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	√	
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, joint venture, dan perusahaan/kendaraan bertujuan khusus (SPE)/(SPV)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/(SPVs)?	√	
D.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report		
	Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: Does the company's annual report disclose the following items:		
D.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objective	√	
D.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	√	

Nomor Indeks Index Number		**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
	D.2.3	Indikator kinerja non keuangan Non-financial performance indicators	√	
	D.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	√	
	D.2.5	Data diri secara rinci (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direksi di perusahaan emiten lain) dari seluruh direksi/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners	√	
		Pernyataan Mengenai Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement		
	D.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode etik tata kelola perusahaan dan jika terdapat ketidakpatuhan, kenali dan jelaskan alasan setiap permasalahan tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	√	
D.3		Remunerasi Anggota Dewan dan Pejabat Eksekutif Utama Remuneration of Members of the Board and Key Executives		
	D.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk non-eksekutif direksi/komisaris? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	√	
	D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi dari masing-masing direksi/komisaris non-eksekutif? Does the company publicly disclose [i.e., annual reports or other publicly disclosed documents] details of the remuneration of each non-executive director/commissioner?	√	
	D.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan, dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif dan ukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk direksi eksekutif dan CEO? Does the company disclose its remuneration (costs, allowances, benefit-in-kind, and other emoluments) policy/practices (i.e., the use of short-term and long-term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	√	
	D.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direksi eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose [i.e., annual reports or other publicly disclosed documents] the details of the remuneration of each of the executive directors and CEO [if they are not a member of the Board]?	√	
D.4		Pengungkapan transaksi pihak berelasi Disclosure of related party transactions (RPT)		
	D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan transaksi pihak berelasi yang penting? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	√	
	D.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap transaksi pihak berelasi yang penting? Does the company disclose the name, relationship, nature, and value of each material RPT?	√	
D.5		Direksi dan komisaris dalam memecahkan masalah saham perusahaan Board of Directors and commissioners dealings in shares of the company		
	D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	√	

Nomor Indeks Index Number		Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
D.6	Auditor eksternal dan Laporan Auditor External Auditor and Auditor Report			
		Apakah perusahaan audit yang sama yang digunakan untuk jasa audit dan non-audit Whether the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services		
	D.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	√	
	D.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	√	
D.7	Media komunikasi Medium of communications			
		Apakah perusahaan menggunakan cara komunikasi berikut? Does the company use the following modes of communication?		
	D.7.1	Laporan triwulanan Quarterly reporting	√	
	D.7.2	Situs Perusahaan Company website	√	
	D.7.3	Pengarahan untuk para analis Analyst's briefing	√	
	D.7.4	Pengarahan media/konferensi pers Media briefings/press conferences	√	
D.8	Pengarsipan/penyelesaian laporan tahunan/keuangan dilakukan tepat waktu Timely filing/release of annual/financial reports			
	D.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun buku? Are the audited annual financial reports/statements released within 120 days from the fiscal year end?	√	
	D.8.2	Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Is the annual report released within 120 days from the fiscal year's end?	√	
	D.8.3	Apakah laporan tahunan disusun secara benar dan wajar dan apakah telah dikukuhkan oleh direksi/komisaris dan/atau pejabat perusahaan terkait? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/ reports affirmed by the Board of Directors/Commissioners and/or the relevant officers of the company?	√	
D.9	Situs perusahaan Company website			
		Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:		
	D.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulanan terbaru) Financial statements/reports (latest quarterly)	√	
	D.9.2	Materi diberikan dalam bentuk *briefing* kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	√	
	D.9.3	Laporan tahunan dapat diunduh Downloadable annual report	√	
	D.9.4	Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB Notice of GMS and/or Extraordinary GMS	√	
	D.9.5	Risalah RUPS dan/atau RUPSLB Minutes of GMS and/or Extraordinary GMS	√	
	D.9.6	Anggaran dasar perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, nota kesepahaman dan anggaran dasar) Company's articles of association (company's by-laws, memorandum, and articles of association)	√	

Nomor Indeks Index Number			**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
	D.10		Hubungan Investor Investor relations		
		D.10.1	Apakah perusahaan memberikan rincian kontak yang dapat dihubungi (misalnya telepon, faks, dan email) dari pejabat/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	√	
E.			Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board		
	E.1		Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Board Duties and Responsibilities		
			Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang jelas Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy		
		E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/ piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy/board charter?	√	
		E.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/ komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring the board of directors/commissioners' approval disclosed?	√	
		E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	√	
			Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission		
		E.1.4	Apakah perusahaan memiliki visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	√	
		E.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the Board of Directors play a leading role in developing and reviewing the company's strategy at least annually?	√	
		E.1.6	Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi perusahaan? Does the Board of Directors have a process to review, monitor, and oversee the implementation of the corporate strategy?	√	
	E.2		Struktur anggota dewan Board structure		
			Pedoman Etika atau Perilaku Perusahaan Code of Ethics or Conduct		
		E.2.1	Apakah rincian pedoman etika atau perilaku perusahaan diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	√	
		E.2.2	Apakah seluruh direksi/komisaris, manajemen senior, dan karyawan diharuskan mematuhi pedoman etika ini? Are all directors/commissioners, senior management, and employees required to comply with the code/s?	√	
		E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap pedoman etika atau perilaku perusahaan? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	√	
			Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure & Composition		
		E.2.4	Apakah jumlah direksi/komisaris independen minimal 50% dari dewan direksi/ komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the Board of Directors/Commissioners?	√	

Nomor Indeks Index Number	Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
E.2.5	Apakah perusahaan mempunyai batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk direktur independen/komisaris independen? Does the company have a term limit of nine years or less or two terms of five years) each for its independent directors/commissioners? 1) Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 1) The five-year term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	√	
E.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batas lima kursi dewan yang diperuntukkan bagi seorang direksi/komisaris independen/non-eksekutif dapat menjabat secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	√	
E.2.7	Apakah perusahaan mempunyai direksi eksekutif yang menjabat pada lebih dari dua dewan perusahaan emiten di luar grup? Does the company have any executive directors serving on more than two boards of listed companies outside the group?	x	
	Komite Nominasi Nominating Committee		
E.2.8	Apakah perusahaan mempunyai Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.2.10	Apakah ketua Panitia Pencalonan adalah seorang direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Nominating Committee?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy

Nomor Indeks Index Number	**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
E.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed, and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration Committee/Compensation Committee		
E.2.13	Apakah Perusahaan mempunyai Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direksi/komisaris non-eksekutif di mana mayoritasnya adalah direksi/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/ commissioners with a majority of the Board of Directors/independent commissioners?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan direksi/komisaris independen? Is the Head of the Remuneration Committee an independent director/ commissioner?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/ piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed, and if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
	Komite Audit Audit Committee		
E.2.18	Apakah Perusahaan mempunyai Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	√	
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direksi/komisaris non-eksekutif di mana mayoritasnya adalah direksi/komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/ commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	√	

Nomor Indeks Index Number		Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
	E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direksi/komisaris independen? Is the Head of the Audit Committee an independent director/commissioner?	√	
	E.2.21	Apakah Perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/ piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/ charter of the Audit Committee?	√	
	E.2.22	Apakah setidaknya salah satu direksi/komisaris independen komite mempunyai keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	√	
	E.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan pertemuan setidaknya empat kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed, and if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	√	
	E.2.24	Apakah Komite Audit mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommending the appointment and removal of the external auditor?	√	
E.3	Proses Dewan Board Processes			
		Rapat dan kehadiran Dewan Board meetings and attendance		
	E.3.1	Apakah rapat Direksi dijadwalkan sebelum tahun buku dimulai? Are the Board of Directors meetings scheduled before the start of the fiscal year?	√	
	E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat setidaknya enam kali selama setahun? Does the Board of Directors/Commissioners meet at least six times during the year?	√	
	E.3.3	Apakah setiap direktur/komisaris telah menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	√	
	E.3.4	Apakah perusahaan membutuhkan quorum minimal sebanyak 2/3 dari keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	√	
	E.3.5	Apakah Direktur/Komisaris noneksekutif Perusahaan menyelenggarakan pertemuan terpisah setidaknya sekali selama setahun tanpa kehadiran anggota eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	√	
		Akses informasi Access to information		
	E.3.6	Apakah kertas kerja untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Dewan Komisaris setidaknya lima hari kerja sebelum rapat Dewan Komisaris? Are worksheets for the Board of Directors/Board of Commissioners meetings provided to the board at least five business days before the board meeting?	√	
	E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan berperan penting dalam mendukung Dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	√	
	E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan mendapatkan pelatihan di bidang hukum, akuntansi atau praktik sekretariat perusahaan dan mengikuti perkembangan yang relevan? Has the company secretary been trained in legal, accountancy, or company secretarial practices and kept abreast of relevant developments?	√	
		Pengangkatan dan Pemilihan Ulang Dewan Board Appointments and Re-Election		
	E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/ commissioners?	√	

Nomor Indeks Index Number	**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
E.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/ commissioners?	√	
E.3.11	Apakah semua Direktur/Komisaris dapat kembali dipilih setiap 3 tahun; atau 5 tahun di perusahaan terbuka di beberapa negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun masing-masing? Are all directors/commissioners subject to re-election every three years; or five years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of five years each? 2) Jangka waktu lima tahun harus disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum pengenalan ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 2) The five-year term must be required by legislation that pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	√	
	Hal-hal terkait Remunerasi Remuneration Matters		
E.3.12	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau pejabat eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	√	
E.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja untuk direktur eksekutif dan pejabat eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan *clawback* dan bonus yang ditangguhkan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with the long-term interests of the company, such as clawback provisions and deferred bonuses?	√	
	Audit Internal Internal Audit		
E.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal terpisah? Does the company have a separate internal audit function?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified, or if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
E.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal membutuhkan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
	Pemantauan Risiko Risk Oversight		

Nomor Indeks Index Number		Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
	E.3.17	Apakah perusahaan mengembangkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka manajemen risiko, serta meninjau efektivitas kerangka tersebut secara berkala? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	√	
	E.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah meninjau pemantauan material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, finansial dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the Board of Directors/commissioners has reviewed the company's material controls (including operational, financial, and compliance controls) and risk management systems?	√	
	E.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko kunci yang dialami perusahaan (seperti risiko finansial, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, dan ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e., financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	√	
	E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kelayakan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the Board of Directors/Commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	√	
E.4	Anggota Dewan Members of the Board			
		Ketua Dewan Board President		
	E.4.1	Apakah posisi ketua dan CEO diduduki oleh individu yang berbeda? Do different persons assume the roles of president and CEO?	√	
	E.4.2	Apakah ketua dewan merupakan direktur/komisaris independen? Is the president an independent director/commissioner?	√	
	E.4.3	Apakah ada direktur yang merupakan mantan CEO Perusahaan dalam kurun 2 tahun terakhir? Has any of director been a former company CEO in the past two years?	√	
	E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the president disclosed?	√	
		Direktur Independen Utama Lead Independent Director		
	E.4.5	Apabila Ketua bukan pihak independent, apakah Dewan menunjuk Direktur Independen Senior/Utama, dan menjelaskan perannya? If the President is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has their role been defined?	√	
		Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies		
	E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris noneksekutif memiliki pengalaman kerja di bidang yang perusahaan jalankan? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector in which the company is operating?	√	
E.5	Kinerja Dewan Board Performance			
		Pengembangan Direktur Directors Development		
	E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru? Does the company have orientation programs for new directors/ commissioners?	√	

Nomor Indeks Index Number	**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan, praktik, serta program yang dapat mendorong direktur/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung? Does the company have a policy, actual practice, and programs that encourage directors/commissioners to attend ongoing or continuous professional education programs?	√	
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance		
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses perencanaan Direksi/Dewan Komisaris untuk menunjuk CEO/Presiden Direktur/Direktur Utama dan manajemen penting lainnya? Does the company disclose the process of how the Board of Directors/Board of Commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/ President Director and key management?	√	
E.5.4	Apakah Direksi/Dewan Komisaris menggelar penilaian kinerja tahunan CEO/ Presiden Direktur/Direktur Utama? Does the Board of Directors/Commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President Director?	√	
	Penilaian Dewan Board Appraisal		
E.5.5	E.5.5 Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Direksi/ Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the Board of Directors/Commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	√	
	Penilaian Direksi Director Appraisal		
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual Directors/Commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	√	
	Penilaian Komite Committee Appraisal		
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	√	
Level 2 Perihal Bonus Level 2 Bonus Items			
(B)A	Hak pemegang saham Rights of Shareholders		
(B) A.1	(B)A.1 Hak berpartisipasi secara efektif dan memilih dalam rapat umum pemegang saham dan hak mendapatkan informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara yang mengatur rapat umum pemegang saham. The right to participate effectively in and vote in general shareholders' meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders' meetings.		
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mempraktikkan pemungutan suara elektronik yang aman dan langsung dan in absentia pada rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	√	
(B)B	Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham Equitable Treatment of Shareholders		
(B) B.1	Pemberitahuan RUPS Notice of GMS		
(B)B.1.1	Apakah perusahaan merilis pengumuman RUPS (dengan rincian agenda dan penjelasan sirkuler), sebagaimana yang disampaikan kepada Bursa, sekurang-kurangnya 28 hari sebelum rapat diselenggarakan? Does the company release its notice of GMS (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the meeting date?	√	

Nomor Indeks Index Number			Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
(B)C.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience				
	(B) C.1				
		(B)C.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara yang dilakukan untuk mengelola risiko dan peluang yang berhubungan dengan iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	√	
		(B) C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/ Pelaporan Keberlanjutan telah diverifikasi secara eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report/Sustainability Reporting is externally assured?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
		(B) C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran komunikasi dengan kelompok pemegang saham dan bagaimana perusahaan menanggapi perhatian pemegang saham terhadap ESG? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
		(B) C.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan? Does the company have a unit/division/committee responsible for managing sustainability matters?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
		(B) C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pandangan Direksi/Dewan Komisaris terhadap risiko dan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan? Does the company disclose the Board of Directors/Board of Commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	√	
		(B) C.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior dan kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	√	
		(B) C.1.7	Apakah Sistem Pelaporan Pelanggaran perusahaan dikelola oleh pihak/ lembaga independen? Is the company's Whistle Whistleblowing managed by independent parties/ institutions?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
(B)D.	Pengungkapan dan transparansi Disclosure and transparency				
	(B) D.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report			
		(B)D.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan? Are the audited annual financial reports/statements released within 60 days from the fiscal year's end?	√	

Nomor Indeks Index Number	**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
(B)E.	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board		
(B) E.1	Kompetensi dan Keberagaman Dewan Board Competencies and Diversity		
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/ commissioner?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
(B) E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keragaman anggota Dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its Board diversity and report on progress in achieving its objectives?	√	
(B) E.2	Struktur Dewan Board Structure		
(B) E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri atas direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised entirely of independent directors/ commissioners?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
(B) E.2.2	Apakah Komite Nominasi menjalani proses identifikasi kualifikasi Direktur yang sejalan dengan tujuan strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of Directors aligned with the company's strategic directions?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
(B) E.3	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Board Appointments and Re-Election		
(B) E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan perekrutan profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data direktur yang dibuat oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by directors or shareholder bodies) when searching for candidates for the Board of Directors/Board of Commissioners?	√	
(B) E.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure & Composition		
(B) E.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen terdiri dari lebih dari 50% anggota direksi/komisaris di perusahaan yang memiliki komisaris utama independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the Board of Directors/commissioners for a company with an independent president commissioner?	√	
(B) E.5	Pemantauan Risiko Risk Oversight		

Nomor Indeks Index Number	Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
(B) E.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan telah mengidentifikasi risiko-risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risks in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	√	
(B) E.6	Kinerja Dewan Board Performance		
(B) E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko dengan level yang setara dengan Dewan? Does the company have a separate Board-level Risk Committee?	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
Level 2 Penalti Level 2 Penalty			
(P)A.	Hak pemegang saham Rights of shareholders		
(P) A.1	Hak dasar pemegang saham Basic shareholder rights		
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau mengabaikan upaya memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham dalam hal pembayaran saham? Did the company fail or neglect to offer all shareholders equal treatment for share repurchases?	√	
(P) A.2	Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, berhak untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-Prinsip, dengan tunduk pada pengecualian-pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.		
(P) A.2.1	Apakah ada bukti hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	x	tidak ada bukti hambatan there is no evidence of barriers
(P) A.3	Hak berpartisipasi secara efektif dan memilih dalam rapat umum pemegang saham dan hak mendapatkan informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara yang mengatur rapat umum pemegang saham. The right to participate effectively in and vote in general shareholders' meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders' meetings.		
(P) A.3.1	Apakah perusahaan mencantumkan materi agenda tambahan atau agenda yang tidak diumumkan ke dalam pemberitahuan RUPS/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda items in the notice of GMS/Extraordinary GMS?	x	Mengumumkan sesuai dengan materi agenda Announce in accordance with the agenda material
(P) A.3.2	Apakah Ketua Dewan dan Ketua seluruh Komite Dewan serta CEO tidak hadir di hampir seluruh Rapat Umum? Was the President of the Board and the Head of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	x	Komite dewan serta CEO hadir dalam rapat umum The board as well as the CEO were present at the general meeting

Nomor Indeks Index Number	Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
(P) A.4	Struktur dan pengaturan modal yang membuat pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.		
	Apakah perusahaan tidak mampu mengungkapkan keberadaan: Did the company fail to disclose the existence of:		
(P) A.4.1	Persetujuan pemegang saham? Shareholders agreement?	√	
(P) A.4.2	Batas maksimal pemungutan suara? Voting cap?	√	
(P) A.4.3	Hak suara ganda? Multiple voting rights?	√	
P) A.5	Struktur dan pengaturan modal yang membuat pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.		
(P) A.5.1	Apakah piramida struktur kepemilikan dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat? Is a pyramid ownership structure and/or cross-holding structure apparent?	√	
(P)B.	Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham Equitable treatment of shareholders		
(P) B.1	Perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan perdagangan pribadi dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.		
(P)B.1.1	Apakah perusahaan pernah mencatat kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan direktur/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/ commissioners, management, and employees in the past three years?	√	
(P) B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan. Protecting minority shareholders from abusive action.		
(P) B.2.1	Apakah terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang material dalam tiga tahun terakhir? Has there been any case of non-compliance with the laws, rules, and regulations pertaining to material-related party transactions in the past three years?	√	
(P) B.2.2	Apakah ada RPT yang dikategorikan sebagai bantuan keuangan (yaitu yang tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arm's length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	√	
(P)C.	Peran pemangku kepentingan Role of stakeholders		
(P) C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. The rights of stakeholders established by law or through mutual agreements are to be respected.		
(P)C.1.1	Apakah ada pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja/ ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan usaha atau masalah lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labor/employment/ consumer/insolvency/commercial/competition or environmental issues?	√	
(P) C.2	Ketika para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient, and reliable information on a timely and regular basis.		

Nomor Indeks Index Number	Parameter Parameter	Penyajian Presentation	Keterangan Description
(P) C.2.1	Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang disyaratkan untuk peristiwa material? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	√	
(P) C.2.2	Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan *greenwashing?* Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	√	
(P)D.	Pengungkapan dan transparansi Disclosure and transparency		
(P) D.1	Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan. Sanctions from regulator on financial reports.		
(P)D.1.1	Apakah perusahaan menerima "opini wajar tanpa pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	√	
(P) D.1.2	Apakah perusahaan menerima "opini tidak wajar" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	√	
(P) D.1.3	Apakah perusahaan menerima "opini tidak memberikan pendapat" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	√	
(P) D.1.4	Apakah perusahaan dalam satu tahun terakhir telah merevisi laporan keuangan karena berbagai alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	√	
(P)E.	Tanggung jawab Dewan Responsibilities of the Board		
(P) E.1	Kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan, dan hukum yang berlaku. Compliance with listing rules, regulations, and applicable laws.		
(P)E.1.1	Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan regulasi pencatatan selain peraturan pengungkapan selama satu tahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	√	
(P) E.1.2	Apakah ada contoh di mana direktur/komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat masalah terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	√	
(P) E.2	Struktur Dewan Board structure		
(P) E.2.1	Apakah Perusahaan memiliki direktur/komisaris independen yang telah menjabat selama lebih dari sembilan tahun atau dua periode jabatan masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? Masa jabatan lima tahun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (whichever is higher) in the same capacity? The five-year term must be required by legislation that pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	√	
(P) E.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar keterangan semua direktur mereka sebagai pihak independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	√	
(P) E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur/non-eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima dewan direksi perusahaan publik? Does the company have independent directors/non-executives/ commissioners who serve on more than five boards of publicly listed companies?	√	

Nomor Indeks Index Number	**Parameter** Parameter	**Penyajian** Presentation	**Keterangan** Description
(P) E.3	Audit Eksternal External Audit		
(P) E.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra dari auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past two years)?	√	
(P) E.4	Struktur dan komposisi Dewan Board structure and composition		
(P) E.4.1	Apakah ketua pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the president been the company CEO in the last three years?	√	
(P) E.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif menerima opsi, saham kinerja, atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares, or bonuses?	√	
Lampiran Appendix			
Apakah pemegang saham berhak berpartisipasi dalam: Do shareholders have the right to participate			
A.2.1	Perubahan konstitusi perusahaan? Amendments to the company's constitution?	√	
A.2.2	Otorisasi saham tambahan? The authorization of additional shares?	√	
A.2.3	Pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang berakibat pada penjualan perusahaan? The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company?	√	
B.1.1	Apakah saham biasa atau saham biasa perusahaan memiliki satu suara untuk satu saham? Does the company's ordinary or common shares have one vote for one share?	√	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang direktur/komisaris dan karyawan untuk mengambil keuntungan dari informasi yang tidak tersedia secara umum di pasar? Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees from benefiting from knowledge not generally available to the market?	√	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan direktur/komisaris untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam transaksi dan benturan kepentingan? Does the company have a policy requiring directors/commissioners to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	√	
D.2.6	Rincian kehadiran setiap direktur/komisaris dalam semua rapat direktur/komisaris yang diadakan sepanjang tahun. Attendance details of each director/commissioner in all directors/commissioners' meetings held during the year.	√	

√ = terpenuhi | x = tidak terpenuhi | - = tidak sesuai/tidak dapat diterapkan
√ = comply | x = not comply | - = not applicable

PENERAPAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance

Berikut disampaikan Rekomendasi dan Panduan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 dan penerapannya oleh Perusahaan.

Below is the Recommendations and Guidelines in the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) and their implementation by the Company.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners				
	1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors				
	1.1.1		Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: • Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; • Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; • Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*) To achieve continuous value creation, the Board of Directors carries out its role and strives to achieve the following governance results: • Competitive and focusing on long-term performance; • Ethical and responsible in engaging in business; • Positively contributing to the community and the environment and capable of persevering and growing (corporate resilience)	√	
		1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors implements high standards of business ethics and ensures the implementation of corporate culture with integrity.	√	
		1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Board of Directors cultivates the corporate culture which ensures that employees understands their responsibility to act according to corporate values and high standards of business ethics.	√	
		1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. The Board of Directors ensures the fulfillment of corporate social and environmental responsibility. The Board of Directors has a clear strategic planning in implementing corporate social and environmental responsibility.	√	
		1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially resilient and operationally agile.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's annual and long-term mission, vision, objectives, goals, strategy, and plans are consistent with long-term objectives, by utilizing innovation and technology effectively.		√	
		1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of sophisticated technology to increase competitiveness, accommodate stakeholders' concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibility.	√	
		1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi. The Board of Directors prioritizes and upholds corporate culture that includes innovation and integrate it into corporate strategy, operational development plans, and operational supervision.	√	
		1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. The Board of Directors encourages innovation that increases long-term value creation for business in dynamic environment. The innovation can include business model planning, innovative products and services, promoting research, improving production and operational process, and collaborating with partners.	√	
	1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements the appropriate and effective risk management and internal control system which are in line with the corporation's vision, mission, objectives, goals, and strategies as well as comply with applicable laws, regulations, and standards.		√	
	1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting system as well as timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		1.1.4.1	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai. The Board of Directors ensures that every personnel involved in the organization and disclosure of corporate information has the relevant knowledge, skills, and experiences, reflected from, among others, relevant professional certification issued by reputable institutions. Furthermore, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources (including employees).	√	
		1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: • Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal; • Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain; • Pendapat Komite Audit; • Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving the disclosure of information (including for the disclosure of periodic financial information), the Board of Directors considers all of the following factors: • The results of the evaluation of design sufficiency and effectiveness of the internal control system implementation; • The opinion of the external auditor on the financial statements, observations on the internal control system, and other observations from other sources; • The opinion of the Audit Committee; • Consistency with goals, strategies, and policies.	√	
		1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. The Board of Directors submits a report that comments on the Quarterly Financial Statements and is published together with the Quarterly Financial Statements to help investors and analysts who will review the corporation's fundamentals and financial performance.	√	
	1.1.5		Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that the sustainability report is prepared accordingly.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		1.1.5.1	Laporan Keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. The Sustainability Report is prepared based on a reporting framework appropriate for the size and complexity of the corporation and meets national and/or global standards.	√	
		1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. Corporate sustainability reporting reflects corporate practices that support continuous value creation.	√	
	1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with the corporation's business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.		√	
		1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	√	
		1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	√	
		1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures, including protection of data security and confidentiality.	√	
	1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that run their business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting devices so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.		x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
	1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, Director's role division individually, which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a decree of the Board of Directors.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	1.1.9		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made mistakes.	√	
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Directors and its Members				
	1.2.1		Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts an objective and independent annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board of Directors and each Director individually.	√	
		1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the Board of Directors' performance. The results of the self-assessment are submitted to the Board of Commissioners for evaluation and, if necessary, adjusted with the assessment of the Board of Commissioners.	√	
		1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolok ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. The self-assessment or other assessment's policy is based on specific, measurable, achievable, and relevant measurements aligned with what was set by the Board of Commissioners based on the considerations of the Nomination and Remuneration Committee and as a basis for assessing the Board of Directors's accountability regarding the Corporation's level of success in achieving performance targets. The selected measurements are included in the work agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	√	
		1.2.1.3	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. The remuneration scheme in the form of shares granted to Directors, Commissioners, and employees must be approved by the shareholders.	√	
		1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan Direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a Director's term of office of is based on an evaluation result of a satisfactory performance of their contributions.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	1.2.2		Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, in consultation with the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
		1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the performance evaluation of the President Director is based on previously determined criteria that have been communicated to the person in advance. The performance criteria or evaluation should incentivize the President Director to carry out his role in supporting the achievement of corporate goals and the creation of sustainable value.	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
		1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. The Board of Commissioners, in consultation with the Nomination and Remuneration Committee, conducts an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Head of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners communicates the results (including areas of improvement) of the performance evaluation to the President Director.	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
		1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara objektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners, in consultation with the Nomination and Remuneration Committee, approves the performance evaluation criteria for other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on previously determined performance evaluation criteria.	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners				
	1.3.1		Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision, and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice for, and approves the corporate long-term business plan and financial plan as well as the corporate short-term financial plan. The Board of Commissioners advises and monitors the Board of Directors on the managing their implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in critical decisions for the corporation, as stipulated in the corporation's articles of association.	√	
	1.3.2		Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	√	
	1.3.3		Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. While considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to and to be determined by the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners considers diversity and non-discriminatory elements and provides equal opportunities without discriminating based on ethnicity, religion, race, social groups, and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and selection process for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is formal and transparent.	√	
	1.3.4		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee performing the nomination function formulates a succession policy in the nomination process for the Board of Directors members. Each year, the Board of Commissioners reviews the reporting on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	1.3.5	Dewan Komisaris: • Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; • Secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners: • Submits to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee performing the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that is in line with continuous corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; • Regularly reviews the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners.		√	
	1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.		√	
		1.3.6.1	Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen. The Board of Commissioners ensures periodic evaluations on the implementation of corporate governance policies, both through self-assessment and using independent external consultants.	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
	1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporation's goals, objectives, and strategies, and comply with applicable laws, regulations, code of conduct, and standards.		√	
		1.3.7.1	Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama korporasi, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (*risk appetite*) korporasi. The Board of Commissioners understands the nature and scope of the corporation's main risks, and periodically reviews and approves the corporation's risk appetite.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: • Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (*risk appetite*) korporasi; • Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (*early warning signals*) atas risiko material; • Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. The Board of Directors monitors and provides input to ensure that: • The establishment and implementation of risk management policies are consistent with the corporation's goals, objectives, strategies, and risk appetite; • Risk management policies can provide early warning signals of material risks; • Risk management policies are reviewed periodically, for example annually.	√	
		1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that key risks are identified by considering internal and external factors.	√	
		1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat. The Board of Directors monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks have been assessed and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.	√	
		1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of the corporation's risk management and internal control systems.	√	
	1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners oversees and directs to achieve the integrity of accounting and corporate financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before approving the financial statements, the Board of Commissioners receives a statement from the President Director and the Director of Finance of the corporation, that in their opinion, the entity's financial records have been properly managed and the financial statements have been prepared according to applicable accounting standards and fairly present the corporation's financial position and performance and that their opinion is based on an appropriately designed and effective risk management and internal control system.	√	
	1.3.9		Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Corporation's annual report and sustainability report, ensures its integrity, and oversees the Corporation's disclosure and communication process.	√	
	1.3.10		Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Charter of the Board of Commissioners is periodically reviewed.	√	
	1.3.11		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of the Board of Commissioners members if they are involved in financial crimes and are proven to have committed misconduct.	√	
	1.3.12		Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at meetings of the Board of Commissioners.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
		1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: • Mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; • Dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; • Mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, the Board of Commissioners appoints an Independent Commissioner or senior Independent Commissioner (if there is more than one Independent Commissioner) to carry out the President Commissioner's role for the tasks of the President Commissioner that have the potential for conflict of interest with affiliated parties. The criteria for appointing a senior Independent Commissioner are: • Able to convey opinions/arguments constructively to the President Commissioner; • Compared to other commissioners, have more knowledge about the corporation, including its performance, market, and stakeholders; • Able to provide balanced views/thoughts on issues and concerns of majority shareholders.	√	
		1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: • Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; • Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan • Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In carrying out their role as members of the Board of Commissioners, Independent Commissioners should: • Act in the best interests of the corporation; • Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or controlling shareholders; • Independently consider the views of minority shareholders and other stakeholders; and • Encourage dialogue between management, shareholders, and other stakeholders.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The corporation discloses the reasons for the termination of the duties of an independent commissioner that occurs before the end of their term of office.	√	
	1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows for different views to be expressed, including coordinating and appropriate setting of a board meeting agenda and ensuring that sufficient time is available to discuss all agenda items. Moreover, there should also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.			√	
		1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. The details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and on the corporation's website.	√	
		1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner coordinates the supervisory role division among the members of the Board of Commissioners, leads Board of Commissioners meetings, and represents the Board of Commissioners in engaging with parties outside the Board of Commissioners.	√	
		1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be directly appointed as the President Commissioner. There must be a cooling-off period of two years before they can be reappointed as a President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director/member of the Board of Directors needs to become a President Commissioner, the Board of Commissioners provides reasons and explanations in the Annual Report.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
1.4	Pembentukan Komite Committee Formation				
	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The corporation has committees under the Board of Commissioners, which shall at least consist of: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Supervisory Committee.		√	
		1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya. For Committees that are not required by regulations, if the corporation does not have the Committee, the corporation shall disclose such fact and disclose the process used to ensure that the functions of such Committee are carried out by the Board of Commissioners accordingly.	√	
	1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and other committees formed by the Board of Commissioners are majority independent and that all members of the committees have the competence, commitment, and authority to carry out their roles effectively and independently.		√	
		1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan. The Committee has a charter that clearly sets out its role and gives it all the authority it needs to carry out its role. This authority includes the right to obtain information, meet with relevant parties related to the performance of its duties (with or without the presence of management), and seek advice from independent external consultants/experts if the committee deems it necessary.	√	
	1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that the monitoring of the Audit Committee's duty implementation is objective and independent, the President Commissioner shall not be the Head of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and Its Members				
	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each commissioner individually.		√	
		1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja sebagai Dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners may have its self-assessment policy to assess the performance of the Board as a whole.	√	
		1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other assessment policy is based on specific, measurable, achievable, relevant, and consistent performance criteria set by the Board of Commissioners.	√	
		1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. Extension of the term of office of Commissioners is based on the results of a satisfactory performance evaluation of their contributions.	√	
		1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners involves independent external consultants periodically, at least once during their term of office, to facilitate an objective and forthright evaluation of the performance of the Board of Commissioners.	√	
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest				
	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. The Board of Directors members who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner informs the Board of Commissioners and the head of the committee responsible for nomination functions before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed corporation, another directorship, or any other position with significant time commitment.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. The Board of Commissioners ensures clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who currently serve or intend to serve as directors or commissioners in other corporations. The policy should stipulate allowable appointments and the number of corporations in which they are permitted to concurrently serve as directors or commissioners.	√	
	1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest involving management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including the misuse of corporate assets and abuse in related-party transactions. Commissioners with conflicts of interest do not participate in the monitoring and decision-making regarding potential conflicts of interest involving themselves or their affiliated Commissioners.		√	
		1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut. The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and Commissioners with conflicts of interest do not participate (abstain) in decision-making related to such conflicts.	√	
		1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya. Each member of the Board of Commissioners promptly informs the Board of Directors and the Board of Commissioners if there is a potential conflict of interest, including as a result of their position as a consultant or officer in customer companies, suppliers, creditors, or other business partners.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. All members of the Board of Directors promptly disclose their potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and do not participate in decision-making when such conflicts of interest are present.	√	
		1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan. In its report, the Board of Commissioners informs the General Meeting of Shareholders (GMS) of any occurring material conflict of interest along with their treatment. A material conflict of interest that is not merely temporary may result in the termination of board membership.	√	
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Development for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners				
	1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the corporation's characteristics and operations, relevant laws, regulations, and standards, as well as other applicable obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing the skills and knowledge they need to carry out their roles on the Board.		√	
		1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and the Board of Commissioners receive a formal and adequate induction program and all information relevant to their roles and responsibilities.	√	
		1.7.1.2	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate, and continuous training and knowledge development programs.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
		1.7.1.3	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly receive accurate, timely, and clear information on the latest developments in relevant, regulations, and standards, other applicable obligations, risk factors, and the corporate business environment.	√	
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners				
	2.1 Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors				
	2.1.1		Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining the candidates for Directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee may use independent sources to determine qualified candidates.	√	
	2.1.2		Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, skills, and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and to pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: • Identitas calon dan alasan pengangkatan; • Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; • Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; • Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; • Lama masa jabatan; • Kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan • Setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information on Director candidates must be disclosed in the selection/re-election process and must be available from the date of GMS summons until the holding of the GMS and can be downloaded via the website of the Public Company and/or e-RUPS, including: • Identity of the candidate and reason for appointment; • Core competencies, qualifications, and professional background; • Current positions in other corporations, as well as important roles in non-profit/charitable organizations; • Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; • Term of office; • Attendance at Board of Directors meetings (except for new Directors); and • Any shareholdings in the corporation.	√	
		2.1.2.2	Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi. The composition of the Board of Directors is formed in such a way that its members collectively reflect diversity in terms of the skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Directors.	√	
		2.1.2.3	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi korporasi serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of the Board of Directors members considers the condition of the corporation and the effectiveness of decision-making.	√	
		2.1.2.4	Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat korporasi beroperasi. There is at least one director with previous experience in the main sector where the corporation operates.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		2.1.2.5	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut. Members of the Board of Directors who oversee accounting or finance are skilled and/or knowledgeable in accounting, reflected by, among other things, professional certification issued by government-recognized accounting professional associations and registered as members of such professional associations.	√	
	2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy on diversity on the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.		√	
		2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. The corporation reports in the Annual Report the current diversity of the Board of Directors and the Board of Commissioners, measurable composition targets, and the progress in achieving those targets. The information should include references on how diversity is achieved through proper succession planning on the Board of Directors and the Board of Commissioners.		
	2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so that they can produce the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: • Identitas calon dan alasan pengangkatan; • Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; • Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; • Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; • Lama masa jabatan; • Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk Komisaris baru); dan • Setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information on Commissioner candidates must be disclosed in the selection/re-election process and must be available from the date of GMS summons until the holding of the GMS and can be downloaded via the website of the Public Company and/or e-RUPS, including: • Identity of the candidate and reason for appointment; • Core competencies, qualifications, and professional background; • Current positions in other corporations, as well as important roles in non-profit/charitable organizations; • Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; • Term of office; • Attendance at meetings of the Board of Commissioners and committees (except for new Commissioners); and • Any shareholdings in the corporation.	√	
		2.1.4.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan. If the Board of Commissioners uses an independent external consultant in the nomination process, relevant information about the independent external consultant is disclosed in the annual report, including information about independence and conflicts of interest.	√	
	2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that carries out the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' competency matrix that has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the competency matrix and nomination criteria.			√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members collectively reflect diversity in terms of the skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.		√	
		2.1.6.1.	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi. At least one Commissioner has previous experience in the main sector where the corporation operates.	√	
		2.1.6.2.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. The determination of the number of the Board of Commissioners members considers the condition of the corporation.	√	
	2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to advise and supervise the Board of Directors independently and for roles where there is a potential for conflict of interest, the Board of Commissioners includes a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.		√	
		2.1.7.1	Mantan Direktur Utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former President Director/member of the Board of Directors can join the Board of Commissioners as an Independent Commissioner only in extraordinary circumstances and there must be a gap between these positions of at least two years.	√	
		2.1.7.2	Mantan Komisaris Independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former Independent Commissioners can be reappointed as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap between these positions of at least two years.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		2.1.7.3	Masa jabatan Komisaris Independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang Komisaris Independen dapat terus menjabat hanya sebagai Komisaris. The term of office of an Independent Commissioner may not exceed nine years. For corporations with a term of office of five years, it may not exceed ten years. After nine/ten years, an Independent Commissioner may continue to serve only as a Commissioner.	√	
	2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners effectively and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for appointing and selecting members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.		√	
		2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: • Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: » Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya; » Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut. • Secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris;	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
			• Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; • Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include but are not limited to: • Drafting guidelines to ensure that all Commissioners allocate sufficient time to the corporation to fulfill their responsibilities effectively. These guidelines include, among others: » In appointing the lead commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a specific job description, including time commitment requirements that also consider time commitment needs during crises. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners before appointment and disclosed in the annual report. Changes in commitments must be promptly reported to the Board of Commissioners, and their impacts explained in the following annual report. » In appointing other commissioner members, the Nomination and Remuneration Committee establishes the criteria and conditions for their appointment. These criteria and conditions are available for review. The expected time commitment should be stated in the appointment letter, and the appointed commissioners must have sufficient time to fulfill the expected time commitments. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners before appointment, along with indications of the required time commitments. The Board of Commissioners must be informed of any changes to these commitments. • Proactively leading and being responsible for the development, implementation, and continuous review of succession planning for the Board of Directors and the Board of Commissioners; • Upholding the principle of independence in managing conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in the execution of committee tasks; • Considering and being responsible for appointing independent nomination consultants, including the selection and requirements for their appointment, as well as disclosing the identity and costs of consultancy services.		

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners				
	2.2.1		Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for the Board of Directors members consists of a compensation structure oriented towards the continuous development of the corporation and encourages the achievement of long-term goals. Remuneration for the Board of Directors must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners for approval through the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors, the economic situation, and corporate performance.	√	
		2.2.1.1.	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. The remuneration policy is reasonable and fair, both in structure and amount, determined in the context of corporate values and internal reward structures, and encourages competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	√	
		2.2.1.2.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/ insentif yang telah dibayar (*clawback*). The corporation has a performance-based remuneration policy for members of the Board of Directors that aligns with the achievement of long-term corporate interests, such as performance metrics including stock ownership options, deferred bonuses, and provisions for the partial or full recovery of bonuses/incentives already paid (clawback).	√	
		2.2.1.3.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive any facilities beyond those already provided based on the resolutions of the General Meeting of Shareholders of the corporation.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for the Board of Commissioners members consists of a remuneration structure that is oriented towards continuous corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners, the economic situation, and corporate performance. Moreover, their position as President Commissioner as well as a head and member in committees must also be considered.		√	
		2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. The remuneration of the Board of Commissioners must be in the form of fixed remuneration. If members of the Board of Commissioners are given performance-related remuneration, the basis for granting it must be related to the long-term development of the corporation and different from that of the members of the Board of Directors.	√	
		2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. Independent Commissioners may not receive stock options, performance-related shares, or bonuses.	√	
	2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on performance, qualifications, and competencies of Directors and Commissioners while considering corporate operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing the remuneration policies for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi: • Menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan; • Mempertimbangkan apakah Direktur dan Komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang; • Secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/ Komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik; • Mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur dan Komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk Direktur dan Komisaris yang hampir pensiun; • Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota Komite dalam pelaksanaan tugas Komite; • Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. In carrying out its role, the Nomination and Remuneration Committee: • Determines the appropriate and balanced proportion between fixed and performance-related components of remuneration, whether paid directly or deferred. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support long-term corporate performance achievement. Remuneration incentives are ensured to be in line with corporate risk policies. Additionally, there are set limits on remuneration, and these limits are disclosed in the annual report; • Considers whether Directors and Commissioners are eligible for annual bonuses and/or allowances with long-term incentive schemes;	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
			• Carefully consider compensation obligations (including pension contributions and all other components) that become due to Directors/ Commissioners if terminated early. The aim is to avoid rewarding poor performance; • Considers the consequences of pension obligations and other long-term benefits for Directors and Commissioners for the corporation, including the impact of increased remuneration and other changes, especially for Directors and Commissioners nearing retirement; • Upholds the principle of independence in managing conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among Committee members in the execution of Committee tasks; • Considers and is responsible for appointing independent remuneration consultants, including selection and requirements for their appointment, and discloses the identity and costs of consultancy services.		
3.	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Work Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners				
	3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Work Relationship			
		3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There is open discussion between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as between the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners. However, maintaining information confidentiality remains important to avoid the leakage of confidential information.	√	
		3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi, dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. According to their respective duties and roles, the Board of Directors works together with the Board of Commissioners in formulating the corporation's mission, vision, and strategy and regularly discusses its implementation.	√	
		3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: • Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; • Memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; • Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah; • Mengatur dan memfasilitasi orientasi Direktur/Komisaris/anggota komite baru dan pengembangan profesional Direktur/Komisaris/anggota komite; • Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/investor, baik lokal maupun asing. The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: • Ensuring a good flow of information between the Board of Commissioners and its committees, and between the Board of Commissioners and the Board of Directors; • Monitoring the development of corporate governance, including ensuring that the charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees are fully implemented, assisting and advising the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance practices to meet stakeholder expectations; • Managing all meeting requirements of the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Directors with the Board of Commissioners, committees formed by the Board of Commissioners, attending and recording minutes of all meetings, and facilitating communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that the discussions and decisions of the meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners are accurately recorded in the minutes; • Arranging and facilitating the orientation of new Directors/Commissioners/committee members and the professional development of Directors/Commissioners/committee members; • Managing investor relations activities to maintain and improve communication between the corporation and shareholders/investors, both domestic and foreign.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		3.1.3.2	Setiap Direktur dan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Korporat dan sebaliknya. Each Director and Commissioner may communicate directly with the Corporate Secretary and vice versa.	√	
		3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi. The Board of Commissioners advises the Board of Directors in the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.	√	
3.2	Akses informasi Dewan Komsaris Information Access for the Board of Commissioners				
	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan, dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that it has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.		√	
		3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process that allows members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and concerned senior management.	√	
		3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or Corporate Secretary immediately informs the Board of Commissioners of major material and significant events related to the corporation's condition, performance, and management. If necessary, a meeting of the Board of Commissioners is held to discuss the event.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between meetings of the Board, the Board of Commissioners communicates regularly with the Board of Directors to be kept informed about corporate developments that require the attention of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can carry out its duties more effectively.	√	
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure to the Corporation				
	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and the relationships between shareholders of the corporation that may impact corporation management and operations.		√	
		3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis di mana korporasi merupakan bagiannya. The Board of Directors and the Board of Commissioners understand the share ownership structure and the relationships between shareholders of the corporation, and consider their impact on the control of the corporation, including written and unwritten agreements of the family as controlling shareholders, agreements between shareholders, or the policies of the business group of which the corporation is a part.	√	
		3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the share ownership structure and the relationships between shareholders of the corporation do not affect the performance of the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, (including in relation to the succession plan of the Board of Directors) in the best interests of the corporation.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
		3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi. The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures that information is disclosed properly when there are conditions that affect the control of the corporation.	√	
4.	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Ethical and Responsible Conduct				
	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct and Ethics				
	4.1.1		Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: • Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; • Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; • Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; • Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; • Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; • Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; • Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi, atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; • Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; • Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
			This statement is embodied in the Code of Conduct and Business Ethics, which must clearly articulate the corporation's expectations that every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as employees will: • Act in the corporation's best interests; • Act honestly and with high standards of integrity; • Act independently and based on complete information, in good faith, with thoroughness and prudence; • Comply with the laws and regulations applicable to the corporation and its operations; • Avoid actions that violate laws or unethical actions based on corporate ethical guidelines; • Not engage or participate in any activities that would create conflicts of interest with the corporation's best interests or negatively impact corporate reputation; • Not take advantage of corporate property or information, ownership of other assets, or its clients for personal gain or that cause loss to the corporation and its clients; • Not exploit their position or opportunities generated by their position for personal gain; • Avoid soliciting or accepting from third parties payments, gratuities, or other benefits for themselves or for others that create conflicts of interest or provide benefits to third parties in violation of laws and regulations; • Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees; • Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.		
	4.1.2		Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan, atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices against money laundering and terrorist financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement by referring to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards.	√	
		4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis. The Board of Directors develops and establishes a system that can be used to prevent money laundering and terrorist financing, corruption, offering or accepting bribes, and other payments or inducements to commit acts that violate laws or regulations or are unethical.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
		4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan. The Board of Directors communicates the anti-money laundering, anti-bribery, and anti-corruption policies by providing training to staff and seeking to extend anti-money laundering, anti-bribery, and anti-corruption efforts to stakeholders.	√	
		4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Any material breach of the anti-money laundering, anti-bribery, and anti-corruption policies shall be reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners or the Board of Commissioners' Committees.	√	
		4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political involvement, which includes lobbying and donations for political purposes or candidates if permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the approach taken are understood, monitored, and regularly reviewed by the Board of Commissioners.	√	
4.2	Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Values and Culture of the Organization				
	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan, dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The corporation articulates, cultivates, and expresses corporate culture and values.		√	
		4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku. The corporation fosters a corporate culture that ensures all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as all employees, understand and commit to fulfilling their responsibilities to behave according to ethical guidelines and conduct.	√	
		4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai, dan etika korporasi. There is adequate training and dissemination at the level of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as all corporate employees mentioned above, for all aspects related to corporate culture, values, and ethics.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. There are assessments and monitoring programs to ensure that the entirety of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all corporate employees understand the relevant code of conduct and implement it effectively to avoid corporate involvement in inappropriate behavior.	√	
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai, dan Budaya Communication and Enforcement of Ethical, Value, and Cultural Guidelines				
	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethical guidelines are effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees, integrated into the corporate strategy and operations including risk management systems and remuneration structures, and enforced.		√	
		4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik. The corporation has a whistleblower reporting policy that can be used to encourage the reporting of behaviors that violate laws or ethics, which includes guidelines on how the corporation protects whistleblowers acting in good faith.	√	
		4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku. The corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are promptly informed if there are material violations of the code of conduct and ethics.	√	
		4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran. The corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are promptly informed if there are material incidents reported based on the violation reporting policy.	√	
		4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan. Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. The Board of Directors ensures that violations of guidelines result in disciplinary action, including dismissal. If there are violations, the Board of Directors is required to take preventive action to prevent recurrences of the violation.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance					
	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance				
		5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan korporasi, dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors conducts periodic reviews of design propriety and the effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and corporate compliance, and reports the review implementation and results to shareholders through the Corporation's annual report.	√	
		5.1.1.1	Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: • Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; • Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal, dan penyedia jasa asuransi lainnya; • Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; • Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan • Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. The regular reviews conducted by the Board of Directors specifically consider: • Changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; • The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control system, the role of internal audit functions, and other assurance service providers; • The extent and frequency of communication of monitoring results to the Board of Commissioners (or to the Audit Committee) that enable the Board of Commissioners to comprehensively assess internal control conditions and their effectiveness in risk management; • Failures or deficiencies in internal control identified during the reviewed period and the extent of contingent impacts that have occurred, could occur, or may occur in the future, which materially affect the corporation's financial condition or performance; and • The effectiveness of internal control related to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		5.1.1.2.	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi. The Board of Directors ensures that the corporation has a function responsible for continually monitoring changes in various applicable laws and regulations related to its business and generally applicable laws and regulations, and has a system to ensure corporate compliance with applicable laws and regulations and internal corporate regulations.	√	
5.2	Manajemen Risiko Risk Management				
	5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risks are inseparable, transparently disclosed, and integrated into the performance of duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as in discussions at the meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.		√	
		5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif. The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all management levels in creating and protecting value for the corporation, by being exemplary in controlling and managing risks in business and operational activities to instill, strengthen, and develop a risk-aware culture based on compliance and effective internal control.	√	
		5.2.1.2	Direksi mengungkapkan: • Risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan • Apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. The Board of Directors discloses: • The main risks faced by the corporation and its management; and • Whether there is a material exposure to environmental or social risks and, if so, how to manage or the intention to manage such risks.	√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
		5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures the alignment of the internal control system and risk management framework with the characteristics of the corporation's business needs and processes so that the internal control and risk management processes for all types of risks faced by the corporation, including risk communication and reporting, risk management, auditing, and their effectiveness, can be effectively implemented in line with stakeholders' expectations.	√	
		5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan *cyber*, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors ensures the governance process for Information Technology risks, including disruptions, cyber security, and disaster recovery, to ensure that all major risks are identified, managed, and reported to the Board of Commissioners.	√	
	5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Supervisory Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its duties by creating transparent, focused, and independent mechanisms for overseeing corporate risk management.		√	
		5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk di antaranya: • Memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; • Memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (*fraud risk*); • Mereviu setiap kejadian material yang melibatkan *fraud* atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang; • Menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; • Menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; • Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan • Mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan.	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
			The roles of the Risk Management Supervisory Committee include: • Monitoring corporate performance against the risk management framework, including monitoring whether the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; • Monitoring controls over key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; • Reviewing any material incidents involving fraud or significant weaknesses in corporate risk controls, as well as lessons learned to prevent recurrence in the future; • Receiving reports from the internal auditor on the adequacy of corporate risk management processes; • Receiving reports from management on new and emerging risk sources as well as risk control and mitigation measures taken by the Board of Directors to address these risks; • Formulating recommendations to the Board of Commissioners regarding changes to the entity's risk management framework or risk appetite approved by the Board of Commissioners; and • Supervising the corporate insurance program while considering corporate business and insurable risks.		
		5.2.2.2	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif. The number of members of the Risk Management Supervisory Committee is adequate, and the majority are independent; among its members, they possess the necessary technical knowledge and adequate understanding of the industry where the entity operates to effectively carry out the committee's mandate.	x	PP Presisi belum memiliki kebijakan yang khusus mengatur kebijakan tersebut PP Presisi does not yet have a policy that specifically regulates this policy
5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management, and Compliance				
	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, which addresses various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.		√	
		5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and capability enhancement among the main GRC systems, which include governance, strategic management, performance management, risk management, compliance management, and internal audit systems so that the corporation remains on track to achieve its objectives.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division responsible for the compliance function does not concurrently carry out functions that could create a conflict of interest.		√	
5.4.	Audit Internal Internal Audit				
	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function assists the corporation in achieving its objectives by bringing forth an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.		√	
		5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris, dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi. Internal audit is conducted objectively and independently of corporate management and the functions it audits. As such, the Internal Audit is functionally responsible and reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and the Board of Commissioners, and can communicate and meet directly with the Audit Committee and the Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	√	
		5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya, dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, ensures that the internal audit function has the authority, resources, and access to sufficient information to carry out its role effectively.	√	
		5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit, the scope of work, and the budget for the Internal Audit function.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal. The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation, evaluates the performance of Internal Audit annually, and reports the results to the Board of Commissioners. Every three years, considering the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of Internal Audit.	√	
		5.4.1.5	Audit Internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. The Internal Audit creates an audit plan, which involves the President Director and the Board of Commissioners with the consideration of the Audit Committee. The internal audit plan is submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners for approval.	√	
		5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi. The Audit Committee ensures that the internal audit implementation is based on applicable internal audit professional standards and by upholding the professional code of ethics and the organization's code of ethics.	√	
6.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency				
	6.1	Kebijakan Pengungkapan Policies on Disclosure			
		6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and protect sensitive and confidential corporate information.	√	
		6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. The right of shareholders to regularly and promptly material information relevant to the corporation must be met.	√	
		6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku. The corporation has and discloses a written policy for implementing the obligation of continuous disclosure/ information transparency based on applicable regulations.	√	
	6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial Statements and Sustainability Report			

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses systems and procedures to ensure that materially unaudited or unreviewed interim financial statements are accurate and complete, providing investors with appropriate information to make the appropriate investment decisions.		√	
		6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: • Pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim; • Peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/ pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim; • Peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. The disclosure of systems and procedures includes at least: • Internal control over financial reporting, including interim financial statements; • The role of risk management/compliance/ management supervisory functions and internal audit functions in ensuring the integrity of interim financial statements; • The role of the Audit Committee in reviewing interim financial statements to be published.	√	
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of the external audit of financial statements. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the dismissal and remuneration of external auditors.		√	
		6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya. The selection process of external auditors through tender is conducted transparently so that shareholders can observe and monitor the process if they wish.	√	
		6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. The Audit Committee ensures that there are no clauses in the contract with the auditor that could compromise the auditor's independence or competence in conducting the audit of financial statements.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu *management letter* yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen. The Audit Committee engages in adequate dialogue with the external auditor without management presence and monitors the interaction between management and the external auditor, including reviewing management letters provided by the external auditor and overseeing management responses.	√	
		6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Board of Commissioners or the Audit Committee ensures that the external auditor promptly informs them of all significant findings and issues identified by the external auditor during the audit.	√	
		6.2.2.5	Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. The Audit Committee reviews any non-audit services provided by the external auditor and its affiliates and related costs to ensure that these services do not compromise auditor independence.	√	
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and prepared according to national or international sustainability reporting frameworks.		√	
		6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asuransi oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten. Sustainability reports are assured by independent and competent external parties.	√	
	6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perusahaan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The company has published a Sustainability Report that is an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report has presented the Company's sustainability performance covering economic, social, environmental, and governance aspects, presented in a three-year comparison, to help shareholders and stakeholders understand the corporate strategic objectives and its progress in creating sustainable value.			√	
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination				

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels must provide equal, timely, and relatively inexpensive access to relevant information for users.		√	
		6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. The corporation regularly holds meetings with financial analysts.	√	
		6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The corporation utilizes the use of information technology effectively and more expansively besides the website as a medium of information transparency.	√	
		6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya. The corporation ensures that disseminated information is safeguarded and securely protected.	√	
	6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The corporation ensures that annual statements regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including explanations of the implementation of each Recommendation and Guideline, are available on the website for a minimum period of five years.		√	
	6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on the capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction, applicable corporate governance regulations must be clearly disclosed. In the case of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, as well as the criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing, must be transparent and documented.		√	
7.	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection for Shareholder Rights				
	7.1 Hak Pemegang Saham Shareholder Rights				
	7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communication policy that facilitates and encourages the participation of shareholders or investors.		√	
		7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are allowed to consult with each other on issues related to basic shareholder rights as set out in these Principles, but it must not be abused.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. The corporation encourages constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. The corporation responds to requests from shareholders to engage in dialogue to support continuous growth and increase the value of the corporation in the medium to long term.	√	
		7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. The corporation provides a forum or platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	√	
		7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The corporation promptly discloses to the public all new material facts that are available to financial analysts and other similar parties.	√	
		7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. The corporation discloses its corporate communication policy with shareholders or investors on its website and reports.	√	
	7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. Corporations that are parent entities ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under joint control in which corporate investments are significant.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
		7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: • Wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; • Efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; • Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya; dan • Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain Perusahaan Terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. The framework and policies of corporate governance in subsidiary entities include written policies, including: • Authority to appoint commissioners and directors. Generally, for relatively large subsidiary entities, the Board of Commissioners needs to be involved in the appointment of executives in the subsidiary entity. For smaller subsidiary entities, the Board of Directors is authorized to carry out this function; • Effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; • Timely and accurate disclosure of material information of subsidiary entities, including financial information, transactions with related parties, and other material information; and • If the corporation has/establishes legal entities other than Limited Liability Companies, the corporation ensures that its corporate governance policies apply to such entities adjusted to the context of their legal entity type.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak. For investments in significant but minority-owned subsidiary entities (such as ownership between 20 percent to 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there is a shareholders' agreement or other agreement that allows the corporation to monitor the performance of the corporation and participate in management, including for the approval of transactions and significant decisions. This is necessary, among other things, to ensure that the corporation has adequate, accurate, and timely information in the subsidiary entity.	√	
	7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporation has regulations and procedures that manage acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and selling substantial corporate assets to ensure that the transactions are made transparently and in fair conditions, protecting the rights of all shareholders according to their class.		√	
		7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. The corporation clearly discloses the regulations and procedures, and thus investors understand their rights and the rights to receive compensation.	√	
		7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan (*anti-take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. The tactics to prevent takeover (anti-takeover devices) are not allowed to be used to shield the management and Board of Commissioners from accountability.	√	
7.2	Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Fair Treatment for Shareholders				
	7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: • Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; • Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation has rules and procedures that ensure: • All shareholders of the same series in one class of shares are treated equally; • Disclosure of such rules and procedures and disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
		7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. To ensure transparency of shareholders' rights to participate in profits, the corporation discloses a measurable dividend policy, such as a target dividend payout ratio/dividend per share.	√	
		7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Investors obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase them. Any changes in the economic value of shares or voting rights must be approved by the class of shares that is negatively affected.	√	
		7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). For shareholders to know the beneficial owners of the corporation with significant ownership, the corporation discloses the beneficial owners of shares through major shareholders and controllers and beneficial owners of share ownership of at least five percent.	√	
		7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: • Perjanjian antar pemegang saham; • *Voting cap;* • *Multiple voting rights;* • Perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation discloses: • Shareholders' agreements; • Voting caps; • Multiple voting rights; • Other arrangements that allow certain shareholders to have voting rights above their ownership in the corporation.	√	
		7.2.1.5	Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. The corporation provides a mechanism/procedure that allows shareholders to have the opportunity to obtain effective compensation for violations of their rights according to applicable laws and regulations at a reasonable cost and without undue delay.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
	7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedures to ensure transactions with related parties are approved and executed in such a manner as to ensure that conflicts of interest have been properly managed, protecting the interests of the corporation and its shareholders.		√	
		7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (*arm's length transaction*). The corporation has policies and standard operating procedures that transactions with related parties are conducted in a manner to ensure they are fair and reasonable (arm's length transactions).	√	
		7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan. Material transactions with related parties, including agreements for consulting services and other services or work between directors/commissioners and their affiliates with the corporation, must obtain approval according to applicable regulations. Besides regulatory requirements, material transactions with related parties require approval from the Board of Commissioners. Commissioners with conflicts of interest do not participate in the approval process.	√	
		7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: • Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; kalaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; • Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy that transactions that are certain to disadvantage public/minority shareholders are prohibited. Examples of such transactions include: • Financial assistance/subsidies to the Board of Directors or Commissioners at below-market interest rates; if loans are provided, they must be at fair and reasonable interest rates and terms and require approval from the Board of Commissioners; • Financial assistance/subsidies to entities other than those fully owned by the corporation.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. The Board of Commissioners discloses the policy process for approving, reviewing, and monitoring transactions with related parties and any inherent conflicts of interest.	√	
		7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi. The Audit Committee's review conclusions on significant related-party transactions/conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	√	
	7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris, dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation owns and discloses policies to prevent insider trading. The Corporation owns clear regulations regarding any trades in corporate shares conducted by directors, commissioners, and insiders to ensure that anyone cannot obtain direct or indirect gain from information not/not yet available on the market.		√	
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders				
	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation convenes a GMS with the agenda and materials of the GMS as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to study the agenda of the meeting well. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the corporation's website.		√	
		7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (*rationale*) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS. In the materials for the GMS agenda, the corporation provides relevant and complete information necessary for decision-making, including an explanation and justification (rationale) for the decisions proposed for approval at the GMS.	√	
	7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses regulations and procedures that facilitate shareholders' participation and effective voting at the GMS.		√	
		7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS. The corporation provides infrastructure that enables the presence of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the GMS.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are present at the Annual GMS.	√	
		7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS. The Head of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Supervisory Committee, and other committees are ready to provide substantial responses to questions addressed to them at the GMS.	√	
		7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: • Mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan; • Memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS; dan • Mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reason, to: • Ask questions at the GMS, including questions related to the results of the annual external audit; • Include an item on the agenda of the GMS; and • Propose resolutions.	√	
		7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: • Lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham; • Pemungutan secara tertutup (*poll-voting*) dan bukan dengan mengacungkan tangan (*show of hands*); • Memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. The corporation has a method or technical procedure for voting that prioritizes independence and shareholders' interests, including: • Easily accessible GMS location for most shareholders; • Voting by poll (poll-voting) and not by a show of hands; • Ensuring there are no requirements and GMS procedures that hinder shareholders from participating in decision-making.	√	
		7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. The corporation strives for electronic voting procedures and takes steps to build infrastructure that enables electronic voting or uses existing infrastructure in the voting ecosystem.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (*bundling*). Each vote at the GMS is only for one decision; there is no integration of multiple decisions (bundling) into the same resolution.	√	
		7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The corporation appoints an independent party (supervisor/inspector) to count and/or validate votes at the GMS and discloses it in the GMS minutes.	√	
		7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali. If resolutions approved by controlling shareholders conflict with the majority votes of non-controlling shareholders, post-GMS, the corporation discloses actions taken to understand and address the concerns of non-controlling shareholders that led them to vote differently from controlling shareholders.	√	
	7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders effectively participate in determining the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.		√	
		7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts a thorough examination of the candidates for Director and Commissioner and provides all relevant material information about the candidates to the shareholders in the process of selecting members of the board. The information disclosed includes information about the position of Director or Commissioner in other corporations, and whether they are considered independent from the perspective of the corporation.	√	
		7.3.3.2	Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. Directors and Commissioners are nominated for election at least once every three years or five years for corporations whose regulations require five years. It would be better if the nomination was done every year.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. Shareholders conduct a separate vote for each candidate for Director and Commissioner.	√	
	7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the GMS.		√	
		7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. In the GMS notice, the corporation identifies and informs the proposed or reappointed external auditor.	√	
		7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The corporation ensures that the external auditor attends the GMS and is obliged to answer shareholders' questions regarding the audit of the financial statements.	√	
	7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The announcement of the voting results and a summary of the GMS minutes are fully disclosed to the public on the next working day.		√	
		7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. The GMS minutes are provided to shareholders no later than 30 working days after the GMS.	√	
		7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. The GMS minutes include questions by shareholders and answers provided by the chair of the meeting or the respondent.	√	
		7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The conduct of the GMS, along with all meeting materials, reports, and related documents, including the annual report and voting results as well as the relevant meeting agenda, are posted on the corporation's official website or digital communication media and made available for at least ten years.	√	
8.	Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders				
	8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*) Key Stakeholder Engagement			
	8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan, dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation, through the Corporate Secretary, conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and involves them in understanding their expectations and concerns as well as the corporation's impact on them.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. The corporation discloses the process of identifying and selecting key stakeholders to engage.	√	
		8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci. The corporation discloses its approach and activities in managing the engagement of key stakeholders, including the frequency based on the type and group of key stakeholders.	√	
		8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. The corporation provides channels for key stakeholders (such as customers, suppliers, the general public, etc.) to express opinions and provide feedback, voice complaints, and/or lodge grievances regarding potential violations of their rights.	√	
		8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: • Respon korporasi; dan • Kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. The corporation discloses significant views, inputs, and complaints conveyed by key stakeholders obtained from stakeholder engagement, including: • Corporate responses; and • Key stakeholder groups providing views and inputs.	√	
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainable Integration in Business Model				
	8.2.1		Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama, dan manajemen risiko. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including setting the corporate sustainability strategy, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider sustainability in carrying out their roles, including, among others, the development and implementation of corporate strategy, business plans, key action plans, and risk management.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that the corporate sustainability strategy, priorities, and targets, as well as performance against these targets, are communicated to stakeholders.	√	
		8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya. The Board of Directors and the Board of Commissioners consistently monitor and understand sustainability issues relevant to the corporation and its business.	√	
		8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi. The performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners includes their performance in supervising and addressing significant risks and opportunities related to corporate sustainability.	√	
		8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi. The Board of Directors appoints an individual in management who has a specific role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.	√	
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection for Stakeholders				
	8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the implementation of high ethical standards, social responsibility, and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are applied to respect and comply with stakeholders' rights.		√	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	Apply or Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
		8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi. The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility to customers, including considering customer information security, ethics, and sales behavior, after-sales service in line with product lifespan/service period, and following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations should promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers or causing misunderstandings about products and services offered by the corporation.	√	
		8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan. The corporation implements and discloses policies that include supplier selection criteria, transparent procurement mechanisms, supplier capacity improvement efforts, and compliance with supplier-related rights. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, carry out social and environmental responsibilities, treat their employees, staff, and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable business policies and procedures based on sustainable values.	√	
		8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara konkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat. The corporation implements and discloses social responsibility by applying corporate business knowledge and experience to develop and produce concrete social responsibility activities that add value to society, including promoting community empowerment.	√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: • Bahan baku; • Energi; • Penggunaan air; • Pemanfaatan sumber daya terbarukan; • Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. The corporation implements and discloses environmental responsibility by preventing, reducing, and managing negative impacts on the environment from all aspects of corporate operations, including: • Raw materials usage; • Energy usage; • Water usage; • Utilization of renewable resources; • Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management, and reduction of greenhouse gas and carbon emissions.	√	
		8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar. The corporation implements and discloses fair competition policies by prioritizing ethical business behavior and refraining from anti-competitive practices to gain or protect market positions.	√	
		8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur. • Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi; • Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has policies to protect the rights of creditors. • The Board of Commissioners oversees and the Board of Directors monitors the financial liquidity and solvency of the corporation; • The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are promptly identified, managed, mitigated, and reported. The Board of Commissioners monitors the handling of financial risks or difficulties by the Board of Directors and receives reports regularly.	√	
	8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the corporation's long-term interests and prioritize sustainability.		√	

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Panduan** Guidelines	**Uraian** Description	**Apply or Explain**	**Keterangan Penerapan** Description of Implementation
		8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation has a policy of providing long-term incentives to employees, which encourages the creation of sustainable values.	√	
		8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted return*), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan. Performance-based remuneration for employees should take into account risk elements, including measuring risk-adjusted returns, to ensure that no incentives are given for undesirable risk-taking.	√	
		8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun. The Board of Directors effectively manages conflicts of interest that may arise between employees as beneficiaries of pension funds with the corporation acting as the manager of the pension fund.	√	
		8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman. The Board of Directors ensures that the corporation has an effective human resources development and management program to ensure that the corporation has a sufficient number of knowledgeable, skilled, and experienced employees.	√	
		8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur. When filling managerial positions within the corporation, the Board of Directors considers diversity, non-discrimination, and providing equal opportunities to all candidates without distinction of ethnicity, religion, race, class, and gender. This diversity policy is accompanied by measurable objectives.	√	

RUJUKAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Reference

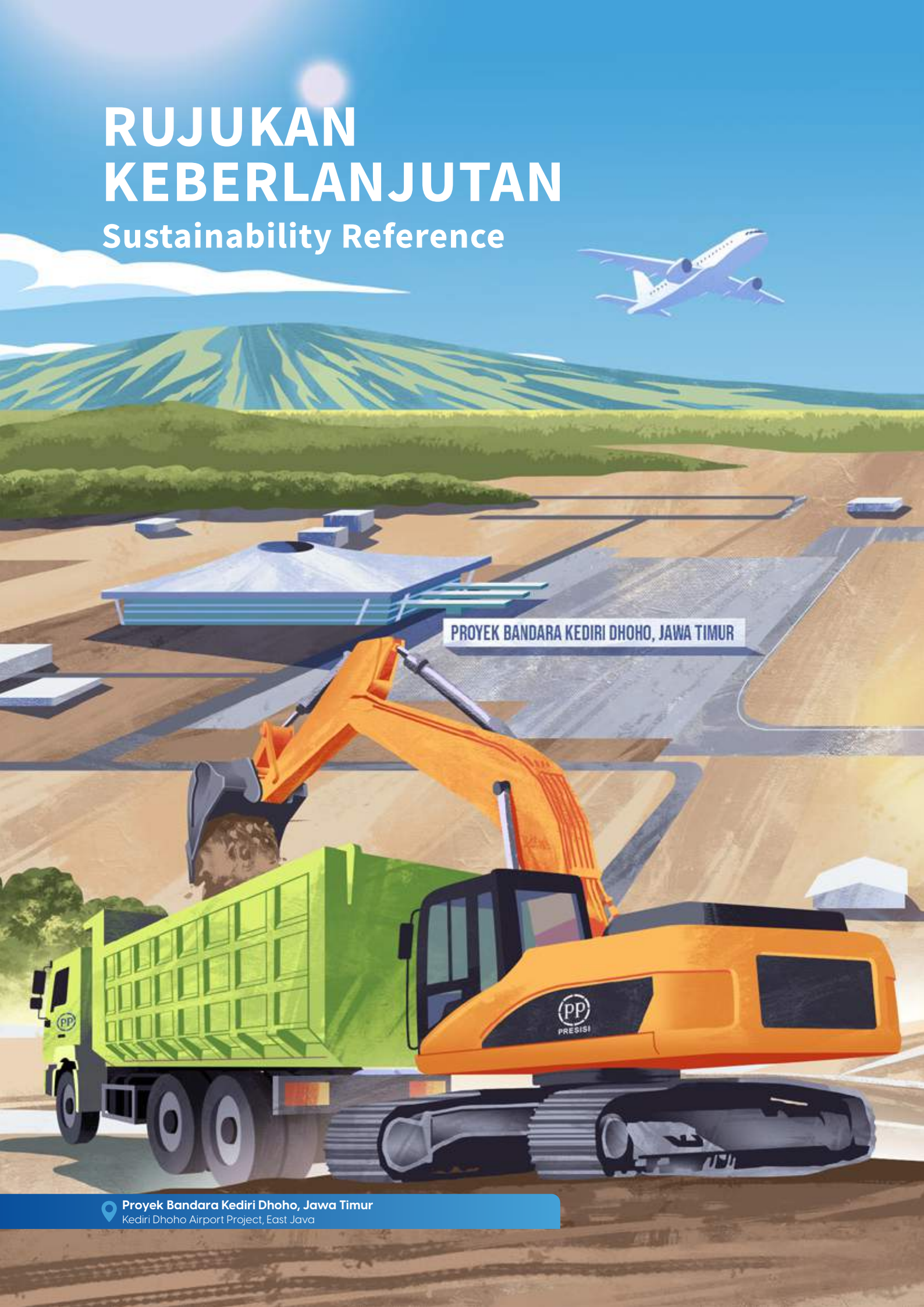

Proyek Bandara Kediri Dhoho, Jawa Timur
Kediri Dhoho Airport Project, East Java

RUJUKAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Reference

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan konstruksi, PPRE terus mendorong penerapan keberlanjutan dalam seluruh aspek operasi dan bisnisnya; mulai dari aktivitas proyek yang mematuhi seluruh peraturan termasuk K3 dan mengindahkan dampak lingkungan, kegiatan perkantoran yang efisien terhadap penggunaan energi, *output* produk dan layanan yang berstandar serta berkualitas tinggi, memberikan *value added* bagi *shareholder* dan *stakeholder*, hingga keberadaan PPRE dan kontribusinya bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

As a company engaging in the mining and construction sector, PPRE continues to encourage sustainability implementation in all aspects of its operations and business, starting from project activities that comply with all regulations, including OHS and heed environmental impacts, office activities that are efficient in energy use, standardized and high-quality product and service outputs, providing added value for shareholders and stakeholders, to the existence of PPRE and its contribution to the environment and society.

Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PPRE
PPRE's Sustainable Development Goal (SDG) Priorities

Lebih lanjut tentang upaya PPRE dalam mewujudkan keberlanjutan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan tahun 2023 sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

More on PPRE's efforts to realize sustainability is available in the 2023 Sustainability Report as an integral document of this Annual Report.

LAPORAN KEUANGAN
Financial Report

Proyek Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat
Mandalika Circuit Project, Lombok, West Nusa Tenggara

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARY

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT/
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024
Tanggal 1 Maret 2024/ *Dated March 1, 2024*

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		*DIRECTORS' STATEMENT LETTER*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI - 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut		*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - December 31, 2023 and for the year then ended*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	6	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	8	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	9	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	10	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	11	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

PRESISI

PLAZA PP, Wisma Robinson Lt. 3
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760
T. +62 21 8403931
F. +62 21 8403931

WORKSHOP
Jl. Raya Naragong Km 15 Pangkalan 6, Bekasi 1753
T. +62 21 82483255/240
F. +62 21 8230353

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk DAN ENTITAS ANAK ("Grup")

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk AND ITS SUBSIDIARY (the "Group")

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

For and on behalf of Board of Director, We, the undersigned:

Nama	:	**I Gede Upeksa Negara**	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57 Jakarta	:	*Office Address*
Alamat Domisili	:	GAP Cluster Arjuna Blok A1/11, Kuta Selatan	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	(021) - 82483255	:	*Phone Number*
Jabatan	:	Direktur Utama/ *President Director*	:	*Position*

Nama	:	**Mohammad Arif Iswahyudi**	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57 Jakarta	:	*Office Address*
Alamat Domisili	:	Jl. Wiguna III No. 6, Gunung Anyar, Surabaya	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	(021) - 82483255	:	*Phone Number*
Jabatan	:	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal/ *Finance, Risk Management & Legal Director*	:	*Position*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup;
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Grup.

Demikan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements;*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in the Group's consolidated financial statements is complete and correct;*
   b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and
4. *We are responsible for the Group's internal control system.*

The Statement letter is made truthfully.

Jakarta, 1 Maret 2024/ *March 1, 2024*

Direktur Utama/
President Director

I Gede Upeksa Negara

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal/
Finance, Risk Management & Legal Director

Mohammad Arif Iswahyudi

METERAI TEMPEL
10000
93B1BAKX803907552

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

Independent Auditor's Report

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (the "Company") and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

Pengakuan Pendapatan

Sebagian besar pendapatan dan laba Grup berasal dari kontrak konstruksi yang berlangsung lebih dari satu periode akuntansi. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan konstruksi adalah sebesar Rp3.212.761.338.603 (94% dari pendapatan Grup)

Grup telah menentukan bahwa kewajiban pelaksanaan tertentu sehubungan dengan aktivitas konstruksi telah diselesaikan sepanjang waktu dan dengan demikian mengakui pendapatan dari aktivitas ini sepanjang waktu.

Kami mengidentifikasi pendapatan kontrak konstruksi sebagai area yang memerlukan fokus audit karena area ini melibatkan pertimbangan dan estimasi manajemen yang signifikan, termasuk:

- Pertimbangan dan estimasi yang dibuat dalam penentuan apakah variasi dalam pekerjaan kontrak harus dimasukkan dalam pendapatan kontrak; dan
- Estimasi yang dibuat sehubungan dengan estimasi total biaya kontrak (yang merupakan bagian dari perhitungan persentase penyelesaian untuk kontrak konstruksi).

Dalam menangani area fokus ini, kami melakukan, antara lain, prosedur berikut:

- Baca kontrak untuk mendapatkan pemahaman tentang syarat dan ketentuan khusus.
- Memeroleh pemahaman tentang proses yang relevan dan pengendalian internal atas keakuratan dan waktu pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan, termasuk pengendalian yang dilakukan manajemen dalam memperkirakan variasi pesanan, klaim, total biaya kontrak, margin keuntungan dan kemajuan proyek konstruksi.
- Mengamati kemajuan konstruksi dengan melakukan kunjungan lapangan dan memeriksa laporan kemajuan penyelesaian fisik. Kami juga telah membahas status konstruksi yang sedang berjalan dengan manajemen, staf keuangan, dan pejabat proyek.
- Mengevaluasi penilaian manajemen tentang perlu atau tidaknya penyisihan untuk ganti rugi yang dipastikan melalui dokumen pendukung seperti perjanjian konstruksi untuk tarif, persetujuan perpanjangan waktu dan laporan kemajuan pekerjaan yang menunjukkan alasan keterlambatan dan upaya untuk mengejar fase dimana kemajuan aktual tercapai belakang kemajuan yang direncanakan.
- Menyetujui jumlah kontrak untuk formulir pesanan variasi yang disetujui sehubungan dengan variasi dalam pekerjaan kontrak dan klaim untuk biaya yang tidak termasuk dalam harga kontrak.
- Mengevaluasi asumsi yang digunakan dalam penentuan kemajuan proyek konstruksi dengan bukti pendukung seperti laporan progres pekerjaan, pesanan pembelian yang disetujui, tagihan dan tagihan sub-kontraktor; dan

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

Revenue Recognition

A significant proportion of the Group's revenues and profits are derived from construction contracts which span more than one accounting period. For the financial year ended December 31, 2023, construction revenue amounted to Rp3,212,761,338,603 (94% of Group's revenue)

The Group has determined that certain performance obligations in relation to construction activities are satisfied over time and thus recognises revenue from this activity over time.

We identified construction contract revenue as areas requiring audit focus as these areas involved significant management's judgement and estimates, including:

- *Judgement and estimates made in the determination of whether variations in contract works should be included in the contract revenue; and*
- *Estimates made in respect of the total estimated contract costs (which forms part of the computation of percentage-of completion for the construction contracts).*

In addressing this area of focus, we performed, amongst others, the following procedures:

- *Read the contract to obtain an understanding of the specific terms and conditions.*
- *Obtained an understanding of the relevant processes and internal controls over the accuracy and timing of revenue recognised in the financial statements, including controls performed by the management in estimating variation orders, claims, total contract costs, profit margin and progress of construction projects.*
- *Observed the progress of the constructions by performing site visits and examined the physical completion progress reports. We have also discussed the status of on-going constructions with management, finance personnel and project officials.*
- *Evaluated management's assessment on whether provision for liquidated ascertained damages is required through supporting documents such as the construction agreements for the rates, extension of time approvals and work progress report indicating the reasons for the delay and efforts to catch up for phases whereby actual progress is behind planned progress.*
- *Agreed the contract sum to approved variation order forms with respect to variations in contract works and claims for costs not included in the contract price.*
- *Evaluating the assumptions used in determining the progress of construction projects with supporting evidence such as work progress reports, approved purchase orders, sub-contractor bills and invoices; and*

- Mengevaluasi penetapan progress proyek konstruksi dengan memeriksa bukti-bukti pendukung seperti progress claim kontraktor dan invoice supplier.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apa pun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

- *Evaluated the determination of progress of construction projects by examining supporting evidence such as contractors' progress claims and suppliers' invoices.*

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya manjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN

00048

Bambang Karunawan, CPA.
Register Akuntan Publik/ *Register of Public Accountant* No. AP.0912

1 Maret 2024/ *March 1, 2024*

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	5	161.747.185.603	305.614.888.536	*Cash and cash equivalents*
Bank yang dibatasi penggunaannya	5	-	29.500.000.000	*Restricted bank*
Investasi jangka pendek	6	107.756.526.527	109.472.110.056	*Short term investments*
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp136.792.385.097 pada 31 Desember 2023 dan Rp127.822.117.196 pada 31 Desember 2022	7			*Trade receivables - net of allowance for impairment losses of Rp136,792,385,097 as at December 31, 2023 and Rp127,822,117,196 as at December 31, 2022*
Pihak berelasi		698.869.891.730	342.992.802.441	*Related parties*
Pihak ketiga		807.760.190.595	465.918.657.897	*Third parties*
Piutang retensi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp49.557.701.019 pada 31 Desember 2023 dan Rp48.608.349.982 pada 31 Desember 2022	8			*Retention receivables - net of allowance for impairment losses of Rp49,557,701,019 as at December 31, 2023 and Rp48,608,349,982 as at December 31, 2022*
Pihak berelasi		157.071.742.704	129.902.662.130	*Related parties*
Pihak ketiga		38.715.613.885	41.322.580.680	*Third parties*
Tagihan bruto pemberi kerja - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp214.277.560.726 pada 31 Desember 2023 dan Rp208.891.648.135 pada 31 Desember 2022	9			*Gross amount due from customers - net of allowance for impairment losses of Rp214,277,560,726 as at December 31, 2023 and Rp208,891,648,135 as at December 31, 2022*
Pihak berelasi		628.759.605.595	888.692.366.160	*Related parties*
Pihak ketiga		1.846.264.329.005	2.022.582.800.098	*Third parties*
Piutang sewa pembiayaan	10	7.017.508.580	6.415.674.097	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	11			*Other receivables*
Pihak berelasi		6.692.418.042	4.633.494.351	*Related parties*
Pihak ketiga		23.330.100.055	19.977.350.073	*Third parties*
Persediaan	12	167.652.474.661	154.034.323.581	*Inventories*
Uang muka	13	36.744.610.111	37.068.233.927	*Advances*
Pajak dibayar dimuka	14a	237.010.309.534	306.137.773.765	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka	15	40.182.109.402	40.534.772.455	*Prepaid expenses*
Jumlah Aset Lancar		**4.965.574.616.029**	**4.904.800.490.247**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang sewa pembiayaan	10	5.040.358.482	12.057.867.062	*Finance lease receivables*
Piutang lain-lain	11	-	110.188.349.350	*Other receivables*
Investasi pada ventura bersama	16	11.670.104.737	162.639.111.302	*Investment in joint venture*
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp324.280.782.149 pada 31 Desember 2023 dan Rp237.068.476.743 pada 31 Desember 2022	17	431.888.829.214	436.851.208.089	*Right-of-use assets - net of accumulated depreciation of Rp324,280,782,149 as at December 31, 2023 and Rp237,068,476,743 as at December 31, 2022*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.857.964.579.622 pada 31 Desember 2023 dan Rp2.573.039.731.195 pada 31 Desember 2022	18	1.500.698.001.491	1.712.080.501.126	*Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp2,857,964,579,622 as at December 31, 2023 and Rp2,573,039,731,195 as at December 31, 2022*
Goodwill	19	246.863.514.371	246.863.514.371	*Goodwill*
Aset tak berwujud	20	3.254.733.747	2.959.290.698	*Intangible assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**2.199.415.542.042**	**2.683.639.841.998**	***Total Non-Current Assets***
JUMLAH ASET		**7.164.990.158.071**	**7.588.440.332.245**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank - jangka pendek	21			*Short term - bank loans*
Pihak berelasi		660.933.660.618	775.224.309.385	*Related parties*
Pihak ketiga		356.581.349.556	511.396.840.216	*Third parties*
Utang usaha	22			*Trade payables*
Pihak berelasi		42.839.394.933	200.834.241.388	*Related parties*
Pihak ketiga		1.069.464.993.244	1.260.080.415.913	*Third parties*
Uang muka pemberi kerja	23			*Advances from project owner*
Pihak berelasi		1.571.291.366	69.071.291.366	*Related parties*
Pihak ketiga		40.202.684.154	89.553.605.469	*Third parties*
Utang lain-lain	24			*Other payables*
Pihak berelasi		100.266.844.238	135.998.324.815	*Related parties*
Pihak ketiga		2.545.274.114	2.679.972.826	*Third parties*
Utang pembelian aset tetap	25	78.117.117.117	-	*Property and equipment purchase payables*
Utang pajak	14b	327.204.497.450	265.247.942.108	*Taxes payable*
Utang bank - jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	28			*Current maturity of long term - bank loans*
Pihak berelasi		55.819.713.909	160.443.302.715	*Related party*
Pihak ketiga		131.308.485.664	121.608.485.664	*Third parties*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturity of long term - liabilities*
Utang lain-lain - pihak berelasi	24	168.067.998.063	52.449.999.996	*Other payables - related party*
Liabilitas sewa	26	188.085.341.586	150.802.277.038	*Lease liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**3.223.008.646.012**	**3.795.391.008.899**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas imbalan pasca kerja	27	17.207.560.832	14.755.488.637	*Post-employment benefits liabilities*
Utang bank - jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	28			*Long term - bank loans - net of current maturity*
Pihak berelasi		-	23.523.713.908	*Related party*
Pihak ketiga		117.195.576.372	90.527.986.780	*Third parties*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				*Long term liabilities - net of current maturity*
Utang lain-lain - pihak berelasi	24	126.997.715.567	74.360.073.745	*Other payables - related party*
Liabilitas sewa	26	163.238.002.852	237.630.526.322	*Lease liabilities*
Utang obligasi	29	202.250.214.000	201.924.818.000	*Bonds payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**626.889.069.623**	**642.722.607.392**	***Total Non-current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**3.849.897.715.635**	**4.438.113.616.291**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham				*Share capital - par value Rp100 per share*
Modal dasar - 24.000.000.000 saham				*Authorized capital - 24,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor - 10.224.271.000 saham	30a	1.022.427.100.000	1.022.427.100.000	*Subscribed and paid-up capital - 10,224,271,000 shares*
Tambahan modal disetor	30b	749.560.161.538	749.560.161.538	*Additional paid-in capital*
Saham treasuri	30d	(18.629.958.023)	(18.629.958.023)	*Treasury shares*
Penghasilan komprehensif lain		46.093.169.345	40.557.527.254	*Other comprehensive income*
Sado laba:				*Retained earnings:*
Ditentukan penggunaannya		97.184.358.276	92.146.775.549	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		532.660.053.128	457.482.076.729	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2.429.294.884.264	2.343.543.683.047	*Equity attributable to owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		885.797.558.172	806.783.032.907	*Non-controlling interests*
Jumlah Ekuitas		**3.315.092.442.436**	**3.150.326.715.954**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**7.164.990.158.071**	**7.588.440.332.245**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENDAPATAN	31	**3.400.865.237.272**	**3.635.195.678.682**	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	32	**(2.807.300.057.531)**	**(3.022.812.855.659)**	***COST OF REVENUE***
LABA KOTOR		**593.565.179.741**	**612.382.823.023**	***GROSS PROFIT***
Beban usaha	33	(90.225.360.939)	(89.257.811.132)	*Operating expenses*
Kerugian penurunan nilai	34	(18.681.806.977)	(1.147.139.489)	*Impairment losses*
Bagian laba ventura bersama	35	14.706.201.031	34.058.350.703	*Share in profit of joint venture*
Pendapatan keuangan	36	1.402.256.029	1.952.476.077	*Finance income*
Beban keuangan	37	(230.514.614.678)	(230.326.938.099)	*Finance costs*
Pendapatan lainnya	38	54.428.074.549	28.977.081.239	*Other incomes*
Beban lainnya	39	(46.509.021.753)	(61.474.234.845)	*Other expenses*
Beban pajak final	14d	(96.382.840.152)	(102.223.249.418)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**181.788.066.851**	**192.941.358.059**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	14c	**(9.006.796.782)**	**(11.279.742.435)**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**172.781.270.069**	**181.661.615.624**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	18	8.387.970.012	6.526.925.128	*Surplus of property and equipment revaluation*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	26	(221.521.382)	1.030.313.934	*Remeasurement of post-employment benefits liabilities*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	***Items that will be reclassified to profit or loss***
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		**8.166.448.630**	**7.557.239.062**	***Total Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**180.947.718.699**	**189.218.854.686**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Total Profit for the Year Attributable to:***
Pemilik entitas induk		80.215.559.126	100.751.654.542	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		92.565.710.943	80.909.961.082	*Non-controlling interest*
		172.781.270.069	**181.661.615.624**	
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Total Comprehensive Income Attributable to:***
Pemilik entitas induk		85.751.201.217	106.055.828.797	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		95.196.517.482	83.163.025.889	*Non-controlling interest*
		180.947.718.699	**189.218.854.686**	
LABA DASAR PER SAHAM	40	**7,85**	**9,85**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Attributable to owners of the parent entity*										
					Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*							
					Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja/ *Remeasurement of Post-employment benefits liabilities*	Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap/ *Surplus of property and equipments revaluation*	Saldo laba/ *Retained earning*					
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor/ *Subscribed and paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saham treasuri/ *Treasury shares*			Ditentukan pengunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo per 1 Januari 2022		**1.022.427.100.000**	**749.560.161.538**	**(18.629.958.023)**	**(554.845.082)**	**35.808.198.081**	**81.169.294.714**	**375.400.819.326**	**2.245.180.770.554**	**734.102.610.362**	**2.979.283.380.916**	***Balance as at January 1, 2022***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	100.751.654.542	100.751.654.542	80.909.961.082	181.661.615.624	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	1.039.978.193	4.264.196.062	-	-	5.304.174.255	2.253.064.807	7.557.239.062	*Other comprehensive income*
Cadangan umum		-	-	-	-	-	10.977.480.835	(10.977.480.835)	-	-	-	*General reserve*
Dividen	29c	-	-	-	-	-	-	(7.692.916.304)	(7.692.916.304)	-	(7.692.916.304)	*Dividend*
Pembayaran deviden entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	(10.482.603.344)	(10.482.603.344)	*Cash dividend of subsidiary*
Saldo per 31 Desember 2022		**1.022.427.100.000**	**749.560.161.538**	**(18.629.958.023)**	**485.133.111**	**40.072.394.143**	**92.146.775.549**	**457.482.076.729**	**2.343.543.683.047**	**806.783.032.907**	**3.150.326.715.954**	***Balance as at December 31, 2022***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	80.215.559.126	80.215.559.126	92.565.710.943	172.781.270.069	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(212.077.494)	5.747.719.585	-	-	5.535.642.091	2.630.806.539	8.166.448.630	*Other comprehensive income*
Cadangan umum		-	-	-	-	-	5.037.582.727	(5.037.582.727)	-	-	-	*General reserve*
Pembayaran deviden entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	(16.181.992.217)	(16.181.992.217)	*Cash dividend of subsidiary*
Saldo per 31 Desember 2023		**1.022.427.100.000**	**749.560.161.538**	**(18.629.958.023)**	**273.055.617**	**45.820.113.728**	**97.184.358.276**	**532.660.053.128**	**2.429.294.884.264**	**885.797.558.172**	**3.315.092.442.436**	***Balance as at December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		2.980.307.005.296	3.075.811.553.136	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada:				*Cash paid to:*
Pemasok dan subkontraktor		(2.183.226.758.605)	(2.178.637.454.457)	*Suppliers and subcontractors*
Direksi dan karyawan		(415.333.597.280)	(440.186.196.748)	*Directors and employees*
Kas yang dihasilkan dari operasi		**381.746.649.411**	**456.987.901.931**	***Cash generated from operation***
Pembayaran pajak-pajak		(169.976.360.176)	(75.503.277.924)	*Taxes payment*
Restitusi pajak	14e	84.383.834.231	159.934.146.123	*Tax refund*
Pembayaran beban keuangan	37	(228.786.962.649)	(230.326.938.099)	*Payment of finance costs*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**67.367.160.817**	**311.091.832.031**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	18	(63.905.251.400)	(8.702.242.513)	*Acquisition of property and equipment*
Penerimaan penjualan aset tetap	17 - 18	39.824.177.184	20.288.721.887	*Proceed from sale of property and equipment*
Perolehan aset tak berwujud	20	(1.891.778.870)	(1.303.623.899)	*Acquisition of intangible assets*
Penerimaan bunga		7.011.402.541	8.493.773.452	*Interest received*
Deposito dijaminkan		1.715.583.529	46.620.017.735	*Collateralized deposit*
Penambahan bank yang dibatasi penggunaannya	5	-	(29.500.000.000)	*Addition restricted bank*
Penerimaan bank yang dibatasi penggunaannya		29.500.000.000	-	*Received from restricted bank*
Penerimaan investasi ventura bersama		86.875.975.000	2.571.299.781	*Proceed from joint venture investment*
Penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi		110.188.349.350	-	*Proceed other receivables from related parties*
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	11	-	(114.821.843.701)	*Loan given to related parties*
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**209.318.457.334**	**(76.353.897.258)**	***Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen	29c	(54.255.811.971)	(18.175.519.648)	*Payment of dividend*
Penerimaan utang bank		2.982.705.625.293	2.737.308.229.374	*Proceed from bank loans*
Pembayaran utang bank		(3.343.591.477.842)	(2.967.492.783.895)	*Payment of bank loans*
Pembayaran utang non bank		(173.667.296.453)	(138.075.669.431)	*Payment of non bank loans*
Penerbitan obligasi	29	-	201.924.818.000	*Bonds issuance*
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	24	180.459.089.857	-	*Proceed loan from related party*
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	24	(12.203.449.968)	-	*Payment of loan from related party*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		**(420.553.321.084)**	**(184.510.925.600)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH - KAS DAN SETARA KAS		**(143.867.702.933)**	**50.227.009.173**	***NET INCREASE (DECREASE) - CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN	5	**305.614.888.536**	**255.387.879.363**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN	5	**161.747.185.603**	**305.614.888.536**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING OF THE YEAR***
Transaksi non-kas diungkapkan dalam Catatan 46				***Non-cash transactions disclosed in Note 46***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk ("Perusahaan") semula bernama PT Prima Jasa Aldodua, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 6 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16498HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 Tambahan No. 20149.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 16 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., PT Prima Jasa Aldodua melakukan penggantian nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PP Alat Konstruksi).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 September 2014, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit, S.H., M.H., PP Alat Konstruksi melakukan penggantian nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi (PP Peralatan Konstruksi).

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 5 Mei 2017, PP Peralatan Konstruksi melakukan penggantian nama menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi).

Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan yang sesuai Akta No. 40 tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0042779.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Juni 2022. Para pemegang saham menyetujui Perubahan Anggaran Dasar tentang penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk ("the Company") originally named PT Prima Jasa Aldodua, a legal entity in the form of a Limited Liability Company which was established based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company No. 02 dated May 6, 2004, made before Muhammad Chotib, S.H., Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. C-16498HT.01.01.TH.2004 dated July 1, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012 Supplement No. 20149.

Based on the Deed of Minutes of Meeting No. 16 dated June 6, 2014, made before Wiwiek Widhi Astuti, S.H., PT Prima Jasa Aldodua changed its name to PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PP Alat Konstruksi).

Based on the Deed of Statement of Resolutions Outside the Meeting of Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 54 dated September 19, 2014, made before Ilmiawan Dekrit, S.H., M.H., PP Alat Konstruksi changed its name to PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi (PP Peralatan Konstruksi).

Based on Deed No. 18 dated May 5, 2017, made before Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 dated May 5, 2017, PP Peralatan Konstruksi changed its name to PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi).

The Articles of Association have been amended several times, most recently based on the Resolution of the Annual Meeting of Shareholders in accordance with Deed No. 40 dated April 27, 2022 by Notary Fathiah Helmi, S.H., and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in accordance with Decree No. AHU-0042779.AH.01.02.TAHUN 2022 dated June 23, 2022. Shareholders approved the Amendment to the Articles of Association, regarding the adjustment to Article 3 concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to conform

Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dengan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Mei 2004.

with the Standard Classification of Indonesian Business Fields for 2020 (KBLI 2020) while still in line to the provisions of the applicable laws and regulations and do not change the purposes and objectives and business activities of the Company as referred to in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 of 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, thus not subject to POJK 17/2020.

The Company commenced its commercial operations in May 2004.

b. Maksud dan tujuan

Sesuai dengan anggaran dasar, maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah berusaha dibidangrak dalam bidang jasa konstruksi, *engineering procurement and construction* (EPC), jasa mekanikal elektrikal, pengangkutan dan pergudangan, jasa penyewaan, perdagangan, pertambangan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis, industri pengolahan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa *engineering* dan perencanaan, dan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

Kegiatan usaha utama Perusahaan meliputi jasa konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan struktur, pabrik produksi dan persewaan alat berat.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo - Jakarta Timur.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

b. Purposes and objectives

Based on the articles of association, the purposes and objectives of the Company is to engage in the field of construction services, engineering procurement and construction (EPC), mechanical and electrical services, transportation and warehousing, rental services, trading, mining, architectural and engineering activities as well as technical consulting, processing industry, capacity building services in construction, engineering and planning services, and development and optimization of the Company's resource utilization.

The Company's main business activities include construction services, mining services, structural works, production plants and heavy equipment rental.

The Company is domiciled in Jakarta, with its head office located at Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo - Jakarta Timur.

The Company's immediate and the ultimate parent Company is PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, incorporated and domiciled in Indonesia.

c. Penawaran umum saham

Saham Perusahaan ditawarkan perdana kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 November 2017 sejumlah 2.351.221.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-442/D.04/2017 tanggal 16 November 2017 seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sejumlah 10.224.271.000 saham.

c. Public offering of shares

The Company's shares of stock were initially offered to the public and listed on the Indonesia Stock Exchange on November 20, 2017 amounted to 2,351,221,000 shares with a par value of Rp100 per share. In accordance with the approval of the Financial Services Authority (OJK) No. S-442/D.04/2017 dated November 16, 2017, all issued and fully paid shares of the Company amounted to 10,224,271,000 shares.

d. Penawaran umum obligasi

Perusahaan telah melakukan Penawaran Obligasi Berkelanjutan I tahap I tahun 2022 kepada masyarakat sejumlah Rp202.980.000.000 yang terdiri dari Seri A dengan nilai Rp102.275.000.000 berjangka waktu 3 tahun dan Seri B dengan nilai Rp100.705.000.000 berjangka waktu 5 Tahun. Penerbitan obligasi telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

d. Public offering of bonds

The Company has made an Offering of Sustainable Bonds I phase I in 2022 to the public in the amount of Rp202,980,000,000 consisting of Series A with a value of Rp102,275,000,000 for a 3 years period and Series B with a value of Rp100,705,000,000 for a period of 5 years. The issuance of bonds has been listed on the Indonesia Stock Exchange.

e. Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 41 tanggal 24 Mei 2023 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0123982 tanggal 5 Juni 2023 dan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 20 April 2022 oleh Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

e. Management of the Company

Based on Deed No. 41 dated May 24, 2023 by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta that have been submitted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.09-0123982 dated June 5, 2023 and based on Deed No. 22 dated April 20, 2022 by Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Nur Rochmad	Yul Ari Pramuraharjo	*President Commissioner*
Komisaris	Albert Simangunsong	Albert Simangunsong	*Commissioner*
Komisaris	Muhammad Zahid	-	*Commissioner*
Komisaris Independen	Indra Jaya Rajagukguk	Indra Jaya Rajagukguk	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	-	Nur Rochmad	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	I Gede Upeksa Negara	Rully Noviandar	*President Director*
Direktur	Mohammad Arif Iswahyudi	Mohammad Arif Iswahyudi	*Director*
Direktur	Rebimun	Rebimun	*Director*
Direktur	Yudi Setiawan	Muhammad Darwis Hamzah	*Director*

Jumlah karyawan Grup pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 220 dan 295 karyawan (tidak diaudit).

The number of Group's employees as at December 31, 2023 and 2022 of 220 and 295 employees, respectively (unaudited).

f. Komite audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan No. 007/SK/DEKOM/PPRE/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pemberhentian Ketua Komite Audit dan Pengangkatan Ketua serta Wakil Ketua Komite Audit, susunan Komite Audit per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

f. Audit committee

Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners No. 010/SK/DEKOM/PPRE/2023 dated June 13, 2023 and No.007/SK/DEKOM/PPRE/2022 dated April 25, 2022 regarding the Dismissal of the Chairman of the Audit Committee and the Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Audit Committee, the composition of the Audit Committee as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Ketua	Nur Rochmad	Nur Rochmad	*Chairman*
Wakil Ketua	Albert Simangunsong	Albert Simangunsong	*Vice Chairman*
Anggota	Tri Saripalupi Andayani	Tri Saripalupi Andayani	*Members*
Anggota	Mubari	Mubari	*Members*
Anggota	Muhammad Zahid	-	*Members*

g. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 tentang Pengangkatan Kepala Biro Sekretariat Perusahaan tanggal 21 Agustus 2023, menetapkan Dyah Novian Tri Hadini sebagai Kepala Biro Sekretariat, berlaku efektif sejak tanggal 21 Agustus 2023.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 235/SK/DIR/PPRE/XI/2020 tentang Pengangkatan Kepala Biro Sekretariat Perusahaan tanggal 23 November 2020, menetapkan Adelia Auliyanti sebagai Kepala Biro Sekretariat, berlaku efektif sejak tanggal 23 November 2020.

g. Corporate secretary

Based on the Decree of the Company's Board of Directors No. 291/SK/DIR/PPRE/VIII/2023 concerning the Appointment of the Head of the Corporate Secretariat Bureau dated August 21, 2023, appointed Dyah Novian Tri Hadini as the Head of the Secretariat Bureau, effective as at August 21, 2023.

Based on the Decree of the Company's Board of Directors No. 235/SK/DIR/PPRE/XI/2020 concerning the Appointment of the Head of the Corporate Secretariat Bureau dated November 23, 2020, appointed Adelia Auliyanti as the Head of the Secretariat Bureau, effective as at November 23, 2020.

h. Audit internal

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawasan Internal, Perusahaan telah membebaskan Syamsir Alamsyah dan mengangkat Wismo Sugewo sebagai Kepala Biro Satuan Pengawasan Internal Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. 070/SK/DIR/PPRE/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Kepala Biro Satuan Pengawasan Internal, Perusahaan telah membebaskan Syaukat Noor dan mengangkat Syamsir Alamsyah sebagai Kepala Biro Satuan Pengawasan Internal Perusahaan.

h. Internal audit

Based on Company's Directors Decree No. 116/SK/DIR/PPRE/V/2023 dated May 22, 2023 regarding the Appointment of the Head of the Internal Supervision Unit Bureau, the Company has discharged Syamsir Alamsyah and appointed Wismo Sugewo as Head of the Company's Internal Supervision Unit Bureau.

Based on Company's Directors Decree No. 070/SK/DIR/PPRE/VIII/2021 dated August 31, 2021 regarding the Appointment of the Head of the Internal Supervision Unit Bureau, the Company has discharged Syaukat Noor and appointed Syamsir Alamsyah as Head of the Company's Internal Supervision Unit Bureau.

i. Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan entitas anak (Grup) sebagai berikut:

i. Subsidiary

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiary (Group), listed as follows:

Entitas anak/ Subsidiary	Bidang Usaha/ *Nature of business*	Domisili/ *Domicile*	Tahun operasi/ *Start of commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2023	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2022	Sebelum eliminasi/ *Before elimination* Jumlah aset/ *Total assets* 31 Desember/ *December 31,* 2023	Sebelum eliminasi/ *Before elimination* Jumlah aset/ *Total assets* 31 Desember/ *December 31,* 2022	Sebelum eliminasi/ *Before elimination* Jumlah pendapatan/ *Total revenues* 2023	Sebelum eliminasi/ *Before elimination* Jumlah pendapatan/ *Total revenues* 2022
Kepemilikan langsung/ Direct ownership									
PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)	Jasa konstruksi/ *Construction services*	Jakarta	1997	51%	51%	2.367.181.386.465	2.431.619.280.112	1.201.053.366.908	1.167.205.891.278

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 07 tanggal 22 Juni 2017 dari Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, Perusahaan telah mengakuisisi saham LMA sejumlah 331.500 lembar saham dari pihak ketiga, mewakili 51% kepemilikan saham dengan harga Rp798.000.000.000.

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares No. 07 dated June 22, 2017, of Irfansah, S.H., M.Kn., a Notary in Karawang, the Company acquired 331,500 shares of stock of LMA from a third party, representing 51% share ownership at price of Rp798,000,000,000.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut, yang relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebiiakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan, terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes* tentang *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.*

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Grup berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual beli dan sewa-balik.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (ISAK)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

The following revised accounting standards, which are relevant to the Group, are effective from January 1, 2023 and do not result in material impact to the Group's consolidated financial statements:

- *Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide an explanation of material accounting policies;*
- *Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding the classification of liabilities;*
- *Amendment to PSAK 16: "Fixed Assets" regarding results before intended use;*
- *Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and explanations;*
- *Amendment to PSAK 46 "Income Taxes" regarding Deferred Tax, related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction adopted from Amendment to IAS 12 Income Taxes concerning Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.*

The following revised accounting standards issued and relevant to the Group are effective from January 1, 2024 and have not been early adopted by the Group:

- *Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;*
- *Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants; and*
- *Amendment to PSAK 73 "Leases" about lease liability in a sales and leaseback.*

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

- PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025.

- *PSAK 74 (amendment) Insurance Contract.*

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is assessing the implication of the above standards, to the Group's consolidated financial statements.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS - IAI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitias, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of compliance

The financial statements of the Group has been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI) and Islamic Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAS - IAI), and Regulations of Financial Services Authority (OJK) No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of the Financial Statements of Listed Entities.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements has been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis, except

pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut, kecuali untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang merupakan ruang lingkup PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham, transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi bersih dalam PSAK 14 Persediaan atau nilai pakai dalam PSAK 48.

for share-based payment transactions that are within the scope of PSAK 53 Share-based Payment, leasing transactions that are within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 14 Inventories or value in use in PSAK 48.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar konsolidasian

c. Basis of consolidated

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak. Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee,* eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power to affect its returns.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

The Company reassesses whether the entity is in fact an investee when facts and circumstances indicate that there has been changes to one or more of the three control elements mentioned above.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee, when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the

Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

All assets and liabilities in intra Group, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions in the Group are eliminated in full on consolidation.

Kepentingan non pengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham non pengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan non pengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan non pengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan non pengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiary that do not result in the Group losing control over the subsidiary are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 71, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Kombinasi bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

- Aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 46 Pajak Penghasilan dan PSAK 24 Imbalan Kerja;
- Instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Grup yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham pada tanggal akuisisi; dan

d. Business combination

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except that:

- *Deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 46 Income Taxes and PSAK 24 Employee Benefits, respectively;*
- *Liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquirer are measured in accordance with PSAK 53 Share-based Payments at the acquisition date; and*

- Aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 58 Aset tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan diukur sesuai dengan standar tersebut.

- *Assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with PSAK 58 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations and are measured in accordance with that standard.*

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a gain from bargain purchase.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup (termasuk operasi bersama) atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest (including joint operations) in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed/sold of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

e. Business combination under common control

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian.

The difference between the transfer price and the book value is presented as additional paid in capital and not reclassified to profit or loss when the control is lost.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

f. Related parties transactions

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related Parties Disclosures".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

g. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah pengakuan awal tersebut.

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Grup meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

g. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

1. Financial assets

Initial recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified in the two categories as follows:

- *Financial assets at amortised cost.*
- *Financial assets at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) or Other Comprehensive Income (FVOCI).*

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial recognition.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, other current assets and other non-current financial assets (quoted and unquoted financial instruments). Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

  Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

  Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Grup memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- *Financial assets at amortized cost.*

  Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

- *Financial assets at fair value through profit or loss*

  Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the profit or loss.

The Group has investments in equity instruments, which are classified as financial asset at fair value through profit and loss.

2. Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

- *Financial assets at amortized cost.*
- *Financial liabilities at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) or Other Comprehensive Income (FVOCI).*

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha, utang pengadaan, akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, uang muka pelanggan, liabilitas keuangan jangka pendek, dan jangka panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

The Group's financial liabilities include trade payables, procurement payable, accruals, loans and bonds payable, due to related parties, deposits from customer, and other current and non-current financial liabilities. Financial liabilities are classified as non current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Financial liabilities at amortized cost

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Gains or losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Sukuk diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi sebagai beban transaksi sukuk menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Sharia bond is recognized initially at nominal value, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred. Any differences between carrying amount and nominal value is recognized in the profit or loss as sharia bond transaction costs using the straight-line method during the period of sharia bond.

Imbal hasil terkait dibebankan dalam laporan laba rugi sebagai biaya keuangan.

The related return element is charged to the profit or loss as finance cost.

Sukuk, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

Sharia bond, adjusted with unamortized premium or discount and transaction costs, is presented as part of liabilities.

3. Instrumen keuangan disalinghapus

3. Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Grup atau pihak lawan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

4. Penurunan nilai dari aset keuangan

Untuk piutang dagang dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian ekspektasian sepanjang umur piutang harus diakui sejak pengakuan awal piutang.

4. Impairment of financial assets

For trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies the simplified approach permitted by PSAK 71, which requires expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of the receivables.

5. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mengalihkan hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

5. Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire; or (2) the Group has transferred its contractual rights to receive the cash flows of the financial assets or retained the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

6. Nilai wajar instrumen keuangan

Grup menilai instrumen keuangan, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

6. Fair value of financial instruments

The Group measures financial instruments, at fair value at each statement of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hierarki

presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset and liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between

dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hierarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian risiko kredit

Grup melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Grup terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Credit risk adjustment

The Group adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Group's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas pada bank dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijaminkan (termasuk deposito *on call*) yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and cash in banks and all deposits which are unrestricted time and not pledge as collateral (including deposits on call) with original maturities of three months or less.

i. Deposito berjangka dan rekening koran bank yang dibatasi penggunaannya

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminkan, atau dibatasi penggunaannya, dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatannya disajikan sebagai "aset keuangan lancar lainnya". Rekening bank yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominal.

i. Time deposits and restricted cash in banks

Time deposits with a maturity date of three months or less since the date of placement which are used as collateral or are restricted, and time deposits with a maturity date of more than three months since the dates of placement are presented as "other current financial assets". Current bank accounts which are used as collateral or are restricted, are presented as restricted cash in bank. Time deposits are stated at nominal values.

j. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

j. Investments in associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

The results of operations and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Group's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture) the Group discontinues recognizing it's share of further losses. Subsequent losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Persyaratan dalam PSAK 48 Penurunan Nilai Aset ("PSAK 48"), diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The requirements of PSAK 48 Impairment of Assets ("PSAK 48") are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate or a joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with it's carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan dihasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi atau ventura bersama.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 71. The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture.

Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

In addition, the Group recorded for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

When a Group transacts with an associate entity or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Group.

Grup menerapkan PSAK 71, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada *investee*.

The Group applies PSAK 71, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied and which form part of the net investment in the investee.

Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 15 (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian *investee* atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 15).

Furthermore, in applying PSAK 71 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 15 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 15).

k. Piutang usaha

k. Trade receivables

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan cadangan penurunan nilai piutang. Piutang dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost less provision for receivables impairment. Accounts are written-off in the period during which they are determined to be not collectible.

l. Piutang retensi

l. Retention receivables

Piutang retensi merupakan piutang kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak, atau sampai kerusakan telah diperbaiki.

Retention receivables are receivables from customers collectable after the fulfillment of the conditions as set in the contract, or until defects have been rectified.

Piutang retensi diukur pada nilai wajar piutang berdasarkan penerimaan arus kas yang diharapkan dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, maka dinyatakan pada biaya, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang. Piutang retensi dicatat pada saat

The retention receivables are measured at the fair value of the consideration receivable based on the expected timing of cash in flows and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, except where the effect of discounting would be immaterial as such, they are stated at cost, less provision for impairment of receivables. Retention receivables

tagihan termin terakhir ditahan oleh pemberi kerja sebesar persentase tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.

are recorded when the final billing is retained by customers based on a certain percentage as set in the contract up to the maintenance period.

m. Tagihan dan utang bruto pemberi kerja

Jumlah tagihan dan utang bruto pemberi kerja berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan kepada pihak pemberi kerja yang masih dalam pelaksanaan. Nilai dari tagihan dan utang bruto merupakan selisih antara pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian dan termin yang ditagih.

Jumlah tagihan bruto pemberi kerja diperoleh apabila pendapatan diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian melebihi termin yang ditagih. Jumlah utang bruto pemberi kerja terjadi apabila termin yang ditagih melebihi pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

m. Gross amount due from and to customers

Gross amount due from and to customers resulting from construction contract services which are still in progress. The value of due from and to customers represents the difference between the revenue recognized based on percentage of completion method and the progress billings.

Gross amount due from customers are obtained when the revenue recognized based on percentage of completion method exceeds the progress billings. Gross amounts due to customers are obtained when the progress billing exceeds the revenue recognized based on the percentage of completion method.

n. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

Persediaan bahan untuk konstruksi

Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (bon pemakaian bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode dilakukan *stock opname* persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan fisik.

n. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

A provision for impairment of inventory is determined on the basis of the estimated future sales of individual inventory.

Material inventory for construction

Purchased materials are recorded as inventory of materials for construction, each withdrawal (note of material used) recorded as material cost in the period concerned using the moving average price method. Every end of the period stock inventory is performed and adjustments are made when there is a difference between book and physical value.

o. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya bersangkutan.

o. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

p. Investasi jangka pendek

Deposito berjangka yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebagai nilai perolehan.

Portofolio reksadana diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek - sekuritas yang diperjualbelikan berdasarkan PSAK No. 50 - Instrumen Keuangan, Penyajian, Laba atau Rugi yang sudah terealisasi atau belum terealisasi (sesuai perubahan NAB) diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

p. Short-term investment

Time deposits with maturities of 3 (three) months but pledged and deposits with maturities of more than 3 (three) months are presented as short-term investments and stated as acquisition value.

Mutual fund portfolios are classified as short-term investments - securities traded under PSAK No. 50 - Financial Instruments, Presentations, Realized or Unrealized Profit or Loss (in compliance with NAB) are recognized in the income statement of the current year.

q. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan termasuk biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya persiapan lahan, biaya instalasi dan peralatan, biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi aset atau perolehan aset tetap, dan kapitalisasi biaya pinjaman tertentu yang timbul selama tahap konstruksi, dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali hak atas tanah) dan penurunan nilai.

Hak atas tanah secara umum dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Masing-masing jenis hak atas tanah dianalisa untuk menentukan apakah hak atas tanah tersebut harus dicatat sebagai aset tetap atau aset hak guna tergantung pada substansi ekonomik yang mendasari kepemilikan hak atas tanah. Jika hak atas tanah tersebut tidak secara efektif memberikan pengendalian atas aset pendasar, melainkan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar, transaksi tersebut dicatat sebagi sewa berdasarkan PSAK 73 “sewa”. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka hak atas tanah tersebut dicatat sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 16 “Aset tetap”.

Penyusutan dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

q. Property and equipment

Property and equipment are stated at cost which includes freight costs, handling costs, site preparation costs, installation costs, internal labor costs and certain capitalized borrowing costs incurred during the construction phase, less accumulated depreciation (except land rights) and impairment in value.

Land rights are generally stated at cost and are not amortised. Each of the land rights is analysed to determine whether it should be accounted for as either a property and equipment or a right-of-use asset, depending on the underlying economic substance of the land rights ownership. If the land rights do not effectively provide control of the underlying assets, but only give the rights to use the underlying assets, they are accounted for as leases under PSAK 73, “Leases”. If the land rights are substantially similar to those of land purchases, they are accounted for as fixed assets under PSAK 16 “Fixed Assets”.

Depreciation is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, using the straight-line method over their estimated useful lives, as follows:

	Tahun/ *Years*	
- Bangunan	20	*Building* -
- Alat ringan	3	*Light weight equipment* -
- *Scaffolding*	5	*Scaffolding* -
- Keet dan *standard*	3	*Keet and standard* -
- Peralatan kantor	3	*Office equipment* -
- Kendaraan	5	*Vehicle* -
- *Bekisting*	8	*Bekisting* -
- Peralatan berat	8	*Heavy equipment* -
- PCH *formwork*	8	*PCH formwork* -

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan atau dijual, biaya perolehan beserta akumulasi penyusutannya dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap dan keuntungannya/ kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as separate asset as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. When property and equipment are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts and any resulting gains or losses are recognized in profit or loss.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pemasangan peralatan dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan dan pemasangan. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi/ pemasangan selesai.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of equipment are capitalized as assets under construction and installation. These costs are reclassified to property and equipment when the construction or installation is complete.

Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman. Semua biaya pinjaman seperti bunga, beban keuangan dalam sewa, dan selisih kurs (diestimasi setiap 3 bulan sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga dengan membatasi selisih kurs yang diperhitungkan sebagai biaya pinjaman sebesar jumlah biaya pinjaman atas biaya pinjaman yang setara dalam mata uang fungsional) yang dapat diatribusikan ke aset kualifikasian, dikapitalisasi ke harga perolehan aset dalam pembangunan dan pemasangan. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan/ pemasangan selesai dan aset yang dibangun/ dipasang tersebut siap untuk digunakan.

Assets under construction and installation are stated at cost, which may include borrowing costs. All borrowing costs such as interest, finance charges in respect of leases and foreign exchange differences (estimated quarterly to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs by capping the exchange differences taken as borrowing costs at the amount of borrowing costs on the functional currency equivalent borrowings) that can be attributed to qualifying assets, are capitalized to the cost of property and equipment under construction and installation. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when the construction or installation is completed and the constructed or installed asset is ready for its intended use.

Biaya yang bergantung pada peristiwa masa depan selanjutnya diakui sebagai bagian nilai tercatat aset sebesar jumlah imbalan ketika terdapat ketidakpastian kewajiban tersebut terjadi.

Cost contingent on future events are subsequently recognized as part of the cost of the asset at the amount of consideration when the obligation is certain to be occurred.

Nilai sisa aset, masa manfaat, dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted in appropriate, at the end of each reporting period.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset ditentukan dengan membandingkan antara penerimaan hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset tersebut dan diakui di laporan laba rugi.

Gains and losses on disposals of assets are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognized in the profit or loss.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.

Property and equipment that are no longer used or sold, are removed from the financial statements. Any resulting gain or loss on disposal of fixed assets are recognized in profit and loss.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Land and building is shown at fair value. Valuation of land is performed by external independent valuers. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

The frequency of revaluations depends on changes in the fair value of the fixed assets being revalued. If the fair value of the revalued asset differs materially from its carrying amount, then further revaluation is required. Some fixed assets experience significant and fluctuating changes in fair value and therefore need to be revalued annually. Annual revaluation does not need to be carried out for fixed assets whose fair value changes are not significant. Otherwise, fixed assets may need to be evaluated every three or five years.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of land is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under property and equipment revaluation, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the properties revaluation reserve relating to a previous revaluation of such land.

Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus in respect of land is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

r. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

r. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik is an ijarah with the wa'd of transferring ownership of the assets that are given at a certain time.

Grup sebagai penyewa

Group as lessee

Utang sewa ijarah diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan atas manfaat yang telah diterima. Beban sewa ijarah diakui selama masa akad pada saat manfaat.

Ijarah rental debt is measured at the amount that must be paid for the benefits that have been received. Ijarah rental expenses are recognized during the contract period at the time of benefit.

Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

The costs of maintaining the ijarah object agreed upon in the contract are the responsibility of the lessee and are recognized as an expense when incurred.

Objek Ijarah Muntahiyah Bittamlik akan dihibahkan kepada Grup setelah berakhirnya jangka waktu sewa.

The object of Ijarah Muntahiyah Bittamlik will be granted to the Group after the end of the lease term.

Jual dan Ijarah

Sell and Ijarah

Transaksi jual dan ijarah merupakan transaksi yang terpisahkan dan tidak saling tergantung dengan harga jual pada nilai wajarnya.

Selling and ijarah transactions are separate and independent transactions with the selling price at fair value.

Jika entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan menyewakannya kembali, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya dalam laba rugi dan menerapkan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah, tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

If an entity sells an ijarah object to another party and leases it back, then the entity recognizes the gain or loss in the period in which it occurs in profit or loss and applies lessee accounting. Gains or losses arising from sales and ijarah transactions cannot be recognized as a reduction or addition to ijarah expenses.

s. Goodwill

s. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired.

Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

t. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

t. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

u. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
  - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal

u. Leases

The Group as lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*
  - *The Group has the right to operate the asset; or*
  - *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus

permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, use the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant interest rate on the outstanding balance of the liabilities.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Short-term leases and leases of low-value assets

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Modifikasi sewa

Lease modification

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

The Group account for a lease modification as a separate lease if both:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup sewa dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu;

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract;*

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- *Remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *Determines the lease term of the modified lease;*
- *Remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *Decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *Makes a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.*

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika demikian, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai pengelompokan aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group as lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset.

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognized as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognized as unearned finance lease income.

Lease income is recognized over the term of the lease using the net investment method that reflects a constant periodic rate of return.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is presented in the statements of financial position based on grouping of the asset. Lease income is recognized over the term of the lease on a straight-line basis.

Transaksi jual dan sewa balik

Pencatatan transaksi jual dan sewa balik bergantung kepada apakah pengalihan aset memenuhi syarat sebagai penjualan. Grup menerapkan persyaratan penentuan saat kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi dalam PSAK 72 untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan.

Pengalihan aset merupakan penjualan

Jika pengalihan aset oleh Grup sebagai penjual - penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 untuk dicatat sebagai penjualan, maka Grup mengukur aset hak guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh Grup. Dengan demikian Grup mengakui hanya jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli - pesewa.

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka Grup melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- Jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa di muka; dan
- Jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli - pesewa kepada Grup.

Grup mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan di atas berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari:

- Selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset; dan
- Selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar.

Sale and leaseback transactions

The accounting for sale and leaseback transactions depends on whether the transfer of the asset qualifies as a sale. The Group applies the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in PSAK 72 to determine whether the transfer of an asset is accounted for as a sale.

Transfer of the asset is a sale

If the transfer of an asset by the Group as the seller - lessee satisfies the requirements of PSAK 72 to be accounted for as a sale, then the Group measures the right-of-use assets arising from the lease back at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right-of-use retained by the Group. Accordingly, the Group shall recognise only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred to the buyer - lessor.

If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal the fair value of the asset, or if the payments for the lease are not at market rates, the Group make the following adjustments to measure the sale proceeds at fair value:

- *Any below-market terms shall be accounted for as a prepayment of lease payments; and*
- *Any above-market terms shall be accounted for as additional financing provided by the buyer - lessor to the Group.*

The Group measures any potential adjustment required above on the basis of the more readily determinable of:

- *The difference between the fair value of the consideration for the sale and the fair value of the asset; and*
- *The difference between the present value of the contractual payments for the lease and the present value of payments for the lease at market rates.*

v. Aset tak berwujud

Biaya atas pembelian *software* akuntansi diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama periode atas pengakuan *software* akuntansi sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

Biaya legal pengurusan hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah pada aset tetap dan/atau properti investasi.

v. Intangible assets

The cost of purchase of accounting software is recognized as an intangible asset and amortized over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter.

The legal cost of land rights upon acquisition of the land is recognized as part of the cost of land under property and equipment and/or investment property.

Biaya pembaruan atau pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama periode hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

The cost of renewal or extension of legal rights on land is recognized as an intangible asset and amortized over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter.

w. Uang muka pemberi kerja

Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

w. Advances from project owners

Advances from project owners (construction services) represent advances received from the project owners on construction works when the employment contract is signed and proportionally will be calculated by the payment of terminology based on the physical progress that achieved.

x. Liabilitas imbalan pasca kerja

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan pasal 185 (b) Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);

x. Post-employments benefit liabilities

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of article 81 and article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja). Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected unit credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);*

- Beban atau pendapatan bunga neto;
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya, seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan. Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan manfaat biaya diakui dalam laba rugi.

y. Saham treasuri

Saham treasuri diukur sebesar imbalan yang dibayarkan, termasuk biaya transaksi signifikan yang dapat diatribusikan secara langsung (dikurangi pajak), dan dikurangkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

z. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

- *Net interest expense or income;*
- *Remeasurement.*

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Other long-term employee benefits

The Group also provides other long term employee benefits such as long service leaves and awards. The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method with the benefit cost recognized in profit and loss.

y. Treasury shares

Treasury shares is measured at consideration paid, including any significant directly attributable transaction costs (net of taxes), and is deducted from equity attributable to the owners of the Group.

z. Recognition of revenue and expense

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition have to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 (dua) cara, yakni:

1. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan melebihi saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang Usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan Tangguhan".

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan. Pendapatan dari jasa diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut diberikan.

Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan (metode output).

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

The implementation of obligation can be fulfilled in 2 (two) ways, it is:

1. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by the customer exceeds the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade Receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred Revenue".

Revenue from the sale of goods is recognised when control of the goods have been transferred to customers. Revenue from services is recognized in the accounting period in which the services are rendered.

Construction

Revenues related to construction contracts are accounted for using the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works (output method).

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Dalam menentukan harga transaksi, Grup menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak (baik secara eksplisit atau implisit) memberikan pelanggan atau Grup manfaat signifikan berupa pendanaan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Tujuan ketika menyesuaikan komponen pendanaan signifikan dalam jumlah imbalan yang dijanjikan adalah agar Grup mengakui pendapatan pada jumlah yang mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pelanggan atas barang atau jasa yang dijanjikan jika pelanggan telah membayar secara kas barang atau jasa tersebut ketika entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan (yaitu harga jual kas). Grup menyajikan dampak pendanaan (pendapatan bunga atau beban bunga) secara terpisah dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dalam laporan penghasilan komprehensif.

In determining the transaction price, the Group adjust the promised amount of consideration for the effects of the time value of money if the timing of payments agreed to by the parties to the contract (either explicitly or implicitly) provides the customer or the Group with a significant benefit of financing the transfer of goods or services to the customer. The objective when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component is for the Group to recognize revenue at an amount that reflects the price that a customer would have paid for the promised goods or services if the customer had paid cash for those goods or services when (or as) they transfer to the customer (ie the cash selling price). The Group present the effects of financing (interest revenue or interest expense) separately from revenue from contracts with customers in the statement of comprehensive income.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

Grup mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Aset kontrak disajikan sebagai piutang retensi dan jumlah tagihan bruto pemberi kerja. Liabilitas kontrak disajikan sebagai jumlah utang bruto pemberi kerja dan pendapatan diterima dimuka.

The Group has recognized contract assets and contract liabilities related with revenue from contract with customers. Contract assets are presented as retention receivables and gross amount due from customers. Contract liabilities are presented as gross amount due to customers and unearned revenues.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non-proyek (beban usaha).

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as non-project expenses (operating expenses).

Pengakuan beban

Expense recognition

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

aa. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu terdapat kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban.

Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

aa. Provision

Provision is recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognized for future operating losses.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability.

The increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance costs.

bb. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Biaya pinjaman diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

bb. Borrowing cost

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

cc. Laba (rugi) per saham dasar dan dilusian

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Grup.

cc. Basic and diluted earning (loss) per share

The amount of basic earning (loss) per share is computed by dividing earning (loss) for the year attributable to owners of the parent by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings (loss) per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Group.

dd. Pajak penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan

dd. Income tax

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other

komprehensif lain konsolidasian karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period computed using prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or

hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

ee. Pajak final

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi komprehensif, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

ee. Final tax

Income subject to final tax, income tax expense is recognized proportionally with the accounting income recognized during the year. The difference between the final amount of tax payable and the amount charged as current tax in the statement of comprehensive income, is recognized as prepaid tax or tax debt. Differences in carrying value of assets and liabilities related to final tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

ff. Segmen operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi adalah Dewan Direksi.

Segmen adalah bagian khusus Grup yang terlibat dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset, dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai dengan segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar segmen dieliminasi.

ff. Operating segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments is the Board of Directors.

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing certain products and services (business segment), which component is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-segment balances and transactions are eliminated.

gg. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual di masa yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

gg. Use of estimate

The preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards requires management to make estimations and assumptions against reported amounts. Because of the lack of certainty in making estimates, there is likely to be actual results in the future different from those estimates.

hh. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian bila material.

hh. Events after the reporting period

Events after the reporting period presents evidence of conditions that occur at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period which are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical judgments in applying accounting policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Grup menandatangani beberapa perjanjian bersama sehubungan dengan kegiatan operasi mereka dimana suatu entitas yang memiliki bentuk hukum terpisah dari pihak-pihak yang terkait dengan pengaturan bersama dan Grup itu sendiri. Selanjutnya, tidak ada pengaturan kontraktual atau fakta dan keadaan lain yang menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam pengaturan bersama memiliki hak atas aset dan kewajiban pengaturan bersama. Dengan demikian, manajemen mengklasifikasikan sebagai ventura bersama.

The Group has entered into several joint agreements in relation to their operations where an entity that has a legal form confers separation between the parties to the joint arrangement and the Group itself. Furthermore, there is no contractual arrangement or any other facts and circumstances that indicate that the parties to the joint arrangement have rights to the assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement. Accordingly, management has classified these as a joint venture.

Penerapan suatu pengaturan

The adoption of an arrangement

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan atau penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika:

- Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut; atau
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang:

  1. Menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
  2. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain.

The adoption of an arrangement is not practical when the entity cannot apply it after the whole rational business done. For a period previously specified, it is not practical to apply a change in accounting policy retrospectively or serves or restatement of the retrospective to correct an error if:

- *The impact of application of retrospective or restatement of the retrospective can not be done;*
- *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires an assumption about the intent of management that exist in the previous period; or*
- *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires significant estimates on the amount and it is impossible to distinguish objectively information about the estimation:*

  1. *Provides evidence of circumstances that existed on the date when such amounts recognized, measured or disclosed; and*
  2. *Available when the financial statement of the previous period is resolved with other information.*

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Key sources of estimation uncertainty

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting year that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Rugi penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Impairment loss on loans and receivables

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment of the

penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap dan properti investasi Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 18.

Estimated useful lives of property and equipment

The useful life of each item of the Group's property and equipment, and investment property are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment and investment properties would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets. The carrying values of property and equipment are disclosed in Note 18.

Penurunan nilai goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul. Nilai tercatat goodwill diungkapkan dalam Catatan 19.

Impairment of goodwill

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash-generating units to which goodwill has been allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise. The carrying values of goodwill are disclosed in Note 19.

Penilaian instrumen keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 46 Grup menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 46 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas yang rinci untuk asumsi tersebut.

Valuation of financial instruments

As described in Note 46, the Group uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 46 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments, as well as the detailed sensitivity analysis for these assumptions.

Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 27.

Employee benefits

The determination of post-employment benefits liabilities is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's post-employment benefit liabilities. The carrying amounts of post-employment benefits liabilities are disclosed in Note 27.

Pengakuan pendapatan dan beban konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Grup mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Grup mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Grup melaksanakan proyek yang lamanya lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan akuntansi Grup untuk proyek membutuhkan pendapatan dan biaya yang akan dialokasikan pada periode akuntansi dan pengakuan berikutnya pada akhir periode atas aset atau liabilitas kontrak untuk proyek yang masih dalam proses. Penerapan kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk menerapkan pertimbangan dalam memperkirakan total pendapatan dan total biaya yang diharapkan pada setiap proyek. Estimasi tersebut direvisi ketika proyek berlangsung untuk mencerminkan status proyek dan informasi terbaru yang tersedia untuk manajemen, perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Manajemen proyek melakukan tinjauan rutin untuk memastikan perkiraan terbaru yang sesuai. Perubahan atas estimasi akan dicatat prospektif, walaupun Grup berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi.

Revenue and expense recognition of construction contract

The policy of revenue and expense recognition of construction contract of the Group requires use of estimates which may impact the reported amount of revenues and cost of revenues. The Group recognizes revenues and expenses related to construction contracts based on the completion stage of contract activities at end of reporting period (percentage of completion method).

The Group carry out projects with a duration of more than one accounting period and are recorded as construction contracts. The Group's accounting policy for projects requires revenues and expenses to be allocated in the accounting period and subsequent recognition at the end of the period of contract assets or liabilities for projects in progress. The implementation of this policy requires management to exercise judgment in estimating the total expected revenues and total costs for each project. These estimates are revised as the project progresses to reflect the status of the project and the latest information available to management, changes to those estimates are applied prospectively. Project management conducts regular reviews to ensure the most recent estimates are appropriate. Changes to estimates will be accounted for prospectively, although the Group believes that the estimates made are reasonable and appropriate, significant differences in the actual stage of completion could materially affect the revenue and cost of revenue from construction.

5. KAS DAN SETARA KAS / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Kas	**6.383.242**	**28.751.207**	***Cash***
Bank			***Bank***
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	36.523.842.370	108.430.682.229	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.293.626.038	21.432.678.949	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.165.034.660	12.831.230.962	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.961.192.900	17.863.502.117	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	3.734.276.034	218.024.787	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	472.579.951	472.579.951	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**68.150.551.953**	**161.248.698.995**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank DKI	51.305.671.021	14.452.009.061	*PT Bank DKI*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	31.384.160.802	9.777.256.225	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	3.436.040.161	33.801.377.382	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	2.749.761.909	10.024.579.658	*PT Bank Permata Tbk*
PT CIMB Niaga Tbk	2.399.361.675	22.696.932.709	*PT CIMB Niaga Tbk*
PT United Overseas Bank Tbk	1.659.455.080	15.091.040.447	*PT United Overseas Bank Tbk*
MUFG Bank Ltd	1.107.661.829	750.093.492	*MUFG Bank Ltd*
PT Bank Danamon Tbk	115.513.569	117.295.714	*PT Bank Danamon Tbk*
PT Bank Central Asia Syariah	1.539.532	-	*PT Bank Central Asia Syariah*
PT Bank Index Selindo	138.701	678.701	*PT Bank Index Selindo*
PT Bank HSBC Indonesia	-	333.080.266	*PT Bank HSBC Indonesia*
Sub Jumlah	**94.159.304.279**	**107.044.343.655**	***Sub Total***
Jumlah bank	**162.309.856.232**	**268.293.042.650**	***Total bank***
Deposito			***Deposits***
Pihak berelasi			***Related party***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	5.000.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Sub Jumlah	**-**	**5.000.000.000**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT CIMB Niaga Tbk	100.000.000	13.066.657.535	*PT CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	15.208.972.804	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank DKI	-	5.259.061.542	*PT Bank DKI*
Sub Jumlah	**100.000.000**	**33.534.691.881**	***Sub Total***
Jumlah deposito	**100.000.000**	**38.534.691.881**	***Total deposits***
Jumlah	**162.416.239.474**	**306.856.485738**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(669.053.871)	(1.241.597.202)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**161.747.185.603**	**305.614.888.536**	***Total - net***
Bank yang dibatasi penggunaannya			***Restricted bank***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	29.500.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Jumlah	**-**	**29.500.000.000**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun.	2% - 4,5%	6% - 6,3%	*Annual interest rate of time-deposits*

Mutasi atas penurunan nilai kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

The movements for the impairment of cash and cash equivalents are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	1.241.597.202	1.218.597.640	*Beginning balance*
Penambahan	-	22.999.562	*Addition*
Pemulihan	(572.543.331)	-	*Recovery*
Jumlah	**669.053.871**	**1.241.597.202**	***Total***

6. INVESTASI JANGKA PENDEK

6. SHORT TERM INVESTMENTS

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related party***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90.000.000.000	90.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**90.000.000.000**	**90.000.000.000**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Thrid party***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	17.841.000.000	19.557.928.425	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub Jumlah	**17.841.000.000**	**19.557.928.425**	***Sub Total***
Jumlah	**107.841.000.000**	**109.557.928.425**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(84.473.473)	(85.818.369)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**107.756.526.527**	**109.472.110.056**	***Total - net***

Investasi jangka pendek merupakan deposito berjangka yang dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima Grup dari bank-bank tersebut.

Short term investments represents time deposits used as collateral for loans received by the Group from respective banks.

Mutasi atas penurunan nilai investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

The movements for the impairment of short term investments are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	85.818.369	528.510.478	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	*Addition*
Pemulihan	(1.344.896)	(442.692.109)	*Recovery*
Jumlah	**84.473.473**	**85.818.369**	***Total***

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi	737.444.709.210	378.019.215.929	*Related parties*
Pihak ketiga	905.977.758.212	558.714.361.605	*Third parties*
Jumlah	**1.643.422.467.422**	**936.733.577.534**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(136.792.385.097)	(127.822.117.196)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.506.630.082.325**	**808.911.460.338**	***Total - net***

Berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut: *Based on business segment are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Pihak berelasi			***Related parties***
Konstruksi	618.307.599.515	240.537.692.034	*Construction*
Sewa	98.000.975.472	117.300.431.779	*Rental*
Ready mix	21.136.134.223	20.181.092.116	*Ready mix*
Jumlah pihak berelasi	**737.444.709.210**	**378.019.215.929**	***Total related parties***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.574.817.480)	(35.026.413.488)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak berelasi - bersih	**698.869.891.730**	**342.992.802.441**	***Total related parties - net***
Pihak ketiga			***Third parties***
Konstruksi	668.127.514.141	347.940.051.417	*Construction*
Sewa	213.031.483.552	182.394.446.401	*Rental*
Ready mix	24.818.760.519	28.379.863.787	*Ready mix*
Jumlah pihak ketiga	**905.977.758.212**	**558.714.361.605**	***Total third parties***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(98.217.567.617)	(92.795.703.708)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak ketiga - bersih	**807.760.190.595**	**465.918.657.897**	***Total third parties - net***
Jumlah	**1.506.630.082.325**	**808.911.460.338**	***Total***

Berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut: *Based on aging of receivables are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
> 1 bulan - 12 bulan	1.514.417.627.506	793.144.570.552	*> 1 month - 12 months*
> 12 bulan - 15 bulan	16.831.494.355	26.570.950.211	*> 12 months - 15 months*
> 15 bulan - 18 bulan	9.762.584.800	12.473.429.531	*> 15 months - 18 months*
> 18 bulan - 21 bulan	4.622.163.534	7.057.883.792	*> 18 months - 21 months*
> 21 bulan - 24 bulan	51.058.194.388	4.330.767.082	*> 21 months - 24 months*
> 24 bulan - 27 bulan	10.894.325.472	53.559.404.244	*> 24 months - 27 months*
> 27 bulan - 30 bulan	743.706.306	1.397.051.835	*> 27 months - 30 months*
> 30 bulan - 33 bulan	248.863.978	242.441.728	*> 30 months - 33 months*
> 33 bulan - 36 bulan	124.050.000	4.502.265.522	*> 33 months - 36 months*
> 36 bulan	34.719.457.083	33.454.813.037	*> 36 months*
Jumlah	**1.643.422.467.422**	**936.733.577.534**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(136.792.385.097)	(127.822.117.196)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.506.630.082.325**	**808.911.460.338**	***Total - net***

Berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut: *Based on customers are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT PP (Persero) Tbk	398.999.044.725	301.851.384.435	*PT PP (Persero) Tbk*
LMA Konsorsium	272.399.628.087	29.142.833.648	*LMA Konsorsium*
PT PPRO Sampurna Jaya	18.311.477.733	18.311.477.733	*PT PPRO Sampurna Jaya*
PT Brantas Abipraya (Persero)	16.091.598.267	-	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Limasland Realty Cilegon	12.588.482.738	12.588.482.738	*PT Limasland Realty Cilegon*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	5.077.293.570	5.077.293.570	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	5.044.996.293	-	*PT Pelabuhan Indonesia II(Persero)*
PT PP Properti Tbk	2.275.585.789	2.276.765.789	*PT PP Properti Tbk*
PT Hutama Karya Infrastruktur	2.019.640.688	721.500.000	*PT Hutama Karya Infrastruktur*
PT PP Properti Suramadu	1.539.595.159	1.539.595.159	*PP Properti Suramadu*
PT PP Infrastruktur	1.117.365.000	495.210.000	*PT PP Infrastruktur*
Lain-lain (Dibawah Rp1 Miliar)	1.980.001.161	6.014.672.857	*Others (Below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**737.444.709.210**	**378.019.215.929**	***Sub Total***

(Lanjutan/*Continued*)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.574.817.480)	(35.026.413.488)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**698.869.891.730**	**342.992.802.441**	***Sub Total - net***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Weda Bay Nickel	293.528.773.490	152.439.308.379	*PT Weda Bay Nickel*
PT Bangun Karya Pratama Lestari	48.804.100.742	48.804.100.742	*PT Bangun Karya Pratama Lestari*
KSO PP - Waskita - Wika	45.204.047.708	-	*KSO PP - Waskita - Wika*
PT Translingkar Kita Jaya	30.714.728.522	2.508.430.241	*PT Translingkar Kita Jaya*
PT Putra Energi Nusantara	25.230.767.136	25.230.767.136	*PT Putra Energi Nusantara*
KSO PP - MARFRI	22.881.995.305	2.197.508.571	*KSO PP - MARFRI*
KSO PP - Markinah	21.481.303.842	-	*KSO PP - Markinah*
KSO Penta Ocean - Toa - Rinkai - PP - Wika	21.427.185.554	21.231.270.554	*KSO Penta Ocean - Toa - Rinkai - PP - Wika*
PT Triaryani	21.386.274.013	4.726.266.109	*PT Triaryani*
KSO PP - Adhi	20.692.826.661	3.982.549.176	*KSO PP - Adhi*
PT Indah Kiat Pulp & Paper	19.344.973.603	19.741.201.506	*PT Indah Kiat Pulp & Paper*
KSO PP - NK	14.988.480.341	-	*KSO PP - NK*
PP - Bahagia Bangun Nusa	14.890.040.760	14.940.193.933	*PP - Bahagia Bangun Nusa*
PT Berkarya Abadi Selalu	13.814.225.475	14.764.225.475	*PT Berkarya Abadi Selalu*
KSO PP - Ashfri	13.799.977.597	13.483.287.522	*KSO PP - Ashfri*
PT Total Bangun Persada Tbk	13.469.629.809	14.062.817.007	*PT Total Bangun Persada Tbk*
KSO PP - Ashfri - Minarta	13.045.502.818	1.548.221.500	*KSO PP - Ashfri - Minarta*
KSO Abipraya APTA - PDK	13.017.802.500	-	*KSO Abipraya APTA - PDK*
PT Hoffmen International	12.359.873.101	33.923.294.101	*PT Hoffmen International*
KSO WIKA - PP	12.060.229.772	6.472.074.374	*KSO WIKA - PP*
Pulo Mas Jaya	11.063.574.000	-	*Pulo Mas Jaya*
PT Maha Cipta Jaya	11.025.985.858	331.529.250	*PT Maha Cipta Jaya*
PP - Wika Gedung	10.954.721.392	10.954.721.392	*PP - Wika Gedung*
KSO Abipraya - Bumi Karsa - CPA	9.189.292.702	-	*KSO Abipraya - Bumi Karsa - CPA*
Adhi - ACSET KSO	8.506.808.132	-	*Adhi - ACSET KSO*
PT Musi Mitra Jaya	8.337.876.812	3.603.582.337	*PT Musi Mitra Jaya*
PT Nusa Raya Cipta	8.253.644.536	4.945.467.507	*PT Nusa Raya Cipta*
PT Bahtera Putra Nusantara	6.662.553.602	5.769.934.570	*PT Bahtera Putra Nusantara*
KSO Wika - Nidya	6.446.545.414	7.234.752.821	*KSO Wika - Nidya*
Koperasi Mitra Prima Selaras	6.370.165.032	6.370.165.032	*Koperasi Mitra Prima Selaras*
KSO PP - RPJ	6.271.498.791	1.965.559.667	*KSO PP - RPJ*
Dinas Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat	5.960.470.496	12.188.629.806	*Dinas Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat*
CV Sejahtera Mandiri	5.703.271.096	-	*CV Sejahtera Mandiri*
PT Pintago Barasaki Group	5.518.672.500	5.518.672.500	*PT Pintago Barasaki Group*
KSO PP - Marga Dwitaguna	5.270.200.784	5.270.200.784	*KSO PP - Marga Dwitaguna*
KSO PP - Andesmont	5.202.978.210	9.650.508.123	*KSO PP - Andesmont*
KSO PP - Gunung Tabor Perkasa	5.135.564.442	-	*KSO PP - Gunung Tabor Perkasa*
PP KSO	4.948.294.078	4.948.294.078	*PP KSO*
KSO PP - NK Konsorsium	4.946.797.000	4.852.447.000	*KSO PP - NK Konsorsium*
PT Salamah Indah	4.771.200.000	4.771.200.000	*PT Salamah Indah*
KSO PP - BRP	4.472.374.533	4.472.374.533	*KSO PP - BRP*
KSO PP - HK	4.325.110.087	4.525.110.087	*KSO PP - HK*
PT Total Persada Indonesia	4.164.159.340	4.768.355.584	*PT Total Persada Indonesia*
KSO PP - GORIP	4.103.895.286	4.091.040.520	*KSO PP - GORIP*
Lain-lain (Dibawah Rp3 Miliar)	56.229.365.340	72.426.299.688	*Others (Below Rp3 Billion)*
Sub Jumlah	**905.977.758.212**	**558.714.361.605**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(98.217.567.617)	(92.795.703.708)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**807.760.190.595**	**465.918.657.897**	***Sub Total - net***
Jumlah	**1.643.422.467.422**	**936.733.577.534**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(136.792.385.097)	(127.822.117.196)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**1.506.630.082.325**	**808.911.460.338**	***Total - net***

Mutasi atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements for the impairment of trade receivables are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	127.822.117.196	126.674.977.707	*Beginning balance*
Penambahan	10.365.235.119	1.147.139.489	*Addition*
Pemulihan	(1.394.967.218)	-	*Recovery*
Jumlah	**136.792.385.097**	**127.822.117.196**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

The management believes that allowance for impairment losses of trade receivables is sufficient to cover possible losses from uncollectible trade receivables in the future.

8. PIUTANG RETENSI

8. RETENTION RECEIVABLES

Piutang retensi merupakan pendapatan Grup yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan dalam masa pemeliharaan, dengan rincian sebagai berikut:

Retention receivables represents the Group's earnings which are retained by the customers as guarantee during the maintenance period, with details are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT PP (Persero) Tbk	119.350.213.323	141.267.036.373	*PT PP (Persero) Tbk*
LMA Konsorsium	64.203.992.671	-	*LMA Konsorsium*
PT Brantas Abipraya (Persero)	3.156.113.825	-	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.513.129.105	12.658.631.594	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT PPRO Sampurna Jaya	2.454.945.296	2.454.945.296	*PT PPRO Sampurna Jaya*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1.027.666.045	1.027.666.045	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	6.318.866.808	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	3.630.394.366	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
Lain-lain (Dibawah Rp1 Miliar)	1.409.564.547	2.355.520.241	*Others (Below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**194.115.624.812**	**169.713.060.723**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.043.882.108)	(39.810.398.593)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**157.071.742.704**	**129.902.662.130**	***Sub Total - net***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Eramet Halmahera Nickel	12.774.337.828	2.155.354.673	*PT Eramet Halmahera Nickel*
KSO Penta Ocean - Toa - Rinkai - PP - Wika	9.639.081.961	9.792.444.040	*KSO Penta Ocean - Toa - Rinkai - PP - Wika*
KSO PP Bahagia Bangun Nusa	7.989.232.639	7.989.232.639	*KSO PP Bahagia Bangun Nusa*
PT Total Bangun Persada	4.343.449.443	6.001.663.570	*PT Total Bangun Persada*
KSO Wika - PP	2.504.865.000	2.718.141.886	*KSO Wika - PP*
KSO PP - Adhi Jaya	2.237.496.602	-	*KSO PP - Adhi Jaya*
PT Nusa Raya Cipta	1.965.122.357	3.073.578.641	*PT Nusa Raya Cipta*
KSO PP - BK	1.687.034.998	-	*KSO PP - BK*
JO CSCEC CSSA	1.335.942.201	2.168.616.507	*JO CSCEC CSSA*
PT Djasa Uber Sakti	1.006.618.204	1.006.618.204	*PT Djasa Uber Sakti*
Lain-lain (Dibawah Rp1 Miliar)	5.746.251.563	15.214.881.909	*Others (Below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**51.229.432.796**	**50.120.532.069**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.513.818.911)	(8.797.951.389)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**38.715.613.885**	**41.322.580.680**	***Total - net***
Jumlah	**245.345.057.608**	**219.833.592.792**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49.557.701.019)	(48.608.349.982)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**195.787.356.589**	**171.225.242.810**	***Total - net***

Mutasi atas penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements for the impairment of retention receivables are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	48.608.349.982	48.744.081.376	*Beginning balance*
Penambahan	2.930.659.267	-	*Addition*
Pemulihan	(1.981.308.230)	(135.731.394)	*Recovery*
Jumlah	**49.557.701.019**	**48.608.349.982**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang retensi cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi dikemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses on retention receivables is sufficient to cover possible losses from uncollectible retention receivables in the future.

9. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA

9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi	816.742.954.396	1.071.739.011.426	*Related parties*
Pihak ketiga	1.872.558.540.930	2.048.427.802.967	*Third parties*
Jumlah	**2.689.301.495.326**	**3.120.166.814.393**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(214.277.560.726)	(208.891.648.135)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**2.475.023.934.600**	**2.911.275.166.258**	***Total - net***

Berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Based on customers are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT PP (Persero) Tbk	639.258.297.493	682.443.852.571	*PT PP (Persero) Tbk*
LMA Konsorsium	138.569.740.627	320.849.183.537	*LMA Konsorsium*
PT Hutama Karya Insfrastruktur	18.349.185.329	17.011.057.529	*PT Hutama Karya Insfrastruktur*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	6.159.892.034	6.294.202.073	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	5.687.870.874	4.308.884.323	*PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk*
PT Angkasa Pura II (Persero)	2.950.214.378	2.950.213.989	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Grahaprima Realtindo	1.623.870.330	1.623.870.330	*PT Grahaprima Realtindo*
PT PPRO Sampurna Jaya	1.449.477.338	1.449.477.338	*PT PPRO Sampurna Jaya*
PT Brantas Abipraya (Persero)	1.424.005.759	28.472.480.580	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
Lain-lain (Dibawah Rp1 Miliar)	1.270.400.234	6.335.789.156	*Others (Below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**816.742.954.396**	**1.071.739.011.426**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(187.983.348.801)	(183.046.645.266)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**628.759.605.595**	**888.692.366.160**	***Sub Total - net***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Weda Bay Nickel	891.063.729.901	599.778.146.870	*PT Weda Bay Nickel*
PT Batuta Chemical Industrial Park	120.248.023.250	120.248.023.250	*PT Batuta Chemical Industrial Park*
PT Surya Dhoho Investama	83.573.026.353	-	*PT Surya Dhoho Investama*
PT Indah Kiat Pulp & Paper	82.419.685.555	25.018.348.430	*PT Indah Kiat Pulp & Paper*
KSO PP - Ashfri	79.018.200.350	79.018.200.350	*KSO PP - Ashfri*
PT Inti Pancar Dinamika	67.086.236.951	67.086.236.951	*PT Inti Pancar Dinamika*
PT Triaryani	61.712.732.890	10.354.292.333	*PT Triaryani*
KSO PP - Bahagia Bangun Nusa	61.612.617.889	65.486.211.235	*KSO PP - Bahagia Bangun Nusa*
PT Tol Jagat Kerthi Bali	60.955.550.764	61.549.933.768	*PT Tol Jagat Kerthi Bali*
KSO PP - Markinah	40.400.726.520	-	*KSO PP - Markinah*

(Lanjutan/*Continued*)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
PP - NK KSO	39.086.811.533	-	*PP - NK KSO*
PP - Waskita - Wika - KSO	34.506.767.797	-	*PP - Waskita - Wika - KSO*
PT Translingkar Kita Jaya	30.505.641.674	774.036.777.390	*PT Translingkar Kita Jaya*
Abipraya - SBS - SILCON KSO	29.906.289.096	-	*Abipraya - SBS - SILCON KSO*
KSO Penta Ocean - Toa - Rinkai - PP - Wika	22.909.907.465	22.909.907.465	*KSO Penta Ocean - Toa - Rinkai - PP - Wika*
KSO PP - Gunung Tabor	21.140.588.090	21.140.588.090	*KSO PP - Gunung Tabor*
PP - WA KSO	12.241.379.541	-	*PP - WA KSO*
Wika - PP KSO	11.664.331.394	-	*Wika - PP KSO*
SRBGC - Wika - Adhi JO	11.516.188.700	-	*SRBGC - Wika - Adhi JO*
PT Total Bangun Persada	10.654.175.766	14.287.547.617	*PT Total Bangun Persada*
Abipraya - Bumi Karsa - CPA KSO	10.170.945.614	-	*Abipraya - Bumi Karsa - CPA KSO*
KSO PP - KNS Hyundai	9.878.616.512	9.878.616.512	*KSO PP - KNS Hyundai*
PP - Mafri - Bangun Nusa KSO	9.670.554.156	-	*PP - Mafri - Bangun Nusa KSO*
PT Pulo Mas Jaya	9.214.699.704	-	*PT Pulo Mas Jaya*
Abipraya - TGP - Supraharmonia KSO	7.700.209.519	-	*Abipraya - TGP - Supraharmonia KSO*
PT Putra Wijayakusuma Sakti	7.667.000.000	-	*PT Putra Wijayakusuma Sakti*
PP - BAP - RE KSO	6.545.541.909	-	*PP - BAP - RE KSO*
Waskita - Nindya - Permata KSO	4.972.040.571	-	*Waskita - Nindya - Permata KSO*
Adhi - ACSET KSO	4.942.567.497	-	*Adhi - ACSET KSO*
PP - Adhi Jaya KSO	3.901.415.716	8.217.178.421	*PP - Adhi Jaya KSO*
KSO PP - Wika Gedung	3.717.554.502	3.717.554.502	*KSO PP - Wika Gedung*
Wika - Nindya KSO	3.690.065.999	8.859.810.999	*Wika - Nindya KSO*
Lain-lain (Dibawah Rp3 Miliar)	18.264.717.752	156.840.428.784	*Others (Below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**1.872.558.540.930**	**2.048.427.802.967**	***Sub Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.294.211.925)	(25.845.002.869)	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah - bersih	**1.846.264.329.005**	**2.022.582.800.098**	***Sub Total - net***
Jumlah	**2.689.301.495.326**	**3.120.166.814.393**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(214.277.560.726)	(208.891.648.135)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**2.475.023.934.600**	**2.911.275.166.258**	***Total - net***

Mutasi atas penurunan nilai tagihan bruto pemberi kerja adalah sebagai berikut:

The movements for the impairment of gross amount due from customers are as follows:

	2023	**2022**	
Saldo awal	208.891.648.135	208.891.648.135	*Beginning balance*
Penambahan	5.385.912.591	-	*Addition*
Pemulihan	-	-	*Recovery*
Jumlah	**214.277.560.726**	**208.891.648.135**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan bruto pemberi kerja cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto pemberi kerja dikemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses on gross amount due from customers is sufficient to cover possible losses from uncollectible of gross amount due from customers in the future.

10. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

10. FINANCE LEASE RECEIVABLES

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan sebagai pesewa untuk alat berat pada proyek hauling milik PT Weda Bay Nickel. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 4 tahun.

The Company entered into a finance lease agreement as a lessor for heavy equipment in the hauling project owned by PT Weda Bay Nickel. The term of the finance lease is 4 years.

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Jumlah piutang sewa pembiayaan			*Amounts finance leases receivables*
Tahun 1	7.817.930.126	7.817.930.126	*Year 1*
Tahun 2	5.211.953.418	7.817.930.126	*Year 2*
Tahun 3	-	5.211.953.418	*Year 3*
Tahun 4	-	-	*Year 4*
Pembayaran sewa tidak didiskontokan	13.029.883.544	20.847.813.670	*Undiscount lease payment*
Nilai sisa tidak dijamin	-	-	*Unguaranteed residual values*
Investasi bruto di sewa	13.029.883.544	20.847.813.670	*Gross investment in the lease*
Dikurangi:			***Less:***
Pendapatan bunga yang belum diterima	972.016.482	2.374.272.512	*Unearned interest income*
Nilai sekarang dari piutang sewa	12.057.867.062	18.473.541.158	*Present value of lease receivable*
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Investasi bersih dalam sewa	**12.057.867.062**	**18.473.541.158**	***Net investment in the lease***
Pembayaran sewa tidak didiskontokan dianalisis sebagai:			*Undiscounted lease payments analyzed as:*
Dapat dipulihkan dalam 12 bulan	7.817.930.126	7.817.930.126	*Recoverable within 12 months*
Dapat dipulihkan setelah 12 bulan	5.211.953.418	13.029.883.544	*Recoverable after 12 months*
Jumlah	**13.029.883.544**	**20.847.813.670**	***Total***
Investasi neto dianalisis sebagai:			*Net investment in the lease analyzed as:*
Dapat dipulihkan dalam 12 bulan	7.017.508.580	6.415.674.097	*Recoverable within 12 months*
Dapat dipulihkan setelah 12 bulan	5.040.358.482	12.057.867.062	*Recoverable after 12 months*
Jumlah	**12.057.867.062**	**18.473.541.159**	***Total***
Rincian berdasarkan penyewa:			*By lessee:*
PT Weda Bay Nickel	12.057.867.062	18.473.541.158	*PT Weda Bay Nickel*
Jumlah	**12.057.867.062**	**18.473.541.158**	***Total***

11. PIUTANG LAIN-LAIN

11. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Jangka pendek			***Short term***
Pihak berelasi			***Related parties***
PPRE - RPJ KSO	3.644.397.446	-	*PPRE - RPJ KSO*
PP Presisi - Sarana KSO	1.875.000.000	1.875.000.000	*PP Presisi - Sarana KSO*
PP Presisi - Yalapersada KSO	573.383.182	-	*PP Presisi - Yalapersada KSO*
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	-	2.015.000.000	*PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO*
Piutang pegawai	599.637.414	743.494.351	*Employee receivables*
Sub Jumlah	**6.692.418.042**	**4.633.494.351**	***Sub Total***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Selama Indah Dua	10.540.958.750	19.977.350.073	*PT Selama Indah Dua*
H.M. Holik	6.000.000.000	-	*H.M. Holik*
PT Leekang Jaya Konstruksi	5.484.516.166	-	*PT Leekang Jaya Konstruksi*
PT Widodo Karya Sejahtera	1.304.625.139	-	*PT Widodo Karya Sejahtera*
Sub Jumlah	**23.330.100.055**	**19.977.350.073**	***Sub Total***
Jumlah	**30.022.518.097**	**24.610.844.424**	***Total***
Jangka panjang			***Long term***
Pihak berelasi			***Related party***
LMA Konsorsium	-	110.188.349.350	*LMA Konsorsium*
Jumlah	**-**	**110.188.349.350**	***Total***

Piutang dari KSO merupakan biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup dan akan ditagihkan kepada KSO.

Receivables from JO represents expenses paid in advance by the Group and will be billed to JO.

Piutang lain-lain kepada PT Selama Indah Dua merupakan pinjaman yang diberikan oleh LMA untuk membiayai operasional PT Selama Indah Dua. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 9,75% per tahun dan telah di perpanjang dengan addendum No. 003/ADD-III/PPM/LMA-SI/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 yang akan berlaku sampai dengan seluruh pinjaman dilunasi.

Other Receivables to PT Selama Indah Dua represents loan provided by LMA to finance the operations of PT Selamat Indah Dua. The loan bears interest at 9.75% per year and has been extended with addendum No. 003/ADD-III/PPM/LMA-SI/II/2024 dated 2 February 2024 which will be valid until the entire loan is repaid.

Piutang pegawai merupakan kebijakan pemberian kredit karyawan LMA mengacu pada surat edaran LMA No. 663/LMA/HRD/EM/XI/2020 perihal pinjaman kredit karyawan dengan masa pinjaman satu tahun.

Employee receivables are LMA employee credit policies referring to LMA circular letter No. 663/LMA/HRD/EM/XI/2020 regarding employee credit loans with a one-year loan period.

Piutang kepada LMA Konsorsium merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh LMA untuk mendanai biaya operasional proyek berdasarkan pada perjanjian No. 018/PKS/LO-LMA/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Receivable from LMA Konsorsium represents a fund loan provided by LMA to finance the operational costs of the project based on the agreement No. 018/PKS/LO-LMA/VII/2022 dated July 25, 2022.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak diperlukan karena manajemen berpendapat seluruh piutang dapat ditagih seluruhnya.

Management believes that the allowance for impairment losses on other receivables is not necessary since all such receivables are fully collectible.

12. PERSEDIAAN

12. INVENTORIES

Merupakan persediaan bahan untuk pembuatan bekisting kolom, bekisting dinding dan bahan batching plant serta suku cadang, sebagai berikut:

Represent inventories of raw material for building of bekisting wall and column, raw material for batching plant and sparepart, are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Suku cadang	81.190.370.224	67.408.399.404	*Spare part*
Bahan baku konstruksi	43.693.904.205	51.961.818.314	*Construction raw material*
Solar dan oli	14.255.964.724	10.853.001.481	*Oil and gasoline*
Lain-lain	28.512.235.508	23.811.104.382	*Others*
Jumlah	**167.652.474.661**	**154.034.323.581**	***Total***

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

Based on the review of the condition of the inventories, the Company's management believes that no provision for impairment of inventories is necessary.

13. UANG MUKA / *13. ADVANCES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Uang muka pemasok	29.701.372.409	33.456.009.808	*Supplier advances*
Uang muka beban tak langsung	6.408.650.294	3.612.224.119	*Indirect expense advances*
Uang muka dinas	634.587.408	-	*Business travel advances*
Jumlah	**36.744.610.111**	**37.068.233.927**	***Total***

14. PERPAJAKAN / *14. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
PPN Masukan	-	129.791.508.894	*VAT In*
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 4 (2)	237.010.309.534	176.346.246.871	*Article 4 (2)*
Jumlah	**237.010.309.534**	**306.137.773.765**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Utang cadangan PPh final	298.892.319.963	263.295.603.026	*PPh final reserve payable*
PPN Keluaran	26.766.461.179	-	*VAT Out*
PPN Pasal 16 D	87.465.598	87.465.598	*VAT Article 16D*
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 4 (2)	465.810.007	1.182.491.418	*Article 4 (2)*
Pasal 21	465.408.494	212.510.373	*Article 21*
Pasal 23	300.951.115	257.037.520	*Article 23*
Pasal 25	182.781.793	193.543.247	*Article 25*
Pasal 29	43.299.301	17.418.926	*Article 29*
Pasal 15	-	1.872.000	*Article 15*
Jumlah	**327.204.497.450**	**265.247.942.108**	***Total***

c. Pajak penghasilan / *c. Income tax*

Pajak kini / ***Current tax***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan - konsolidasian	181.788.066.851	192.941.358.059	*Profit before income tax - consolidated*
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	192.121.547.081	168.520.290.121	*Profit before income tax - subsidiary*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	**(10.333.480.230)**	**24.421.067.938**	***Profit before income tax - The Company***

(Lanjutan/*Continued*)

	2023	2022	
Koreksi fiskal positif			***Positive fiscal correction***
Beban pokok pendapatan yang dikenakan pajak final	1.725.335.089.476	1.915.612.283.306	*Cost of revenue subject to final tax*
Penyusutan fiskal	191.740.920.610	237.286.047.253	*Fiscal depreciation*
Beban penyusutan aset hak guna	97.941.492.048	90.289.686.090	*Depreciation expense of right-of-use assets*
Dividen	16.842.481.695	10.910.464.705	*Dividend*
Pengembangan usaha	16.662.565.325	17.336.867.513	*Business development*
Pemeliharaan aset tetap	11.276.022.882	16.707.832.878	*Property and equipment maintenance*
Biaya sumbangan sosial	1.705.033.390	698.703.402	*Social donation expense*
STP pajak	5.399.758.358	2.508.184.707	*Tax SPT*
Beban cadangan pesangon	5.069.730.142	1.565.053.768	*Severance reserve expenses*
Jumlah	**2.071.973.093.926**	**2.292.915.123.622**	***Total***
Koreksi fiskal negatif			***Negative fiscal correction***
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	4.256.846.386	4.080.914.161	*Bank and deposit interest income*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	2.031.042.476.992	2.277.428.814.358	*Revenue subject to final tax*
Jumlah	**2.035.299.323.378**	**2.281.509.728.519**	***Total***
Laba kena pajak	**26.340.290.318**	**35.826.463.041**	***Taxable income***
Pajak Penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku (22%)	5.794.863.870	7.881.821.869	*Income tax calculated at the applicable rate (22%)*
Beban pajak kini			***Current tax expenses***
Perusahaan	5.794.863.870	7.881.821.870	*The Company*
Entitas anak	3.211.932.912	3.397.920.565	*Subsidiary*
Jumlah beban pajak	**9.006.796.782**	**11.279.742.435**	***Total current tax expenses***
Pajak dibayar dimuka			***Prepaid taxes***
Perusahaan	5.782.513.871	7.866.696.870	*The Company*
Entitas anak	3.180.983.610	3.396.545.208	*Subsidiary*
Jumlah pajak dibayar dimuka	**8.963.497.481**	**11.263.242.078**	***Total prepaid taxes***
Utang pajak penghasilan	**43.299.301**	**16.500.357**	***Income tax payable***

Jumlah laba fiskal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah berdasarkan perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin akan disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilaporkan ke otoritas pajak atau adanya pemeriksaan dari otoritas pajak.

The amount of taxable profit for the years ended December 31, 2023 is based on preliminary calculations. The amount may be adjusted when Annual Tax Returns are reported to the tax authorities or there is inspection by the tax authorities.

Jika ada perbedaan antara laba kena pajak yang diakui sebelumnya dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT dicatat sebagai penyesuaian tahun sebelumnya dan diakui pada tahun berjalan saat SPT dilaporkan.

If there is a difference between the taxable income previously recognized with the amounts reported in the annual tax return is recorded as an adjustment to the previous year and recognized in the current year when annual tax return reported.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Tidak terdapat (beban) manfaat pajak tangguhan dan aset (kewajiban) pajak tangguhan per 31 Desember 2023 dan 2022 karena tidak terdapat beda temporer yang akan dikompensasikan dimasa yang akan datang.

There are no deferred tax benefit (liabilities) and deferred tax assets (liabilities) as at December 31, 2023 and 2022 because there is no temporary difference to be compensated in the future.

d. Pajak final / ***d. Final tax***

	2023	2022	
Perusahaan	60.931.274.304	68.322.864.431	*The Company*
Entitas anak	35.451.565.848	33.900.384.987	*Subsidiary*
Jumlah	**96.382.840.152**	**102.223.249.418**	***Total***

e. Administrasi perpajakan

Surat ketetapan pajak

Pada tanggal 27 Juni 2023 Perusahaan menerima SKPLB atas PPN yang mengkonfimasi kelebihan pembayaran sebesar Rp28.586.682.325 dan pada tanggal 3 Oktober 2023 Perusahaan menerima SKPKPP atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran sebesar Rp55.897.130.195.

Pada tanggal 25 November 2022, Perusahaan menerima SKPLB atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran sebesar Rp159.934.146.123.

Perubahan tarif pajak badan

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 07 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No. 07/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No. 07/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
b. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
c. Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga berlaku mulai 1 April 2022;

e. Tax administration

Tax assessment letters

On June 27, 2023, the Company received a SKPLB regarding Value Added Tax which confirmed an overpayment of Rp28,586,682,325 and on October 3, 2023, the Company received a SKPKPP regarding Value Added Tax which confirmed an overpayment of Rp55,897,130,195.

On November 25, 2022, the Company received a Tax Clearance Letter regarding Value Added Tax which confirmed an overpayment of Rp159,934,146,123.

Change in tax rates

On October 2021, the Government of Indonesia approved the Law No. 07 year 2021 related to harmonisation of tax regulations. Some purposes of Law No. 07/2021 are to increase sustainable economic growth and support the acceleration of economic recovery, realize a tax system that is more just with legal certainty, implement administrative reforms, consolidated taxation policies, and expansion of the tax base, as well as increasing Taxpayer voluntary compliance.

Some changes in tax regulations from the implementation of Law No. 07/2021, among others, are as follows:

a. The application of the corporate income tax rate to 22% starting from the 2022 Fiscal Year, and for domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the above mentioned tax rate;
b. VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect on April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025;
c. Simplification of VAT using final rate for certain taxable goods or services which also applies from April 1, 2022;

d. Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis aset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

d. Voluntary disclosure program for corporate taxpayers for the period January 1 - June 30, 2022, on the basis of assets acquired during January 1, 1985 - December 31, 2015 which were not disclosed when participating in the previous tax amnesty program.

Penerapan UU No. 07/2021 berdampak pada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2023, yang diukur menggunakan tarif pajak 22%.

The implementation of Law No. 07/2021 affect the measurement of deferred tax assets and liabilities as at December 31, 2023 which were measured using the applicable tax rate of 22%.

15. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

15. PREPAID EXPENSES

Merupakan biaya asuransi dibayar dimuka, sebagai berikut:

Represents prepaid of insurance expenses, are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Alat berat	38.212.736.899	37.530.900.610	*Heavy equipment*
Kendaraan	1.969.372.503	717.381.492	*Vehicle*
Kesehatan	-	2.286.490.353	*Medical*
Jumlah	**40.182.109.402**	**40.534.772.455**	***Total***

Aset tetap berupa alat berat, PCH, *scaffolding, bekisting*, dan kendaraan telah diasuransikan. Beban asuransi tersebut dibebankan sesuai masa berlakunya.

Property and equipments includes heavy equipment, PCH, scaffolding, formwork, and vehicles are insured. The insurance expenses are charged on validity period.

16. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

16. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

Nama ventura bersama/ *Name of joint venture*	Nama proyek/ *Name of project*	Persentase partisipasi/ *Participation percentage*
LMA Konsorsium	Kediri International Airport	51% : 49%
PPRE - RPJ KSO	Pembangunan Sistem Pengambilan dan Treatment Sampah Badan Air Melalui Rekayasa Sungai pada Kali Ciliwung Segmen TB Simatupang	55% : 45%
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	Pembangunan Jalur KA Lintas Medan - Binjai	60% : 40%
PP Presisi - Sarana KSO	Pembangunan Jembatan GORR Segmen I STA 7700 dan STA 8500	70% : 30%
PP Presisi - Yalapersada KSO	Pembangunan Prasarana dan Sarana PP Ukurlaran SKPT Saumlaki	51% : 49%

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

The movements of investment in joint venture are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai tercatat awal tahun	162.639.111.302	131.152.060.380	*Carrying amount at beginning of the year*
Mutasi investasi - bersih	(165.675.207.596)	(2.571.299.781)	*Investment movements - net*
Bagian laba ventura bersama	14.706.201.031	34.058.350.703	*Share in profit of joint ventures*
Jumlah	**11.670.104.737**	**162.639.111.302**	***Total***

17. ASET HAK GUNA

Grup menyewa beberapa aset termasuk kendaraan, alat berat dan *tower crane*. Masa sewa rata-rata adalah 3 tahun.

Grup memiliki opsi untuk membeli peralatan manufaktur tertentu dengan jumlah nominal pada akhir masa sewa. Kewajiban Perusahaan dijamin dengan hak milik pesewa atas aset yang disewa untuk sewa tersebut.

17. RIGHT-OF-USE ASSETS

The Group leases several assets including vehicles, heavy equipment, and tower crane. The average lease term is 3 years.

The Group has options to purchase certain manufacturing equipment for a nominal amount at the end of the lease term. The Company's liabilities are secured by the lessors title to the leased assets for such leases.

	31 Desember/ *December 31*, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***At cost***
Kendaraan	120.389.118.873	5.829.463.442	11.085.007.500	(3.629.938.000)	111.503.636.815	*Vehicles*
Tower crane	26.279.938.688	-	-	-	26.279.938.688	*Tower crane*
Earth moving	516.983.127.271	130.728.374.089	-	(39.592.965.500)	608.118.535.860	*Earth moving*
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000	*PCH*
Jumlah	**673.919.684.832**	**136.557.837.531**	**11.085.007.500**	**(43.222.903.500)**	**756.169.611.363**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kendaraan	80.685.805.593	14.895.736.880	10.860.693.334	(748.564.021)	83.972.285.118	*Vehicles*
Tower crane	26.279.938.688	-	-	-	26.279.938.688	*Tower crane*
Earth moving	119.835.232.462	97.630.619.516	-	(13.704.793.635)	203.761.058.343	*Earth moving*
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000	*PCH*
Jumlah	**237.068.476.743**	**112.526.356.396**	**10.860.693.334**	**(14.453.357.656)**	**324.280.782.149**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**436.851.208.089**				**431.888.829.214**	***Net Book Value***

	31 Desember/ *December 31*, 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***At cost***
Kendaraan	118.906.627.301	11.744.343.405	6.151.851.833	(4.110.000.000)	120.389.118.873	*Vehicles*
Tower crane	26.279.938.688	-	-	-	26.279.938.688	*Tower crane*
Earth moving	340.953.553.868	224.376.956.884	-	(48.347.383.481)	516.983.127.271	*Earth moving*
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000	*PCH*
Jumlah	**496.407.619.857**	**236.121.300.289**	**6.151.851.833**	**(52.457.383.481)**	**673.919.684.832**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kendaraan	70.029.985.577	17.897.610.139	5.436.892.447	(1.804.897.676)	80.685.805.593	*Vehicles*
Tower crane	26.149.409.170	130.529.518	-	-	26.279.938.688	*Tower crane*
Earth moving	54.253.055.875	87.237.775.437	-	(21.655.595.850)	119.835.232.462	*Earth moving*
PCH	10.216.661.961	50.838.039	-	-	10.267.500.000	*PCH*
Jumlah	**160.649.112.583**	**105.316.753.133**	**5.436.892.447**	**(23.460.493.526)**	**237.068.476.743**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**335.758.507.274**				**436.851.208.089**	***Net Book Value***

Seluruh penyusutan dialokasikan pada beban pokok pendapatan, total penyusutan pada 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp112.526.356.396 dan Rp105.316.753.133.

All depreciation is allocated to cost of revenue, total depreciation in 2023 and 2022 amounted to Rp112,526,356,396 and Rp105,316,753,133, respectively.

Keuntungan atas penjualan pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The gain on sales in 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Harga jual	4.781.501.301	3.857.268.951	*Selling price*
Nilai buku bersih	224.314.166	714.959.386	*Net book value*
Keuntungan atas penjualan	**4.557.187.135**	**3.142.309.565**	***Gain on sale***

(Lanjutan/*Continued*)

18. ASET TETAP / *18. PROPERTY AND EQUIPMENT*

	31 Desember/ *December 31*, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi dan revaluasi/ *Reclassification and revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***At cost***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	281.601.230.250	-	-	6.322.858.000	287.924.088.250	*Land*
Bangunan	42.821.552.388	-	1.738.207.472	1.535.704.762	42.619.049.678	*Building*
Apartemen	9.365.005.000	-	468.250.250	1.454.407.250	10.351.162.000	*Apartment*
Alat ringan	21.820.644.671	4.400.151.400	-	-	26.220.796.071	*Light equipment*
Fasilitas proyek	14.101.956.025	-	-	-	14.101.956.025	*Project facility*
Keet dan standard	3.190.407.570	-	-	-	3.190.407.570	*Keet and standard*
Scaffolding	23.227.502.447	-	-	-	23.227.502.447	*Scaffolding*
Kendraan	36.302.544.324	980.000.000	3.637.924.460	3.629.938.000	37.274.557.864	*Vehicles*
Batching plant	200.459.828.896	-	-	-	200.459.828.896	*Batching plant*
Tower crane	170.837.031.529	-	-	-	170.837.031.529	*Tower crane*
Earth moving	3.082.263.821.269	136.642.217.117	114.106.836.555	39.592.965.500	3.144.392.167.331	*Earth moving*
Bekisting	170.922.184.749	-	-	-	170.922.184.749	*Formwork*
PCH	220.423.848.703	-	-	-	220.423.848.703	*PCH*
Sub Jumlah	**4.277.337.557.821**	**142.022.368.517**	**119.951.218.737**	**52.535.873.512**	**4.351.944.581.113**	***Sub Total***
Aset dalam penyelesaian						***Assets under construction***
Bangunan	7.782.674.500	-	139.674.500	(925.000.000)	6.718.000.000	*Building*
Sub Jumlah	**7.782.674.500**	**-**	**139.674.500**	**(925.000.000)**	**6.718.000.000**	***Sub Total***
Jumlah	**4.285.120.232.321**	**142.022.368.517**	**120.090.893.237**	**51.610.873.512**	**4.358.662.581.113**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	-	1.738.207.472	1.738.207.472	-	-	*Building*
Apartemen	-	468.250.250	468.250.250	-	-	*Apartment*
Alat ringan	19.841.455.986	4.272.103.953	-	(808.344.355)	23.305.215.584	*Light equipment*
Fasilitas proyek	13.935.540.275	141.398.910	-	-	14.076.939.185	*Project facility*
Keet dan standard	3.190.407.570	-	-	-	3.190.407.570	*Keet and standard*
Scaffolding	23.227.502.443	-	-	-	23.227.502.443	*Scaffolding*
Kendaraan	30.250.346.531	2.653.440.580	3.403.516.952	748.564.021	30.248.834.180	*Vehicles*
Batching plant	127.695.843.832	24.415.090.850	-	135	152.110.934.817	*Batching plant*
Tower crane	147.503.375.304	9.867.336.795	-	-	157.370.712.099	*Tower crane*
Earth moving	1.967.552.736.038	304.416.061.526	111.997.664.680	14.513.137.855	2.174.484.270.739	*Earth moving*
Bekisting	87.465.651.790	21.625.893.172	-	-	109.091.544.962	*Formwork*
PCH	152.376.871.426	18.481.346.617	-	-	170.858.218.043	*PCH*
Jumlah	**2.573.039.731.195**	**388.079.130.125**	**117.607.639.354**	**14.453.357.656**	**2.857.964.579.622**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**1.712.080.501.126**				**1.500.698.001.491**	***Net Book Value***

	31 Desember/ *December 31*, 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi dan revaluasi/ *Reclassification and revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***At cost***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	270.877.583.250	845.000.000	-	9.878.647.000	281.601.230.250	*Land*
Bangunan	42.191.385.388	402.700.856	1.907.195.993	2.134.662.137	42.821.552.388	*Building*
Apartemen	9.276.376.000	-	463.818.800	552.447.800	9.365.005.000	*Apartment*
Alat ringan	18.847.218.762	2.973.425.909	-	-	21.820.644.671	*Light equipment*
Fasilitas proyek	14.101.956.025	-	-	-	14.101.956.025	*Project facility*
Keet dan standard	3.190.407.570	-	-	-	3.190.407.570	*Keet and standard*
Scaffolding	23.227.502.447	-	-	-	23.227.502.447	*Scaffolding*
Kendraan	36.180.667.167	193.533.988	4.181.656.831	4.110.000.000	36.302.544.324	*Vehicles*
Batching plant	200.459.828.896	-	-	-	200.459.828.896	*Batching plant*
Tower crane	171.542.931.529	-	705.900.000	-	170.837.031.529	*Tower crane*
Earth moving	3.091.612.110.953	3.871.590.000	61.567.263.165	48.347.383.481	3.082.263.821.269	*Earth moving*
Bekisting	170.506.192.989	415.991.760	-	-	170.922.184.749	*Formwork*
PCH	220.423.848.703	-	-	-	220.423.848.703	*PCH*
Sub Jumlah	**4.272.438.009.679**	**8.702.242.513**	**68.825.834.789**	**65.023.140.418**	**4.277.337.557.821**	***Sub Total***
Aset dalam penyelesaian						***Assets under construction***
Bangunan	13.821.506.309	-	-	(6.038.831.809)	7.782.674.500	*Building*
Sub Jumlah	**13.821.506.309**	**-**	**-**	(6.038.831.809)	**7.782.674.500**	***Sub Total***
Jumlah	**4.286.259.515.988**	**8.702.242.513**	**68.825.834.789**	**58.984.308.609**	**4.285.120.232.321**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	-	1.907.195.993	1.907.195.993	-	-	*Building*
Apartemen	-	463.818.800	463.818.800	-	-	*Apartment*
Alat ringan	18.585.455.132	1.256.000.854	-	-	19.841.455.986	*Light equipment*
Fasilitas proyek	13.466.457.589	469.082.686	-	-	13.935.540.275	*Project facility*
Keet dan standard	3.190.407.570	-	-	-	3.190.407.570	*Keet and standard*
Scaffolding	23.227.502.443	-	-	-	23.227.502.443	*Scaffolding*
Kendaraan	30.383.502.022	2.243.603.663	4.181.656.830	1.804.897.676	30.250.346.531	*Vehicles*

(Lanjutan/*Continued*)

	31 Desember/ *December 31,* 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi dan revaluasi/ *Reclassification and revaluation***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Batching plant	101.754.869.267	25.940.974.565	-	-	127.695.843.832	*Batching plant*
Tower crane	136.652.780.722	11.412.105.946	561.511.364	-	147.503.375.304	*Tower crane*
Earth moving	1.684.022.040.819	318.088.553.705	56.213.457.336	21.655.598.850	1.967.552.736.038	*Earth moving*
Bekisting	65.729.509.156	21.736.142.634	-	-	87.465.651.790	*Formwork*
PCH	132.926.395.913	19.450.475.513	-	-	152.376.871.426	*PCH*
Jumlah	**2.209.938.920.633**	**402.967.954.359**	**63.327.640.323**	**23.460.496.526**	**2.573.039.731.195**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**2.076.320.595.355**				**1.712.080.501.126**	***Net Book Value***

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation was allocated are as follows:

	2023	**2022**	
Harga pokok pendapatan	382.857.230.640	397.067.382.910	*Cost of revenue*
Beban usaha	5.221.899.486	5.900.571.449	*Operating expenses*
Jumlah	**388.079.130.125**	**402.967.954.359**	***Total***

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Management has reviewed the estimated economic life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period.

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Property and equipment, except land, are insured with various insurance companies against fire, theft and other possible risk, as follows:

Perusahaan asuransi/ *Insurance company*	**Jumlah pertanggungan/ *Sum insured***	
	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**
PT Asuransi Chubb	861.458.252.152	1.432.783.935.866
PT Asuransi Askrida Syariah	185.630.526.335	146.817.922.600
PT Asuransi Tri Pakarta	89.353.392.328	536.516.380.644
PT Sompo Insurance Indonesia	83.832.000.150	46.064.250.150
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	51.281.377.500	36.047.000.000
PT Asuransi Central Asia	38.428.650.000	-
PT MNC Asuransi Indonesia	37.767.750.000	7.795.582.032
PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	13.853.000.000	16.821.500.000
PT KSK Insurance Indonesia	9.761.900.000	83.642.810.000
PT Asuransi Ramayana	4.218.400.000	4.218.400.000
PT Asuransi Sahabat Insurance	1.814.000.000	1.618.600.000
PT Asuransi Total Bersama	1.750.000.000	-
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	47.680.680	47.680.680
PT Asuransi Jasaraharja Putera	-	6.750.349.366
PT Asuransi Umum BCA	-	1.777.500.000
Jumlah/ *Total*	**1.379.196.929.145**	**2.320.901.911.338**

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses from the insured risk.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap. Manajemen tidak melakukan cadangan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which indicated impairment of the carrying amount of the property and equipment. Management did not perform allowance for impairment of property and equipment as at December 31, 2023 and 2022.

Tidak terdapat aset yang tidak digunakan untuk sementara, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada 31 Desember 2023 dan 2022.

There are no temporarily unused assets, property and equipments that have been discontinued from active use and not classified as available-for-sale as at December 31, 2023 and 2022.

Jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.293.477.195.269 dan Rp825.129.012.725.

The total cost of property and equipment that have been fully depreciated and still in use as at December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,293,477,195,269 and Rp825,129,012,725, respectively.

Penilaian kembali aset tetap

Revaluation of property and equipment

Penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan No. 00020/2.0041-14/PI/03/0605/1/I/2024 dalam laporannya tertanggal 18 Januari 2024 untuk tahun 2023 dan No. 00013/2.0041-12/PI/03/0142/1/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 untuk tahun 2022.

An assessment of the fair value of property and equipments in the form of land and buildings is carried out by an independent appraiser who has registered at OJK, KJPP Dasa'at, Yudistira and Partners No. 00020/2.0041-14/PI/03/0605/1/I/2024 in its report dated January 18, 2024 for 2023 and No. 00013/2.0041-12/PI/03/0142/1/I/2023 dated January 11, 2023 for 2022.

Laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan pendekatan biaya.

The valuation was performed in accordance with the Indonesian Appraisal Standards (SPI), referring to recent arm's length market transaction and BAPEPAM-LK'S rule No. VIII.C.4 regarding valuation and presentation of asset valuation report in capital market. Appraisal method were based on the market value approach and cost approach.

	Jumlah tercatat/ *Net carrying value*		Nilai pasar/ *Market value*		Keuntungan (kerugian) revaluasi/ *Gain (loss) on revaluation*		
	31 Desember/*December 31,*		31 Desember/*December 31,*		31 Desember/*December 31,*		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tanah							***Land***
Perusahaan	82.213.260.000	80.659.780.000	84.557.940.000	82.213.260.000	2.344.680.000	1.553.480.000	*Company*
LMA	199.387.970.250	191.062.803.250	203.366.148.250	199.387.970.250	3.978.178.000	8.325.167.000	*LMA*
Sub Jumlah	**281.601.230.250**	**271.722.583.250**	**287.924.088.250**	**281.601.230.250**	**6.322.858.000**	**9.878.647.000**	***Sub Total***
Bangunan							***Buliding***
Perusahaan	12.089.576.166	12.358.618.293	12.744.600.000	12.714.249.000	655.023.834	355.630.707	*Company*
LMA	30.978.912.862	35.343.050.329	32.389.001.040	31.635.697.750	1.410.088.178	(3.707.352.579)	*LMA*
Sub Jumlah	**43.068.489.028**	**47.701.668.622**	**45.133.601.040**	**44.349.946.750**	**2.065.112.012**	**(3.351.721.872)**	***Sub Total***
Jumlah	**324.669.719.278**	**319.424.251.872**	**333.057.689.290**	**325.951.177.000**	**8.387.970.012**	**6.526.925.128**	***Total***

Keuntungan (kerugian) atas penjualan pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The gain (loss) on sales in 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Harga jual	35.042.675.883	16.431.452.936	*Selling price*
Nilai buku bersih	2.343.579.383	5.498.194.466	*Net book value*
Keuntungan atas penjualan	**32.699.096.500**	**10.933.258.470**	***Gain on sale***

Aset dalam penyelesaian

Merupakan bangunan dalam bentuk 1 unit apartemen dan mess karyawan, pada tanggal 31 Desember 2023, persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian adalah 95% dari nilai kontrak. Manajemen memperkirakan bahwa aset dalam penyelesaian akan selesai sampai dengan Maret 2024.

Manajemen tidak melihat peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam penyelesaian.

Assets under construction

Represents a building in the form of 1 unit apartment and employee mess, as at December 31, 2023, the percentage level of completion of assets under construction is 95% of the contract value. Management predicts that the construction in progress will be completed to March 2024.

Management does not foresee any events that may occur that would prevent completion of such construction in progress.

19. GOODWILL

Merupakan goodwill atas transaksi kombinasi bisnis LMA pada 2017, per 31 Desember 2023 dan 2022 saldo goodwill sebesar Rp246.863.514.371.

Pada bulan Juni 2017, Perusahaan mengakuisisi 51% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi melalui pembelian 331.500 lembar saham milik Tuan Afandi dengan biaya perolehan Rp798.000.000.000. Perusahaan mencatat aset dan liabilitas LMA dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 Juni 2017.

Berdasarkan penilaian kembali oleh KJPP Dasa'at, Yudistira dan Rekan dalam laporan No. 00168/2.0041-03/PI/07/0379/0/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 nilai pasar 51% ekuitas LMA pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.225.781.813.000.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas goodwill tersebut di atas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang mengharuskan Perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai atas goodwill, selain dari pengujian tahunan yang diungkapan pada Catatan ini.

Uji penurunan nilai terhadap goodwill

Dalam menguji apakah penurunan nilai goodwill diperlukan, nilai tercatat goodwill dialokasikan ke aset atau unit penghasil kas yang relevan untuk mendapatkan nilai tercatat kombinasian. Nilai tercatat kombinasian tersebut dibandingkan dengan nilai terpulihkan unit penghasil kas. Perusahaan menguji penurunan nilai goodwill setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan goodwill yang dialokasikan ditentukan berdasarkan "nilai pakai" (*value-in-use*) dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan.

19. GOODWILL

Represents goodwill for the LMA business combination transaction in 2017, as at December 31, 2023 and 2022 goodwill balance amounted to Rp246,863,514,371.

On June 2017, the Company, acquired 51% ownership of PT Lancarjaya Mandiri Abadi through the purchase of 331,500 shares from Mr. Afandi with acquisition cost of Rp798,000,000,000. The Company recognized the assets and liabilities of LMA at fair values as at June 30, 2017.

Based on revaluation by KJPP Dasa'at, Yudistira and Partners in their report No. 00168/2.0041-03/PI/07/0379/0/II/2024 dated February 19, 2024 market value of 51% of LMA equity as at December 31, 2023 was Rp1,225,781,813,000.

Management believes that there were no indicators of impairment that existed on the goodwill for the years ended December 31, 2023 and 2022 that require the Company to perform impairment tests on goodwill, other than the current annual test disclosed in this Note.

Impairment test on goodwill

In assessing whether impairment on goodwill is required, the carrying value of goodwill is allocated to the relevant assets or cash-generating unit to obtain combined carrying value. The combined carrying value is compared with cash-generating unit's recoverable amount. The Company performs testing of goodwill impairment annually (on December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

For impairment testing purposes, the recoverable amounts of the goodwill allocated are determined based on "value-in-use" using discounted cash flows method.

Asumsi yang digunakan

Jumlah terpulihkan goodwill ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pasar wajar LMA meggunakan arus kas yang didiskontokan dari rencana bisnis masa depan.

Tingkat diskonto: tingkat diskonto sebelum pajak yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 8,99% diperoleh dari biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak (WACC).

Harga sewa: Harga sewa didasarkan pada estimasi manajemen dan data pasar yang tersedia.

Beban operasi dan modal: Asumsi ini didasarkan pada perencanaan beban operasi dan modal Perusahaan. Manajemen memiliki kontrol penuh atas biaya, dan yakin bahwa asumsi akan tercapai.

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas menjadi lebih tinggi dari nilai yang terpulihkan secara material.

Goodwill tersebut tidak diharapkan dapat dikurangkan untuk tujuan pelaporan pajak.

Estimasi nilai wajar ditetapkan dengan metode nilai pasar dan pendapatan.

Tidak terdapat aset atau liabilitas kontinjensi.

Key assumptions used

The recoverable amount of goodwill has been determined based on the fair market value of LMA using discounted cash flow projections from the business future plan.

Discount rate: the pre-tax discount rate used as at December 31, 2023 was 8.99% derived from the post-tax weighted average cost of capital (WACC).

Rental prices: Forecasted rental prices are based on management's estimates and available market data.

Operating and capital expenses: These assumptions are based on the Company's operating and capital expenses plan. The management has full control over the costs, and believes that assumptions will be achievable.

Changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable amount, in particular the discount rate, can have significant impact on the result of the impairment assessment. Management believes that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to the cash-generating unit to materially exceed its recoverable amount.

Goodwill is not expected to be deductible for tax purposes.

The fair value was estimated by applying a market approach and income approach.

There are no contingent assets or liabilities.

20. ASET TAK BERWUJUD

20. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Software	12.212.940.607	10.321.161.737	*Software*
Dikurangi:			***Less:***
Amortisasi	(8.958.206.860)	(7.361.871.039)	*Amortization*
Jumlah	**3.254.733.747**	**2.959.290.698**	***Total***

Software merupakan kepemilikan lisensi resmi dari SAP, *Microsoft Office, Online I-matrix Batching Plant*, *Autocad*, dan *Visio*.

Software represents official licensed ownership of SAP, Microsoft Office, Online I-matrix Batching Plant, Autocad, and Visio.

(Lanjutan/*Continued*)

21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK / *21. SHORT TERM - BANK LOANS*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	295.718.000.000	299.999.000.000	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	160.004.000.000	195.000.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	148.280.320.618	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	56.931.340.000	5.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	275.225.309.385	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**660.933.660.618**	**775.224.309.385**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	160.365.000.000	28.025.000.000	*PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	99.824.600.000	-	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank DKI	96.391.749.556	160.000.000.000	*PT Bank DKI*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	236.916.666.669	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub Jumlah	**356.581.349.556**	**511.396.840.216**	***Sub Total***
Jumlah	**1.017.515.010.174**	**1.286.621.149.601**	***Total***

Kreditor/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Type of facilities*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*	Tanggal perjanjian/ *Agreement Date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
Perusahaan/ *Company*							
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	300.000.000.000	18 Februari/ *February 18,* 2023	18 Februari/ *February 18,* 2024	9.00%	295.718.000.000	299.999.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	*CC Lines* (*LC*/SKBDN)	250.000.000.000	2 November/ *November 2,* 2022	20 Oktober/ *October 20,* 2024	8,50%	-	236.916.666.669
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Musyarakah Modal Kerja	400.000.000.000	6 Februari/ *Februari 6,* 2023	6 Februari/ *Februari 6,* 2024	9.00%	160.004.000.000	195.000.000.000
PT Bank DKI	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	200.000.000.000	15 November/ *November 15,* 2023	15 November/ *November 15,* 2024	9,25%	96.391.749.556	160.000.000.000
PT United Overseas Bank Tbk	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	350.000.000.000	10 Oktober/ *October 10,* 2022	10 Oktober/ *October 10,* 2023	8,99%	-	86.455.173.547
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	*Cash collateral*	28.025.000.000	28 Desember/ *December 28,* 2022	30 Maret/ *March 30,* 2023	0,30%	-	28.025.000.000
	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	300.000.000.000	1 Maret/ *March 1,* 2023	1 Maret/ *March 1,* 2024	9,15%	160.365.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas *Non Cash Loan*	400.000.000.000	9 januari/ *January 9,* 2022	9 januari/ *January 9,* 2024	10,00%	148.280.320.618	-
LMA							
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*KMK Joint Borrowing*	286.825.000.000	8 Desember/ *December 8,* 2022	31 Maret/ *March 31,* 2023	7,25%	-	275.225.309.385
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit*	82.500.000.000	26 Oktober/ *October 26,* 2023	25 Oktober/ *October 25,* 2024	8.5%	56.931.340.000	5.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	Term loan Revolving 1	80.000.000.000	20 Juli/ *Juli 20,* 2023	24 Juni/ *Juni 24,* 2024	8,00%	99.824.600.000	-
					Jumlah/ *Total*	**1.017.515.010.174**	**1.286.621.149.601**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Perusahaan

Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 18 Februari 2022 dan telah dilakukan addendum fasilitas kredit sesuai dengan perjanjian kredit dengan No. 014/A/LCC/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan Fidusia atas seluruh piutang usaha pada proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas pinjaman baik yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan Rp375.000.000.000 yang diikat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Piutang No. 54 tanggal 18 Februari 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 3 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

The Company

The Company obtained an Export Working Capital Credit Facility in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 53 dated February 18, 2022 and an addendum has been made to the credit facility with agreement No. 014/A/LCC/II/2023 dated February 20, 2023.

This loan is guaranteed by Fiduciary for all trade receivables on projects financed by existing and future loan facilities with a guarantee value of Rp375,000,000,000 which is bound by the Deed of Fiduciary Guarantee Agreement No. 54 dated February 18, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Interest Bearing Debt to Equity Ratio maximum of 3 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*
- *Current Ratio minimum of 1 time.*

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perusahaan

Perusahaan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Musyarakah sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 294/AMD/CB/JKT/2021 tanggal 5 November 2021.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Debt to Ebitda Ratio* maksimum sebesar 4 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* lebih besar atau sama dengan 1,1 kali.

Perusahaan telah melunasi pinjaman tersebut pada tahun 2023.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

The Company

The Company obtained the Musyarakah Special Transaction Financing Facility in accordance with the Credit Agreement No. 294/AMD/CB/JKT/2021 dated November 5, 2021.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Debt to Ebitda Ratio maximum of 4 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio is greater than or equal to 1.1 times.*

The Company has fully paid the loan in 2023.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Perusahaan

Perusahaan memperoleh Fasilitas Musyarakah Modal Kerja sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 29 September 2021 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 6 Februari 2023.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

The Company

The Company obtained a Musyarakah Working Capital Credit Facility in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 27 dated September 29, 2021 with most recently amendment based on the Deed of Addendum to the Credit Agreement No. 03 dated February 6, 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan Fidusia atas seluruh piutang usaha pada proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas pinjaman baik yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan Rp400.000.000.000 yang diikat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Piutang No. 03 tanggal 6 Februari 2023 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.

This loan is guaranteed by Fiduciary for all trade receivables on projects financed by existing and future loan facilities with a guarantee value of Rp400,000,000,000 which is bound by the Deed of Fiduciary Guarantee Agreement No. 03 dated February 6, 2023 by Notary Fathiah Helmi, S.H.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 3 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 3 times*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum 1 time.*

PT Bank DKI

Perusahaan

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Modal Kerja sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Desember 2021 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 15 November 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Piutang Usaha dari Proyek Pemerintah Republik Indonesia yang dibiayai melalui APBN, Proyek BUMN, Proyek APBD DKI Jakarta, Proyek BUMD DKI Jakarta yang tidak sedang atau tidak akan diagunkan kepada pihak manapun selain Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Minimum sebesar 125% dari limit fasilitas kredit atau senilai Rp250.000.000.000.
   b. Umur piutang usaha maksimum 6 bulan.

   Atas piutang tersebut telah dilakukan pengikatan secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 13 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00499008.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021 dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00529734.AH.05.02 TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023.

2. Surat Pernyataan Jaminan dari Perusahaan sesuai Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 12 tanggal 24 Agustus 2021 dibuat dihadapan Notaris Irfansyah, S.H.

PT Bank DKI

The Company

The Company obtained a credit facility in the form of Working Capital in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 24 dated December 22, 2021 with most recently amendment based on the Deed of Addendum to the Credit Agreement No. 11 dated November 15, 2023.

The loan is guaranteed by:

1. *Trade Receivables from Projects of the Government of the Republic of Indonesia financed through the APBN, BUMN Projects, DKI Jakarta APBD Projects, DKI Jakarta BUMD Projects which are not being or will not be pledged as collateral to any party other than Bank DKI with the following conditions:*

   a. Minimum of 125% of the credit facility limit or Rp250,000,000,000.
   b. The maximum aging of trade receivables is 6 months.

   Fiduciary binding has been carried out on these receivables based on the Deed of Fiduciary Guarantee No. 13 dated August 24, 2021 and has been registered with the Fiduciary Registration Office as evidenced by Fiduciary Guarantee Certificate No. W10.00499008.AH.05.01 TAHUN 2021 dated September 6, 2021 and Certificate of Change of Fiduciary Guarantee No. W10.00529734.AH.05.02 TAHUN 2023 dated October 18, 2023.

2. *Letter of Undertaking from the Company according to Deed of Statement and Commitment No. 12 dated August 24, 2021 made before Notary Irfansyah, S.H.*

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 4,5 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimum 1 kali.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 4.5 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*

PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal No. 02 tanggal 10 Oktober 2019 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan VI terhadap Perjanjian Kredit No. 1364/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang dari kontrak proyek dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau Pemerintah Indonesia atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik proyek dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp350.000.000.000.

Perusahaan telah melunasi pinjaman tersebut pada tahun 2023.

PT Bank UOB Indonesia

The Company

The Company obtained a Working Capital Credit facility accordance to Deed of Credit Agreement No. 02 dated October 10, 2019 with the most recently amended based on the Amendment Deed VI of Credit Agreement No. 1364/10/2022 dated October 10, 2022.

The loan is guaranteed with fiduciary collateral for receivables from the project contract with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk or Badan Usaha Milik Negara (BUMN) or Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) as the owner of the project with a guarantee value of not less than Rp350,000,000,000.

The Company has fully paid the loan in 2023.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Perusahaan

Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi dengan Akta Perjanjian No. 02 tanggal 1 Maret 2019 dan telah dilakukan addendum dengan perjanjian No. 01 tanggal 1 Maret 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang atau akan dibiayai minimal sebesar 125% dari outstanding kredit, piutang diikat dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp375.000.000.000 dengan Akta Jaminan Fidusia No. 1 tanggal 1 Maret 2023 oleh Notaris Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H.

Perusahaan telah melunasi pinjaman tersebut pada tahun 2023.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

The Company

The Company obtained a Construction Working Capital Credit Facility with Deed of Agreement No. 02 dated March 1, 2019 and has been addendum with perjanjian No. 01 dated March 1, 2023.

This loan is guaranteed by project receivables from Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/ which are or will be financed at a minimum of 125% of the outstanding credit, the receivables are tied to a fiduciary guarantee of Rp375,000,000,000 with Fiduciary Guarantee Deed No. 1 dated March 1, 2023 by Notary Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H.

The Company has fully paid the loan in 2023.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

LMA

Perusahaan memperoleh Fasilitas *Joint Borrowing* sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 3 Juni 2022 dengan perubahan terakhir No. (1) 12 tanggal 8 Desember 2022.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

LMA

The Company obtained the Joint Borrowing Facility in accordance with Credit Agreement No. 12 dated June 3, 2022 with the last amendment No. (1) 12 dated December 8, 2022.

Atas fasilitas tersebut maksimum kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan LMA adalah sebesar Rp480.000.000.000 dimana dialokasikan untuk LMA maksimum Rp286.825.000.000.

Regarding the facility, the maximum credit given to the Company and LMA is Rp480,000,000,000 which allocated for LMA maximum Rp286,825,000,000.

Pinjaman ini dijamin dengan Tagihan termin proyek Tol Cinere - Jagorawi seksi 3 sesuai Surat Perjanjian Jasa Pemborongan No. 14/SK-PBJ/TLKJ/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 berikut perubahannya dengan nilai proyek Rp1.102.091.000.000 dan akan diikat Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.102.091.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

This loan is secured by the Toll Road Cinere - Jagorawi section 3 installment bill in accordance with the Contract of Services for Contracting No. 14/SK-PBJ/TLKJ/V/2021 dated May 20, 2021, along with its amendment, with a project value of Rp1,102,091,000,000 and will be secured by Fiduciary with a collateral value of Rp1,102,091,000,000 and registered at the Fiduciary Registration Office.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Current Ratio* minimal 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 3 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali.

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 3 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*

LMA telah melunasi pinjaman tersebut pada tahun 2023.

LMA has fully paid the loan in 2023.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

LMA

LMA

LMA memperoleh Fasilitas Kredit Modal Transaksional sesuai dengan Akta No.100 tanggal 26 Oktober 2021 dan telah diperpanjang dengan Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. WCO.KP/0467/KMK/2021 tanggal 26 Oktober 2022.

LMA obtained a Transactional Capital Credit Facility in accordance with Deed No. 100 dated October 26, 2021 and has been extended with Addendum I of the Transactional Working Capital Credit Agreement No. WCO.KP/0467/KMK/2021 dated October 26, 2022.

Pinjaman ini dijamin dengan:

This loan is guaranteed with:

1. Agunan *Non Fixed Asset*

   Piutang usaha atas seluruh *project* yang dibiayai oleh Bank, baik yang ada saat ini maupun tagihan yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar Rp82.500.000.000 yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 102 tanggal 16 Oktober 2022 oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H.

1. *Non-Fixed Asset Collateral*

   Trade receivable for all projects financed by the Bank, both current and future bills with a guaranteed value of Rp82,500,000,000 which has been tied with Fiduciary Guarantee Deed No. 102 dated October 16, 2022 by Notary Sri Ismiyati, S.H.

2. Agunan *Fixed Aset*

   a. Tanah total seluas 7.876 m^2 beserta bangunan ruko, gudang dan *mess* serta sarana perlengkapan di atasnya yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa:

2. *Fixed Asset Collateral*

   a. *The total land area of 7,876 m^2, along with the commercial building, warehouse, mess, and related facilities located in Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat with proof of ownership in the form of:*

- SHGB No. 02695 atas nama LMA.
- SHGB No. 02696 atas nama LMA.
- SHGB No. 02697 atas nama LMA.
- SHGB No. 02698 atas nama LMA.
- SHM No. 02889 atas nama Budi Antony.
- SHM No. 146 atas nama Justian Styawan.
- SHM No. 01400 atas nama Budi Antony.

Atas SHGB tersebut telah diikat hak tanggungan peringkat pertama No. 02480/2021 dengan nilai sebesar Rp8.734.000.000.

b. Tanah total seluas 3.165 m^2 yang terletak di Jalan Babakan Bogor RT 003 RW 006, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa:

- SHM No. 00949 atas nama Justian Styawan.
- SHM No. 00943 atas nama Budi Antony.

c. Tanah seluas 8.666 m^2 terletak di Jalan Desa Dawuan Timur, RT 003 RW 008, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan yang saat ini masih berupa SHM 01415 atas nama Budi Antony.

Atas agunan tersebut akan dilakukan perubahan menjadi SHGB atas nama LMA untuk kemudian diikat Hak Tanggungan dengan nilai total sebesar Rp3.466.000.000.

3. Agunan lainnya berupa:

Jaminan Pribadi dari Afandi Tjandra yang telah diikat dengan Akta Jaminan Pribadi No. 103 tanggal 16 Oktober 2022 oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, LMA diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 2 kali.
- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.

- *SHGB No. 02695 on behalf of LMA.*
- *SHGB No. 02696 on behalf of LMA.*
- *SHGB No. 02697 on behalf of LMA.*
- *SHGB No. 02698 on behalf of LMA.*
- *SHM No. 02889 on behalf of Budi Antony.*
- *SHM No. 146 on behalf of Justian Styawan.*
- *SHM No. 01400 on behalf of Budi Antony.*

The SHGB mentioned above is secured by a first-ranking mortgage No. 02480/2021 with a value of Rp8,734,000,000.

b. The land area of 3,165 m^2 located on Jalan Babakan Bogor RT 003 RW 006, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat with proof of ownership in the form of:

- *SHM No. 00949 on behalf of Justian Styawan.*
- *SHM No. 00943 on behalf of Budi Antony.*

c. The land area of 8,666 m^2 located on Jalan Desa Dawuan Timur RT 003 RW 008, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat with proof of ownership which is currently still in the form of SHM 01415 on behalf of Budi Antony.

The collateral will be changed to SHGB on behalf of LMA and then tied with Mortgage with a total value of Rp3,466,000,000.

3. Other collateral in the form of:

Personal Guarantee from Afandi Tjandra which has been bound by the Personal Guarantee Deed No. 103 dated October 16, 2022 by Notary Sri Ismiyati, S.H.

In connection with the loan, LMA is required to maintain the following financial covenants:

- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 2 times.*
- *Current Ratio minimum of 1 time.*

PT Bank Central Asia Tbk

LMA

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 24 Februari 2023 oleh Weliana Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:

   - SHM No. 3335, 3336, 3337, 3338, 3339 atas nama Tjong Arafat Tjandra dengan lokasi tanah di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.
   - SHM No. 3518 dan 3288 atas nama Afandi dengan lokasi tanah di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.
   - SHM No. 3519 atas nama Neni Junaedi dengan lokasi tanah di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.
   - SHGB No. 5989 dan 5990 atas nama LMA dengan lokasi tanah di Jalan Casablanca I Blok BC Kaveling No. 2A dan 2B, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat.
   - SHM No. 356, 357 atas nama Neni Junaedi dengan lokasi tanah di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.
   - SHM No. 363, 364, 370, 371, 377, 378, 384, 385, 391, 392 atas nama Afandi dengan lokasi tanah di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.
   - SHM No. 398, 399, 411, 412, 417, 418, 422, 423 atas nama Neni Junaedi dengan lokasi tanah di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.
   - SHGB No. 4378 atas nama LMA dengan lokasi tanah di Jalan Lingkar Luar Barat Komplek Perumahan Puri Mansion Blok B Nomor 15 Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
   - SHGB No. 5261 atas nama Neni Junaedi dengan lokasi tanah di Blok/Nomor Kaveling AR.1-43, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakasetia.

PT Bank Central Asia Tbk

LMA

Based on the Deed of Amendment to the Credit Agreement No. 23 dated February 24, 2023 by Weliana Salim, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This loan is secured by:

1. A land area including buildings and everything that has been and or will be erected, planted and placed on the land with the following information and proof of ownership:

   - *SHM No. 3335, 3336, 3337, 3338, 3339 on behalf of Tjong Arafat Tjandra with land location in Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.*
   - *SHM No. 3518 and 3288 on behalf of Afandi with land location in Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.*
   - *SHM No. 3519 on behalf of Neni Junaedi with land location in Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi Kecamatan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.*
   - *SHGB No. 5989 and 5990 on behalf of LMA with land location in Jalan Casablanca I Blok BC Kaveling No. 2A and 2B, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kepala Gading Barat.*
   - *SHM No. 356, 357 on behalf of Neni Junaedi with land location in Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.*
   - *SHM No. 363, 364, 370, 371, 377, 378, 384, 385, 391, 392 on behalf of Afandi with land location in Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.*
   - *SHM No. 398, 399, 411, 412, 417, 418, 422, 423 on behalf of Neni Junaedi with land location in Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Tanjung Lago.*
   - *SHGB No. 4378 on behalf of LMA with land location in Jalan Lingkar Luar Barat Komplek Perumahan Puri Mansion Blok B Nomor 15 Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.*
   - *SHGB No. 5261 on behalf of Neni Junaedi with land location in Blok/Nomor Kaveling AR. 1-43, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakasetia.*

- SHGB No. 1001 dan 1002 atas nama LMA dengan lokasi tanah di Jalan Pegangsaan Dua/Logistik Nomor 72, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Selatan.
- SHGB No. 4062 dan 3987 atas nama LMA dengan lokasi tanah di Komplek Perumahan Puri Mansion Jalan Buckingham 1 Nomor 6 dan 8, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
- SHGB No. 6977 atas nama PT Solusi Mandiri Propertindo dengan lokasi tanah di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Jakasampurna.

2. 13 unit Vibrating Sakai berikut peralatannya yang terletak di Jalan Raya Narogong 12,5 Nomor 18 Bekasi dan/atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Daftar Alat Berat *Vibrator Roller* tanggal 24 Desember 2014.
3. 44 unit Dump Truck Merk Hino Tipe FM 260 JD Tahun 2011 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kendaraan tanggal 24 Desember 2014.
4. Hak atas piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi hak Pemberi Agunan terhadap pihak manapun dengan nilai piutang sebesar Rp20.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang tanggal 15 Desember 2014 Nomor 325/LMA/DP/XII/2014 berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu.
5. Jaminan Pribadi oleh Afandi Tjandra sebesar *unlimited*.
6. 3 bidang tanah dan bangunan girik berdasarkan akta jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah Nomor 06, 07 dan 08 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Achmad Kiki Said, S.H., Notaris di Jakarta.
7. 105 unit Dump Truck merk Hino tipe FM 260 JD yang akan dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 1.
8. 8 unit Dump Truck merk Hino tipe FM 260 JD yang akan dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2.
9. 26 unit Dump Truck merk Hino tipe FM 260 JD Tahun 2018 sebagaimana dijabarkan dalam Surat Pernyataan tanggal 13 April 2021 yang merupakan pembaharuan dari Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2019 yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 2.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, LMA diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *SHGB No. 1001 and 1002 on behalf of LMA with land location in Jalan Pegangsaan Dua/Logistik Nomor 72, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Selatan.*
- *SHGB No. 4062 and 3987 on behalf of LMA with land location in the Komplek Perumahan Puri Mansion Jalan Buckingham 1 Nomor 6 dan 8, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.*
- *SHGB No. 6977 on behalf of PT Solusi Mandiri Propertindo with land location in Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Keluarahan Jakasampurna.*

2. *13 units of Vibrating Sakai and their equipment located at Jalan Raya Narogong 12.5 Nomor 18 Bekasi and/or in the future are stored anywhere, as it turns out from the Vibrator Roller Heavy Equipment List dated December 24, 2014.*
3. *44 units of Hino Brand Dump Truck FM 260 JD Year 2011 as described in the Vehicle Register dated December 24, 2014.*
4. *The right of receivables that is now or in the future are the rights of the Collateral Giver to any party with a receivable value of Rp20,000,000,000 as stated in the Receivables List dated December 15, 2014 Number 325/LMA/DP/XII/2014 along with all amendments and updated from time to time.*
5. *Personal Guarantee by Afandi Tjandra of unlimited amount.*
6. *3 plots of land and girik buildings based on the deed of sale and purchase of buildings and relinquishment of land rights Numbers 06, 07 and 08 dated October 13, 2011 drawn up before Achmad Kiki Said, S.H., Notary in Jakarta.*
7. *105 units of Hino brand Dump Truck type FM 260 JD which will be financed by Investment Credit facility 1.*
8. *8 units of Hino brand Dump Truck type FM 260 JD which will be financed by Investment Credit facility 2.*
9. *26 units of Dump Truck Hino brand FM 260 JD Year 2018 as described in the Statement Letter dated April 13, 2021 which is a renewal of the Statement Letter dated May 13, 2019 which is financed by Investment Credit facility 2.*

In connection with the loan above, LMA is required to maintain the following financial covenants:

- Rasio EBITDA minimal sebesar 1 kali.
- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* minimal sebesar 1,5 kali.

- *EBITDA Ratio minimum of 1 time.*
- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio minimum of 1.5 times.*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan

Perusahaan memperoleh Fasilitas Non Cash Loan sesuai dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 26 Desember 2022 dengan tingkat diskonto sebesar 10% per tahun dan bersifat *reviewable*.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- Menjaga ekuitas selalu positif.
- Menjaga kolektabilitas fasilitas kredit tetap dalam keadaan baik.

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Piutang usaha telah dilakukan pengikatan secara fidusia atas nama PT Lancarjaya Mandiri Abadi dengan nilai jaminan sebesar Rp600.000.000.000, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01018244.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 2 Agustus 2022 dan akan dilakukan perubahan fidusia dengan nilai jaminan sebesar Rp630.000.000.000.
2. Piutang usaha telah dilakukan pengikatan secara fidusia atas nama PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dengan nilai jaminan sebesar Rp90.000.000.000.

Dari total fasilitas diatas, Grup telah menggunakan sebesar Rp148.280.320.618.

Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka pendek tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company

The Company obtained a Non Cash Loan Facility in accordance with the Deed of Addendum Credit Agreement No. 27 dated Desember 26, 2022, with discount rate 10.00% per annum and reviewable.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Keep equity always positive.*
- *Maintain collectability of credit facilities in good condition.*

The loan is guaranteed by:

1. *Trade receivables have been fiduciary binding on behalf of PT Lancarjaya Mandiri Abadi with a collateral value of Rp600,000,000,000, as proven by Fiduciary Guarantee Certificate No. W11.01018244.AH.05.01 TAHUN 2022 dated August 2, 2022 and there will be a change in fiduciary with a collateral value of Rp630,000,000,000.*
2. *Fiduciary binding has been carried out on these trade receivables based on behalf of PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk with loan Rp90,000,000,000.*

From the total facilitiy above, the Group has used Rp148,280,320,618.

Compliance with loan covenants

As at December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with all of the covenants of the above mentioned short term loans as stipulated in the respective loan agreements.

22. UTANG USAHA / *22. TRADE PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	31.857.903.326	93.165.311.250	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Beton Tbk	4.708.607.832	37.038.245.442	*PT Wijaya Karya Beton Tbk*
PT Bhirawa Steel	3.356.616.663	-	*PT Bhirawa Steel*
Lain-lain (Dibawah Rp3 Miliar)	2.916.267.112	70.630.684.696	*Others (Below Rp3 Billion)*
Sub Jumlah	**42.839.394.933**	**200.834.241.388**	***Sub Total***

(Lanjutan/*Continued*)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Pemasok			***Supplier***
CV Jaya Teknik Diesel	77.854.296.841	88.559.196.706	*CV Jaya Teknik Diesel*
Koperasi Mitra Prima Selaras	52.078.928.591	36.494.315.274	*Koperasi Mitra Prima Selaras*
PT Teleindo Prakarsa	44.711.905.791	90.289.576.692	*PT Teleindo Prakarsa*
CV Anugrah Tangguh Mandiri	44.686.906.668	-	*CV Anugrah Tangguh Mandiri*
PT Biwandana	41.351.785.144	38.546.379.230	*PT Biwandana*
PT Indonesia Equipment Center	41.166.300.000	-	*PT Indonesia Equipment Center*
PT Wadah Suci	32.151.196.803	45.872.336.464	*PT Wadah Suci*
PT Global Mitra Multiguna	30.550.706.862	-	*PT Global Mitra Multiguna*
PT Bumi Cahyana Perkasa	29.614.060.243	-	*PT Bumi Cahyana Perkasa*
PT Dana Mitra Teknik	28.290.284.055	-	*PT Dana Mitra Teknik*
PT Ria Energi Indonesia	22.619.020.005	-	*PT Ria Energi Indonesia*
PT Mitra Bor Nusantara	21.199.072.412	6.017.779.426	*PT Mitra Bor Nusantara*
PT Wisan Petro Energi	20.850.377.640	-	*PT Wisan Petro Energi*
PT Majapahit Indo Perkasa	19.604.050.326	26.138.624.026	*PT Majapahit Indo Perkasa*
PT Tricipta Asa Perkasa	18.391.588.542	-	*PT Tricipta Asa Perkasa*
PT Nagamas Ban	17.672.692.406	12.508.355.100	*PT Nagamas Ban*
PT Samudera Perdana Selaras	17.671.537.500	29.910.215.800	*PT Samudera Perdana Selaras*
PT Darya Adhinatha Berkah	15.540.258.125	-	*PT Darya Adhinatha Berkah*
PT Migas Indonesia Raya	13.226.436.364	4.182.811.957	*PT Migas Indonesia Raya*
PT Pratama Widya	12.383.753.496	6.317.127.877	*PT Pratama Widya*
PT Siberat Digital Logistik	11.608.895.509	-	*PT Siberat Digital Logistik*
PT Sukses Mandiri Berkah	11.192.665.544	-	*PT Sukses Mandiri Berkah*
PT Cemindo Gemilang	10.540.576.887	40.519.658.980	*PT Cemindo Gemilang*
PT Sekasa Inti Perkasa	10.199.986.171	25.622.170.808	*PT Sekasa Inti Perkasa*
PT Mulia Rentalindo Persada	9.672.082.075	-	*PT Mulia Rentalindo Persada*
CV Central Material 33	9.045.231.690	9.568.863.730	*CV Central Material 33*
CV Anugerah Bangun Kencana	8.522.980.001	7.745.220.258	*CV Anugerah Bangun Kencana*
PT Sinar Kencana Elektrik	8.345.507.199	5.802.678.945	*PT Sinar Kencana Elektrik*
CV Aa Sinergi	8.305.975.827	5.402.545.066	*CV Aa Sinergi*
PT Petro Inti Sejahtera	8.220.611.680	-	*PT Petro Inti Sejahtera*
PT Growth Sumatra Industry	8.199.773.478	10.508.094.508	*PT Growth Sumatra Industry*
PT Citra Energi Sumatera	7.956.018.240	7.619.657.280	*PT Citra Energi Sumatera*
PT Kencana Graha Pertiwi	7.915.920.588	3.102.634.205	*PT Kencana Graha Pertiwi*
PT Petro Utama Energi	7.796.791.859	20.902.312.514	*PT Petro Utama Energi*
CV Rafvindotama Jaya Persada	7.596.277.105	-	*CV Rafvindotama Jaya Persada*
CV Anugerah Makmurindo	5.253.508.189	-	*CV Anugerah Makmurindo*
PT Aneka Servis Indonesia	7.163.161.495	-	*PT Aneka Servis Indonesia*
PT Audri Lutfia Jaya	6.964.095.211	-	*PT Audri Lutfia Jaya*
PT Nusa Indah Internasional	6.805.373.085	6.012.572.070	*PT Nusa Indah Internasional*
PT Brayan Urip Makmur	6.573.782.524	-	*PT Brayan Urip Makmur*
PT Rajawali Emas Ancora	6.417.585.500	-	*PT Rajawali Emas Ancora*
PT Joliv Anugerah Abadi	6.256.972.257	-	*PT Joliv Anugerah Abadi*
PT Wahana Raya Semesta	6.235.172.567	-	*PT Wahana Raya Semesta*
PT Gema Putra Nusantara	6.227.606.298	-	*PT Gema Putra Nusantara*
CV Indah Jaya Part	5.974.671.194	4.710.714.769	*CV Indah Jaya Part*
PT Pilar Ekatama	5.956.323.575	12.361.460.278	*PT Pilar Ekatama*
PT Adhimix Rmc Indonesia	5.895.795.525	7.052.571.722	*PT Adhimix Rmc Indonesia*
PT Niaga Utama Rizki	5.846.495.220	-	*PT Niaga Utama Rizki*
PT Cahaya Energi Asia	5.174.311.550	-	*PT Cahaya Energi Asia*
PT Sempurna Raya Makmur	5.095.578.913	4.336.887.516	*PT Sempurna Raya Makmur*
PT Triguna Karya Nusantara	4.948.855.525	-	*PT Triguna Karya Nusantara*
PT Lotus Sg Lestari	4.654.645.014	7.471.062.530	*PT Lotus Sg Lestari*
PT Gajaco Utama	4.294.295.684	-	*PT Gajaco Utama*
PT Aura Cahya Utama	3.980.064.574	-	*PT Aura Cahya Utama*
PT Adrien Suma Jaya	3.830.296.802	3.411.990.017	*PT Adrien Suma Jaya*
PT Taruna Karya	3.756.686.421	-	*PT Taruna Karya*
PT Intiniaga Sukses Abadi	3.667.819.300	-	*PT Intiniaga Sukses Abadi*
PT Tibeka Logistik Indonesia	3.665.125.000	8.412.600.000	*PT Tibeka Logistik Indonesia*
PT Batch Automation Indonesia	3.646.613.150	8.888.096.840	*PT Batch Automation Indonesia*
PT Tridaya Perkasa Nusantara	3.631.137.279	-	*PT Tridaya Perkasa Nusantara*
PT Sukses Anugerah Berkat	3.584.033.685	3.756.744.872	*PT Sukses Anugerah Berkat*
PT Sefas Keliantama	3.538.817.633	3.569.856.861	*PT Sefas Keliantama*

(Lanjutan/*Continued*)

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
CV Elye Mandiri Karya	3.348.836.800	3.159.280.000	*CV Elye Mandiri Karya*
PT Trijaya Perkasa Energi	3.344.492.160	-	*PT Trijaya Perkasa Energi*
PT Papan Mandiri Cemerlang	3.184.292.340	-	*PT Papan Mandiri Cemerlang*
PT Sinar Kencana Kertajaya	3.177.220.642	-	*PT Sinar Kencana Kertajaya*
PT Gelora Bangun Bersama Abadi	3.105.265.918	6.125.315.918	*PT Gelora Bangun Bersama Abadi*
Lain-lain (Dibawah Rp3 Miliar)	177.531.610.547	657.535.512.674	*Others (Below Rp3 Billion)*
Jumlah Pemasok	**1.069.464.993.244**	**1.258.435.220.913**	***Total Supplier***
Mandor			***Foreman***
Sarwono	-	1.645.195.000	*Sarwono*
Jumlah Mandor	**-**	**1.645.195.000**	***Total Foreman***
Sub Jumlah	**1.069.464.993.244**	**1.260.080.415.913**	***Sub Total***
Jumlah	**1.112.304.388.177**	**1.460.914.657.301**	***Total***

Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Supplier payable represents payables to suppliers of material procurement related to project activities.

Utang kepada mandor merupakan utang upah mandor sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Payables to foreman represents payable of foreman wages in related with project activities.

23. UANG MUKA PEMBERI KERJA

23. ADVANCES FROM PROJECT OWNER

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT PPRO Sampurna Jaya	1.339.757.122	1.339.757.122	*PT PPRO Sampurna Jaya*
LMA Konsorsium	-	67.500.000.000	*LMA Konsorsium*
Lain-lain (Dibawah Rp1 Miliar)	231.534.244	231.534.244	*Others (Below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**1.571.291.366**	**69.071.291.366**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Surya Dhoho Investama	15.418.000.213	-	*PT Surya Dhoho Investama*
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.960.499.395	5.960.499.395	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
PT Cipta Kridatama	3.397.867.938	3.397.867.938	*PT Cipta Kridatama*
PT Pulo Mas Jaya	2.462.951.892	-	*PT Pulo Mas Jaya*
PT Indah Kiat Pulp & Paper	2.271.077.107	11.227.977.473	*PT Indah Kiat Pulp & Paper*
PT Total Persada Indonesia	2.075.393.032	1.891.732.794	*PT Total Persada Indonesia*
PT Takenaka Indonesia	1.868.152.876	1.868.152.876	*PT Takenaka Indonesia*
PT Total Bangun Persada	1.595.389.956	2.481.126.788	*PT Total Bangun Persada*
PT Hoffmen International	1.230.653.164	1.230.653.164	*PT Hoffmen International*
Lain-lain (Dibawah Rp1 Miliar)	3.922.698.581	61.495.595.041	*Others (Below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**40.202.684.154**	**89.553.605.469**	***Sub Total***
Jumlah	**41.773.975.520**	**158.624.896.835**	***Total***

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja yang secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

Advances from project owners represents advances received from customers and will be proportionately compensanted to billings in accordance with physical progress of the projects.

24. UTANG LAIN-LAIN / *24. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Jangka pendek			***Short-term***
Pihak berelasi			***Related parties***
Utang dividen	85.156.343.401	135.981.168.401	*Dividend payable*
KSO PPRE - Yala Persada	15.000.000.000	-	*KSO PPRE - Yala Persada*
Lain-lain (Dibawah Rp1 Miliar)	110.500.837	17.156.414	*Others (Below Rp1 Billion)*
Sub Jumlah	**100.266.844.238**	**135.998.324.815**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
Koperasi saham	1.609.470.696	1.767.867.022	*Shares union*
Asuransi	935.803.418	912.105.804	*Insurance*
Sub Jumlah	**2.545.274.114**	**2.679.972.826**	***Sub Total***
Jumlah	**102.812.118.352**	**138.678.297.641**	***Total***
Jangka panjang			***Long term***
Pihak berelasi			***Related party***
PT PP (Persero) Tbk	295.065.713.630	126.810.073.741	*PT PP (Persero) Tbk*
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(168.067.998.063)	(52.449.999.996)	*Current maturity*
Jumlah - bersih	**126.997.715.567**	**74.360.073.745**	***Total - net***

Utang dividen merupakan dividen bagian PT PP (Persero) Tbk dan YKKPP yang belum dibayarkan oleh Perusahaan atas laba tahun 2018 sampai dengan 2020.

Dividend payable is a share of dividends PT PP (Persero) Tbk and YKKPP which have not been paid by the Company for profits from 2018 to 2020.

Utang kepada PT PP (Persero) Tbk merupakan pinjaman dana untuk keperluan modal kerja Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 5667/EXT/PP/DFH/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan telah diperpanjang dengan Pakta Integritas No. 080/SK/DIR/PPRE/X/2021 dengan jangka waktu pinjaman hingga 15 Oktober 2023 dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, perpanjangan perjanjian pinjaman tersebut masih dalam proses.

Payables to PT PP (Persero) Tbk represents loan funds for the Company's working capital purposes in accordance with the Borrowing and Loan Agreement No. 5667/EXT/PP/DFH/2018 dated December 14, 2018 and has been extended by Integrity Pact No. 080/SK/DIR/PPRE/X/2021 with a loan term until October 15, 2023 and bears interest at 8% per year. Until the issuance of the financial report, the renewal of loan agreement still on process.

25. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP / *25. PROPERTY AND EQUIPMENT PURCHASE PAYABLES*

Merupakan utang atas pembelian aset tetap berupa *dump truck* kepada PT Lancarjaya Nusantara Enjiniring pada 31 Desember 2023 sebesar Rp78.117.117.117.

Represents a payables for property and equipment purchases in form of dump trucks to PT Lancarjaya Nusantara Enjiniring as at December 31, 2023 amounted to Rp78,117,117,117.

(Lanjutan/*Continued*)

26. LIABILITAS SEWA / *26. LEASE LIABILITIES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	85.200.734.289	106.250.030.516	*PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia*
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	63.578.798.532	42.521.772.928	*PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
PT Komatsu Astra Finance	42.793.213.450	22.489.716.000	*PT Komatsu Astra Finance*
PT Mandiri Tunas Finance	36.572.624.306	32.654.599.363	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT SMFL Leasing Indonesia	35.895.192.892	59.134.455.823	*PT SMFL Leasing Indonesia*
PT Surya Artha Nusantara Finance	26.514.545.652	39.106.725.672	*PT Surya Artha Nusantara Finance*
PT Bumiputera BOT Finance	19.445.617.663	-	*PT Bumiputera BOT Finance*
PT ORIX Indonesia Finance	18.925.024.757	27.661.652.206	*PT ORIX Indonesia Finance*
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	16.657.271.330	38.742.152.856	*PT Mitsui Leasing Capital Indonesia*
PT Astra Credit Company	4.171.572.892	6.694.854.525	*PT Astra Credit Company*
PT Chandra Shakti Utama Leasing	1.000.682.868	-	*PT Chandra Shakti Utama Leasing*
PT Maybank Indonesia Finance	554.597.398	1.533.624.708	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT Takari Kokoh Sejahtera	13.468.409	11.147.353.038	*PT Takari Kokoh Sejahtera*
PT BCA Finance	-	495.865.725	*PT BCA Finance*
Jumlah	**351.323.344.438**	**388.432.803.360**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(188.085.341.586)	(150.802.277.038)	*Current maturity*
Jumlah - bersih	**163.238.002.852**	**237.630.526.322**	***Total - net***

Pembayaran minimum sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa berdasarkan perjanjian sewa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The minimum lease payments and present value of minimum lease payments based on the lease agreements as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	Pembayaran minimum sewa/ *Minimum lease payments*		Nilai kini pembayaran minimum sewa/ *Present value of minimum lease payment*		
	2023 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2022 Rp	
Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo:					*Details of lease liabilities by due date:*
Tidak lebih dari satu tahun	225.306.984.068	184.479.463.272	188.085.341.586	150.802.277.038	*Not more than one year*
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	191.130.663.172	240.234.605.760	163.238.002.852	237.630.526.322	*More than one year and less than five years*
Lebih dari lima tahun	-	-	-	-	*More than five years*
	416.437.647.240	424.714.069.032	351.323.344.438	388.432.803.360	
Dikurangi:					***Less:***
Biaya keuangan masa depan	(65.114.302.802)	(36.281.265.672)	-	-	*Future finance costs*
Nilai kini pembayaran minimum sewa	351.323.344.438	388.432.803.360	351.323.344.438	388.432.803.360	*Present value of minimum lease payments*
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			(188.085.341.586)	(150.802.277.038)	*Current maturity*
Liabilitas sewa jangka panjang - bersih			**163.238.002.852**	**237.630.526.322**	***Long term lease liabilities - net***

Grup menandatangani perjanjian pembiayaan untuk kendaraan dan alat berat dengan tingkat suku bunga tetap.

The Group signed financing agreements for vehicles and heavy equipment with fixed interest rates.

Kendaraan, alat berat tersebut dipakai sebagai jaminan untuk liabilitas sewa pembiayaan yang bersangkutan. Grup tidak memiliki batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

These vehicles and heavy equipments are pledged as collateral for the underlying finance lease liabilities. The Group have no covenants under these loan facility agreements.

Penyewa/ *Lessor*	Entitas/ *Entities*	Nilai pembiayaan/ *Financing amount*	Nomor kontrak/ *Contract number*	Alat/ *Equipment*	Jangka waktu/ *Period of time* Bulan/*Months*	Suku bunga/ *Interest rate*
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia	Perusahaan/ *The Company*	32.300.740.000	PPK17101246-004	2 unit Cement Deep Mixing Equipment	48	9,3%
		1.357.200.000	PPK20111540-001	9 unit Genset Perkins 30 KVA 1103A-33G	48	9,3%
		30.580.000.000	PPK20111541-001	4 unit Bulldozer Komatsu tipe D85E-SS-2, 6 unit Excavator Komatsu tipe PC 300SE-8MO	48	9,3%
		14.840.000.000	PPK20111541-002	10 unit KOMATSU Excavator; Type: PC200-M1	48	9,3%
		4.945.000.000	PPK20111541-003	5 unit SAKAI Vibratory; Type: SV526D	48	9,3%
		14.780.361.706	PPK20111541-004	13 unit HINO; Type: FM260JD + Karoseri	48	9,3%
		1.802.000.000	PPK20111541-006	2 unit LIUGONG Wheel Loader; Type: CLG855H	48	9,3%
		14.515.000.000	PPK21041570-001	4 unit KOMATSU Excavator Type; PC300SE-8M0, 1 unit KOMATSU Bulldozer Type; D85ESS-2	48	9,3%
		10.779.000.000	PPK21041570-002	1 unit DETEDE Stone Crusher Type; Cap 150 TPH	48	9,3%
		5.718.000.000	PPK21041570-003	2 unit KOMATSU Excavator; Type; PC300SE-8M0	48	9,3%
		4.398.000.000	PPK21041570-004	2 unit KOMATSU Motor Grader; Type GD535-5	48	9,3%
		28.698.772.511	PPK21041570-005	25 unit HINO; Type: FM260JD + Karoseri	48	9,3%
		16.071.312.606	PPK21041570-006	14 unit HINO; Type: FM260JD + Karoseri	48	9,3%
		11.544.000.000	PPK21041570-009	2 unit KOMATSU Excavator 50 Ton; Type: PC500LC-8R	48	9,5%
		3.108.000.000	PPK21041570-010	1 unit KOMATSU Excavator 30 Ton; Type: PC300SE-8M0	48	9,5%
		3.663.000.000	PPK21041570-011	2 unit KOMATSU Excavator 20 Ton; Type: PC210-10M0	48	9,5%
		13.775.100.000	PPK21041570-012	10 unit SHACMAN F3000 Dump Truck 40 Ton Including Roll Over Protection	48	9,5%
	LMA	33.557.700.000	PPK17101246-000	Alat berat	48	10%
PT Takari Kokoh Sejahtera	Perusahaan/ *The Company*	42.527.000.000	PPRE000000143-001	43 unit HINO 260 JD + Dump	48	9,3%
PT Astra Credit Company	Perusahaan/ *The Company*	924.555.273	01100103005257884	1 unit Toyota All New Alphard 2.5 G A/T	48	11,57%
		443.473.504	01100103005235163	1 unit Toyota All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT TRI	48	9,68%
		458.000.000	01100103005295900	1 unit Toyota All New Fortuner 4X2	48	9,7%
		357.110.000	01000103005310319	1 unit Toyota All New Hilux DC 2.4 G (4X4)	48	11,6%
		357.110.000	01000103005310378	1 unit Toyota All New Hilux DC 2.4 G (4X4)	48	11,6%
		357.110.000	01000103005310408	1 unit Toyota All New Hilux DC 2.4 G (4X4)	48	11,6%
		357.110.000	01000103005310459	1 unit Toyota All New Hilux DC 2.4 G (4X4)	48	11,6%
		1.127.358.200	01100103005343020	1 unit Lexus RX 300 F Sport	48	8,3%
		1.127.358.200	01100103005343080	1 unit Lexus RX 300 F Sport	48	8,3%
		1.127.358.200	01100103005343136	1 unit Lexus RX 300 F Sport	48	8,3%
		1.127.358.200	01100103005343152	1 unit Lexus RX 300 F Sport	48	8,3%
		1.127.358.200	01100103005343071	1 unit Lexus RX 300 F Sport	48	8,3%
		1.127.358.200	01100103005343128	1 unit Lexus RX 300 F Sport	48	8,3%
	LMA	10.000.000.000	01100910001810680	10 units Hino Dump Truck FM 260 JD	36	9,7%
PT Mandiri Tunas Finances	Perusahaan/ *The Company*	229.960.000	9432001793	1 unit Toyota Innova 2.4 G A/T Diesel	48	8,83%
		358.469.000	9432103906	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		358.469.000	9432103907	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		358.469.000	9432103908	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		358.469.000	9432103909	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		358.469.000	9432105199	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		358.469.000	9432105200	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		358.469.000	9432105599	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		367.520.000	9432105600	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		423.858.000	9432106488	1 unit Toyota Fortuner 2,4 VRZ TRD AT Diesel	48	8,8%
		464.560.000	9432107147	1 unit Pajero Sport Dakar 4X2	48	8,8%
		368.800.000	9432108369	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		368.800.000	9432108370	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		367.520.000	9432108372	1 unit Hilux DC 2,4 G M/T 4X4	48	8,8%
		1.169.600.000	9432108876	1 unit Lexus RX 300 F Sport	48	8,8%
		368.800.000	9432108371	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,8%
		472.560.000	9432200107	1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2	48	8,8%
		353.200.000	9432200230	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,8%
		353.200.000	9432200231	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,8%
		317.280.000	9432200339	1 unit Toyota Innova All New 2.4 G A/T Diesel	48	8,8%
		317.280.000	9432200340	1 unit Toyota Innova All New 2.4 G A/T Diesel	48	8,8%
		317.280.000	9432200341	1 unit Toyota Innova All New 2.4 G A/T Diesel	48	8,8%
		317.280.000	9432201091	1 unit Toyota Innova All New 2.4 G A/T Diesel	48	8,8%
		355.640.000	9432201472	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,8%
		355.640.000	9432201473	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,8%
		355.640.000	9432201709	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,8%
		428.640.000	9432201092	1 unit Mitsubishi Pajero Exceed 4X2 AT	48	8,8%
		482.560.000	9432203765	1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 AT	48	8,8%
		482.560.000	9432203766	1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 AT	48	8,8%
		326.165.000	9432203767	1 unit Toyota Innova All New 2.4 G A/T Diesel	48	8,84%
		334.400.000	9432203769	1 unit Toyota Innova All New 2.4 G A/T Diesel	48	8,8%
		425.198.000	9432203985	1 unit Mitsubishi Pajero Exceed 4X2 AT	48	8,37%

(Lanjutan/*Continued*)

Penyewa/ *Lessor*	Entitas/ *Entities*	Nilai pembiayaan/ *Financing amount*	Nomor kontrak/ *Contract number*	Alat/ *Equipment*	Jangka waktu/ *Period of time* Bulan/*Months*	Suku bunga/ *Interest rate*
		425.198.000	9432203986	1 unit Mitsubishi Pajero Exceed 4X2 AT	48	8,37%
		359.482.000	9432204237	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,38%
		359.482.000	9432204238	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,38%
		359.482.000	9432204239	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,38%
		334.400.000	9432204429	1 unit Toyota Innova All New 2.4 G A/T Diesel	48	8,8%
		361.278.000	9432205345	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 G M/T 4X4	48	8,37%
		783.840.000	9432204725	1 unit Toyota Innova 2.4 G AT DIESEL	48	4,3%
		783.840.000	9432204726	1 unit Toyota Innova 2.4 G AT DIESEL	48	4,3%
		462.900.000	9432205119	1 unit Toyota Hilux DC 2.4 MT	48	4,3%
		2.424.672.000	9432205746	1 unit Toyota Hilux E MT DC 4x4	48	4,3%
		2.424.672.000	9432205747	1 unit Toyota Hilux E MT DC 4x4	48	4,3%
		2.424.672.000	9432205748	1 unit Toyota Hilux E MT DC 4x4	48	4,3%
		2.424.672.000	9432205749	1 unit Toyota Hilux E MT DC 4x4	48	4,3%
		2.424.672.000	9432205750	1 unit Toyota Hilux E MT DC 4x4	48	4,3%
		2.424.672.000	9432205751	1 unit Toyota Hilux E MT DC 4x4	48	4,3%
		1.103.136.000	9432301541	1 unit Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2	48	5,73%
		1.103.136.000	9432301542	1 unit Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2	48	5,73%
		1.217.952.000	9432301543	1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2	48	5,73%
		1.217.952.000	9432301544	1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2	48	5,73%
	LMA	794.822.044	9432201904	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 160C	36	10%
		794.822.044	9432201905	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 160C	36	10%
		794.822.044	9432201906	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 160C	36	10%
		1.469.315.914	9432203834	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 230	36	10%
		1.469.315.914	9432203835	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 230	36	10%
		1.469.315.914	9432203836	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 230	36	10%
		1.266.782.079	9432205138	1 unit Liugong Roller 6620E	36	8,25%
		1.266.782.079	9432205139	1 unit Liugong Roller 6620E	36	8,25%
		974.447.754	9432205140	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 160C	36	8,25%
		974.447.754	9432205141	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 160C	36	8,25%
		974.447.754	9432205142	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 160C	36	8,25%
		1.656.561.181	9432205143	1 unit Liugong Motor Greader 4215D	36	8,25%
		999.000.000	9432205935	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 160C	36	8,25%
		999.000.000	9432205936	1 unit Liugong Bulldozer CLG B 160C	36	8,25%
		1.300.000.000	9432301203	1 Unit DONGFENG DUMP TRUCK K24Y	36	8,25%
		1.300.000.000	9432301204	1 Unit DONGFENG DUMP TRUCK K24Y	36	8,25%
		1.300.000.000	9432301205	1 Unit DONGFENG DUMP TRUCK K24Y	36	8,25%
		1.300.000.000	9432301206	1 Unit DONGFENG DUMP TRUCK K24Y	36	8,25%
		1.300.000.000	9432301207	1 Unit DONGFENG DUMP TRUCK K24Y	36	8,25%
PT Surya Artha Nusantara Finance	Perusahaan/ *The Company*	6.682.500.000	32107000187	5 unit KOMATSU Excavator pc200-8M1	48	9,3%
		11.781.000.000	32107000195	2 unit KOMATSU Bulldozer Type D85ESS-2 1 unit KOMATSU Bulldozer Type D65E-12 1 unit KOMATSU Excavator Type pc300-8M0	48	9,3%
		28.151.000.000	32110002089	5 unit KOMATSU Excavator PC300SE-8 3 unit KOMATSU Bulldozer D85E-SS-2 1 unit KOMATSU Bulldozer D65E-12	48	9,3%
		5.718.000.000	32203001691	2 unit KOMATSU Hydraulic Excavator Type: PC 300SE-8M0	48	9,30%
PT SMFL Leasing Indonesia	Perusahaan/ *The Company*	8.035.656.303	FL2100269	7 unit Dump Truck Hino FM260JD + Karoseri	48	9,1%
		9.183.607.203	FL2100269	8 unit Dump Truck Hino FM260JD + Karoseri	48	9,1%
		989.000.000	FL2100280	1 unit Sakai Vibrating Roller Type SV526D	48	9,1%
		6.887.705.403	FL2100293	6 unit Dump Truck Hino FM260JD + Karoseri	48	9,1%
		4.452.000.000	FL2100299	3 unit Komatsu Excavator PC200	48	9,1%
		5.055.000.000	FL2200057	5 unit SAKAI Vibrating Roller Type: SV526D	48	9,25%
		8.557.000.000	FL2200133	3 unit KOMATSU Excavator Type: PC300	48	9,25%
		15.723.000.000	FL2200134	4 unit KOMATSU Excavator PC210, 1 unit KOMATSU Excavator PC300, 1 unit KOMATSU Bulldozer D85ESS2, 1 unit KOMATSU Motor Grader GD535-5	48	9,25%
		5.718.000.000	FL2200135	2 unit KOMATSU Excavator PC300	48	9,25%
	LMA	19.592.100.000	FL2000269	8 unit Kobelco Excavator SK200 5 unit Kobelco Excavator SK330	36	9,75%
PT Maybank Indonesia Finance	LMA	257.184.000	50101210219	1 unit Honda HRV.15 E CVT SE	24	6,53%
		257.184.000	50101210220	1 unit Honda HRV.15 E CVT SE	24	6,53%
		439.512.000	50501221155	1 unit Toyota All New Hilux D Cab V 24 AT	24	6,12%
		775.104.000	50501221763	1 unit Hyundai Palisade D 2200 AT Signature	24	6,12%
		775.104.000	50501221764	1 unit Hyundai Palisade D 2200 AT Signature	24	6,12%
		775.104.000	50501221929	1 unit Hyundai Palisade D 2200 AT Signature	24	6,12%
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	LMA	12.430.000.000	912149004	10 unit Kobelco Hydraulic Excavator SK 200-10	40	8,7%
		6.215.000.000	912149008	5 unit Kobelco Hydraulic Excavator SK 200-10	40	8,7%
		12.430.000.000	912149011	10 unit KOBELCO Hydraulic Excavator SK 200	40	8,7%
		6.215.000.000	912249001	5 unit KOBELCO Hydraulic Excavator SK 200	40	8,7%
		13.170.150.000	912249020	10 unit KOBELCO Hydraulic Excavator SK 200	40	8,7%
PT BCA Finance	LMA	353.920.800	9562022339-PK-020	1 unit Mitsubishi Triton Double Cabin HDX 4x4	24	6%
		353.920.800	9562022339-PK-021	1 unit Mitsubishi Triton Double Cabin HDX 4x4	24	6%
		353.920.800	9562022339-PK-022	1 unit Mitsubishi Triton Double Cabin HDX 4x4	24	6%
		353.920.800	9562022339-PK-023	1 unit Mitsubishi Triton Double Cabin HDX 4x4	24	6%
		353.920.800	9562022339-PK-024	1 unit Mitsubishi Triton Double Cabin HDX 4x4	24	6%

(Lanjutan/*Continued*)

Penyewa/ *Lessor*	Entitas/ *Entities*	Nilai pembiayaan/ *Financing amount*	Nomor kontrak/ *Contract number*	Alat/ *Equipment*	Jangka waktu/ *Period of time* Bulan/*Months*	Suku bunga/ *Interest rate*
PT Komatsu Astra Finance	Perusahaan/ *The Company*	7.677.542.000	221141005	1 unit KOMATSU Grader Type: GD 535-5, 3 unit KOMATSU Excavator Type: PC 210-10M0	48	9,30%
		18.119.542.000	221141017	2 unit KOMATSU Grader Type: GD 535-5, 2 unit KOMATSU Buildozer Type: D 85E-SS-2, 3 unit KOMATSU Excavator Type: PC 300SE-8M0	48	9,30%
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Perusahaan/ *The Company*	17.481.740.007	00054-012	15 unit HINO; Type: FM260JD + Karoseri	48	9,15%
		28.582.490.000	00054-013	2 unit KOMATSU Excavator Type: PC 300SE, 2 unit Motor Grader GD 535-5, 2 unit KOMATSU Excavator PC210, 4 unit KOMATSU Bulldozer Type: DS5ESS-2	48	9,15%
	LMA	8.963.250.000	00523-003	2 Unit Excavator kobelco hydraulic type 330 dan 3 Unit Excavator kobelco hydraulic type 200	36	9,43%
		9.767.990.000	00523-002	6 Unit Excavator kobelco hydraulic type 330	36	9,43%
		9.518.240.000	00523-004	7 Unit Excavator kobelco hydraulic type 200	36	9,43%
		9.518.250.000	00523-005	7 Unit Excavator kobelco hydraulic type 200	36	9,43%
PT ORIX Indonesia Finance	Perusahaan/ *The Company*	13.721.500.000	L22J00713A	5 unit VOLVO Dump Truck Type: FMX4408X4R	48	4,42%
		17.480.750.150	L22J00714A	15 unit HINO; Type: FM260JD + Karoseri	48	4,42%
PT Chandra Sakti Utama Leasing	Perusahaan/ *The Company*	3.000.000.000	165/CSUL/PMK-MU/X/2023	Alat Berat	8	*N/a*
PT Bumiputera - Bot Finance	LMA	13.898.433.600	LJKT-202307-0028	4 Unit Liugong Bulldozer dan 6 Unit Liugong Vibrating	36	10,5%
		10.981.983.600	LJKT-202307-0032	5 Unit Liugong Bulldozer dan 3 Unit Liugong Vibrating	36	10,5%

27. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

27. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Grup menyelenggarakan program imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

The Grup implements a post-employment benefits program based on Law No. 11 of 2020 regarding Cipta Kerja and Government Regulation No. 35/2021.

Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 494 dan 491 karyawan.

The total number of employees eligible for the benefits until December 31, 2023 and 2022 amounted to 494 and 491 employees, respectively.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Enny Diah Awal dengan Laporan No. 23018A/PPPK/AP/01/2024 tanggal 9 Januari 2024. Asumsi utama yang digunakan dalam penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, KKA Enny Diah Awal with Report No. 23018A/PPPK/AP/01/2024 dated January 9, 2024. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2023	2022	
Tingkat diskonto	6,90%	7,40%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	9,00%	9,00%	*Salary increment rate*
Tingkat mortalitas	TMI IV	TMI IV	*Mortality rate*

Beban imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in consolidated comprehensive income in respect of the defined benefit plans are as follows:

	2023	2022	
Biaya jasa:			*Service cost:*
Biaya jasa kini	2.325.174.378	3.341.823.431	*Current service cost*
Biaya jasa lalu dan (keuntungan) kerugian atas penyelesaian	(478.977.398)	(1.787.826.773)	*Past service cost and (gain) loss from settlements*

(Lanjutan/*Continued*)

	2023	2022	
Biaya bunga	1.062.737.788	1.142.335.448	*Interest cost*
Dampak IFRIC	-	(257.539.551)	*Impact of IFRIC*
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	2.908.934.768	2.438.792.555	*Components of defined benefit costs recognized in profit or loss*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto			*Remeasurement on the net defined benefit liability*
Keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari:			*Actuarial gains and losses arising from:*
Perubahan asumsi demografi	-	-	*Changes in demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	196.911.880	68.376.476	*Changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman	24.609.502	242.598.685	*Experience adjustment*
Dampak IFRIC	-	(1.341.289.095)	*Impact of IFRIC*
Penyesuaian untuk aset imbalan pasti yang dibatasi	-	-	*Adjustments for restrictions on the defined benefit asset*
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	221.521.382	(1.030.313.934)	*Component of defined benefit costs recognized in other comprehensive income*
Jumlah	**3.130.456.150**	**1.408.478.621**	***Total***

Liabilitas Grup sehubungan dengan program imbalan pasti yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The Group's liabilities in relation to the defined benefits plan included in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai kini kewajiban	17.207.560.832	14.755.488.637	*Present value of funded liabilities*
Nilai wajar aset program	-	-	*Fair value of plan assets*
Status pendanaan	17.207.560.832	14.755.488.637	*Funded status*
Batas atas aset yang diakui	-	-	*Restrictions on assets recognized*
Liabilitas bersih yang timbul dari kewajiban imbalan pasti	**17.207.560.832**	**14.755.488.637**	***Net liabilities arising from defined benefit liabilities***

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of the defined benefits liabilities are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Kewajiban imbalan pasti - awal	14.755.488.637	15.430.255.873	*Defined benefit liabilities - beginning*
Biaya jasa kini	2.325.174.378	3.378.240.098	*Current service costs*
Biaya bunga	1.062.737.788	1.142.335.448	*Interest costs*
Pengukuran kembali (keuntungan)/kerugian:			*Remeasurement (gains)/losses:*
Perubahan asumsi demografi	-	-	*Changes in demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	196.911.880	68.376.476	*Changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman	24.609.502	242.598.685	*Experience adjustment*
Dampak IFRIC	-	(1.598.828.646)	*Impact of IFRIC*
Kontribusi dari peserta program	-	-	*Contributions from plan participants*
Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen	(478.977.398)	(1.779.276.773)	*Past service cost, including losses (gain) on curtailments*
Pembayaran manfaat	(678.383.955)	(2.128.212.524)	*Benefits paid*
Kewajiban imbalan pasti - akhir	**17.207.560.832**	**14.755.488.637**	***Defined benefits liabilities - ending***

Program imbalan pasca kerja memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Post-employment benefits program expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan real estat. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estate untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; Namun, sebagian akan di*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko harapan hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan tingkat upah yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp16.160.496.397 (meningkat sebesar Rp18.073.668.734).
- Jika tingkat upah lebih tinggi (lebih rendah) 1% kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp18.204.036.083 (berkurang sebesar Rp16.043.088.589).

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and salary rate. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- *If the discount rate was 1% higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp16,160,496,397 (increase by Rp18,073,668,734).*
- *If the wage rate is higher (lower) 1% the defined benefit obligation will increase by Rp18,204,036,083 (decrease by Rp16.043.088.589).*

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the post-employment benefits liabilities as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the post-employment benefits liabilities has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the post-employment benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

28. UTANG BANK - JANGKA PANJANG / *28. LONG TERM - BANK LOANS*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi			***Related party***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	55.819.713.909	183.967.016.623	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Sub Jumlah	**55.819.713.909**	**183.967.016.623**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Central Asia Tbk	87.976.075.752	78.276.075.752	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank DKI	70.000.000.000	-	*PT Bank DKI*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	62.629.370.284	87.897.118.392	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Permata Tbk	27.898.616.000	45.963.278.300	*PT Bank Permata Tbk*
Sub Jumlah	**248.504.062.036**	**212.136.472.444**	***Sub Total***
Jumlah	**304.323.775.945**	**396.103.489.067**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			*Current maturity*
Pihak berelasi			***Related party***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	55.819.713.909	160.443.302.715	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Sub Jumlah	**55.819.713.909**	**160.443.302.715**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25.267.748.112	25.267.748.112	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	87.976.075.752	78.276.075.752	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	18.064.661.800	18.064.661.800	*PT Bank Permata Tbk*
Sub Jumlah	**131.308.485.664**	**121.608.485.664**	***Sub Total***
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	**187.128.199.573**	**282.051.788.379**	***Current maturity***
Bagian jangka panjang			***Long-term portion***
Pihak berelasi	-	23.523.713.908	*Related party*
Pihak ketiga	117.195.576.372	90.527.986.780	*Third parties*
Jumlah	**117.195.576.372**	**114.051.700.688**	***Total***

Kreditor/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Type of facilities*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*	Tanggal perjanjian/ *Agreement Date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
Perusahaan/ *Company*							
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	*Line Facility*	1.740.095.000.000	26 Mei/ *May 26,* 2016	20 Desember/ *December 20,* 2024	9,25%	55.819.713.909	183.967.016.623
PT Bank CIMB Niaga Tbk	*Financing Facility*	150.000.000.000	29 September/ *September 29,* 2017	20 Oktober/ *October 20,* 2024	8,25%	62.629.370.284	87.897.118.392
PT Bank Permata Tbk	*Term Loan*	350.000.000.000	6 Maret/ *March 6,* 2020	4 Agustus *August 4,* 2025	9,00%	27.898.616.000	45.963.278.300
PT Bank DKI	*Trust Receipt Financing*	200.000.000.000	28 November/ *November 28,* 2023	30 Juni/ *June 30,* 2025	9,25%	70.000.000.000	-

(Lanjutan/*Continued*)

Kreditor/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Type of facilities*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*	Tanggal perjanjian/ *Agreement Date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
LMA							
PT Bank Central Asia Tbk	*Term loan Revolving 2*	88.000.000.000	6 September/ *September 6,* 2019	24 Juni/ *June 24,* 2024	8,75%	87.976.075.752	78.276.075.752
					Jumlah/ *Total*	**304.323.775.945**	**396.103.489.067**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Perusahaan

Perusahaan memperoleh *Line Facility* sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 26 Juni 2019 dan telah diperpanjang dengan Akta Addendum III Perjanjian Line Facility berdasarkan prinsip musyarakah, wakalah dan kafalah No. 27 tanggal 29 September 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha yang ada maupun yang akan ada atas proyek yang dibiayai, diikat fidusia sebesar Rp500.000.000.000 sesuai dengan Addendum I Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 29 September 2021 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00589993.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 3 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

The Company

The Company obtained a Line Facility in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 07 dated June 26, 2019 and has been extended by Deed Addendum III to the Line Facility Agreement based on the principles of musyarakah, wakalah and kafalah No. 27 dated September 29, 2021.

This loan is secured by existing and future trade receivables for the project being financed, tied with a fiduciary amount of Rp500,000,000,000 in accordance with Addendum I of the Fiduciary Guarantee Deed No. 28 dated September 29, 2021 by Notary Fathiah Helmi, S.H., and Certificate of Change of Fiduciary Guarantee No. W10.00589993.AH.05.02 TAHUN 2021 dated October 27, 2021.

In connection with the loan mentioned, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum of 3 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*

PT Bank Permata Tbk

Perusahaan

Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja sesuai Akta Perjanjian pemberian fasilitas perbankan (ketentuan khusus) No. 145 tanggal 31 Oktober 2019, dengan nilai fasilitas pinjaman maksimal sebesar Rp350.000.000.000.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas tagihan/piutang yang berasal dari proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank, baik yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada, dengan nilai minimum sebesar 125% dengan nilai penjaminan yang akan ditentukan kemudian berdasarkan Akta Jaminan Fidusia.

PT Bank Permata Tbk

The Company

The Company obtained a Working Capital Credit Facility in accordance with the Deed Of Banking Facility Agreement (special provisions) No. 145 dated October 31, 2019 with a loan facility maximum of Rp350,000,000,000.

This loan is collateralized by fiduciary on claims/receivables originating from projects financed by the Bank, both existing and future ones, with a minimum value of 125% with the value of the guarantee to be determined later based on the Fiduciary Guarantee Deed.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1 kali.
- *Ratio Interest Bearing Debt* terhadap jumlah ekuitas maksimum sebesar 2 kali.

In connection with the loan, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio to total equity maximum of 2 times.*

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perusahaan

Berdasarkan perubahan terakhir atas Perjanjian Kredit No. 119/CB/JKT/2017 tanggal 29 September 2017 dengan surat No. 303/AMD/CB/JKT/2023 tanggal 30 November 2023, Perusahaan menerima Fasilitas Pembiayaan Investasi (PI) untuk membiayai belanja modal peralatan berat dengan plafond sebesar Rp150.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 5 Mei 2026. Fee administrasi sebesar 0,75% dari plafon pada saat penandatanganan dan selanjutnya sebesar 0,50% flat dari limit plafon.

Pinjaman ini dijamin dengan gadai agunan tunai (*cash collateral*) deposito dengan nilai penjaminan setara 15% dari plafond Fasilitas PI dengan ketentuan gadai agunan tunai ini dapat diikat dengan gadai agunan tunai per transaksi atau sebelum dari setiap penarikan dengan nilai penjaminan per penarikan setara 15% dari nilai penarikan Fasilitas PI.

Dalam hal Perusahaan tidak melakukan pembayaran utang, maka Bank akan menarik atau mengambil kepemilikan 100% atas peralatan berat yang menjadi objek pembiayaan untuk dilakukan penjualan.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Debt to Ebitda Ratio* maksimum sebesar 4 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* lebih besar atau sama dengan 1,1 kali.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

The Company

Based on the latest amendment to Credit Agreement No. 119/CB/JKT/2017 dated September 29, 2017 with letter No. 303/AMD/CB/JKT/2023 dated November 30, 2023, the Company received an Investment Financing Facility (PI) to finance heavy equipment capital expenditure with a limit of Rp150,000,000,000 with term loan up to May 5, 2026. The administration fee is 0.75% of the plafond at the time of signing and then a flat 0.50% of the plafond limit.

This loan is guaranteed by a cash collateral guaranteed by (cash collateral) deposit with a guarantee value equivalent to 15% of the PI Facility limit with the provisions that this cash collateral guarantee can be tied to a cash collateral guarantee per transaction or before each withdrawal with a guarantee value per withdrawal equal to 15% of PI Facility withdrawal value.

In the event that the Company does not make loan payments, the Bank will withdraw or take over 100% ownership of the heavy equipment that is the object of financing for sale.

In connection with the loan, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Debt to Ebitda Ratio maximum of 4 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio is greater than or equal to 1.1 times.*

PT Bank DKI

Perusahaan

Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Desember 2021 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 15 November 2023.

PT Bank DKI

The Company

The Company obtained a Working Capital Credit Facility in accordance with the Deed of Credit Agreement No. 24 dated December 22, 2021 with the latest amendment based on the Deed of Addendum to the Credit Agreement No. 11 dated November 15, 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan:

a. Tagihan dan/atau potensi tagihan proyek yang dijaminkan kepada PT Bank DKI akan dilakukan pengikatan nilai penjaminan sebesar 125% dari limit fasilitas kredit yang digunakan atau sebesar Rp87.500.000.000.
b. Tagihan dan potensi tagihan proyek yang dijaminkan kepada PT Bank DKI akan dilakukan review secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali

Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan menjaga *financial covenant* sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 4,5 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* minimum sebesar 100%.

The loan is guaranteed by:

a. Invoice and potential project invoice loaned to PT Bank DKI will be loaned binding with loan of 125% of the credit facility limit or Rp87,500,000,000.

b. Invoice and potential project invoice guaranteed to PT Bank DKI will be reviewed perodic every 3 (three) months.

In connection with the loan above, the Company is required to maintain the following financial covenants:

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Debt to Equity Ratio maximum 4.5 times.*
- *Debt Service Coverage Ratio minimum of 100%.*

PT Bank Central Asia Tbk

LMA

Pinjaman ini dijaminkan dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka pendek (Catatan 21).

Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

PT Bank Central Asia Tbk

LMA

These loans are collateralized by the same collateral as short-term loans (Note 21).

Compliance with loan covenants

As at December 31, 2023 and 2022, the Grup has complied with all of the covenants of the above mentioned long-term loans as stipulated in the respective loan agreements.

29. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2023 rincian obligasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

29. BONDS PAYABLE

As at December 31, 2023, the bond details of the Company are as follows:

	Suku bunga/ *Interest rate*	Jangka waktu/ *Term*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022
Obligasi berkelanjutan I PP Presisi tahap I tahun 2022 - Seri A	9,50%	3 tahun/ *3 years*	30 Juni/ *June 30,* 2025	102.275.000.000	102.275.000.000
Obligasi berkelanjutan I PP Presisi tahap I tahun 2022 - Seri B	10,50%	5 tahun/ *5 years*	30 Juni/ *June 30,* 2027	100.705.000.000	100.705.000.000
Jumlah				**202.980.000.000**	
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi/ *Unamortized cost*				(729.786.000)	(1.055.182.000)
Utang obligasi jangka panjang/ *Long term bonds payable*				**202.250.214.000**	**201.924.818.000**

Pada tanggal 10 Maret 2023, PT Pefindo telah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan Perusahaan dengan hasil peringkat BBB+.

On March 10, 2023, PT Pefindo conducted a rating of the Company's Sustainable Bond with a result of BBB+.

Wali amanat atas Obligasi Perusahaan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The trustee of the Company's Bonds is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perusahaan terikat dengan beberapa batasan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is bound by some financial ratio restrictions as follows:

- *Current Ratio* minimum sebesar 1 kali.
- *Interest bearing debt to equity ratio* maksimum 3 kali.
- Perbandingan EBITDA dengan beban bunga pinjaman minimum 1,5 kali.

- *Current Ratio minimum of 1 time.*
- *Interest-bearing debt to equity ratio maximum of 3 times.*
- *The ratio of EBITDA to interest bearing debt minimum of 1.5 times.*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi semua persyaratan tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian terkait.

As at December 31, 2023 and 2022, the Grup has complied with all of the covenants of the above mentioned as stipulated in the agreement.

30. MODAL SAHAM

30. SHARE CAPITAL

a. Modal ditempatkan dan disetor

a. Subscribed and paid-up capital

Berdasarkan Akta Keputusan Sirkular Pemegang Saham No. 11 tanggal 17 Juli 2017 oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp2.400.000.000.000 yang terbagi atas 2.400.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

Based on the Deed of Shareholders Circular Decree No. 11 dated July 17, 2017 by Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notary in Jakarta, the Company's authorized capital amounted to Rp2,400,000,000,000 divided into 2,400,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share.

Berdasarkan Akta Notaris No. 27 tertanggal 14 Agustus 2017 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal per saham atas saham Perusahaan dari nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 menjadi nilai nominal per saham sebesar Rp100 dan mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 4.239.330.000 lembar saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Perdana Saham Perusahaan (*Initial Public Offering*) dengan nilai nominal Rp100.

Based on the Notarial Deed No. 27 dated August 14, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the change in the par value per share of the Company's shares from par value per share of Rp1,000,000 to par value per share of Rp100 and issued shares in deposits of 4,239,330,000 new shares which will be offered to the public through Initial Public Offering with par value of Rp100.

Saham Perusahaan ditawarkan perdana kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 November 2017 sejumlah 2.351.221.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-442/D.04/2017 tanggal 16 November 2017 seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sejumlah 10.224.271.000 saham.

The Company's shares of stock were initially offered to the public and listed on the Indonesia Stock Exchange on November 20, 2017 of 2,351,221,000 shares with a par value of Rp100 per share. In accordance with the approval of the Financial Services Authority (OJK) No. S-442/D.04/2017 dated November 16, 2017, over all subscribed and fully paid shares of the Company amounted to 10,224,271,000 shares.

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

(Lanjutan/*Continued*)

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares subscribed and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	76,99%	787.148.000.000	*PT PP (Persero) Tbk*
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	1.570.000	0,01%	157.000.000	*Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan*
Masyarakat	2.243.162.300	23,00%	224.316.230.000	*Public*
Sub Jumlah	**10.116.212.300**	**100,00%**	**1.011.621.230.000**	***Sub Total***
Saham Treasury	108.058.700		10.805.870.000	*Treasury Shares*
Jumlah	**10.224.271.000**		**1.022.427.100.000**	***Total***

b. Tambahan modal disetor

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham yang diterbitkan dalam rangka IPO pada 24 November 2017 dengan hasil yang diterima, setelah dikurangi biaya penerbitan saham sebagai berikut:

b. Additional paid-in capital

This account represents the difference between the total par value of new shares issued in connection with the IPO conducted in November 24, 2017 and the related proceeds, after netting off the share issuance costs are as follows:

	2023	2022	
Agio saham	775.902.930.000	775.902.930.000	*Agio stock*
Beban emisi saham	(26.342.768.462)	(26.342.768.462)	*Share issuance costs*
Jumlah	**749.560.161.538**	**749.560.161.538**	***Total***

c. Dividen

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 40 tanggal 24 Mei 2023 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp100.751.654.542, sebagai berikut:

- Sebesar Rp5.037.582.727 atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib.
- Sisa sebesar Rp95.714.071.815 atau 95% dibukukan sebagai saldo Laba Ditahan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 22 tanggal 20 April 2022 oleh Kristanti Suryani, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk sebesar Rp76.929.163.044, sebagai berikut:

- Sebesar Rp7.692.916.304 atau lebih kurang 10% atau sejumlah Rp0,76 per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada pemegang saham.
- Sebesar Rp3.846.458.152 atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib.
- Sisa sebesar Rp65.389.788.587 atau 75% dibukukan sebagai saldo Laba Ditahan.

c. Dividend

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders as stated in Deed No. 40 dated May 24, 2023 by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, shareholders agree the use of net profit for the 2022 financial year attributable to the owner of the parent entity in the amount of Rp100,751,654,542, are as follows:

- *An amount of Rp5,037,582,727 or more or less 5% is used as Mandatory Reserve.*
- *The remaining Rp95,714,071,815 or 95% is recorded as Retained Earnings balance.*

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders as stated in Deed No. 22 dated April 20, 2022 by Kristanti Suryani, S.H., Notary in Jakarta, shareholders agree the use of net profit for the 2021 financial year attributable to the owner of the parent entity in the amount of Rp76,929,163,044, are as follows:

- *An amount of Rp7,692,916,304 or approximately 10% or a total of Rp0.76 per share distributed as Cash Dividends to shareholders.*
- *An amount of Rp3,846,458,152 or more or less 5% is used as Mandatory Reserve.*
- *The remaining Rp65,389,788,587 or 75% is recorded as Retained Earnings balance.*

d. Saham treasuri

Pada tahun 2020, Perusahaan membeli kembali saham melalui Bursa Efek Indonesia sebesar 108.058.700 lembar saham dengan total nilai perolehan sebesar Rp18.629.958.023 yang dicatat sebagai saham treasuri yang merupakan pengurang ekuitas.

Hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Perusahaan belum melepaskan kembali saham treasuri sehingga tidak terdapat selisih harga perolehan dan harga pelepasan saham treasuri.

d. Treasury shares

In 2020, the Company bought back shares through the Indonesia Stock Exchange amounting to 108,058,700 shares with a total acquisition value of Rp18,629,958,023 which was recorded as treasury shares and reduced equity.

Until the year ended December 31, 2023, the Company has not relinquished its treasury shares, so there is no difference between the acquisition price and the disposal price of the treasury shares.

31. PENDAPATAN

Rincian pendapatan berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

31. REVENUE

Details of revenue by business sectors are as follows:

	2023	2022	
Konstruksi	3.212.761.338.603	3.407.244.735.977	*Construction*
Sewa	107.486.287.112	117.614.392.646	*Rental*
Ready mix	80.617.611.557	110.336.550.059	*Ready mix*
Jumlah	**3.400.865.237.272**	**3.635.195.678.682**	***Total***

Rincian pelanggan dengan pendapatan melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of revenue more than 10% from the total revenue are as follows:

	2023	2022	
PT Weda Bay Nickel	978.515.654.820	1.112.228.986.658	*PT Weda Bay Nickel*
PT Translingkar Kita Jaya	278.919.088.703	747.920.503.404	*PT Translingkar Kita Jaya*
PT PP (Persero) Tbk	768.958.948.215	619.794.151.388	*PT PP (Persero) Tbk*
LMA Konsorsium	-	331.158.271.242	*LMA Konsorsium*
Jumlah	**2.026.393.691.738**	**2.811.101.912.692**	***Total***

Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of revenue based on customers are as follows:

	2023	2022	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT PP (Persero) Tbk	768.958.948.215	619.794.151.388	*PT PP (Persero) Tbk*
LMA Konsorsium	53.527.657.922	331.158.271.242	*LMA Konsorsium*
PT Brantas Abipraya (Persero)	43.323.669.595	97.331.035.774	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	10.420.212.081	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	-	6.654.190.904	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
Lain-lain (Dibawah Rp3 Miliar)	4.718.859.779	4.787.345.153	*Others (Below Rp3 Billion)*
Sub Jumlah	**870.529.135.511**	**1.070.145.206.542**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Weda Bay Nickel	978.515.654.820	1.112.228.986.658	*PT Weda Bay Nickel*
PT Translingkar Kita Jaya	278.919.088.703	747.920.503.404	*PT Translingkar Kita Jaya*
PT Hengjaya Mineralindo	187.519.547.976	59.638.125.798	*PT Hengjaya Mineralindo*
PT Surya Dhoho Investama	118.409.993.460	-	*PT Surya Dhoho Investama*
PT Indah Kiat Pulp & Paper	112.949.842.129	49.447.399.844	*PT Indah Kiat Pulp & Paper*
PP - Markinah KSO	92.321.681.086	-	*PP - Markinah KSO*

(Lanjutan/*Continued*)

	2023	2022	
Kementrian PUPR - Satker Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang	91.551.485.579	-	*Kementrian PUPR - Satker Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang*
PP - Waskita - Wika KSO	76.214.281.100	-	*PP - Waskita - Wika KSO*
Abipraya - APTA - PDK KSO	68.808.888.010	-	*Abipraya - APTA - PDK KSO*
PT Triaryani	65.443.472.688	40.155.603.492	*PT Triaryani*
PP - NK KSO	58.424.768.330	-	*PP - NK KSO*
PT Eramet Halmahera Nickel	56.260.478.902	17.102.488.972	*PT Eramet Halmahera Nickel*
Wika - PP KSO	38.746.680.695	54.362.837.718	*Wika - PP KSO*
PP - MAFRI - Bangun Nusa KSO	28.747.828.353	-	*PP - MAFRI - Bangunnusa KSO*
PT Pulo Mas Jaya	28.666.713.477	-	*PT Pulo Mas Jaya*
SRBGC - Wika - Adhi JO	25.859.370.196	-	*SRBGC - Wika - Adhi JO*
KSO PP Bahagia Bangun Nusa	24.334.137.254	5.358.210.746	*KSO PP Bahagia Bangun Nusa*
Abipraya - Bumi Karsa - CPA KSO	22.692.472.143	-	*Abipraya - Bumi Karsa - CPA KSO*
PT Takenaka Indonesia	19.750.112.300	8.850.655.869	*PT Takenaka Indonesia*
Abipraya - TGP - Supraharmonia KSO	16.605.490.847	-	*Abipraya - TGP - Supraharmonia KSO*
ADHI ACSET KSO	16.564.020.612	-	*ADHI ACSET KSO*
PP WA KSO	12.241.379.540	-	*PP WA KSO*
Waskita - Nindya - Permata KSO	11.496.274.175	-	*Waskita - Nindya - Permata KSO*
PP - GORIP JV	10.651.544.932	4.567.894.603	*PP-GORIP JV*
PP - Ashfri Minarta KSO	10.362.410.692	-	*PP-Ashfri Minarta KSO*
PT Maha Cipta Jaya	10.287.588.403	-	*PT Maha Cipta Jaya*
PT Putra Wijayakusuma Sakti	7.667.000.000	-	*PT Putra Wijayakusuma Sakti*
PP - BAP - RE KSO	6.545.541.909	-	*PP - BAP - RE KSO*
PT Sejahtera Mandiri	5.408.804.413	-	*PT Sejahtera Mandiri*
PT Wavin Manufacturing Indonesia	5.017.963.200	-	*PT Wavin Manufacturing Indonesia*
KSO - PP ADHI	4.745.548.130	578.026.990	*KSO - PP ADHI*
KSO PPRE - RPJ	4.057.549.005	-	*KSO PPRE - RPJ*
PP - PP Urban - JAKON KSO	3.528.587.528	-	*PP - PP Urban - JAKON KSO*
Indonesia Xin Hai Steel Structure	3.360.450.000	-	*Indonesia Xin Hai Steel Structure*
PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor	3.219.066.729	3.056.605.769	*PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor*
Lain-lain (Dibawah Rp3 Miliar)	24.440.384.445	461.783.132.277	*Others (Below Rp3 Billion)*
Sub Jumlah	**2.530.336.101.761**	**2.565.050.472.140**	***Sub Total***
Jumlah	**3.400.865.237.272**	**3.635.195.678.682**	***Total***

32. BEBAN POKOK PENDAPATAN

32. COST OF REVENUE

	2023	2022	
Konstruksi			***Construction***
Upah	458.533.420.668	370.392.467.135	*Wages*
Bahan	946.930.402.686	1.515.782.098.464	*Material*
Overhead	571.650.335.152	381.898.968.193	*Overhead*
Penyusutan	488.191.924.827	456.249.448.560	*Depreciation*
Alat	196.287.819.153	111.652.792.194	*Equipment*
Sub Jumlah	**2.661.593.902.486**	**2.835.975.774.546**	***Sub Total***
Sewa			***Rental***
Upah	1.767.492.701	6.200.811.692	*Wages*
Bahan	5.542.136.879	11.990.068.712	*Material*
Overhead	34.043.150.058	26.469.726.238	*Overhead*
Penyusutan	2.776.571.351	25.193.712.788	*Depreciation*
Alat	21.544.224.382	9.316.834.758	*Equipment*
Sub Jumlah	**65.673.575.371**	**79.171.154.191**	***Sub Total***

(Lanjutan/*Continued*)

	2023	2022	
Ready Mix			***Ready Mix***
Upah	460.650.490	2.745.015.800	*Wages*
Bahan	62.306.626.676	71.019.317.029	*Material*
Overhead	9.875.655.595	10.644.175.408	*Overhead*
Penyusutan	4.415.090.857	20.940.974.565	*Depreciation*
Alat	2.974.556.056	2.316.444.120	*Equipment*
Sub Jumlah	**80.032.579.674**	**107.665.926.922**	***Sub Total***
Jumlah	**2.807.300.057.531**	**3.022.812.855.659**	***Total***

33. BEBAN USAHA / *33. OPERATING EXPENSES*

	2023	2022	
Biaya pegawai	65.858.942.005	61.203.448.819	*Employees expenses*
Biaya umum	17.548.183.627	20.089.558.517	*Other expenses*
Biaya penyusutan gedung	5.221.899.486	5.900.571.449	*Depreciation building*
Amortisasi aset tidak berwujud	1.596.335.821	2.064.232.347	*Amortization of intangible assets*
Jumlah	**90.225.360.939**	**89.257.811.132**	***Total***

34. KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *34. IMPAIRMENT LOSSES*

	2023	2022	
Piutang Usaha (Catatan 7)	10.365.235.119	1.147.139.489	*Trade receivables (Note 7)*
Tagihan bruto pemberi kerja (Catatan 9)	5.385.912.591	-	*Gross amount due from customers (Note 9)*
Piutang Retensi (Catatan 8)	2.930.659.267	-	*Retention receivables (Note 8)*
Jumlah	**18.681.806.977**	**1.147.139.489**	***Total***

35. BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA / *35. SHARE IN PROFIT OF JOINT VENTURE*

Pembagian laba berasal dari ventura bersama sebagai berikut:

Profit sharing comes from the following joint ventures:

	2023	2022	
LMA Konsorsium	10.706.201.031	21.440.971.185	*LMA Konsorsium*
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	2.250.000.000	612.988.025	*PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO*
PP Presisi - Yalapersada KSO	1.250.000.000	811.299.781	*PP Presisi - Yalapersada KSO*
PP Presisi - Sarana KSO	500.000.000	7.615.794.570	*PP Presisi - Sarana KSO*
PPRE - RPJ KSO	-	3.577.297.142	*PPRE - RPJ KSO*
Jumlah	**14.706.201.031**	**34.058.350.703**	***Total***

36. PENDAPATAN KEUANGAN / *36. FINANCE INCOME*

	2023	2022	
Pendapatan keuangan dari sewa	1.402.256.029	1.952.476.077	*Finance income from lease*
Jumlah	**1.402.256.029**	**1.952.476.077**	***Total***

37. BEBAN KEUANGAN / *37. FINANCE COSTS*

	2023	2022	
Beban bunga dari utang			*Interest expense on*
Bank	196.589.043.339	194.795.867.649	*Bank loans*
Sewa pembiayaan	33.925.571.339	35.531.070.450	*Finance lease liabilities*
Jumlah	**230.514.614.678**	**230.326.938.099**	***Total***

38. PENDAPATAN LAINNYA / *38. OTHER INCOMES*

	2023	2022	
Pendapatan diluar usaha	44.868.764.364	21.880.359.924	*Non operating income*
Pendapatan jasa giro - net	4.559.672.411	3.940.689.479	*Current account income - net*
Pemulihan kerugian penurunan nilai	3.950.163.675	555.423.940	*Recovery of impairment losses*
Bagi hasil murabahah	634.018.176	2.240.694.413	*Murabahah profit sharing*
Pendapatan bunga deposito - net	415.455.923	359.913.483	*Deposito interest income - net*
Jumlah	**54.428.074.549**	**28.977.081.239**	***Total***

39. BEBAN LAINNYA / *39. OTHER EXPENSES*

	2023	2022	
Administrasi bank	28.629.434.663	41.048.059.596	*Bank administration*
Beban diluar usaha	17.554.191.090	20.263.477.249	*Non operating expense*
Amortisasi emisi obligasi	325.396.000	162.698.000	*Amortization of bond issuance*
Jumlah	**46.509.021.753**	**61.474.234.845**	***Total***

40. LABA DASAR PER SAHAM / *40. BASIC EARNINGS PER SHARE*

Laba dasar per saham dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham rata-rata tertimbang biasa yang beredar sepanjang tahun.

Basic earning per share is calculated by dividing the profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2023	2022	
Laba bersih kepada pemilik entitas induk	80.215.559.126	100.751.654.542	*Net profit attributable to owners of the parent entity*
Jumlah rata-rata saham biasa yang beredar	10.224.271.000	10.224.271.000	*The average number of ordinary shares outstanding*
Laba dasar per saham	**7,85**	**9,85**	***Basic earning per share***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

As at December 31, 2023 and 2022, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earning per share is equivalent to basic earning per share.

(Lanjutan/*Continued*)

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Grup melakukan transaksi usaha dan lainnya dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Group has engaged in trade and other transactions with related parties. Significant transactions and balances with related parties are as follows:

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. Nature of relationship and transaction

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
PT PP (Persero) Tbk	Pemegang saham pengendali langsung Perusahaan, pemberi kerja/ *Direct controlling shareholder of the Company, project owner*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner* Utang lain-lain/ *Other payables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
YKKPP (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan)	Pemegang saham/ *Shareholder*	Utang lain-lain/ *Other payables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT PP Properti Tbk	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT PP Urban	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Utang usaha/ *Trade payables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT PP Infrastruktur	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT PP Energi	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pendapatan usaha/ *Revenue*
Dewan Komisaris dan Direksi/ *Board of Commisisoners and Directors*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*
Karyawan Kunci/ *Key employees*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*
PT Grahaprima Realtindo	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
PT PPRO Sampurna Jaya	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*
PT PP Properti Suramadu	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*
PT Limasland Realty Cilegon	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner*

(Lanjutan/*Continued*)

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat dari hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***Nature of transaction***
PT Odira Energy Karang Agung	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Utang bank/ *Bank loans*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Utang bank/ *Bank loans*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Investasi jangka pendek/ *Short term invesments*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Utang bank/ *Bank loans*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents* Utang bank/ *Bank loans*
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
PT Angkasa Pura I (Persero)	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT Angkasa Pura II (Persero)	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT Dahana (Persero)	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Hutama Karya Infrastruktur	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables*
PP Presisi - Sarana KSO	Ventura bersama/ *Joint venture*	Piutang lain-lain/ *Other receivables* Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*
PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO	Ventura bersama/ *Joint venture*	Piutang lain-lain/ *Other receivables* Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*
KSO PPRE - RPJ	Ventura bersama/ *Joint venture*	Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*
KSO PPRE - Yala Persada Indonesia	Ventura bersama/ *Joint venture*	Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*

(Lanjutan/*Continued*)

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat dari hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***Nature of transaction***
LMA Konsorsium	Ventura bersama/ *Joint venture*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Piutang lain-lain/ *Other receivables* Utang usaha/ *Trade payables* Investasi pada ventura bersama/ *Investment in joint venture* Uang muka pemberi kerja/ *Advances from project owner* Pendapatan usaha/ *Revenue* Bagian laba ventura bersama/ *Share in profit of joint venture*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Varia Usaha Beton	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Piutang retensi/ *Retention receivables* Tagihan bruto pemberi kerja/ *Gross amount due from customers*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Piutang usaha/ *Trade receivables* Pendapatan usaha/ *Revenue*
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Utang usaha/ *Trade payables*
PT Multi Terminal Indonesia	Entitas affiliasi/ *Entity affiliated*	Utang usaha/ *Trade payables*

Harga jual dan harga pembelian ditentukan berdasarkan perjanjian dan memiliki syarat dan kondisi yang sama pada pihak berelasi dan ketiga.

The selling price and purchase price are determined based on the agreement and have the same terms and conditions on the related and third parties.

b. Saldo / ***b. Balances***

	2023		**2022**		
	% dari jumlah	**Nilai/ *Amount***	**% dari jumlah**	**Nilai/ *Amount***	
Aset:					***Assets:***
Kas dan setara kas	0,95%	68.150.551.953	2,19%	166.248.698.995	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	1,26%	90.000.000.000	1,19%	90.000.000.000	*Short term investments*
Piutang usaha	9,75%	698.869.891.730	4,52%	342.992.802.441	*Trade receivables*
Piutang retensi	2,19%	157.071.742.704	1,71%	129.902.662.130	*Retention receivables*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	8,78%	628.759.605.595	11,71%	888.692.366.160	*Gross amount due from customers*
Piutang lain-lain	0,09%	6.692.418.042	1,51%	114.821.843.701	*Other receivables*
Liabilitas:					***Liabilities:***
Utang usaha	1,11%	42.839.394.933	4,53%	200.834.241.388	*Trade payables*
Utang lain-lain	10,27%	395.332.557.868	5,92%	262.808.398.556	*Other payables*
Uang muka pemberi kerja	0,04%	1.571.291.366	1,56%	69.071.291.361	*Advances from project owner*
Utang bank - jangka pendek	17,17%	660.933.660.618	17,47%	775.224.309.385	*Short term - bank loans*
Utang bank - jangka panjang	1,45%	55.819.713.909	4,15%	183.967.016.623	*Long term - bank loans*
Pendapatan	25,60%	870.529.135.511	29,44%	1.070.145.206.542	***Revenue***

Biaya remunerasi Komisaris, Direksi dan Karyawan kunci untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The remuneration costs for the Commissioners, Directors and Key Employees for 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Komisaris	2.456.899.367	2.201.927.005	*Commissioner*
Direksi	7.951.162.969	6.259.540.824	*Directors*
Karyawan kunci	16.212.662.400	15.634.569.494	*Key employees*
Jumlah	**26.620.724.736**	**24.096.037.323**	***Total***

42. SEGMEN OPERASI

Manajemen memonitor hasil operasi segmen bisnis untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi operasi yang diukur dengan cara yang konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

42. OPERATING SEGMENT

Management monitors the operating results of its business segments for the purpose of decision making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with the operating profit or loss in the consolidated financial statements.

a. Segmen primer

Segmen primer Grup dikelompokkan berdasarkan jenis usaha atau produk yang dihasilkan. Informasi segmen berdasarkan jenis usaha atau produk adalah sebagai berikut:

a. Primary segment

The Group's primary segments are grouped based on the type of business or products produced. Segment information by type of business or product are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
Uraian	**Konstruksi/ *Construction***	***Ready Mix***	**Sewa/ *Rent***	**Jumlah/ *Total***	***Description***
Jumlah aset	6.771.367.161.238	168.699.033.264	224.923.963.569	7.164.990.158.071	*Total assets*
Jumlah liabilitas	3.639.851.679.244	90.021.577.919	120.024.458.472	3.849.897.715.635	*Total liabilities*
Pendapatan	3.212.761.338.603	80.617.611.557	107.486.287.112	3.400.865.237.272	*Revenue*
Harga pokok pendapatan	(2.661.593.902.486)	(80.032.579.674)	(65.673.575.371)	(2.807.300.057.531)	*Cost of revenue*
Beban usaha	(82.529.001.883)	(120.583.499)	(7.575.775.557)	(90.225.360.939)	*Operating expenses*
Pendapatan keuangan	1.402.256.029	-	-	1.402.256.029	*Finance income*
Pendapatan lainnya	49.485.533.977	77.782.808	4.864.757.764	54.428.074.549	*Other incomes*
Beban lainnya	(41.630.913.329)	(78.256.177)	(4.799.852.247)	(46.509.021.753)	*Other expenses*
Bagian laba ventura bersama	14.599.139.021	-	107.062.010	14.706.201.031	*Share in profit of joint venture*
Kerugian penurunan nilai	(17.225.884.833)	(23.099.141)	(1.432.823.003)	(18.681.806.977)	*Impairment losses*
Beban keuangan	(209.502.657.550)	(331.728.400)	(20.680.228.728)	(230.514.614.678)	*Finance costs*
Pajak:					*Taxes:*
Final	(96.382.840.152)	-	-	(96.382.840.152)	*Final*
Non final	-	-	(9.006.796.783)	(9.006.796.783)	*Non final*
Jumlah	**169.383.067.397**	**109.147.473**	**3.289.055.199**	**172.781.270.069**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
Uraian	**Konstruksi/ *Construction***	***Ready Mix***	**Sewa/ *Rent***	**Jumlah/ *Total***	***Description***
Jumlah aset	7.112.594.661.119	230.326.618.041	245.519.053.085	7.588.440.332.245	*Total assets*
Jumlah liabilitas	4.159.814.379.582	134.706.956.234	143.592.280.475	4.438.113.616.291	*Total liabilities*
Pendapatan	3.407.244.735.977	110.336.550.059	117.614.392.646	3.635.195.678.682	*Revenue*
Harga pokok pendapatan	(2.835.975.774.546)	(107.665.926.922)	(79.171.154.191)	(3.022.812.855.659)	*Cost of revenue*
Beban usaha	(82.792.312.160)	(470.874.484)	(5.994.624.488)	(89.257.811.132)	*Operating expenses*
Pendapatan keuangan	1.952.476.077	-	-	1.952.476.077	*Finance income*
Pendapatan lainnya	25.412.011.873	247.772.740	3.317.296.626	28.977.081.239	*Other incomes*
Beban lainnya	(56.991.726.056)	(13.184.092)	(4.469.324.697)	(61.474.234.845)	*Other expenses*

(Lanjutan/*Continued*)

Uraian	31 Desember/ *December 31, 2022* Konstruksi/ *Construction*	*Ready Mix*	Sewa/ *Rent*	Jumlah/ *Total*	*Description*
Bagian laba ventura bersama	34.058.350.703	-	-	34.058.350.703	*Share in profit of joint venture*
Kerugian penurunan nilai	(910.177.332)	(50.070.726)	(186.891.431)	(1.147.139.489)	*Impairment losses*
Beban keuangan	(212.715.555.328)	(1.688.474.641)	(15.922.908.130)	(230.326.938.099)	*Finance costs*
Pajak:					*Taxes:*
Final	(102.223.249.418)	-	-	(102.223.249.418)	*Final*
Non final	-	-	(11.279.742.435)	(11.279.742.435)	*Non final*
Jumlah	**177.058.779.790**	**695.791.934**	**3.907.043.900**	**181.661.615.624**	***Total***

b. Segmen sekunder

Grup beroperasi dan terdaftar di Indonesia. Seluruh kegiatan konstruksi dan penjualan barang dilakukan di Indonesia dengan pelanggan dalam negeri.

b. Secondary segment

The Group are operating and registered in Indonesia. All construction and sales activities are carried out in Indonesia with domestic customers.

43. PERJANJIAN DAN KOMITMEN

1. Grup mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

43. AGREEMENTS AND COMMITMENTS

1. The Group has commitments to carry out the following construction work:

Nama proyek/ *Name of project*	Nilai kontrak/ *Value of contract*	Pemberi kerja/ *Owner project*	Tenggat waktu/ *period* Mulai/ *Start*	Selesai/ *End*
MO Tofu	2.847.402.657.560	PT Weda Bay Nickel	16/04/2023	15/04/2027
Hauling Service Weda Bay	2.615.975.467.718	PT Weda Bay Nickel	04/09/2021	01/12/2026
MDO OA Weda Bay	891.858.833.216	PT Weda Bay Nickel	30/11/2021	29/11/2025
Quarry Vale	484.873.841.000	PT PP (Persero) Tbk	31/01/2022	21/04/2025
IGP Bahadopi	357.814.121.000	PT PP (Persero) Tbk	31/01/2022	21/04/2025
Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Medan - Binjai	128.579.062.108	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	09/05/2022	24/10/2024
Pembangunan Jalan Seksi 6C-1 SP 3 ITCI Simpang 1 B Sumbu	119.141.446.740	PP - Waskita - YPP KSO	06/06/2023	07/08/2024
Pelabuhan SKPT Saumlaki	122.875.267.220	Kementerian Kelautan dan Perikanan	07/11/2022	05/05/2024
Jembatan GORR Gorontalo	104.914.056.125	Kementrian PUPR	26/08/2022	26/04/2024
IKPP Karawang	142.816.089.000	PT Indah Kiat Pulp & Paper	03/06/2022	03/04/2024
Pemenuhan sebagian kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara) Paket Kontruksi fisik	400.279.482.298	PP - BAP - RE KSO	13/12/2023	31/03/2024
Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 2	104.326.605.000	PP - NK KSO	10/07/2023	31/03/2024
Proyek Tol Kartaraja seksi 1	100.457.500.000	PT PP (Persero) Tbk	27/10/2023	31/03/2024
Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3	46.790.148.838	PP - Waskita - Wika KSO	10/07/2023	31/03/2024
HR Tofu Weda Bay	314.094.159.984	PT Weda Bay Nickel	01/08/2022	09/03/2024
Proyek Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1 Kecamatan sepaku kabupaten Penajam Paser Utara	8.197.972.000	PT Brantas Abipraya	25/02/2023	25/02/2024
Gedung BI IKN Tahap 1	2.701.804.112	PT PP (Persero) Tbk	11/12/2023	01/02/2024
Tol Indrapura Kisaran	1.135.794.894.000	PT PP (Persero) Tbk	09/09/2019	30/01/2024
Batching Plant Indrapura Kisaran	118.437.952.201	PT PP (Persero) Tbk	19/05/2020	30/01/2024
Proyek Kontruksi Stage 2 Proving Ground	31.452.145.260	PT Hutama Karya	18/11/2023	29/01/2024
Pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di kawasan IKN dan Dermaga logistik termasuk Akses	44.358.785.172	PP - WA KSO	25/09/2023	23/01/2024
Pekerjaan Cut & Fill Tanah-Tahap II Kemenko 2 IKN	1.813.122.390	PT Hutama Karya	07/12/2023	20/01/2024
Proyek Pembangunan Jalan di dalam KIPP; Paket Pembangunan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN	13.200.000.000	Waskita - Nindya - Permata KSO	19/10/2023	17/01/2024
PMJ Land Tower	31.159.471.171	PT Pulo Mas Jaya	26/05/2023	31/12/2023
Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 11B Ruas Sukaragam-Suka bungah	73.540.555.037	Adhi - ACSET KSO	08/09/2023	31/12/2023
Proyek Gedung Kantor Presiden	11.082.287.175	PP - WIKA KSO	17/07/2023	31/12/2023
KIT B 10 HA	7.616.693.000	PT Putra Wijayakusuma Sakti	09/09/2023	31/12/2023
Pekerjaan Cut & Fill Plaza Bhinneka	4.893.314.245	Abipraya - Indah KSO	21/11/2023	31/12/2023

(Lanjutan/*Continued*)

Nama proyek/ *Name of project*	Nilai kontrak/ *Value of contract*	Pemberi kerja/ *Owner project*	Tenggat waktu/ *period* Mulai/ *Start*	Selesai/ *End*
Pekerjaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B :Rencana Outer Ring Road - Sp. 3 ITCI	45.999.170.520	Abipraya - Bumi Karsa - CPA KSO	30/08/2023	30/12/2023
Dermaga IKN	91.551.485.579	Kementrian PUPR	03/01/2023	10/12/2023
Pembangunan Rumah Susun ASN 1	4.214.208.489	PP - PP Urban - Jakon KSO	12/09/2023	14/11/2023
BP Batang BPSP	2.002.250.000	PT PP (Persero) Tbk	15/09/2023	31/10/2023
BP KCC Glass Batang	36.208.983.650	PT PP (Persero) Tbk	13/06/2022	30/10/2023
BP Takenaka	19.750.112.300	PT Takenaka Indonesia	24/01/2023	30/10/2023
Serang - Panimbang Toll Road Development Project Section 3 (Cileles-Panimbang) Road Earthwork Subcontract Agreement	19.296.000.000	SRBGC - Wika - Adhi JO	25/09/2023	25/10/2023
Pekerjaan Koneksi Jalan Tol Pengembangan Airport Baru Kediri	27.000.000.000	PT Surya Dhoho Investama	01/03/2022	15/10/2023
Proyek Tol Cinere Kukusan	787.761.956.074	PT Translingkar Kita Jaya	04/06/2021	30/09/2023
Pekerjaan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (TPST 1 KIPP IKN)	2.241.597.718	Abipraya - SBS - SILCON KSO	10/08/2023	24/09/2023
Karawang Outlet Mall	6.275.672.499	PT Shimizu Bangun Ciptra Kontraktor	15/08/2022	15/09/2023
Upah Giling Beton Karawang	2.168.030.490	PT PP (Persero) Tbk	15/03/2023	31/08/2023
Pekerjaan Lansekap Pengembangan Airport Baru Kediri	86.000.000.000	PT Surya Dhoho Investama	14/12/2022	31/08/2023
Camp Sonic Wedabay	73.362.967.874	PT Eramet Halmahera Nickel	27/10/2022	18/08/2023
Serang-Panimbang Toll Road Project Section 3	43.902.372.878	PT PP (Persero) Tbk	03/07/2022	31/07/2023
Proyek Pembangunan Pabrik Baru Wavin	5.443.970.580	PT Wavin Manufacturing Indonesia	29/05/2023	29/07/2023
MIG Data Center	5.973.362.265	PT Tatamulia Nusantara Indah	29/08/2022	23/07/2023
Batching Plant Gedung Karawang	9.405.000.000	PT PP (Persero) Tbk	04/08/2023	17/07/2023
Pekerjaan Jalan Kerja Kawasan Sub BWP 1.B dan 1.C	51.762.567.944	Abipraya - APTA - PDK KSO	06/03/2023	03/07/2023
Hengjaya Hauling Road	206.557.596.847	PT Hengjaya Mineralindo	14/10/2022	30/06/2023
Hengjaya Jembatan Makarti	40.600.076.927	PT Hengjaya Mineralindo	21/11/2022	30/06/2023
Batching Plant IPAL	4.398.564.150	KSO PP - SBS - NKJ	27/07/2022	30/06/2023
Batching Plant Xinhai	3.360.450.000	PT Xinhai Indonesia	04/08/2023	30/06/2023
Warehouse Depok Cimanggis	17.326.559.395	PT Total Persada Indonesia	14/02/2022	13/06/2023
Proyek Pembangunan Gedung Kemensetneg	5.253.194.034	PT PP (Persero) Tbk	24/03/2023	30/05/2023
Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 2	56.445.715.408	PT PP (Persero) Tbk	26/12/2022	25/04/2023
Pembangunan Jalan Di dalam KIPP Pembangunan Jalan Sumbu	56.980.763.400	KSO PP Markinah	11/01/2023	31/03/2023
Pembangunan Bangunan Istana Negara & Lapangan Upacara pada kawasan istana kepresidenan ibu kota Negara	2.545.116.400	KSO PP - Wika	16/02/2022	28/02/2023
Lot 6B Zona 1	16.571.200.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	25/02/2022	25/02/2023
Tol Cinere - Jagorawi Seksi 3 STA 09+314 S/d STA 15+000	407.774.098.039	PT Translingkar Kita Jaya	30/10/2021	31/01/2023

2. Perjanjian kerjasama operasi

LMA-PPRE KSO

Sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Ruas Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3, Perusahaan secara bersama-sama dengan LMA membentuk KSO dengan keikutsertaan modal 49:51 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 004/LMA-PPRE/IV/2021.

LMA Konsorsium

LMA mengadakan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Pembangunan Sarana Perkasa dengan membentuk LMA Konsorsium untuk proyek pengembangan bandara baru di Kediri, Jawa Timur, Indonesia berdasarkan Perjanjian No. 002/EXT/LEG-PKS/LMA/11/2020 tanggal 3 Februari 2020.

2. Agreement of joint operation

LMA-PPRE KSO

In connection with the construction of the Cinere-Jagorawi Toll Road Section 3, the Company together with LMA formed a KSO with a capital participation of 49:51 in accordance with the Joint Operation Agreement Letter No. 004/LMA-PPRE/IV/2021.

LMA Konsorsium

LMA entered into Agreement of Joint Operation (JO) with PT Pembangunan Sarana Perkasa to establish LMA Consortium for new airport development at Kediri, Jawa Timur, Indonesia based on the agreement No. 002/EXT/LEG-PKS/LMA/11/2020 dated February 3, 2020.

PP Presisi - Sarana KSO

Berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/ppre-sarana/KSO/GORR/IV/2022, Perusahaan bersama dengan PT Sarana MultiKarya Indonesia membentuk kerjasama operasi untuk pengerjaan proyek pembangunan jembatan GORR segmen 1 STA 7700 dan STA 8500 di Gorontalo.

PP Presisi - Sarana KSO

Based on the Joint Operation Agreement letter No. 001/ppre-sarana/KSO/GORR/IV/2022, the Company and PT Sarana MultiKarya Indonesia formed a joint operation for the construction project of GORR bridge segment 1 STA 7700 and STA 8500 in Gorontalo.

PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO

Berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/PPRE-DPIKSO/JLKAMB4/I/2022, Perusahaan bersama dengan PT Duta Pratama Indah membentuk kerjasama operasi untuk pengerjaan proyek pembangunan jalur KA Lintas Medan - Binjai km 2+850 s/d km 3+290.

PP Presisi - Duta Pratama Indah KSO

Based on the Joint Operation Agreement No. 01/PPRE-DPIKSO/JLKAMB4/I/2022, the Company and PT Duta Pratama Indah formed a joint operation for the construction project of the railway of Medan - Binjai km 2+850 to km 3+290.

PP Presisi - Yalapersada KSO

Berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Operasi No. 022/PPPRESISI-YALAPERSADAKSO/ SMLK/X/2022, Perusahaan bersama dengan PT Permata Anugerah Yalapersada membentuk kerjasama operasi untuk pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana PP Ukurlaran SKPT Saumlaki.

PP Presisi - Yalapersada KSO

Based on the Joint Operation Agreement No. 022/PPPRESISI-YALAPERSADAKSO/ SMLK/X/2022, the Company and PT Permata Anugerah Yalapersada formed a joint operation for the construction of infrastructure and facilities for Ukurlaran SKPT Saumlaki.

PPRE - RPJ KSO

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi No. 017/PPRE-RPJ/KSO/DKI/V/2022, Perusahaan bersama dengan PT Runggu Prima Jaya membentuk kerjasama operasi untuk pekerjaan Pembangunan Sistem Pengambilan dan Treatment Sampah Badan Air Melalui Rekayasa Sungai pada Kali Ciliwung Segmen TB Simatupang.

PPRE - RPJ KSO

Based on the Joint Operation Agreement No. 017/PPRE-RPJ/KSO/DKI/V/2022, the Company and PT Runggu Prima Jaya formed a joint operation for the construction of a waste collection and treatment system from water bodies through river engineering in the Kali Ciliwung segment TB Simatupang.

44. KONTINJENSI

Tidak terdapat kewajiban kontinjensi. Dalam hal ini Grup tidak menjadi pihak tergugat maupun penggugat, tidak melakukan transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan, tidak terlibat dalam perselisihan/ sengketa pajak, tidak terlibat perkara/ denda terkait lingkungan hidup, serta tidak terdapat perselisihan dengan karyawan.

44. CONTINGENCIES

There are no contingency obligations. In this case, the Group is neither a defendant nor a plaintiff, does not engage in transactions that potentially involve conflicts of interest, is not involved in tax disputes/ controversies, is not subject to environmental fines/ penalties, and there are no disputes with employees.

45. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga dan risiko harga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup. Direksi melakukan identifikasi, evaluasi, dan lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko nilai mata uang, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a) Faktor-faktor risiko keuangan

1) Risiko pasar

Kebijakan manajemen risiko Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup.

Grup tidak terdampak terhadap risiko tingkat bunga yang berasal dari dampak perubahan tingkat bunga yang dimiliki oleh aset dan liabilitas tertentu yang mengandung komponen tingkat bunga.

2) Risiko tingkat suku bunga

Risiko arus kas tingkat bunga adalah risiko akibat perubahan tingkat bunga pasar yang mempengaruhi arus kas yang terkait dengan instrumen keuangan dengan tingkat bunga variabel.

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga. Risiko tingkat suku bunga dari kas, piutang non-usaha, piutang retensi, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, dan proyek dalam pelaksanaan tidak signifikan.

45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including, interest rate risk, and price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group's overall risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors. The Board of Directors identifies, evaluates and hedges financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as currency risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non derivative financial instruments and the investment of excess liquidity.

a) Financial risk factors

1) Market risk

The Group's risk management policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in interest rates and to minimize potential adverse effects on the Group's financial risk.

The Group has no impact on interest rate risk arising from the impact of changes in interest rates on certain assets and liabilities that contain an interest rate component.

2) Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that changes in market interest rates will impact cash flows arising from variable rate financial instruments.

The Group's interest rate risk primarily arises from its loans. Loans issued at floating rates expose the Group to cash flow interest rate risk. Loans issued at fixed rates expose the Group to fair value interest rate risk. The interest rate risk from cash, non-trade trade receivables, retention receivables, gross contractual amount due from customers and project under construction is not significant.

Profil pinjaman Grup adalah sebagai berikut:

The Group's loans profile are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31,* 2022		
	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ *Weighted average interest rate*	Saldo/ *Balance* (Dalam juta)/ *(In Millions)*	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ *Weighted average interest rate*	Saldo/ *Balance* (Dalam juta)/ *(In Millions)*	
Utang bank - jangka pendek	7,99%	1.017.515	8,56%	1.286.621	*Short term - bank loans*
Utang bank - jangka panjang	8,81%	304.324	9,14%	396.103	*Long term - bank loans*
Liabilitas sewa	8,39%	351.323	9,43%	388.433	*Lease liabilities*
Utang obligasi	10,00%	202.250	10,00%	201.925	*Bonds payable*
Eksposure neto atas risiko arus kas tingkat suku bunga		**1.875.412**		**2.273.082**	***Net exposure to cash flow interest rate risk***

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika tingkat bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang lebih tinggi/ rendah 100 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/ tinggi sebesar Rp18.754 Juta (Desember 2022: Rp22.731 Juta).

As at December 31, 2023, if interest rates on floating rate loans had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit after tax for the year would have been lower/ higher by Rp18,754 Million (December 2022: Rp22,731 Million).

3) Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha dan lain-lain. Grup menempatkan saldo bank dan deposito berjangka pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya.

Grup memiliki kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit. Karena itu, Grup memiliki kebijakan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pelanggan yang memiliki sejarah dan reputasi kredit yang baik. Manajemen melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

3) Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

The credit risk of the Group is primarily attributed to its cash in banks, time deposits, trade and other receivables. The Group places their bank balances and time deposits to the credit trusted financial institutions.

The Group has established policies to obtain sustainable revenue growth by minimizing losses due to credit risk exposure. Accordingly, the Group have established a policy to ensure that transactions are made with customers who has good credit reputation. Management conducts ongoing supervision to reduce credit risk exposure at reporting date.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

4) Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memantau profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga kecukupan kas, serta memastikan

4) Liquidity risk

Purdent liquidity risk management includes managing the profile of loan maturities and funding sources, maintaining sufficient cash, and ensuring the availability of funding from

tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Grup mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal serta terus memonitor perkiraan posisi kas dan utang bruto yang dimiliki Grup dalam jangka pendek berdasarkan perkiraan arus kas. Selain itu, dilakukan proyeksi arus kas jangka panjang untuk membantu Grup dalam merencanakan kebutuhan pendanaan dalam jangka panjang.

an adequate amount of committed credit facilities and the ability to close out market positions. The Group's ability to fund its loan requirements is managed by maintaining diversified funding sources with adequate committed funding lines from high quality lenders and by monitoring rolling short term forecasts of the Group's cash and gross debt on the basis of expected cash flows. In addition, long term cash flows are projected to assist with the Group's long term debt financing plans.

Grup memonitor pergerakan perkiraan kebutuhan likuiditas untuk memastikan tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional serta untuk senantiasa memelihara kelonggaran likuiditas Grup terhadap fasilitas pinjaman yang belum digunakan, sehingga Grup tidak melampaui batas pinjaman atau batasan-batasan untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

The Group monitors rolling forecasts of the liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its unused committed loan facilities at all times so that the Group does not breach loan limits or covenants on any of its loan facilities.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan non-derivatif Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The table below analyze the Group's non-derivative financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity dates. The amounts disclosed in the table are the contract undiscounted cash flows.

	31 Desember/ *December 31,* 2023 (dalam juta/ *in million* Rupiah)					
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**1-3 tahun/ *1-3 years***	**3-5 tahun/ *3-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang bank - jangka pendek	1.017.515	-	-	-	1.017.515	*Short term - bank loans*
Utang bank - jangka panjang	187.128	117.196	-	-	304.324	*Long term - bank loans*
Liabilitas sewa	188.085	163.238	-	-	351.323	*Lease liabilities*
Utang obligasi	-	101.661	100.589	-	202.250	*Bonds payable*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.392.728**	**382.095**	**100.589**	**-**	**1.875.412**	***Total financial liabilities***

	31 Desember/ *December 31,* 2022 (dalam juta/ *in million* Rupiah)					
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**1-3 tahun/ *1-3 years***	**3-5 tahun/ *3-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang bank - jangka pendek	1.286.621	-	-	-	1.286.621	*Short term - bank loans*
Utang bank - jangka panjang	-	282.052	114.052	-	396.103	*Long term - bank loans*
Liabilitas sewa	-	150.802	237.631	-	388.433	*Lease liabilities*
Utang obligasi	-	-	201.925	-	201.925	*Bonds payable*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.286.621**	**432.854**	**553.607**	**-**	**2.273.082**	***Total financial liabilities***

b) Manajemen permodalan

Grup mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo liabilitas dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari utang termasuk utang bank, utang obligasi dan liabilitas sewa pembiayaan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, kas dan setara kas dan modal tersedia bagi para pemegang saham dari Grup, modal saham dan laba ditahan.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan review struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

b) Capital management

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of debt and equity balance.

The Group's capital structure consists of debt including bank debt, bond debt and finance lease liabilities in the consolidated financial statement notes, cash and cash equivalents, and available equity for the Group's shareholders, share capital and retained earnings.

The Group's Board of Directors regularly reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The ratios as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
*) Dalam juta			*) In million
Jumlah pinjaman	1.875.412	2.273.082	*Total loans*
Dikurangi:			***Less:***
Kas dan setara kas	(161.747)	(335.115)	*Cash and cashequivalents*
Liabilitas - bersih	1.713.665	1.937.967	*Liabilities - net*
Jumlah ekuitas	3.315.092	3.150.327	*Total equity*
Rasio utang terhadap modal	**51,7%**	**61,52%**	***Net payable to equity rasio***

c) Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan amortisasi.

Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena memiliki jatuh tempo yang singkat sedangkan liabilitas keuangan tidak lancar memiliki tingkat bunga pasar.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada:

1) Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana entitas dapat mengakses pada tanggal pengukuran;

c) Fair value of financial instruments

Fair value of financial instruments carried at amortized cost.

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities measured at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values because of short term maturities while the noncurrent financial liabilities carry market rate of interest.

Fair value measurements are recognized in the consolidated statement of financial position.

Measurement of fair value based on:

1) Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;

2) Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
3) Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

2) Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

3) Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

46. TRANSAKSI NON KAS

46. NON CASH TRANSACTIONS

a. Selama tahun berjalan, Grup melakukan aktivitas investasi dan pendanaan non kas yang tidak tercermin dalam laporan arus kas konsolidasian yaitu:

a. During the current year, the Group entered into the following non-cash investing and financing activites which are not reflected in consolidated statements of cash flows:

	2023	2022	
Penambahan aset tetap melalui:			*Acquisition of assets through:*
Sewa pembiayaan	136.557.837.531	193.529.149.632	*Finance lease liabilities*
Utang usaha	78.117.117.117	-	*Trade payables*
Revaluasi	8.387.970.012	6.526.925.128	*Revaluation*
Pembebanan biaya amortisasi emisi obligasi	325.396.000	-	*Amortization expense for bond issuance*
Saling hapus penerimaan dari ventura bersama dengan utang usaha	78.799.232.596	-	*Net-off proceed from joint venture with trade payables*

b. Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

b. The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2023	Arus kas/ *Cash flows*	Lainnya/ *Others*	31 Desember/ *Desember 31,* 2023	
Utang bank	1.682.724.638.668	(360.885.852.549)	-	1.321.838.786.119	*Bank loans*
Liabilitas sewa	388.432.803.360	(173.667.296.453)	136.557.837.531	351.323.344.438	*Lease liabilities*
Utang obligasi	201.924.818.000	-	325.396.000	202.250.214.000	*Bond payables*
Pinjaman pihak berelasi	126.810.073.741	168.255.639.889	-	295.065.713.630	*Loan from related party*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**2.399.892.333.769**	**(534.553.149.002)**	**136.883.233.531**	**1.875.412.344.557**	***Total liabilities from financing activities***

	1 Januari/ *January 1,* 2022	Arus kas/ *Cash flows*	Lainnya/ *Others*	31 Desember/ *Desember 31,* 2022	
Utang bank	1.912.909.193.189	(230.184.554.521)	-	1.682.724.638.668	*Bank loans*
Liabilitas sewa	332.979.323.159	(138.075.669.431)	193.529.149.632	388.432.803.360	*Lease liabilities*
Utang obligasi	-	201.924.818.000	-	201.924.818.000	*Bond payables*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**2.245.888.516.348**	**(166.335.405.952)**	**193.529.149.632**	**2.273.082.260.028**	***Total liabilities from financing activities***

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perusahaan.

47. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There were no significant events which had a material effect on the Company's financial condition and results of operations.

48. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh direktur untuk diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2024.

48. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements and the supplementary information were the responsibilities of management and were approved by the director and authorized for issued on March 1, 2024.

*****

REFERENSI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
A	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: 1. Pendapatan/penjualan; 2. Laba bruto; 3. Laba (rugi); 4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 5. Total laba (rugi) komprehensif; 6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 7. Laba (rugi) per saham; 8. Jumlah aset; 9. Jumlah liabilitas; 10. Jumlah ekuitas; 11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 14. Rasio lancar; 15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya	**Summary of Key Financial Information** Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with the previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business. This is in the event that the Issuer or the Public Company commences the business less than 3 (three) years, and the report shall at least contain: 1. Income/sales; 2. Gross profit; 3. Profit (loss); 4. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and noncontrolling interest; 5. Total comprehensive profit (loss); 6. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest; 7. Earning (loss) per share; 8. Total assets 9. Total liabilities; 10. Total equities 11. Profit (loss) to total assets ratio; 12. Profit (loss) to equities ratio; 13. Profit (loss) to income ratio; 14. Current ratio; 15. Liabilities to equities ratio; 16. Liabilities to total assets ratio; and 17. Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;	26-32
B	**Informasi Saham** Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: 1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: A. Jumlah saham yang beredar; B. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; C. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan D. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	**Stock Information** Stock Information for Public Company at least contains: 1. Shares issued for each three- month period in the last 2 (two) fiscal years, at least covering: A. Total of outstanding shares; B. Market capitalization based on the price of the shares listed on the Stock Exchange; C. Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and D. Share volume at the Stock Exchange where the shares listed on. Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company which shares is listed on the Stock Exchange;	35-36

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: A. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; B. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; C. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; D. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan E. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	2. In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, issuance of convertible securities, as well as additions and subtractions of capital, then the share information referred to in point 1) should be added with explanation on: A. Date of corporate action; B. Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, total of convertible securities issued, and change in par value of shares; C. Total of outstanding shares prior to and after corporate action; D. Total of convertible securities issued; and E. Share price prior to and after corporate action;	
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	3. In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the fiscal year, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and	
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	4. In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the last period of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting.	
C	**Laporan Direksi** Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; B. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; C. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; D. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan E. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan 3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	**Board of Directors Report** The Board of Directors Report should at least contain the following items regarding: 1. The performance of the Issuer or Public Company, at least covering: A. Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; B. The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuer or Public Company; C. The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; D. Comparison between achievement of results and targets; and E. Challenges faced by the Issuer or Public Company; 2. Description on business prospects; 3. Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company.	62-73
D	**Laporan Dewan Komisaris** Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; 2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan 3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	**Board of Commissioners Report** The Board of Commissioners Report should at least contain the following items regarding: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors; 2. View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors; 3. View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company.	48-61

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
E	**Profil Perusahaan** Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	**Company Profile** Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:	
	1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	1. Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the fiscal year;	78-81
	2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: A. Alamat; B. Nomor telepon; C. Alamat surat elektronik; dan D. Alamat situs web;	2. Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include: A. Address; B. Telephone number; C. E-mail address; and D. Website address;	78
	3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	3. Brief history of the Issuer or Public Company;	79-87
	4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan;	4. Vision and mission of the Issuer or Public Company and corporate culture;	88-89
	5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	5. Line of business based on the latest Articles of Association in the fiscal year, and types of products and/or services produced;	91-103
	6. Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	6. Operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	104-105
	7. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	7. Organization structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, along with their names and positions;	108-109
	8. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	8. List of industry association memberships on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	106
	9. Profil Direksi, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; B. Foto terbaru; C. Usia; D. Kewarganegaraan; E. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; F. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	9. Board of Directors profiles include: A. Name and short description of duties and functions; B. Latest photograph C. Age; D. Citizenship E. Education and certification; F. History position, covering information on: • Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company; • Concurrent positions, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Directors does not have any concurrent positions, this matter shall be disclosed; and	116-120

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; • Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan • Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	• Work experience and period in and outside the Issuer or Public Company; • Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders either directly or indirectly to the individual owner, including name of the affiliated party. If a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and • Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	
	10. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatan; B. Foto terbaru; C. Usia; D. Kewarganegaraan; E. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; F. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; • Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; G. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; H. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan I. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	10. Profile of the Board of Commissioners, at least containing: A. Name and position; B. Recent photograph; C. Age; D. Nationality; E. Education history and certification; F. Position history, including information on: • Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners; • The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, the matter shall be disclosed; and • Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; G. Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; If the members of the Board of Commissioners have no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; H. Statement of independence of the independent commissioner if the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and I. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	110-115

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	11. If there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;	110, 116
	12. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	12. Total employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; the disclosure of information can be presented in table.	126-130
	13. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: A. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan C. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	13. Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, consisting of information regarding: A. Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company; B. The Board of Commissioners and the Board of Directors members who own shares of the Issuers or Public Company. If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, this matter shall be disclosed; and C. Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuer or Public Company; The aforementioned information is presented in table.	132-139
	14. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	14. Percentage of indirect ownership of the Issuer or Public Company shares by the Board of Directors and the Board of Commissioners members at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of the Board of Directors and the Board of Commissioners members; If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	
	15. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: A. Kepemilikan institusi lokal; B. Kepemilikan institusi asing; C. Kepemilikan individu lokal; dan D. Kepemilikan individu asing;	15. Total shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on: A. Ownership of local institutions; B. Ownership of foreign institutions; C. Ownership of local individual; and D. Ownership of foreign individual;	
	16. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	16. Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder. The information is presented in scheme or diagram;	
	17. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	17. Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company with entity (if any), percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company, associates, joint ventures; For subsidiaries, the information on the addresses of the subsidiaries is included;	143

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	18. Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	18. Chronology of share listing, total of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and change in par value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	131
	19. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	19. Other securities listing information other than securities as referred to in point 18), which have not yet matured in the fiscal year at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);	144
	20. Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: A. Nama dan alamat; B. Periode penugasan; C. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; D. Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan E. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	20. Information on the use of the services of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) and their networks/associations/allies include: A. Name and address; B. Assignment period; C. Information on audit and/or non-audit services provided; D. Audit and non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and E. If AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, the information shall be disclosed; and Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies is presented in table.	145
	21. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	21. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	145-146
F	**Analisis dan Pembahasan Manajemen** Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	**Management Discussion and Analysis** Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:	
	1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: A. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; B. Pendapatan/penjualan; dan C. Profitabilitas;	1. Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including: A. Production, including process, capacity, and growth; B. Income/sales; and C. Profitability;	156-165
	2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: A. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; B. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; C. Ekuitas; D. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan E. Arus kas;	2. Comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning: A. Current assets, non-current assets, and total assets; B. Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities; C. Equity; D. Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and E. Cash flows;	168-195

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	3. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	3. Capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;	196
	4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	4. Account receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;	197-198
	5. Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	5. Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;	198-199
	6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a. tujuan dari ikatan tersebut; B. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; C. Mata uang yang menjadi denominasi; dan D. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	6. Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least: A. The purpose of such ties; B. Source of funds expected to fulfill the said ties; C. Currency of denomination; and D. Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;	200
	7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: A. Jenis investasi barang modal; B. Tujuan investasi barang modal; dan C. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	7. Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include: A. Type of investment of capital goods; B. Objective of the investment of capital goods; and C. Value of the investment of capital goods;	200
	8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	8. Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);	201
	9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	9. Information on the prospects of the Issuer or the Public Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;	204-205
	10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: A. Pendapatan/penjualan; B. Laba (rugi); C. Struktur modal (*capital structure*); atau D. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	10. Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning: A. Income/sales B. Profit (loss); C. Capital structure; or D. Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;	202-204
	11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: A. Pendapatan/penjualan; B. Laba (rugi); C. Struktur modal (capital structure); D. Kebijakan dividen; atau E. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	11. Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning: A. Income/sales; B. Profit (loss); C. Capital structure; or D. Dividend policy; E. Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;	205-206
	12. Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	12. Marketing aspects of the Company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;	166
	13. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: A. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; B. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; C. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan D. Jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	13. Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least: A. Dividend policy, among others, containing information on the percentage of dividends distributed to net income; B. The date of the payment of cash dividend and date of distribution of non-cash dividend; C. Total of cash per share (cash and/or non cash); and D. Total of dividend per year paid; Disclosure of information is presented in table. If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	207

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: A. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan B. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	14. Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of: A. During the fiscal year, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, the realization of the cumulative use of proceeds until the end of fiscal year should be disclosed; and B. If there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, Issuer should explain the changes;	209-210
	15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: A. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; B. Nama pihak yang melakukan transaksi; C. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); D. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; E. Pemenuhan ketentuan terkait; dan F. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: • Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); dan • Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*) G. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	15. Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include: A. Transaction date, value, and object; B. Name of transacting parties; C. Nature of related parties (if any); D. Description of the fairness of the transaction; and E. Compliance with related rules and regulations; F. If there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses the following information: • Statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and • Role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle G. For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation shall be disclosed that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate operating income, and those are run regularly, repeatedly, and/or continuously; If the affiliated transactions or material transactions in question have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	210-217

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	H. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; I. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	H. For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is disclosed; I. If there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transactions, such matters shall be disclosed;	
	16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	16. Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and	218-219
	17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	17. Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any).	219
G	**Tata Kelola** Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	**Corporate Governance** Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:	
	1. RUPS, paling sedikit memuat: A. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: • Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan • Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; B. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	1. GMS, at least contains: A. Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include: • GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year are realized; and • GMS resolutions for the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year that have not been realized and the reasons for not being realized; B. If the Issuer or Public Company uses an independent party in the implementation of the GMS to calculate the votes, this matter shall be disclosed;	253 -269
	2. Direksi, paling sedikit memuat: A. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. B. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi C. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. D. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: • Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan • Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	2. Board of Directors, at least contains: A. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in table. B. Statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors C. Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in table. D. Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors: • Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and • Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	310-330

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	E. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: • Prosedur penilaian kinerja; dan • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan F. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	E. Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors in the fiscal year shall at least contain: • Performance appraisal procedures; and • Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and F. If the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
3.	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: A. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; B. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; C. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. D. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: • Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan • Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); E. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: • Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan • Pihak yang melakukan penilaian; dan F. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: • Prosedur penilaian kinerja; dan • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	3. The Board of Commissioners, at least contains: A. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners; B. Statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners; C. Policies and implementation of the frequency of the Board of Commissioners meetings, the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors and the level of attendance of the Board of Commissioners members in such meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of the Board of Commissioners members at the Board of Commissioners meeting, the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors, or the GMS can be presented in table. D. Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners: • Policy on training and/or improving the competence of the Board of Commissioners members, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and • Training and/or competency improvement attended by the Board of Commissioners members during the fiscal year (if any); E. Performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing: • Procedures for implementing performance assessment; • Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and • The party conducting the assessment; and F. Assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes: • Performance assessment procedures; and • Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings;	269-310
4.	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: A. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan B. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: • Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	4. Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain: A. Nomination procedure, including brief description of the policy and nomination process for the Board of Directors members and/or the Board of Commissioners members; and B. Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including: • Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	378-388

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	• Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan • Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	• Remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and • Total remuneration for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in table.	
5.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: A. Nama; B. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; C. Periode penugasan dewan pengawas syariah; D. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan E. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	5. Sharia supervisory board, for Issuer or Public Company that carries out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain the following information: A. Name; B. Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; C. Period of assignment of the sharia supervisory board; D. Duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and E. Frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuer or Public Company;	N/A
6.	Komite audit, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; B. Usia; C. Kewarganegaraan; D. Riwayat pendidikan; E. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; F. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; G. Pernyataan independensi komite audit; H. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); I. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan J. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit;	6. The Audit Committee, at least contains the following information: A. Name and position in the committee; B. Age; C. Citizenship D. Education background; E. History of position; including: • Legal basis for the appointment as member of the committee; • Concurrent position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and • Work experience and period in and outside the Issuer or Public Company; • F. Period and terms of office of the member of Audit Committee; G. Statement of independence of the Audit Committee; H. Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); I. Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and J. Implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	390-421
7.	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; B. Usia; C. Kewarganegaraan; D. Riwayat pendidikan;	7. Nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least contains the following information: A. Name and position in committee membership; B. Age; C. Nationality; D. Education background;	N/A

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	E. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; F. Periode dan masa jabatan anggota komite; G. Pernyataan independensi komite; H. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); I. Uraian tugas dan tanggung jawab; J. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); K. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; L. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan M. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksuddalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: • Alasan tidak dibentuknya komite; dan • Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	E. History of position, including information on: • Legal basis for appointment as committee member; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and • Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; F. Period and term of office of the committee members; G. Statement of committee independence; H. Training and/or competency improvement that the committee members participated in the fiscal year (if any); I. Description of duties and responsibilities; J. Statement that the committee members have a guideline or charter; K. Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting; L. Brief description of the implementation of activities in the financial year; and M. If no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company only discloses the information as referred to in point i) to point l) and disclose: • Reasons for not forming the committee; and • Parties who carry out the nomination and remuneration functions;	
8.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; B. Usia; C. Kewarganegaraan; D. Riwayat pendidikan; E. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; F. Periode dan masa jabatan anggota komite; G. Pernyataan independensi komite; H. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan I. Uraian tugas dan tanggung jawab; J. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; K. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan L. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	8. Other committees by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least contain the following information: A. Name and position in committee membership; B. Age; C. Nationality; D. Education background; E. History of position, including information on: • Legal basis for appointment as committee member; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and • Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; F. Period and term of office of the committee members; G. Statement of committee independence; H. Training and/or competency improvement that the committee members participated in the fiscal year (if any); and I. Description of duties and responsibilities; J. Statement that the committee has guidelines or charters; K. Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the L. Brief description of the committee's activities for the fiscal year; meeting; and	421-460

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	9. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: A. Nama; B. Domisili; C. Riwayat jabatan, meliputi: • Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; D. Riwayat pendidikan; E. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan F. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	9. Corporate Secretary, including: A. Name; B. Domicile; C. History of position, including • Legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and • Work experience and period in and outside the Issuer or Public Company; D. Education background; E. Education and/or training during the fiscal year; and F. Brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the fiscal year;	460-474
	10. Unit audit internal, paling sedikit memuat: A. Nama kepala unit audit internal; B. Riwayat jabatan, meliputi: • Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; C. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); D. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; E. Struktur dan kedudukan unit audit internal; F. Uraian tugas dan tanggung jawab; G. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan H. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	10. The Internal Audit Unit, at least contains the following information: A. Name of Head of Internal Audit Unit; B. History of position, including: • Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and • Work experience and period I and outside the Issuer or Public Company; C. Qualification or certification as internal auditor (if any); D. Education and/or training during the fiscal year; E. Structure and position of Internal Audit Unit; F. Description of duties and responsibilities; G. Statement that the Internal Audit Unit has Internal Audit Unit charter; and H. Brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the fiscal year;	475-484
	11. Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; B. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan C. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	11. Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering: A. Finan ial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and B. Review on the effectiveness of internal control systems; C. Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	501-507
	12. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; B. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; C. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan D. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	12. Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least includes: A. General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company; B. Types of risk and the management; and C. Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company D. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	508-515
	13. Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: A. Pokok perkara/gugatan; B. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan C. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	13. Important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors (if any), among others include: A. Substance of the case/claim; B. Status of settlement of case/claim; and C. Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company	522

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	14. Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	14. Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);	522
	15. Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: A. Pokok-pokok kode etik; B. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan C. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	15. Information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes: A. Key points of the code of conduct B. Socialization of the code of conduct and enforcement; and C. Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;	523-528
	16. Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: A. Jumlah saham dan/atau opsi; B. Jangka waktu pelaksanaan; C. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan D. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	16. Brief description of the policy for providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program share ownership by employees (employee stock ownership program/ESOP); In terms of providing compensation through management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the disclose of information must at least contain: A. Total shares and/or options; B. Implementation period; C. Requirements for eligible employees and/or management; and D. Exercise price or determination of exercise price;	388
	17. Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: A. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan B. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	17. Brief description of the information disclosure policy regarding: A. Share ownership of the Board of Directors and the Board of Commissioners members is no later than 3 (three) working days after the ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and B. Implementation of the policy;	389
	18. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Cara penyampaian laporan pelanggaran; B. Perlindungan bagi pelapor; C. Penanganan pengaduan; D. Pihak yang mengelola pengaduan; dan E. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: • Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan • Tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	18. Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include: A. Mechanism for violation reporting; B. Protection for the whistleblower; C. Handling of violation reports; D. Unit responsible for handling of violation report; and E. Results from violation report handling, at least includes: • Total of complaints received and processed during the fiscal year; and • Follow up of complaints; If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter shall be disclosed.	541-545

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	19. Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan B. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	19. Description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing: A. Programs and procedures implemented in overcoming corruption, kickbacks, fraud, bribery and gratuities in Issuer or Public Company; and B. Anti-corruption training/socialization to employees of Issuer or Public Company; If the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the policy should be disclosed.	529-530
	20. Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: A. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau B. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	20. Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Company for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including: A. Statement regarding recommendation that have been implemented; and/or B. Description of recommendation that have not been implemented, alon with the reason and alternatives of implementation (if any) Disclosure of information is presented in table.	248-252
H	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies that are Sustainability Reports as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
I	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	Audited Annual Financial Report	✓
J	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	Statement Letter of the Board of Directors and the Board of Commissioners Members regarding Responsibility for the Annual Report	74-75

PRESISI

2023
Laporan Tahunan
Annual Report

PRESISI

Plaza PP, Wisma Robinson Lt. 3 Jl. TB
Simatupang No. 57. Pasar rebo, Jakarta Timur
13760

Phone : (021) 8414119
(021) 824 83255
(021) 824 83240
Email : headoffice@pp-presisi.co.id
divisi.peralatan@pp-presisi.co.id

www.pp-presisi.co.id